

Indonesia Financial Group

ADVANCING THROUGH CHALLENGES FOR THE FUTURE

Melangkah Maju di Tengah Tantangan untuk Masa Depan

2024 **Annual Report**
Laporan Tahunan





TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2024
ABOUT THE 2024 ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group tahun buku 2024 dengan tema ***"Advancing Through Challenges For The Future*-Melangkah Maju di Tengah Tantangan untuk Masa Depan"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis IFG sepanjang 2024 serta masa depan keberlanjutan usaha.

Laporan Tahunan IFG 2024 diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam lingkup internal kepada pemegang saham serta para pemangku kepentingan dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" atau "IFG" yang didefinisikan sebagai Indonesia Financial Group yang menjalankan usaha di bidang keuangan khususnya asuransi, penjaminan, dan investasi. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Indonesia Financial Group secara umum.

Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group for the fiscal year 2024 with the theme **"Advancing Through Challenges For The Future"**. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on the facts and development of IFG's business throughout 2024 as well as the future of business sustainability.

The IFG 2024 Annual Report is published to enhance information disclosure within the internal scope to shareholders as well as stakeholders and relevant authorities. This Annual Report is a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance during the year.

Mention of the currency unit "Rupiah" or IDR refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or USD refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

This Annual Report contains the words "Company" or "IFG," which are defined as Indonesia Financial Group, which operates in the field of financial sector, particularly insurance, guarantee and investment. Occasionally the words "we" are used for convenience to refer to Indonesia Financial Group in general.



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Indonesia Financial Group, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Indonesia Financial Group serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Indonesia Financial Group.

This annual report contains statements regarding the financial position, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of Indonesia Financial Group, which are classified as forward-looking statements in accordance with applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements involve risks and uncertainties and may cause actual results to differ materially from those reported.

The forward-looking statements in this Annual Report are based on various assumptions regarding the current and future conditions of Indonesia Financial Group and the business environment in which the Company operates. The statements contained in this Annual Report are not guarantees of future performance, as actual results in the future may differ due to factors beyond the control of Indonesia Financial Group.

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Buku 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Members of the Board of Commissioners and Directors Regarding Responsibility for the Accuracy of the Contents of the Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the Fiscal Year 2024. We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the year 2024 has been contained completely and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 17 Juni 2025
Jakarta, 17 June 2025

Hexana Tri Sasongko
Direktur Utama
President Director

Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Rizal Ariansyah*
Direktur SDM
Human Capital Director

Rianto Ahmadi
Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis
Technical Director concurrently as Acting Business Director

Heru Handayanto
Direktur Keuangan merangkap Plh. Direktur SDM
Finance Director concurrently Acting Director of Human Resources

*) Dalam proses fit and proper OJK untuk pengangkatan jabatan periode kedua
*) In the OJK fit and proper process for appointment to a second term

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

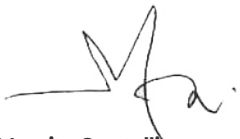
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Members of the Board of Commissioners and Directors Regarding Responsibility for the Accuracy of the Contents of the Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the Fiscal Year 2024. We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the year 2024 has been contained completely and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 17 Juni 2025
Jakarta, June, 17, 2025



Fauzi Ichsan
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner



Masyita Crystallin
Komisaris
Commissioner



Sumiyati
Komisaris
Commissioner



Nasrudin
Komisaris
Commissioner



Hotbonar Sinaga
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Wahyu Setyawan
Komisaris
Commissioner



SEKAPUR SIRIH
FOREWORD

Advancing Through Challenges for the Future
Melangkah Maju di Tengah Tantangan untuk Masa Depan



Tema *Advancing Through Challenges for the Future* merefleksikan semangat IFG dalam menghadapi dinamika global dan nasional dengan sikap adaptif dan visioner. Di tengah proses pemulihan pasca-pandemi, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, IFG senantiasa menunjukkan performa yang adaptif dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis secara konsisten di seluruh lini bisnis. Kinerja keuangan tahun 2024 tetap terjaga melalui langkah-langkah perbaikan fundamental, pengembangan kapabilitas di luar mandat Pemerintah, serta penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat luas. Selain itu, penguatan sinergi antar anggota *holding* serta kolaborasi dalam ekosistem BUMN terus didorong untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Komitmen terhadap tata kelola yang baik, manajemen risiko yang andal, serta peningkatan kapabilitas operasional menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi jangka panjang IFG. Dengan fondasi yang kuat, IFG optimistis dapat terus melangkah maju melewati tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

The theme "Advancing Through Challenges for the Future" reflects IFG's spirit in facing global and national dynamics with an adaptive and visionary attitude. Amidst the post-pandemic recovery process, the world still faces various challenges such as geopolitical tensions, slowing international trade, and financial market volatility. However, IFG continues to demonstrate adaptive performance in consistently implementing various strategic initiatives across all business lines. Financial performance in 2024 was maintained through fundamental improvements, the development of capabilities beyond the Government's mandate, and the creation of added value for customers and the wider community. In addition, the strengthening of synergies between holding company members and collaboration within the SOE ecosystem will continue to be encouraged to support sustainable growth. Commitment to good governance, reliable risk management, and operational capability enhancement remain the cornerstones in realizing IFG's long-term vision. With a strong foundation, IFG is optimistic about continuing to move forward through challenges and creating a better future for all stakeholders.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2023

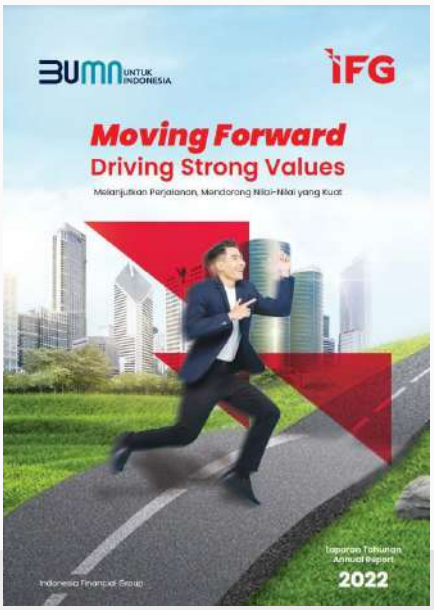


Strengthening Foundation to Drive Performance
Penguatan Fundamental Menggerakkan Kinerja

Tahun 2023 menandai tiga tahun perjalanan IFG sebagai *holding* asuransi, penjaminan, dan investasi. Sejak penetapan tersebut, IFG sebagai *strategic investment holding (non-operating)* telah melakukan berbagai upaya penguatan fungsi *holding* secara fundamental, yang di dalamnya mencakup restrukturisasi portofolio, restrukturisasi model bisnis, penguatan fokus bisnis (*sharpen our focus of business*), serta peningkatan daya saing bisnis (*enhance our competitiveness*). IFG juga terus berkomitmen memperkuat fondasi *holding* melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia serta kapabilitas bisnis dan operasional, memastikan keberlanjutan dan ketangguhan perusahaan untuk masa depan.

The year 2023 marked three years of IFG's journey as an insurance, guarantee, and investment holding company. Since its establishment, IFG as a strategic investment holding (non-operating) company has made various efforts to strengthen its fundamental holding functions, including portfolio restructuring, business model restructuring, sharpen our focus of business, and enhancing business competitiveness. IFG remains committed to strengthening the holding company's foundation through improved governance, risk management, human capital, and business and operational capabilities, ensuring the sustainability and resilience of the company for the future.

2022



Moving Forward, Driving Strong Values

Melanjutkan Perjalanan, Mendorong Nilai-Nilai yang Kuat

Sebagai *Holding* BUMN yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, pada tahun 2022 ini Indonesia Financial Group (IFG) melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan 10 (sepuluh) anak perusahaan dalam mendorong nilai-nilai bisnis yang lebih kuat melalui penguatan dan penyelamatan industri asuransi, penjaminan, dan investasi, perbaikan dan membangun *best practice* industri asuransi, penjaminan, dan investasi di Indonesia, serta pengembangan industri asuransi, penjaminan, dan investasi di Indonesia. Dengan ini, IFG berkomitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

As an SOE Holding engaged in insurance, guarantee and investment, in 2022 Indonesia Financial Group (IFG) continues its journey together with 10 (ten) subsidiaries in encouraging stronger business values through strengthening and saving the insurance, guarantee and investment industry, improving and building best practices in the insurance, guarantee and investment industry in Indonesia, as well as developing the insurance, guarantee and investment industry in Indonesia. Therefore, IFG is strongly committed in realizing healthier and more sustainable business management.

2021



Bertransformasi Menuju Fundamental yang Lebih Kuat

Transforming Towards Stronger Fundamental

Tahun 2021 masih menjadi tantangan bagi Perusahaan karena adanya dampak Pandemi COVID-19. Namun, Perusahaan senantiasa menerapkan inisiatif strategis agar mampu membukukan kinerja yang positif dan konsisten hingga akhir tahun. Perusahaan terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan. IFG secara grup terus mencanangkan sinergi antar Anak Perusahaan dalam rangka menggapai hasil yang optimal sebagai buah dari transformasi menuju fundamental yang lebih kuat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan *monitoring* kinerja anak perusahaan secara periodik, memfasilitasi restrukturisasi portofolio bisnis asuransi kredit anak perusahaan, reviu model bisnis asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kesehatan anak perusahaan, dan reviu model bisnis BKI sebagai perusahaan *private equity.*

The year of 2021 remains a challenging year for the Company due to the impact of the Covid-19 Pandemic. However, the Company continues to implement strategic initiatives to record positive and consistent performance until the end of the year. The Company continues to optimize its capacity and role in achieving better work achievements amidst the challenging global economic conditions. IFG as a group continues to promote synergy among its subsidiaries to achieve optimal results following the transformation to stronger fundamentals. This commitment is realized through periodic monitoring of subsidiaries' performance, facilitating the restructuring of subsidiaries' credit insurance business portfolio, reviewing subsidiaries' motor vehicle insurance and health insurance business models, and reviewing BKI's business model as a private equity company.


IFG
INDONESIA FINANCIAL GROUP

PENCAPAIAN 2024
2024 ACHIEVEMENT

KINERJA IFG
IFG PERFORMANCE

Aset
Assets

Rp132,38 Triliun
IDR132.38 Trillion

Ekuitas
Equity

Rp38,84 Triliun
IDR38,84 Trillion

Pendapatan *Underwriting*-Bersih
Underwriting Income - Net

Rp28,30 Triliun
IDR28.30 Trillion

Pendapatan Premi Asuransi-Bersih
Insurance Premium Income - Net

Rp19,75 Triliun
IDR19.75 Trillion

Pendapatan Penjaminan-Bersih
Guarantee Income - Net

Rp7,33 Triliun
IDR7.33 Trillion

Pendapatan *Underwriting* Lain-lain
Other Underwriting Income

Rp1,22 Triliun
IDR1.22 Trillion

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pilar Sosial
Social Pillar

Rp9,60 miliar
IDR9.60 billion

Pilar Ekonomi
Economic Pillar

Rp1,74 miliar
IDR1.74 billion

Pilar Lingkungan
Environmental Pillar

Rp4,19 miliar
IDR4.19 billion

Pilar Hukum dan Tata Kelola
Law and Governance Pillar

Rp2,25 miliar
IDR2.25 billion

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Pelatihan *Softskill*
Softskill Training

622 Jam
622 Hours

Pelatihan Teknikal
Technical Training

15.045 Jam
15,045 Hours

IFG memiliki sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi dilandaskan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan maupun individu.
IFG has a competency-based human capital development system based on information regarding job and individual competency requirements.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

2 TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2024
ABOUT THE 2024 ANNUAL REPORT

3 SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY

4 PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

5 PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

7 SEKAPUR SIRIH
FOREWORD

7 ADVANCING THROUGH CHALLENGES FOR THE FUTURE
MELANGKAH MAJU DI TENGAH TANTANGAN UNTUK MASA DEPAN

8 KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

8 PENCAPAIAN 2024
2024 ACHIEVEMENT

14 DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

01 PERFORMA 2024
2024 PERFORMANCE

18 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

23 IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

24 IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS

25 INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI
INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS

25 INFORMASI TENTANG
SUMBER PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ABOUT OTHER SOURCES OF FUNDING

26 PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS

02 LAPORAN MANAGEMENT
MANAGEMENT REPORT

32 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

44 LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

68 INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY

72 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

74 JEJAK LANGKAH
MILESTONES

76 MAKNA LOGO PERUSAHAAN
MEANING OF COMPANY'S LOGO

77 BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA
LINE OF BUSINESS AS WELL AS PRODUCTS AND SERVICES

80 JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
BUSINESS NETWORK AND OPERATION AREA

82 VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

88 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

90 PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

100 PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

110 PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS

116 DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

122 STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER STRUCTURE AND COMPOSITION

124 DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS

152 ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, REGIONAL NETWORKS, AND INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

154 STRUKTUR GROUP IFG
GROUP STRUCTURE OF IFG

155 KEANGGOTAAN ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

156 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
THE CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING OF SHARE

156 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA
THE CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND REGISTRATION OF OTHER `SECURITIES

157 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

158 INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

161 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATION

04 FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORTING FUNCTION

164 SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

05 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

184 TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW

198 TINJAUAN SEGMEN INDUSTRI
INDUSTRY SEGMENT OVERVIEW

207 RENCANA STRATEGIS 2024
2024 STRATEGIC PLAN

212 ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

222 TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

245 TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

252 KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
ABILITY TO PAY PAYABLES AND COLLECTIBILITY LEVEL OF RECEIVABLES

253 LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA TAHUN 2024
REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS FOR THE YEAR 2024

261 STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

262 REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZATION

263 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

265 PERNYATAAN TENTANG PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN SECARA TERINTEGRASI
STATEMENT ON THE ISSUANCE OF INTEGRATED ANNUAL REPORT

266 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN
COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION AND PROJECTION FOR THE NEXT YEAR

267 PROYEKSI TAHUN 2025
2025 PROJECTION

269 ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

270 INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAMS (ESOP/MSOP)

270 INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
INFORMATION ABOUT THE REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

271 INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER OF BUSINESSES, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

272 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

275 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

301 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
ACCOUNTING POLICY CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

302 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

303 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

305 PROSPEK USAHA TAHUN 2025
BUSINESS PROSPECT IN 2025

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GORVERNACE

310 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

317 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

319 STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

321 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

328 DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

352 KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

354 DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

384 PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

398 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETINGS

422 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

426 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

436 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

444 KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

455 KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

470 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

512 AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK
EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

515 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

517 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

562 PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

566 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

568 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

573 KODE ETIK PERUSAHAAN
COMPANY'S CODE OF CONDUCT

579 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

580 KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL POLICY

582 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

583 KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK
POLICY ON GRANTING FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

584 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

586 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
WHISTLEBLOWING SYSTEM

592 TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

593 PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE

07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

610 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

612 PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN
PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE COMPANY

613 STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

614 STRATEGI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY STRATEGY

615 LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

617 REALISASI DANA DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 2024
REALIZATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDS AND ACTIVITIES IN 2024

621 PROGRAM UNGGULAN
FLAGSHIP PROGRAMS

630 PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL (PUMK)
MICRO & SMALL ENTERPRISES FUNDING PROGRAM (PUMK)

631 LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL AUDIT TAHUN 2024
FINANCIAL STATEMENT FOR MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES FUNDING PROGRAM AUDIT IN 2024

08 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT





1

Performa 2024

2024 Performance

Di tahun 2024, kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp15,23 triliun, mengalami peningkatan Rp0,71 triliun atau 4,86% jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp14,52 triliun.

In 2024, the Company's cash and cash equivalents were recorded at IDR15.23 trillion, an increase of IDR0.71 trillion or 4.86% when compared to 2023 of IDR14.52 trillion.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

IKHTISAR LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

HIGHLIGHTS OF CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In billion Rupiah, unless stated otherwise)

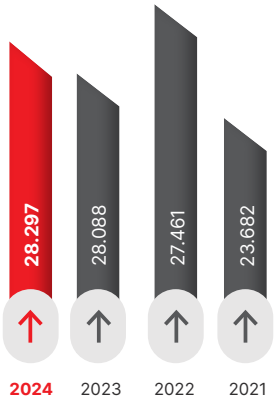
Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021	YoY 2024-2023 (%)
Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income	**28.297**	28.088	27.461	23.682	0,74%
Beban *Underwriting* Underwriting Expenses	**26.529**	21.873	19.726	(17.565)	21,29%
Hasil *Underwriting* Underwriting Results	**1.768**	6.215	7.735	6.117	-71,55%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**(387)**	2.339	4.119	3.440	-116,55%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Profit (Loss) for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding	**(445)**	2.239	4.049	3.380	-119,87%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	**57**	100	71	60	-43,00%
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)	**(1.144)**	2.578	3.095	3.440	-144,38%
Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:					
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding	**(1.201)**	2.478	3.027	3.274	-148,47%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	**57**	100	68	58	-43,00%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit (Loss) for the Year	**(1.144)**	2.578	3.095	3.332	-144,38%

*) Disajikan Kembali
*) Restated

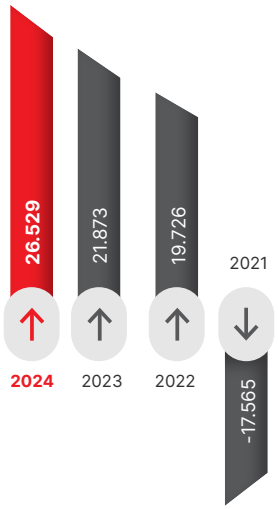
Grafik Ikhtisar Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Chart of Highlights of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Pendapatan *Underwriting*
Underwriting Income

(Rp miliar)
(Rp billion)

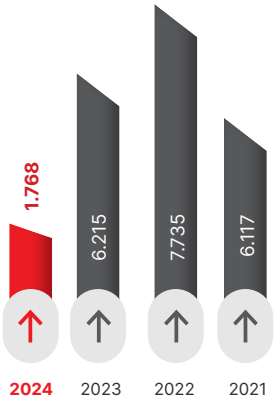


Beban *Underwriting*
Underwriting Expenses

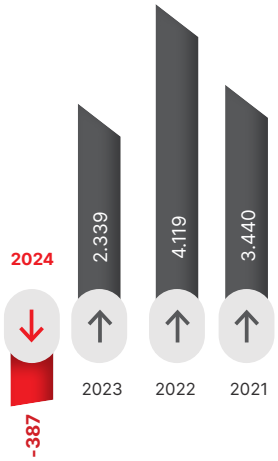


Hasil *Underwriting*
Underwriting Results

(Rp miliar)
(Rp billion)



Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year



IKHTISAR POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

HIGHLIGHTS OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021*	YoY 2024-2023 (%)
Jumlah Aset Total Asset	**132.384**	136.196	131.757	119.967	-2,80%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**95.308**	97.982	94.577	80.871	-2,73%
Dana *Tabarru* Tabarru Fund	**(1.762)**	(1.787)	(970)	(663)	-1,40%
Ekuitas yang Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding	**37.603**	38.750	37.258	38.881	-2,96%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	**1.235**	1.251	892	878	-1,28%

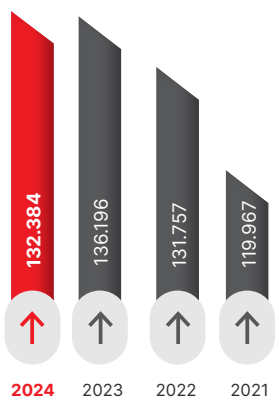
Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021*	YoY 2024-2023 (%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	**38.838**	**40.001**	**38.150**	**39.759**	**-2,91%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**132.384**	**136.196**	**131.757**	**119.967**	**-2,80%**

*) Disajikan Kembali
*) Restated

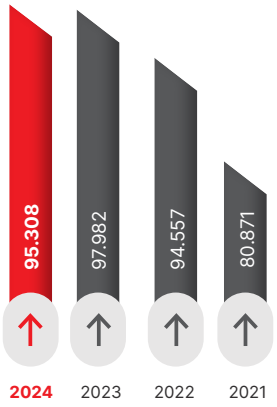
Grafik Ikhtisar Posisi Keuangan Konsolidasian
Chart of Highlights of Consolidated Statement of Financial Position

Jumlah Aset
Total Asset

(Rp miliar)
(Rp billion)

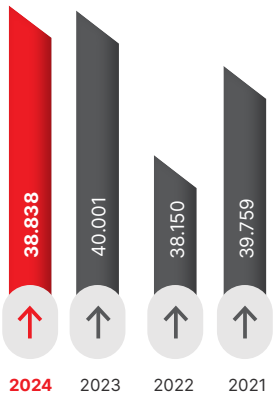


Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



Jumlah Ekuitas
Total Equity

(Rp miliar)
(Rp billion)



IKHTISAR ARUS KAS KONSOLIDASIAN

HIGHLIGHTS OF CONSOLIDATED CASH FLOW

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In billion Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021	YoY 2024-2023 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	**(6.931,49)**	(58,32)	(379)	2.933	11.786,28%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investment Activities	**6.296,45**	(1.139,70)	(13.511)	(21.805)	-652,46%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In billion Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022*	2021	YoY 2024-2023 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Investment Activities	**1.340,85**	1.214,76	3.742	19.483	10,38%
Kas dan Setara Kas di Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**14.522,58**	15.041,97	24.278	25.630	-3,45%
Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at The End of the Year	**15.228,60**	14.522,58	14.140	26.242	4,86%

*) Disajikan Kembali
*) Restated

IKHTISAR RASIO-RASIO KEUANGAN

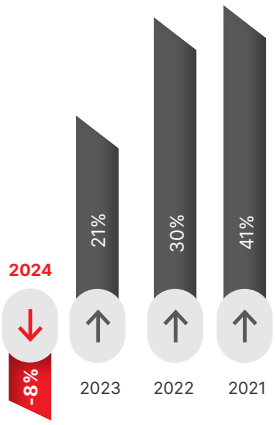
HIGHLIGHTS OF FINANCIAL RATIOS

Uraian Description	2024	2023	2022*)	2021*)
EBITDA Margin	**-8**	21	30	41
Net Income Margin (NIM)	**-5**	20	32	37
Return on Asset (ROA)	**-0,3**	2	3	3
Return on Equity (ROE)	**-1**	6	11	9
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	**245**	242	249	203
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Liability to Total Assets Ratio	**72**	72	71	67

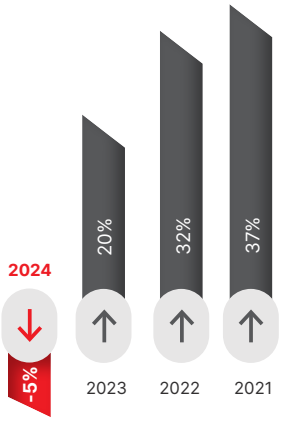
*) Disajikan Kembali
*) Restated

Grafik Ikhtisar Rasio-Rasio Keuangan
Chart of Highlights of Financial Ratios

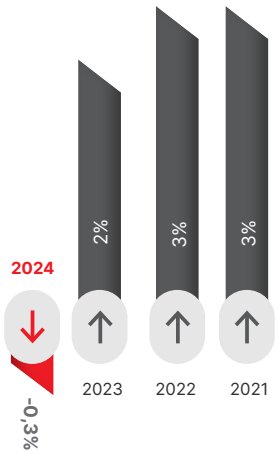
EBITDA Margin (%)



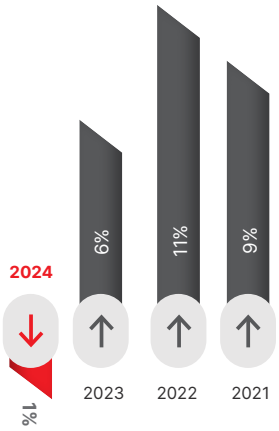
NIM (%)



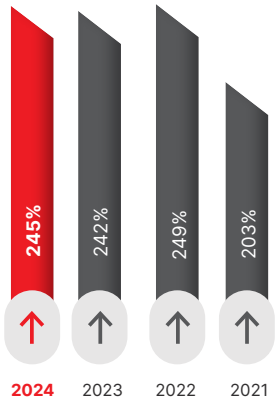
ROA (%)



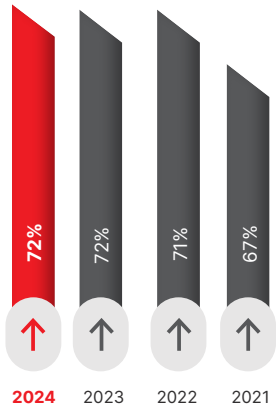
ROE (%)



Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Liability to Equity Ratio



Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)
Liability to Total Assets Ratio



IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian Description	2024	2023*	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage (%)
Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income				
Pendapatan Premi Asuransi-Bersih Insurance Premium Income - Net	**19.748**	20.589	(841)	-4,08%
Pendapatan Penjaminan-Bersih Guarantee Income - Net	**7.328**	6.556	771	11,76%
Jumlah Pendapatan *Underwriting* Total Underwriting Income	**28.297**	**28.088**	**210**	**0,75%**
Beban *Underwriting* Underwriting Expenses	**26.529**	21.873	4.657	21,29%
Hasil *Underwriting* Underwriting Results	**1.768**	6.215	(4.447)	-71,56%
Pendapatan Jasa Manajemen Keuangan Financial Management Services Income	**438**	400	39	9,65%
Pendapatan Pengelolaan Gedung Building Management Income	**140**	150	(10)	-6,62%
Hasil Investasi Investment Income	**5.500**	**5.152**	**348**	**6,75%**

IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS

JUMLAH SAHAM

Per 31 Desember 2024, seluruh saham Perusahaan berjumlah 93.719.537 lembar, dengan kepemilikan penuh (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk publik, manajemen, maupun karyawan.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Di sepanjang tahun 2024, Perusahaan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) maupun memperdagangkan sahamnya kepada publik. Oleh karena itu, tidak tersedia informasi mengenai perdagangan saham, termasuk kapitalisasi pasar, pergerakan harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan di bursa saham. Selain itu, data grafik mengenai harga penutupan dan volume perdagangan saham dalam setiap triwulan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, termasuk informasi penghentian sementara perdagangan saham, juga tidak dapat disajikan.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

IFG tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, ataupun penurunan nilai nominal saham pada tahun 2024.

DIVIDEN SAHAM

Pada tahun 2024, IFG tidak menetapkan pembagian dividen atas hasil usaha tahun buku 2023. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat fundamental keuangan Perusahaan dan mengoptimalkan kinerja operasional, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang lebih berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

NUMBER OF SHARES

As of December 31, 2024, all of the Company's shares amounted to 93,719,537 shares, with full ownership (100%) by the Government of the Republic of Indonesia. In this regard, the Company does not issue shares to the public, management or employees.

INFORMATION ABOUT SHARE TRADING AND PUBLIC OWNERSHIP

Throughout 2024, the Company has never conducted an Initial Public Offering (IPO) or traded its shares to the public. Therefore, there is no information available on stock trading, including market capitalization, highest, lowest, and closing stock price movements, and trading volume on the stock exchange. In addition, graphical data regarding the closing price and trading volume of shares in each quarter during the last 2 (two) fiscal years, including information on temporary suspension of share trading, cannot be presented.

INFORMATION ABOUT CORPORATE ACTION

IFG does not conduct corporate actions such as stock splits,reverse stock combinations, bonus shares, or a decrease in the nominal value of shares in 2024.

SHARE DIVIDEND

In 2024, IFG did not declare a dividend distribution for the 2023 fiscal year. This policy was adopted as a strategic measure to strengthen the Company's financial fundamentals and optimize operational performance, thereby creating more sustainable value for shareholders in the long term.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS

Hingga 31 Desember 2024, IFG tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya . Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, IFG has not listed any bonds, sukuk or convertible bonds, nor any other securities listing. Therefore, there is no information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and bonds/sukuk ratings that can be presented in this Annual Report

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ABOUT OTHER SOURCES OF FUNDING

Pada tahun 2024, IFG direncanakan menerima dana PMN sebesar Rp3,56 triliun untuk menyelesaikan pengalihan sisa pemegang polis Jiwasraya yang sebelumnya telah diajukan pada tahun 2023. Aksi korporasi ini didasari oleh pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dalam realisasinya, pada tanggal 28 Maret 2024, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang mengatur mengenai penambahan modal sebesar Rp3,56 triliun. Selanjutnya, pada April tahun 2024, IFG telah menyelesaikan proses pencairan dana PMN, atas dana tersebut, sepenuhnya telah dilakukan penyertaan modal kepada IFG Life.

In 2024, IFG is planned to receive PMN funds amounting to IDR3.56 trillion to complete the transfer of remaining Jiwasraya policyholders that had previously been submitted in 2023. This corporate action is based on the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2023 concerning the State Budget for the 2024 Fiscal Year, as detailed in Presidential Regulation Number 76 of 2023 concerning the Details of the State Budget for the 2024 Fiscal Year.

In its realization, on March 28, 2024, the Government issued Government Regulation Number 16 of 2024 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, which regulates a capital increase of IDR3.56 trillion. Furthermore, in April 2024, IFG completed the PMN fund disbursement process, and the funds were fully invested in IFG Life.

PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS

Januari
January





Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 IFG dan Anggota *Holding*

General Meeting of Shareholders Ratification of the Company's Work Plan and Budget for 2024 IFG and Holding Members

Februari
February



Penandatanganan Nota Kesepahaman Taksonomi Data Industri Asuransi Indonesia Re - IFG

Signing of Memorandum of Understanding on Insurance Industry Data Taxonomy Indonesia Re - IFG

Maret
March







- IFG *Leaders Strategic Getaway*
- HUT IFG ke-4

- IFG Leaders Strategic Getaway
- IFG 4th Anniversary

April
April







- Mudik Gratis Bersama BUMN 2024
- Aplikasi *One by* IFG Diluncurkan ke Publik
- Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

- Free Homecoming with SOEs 2024
- One by IFG App Launched to the Public
- Public Information Disclosure Education Forum

Mei
May



Launching buku "Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor *Untapped Potentials* Sektor Asuransi dan Dana Pensiun"
Launching the book "Towards a Sustainable Future: Exploring Untapped Potentials of the Insurance and Pension Fund Sector"

Juni
June







- Kegiatan Bakti Diaspora untuk Indonesia 2024
- Penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia antara PT Asuransi Jiwa IFG dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma Tbk

- Diaspora Service Activities for Indonesia 2024
- Signing of the Share Purchase Agreement of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia between PT Asuransi Jiwa IFG and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Kimia Farma Tbk

Juli
July



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara IFG dan Swiss Re untuk Pengelolaan Risiko di BUMN melalui *Risk Management Partner*
Signing of a Memorandum of Understanding between IFG and Swiss Re for Risk Management in State-Owned Enterprises through Risk Management Partners

Agustus
August



- Festival Harmony 2024
- Penandatanganan Komitmen *Anti-Fraud* antara IFG dan Anggota *Holding* dengan BPKP



- Festival Harmony 2024
- Signing of Anti-Fraud Commitment between IFG and Holding Members with BPKP

September
September



- Penandatanganan Nota Kesepahaman Inisiasi Pembentukan Ekosistem Digital melalui Solusi Asuransi dan Solusi Telekomunikasi
- TJSL IFG Hari Bersahabat - "*Stop Bullying*"



- Signing of Memorandum of Understanding on the Initiation of Digital Ecosystem Development through Insurance and Telecommunications Solutions
- TJSL IFG Friendly Day - "Stop Bullying"

Oktober
October







- IFG *Conference* 2024
- IFG *Risk Management Summit* 2024
- Penandatanganan Kerja Sama antara IFG dengan IMI untuk Perlindungan Risiko Mobilitas Berkendara

- IFG Conference 2024
- IFG Risk Management Summit 2024
- Signing of Cooperation Agreement between IFG and IMI for Driving Mobility Risk Protection

November
November







- IFG Labuan Bajo Marathon 2024
- TJSL "Pustaka Lestari" - November 2024

- IFG Labuan Bajo Marathon 2024
- TJSL "Pustaka Lestari" - November 2024

Desember
December







- Pentas Seni Siswa Disabilitas di Hari Disabilitas Internasional 2024
- Pelatihan Karyawan Disabilitas di Hari Disabilitas Internasional 2024

- Student with Disabilities Art Performance on International Day of People with Disabilities 2024
- Training for Employees with Disabilities on International Day of People with Disabilities 2024





2

Laporan Manajemen

Management Report

IFG berkomitmen untuk memperkokoh fondasi seluruh anggota *holding* melalui penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas bisnis dan operasional.

IFG is committed to strengthening the foundation of all holding members through strengthening corporate governance, risk management, and improving business and operational capabilities.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



FAUZI ICHSAN

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

Mengawali laporan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami selaku jajaran Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian kinerja PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) tahun buku 2024. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan serta memberikan nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dalam menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab. Dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen, Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

We would like to begin this report by expressing our gratitude to God Almighty. We, the Board of Commissioners, would like to express our appreciation for the performance of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) in the 2024 fiscal year. In accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, the Board of Commissioners has carried out its supervisory functions and duties, as well as provided advice to the Board of Directors in managing the Company's business operations with full responsibility. We can confirm that the Company's financial statements have been audited by independent auditors, Public Accountants (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM) with an unqualified opinion.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2024, yang meliputi evaluasi atas kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, penelaahan atas prospek usaha yang disusun Direksi, serta penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Through this Annual Report, the Board of Commissioners hereby presents the implementation of its duties and responsibilities during 2024, which includes evaluation of the performance of the Board of Directors, supervision of the implementation of company strategies, review of business prospects prepared by the Board of Directors, and assessment of the implementation of good corporate governance principles.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat menantang bagi IFG, namun Perusahaan tetap melakukan beragam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan. Di tengah pemulihan yang terus berlanjut pasca-pandemi, dunia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga volatilitas pasar keuangan. Kami mencermati bahwa kebijakan moneter ketat yang diterapkan secara luas berhasil menurunkan tekanan inflasi global, namun juga meningkatkan risiko pembiayaan bagi negara-negara berkembang. Di sisi lain, pergeseran rantai pasok global dan akselerasi transisi energi membuka peluang strategis baru, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Board of Commissioners' Opinion on the Performance of the Board of Directors

The year 2024 was a very challenging year for IFG, but the Company continued to make various efforts to achieve its targets. The Board of Commissioners has the duty to supervise and advise the Board of Directors on the management of the Company. Amidst the ongoing recovery from the pandemic, the world still faces various challenges, ranging from geopolitical tensions, a slowdown in international trade, to financial market volatility. We observe that the tight monetary policies implemented across the board have succeeded in reducing global inflationary pressures, but have also increased financing risks for developing countries. On the other hand, shifts in global supply chains and the acceleration of energy transition bring new strategic opportunities, especially for countries in Asia, including Indonesia.

Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil menjalankan sejumlah inisiatif strategis di seluruh lini bisnis sehingga kinerja keuangan Perusahaan sepanjang tahun 2024 tetap terjaga.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has successfully implemented several strategic initiatives across all business lines, thereby maintaining

IFG terus melakukan perbaikan fundamental dan berupaya membangun bisnis yang berkelanjutan serta lebih kompetitif dengan mengembangkan kapabilitas di luar penugasan Pemerintah. Perusahaan juga menargetkan penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antar Anggota *Holding* serta ekosistem BUMN guna mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, IFG berkomitmen untuk memperkokoh fondasi seluruh Anggota *Holding* melalui penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas bisnis dan operasional.

the Company's financial performance throughout 2024. IFG continues to make fundamental improvements and strives to build a sustainable and more competitive business by developing capabilities beyond the Government's mandate. The Company also aims to create added value for customers and the community, while strengthening synergies between holding members and the SOE ecosystem to support business growth. In addition, IFG is committed to strengthening the foundations of all holding members through strengthening corporate governance, risk management, and improving business and operational capabilities.

Penilaian atas kinerja Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris juga didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris melihat konsistensi Perusahaan dalam optimalisasi penggunaan anggaran dengan tetap melakukan upaya peningkatan layanan dalam rangka pemenuhan RKAP dan target *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perusahaan telah sesuai dengan target RKAP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi.

The assessment of the Board of Directors' performance by the Board of Commissioners is also based on shareholder directives as stipulated in the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners acknowledged the Company's consistency in optimizing budget utilization while continuing to improve services in order to fulfill the RKAP and Key Performance Indicator (KPI) targets that had been set. The collective performance of the Board of Directors in achieving the Company's targets was in accordance with the RKAP targets and/or other criteria set by the Board of Commissioners after discussion with the Board of Directors.

Perusahaan menetapkan target KPI Direksi dalam RUPS RKAP tahun 2023. Keberhasilan kinerja Direksi diukur sebagai hasil kerja kolegial seluruh anggota dalam mengelola Perusahaan. Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan secara rutin melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui *Working Group Meeting* yang diadakan setiap bulan. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian di berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, pelanggan, serta SDM dan sistem.

The Company has determined the Board of Directors' KPI targets in the 2023 RKAP GMS. The success of the Board of Directors' performance is measured as the result of the collegial work of all members in managing the Company. Performance evaluation of the Board of Directors is conducted regularly through joint meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as through monthly Working Group Meetings. Performance assessment is based on achievements in various aspects, including financial, operational, customer, human capital, and systems.

Dengan mengacu pada Kontrak Manajemen antara IFG dengan Kementerian BUMN yang tertuang dalam Risalah RUPS IFG tentang Pengesahan RKAP 2024 dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka capaian Indikator Kinerja Utama (KPI) secara kolegial untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Management Contract between IFG Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises, as outlined in the Minutes of the IFG General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the 2024 RKAP and the Annual Management Contract of the State-Owned Enterprise Board of Directors, the collective achievement of Key Performance Indicators (KPIs) for the year 2024 is as follows:

KPI		Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization until Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
I.	**Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia** Economic and Social Value for Indonesia						
Finansial Financial							
1.	EBITDA	*Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture*	Rp Triliun Trillion IDR	4	4,50	-0,64	0,00
2.	ROE (Konsolidasi) ROE (consolidated)	Laba Bersih Tahun Berjalan / *Average Total Equity* Net Profit for the Year / Average Total Equity	%	4	5,00	-0,92	0,00
3.	Cashflow from Operation	Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash provided by (used in) operating activities	Rp Miliar Billion IDR	3	100,00	-6.931,00	0,00
4.	DSCR	CFADS / *Debt Service*	Kali Time(s)	3	1,35	1,14	2,54
5.	Peningkatan RBC RBC Improvement	*Weighted Average* Pencapaian RBC Anak dan Cucu Perusahaan Asuransi Umum dan Jiwa Weighted Average Achievement of RBC of Subsidiaries and Sub-subsidiaries of General and Life Insurance Companies	%	3	400,00	517,62	3,30
Operasional Operational							
6.	Perbaikan Combined Ratio Anak Perusahaan Asuransi dan Penjaminan Improvement of Combined Ratio of Insurance and Guarantee Subsidiaries	*Loss Ratio + Expense Ratio*	%	5	96,00	110,11	4,36
7.	Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 Completion and Submission of Audited Financial Statements of 2023	Tanggal rilis laporan keuangan BPUI Konsolidasi (*audited*) tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Release date of BPUI Consolidated (audited) financial statements in 2023 with an unqualified opinion (WTP)	Waktu Date	6	15 April 2024 April 15, 2024	07 Oktober 2024 October 7, 2024	0,00
8.	Penyelesaian Identifikasi Onerous Contracts	*Onerous Contract* teridentifikasi 100% Onerous Contract identified 100%	Waktu Date	3	31 Maret 2024 March 31, 2024	29 Maret 2024 March 29, 2024	3,00

KPI		Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization until Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
9.	Penyelesaian Perbaikan *Onerous Contracts** Completion of Onerous Contracts Identification Completion of Onerous Contracts Repair*	Meminimalisir dampak PSAK 74 dari kontrak asuransi *onerous* yang dapat diperbaiki (Persentase nilai *onerous contract* yang dapat dilakukan perbaikan yang berhasil diubah menjadi tidak *onerous) exclude* program penugasan pemerintah Minimize the impact of PSAK 74 from onerous insurance contracts that can be repaired (Percentage of the value of onerous contracts that can be repaired that are successfully converted into not onerous) exclude government assignment programs.	%	5	100,00	86,31	5,00
10.	Penyelesaian Target *Output* Persiapan Implementasi PSAK 74 Completion of Target Output Preparation for PSAK 74 Implementation	Persiapan implementasi PSAK 74 selesai 100% PSAK 74 implementation preparation completed 100%	Waktu Date	4	31 Desember 2024 December 31, 2024	98%	3,92
Sosial Social							
11.	Volume Penjaminan KUR dan/atau Penugasan Pemerintah Lainnya KUR Guarantee Volume and/ or Other Government Assignments	Rata-rata pencapaian dari lini bisnis penugasan pemerintah: 1. Persentase volume penjaminan KUR sesuai penugasan dari pemerintah; (Bobot: 50%) 2. Persentase pencapaian premi IW dan SW; (Bobot: 50%) Average achievement of government assignment business lines: 1. Percentage of KUR guarantee volume in accordance with government assignments; (Weight: 50%) 2. Percentage of Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contribution (SW) ; (Weight: 50%)	%	5	100,00	96,93	4,85
12.	Penyelesaian Secara Tuntas Pengalihan Portofolio Liabilitas dan Aset Polis Jiwasraya ke IFG Life Complete Settlement of Jiwasraya Policy Liability and Assets Portfolio Transfer to IFG Life	(Persentase Penyelesaian Pengalihan Aset + Persentase Penyelesaian Pengalihan Liabilitas) / 2 Percentage of Asset Transfer Completion + Percentage of Liability Transfer Completion) / 2	%	5	100,00	99,99	5,00
	Sub Total			**50**			**31,97**

KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization until Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
II.	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation					
13.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Roadmap for Improvement of Risk Management Implementation	(Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 / Total program *roadmap* perbaikan penerapan manajemen risiko) x 100% (Number of programs implemented in 2024 / Total roadmap programs for improving risk management implementation) x 100%	%	5	100,00	100,00	5,00
14.	HUW Bisnis di Luar Penugasan dari LoB sesuai dengan fokus Bisnis Underwriting Result Business Outside Assignment from LoB in accordance with Business focus	Hasil *Underwriting* Non Penugasan 2024 Non-assignment underwriting result 2024	Rp Triliun Trillion IDR	5	2,86	1,31	2,29
	Sub Total			**10**			**7,29**
III.	**Kepemimpinan Teknologi/** Technology Leadership					
15.	Integrasi MIS dengan Anak Perusahaan *(Front End dan Back End)* MIS Integration with Subsidiaries (Front End and Back End)	Progres penyelesaian: 1. Implementasi ERP; (Bobot: 30%) 2. Integrasi Data Finansial yang bersumber dari ERP dengan *Holding*; (Bobot: 20%) 3. Integrasi Data Manajemen Risiko Terintegrasi; (Bobot: 25%) 4. Implementasi *Dashboard* fungsi *enabler* pada *single source of truth* IFG *(One Data)* Completion progress: 1. ERP implementation; (Weight: 30%) 2. Integration of Financial Data sourced from ERP with Holding; (Weight: 20%) 3. Integration of Integrated Risk Management Data; (Weight: 25%) 4. Implementation of Dashboard enabler function on IFG's single source of truth (One Data)	%	5	100,00	97,95	4,90
16.	Produktivitas *Channel* Pemasaran Digital Digital Marketing Channel Productivity	Rata-rata persentase nilai transaksi dari *channel* digital Anggota *Holding* Average percentage of transaction value from digital channels of Holding Members	%	5	100,00	141,58	5,50
	Sub Total			**10**			**10,40**

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization until Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
IV.	**Peningkatan Investasi** Increased Investment						
17.	*Yield on Investment* (YoI)	Pendapatan Investasi (*Gross*) / Rata-rata Geometric Total Aset Investasi Investment Income (Gross) / Geometric Average of Total Investment Assets	%	5	6,00	6,19	5,15
18.	Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Investment Adequacy Ratio (IRA)	(Investasi+Kas dan Bank) / (Cadangan Teknis Retensi Sendiri + Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung) (Investment+Cash and Bank) / (Self Retention Technical Reserve + Self Retention Claims Payable + Other Payables to Insured)	%	5	136,00	120,72	4,44
19.	Pencapaian KPI PMN	Persentase Pencapaian KPI PMN Percentage of PMN KPI Achievement	Skor Score	5	100,00	104,04	5,20
	Sub Total			**15**			**14,79**
V.	**Pengembangan Talenta** Talent Development						
20.	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women in Nominated Talent	(Jumlah Nominated Talent Perempuan / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Female Nominated Talent / Number of Nominated Talent) x 100%	%	3	27,00	27,91	3,10
21.	Rasio *Top Talent* Muda (<=42 tahun) dalam *Nominated Talent* Ratio of Young Top Talent (<=42 years old) in Nominated Talent	(Jumlah *Nominated Talent* Muda <=42 Tahun / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Young Nominated Talent <=42 years old/ Number of Nominated Talent) x 100%	%	3	25,00	20,93	2,51
22.	Implementasi *Talent Mobility* Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan (BOD-1/Setara) Implementation of Talent Mobility of Parent Company and Subsidiaries (BOD-1/ Equivalent)	(Jumlah *Nominated Talent* yang mengalami *Talent Mobility* / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Nominated Talent experiencing Talent Mobility / Number of Nominated Talent) x 100%	%	3	11,00	6,98	1,90

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization until Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
23.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Organs	(Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi / Total jumlah personil organ pengelola risiko) x 100% (Number of qualified risk management organ personnel / Total number of risk management organ personnel) x 100%	%	3	90,00	96,49	3,22
24.	Implementasi *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Implementation of Pension Fund Restructuring Roadmap	Persentase penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun sesuai *milestone* tahun 2024 Percentage of completion of the Pension Fund Restructuring Roadmap according to the 2024 milestone	%	3	100,00	100,00	3,00
	Sub Total			**15**			**13,73**
	Total			**100**			**78,18**

* Skala penilaian sesuai Kontak Manajemen , di mana pencapaian 61%-100% = skor 5.
* Rating scale according to Contact Management, in which the achievement of 61%-100% = score 5.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi secara strategis telah berupaya secara optimal dalam rangka meraih pencapaian target Perusahaan dan mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has made optimal strategic efforts to achieve the Company's targets and appreciates the various strategic initiatives taken by the Board of Directors in dealing with challenging conditions.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional IFG telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar Perusahaan dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Supervision of the Board of Commissioners in the Formulation and Implementation of Company Strategy

During 2024, the Board of Commissioners ensured that IFG's operational activities were in accordance with the established business plan and that the Company complied with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners remains committed to exercising oversight to ensure that the Company is managed professionally, in accordance with the interests of Shareholders and other Stakeholders.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis Perusahaan, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebanyak 19 (Sembilan belas) kali, dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat secara keseluruhan adalah 96%. Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, juga melakukan rapat dengan mengundang Direktorat dan Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

The Board of Commissioners is committed to being proactive in performing its oversight functions, including in the formulation of the Company's strategic plans, the preparation and implementation of business plans, performance monitoring, and the implementation of risk management and Good Corporate Governance. Throughout 2024, the Board of Commissioners held 19 (nineteen) joint meetings with the Board of Directors, with an overall attendance rate of 96%. In addition to joint meetings, the Board of Commissioners' committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee, also held meetings with the relevant Directorates and Divisions to discuss areas under the responsibility of each Committee.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris menjaga objektivitas dan independensi dengan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

In carrying out its role, the Board of Commissioners maintains objectivity and independence by not getting involved in the Company's operational decision-making, except for matters regulated and stipulated in the applicable provisions.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris memahami bahwa tahun 2025 masih menjadi tahun yang sangat menantang bagi IFG, namun Perusahaan tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kinerja tahun 2024, IFG menunjukkan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator pertumbuhan usaha optimal dibandingkan dengan target RKAP di tahun 2024 yang telah ditetapkan. Kinerja ini berkat akselerasi semua unit usaha yang melakukan harmonisasi untuk mencapai kinerja terbaik di tengah ketidakpastian ekonomi dan iklim usaha nasional yang bersifat dinamis.

Opinions on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners understands that 2025 will still be a very challenging year for IFG, but the Company will continue to make efforts to achieve its targets. Based on its performance in 2024, IFG has demonstrated its ability to overcome existing challenges. This is evident from the achievement of several optimal business growth indicators compared to the targets set in the 2024 RKAP. This performance is the result of the acceleration of all business units that have harmonized their efforts to achieve the best performance amid economic uncertainty and a dynamic national business climate.

Dewan Komisaris menilai bahwa tahun 2025 tetap menghadirkan terutama ketidakpastian iklim ekonomi. Namun demikian, Dewan Komisaris telah mengkaji rencana bisnis Perusahaan untuk tahun anggaran 2025 yang telah disusun Direksi, dan berpendapat bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah realistis. Kami juga mengapresiasi target-target yang dicanangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis IFG dengan rencana strategis yang tepat untuk pencapaian target tersebut.

The Board of Commissioners assesses that 2025 will continue to present significant economic uncertainty. However, the Board of Commissioners has reviewed the Company's business plan for the 2025 fiscal year, which was prepared by the Board of Directors, and believes that the assumptions used are realistic. We also appreciate the targets set to drive IFG's business growth with appropriate strategic plans to achieve these targets.

Melihat keberhasilan penerapan langkah strategis yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris memiliki keyakinan terhadap prospek pertumbuhan Perusahaan ke depan. Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi bersama seluruh jajaran manajemen memiliki kapabilitas yang kuat untuk merealisasikan visi Perusahaan, yakni menjadi salah satu grup keuangan di bidang Perasuransian dan Penjaminan yang terdepan, terpercaya, serta terintegrasi dalam menyediakan layanan dan produk yang unggul dan andal.

Looking at the successful implementation of strategic measures by the Board of Directors throughout 2024, the Board of Commissioners is confident in the Company's future growth prospects. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors, together with the entire management team, has the strong capabilities to realize the Company's vision of becoming one of the leading, trusted, and integrated financial groups in the insurance and guarantee sectors, providing superior and reliable services and products.

Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam RKAP, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan IFG baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

In general, the Board of Commissioners believes that the business prospects prepared by the Board of Directors as outlined in the RKAP are well-aligned and in line with IFG's short-term and long-term direction and objectives.

Pandangan atas Penerapan tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan fundamental bagi Perusahaan. Penerapan GCG diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham, tanpa mengesampingkan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Perusahaan terus mengembangkan praktik GCG melalui berbagai inovasi

Opinions on the Implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners realizes that the systematic and consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental requirement for the Company. The implementation of GCG is expected to not only drive business growth and improve accountability, but also create sustainable value for shareholders, without neglecting the interests of other stakeholders. As a form of commitment to continuous improvement, the Company continues to develop GCG practices through various innovations in order to improve its implementation at all

dalam rangka menyempurnakan implementasinya di seluruh tingkat organisasi. Upaya ini memperkuat kepercayaan diri Perusahaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang serta memperkokoh posisinya sebagai entitas usaha yang memiliki daya saing tinggi.

levels of the organization. These efforts strengthen the Company's confidence in facing future challenges and reinforce its position as a highly competitive business entity.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan Perusahaan. Salah satu peran penting Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa sosialisasi WBS terlaksana secara efektif di seluruh lingkup Perusahaan. Di internal, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media internal serta presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Sementara itu, untuk pihak eksternal, sosialisasi disampaikan melalui saluran seperti *website* resmi, *email*, dan kegiatan-kegiatan eksternal Perusahaan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa penerapan WBS di lingkungan IFG berjalan optimal dan sesuai tujuan. Dapat kami sampaikan pula, bahwa sepanjang tahun 2024, IFG memproses sebanyak 18 pengaduan. Dari 18 pengaduan tersebut semuanya telah selesai ditindaklanjuti.

As part of the implementation of GCG principles, the Board of Commissioners consistently supervises the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) within the Company. One of the important roles of the Board of Commissioners is to ensure that the dissemination of information regarding the WBS is carried out effectively throughout the Company. Internally, dissemination is carried out through various internal media and direct presentations to relevant work units. Meanwhile, for external parties, dissemination is conveyed through channels such as the official website, email, and external Company activities. With continuous supervision, the Board of Commissioners is committed to ensuring that the implementation of the WBS within IFG runs optimally and in accordance with its objectives. We also would like to convey that throughout 2024, IFG processed a total of 18 complaints. All 18 complaints have been resolved.

Pada dasarnya, penerapan GCG di IFG telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam setiap aktivitas perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan Perusahaan, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, standar GCG mengatur peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat dan pendapat atas berbagai tindakan maupun rencana strategis Direksi secara cermat dan bijaksana guna mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

In general, the implementation of GCG at IFG has been properly conducted and is carried out as a form of collaboration between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees in every company activity. The objective is to protect the interests of the Company, shareholders, and stakeholders. In its implementation, GCG standards regulate the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function to ensure that the management of the Company by the Board of Directors is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners also provides careful and prudent advice and opinions on various actions and strategic plans of the Board of Directors to support the achievement of the Company's objectives.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta dalam memberikan saran dan rekomendasi, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Evaluasi terhadap kinerja organ pendukung tersebut dilakukan secara kualitatif, dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan komite dalam menjalankan fungsinya, kualitas dokumentasi, serta relevansi dan efektivitas rekomendasi yang diberikan. Atas dedikasi dan kontribusi yang telah ditunjukkan oleh seluruh anggota komite dalam mendukung tugas Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas komitmen dan kerja sama yang telah diberikan.

Meanwhile, in carrying out its supervisory function and in providing advice and recommendations, the Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee. The performance of these supporting organs is evaluated qualitatively, considering the level of activity of the committee in performing its functions, the quality of documentation, and the relevance and effectiveness of the recommendations provided. For the dedication and contribution shown by all committee members in supporting the duties of the Board of Commissioners, we express our highest appreciation and gratitude for their commitment and cooperation.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yaitu dengan bergabungnya Bapak Wahyu Setiawan yang resmi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan per 3 Januari 2024. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Komposisi Dewan Komisaris berjumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners in 2024

Throughout 2024, there has been a change in the composition of the Board of Commissioners with the appointment of Mr. Wahyu Setiawan as Commissioner of the Company effective January 3, 2024. Until this annual report was published, the Board of Commissioners consisted of 6 (six) members, comprising 1 (one) President Commissioner who also serves as Independent Commissioner, 4 (four) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner. The composition and basis for the appointment of Commissioners is summarized in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komisaris
Table of Composition and Basis for Appointment of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-400/ MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No.SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 tanggal 26 November 2020. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 dated November 26, 2020.
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.
Wahyu Setyawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-3/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024. Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No.SK-3/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Board of Commissioners is committed to accomplish this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of shareholders and other stakeholders.

Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris IFG menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat, dedikasi, dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan dalam mewujudkan pencapaian kinerja Perusahaan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, konsumen, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

Appreciation

On this occasion, on behalf of the entire Board of Commissioners, I would like to express my deepest appreciation and gratitude for the passion, dedication and commitment shown by the Board of Directors, management and all employees in realizing the Company's performance achievements. We would also like to extend our gratitude to our shareholders, customers, business partners, and all stakeholders for their trust and support in maintaining the sustainability and growth of the Company's business.

Jakarta, 17 Juni 2025
Atas nama Dewan Komisaris
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Jakarta, June, 17, 2025
On behalf of the Board of Commissioners
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



Fauzi Ichsan
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



HEXANA TRI SASONGKO

Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Honorable Shareholder and Stakeholder,

Di tahun 2024, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) terus berupaya untuk memenuhi tujuan dari pembentukan *Holding*. IFG menyadari pentingnya peranan *Holding* dalam penguatan daya saing nasional dan inklusi keuangan. Pada 2024, IFG konsisten mengoptimalkan peran *Holding* untuk memperkuat fundamental keuangan, sinergi grup, dan tata kelola investasi. Laporan ini menyajikan tinjauan kinerja, strategi pertumbuhan, dan arah usaha ke depan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham.

In 2024, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) continues to strive to fulfil the objectives of its establishment as a holding company. IFG recognizes the important role of a holding company in strengthening national competitiveness and financial inclusion. In 2024, IFG will consistently optimize its role as a holding company to strengthen financial fundamentals, group synergy, and investment governance. This report presents a review of performance, growth strategies, and future business directions as a form of transparency and accountability to shareholders.

Melalui laporan tahunan ini, saya mewakili Direksi IFG menyampaikan laporan atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan sepanjang tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Laporan Direksi ini memuat analisis kinerja Perusahaan, tinjauan terhadap prospek usaha ke depan, perkembangan dalam penerapan tata kelola perusahaan, serta berbagai informasi penting lainnya yang relevan dengan perjalanan dan pencapaian IFG selama tahun berjalan.

Through this annual report, I, on behalf of the Board of Directors of IFG, submit a report on the implementation of the Company's management throughout 2024 as a form of accountability to the Shareholders and all Stakeholders. This Board of Directors' Report contains an analysis of the Company's performance, a review of future business prospects, developments in the implementation of corporate governance, and other important information relevant to IFG's journey and achievements during the current year.

Tinjauan Makro ekonomi

Laju inflasi Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tren ini sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 3% ±1% pada tahun 2023, yang kemudian turun menjadi 2,5% ±1% untuk tahun 2024. Penurunan inflasi dan penyesuaian target tersebut mencerminkan arah kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten, serta efektivitas kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga.

Meskipun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia berjalan selaras, risiko global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Salah satu faktor utama yang turut menekan inflasi pada tahun 2024 adalah pergerakan harga komoditas, sebagai berikut:

a. Harga Minyak Mentah Indonesia
   Sepanjang tahun 2024, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP) mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi global. Pada Mei 2024, ICP turun menjadi USD 79,78 per barel dari USD 87,61 per barel di bulan sebelumnya, seiring meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tren penurunan berlanjut

Macroeconomic Review

Indonesia's inflation rate showed a decline from 2023 to 2024. This trend aligns with the inflation target set by the Bank of Indonesia, which was 3% ±1% for 2023, and subsequently decrease to 2.5% ±1% for 2024. The decline in inflation and the adjustment of the target reflects consistent monetary and fiscal policy directions, as well as the effectiveness of the Central Inflation Control Team (TPIP) and the Regional Inflation Control Team (TPID) in maintaining price stability.

Although the synergy between fiscal and monetary policies in Indonesia is done seamlessly, global risks remain a factor to watch out for. One of the main factors contributing to inflation in 2024 is the movement of commodity prices, as follows:

a. Indonesian Crude Oil Prices
   Throughout 2024, the price of Indonesian crude oil (Indonesian Crude Price/ICP) fluctuated due to geopolitical dynamics and global economic conditions. In May 2024, the ICP declined to USD 79.78 per barrel from USD 87.61 per barrel in the previous month, following the easing of tensions in the Middle East. The downward trend continued in

pada bulan Juni dengan ICP mencapai USD 79,31 per barel. Namun, harga kembali meningkat pada bulan Juli menjadi USD 82,00 per barel, didorong oleh meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Merah serta revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menjadi 2,9%.

Pada September 2024, ICP mengalami penurunan signifikan ke USD 72,54 per barel, dipicu oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok serta meningkatnya ekspor minyak dari Libya dan Irak. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga November 2024, dengan ICP mencapai titik terendah tahun ini di USD 71,83 per barel, dan mengalami sedikit penurunan lebih lanjut menjadi USD 71,61 per barel pada Desember 2024. Fluktuasi harga minyak sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan inflasi akibat harga energi berkurang, ketidakpastian ekonomi global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

b. Harga Minyak Sawit Mentah
Pada awal tahun 2024, harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) tercatat sebesar MYR 3.638 per ton. Sepanjang tahun, harga CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai MYR 4.444 per ton pada bulan Desember 2024, mencerminkan pertumbuhan sekitar 21,42%. Peningkatan ini didorong oleh kekhawatiran terkait ekspor serta meningkatnya permintaan dari negara pembeli utama, terutama Tiongkok, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek pada akhir Januari.

June, with the ICP reaching USD 79.31 per barrel. However, prices returned to rise in July to USD 82.00 per barrel, driven by increased tensions in the Red Sea region and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) revising its global economic growth projection to 2.9%.

In September 2024, the ICP experienced a significant decline to USD 72.54 per barrel, triggered by an economic slowdown in China and increased oil exports from Libya and Iraq. This downward trend continued through November 2024, with the ICP reaching its lowest point of the year at USD 71.83 per barrel, and experiencing a slight further decline to USD 71.61 per barrel in December 2024. Oil price fluctuations throughout the year indicate that although inflationary pressures from energy prices have eased, global economic uncertainty remains a factor to monitor.

b. Crude Palm Oil Prices
At the beginning of 2024, crude palm oil (CPO) prices were recorded at MYR 3,638 per ton. Throughout the year, CPO prices significantly increased, reaching MYR 4,444 per ton in December 2024, reflecting growth of around 21.42%. This increase was driven by concerns over exports and rising demand from major buyers, particularly China, ahead of the Lunar New Year celebrations in late January.

Dari sisi struktural, berdasarkan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK), kontributor inflasi utama pada 2024 berasal dari harga barang yang diatur Pemerintah (*administered prices*) serta inflasi inti. Inflasi barang yang diatur Pemerintah *(administered prices)* menunjukkan tren stabil sepanjang tahun, yang mengindikasikan kebijakan harga yang dikontrol secara ketat oleh Pemerintah, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik. Inflasi inti (*core inflation*) terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun, yang mencerminkan peningkatan permintaan domestik yang lebih kuat serta tekanan harga dari sektor jasa dan konsumsi.

Sebaliknya, inflasi barang-barang yang bersifat volatil *(volatile food prices)* mengalami penurunan tajam sepanjang tahun 2024, bahkan memasuki wilayah deflasi pada awal 2025. Hal ini mencerminkan stabilitas pasokan pangan, harga pangan yang lebih terkendali, serta peran kebijakan stabilisasi pangan yang dijalankan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Secara keseluruhan, tren inflasi yang menurun sepanjang 2024 mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan harga, terutama melalui stabilitas *administered prices* dan penurunan harga barang-barang volatil. Namun, tekanan inflasi inti masih berlanjut, mengindikasikan permintaan domestik yang kuat sebagai pendorong utama inflasi di Indonesia.

From a structural perspective, based on movements in the Consumer Price Index (CPI), the main contributors to inflation in 2024 were administered prices and core inflation. Inflation in administered prices showed a stable trend throughout the year, indicating that the government maintained strict price controls, such as subsidies for Fuel Oil (BBM) and electricity tariffs. Core inflation continued to rise until the end of the year, reflecting stronger domestic demand and price pressures from the services and consumption sectors.

On the other hand, volatile food prices declined sharply throughout 2024, even entering deflationary territory in early 2025. This reflects the stability of food supply, more controlled food prices, and the role of food stabilization policies implemented by the Government and Bank Indonesia.

Overall, the declining inflation trend throughout 2024 reflects the effectiveness of monetary and fiscal policies in controlling prices, particularly through the stability of administered prices and the decline in volatile goods prices. However, core inflationary pressures persist, indicating strong domestic demand as the main driver of inflation in Indonesia. In contrast, throughout 2024, the exchange rate of the rupiah against the US dollar experienced significant

Di sisi lain, sepanjang tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik. Ketidakpastian global, kondisi perdagangan internasional, serta arus modal asing berkontribusi terhadap pergerakan rupiah sepanjang tahun. Pada 1 Januari 2024, rupiah berada di Rp15.796 per dolar Amerika Serikat dan melemah hingga Rp16.410 pada 28 Juni 2024 sebelum sedikit menguat menjadi Rp16.375. Pelemahan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

fluctuations, influenced by various external and domestic factors. Global uncertainty, international trade conditions, and foreign capital flows contributed to the movement of the rupiah throughout the year. On January 1, 2024, the rupiah was at IDR15,796 per US dollar and depreciated to IDR16,410 on June 28, 2024, before slightly strengthening to IDR16,375. This depreciation was caused by increased demand for the US dollar amid global economic uncertainty.

Arus modal asing memainkan peran penting dalam pergerakan rupiah. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami periode *capital outflow* pada beberapa kuartal, terutama di triwulan III tahun 2023, yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah pada saat itu. Namun, kondisi mulai membaik di akhir tahun 2023 dengan masuknya modal asing kembali, mendukung penguatan rupiah di awal tahun 2024. Namun, tren di tahun 2024 lebih bervariasi, dengan *capital outflow* yang signifikan pada triwulan III tahun 2024, menekan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, terjadi lonjakan arus modal masuk di triwulan II dan triwulan IV tahun 2024, yang sempat membantu penguatan rupiah.

Foreign capital flows played an important role in the movement of the rupiah. In 2023, Indonesia experienced capital outflows in several quarters, particularly in the third quarter of 2023, which contributed to the weakening of the rupiah at that time. However, conditions began to improve toward the end of 2023 with the return of foreign capital, supporting the strengthening of the rupiah at the beginning of 2024. The trend in 2024 was more varied, with significant capital outflows in the third quarter of 2024, putting pressure on the rupiah's exchange rate. On the contrary, there was a surge in capital inflows in the second and fourth quarters of 2024, which temporarily helped strengthen the rupiah.

Di triwulan III tahun 2024, rupiah menunjukkan penguatan, mencapai Rp15.100 pada 26 September 2024, level terkuat dalam 6 (enam) bulan terakhir, sebelum kembali melemah akibat meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Pada kuartal keempat, rupiah sempat menguat ke Rp15.875 pada 25 November 2024, tetapi kembali melemah tajam ke Rp16.225 pada 19 Desember 2024, sebelum akhirnya ditutup di Rp16.162 pada akhir tahun.

In the third quarter of 2024, the rupiah showed signs of appreciation, reaching IDR15,100 on September 26, 2024, its strongest level in six months, before declining again due to increased volatility in global financial markets. In the fourth quarter, the rupiah briefly strengthened to IDR15,875 on November 25, 2024, but then depreciated sharply to IDR16,225 on December 19, 2024, before finally closing at IDR16,162 at the end of the year.

Pola arus modal keluar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa investor global masih berhati-hati terhadap aset di negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global. Penguatan rupiah pada triwulan II dan triwulan IV tahun 2024 mengindikasikan kepercayaan investor yang kembali tumbuh, tetapi lonjakan *capital outflow* di triwulan III tahun 2024 menunjukkan bahwa risiko global tetap menjadi ancaman terhadap stabilitas nilai tukar.

The capital outflow pattern in 2024 indicates that global investors remain cautious toward assets in emerging markets, including Indonesia, particularly amid global monetary policy uncertainty. The strengthening of the rupiah in the second and fourth quarters of 2024 indicated a resurgence of investor confidence, but the surge in capital outflows in the third quarter of 2024 showed that global risks remained a threat to exchange rate stability.

Stabilitas rupiah sepanjang 2024 mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing dan kondisi ekonomi global, sehingga kebijakan moneter yang adaptif tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi dampak volatilitas terhadap inflasi serta pertumbuhan nasional.

The stability of the rupiah throughout 2024 reflects high dependence on foreign capital flows and global economic conditions, so adaptive monetary policy remains necessary to maintain economic balance and reduce the impact of volatility on inflation and national growth.

Tinjauan Segmen Industri

Industri asuransi umum masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi secara yoy di tahun 2024, melanjutkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK, pendapatan premi industri tumbuh 5,7% di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 24,2%. Tren pertumbuhan ini juga didukung oleh data yang dihimpun oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang mencatat

Industry Segment Review

The general insurance industry continued to record year-on-year premium income growth in 2024, continuing the upward trend of the past few years. According to OJK data, premium income in the industry increased by 5.7% in 2024 compared to 24.2% in 2023. This growth trend is also supported by data compiled by the Indonesian General Insurance Association (AAUI), which noted that premium

bahwa pertumbuhan premi di tahun 2024 didorong oleh pertumbuhan premi pada lini bisnis asuransi properti sebesar 14,7% dan lini bisnis asuransi kesehatan sebesar 77,2%.

Dari sisi pangsa pasar, industri asuransi umum masih didominasi oleh 3 (tiga) lini bisnis utama, yaitu asuransi properti, asuransi kredit, dan asuransi kendaraan bermotor. Ketiga lini bisnis ini tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan premi industri, dengan pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Sementara itu, industri reasuransi mengalami penurunan pendapatan premi pada tahun 2024, berbalik dari tren pertumbuhan positif tahun sebelumnya. Berdasarkan data OJK, pendapatan premi bruto (*gross premium*) turun sebesar -4,7% secara yoy berbanding terbalik dengan pertumbuhan sebesar 15,0% di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya premi pada beberapa lini usaha utama, seperti asuransi kredit yang menyusut -26,1%, lini usaha aneka yang turun -41,4%, serta engineering yang mengalami kontraksi -18,5%, menurut data AAUI di tahun 2024.

Sejalan dengan penurunan premi, jumlah klaim bruto (*gross claims*) tahun 2024 juga mengalami penurunan lebih dalam, yaitu sebesar -11,7% dibandingkan tahun 2023. Penurunan klaim ini dipengaruhi oleh turunnya klaim pada asuransi kredit sebesar -38,5%, lini usaha aneka yang merosot -72,9%, serta properti yang mencatatkan penurunan sebesar -8,6%.

Di sisi lain, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kinerja 56 perusahaan asuransi jiwa sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam berbagai indikator utama, termasuk peningkatan pendapatan premi dan jumlah tertanggung.

Dari sisi pendapatan premi, pada tahun 2024 pendapatan premi industri mencapai Rp185,39 triliun, tumbuh 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp77,07 triliun, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,3%.

Dari sisi total klaim, sepanjang tahun 2024, industri asuransi jiwa telah membayarkan Rp160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga Indonesia, serta mencerminkan komitmen industri dalam melindungi masyarakat Indonesia. Selain itu, industri akan terus memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan finansial yang optimal.

Namun demikian, di tahun 2024 segmen industri penjaminan mencatatkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp11,7 triliun, menurun sebesar 3,85% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp12,2 triliun. Sejalan dengan penurunan IJP pada industri penjaminan, premi bruto industri asuransi kredit juga mengalami penurunan sebesar 3,01% pada tahun 2024, dengan total premi bruto mencapai Rp21,7 triliun.

growth in 2024 was driven by premium growth in the property insurance business line of 14.7% and the health insurance business line of 77.2%.

In terms of market share, the general insurance industry was still dominated by three main business lines: property insurance, credit insurance, and motor vehicle insurance. These three business lines remain the largest contributors to the industry's premium income, with relatively stable growth year-on-year.

Meanwhile, the reinsurance industry experienced a decline in premium income in 2024, reversing the positive growth trend of the previous year. According to OJK data, gross premium income decreased by minus 4.7% year-on-year, contrasting with the 15.0% growth recorded in 2023. This decline was primarily driven by sharp decline in premiums across several key business lines, such as credit insurance, which contracted by minus 26.1%, miscellaneous insurance, which decreased to minus 41.4%, and engineering insurance, which saw a contraction of minus 18.5%, according to AAUI data for 2024.

In line with the decline in premiums, gross claims in 2024 also experienced a more significant decline of minus 11.7% compared to 2023. This decline in claims was influenced by a downward trend in credit insurance claims of minus 38.5%, miscellaneous business lines which dropped by minus 72.9%, and property which recorded a decline of 8.6%.

On the other hand, the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) reported the performance of 56 life insurance companies throughout 2024, which showed positive growth in various key indicators, including an increase in premium income and the number of insured persons.

In terms of premium income, in 2024, the industry's premium income reached IDR185.39 trillion, or 4.3% increase compared to the previous year. This growth was supported by new business premiums of IDR108.32 trillion and renewal premiums of IDR77.07 trillion, which each recorded growth of 4.3%.

In terms of total claims, throughout 2024, the life insurance industry paid IDR160.07 trillion to 9.08 million beneficiaries. This figure demonstrates that life insurance is a key pillar in supporting the economic resilience of Indonesian families, as well as reflecting the industry's commitment to protecting the Indonesian people. In addition, the industry will continue to ensure that customers receive optimal financial protection.

However, in 2024, the guarantee industry segment recorded Guarantee Service Fees (IJP) of IDR11.7 trillion, a decrease of 3.85% compared to 2023, which amounted to IDR12.2 trillion. In line with the decline in IJP in the guarantee industry, the gross premiums of the credit insurance industry also decreased by 3.01% in 2024, with total gross premiums reaching IDR21.7 trillion. This decline contrasts with a 10.52%

Penurunan ini berbanding terbalik dengan peningkatan volume penyaluran kredit sebesar 10,52%, menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7,2 triliun.

Sedangkan dalam industri pasar modal menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan transaksi di seluruh instrumen perdagangan. RNTH saham mencapai Rp12,8 triliun, naik dari Rp10,7 triliun pada 2023. Industri *secondary brokerage* tetap kompetitif, dengan 15 (lima belas) broker teratas menguasai 67% dari total transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebagian besar berasal dari broker yang memiliki *captive market* kuat, seperti yang berafiliasi perbankan domestik dan asing.

Persaingan ini juga mendorong tren penurunan komisi *equity brokerage* dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perdagangan obligasi Pemerintah dalam denominasi rupiah mencatatkan peningkatan nilai transaksi harian sebesar 3,8% menjadi Rp49,7 triliun, sementara obligasi korporasi rupiah tumbuh 6,21% dengan nilai transaksi harian mencapai Rp2,46 triliun sepanjang 2024.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan di 2024

IFG terus melakukan perbaikan fundamental dan berupaya membangun bisnis yang berkelanjutan serta lebih kompetitif dengan mengembangkan kapabilitas di luar penugasan Pemerintah. Perusahaan juga menargetkan penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antar Anggota *Holding* serta ekosistem BUMN guna mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, IFG berkomitmen untuk memperkokoh fondasi seluruh Anggota *Holding* melalui penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas bisnis dan operasional.

IFG telah merumuskan 8 (delapan) Program Kerja Utama IFG pada tahun 2024 yang selaras dengan Arahan Taktis Arahan Pemegang Saham (APS) Seri A RKAP 2024, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Optimalisasi Penugasan Pemerintah sesuai mandat.
   - Meningkatkan penetrasi IW dan SW dengan menjangkau pelanggan secara langsung;
   - Meningkatkan fasilitas pada program pencegahan kecelakaan;
   - Memperkuat landasan dan dukungan hukum pada Jasa Raharja;
   - Optimalisasi pengelolaan penugasan pemerintah; dan
   - Penyelesaian transfer portofolio polis & aset Jiwasraya secara tuntas.
2. *Operational Excellence*: perbaikan proses bisnis dan sistem penunjang *back-end* dan *middle-end* termasuk penguatan *underwriting* serta meningkatkan kapabilitas penagihan piutang yang didukung Teknologi Informasi

increase in credit disbursement volume, amounted to IDR7.9 trillion in 2024 compared to IDR7.2 trillion in the previous year.

Meanwhile, the capital market industry showed higher activity in 2024 compared to the previous year, reflected in increased transactions across all trading instruments. Stock RNTH reached IDR12.8 trillion, an increase from IDR10.7 trillion in 2023. The secondary brokerage industry remained competitive, with the top 15 brokers controlling 67% of total transactions on the Indonesia Stock Exchange (IDX), most of which came from brokers with strong captive markets, such as those affiliated with domestic and foreign banks.

This competition also drove a downward trend in equity brokerage commissions from year to year. On the other hand, government bond trading in rupiah denominations recorded a 3.8% increase in daily transaction value to IDR49.7 trillion, while rupiah-denominated corporate bonds grew by 6.21%, with daily transaction value reaching Rp2.46 trillion throughout 2024.

Company Strategy and Strategic Policy in 2024

IFG continues to make fundamental improvements and strive to build a sustainable and more competitive business by developing capabilities beyond the Government's mandate. The Company also aims to create added value for customers and the community, while strengthening synergies between holding members and the SOE ecosystem to support business growth. IFG is committed to strengthening the foundations of all holding members through strengthening corporate governance, risk management, and improving business and operational capabilities.

IFG has formulated eight Main Work Programs for 2024 in line with the Tactical Directives of the Shareholders' Directive (APS) Series A RKAP 2024, which include the following:

1. Optimizing government assignments in accordance with the mandate.
   - Increasing the penetration of Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contribution (SW) by reaching customers directly;
   - Enhancing facilities in accident prevention programs;
   - Strengthening the legal foundation and support for Jasa Raharja;
   - Optimizing the management of government assignments; and
   - Completely settling the transfer of Jiwasraya's policy portfolio and assets.
2. Operational Excellence: improvement of business processes and back-end and middle-end support systems, including strengthening underwriting and improving receivables collection capabilities

(Straight Through Processing)

- Digitalisasi proses bisnis;
- Optimalisasi kinerja produk dan portofolio di antaranya dengan memperkuat *Risk Analytic;*
- Integrasi infrastruktur, aplikasi, teknologi informasi Induk dengan Anak Perusahaan serta peningkatan *core/surrounding system* dan tata kelola data;
- Implementasi PSAK-74 Fase 4-5 (implementasi dan *go-live*) secara terintegrasi; dan
- *Enterprise Resource Planning.*

3. Memperkuat sinergi untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan bisnis saat ini.
   - Menciptakan keunggulan kompetitif dengan penguasaan pasar (didukung reasuransi);
   - Membangun *join-capacity financial lines* melalui konsorsium atau koasuransi;
   - Memanfaatkan akses terhadap ekosistem BUMN, afiliasi, dan pemerintahan;
   - Menumbuhkan penjaminan/asuransi kredit produktif secara selektif dengan *stop-loss* dan *underwriting* yang *robust*;
   - Mengembangkan model bisnis untuk meningkatkan *recovery* dari hak subrogasi; dan
   - Memaksimalkan produktivitas dari aset properti.

4. Ekspansi pada Pasar Baru
   - Meningkatkan penetrasi pada segmen usaha menengah (*mid-market*);
   - Masuk ke bisnis ritel untuk meningkatkan pertumbuhan (MTPL, properti residensial, dan mikro asuransi);
   - Mengembangkan bisnis *worksite* dan ritel dengan bertumpu pada korporasi;
   - Mengembangkan bisnis asuransi jiwa syariah; dan
   - Distribusi terintegrasi: mengintegrasikan dan memperluas jaringan distribusi melalui digitalisasi dan *bionic-model.*

5. Melakukan Transformasi Model Bisnis dan Inovasi Produk
   - Mengubah model bisnis menjadi *Risk Management Partnership;*
   - Beralih dari KBG ke *surety* dengan S&K yang lebih *robust* serta risk sharing;
   - Menggarap pasar asuransi kesehatan melalui skema yang *game-changing (managed-care hybrid);*
   - Melakukan transformasi *bancassurance*;
   - BTIM mengembangkan alternatif solusi baru, contoh: *mortgage-backed securities*, dana berbasis aset infrastruktur, *pension fund*, dan lainnya;
   - Bahana Sekuritas sebagai instrumen transformasi pada IFG dan BUMN dan menjadi pemain utama pasar *advisory*; dan
   - BAV melakukan *direct lending to consumers* melalui distribusi yang efisien yaitu *group lending.*

6. Manajemen Risiko & Tata Kelola yang *robust*: menumbuhkan kultur manajemen risiko yang kuat pada

supported by Information Technology (Straight Through Processing)

- Digitization of business processes;
- Optimization of product and portfolio performance, including by strengthening Risk Analytics;
- Integration of infrastructure, applications, and information technology between the parent company and subsidiaries, as well as improvement of core/surrounding systems and data governance;
- Implementation of PSAK-74 Phase 4-5 (implementation and go-live) in an integrated manner; and
- Enterprise Resource Planning.

3. Strengthening synergies to increase market share and optimize current business.
   - Creating competitive advantage through market dominance (supported by reinsurance);
   - Building joint financial lines through consortiums or co-insurance;
   - Leveraging access to the state-owned enterprise ecosystem, affiliates, and government;
   - Growing selective credit insurance/guarantees with robust stop-loss and underwriting;
   - Developing business models to enhance recovery from subrogation rights; and
   - Maximizing productivity from property assets.

4. Expansion into New Markets
   - Increasing penetration in the mid-market segment;
   - Entering the retail business to drive growth (MTPL, residential property, and microinsurance);
   - Developing worksite and retail businesses with a focus on corporations;
   - Developing sharia life insurance business; and
   - Integrated distribution: integrate and expand distribution networks through digitalization and bionic models.

5. Business Model Transformation and Product Innovation
   - Transforming the business model into a Risk Management Partnership;
   - Shifting from KBG to surety with more robust terms and conditions and risk sharing;
   - Tapping into the health insurance market through game-changing schemes (managed-care hybrid);
   - Transforming bancassurance;
   - BTIM developing new alternative solutions, such as mortgage-backed securities, infrastructure-based asset funds, pension funds, and others;
   - Bahana Sekuritas as a transformation instrument for IFG and state-owned enterprises and becoming a major player in the advisory market; and
   - BAV conducting direct lending to consumers through efficient distribution, namely group lending.

6. Robust Risk Management & Governance: fostering a strong risk management culture within the IFG

Grup IFG, analisis risiko untuk menunjang IFG menjadi *risk management partner.*

- Peningkatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di lingkungan IFG;
- Penguatan *Operational Risk Level Contingency Plan*;
- Implementasi atas regulasi Pelindungan Data Pribadi; dan
- Penguatan tata kelola perusahaan secara terintegrasi.

7. Pengembangan Talenta: Mengembangkan dan menarik talent baru untuk menjadi lebih kompeten pada manajemen risiko dan menciptakan *High-Performing Culture.*
   - Menciptakan SDM yang unggul dan profesional;
   - Peningkatan kompetensi kepemimpinan terpusat oleh IFG Corporate University; dan
   - Meningkatkan kemampuan teknis SDM melalui program terintegrasi dengan Akademi dalam menjawab tuntutan bisnis.
8. Pengelolaan Investasi yang Optimal dengan memperhatikan prinsip ALM.
   - Optimalisasi pengelolaan likuiditas Anak Perusahaan dengan meminimalisir *idle cash cash on hand;*
   - *Reshaping* alokasi aset investasi melalui *Strategic Asset Allocation* ("SAA") dan *gapping duration* berdasarkan *risk limit* yang terukur sesuai profil liabilitas sehingga meningkatkan alokasi aset investasi yang lebih produktif; dan
   - Memperbaiki *investment selection* melalui sinergi BTIM melalui mekanisme KPD untuk meningkatkan kinerja masing-masing instrumen aset investasi.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi menyusun strategi dan kebijakan Perusahaan jangka pendek melalui Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diselaraskan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk jangka panjang, Direksi juga menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi IFG memegang peranan kunci dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis yang menjadi dasar arah pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan. Seluruh keputusan dan langkah yang diambil oleh Direksi selalu diarahkan untuk selaras dengan aspirasi Pemegang Saham dan mendukung misi utama IFG dalam memperkuat perannya di ekosistem keuangan nasional.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, Direksi secara seksama mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi dinamika usaha. Direksi menetapkan arahan strategis serta sasaran utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Group, risk analysis to support IFG in becoming a risk management partner.

- Enhancing risk awareness culture within the IFG environment;
- Strengthening the Operational Risk Level Contingency Plan;
- Implementing Personal Data Protection regulations; and
- Strengthening integrated corporate governance.

7. Talent Development: Developing and attracting new talent to become more competent in risk management and creating a High-Performing Culture.
   - Creating superior and professional human resources;
   - Improving leadership competencies through IFG Corporate University; and
   - Enhancing the technical capabilities of human resources/human capital through integrated programs with the Academy in response to business demands.
8. Optimal Investment Management with consideration of ALM principles.
   - Optimizing liquidity management of subsidiaries by minimizing idle cash on hand;
   - Reshaping investment asset allocation through Strategic Asset Allocation ("SAA") and duration gapping based on measurable risk limits in line with liability profiles to increase more productive investment asset allocation; and
   - Improving investment selection through BTIM synergy via the KPD mechanism to enhance the performance of each investment asset instrument.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors formulates the Company's short-term strategies and policies through the Company Work Plan and Budget (RKAP) in line with the established vision and mission. For the long term, the Board of Directors also formulates a Long-Term Company Plan (RJPP) that refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises.

As the organ responsible for managing the Company's operations, the IFG Board of Directors plays a key role in formulating strategic strategies and policies that form the basis for the Company's short-term and long-term development direction. All decisions and measures taken by the Board of Directors are always directed to be in line with the aspirations of the Shareholders and support IFG's main mission in strengthening its role in the national financial ecosystem.

In formulating strategies and policies, the Board of Directors carefully considers various internal and external factors that affect business dynamics. The Board of Directors establishes strategic directions and main objectives as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which then

Perusahaan (RKAP), yang selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan aktivitasnya secara terarah, konsisten, dan terukur.

Bersama jajaran eksekutif IFG, Direksi secara berkala melakukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk implementasinya di seluruh level organisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dengan dinamika bisnis dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Direksi juga mengambil peran aktif dalam memastikan seluruh bagian organisasi memahami dan mengimplementasikan strategi secara konsisten. Selain itu, Direksi turut mengawasi secara langsung pelaksanaan strategi tersebut, dengan dukungan komite-komite di bawah Direksi serta organ pendukung lainnya, guna memastikan implementasi berjalan sesuai arah dan tujuan Perusahaan.

Proses yang dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Untuk memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan optimal, Direksi secara konsisten memantau dan mengawasi perkembangan di seluruh aspek, mencakup pemasaran, keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, hingga kegiatan operasional lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui forum rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan secara berkala. Dalam forum tersebut, setiap unit kerja menyampaikan laporan terkini mengenai pencapaian target, pelaksanaan inisiatif strategis, serta kendala yang dihadapi selama proses implementasi.

Direksi IFG memastikan bahwa implementasi strategi secara menyeluruh berjalan searah dengan arah strategis Perusahaan. Hal ini dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang efektif antara Direksi dan seluruh elemen organisasi, mulai dari lini bisnis, unit kerja, cabang, hingga Anggota *Holding*. Direksi secara rutin melakukan peninjauan terhadap parameter kinerja utama dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Parameter tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pencapaian bisnis, mitigasi risiko, hubungan dengan pemangku kepentingan, kapabilitas digital, kualitas layanan, serta keamanan data dan informasi.

Dalam pelaksanaannya, Direksi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif sebagai pemberi arahan, dengan menawarkan solusi maupun penyesuaian strategi apabila diperlukan. Proses evaluasi yang rutin ini memungkinkan Direksi untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi deviasi dari rencana awal, melakukan tindakan korektif, dan memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bergerak selaras menuju pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Dengan demikian, implementasi strategi dapat berlangsung secara terkontrol, terukur, dan responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Secara konsisten, Direksi juga menanamkan budaya dan nilai-nilai Perusahaan dalam seluruh aktivitas organisasi, membangun kerja sama tim yang solid, serta memastikan

become a reference for all work units in conducting their activities in a focused, consistent, and measurable manner.

Alongside IFG's executive team, the Board of Directors regularly evaluates the strategies and policies that have been established, including their implementation at all levels of the organization. This evaluation aims to ensure that the strategies remain relevant to business dynamics and that their implementation is in line with the established goals and targets.

The Board of Directors also takes an active role in ensuring that all parts of the organization understand and implement the strategy consistently. In addition, the Board of Directors directly supervises the implementation of the strategy, with the support of committees under the Board of Directors and other supporting organs, to ensure that the implementation is in line with the Company's direction and objectives.

Processes Conducted by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

To ensure optimal management of the Company, the Board of Directors consistently monitors and supervises developments in all aspects, including marketing, finance, taxation, human capital, and other operational activities. This supervision is carried out through regular monitoring and performance evaluation meetings. In these forums, each work unit submits the latest reports on target achievement, implementation of strategic initiatives, and obstacles encountered during the implementation process.

The IFG Board of Directors ensures that the overall implementation of the strategy is in line with the Company's strategic direction. This is achieved through effective communication between the Board of Directors and all elements of the organization, from business lines, work units, branches, to subsidiaries. The Board of Directors regularly reviews key performance indicators and provides constructive feedback. These indicators cover various aspects, such as business achievements, risk mitigation, stakeholder relations, digital capabilities, service quality, and data and information security.

In its implementation, the Board of Directors not only performs a supervisory function but also plays an active role as a guide, offering solutions or strategic adjustments when necessary. This regular evaluation process enables the Board of Directors to proactively identify potential deviations from the initial plan, take corrective actions, and ensure that all parts of the organization move in alignment toward achieving the Company's strategic objectives. Thus, strategy implementation can take place in a controlled, measurable, and responsive manner to the dynamics of change.

The Board of Directors consistently instills the Company's culture and values in all organizational activities, builds solid teamwork, and ensures effective coordination across

koordinasi yang efektif di seluruh jenjang manajerial guna mendukung pencapaian target dan pelaksanaan rencana strategis Perusahaan.

Perbandingan antara hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Meskipun industri asuransi secara keseluruhan belum menunjukkan kondisi yang sepenuhnya kondusif hingga akhir tahun 2024, IFG berhasil mencatatkan peningkatan kinerja pada segmen bisnis non-penugasan. Pada tahun 2024, proporsi premi non-penugasan mencapai 37,73% dari total premi, meningkat dari 34,77% pada tahun sebelumnya. Peningkatan proporsi ini mencerminkan keberhasilan IFG dalam mengurangi ketergantungan terhadap bisnis penugasan dan memperkuat fondasi bisnis non-penugasannya.

Lebih lanjut, gambaran singkat kinerja IFG pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam bisnis asuransi umum, tiga entitas dalam ekosistem IFG, yaitu Askrindo dan Jasindo sebagai Anggota *Holding*, serta PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP) sebagai cucu perusahaan, berhasil menempati posisi dua besar secara konsolidasi dalam industri asuransi umum nasional berdasarkan capaian pendapatan premi bruto. Pada lini bisnis *suretyship*, JRP berhasil menjadi market leader dengan pangsa pasar sebesar 21,34%, diikuti oleh Askrindo dengan pangsa pasar sebesar 14,57%. Pada lini bisnis asuransi kredit, Askrindo memimpin dengan pangsa pasar sebesar 22,77%, di mana mayoritas penerimaan premi berasal dari bisnis penugasan KUR, yang berkontribusi 77,91% dari total bisnis asuransi kredit di Askrindo. Pada lini bisnis *oil and gas*, Jasindo berhasil menjadi *market leader* dengan pangsa pasar sebesar 52,92%, dengan kontribusi premi terbesar berasal dari SKK Migas. Pada lini bisnis *liability*, JRP menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 11,68% dengan rasio klaim rendah sebesar 10,09%.
2. Dalam bisnis penjaminan, IFG melalui Jamkrindo masih mempertahankan posisinya sebagai *market leader.* Jamkrindo mendominasi pasar dengan *market share* 69,12% atau penerimaan IJP sebesar Rp8,1 triliun. Di samping itu, Jamkrindo mencatatkan kenaikan premi sebesar 13,36% *yoy*, dari Rp7,15 triliun menjadi Rp8,10 triliun. Pencapaian ini masih berbanding terbalik dengan penurunan yang terjadi pada industri penjaminan di tahun 2024 sebesar 3,85%.
3. Dalam bisnis asuransi jiwa dan kesehatan, IFG melalui IFG Life mengambil langkah strategis untuk memperluas pangsa pasar dengan mengakuisisi Mandiri Inhealth pada Juni 2024. Aksi ini dilakukan di tengah momentum pertumbuhan positif industri, serta sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi IFG Life di segmen asuransi jiwa dan kesehatan secara nasional. Langkah ini mengantarkan IFG Life menjadi perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia berdasarkan APE per 31 Desember 2024, dengan nilai APE mencapai Rp6,83 triliun, melampaui Allianz (Rp3,50 triliun) dan Prudential (Rp3,35 triliun).
4. Dalam bisnis pasar modal dan investasi, peningkatan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2024 turut memberikan dampak

all managerial levels to support the achievement of the Company's targets and the implementation of its strategic plans.

Comparison between Achieved and Targeted Results

Although the insurance industry as a whole has not shown entirely conducive conditions until the end of 2024, IFG managed to record improved performance in the non-assignment business segment. In 2024, the proportion of non-assignment premiums reached 37.73% of total premiums, an increase from 34.77% in the previous year. This increase reflects IFG's success in reducing its dependence on assigned business and strengthening the foundation of its non-assigned business.

Furthermore, a brief overview of IFG's performance in 2024 is explained as follows:

1. In the general insurance business, three entities in the IFG ecosystem, namely Askrindo and Jasindo as members of the holding company, and PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP) as a sub-subsidiary, successfully ranked among the top two in the national general insurance industry in terms of gross premium income. In the suretyship business line, JRP became the market leader with a market share of 21.34%, followed by Askrindo with a market share of 14.57%. In the credit insurance business line, Askrindo leads with a market share of 22.77%, with the majority of premium income coming from the KUR assignment business, contributing 77.91% of total credit insurance business at Askrindo. In the oil and gas business line, Jasindo has become the market leader with a market share of 52.92%, with the largest premium contribution coming from SKK Migas. In the liability business line, JRP ranked second with a market share of 11.68% and a low claim ratio of 10.09%.
2. In the guarantee business, IFG through Jamkrindo maintained its position as market leader. Jamkrindo dominated the market with a market share of 69.12% or IJP revenue of Rp8.1 trillion. Additionally, Jamkrindo recorded a 13.36% year-on-year increase in premiums, from IDR7.15 trillion to IDR8.10 trillion. This achievement contrasts with the 3.85% decline in the guarantee industry in 2024.
3. In the life and health insurance business, IFG, through IFG Life, took a strategic step to expand its market share by acquiring Mandiri Inhealth in June 2024. This action was taken amid positive growth momentum in the industry and as part of efforts to strengthen IFG Life's position in the life and health insurance segment nationally. This move has made IFG Life the largest life insurance company in Indonesia based on APE as of December 31, 2024, with an APE value of IDR6.83 trillion, surpassing Allianz (IDR3.50 trillion) and Prudential (IDR3.35 trillion).
4. In the capital market and investment business, the increase in the average daily transaction value (RNTH) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) throughout

positif terhadap kinerja bisnis *equity brokerage* Bahana Sekuritas, baik pada segmen institusi maupun ritel. Peningkatan aktivitas perdagangan tersebut mendorong kenaikan nilai transaksi harian Bahana Sekuritas sebesar 20% secara tahunan (yoy) dibandingkan tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, peringkat Bahana Sekuritas di pasar juga mengalami peningkatan, dari posisi 35 menjadi posisi 32.

5. Dalam bisnis aset manajemen, BTIM mencatat pencapaian signifikan dengan berhasil naik ke peringkat kedua sebagai manajer investasi terbesar berdasarkan total AUM (termasuk KPD) dari posisi sebelumnya di peringkat kelima.
6. Dalam bisnis pembiayaan dan modal ventura, IFG melalui BAV mencatat kontribusi signifikan dengan menyalurkan pendanaan UMi *Direct* sebesar Rp76,7 miliar kepada 11.002 debitur yang tersebar di seluruh provinsi.
7. Dalam bisnis pengelolaan gedung, IFG melalui GNTU mempertahankan kinerja operasional gedung dengan *occupancy rate* mencapai 95,4%, jauh di atas rata-rata tingkat hunian gedung perkantoran di kawasan SCBD yang hanya sebesar 74%.
8. Dalam bisnis jasa konsultansi manajemen, IFG melalui PT Bahana Kapital Investa (BKI) terus melakukan upaya perbaikan kinerja operasional dan pencapaian pendapatan. Hingga akhir 2024, BKI membukukan pendapatan operasional sebesar Rp18,5 miliar. Meskipun masih terdapat ruang untuk pertumbuhan, angka ini mencerminkan fondasi awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui optimalisasi strategi bisnis di tahun mendatang.

Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

Sepanjang tahun 2024, IFG tidak hanya menghadapi tantangan internal, baik di tingkat *Holding* maupun di masing-masing Anggota *Holding*, tetapi juga harus merespons berbagai faktor eksternal yang menambah kompleksitas lingkungan bisnis. Selain itu, pada tahun keempatnya sebagai *Holding* di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menghadapi perubahan regulasi di industri keuangan dan asuransi yang menuntut penyesuaian secara cepat dan strategis. Berikut, tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan oleh IFG sepanjang tahun 2024:

A. Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan

Pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Anggota *Holding* asuransi umum dan penjaminan IFG, antara lain:

1. Industri asuransi umum masih marak dengan persaingan yang tidak sehat, pelanggaran terhadap ketentuan regulator, dan pencatatan pencadangan teknis yang belum menggunakan standar baku.
2. Kondisi makroekonomi, khususnya di sektor UMKM yang masih dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19, tercermin di dalam tingginya tingkat *loan at risk* kredit sektor UMKM yang mengakibatkan nilai klaim semakin meningkat di tahun 2024.
3. *Collection* SW belum sesuai dengan target potensi penyerapan unit kendaraan bermotor dikarenakan tidak tercapainya target realisasi daftar ulang

2024 also had a positive impact on the performance of Bahana Sekuritas' equity brokerage business, both in the institutional and retail segments. The increase in trading activity drove a 20% year-on-year (yoy) increase in Bahana Sekuritas' daily transaction value compared to 2023. As a result, Bahana Sekuritas' market ranking also improved from 35th to 32nd.

5. In the asset management business, BTIM recorded a significant achievement by successfully rising to second place as the largest investment manager based on total AUM (including KPD) from its previous position in fifth place.
6. In the financing and venture capital business, IFG through BAV made a significant contribution by disbursing UMi Direct funding of IDR76.7 billion to 11,002 debtors spread across all provinces.
7. In the building management business, IFG through GNTU maintained its operational performance with an occupancy rate of 95.4%, far above the average occupancy rate of office buildings in the SCBD area, which was only 74%.
8. In the management consulting services business, IFG, through PT Bahana Kapital Investa (BKI), continued to improve operational performance and revenue achievement. By the end of 2024, BKI recorded operating income of IDR18.5 billion. Although there is still room for growth, this figure reflects a solid foundation that can be further developed through the optimization of business strategies in the coming years

Challenges Faced and Its Solutions

Throughout 2024, IFG not only faced internal challenges, both at the holding company level and at each of its subsidiaries, but also had to respond to various external factors that added to the complexity of the business environment. Additionally, in its fourth year as a holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, IFG must overcome regulatory changes in the financial and insurance industries that required quick and strategic adjustments. The following are the challenges faced and solutions implemented by IFG throughout 2024:

A. General Insurance and Guarantee Business

In 2024, several issues were faced by IFG's general insurance and guarantee holding members, including:

1. The general insurance industry remained plagued by unhealthy competition, violations of regulatory provisions, and technical provisioning that does not yet comply with standard practices.
2. Macroeconomic conditions, particularly in the MSME sector, which was still recovering from the Covid-19 pandemic, were reflected in the high level of MSME loan at risk, which has led to an increase in claims in 2024.
3. Collection of Compulsory Contribution (SW) had not been in line with the potential absorption target for motor vehicles due to the failure to achieve the

kendaraan bermotor. Tak hanya itu, pembayaran santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan juga meningkat dari tahun sebelumnya.
4. Tantangan dalam bersaing di pasar dan penetrasi bisnis di sektor korporasi, khususnya pada ekosistem BUMN.
5. Pada tahun 2024, Nasre (Anggota *Holding* dari Askrindo) masih berada dalam kondisi insolven, sehingga masih dalam proses penyehatan keuangan.
6. Terbitnya POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.
7. Terbitnya POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah pasal 6 ayat 2 hingga 4, perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang melakukan penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah wajib membentuk unit usaha penjaminan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK berlaku atau pada 23 Desember 2025.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, IFG melakukan beberapa inisiasi, di antaranya:
1. Perbaikan kondisi industri asuransi membutuhkan peran OJK yang lebih tegas di dalam memastikan peraturan OJK diikuti oleh semua pelaku industri. Dalam hal ini, peran IFG membantu memberikan masukan kepada OJK terkait dengan praktik-praktik yang lazim dilakukan di industri asuransi dan juga memberikan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi yang sehat.
2. IFG, Askrindo, dan Jamkrindo bersama dengan BRI telah membentuk *joint task force* berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-41/MBU/02/2024 untuk penyusunan kajian bersama Optimalisasi KUR dengan menunjuk McKinsey dan LM FEB UI sebagai konsultan.
3. Meningkatkan *collection* SW secara intensif melalui upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan berkolaborasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait pada lima pilar keselamatan jalan dalam menerapkan langkah-langkah teknis keselamatan lalu lintas guna mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.
4. IFG mengimplementasikan pendekatan *group-to-group* dalam menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah BUMN, seperti PLN, Telkomsel, Injourney, dan KAI. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada hubungan dengan perusahaan induk, melainkan juga melibatkan seluruh ekosistem di dalam BUMN terkait.
5. IFG telah melakukan *mapping* dan *profiling key account* di ekosistem BUMN untuk menargetkan kerja sama *group-to-group* pada *key account.*
6. IFG menerapkan *sales transformation* melalui *Discipline in Execution* di Askrindo dan Jasindo.

target for motor vehicle re-registration. Furthermore, compensation payments to accident victims also increased from the previous year.
4. Challenges in competing in the market and business penetration in the corporate sector, particularly in the state-owned enterprise ecosystem.
5. In 2024, Nasre (a subsidiary of Askrindo) was still in insolvent and therefore still undergoing financial restructuring.
6. The issuance of POJK No. 20 of 2023 concerning Insurance Products Linked to Sharia Credit or Financing and Suretyship or Sharia Suretyship Products.
7. The issuance of POJK No. 36 of 2024 concerning the Operation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, Article 6, paragraphs 2 to 4, general insurance companies and Sharia general insurance companies that provide guarantees based on government assignments are required to establish a guarantee business unit no later than 6 (six) months from the effective date of the POJK or by December 23, 2025.

To address the above issues, IFG has initiated several measures, including:
1. Improving the condition of the insurance industry requires a stronger role for OJK in ensuring that OJK regulations are followed by all industry players. In this regard, IFG assists by providing input to OJK on common practices in the insurance industry and offering solutions to enhance the growth of a healthy insurance industry.
2. IFG, Askrindo, and Jamkrindo, together with BRI, have formed a joint task force based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-41/MBU/02/2024 to prepare a joint study on the Optimization of KUR by appointing McKinsey and LM FEB UI as consultants.
3. Intensifying efforts to improve SW collection by enhancing public compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB), through intensive collaboration with relevant stakeholders across the five pillars of road safety in implementing technical traffic safety measures to reduce traffic accident fatality rates.
4. IFG is implementing a group-to-group approach in establishing strategic partnerships with several state-owned enterprises (SOEs), such as PLN, Telkomsel, Injourney, and KAI. This approach is not limited to relationships with parent companies but also involves the entire ecosystem within the relevant SOEs.
5. IFG has conducted mapping and profiling of key accounts within the SOE ecosystem to target group-to-group collaboration with key accounts.
6. IFG is implementing sales transformation through Discipline in Execution at Askrindo and Jasindo. These

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penjualan, memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, dan menciptakan kerangka kerja yang *cohesive* untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan.

7. IFG memberikan pendampingan dalam proses penyehatan Nasre yang sudah berjalan sejak tahun 2023 melalui pembentukan *Task Force* Penyehatan Nasre yang memonitor pelaksanaan setiap inisiatif dalam rencana tindak atau rencana penyehatan keuangan, mendorong pemberian bisnis yang sehat dari anggota IFG, serta mendukung dilakukannya penunjukan konsultan aktuaria independen untuk memastikan ketepatan metode dan akurasi perhitungan liabilitas Nasre khususnya cadangan teknis dan MMBR.
8. Menindaklanjuti pemberlakuan POJK No. 20 tahun 2023, saat ini Askrindo dalam proses adendum PKS dengan mitra perbankan untuk mengakomodir perubahan yang diprasyaratkan dalam POJK tersebut, sehingga Askrindo dapat kembali memasarkan produk asuransi kredit.
9. Askrindo akan membentuk unit usaha penjaminan sebagai solusi dalam mematuhi POJK No. 36 tahun 2024, sehingga tetap dapat melakukan penjaminan penugasan pemerintah, yaitu KUR.

B. Bisnis Asuransi Jiwa

Sepanjang tahun 2024, IFG dihadapkan pada berbagai tantangan dalam bisnis asuransi jiwa yang dijalankan oleh Anggota *Holding*, IFG Life. Tantangan tersebut bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Sebagai respons untuk mengatasi tantangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan yang mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh IFG Life pada tahun 2024, yaitu:

1. Hasil investasi aset tanah/bangunan yang relatif kecil menyebabkan *negative spread* terhadap asumsi suku bunga *actuary* yang digunakan sehingga berdampak terhadap profitabilitas IFG Life;
2. Adanya dinamika dalam pencadangan, seperti pergerakan asumsi suku bunga acuan dan IBPA serta pergerakan liabilitas dari pengalihan portofolio migrasi Jiwasraya; dan
3. Pengembangan *new business* belum mencapai target yang ditetapkan serta *sales driver* dari masing-masing lini bisnis belum terealisasi sesuai perencanaan sehingga mempengaruhi aktivitas penjualan dan mengakibatkan pendapatan premi bisnis baru tidak sesuai target.

Menjawab tantangan tersebut, bersama dengan IFG telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi aset tanah/bangunan, baik melalui penjualan maupun sewa-menyewa melalui kerja sama dengan ekosistem grup IFG maupun ekosistem BUMN serta penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

steps aim to enhance sales capabilities, strengthen a results-oriented work culture, and create a cohesive framework to support the achievement of overall business objectives.

7. IFG provides assistance in the Nasre restructuring process, which has been ongoing since 2023, through the formation of a Nasre Restructuring Task Force that monitors the implementation of each initiative in the action plan or financial restructuring plan, promoting sound business practices among IFG members, and supporting the appointment of independent actuarial consultants to ensure the accuracy of methods and calculations of Nasre's liabilities, particularly technical reserves and Minimum Risk-Based Capital (Minimum RBC)
8. Following the implementation of POJK No. 20 of 2023, Askrindo is currently in the process of amending its cooperation agreement with banking partners to accommodate the changes required by the POJK, enabling Askrindo to resume marketing its credit insurance products.
9. Askrindo will establish a guarantee business unit as a solution to comply with POJK No. 36 of 2024, enabling it to continue providing government-assigned guarantees, namely KUR.

B. Life Insurance Business

Throughout 2024, IFG faced various challenges in the life insurance business operated by its subsidiary, IFG Life. These challenges stemmed from both internal and external factors. In response to these challenges, improvement measures were implemented to support the achievement of overall objectives.

Some of the challenges faced by IFG Life in 2024 include:

1. Relatively low returns on land/building investments resulted in a negative spread against the actuarial interest rate assumptions used, thereby impacting IFG Life's profitability;
2. Dynamics in reserves, such as changes in benchmark interest rate assumptions and IBPA, as well as liability movements from the transfer of the Jiwasraya migration portfolio; and
3. The development of new business has not reached the set target, and the sales drivers from each business line have not been realized as planned, thereby affecting sales activities and resulting in new business premium income that is not in line with the target.

In response to these challenges, various efforts have been made together with IFG, as follows:

1. Optimizing land/building assets, both through sales and leasing in collaboration with the IFG ecosystem and the state-owned enterprise ecosystem, as well as auction sales through the State Asset and Auction Service Office (KPKNL);

2. Optimalisasi aset investasi dengan melakukan realisasi capital gain dengan tetap memperhatikan realisasi ALM;
3. Melakukan evaluasi polis atas penerapan asumsi suku bunga acuan;
4. Mengembangkan produk berbasis proteksi;
5. Penawaran kembali program asuransi lainnya kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo;
6. Melakukan kolaborasi lebih intensif melalui PMO *Preferred Partnership Bancassurance* BTN untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penjualan produk *bancassurance* di BTN; dan
7. Menjalankan program-program unggulan dalam rangka penetrasi penjualan produk-produk baru untuk meningkatkan premi bisnis baru.

C. Bisnis Pasar Modal dan Investasi

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Anggota *Holding* bidang *capital market* dan investasi, baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, IFG juga telah dan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Gambaran tentang Prospek Usaha

Sebagaimana dikutip dari Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program-program yang dirumuskan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.

2. Optimizing investment assets by realizing capital gains while still paying attention to ALM realization;
3. Evaluating policies on the application of benchmark interest rate assumptions;
4. Developing protection-based products;
5. Reoffering other insurance programs to policyholders whose policies have matured;
6. Collaborating more intensively through BTN's PMO Preferred Partnership Bancassurance to achieve optimal results in the sale of bancassurance products at BTN; and
7. Implementing flagship programs to penetrate the market for new products to increase new business premiums.

C. Capital Market and Investment Business

Throughout 2024, the capital market and investment subsidiaries had to deal with several challenges, both internal and external. To address these challenges, IFG has also taken steps to support the achievement of overall objectives.

Overview of Business Prospects

As quoted from the Bank Indonesia Annual Meeting Book 2024, it is explained that overall, the programs formulated by the Government are expected to increase economic growth while maintaining macroeconomic stability.

Tabel Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024-2030
Table of Indonesia Economic Projection in 2024-2030

Indikator Indicator	Satuan Unit	2024	2025	2026	2030		
					Baseline	Optimis Optimistic	Super Optimis Super Optimistic
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	%	4,7-5,5	4,8-5,6	4,9-5,7	5,3-61	5,8-6,6	6,7-7,5
Inflasi IHK CPI Inflation	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Transaksi Berjalan Current Account	% PDB	-0,1 s.d -0,9 -0.1 to -0.9	-0,5 s.d -1,3 -0.5 to -1.3	-0,6 s.d -1,4 -0.6 to -1.4	-0,5 s.d -1,3 -0.5 to -1.3	-0,9 s.d -1,7 -0.9 to -1.7	-1,1 s.d -1,9 -1.1 to -1.9
Kredit Perbankan Banking Credit	%	10-12	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13

Sumber: Proyeksi Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia Projections

Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia yang selalu berubah dengan cepat dapat berpengaruh pada stabilitas dan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia perlu dikalibrasi untuk penguatan kerja sama bilateral dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dunia, seperti AS, India, dan Arab Saudi. Kedua, di samping program dan proyek Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, peran swasta baik perusahaan besar maupun UMKM, ekonomi kreatif, sektor jasa ekonomi dan keuangan digital, dan pariwisata

The rapidly changing geopolitical and economic dynamics of the world can affect Indonesia's economic stability and growth. Therefore, Indonesia's trade and investment policies need to be calibrated to strengthen bilateral cooperation with sources of global economic growth, such as the US, India, and Saudi Arabia. Secondly, in addition to government programs and projects to promote growth, the role of the private sector, including large companies, MSMEs, the creative economy, the digital economy and financial services, and tourism is crucial for driving economic growth

sangat penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kaitan ini, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan kepastian usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

and job creation. In this regard, improving the investment climate, developing infrastructure, and ensuring business certainty are key to economic growth and job creation.

Satu hal yang tak kalah penting ialah terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membentuk kredibilitas bagi kinerja perekonomian Indonesia yang diakui secara internasional. Dalam kaitan ini, koordinasi erat antara kebijakan Pemerintah, kebijakan Bank Indonesia, dan kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perekonomian global yang berubah cepat menjadi prasyarat dan landasan bagi keberhasilan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Equally important is maintaining macroeconomic stability and a sound financial system, which have established the credibility of Indonesia's economic performance that is recognized internationally. In this regard, close coordination between the policies of the Government, Bank Indonesia, and the Financial System Stability Committee (KSSK) in facing the rapidly changing geopolitical and global economic dynamics is a prerequisite and foundation for the success of the national economic transformation policy mix in achieving high and sustainable economic growth towards Indonesia Emas 2045.

Sasaran dan Strategi Perusahaan terkait Prospek Usaha di Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi fase penting yang akan menjadi landasan utama bagi Perusahaan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, rencana kerja tahun 2025 difokuskan pada penguatan fundamental bisnis dengan mengadopsi praktik terbaik, meningkatkan kapabilitas perusahaan, serta melakukan transformasi organisasi dan budaya untuk menciptakan organisasi dengan kinerja unggul *(high-performing organization).*

Mengacu pada 23 *strategic levers*, IFG menyusun berbagai inisiatif strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025. Di mana setiap inisiatif telah melalui analisis biaya dan manfaat *(cost-benefit analysis)* guna memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dari 23 *strategic levers*, IFG kemudian menyusun 19 Proyek Korporasi yang dibagi ke beberapa kategori sebagai berikut:

Proyek Korporasi terkait Optimasi Bisnis dan Operasional:

1. Pengoptimalan Program Penugasan Pemerintah;
2. Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan;
3. *Key Account Management* (KAM) dan Penguatan Kapasitas Bisnis Asuransi (*Joint Underwriting,* Reasuransi, dan *Risk Management Partner);*
4. Peningkatan dan Penguatan *Distribution Channel* (Digital, B2B2C, G2G);
5. Persiapan untuk Masuk ke dalam Pasar MTPL;
6. Digitalisasi Proses Bisnis;
7. Perbaikan layanan Asuransi Kesehatan untuk meningkatkan *customer experience* dan menurunkan klaim rasio (seperti melalui *telemedicine*);
8. Optimalisasi/Konsolidasi Bisnis Syariah dan Penjaminan di Ekosistem IFG;
9. Restrukturisasi dan Penyehatan Bisnis Reasuransi; dan
10. Optimalisasi Bisnis CMI

Company Objectives and Strategies related to Business Prospects in 2025

The year 2025 represents an important phase that will serve as the main foundation for the Company in the next five years. Therefore, the 2025 work plan focuses on strengthening business fundamentals by adopting best practices, improving company capabilities, and transforming the organization and culture to create a high-performing organization.

Referring to 23 strategic levers, IFG has developed various strategic initiatives to be implemented in 2025. Each initiative has undergone a cost-benefit analysis to ensure that the benefits outweigh the costs. From the 23 strategic levers, IFG then developed 19 Corporate Projects divided into the following categories:

Corporate Projects related to Business and Operational Optimization:

1. Optimization of Government Assignment Programs;
2. Development of a Guarantee Information System;
3. Key Account Management (KAM) and Strengthening of Insurance Business Capacity (Joint Underwriting, Reinsurance, and Risk Management Partner);
4. Improvement and Strengthening of Distribution Channels (Digital, B2B2C, G2G);
5. Preparation for Entry into the MTPL Market;
6. Business Process Digitization;
7. Improvement of Health Insurance services to enhance customer experience and reduce claim ratios (such as through telemedicine);
8. Optimization/Consolidation of Sharia Business and Guarantee in the IFG Ecosystem;
9. Restructuring and Restoring the Reinsurance Business; and
10. Optimization of CMI Business

Proyek Korporasi terkait Kepatuhan:
1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan;
2. Implementasi dan Optimalisasi Penerapan PSAK 117;
3. Pengembangan dan Implementasi ERP; dan
4. Program *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Proyek Korporasi terkait Transformasi Organisasi:
1. *Purpose Activation and Culture Transformation;*
2. *Talent Management and Development;*
3. Tindak Lanjut Kajian *Brand* Arsitektur; dan
4. Implementasi *Parenting Governance.*

Proyek Korporasi terkait Sinergi antar Anggota *Holding*:
1. Implementasi *Shared Services;* dan
2. Optimalisasi Aset dan Investasi secara terintegrasi.

Dengan strategi yang adaptif dan kolaboratif, serta komitmen terhadap pengembangan segmen industri yang inklusif dan berkelanjutan, IFG optimis mampu meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memperkuat kontribusinya dalam membangun fondasi yang tangguh dan berdaya saing global pada tahun 2025 dan seterusnya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

IFG memiliki keyakinan bahwa peningkatan nilai Perusahaan yang didasari oleh integritas akan meningkatkan nilai dan memperkukuh performa IFG dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta dalam upaya untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan norma hukum, serta berbagai nilai, dan norma lainnya. Oleh karenanya, sebagai bentuk komitmen kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, IFG memastikan terimplementasinya GCG didukung oleh struktur GCG yang memadai, antara lain mencakup:

Corporate Projects related to Compliance:
1. Improvement of Governance and Financial Management;
2. Implementation and Optimization of PSAK 117;
3. Development and Implementation of ERP; and
4. Environmental, Social, and Governance (ESG) Program.

Corporate Projects related to Organizational Transformation:
1. Purpose Activation and Culture Transformation;
2. Talent Management and Development;
3. Follow-up on Brand Architecture Review; and
4. Implementation of Parenting Governance.

Corporate Projects related to Synergy among members of the Holding Company:
1. Implementation of Shared Services; and
2. Integrated Asset and Investment Optimization.

With adaptive and collaborative strategies, as well as a commitment to inclusive and sustainable industry segment development, IFG is optimistic that it will be able to increase added value for stakeholders and strengthen its contribution in building a strong and globally competitive foundation in 2025 and beyond.

Implementation of Good Corporate Governance

IFG believes that increasing the value of the Company based on integrity will enhance the value and strengthen IFG's performance in providing added value to shareholders and stakeholders, as well as in its efforts to make a better contribution to the national economy, while continuing to pay attention to social values and legal norms, as well as various other values and norms. Therefore, as a form of commitment to shareholders and stakeholders, IFG ensures the implementation of GCG supported by an adequate GCG structure, including:

Organ Utama Main Organ	***Governance Soft Structure***
• RUPS • Dewan Komisaris • Direksi • Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi • GMS • Board of Commissioners • Board of Directors • Supporting Organizations of the Board of Commissioners and Board of Directors	• *Core Values* • IFG *Principle* (Piagam Korporasi, Pedoman Strategis, dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi) • Pedoman • Kebijakan • Prosedur • Petunjuk Teknis • Sistem Manajemen/Sistem Pengendalian Internal • Core Values • IFG Principle (Corporate Charter, Strategic Guidelines, and Integrated Governance Guidelines) • Guidelines • Policies • Procedures • Technical Guidelines • Management System/Internal Control System

Adapun, dalam rangka implementasi tata kelola terintegrasi di lingkungan IFG dan Anggota *Holding*, sepanjang tahun 2024, IFG telah melakukan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola terintegrasi, yaitu sebagai berikut:

In order to implement integrated governance within IFG and its holding company members, throughout 2024, IFG has carried out a series of activities related to the implementation of integrated governance, as follows:

1. Menetapkan susunan komite tata kelola terintegrasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 5 Februari 2024.

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengesahkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Keputusan Dewan Komisaris IFG Nomor 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), yang di dalamnya mencakup:
   a. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan;
   b. Kode Etik (*Code of Ethic*) Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   c. Kode Perilaku (*Code of Conduct*) Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   e. Evaluasi Kinerja dan Pembebanan Biaya; dan
   f. Kerahasiaan.
3. Dengan telah dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam angka 1, merujuk Pasal 20 POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan jo. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi IFG, Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi IFG telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat, yaitu pada:
   a. Tanggal 22 Mei 2024 dengan agenda Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Tanggal 9 Agustus 2024 dengan agenda:
      i) Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2024; dan
      ii) Penyampaian Kajian Parenting Model Grup IFG;
   c. Tanggal 27 Desember 2024 dengan agenda:
      i) Persiapan Audit untuk Tahun Buku 2024; dan
      ii) Persiapan Implementasi *Internal Control over Financial Reporting Framework* (ICOFR).
4. IFG telah melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Anggota *Holding* yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Terintegrasi atas penerapan model tata kelola (*governance structure*) berdasarkan *three lines model* sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk masing-masing kriteria dan klasifikasi risiko pada Anggota *Holding*.

1. Established the integrated governance committee structure in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 concerning the Establishment of an Integrated Governance Committee dated February 5, 2024.
2. The Integrated Governance Committee has ratified the Integrated Governance Committee Charter through Decree of IFG's Board of Commissioners Number 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 concerning the Integrated Governance Committee Charter of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), which includes:
   a. Basic Principles of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
   b. Code of Ethics of the Integrated Governance Committee;
   c. Code of Conduct of the Integrated Governance Committee;
   d. Requirements for Members of the Integrated Governance Committee;
   e. Performance Evaluation and Cost Allocation; and
   f. Confidentiality.
3. With the establishment of the Integrated Governance Committee as referred to in point 1, referring to Article 20 of POJK Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates in conjunction with IFG Integrated Governance Guidelines, the Integrated Governance Committee must hold at least one meeting every semester. In 2024, the IFG Integrated Governance Committee has held three meetings, namely on:
   a. May 22, 2024 with the agenda of Dissemination of Integrated Governance Guidelines;
   b. August 9, 2024 with the following agenda:
      i) Approval of the Integrated Governance Implementation Report for Semester I of 2024; and
      ii) Submission of the IFG Group Parenting Model Study;
   c. December 27, 2024 with the following agenda:
      i) Preparation for the 2024 Audit; and
      ii) Preparation for the Implementation of the Internal Control over Financial Reporting Framework (ICOFR).
4. IFG has disseminated the Integrated Governance Guidelines to holding company members that have been approved based on the Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 2 of 2023 concerning Integrated Good Corporate Governance Guidelines on the implementation of a governance structure based on the three lines model in accordance with the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, for each criterion and risk classification of holding company members.

5. Merujuk Pasal 45 POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, IFG memiliki kewajiban untuk menyusun laporan penilaian tata kelola terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Pada tahun 2024, IFG telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
   a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi bulan Desember 2023 melalui Surat Nomor 039/DIRUT/BPUI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024; dan
   b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi bulan Juni 2024 melalui Surat Nomor 284/DUM-SEKPER/S/BPUI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

   Dari pelaporan yang telah dilakukan, IFG memperoleh:
   a. Peringkat II untuk penilaian individu, yang mencerminkan bahwa IFG telah melakukan tata kelola yang secara umum baik; dan
   b. Peringkat II untuk penilaian konsolidasi karena konglomerasi keuangan IFG dinilai telah menerapkan tata kelola pada masing-masing entitas yang menghasilkan predikat baik secara konsolidasi.
6. Merujuk Pasal 46 POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, IFG memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi kepada OJK, selambatnya 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir serta mempublikasikan laporan dimaksud dalam home page perusahaan. Pada tahun 2024, IFG telah:
   a. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023 kepada OJK melalui Surat Nomor 197/DIRUT-SEKPER/S/BPUI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024; dan
   b. Mempublikasikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahunan 2023 di home page IFG, https://ifg.id/.

7. Merujuk Pasal 73 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, IFG wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi secara semester dan tahunan yang menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan yang dituangkan dalam bab tersendiri.

   Pada tahun 2024, IFG telah menyusun Laporan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi semester I tahun 2024, yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Manajemen IFG Triwulan II Tahun 2024. Laporan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 010/DIRKOM-DAP/S/BPUI/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Triwulan II Tahun 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Laporan Tata Kelola Terintegrasi IFG posisi semester II tahun 2024 juga telah disampaikan secara terpisah melalui aplikasi *Virtual Data Room* (VDR) Kementerian BUMN.

5. Referring to Article 45 of POJK Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, IFG is required to prepare an integrated governance assessment report every semester for the positions at the end of June and December. In 2024, IFG has submitted to the Financial Services Authority:
   a. Integrated Governance Implementation Report for the position in December 2023 through Letter Number 039/DIRUT/BPUI/II/2024 dated February 15, 2024; and
   b. Integrated Governance Implementation Report for June 2024 through Letter Number 284/DUM-SEKPER/S/BPUI/VIII/2024 dated August 12, 2024.

   From the reports submitted, IFG obtained:
   a. Rank II for individual assessment, reflecting that IFG has implemented governance that is generally good; and
   b. Rank II for consolidated assessment because the IFG financial conglomerate has been assessed as having implemented governance in each entity that resulted in a good rating on a consolidated basis.
6. Referring to Article 46 of POJK Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, IFG is required to prepare and submit an annual report on the implementation of integrated governance to the OJK no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year and publish the report on the company's home page. In 2024, IFG has:
   a. Submitted the 2023 Annual Report on the Implementation of Corporate Governance to the OJK through Letter Number 197/DIRUT-SEKPER/S/BPUI/V/2024 dated May 30, 2024; and
   b. Published the Annual Report on the Implementation of Corporate Governance for 2023 on IFG's home page, https://ifg.id/.

7. Referring to Article 73 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises, IFG is required to prepare and submit Integrated Governance Reports on a semi-annual and annual basis, which are integrated with the quarterly and annual reports and presented in a separate chapter.

   In 2024, IFG has prepared an Integrated Governance Report for the first semester of 2024, which is integrated with the IFG Management Report for the Second Quarter of 2024. The report was submitted through Letter Number 010/DIRKOM-DAP/S/BPUI/VII/2024 dated July 31, 2024, regarding the Submission of the Second Quarter Report of 2024 of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The IFG Integrated Governance Report for the second semester of 2024 has also been submitted separately through the Virtual Data Room (VDR) application of the Ministry of State-Owned Enterprises.

8. Sebagaimana telah dibahas juga sebelumnya dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 27 Desember 2024, sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri BUMN nomor S-491/MBU/09/2023 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP 2024, khususnya terkait arahan untuk pelaksanaan reviu ICOFR bagi BUMN, IFG telah melakukan persiapan implementasi ICOFR sebagai berikut:

   a. Menginisiasi implementasi ICOFR sesuai dengan ruang lingkup berdasarkan Surat Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor S-4/DKU.MBU/02/2024 perihal Penyampaian Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu ICOFR atau Diagnostik ICOFR bagi BUMN Sistemik A dan Sistemik B dengan dukungan dari PT Deloitte Konsultan Indonesia (Deloitte);

   b. Melakukan diagnosis melalui 4 (empat) tahap, yaitu Tahap I - Memahami Struktur Korporasi, Tahap II - Memahami Laporan Keuangan Perusahaan, Tahap III - Menjalankan Prosedur Diagnosis ICOFR, dan Tahap IV - Menyusun Roadmap Perbaikan Gap Diagnosis; dan

   c. Menyampaikan Laporan Final Hasil Diagnostik ICOFR Tahap I sampai Tahap IV yang telah dibahas dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi kepada Kementerian BUMN.

   IFG saat ini sedang melakukan tahapan perancangan, termasuk penentuan ruang lingkup dan *timeline*, sesuai dengan Petunjuk Teknis ICOFR BUMN yang keluar di November 2024. Sebagai tambahan, Dewan Komisaris IFG pada tanggal 23 Desember 2024 menyampaikan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kesiapan IFG menjalankan *roadmap* implementasi ICOFR yang meminta agar tenggat waktu implementasi ICOFR di IFG ditangguhkan dengan mengikuti timeline yang berlaku untuk BUMN *Tier* 2, mengingat kompleksitas remediasi atas *gap* diagnosis yang sedang berjalan, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dampak signifikan atas implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 Kontrak Asuransi pada proses bisnis Anggota *Holding* yang bergerak di bidang asuransi.

9. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, pada tahun 2024, IFG mengikuti pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Komisi Informasi Pusat) merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, IFG dikualifikasikan sebagai badan publik yang "Cukup Informatif" dalam kategori BUMN.

8. As previously discussed in the Integrated Governance Committee Meeting on December 27, 2024, as a follow-up to the Minister of State-Owned Enterprises' letter number S-491/MBU/09/2023 concerning Shareholders' Aspirations for the Preparation of the 2024 Budget Plan, particularly regarding the guidance for the implementation of the ICOFR review for state-owned enterprises, IFG has conducted the following preparations for the implementation of ICOFR:
   a. Initiated the implementation of ICOFR in accordance with the scope outlined in the Deputy for Finance and Risk Management's Letter No. S-4/DKU.MBU/02/2024 regarding the Submission of the Scope for the Implementation of the ICOFR Review or ICOFR Diagnostic for Systemic A and Systemic B SOEs, with support from PT Deloitte Konsultan Indonesia (Deloitte);
   b. Conducted a diagnosis through 4 (four) stages, namely Stage I - Understanding the Corporate Structure, Stage II - Understanding the Company's Financial Statements, Stage III - Implementing the ICOFR Diagnosis Procedure, and Stage IV - Preparing a Roadmap for Diagnosis Gap Improvement; and
   c. Submitted the Final Report on the Results of ICOFR Diagnosis Stages I to IV, which has been discussed with the Board of Commissioners, Audit Committee, and Board of Directors to the Ministry of State-Owned Enterprises.

   IFG is currently in the design stage, including determining the scope and timeline, in accordance with the Technical Guidelines for ICOFR for State-Owned Enterprises issued in November 2024. In addition, on December 23, 2024, the IFG Board of Commissioners submitted the Response of the Board of Commissioners/Supervisory Board on IFG's readiness to implement the ICOFR implementation roadmap, requesting that the deadline for ICOFR implementation at IFG be postponed in accordance with the timeline applicable to Tier 2 SOEs, considering the complexity of the ongoing gap diagnosis remediation, the need to enhance human resource capacity, and the significant impact of the implementation of Financial Accounting Standards (PSAK) 117 Insurance Contracts on the business processes of holding company members operating in the insurance sector.

9. In order to apply the principle of transparency, in 2024, IFG will participate in the monitoring and evaluation of public information disclosure by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia in accordance with the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Based on the results of monitoring and evaluation as stipulated in the Decision of the Central Information Commission of the Republic of Indonesia Number 53/KEP/KIP/XII/2024 concerning Amendments to the Decision of the Central Information Commission of the Republic of Indonesia Number 52/KEP/KIP/XII/2024 concerning the Results of Monitoring and Evaluation of Public Information Disclosure in Public Agencies in 2024, IFG was qualified

10. Mengenai pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), sehubungan dengan pencabutan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*, maka merujuk Surat Plh. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pelaksanaan Asesmen GCG BUMN Tahun 2023, pada tahun 2024 IFG telah melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola secara terintegrasi dengan menggunakan indikator OJK.

Perubahan Komposisi Direksi 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) Tahunan tanggal 22 Januari 2025. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pantro Pander Silitonga sebagai Direktur Bisnis Perusahaan. Pantro Pander Silitonga diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi di Dewan Ekonomi Nasional pada 23 Desember 2024, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada 17 Desember 2024. Dengan pengangkatan tersebut, Pantro Pander Silitonga secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bisnis IFG.

as a public agency that is “Fairly Informative” in the state-owned enterprise category.

10. Regarding the assessment of the implementation of good corporate governance (GCG), in connection with the revocation of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance, reference is made to the Letter of the Acting Deputy Minister of Finance Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024 concerning the Implementation of GCG Assessment for State-Owned Enterprises. Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2024, regarding the Implementation of GCG Assessment for State-Owned Enterprises in 2023, in 2024 IFG conducted an assessment of the implementation of integrated corporate governance using OJK indicators.

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2024

Throughout 2024, there have been changes in the composition of the Board of Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on January 22, 2025. The changes in the composition of the Board of Directors were made based on the Company’s needs. The 2024 Annual GMS decided to honorably dismiss Pantro Pander Silitonga as the Company’s Business Director. Pantro Pander Silitonga was appointed as Executive Director for Monitoring and Evaluation of Priority Economic Programs at the National Economic Council on December 23, 2024, in accordance with Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 88/M of 2024 concerning the Appointment of the National Economic Director, which was enacted on December 17, 2024. With this appointment, Pantro Pander Silitonga is no longer serving as Business Director of IFG.

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Direksi Perusahaan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM, 1 (satu) orang Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

As of the date of this annual report, the Company's Board of Directors consists of 5 (five) persons, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Director of Human Capital, 1 (one) Technical Director who also serves as Acting Business Director, and 1 (one) Director of Finance. The composition and basis for the appointment of the Company's Board of Directors is shown in the table below.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Director of HC	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in the capacity of General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis Technical Director concurrently Acting Business Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No SK-313/MBU/09/2021 Tanggal : 20 September 2021 dan Surat Dewan Komisaris Nomor: 57/DK-BPUI/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Decision of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-313/MBU/09/2021 dated September 20, 2021, and the Board of Commissioners' Letter No. 57/DK-BPUI/XII/2024 dated December 31, 2024.
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in the capacity of General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

The entire Board of Directors is committed to completing this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of shareholders and other stakeholders.

Apresiasi

Atas pencapaian kinerja IFG sepanjang tahun 2024, Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, Direksi mengucapkan terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang terus terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Komisaris atas peran aktifnya dalam memberikan pengawasan dan nasihat yang konstruktif, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Direksi juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi, kerja keras, dan semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan dalam mewujudkan kinerja optimal di tahun 2024. Semoga pencapaian ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Appreciation

For the achievement of IFG's performance throughout the year, the Board of Directors expresses its deepest appreciation and gratitude to all parties who have made their best contributions. To the shareholder and stakeholders, the Board of Directors would like to extend gratitude for their continued support, trust and cooperation. Appreciation is also extended to the Board of Commissioners for its active role in providing constructive supervision and advice, so that the Company can be managed effectively and accurately.

The Board of Directors also conveys its highest appreciation to all levels of management and employees for their dedication, hard work, and solidarity that have been shown in realizing optimal performance in 2024. May these achievements continue to improve and become a solid foundation for sustainable growth in the years to come.

Jakarta, 17 Juni 2025
Atas nama Direksi
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Jakarta, June, 17, 2025
On behalf of the Board of Directors
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



Hexana Tri Sasongko
Direktur Utama
President Director


IFG



3

Profil Perusahaan

Company Profile

IFG terus melakukan perbaikan fundamental dan berupaya membangun bisnis yang berkelanjutan serta lebih kompetitif dengan mengembangkan kapabilitas di luar penugasan Pemerintah.

IFG continues to make fundamental improvements and seeks to build a sustainable and more competitive business by developing capabilities beyond Government assignments.

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan
Company Name

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Nama *Holding*
Holding Name

Indonesia Financial Group (IFG)

Bentuk *Holding*
Type of Holding

BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi
Holding Company for Insurance, Guarantee and Investment SOE

Bentuk dan Status Badan Usaha
Type and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Holding Company for Insurance, Guarantee and Investment SOE

Tanggal dan Tahun Pendirian
Date and Year of Establishment

17 April 1973
April 17, 1973


IFG

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

1. **Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.**
2. **Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, yang dibuat dihadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508.**

1. Government Regulation of Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the National Private Business Development.
2. Deed No. 11 dated April 17, 1973 drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973 Supplement No. 508.

Dasar Hukum Pembentukan *Holding*
Legal Basis for the Establishment of Holding

1. **PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.**
2. **PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Indonesia Financial Group, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) Askrindo, Perusahaan Perseroan (Persero) Jasindo, Perusahaan Perseroan (Persero) Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Jamkrindo.**

1. Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development, the purpose and objective of IFG is to carry out activities as a holding company in the field of finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including micro, small and medium enterprises (UMKM), and optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Indonesia Financial Group, derived from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in Askrindo (Persero), Jasindo (Persero), Jasa Raharja (Persero), and Jamkrindo (Persero).

Bidang Usaha
Line of Business

Aktivitas perusahaan holding termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain, aktivitas kantor pusat, investasi langsung maupun tidak langsung, aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset, dan aktivitas konsultasi manajemen.
The activities of holding companies include establishing or participating in other entities, head office activities, direct and indirect investments, corporate/asset restructuring activities, and management consulting activities.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (Akta Nomor 4 Tanggal 4 November 2021)
100% Owned by the Republic of Indonesia (Deed Number 4 Dated November 4, 2021)

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp93.719.537.000.000
IDR93.719.537.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid Capital

Rp90,163 triliun
IDR90.163 trillion

Kelompok Usaha
Business Group

1. **Anggota *Holding* Bidang Asuransi dan Penjaminan:**
   Member of Insurance and Guarantee Holding:
   a. **PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)**
   b. **PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)**
   c. **PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)**
   d. **PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)**
   e. **PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)**
2. **Anggota *Holding* Bidang Keuangan dan Pasar Modal:**
   Member of Finance and Capital Market Holding
   a. **PT Bahana Sekuritas (BS)**
   b. **PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)**
   c. **PT Bahana Artha Ventura (BAV)**
   d. **PT Bahana Kapital Investa (BKI)**
   e. **PT Bahana Mitra Investa (BMI)**
3. **Anggota *Holding* Bidang Non Keuangan**
   Member of Non-Financial Holding
   a. **PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)**

Alamat
Address

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3,
Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3,
Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190

Telephone
Telephone

(+62 21) 50890929

Surel
Email

info@ifg.id

***Website* Perusahaan**
Company's Website

www.ifg.id

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operation Area

Seluruh wilayah di Indonesia
All regions in Indonesia

Jumlah Karyawan
Total Employees

308 (orang) per 31 Desember 2024
308 (people) as of December 31, 2024

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

SEJARAH PENDIRIAN DAN SEKILAS PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) pertama kali didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis, BPUI melebarkan bisnis layanan keuangannya di bidang investasi pasar modal, *investment banking*, dan *securities trading* melalui PT Bahana Sekuritas (BS), melakukan *joint venture* dengan Trust Company of the West dengan membentuk perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), layanan pendampingan dan pembiayaan UMKM melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV), layanan *property management* melalui PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), serta layanan penasihat investasi dan keuangan melalui BKI.

Memasuki tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya di bidang keuangan dan investasi, diperlukan perubahan maksud dan tujuan dari pendirian BPUI. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, maksud dan tujuan dari BPUI adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPUI melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:

1. aktivitas perusahaan *Holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain;
2. aktivitas kantor pusat;
3. investasi langsung maupun tidak langsung;
4. aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
5. aktivitas konsultasi manajemen.

Selain kegiatan usaha utama, BPUI dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

HISTORY OF ESTABLISHMENT AND OVERVIEW OF COMPANY DEVELOPMENT

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) was first established in 1973 with the aim of fostering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia by providing assistance and working capital. Along with business development and needs, BPUI expanded its financial services business in the fields of capital market investment, investment banking, and securities trading through PT Bahana Sekuritas (BS). It conducted a joint venture with Trust Company of the West by forming an investment management company PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), mentoring and financing services for MSMEs through PT Bahana Artha Ventura (BAV), property management services through PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), and investment and financial advisory services through BKI.

As we enter 2020, to support the Government's policy in national economic development, especially in the field of finance and investment, it is necessary to change the purpose and objectives of the establishment of BPUI. In this regard, based on Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 1973 concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development, the purpose and objective of BPUI is to conduct activities as a Holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including MSMEs, and optimizing the utilization of resources based on the principles of good corporate governance. In order to achieve these aims and objectives, BPUI carries out the main business activities, namely:

1. Activities in Holding companies include establishing or participating in other entities;
2. Activities in head office;
3. Direct and indirect investment;
4. Corporate/asset restructuring activities; and
5. Management consulting activities.

In addition to the main business activities, BPUI may conduct other business activities in order to optimize the utilization of its resources.

Selanjutnya, di tahun 2020, Pemerintah melalui PP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, menetapkan BPUI sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat nomor S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notarial berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS BPUI. Dengan penetapan tersebut, maka BPUI resmi menjadi *Holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), di samping Anggota *Holding* yang telah ada sebelumnya.

Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya BPUI sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, BPUI melakukan transformasi *brand* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Perubahan *brand* dan logo tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri BUMN sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Pendirian IFG Life sebagai bagian dari Anggota *Holding* IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun. IFG mendukung prioritas BUMN dalam mempercepat pembangunan nasional dan berkomitmen untuk memenuhi mandatnya dengan kepatuhan penuh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang *prudent* dan *accountable*.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak awal didirikan pada tahun 1973 hingga saat ini, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI. Namun, seiring dengan ditetapkannya PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, *Holding* ditunjuk oleh Pemerintah sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi sehingga Perusahaan melakukan transformasi *brand* sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Furthermore, in 2020, through Government Regulation Number 20 of 2020 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, the Government established BPUI as a SOE Holding Insurance, Guarantee, and Investment. After the issuance of the Government Regulation, the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company, followed up by issuing a Decree of the Minister of SOEs. It is stated in letter number S-203/MBU/03/2020 concerning Approval of Acceptance of Share Transfers dated March 31, 2020, which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of the Meeting Decision of the Minister of SOEs as the GMS of BPUI. With this determination, BPUI officially became a Holding of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), in addition to the existing Holding Members.

In the same year as the establishment of BPUI as an Insurance, Guarantee and Investment Holding, BPUI transformed its brand and logo into Indonesia Financial Group (IFG). The brand and logo changes have received approval from the Minister of SOEs as stated in letter number S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020.

Furthermore, in December 2020, the Government together with the House of Representatives of the Republic of Indonesia approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). The establishment of IFG Life as part of IFG's Holding Members became IFG's business map for business portfolios in the life insurance, health and pension fund sectors IFG supports the priorities of SOEs in accelerating national development and is committed to fulfilling its mandate in full compliance with the principles of good corporate governance in order to create prudent and accountable corporate management.

NAME CHANGE INFORMATION

Since its establishment in 1973 until the present, the Company has never changed its name from PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or BPUI. However, along with the enactment of Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020, the Holding was appointed by the Government as an Insurance, Guarantee, and Investment Holding so that the Company carried out a brand transformation as stated in the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

1973

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) didirikan pada tahun 1973 memiliki misi untuk membina pengusaha-pengusaha UMKM.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) was established in 1973 with a mission to foster entrepreneurs of MSMEs.

1993

Pada tahun 1993 *Holding* melakukan pengembangan usaha di bidang pasar modal, di mana kemudian *Holding* membentuk Anggota *Holding* di bidang modal ventura dan pembinaan usaha kecil dan menengah BAV, di bidang pasar modal dan pasar uang (PT Bahana Securities), dan di bidang manajemen investasi BTIM.
In 1993, the Holding expanded its business in the capital market sector, where it formed Members of the Holding in the venture capital and small and medium enterprise development sector BAV, in the capital and money market sector (PT Bahana Securities), and in the investment management sector BTIM.

2004

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004, *Holding* mengakuisisi PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Gedung *(building management).*
Furthermore, on December 23, 2004, the Holding acquired PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), a company engaged in building management.

2018

Pada bulan Juni 2018, BPUI melakukan aktivasi PT Bahana Kapital Investa (BKI) sebagai salah satu Anggota *Holding* yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasehat keuangan *(advisory).*
In June 2018, BPUI activated PT Bahana Kapital Investa (BKI) as one of its Member of Holding engaged in investment and financial *advisory* services.

2020

1. **PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional merupakan landasan hukum penunjukan *Holding* sebagai *Holding* di bidang Keuangan dan investasi di mana kemudian dengan PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Indonesia Financial Group sebagai landasan hukum penunjukan *Holding* sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan sebagai tambahan dari peran *Holding* selaku *Holding* dibidang Keuangan dan Investasi.**

   Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui Surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Indonesia Financial Group maka *Holding* resmi menjadi *Holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disamping Anggota *Holding* yang sudah ada yaitu Bahana Sekuritas, BTIM, BAV, GNTU dan BKI.

2. **Sehubungan dengan pembentukan *Holding* tersebut dan sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).**

3. **Di bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun.**

1. Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development is the legal basis for the appointment of Holding as a Holding in Finance and investment where later with Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Capital of Indonesia Financial Group as a legal basis for the appointment of Holding as a Holding of SOEs in Insurance and Guarantee as an addition to the role of Holding as a Holding in the field of Finance and Investment.

   After the issuance of the Government Regulation (PP) the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company followed up by issuing a Decree of the Minister of SOEs through Letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval of Acceptance of Share Transfer dated March 31, 2020, which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Meeting Resolution of the Minister of SOEs as the GMS of Indonesia Financial Group, the Holding officially became the Holding of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) in addition to the existing Holding Members, namely Bahana Sekuritas, BTIM, BAV, GNTU and BKI.

2. In connection with the establishment of the Holding and in accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).

3. In December 2020, the government and Commission VI of the House of Representatives approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish IFG Life. The establishment of IFG Life as part of IFG becomes IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors.



2021

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-387/NB.2/2021, Indonesia Financial Group (IFG) melalui entitas anggota holding, IFG Life, secara resmi menerima pengalihan polis eks Jiwasraya. IFG menerima penugasan dari Pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan Jiwasraya, dan penerimaan pengalihan polis ini merupakan salah satu langkah strategis dalam melaksanakan penugasan tersebut. Sejalan dengan itu, IFG Life telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemegang polis eks Jiwasraya guna memastikan proses transisi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Based on the Financial Services Authority (OJK) letter Number S-387/NB.2/2021, Indonesia Financial Group (IFG) through its holding company, IFG Life, has officially accepted the transfer of former Jiwasraya policies. IFG has been tasked by the Government to carry out restructuring as part of the rescue of Jiwasraya, and the acceptance of this policy transfer is one of the strategic steps in fulfilling that mandate. In line with this, IFG Life has conducted outreach to all former Jiwasraya policyholders to ensure the transition process is carried out transparently and accountably.

2022

1. **Terbit POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Indonesia Financial Group.**
2. **Sebagai Ketua *Project Management Office* (PMO) Percepatan Integrasi Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, IFG melakukan penandatangan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*/MoU) rencana kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun antara IFG dan 8 BUMN pendiri dana pensiun.**

1. POJK Number 13/POJK.05/2022 was issued concerning the Supervision of Indonesia Financial Group.
2. As the Chairperson of the Project Management Office (PMO) for the Integration Acceleration of SOE Pension Fund Management, IFG signed a Memorandum of Understanding (MoU) for a cooperation plan for the management of pension fund investment assets between IFG and 8 SOE pension fund founders.

2024

Pada tanggal 26 Juni 2024 IFG melalui IFG Life melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) penyelesaian akuisisi 80% saham Mandiri Inhealth. Kepemilikan saham yang dibeli oleh IFG Life terdiri dari 60% saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 10% saham milik PT Kimia Farma Tbk, dan 10% saham milik IFG.

On June 26, 2024, IFG, through IFG Life, signed a Deed of Sale and Purchase (AJB) to complete the acquisition of 80% of Mandiri Inhealth's shares. The shares purchased by IFG Life consist of 60% owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 10% owned by PT Kimia Farma Tbk, and 10% owned by IFG.

2023

1. **Pada 30 November Fundraising internal IFG sebesar Rp1,46 triliun yang telah disetorkan kepada IFG Life**
2. **Pada tanggal 29 Desember Program Penyelamatan Pemegang Polis Jiwasraya Berakhir, IFG Life Menerima Pengalihan Polis Hasil Restrukturisasi**
3. **Pada 31 Desember Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,00 triliun yang telah disetorkan kepada IFG Life**

1. On November 30, IFG's internal fundraising amounted to IDR1.46 trillion which has been deposited to IFG Life.
2. On 29 December Jiwasraya Policyholder Rescue Program Ends, IFG Life Receives Transfer of Restructured Policy Results
3. On December 31, State Equity Participation amounting to IDR3.00 trillion which has been deposited to IFG Life



MAKNA LOGO PERUSAHAAN
MEANING OF COMPANY'S LOGO



Logo perusahaan telah diatur berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Berdasarkan ketentuan tersebut, logo Perusahaan memiliki pengertian sebagai berikut:

TIPOGRAFI:
Logo IFG telah didesain untuk membangkitkan kehadiran yang bermakna. Garis-garis sudut logo memberikan kesan kontemporer dari sebuah organisasi yang berorientasi ke depan.

IKONOGRAFI:
Perangkat yang saling berhubungan dengan huruf "I" melambangkan gerak dan aspirasi ke depan.

WARNA:
Merah mewakili dinamika, kekuatan, dan semangat. Warna merah yang kami gunakan sama persis dengan warna merah bendera Indonesia yang mewujudkan kebanggaan kami akan warisan nasional.

The company's logo has been regulated based on the Ministry of State-owned Enterprises' Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG). Based on these provisions, the Company's logo has the following meaning:

TYPOGRAPHY:
The IFG logo has been designed to evoke a meaningful presence. The angular lines of the logo give a contemporary impression of a forward-looking organization.

ICONOGRAPHY:
The interconnected device with the letter "I" symbolizes forward motion and aspiration.

COLOR:
Red represents dynamism, strength, and passion. The red color we use is exactly the same as the red color of the Indonesian flag which embodies our pride in our national heritage.

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA
LINE OF BUSINESS AS WELL AS PRODUCTS AND SERVICES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Akta No. 25 Tanggal 4 April 2024, disebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the Company's Articles of Association as stated in Deed No. 25 Dated April 4, 2024, states that the purpose and objective of the company is to perform activities as a Holding company in the field of finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including MSMEs, and optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi saat ini memiliki 11 (sebelas) Anggota *Holding*, yang terdiri dari 5 (lima) Anggota *Holding* yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) Anggota *Holding* yang bergerak di bidang keuangan dan pasar modal, serta 1 (satu) Anggota *Holding* di bidang non keuangan. Melalui 11 (sebelas) Anggota *Holding*, IFG melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 11 (sebelas) Anggota *Holding*nya, adalah sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES

As an SOE Holding Insurance, Guarantee and Investment which currently has 11 (eleven) Holding Members, consisting of 5 (five) Holding Members engaged in insurance and guarantee and 5 (five) Holding Members engaged in finance and capital markets, as well as 1 (one) Holding Member in the non-financial sector. Through its 11 (eleven) Holding Members, IFG conducts business activities in insurance, guarantees, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses including office building management.

The business activities carried out by the Company through its 11 (eleven) subsidiaries are as follows:

Kegiatan Usaha Business Activities	**Telah/Belum Dijalankan** Implemented/Not Implemented	**Keterangan** Description
Jasa Keuangan dan Pasar Modal Financial Services and Capital Markets	√	Telah dijalankan melalui Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Bahana Mitra Investa (BMI). It has been implemented through Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), and PT Bahana Mitra Investa (BMI).
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reassurance	√	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). It has been implemented through PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Penjaminan Guarantee	√	Telah dijalankan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). It has been implemented through PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asuransi Jiwa dan Kesehatan Life and Health Insurance	√	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). It has been implemented through PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).
Jasa Keuangan Non Keuangan Non-Financial Services	√	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

√ = telah dijalankan / x = belum dijalankan
√ = implemented / x = not yet implemented

PRODUK DAN LAYANAN

IFG menawarkan jenis-jenis produk dan jasa yang dimiliki melalui 11 (sebelas) Anggota *Holding*, sebagai berikut:

PRODUCTS AND SERVICES

IFG offers its products and services through 11 (eleven) Holding Members, as follows:

Jenis Produk dan Layanan Type of Products and Services	**Keterangan** Description
Produk Product(s)	
Reksa Dana Mutual Fund	IFG melalui PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG memiliki beragam produk Reksadana baik Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Ekuitas, Reksadana Campuran, Reksadana Index, Reksadana Terproteksi, Reksadana Penyertaan Terbatas/ Investasi Alternatif, dan KPD IFG through PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG has a variety of Mutual Fund products including Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Equity Mutual Funds, Balanced Mutual Funds, Index Mutual Funds, Protected Mutual Funds, Limited Participation/ Alternative Investment Funds, and Fund Management Contract (KPD).
Pendanaan UMI Ultra Micro Financing	BAV sebagai *agent of Development* UMKM menyalurkan program UMi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada Koperasi untuk mendukung pengusaha mikro. BAV as an agent of Development MSME channels the UMi program of the Government Investment Center (PIP) to Cooperatives to support micro entrepreneurs.
Pendanaan PMVD Regional Venture Capital Company (PMVD) Funding	Melalui Anggota *Holding* Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia, maka BAV memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang ada di setiap daerah. Through its Regional Venture Capital Company (PMVD) subsidiaries spread across 25 provinces in Indonesia, BAV can strengthen its network and expand the base of MSMEs in each region.
Pendanaan PMVJP Short-term Venture Capital Company PMVJP) Funding	PMVJP merupakan pembiayaan Anjak Piutang/*Invoice Financing* yaitu jasa pengalihan piutang (hak tagih) jangka pendek yang dimiliki oleh Nasabah kepada BAV. Short-term Venture Capital Company (PMVJP) is Factoring/Invoice Financing, which is short-term receivables transfer service owned by the Customer to BAV.
Layanan Service(s)	
Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee	• **Jamkrindo:** Penjaminan Konsumtif, Penjaminan Produktif, KUR, PEN dan Suretyship • **Askrindo:** KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, Asuransi Umum, LC/SKBDN dan PEN • **Jasindo:** *Cargo, Aviation, M.Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship* dan *Miscellaneous* • **Jasa Raharja:** IW dan SW • **Jamkrindo:** Consumptive Guarantee, Productive Guarantee, People's Business Credit (KUR), PEN and Suretyship • **Askrindo:** People's Business Credit (KUR), AKK, AKM, Trade Credit Insurance (Askredag), Surety, KBG, General Insurance, LC/SKBDN and PEN • **Jasindo:** Cargo, Aviation, Marine Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous • **Jasa Raharja:** Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contribution (SW)
Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Brokerage Services for trading equity securities (shares)	Bahana Sekuritas (BS) memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dengan strategi meningkatkan volume transaksi untuk memperbesar *market shares* dan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Bahana Sekuritas (BS) is licensed as a Broker-Dealer with a strategy to increase transaction volume to enlarge market shares and to increase business income.
Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Brokerage Services for trading equity securities (shares)	Bahana Sekuritas (BS) memiliki layanan Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS). Hal ini selaras dengan penetapan POJK No. 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk Bahana Sekuritas (BS) has Debt and Sukuk Securities Brokerage Services (EBUS). This is in line with the stipulation of POJK No. 9/POJK.04/2019 concerning Broker-Dealers for Debt Securities and Sukuk.
Penjamin Emisi Efek Underwriter	Bahana Sekuritas (BS) melakukan penjaminan emisi efek untuk saham dan utang. Bahana Sekuritas (BS) underwrites securities for shares and debt.
Penasihat Keuangan Financial Advisor	PT Bahana Kapital Investa (BKI) merupakan Anggota *Holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan *(financial advisory)* dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan nama PT Bahana Mitra Usaha. Seiring perkembangannya, BKI memiliki layanan jasa konsultasi meliputi *Feasibility Study, Merger and Acquisition, Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Venture, Risk Management,* dan *Leverage Buyout.* PT Bahana Kapital Investa (BKI) is a member of the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Holding company, which is engaged in investment and financial advisory services and has been operating since 1993 under the name PT Bahana Mitra Usaha. As part of its growth, BKI offers a range of consulting services, including Feasibility Studies, Mergers and Acquisitions,Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Ventures, Risk Management, and Leveraged Buyouts.

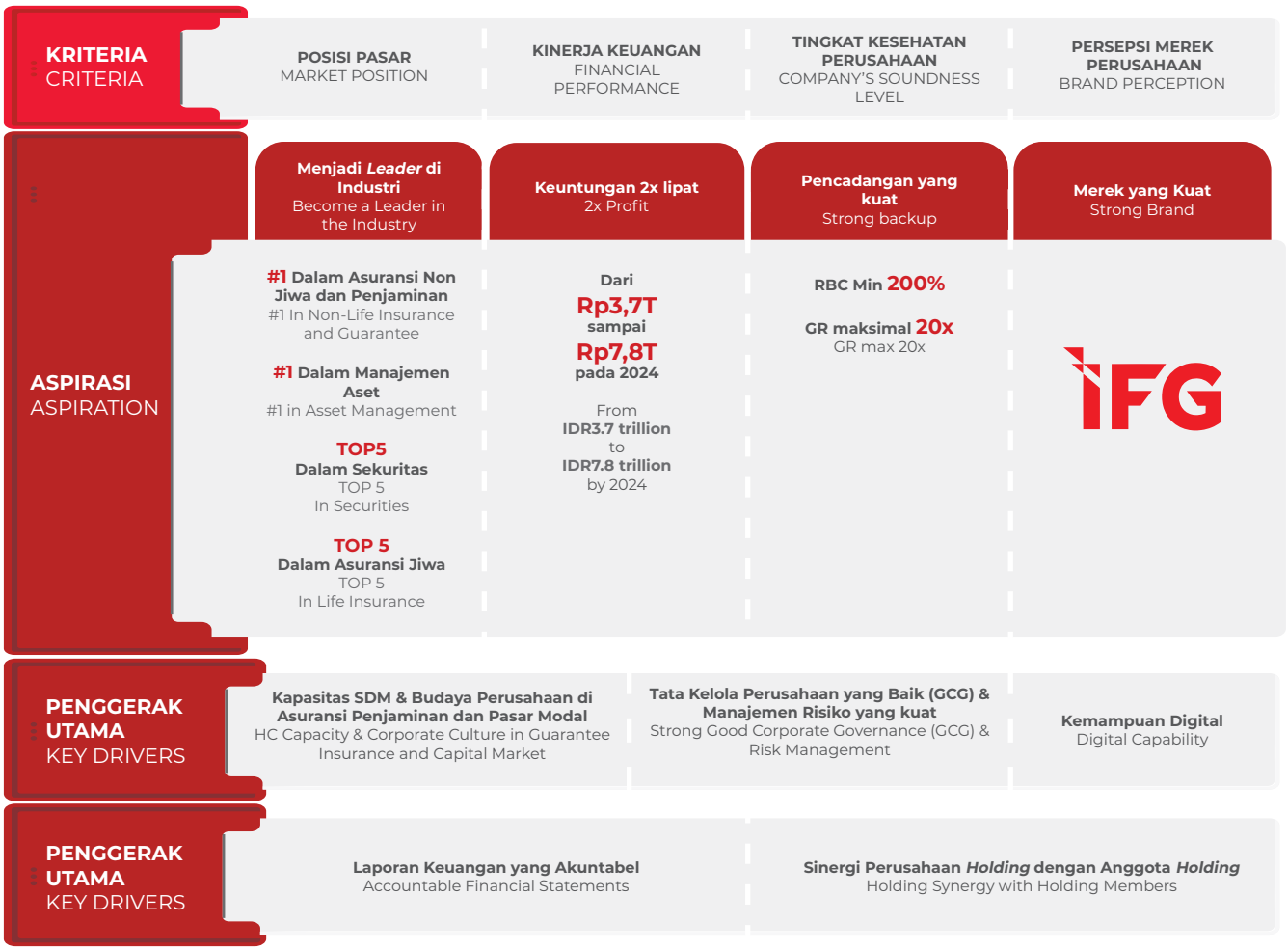
Jenis Produk dan Layanan Type of Products and Services	Keterangan Description
Manajemen Aset Asset Management	BTIM mendapatkan pendapatan usaha yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan adalah pendapatan usaha yang dihasilkan dari jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola perusahaan. Prinsip pengelolaan risiko yang berhati-hati *(prudent)* dan ketaatan terhadap peraturan telah melekat dan dijalankan oleh seluruh insan BTIM dalam praktik pengelolaan perusahaan dan portofolio secara berkesinambungan. BTIM derives its operating income from its main business activities, namely income generated from investment management services provided by the company. The principles of prudent risk management and compliance with regulations are embedded in and implemented by all BTIM personnel in the ongoing management of the company and its portfolio.
Investasi dan Manajemen Properti Property Investment and Management	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) merupakan pemilik dan pengelola Gedung Graha CIMB yang merupakan *landmark* Jalan Sudirman dan telah memperoleh Sertifikasi *Green Building* sejak tahun 2015. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) is the owner and manager of Graha CIMB Building which is a landmark of Jalan Sudirman and has obtained Green Building Certification since 2015.
Jasa Keuangan Non Bank dan Investasi Non-Bank Financial Services and Investment	BMI bergerak di bidang jasa keuangan non bank dan investasi, BMI pada tahun buku 2022 tidak melakukan kegiatan usaha atau dalam kondisi *dormant* BMI is engaged in non-bank financial services and investment, BMI in the fiscal year 2022 does not carry out business activities or is in a dormant condition

KOMPETENSI INTI

Perusahaan memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya. Setiap produk dan jasa yang dibuat oleh Perusahaan adalah solusi terhadap kebutuhan pelanggan dan diberikan dalam kualitas yang tinggi secara konsisten.

CORE COMPETENCIES

The Company has a core competency as a provider of quality solutions to its customers. Every product and service made by the Company is a solution to customer needs and is delivered in consistently high quality.



JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
BUSINESS NETWORK AND OPERATION AREA



Seluruh Wilayah Indonesia
All Regions in Indonesia



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

VISI
VISION

Menjadi perusahaan grup keuangan perasuransian dan penjaminan yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi dalam memberikan layanan jasa keuangan dan produk yang terkemuka dan handal.

To be a leading, trusted, and integrated insurance and guarantee financial group company in providing leading and reliable financial services and products.



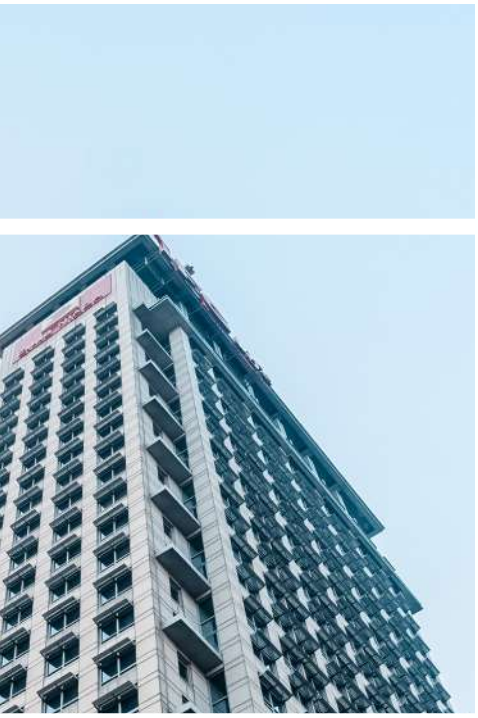
MISI
MISSION

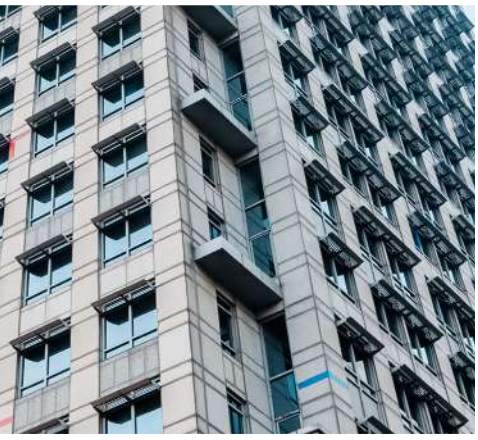
1. Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Memberikan pelayanan berkualitas, solusi inovatif dan terintegrasi melalui SDM yang kompeten dan produk yang *accessible* dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.
3. Menjalankan usaha yang sustainable dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith.*

1. To provide basic protection and business facilities to the community in order to improve the social welfare and standard of living of the nation in all regions within the framework of a unitary state.
2. Providing quality services, innovative and integrated solutions through competent human resources and accessible products in answering customer needs and increasing shareholder value.
3. Running a sustainable business by upholding the values of good corporate governance based on synergy and the principle of Utmost Good Faith.











REVIU VISI DAN MISI PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Visi dan Misi Perusahaan senantiasa ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Visi dan Misi Perusahaan saat ini yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam RJPP Tahun 2020 – 2024 yang telah disahkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS melalui surat nomor S-183/MBU/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2020 – 2024. Adapun untuk Visi dan Misi Perusahaan yang baru akan dirumuskan seiring dengan penyusunan RJPP Tahun 2025 – 2029.

REVIEW OF COMPANY VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The Company's Vision and Mission are regularly reviewed by involving the Board of Directors, Board of Commissioners and other management to ensure their relevance to the Company's business development. The Company's current Vision and Mission have been approved and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners as stated in the RJPP Year 2020 - 2024 which has been approved by the Minister of SOEs as the GMS through letter number S-183/MBU/03/2022 dated March 18, 2022 regarding the Ratification of the Company's Long Term Plan (RJPP) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Year 2020 - 2024. As for the new Vision and Mission of the Company, it will be formulated along with the preparation of the RJPP Year 2025 - 2029.





TUJUAN PERUSAHAAN

Adapun 3 (tiga) objektif utama sebagai Perusahaan BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi,adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Bisnis Non-Asuransi Jiwa
   Saat ini, perusahaan non-asuransi jiwa terbesar yang memberikan pengaruh terhadap keseimbangan kondisi di Industri, praktik terbaik dan potensi sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya.
   a. Menjaga keseimbangan Industri dengan mitra-mitra bisnis (mis. bank, *dealers*, penyedia layanan Kesehatan) untuk memastikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan;
   b. Menyediakan arahan yang strategis termasuk fokus pada bisnis, *cross-selling, shared-services*, dan infrastruktur; dan
   c. Manajemen risiko yang kuat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Transformasi Bisnis Asuransi Jiwa
   Menciptakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan memetamorfosiskan perusahaan asuransi tertua di Indonesia.
   a. Konsep *"Bridge Bank"*: Perusahaan asuransi jiwa yang baru untuk mengambil alih portofolio yang direstrukturisasi;

COMPANY'S OBJECTIVES

The 3 (three) main objectives as an Insurance, Guarantee, and Investment Holding Company are as follows:

1. Increase Non-Life Insurance Business
   Currently, the Company is the largest non-life insurance company that has an influence on the balance of conditions in the industry, best practices and potential synergies with other state-owned enterprises.
   a. Maintain a balance of Industry with business partners (e.g. banks, dealers, healthcare providers) to ensure more sustainable business practices;
   b. Provide strategic direction including focus on business, cross-selling, shared-services, and infrastructure; and
   c. Strong and prudent risk management.
2. Life Insurance Business Transformation
   Creating one of the largest life insurance companies in Indonesia by metamorphosing the oldest insurance company in Indonesia.
   a. "Bridge Bank" concept: A new life insurance company to take over the restructured portfolio;



b. Restrukturisasi yang masif untuk membuat portofolio yang sehat;
c. Didorong oleh dukungan signifikan dari pemerintah termasuk PMN, konsesi ke pasar *captive*, dan lain-lain; dan
d. Bisnis baru termasuk kerja sama dengan BUMN, membuat *platform* kesehatan yang baru, dan institusi pemerintahan.

3. Agen Pengembangan
Menciptakan sebuah model yang berkelanjutan sebagai agen pengembangan untuk mendukung program pemerintah.
a. Mengembangkan sebuah model yang berkelanjutan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan Jamkrindo dan Askrindo;
b. Menyediakan penjaminan kredit untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMKM (bisnis mikro dan kecil); dan
c. Memastikan Jamkrindo dan Askrindo tidak terekspos risiko kredit yang berlebihan.

b. Massive restructuring to create a healthy portfolio;
c. Driven by significant support from the government including State Equity Participation (PMN), concessions to captive markets, etc; and
d. New business including cooperation with SOEs, creating new healthcare platforms, and government institutions.

3. Development Agent
Create a sustainable model as a development agent to support government programs.
a. Develop a sustainable model to support the National Economic Recovery (PEN) Program involving Jamkrindo and Askrindo;
b. Provide credit guarantees for KUR (People's Business Credit) and MSMEs (micro, small, and medium enterprises);
c. Ensure Jamkrindo and Askrindo are not exposed to excessive credit risk.



SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Sementara itu, IFG sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menerapkan nilai budaya AKHLAK sebagai penyempurnaan dari budaya perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana arahan Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Indonesia Financial Group No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/ IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Indonesia Financial Group tanggal 29 September 2020.

BASIC ATTITUDE AND CORPORATE CULTURE

Meanwhile, IFG, as part of the State-Owned Enterprises (SOE) entity, has implemented the AKHLAK cultural values as an enhancement of its corporate culture, Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) in accordance with the Ministry of SOEs' directive through Ministerial Circular No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020 and Decree of the Board of Directors of Indonesia Financial Group No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/ IX/2020 concerning the Determination of Core Values of Indonesia Financial Group dated September 29, 2020.



AKHLAK

Amanah
Trustworthy

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen,bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
The Company upholds the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values

Loyal
Loyal

Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.
The Company will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, BUMN and the State. The Company is willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.

Kompeten
Competent

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
The Company continues to learn and develop its capabilities by improving competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn and completing assignments with the best quality.

Adaptif
Adaptive

Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.
The Company will continue to innovate and also enthusiastically drive or face changes that occur by adapting to be better, to continuously make improvements by following technological developments and acting proactively.

Harmonis
Harmonious

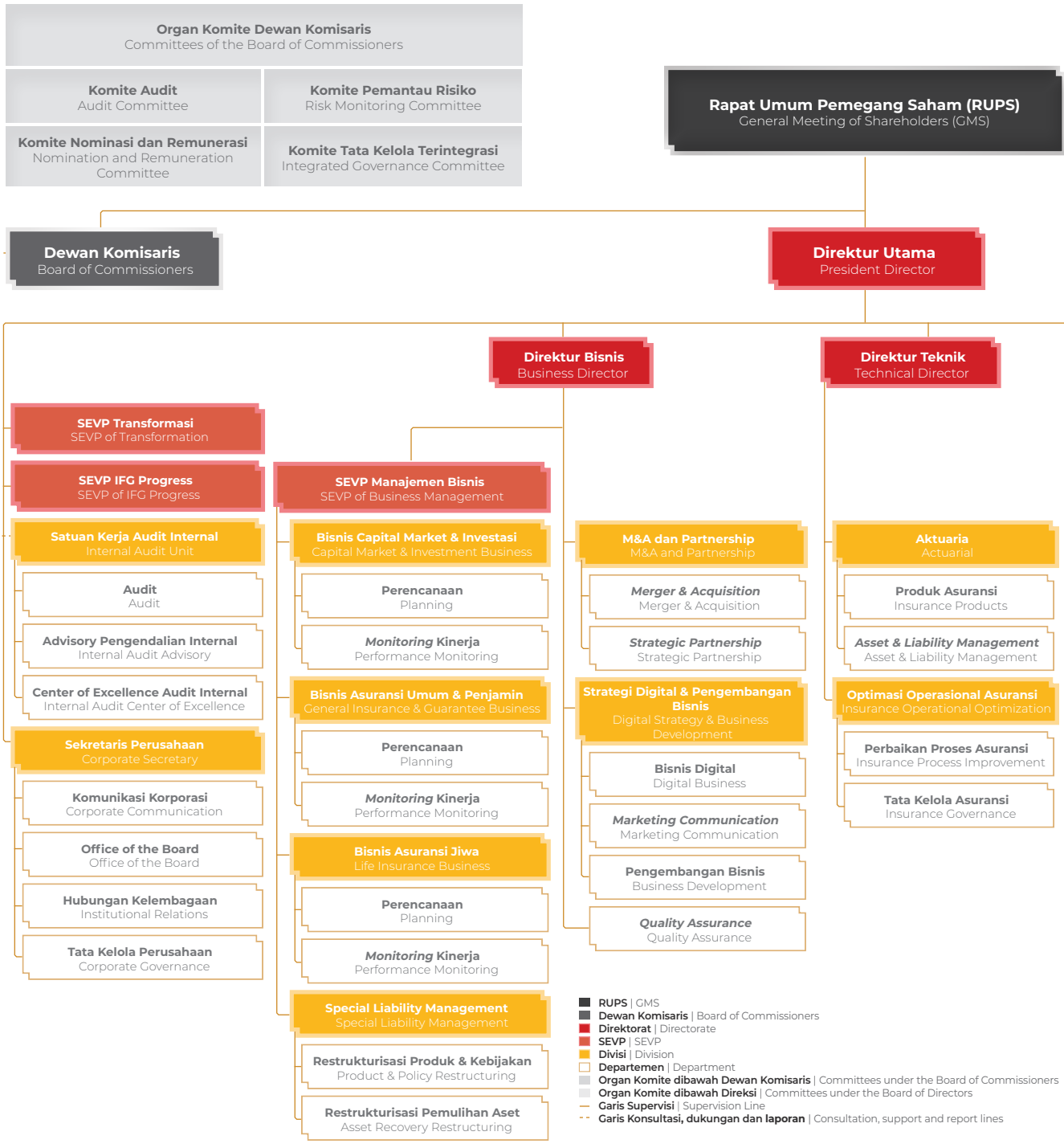
Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.
The Company continues to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to support others and build a conducive work environment.

Kolaboratif
Collaborative

Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
The Company continues to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, being open to working together to generate added value and also mobilizing the use of various resources for common goals

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan optimal kepada arah tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi IFG No. 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Adapun struktur organisasi Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:



The Company's organizational structure is prepared and determined based on consideration of the direction and objectives of corporate development, effectiveness of corporate management, effective workflow and balanced control processes so as to provide optimal support to the direction of the Company's goals. The Company's organizational structure has been approved through IFG Board of Directors Decree No. 15 Year 2024 regarding Organizational Structure Policy. The organizational structure of the Company is as follow:

Organ Komite Direksi
Board of Directors Committees

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	**Komite SDM** HC Committee	**Komite BDHC CMI** BDHC CMI Committee
Komite Talenta Talent Committee	**Komite Investasi** Investment Committee	**Komite TJSL** TJSL Committee
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Committee	**Komite Pengarah Teknologi Informasi** Information Technology Steering Committee	**Product Committee Holding** Product Committee Holding

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Direktur Keuangan
Director of Finance

- **Keuangan Perusahaan**
  Corporate Finance
  - **Pengelolaan Keuangan**
    Financial Management
  - **Perencanaan Keuangan**
    Financial Planning
  - **TKPKKP**
    Health Program Compliance and Control Coordination Team (TKPKKP)
  - **Pengelolaan Permodalan**
    Capital Management
- **Akuntansi & Pelaporan**
  Accounting & Reporting
  - **Akuntansi**
    Accounting
  - **Kebijakan Akuntansi**
    Accounting Policy
  - **Analisa Pelaporan Keuangan**
    Financial Reporting Analysis
- **Manajemen Portofolio Investasi & Anggota *Holding***
  Investment & Subsidiary Portfolio Management
  - **Strategi & Perencanaan Investasi**
    Investment Strategy & Planning
  - **Manajemen Portofolio Investasi**
    Investment Portfolio Management
  - **Management Information System**
    Management Information System

Direktur SDM
HC Director

- **Sumber Daya Manusia**
  Human Capital
  - **Strategi SDM**
    HC Strategy
  - **Layanan & Analisis SDM**
    HC Services & Analytics
  - **Manajemen Talenta**
    Talenta Management
- **Pembelajaran & Budaya Perusahaan**
  Learning & Corporate Culture
  - **Pembelajaran**
    Learning
  - **Budaya Perusahaan**
    Corporate Culture

- **Hukum**
  Legal
  - **Hukum Korporasi**
    Corporate Law
  - **Hukum Bisnis**
    Business Law
  - **Litigasi & Operasional**
    Litigation & Operations
  - **Peraturan & Perundang-undangan**
    Regulation & Legislation
- **Pengadaan & Pengelolaan Aset**
  Procurement & Asset Management
  - **Umum**
    General Affairs
  - **Pengadaan**
    Procurement
  - **TJSL**
    TJSL
  - **Kearsipan**
    Archives
  - **Pengelolaan Aset**
    Asset Management

SEVP Teknologi Informasi
SEVP of Information Technology

- **Teknologi Informasi**
  Information Technology
  - **Strategi Pengembangan Sistem**
    System Development Strategy
  - **Operasional & Infrastruktur**
    Operations & Infrastructure
  - **Perencanaan & Tata Kelola**
    Planning & Governance
- **Manajemen Risiko, Kepatuhan & Kebijakan**
  Risk Management, Compliance & Policy
  - **Kepatuhan**
    Compliance
  - **Manajemen Risiko**
    Risk Management
  - **Kebijakan**
    Policy
  - **Analisis Risiko**
    Risk Analysis
- **Strategi Pemasaran**
  Marketing Strategy
  - **Perencanaan Strategi Perusahaan**
    Corporate Strategy Planning
  - **Implementasi Strategi Perusahaan**
    Corporate Strategy Implementation

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



FAUZI ICHSAN
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

WAHYU SETYAWAN
Komisaris
Commissioner

HOTBONAR SINAGA
Komisaris Independen
Independent Commissioner



MASYITA CRYSTALLIN
Komisaris
Commissioner

NASRUDIN
Komisaris
Commissioner

SUMIYATI
Komisaris
Commissioner



FAUZI ICHSAN

Komisaris Utama/Independen | President/Independent Commissioner

Periode Jabatan: 30 Desember 2020-RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: December 30, 2020-2025 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 27 Januari 1970

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Fauzi Ichsan diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Sarjana (S1) London School of Economics, 1991.

Sertifikasi yang dimiliki
- Advanced Corporate Finance
- Corporate Mergers and Acquisitions
- Policies, operations and coordination among economic and financial policymakers and regulators in the US
- FDIC 101: Structure, Policies, Transactions and Operations of Federal Deposit Insurance Corporation

Pengalaman Kerja
Karir Fauzi Ichsan antara lain Treasury Economist dan Head of Fixed Income Sales di Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor Dubes Inggris untuk Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), dan Kepala Eksekutif LPS(2015- 2020).

Rangkap Jabatan
- PT Unilever Indonesia - Komisaris Independen (Apr 2021 - Sekarang)
- PT Manulife Investment Management Indonesia – Komisaris Independen (Juli 2020 – Sekarang)
- PT AKR Corporindo – Komisaris Independen (April 2020 – Sekarang)
- Komisaris Independen PT Minamas Gemilang

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 54 years old as of December 31, 2024
Born in Jakarta, January 27, 1970

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Fauzi Ichsan was appointed as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

Educational Background
- Master degree from Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Bachelor degree (S1) London School of Economics, 1991.

Certifications
- Advanced Corporate Finance
- Corporate Mergers and Acquisitions
- Policies, operations and coordination among economic and financial policymakers and regulators in the US
- FDIC 101: Structure, Policies, Transactions and Operations of the Federal Deposit Insurance Corporation

Work Experience
Fauzi Ichsan's career includes Treasury Economist and Head of Fixed Income Sales at Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor to the British Ambassador to Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), and Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation (LPS) (2015-2020).

Concurrent Position
- PT Unilever Indonesia - Independent Commissioner (Apr 2021 - Present)
- PT Manulife Investment Management Indonesia - Independent Commissioner (July 2020 - Present)
- PT AKR Corporindo - Independent Commissioner (April 2020 - Present)
- Independent commissioner of PT Minamas Gemilang

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



MASYITA CRYSTALLIN

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 30 Desember 2020-RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: December 30, 2020- 2025 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 43 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surabaya, 13 Juli 1981

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Masyita Crystallin diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-400/ MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) Ekonomi bidang International Monetary and Finance, Claremont Graduate University, 2015.
- Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Internasional, The Australian National University, 2007.
- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005.

Sertifikasi yang dimiliki
- Certified Risk Professional (CRP)
- Certificate on Climate Change and Energy, Harvard Kennedy School
- Certificate on Management Development, Wharton Executive Education
- Certificate on Analysis to Action: An Executive Education Program on Disaster Risk Financing in Asia, Lee Kuan Yew School of Public Policy Executive Education

Pengalaman Kerja
Masyita Crystallin saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi. Sebelum bergabung dengan Kementerian Keuangan, Masyita merupakan Kepala Ekonom Bank DBS Indonesia, bertanggung jawab untuk melakukan analisis makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan. Beliau juga pernah bergabung dengan World Bank sebagai Ekonom Makro pada Tim Manajemen Makro-Fiskal (Januari 2014 – Desember 2017).

Rangkap Jabatan
- Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq
- Co-chair Sherpa (Deputi) bersama Belanda
- Dewan Pembina World Resource Institute
- Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 43 years old as of December 31, 2024
Born in Surabaya, July 13, 1981

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Masyita Crystallin was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

Educational Background
- Doctorate Degree (S3) in Economics in International Monetary and Finance, Claremont Graduate University, 2015.
- Master Degree in International Development Economics, The Australian National University, 2007.
- Bachelor of Economics, University of Indonesia, 2005.

Certifications
- Certified Risk Professional (CRP)
- Certificate on Climate Change and Energy, Harvard Kennedy School
- Certificate on Management Development, Wharton Executive Education
- Certificate on Analysis to Action: An Executive Education Program on Disaster Risk Financing in Asia, Lee Kuan Yew School of Public Policy Executive Education

Work Experience
Masyita Crystallin currently serves as Special Staff to the Minister of Finance for Fiscal and Macroeconomic Policy Formulation. Prior to joining the Ministry of Finance, Masyita was the Chief Economist of DBS Bank Indonesia, responsible for macroeconomic, fiscal and financial market analysis. She also joined the World Bank as a Macro Economist in the Macro-Fiscal Management Team (January 2014 - December 2017).

Concurrent Position
- Partner and Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq
- Co-chair Sherpa (Deputy) with the Netherlands
- Board of Trustees, World Resource Institute
- Board of Experts, Indonesian Employers Association

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



SUMIYATI

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 31 Juli 2021 – RUPS tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: July 31, 2021– 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 63 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Sragen, 6 Juli 1961

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Sumiyati diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Riwayat Pendidikan
- S2 Master of Financial Management dari Central Queensland University, Australia, 1994.
- Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1989.
- Diploma III dari Sekolan Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1983.

Sertifkasi yang dimiliki
- Chartered Accountant
- Qualified Internal Auditor
- Certified Government Internal Auditor
- Government Chief Audit Executive

Pengalaman Kerja
Sumiyati menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dari tahun 2017 sampai 2021. Sebelumnya, Sumiyati pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Keuangan.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Audit Lembaga Pengelola Investasi / Indonesia Investment Authority (INA)
- Komisaris Independen PT Asia Pasific Fibers Tbk
- Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
- Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 63 years old as of December 31, 2024
Born in Sragen, July 06, 1961

Domicile
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Sumiyati was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.

Educational Background
- Master of Financial Management from Central Queensland University, Australia, 1994.
- Diploma IV from the State College of Accountancy (STAN) (1989)
- Diploma III from the State College of Accountancy (STAN) (1983)

Certifications
- Chartered Accountant
- Qualified Internal Auditor
- Certified Government Internal Auditor
- Government Chief Audit Executive

Work Experience
Sumiyati served as Inspector General of the Ministry of Finance from 2017 to 2021. Previously, Sumiyati served as Head of the Financial Education and Training Agency, Head of the Planning and Finance Bureau of the Secretariat General and Head of the Accounting and Financial Reporting Section at the Ministry of Finance.

Concurrent Position
- Member of the Audit Committee of the Investment Management Agency / Indonesia Investment Authority (INA)
- Independent Commissioner of PT Asia Pasific Fibers Tbk
- Chairperson of the Government Accounting Standards Working Committee
- Supervisory Board of the Kemayoran Complex Management Center

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



HOTBONAR SINAGA

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan: 26 November 2020-RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: November 26, 2020- 2025 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 75 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Cipanas, 20 Mei 1949

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Hotbonar Sinaga diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 tanggal 26 November 2020.

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia, 1980.

Sertifkasi yang dimiliki
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)
- QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)
- Asesor berlisensi BNSP No. REG MET.000.001021 2017

Pengalaman Kerja
Karir Hotbonar Sinaga antara lain Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Program Sarjana Strata 1 dan Magister Management tahun 1973- 2016, kemudian menjabat sebagai Managing Director Johnson & Higgins (Pialang Asuransi Patungan dengan Amerika) 1986-1991, Direktur Pemasaran Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 1991-1997, Direktur Metlife Sejahtera 1997-2000, Konsultan E & Y Kanada 1999-2000, Direktur Utama PT Asuransi Berdikari 2000-2005, Komisaris dan Komite Audit kelompok Sinarmas 2004-2007, Direktur Utama PT Jamsostek 2007-2012 dan Dewan Audit OJK 2013-2014, lalu menjabat Komisaris Independen di beberapa perusahaan diantaranya PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, dan PT Asuransi Mega Life.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 75 years old as of December 31, 2024
Born in Cipanas, May 20, 1949

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Hotbonar Sinaga was appointed as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 dated November 26, 2020.

Educational Background
Bachelor of Economics, University of Indonesia, 1980.

Certifications
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute Mitra Kalyana Sejahtera)
- BNSP licensed assessor No. REG MET.000.001021 2017

Work Experience
Hotbonar Sinaga's career includes working as a permanent Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia, Undergraduate and Masters in Management Programs from 1973-2016, then served as Managing Director of Johnson & Higgins (Joint Insurance Broker with America) in 1986-1991, Marketing Director of Asuransi Jiwa Tugu Mandiri in 1991-1997, Director of Metlife Sejahtera in 1997-2000, Canada E & Y Consultant in 1999-2000, President Director of PT Asuransi Berdikari in 2000-2005, Commissioner and Audit Committee of the Sinarmas Group in 2004-2007, President Director of PT Jamsostek in 2007-2012 and OJK Audit Board in 2013-2014. He also served as Independent Commissioner in several companies including PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, and PT Asuransi Mega Life.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



NASRUDIN

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 29 April 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: April 29, 2021– 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 68 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 20 Oktober 1956

Domisili
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Nasrudin diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021.

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.
- Master (S2) Manajemen dari STIE-IPWI, 1998.
- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Muhammadiyah, 1986.

Sertifkasi yang dimiliki
- Executive Secretary Conventional on Biological Diversity
- EDP - Financial Statement
- Risk Governance Professional
- Advokat - PERADI

Pengalaman Kerja
Karir Nasrudin antara lain pernah menjabat berbagai posisi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan, Direktur Litigasi Peraturan Perundang Undangan dan Widyaiswara Utama.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 68 years old as of December 31, 2024
Born in Jakarta, October 20, 1956

Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment History
Nasrudin was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.

Educational Background
- Doctorate Degree (S3) in Law from Padjajaran University, Bandung, 2013.
- Master of Management from STIE-IPWI, 1998.
- Bachelor's Degree in Law from Muhammadiyah University, 1986.

Certifications
- Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity
- EDP - Financial Statement
- Risk Governance Professional
- Advocate - PERADI

Work Experience
Nasrudin's career includes holding various positions at the Ministry of Law and Human Rights (HAM) as Director of Legislation Harmonization, Director of Legislation Litigation and Trainer Specialist

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



WAHYU SETYAWAN

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 3 Januari 2024 – RUPS tahun 2029, Periode Pertama
Term of Office: January 03, 2024– 2029 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 50 Tahun 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 9 September 1974

Domisili
DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan
Wahyu Setyawan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-3/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024.

Riwayat Pendidikan
- S1 Hukum, Universitas Brawijaya, Surabaya, 1998
- S2 Hukum, Niigata University, Niigata – Jepang, 2008
- S2 Manajemen, PPM Manajemen, Jakarta, 2023

Sertifikasi yang dimiliki
- Certification on Audit Committee Practices
- Qualified Risk Governance Professional

Pengalaman Kerja
Wahyu Setyawan adalah Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian BUMN.

Rangkap Jabatan
Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian BUMN.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 50 years old as of December 31, 2024
Born in Jakarta, September 09, 1974

Domicile
DKI Jakarta

Appointment History
Wahyu Setyawan was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-3/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Educational Background
- Bachelor of Law, Brawijaya University, Surabaya, 1998
- Master of Law, Niigata University, Niigata - Japan, 2008
- Master of Management, PPM Management, Jakarta, 2023

Certifications
- Certification on Audit Committee Practices
- Qualified Risk Governance Professional

Work Experience
Wahyu Setyawan is an Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOEs. Previously, he served as Assistant Deputy for Legislation and Regulations at the Ministry of SOEs.

Concurrent Position
Assistant Deputy for Legislation at the Ministry of SOEs.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yaitu dengan bergabungnya Bapak Wahyu Setyawan yang resmi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan per 3 Januari 2024. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, komposisi Dewan Komisaris berjumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGE IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2024

Throughout 2024, there has been a change in the composition of the Board of Commissioners with the joining of Mr. Wahyu Setyawan, who officially took office as Commissioner of the Company on January 3, 2024. As of the date of this annual report, the Board of Commissioners consists of 6 (six) members, comprising 1 (one) Chairperson of the Board of Commissioners who also serves as an Independent Commissioner, 4 (four) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner. The composition and basis for the appointment of Commissioners are summarized in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komisaris
Table of Composition and Basis for the Appointment of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-400/ MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 tanggal 26 November 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 dated November 26, 2020.
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.
Wahyu Setyawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-3/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-3/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.



PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



HEXANA TRI SASONGKO
Direktur Utama
President Director

PANTRO PANDER SILITONGA
Direktur Bisnis
Business Director

RIANTO AHMADI
Direktur Teknik
Technical Director



HARU KOESMAHARGYO
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

HERU HANDAYANTO
Direktur Keuangan
Finance Director

RIZAL ARIANSYAH
Direktur SDM
Human Capital Director



HEXANA TRI SASONGKO

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan: 4 Juni 2021-RUPS tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: April 29, 2021– 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 60 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Klaten, 23 Maret 1964

Domisili
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Hexana Tri Sasongko diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Riwayat Pendidikan
- S2 Master in Business Administration, dari Monash Mt. Eliza Business School Monash University, Melbourne, Australia, 1996.
- S1 Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.

Sertifkasi yang dimiliki
Certified Wealth Manager

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Hexana Tri Sasongko adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di mana sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Investasi dan Teknologi Informasi. Hexana Tri Sasongko juga pernah menjabat sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Treasury & Global Services dan Senior Executive Vice President Direktorat IT Strategy & Satellite di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Rangkap Jabatan
Komisaris PT Bahana Artha Ventura

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 60 years old as of December 31, 2024
Born in Klaten, March 23, 1964

Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment History
Hexana Tri Sasongko was appointed as President Director based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Educational Background
- Master Degree in Business Administration, from Monash Mt. Eliza Business School Monash University, Melbourne, Australia, 1996.
- Bachelor of Law from Airlangga University, Surabaya, 1986.

Certifications
Certified Wealth Manager

Work Experience
Prior to joining IFG, Hexana Tri Sasongko was President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero), where she previously served as Director of Investment and Information Technology. Hexana Tri Sasongko has also served as Senior Executive Vice President of Treasury & Global Services Directorate and Senior Executive Vice President of IT Strategy & Satellite Directorate at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prior to serving as President Director, he served as Deputy President Director at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Concurrent Position
Commissioner of PT Bahana Artha Ventura

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling hareholders, either directly or indirectly.



HARU KOESMAHARGYO

Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Periode Jabatan: 21 Maret 2023-RUPS 2028, Periode Pertama
TTerm of Office: March 21, 2023- 2028 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 16 April 1966

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Haru Koesmahargyo diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) MBA in Investment Banking dari Emory University, Atlanta, 2000.
- Sarjana (S1) bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang, 1989.

Sertifkasi yang dimiliki
- Behavioral Science in Business, 2022
- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko, SMR Level:V (LSPP), 2021
- ERM Risk Management Program, Refreshing Level 5, 2017

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Haru Koesmahargyo adalah Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi Eksekutif di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diantaranya adalah Direktur Keuangan, Direktur Keuangan dan (Treasury), Kepala Divisi Treasury, General Manager dan Head of Investor Relation. Beliau memperoleh sarjana dalam bidang Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, serta magister dalam bidang Investment Banking dari Emory University.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 58 years old as of December 31, 2024
Born in Jakarta, April 16, 1966

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Haru Koesmahargyo was appointed as Deputy President Director based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Educational Background
- MBA in Investment Banking from Emory University, Atlanta, 2000.
- Bachelor's degree in Agricultural Technology from Brawijaya University, Malang, 1989.

Certifications
- Behavioral Science in Business, 2022
- Risk Management Certification Maintenance Program, SMR Level:V (LSPP), 2021
- ERM Risk Management Program, Refreshing Level 5, 2017

Work Experience
Prior to joining IFG, Haru Koesmahargyo was the President Director of Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. He has also held various Executive positions at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk including Finance Director, Finance and (Treasury) Director, Head of Treasury Division, General Manager and Head of Investor Relations. He holds a bachelor's degree in Agricultural Technology from Brawijaya University and a master's degree in Investment Banking from Emory University.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling hareholders, either directly or indirectly.



RIZAL ARIANSYAH

Direktur SDM | Human Capital Director

Periode Jabatan: 11 Februari 2020-RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: February 11, 2020- 2025 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Surabaya, 24 Juni 1974

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Rizal Ariansyah diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

Sertifkasi yang dimiliki
- Izin Konsultan Hukum Pasar Modal/Kelas Terapan III/2001 Nomor 098/KH/T-III/2001, 2001
- Ijin Advokat/Pengacara (AA.00.10597), 2006
- Pelatihan Hukum Persaingan Usaha, 2007
- Pelatihan Valuasi Aset Saham dan Kredit, 2015

Pengalaman Kerja
Selain menjabat sebagai Direktur SDM, beliau juga menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris pada Anggota *Holding*, diantaranya sebagai Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama sejak Juni 2020 sampai sekarang, dan Komisaris PT Bahana Kapital Investa sejak April 2020 sampai sekarang. Sebelum bergabung dengan IFG, Rizal Ariansyah pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020), Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Koordinator Sekretaris Tetap Pelindo I, II, III dan IV PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Sekretaris Perusahaan/Executive Vice President PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Sekretaris Perusahaan/ Executive Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2016), Partner Law Firm Radjiman Bilitea & Partners (2009-2012), Kepala Bagian Hukum-2/Kepala Group/Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005-2009), Kepala Sub Bagian Hukum/Senior Manager PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005), dan Kepala Group Hukum/ Vice President (1999-2004).

Rangkap Jabatan
- Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama (Juni 2020-Sekarang)
- Komisaris PT Bahana Kapital Investa (April 2020-Sekarang)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 50 years old as of December 31, 2024
Born in Surabaya, June 24, 1974

Domicile
Bekasi, West Java, Indonesia

Appointment History
Rizal Ariansyah was appointed as Director of Human Capital based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Educational Background
- Master's Degree in Law, University of Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bachelor's Degree in Law, University of Indonesia, Jakarta, 1996.

Certifications
- Capital Market Law Consultant License / Applied Course III/2001 Number 098/KH/T-III/2001, 2001
- Advocate/Lawyer License (AA.00.10597), 2006
- Competition Law Training, 2007
- Stock and Credit Asset Valuation Training, 2015

Work Experience
In addition to serving as Human Capital Director, he also serves on the Board of Commissioners of Holding Members, including as President Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama since June 2020 until present, and Commissioner of PT Bahana Kapital Investa since April 2020 until present. Before joining IFG, Rizal Ariansyah served as President Commissioner of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020), Deputy President Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), Human Resources Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Permanent Secretary Coordinator for Pelindo I, II, III, and IV at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Corporate Secretary/Executive Vice President at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Corporate Secretary/Executive Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2016), Partner at Radjiman Bilitea & Partners Law Firm (2009-2012), Head of Legal Department-2/Head of Group/Senior Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005-2009), Head of Legal Sub-Department/Senior Manager of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005), and Head of Legal Group/Vice President (1999-2004).

Concurrent Position
- President Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama (June 2020-Present)
- Commissioner of PT Bahana Kapital Investa (April 2020-Present)

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling hareholders, either directly or indirectly.



RIANTO AHMADI

Direktur Teknik | Technical Director*
Periode Jabatan: 20 September 2024 - RUPS 2026, Periode Pertama
Term of Office: September 20, 2024 - 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 65 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran California, 19 Desember 1959

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Rianto Ahmadi diangkat menjadi Direktur Teknik berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No SK- 313/MBU/09/2021 Tanggal 20 September 2021 dan ditetapkan merangkap sebagai Plt. Direktur Bisinis oleh Dewan Komisaris sejak tanggal 26 Desember 2024

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) Statistika dari University of Missouri, 1992.
- Magister (S2) Statistika dari Unversity of Texas, 1987.
- Sarjana (S1) Matematika, Institut Teknologi Bandung, 1984.

Sertifkasi yang dimiliki
- Fellow Society of Actiaries of Indonesia (FSAI), 1999
- Certified Enterprise Risk Governance (CERG), 2017
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), 2019

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Rianto Ahmadi menjabat sebagai Direktur, Chief Risk and Compliance Officer, di Prudential Life Assurance Indonesia. Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Independen, atau Penasihat, di beberapa perusahaan di industri asuransi, baik multinasional maupun domestik. Rianto sebelumnya juga menjabat untuk beberapa periode sebagai Ketua dari organisasi Persatuan Aktuaris Indonesia, di mana saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Aktuaris.

Rangkap Jabatan
Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa IFG

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 65 years old as of December 31, 2024
Born in California, December 19, 1959

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Rianto Ahmadi was appointed as Technical Director based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-313/MBU/09/2021 dated September 20, 2021, and was appointed as Acting Business Director by the Board of Commissioners since December 26, 2024.

Educational Background
- Doctorate (S3) in Statistics from University of Missouri, 1992.
- Master's Degree (S2) in Statistics from the University of Texas, 1987.
- Bachelor of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology, 1984.

Certifications
- Fellow Society of Actiaries of Indonesia (FSAI), 1999
- Certified Enterprise Risk Governance (CERG), 2017
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), 2019

Work Experience
Prior to joining IFG, Rianto Ahmadi served as Director, Chief Risk and Compliance Officer, at Prudential Life Assurance Indonesia. He has served as President Director, Deputy President Director, Director, Independent Commissioner, or Advisor, in several companies in the insurance industry, both multinational and domestic. Rianto previously also served for several periods as Chairman of the Indonesian Actuary Association, where he currently serves as Chairman of the Actuary Council.

Concurrent Position
President Commissioner of PT Asuransi Jiwa IFG

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling hareholders, either directly or indirectly.

*) Ditetapkan merangkap sebagai Plt. Direktur Bisinis oleh Dewan Komisaris sejak tanggal 26 Desember 2024
*) Appointed as Acting Director of Business by the Board of Commissioners since December 26, 2024



HERU HANDAYANTO

Direktur Keuangan | Finance Director

Periode Jabatan: 26 September 2022-RUPS 2027, Periode Pertama
Term of Office: September 26, 2022- 2027 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2024
Kelahiran Jakarta, 23 Februari 1971

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Heru Handayanto diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022.

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia, 1995.

Sertifkasi yang dimiliki
- Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
- Wakil Manajer Investasi (WMI)
- Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Heru Handayanto menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional di Mandiri Sekuritas, dan juga pernah menduduki posisi sebagai Chief Financial Officer dan Chief Operating Officer di PT MNC Securities Indonesia dan Chief Operating Officer di PT CIMB Securities Indonesia.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 53 years old as of December 31, 2024
Born in Jakarta, February 23, 1971

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Heru Handayanto was appointed as Director of Finance based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as theGeneral Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022 SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Educational Background
Bachelor's Degree (S1) in Accounting, University of Indonesia, 1995.

Certifications
- Representative of Securities Trading Broker (WPPE)
- Investment Manager Representative (WMI)
- Representative of Securities Underwriter (WPEE)

Work Experience
Prior to joining IFG, Heru Handayanto served as Director of Finance and Operations at Mandiri Sekuritas, and has also held positions as Chief Financial Officer and Chief Operating Officer at PT MNC Securities Indonesia and Chief Operating Officer at PT CIMB Securities Indonesia.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling hareholders, either directly or indirectly.



PANTRO PANDER SILITONGA*

Direktur Bisnis | Business Director

Periode Jabatan: 11 Februari 2020-RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: February 11, 2020- 2025 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Jakarta, 25 September 1976

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Pantro Pander Silitonga diangkat menjadi Direktur Bisnis berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2), MBA in Finance, Strategy and Venture Capital, The University of Chicago, USA, 2007.
- Sarjana (S1), Bachelor of Science in Process Re-engineering, Operations & Accounting, Indiana University Bloomington, USA, 1998.

Sertifkasi yang dimiliki
-

Pengalaman Kerja
Pantro Pander pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Mandiri Capital, sebuah perusahaan modal ventura milik PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Sebelum bekerja di Mandiri Capital (2019 – 2020), beliau menjabat sebagai Senior Vice President Bank Mandiri. Pantro Pander juga pernah bekerja selama 7 tahun di PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebagai Vice President untuk 4G LTE (2009 – 2016). Beliau juga pernah bekerja sebagai Konsultan di The Boston Legal Consulting Gorup (2007 – 2009).

Rangkap Jabatan
Komisaris Utama PT Bahana TCW Investment Management (Desember 2020 – Sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 48 years old as of December 31, 2023
Born in Jakarta, September 25, 1976

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Pantro Pander Silitonga was appointed as Business Director based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020.

Educational Background
- Master's Degree (S2), MBA in Finance, Strategy and Venture Capital, The University of Chicago, USA, 2007.
- Bachelor of Science in Process Reengineering, Operations & Accounting, Indiana University Bloomington, USA, 1998.

Certifications
-

Work Experience
Pantro Pander has served as President Commissioner of Mandiri Capital, a venture capital company owned by PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Prior to working at Mandiri Capital (2019 - 2020), he served as Senior Vice President of Bank Mandiri. Pantro Pander also worked for 7 years at PT XL Axiata Tbk (EXCL) as Vice President for 4G LTE (2009 - 2016). He also worked as a Consultant at The Boston Legal Consulting Group (2007 - 2009).

Concurrent Position
President Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (December 2020 - Present).

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Berhenti menjabat per 17 Desember 2024
*) Officially resigned on December 17, 2024

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI 2024

Sepanjang tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) Tahunan tanggal 22 Januari 2025. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pantro Pander Silitonga sebagai Direktur Bisnis Perusahaan. Pantro Pander Silitonga diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi di Dewan Ekonomi Nasional pada 23 Desember 2024, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada 17 Desember 2024. Dengan pengangkatan tersebut, Pantro Pander Silitonga secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bisnis IFG.

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Direksi Perusahaan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM, 1 (satu) orang Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Throughout 2024, there have been changes in the composition of the Board of Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on January 22, 2025. The changes in the composition of the Board of Directors were made based on the Company's needs. The 2024 AGMS decided to honorably dismiss Pantro Pander Silitonga as the Company's Business Director. Pantro Pander Silitonga was appointed as Executive Director for Monitoring and Evaluation of Priority Economic Programs at the National Economic Council on December 23, 2024, in accordance with Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 88/M of 2024 on the Appointment of the National Economic Director, which was issued on December 17, 2024. With this appointment, Pantro Pander Silitonga is no longer serving as Business Director in IFG.

As of the publication of this annual report, the Company's Board of Directors consists of 5 (five) members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Director of Human Capital, 1 (one) Technical Director concurrently serving as Acting Business Director, and 1 (one) Director of Finance. The composition and basis for the appointment of the Company's Board of Directors is shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rianto Ahmadi*	Direktur Teknik Technical Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No SK-313/MBU/09/2021 Tanggal : 20 September 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-313/MBU/09/2021 Dated: September 20, 2021.
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Finance Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

*Ditetapkan merangkap sebagai Plt. Direktur Bisinis oleh Dewan Komisaris sejak tanggal 26 Desember 2024
*Appointed as Acting Director of Business by the Board of Commissioners since December 26, 2024

PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS



JOSEPH GEORGINO GODONG

SEVP Teknologi Informasi | SEVP of Information Technology
Menjabat sejak 11 Oktober 2021 | Started serving since October 11, 2021

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	63 tahun per 31 Desember 2024 63 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	11 Oktober 2021 October 11, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Teknik Elektro Universitas Trisakti Electrical Engineering, Trisakti University
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Anggota Pengurus PPSC (RS St Carolus Jakarta) (Mei 2019) • Anggota Komite Audit (RS St Carolus Jakarta) (November 2019) • Technical Advisor (PT Mandiri Capital Indonesia) (April 2019 – Oktober 2019) • Technical Advisor (PT Mitra Transaksi Indonesia) (Januari 2019) • SEVP Operations (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (Maret 2018 – Oktober 2018) • Anggota Komite Kredit (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (2016 – Oktober 2018) • Komisaris Utama (PT Mandiri Capital Indonesia) (Januari 2016 – April 2019) • Komisaris (PT Mandiri Capital Indonesia) (Juli 2015 – Januari 2016) • SEVP Information & Technology (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (November 2014 – Februari 2018) • Executive Officer (Bank Mega) (Mei 2014 – Juli 2014) • Direktur Teknologi Informasi dan Operasi (Bank Mega) (April 2013 – April 2014) • Direktur Teknologi Informasi, Operasi, dan Finance (Bank Mega) (April 2010 – April 2013) • Direktur Kepatuhan (Permata Bank) (Agustus 2008 – Agustus 2009) • Direktur (Permata Bank) (April 2008 – Agustus 2008) • Direktur Teknologi Informasi dan Operational (Permata Bank) (Februari 2006 – April 2008) • Direktur Finance & Information Serv (Permata Bank) (Oktober 2002 – Februari 2006) • Direktur Financial Serv (Bank Bali) (Desember 2000 – Oktober 2002) • Tim Pengelola (Bank Bali) (November 2000 – Desember 2000) • Member of the PPSC Management Board (St. Carolus Hospital, Jakarta) (May 2019) • Member of the Audit Committee (St. Carolus Hospital, Jakarta) (November 2019) • Technical Advisor (PT Mandiri Capital Indonesia) (April 2019 – October 2019) • Technical Advisor (PT Mitra Transaksi Indonesia) (January 2019) • SEVP of Operations (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (March 2018 – October 2018) • Member of the Credit Committee (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (2016 – October 2018) • President Commissioner (PT Mandiri Capital Indonesia) (January 2016 – April 2019) • Commissioner (PT Mandiri Capital Indonesia) (July 2015 – January 2016) • SEVP of Information & Technology (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) (November 2014 – February 2018) • Executive Officer (Bank Mega) (May 2014 – July 2014) • Director of Information Technology and Operations (Bank Mega) (April 2013 – April 2014) • Director of Information Technology, Operations, and Finance (Bank Mega) (April 2010 – April 2013) • Director of Compliance (Permata Bank) (August 2008 – August 2009) • Director (Permata Bank) (April 2008 – August 2008) • Director of Information Technology and Operations (Permata Bank) (February 2006 – April 2008) • Director of Finance & Information Services (Permata Bank) (October 2002 – February 2006) • Director of Financial Services (Bank Bali) (December 2000 – October 2002) • Management Team (Bank Bali) (November 2000 – December 2000
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 113/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tentang Pengangkatan Selaku SEVP Teknologi Informasi tanggal 11 Oktober 2021. Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 113/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 concerning the Appointment as SEVP of Information Technology on October 11, 2021.



ROSMAYLINDA NASUTION

SEVP Manajemen Bisnis | SEVP of Business Management
Menjabat sejak 2 Juni 2021 | Started serving since June 02, 2021

Kewarganegaraan Nationality	:	Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	2 Juni 2021 June 02, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Parahyangan Catholic University • SKAGIT Valley College (A.A Degree) • Western Washington University • Washington State University (B.A. - Marketing) • Washington State University (M.B.A. in Management)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Chief Marketing Officer (Lippo Life Assurance – LLA) (Januari 2019) • Chief Distribution and Communication Officer, Director (Zurich Topaz) (Januari 2017 – Agustus 2018) • Chief Executive Officer (Jardine Lloyd Thompson) (2014 – 2016) • Marketing & Business Director (PT ACE INA Insurance) (2013 – 2014) • Accident & Health Director (PT ACE INA Insurance) (2009 – 2013) • Strategic Partnership Director (PT Asuransi CIGNA) (2006 – 2009) • Assosiate Director, Business Development (PT Asuransi CIGNA) (2005 – 2006) • Executive Manager, Affinity Relationship & Group Benefits Manager (2003 – 2005) • Group Benefits Manager & Credit Life Manager (2002 – 2022) • Group Benefits Manager (2001 – 2002) • Corporate Sales Senior Manager (PT Asuransi Cigna Indonesia) (2000 – 2001) • Chief Marketing Officer (Lippo Life Assurance – LLA) (January 2019) • Chief Distribution and Communication Officer, Director (Zurich Topaz) (January 2017 – August 2018) • Chief Executive Officer (Jardine Lloyd Thompson) (2014 – 2016) • Marketing & Business Director (PT ACE INA Insurance) (2013 – 2014) • Accident & Health Director (PT ACE INA Insurance) (2009 – 2013) • Strategic Partnership Director (PT Asuransi CIGNA) (2006 – 2009) • Assosiate Director, Business Development (PT Asuransi CIGNA) (2005 – 2006) • Executive Manager, Affinity Relationship & Group Benefits Manager (2003 – 2005) • Group Benefits Manager & Credit Life Manager (2002 – 2022) • Group Benefits Manager (2001 – 2002) • Corporate Sales Senior Manager (PT Asuransi Cigna Indonesia) (2000 – 2001)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 131/SK-DIR/BPUI/SDM/IX/2021 tentang Pengangkatan Selaku SEVP Manajemen Bisnis tanggal 2 Juni 2021. Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 131/SK-DIR/BPUI/SDM/IX/2021 concerning Appointment as SEVP of Business Management dated June 2, 2021.



OKTARINA DWIDYA SISTHA

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan | Head of Corporate Secretary Division
Menjabat sejak 24 Oktober 2022 | Started serving since October 22, 2022

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	43 tahun per 31 Desember 2024 43 years old as of December 31, 2024
Domisili Age	:	Jakarta , Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	24 Oktober 2022 October 24, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2019) • Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2000) • Master of Law from the University of Indonesia (2019) • Bachelor of Law from the University of Indonesia (2000)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Indonesia Financial Group (Oktober, 2022 – sekarang) • Vice Presindent Complience, Indonesia Investment Authority (INA) (Juni, 2021 – Oktober, 2022) • Indonesia Financial Group (Desember, 2020 – Mei, 2021) • Lembaga Penjamin Simpanan (2006 – 2020) • Head of Corporate Secretary Division, Indonesia Financial Group (October 2022 – present) • Vice President of Compliance, Indonesia Investment Authority (INA) (June 2021 – October 2022) • Indonesia Financial Group (December 2020 – May 2021) • Deposit Insurance Agency (2006 – 2020)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022 tentang Pengangkatan Selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 24 Oktober 2022. Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022 concerning the Appointment as Head of the Corporate Secretary Division of the Company (Persero) dated October 24, 2022.



YULLYAN, CIA

Kepala Divisi SKAI | Head of Internal Audit Unit Division
Menjabat sejak 4 Oktober 2021 | Started serving since October 2, 2021

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2024 48 years old as of December 31, 2024
Domisili Age	:	Tangerang, Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	4 Oktober 2021 October 04, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	· Master (Akuntansi) Universitas Indonesia (2006) · Sarjana (Akuntansi) Universitas Brawijaya (2001) · Diploma (Akuntansi) STAN (1998) · Master's Degree (Accounting) University of Indonesia (2006) · Bachelor's Degree (Accounting) Brawijaya University (2001) · Diploma (Accounting) STAN (1998)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	· Kepala Divisi SKAI, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (5 Oktober 2021 - sekarang) · Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 - 2021) · Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) · Tax Section Head, Premier Oil (2012 – 2013) · Head of Audit, CNOOC (2010 – 2012) · Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010) · Head of Internal Audit Unit Division, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (October 5, 2021 - present) · Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 - 2021) · Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) · Tax Section Head, Premier Oil (2012 – 2013) · Head of Audit, CNOOC (2010 – 2012) · Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tentang Pengangkatan Selaku Kepala SKAI tanggal 5 Oktober 2021. Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 regarding the Appointment as Head of Internal Audit Unit on October 5, 2021.

Selain Pejabat Eksekutif senior, berikut disampaikan *list* pejabat di level menengah Perusahaan :

In addition to senior executive officers, the following is a list of middle-level officers of the Company:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Ronald	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division
2	Dini Asima D.J Manurung	Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan Head of Accounting and Reporting Division
3	Jovita Josephine Sadrach	Kepala Divisi Bisnis Asuransi Jiwa Head of Life Insurance Business Division
4	*Vacant*	Kepala Divisi Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan Head of General Insurance and Guarantee Business Division
5	Anastasia Dara P.Dirani	Kepala Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi Head of Capital Market and Investment Business Division
6	Rimhalsyah	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division
7	Ibrahim Kholilul Rohman	Chief Senior Research Analyst Chief Senior Research Analyst
8	*Vacant*	Kepala Divisi Keuangan Perusahaan Head of Corporate Finance Division
9	Sariniatun	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division
10	Yustinus Rinaldo Arianto	Kepala Divisi Optimasi Operasional Asuransi Head of Insurance Operational Optimization Division
11	*Vacant*	Kepala Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan Head of Learning and Corporate Culture Division
12	Hendrich Syahputra	Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset Head of Procurement and Asset Management Division
13	*Vacant*	Kepala Divisi M&A dan Partnership Head of M&A and Partnership Division
14	Raden sihar Martogi Sinambela	Kepala Divisi Special Liability Management Head of Special Liability Management Division
15	Yusman Dedy Kusuma	Kepala Divisi Strategi Perusahaan Head of Corporate Strategy Division
16	Sandra Sahupala	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division
17	M.Yusuf Nur Sumarno P	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division
18	Dhinda Arisyiya	Kepala Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis Head of Digital Strategy and Business Development Division
19	Erwandy Susanto	Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi & Anggota Holding Head of Investment Portfolio Management & Subsidiaries Division
20	Rachmadi Gustrian	Project Leader Transformasi Office Project Leader Transformasi Office


IFG
IFG
IFG
IFG

DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 308 orang, mengalami peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan jumlah karyawan pada tahun 2023 yang sebanyak 300 orang.

Sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, pemetaan tingkat pendidikan karyawan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung perencanaan pengembangan kompetensi dan pengelolaan karier. Komposisi jenjang pendidikan karyawan juga mencerminkan arah kebijakan rekrutmen serta kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Adapun rincian demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

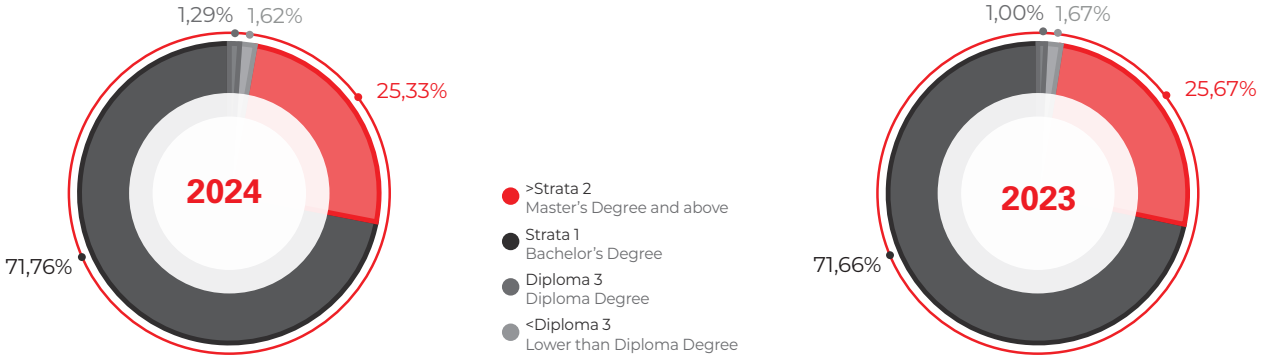
As of December 31, 2024, the Company had 308 employees, an increase of 2.67% compared to 300 employees in 2023.

As part of the company's efforts to build high-quality human capital, mapping the educational level of employees is an important indicator in supporting competency development planning and career management. The composition of employees' educational levels also reflects the direction of recruitment policies and the organization's readiness to face future business challenges. The details of employee demographics based on educational levels in the last two years are as follows:

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Orang)
Demographics of Employees Based on Education Level (Person)

Jenjang Pendidikan Education Level	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
>Strata 2 Master's Degree and above	52	27	79	25,32	49	28	77	25,67
Strata 1 Bachelor's Degree	116	105	221	71,75	111	103	214	71,67
Diploma 3 Diploma Degree	0	3	3	1,29	0	3	3	1,00
<Diploma 3 Lower than Diploma Degree	4	1	5	1,62	4	1	5	1,67
Jumlah Total	**172**	**136**	**308**	**100,00**	**164**	**136**	**300**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan hingga akhir tahun 2024, mayoritas karyawan perusahaan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1), yakni sebanyak 221 orang atau 71,75% dari total 308 karyawan. Proporsi ini relatif stabil dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 71,67%. Karyawan dengan pendidikan ≥Strata 2 (S2 ke atas) tercatat sebanyak 79 orang atau 25,32%, menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 77 orang (25,67%). Sementara itu, karyawan dengan jenjang pendidikan Diploma 3 dan di bawahnya masih tergolong sangat sedikit, masing-masing hanya 3 orang (1,29%) dan 5 orang (1,62%) di tahun 2024, serta tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2023.

Based on employee demographic data by education level as of the end of 2024, the majority of company employees have a bachelor's degree (S1), totalling 221 people or 71.75% of the total 308 employees. This proportion is relatively stable compared to 2023, which was 71.67%. Employees with an educational background of Master's degree (S2) or higher are recorded at 79 people, or 25.32%, showing an increase in numbers compared to the previous year, which was 77 people (25.67%). Meanwhile, employees with Diploma 3 education level and below are still very few, only 3 people (1.29%) and 5 people (1.62%) in 2024, and did not experience significant changes from 2023.

Data ini menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan kandidat dengan latar belakang pendidikan minimal Strata 1. Peningkatan proporsi karyawan dengan pendidikan tinggi (≥Strata 2) juga mengindikasikan upaya penguatan kapasitas SDM, terutama untuk posisi yang memerlukan kompetensi lanjutan dan spesialisasi. Stabilnya jumlah karyawan dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma 3 mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peran teknis atau operasional dasar tidak menjadi fokus utama dalam struktur SDM perusahaan saat ini. Hal ini juga selaras dengan orientasi perusahaan yang kemungkinan semakin mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

This data indicates that the Company maintains a recruitment policy prioritizing candidates with a minimum educational background of a Bachelor's degree. The increase in the proportion of employees with higher education (≥Master's degree) also suggests efforts to strengthen human capital capacity, particularly for positions requiring advanced competencies and specialization. The stable number of employees with educational backgrounds below Diploma 3 reflects that the need for technical or basic operational roles is not a primary focus in the company's current human capital structure. This is also aligned with the company's orientation, which is likely increasingly focused on improving the quality of human capital and professionalism to support the achievement of strategic objectives.

Komposisi usia karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, karena mencerminkan keseimbangan antara potensi, pengalaman, serta kebutuhan pengembangan organisasi ke depan. Distribusi usia yang sehat mendukung kesinambungan organisasi, baik dalam konteks regenerasi maupun perencanaan suksesi. Berikut ini disajikan data demografi karyawan perusahaan berdasarkan rentang usia selama dua tahun terakhir:

The composition of employee's age is an important indicator in human capital management, as it reflects the balance between potential, experience, and future organizational development needs. A healthy age distribution supports organizational continuity, both in terms of regeneration and succession planning. The following presents employee demographic data based on age ranges over the past two years:

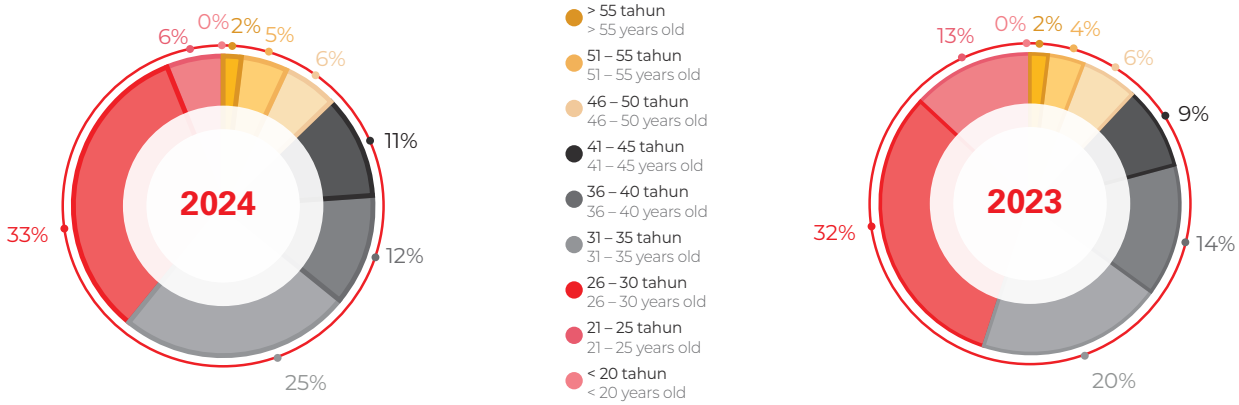
Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (Orang)
Demographics of Employee Based on Age Group (Person)

Rentang Usia Age Group	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
> 55 tahun > 55 years old	3	2	5	1,62	5	1	6	2
51 – 55 tahun 51 – 55 years old	12	3	14	4,55	8	4	12	4
46 – 50 tahun 46 – 50 years old	13	4	18	5,84	13	5	18	6
41 – 45 tahun 41 – 45 years old	20	15	34	11,04	15	11	26	9
36 – 40 tahun 36 – 40 years old	23	15	38	12,34	21	20	41	14
31 – 35 tahun 31 – 35 years old	50	27	77	25,00	37	24	61	20
26 – 30 tahun 26 – 30 years old	42	60	103	33,44	50	46	96	32

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (Orang)
Demographics of Employee Based on Age Group (Person)

Rentang Usia Age Group	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
21 – 25 tahun 21 – 25 years old	9	10	19	6,17	15	24	39	13
< 20 tahun < 20 years old	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Jumlah Total	**172**	**136**	**308**	**100,00**	**164**	**136**	**300**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan rentang usia per 31 Desember 2024, komposisi terbesar berada pada kelompok usia 26–30 tahun dengan total 103 orang atau 33,44% dari seluruh karyawan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebanyak 96 orang (32%), menandakan bahwa perusahaan masih konsisten merekrut karyawan di usia produktif awal yang umumnya memiliki fleksibilitas dan potensi pengembangan karier jangka panjang. Kelompok usia 31–35 tahun juga mengalami kenaikan dari 61 orang (20,33%) menjadi 77 orang (25%), menunjukkan akumulasi pengalaman kerja dari kelompok usia yang sebelumnya lebih muda. Di sisi lain, jumlah karyawan berusia di atas 55 tahun tercatat hanya 5 orang (1,62%), menunjukkan porsi karyawan senior yang relatif kecil.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur usia karyawan perusahaan saat ini didominasi oleh generasi muda, dengan sekitar 65% karyawan berada pada rentang usia 26–35 tahun. Hal ini mencerminkan strategi perusahaan dalam membangun *workforce* yang energik dan adaptif terhadap perubahan. Penurunan jumlah karyawan pada kelompok usia 36–40 tahun dan 41–45 tahun kemungkinan disebabkan oleh rotasi alami, pengunduran diri, atau pensiun dini, serta belum adanya penguatan signifikan dari kelompok usia di bawahnya yang masuk ke tahap menengah. Komposisi ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan suksesi dan pengembangan kompetensi, agar keseimbangan antara pengalaman dan inovasi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Based on employee demographic data by age range as of December 31, 2024, the largest composition is in the 26-30 years old age group with a total of 103 people or 33.44% of all employees. This number has increased from 2023 which was 96 people (32%), indicating that the Company is still consistently recruiting employees at an early productive age who generally have flexibility and long-term career development potential. The 31-35 years old age group also increased from 61 people (20.33%) to 77 people (25%), indicating the accumulation of work experience from previously younger age groups. On the other hand, the number of employees over 55 years old was recorded at only 5 people (1.62%), indicating a relatively small portion of senior employees.

Further analysis shows that the company's current employee age structure is dominated by the younger generation, with around 65% of employees in the 26-35 years old age group. This reflects the company's strategy of building an energetic and change-adaptive workforce. The decline in the number of employees in the 36-40 years and 41-45 years old age groups is likely due to natural rotation, resignation, or early retirement, as well as the absence of significant reinforcement from the lower age groups entering the middle stage. This composition is important to consider in succession planning and competency development, so that the balance between experience and innovation can be maintained in a sustainable manner.

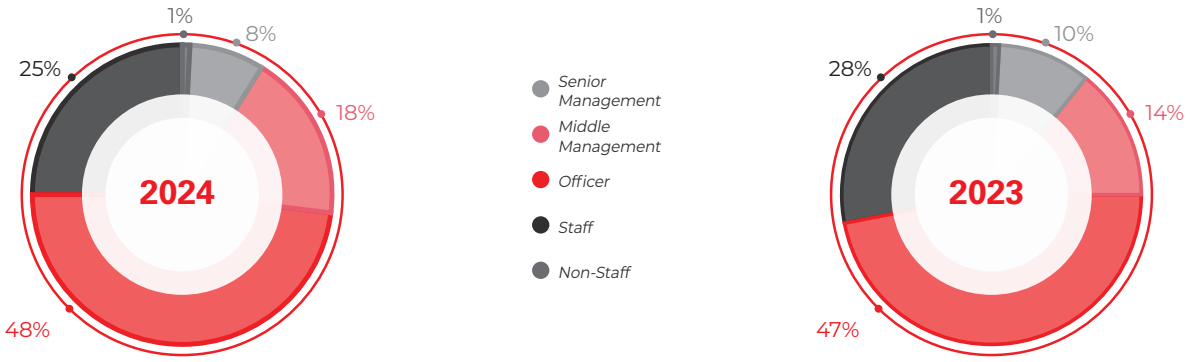
Struktur jenjang jabatan mencerminkan distribusi peran dan tanggung jawab karyawan di dalam organisasi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi. Pemantauan komposisi ini penting untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi dan kebutuhan strategis perusahaan. Berikut ini disajikan data demografi karyawan berdasarkan jenjang jabatan dalam dua tahun terakhir:

The position structure reflects the distribution of employee roles and responsibilities within the organization, and serves as a reference for career management and competency development. Monitoring this composition is important to ensure alignment between the organizational structure and the company's strategic needs. The following presents employee demographic data by position level in the last two years:

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan (Orang)
Demographic of Employee Based on Job Level (Person)

Jenjang Jabatan	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Senior Management	17	8	25	8,12	19	11	30	10,00
Middle Management	39	20	59	19,16	28	15	43	14,33
Officer	82	63	145	47,08	80	60	140	46,67
Staff	30	45	75	24,35	33	50	83	27,67
Non-Staff	4	0	4	1,30	4	0	4	1,30
Jumlah Total	**172**	**136**	**308**	**100,00**	**164**	**136**	**300**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan jenjang jabatan tahun 2024, distribusi karyawan terbesar masih berada pada level *Officer* dengan jumlah 145 orang atau 47,08% dari total karyawan. Jumlah ini relatif stabil dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 46,67%. Peningkatan signifikan terjadi pada jenjang *Middle Management*, dari 43 orang (14,33%) di tahun 2023 menjadi 59 orang (19,16%) di tahun 2024. Sementara itu, jumlah karyawan di jenjang *Senior Management* justru mengalami penurunan dari 30 orang (10,00%) menjadi 25 orang (8,12%), yang dapat disebabkan oleh restrukturisasi atau pengalihan kewenangan tertentu ke level manajerial menengah.

Based on employee demographic data by position level in 2024, the largest distribution of employees is still at the Officer level with 145 people or 47.08% of total employees. This number is relatively steady compared to 2023 which amounted to 46.67%. A significant increase occurred at the Middle Management level, from 43 people (14.33%) in 2023 to 59 people (19.16%) in 2024. Meanwhile, the number of employees at the Senior Management level decreased from 30 people (10.00%) to 25 people (8.12%), which may be caused by restructuring or transferring certain authorities to the middle managerial level.

Di sisi lain, proporsi *Staff* mengalami penurunan dari 27,67% menjadi 24,35%, mencerminkan kemungkinan adanya penguatan peran *Officer* atau pergeseran fungsi operasional ke arah yang lebih strategis. Jumlah *Non-Staff* tetap stabil di angka 4 orang (1,30%). Perubahan komposisi ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mendorong

On the other hand, the proportion of Staff decreased from 27.67% to 24.35%, reflecting the possibility of strengthening the role of Officers or shifting operational functions to a more strategic direction. The number of Non-Staff remained constant at 4 people (1.30%). This change in composition indicates the company's efforts to encourage the

penguatan kapasitas manajerial dan peran profesional, dengan meningkatkan proporsi karyawan di level *Officer* dan *Middle Management*. Hal ini selaras dengan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks, di mana pengambilan keputusan, inovasi, dan koordinasi lintas fungsi menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

strengthening of managerial capacity and professional roles, by increasing the proportion of employees at the Officer and Middle Management levels. This is in line with the needs of an increasingly complex organization, where decision-making, innovation, and cross-functional coordination have become increasingly important in supporting the achievement of the company's strategic goals.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (Orang)
Demographics of Employees Based on Employment Status (Person)

Status Kepegawaian Employment Status	2024				2023			
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**
Karyawan Tetap Permanent Employees	**163**	**128**	**291**	**94%**	151	126	277	92,33
Karyawan Kontrak Contract Employees	**10**	**7**	**17**	**6%**	13	10	23	7,67
Jumlah Total	**173**	**135**	**308**	**100%**	**164**	**136**	**300**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perusahaan secara berkala mendukung program pengembangan karyawannya, salah satu upayanya adalah dengan mengalokasikan biaya untuk program pengembangan kompetensi. Perusahaan telah menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp13,590,490,000,-, dengan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp13,062,493,386,-, jumlah tersebut meningkat 32,05% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.886.344.782.

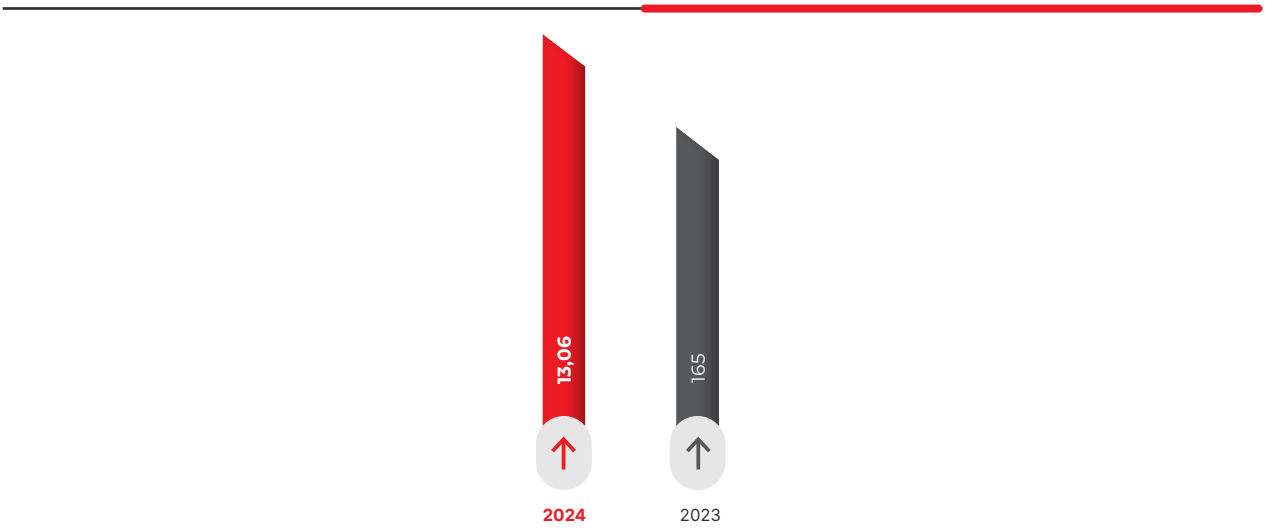
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The Company regularly supports employee development programs, one of which is by allocating funds for competency development programs. The Company has budgeted employee training costs of IDR13,590,490,000, with realization in 2024 amounting to IDR13,062,493,386, an increase of 32.05% when compared to 2023 amounting to IDR9,886,344,782.

Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp-miliar)
Competency Development Costs (IDR-Billion)

	2024	2023	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	13,06	9,89	3,17	32,05% ↑

Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp-miliar)
Comparison of Competency Development Costs (IDR-Billion)



Uraian lengkap terkait kebijakan pengelolaan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan oleh IFG dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

A complete description of the competency management and development policies for Employees carried out by IFG can be seen in the discussion of Human Capital in the Business Support Functions chapter in this Annual Report.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER STRUCTURE AND COMPOSITION

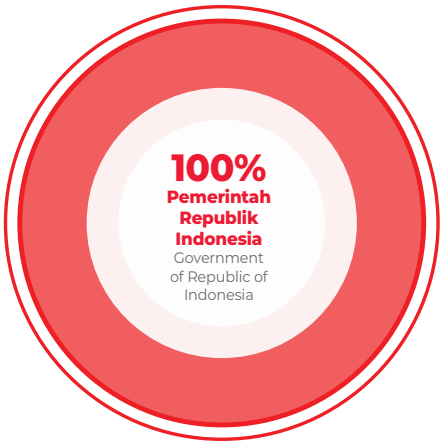
STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP OF THE COMPANY

Struktur Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2024
Structure of The Company's Shareholders As of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)** Issued and Fully-Paid Capital (IDR)	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Nominal Value of Shares = IDR1,000,000/share			
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	93.719.537	93.719.537.000.000	100,00

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2024
Composition of Company's Shareholders as of December 31, 2023



INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Selain itu, Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Penjelasan mengenai seluruh kepemilikan saham telah sesuai dengan yang disampaikan di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS EACH BELOW 5 (FIVE) PERCENT

Throughout 2024, the Company did not have any policies related to Employee Stock Ownership Program (ESOP) and Management Stock Ownership Program (MSOP). Furthermore, The Company also did not conduct an Initial Public Offering which would have enabled public ownership of the Company's shares. The explanation of all shareHoldings is in accordance with the above. Therefore, there are no Company officers or employees who own shares of the Company.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 93.719.537 lembar saham Perusahaan seluruhnya atau 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Penyertaan Modal Negara. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Perusahaan.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian BUMN.

INFORMATION ON MAJOR/ CONTROLLING SHAREHOLDERS

As of the end of 2024, a total of 93,719,537 shares of the Company, representing 100% of the Company's total shares, are owned by the Government of the Republic of Indonesia through State Equity Participation. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia acts as the majority shareholder and controller as well as the ultimate owner of the Company.

Based on PP No. 41 of 2003 concerning the Transfer of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance in State-Owned Enterprises (Persero), Public Enterprises (PERUM) and Government Agencies (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; the Shareholder of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises.

Pemerintah Republik Indonesia/Kepresidenan Government/ Presidency of Republic of Indonesia	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia State Palace Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Central Jakarta DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Central Jakarta, 10110 DKI Jakarta, Indonesia Phone +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id Office of Ministry of SOEs Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta, 10110 DKI Jakarta, Indonesia Phone +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS

INDONESIA FINANCIAL GROUP

Jasa Keuangan Non-Asuransi dan Penjaminan
Non-Insurance and Guarantee Financial Services

- PT Bahana Sekuritas ("BS") (99,99%)
- PT Bahana Mitra Investa ("BMI") (99,10%)
- PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") (60,00%)
- PT Bahana Arta Ventura ("BAV") (64,20%)
- PT Bahana Kapital Investa ("BKI") (99,96%)
- PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU") (53,00%)

Asuransi Umum dan Reasuransi
General Insurance and Reinsurance

- PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("JR") (99,99%)
- PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") (99,99%)

Penjaminan
Guarantee

- PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") (99,99%)
- PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") (99,99%)

Asuransi Jiwa dan Kesehatan
Life and Health Insurance

- PT Asuransi Jiwa IFG("IFG Life") (99,99%)

Entitas Anak
Subsidiaries

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Kepemilikan oleh IFG(%) Ownership by IFG(%)		Jumlah Aset(Rp-juta) Total Asset(IDR- Million)		Status Operasi Operational Status
					2024	2023	2024	2023	
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	Asuransi Insurance	Jakarta	1960	1961	**99,99%**	99,99%	**18.374.228**	18.207.187	Beroperasi In operation
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	Penjaminan Guarantee	Jakarta	1970	1970	**99,99%**	99,99%	**32.358.328**	32.231.220	Beroperasi In operation
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1971	1971	**99,99%**	99,99%	**37.178.049**	34.948.877*	Beroperasi In operation
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1973	1973	**99,99%**	99,99%	**15.616.613**	15.756.061	Beroperasi In operation
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	Mutual Fund, Discretionary Fund, Alternative Investment Mutual Fund, Discretionary Fund, Alternative Investment	Jakarta	1991	1991	**60,00%**	60,00%	**502.509**	491.732	Beroperasi In operation
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	Building Management, Hospitality Management	Jakarta	1989	1993	**52,88%**	52,88%	**285.922**	811.031	Beroperasi In operation
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Pembiayaan Produktif, Penyertaan Saham, Obligasi, Konversi Productive Financing, Equity Investments, Bonds, Conversion	Jakarta	1991	1991	**85,24%**	84,75%	**1.281.497**	1.639.769	Beroperasi In operation
PT Bahana Sekuritas (BS)	Perantara Perdagangan Efek, Penjamin Emisi Efek, Penasehat Keuangan Securities Brokerage, Underwriter, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	**99,20%**	99,20%	**856.326**	580.387	Beroperasi In operation
PT Bahana Kapital Investa (BKI)	Investment, Penasihat Keuangan Investment, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	**99,97%**	99,97%	**43.2101**	70.522	Beroperasi In operation
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	Dormant Company	Jakarta	1997	1997	**99,10%**	99,10%	**933**	1.368	Dormant
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	Asuransi Insurance	Jakarta	2020	2021	**99,99%**	99,99%	**34.967.966**	35.911.175*	Beroperasi In operation

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

1. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), selanjutnya disebut "Jasa Raharja" atau "Perusahaan", berdiri pada tanggal 1 Januari 1960. Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Di bidang asuransi kerugian, penerbitan Undang-undang tersebut dijelaskan melalui PP No. 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

  Seiring dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI), Jasa Raharja bergabung ke dalam BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. IFG bertindak sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi BUMN dengan anggota PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

- **Brief History**

  PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), hereinafter referred to as "Jasa Raharja" or the "Company", was established on January 1, 1960. The history of Jasa Raharja's establishment is closely linked to the government's policy of nationalizing Dutch-owned companies with the enactment of Law No. 86 of 1958 concerning the Nationalization of Dutch Companies. In the insurance sector, the issuance of the Law is explained through Government Regulation No. 3 of 1960 concerning the Determination of Dutch Loss Insurance Companies subject to Nationalization.

  With the issuance of Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI), Jasa Raharja has joined the state-owned Holding Company for Insurance, Guarantee, and Investment. IFG acts as the SOE Holding Company for Insurance, Guarantee, and Investment, with members including PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), and PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

- **Keunggulan**
  Jasa Raharja turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Excellence**
  Jasa Raharja participates in implementing and supporting Government policies and programs in the fields of economy, social security and national development in general, especially in the field of loss insurance by organizing social insurance programs, and optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and competitive services to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Jasa Raharja per 31 Desember 2024
Share ownership in Jasindo As of December 31, 2024



Manajemen Kunci Jasa Raharja per 31 Desember 2024
Key Management of Jasa Raharja As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Hendro Sugiatno
Komisaris Commissioner(s)	M. Khoerur Roziqin
Komisaris Independen Independent Commissioner	Eko Suwardi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iwan Faidi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Rimawan Pradiptyo
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Rivan A. Purwantono
Direktur Keuangan Director of Finance	Bayu Rafisukmawan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Harwan Muldidarmawan
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Rubi Handojo
Direktur Operasional Director of Operations	Dewi Aryani Suzana

Kinerja Keuangan Jasa Raharja
Financial Performance of Jasa Raharja
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	2023 (Rp-miliar) 2023 (IDR- billion)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**7.706,1**	7.587,6
Jumlah Beban Total Expenses	**6.166,7**	6.040,3
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	**1.539,3**	1.547,3
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**(205,9)**	(250,1)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**1.333,5**	1.297,2

2. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

  Jamkrindo berdiri pada 1980 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu, perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui PP No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

  Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan PP No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk menyukseskan

- **Brief History**

  Jamkrindo was established in 1980 as a Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still lagging behind that of state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to the Public Company for Cooperative Financial Development (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981 which was enhanced by Government Regulation No. 51 of 1981. 27 of 1985 dated May 31, 1985 on the General Company for Cooperative Financial Development.

  In 2018, the Government issued Government Regulation (PP) No. 35/2018 on Public Company (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, this regulation was issued to increase Jamkrindo's role in the national guarantee industry as an effort to succeed the Government's

kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484. AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian pada 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) No. 25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo.

- **Keunggulan**

Perseroan memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha UMKM, serta Koperasi, Penjaminan bagi BUMN Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan.

policies and programs in the field of economy and national development. The Government views that Jamkrindo needs to develop its business by adding to the Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support the Government's policies and programs in the economic sector and national development.

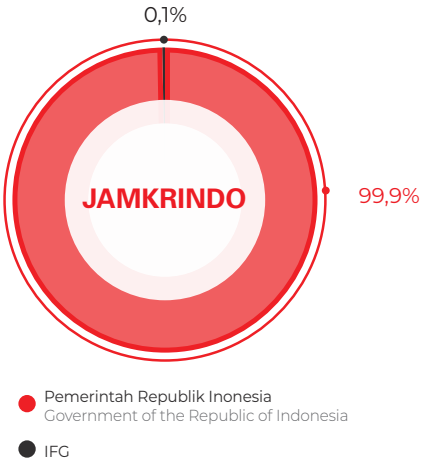
In 2020, President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of Jaminan Kredit Indonesia Corporation from a Public Company to become a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484. AH.01.01 of 2020 Regarding the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020.

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo (Persero) No. 25 dated February 24, 2020 was amended by the issuance of the Deed of Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020 which resulted in the change of Jamkrindo's status and name to PT Jamkrindo.

- **Excellence**

The Company aims to conduct business activities in the form of guarantees for MSMEs and cooperatives, guarantees for state-owned enterprises, warehouse receipt system guarantees, and other guarantees, as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on corporate governance principles.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2024
Share ownership in Jamkrindo As of December 31, 2024



Manajemen Kunci Jamkrindo per 31 Desember 2024
Key Management of Jamkrindo As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Krisna Wijaya
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hernita Alius Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Commissioner(s)	• Desty Arlaini • Ari Wahyuni • Angger P Yuwono
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Akhmad Purwakajaya
Direktur Bisnis dan Penjaminan Director of Business and Gurantee	Henry Panjaitan
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Suwarsito
Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	Abdul Bari
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General Affairs, and Risk Management	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno
Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Alia Nur Fitri

Kinerja Keuangan Jamkrindo
Financial Performance of Jamkrindo
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023 (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	**6.922,0**	6.354,7
Beban Penjaminan Bersih Net Guarantee Expenses	**5.019,3**	3.577,3
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**1.287,0**	1.638,9
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	**1.131,5**	1.436,8

3. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)



- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Kredit Indonesia, selanjutnya disebut "Askrindo" didirikan pada tanggal 6 April 1971, sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit dengan Pemegang Saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan didirikannya Askrindo adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan, agar UMKM dapat lebih memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

  Seiring perkembangan bisnis Perusahaan, Askrindo telah mengalami beberapa kali perubahan status kepemilikan saham, di mana pada awal pendiriannya pemegang saham Askrindo adalah Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kemudian, sejak tahun 2010, Bank Indonesia telah melepaskan seluruh sahamnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemegang Saham menjadi hanya Departemen Keuangan RI. Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Askrindo

- **Brief History**

  PT Asuransi Kredit Indonesia, hereinafter referred to as "Askrindo," was established on April 6, 1971, as a follow-up to the issuance of Government Regulation No. 1 of 1971 dated January 11, 1971 concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in Credit Insurance with Shareholders of Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The purpose and objective of establishing Askrindo is to provide solutions to problems faced by MSME players in gaining access to the banking credit system, allowing MSMEs to play a greater role in supporting national economic growth.

  Along with the development of the Company's business, Askrindo has undergone several changes in share ownership status, where at the beginning of its establishment Askrindo's shareholders were Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Then, since 2010, Bank Indonesia has released all of its shares to the Government of the Republic of Indonesia, thus, the one and only Shareholder is Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. On March 31, 2020, based on the Decree of the Ministry of SOEs, PT

bergabung dengan *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG). Hal ini seiring dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

Askrindo merged with the Insurance, Guarantee, and Investment Holding company Indonesia Financial Group (IFG). This is in line with the issuance of Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, derived from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) , PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero).

- **Keunggulan**
  Askrindo memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Selain itu, Perusahaan juga berupaya mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Excellence**
  Askrindo has the purpose and objective to conduct business in the field of insurance by conducting a loss insurance business, including with sharia principles and optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality services and strong competitiveness. In addition, the Company also seeks to obtain or pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Askrindo per 31 Desember 2024
Share ownership in Askrindo As of December 31, 2024



Manajemen Kunci Askrindo per 31 Desember 2024
Key Management of Askrindo As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Widodo Ekatjahjana
Komisaris Commissioner(s)	Encep Sudarwan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Viviet Savitri Putri
Komisaris Independen Independent Commissioner	Heru Kreshna Reza
Komisaris Independen Independent Commissioner	Renny Octavianus Rorong
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Fankar Umran
Direktur Teknik Director of Technical	Vincentius Wilianto
Direktur Keuangan Director of Finance	Leonardo Henry Gavaza
Direktur Kepatuhan, Sumber Daya Manusia & Manajemen Risiko Director of Compliance, Human Resource, & Management Risk	R Mahelan Prabantarikso
Direktur Bisnis Director of Business	Budhi Novianto

Kinerja Keuangan Askrindo
Financial Performance of Askrindo
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023* (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Premi Bruto Gross Premium	**5.589.003**	7.297,3
Pendapatan Premi-Bersih Net Premium Income	**8.484.980**	11.109,0
Pendapatan *Underwriting*-Bersih Net Underwriting Income	**-458.674**	2.845,9
Pendapatan Investasi Investment Income	**1.157.690**	1.157,2
Beban Usaha Operating Expenses	**-1.410.293**	(1.439,2)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat Profit Before Income Tax and Zakat	**-1.328.211**	1.601,9
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**-1.096.331**	1483,3

*) disajikan kembali
*)Restarted

4. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

asuransi jasindo

A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo yang bergerak di bidang jasa asuransi umum, merupakan Anggota *Holding* dari IFG yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan status baru yang berlaku sejak tahun 2020 tersebut, walau masih merupakan bagian dari BUMN dan masih terdapat kepemilikan negara, Asuransi Jasindo tidak lagi menggunakan kata "Persero" sebagai nama resmi perusahaan.

  Asuransi Jasindo merupakan hasil nasionalisasi terhadap dua perusahaan asuransi, yaitu NV Assurantie Maatschappij de Nederlander dan Bloom Vander. Kebijakan nasionalisasi terhadap kedua perusahaan asuransi tersebut diikuti dengan perubahan nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Kehadiran PT Asuransi Bendasraya bertujuan untuk memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh keamanan serta perekonomian negara.

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan *merger* antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Penggabungan tersebut disahkan pada tanggal 2 Juni 1973 melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1.

- **Keunggulan**

  Asuransi Jasindo melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Brief History**

  PT Asuransi Jasa Indonesia or Asuransi Jasindo, which is engaged in general insurance services, is a Holding Member of IFG, which is a State-Owned Enterprise (SOE). With the new status that has been in effect since 2020, although it is still part of a state-owned enterprise and still has state ownership, Asuransi Jasindo no longer uses the word "Persero" as the company's official name.

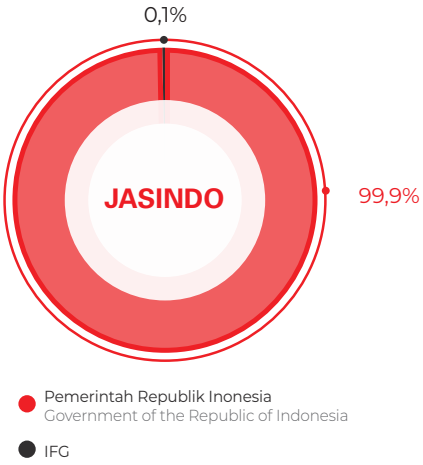
  Asuransi Jasindo is the result of the nationalization of two insurance companies, namely NV Assurantie Maatschappij de Nederlander and Bloom Vander. The nationalization policy of the two insurance companies was followed by a change in their names to PT Asuransi Bendasraya engaged in General Insurance in Rupiah and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) engaged in General Insurance in foreign currency. The presence of PT Asuransi Bendasraya aims to provide maximum benefits to the community and strengthen the security and economy of the country.

  Based on the Decree of the Minister of Finance No. 764/MK/IV/12/1972 dated December 9, 1972, the Indonesian government decided to merge PT Asuransi Bendasraya and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) into PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the General Insurance business. The merger was legalized on June 2, 1973 through Notarial Deed by Mohamad Ali No. 1.

- **Excellence**

  Asuransi Jasindo conducts business in the field of loss insurance and other similar businesses in accordance with the applicable laws and regulations as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality services and strong competitiveness to obtain / pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Jasindo per 31 Desember 2024
Share ownership in Jasindo As of December 31, 2024



Manajemen Kunci Jasindo per 31 Desember 2024
Key Management of Jasindo As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen Independent Commissioner	· Amir Tohar · Bimantoro Wiyono
Komisaris Commissioner(s)	· Indah Anggoro Putri · Dwi Pudjiastuti Handajani
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Andy Samuel
Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	Diwe Novara
Direktur Operasional Director of Operations	Ocke Kurniandy
Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Ocke Kurniandy
Direktur SDM dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Dewi Utari
Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	Syah Amondaris

Kinerja Keuangan Jasindo
Financial Performance of Jasindo
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023* (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Premi-Bersih Net Premium Income	**1.516**	1.166
Beban *Underwriting* Underwriting Expenses	**(1.417)**	(926)
Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income	**99**	241
Beban Usaha Operating Expenses	**(377)**	(399)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**110**	112
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**158**	103

5. PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)

BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

  BTIM bergerak dibidang manajemen investasi dan tanggal 21 Juni 1994, Perusahaan memperoleh izin operasi sebagai perusahaan manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Sejak tanggal 31 Desember 2012, seluruh fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

  BTIM merupakan Perusahaan patungan antara IFG (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Company LLC (dengan kepemilikan saham 40%), salah satu lembaga keuangan manajer investasi terkemuka di Amerika Serikat. Pasca terjadinya *massive redemption* pada industri Reksa Dana di tahun 2005, sejak saat itu sampai dengan akhir tahun 2020, industri Reksa

- **Brief History**

  BTIM operates in investment management sector and on June 21, 1994 the Company obtained an operating license as an investment management company from the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK). Since December 31, 2012, all functions, duties and authority of Bapepam and LK have been transferred to the Financial Services Authority (OJK) based on Law no. 21 of 2011 concerning OJK.

  BTIM is a joint venture between IFG (with 60% share ownership) and TCW Capital Investment Company LLC (with 40% share ownership), one of the leading investment management financial institutions in United States. After the massive redemption occurred in the Mutual Fund industry in 2005, from then until the end of 2020, the Mutual Fund industry became increasingly

Dana semakin bergairah dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sehingga dana kelolaan BTIM mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp51,40 triliun.

Hingga saat ini, BTIM telah dipercaya sebagai Manajer Investasi untuk mengelola Asian Bond Fund yang dihimpun oleh *Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP), yang merupakan lembaga kerjasama bank-bank sentral di negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

- **Keunggulan**

BTIM dipercaya dalam pengelolaan investasi dari beberapa institusi besar multinasional, yang mana hal ini menunjukkan pengakuan pasar dan investor atas reputasi dan kinerja BTIM sebagai Manajer Investasi dalam mengelola investasi jangka panjang. Kepercayaan internasional yang diemban BTIM direfleksikan oleh mandat dari *Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks* (EMEAP) untuk mengelola sebagian dana bank-bank sentral Asia Pasifik.

Sejak 2005, BTIM adalah satu-satunya Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksa Dana Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund (ABF - IBI Fund), serta menjadi pelopor dalam industri Reksa Dana sebagai Manajer Investasi pertama yang mampu menciptakan inovasi produk *Exchange Traded Fund* (ETF) berbasis portofolio Obligasi Pemerintah RI. Ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode efek R-ABFII (Unit Penyertaan Reksa Dana ABF yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia). Pada tahun 2008, BTIM sebagai Manajer Investasi pertama yang mampu menerbitkan produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis portofolio efek bersifat ekuitas pada Perseroan Tertutup sektor infrastruktur yang bergerak di bidang Pelabuhan Umum, dan sebagai Manajer Investasi pertama di Indonesia yang memiliki fitur produk investasi berbasis *endowment fund*.

enthusiastic with the recovery of public confidence in the capital market so that BTIM's managed funds increased to IDR51.40 trillion.

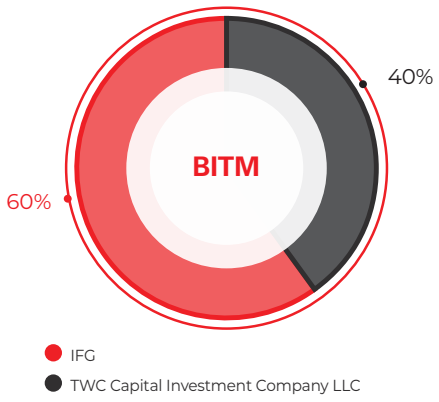
Until now, BTIM has been trusted as the Investment Manager to manage the Asian Bond Fund which was collected by the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), which is a cooperative institution for central banks in East Asia and Pacific countries.

- **Excellence**

BTIM is trusted in managing investments from several large multinational institutions, which shows market and investor recognition of BTIM's reputation and performance as an Investment Manager in managing long-term investments. The international trust that BTIM carries is reflected in the mandate from the Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) to manage part of the funds of Asia Pacific central banks.

Since 2005, BTIM has been the only Investment Manager trusted to manage the Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund (ABF - IBI Fund), as well as being a pioneer in the Mutual Fund industry as the first Investment Manager capable of creating innovative Exchange Traded Fund (ETF) products based on the Indonesian Government Bond portfolio. It is listed on the Indonesian Stock Exchange with the effect code R-ABFII (ABF Mutual Fund Participation Units which can be traded on the Indonesian Stock Exchange). In 2008, BTIM was the first Investment Manager capable of issuing a Limited Participation Mutual Fund (RDPT) product based on an equity portfolio of securities in a Closed Company in the infrastructure sector operating in the Public Port sector, and as the first Investment Manager in Indonesia which have a feature-based investment product of endowment funds.

Kepemilikan Saham BTIM per 31 Desember 2024
Share ownership in BTIM As of December 31, 2024



Manajemen Kunci BTIM per 31 Desember 2024
Key Management of BTIM As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Hario Soeprobo *
Komisaris Commissioner(s)	Pantro Pander Silitonga
Komisaris Commissioner(s)	Marc Irwin Stern

*) Merangkap Komisaris Independen
*) concurrently as Independent Commissioner

Direksi Board of Directors	
Presiden Direktur President Director	Rukmi Proborini
Direktur Investasi Director of Investment	Doni Firdaus
Direktur Pemasaran Director of Marketing	Danica Adhitama
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Director of Risk Management and Compliance	Novi Imelda

Kinerja Keuangan BITM
Financial Performance of BITM
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	2023 (Rp-miliar) 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Usaha Operating Income	**247,1**	207,7
Beban Usaha Operating Expenses	**179,3**	146,6
Laba Usaha Operating Profit	**55,3**	61,1
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih Net other income (Expenses)	**4,2**	9,6
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	**59,5**	70,6
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**42,0**	55,0

6. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

GRAHANIAGA TATAUTAMA
A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

GNTU merupakan salah satu Anggota *Holding* dari IFG yang bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung-gedung atau bagian gedung-gedung untuk dipergunakan sebagai ruangan kantor, tempat usaha dan keperluan lainnya.

Usaha komersial GNTU dimulai sejak 1 Juni 1993 dengan didirikannya gedung Graha CIMB Niaga, sebuah gedung perkantoran yang terletak di kawasan perkantoran terkemuka, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman ("SCBD"), di Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, dengan luas lantai 65.119 m2 yang terdiri dari 28 lantai dan 3 *basement* serta area yang disewakan (*rentable area*) seluas kurang lebih 32.247,24 m2.

- **Keunggulan**

Manajemen GNTU berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu *(The Quality Management System)* ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan *(The Environment Management System)* 14001:2015 dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). GNTU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti pertama di kawasan Jakarta Selatan yang menyandang sertifikat ISO 14001:2015 tersebut. GNTU memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 tersebut dari lembaga sertifikasi internasional *Lloyd's Register Quality Assurance Limited*, serta mendapat akreditasi dari UKAS *Quality Management* dan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu. GNTU juga memperoleh Sertifikasi dengan predikat Platinum pada tanggal 13 Maret 2019 dan *Green Office* dengan predikat Gold pada tanggal 21 April 2016 dari *Building and Construction Authority International Singapore* (BCAI).

- **Brief History**

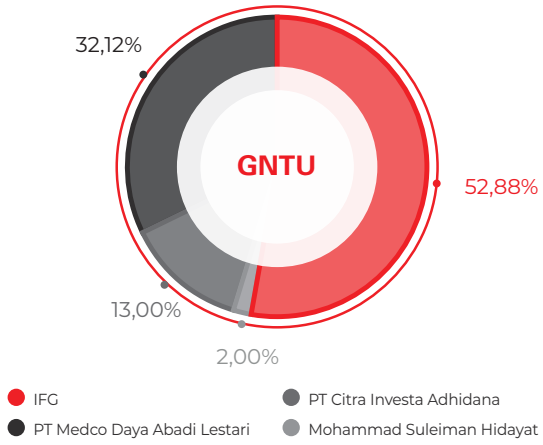
GNTU is a Holding Member of IFG which operates in the filed of ownership, management and rental of buildings or parts of buildings for use as office space, business premises and other purposes.

GNTU's commercial business began on June 1, 1993 with the establishment of the Graha CIMB Niaga building, an office building located in a leading office area, Sudirman Integrated Commercial Area ("SCBD"), on Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, with a floor area of 65, 119 m2 consisting of 28 floors and 3 basements as well as a rentable area of approximately 32,247.24 m2

- **Excellence**

In carrying out daily operational activities, GNTU Management is guided by the Quality Management System of ISO 9001: 2015, Environmental Management System of 14001:2015, as well as the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). GNTU is the first property company in the South Jakarta area that holds the ISO 14001: 2015 certificate. GNTU obtained ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications from the international certification body Lloyd's Register Quality Assurance Limited, and received accreditation from UKAS Quality Management and KAN (National Accreditation Committee) Quality System Certification Body. GNTU also obtained a Platinum Certificate on March 13, 2019 and Green Office with a Gold title on April 21, 2016 from the Building and Construction Authority International (BCAI) Singapore.

Kepemilikan Saham GNTU per 31 Desember 2024
Share ownership in GNTU As of December 31, 2024



Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah (Rp)** Total (in IDR)		**Jumlah (Lembar Saham)** Total (Shares)		**%**
	Seri A Series A	**Seri B** Series B	**Seri A** Series A	**Seri B** Series B	
IFG	23.014.062.500	183.750.000.000	4.468.750	8.750.000	52,88
Mohammad Suleiman Hidayat	2.575.000.000		500.000		2,00
PT Citra Investa Adhidana	16.737.500.000		3.250.000		13,00
PT Medco Daya Abadi Lestari	41.360.937.500		8.031.250		32,12
Total		**267.437.500.000**	**16.250.000**	**8.750.000**	**100,00**

Manajemen Kunci GNTU per 31 Desember 2024
Key Management of GNTU As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Dedi Sjahrir Panigoro
Komisaris Commissioner(s)	Rizal Ariansyah
Komisaris Commissioner(s)	Indira Purwita Djohan
Komisaris Commissioner(s)	Ariful Yaqin
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Chairul Tri Handinarno
Direktur Director (s)	Dewa Agung Rudy PH

Kinerja Keuangan GNTU
Financial Performance of GNTU
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023 (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Usaha Operating Income	184,4	172,1
Beban Operasional Operational Expenses	(118,5)	(109,6)
Laba Usaha Operating Profit	65,9	62,6
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	76,0	70,0
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	74,4	68,9

7. PT Bahana Artha Ventura (BAV)

- **Riwayat Singkat**

  PT Bahana Artha Ventura (BAV) didirikan atas keterkaitan dengan penugasan awal Pemerintah kepada IFG untuk membina dan menggerakkan sektor UMKM. Sejalan dengan perkembangan bisnis IFG, penugasan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada BAV untuk mencapai tujuan IFG dalam pembiayaan dan pembinaan sektor UMKM di Indonesia.

  BAV senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas sebaran pergerakan sektor riil secara nasional. Hingga saat ini, BAV telah mendirikan 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengajak mitra lokal dan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia sebagai pemegang saham di masing-masing daerah untuk memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang dibinanya. Bermula dari hanya 7 (tujuh) PMVD pada tahun 1994, BAV menargetkan untuk memiliki PMVD di setiap provinsi. Target tersebut tercapai dengan status kepemilikan PMVD di 27 propinsi. Hingga kini, BAV telah memiliki 25 PMVD di 24 provinsi khususnya sejak ditutupnya kantor PMVD di Timor Timur pada tahun 1999 dan pelepasan PMVD NTT serta likuidasi PMVD Sumatera Selatan.

- **Keunggulan**

  BAV merupakan perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Oleh karena itu, BAV mampu menjangkau dan terbukti efektif untuk mengembangkan UMKM di hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan produk pembiayaan pola bagi hasil, penyertaan saham dan obligasi konversi.

- **Brief History**

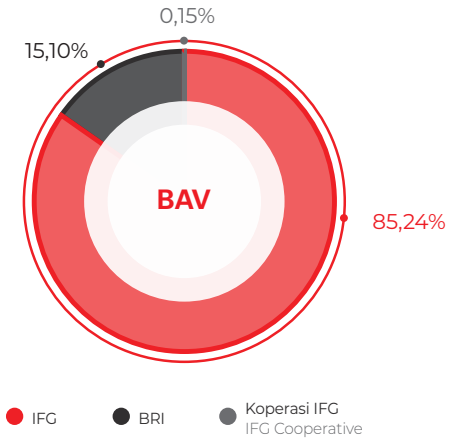
  PT Bahana Artha Ventura (BAV) was founded in connection with the government's initial assignment to IFG to develop and mobilize the MSME sector. In line with IFG's business development, this assignment was completely handed over to BAV to achieve IFG's goals in financing and developing the MSME sector in Indonesia

  BAV continues to support government policies in encouraging regional economic growth and expanding the distribution of real sector movements nationally. Until now, BAV has established 27 Regional Venture Capital Companies (PMVD) spread across 26 provinces in Indonesia. This is done by inviting local partners and several leading companies in Indonesia as shareholders in each region to strengthen the network and expand the MSME basis which is fostered. Starting from only 7 (seven) Regional Venture Capital Companies (PMVD) in 1994, BAV targets to have PMVD in each province. The target was achieved with PMVD ownership status in 27 provinces. To date, BAV has had 25 PMVDs in 24 provinces particularly since the closing of the PMVD office in East Timor in 1999 and the liquidation of the South Sumatran PMVD.

- **Excellence**

  BAV is a venture capital company that has the widest network in Indonesia. Therefore, BAV is able to reach and prove effective in developing MSMEs in almost all regions in Indonesia, with profit-sharing financing products, investment in shares and convertible bonds

Kepemilikan Saham BAV per 31 Desember 2024
Share ownership in BAV As of December 31, 2024



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah (Rp) Total (in IDR)	Jumlah (Lembar Saham) Total (Shares)	%
IFG	399.538.000.000	399.538	85,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.207.000.000	71.207	15,10
Koperasi IFG IFG Cooperative	721.000.000	721	0,15
Total	471.466.000.000	471.466	100

Manajemen Kunci BAV per 31 Desember 2024
Key Management of BAV As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Plt. Komisaris Utama Acting President Commissioner	Hafiz Arief
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hafiz Arief
Komisaris Commissioner(s)	Rianto Ahmadi
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Agus Wicaksono
Direktur Keuangan & Operasional Director of Finance & Operations	Rukita
Direktur Pembinaan Usaha Director of Business Development	Noersari Handayani

Kinerja Keuangan BAV
Financial Performance of BAV
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	2023 (Rp-miliar) 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Usaha Operating Income	**128,4**	138,9
Beban Usaha Operating Expenses	**156,1**	137,1
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	**(27,8)**	1,8
Penghasilan (Beban)/Lain-lain Bersih Net Income (Expenses)/Other	**7,1**	12,4
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Net Income (Expenses)/Other	**(20,6)**	14,2
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**(19,9)**	11,6

8. PT Bahana Sekuritas (BS)

- **Riwayat Singkat**
  Sejak tanggal 12 November 1993, PT Bahana Sekuritas (BS) memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek. Setelah adanya persetujuan tersebut, Perusahaan secara konsisten memberikan komitmen dan kontribusi nyata dalam mendorong upaya Pemerintah untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia.

- **Brief History**
  On November 12, 1993, PT Bahana Sekuritas (BS) obtained approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to carry out activities as an underwriter and securities trading broker Since the approval, the Company has consistently made a real commitment and contribution in encouraging the government's efforts to develop the capital market in Indonesia.

Selain itu, Perusahaan juga secara aktif mengembangkan perdagangan saham dan obligasi di pasar sekunder dan menjadi penjamin emisi saham (IPO) maupun obligasi berbagai perusahaan di Indonesia. Perusahaan juga berperan aktif dalam menangani proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta nasional guna membantu perusahaan tersebut menjadi lebih sehat dan kuat, serta mampu berdaya saing di era globalisasi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan jasa Pasar Modal dan Penasihat Keuangan Nasional yang Terkemuka di Indonesia melalui inovasi, keahlian, kepemimpinan, dan komitmen terhadap harapan pemangku kepentingan dan perkembangan berkesinambungan pasar modal di Indonesia. Visi ini diaktualisasikan melalui misi perusahaan yaitu untuk Menyediakan Solusi Jasa Pasar Modal dan Penasihat Keuangan yang Inovatif, Berkualitas, Aman dan Terpercaya untuk mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Di pasar saham, Perusahaan telah menangani berbagai transaksi yang menjadi *landmark* di pasar modal Indonesia.

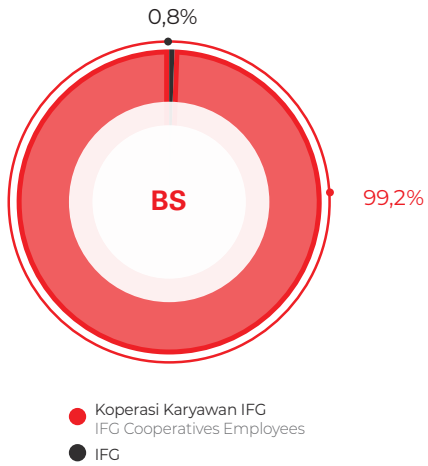
- **Keunggulan**
  Perusahaan telah berhasil menunjukkan eksistensinya di pasar modal dan keuangan Indonesia, dengan menjadi salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan disegani di Indonesia. Eksistensi dan peran BS diakui oleh pelaku bisnis di dalam negeri serta pelaku bisnis di dunia keuangan internasional. Berbagai penghargaan telah diterima dari sejumlah media maupun lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional yang mana menegaskan posisi BS di sektor industri keuangan Indonesia.

The Company actively develops stocks and bonds trading in the secondary market and becomes an underwriter (IPO) and bonds of various companies in Indonesia. The Company also plays an active role in handling the restructuring process of state-owned and national private companies to help the company become healthier and stronger, and able to compete in the era of globalization.

In conducting its business activities, the Company has a vision to become a Leading Capital Market and National Financial Advisory service company in Indonesia through innovation, expertise, leadership, and commitment to stakeholder expectations and sustainable development of the capital market in Indonesia. This vision is actualized through the Company's mission, which is to Provide Innovative, Quality, Safe and Reliable Capital Market and Financial Advisory Services Solutions to support Indonesia's Economic Growth. In the stock market, the Company has handled various transactions that have become landmarks in the Indonesian capital market.

- **Excellence**
  The Company has successfully demonstrated its existence in the Indonesian capital and financial markets, by becoming one of the leading and respected securities companies in Indonesia. The existence and role of BS are recognized by business people in the country and business people in the world of international finance. Various awards have been received from a number of leading media and institutions both nationally and internationally which confirm BS's position in the Indonesian financial industry sector.

Kepemilikan Saham BS per 31 Desember 2024
Share ownership in BS As of December 31, 2024



Manajemen Kunci BS per 31 Desember 2024
Key Management of BS As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Plt. Komisaris Utama Acting President Commissioner	Hari Gursida
Plt. Komisaris Independen Acting Independent Commissioner	Hari Gursida
Komisaris Commissioner(s)	Heru Handayanto
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Reza Benito Zahar
Direktur Operasional Director of Operations	Suryadi Adipranata
Direktur Capital Market Director of Capital Market	Jolanda Veronica Sondak
Direktur Perbankan Investasi Director of Investment Banking	Tulus Nababan

Kinerja Keuangan BS
Financial Performance of BS
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023 (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Pendapatan usaha Operating Income	**137,73**	151,3
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**(33,83)**	(107,3)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	**(32,56)**	(101,1)

9. PT Bahana Kapital Investa (BKI)

BAHANA
Kapital Investa
A member of IFG

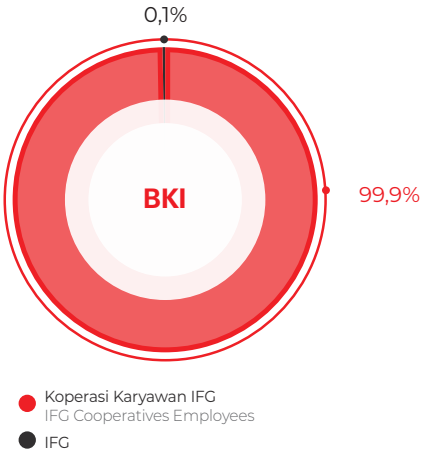
- **Riwayat Singkat**
  BKI merupakan Anggota *Holding* IFG yang bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*), serta direaktivasi sejak Juni 2018. BKI melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal baik secara langsung maupun melalui instrumen keuangan lainnya pada perusahaan dan menyediakan layanan jasa konsultasi kepada perusahaan-perusahaan seperti penggabungan usaha dan peleburan usaha (*merger and acquisition*), studi kelayakan (*feasibility study*), strategi perusahaan (*corporate strategy*), maupun perencanaan pengembangan bisnis (*corporate planning*).

- **Keunggulan**
  Pada tahun 2024, BKI mencatatkan kinerja pendapatan usaha sebesar Rp16,45 miliar. Seluruh *project advisory* yang didapatkan oleh BKI berasal dari ekosistem *Holding* IFG ataupun BUMN. Adapun ruang lingkup *advisory* BKI antara lain *merger* dan akuisisi, *restructuring*, divestasi, dan lainnya.

- **Brief History**
  BKI is a Holding Member of IFG engaged in investment and financial advisory services and has only been reactivated since June 2018. BKI invests in the form of equity participation either directly or through other financial instruments in the companies and provides consulting services to companies such as on business mergers and acquisitions, feasibility studies, corporate strategy, as well as business development planning (corporate planning).

- **Excellence**
  In 2024, BKI recorded an operating revenue performance of IDR16.45 billion. All project advisory obtained by BKI comes from the IFG or SOEs (State-Owned Enterprise) holding ecosystem. The scope of BKI's advisory includes mergers and acquisition, restructuring, divestment, and others.

Kepemilikan Saham BKI per 31 Desember 2024
Share ownership in BKI As of December 31, 2024



Manajemen Kunci BKI per 31 Desember 2024
Key Management of BKI As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Achmad Hafiz
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hexana Tri Sasongko
Direksi Board of Directors	
Direktur Director (s)	Syahrudin Ikhsan Dongoran

Kinerja Keuangan BKI
Financial Performance of BKI
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	2023 (Rp-miliar) 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Usaha Operating Income	**16,45**	30,5
Beban Operasional Operational Expenses	**(24,11)**	(30, 7)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	**(7,66)**	(0,2)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Other net income (expenses)	**(10,09)**	0,2
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	**(17,75)**	0,03
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**(17,17)**	0,2

10. PT Bahana Mitra Investa (BMI)

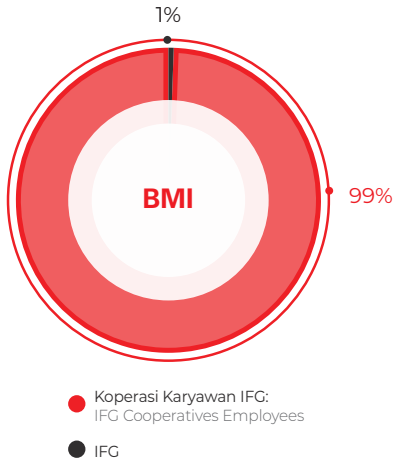
- **Riwayat Singkat**
  PT Bahana Mitra Investa ("BMI") didirikan pada tanggal 15 Mei 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris Sari Bhirawati, S.H., pada saat itu merupakan pengganti dari Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2062.HT.01.01 tanggal 23 Maret 1998. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana Mitra Investa No. 2 tanggal 14 Juni 2019 dibuat dihadapan Hengky Antolis, S.H, MKn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0031361.AH.01.02 tahun 2019. Sejak 15 Mei 1997, Perusahaan mulai beroperasi dengan fokus bisnis untuk memberikan jasa keuangan dan non keuangan dalam bidang Investasi.

- **Keunggulan**
  Hingga akhir tahun 2020, BMI tidak melakukan kegiatan usaha, dana yang ada hanya didepositokan ke Bank.

- **Brief History**
  PT Bahana Mitra Investa ("BMI") was established based on Notarial Deed No. 14, dated May 15, 1997 made before Notary Sari Bhirawati, S.H., at that time a substitute for Zacharias Omawele, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2062. HT.01.01 dated March 23, 1998. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bahana Mitra Investa No. 2 dated June 14, 2019 made before Hengky Antolis, S.H, MKn, Notary in Jakarta. The deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU0031361.AH.01.02 of 2019. The Company started its operations on May 15, 1997. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's business is to provide financial and nonfinancial services in the investment sector.

- **Excellence**
  Until the end of 2020, BMI did not carry out business activities, existing funds were only deposited in the bank.

Kepemilikan Saham BMI per 31 Desember 2024
Share ownership in BMI As of December 31, 2024



Manajemen Kunci BMI per 31 Desember 2024
Key Management of BMI As of December 31, 2024

Komisaris Commissioner	Leonardo Henry Gavaza
Plt. Direktur Acting Director	Riyanto Dwiatmodjo

Kinerja Keuangan BMI
Financial Performance of BMI
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023 (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Pendapatan Operasional Operating Income	**-**	-
Beban Usaha Operating Expenses	**(791)**	(727)
Pendapatan Non Operasional Bersih Net Non-Operational Income	**4**	(3)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	**(715)**	(730)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**(715)**	(730)

11. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

- **Riwayat Singkat**

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Hadijah, S.H. IFG Life bergerak dalam bidang asuransi jiwa untuk memperluas cakupan bisnis dalam memenuhi target seluruh kebutuhan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Sebagai Anggota *Holding* dari IFG, Perusahaan diharapkan dapat menjadi perusahaan yang lebih besar dan sustain terutama di sektor asuransi jiwa.

IFG Life mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 April 2021. Hingga kini, Perusahaan senantiasa melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif. Berlandaskan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, IFG Life memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

- **Brief History**

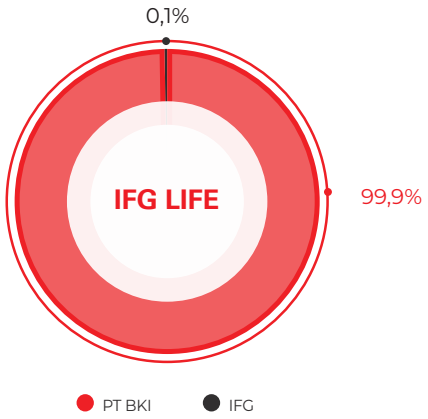
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) was established on October 22, 2020 through a Deed of Establishment of a Limited Liability Company by Notary Hadijah, S.H. IFG Life operates in the life insurance sector to expand its business scope to meet the target of all insurance and underwriting needs in Indonesia. As a Holding Member of IFG, the Company is expected to become a larger and more sustainable company, especially in the life insurance sector.

IFG Life obtained an operational license from the Financial Services Authority (OJK) on April 7, 2021. Until now, the Company continues to complement and strengthen the IFG ecosystem as an SOE Holding Insurance, Guarantee and Investment which has a strategic position in developing maximum, healthy, and comprehensive protection insurance products and services, which are based on governance and strong and prudent risk management, as well as optimizing the use of technology to expand service access so that maximum protection services can be provided to customers.

- **Keunggulan**
  IFG Life senantiasa melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai Perusahaan asuransi perlindungan (jiwa dan kesehatan), penjaminan, dan investasi yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif. Berlandaskan pada tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, IFG Life berkomitmen secara penuh untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

- **Excellence**
  IFG Life continues to complement and strengthen the IFG ecosystem as a protection insurance (life and health), guarantee and investment company which has a strategic position in developing maximum, healthy and comprehensive protection insurance products and services. With a basis on good governance, strong and careful risk management, as well as optimizing the use of technology, IFG Life is fully committed to expanding service access so that protection services can be provided optimally to customers.

Kepemilikan Saham IFG Life per 31 Desember 2024
Share ownership in IFG Life As of December 31, 2024



- IFG: 20.509.999 lembar saham. masing-masing per lembar saham senilai Rp1.000.000
- PT Bahana Kapital Investa: 1 (satu) lembar saham
- IFG: 20,509,999 shares. With each share being worth IDR1,000,000
- PT Bahana Kapital Investa: 1 (one) share

Manajemen Kunci IFG Life per 31 Desember 2024
Key Management of IFG Life As of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Dasuki Amsir
Komisaris Independen Independent Commissioner	Yasril Rasyid
Komisaris Independen Independent Commissioner	Maliki Heru Santosa
Komisaris Independen Independent Commissioner	Akhmad Gojali Harahap
Komisaris Commissioner (s)	Rianto Ahmadi

Manajemen Kunci IFG Life per 31 Desember 2024
Key Management of IFG Life As of December 31, 2024

Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Budi Tua Arifin Tampubolon
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Management Risk	Eli Wijanti
Direktur Operasional dan Teknologi informasi Director of Operations and Information Technology	Iskak Hendrawan
Direktur Investasi Director of Investment	Mufri Dharmawan
Direktur Keuangan Director of Finance	Ryan Diastana Firman
Direktur Bisnis Individu Director of Individual Business	Fabiola Noralita
Direktur Bisnis Korporasi Director of Corporate Business	Bugi Riagandhy

Kinerja Keuangan IFG Life
Financial Performance of IFG Life
2024-2023

	2024 (Rp-miliar) 2024 (IDR- billion)	**2023* (Rp-miliar)** 2023 (IDR- billion)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**7.295.227**	2.695,3
Jumlah Beban Total Expenses	**7.390.078**	3.357,3
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	**-53.044**	(659,4)

*) disajikan kembali
*)Restarted

ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, REGIONAL NETWORKS, AND INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

ALAMAT ENTITAS ANAK	ADDRESS OF SUBSIDIARIES
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920 Telp: +6281210500500 Fax: +62 21 522084 Surel/E-mail: pusat@jasaraharja.co.id Web: www.jasaraharja.co.id	**PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja** Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920 Phone: +6281210500500 Fax: +62 21 522084 E-mail: pusat@jasaraharja.co.id Web: www.jasaraharja.co.id
PT Jaminan Kredit Indonesia Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia (Central Jakarta 10610, Indonesia) Telp: +62 21 6540335 Surel/E-mail: contact@jamkrindo.co.id Web: www.jamkrindo.co.id	**PT Jaminan Kredit Indonesia** Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia (Central Jakarta 10610, Indonesia) Phone: +62 21 6540335 E-mail: contact@jamkrindo.co.id Web: www.jamkrindo.co.id
PT Asuransi Kredit Indonesia Graha Askrindo Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610 - Indonesia. Telp: +62 21 6546471-72 Fax: +62 21 6546483-84 Surel/E-mail: askrindo@askrindo.co.id Web: www.askrindo.co.id	**PT Asuransi Kredit Indonesia** Graha Askrindo Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610 - Indonesia. Phone: +62, 21, 6546471- 72 Fax: +62, 21, 6546483- 84 E-mail: askrindo@askrindo.co.id Web: www.askrindo.co.id
PT Asuransi Jasa Indonesia Graha Jasindo Jalan Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat 10340 (Jalan Menteng Raya No. 21, Central Jakarta 10340) Telp : +62 21 3924737 contact center : 1500-073 Surel/E-mail: contactcenter@asuransijasindo.co.id Web : www.jasindo.co.id	**PT Asuransi Jasa Indonesia** Graha Jasindo Jalan Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat 10340 (Jalan Menteng Raya No. 21, Central Jakarta 10340) Phone: +62 21 3924737 contact center: 1500-073 E-mail: contactcenter@asuransijasindo.co.id Web : www.jasindo.co.id
PT Bahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia Telp: +62 21 250 5585 Surel/E-mail: support.bahanatcw@bahana.co.id Web: www.link.bahanatcw.com	**PT Bahana TCW Investment Management** Graha CIMB Niaga, 21st floor Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia Phone: +62 21 250 5585 E-mail: support.bahanatcw@bahana.co.id Web: www.link.bahanatcw.com
PT Grahaniaga Tatautama Graha CIMB Niaga Lantai B1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia Telp: +62 21 2505250 Fax: +62 21 2505150 Web: www.grahaniaga.co.id	**PT Grahaniaga Tatautama** Graha CIMB Niaga Floor B1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia Phone: +62 21 2505250 Fax: +62 21 2505150 Web: www.grahaniaga.co.id

ALAMAT ENTITAS ANAK	ADDRESS OF SUBSIDIARIES
PT Bahana Artha Ventura KMO Building Suite 701, Lt.7 Jl. Kyai Maja No.1 Gunung, Kebayoran - Jakarta Selatan 12120 Telp : +62 21 7918 2688 Web : www.bahanaventura.com	**PT Bahana Artha Ventura** KMO Building Suite 701, 7th floor Jl. Kyai Maja No.1 Gunung, Kebayoran - South Jakarta 12120 Phone: +62 21 7918 2688 Web : www.bahanaventura.com
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga, lantai 19 Jl Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +62 21 250 5678 Fax: +62 21 250 5087 Surel: cs@bahana.co.id Web: www.bahanasekuritas.id	**PT Bahana Sekuritas** Graha CIMB Niaga, 19th floor Jl Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia Phone: +62 21 250 5678 Fax: +62 21 250 5087 Email: cs@bahana.co.id Web: www.bahanasekuritas.id
PT Bahana Kapital Investa Graha CIMB Niaga, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia Telp: +62 21 2505080 Surel/E-mail: adminbki@bahana.co.id Web: www.bahanakapitalinvesta.id	**PT Bahana Kapital Investa** Graha CIMB Niaga, 23rd floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia Phone: +62 21 2505080 E-mail: adminbki@bahana.co.id Web: www.bahanakapitalinvesta.id
PT Asuransi Jiwa IFG Graha CIMB Niaga Lt. 5 dan 6 Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta - 12190 Telp : 1500 176 Web : www.ifg-life.id	**PT Asuransi Jiwa IFG** Graha CIMB Niaga 5th and 6th floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta - 12190 Phone: 1500 176 Web : www.ifg-life.id
PT Bahana Mitra Investa Graha CIMB Niaga Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia Telp: +62 21 2505250 Fax: +62 21 5225909 Web: www.bahana.co.id	**PT Bahana Mitra Investa** Graha CIMB Niaga 18th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia Phone: +62 21 2505250 Fax: +62 21 5225909 Web: www.bahana.co.id

STRUKTUR GROUP IFG
GROUP STRUCTURE OF IFG

IFG

Produk Keuangan dan Pasar Modal Manajemen Aset Sekuritas dan Investasi
Financial Products and Capital Market of Securities and Investment Asset Management

- Manajemen Investasi
  Investment Management
  60,0%
- Investasi
  Investment
  99,9%
- Penjaminan dan Perdagangan
  Guarantee and Trade
  99,2%
- Model Ventura
  Venture Model
  64,6%
- Manajemen Properti
  Property Management
  53,0%

Asuransi Umum dan Penjaminan
General Insurance and Guarantee

- Asuransi Sosial
  Social Insurance
  99,99%
- Penjaminan Kredit, Termasuk Penjaminan KUR
  Credit Guarantee, Including KUR Guarantee
  99,99%
- Asuransi Umum
  General Insurance
  99,99%
- Asuransi Umum Termasuk Penjaminan KUR
  General Insurance, Including KUR Guarantee
  99,99%
- Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah Termasuk Penjaminan KUR
  General Insurance with Sharia Principles Including KUR Guarantee
- Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah
  General Insurance with Sharia Principles
- Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah
  General Insurance with Sharia Principles
- Reasuransi Profesional
  Professional Reinsurance

Asuransi Jiwa dan Kesehatan
Life and Health Insurance

- **IFG Life**
  99,99%

KEANGGOTAAN ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

Sebagai langkah upaya dalam memperkuat bisnisnya, IFG aktif dalam berbagai asosiasi, sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

As part of its efforts to strengthen its business, IFG is active in various associations, as listed in the following table:

No.	**Nama Asosiasi** Name of Association
1.	Forum Hukum BUMN SOE Legal Forum
2.	Forum Human Capital Indonesia BUMN Indonesian SOE Human Capital Forum
3.	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal Internal Audit Communication Forum
4.	Forum Manajemen Risiko BUMN Internal Audit Communication Forum
5.	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal Internal Audit Communication Forum
6.	Srikandi BUMN

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

THE CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING OF SHARE

Per 31 Desember 2024, Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham kepada publik dan pencatatan saham di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi *(corporate action)*; dan nama bursa di mana saham dicatatkan.

As of December 31, 2023, the Company does not trade shares with the public or list shares on stock exchanges, whether in Indonesia or abroad. Therefore, there is no information regarding share trading including the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action; number of registered shares after each corporate action; and the name of the stock exchange where the shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

THE CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND REGISTRATION OF OTHER `SECURITIES

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of the end of 2024, the Company has not issued securities such as bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on the stock exchange, either in Indonesia or abroad. As a result, there is no information available regarding the names of other securities, the issuance dates of other securities, the interest rates/returns on other securities, the maturity dates of other securities; the offering values of other securities; the names of the stock exchanges where other securities are listed; and the ratings of other securities.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK — PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/ Profession	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Alamat Address	Plaza Asia, 10th & 11th FloorJl. Jend. Sudirman kav. 59Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	7 Januari 2025 – 30 September 2025 January 7, 2025 - September 30, 2025
Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024
Jasa Lainnya Other Services	• Pengujian dan pelaporan atas kepatuhan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PSA Nomor 62 • Audit umum atas Laporan Keuangan TJSL untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 • Testing and reporting on IFG's compliance with applicable laws and regulations under PSA No. 62 • General audit of the JSP Financial Statements for the year ending December 31, 2024
Biaya Fee	Rp5.150.000.000 (belum termasuk PPN dan Out of Pocket (OPE) luar kota IDR5,150,000,000 (excluding VAT and Out of Pocket (OPE) out of town)



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

Sebagai bentuk keterbukaan informasi Perusahaan kepada public, IFG senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Untuk itu, IFG senantiasa memberikan informasi yang komunikatif dan *up-to-date* mengenai Perusahaan kepada semua pihak melalui situs resmi Perusahaan www.ifg.id. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi kepada seluruh pihak dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan, meliputi:

1. Informasi Umum Perusahaan;
2. Informasi Produk dan Layanan;
3. Informasi Publik; dan
4. Informasi Lainnya.

Situs web Perusahaan terdiri dari 9 (sembilan) kanal dengan konten sebagai berikut:

As the Company's form of information disclosure towards the public, IFG has always prioritize the principles of corporate governance. Therefore, IFG has always provide communicative and up-to-date information about the Company to all parties via the official Company's website www.ifg.id. The Company is also committed to prioritizing the principle of transparency to all parties as much as possible to provide the required information, which includes:

1. General Information on the Company;
2. Product and Service Information;
3. Public Information; and
4. Other Information.

The Company's website consists of 9 (nine) channels with the following content:

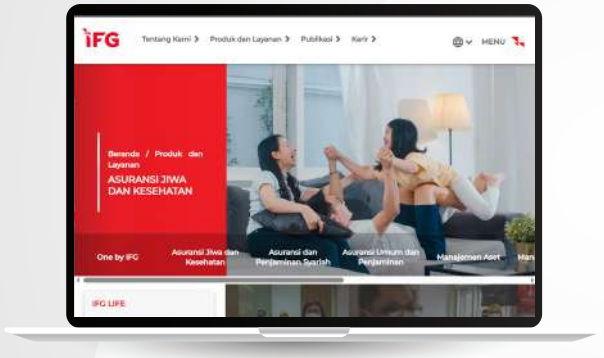


Nama Kanal | Channel Name

Tentang Kami
About Us

Konten
- **Sekilas Perusahaan**
- **Visi, Misi dan Nilai Perusahaan**
- **Sejarah Kami**
- **Profil Manajemen**
- **Struktur *Holding***
- **Struktur Organisasi**
- **Penghargaan dan Sertifikat**

Content:
- Company at a Glance
- Vision, Mission, and Corporate Culture
- Our History
- Management Profile
- Holding Structure
- Organizational Structure
- Awards and Certifications



Nama Kanal | Channel Name

Produk dan Layanan
Products and Services

Konten
- **One by IFG**
- **Asuransi dan Penjaminan Syariah**
- **Asuransi Umum dan Penjaminan**
- **Manajemen Aset**
- **Manajemen Properti**
- **Penasihat Investasi dan Modal Usaha**
- **Reasuransi**
- **Sekuritas dan Investasi**

Content:
- One by IFG
- Sharia Insurance and Guarantee
- General Insurance and Guarantee
- Asset Management
- Property Management
- Investment Advisor and Ventur Capital
- Reinsurance
- Securities and Investment

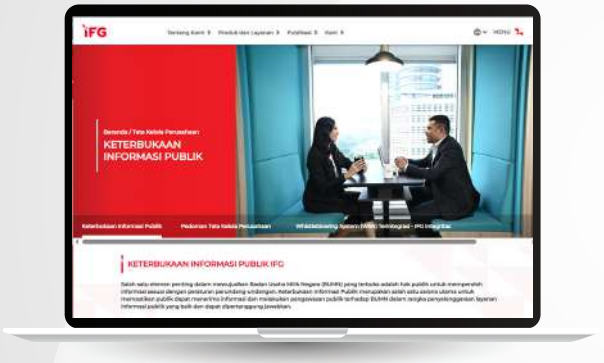


Nama Kanal | Channel Name

Publikasi
Publication

Konten
- **Galeri**
- ***Insight / Stories***
- **Laporan Tahunan**
- **Siaran Pers**

Content:
- Gallery
- Insight / Stories
- Annual Report
- Press Release



Nama Kanal | Channel Name

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Konten
- **Keterbukaan Informasi Publik**
- **Pedoman Tata Kelola Perusahaan**
- ***Whistleblowing System* (WBS) Terintegrasi – IFG Integritas**

Content:
- Public Information Disclosure
- Corporate Governance Guidelines
- Integrated Whistleblowing System (WBS) – IFG Integritas

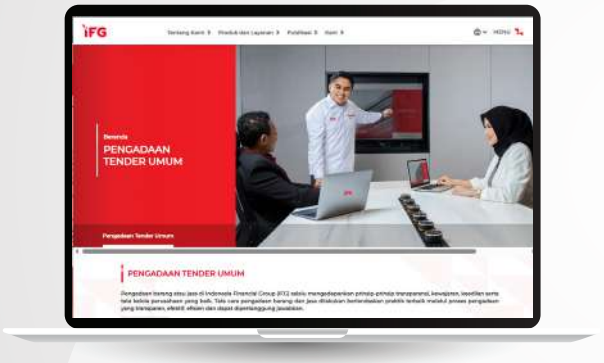


Nama Kanal | Channel Name

Karir
Career

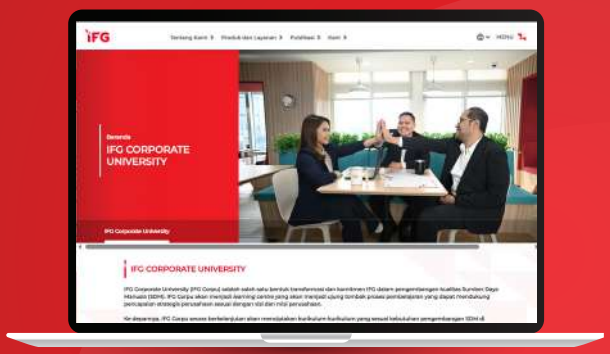
Konten
- **Life at IFG**
- **Rekrutmen**

Content:
- Life at IFG
- Recruitment



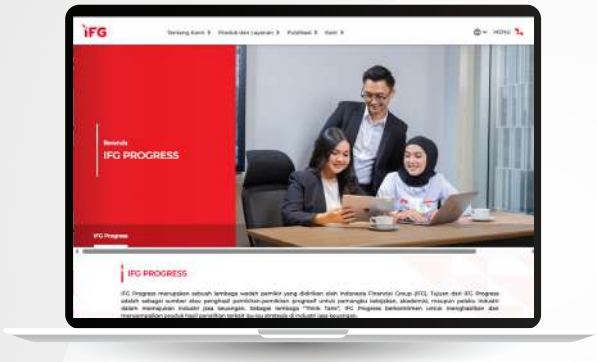
Nama Kanal | Channel Name

Pengadaan Tender Umum
Public Tender Procurement



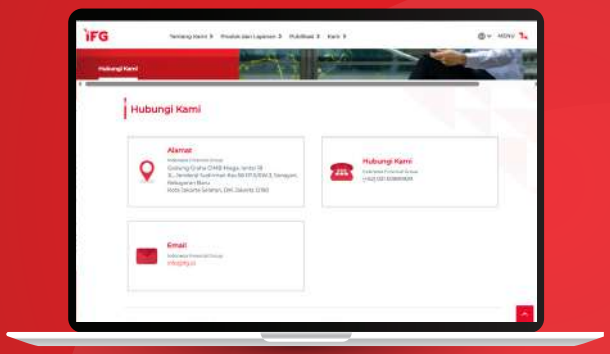
Nama Kanal | Channel Name

IFG Corporate University



Nama Kanal | Channel Name

IFG Progress



Nama Kanal | Channel Name

Hubungi Kami
Contact Us

Perusahaan senantiasa memperbarui informasi yang disajikan dalam situs secara berkala untuk memberikan informasi terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Selain itu, Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Instagram, Facebook, X, LinkedIn, dan Youtube.

The Company regularly updates the information presented on its website to provide the latest information to all stakeholders and the general public. The Company also has social media accounts as part of its information disclosure and communication with all stakeholders, including Instagram, Facebook, X, LinkedIn, and YouTube.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATION

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2024
Awards Obtained in 2024

Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards Name	Diberikan Oleh Awarded by
1 Februari 2024 February 01, 2024	Living Legend Awards 2024	Warta Ekonomi
22 Februari 2024 February 22, 2024	The Iconomics Indonesia's Top 20 Digital Innovation Awards	Iconomics
7 Maret 2024 March 07, 2024	· PR Indonesia Award 2024 · Bronze Winner dalam kategori Manajemen Krisis Sub Kategori Krisis & Pasca Krisis · PR Indonesia Award 2024 · Bronze Winner in the Crisis Management category, Subcategory Crisis Post-Crisis	PR Indonesia
7 Maret 2024 March 07, 2024	· BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS 2024) - Communications Best Communications on Corporate Action kategori Best Corporate Restructure	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
13 Maret 2024 March 13, 2024	· 13th Anugerah BUMN 2024 · Business Reinvention untuk Optimalisasi Peluang Bisnis di Industri 4.0 · Terbaik II · Kategori Transformasi Organisasi Perusahaan BUMN · 13th Anugerah BUMN 2024 · Business Reinvention for Optimizing Business Opportunities in the · Best Industry 4.0 II · Category of Organizational Transformation of State-Owned Enterprises	BUMN Track
1 Juni 2024 June 01, 2024	TOP CSR of the Year 2024: Special Achievement for Social Initiative "Mudik Lebaran". TOP CSR of the Year 2024: Special Achievement for Social Initiative Mudik Lebaran/ led Homecoming.	Info Brand

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024
Certifications that still valid in 2024

Tanggal Date	Nama Sertifikasi Certification Name	Berlaku Hingga Valid Until	Diberikan oleh Given by
12 November 2021 November 12, 2021	Anti Bribery Management System – ISO 37001:2016	11 November 2024 November 11, 2024	The British Standards Institution (BSI)
18 Agustus 2022 August 18, 2022	IT Capability Level 3.32 - COBIT 2019	-	PT Mitratex Konsultan - COBIT 2019
26 Desember 2024 December 26, 2024	Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 : 2024 ISO 27001 Information Security Management System Certificate: 2024	25 Desember 2027 December 25, 2027	PT TUV SUD Indonesia





4

Fungsi
Penunjang Bisnis
Business Supporting Function

Dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan asuransi yang terus berkembang, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan daya saing Perusahaan.

In facing the evolving dynamics of the financial and insurance industry, strengthening human resources (HR) is key to the Company's sustainability and competitiveness.

Sumber Daya Manusia
Human Capital



PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN

Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan IFG dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Divisi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi SDM. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia membawahi tiga departemen utama yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDM secara menyeluruh, yaitu:

1. **Departemen Strategi SDM,** yang bertugas menyusun kebijakan, inisiatif strategis, dan perencanaan SDM, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan struktur organisasi, serta penyusunan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan strategi perusahaan.
2. **Departemen Manajemen Talenta,** yang berperan dalam pengelolaan siklus karyawan, meliputi rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengelolaan suksesi dan *talent pool*, hingga program-program peningkatan keterlibatan dan retensi talenta.
3. **Departemen Layanan & Analisis SDM,** yang mengelola layanan administrasi SDM, penggajian, manajemen data karyawan, serta menyajikan analisis dan pelaporan SDM berbasis data *(HR analytics)* untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

COMPANY'S HUMAN CAPITAL MANAGER

Organizational Structure of Human Capital Division

The management of Human Capital (HC) within IFG is conducted by the Human Capital Division as stated in the Decree of the Board of Directors Number 15 of 2024 concerning Organizational Structure Policy. This division is led by the Head of Human Capital Division, who reports directly to the Director in charge of the HC function. In completing his/her duties, the Head of Human Capital Division oversees three main departments, each of which has a strategic role in overall HC management, namely:

1. **HC Strategy Department,** which is responsible for developing policies, strategic initiatives, and HC planning, including workforce needs planning, organizational structure development, and the development of HC policies and procedures that are aligned with the company's strategy.
2. **Talent Management Department,** which plays a role in managing the employee lifecycle, including recruitment and selection, competency development, performance management, succession and talent pool management, as well as talent engagement and retention programs.
3. **HC Services & Analytics Department,** which manages HC administration services, payroll, employee data management, and provides data-driven HC analytics and reporting to support more accurate and data-driven decision-making.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pengelolaan SDM dapat berjalan secara terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

This organizational structure is designed to ensure that all HC management functions can be operated in an integrated, adaptive and responsive manner to the dynamics of organizational needs, and support the achievement of the company's strategic goals.

Jumlah Karyawan Divisi Sumber Daya Manusia

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengelolaan SDM secara menyeluruh dan terintegrasi, Divisi Sumber Daya Manusia saat ini didukung oleh total 17 karyawan yang tersebar di tiga departemen utama. Komposisi karyawan tersebut dirancang untuk mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap penguatan kebijakan strategis, layanan operasional SDM, serta pengelolaan dan pengembangan talenta. Adapun komposisi karyawan pada Divisi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Total Employees of Human Capital Division

To ensure the effective implementation of HC management functions in a comprehensive and integrated manner, the Human Capital Division is currently supported by a total of 17 employees spread across three main departments. The employee composition is designed to reflect the organization's needs for strategic policy reinforcement, HC operational services, as well as talent management and development. The employee composition of the Human Capital Division is as follows:

Nama Jabatan Position Name	**Jumlah (2024)** Total (2024)
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division	1
Kepala Departemen Layanan SDM Head of HC Services Department	1
Kepala Departemen Strategi SDM Head of HC Strategy Department	0
Kepala Departemen Manajemen Talenta Head of Talent Management Department	1
Officer Layanan dan Analisis SDM HC Service and Analysis Officer	4
Officer Strategi SDM HC Strategy Officer	4
Officer Manajemen Talenta Talent Management Officer	2
Staf Layanan SDM Staff of HC Services	2
Staf Strategi SDM Staff of HC Strategy	0
Staf Manajemen Talenta Staff of Talent Management	2
Jumlah Total	**17**

Komposisi ini mencerminkan upaya perusahaan untuk mengembangkan Divisi Sumber Daya Manusia yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga mampu merumuskan dan menjalankan strategi SDM yang proaktif dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi ke depan.

This composition reflects the company's efforts to develop an Human Capital Division that is not only operationally strong, but also able to formulate and execute HC strategies that are proactive and adaptive to the needs of the organization going forward.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN

Sistem Pengembangan Organisasi

Dalam menghadapi dinamika industri keuangan dan asuransi yang terus berkembang, penguatan SDM menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan daya saing Perusahaan. Strategi pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga pada pembentukan organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Sebagai langkah strategis, Perusahaan secara berkala menyesuaikan struktur organisasi agar selaras dengan visi, misi, serta arah bisnis yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap efektivitas unit kerja dilakukan untuk memastikan optimalisasi proses bisnis yang efisien dan sesuai dengan tantangan industri saat ini. Sejalan dengan peran IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan terus melakukan transformasi organisasi guna mendukung ekosistem keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

Melalui pengelolaan SDM yang terarah, Perusahaan berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan inovasi di sektor asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran. Dengan pendekatan ini, diharapkan SDM Perusahaan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam peningkatan kepercayaan industri keuangan nasional.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang, Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, proses rekrutmen dilakukan secara terencana dan strategis guna memastikan keberlanjutan operasional serta pencapaian target bisnis.

Di tahun 2024, Perusahaan telah melakukan rekrutmen karyawan sebanyak 59 orang, mengalami penurunan sebanyak 55 orang atau 47,16% dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 106 orang. Penurunan tersebut disebabkan oleh optimalisasi kebutuhan SDM melalui perencanaan tenaga kerja yang lebih selektif dan efisien, serta pemanfaatan *internal talent pool* untuk mengisi posisi yang tersedia, sehingga kebutuhan rekrutmen eksternal menjadi lebih terbatas. Adapun pelaksanaan rekrutmen karyawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

COMPANY'S HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Organizational Development System

In facing the evolving dynamics of the financial and insurance industry, strengthening human capital (HC) is key to the Company's sustainability and competitiveness. HC development strategies not only focus on improving individual competencies, but also on building an organization that is adaptive and responsive to change.

As a strategic step, the Company regularly adjusts the organizational structure to align with the vision, mission, and business direction that has been determined. Evaluation of the effectiveness of work units is conducted to ensure the optimization of efficient business processes that are in line with current industry challenges. In line with IFG's role as an Insurance and Guarantee Holding SOE, the Company continues to carry out organizational transformation to support a more accountable and transparent financial ecosystem.

Through targeted human capital management, the Company is committed to building a professional and ethical work culture capable of delivering innovation in the insurance, guarantee, venture capital, securities, investment management, investment advisory, financial consulting, management consulting, and other financial services sectors, including office building management. With this approach, it is expected that the Company's humancapital can become the driving force in realizing sustainable growth and contribute to increasing the confidence of the national financial industry.

Employee Recruitment Policy and Implementation

In response to the ever-evolving business dynamics, the Company remains committed to meeting the needs for competent and qualified human capital. Therefore, the recruitment process is carried out in a planned and strategic manner to ensure operational sustainability and achievement of business targets.

In 2024, the Company has recruited 59 employees, a decrease of 55 people or 47.16% compared to the previous year of 106 people. This decrease was due to the optimization of human resource requirements through more selective and efficient workforce planning, as well as the utilization of internal talent pools to fill available positions, thereby limiting the need for external recruitment. The implementation of employee recruitment in the last 3 (three) years is summarized as follows:

Rekrutmen Karyawan 2022-2024 (Orang)
2022-2024 Employee Recruitment (Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Jumlah Karyawan Total Employees	308	300	242
Karyawan Masuk Employee Joining the Company	59	106	101

Tingkat *Turn Over* Karyawan

Pemantauan terhadap penyebab karyawan keluar dan tingkat *turnover* setiap tahunnya menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi retensi dan manajemen SDM secara keseluruhan. Berikut ini disajikan data jumlah dan penyebab karyawan keluar dari perusahaan selama tiga tahun terakhir:

Employee Turn Over Rate

Monitoring the reasons for employee resignations and the annual turnover rate are important indicators in evaluating the effectiveness of retention strategies and overall human capital management. The following data shows the number and reasons for employee turnover over the past three years:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan Tahun 2022-2024
Number and Causes of Employees Leaving the Company Year 2022-2024

Penyebab Reasoning	2024	2023	2022
Pensiun Retired	0	2	9
Meninggal dunia Passed away	0	0	0
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resigned at their own request	37	32	31
Diberhentikan Laid off	1	0	0
Jumlah karyawan masuk Total Employee Entering the Company	59	106	101
Jumlah Karyawan yang keluar Total Employees Leaving the Company	38	34	40
Jumlah karyawan di awal tahun Number of employees at the beginning of the year	300	242	179
Jumlah karyawan di akhir tahun Number of employees at the end of the year	308	300	242
Tingkat turnover Turnover Rate	12,2%	12.5%	19%

Berdasarkan data jumlah dan penyebab karyawan keluar dari perusahaan selama periode 2022–2024, terlihat bahwa total karyawan yang keluar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 38 orang, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 34 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Sementara itu, hanya terdapat satu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 2024, dan tidak ada kasus PHK dalam dua tahun sebelumnya. Jumlah karyawan yang masuk pada tahun 2024 sebesar 59 orang, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 (106 orang) maupun 2022 (101 orang), menunjukkan adanya penyesuaian dalam kebijakan rekrutmen.

Based on data on the number and reasons for employee resignations during the 2022–2024 period, it is evident that the total number of employees who left the company in 2024 was 38, a slight increase from 34 in the previous year. Most of these were voluntary resignations. Meanwhile, there was only one case of termination of employment (PHK) in 2024, and no cases of PHK in the previous two years. The number of employees joining in 2024 was 59, lower than in 2023 (106) and 2022 (101), indicating an adjustment in recruitment policy.

Tingkat *turnover* pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,2%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 (12,5%) dan secara signifikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 19%. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan dalam retensi karyawan dan kemungkinan adanya peningkatan kenyamanan kerja serta kepuasan terhadap organisasi. Meskipun demikian, angka turnover di atas 10% tetap perlu menjadi perhatian, terutama dalam konteks pengelolaan talenta dan kesinambungan bisnis.

The turnover rate in 2024 was recorded at 12.2%, slightly lower than in 2023 (12.5%) and significantly lower than in 2022, which reached 19%. This decrease indicates an improvement in employee retention and a possible increase in job satisfaction and satisfaction with the organization. However, a turnover rate above 10% remains a concern, particularly in the context of talent management and business continuity.

Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi

IFG memiliki sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi dilandaskan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan maupun individu. Sistem pengembangan tersebut diakukan untuk memberikan hasil sesuai standar

Competency Development Programs and Policies

IFG has a competency-based human capital development system based on information regarding job and individual competency requirements. The development system is carried out to provide results according to predetermined

kinerja yang telah ditetapkan. IFG melakukan pengembangan kompetensi berupa pelatihan dan sertifikasi kepada seluruh Insan Perusahaan untuk mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill* berdasarkan Kalender Pembelajaran Tahun 2024 serta pengelolaannya mengacu pada *Learning Value Chain* (LVC) *Corporate University* yang diselenggarakan secara internal maupun melalui pihak eksternal Perusahaan.

Di tahun 2024, Perusahaan telah menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp13,590,490,000,-, meningkat Rp3.704.145.218 atau 17% dibanding tahun 2023 yaitu Rp9.886.344.782,-. Adapun realisasi biaya pelatihan karyawan di tahun 2024 adalah sebesar Rp13,062,493,386,- dengan rincian sebagai berikut:

performance standards. IFG conducts competency development in the form of training and certification for all Company personnel to develop soft skills and hard skills based on the 2024 Learning Calendar and managed in accordance with the Learning Value Chain (LVC) Corporate University, which is conducted internally and through external parties.

In 2024, the Company has budgeted employee training costs of IDR13,590,490,000 an increase of IDR3,704,145,218 or 17% compared to 2023, which was IDR9,886,344,782. The realization of employee training costs in 2024 is IDR13,062,493,386,- with the following details:

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Workshop Influencer BUMN Yogyakarta SOE Influencer Workshop in Yogyakarta	1	11-13 Januari 2024 January 11-13, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	-
Workshop Chief Human Resources Officer (CHRO) Chief Human Resources Officer (CHRO) Workshop	2	18 Januari 2024 January 18, 2024	BUMN School of Excellence	Rp 2.008.000
Workshop Influencer BUMN Jawa Timur SOE Influencer Workshop in East Java	1	25-27 Januari 2024 January 25-27, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	-
Pelatihan *Risk Index Maturity* (RMI) - *Batch* 1 Risk Index Maturity (RMI) Training - Batch 1	2	6 Februari 2024 February 06, 2024	BSE	Rp 20.000.000
Certified Risk Executive Leader (CREL) - *Batch* 1	3	20 Februari 2024 February 20, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi BPKB BPKB Professional Certification Agency	Rp 21.150.000
Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 73) Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 73) Training	13	22 Februari 2024 February 22, 2024	KPMG	Rp 232.500.000
Certified Risk Management Officer (CRMO) - *Batch* 1	10	26-29 Februari 2024 February 26-29, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 192.050.000
Certified Risk Management Professional (CRMP) - *Batch* 1	10	26 Februari-1 Maret 2024 February 26- March 1, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 278.050.000
Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 71) Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 71) Training	32	28 Februari 2024 February 28, 2024	KPMG	Rp 158.100.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Work Without Walls	1	29 Februari 2024 February 29, 2024	Ktalent Asia	Rp 2.997.500
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	5	6 Maret 2024 March 06, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute (LSP MKS)	Rp 69.930.000
Pelatihan *Risk Index Maturity* (RMI) - *Batch* 2	2	8 Maret 2024 March 08, 2024	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)	Rp 5.000.000
Pelatihan Implementasi PSAK 74 PSAK 74 Implementation Training	18	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG	Rp 279.000.000
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)/ Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Deputy Underwriter (WPEE)/ Deputy Broker-Dealer (WPPE)	1	1-5 April 2024 April 1-5, 2024	TICMI Edu	Rp 800.000
Certified Risk Management Professional (CRMP) - *Batch* 2	17	29 April-6 Mei 2024 April 29- May 6, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 278.050.000
Microsoft Excel	10	13-14 Mei 2024 May 13 -14, 2024	Brainmatics	Rp 68.600.000
Certified Risk Management Professional (CRMP) - *Batch* 3	21	13-17 Mei 2024 May 13-17, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 268.050.000
Praktik *Underwriting* Asuransi Umum - *Batch* 1 General Insurance Underwriting Practice - Batch 1	20	20-21 Mei 2024 May 20-21, 2024	AAMAI	Rp 25.000.000
Certified Risk Management Officer (CRMO) - *Batch* 2	13	27-30 Mei 2024 May 27-30, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 180.400.000
Data Protection	3	28-30 Mei 2024 May 28-30, 2024	APPDI	Rp 40.150.000
Leadership Fundamentals	1	29-30 Mei 2024 February 29, 2024	Ascademy	Rp 2.943.000
Certified Data Protection Officer (CDPO)	3	28-30 Mei 2024 May 28-30, 2024	Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI) Indonesian Data Protection Practitioners Association (APPDI)	Rp 40.150.000
Certified Anti *Fraud* Officer (CAFO)	6	3-5 Juni 2024 June 3-5, 2024	GRC Management / LSP GRC Management	Rp 37.200.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Certified Risk Management Officer (CRMO) - *Batch* 3	16	3-6 Juni 2024 June 3-6, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 178.650.000
Sertifikasi Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) Mutual Fund Selling Agent Representative Certification (WAPERD	2	7-8 Juni 2024 June 7-8, 2024	AAMAI	Rp 3.283.000
ISO 37001 Anti Bribery Implementation	1	10-13 Juni 2024 June 10-13, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute (LSP MKS)	Rp 14.340.000
Workshop Penerapan Regulasi Pengupahan Terbaru Pasca Terbitnya PP No. 51 Tahun 2023 Workshop on the Implementation of the Latest Wage Regulations After the Issuance of Government Regulation No. 51 of 2023	2	12 Juni 2024 June 12, 2024	Angkatan Muda Islam Indonesia Indonesian Islamic Youth Force	Rp 5.000.000
Project Management	24	19-25 Juni 2024 June 19-25, 2024	Avenew	Rp 574.950.000
Sertifikasi *Project Management* Professional (PMP) Project Management Professional (PMP) Certification	24	19-25 Juni 2024 June 19- 25, 2024	Avenew Indonesia	Rp 298.067.000
Pelatihan Peran *Corporate Secretary* Corporate Secretary Role Training	11	20-21 Juni 2024 June 20-21, 2024	Mahaka Institute	Rp 177.800.000
Praktik *Underwriting* Asuransi Umum - *Batch* 2 General Insurance Underwriting Practice - Batch 2	21	20-21 Juni 2024 June 20-21, 2024	AAMAI	Rp 25.000.000
Business Essentials *Batch* II	1	26 Juni 2024 June 26, 2024	BUMN School of Excellence SOE School of Excellence	Rp 30.000.000
Business Modelling	22	26-27 Juni 2024 June 26-27, 2024	Ahli Asuransi Learning Center	Rp 170.350.000
Certified Risk Associate (CRA)	1	26-27 Juni 2024 June 26-27, 2024	Tap Kapital Indonesia	Rp 1.800.000
Indonesia Internal Audit Practicioner (IIAP)	2	1 Juli 2024 July 01, 2024	IIA	
Pathways to Chartered Account	2	1 Juli-18 September 2024 July 1- September 18, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	Rp 50.000.000
Legal Compliance	14	2-3 Juli 2024 July 2-3, 2024	GRC Training	Rp 52.550.000
Social Return of Investment (SROI)	1	3-5 Juli 2024 July 3-5, 2024	Social Investment Indonesia	Rp 7.770.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta (Orang) Total Participant (People)	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Fee (IDR)
Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) Level Managerial	1	6-24 Juli 2024 July 6-24, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation	Rp 9.000.000
Konferensi Audit Internal 2024 Internal Audit Conference 2024	5	10-11 Juli 2024 October 03, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	Rp 32.500.000
Seminar Nasional Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) National Seminar on Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)	5	16-17 Juli 2024 July 16-17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditor Association	Rp 25.000.000
Pelatihan Strategi Implementasi *Underwriting* & Pengelolaan Klaim Underwriting & Claims Management Implementation Strategy Training	14	19 Juli 2024 July 19, 2024	IFG Corporate University	Rp 5.000.000
Sertifikasi Certified Financial Analyst Certified Financial Analyst Certification	4	20 Juli-2 November 2024 July 20-November 2, 2024	B BINUS Business School	Rp 62.000.000
Certified Legal Audit (CLA)	3	22-26 Juli 2024 July 22-26, 2024	Jimly School of Law	Rp 26.500.000
Data Analytic dan Data Science Data Analytic and Data Science	16	23-24 Juli 2024 July 23-24, 2024	Rakamin Academy	Rp 12.800.000
Sertifikasi Certified Management Accountant Certified Management Accountant Certification	4	23 Juli-12 September 2024 July 23-September 12, 2024	BINUS Business School	Rp 66.100.000
Certified Anti-*Fraud* Governance (CAFG)	2	24-26 Juli 2024 July 24-26, 2024	LSP GRC Manajemen	Rp 25.400.000
Masterclass Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy Masterclass	6	25-26 Juli 2024 July 25-26, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR) Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 15.000.000
Sertifikasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Certification of Regulation Drafting	2	29-31 Juli 2024 July 29-31, 2024	Indonesian Center for Legislative Drafting	Rp 31.000.000
Produk & Proses Bisnis Pasar Modal Investasi & Properti Investment & Property Capital Market Products & Business Processes	14	5-6 Agustus 2024 August 5-6, 2024	IFG Corporate University	-
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Level 5 Risk Management Certification	1	13-14 Agustus 2024 August 13-14, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp 11.500.000
CAT Modelling	1	19-23 Agustus 2024 August 19-23, 2024	SwissRe	Rp 131.180.644

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Pelatihan Strategi Pengelolaan Investment & Portfolio Investment & Portfolio Management Strategy Training	13	20 Agustus 2024 August 20, 2024	IFG Corporate University	Rp 5.250.000
Pelatihan Strategi Pengelolaan Produk Suretyship Suretyship Product Management Strategy Training	24	22 Agustus 2024 August 22, 2024	IFG Corporate University	Rp 3.750.000
Effective Report Writing for Internal Audit	5	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)	Rp 10.000.000
Seminar GRC Summit 2024 GRC Summit 2024 Seminar	1	23 Agustus 2024 August 23, 2024	CRMS Indonesia	Rp 6.899.760
Sertifikasi Certified Professional Management Accountant (CPMA) Certified Professional Management Accountant (CPMA) Certification	8	24 Agustus-9 November 2024 August 24-November 9, 2024	PPA FEB UI	Rp 56.250.000
Sertifikasi Certificate in General Insurance (CGI)/ AAAIK/ AAIK *Batch* 1 Certification Certificate in General Insurance (CGI)/ AAAIK/ AAIK Batch 1	8	26-30 Agustus 2024 August 26-30, 2024	SME Jasindo Bangun Insani	Rp 144.853.800
Sertifikasi Financial Risk Manager (FRM) Financial Risk Manager (FRM) Certification	2	27 Agustus-15 November 2024 August 27-November 15, 2024	BINUS Business School	Rp 82.859.000
ACIIA Regional Conference 2024	4	28-29 Agustus 2024 August 28 –29, 2024	Institute of Internal Auditors Indonesia	Rp 32.000.000
Workshop Legal Opinion Atas Upah Proses, Ganti Rugi, Maupun Pengajuan PHK Workshop on Legal Opinion on Wage Proceedings, Compensation, and Termination Filings	1	28-29 Agustus 2024 August 28 –29, 2024	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Informasi Publik (P3IP) Edupac Kaplan Center for the Assessment and Development of Public Information (P3IP) Edupac Kaplan	Rp 5.000.000
Pelatihan Pengelolaan Protokoler Perusahaan Corporate Protocol Management Training	12	29-30 Agustus 2024 September 03, 2024	Mahaka Institute	-
Sertifikasi Bidang Sumber Daya Manusia Certification in Human Capital	7	2-6 September 2024 September 2-6, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Human Capital Manageement Indonesia Indonesian Human Capital Management Professional Certification Institute	Rp 29.000.000
Pelatihan Pengelolaan Subrograsi Subrogation Management Training	26	3 September 2024 September 03, 2024	IFG Corporate University	-
National Anti *Fraud* Conference National Anti Fraud Conference	4	5-6 September 2024 September 5-6, 2024	Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE)	Rp 24.750.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Workshop Metode Job Evaluation Workshop on Job Evaluation Method	22	6-9 September 2024 September 6-9, 2024	Eksternal External	Rp 15.000.000
Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	14	8-9 September 2024 September 8-9, 2024	Narabahasa	Rp 78.050.000
Pelatihan Integrated Governance, Risk, and Compliance Integrated Governance, Risk, and Compliance Training	5	11-12 September 2024 September 11-12, 2024	HRD Spot	Rp 22.000.000
ESG Investing	1	18 September-20 November 2024 September 18-November 20, 2024	Edupac Kaplan	Rp 26.570.000
Employee & Industrial Relations Conference 2024	1	19-20 September 2024 September 19-20, 2024	Forum Human Capital Indonesia Human Capital Indonesia Forum	-
Workshop Journey to Pursuit World Class Contact Center Journey to Pursuit World Class Contact Center Workshop	1	20 September 2024 September 20, 2024	BCA Institute	Rp 2.000.000
Dasar Aktuaria Asuransi Umum Actuarial Basis of General Insurance	1	21 September-26 Oktober 2024 September 21-October 26, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society Of Actuaries Of Indonesia	Rp 8.800.000
Pelatihan *Awareness* ESG *and Sustainability* ESG and Sustainability Awareness Training	3	23-24 September 2024 September 23-24, 2024	Indonesia Environment & Energy Center	Rp 21.645.000
Sertifikasi Certificate in General Insurance (CGI)/ AAAIK/ AAIK *Batch* 2 Certification Certificate in General Insurance (CGI)/ AAAIK/ AAIK Batch 2	6	23-26 September 2024 September 23-26, 2024	SME Jasindo Bangun Insani	Rp 144.853.800
Seminar Nasional Good Corporate Governance Seminar on National Good Corporate Governance	1	25 September 2024 September 25, 2024	Indonews.id	Rp 1.750.000
Pelatihan Perumusan dan Implementasi Strategi Produk Training on Product Strategy Formulation and Implementation	12	30 September-1 Oktober 2024 September 30-October 1, 2024	Prasmul-Eli	Rp 92.170.000
Pengawasan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Supervision of Domestic Product Improvement (P3DN)	3	30 September-4 Oktober 2024 October 30-September 4, 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKB BPKB Supervisory Education and Training Center (Pusdiklatwas)	Rp 10.910.000
Sertifikasi Aktuaria (ASAI modul A50 - A60) Actuarial Certification (ASAI module A50 - A60)	2	Oktober 2024 October 2024	Persatuan Aktuaria Indonesia Society Of Actuaries Of Indonesia	Rp 1.254.038

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Business Essentials *Batch* III	1	3 Oktober 2024 October 03, 2024	BUMN School of Excellence SOE School of Excellence	Rp 25.000.000
International Tax Conference	2	3 Oktober 2024 October 03, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	Rp 10.500.000
Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP Asset Management Certification by BNSP	1	2-3 Oktober 2024 October 2-3, 2024	EPT Media Edutama Indonesia	Rp 9.990.000
Pengadaan Jasa dan Barang Procurement of Services and Goods	1	4-23 Oktober 2024 October 4-23, 2024	PPM Manajemen	Rp 6.370.000
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	1	7-10 Oktober 2024 October 7-10, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP MR Risk Management Professional Certification Organization (LSP MR)	Rp 10.000.000
Pelatihan Dasar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Basic Training for Capital Market Legal Consultants Association	3	5-27 Oktober 2024 October 5-27, 2024	Jentera	Rp 32.340.000
Pelatihan Business Acumen & Innovation Business Acumen & Innovation Training	17	15-16 Oktober 2024 October 15-16, 2024	Mitra Solusi Training	Rp 16.750.000
Malaysia MFRS 17 Insurance Contracts	4	15-17 Oktober 2024 October 15-17, 2024	Malaysian Institute of Accountants	Rp 43.800.000
Governance, Risk and Compliance Professional (GRCP)	1	22-24 Oktober 2024 October 22-24, 2024	Center for Management and Sustainability (CRMS)	Rp 54.000.000
Certified Governance, Risk and Compliance Professional (CGRCP)	3	22-24 Oktober 2024 October 22-24, 2024	Center for Management and Sustainability (CRMS)	Rp 13.500.000
Pathways to Chartered Account	1	22-25 Oktober 2024 October 22-25, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	Rp 20.000.000
Asian Actuarial Conference 2024	1	22-25 Oktober 2024 October 22-25, 2024	Actuarial Society of Hongkong	Rp 15.650.000
AAUI Reinsurance Training	3	24 Oktober 2024 October 24, 2024	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Indonesian Life Insurance Association (AAUI)	Rp 1.800.000
Stress Management	13	24-25 Oktober 2024 October 24-25, 2024	Mindfullness Indonesia	Rp 71.875.000
Basic English *Batch* 1	3	28 Oktober-1 November 2024 October 28- November 1, 2024	IFG Corporate University - Udemy	-
Corporate Valuation	7	28 Oktober-1 November 2024 October 28- November 1, 2024	IFG Corporate University - Linkedin Learning	-
Creative Thinking	15	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Excellence Asia	Rp 18.475.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Special Education for Advocates (PKPA)	4	2-17 November 2024 November 2-17, 2024	CLE FH UI	Rp 34.258.840
Program The 6th International Conference on Law and Governance: Reshaping the Future of Indonesian Higher Legal Education The 6th International Conference on Law and Governance Program: Reshaping the Future of Indonesian Higher Legal Education	2	4-5 November 2024 November 4-5, 2024	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Faculty of Law, University of Indonesia	Rp 2.000.000
Sertifikasi Certified *Fraud* Examiner (CFE) Certified Fraud Examiner (CFE) Certification	2	4-8 November 2024 November 4-8, 2024	Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE)	Rp 104.100.000
BUMN Business Essentials Immersion SOE Business Essentials Immersion	1	6-8 November 2024 November 6-8, 2024	BUMN School of Excellence SOE School of Excellence	-
Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Representative of Securities Trading Broker (WPPE)	1	18 November-4 Desember 2024 November 18 - December 4, 2024	IFG Corporate University	Rp 6.000.000
Actuarial Conference 2024	2	20 November 2024 November 20, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society Of Actuaries Of Indonesia	Rp 20.200.000
Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 2 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 2	8	20 November 2024 November 20, 2024	IFG Corporate University	Rp 78.050.000
Chief Technology Officer (CTO) School Tahun 2024 Chief Technology Officer (CTO) School in 2024	1	15 November 2024 November 15, 2024	BUMN School of Excellence SOE School of Excellence	Rp 76.000.000
Program Sertifikasi IT Risk Fundamental Seminar on National Good Corporate Governance	2	21-22 November 2024 November 21-22, 2024	PT Andalan Teknologi Inovasi	Rp 29.970.000
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Certification	1	25 November 2024 November 25, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp 8.000.000
Aritificial Intelligence for Executives	1	25-28 November 2024 November 25-28, 2024	IESE Business School	-
Basic English *Batch* 2	5	25-29 November 2024 November 25-29, 2024	IFG Corporate University - Udemy	-
Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	19	29 November 2024 November 29, 2024	IFG Corporate University	Rp 46.000.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Business Essentials *Batch* IV	1	29 November 2024 November 29, 2024	BUMN School of Excellence SOE School of Excellence	Rp 50.000.000
Leading Digital and AI Transformation	1	2-6 Desember 2024 December 2-6, 2024	IESE Business School	-
Pelatihan Event Management Event Management Training	1	4 Desember 2024 December 04, 2024	GRC Training	Rp 7.500.000
Seminar Nasional Internal Audit National Seminar on Internal Audit	5	4-5 Desember 2024 December 4-5, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)	Rp 24.500.000
Masterclass dan Seminar Risk Beyond Masterclass and Risk Beyond Seminar	2	4-6 Desember 2024 December 4-6, 2024	ERMA dan CRMS ERMA and CRMS	Rp 25.530.000
K3 Umum General OHS	1	9-21 Desember 2024 December 9-21, 2024	Safety First Indonesia	Rp 8.575.000
Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) Certified Information Systems Auditor (CISA) Certification	1	9-13 Desember 2024 December 9-13, 2024	IT Governance Indonesia	Rp 28.860.000
Sertifikasi Wakil Manager Investasi (WMI) Investment Deputy Manager Certification (WMI)	9	10-13 Desember 2024 December 10-13, 2024	Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia Board of the Indonesian Mutual Fund and Investment Players Association	Rp 125.704.600
Actuarial Modelling	12	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024	Nityasa Niscita Solusi	Rp 29.400.000
Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X National Conference of Risk Management Professionals X	2	12-13 Desember 2024 December 12-13, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Indonesian Institute of Certified Public Accountants	Rp 10.500.000
Certified Anti-*Fraud* Governance (CAFG)	1	12-14 Desember 2024 December 12-14, 2024	GRC Management	Rp 13.500.000
Program Perpanjangan Sertifikasi Webinar Mendalami Perubahan Iklim dan Pasar Karbon Webinar Certification Extension Program: Delving into Climate Change and the Carbon Market	1	18 Desember 2024 December 18, 2024	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Certified Public Accountants	Rp 750,000
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	5	19 Desember 2024 December 19, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute (LSP MKS)	Rp 69.930.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2024
Implementation of Employee Education and Training in 2024

Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta (Orang) Total Participant (People)	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Fee (IDR)
Sertifikasi AWS Cloud Engineer AWS Cloud Engineer Certification	2	23-26 Desember 2024 December 23-26, 2024	Trainocate	Rp 44.100.000
Sertifikasi Google Cloud Platform Profesional Google Cloud Platform Professional Certification	1		Trainocate	Rp 3.327.000

Realisasi Pelatihan Karyawan berdasarkan Jam Pelatihan
Realization of Employee Training by Training Hours

Uraian Description	2024	2023	2022
Jumlah Jam Pelatihan *Soft Skill* Total Soft Skill Training Hour	**622**	5.684	144
Jumlah Jam Pelatihan Teknikal Total Technical Skill Training Hour	**15.045**	34.451	1.845
Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hour	**15.667**	40.135	1.989

Tabel Pelatihan berdasarkan Gender dan Level Jabatan Tahun 2024
Table of Training by Gender and Position Level In 2024

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees who Receive Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Training Hours per Employee
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	496	8616	17,4
Perempuan Female	395	5293	17,8
Total	**891**	**15.666**	**17,6**
Berdasarkan Level Jabatan By Position Level			
Non *Staff*	0	0	0
Staff	242	1811	7,5
Senior *Staff*	118	4766	19,7
Assistant Manager	73	2317	19,6
Manager	134	901	12,3
Senior Manager	127	2204	16,4
Assistant Vice President	142	2293	18,1
Vice President	48	2355	16,6
Senior Vice President	7	712	14,8
Total	**891**	**15.666**	**17,6**

*Data Konsolidasi IFG & Anggota Holding
*Consolidated Data of IFG & Holding Members

Penilaian Kinerja dan Upah Karyawan

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, Perusahaan melaksanakan penilaian kinerja untuk mempermudah penempatan karyawan sesuai dengan posisi yang tepat serta kebutuhan Perusahaan. Program ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna menggali potensi serta talenta karyawan, yang hasilnya akan menjadi dasar dalam pengembangan serta pengisian jabatan tertentu.

Secara internal, Perusahaan telah menjalankan penilaian kinerja melalui program manajemen kinerja. Program ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan sesuai dengan harapan Perusahaan dalam periode tertentu, berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja mencakup perencanaan dan evaluasi kinerja. Melalui program ini, seluruh level jabatan, mulai dari pimpinan hingga karyawan, akan memperoleh umpan balik terhadap hasil kinerja mereka dalam satu periode penilaian. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kinerja serta pencapaian di masa mendatang.

Employee Performance Assessment and Wages

In responding to increasingly competitive business competition, the Company conducts performance assessment to facilitate employee placement in accordance with the right position and the Company's needs. This program is conducted periodically and continuously to explore the potential and talent of employees, the results of which will be the basis for the development and filling of certain positions.

Internally, the Company has conducted performance assessment through a performance management program. This program aims to measure the extent to which employee performance is in line with the Company's expectations within a certain period, based on predetermined standards. Performance management includes performance planning and evaluation. Through this program, all levels of positions, from leaders to employees, will get feedback on their performance results in one assessment period. Thus, they can improve their performance and achievements in the future.

Tabel Perbandingan Upah Karyawan Baru Level Terendah dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2024
Comparison Table of Lowest Level New Employee Wages compared to Provincial Minimum Wage in 2024

No.	**Wilayah Operasional** Operational Area	**Provinsi/ Daerah** Operational Area	**Imbal Jasa Karyawan Tetap Level Terendah** Compensation For the Lowest Level Employee	**Upah Minimum Provinsi** Provincial Minimum Wage	**Persentase/ Rasio** Percentage/ Ratio
	1	2	3	4	3:4
1.	Kantor Pusat /*Holding* Head Office/ Holding	DKI Jakarta	Rp7.269.200	Rp5.067.381	143%

Berdasarkan data pada tabel perbandingan upah tahun 2024, diketahui bahwa imbal jasa karyawan tetap level terendah di Kantor Pusat/*Holding* yang berlokasi di DKI Jakarta sebesar Rp7.269.200. Angka ini berada 43% lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar Rp5.067.381, atau setara dengan 143% dari UMP.

Hal ini mencerminkan bahwa Perusahaan telah menerapkan kebijakan pengupahan yang kompetitif dan berada di atas ketentuan minimum yang berlaku secara regional. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, namun juga menggambarkan komitmen perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan di level terbawah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing organisasi dalam menarik dan mempertahankan talenta.

Based on the data in the 2024 wage comparison table, it is known that the lowest level of permanent employee compensation at the Head Office/Holding located in DKI Jakarta is IDR7,269,200. This figure is 43% higher than the 2024 DKI Jakarta Provincial Minimum Wage (UMP) of IDR5,067,381, or equivalent to 143% of the UMP.

This reflects that the Company has implemented a competitive wage policy that is above the regional minimum. This not only demonstrates compliance with labor regulations, but also illustrates the company's commitment to providing decent compensation for employees at the lowest level, which ultimately contributes to improving the welfare and competitiveness of the organization in attracting and retaining talent.

Program Pengembangan Karier dan Promosi

IFG melaksanakan program pengembangan karier dan promosi dengan tujuan untuk memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Implementasi program pengembangan karier Perusahaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan dalam rangka mengembangkan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.

Program pengembangan karier dan promosi dilakukan untuk membentuk para pemimpin masa depan serta menempatkan karyawan pada beberapa level tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dan skill yang dimiliki sehingga proses regenerasi karyawan pada level organisasi Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2024, IFG telah melaksanakan program pengembangan karier dan promosi terhadap 67 karyawan atau 22% dari jumlah karyawan Perusahaan.

Career Development and Promotion Program

IFG has a career development and promotion program that aims to provide a comprehensive experience to each employee about the overall operations and business developed by the Company. The implementation of the Company's career development program is done in accordance with business needs and the fulfillment of the Company's performance targets in order to develop and motivate employees to improve their performance.

Career development and promotion programs are implemented to develop future leaders and place employees at specific levels based on their competencies and skills, ensuring a smooth succession process within the Company's organizational structure. Throughout 2024, IFG has implemented career development and promotion programs for 67 employees, or 22% of the Company's total workforce.

Program Pensiun

IFG menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Program ini dapat diikuti oleh karyawan yang telah berusia 55 tahun atau dalam jangka waktu 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun, yaitu 56 tahun. Pada tahun 2024, tidak ada karyawan yang mencapai usia pensiun, sehingga program pelatihan tersebut tidak diselenggarakan.

Retirement Program

IFG provides education and training programs for employees who are approaching retirement. This program is open to employees who are 55 years old or within six months of reaching retirement age, which is 56 years old. In 2024, no employees reached retirement age, so the training program was not held.

Program Kesejahteraan

IFG memberikan jaminan serta manfaat kerja bagi karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP). Peraturan ini mencakup mekanisme kesejahteraan karyawan, termasuk upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, serta kesempatan pendidikan yang adil dan merata. Perusahaan juga berkomitmen untuk memastikan bahwa penghasilan karyawan melebihi standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berikut adalah jumlah remunerasi karyawan Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

Welfare Program

IFG provides guarantees and benefits for employees as outlined in the Company Regulations (PP). These regulations cover employee welfare mechanisms, including overtime pay, pension funds, health benefits, and fair and equitable educational opportunities. The Company is also committed to ensuring that employee income exceeds the minimum wage standards set by the Government. The following is the amount of employee remuneration for the Company over the past three years:

Remunerasi Karyawan 2022-2024
Employee Remuneration 2022-2024

Uraian Description	**2024** **(Rp miliar)** (Billion IDR)	**2023** **(Rp miliar)** (Billion IDR)	**2022** **(Rp miliar)** (Billion IDR)
Remunerasi Karyawan Employee Remuneration	**282,841**	248,980	224,469

Selama periode tiga tahun terakhir, remunerasi karyawan mengalami tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024, total remunerasi tercatat sebesar Rp282,841 miliar, naik sebesar 13,60% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp248,980 miliar. Adapun pada tahun 2023, nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 10,93% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp224,469 miliar.

Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah karyawan. Selain itu, tren ini juga mengindikasikan komitmen perusahaan dalam memberikan kompensasi yang selaras dengan produktivitas dan kontribusi karyawan terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.

Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia ke Depan

Perusahaan memahami bahwa kualitas SDM merupakan faktor utama dalam mendorong keberlanjutan dan daya saing bisnis. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi prioritas utama yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi serta dinamika industri. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan menerapkan strategi pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi karyawan pada bidang PSAK 117, teknologi, manajemen risiko, dan tata kelola dalam mendukung digitalisasi proses bisnis di lingkungan IFG.
2. Menumbuhkan kompetensi karyawan dalam mendorong pencapaian bisnis yang berorientasi pada *mindset customer-centricity.*
3. Membangun kapabilitas leaders yang selaras dengan arah strategi bisnis perusahaan bagi karyawan level BOD-1 sampai dengan BOD-3, termasuk *young talents*, karyawan perempuan, dan karyawan *new-entry.*
4. Optimalisasi integrasi *digital learning* bagi seluruh karyawan di lingkungan IFG.

Over the past three-year period, employee remuneration has experienced a consistent upward trend. In 2024, total remuneration was recorded at IDR282.841 billion, an increase of 13.60% compared to 2023 which amounted to IDR248.980 billion. As for 2023, this value also increased by 10.93% compared to 2022 which amounted to IDR224.469 billion.

This increase is in line with the growth in the number of employees. This trend also indicates the company's commitment to providing compensation that is aligned with employee productivity and contribution to the achievement of company performance.

Future Human Capital Development Plan

The Company understands that the quality of HC is a key factor in driving business sustainability and competitiveness. Therefore, HC development is a top priority that is aligned with organizational needs and industry dynamics. To achieve this, the company implements the following HC development strategy:

1. Improved employee competencies in PSAK 117, technology, risk management, and governance to support the digitization of business processes within IFG.
2. Fostering employee competence in driving business achievements that are oriented towards a customer-centricity mindset.
3. Building leaders' capabilities that are aligned with the direction of the company's business strategy for employees at the BOD-1 to BOD-3 levels, including young talents, female employees, and new-entry employees.
4. Optimization of digital learning integration for all employees within IFG.


ER TO PRO





5

Analisis dan
Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Perusahaan membukukan pendapatan *underwriting* di tahun 2024, sebesar Rp28,30 triliun, meningkat Rp0,21 triliun atau 0,75% dari tahun 2023 yang sebesar Rp28,09 triliun.

The company booked underwriting income in 2024, amounting to Rp28.30 trillion, an increase of Rp0.21 trillion or 0.75% from 2023 which amounted to Rp28.09 trillion.

TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW



TINJAUAN MAKROEKONOMI SECARA UMUM

Proyeksi makroekonomi ke depan dalam beberapa variabel utama seperti PDB, inflasi, nilai tukar, dan imbal jasa (*Yield*) dari Surat Berharga Negara (SBN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

GENERAL MACROECONOMIC REVIEW

Future macroeconomic projections in several key variables such as GDP, inflation, exchange rates, and Government Securities (SBN) yield are depicted in the following table.

Tabel Indikator Makroekonomi Indonesia Tahun 2024
Table of Indonesia's Macroeconomic Indicators in 2024

Indikator Makro ekonomi, 2023 2023 Macro economic Indicators	**Aktual** Actual	**Aspirasi Pemegang Saham 2024** Shareholder Aspirations 2024		**Bloomberg** Consensus		**Proyeksi IFG Progress 2024***** 2024 IFG Progress' Projection***	
		Proyeksi Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual
Produk Domestik Bruto (yoy, %) Gross Domestic Product (yoy, %)	5,03	**5,1**	**0,1**	**5,0**	**-**	**4,9 – 5,0**	**-**
Inflasi IHK EoP, yoy, %)* Consumer Price Index Inflation (EoP, yoy, %)*	2,3	**2,7**	**0,4**	**2,6**	**0,3**	**2.7**	**0,4**
Nilai Tukar (EoP, USD/IDR)* Exchange Rate (EoP, USD/IDR)*	16.132	**16.000**	**-132 Rupiah**	**15.525**	**-607 Rupiah**	**15.400**	**-732 Rupiah**

Tabel Indikator Makroekonomi Indonesia Tahun 2024
Table of Indonesia's Macroeconomic Indicators in 2024

Indikator Makro ekonomi, 2023 2023 Macro economic Indicators	**Aktual** Actual	**Aspirasi Pemegang Saham 2024** Shareholder Aspirations 2024		**Bloomberg** Consensus		**Proyeksi IFG Progress 2024***** 2024 IFG Progress' Projection***	
		Proyeksi Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual
Imbal Hasil SBN 10 Tahun (rata-rata, %)** 10-Year Government Securities Yield (average, %)**	7,00	**6,9**	**10 bps**	**6,6**	**40 bps**	**6,6-7,1**	**-**

Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

* Angka proyeksi inflasi dan nilai tukar akan dibandingkan dengan angka aktual end of period tahun 2023.
The projected inflation and exchange rate figures will be compared with the actual end of period figures in 2023.

** Angka proyeksi imbal hasil SBN 10 tahun akan dibandingkan dengan angka aktual tahun 2023 secara rata-rata.
The projected 10-year SBN yields will be compared with the actual figures for 2023 on an average basis.

*** Proyeksi IFG Progress untuk akhir tahun 2024 yang direvisi pada Oktober 2024.
IFG Progress projection for the end of 2024 revised in October 2024.

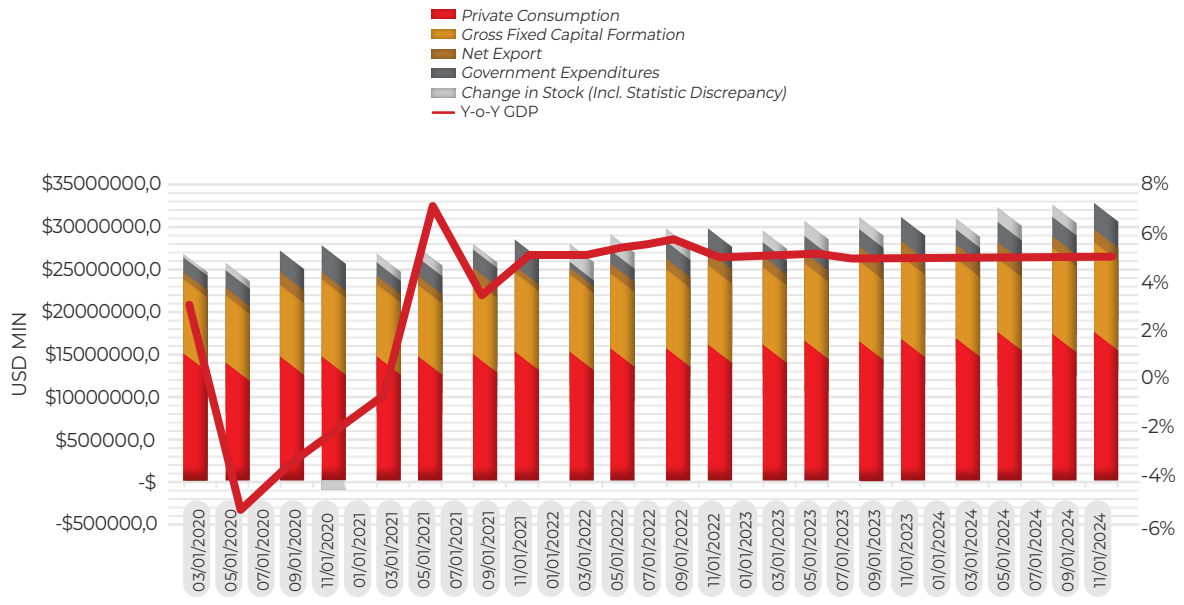
Secara detail, pergerakan variabel makroekonomi utama dapat dijelaskan dalam segmen sebagai berikut:

1. **PDB**
   Kinerja perekonomian yang diukur dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran digambarkan pada gambar di bawah, di mana dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi akan terbentuk dari pertumbuhan konsumsi, investasi (*Gross Fixed Capital Formation*), pengeluaran Pemerintah dan ekspor neto.

In detail, the movements of key macroeconomic variables are explained in segments as follows:

1. **GDP**
   The performance of the economy as measured by economic growth from the expenditure side is depicted in the figure below, in which economic growth in expenditure, will be formed from consumption growth, investment (Gross Fixed Capital Formation), government spending and net exports.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran
Indonesia's Economic Growth by Expenditure



Sumber: CEIC, BPS, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, BPS, IFG Progress Analysis

Dari grafik di atas, terlihat bahwa penyumbang *output* perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Di tahun 2024, 54% dari besaran PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PDB di tahun 2024 mencapai 5,03%. Angka ini mengalami perlambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 5,05%. Dari komponen pembentuknya, kontribusi pengeluaran Pemerintah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, mencapai 9% dari total PDB, secara pertumbuhan (yoy) pengeluaran Pemerintah meningkat sebesar 6,7% di tahun 2024. Selain itu, di tahun 2024, investasi tetap memiliki porsi yang signifikan mencapai 32,1%, namun *net export* yang sebesar 4,2% mengalami penurunan 0,4 basis poin dari tahun 2023.

From the graph above, it is shown that Indonesia's economic output is still supported by household consumption. In 2024, 54% of Indonesia's GDP is supported by household consumption. GDP growth in 2024 reached 5.03%. This figure slowed down compared to the previous year, which amounted to 5.05%. Of the components, the contribution of government expenditure experienced significant growth in 2024, reaching 9% of total GDP. In terms of growth (yoy) of government expenditure increased by 6.7% in 2024. In addition, in 2024, fixed investment has a significant share reaching 32.1%, but net exports which amounted to 4.2% decreased by 0.4 basis points from 2023.

Selain pertumbuhan yang stagnan, pertumbuhan PDB Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (7,09%), Filipina (5,64%) dan Malaysia (5,11%). Terhambatnya pertumbuhan selama tahun 2024 disebabkan oleh masih fluktuatifnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, misalnya pada tahun 2024, pertumbuhan konsumsi sempat mengalami kontraksi (-0,48%) di triwulan III tahun 2024 *quarter-on-quarter* (qoq) akibat deflasi dan perlambatan konsumsi.

Not only stagnant growth, Indonesia's GDP growth still lags behind several other ASEAN countries, such as Vietnam (7.09%), the Philippines (5.64%) and Malaysia (5.11%). The slowdown in growth during 2024 was caused by the fluctuating growth of household consumption, for example in 2024, consumption growth contracted (-0.48%) in the third quarter of 2024 quarter-on-quarter (qoq) due to deflation and slowing consumption.

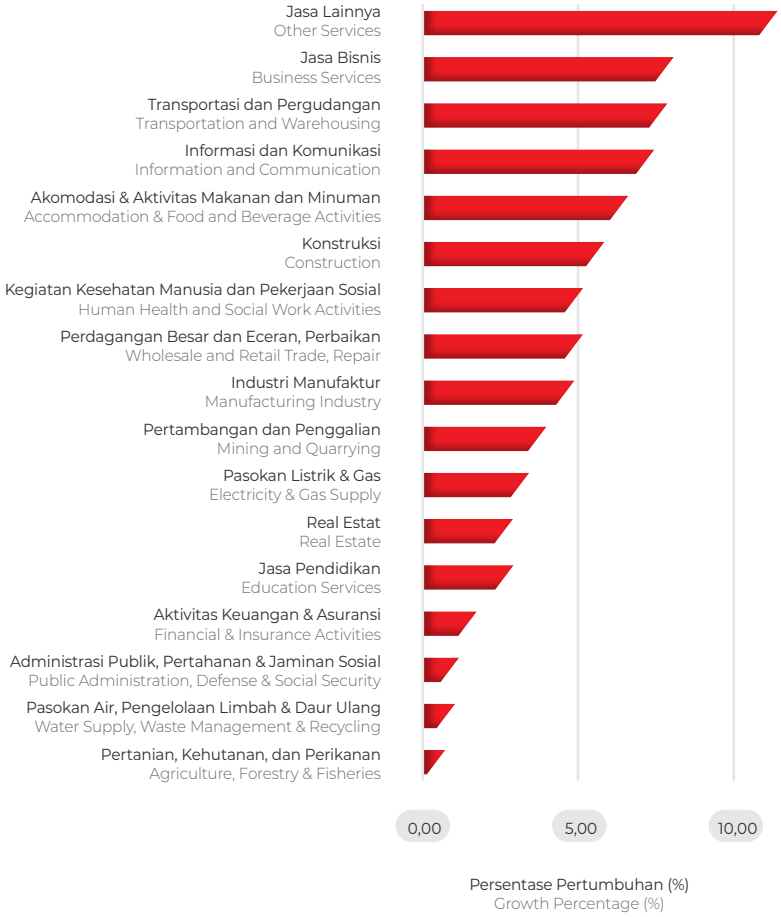
Selain itu, *net export* Indonesia juga mengalami perlambatan sebesar 0,1% sepanjang tahun akibat peningkatan nilai impor sebesar 7,95%. Penurunan harga komoditas di Juni 2024 turun berkontribusi, misalnya batu bara (-4,87%), nikel (-10,67%), tembaga (-4,84%), dan emas (-1,05%) turun berperan dalam pengurangan nilai ekspor di tahun 2024.

In addition, Indonesia's net exports also experienced a slowdown of 0.1% over the year due to an increase in the value of imports by 7.95%. Declining commodity prices in June 2024 contributed, for example, coal (-4.87%), nickel (-10.67%), copper (-4.84%), and gold (-1.05%). These are contributed to the reduction in export value in 2024.

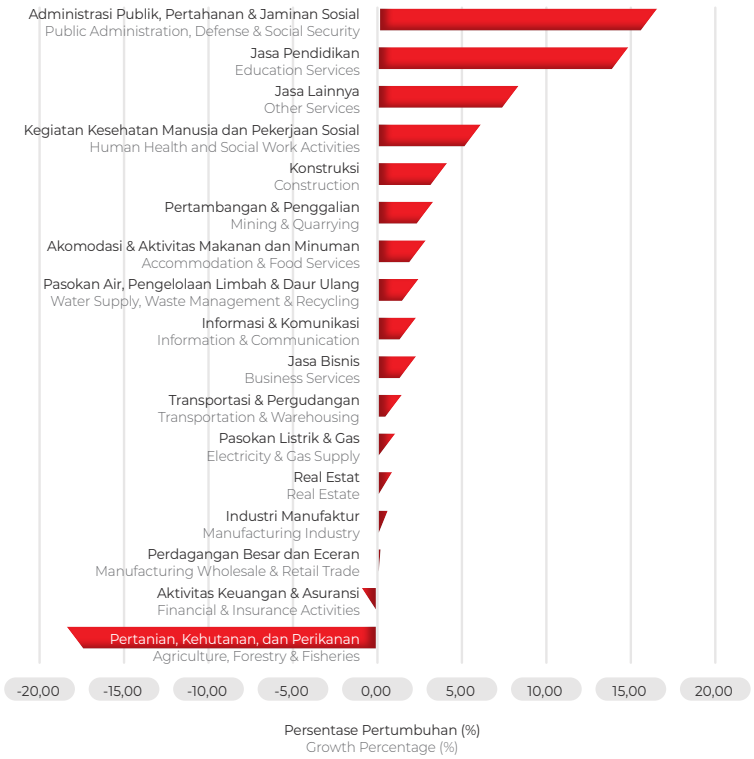
Tidak hanya itu, terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja antar sektor ekonomi. Beberapa sektor mampu tumbuh lebih cepat dan berperan sebagai penggerak utama perekonomian, sementara sektor lain mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lebih lambat. Analisis perekonomian dari sisi sektoral dapat dijelaskan pada gambar di bawah, yang merinci pertumbuhan output per sektor secara tahunan dan triwulanan.

There are significant differences in performance between economic sectors. Some sectors are able to grow faster and act as the main drivers of the economy, while other sectors experience contraction or slower growth. An analysis of the economy from a sectoral perspective is explained in the figure below. It gives details output growth per sector on an annual and quarterly basis.

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2024 *Yearly Basis*
Sectoral Economic Growth in 2024 Yearly Basis



Quarterly Basis
Quarterly Basis

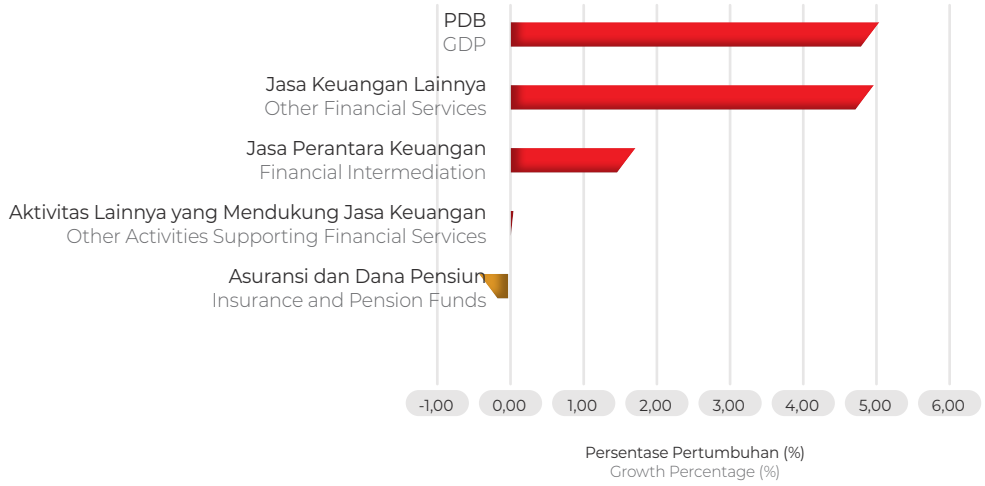


Sumber: CEIC, BPS, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, BPS, IFG Progress Analysis

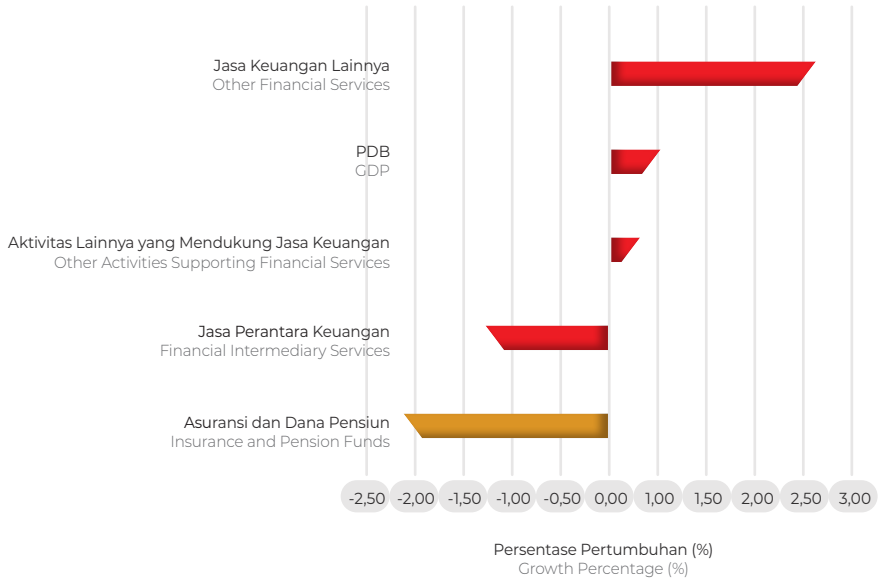
Dengan menggunakan indikator tahunan maupun triwulanan, industri asuransi dan dana pensiun masih tertinggal dibandingkan dengan industri yang lain. Alih-alih tumbuh, industri asuransi dan dana pensiun mengalami penurunan 0,43% yoy. Sementara itu, secara kuartalan, industri asuransi dan dana pensiun turun 2,11%. Adapun, perbandingan antara industri asuransi dan industri keuangan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana jasa keuangan lainnya memiliki kinerja terbaik dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya, baik secara tahunan maupun triwulanan.

Using both annual and quarterly indicators, the insurance and pension fund industry still lags behind other industries. Instead of growing, the insurance and pension fund industry experienced a 0.43% yoy decline. Meanwhile, on a quarterly basis, the insurance and pension fund industry decreased by 2.11%. On the other hand, comparison between the insurance industry and other financial industries is signified in the figure below, where other financial services have the best performance compared to other financial sectors, both on an annual and quarterly basis.

Perbandingan Kinerja Ekonomi Asuransi dan Sektor Lain *Yearly Basis*
Comparison of Economic Performance of Insurance and Other Sectors Yearly Basis



Quarterly Basis
Quarterly Basis



Sumber: CEIC, BPS, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, BPS, IFG Progress Analysis

2. Inflasi

Laju inflasi Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tren ini sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 3% ±1% pada tahun 2023, yang kemudian turun menjadi 2,5% ±1% untuk tahun 2024. Penurunan inflasi dan penyesuaian

2. Inflation

Indonesia's inflation rate shows a decline from 2023 to 2024. This trend is in line with the inflation target set by Bank Indonesia, which is 3% ± 1% in 2023, which then declined to 2.5% ± 1% for 2024. The decline in inflation and the adjustment of the target reflect the consistent

target tersebut mencerminkan arah kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten, serta efektivitas kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga.

Meskipun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia berjalan selaras, risiko global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Salah satu faktor utama yang turut menekan inflasi pada tahun 2024 adalah pergerakan harga komoditas, sebagai berikut:

a. Harga Minyak Mentah Indonesia
   Sepanjang tahun 2024, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP) mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi global. Pada Mei 2024, ICP turun menjadi USD 79,78 per barel dari USD 87,61 per barel di bulan sebelumnya, seiring meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tren penurunan berlanjut pada bulan Juni dengan ICP mencapai USD 79,31 per barel. Namun, harga kembali meningkat pada bulan Juli menjadi USD 82,00 per barel, didorong oleh meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Merah serta revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menjadi 2,9%.

   Pada September 2024, ICP mengalami penurunan signifikan ke USD 72,54 per barel, dipicu oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok serta meningkatnya ekspor minyak dari Libya dan Irak. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga November 2024, dengan ICP mencapai titik terendah tahun ini di USD 71,83 per barel, dan mengalami sedikit penurunan lebih lanjut menjadi USD 71,61 per barel pada Desember 2024. Fluktuasi harga minyak sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan inflasi akibat harga energi berkurang, ketidakpastian ekonomi global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

b. Harga Minyak Sawit Mentah
   Pada awal tahun 2024, harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) tercatat sebesar MYR 3.638 per ton. Sepanjang tahun, harga CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai MYR 4.444 per ton pada bulan Desember 2024, mencerminkan pertumbuhan sekitar 21,42%. Peningkatan ini didorong oleh kekhawatiran terkait ekspor serta meningkatnya permintaan dari negara pembeli utama, terutama Tiongkok, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek pada akhir Januari.

Dari sisi struktural, berdasarkan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK), kontributor inflasi utama pada 2024 berasal dari harga barang yang diatur Pemerintah (*administered prices*) serta inflasi inti. Inflasi barang yang diatur Pemerintah (*administered prices*) menunjukkan tren stabil sepanjang tahun, yang mengindikasikan kebijakan harga yang dikontrol secara ketat oleh Pemerintah, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik. Inflasi inti (*core inflation*)

direction of monetary and fiscal policies, as well as the effectiveness of the work of the Central Inflation Control Team (TPIP) and the Regional Inflation Control Team (TPID) in maintaining price stability.

Although fiscal and monetary policies in Indonesia are well aligned, global risks remain a factor of concern. One of the main factors that contribute to suppressing inflation in 2024 is commodity price movements, as follows:

a. Indonesian Crude Oil Price
   Throughout 2024, the Indonesian Crude Price (ICP) has fluctuated due to geopolitical dynamics and global economic conditions. In May 2024, ICP decreased to USD 79.78 per barrel from USD 87.61 per barrel in the previous month, as tensions in the Middle East region eased. The downward trend continued in June with ICP reaching USD 79.31 per barrel. However, prices rebounded in July to USD 82.00 per barrel, driven by rising tensions in the Red Sea region as well as the revision of global economic growth projections by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) to 2.9%.

   In September 2024, ICP experienced a significant decline to USD 72.54 per barrel, triggered by the economic slowdown in China and increased oil exports from Libya and Iraq. This downward trend continued into November 2024, with ICP reaching its lowest point of the year at USD 71.83 per barrel, and experiencing a slight further decline to USD 71.61 per barrel in December 2024. The fluctuations in oil prices over the course of the year suggest that while inflationary pressures due to energy prices are easing, global economic uncertainty remains a factor to watch.

b. Crude Palm Oil Price
   At the start of 2024, the price of crude palm oil (CPO) was recorded at MYR 3,638 per ton. Throughout the year, CPO prices experienced a significant increase, reaching MYR 4,444 per ton in December 2024, reflecting growth of approximately 21.42%. This increase was driven by export-related concerns as well as increased demand from key buying countries, particularly China, ahead of the Lunar New Year celebrations in late January.

Structurally, based on the movement of the Consumer Price Index (CPI), the main contributors to inflation in 2024 come from administered prices and core inflation. Administered prices inflation showed a stable trend throughout the year, indicating tightly controlled price policies by the government, such as fuel subsidies and electricity tariffs. Core inflation continued to rise until the end of the year, reflecting stronger domestic demand as

terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun, yang mencerminkan peningkatan permintaan domestik yang lebih kuat serta tekanan harga dari sektor jasa dan konsumsi.

Sebaliknya, inflasi barang-barang yang bersifat volatil (*volatile food prices*) mengalami penurunan tajam sepanjang tahun 2024, bahkan memasuki wilayah deflasi pada awal 2025. Hal ini mencerminkan stabilitas pasokan pangan, harga pangan yang lebih terkendali, serta peran kebijakan stabilisasi pangan yang dijalankan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Secara keseluruhan, tren inflasi yang menurun sepanjang 2024 mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan harga, terutama melalui stabilitas administered prices dan penurunan harga barang-barang volatil. Namun, tekanan inflasi inti masih berlanjut, mengindikasikan permintaan domestik yang kuat sebagai pendorong utama inflasi di Indonesia.

3. Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik. Ketidakpastian global, kondisi perdagangan internasional, serta arus modal asing berkontribusi terhadap pergerakan rupiah sepanjang tahun. Pada 1 Januari 2024, rupiah berada di Rp15.796 per dolar Amerika Serikat dan melemah hingga Rp16.410 pada 28 Juni 2024 sebelum sedikit menguat menjadi Rp16.375. Pelemahan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Arus modal asing memainkan peran penting dalam pergerakan rupiah. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami periode *capital outflow* pada beberapa kuartal, terutama di triwulan III tahun 2023, yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah pada saat itu. Namun, kondisi mulai membaik di akhir tahun 2023 dengan masuknya modal asing kembali, mendukung penguatan rupiah di awal tahun 2024. Namun, tren di tahun 2024 lebih bervariasi, dengan *capital outflow* yang signifikan pada triwulan III tahun 2024, menekan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, terjadi lonjakan arus modal masuk di triwulan II dan triwulan IV tahun 2024, yang sempat membantu penguatan rupiah.

Di triwulan III tahun 2024, rupiah menunjukkan penguatan, mencapai Rp15.100 pada 26 September 2024, level terkuat dalam 6 (enam) bulan terakhir, sebelum kembali melemah akibat meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Pada kuartal keempat, rupiah sempat menguat ke Rp15.875 pada 25 November 2024, tetapi kembali melemah tajam ke Rp16.225 pada 19 Desember 2024, sebelum akhirnya ditutup di Rp16.162 pada akhir tahun.

Pola arus modal keluar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa investor global masih berhati-hati terhadap aset di negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global. Penguatan rupiah pada triwulan II dan triwulan IV tahun

well as price pressures from the services and consumption sectors.

In contrast, inflation in volatile food prices experienced a sharp decline throughout 2024, even entering deflationary territory in early 2025. This reflects the stability of food supply, more manageable food prices, and the role of food stabilization policies implemented by the Government and Bank Indonesia.

Overall, the declining inflation trend throughout 2024 reflects the effectiveness of monetary and fiscal policies in controlling prices, particularly through the stability of administered prices and the decline in prices of volatile goods. However, core inflationary pressures persist, indicating strong domestic demand as the main driver of inflation in Indonesia.

3. Rupiah Exchange Rate

Throughout 2024, the exchange rate of the rupiah against the US dollar experienced significant fluctuations, influenced by various external and domestic factors. Global uncertainty, international trade conditions, and foreign capital flows contributed to the movement of the rupiah throughout the year. On January 1, 2024, the rupiah stood at IDR15,796 per US dollar and depreciated to IDR16,410 on June 28, 2024, before recovering slightly to IDR16,375. This depreciation was caused by increased demand for the US dollar amid global economic uncertainty.

Foreign capital flows play an important role in the movement of the rupiah. In 2023, Indonesia experienced a period of capital outflow in several quarters, especially in the third quarter of 2023, which contributed to the depreciation of the rupiah at that time. However, conditions began to improve at the end of 2023 with the return of foreign capital, supporting the strengthening of the rupiah in early 2024. Yet, the trend in 2024 was more varied, with significant capital outflows in the third quarter of 2024, putting pressure on the rupiah's exchange rate. On the other hand, there was a surge in capital inflows in the second and fourth quarters of 2024, which temporarily helped strengthen the rupiah.

In the third quarter of 2024, the rupiah strengthened, reaching IDR15,100 on September 26, 2024, its strongest level in six months, before depreciating again due to increased volatility in global financial markets. In the fourth quarter, the rupiah strengthened to IDR15,875 on November 25, 2024, but depreciated significantly to IDR16,225 on December 19, 2024, before finally closing at IDR16,162 at the end of the year.

The pattern of capital outflows in 2024 indicates that global investors remain cautious toward assets in emerging markets, including Indonesia, particularly amid uncertainty surrounding global monetary policy. The strengthening of the rupiah in the second and fourth quarters of 2024

2024 mengindikasikan kepercayaan investor yang kembali tumbuh, tetapi lonjakan *capital outflow* di triwulan III tahun 2024 menunjukkan bahwa risiko global tetap menjadi ancaman terhadap stabilitas nilai tukar.

Stabilitas rupiah sepanjang 2024 mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing dan kondisi ekonomi global, sehingga kebijakan moneter yang adaptif tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi dampak volatilitas terhadap inflasi serta pertumbuhan nasional.

4. Imbal Hasil SBN 10 Tahun

Imbal hasil (*yield*) SBN tenor 10 tahun Indonesia mengalami dinamika yang signifikan sepanjang 2024. Setelah mengawali tahun di kisaran 6,5%, *yield* SBN 10 tahun sempat menembus level di atas 7% pada paruh pertama 2024, sebelum kembali turun mendekati 6,5% dan akhirnya ditutup sekitar level 7% menjelang akhir tahun 2024. Kinerja obligasi Pemerintah Indonesia tenor 10 tahun sepanjang 2024 memperlihatkan *two-way movement* yang dipengaruhi sinergi faktor domestik dan global.

Faktor internal seperti kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang sempat mengetat lalu mulai longgar, kebijakan fiskal yang terukur dengan peningkatan penerbitan utang, serta bertambahnya peran investor domestik (Bank Indonesia, asuransi, dana pensiun, ritel) berhasil menopang pasar SBN di tengah gejolak.

Faktor eksternal, terutama kebijakan The Fed dan fluktuasi *yield* global, menjadi pendorong utama kenaikan maupun penurunan *yield* SBN pada momen-momen tertentu. Tingginya korelasi *yield* SBN dengan US-Treasury Bill (mencapai ~86%) membuat setiap guncangan di pasar obligasi Amerika Serikat cepat dirasakan di Indonesia. Geopolitik global turut mempengaruhi sentimen, meski dampaknya lebih temporer.

Sepanjang tahun, Indonesia berhasil menjaga stabilitas makro dan kepercayaan investor, terbukti dari aliran masuk asing yang tetap positif dan volatilitas *yield* yang dapat dikendalikan. *Yield* SBN 10-tahun Indonesia bergerak dalam rentang kurang lebih 6,4% hingga 7,3% pada tahun 2024, dengan 3 (tiga) fase utama: kenaikan tajam di awal tahun (puncak di April 2024), penurunan di pertengahan tahun (terendah sekitar September 2024), diakhiri dengan kenaikan moderat di akhir tahun 2024.

Perubahan komposisi kepemilikan yang signifikan – asing turun ke 14,5% dan peran domestik kian dominan – menjadikan pasar SBN lebih resilien terhadap *shock* eksternal dibanding masa lalu. Ke depan, dengan mulai turunnya suku bunga Bank Indonesia (awal 2025) dan prospek pelonggaran The Fed, *yield* SBN berpotensi melanjutkan tren penurunan secara bertahap. Namun, tahun 2024 telah menunjukkan bahwa disiplin fiskal, koordinasi kebijakan, dan pendalaman pasar domestik adalah kunci untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap imbal hasil obligasi Pemerintah.

indicated a resurgence of investor confidence, but the surge in capital outflows in the third quarter of 2024 showed that global risks remained a threat to exchange rate stability.

The stability of the rupiah throughout 2024 reflects high dependence on foreign capital flows and global economic conditions, making adaptive monetary policy essential to maintain economic balance and mitigate the impact of volatility on inflation and national growth.

4. 10-Year Government Securities Yield

Indonesia's 10-year Government Securities (SBN) yield experienced significant dynamics throughout 2024. After starting the year at around 6.5%, the 10-year SBN yield briefly reached the level above 7% in the first half of 2024, before falling back to near 6.5% and finally closing around the 7% level towards the end of 2024. The performance of 10 year Government of Indonesia bonds throughout 2024 shows a two-way movement influenced by the synergy of domestic and global factors.

Internal factors such as Bank Indonesia's interest rate policy that had tightened and then began to loosen, measured fiscal policy with increased debt issuance, and the increasing role of domestic investors (Bank Indonesia, insurance, pension funds, retail) managed to support the SBN market amid the turmoil.

External factors, especially the Fed's policy and global yield fluctuations, are the main drivers of the increase or decrease in SBN yield at certain moments. The high correlation between SBN yields and US Treasury Bills (reaching ~86%) means that any disruption in the US bond market is quickly reflected in Indonesia. Global geopolitics also influence sentiment, although the impact is more temporary.

Throughout the year, Indonesia managed to maintain macro stability and investor confidence, as evidenced by positive foreign inflows and manageable yield volatility. Indonesia's 10-year SBN yield moves in a range of approximately 6.4% to 7.3% in 2024, with 3 (three) main phases: a sharp increase at the beginning of the year (peak in April 2024), a decline in the middle of the year (lowest around September 2024), ending with a moderate increase at the end of 2024.

The significant change in ownership composition – foreigners, decreased to 14.5% and domestic role increasingly dominant - has made the SBN market more resilient to external shocks than in the past. Moving forward, with the start of Bank Indonesia's interest rate cuts (early 2025) and the prospect of Fed easing, SBN yields are likely to continue their gradual downward trend. However, 2024 has shown that fiscal discipline, policy coordination, and deepening of the domestic market are key to mitigating the impact of external volatility on government bond yields.

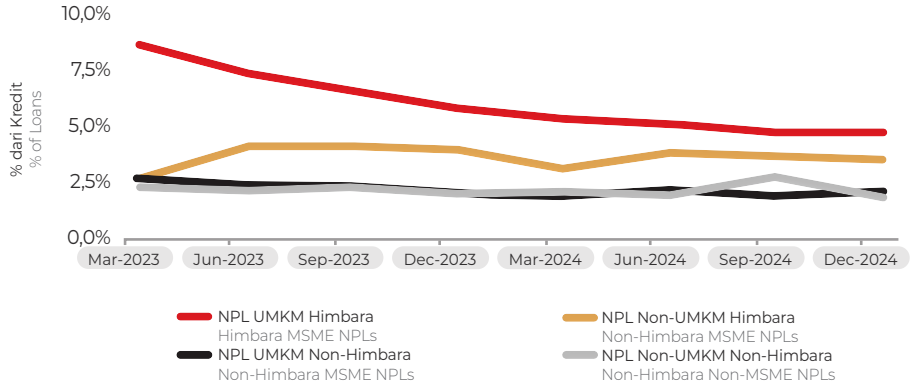
Tinjauan Makroekonomi yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Tahun 2024

1. **Kualitas Kredit UMKM**
   Berdasarkan data Bank Indonesia, sekitar 46% alokasi kredit UMKM pada tahun 2024 tersalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 47%. Di sisi lain, kualitas kredit UMKM masih menunjukkan kinerja yang relatif kurang baik dibandingkan kredit pada segmen perusahaan besar. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kredit adalah rasio NPL. Tren NPL triwulanan selama tahun 2023 dan 2024, yang mencakup segmentasi UMKM dan non-UMKM, serta perbandingan antara bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan non-Himbara, disajikan pada grafik berikut.

Overview of Macroeconomics Affecting Company Performance in 2024

1. **Credit Quality of MSMEs**
   Based on Bank Indonesia data, around 46% of MSME credit allocation in 2024 was channeled to the wholesale and retail trade sector, slightly decreased from 47% in 2023. On the other hand, the quality of MSME loans still shows relatively poor performance compared to loans to the large company segment. One indicator that is used to assess credit quality is the NPL ratio. Quarterly NPL trends during 2023 and 2024, including MSME and non-MSME segmentation, as well as a comparison between member banks of the Association of State-Owned Banks (Himbara) and non-Himbara, are presented in the following graph.

Persentase NPL Rata-Rata untuk Segmen UMKM dan Non-UMKM, Triwulan I 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024
Average NPL Percentage for MSME and Non-MSME Segments, 1st Quarter 2023 to 4th Quarter 2024



Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, Analisis IFG Progress
Catatan: Bank non-Himbara merupakan sampel 4 (empat) Bank terbesar non-Himbara (BCA, Panin, Danamon, Permata), sedangkan Bank Himbara terdiri atas BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.
Source: Banking Financial Reports, IFG Progress Analysis
Notes: Non-Himbara banks are a sample of 4 (four) largest non-Himbara banks (BCA, Panin, Danamon, Permata), while Himbara banks consist of BNI, Mandiri, BRI, and BTN.

Persentase NPL untuk segmen UMKM memiliki tren penurunan untuk bank Himbara dan non-Himbara di tahun 2024, namun angka tersebut secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan NPL untuk segmen non-UMKM, baik dari bank Himbara maupun non-Himbara. NPL UMKM di bank Himbara mencapai sekitar 5,87% pada akhir tahun 2023 dan turun ke angka 4,82% pada akhir tahun 2024, sementara untuk bank non-Himbara, NPL UMKM berada di angka 3,98% pada akhir tahun 2023 dan sedikit turun menjadi 3,52% pada akhir tahun 2024. Sementara NPL non UMKM pada akhir tahun 2023 berada di angka sekitar 2%, turun di akhir tahun 2024 di angka sekitar 1,5%, baik di kelompok bank Himbara maupun non-Himbara.

Hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah NPL UMKM non-Himbara yang memiliki tren *mixed*, di mana pada semester pertama tahun 2024 tren NPL mengalami peningkatan, lalu tren tersebut menurun pada semester kedua tahun 2024. Secara umum, performa kredit di segmen UMKM masih memiliki risiko gagal bayar yang relatif lebih besar dibandingkan segmen non-UMKM di tahun 2024.

The percentage of NPLs for the MSME segment has a downward trend for both Himbara and non-Himbara banks in 2024, but the figure is consistently higher than the NPLs for the non-MSME segment, both from Himbara and non-Himbara banks. MSME NPLs in Himbara banks reached around 5.87% at the end of 2023 and declined to 4.82% at the end of 2024, while for non-Himbara banks, MSME NPLs stood at 3.98% at the end of 2023 and slightly decreased to 3.52% at the end of 2024. Meanwhile, non-MSME NPLs at the end of 2023 were at around 2%, falling at the end of 2024 to around 1.5%, both in the Himbara and non-Himbara bank groups.

A matter of particular concern is the mixed trend in non-Himbara SME NPLs, which increased in the first half of 2024 before declining in the second half of the year. Overall, credit performance in the SME segment still poses a relatively higher risk of default than the non-SME segment in 2024.

Selain performa kredit UMKM yang kurang baik, terdapat pula tren perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM yang masih terjadi di tahun 2024. Secara keseluruhan, penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan yoy sepanjang tahun 2024, melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak tahun 2023.

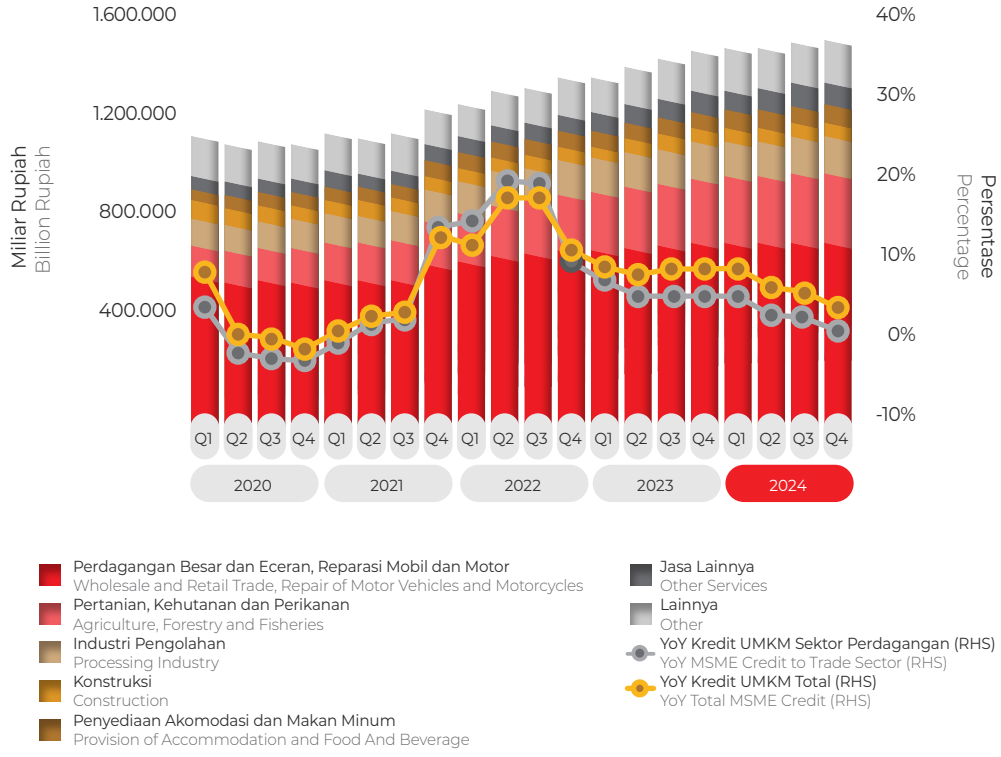
In addition to poor MSME credit performance, there was also a slowdown in MSME lending growth in 2024. Overall, MSME lending growth slowed year-on-year throughout 2024, continuing the downward trend that had been occurred since 2023.

Pertumbuhan kredit UMKM mencapai titik tertinggi pada triwulan III tahun 2022, namun setelah itu terus mengalami penurunan pada tahun 2024 hingga mencapai angka 3,37% yoy pada triwulan IV tahun 2024, jauh lebih lambat dibandingkan triwulan IV tahun 2023 sebesar 8,06% yoy. Perlambatan ini juga terjadi secara signifikan pada sektor yang selama ini menjadi penerima kredit UMKM terbesar, yakni sektor perdagangan besar dan eceran.

MSME credit growth reached its highest point in the third quarter of 2022, but after that it continued to decline in 2024 until it reached 3.37% yoy in the fourth quarter of 2024. It was much slower than the fourth quarter of 2023 at 8.06% yoy. This slowdown also occurred significantly in the sector that has been the largest recipient of MSME credit, namely the wholesale and retail trade sector.

Penyaluran Kredit UMKM berdasarkan Lapangan Usaha (Sisi Kiri, Batang) dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Perdagangan (Sisi Kanan, Garis)

MSME Lending by Business Field (Left Side, Bars) and Growth of MSME Lending to Trade Sector (Right Side, Lines)



Sumber: Bank Indonesia, Analisis IFG Progress
Source: Bank Indonesia, IFG Progress Analysis

Grafik di atas menunjukkan perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM secara umum, serta secara khusus di sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor pada tahun 2020 – 2024. Meskipun penyaluran kredit UMKM ke sektor perdagangan tetap meningkat pada setiap triwulannya, terdapat perlambatan pertumbuhan yoy yang signifikan pada tahun 2024, yang melanjutkan tren penurunan di tahun 2023.

The graph above shows a slowdown in MSME lending growth in general, and specifically in the wholesale and retail trade and motor vehicle repair sectors in 2020–2024. Although MSME lending to the trade sector increased every quarter, there was a significant slowdown in year-on-year growth in 2024, continuing the downward trend in 2023.

Perlambatan pertumbuhan yoy kredit UMKM sektor perdagangan yang terjadi pada triwulan IV tahun 2022 terus berlanjut hingga triwulan IV tahun 2024, di mana angka ini mencatat pertumbuhan terendah di masa pasca-pandemi

The slowdown in yoy growth of MSME loans to trade that occurred in the fourth quarter of 2022 continued until the fourth quarter of 2024, where it recorded the lowest growth in the post-pandemic period (since the fourth quarter of 2021).

(sejak triwulan IV tahun 2021). Penyaluran kredit UMKM ke sektor ini bertumbuh sebesar 19,04% yoy pada triwulan IV tahun 2022, tetapi angka ini menurun drastis pada triwulan I tahun 2023 menjadi 6,94% dan terus menurun hingga mencapai 0,87% pada triwulan IV tahun 2024.

MSME loan disbursement to this sector grew by 19.04% yoy in Q4 of 2022, but this figure dropped dramatically in Q1 of 2023 to 6.94% and continued to decline until it reached 0.87% in Q4 of 2024.

Kinerja Sektor Perdagangan Indonesia

Sektor perdagangan Indonesia mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 4,09% dan meningkat pada tahun 2024 mencapai sebesar 5,19%. Tidak hanya itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) sektor perdagangan juga mengalami pertumbuhan (yoy) rata-rata 3,17% sepanjang tahun 2024, mencapai titik tertingginya pada Maret 2024 (9,31%). Namun, pertumbuhan IPR tersebut mengalami perlambatan sejak Agustus 2024 (5,78%) dan turun secara konstan hingga 1,76% di Desember 2024.

Indonesia's Trade Sector Performance

Indonesia's trade sector has improved compared to 2023. In 2023, trade sector growth reached 4.09% and increased in 2024 to reach 5.19%. Also, the trade sector's Index of Real Sales (IPR) also experienced growth (yoy) of 3.17% on average throughout 2024, reaching its highest point in March 2024 (9.31%). However, the IPR growth has slowed down since August 2024 (5.78%) and steadily decreased to 1.76% in December 2024.

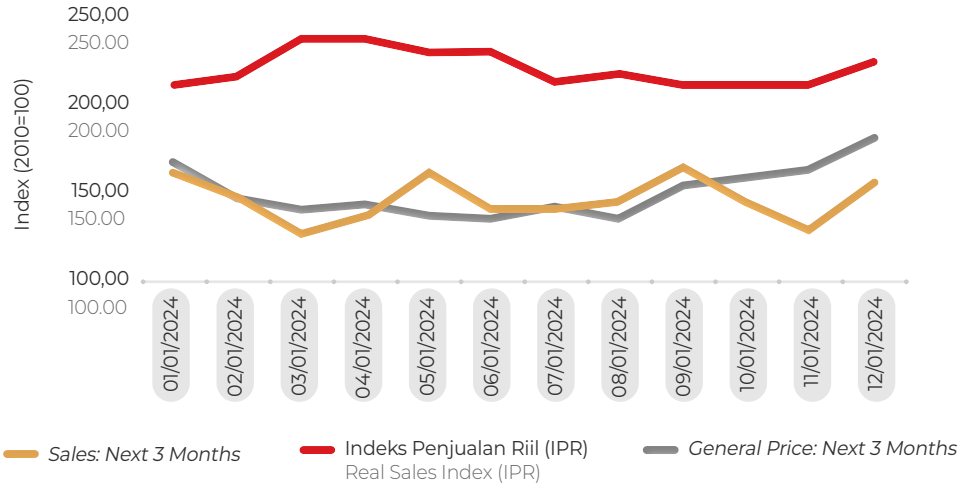
Dari sisi *supply*, ekspektasi penjualan (*sales next 3 months*) mengalami penurunan. Hal ini juga tercermin dalam perlambatan pertumbuhan *general selling price* sejak triwulan I tahun 2024 yang mengalami penurunan sebesar -1,8% (yoy) pada Desember 2024. Fenomena ini didorong oleh pelemahan permintaan yang sempat terjadi dari periode Mei hingga September di tahun 2024.

On the supply side, sales expectations (sales for the next 3 months) have decreased. This is also reflected in the slowdown in general selling price growth since the first quarter of 2024, which decreased by -1.8% (yoy) in December 2024. This phenomenon was driven by a slowdown in demand that occurred from May to September 2024.

Namun, pada Desember 2024 terjadi peningkatan *month-on-month* (mom) pada indeks penjualan dan *selling price* yang bersifat *cyclical* pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tren ini diikuti dengan peningkatan ekspektasi penjualan dan ekspektasi *general price next 3 months*. Dengan demikian, walaupun secara tingkatan *output* sektor ini bertumbuh, namun pertumbuhan masih terbatas akibat pelemahan permintaan yang terjadi di pertengahan tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2024.

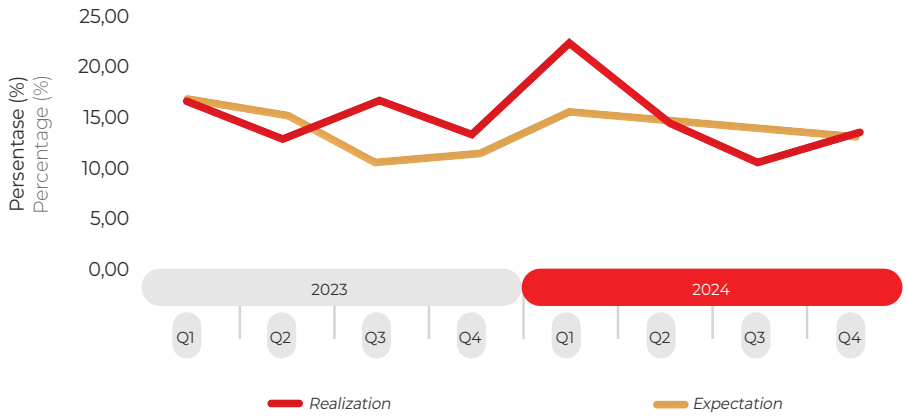
However, in December 2024, there was a month-on-month (mom) increase in the sales index and selling prices, which are cyclical in nature, during the Christmas and New Year celebrations (Nataru). This trend was followed by an increase in sales expectations and general price expectations for the next three months. Thus, although the output level of this sector is growing, growth remains limited due

Perkembangan Indeks Penjualan Riil, *Sales Expectation*, dan *General Price Expectation*
Development of the Real Sales Index, Sales Expectation, and General Price Expectation



Sumber: CEIC, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, IFG Progress Analysis

Perkembangan *Selling Price* (% *Weighted Net Balance*)
Selling Price Development (% Weighted Net Balance)



Sumber: CEIC, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, IFG Progress Analysis

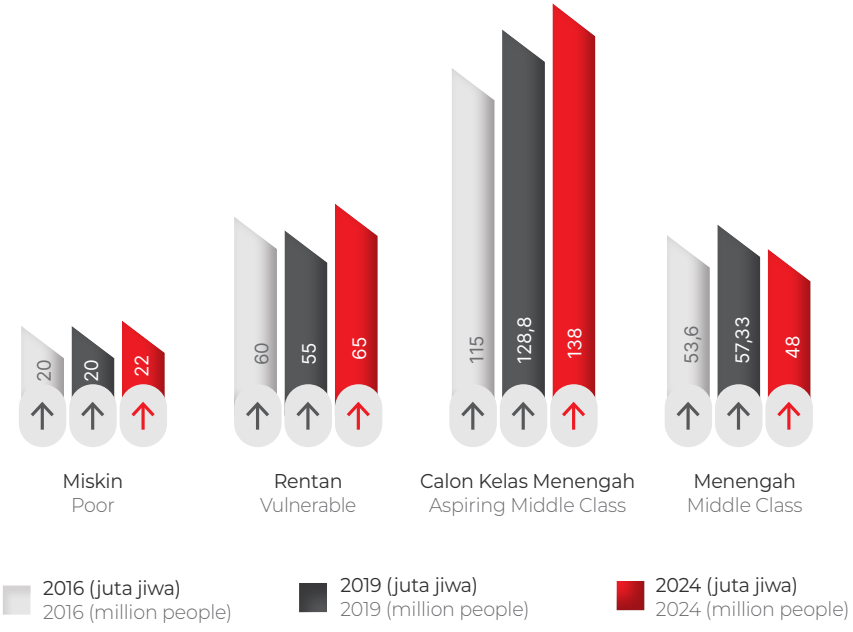
5. Tren Pengeluaran Kelas Menengah dan Dinamika Ekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mengalami pemulihan di beberapa sektor, meskipun tantangan ekonomi global masih berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah penurunan jumlah kelas menengah yang sebelumnya menjadi pendorong utama konsumsi domestik. Pada tahun 2023, individu dengan pengeluaran bulanan antara Rp2.040.262 sampai dengan Rp9.909.844 mengalami penurunan yang berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat.

5. Middle Class Spending Trends and Economic Dynamics

In 2024, Indonesia's economy experienced recovery in several sectors, although global economic challenges still affected people's purchasing power. One of the main concerns is the decline in the middle class, which was previously the main driver of domestic consumption. In 2023, individuals with monthly expenditure between IDR2,040,262 and IDR9,909,844 experienced a decline which had a direct impact on people's consumption patterns.

Jumlah Populasi Indonesia Menurut Kategori
Total Population of Indonesia by Category



Sumber: BPS, Analisis IFG Progress
Source: BPS, IFG Progress Analysis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi kelas 'Menengah' pada tahun 2024 menurun menjadi 48 juta jiwa, dibandingkan 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 dan 53,6 juta jiwa pada tahun 2016. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran ekonomi yang cukup signifikan. Di sisi lain, jumlah populasi dalam kategori 'Calon Kelas Menengah' justru mengalami peningkatan, mencapai 138 juta jiwa pada tahun 2024, naik dari 128,8 juta jiwa pada 2019 dan 115 juta jiwa pada tahun 2016.

Based on data from the Statistics Indonesia (BPS), the population of the 'Middle' class in 2024 decreased to 48 million people, compared to 57.33 million people in 2019 and 53.6 million people in 2016. This decline indicates a significant economic shift. On the other hand, the population in the 'Middle Class Candidate' category has actually increased, reaching 138 million people in 2024, an increase from 128.8 million people in 2019 and 115 million people in 2016.

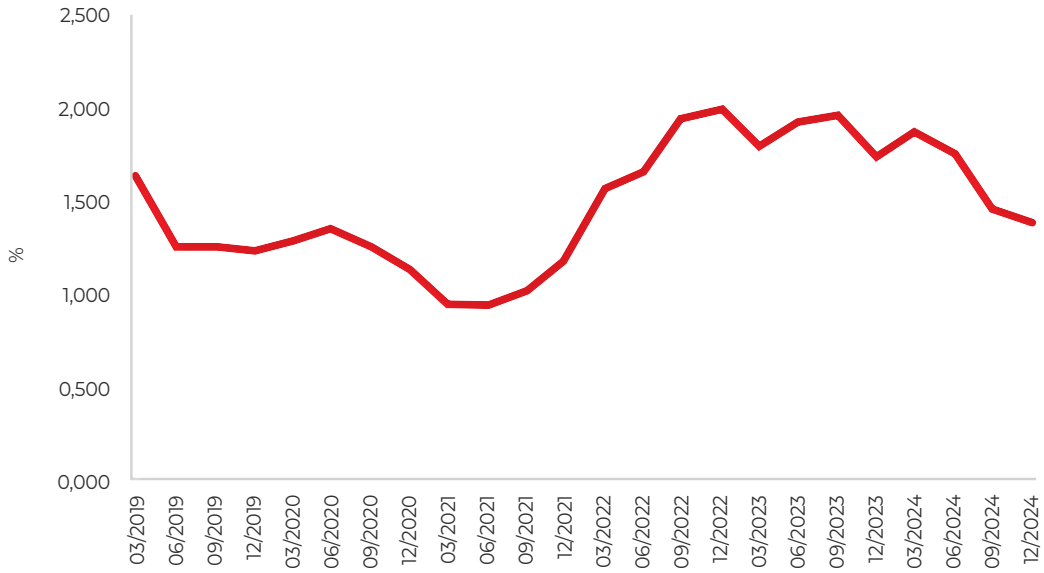
Kenaikan ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan status ekonomi dari kelompok kelas menengah akibat penurunan pendapatan. Selanjutnya, kategori 'Rentan' juga menunjukkan peningkatan menjadi 65 juta jiwa pada tahun 2024, dibandingkan 55 juta jiwa pada tahun 2019, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perpindahan sebagian masyarakat dari kelompok 'Calon Kelas Menengah' ke kategori ini.

This increase indicates a possible decline in the economic status of the middle class due to a decline in income. Furthermore, the 'Vulnerable' category also shows an increase to 65 million people in 2024, compared to 55 million people in 2019, which is most likely due to the movement of some people from the 'Middle Class Candidate' group to this category.

Perubahan struktur populasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami transisi dari kelas menengah ke kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif untuk mendorong peningkatan daya beli dan menjaga stabilitas konsumsi domestik. Hal ini menjadi krusial mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54% terhadap PDB Indonesia hingga akhir Desember 2024.

This change in population structure reflects the challenge of maintaining balanced economic growth, especially for those who are transitioning from middle class to vulnerable groups. Therefore, more inclusive economic policies are needed to boost purchasing power and maintain the stability of domestic consumption. This is crucial given that household consumption accounts for around 54% of Indonesia's GDP until the end of December 2024.

Indeks Harga Properti Residensial, YoY
Residential Property Price Index, YoY



Sumber: CEIC, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, IFG Progress Analysis

Sektor properti menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada awal tahun 2024. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) mencatat pertumbuhan 1,89% (yoy) pada triwulan I tahun 2024, meningkat dibandingkan 1,74% (yoy) pada triwulan IV tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat kepemilikan rumah di berbagai kategori. Namun, pemulihan di sektor properti tidak serta-merta menghilangkan tekanan pada daya beli masyarakat terlihat pada sepanjang tahun 2024.

Meskipun indeks tersebut tetap bertumbuh positif, tingkat pertumbuhan sektor properti mengalami penurunan. Inflasi serta ketidakpastian ekonomi global masih memengaruhi konsumsi kelas menengah, terutama di sektor ritel dan otomotif yang sangat bergantung pada stabilitas daya beli.

Pengeluaran kelas menengah pada tahun 2024 mengalami pergeseran yang mencerminkan respons terhadap kondisi ekonomi yang dinamis. Pemulihan sejak akhir tahun 2023 mendorong peningkatan konsumsi di beberapa sektor, khususnya properti dan barang tahan lama.

Namun demikian, pola konsumsi secara umum tetap mengalami penyesuaian, terutama di kalangan kelompok dengan tingkat pengeluaran bulanan yang lebih rendah. Kelompok ini cenderung lebih selektif dalam pengeluaran, dengan fokus yang lebih besar pada kebutuhan esensial dibandingkan barang non-esensial. Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi menunjukkan kestabilan dalam menjaga tingkat konsumsi, meskipun terjadi perubahan dalam struktur alokasi pengeluaran rumah tangga.

The property sector showed signs of recovery in early 2024. The Index of Residential Property Prices (IHPR) recorded a growth of 1.89% (yoy) in the first quarter of 2024, an increase from 1.74% (yoy) in the fourth quarter of 2023. This indicates an increased interest in home ownership across various categories. However, the recovery in the property sector did not necessarily eliminate the pressure on people's purchasing power throughout 2024.

Although the index continued to grow positively, the growth rate of the property sector declined. Inflation and global economic uncertainty are still affecting middle-class consumption, especially in the retail and automotive sectors, which are highly dependent on stable purchasing power.

Middle-class spending in 2024 underwent a shift that reflected a response to dynamic economic conditions. The recovery since the end of 2023 has led to increased consumption in several sectors, particularly property and durable goods.

However, consumption patterns in general continue to adjust, especially among groups with lower monthly expenditure levels. This group tends to be more selective in spending, with a greater focus on essential needs than non-essential goods. In contrast, groups with higher expenditure levels showed stability in maintaining consumption levels, despite changes in the allocation structure of household expenditure.

TINJAUAN SEGMEN INDUSTRI
INDUSTRY SEGMENT OVERVIEW

1. INDUSTRI ASURANSI UMUM DAN REASURANSI

a. Industri Asuransi Umum

Industri asuransi umum masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi secara yoy di tahun 2024, melanjutkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK, pendapatan premi industri tumbuh 5,7% di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 24,2%. Tren pertumbuhan ini juga didukung oleh data yang dihimpun oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang mencatat bahwa pertumbuhan premi di tahun 2024 didorong oleh pertumbuhan premi pada lini bisnis asuransi properti sebesar 14,7% dan lini bisnis asuransi kesehatan sebesar 77,2%.

Dari sisi pangsa pasar, industri asuransi umum masih didominasi oleh 3 (tiga) lini bisnis utama, yaitu asuransi properti, asuransi kredit, dan asuransi kendaraan bermotor. Ketiga lini bisnis ini tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan premi industri, dengan pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

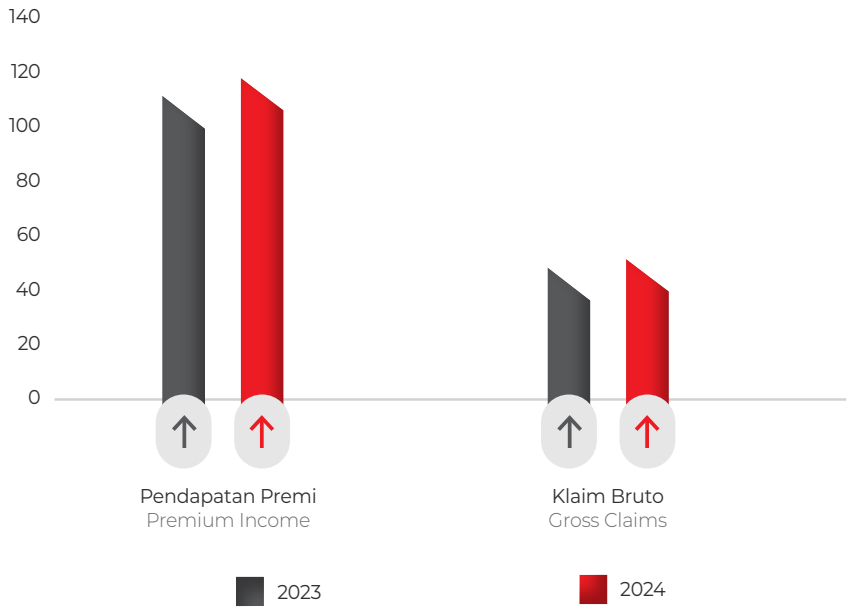
1. GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE INDUSTRY

a. General Insurance Industry

The general insurance industry still recorded yoy growth in premium income in 2024, continuing the upward trend in recent years. Based on OJK data, industry premium income grew 5.7% in 2024 compared to 2023 of 24.2%. This growth trend is also supported by data compiled by the Indonesian General Insurance Association (AAUI), which noted that premium growth in 2024 was driven by premium growth in the property insurance business line of 14.7% and the health insurance business line of 77.2%.

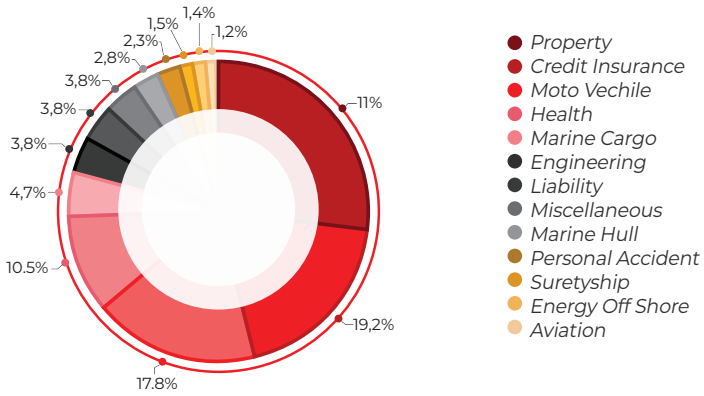
In terms of market share, the general insurance industry is still dominated by 3 (three) main business lines, namely property insurance, credit insurance, and motor vehicle insurance. These three lines of business remain the largest contributors to the industry's premium income, with relatively stable growth from year to year.

Kinerja Pendapatan Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Umum (dalam triliun Rupiah)
Performance of Premium Income and Gross Claims of General Insurance Industry (in trillion Rupiah)



Sumber: OJK dan AAUI, Analisis IFG Progress
Source: OJK and AAUI, IFG Progress Analysis

Pangsa Pasar Pendapatan Premi Industri Asuransi Umum Tahun 2024
Market Share of General Insurance Industry Premium Income in 2024



Namun, pertumbuhan premi tersebut juga diikuti dengan peningkatan beban klaim yang lebih besar. Data OJK menunjukkan bahwa total klaim industri meningkat 8,0% yoy pada tahun 2024, dibandingkan 17,6% di tahun 2023. Berdasarkan data AAUI, kenaikan klaim pada lini bisnis properti dan asuransi kredit berkontribusi signifikan terhadap lonjakan beban klaim industri. Peningkatan beban klaim yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan premi dapat menjadi *early warning* bagi industri terhadap potensi peningkatan risiko di masa mendatang.

However, this growth in premiums was also accompanied by a larger increase in claims expenses. OJK data shows that total industry claims increased 8.0% yoy in 2024, compared to 17.6% in 2023. Based on AAUI data, the increase in claims in the property and credit insurance lines contributed significantly to the surge in industry claims expenses. The higher increase in claims compared to premium growth could serve as an early warning for the industry regarding potential risks in the future.

Indikasi meningkatnya risiko ini turut tercermin dalam profitabilitas industri yang mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan dan berbalik mencatatkan kerugian di tahun 2024. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kenaikan signifikan dalam cadangan klaim sebesar 306,3% yoy di tahun 2024, yang mencerminkan potensi peningkatan beban klaim di masa depan.

An indication of this increased risk is also reflected in the profitability of the industry, which experienced a significant decline in financial performance and turned to record losses in 2024. One of the main factors influencing this is the significant increase in claim reserves of 306.3% yoy in 2024, reflecting the potential for increased claim expenses in the future.

Sebagai respons terhadap meningkatnya eksposur risiko, perusahaan asuransi umum juga menaikkan cadangan teknis mereka secara signifikan, mencapai pertumbuhan 902,3% yoy pada tahun yang sama. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan perusahaan asuransi umum menghadapi potensi kewajiban klaim yang lebih besar. Kenaikan kedua komponen cadangan tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap profitabilitas industri asuransi umum di tahun 2024 ini.

In response to the increasing risk exposure, general insurance companies also raised their technical reserves significantly, reaching a growth of 902.3% yoy in the same year. This move aims to ensure the readiness of general insurance companies to face greater potential claim liabilities. The increase in both reserve components put significant pressure on the profitability of the general insurance industry in 2024.

b. Industri Reasuransi

Industri reasuransi mengalami penurunan pendapatan premi pada tahun 2024, berbalik dari tren pertumbuhan positif tahun sebelumnya. Berdasarkan data OJK, pendapatan premi bruto (*gross premium*) turun sebesar -4,7% secara yoy berbanding terbalik dengan pertumbuhan sebesar 15,0% di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya premi pada beberapa lini usaha utama, seperti asuransi kredit yang menyusut -26,1%, lini usaha aneka yang turun -41,4%, serta *engineering* yang mengalami kontraksi -18,5%, menurut data AAUI di tahun 2024.

b. Reinsurance Industry

The reinsurance industry experienced a decline in premium income in 2024, reversing the positive growth trend of the previous year. Based on OJK data, gross premium income decreased by minus 4.7% yoy in contrast to growth of 15.0% in 2023. This decline was mainly due to a decline in premiums in several key business lines, such as credit insurance, which contracted by minus 26.1%, miscellaneous business lines, which decreased by minus 41.4%, and engineering, which contracted by minus 18.5%, according to AAUI data in 2024.

Sejalan dengan penurunan premi, jumlah klaim bruto (*gross claims*) tahun 2024 juga mengalami penurunan lebih dalam, yaitu sebesar -11,7% dibandingkan tahun 2023. Penurunan klaim ini dipengaruhi oleh turunnya klaim pada asuransi kredit sebesar -38,5%, lini usaha aneka yang merosot -72,9%, serta properti yang mencatatkan penurunan sebesar -8,6%.

In line with the decline in premiums, the number of gross claims in 2024 also experienced a deeper decline, which amounted to minus 11.7% compared to 2023. This decline in claims was influenced by a decrease in claims in credit insurance by minus 38.5%, miscellaneous business lines which decreased by minus 72.9%, and property which recorded a decline of minus 8.6%.

Tren ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2023, di mana jumlah klaim tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 16,5% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan premi, tetapi lonjakan klaim yang lebih besar menyebabkan tekanan pada Hasil *Underwriting* (HUW), yang tercatat negatif hingga -9,5% pada tahun tersebut. Meskipun pendapatan premi bruto dan klaim bruto sama-sama mengalami penurunan, profitabilitas industri reasuransi justru mencatatkan hasil negatif.

This trend was reversed in 2023, where the number of claims recorded a significant increase of 16.5% compared to 2022. The increase was in line with premium growth, but the larger surge in claims put pressure on the Underwriting Result (HUW), which recorded a negative -9.5% in that year. Although gross premium income and gross claims both decreased, the profitability of the reinsurance industry actually recorded negative results.

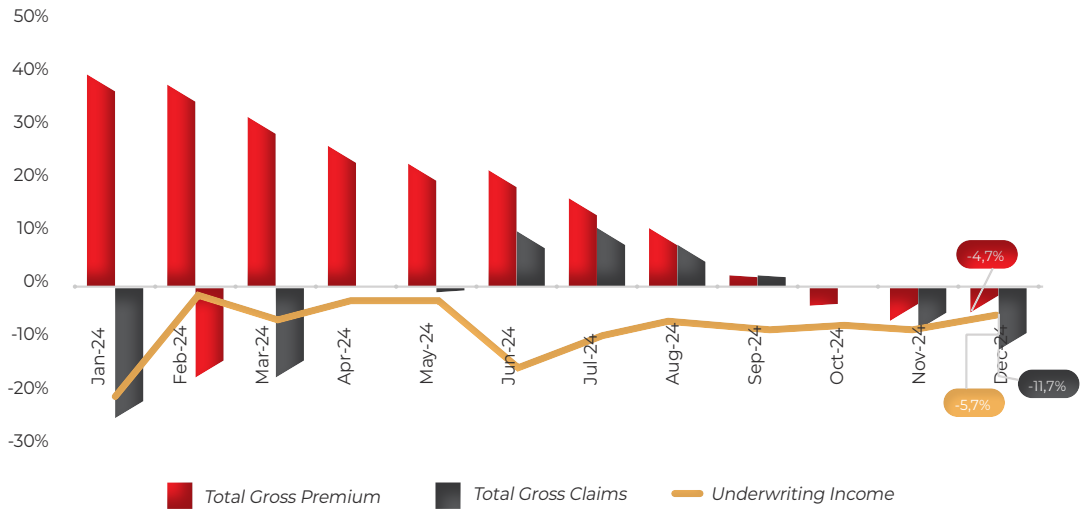
Hal ini disebabkan oleh kenaikan signifikan pada cadangan klaim yang mengindikasikan adanya ekspektasi kenaikan beban klaim di masa mendatang, yang berpotensi menekan kinerja keuangan industri reasuransi. Lonjakan cadangan klaim mengindikasikan bahwa pelaku industri bersikap lebih konservatif dalam mengantisipasi risiko yang mungkin belum sepenuhnya terealisasi.

This was due to a significant increase in claim reserves, indicating expectations of higher claims in the future, which could potentially weigh on the financial performance of the reinsurance industry. The surge in claim reserves indicates that industry players are taking a more conservative stance in anticipating risks that may not yet have fully materialized.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, baik perusahaan asuransi umum maupun reasuransi, menghadapi indikasi peningkatan risiko yang serupa. Lonjakan cadangan klaim yang terjadi pada industri reasuransi dapat menjadi refleksi dari tingginya eksposur risiko di sektor asuransi umum, mengingat reasuransi berperan dalam menanggung sebagian besar klaim dari perusahaan asuransi langsung.

This situation indicates that both general insurance and reinsurance companies are facing similar indications of increased risk. The surge in claim reserves in the reinsurance industry may reflect high risk exposure in the general insurance sector, given that reinsurance plays a role in covering a large portion of claims from direct insurance companies.

Pertumbuhan Kinerja Reasuransi pada Tahun 2024 (%yoy)
Reinsurance Performance Growth in 2024 (%yoy)



Sumber: OJK, Analisis IFG Progress
Source: OJK, IFG Progress Analysis

2. INDUSTRI ASURANSI JIWA

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kinerja 56 perusahaan asuransi jiwa sepanjang tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam berbagai indikator utama, termasuk peningkatan pendapatan premi dan jumlah tertanggung.

Dari sisi pendapatan premi, pada tahun 2024 pendapatan premi industri mencapai Rp185,39 triliun, tumbuh 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp77,07 triliun, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,3%.

Berdasarkan jenis produk, premi asuransi tradisional tumbuh signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp110,36 triliun, dengan kontribusi 59,5% dari total premi, sementara 40,5% berasal dari unit link. Di sisi lain, premi asuransi jiwa syariah juga mengalami pertumbuhan 10,4% menjadi Rp22,61 triliun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Dari sisi cakupan perlindungan, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa mengalami lonjakan 80,1% menjadi 154,64 juta orang, yang didorong oleh pertumbuhan pesat segmen tertanggung kumpulan (107,7%) menjadi 133,05 juta orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin besar cakupan masyarakat yang berhasil memiliki proteksi asuransi dengan bantuan fasilitas dari perusahaan atau organisasi. Hal ini mencerminkan peran industri dalam memberikan solusi perlindungan finansial yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari sisi total klaim, sepanjang tahun 2024, industri asuransi jiwa telah membayarkan Rp160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga Indonesia, serta mencerminkan komitmen industri dalam melindungi masyarakat Indonesia. Selain itu, industri akan terus memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan finansial yang optimal.

Secara lebih rinci, beberapa jenis klaim menunjukkan tren positif bagi industri asuransi jiwa, di antaranya:

a. klaim meninggal dunia mencapai Rp11,29 triliun, memastikan keluarga nasabah tetap memiliki perlindungan keuangan;
b. klaim akhir kontrak meningkat 13,9% menjadi Rp18,30 triliun, mencerminkan manfaat jangka panjang yang diterima nasabah setelah menyelesaikan masa pertanggungan mereka;
c. klaim *surrender* turun 13,3% menjadi Rp77,15 triliun, menandakan kesadaran atas pentingnya proteksi jiwa yang semakin baik; dan
d. klaim *partial withdrawal* naik 17% menjadi Rp19,87 triliun, menunjukkan bahwa polis asuransi tetap menjadi solusi likuiditas bagi nasabah yang membutuhkan dana tanpa harus kehilangan perlindungan sepenuhnya.

2. LIFE INSURANCE INDUSTRY

The Indonesian Life Insurance Association (AAJI) reported the performance of 56 life insurance companies throughout 2024 which showed positive growth in various key indicators, including an increase in premium income and the number of insured.

In terms of premium income, in 2024 industry premium income reached IDR185.39 trillion, growing 4.3% compared to the previous year. This growth was supported by new business premiums of IDR108.32 trillion and advanced premiums of IDR77.07 trillion, each of which recorded a growth of 4.3%.

By product type, traditional insurance premiums increase significantly by 18.7% to IDR10.36 trillion, contributing 59.5% of the total premiums, while 40.5% came from unit-linked. On the other hand, sharia life insurance premiums also grew 10.4% to IDR22.61 trillion, in line with the increasing public awareness of sharia-based financial products.

In terms of coverage, the number of life insurance policyholders went up by 80.1% to 154.64 million people, driven by rapid growth in the group policyholder segment (107.7%) to 133.05 million people. This increase indicates that an increasingly larger portion of the population is successfully obtaining insurance protection with the assistance of facilities provided by companies or organizations. This reflects the industry's role in providing broader financial protection solutions for the public.

In terms of total claims, throughout 2024, the life insurance industry has paid IDR160.07 trillion to 9.08 million beneficiaries. This figure shows that life insurance is a major pillar in supporting the economic resilience of Indonesian families, and reflects the industry's commitment to protecting the Indonesian people. In addition, the industry will continue to ensure that customers get optimal financial protection.

In more detail, several types of claims showed a positive trend for the life insurance industry, including:

a. death claims reached IDR11.29 trillion, ensuring the families of customers continue to have financial protection;
b. end-of-contract claims increased 13.9% to IDRn18.30 trillion, reflecting the long-term benefits that customers receive upon completion of their coverage period;
c. surrender claims decreased 13.3% to IDR77.15 trillion, signaling better awareness of the importance of life protection; and
d. partial withdrawal claims increased 17% to IDR19.87 trillion, showing that insurance policies remain a liquidity solution for customers who need funds without having to lose full protection.

Sementara itu, klaim kesehatan meningkat 16,4% menjadi Rp24,18 triliun, dengan pertumbuhan yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 24,6%. Industri optimis, bahwa dengan aturan baru OJK yang akan diterbitkan pada tahun 2025, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai *Coordination of Benefit* (CoB), pengelolaan klaim kesehatan dapat lebih efisien. Hal ini akan memberikan kepastian bagi industri asuransi kesehatan swasta sekaligus memastikan manfaat perlindungan tetap optimal bagi masyarakat.

Meanwhile, health claims increased by 16.4% to IDR24.18 trillion, with a more restrained growth compared to the previous year which reached 24.6%. The industry is optimistic that with the new OJK regulations to be issued in 2025, including further regulation on Coordination of Benefit (CoB), health claims management can be more efficient. This will provide certainty for the private health insurance industry as well as ensure that protection benefits remain optimal for the community.

Dari sisi total aset, industri asuransi jiwa mengalami peningkatan aset 0,7% menjadi Rp616,75 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang hanya 0,3%. Sementara itu, total investasi industri asuransi jiwa mencapai Rp541,40 triliun, naik 0,2%. Peningkatan pada total aset dan investasi ini mencerminkan komitmen dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang serta memperkuat ketahanan sektor asuransi secara keseluruhan.

In terms of total assets, the life insurance industry experienced a 0.7% increase in assets to IDR616.75 trillion, higher than last year's growth of only 0.3%. Meanwhile, total investment in the life insurance industry reached IDR541.40 trillion, an increase of 0.2%. This increase in total assets and investments reflects a commitment to maintaining long-term financial stability and strengthening the resilience of the insurance sector as a whole.

Salah satu pertumbuhan investasi terbesar berasal dari SBN yang meningkat 11,9% dengan total kontribusi Rp205,03 triliun (37,9% dari total investasi). Industri asuransi jiwa terus memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya melalui peningkatan investasi di SBN, yang tidak hanya mendukung stabilitas industri tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Sementara itu, investasi di saham dan reksa dana masing-masing berkontribusi sebesar 24,7% dan 12,9% dari total portofolio investasi.

One of the largest investment growths came from SBN, which increased by 11.9% with a total contribution of IDR205.03 trillion (37.9% of total investment). The life insurance industry continues to play an important role in the Indonesian economy, one of which is through increased investment in SBN. It is not only supports industry stability but also contributes to national development. Meanwhile, investments in shares and mutual funds contributed 24.7% and 12.9% of the total investment portfolio, respectively.

Industri asuransi jiwa saat ini tengah bersiap menghadapi implementasi PSAK 117 pada tahun 2025 serta regulasi permodalan pada tahun 2026, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan industri. Adaptasi terhadap regulasi baru serta terus berinovasi dalam pengembangan produk, industri asuransi jiwa memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Untuk memastikan keberlanjutan di masa depan, sinergi antara perusahaan asuransi, regulator, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan serta peluang ke depan.

The life insurance industry is currently preparing for the implementation of PSAK 117 in 2025 and capital regulations in 2026, which aim to increase transparency and sustainability of the industry. Adapting to new regulations and continuing to innovate in product development, the life insurance industry has positive growth prospects. To ensure sustainability in the future, synergy between insurance companies, regulators, and society is a key factor in facing the challenges and opportunities ahead.

3. INDUSTRI ASURANSI WAJIB

Asuransi wajib merupakan salah satu sektor dalam industri asuransi di Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk melaksanakan program tertentu. Dalam hal ini, Jasa Raharja, sebagai salah satu entitas Anggota *Holding* IFG, memainkan peran strategis dalam menyediakan perlindungan dasar bagi masyarakat melalui 2 (dua) program utama yang diatur oleh Undang-Undang (UU).

Program pertama adalah asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum (Iuran Wajib/IW) yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Program kedua adalah asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (Sumbangan Wajib/SW) yang diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang

3. COMPULSORY INSURANCE INDUSTRY

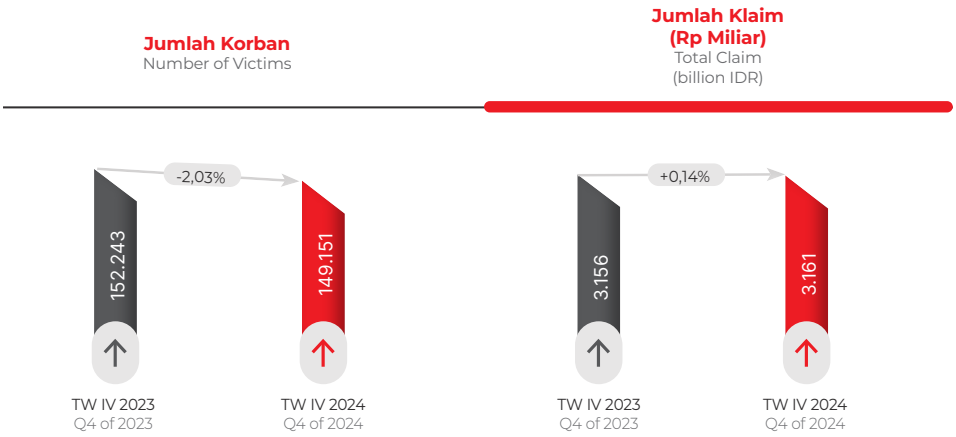
Compulsory insurance is one of the sectors in the insurance industry in Indonesia organized by Government agencies or insurance companies appointed to implement certain programs. In this case, Jasa Raharja, as one of the IFG holding member entities, plays a strategic role in providing basic protection for the community through 2 (two) main programs regulated by Law (UU).

The first program is public transport passenger accident insurance (Compulsory Premiums/IW) which is regulated by Law No. 33/1964 on the Compulsory Passenger Accident Insurance Fund. The second program is road traffic accident insurance (Compulsory Contribution/SW) which is regulated by Law No. 34/1964 on the Compulsory

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua program ini menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap risiko kecelakaan yang terjadi dalam aktivitas transportasi umum maupun lalu lintas jalan.

Insurance Fund for Road Traffic Accidents. These two programs are important instruments in ensuring basic protection for the community against the risk of accidents that occur in public transportation and road traffic activities.

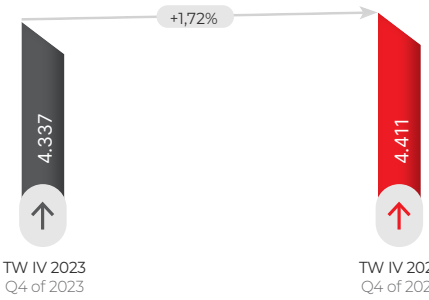
Jumlah Santunan dan Korban yang Menerima Santunan di Jasa Raharja
Number of Compensation and Victims Receiving Compensation at Jasa Raharja



Sebagai bagian dari pilar keselamatan perjalanan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan, Jasa Raharja telah memberikan santunan sebesar Rp3.161 miliar pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3.156 miliar. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah korban kecelakaan perjalanan menjadi 149 ribu korban pada tahun 2024, turun sebesar 2,03% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 152 ribu korban. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan ini adalah meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah korban meninggal dunia sebesar 25.587 korban atau meningkat 1,94% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 25.101 korban meninggal dunia.

As part of the pillar of travel safety, especially in handling accident victims, Jasa Raharja has provided compensation of IDR3,161 billion in 2024, an increase of 0.14% compared to the previous year which was recorded at IDR3,156 billion. This increase was inversely proportional to the decline in the number of victims of travel accidents to 149 thousand victims in 2024, a decrease of 2.03% compared to 2023 which reached 152 thousand victims. One of the factors driving this increase is the increase in the accident fatality rate, which is shown from the increase in the number of fatalities of 25,587 victims or an increase of 1.94% compared to the previous year of 25,101 victims.

Penerimaan SW di Jasa Raharja (Rp miliar)
Compulsory Contribution (SW) Revenue at Jasa Raharja (IDRbillion)



Di sisi lain, penerimaan SW pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp4.411 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,72% dari tahun 2023 yang sebesar Rp4.337 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah

On the other hand, SW revenue in 2024 was recorded at IDR4,411 billion, an increase of 1.72% from 2023 which amounted to IDR4,337 billion. This increase is in line with the increase in the number of vehicles that paid off the

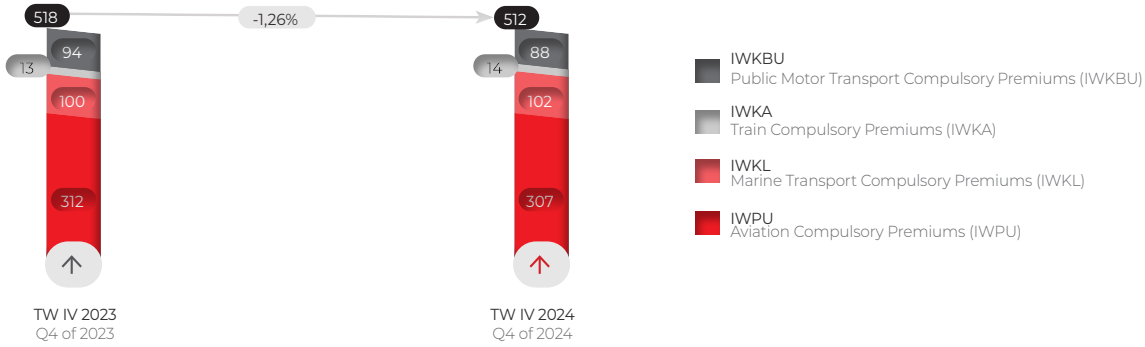
kendaraan lunas daftar ulang sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi dengan aplikasi Signal dan sistem Samsat Nasional.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses collection, tetapi juga untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat secara lebih mudah dan transparan. Hasil dari pengembangan ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam realisasi SW online nasional, yang pada tahun 2024 tumbuh sebesar 22,04% dibandingkan periode sebelumnya, dengan nilai total mencapai Rp304 miliar.

re-registration by 1.3% from the previous year. One of the strategic efforts made is the utilization of digital technology through integration with the Signal application and the National Samsat system.

This step not only aims to improve the efficiency of the collection process, but also to expand the reach of services to the public in a more convenient and transparent manner. The results of this development is indicated from the significant increase in the national online SW realization, which in 2024 increased by 22.04% compared to the previous period, with a total value of IDR304 billion.

Penerimaan IW di Jasa Raharja (Rp miliar)
Compulsory Premiums (IW) Revenue at Jasa Raharja (IDRbillion)



Sementara itu, penerimaan IW pada tahun 2024 mencapai Rp512 miliar mengalami penurunan 1,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp518 miliar. Penurunan tersebut kontribusi oleh Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dengan penerimaan sebesar Rp88 miliar pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp94 miliar atau menurun 5,59% yang disebabkan dari pemberhentian pembayaran IWKBU dari Gojek dan kendaraan transportasi umum online lainnya.

Meanwhile, IW revenue in 2024 reached IDR512 billion, a decrease of 1.26% compared to the same period the previous year of IDR518 billion. The decrease was contributed by the Public Motor Vehicles Compulsory Premiums (IWKBU) with revenue of IDR88 billion in 2024 compared to the previous year of IDR94 billion or a decrease of 5.59% due to the termination of IWKBU payments from Gojek and other online public transportation vehicles.

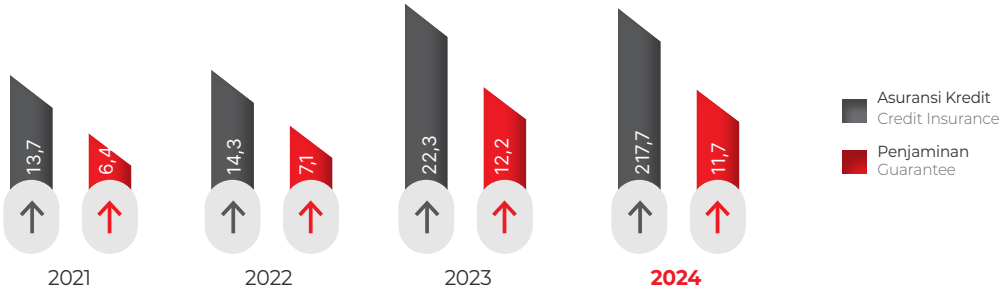
4. INDUSTRI PENJAMINAN DAN ASURANSI KREDIT

Industri penjaminan mencatatkan IJP sebesar Rp11,7 triliun di tahun 2024, menurun sebesar 3,85% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp12,2 triliun. Sejalan dengan penurunan IJP pada industri penjaminan, premi bruto industri asuransi kredit juga mengalami penurunan sebesar 3,01% pada tahun 2024, dengan total premi bruto mencapai Rp21,7 triliun. Penurunan ini berbanding terbalik dengan peningkatan volume penyaluran kredit sebesar 10,52%, menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7,2 triliun.

4. CREDIT GUARANTEE AND INSURANCE INDUSTRY

The guarantee industry recorded an IJP of IDR1 1.7 trillion in 2024, a decrease of 3.85% compared to 2023 which amounted to IDR12.2 trillion. In line with the decline in IJP in the guarantee industry, the gross premium of the credit insurance industry also decreased by 3.01% in 2024, with total gross premiums reaching IDR21.7 trillion. This decline is inversely proportional to the increase in lending volume by 10.52%, to IDR7.9 trillion in 2024 compared to the previous year of IDR7.2 trillion.

Premi Bruto Industri Penjaminan dan Asuransi Kredit (Rp triliun)
Gross Premiums of Guarantee and Credit Insurance Industry (IDRtrillion)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK
Source: OJK Indonesian Banking Statistics

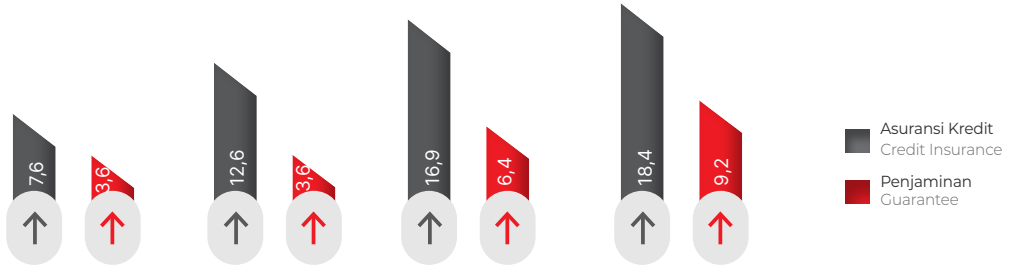
Berbanding terbalik dengan penurunan premi dan IJP, klaim di industri penjaminan dan asuransi kredit juga mengalami pemburukan. Klaim bruto pada industri penjaminan meningkat sebesar 44,05% pada tahun 2024, mencapai Rp9,2 triliun dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp6,4 triliun. Sedangkan di industri asuransi kredit, klaim bruto meningkat sebesar 9,45% di tahun 2024, mencapai Rp18,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,9 triliun. Secara keseluruhan, klaim industri penjaminan dan asuransi kredit naik 34,28% dalam 4 (empat) tahun terakhir (*Compound Annual Growth Rate* (CAGR) tahun 2021 – 2024).

Sebaliknya, jumlah NPL bank umum di Indonesia turun sebesar 0,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan secara holistik yang dapat menyeimbangkan atau menjaga industri penjaminan dan asuransi kredit agar dapat bertahan dalam jangka panjang.

In contrast to the decline in premiums and IJP, claims in the guarantee and credit insurance industries have also deteriorated. Gross claims in the guarantee industry increased by 44.05% in 2024, reaching IDR9.2 trillion compared to the previous year of Rp6.4 trillion. Meanwhile, in the credit insurance industry, gross claims increased by 9.45% in 2024, reaching IDR18.5 trillion compared to the previous year of IDR16.9 trillion. Overall, the guarantee and credit insurance industry claims have increased by 34.28% in the last 4 (four) years (Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2021 - 2024).

In contrast, the number of commercial bank NPLs in Indonesia decreased by 0.27% compared to the previous year. This shows the need for a holistic policy that can balance or maintain the credit guarantee and insurance industry in order to survive in the long term.

Klaim Bruto Industri Penjaminan dan Asuransi Kredit (Rp triliun)
Gross Claims of Guarantee and Credit Insurance Industry (IDRtrillion)



5. INDUSTRI PASAR MODAL DAN INVESTASI

Dalam industri pasar modal menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan transaksi di seluruh instrumen perdagangan. RNTH saham mencapai Rp12,8 triliun, naik dari Rp10,7 triliun pada 2023. Industri *secondary brokerage* tetap kompetitif, dengan 15 (lima belas) broker teratas menguasai 67% dari total

5. CAPITAL MARKET AND INVESTMENT INDUSTRY

The capital market industry showed higher activity in 2024 compared to the previous year, reflected in increased transactions across all trading instruments. The Average Daily Transaction Value of Stock Trading reached IDR12.8 trillion, an increase from IDR10.7 trillion in 2023. The secondary brokerage industry remains competitive, with the top 15 brokers accounting for 67%

transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebagian besar berasal dari broker yang memiliki *captive market* kuat, seperti yang berafiliasi perbankan domestik dan asing. Persaingan ini juga mendorong tren penurunan komisi *equity brokerage* dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perdagangan obligasi Pemerintah dalam denominasi rupiah mencatatkan peningkatan nilai transaksi harian sebesar 3,8% menjadi Rp49,7 triliun, sementara obligasi korporasi rupiah tumbuh 6,21% dengan nilai transaksi harian mencapai Rp2,46 triliun sepanjang 2024.

Dalam industri pembiayaan dan modal ventura, melalui program pembiayaan UMi yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga menunjukkan kinerja positif dengan total penyaluran mencapai Rp44,64 triliun kepada 11,84 juta pelaku usaha UMi, meningkat sebesar Rp9,58 triliun atau sekitar 27,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini menyasar segmen yang belum terlayani oleh perbankan melalui KUR, dengan fokus pada sektor produktif. Program pembiayaan UMi menargetkan 2,2 juta pelaku usaha pada 2024 dan telah menjangkau 99% wilayah administratif di Indonesia melalui 84 mitra penyalur, yang terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik langsung, tidak langsung, maupun linkage.

Dalam industri pengelolaan gedung, tingkat hunian perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2024 mencapai 74,0%, meningkat sebesar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat hunian di luar kawasan CBD tercatat sebesar 72,0%. Grup IFG turut berkontribusi dalam pasar ini, dengan tingkat hunian sebesar 38% di Gedung Graha CIMB Niaga.

Di sisi lain, dalam industri manajer investasi, terdapat penurunan hingga akhir tahun 2024, di mana jumlah dana kelolaan atau AUM di luar Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) menurun sebesar -1,66% dengan penurunan terbesar berasal dari produk reksa dana berbasis saham sebesar -17,0% (Rp18 triliun), sementara untuk produk reksa dana berbasis pasar uang dan reksa dana terproteksi memiliki peningkatan masing-masing sebesar Rp7 triliun (8,2%) dan Rp8 triliun (7,2%) secara yoy.

of total transactions on the Indonesia Stock Exchange (IDX), mostly from brokers with strong captive markets, such as those affiliated with domestic and foreign banks. This competition has also driven a downward trend in equity brokerage commissions from year to year. On the other hand, trading in rupiah-denominated government bonds recorded an increase in daily transaction value of 3.8% to IDR49.7 trillion, while rupiah corporate bonds increased 6.21% with a daily transaction value of IDR2.46 trillion throughout 2024.

In the financing and venture capital industry, the UMi financing program managed by the Government Investment Center (PIP) also showed positive performance with a total distribution of IDR44.64 trillion to 11.84 million UMi business actors, an increase of IDR9.58 trillion or around 27.3% compared to the previous year. This program targets segments that have not been served by banks through KUR, with a focus on the productive sector. The UMi financing program targets 2.2 million business actors by 2024 and has reached 99% of administrative areas in Indonesia through 84 channeling partners, consisting of Non-Bank Financial Institutions (LKBB), both direct, indirect, and linkage.

In the building management industry, the office occupancy rate in Jakarta's central business district (CBD) in 2024 reached 74.0%, an increase of 0.5% compared to the previous year. Meanwhile, the occupancy rate outside the CBD area was recorded at 72.0%. IFG Group contributes to this market, with an occupancy rate of 38% in Graha CIMB Niaga Building.

On the other hand, there was a decline until the end of 2024 in the investment manager industry, where the number of managed funds or AUM outside the Fund Management Contract (KPD) decreased by minus 1.66% with the biggest decline coming from equity-based mutual fund products of minus 17.0% (IDR18 trillion), while money market-based mutual fund products and protected mutual funds had an increase of IDR7 trillion (8.2%) and IDR8 trillion (7.2%) respectively yoy.

RENCANA STRATEGIS 2024
2024 STRATEGIC PLAN

ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan perannya sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, IFG menghadapi berbagai tantangan, baik yang dialami oleh *Holding* maupun oleh Anggota *Holding*. Dalam hal ini, IFG secara proaktif memberikan panduan strategis, arahan, serta konsultasi bisnis kepada seluruh entitas di dalamnya. Selain itu, IFG juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program kerja yang bersifat implementatif, termasuk pendampingan dan pemantauan terhadap realisasi strategi di masing-masing Anggota *Holding*.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh grup IFG di tahun 2024, baik secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. **Pemburukan Kualitas Kredit akibat Peningkatan Klaim KUR**
   Program Penugasan KUR pada Askrindo dan Jamkrindo yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Penjamin KUR berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

   Berdasarkan prognosa 2024, hasil *underwriting* perusahaan (KUR & non-KUR) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, membukukan hasil sebesar negatif Rp284,2 miliar untuk Askrindo dan Rp800,6 miliar untuk Jamkrindo. Penyebab utama penurunan kinerja keuangan pada tahun 2024 bersumber dari pemburukan kualitas kredit KUR yang dijamin. Kualitas kredit yang memburuk terefleksikan dari peningkatan pengajuan klaim KUR dengan pertumbuhan yang menyebabkan prognosa hasil *underwriting* KUR mengalami penurunan sebesar -297% dibanding tahun sebelumnya. Atas hal tersebut, kinerja program penugasan KUR di IFG dan Anak Perusahaan menunjukkan hasil yang merugi. Berdasarkan vintage analysis, risiko meningkat dari COVID, terutama atas pinjaman yang direstrukturisasi dan berdasarkan kondisi klaim dan tanpa penyesuaian IJP, total kerugian dari KUR diperkirakan mencapai Rp11,8-Rp17,2 triliun hingga 2027 yang akan dialami oleh Penjamin akibat COVID vintages. Puncak kerugian yang dialami Penjamin tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan di tahun 2024. Akibat pemburukan klaim KUR tersebut, net hasil *underwriting* KUR di Askrindo dan Jamkrindo diproyeksikan turun signifikan mencapai -Rp4,0 triliun pada akhir tahun 2024.

STRATEGIC ISSUES FACED

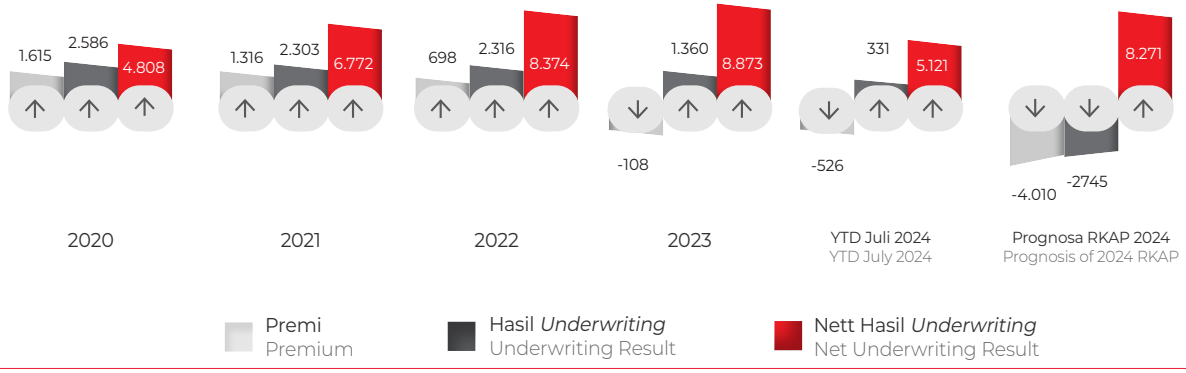
In performing its role as an Insurance, Guarantee and Investment Holding SOE, IFG faces various challenges, both experienced by the holding and by the holding members. In this case, IFG proactively provides strategic guidance, direction, and business consultation to all entities within the holding. In addition, IFG is also directly involved in the implementation of work programs, including mentoring and monitoring the realization of strategies in each holding member.

The strategic issues faced by the IFG group in 2024, both internally and externally, are as follows:

1. **Deterioration in Credit Quality due to Increase in KUR Claims**
   KUR Assignment Program to Askrindo and Jamkrindo, which have been designated as KUR Guarantee Companies based on the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 188 of 2015 concerning the Determination of People's Business Credit Distributors and People's Business Credit Guarantee Companies.

   Based on the 2024 forecast, the companies' underwriting results (KUR & non-KUR) experienced a significant decline compared to the previous year, recording negative results of IDR284.2 billion for Askrindo and IDR800.6 billion for Jamkrindo. The main cause of the decline in financial performance in 2024 stemmed from the deterioration in the quality of KUR loans guaranteed. The deteriorating credit quality is reflected in the increase in KUR claim submissions with growth that caused the prognosis of KUR underwriting results to decline by minus 297% compared to the previous year. As a result, the performance of the KUR assignment program in IFG and Subsidiaries showed loss-making results. Based on vintage analysis, the risk increases from COVID, especially on restructured loans and based on claim conditions and without IJP adjustment, the total loss from KUR is estimated to reach IDR11.8 to IDR17.2 trillion until 2027 which will be experienced by Guarantors due to COVID vintages. The peak of losses experienced by the Guarantor is expected to have a significant impact in 2024. As a result of the worsening KUR claims, the net KUR underwriting result at Askrindo and Jamkrindo is projected to drop significantly to minus IDR4.0 trillion by the end of 2024.

Gambar Premi dan Hasil *Underwriting* KUR
KUR Premium and Underwriting Results



Sumber: Analisis IFG
Source: IFG Analysis

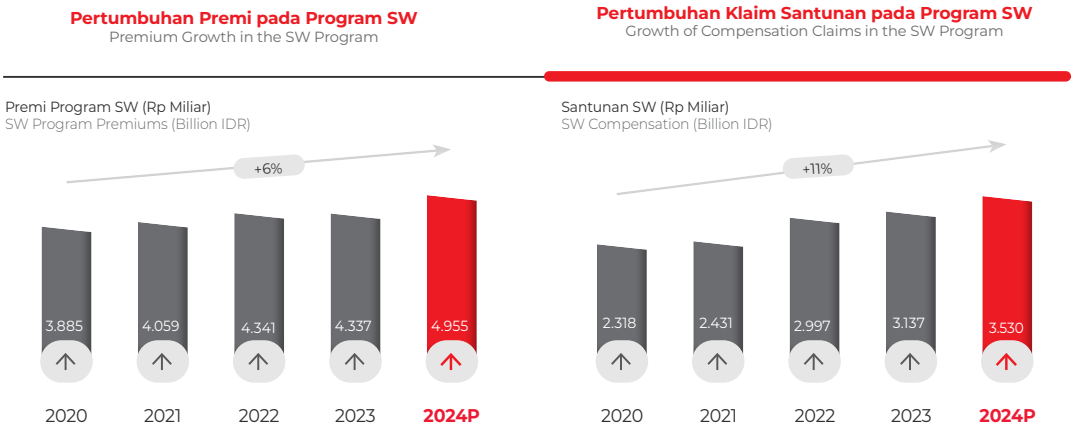
2. Peningkatan Pembayaran Santunan SW

Peningkatan SW bertumbuh sejalan dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi di Indonesia. Lini bisnis SW mencatatkan CAGR sebesar 2,8% dari tahun 2020 hingga Prognosa 2024. Meskipun premi mengalami peningkatan, klaim atau santunan SW juga tumbuh sebesar 7,1%. Jasa Raharja menghadapi kondisi *negative jaws*, di mana pertumbuhan klaim lebih besar daripada pertumbuhan premi. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebesar 14,1% dari tahun 2020 hingga 2023. Akibatnya, rasio santunan meningkat dan berdampak pada penurunan laba bersih Jasa Raharja.

2. Increased payment of SW benefits

The increase in SW grew in line with the increase in private motor vehicle ownership in Indonesia. The SW business line recorded a CAGR of 2.8% from 2020 to 2024 forecast. Despite the increase in premiums, SW claims or compensation also grew by 7.1%. Jasa Raharja is facing negative jaws, where claims growth is greater than premium growth. This is indicated by the increase in traffic accidents in Indonesia by 14.1% from 2020 to 2023. As a result, the compensation ratio increased and resulted in a decrease in Jasa Raharja's net profit.

Prognosa SW
Prognosis of SW



3. Persaingan antar Sesama Perusahaan Asuransi dan Ketergantungan bisnis terhadap Broker

Tingginya ketergantungan industri Asuransi Umum terhadap jalur distribusi broker memicu persaingan yang semakin ketat antara Anak Perusahaan IFG dan perusahaan asuransi lainnya. Meskipun tarif dan biaya akuisisi serta tambahan *fee* untuk broker telah ditetapkan, dalam praktiknya terjadi peningkatan *fee* yang harus dibayarkan, sehingga menyulitkan IFG dan Anak Perusahaan untuk bersaing secara efektif. Kondisi ini berdampak pada penurunan pangsa pasar IFG.

3. Competition among insurance companies and business dependence on brokers

The high dependence of the General Insurance industry on broker distribution channels has triggered increasingly fierce competition between IFG Subsidiaries and other insurance companies. Although acquisition rates and fees as well as additional fees for brokers have been determined, in practice there has been an increase in the fees that must be paid, making it difficult for IFG and its Subsidiaries to compete effectively. This condition has resulted in a decline in IFG's market share.

4. **Pengelolaan Bisnis Subrogasi yang Masih Belum Optimal**
   Pendapatan subrogasi memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi Perusahaan. Namun, kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam tingkat kolektibilitas pengembalian dana subrogasi memengaruhi optimalisasi kinerja IFG dan Anak Perusahaan pada tahun 2024. Kendala utama terletak pada terbatasnya akses dan ketersediaan data, informasi, serta dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian aset subrogasi.

5. **Kondisi Penyehatan Keuangan pada Perusahaan Afiliasi IFG**
   Isu insolvensi likuiditas pada PT Reasuransi Nasional Indonesia ("NasRe") sebagai cucu perusahaan IFG, pada September 2024 menunjukkan tingkat solvensi sebesar -84%, jauh di bawah batas minimum yang ditetapkan OJK untuk perusahaan reasuransi sebesar 120%. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kinerja bisnis Askrindo secara konsolidasi dan juga IFG *Holding*. Penyehatan keuangan NasRe menjadi prioritas utama untuk memperbaiki tingkat solvensi dan *Risk-Based Capital* serta memastikan keberlanjutan bisnis ke depan.

6. **Kendala Penjualan Aset Properti IFG Life**
   Nilai buku aset yang dimiliki IFG Life berada pada level yang cukup tinggi akibat kapitalisasi pajak pengalihan yang mencapai rata-rata 7%. Di sisi lain, kondisi pasar properti saat ini sedang lesu, dan dengan meningkatnya biaya pinjaman, para pembeli berharap bank dapat berperan sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, terdapat anggapan di kalangan pembeli bahwa barang yang dilelang, yang identik dengan barang eksekusi, seharusnya ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar. Dalam konteks ini, para pembeli juga menantikan lelang kedua dengan harapan adanya penyesuaian harga yang lebih menguntungkan.

7. **Optimalisasi Pengelolaan Investasi**
   IFG melakukan optimalisasi terkait pengelolaan aset investasi dengan prinsip *Liability Driven Investment* ("LDI") di mana pada RKAP tahun 2024 ditargetkan *Yield* on *Investment* ("YoI") sebesar 6%, sedangkan prognosa YoI pada Desember 2024 diproyeksikan sebesar 6%. Hal ini didukung dengan strategi investasi yang disesuaikan dengan profitabilitas dari Anak Perusahaan, di mana sebelumnya mayoritas alokasi aset investasi IFG ada pada investasi deposito dan dilakukan optimalisasi penempatan pada kelas aset investasi yang memiliki imbal hasil yang lebih baik seperti penempatan investasi pada obligasi, baik pada SBN maupun obligasi korporasi, dengan tetap memperhatikan *Asset Liability Management* dan risiko.

INISIATIF STRATEGIS 2024

IFG terus melakukan perbaikan fundamental dan berupaya membangun bisnis yang berkelanjutan serta lebih kompetitif dengan mengembangkan kapabilitas di luar penugasan Pemerintah. Perusahaan juga menargetkan penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat, sekaligus memperkuat

4. **Subrogation Business Management is Still Not Optimal**
   Subrogation income has great potential to contribute significantly to the Company. However, the lack of efficiency and effectiveness in the collection rate of subrogation refunds affects the optimization of IFG and Subsidiaries' performance by 2024. The main obstacle lies in the limited access and availability of data, information, and documents required in the settlement of subrogation assets.

5. **Financial Restructuring Condition of IFG Affiliated Companies**
   The liquidity insolvency issue of PT Reasuransi Nasional Indonesia ("NasRe") as IFG's sub-subsidiaries, as of September 2024 showed a solvency level of minus 84%, far below the minimum limit set by OJK for reinsurance companies of 120%. This condition negatively impacts Askrindo's business performance on a consolidated basis as well as IFG Holding. NasRe's financial restructuring is a top priority to improve its solvency and Risk-Based Capital levels and ensure business sustainability going forward.

6. **Constraints on IFG Life's Property Asset Sales**
   The book value of IFG Life's assets is quite high due to transfer tax capitalization reaching an average of 7%. On the other hand, the current property market is subdued, and with rising borrowing costs, buyers are hoping that banks can act as a bridge to meet their needs. Meanwhile, there is a perception among buyers that auctioned properties, which are synonymous with foreclosed properties, should be offered at below market prices. In this context, buyers are also looking forward to a second auction in the hope of more favorable price adjustments.

7. **Optimization of Investment Management**
   IFG optimizes the management of investment assets with the principle of Liability Driven Investment ("LDI") where in the 2024 RKAP the Yield on Investment ("YoI") is targeted at 6%, while the prognosis of YoI in December 2024 is projected at 6%. This is supported by an investment strategy that is adjusted to the profitability of the Subsidiary, where previously the majority of IFG's investment asset allocation was in deposit investments and optimized placement in investment asset classes that have better returns such as investment placement in bonds, both in SBN and corporate bonds, while still paying attention to Asset Liability Management and risk.

2024 STRATEGIC INITIATIVES

IFG continues to make fundamental improvements and seeks to build a sustainable and more competitive business by developing capabilities beyond Government assignments. The company also targets the creation of added value for customers and society, while strengthening synergies

sinergi antar Anggota *Holding* serta ekosistem BUMN guna mendukung pertumbuhan bisnis. Selain itu, IFG berkomitmen untuk memperkokoh fondasi seluruh Anggota *Holding* melalui penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas bisnis dan operasional.
IFG telah merumuskan 8 (delapan) Program Kerja Utama IFG pada tahun 2024 yang selaras dengan Arahan Taktis APS Seri A RKAP 2024, yang mencakup hal-hal berikut:

1. **Optimalisasi Penugasan Pemerintah sesuai mandat.**
   I. Meningkatkan penetrasi IW dan SW dengan menjangkau pelanggan secara langsung;
   II. Meningkatkan fasilitas pada program pencegahan kecelakaan;
   III. Memperkuat landasan dan dukungan hukum pada Jasa Raharja;
   IV. Optimalisasi pengelolaan penugasan pemerintah; dan
   V. Penyelesaian transfer portofolio polis & aset Jiwasraya secara tuntas.

2. ***Operational Excellence*: perbaikan proses bisnis dan sistem penunjang *back-end* dan *middle-end* termasuk penguatan *underwriting* serta meningkatkan kapabilitas penagihan piutang yang didukung Teknologi Informasi (*Straight Through Processing)***
   I. Digitalisasi proses bisnis;
   II. Optimalisasi kinerja produk dan portofolio di antaranya dengan memperkuat *Risk Analytic;*
   III. Integrasi infrastruktur, aplikasi, teknologi informasi Induk dengan Anak Perusahaan serta peningkatan *core/surrounding system* dan tata kelola data;
   IV. Implementasi PSAK-74 Fase 4-5 (implementasi dan *go-live*) secara terintegrasi; dan
   V. *Enterprise Resource Planning.*

3. **Memperkuat sinergi untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan bisnis saat ini.**
   I. Menciptakan keunggulan kompetitif dengan penguasaan pasar (didukung reasuransi);
   II. Membangun *join-capacity financial lines* melalui konsorsium atau koasuransi;
   III. Memanfaatkan akses terhadap ekosistem BUMN, afiliasi, dan pemerintahan;
   IV. Menumbuhkan penjaminan/asuransi kredit produktif secara selektif dengan *stop-loss* dan *underwriting* yang *robust*;
   V. Mengembangkan model bisnis untuk meningkatkan *recovery* dari hak subrogasi; dan
   VI. Memaksimalkan produktivitas dari aset properti.

4. **Ekspansi pada Pasar Baru**
   I. Meningkatkan penetrasi pada segmen usaha menengah (*mid-market*);
   II. Masuk ke bisnis ritel untuk meningkatkan pertumbuhan (MTPL, properti residensial, dan mikro asuransi);

between holding members and the SOE ecosystem to support business growth. In addition, IFG is committed to strengthening the foundation of all holding members through strengthening corporate governance, risk management, and improving business and operational capabilities.
IFG has formulated 8 (eight) IFG Key Work Programs in 2024 that are aligned with the APS Tactical Direction Series A RKAP 2024, which includes the following:

1. **Optimization of Government Assignments as mandated.**
   I. Increase Compulsory Premiums and Compulsory Contributions penetration by reaching out to customers directly;
   II. Improve facilities in the accident prevention program;
   III. Strengthen the legal foundation and support for Jasa Raharja;
   IV. Optimizing the management of government assignments; and
   V. Completion of Jiwasraya policy & asset portfolio transfer.

2. **Operational Excellence: improvement of business processes and back-end and middle-end support systems including strengthening underwriting and improving receivables collection capabilities supported by Information Technology (Straight Through Processing).**
   I. Digitalization of business processes;
   II. Optimization of product and portfolio performance, including by strengthening Risk Analytic;
   III. Integration of Parent's infrastructure, applications, information technology with Subsidiaries as well as improvement of core/surrounding systems and data governance;
   IV. Integrated implementation of PSAK-74 Phase 4-5 (implementation and go-live); and
   V. Enterprise Resource Planning.

3. **Strengthen synergies to increase market share and optimize current business.**
   I. Create competitive advantage with market dominance (supported by reinsurance);
   II. Establish joint-capacity financial lines through consortia or coinsurance;
   III. Leverage access to the ecosystem of SOEs, affiliates, and government;
   IV. Selectively grow productive credit guarantees/ insurance with stop-loss and robust underwriting;
   V. Develop business models to increase recovery from subrogation rights; and
   VI. Maximize the productivity of property assets.

4. **Expansion to New Markets**
   I. Increase penetration in the mid-market segment;
   II. Enter into retail business to boost growth (MTPL, residential property, and micro insurance);

III. Mengembangkan bisnis *worksite* dan ritel dengan bertumpu pada korporasi;
IV. Mengembangkan bisnis asuransi jiwa syariah; dan
V. Distribusi terintegrasi: mengintegrasikan dan memperluas jaringan distribusi melalui digitalisasi dan *bionic-model*.

5. Melakukan Transformasi Model Bisnis dan Inovasi Produk

I. Mengubah model bisnis menjadi *Risk Management Partnership;*
II. Beralih dari KBG ke *surety* dengan S&K yang lebih *robust* serta *risk sharing;*
III. Menggarap pasar asuransi kesehatan melalui skema yang *game-changing (managed-care hybrid);*
IV. Melakukan transformasi *bancassurance*;
V. BTIM mengembangkan alternatif solusi baru, contoh: *mortgage-backed securities*, dana berbasis aset infrastruktur, *pension fund*, dan lainnya;
VI. Bahana Sekuritas sebagai instrumen transformasi pada IFG dan BUMN dan menjadi pemain utama pasar *advisory*, dan
VII. BAV melakukan *direct lending to consumers* melalui distribusi yang efisien yaitu *group lending*.

6. Manajemen Risiko & Tata Kelola yang *robust*: menumbuhkan kultur manajemen risiko yang kuat pada Grup IFG, analisis risiko untuk menunjang IFG menjadi *risk management partner.*

I. Peningkatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di lingkungan IFG;
II. Penguatan *Operational Risk Level Contingency Plan*;
III. Implementasi atas regulasi Pelindungan Data Pribadi; dan
IV. Penguatan tata kelola perusahaan secara terintegrasi.

7. Pengembangan Talenta: Mengembangkan dan menarik *talent* baru untuk menjadi lebih kompeten pada manajemen risiko dan menciptakan *High-Performing Culture.*

I. Menciptakan SDM yang unggul dan profesional;
II. Peningkatan kompetensi kepemimpinan terpusat oleh IFG Corporate University; dan
III. Meningkatkan kemampuan teknis SDM melalui program terintegrasi dengan Akademi dalam menjawab tuntutan bisnis.

8. Pengelolaan Investasi yang Optimal dengan memperhatikan prinsip ALM.

I. Optimalisasi pengelolaan likuiditas Anak Perusahaan dengan meminimalisir *idle cash cash on hand;*
II. *Reshaping* alokasi aset investasi melalui *Strategic Asset Allocation* ("SAA") dan *gapping duration* berdasarkan *risk limit* yang terukur sesuai profil liabilitas sehingga meningkatkan alokasi aset investasi yang lebih produktif; dan
III. Memperbaiki *investment selection* melalui sinergi BTIM melalui mekanisme KPD untuk meningkatkan kinerja masing-masing instrumen aset investasi.

III. Develop worksite and retail business by relying on corporations;
IV. Develop sharia life insurance business; and
V. Integrated distribution: integrate and expand distribution networks through digitization and bionic-models.

5. Business Model Transformation and Product Innovation

I. Change the business model to Risk Management Partnership;
II. Switch from KBG to surety with more robust T&Cs and risk sharing;
III. Tackle the health insurance market through a game-changing scheme (managed-care hybrid);
IV. Transform bancassurance;
V. BTIM develops new alternative solutions, for example: mortgage-backed securities, infrastructure asset-based funds, pension funds, and others;
VI. Bahana Sekuritas as a transformation instrument for IFG and SOEs and a major player in the advisory market; and
VII. BAV conducts direct lending to consumers through efficient distribution, namely group lending.

6. Robust Risk Management & Governance: Foster a strong risk management culture in IFG Group, risk analysis to support IFG to become a risk management partner.

I. Increase risk awareness culture within IFG;
II. Strengthen Operational Risk Level Contingency Plan;
III. Implementation of the regulation on Personal Data Protection; and
IV. Strengthen integrated corporate governance.

7. Talent Development: Develop and attract new talents to become more competent in risk management and create a High-Performing Culture.

I. Create excellent and professional human resources;
II. Centralize leadership competency enhancement by IFG Corporate University; and
III. Improve the technical capabilities of human resources through integrated programs with the Academy in response to business demands.

8. Optimal Investment Management with regard to ALM principles.

I. Optimization of Subsidiary's liquidity management by minimizing idle cash on hand;
II. Reshape investment asset allocation through Strategic Asset Allocation ("SAA") and gapping duration based on measurable risk limits in accordance with the liability profile so as to increase the allocation of more productive investment assets; and
III. Improve investment selection through BTIM synergy through KPD mechanism to improve the performance of each investment asset instrument.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

STRATEGI PEMASARAN PANGSA PASAR

1. ASURANSI UMUM DAN PENJAMINAN

Di tengah industri asuransi yang masih marak dengan persaingan tidak sehat, IFG tetap berfokus pada lini bisnis yang *profitable* meskipun terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK di untuk lini usaha harta benda (*property*) dan kendaraan bermotor (*motor vehicle*). Di lapangan, terjadi permintaan komisi tambahan dalam bentuk *engineering fee* hingga 45% untuk lini *property* sehingga total biaya akuisisi mencapai 60%. Begitu pula dengan lini *motor vehicle*, terdapat tambahan biaya akuisisi, salah satunya dalam bentuk program *cashback* hingga 35%, sehingga total biaya akuisisi mencapai 60%. Padahal, menurut SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor, biaya akuisisi untuk lini bisnis asuransi harta benda ditetapkan maksimal 15% dan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor maksimal 25%.

Terlepas dari praktik bisnis yang tidak sehat dan persaingan di industri yang sulit karena IFG tetap mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pada tahun 2024, IFG berhasil menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar sebesar 9,82% di sektor industri asuransi umum, di bawah Sinarmas Group yang didominasi oleh lini bisnis *property* dan kredit. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Astra Buana yang mendominasi lini bisnis asuransi *motor vehicle*.

Walaupun sudah berada di peringkat kedua di industri asuransi umum, IFG berkomitmen untuk memperkuat posisinya di industri asuransi umum melalui berbagai strategi, termasuk mempercepat pertumbuhan bisnis non-penugasan pemerintah secara *profitable* dan *sustainable*, di antaranya dengan meningkatkan bisnis di segmen SME dan ritel melalui pengembangan kemitraan B2B2C serta mengoptimalkan strategi *joint capacity* untuk meningkatkan kapasitas dan *bargaining power* grup IFG. Selain itu, IFG juga mengoptimalkan proses bisnis berbasis teknologi pada Anggota *Holding* untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi nasabah dan mitra Anggota *Holding*.

IFG berhasil memperkuat posisinya sebagai *market leader* di beberapa lini bisnis. Pada lini bisnis *suretyship*, JRP menjadi *market leader* dengan pangsa pasar sebesar 21,34%, diikuti oleh Askrindo dengan pangsa pasar sebesar 14,57%. Selain itu, Askrindo mendominasi lini bisnis

MARKET SHARE MARKETING STRATEGY

1. GENERAL INSURANCE AND GUARANTEE

Amidst fierce competition in the insurance industry, IFG remains focused on profitable business lines despite practices that are not in accordance with OJK regulations in the property and motor vehicle lines of business. In the field, there are requests for additional commissions in the form of engineering fees of up to 45% for the property line, bringing the total acquisition cost to 60%. Similarly, in the motor vehicle segment, there are additional acquisition costs, including a cashback program of up to 35%, resulting in total acquisition costs reaching 60%. However, according to SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 on the Determination of Premium Rates or Contributions for Property Insurance and Motor Vehicle Insurance Business Lines, acquisition costs for the property insurance business line are capped at 15%, and for the motor vehicle insurance business line at 25%.

Despite unhealthy business practices and tough industry competition as IFG maintained compliance with prevailing regulations, by 2024, IFG managed to occupy the second rank with a market share of 9.82% in the general insurance industry sector, under Sinarmas Group which is dominated by property and credit business lines. Meanwhile, the third position is occupied by Astra Buana, which dominates the motor vehicle insurance business line.

Although already ranked second in the general insurance industry, IFG is committed to strengthening its position in the general insurance industry through various strategies, including accelerating the growth of non-government-assigned business in a profitable and sustainable manner, including by increasing business in the SME and retail segments through the development of B2B2C partnerships and optimizing joint capacity strategies to increase the capacity and bargaining power of the IFG group. In addition, IFG also optimizes technology-based business processes at holding members to improve efficiency and service quality for customers and partners of holding members.

IFG managed to strengthen its position as market leader in several business lines. In the suretyship business line, JRP is the market leader with a market share of 21.34%, followed by Askrindo with a market share of 14.57%. In addition, Askrindo dominates the credit insurance business line

asuransi kredit dengan pangsa pasar 22,77%. Mayoritas penerimaan premi berasal dari bisnis penugasan KUR, yang berkontribusi 77,91% dari total asuransi kredit di Askrindo. Pada lini bisnis *oil and gas,* Jasindo berhasil menjadi *market leader* dengan pangsa pasar sebesar 52,92%, dengan kontribusi premi terbesar berasal dari SKK Migas. Pada lini bisnis liability, JRP menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 11,68% dengan rasio klaim rendah sebesar 10,09%, menunjukkan profitabilitas yang baik di JRP.

with a market share of 22.77%. The majority of premium income came from the KUR assignment business, which contributed 77.91% of total credit insurance in Askrindo. In the oil and gas business line, Jasindo managed to become the market leader with a market share of 52.92%, with the largest premium contribution coming from SKK Migas. In the liability business line, JRP ranked second with a market share of 11.68% with a low claim ratio of 10.09%, indicating good profitability in JRP.

Berikut peringkat 10 besar industri asuransi umum berdasarkan penerimaan premi bruto pada tahun 2024 (Sumber: AAUI).

The following is the ranking of the top 10 general insurance industries based on gross premium income in 2024 (Source: AAUI).

Peringkat Perusahaan Asuransi Umum Berdasarkan GWP
Rating of General Insurance Companies Based on GWP

Top 10 Perusahaan Asuransi Umum dari Premi Bruto Tahun 2024
Top 10 General Insurance Companies by Gross Premiums in 2024



Catatan:
Grup Sinarmas terdiri dari Asuransi Sinarmas dan Sinarmas Insurtech
Grup IFG terdiri dari Jasindo, Jasaraharja Putera, and Askrindo
Notes:
Sinarmas Group consists of Asuransi Sinarmas and Sinarmas Insurtech.
IFG Group consists of Jasindo, Jasaraharja Putera, and Askrindo.

Secara lebih terperinci, menurut data AAUI, industri asuransi umum tahun 2024 mengalami pertumbuhan premi sebesar 8,66% secara YoY, yakni dari Rp104,0 triliun di tahun 2023 menjadi Rp112,9 triliun di tahun 2024. Namun demikian, IFG secara konsolidasi mengalami penurunan premi bruto sebesar 7,64% (YoY), yakni dari Rp12,0 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Asuransi kredit menjadi penyumbang premi terbesar bagi IFG, namun lini bisnis ini mengalami penurunan, dengan capaian premi bruto sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2024, turun 22,38% dibandingkan tahun 2023, sebesar Rp6,4 triliun.

On a more detailed level, according to AAUI data, the general insurance industry in 2024 experienced premium growth of 8.66% YoY, from IDR104.0 trillion in 2023 to IDR112.9 trillion in 2024. However, IFG saw a consolidated decline in gross premiums of 7.64% (YoY), from IDR12.0 trillion to IDR11.1 trillion. Credit insurance was the largest contributor to IFG's premiums, but this business line experienced a decline, with gross premiums of IDR5.0 trillion in 2024, a decrease of 22.38% compared to IDR6.4 trillion in 2023.

Penurunan premi ini merupakan efek dari *refund* IJP KUR sebesar Rp284 miliar karena adanya pelunasan dipercepat dan pembatalan pencairan kredit. Selain itu, lini bisnis AKK juga mengalami penurunan karena, pada November dan Desember, kerja sama dengan BRI sedang ditangguhkan dan masih dalam proses adendum PKS. Selain itu, terjadi penurunan KBG karena terbatasnya *commercial lines* dari Bank Himbara.

This decline in premiums was due to a refund of IDR284 billion in IJP KUR (Credit Guarantee Fund) as a result of accelerated repayments and cancellation of credit disbursements. In addition, the Work Accident Insurance (AKK) business line also experienced a decline because, in November and December, cooperation with BRI was suspended and still in the process of amending the cooperation agreement. Furthermore, there was a decline in KBG due to limited commercial lines from Bank Himbara.

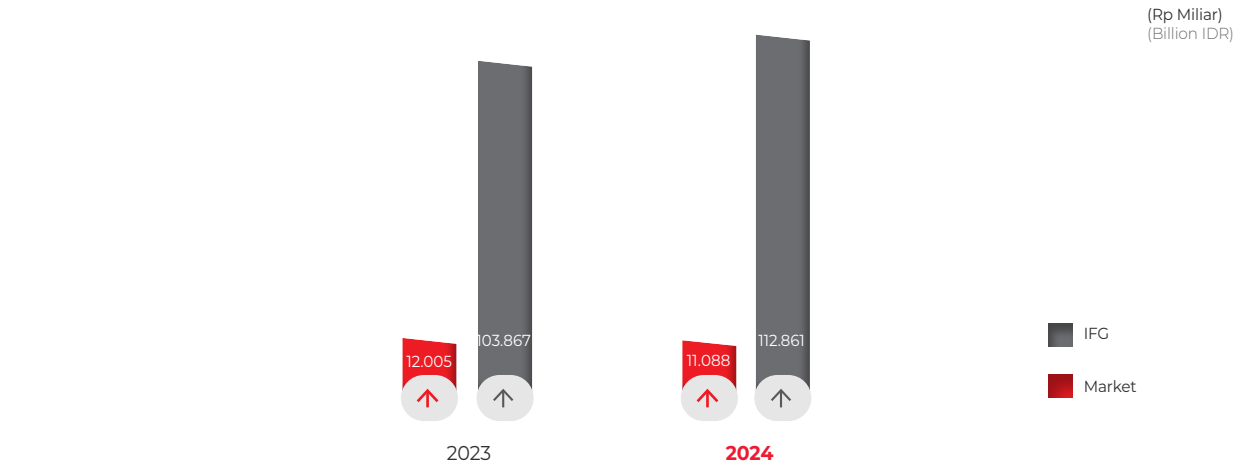
IFG terus berkomitmen untuk meningkatkan posisinya di industri asuransi umum dengan memperkuat bisnis non-penugasan pemerintah. Sebagai bukti, komposisi premi dari bisnis non-penugasan IFG mencapai 37,73% pada tahun 2024, yang berarti meningkat dari porsi 34,77% di tahun 2023.

Gambar di bawah memberikan gambaran perbandingan pendapatan premi bruto IFG dibandingkan dengan industri asuransi umum:

IFG remains committed to strengthening its position in the general insurance industry by enhancing its non-government-assigned business. As evidence, the premium composition from IFG's non-government-assigned business reached 37.73% in 2024, an increase from the 34.77% share in 2023.

The chart below provides a comparison of IFG's gross premium income compared to the general insurance industry:

IFG vs Pasar Asuransi Umum
IFG vs General Insurance Market

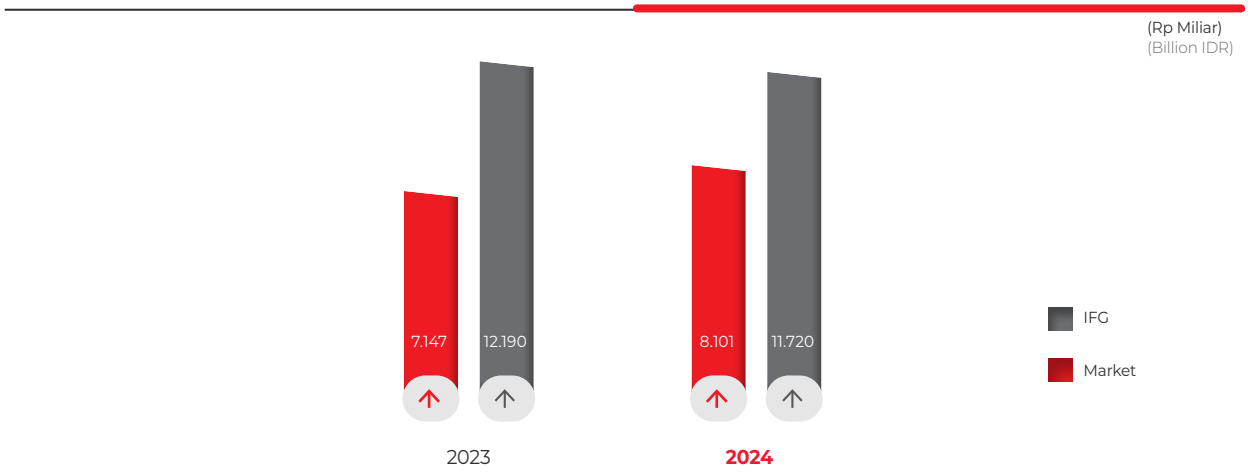


Catatan: Perusahaan Asuransi Umum IFG, yaitu (1) Askrindo; (2) Jasindo; dan (3) JRP.
Notes: IFG General Insurance Companies, namely (1) Askrindo; (2) Jasindo; and (3) JRP.

Di bisnis penjaminan, Jamkrindo masih menjadi perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 69,12% di tahun 2024. Jamkrindo mencatatkan kenaikan premi sebesar 13,36% YoY, dari Rp7,15 triliun menjadi Rp8,10 triliun. Prestasi ini terjadi di tengah kondisi industri asuransi penjaminan yang mengalami sebesar 3,85% pada tahun 2024. Sebagai upaya memperkuat posisi di pasar, Jamkrindo terus berfokus mengembangkan kompetensi dan kinerja, khususnya pada lini bisnis non-penugasan pemerintah.

In the guarantee business, Jamkrindo is still the largest guarantee company in Indonesia with a market share of 69.12% in 2024. Jamkrindo recorded a 13.36% YoY increase in premiums, from IDR7.15 trillion to IDR8.10 trillion. This achievement occurred amidst the conditions of the guarantee insurance industry which experienced a 3.85% growth in 2024. In an effort to strengthen its position in the market, Jamkrindo continues to focus on developing competencies and performance, especially in the non-government-assigned business line.

IFG vs Pasar Penjaminan
IFG vs Guarantee Market



Catatan: Perusahaan Penjaminan IFG, yaitu Jamkrindo.
Notes: IFG Guarantee Company, namely Jamkrindo.

Ke depan, IFG terus berkomitmen untuk menerapkan pendekatan yang selektif dan strategis dalam memilih portofolio bisnis, dengan fokus pada pengembangan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders*.

Going forward, IFG continues to be committed to a selective and strategic approach in choosing its business portfolio, with a focus on developing businesses that are healthy, sustainable and provide added value to stakeholders.

2. ASURANSI JIWA

Sepanjang tahun 2024, industri asuransi jiwa mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp185,39 triliun, meningkat 4,3% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh premi bisnis baru sebesar Rp108,32 triliun dan premi lanjutan Rp77,07 triliun, yang masing-masing naik 4,3%.

Dari sisi jenis produk, premi asuransi tradisional tumbuh signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp110,36 triliun, dengan kontribusi 59,5% dari total premi, sementara 40,5% berasal dari unit *link*. Produk asuransi jiwa syariah juga mengalami pertumbuhan 10,4% menjadi Rp22,61 triliun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Dari sisi cakupan perlindungan, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa mengalami lonjakan 80,1% menjadi 154,64 juta orang, yang didorong oleh pertumbuhan pesat segmen tertanggung kumpulan (107,7%) menjadi 133,05 juta orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin besar cakupan masyarakat yang berhasil memiliki proteksi asuransi dengan bantuan fasilitas dari perusahaan atau organisasi. Hal ini mencerminkan peran industri dalam memberikan solusi perlindungan finansial yang lebih luas bagi masyarakat.

2. LIFE INSURANCE

Throughout 2024, the life insurance industry recorded premium income of IDR185.39 trillion, an increase of 4.3% over the previous year. This growth was driven by new business premiums of IDR108.32 trillion and continued premiums of IDR77.07 trillion, each of which increased 4.3%.

In terms of product type, traditional insurance premiums grew significantly by 18.7% to IDR110.36 trillion, contributing 59.5% of total premiums, while 40.5% came from unit-linked products. Sharia life insurance products also experienced growth of 10.4% to IDR22.61 trillion, in line with the increasing public awareness of sharia-based financial products.

In terms of protection coverage, the number of insured in the life insurance industry experienced a surge of 80.1% to 154.64 million people, driven by the rapid growth of the group insured segment (107.7%) to 133.05 million people. This increase shows that a greater scope of people who successfully have insurance protection with the help of facilities from companies or organizations. This reflects the industry's role in providing broader financial protection solutions for the public.

Untuk meningkatkan pangsa pasar dan menjadi pemain utama dalam industri asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, IFG Life telah melakukan akuisisi terhadap Mandiri Inhealth pada tanggal 26 Juni 2024. Akuisisi ini menjadikan IFG Life sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1 (satu) di Indonesia berdasarkan data *Annualized Premium Equivalent* (APE) per 31 Desember 2024. APE IFG Life tercatat sebesar Rp6,83 triliun, disusul Allianz dan Prudential dengan APE masing-masing sebesar Rp3,50 triliun dan Rp3,35 triliun.

IFG Life terus fokus pada pengembangan bisnis baru, baik secara organik maupun anorganik. IFG Life secara bertahap juga telah menerima pengalihan portofolio eks-Jiwasraya yang berpotensi untuk dilakukan *monetizing* bersama Mandiri Inhealth, sehingga dapat mendorong pendapatan premi bisnis baru. Hal ini menunjukkan upaya perusahaan melakukan diversifikasi dan memperluas portofolio bisnis dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan bisnis baru. Dengan demikian, IFG Life dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat sekaligus memperkuat posisinya di industri asuransi jiwa dan asuransi kesehatan di Indonesia.

To increase market share and become a major player in the life insurance and health insurance industry, IFG Life has made an acquisition of Mandiri Inhealth on June 26, 2024. This acquisition makes IFG Life the number 1 (one) life insurance company in Indonesia based on Annualized Premium Equivalent (APE) data as of December 31, 2024. IFG Life's APE was recorded at IDR6.83 trillion, followed by Allianz and Prudential with APEs of IDR3.50 trillion and ID 3.35 trillion, respectively.

IFG Life continues to focus on developing new businesses, both organically and inorganically. IFG Life has also gradually received the transfer of the former Jiwasraya portfolio, which has the potential to be monetized together with Mandiri Inhealth, thereby driving new business premium income. This demonstrates the company's efforts to diversify and expand its business portfolio by continuously improving and developing new businesses. As a result, IFG Life is well-positioned to navigate increasingly intense competition while strengthening its position in the life insurance and health insurance industries in Indonesia.

Peringkat Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan APE per 31 Desember 2024
Ranking of Life Insurance Companies Based on APE as of December 31, 2024

No	Nama Peserta Name of Participant	APE 2024 (Rp Miliar) 2024 APE (billion IDR)
1	IFG Life / mandiri inhealth	6.828
2	Allianz	3.500
3	PRUDENTIAL	3.350
4	BRIlife	3.290
5	AXA mandiri	2.694
6	AIA	2.582
7	Manulife	2.433
8	BNI Life	1.594
9	taspen life	1.462
10	astra life	1.303

Sumber : AAJI (diolah)
Source: AAJI (processed)

3. PASAR MODAL DAN INVESTASI

a. Sekuritas

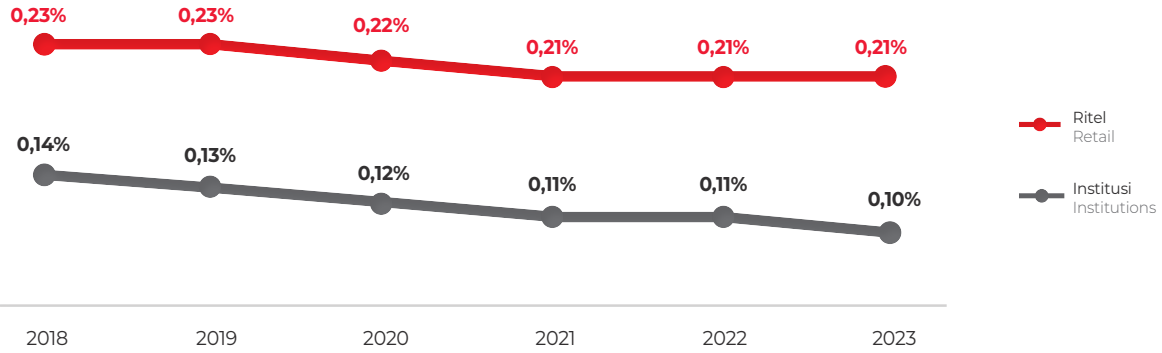
Lini bisnis *equity brokerage* merupakan lini bisnis utama di perusahaan sekuritas. Namun, *equity brokerage* merupakan bisnis yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi. BS berhadapan dengan perusahaan sekuritas yang memiliki *competitive advantage* yang kuat karena memiliki *captive market*, seperti bank. Selain itu, masih berlanjut tren penurunan komisi *equity brokerage* yang dilakukan perusahaan sekuritas untuk bertahan secara kompetitif dari tahun ke tahun.

3. CAPITAL MARKETS AND INVESTMENT

a. Securities

The equity brokerage line of business is the main line of business in securities companies. However, equity brokerage is a highly competitive business. BS is dealing with securities firms that have a strong competitive advantage because they have a captive market, such as banks. In addition, there is a continuing trend of equity brokerage commission reductions by securities firms to survive competitively from year to year.

Komisi *Equity Brokerage* di Indonesia
Equity Brokerage Commissions in Indonesia

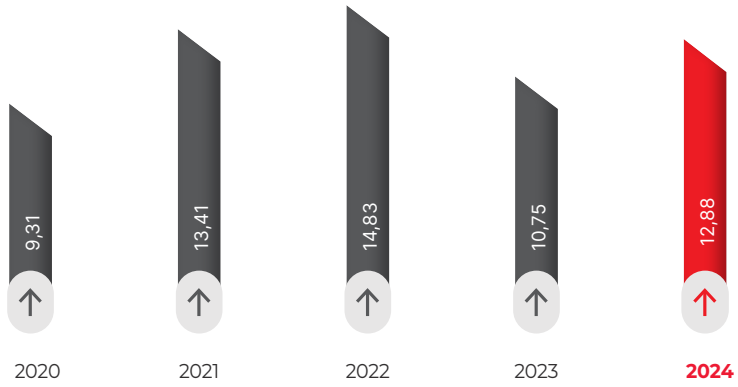


*) Data tahun 2024 belum dipublikasikan.
*) Data for 2024 has not yet been published.

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan RNTH di BEI. Untuk perdagangan saham, RNTH mencapai Rp12,8 triliun, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar Rp10,7 triliun.

In 2024, there was an increase in The Average Daily Transaction Value (RNTH) on the IDX. For stock trading, RNTH reached IDR12.8 trillion, an increase from 2023 which amounted to IDR10.7 trillion.

RNTH BEI (Rp triliun)
The Average Daily Transaction Value (RNTH) on the IDX (IDRtrillion)



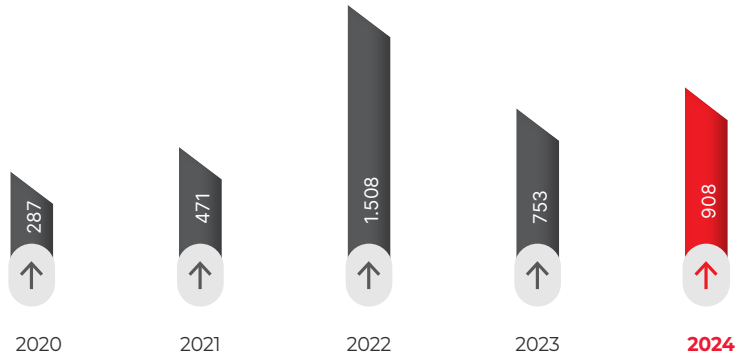
Peningkatan nilai transaksi harian ini memiliki efek langsung terhadap peningkatan nilai transaksi harian di BS sebesar 20% secara year on year dibanding tahun 2023, dengan nilai RNTH pada tahun 2024 sebesar Rp169 miliar. Namun, peningkatan RNTH tersebut belum bisa membuat BS membukukan keuntungan pada lini bisnis *equity brokerage* karena peningkatan transaksi di BS didominasi dari klien DMA yang memiliki *fee* lebih kecil.

This increase in daily transaction value has a direct effect on the increase in daily transaction value at BS by 20% year on year compared to 2023, with an RNTH value in 2024 of IDR169 billion. However, the increase in RNTH has not been able to make BS profitable in the equity brokerage business line because the increase in transactions at BS is dominated by DMA clients who have smaller fees.

Oleh karena itu, BS akan mengejar pertumbuhan melalui bisnis *investment banking*, khususnya *investment banking financial advisory*. Lini bisnis ini didominasi oleh perusahaan dengan afiliasi BUMN dan dalam beberapa tahun ini, lini bisnis *investment banking financial advisory* telah menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Therefore, BS will pursue growth through its investment banking business, particularly investment banking financial advisory. This business line is dominated by companies with SOE affiliations and in recent years, the investment banking financial advisory business line has shown significant growth.

Total Pendapatan *Investment Banking Financial Advisory* Perusahaan Sekuritas BUMN(Rp miliar)
Total Revenue Investment Banking Financial Advisory SOE Securities Company (IDRbillion)



b. Manajer Investasi

BTIM, Anggota *Holding* IFG yang bergerak di industri manajemen aset, menjalankan bisnisnya dengan mengedepankan manajemen risiko yang kuat. Hal ini diperlihatkan dengan penunjukan direktur yang fokus di manajemen risiko serta pengembangkan produk investasi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian namun tetap memberikan tingkat pengembalian yang optimum. Saat ini, BTIM terutama mengembangkan produk yang memiliki aset dasar obligasi, sesuai dengan tren di pasar.

Berkat konsistensinya, pada akhir 2024, BTIM berhasil menempati peringkat ke-2 (dua) MI dengan total dana kelolaan terbesar, naik dari peringkat ke-5 (lima) pada tahun sebelumnya. Total dana kelolaan BTIM, termasuk dari KPD, mencapai Rp73,21 triliun. Dengan demikian, BTIM mencapai 100% target total AUM di RKAP 2024. Di luar KPD, posisi AUM reksa dana BTIM sebesar Rp44,44 triliun, sehingga posisinya turun ke peringkat ke-2 (dua) setelah PT BRI Manajemen Investasi, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Secara tahunan, AUM reksa dana BTIM turun tipis 3,87%. Berikut, tabel peringkat MI berdasarkan total AUM reksa dana:

b. Investment Manager

BTIM, a member of the IFG holding company engaged in the asset management industry, runs its business by prioritizing strong risk management. This is demonstrated by the appointment of a director who focuses on risk management and the development of investment products that prioritize the principle of prudence while still providing an optimum rate of return. Currently, BTIM is mainly developing products that have bonds as their underlying asset, in line with market trends.

Through its consistency, by the end of 2024, BTIM successfully ranked second among MI with the largest total assets under management, improving from fifth place in the previous year. BTIM's total assets under management, including those from KPD, reached IDR73.21 trillion. As a result, BTIM achieved 100% of its total AUM target in the 2024 Business Plan. Excluding KPD, BTIM's mutual fund AUM stood at IDR44.44 trillion, placing it in second place behind PT BRI Manajemen Investasi, which recorded significant growth. On an annual basis, BTIM's mutual fund AUM declined slightly by 3.87%. The following table shows the MI rankings based on total mutual fund AUM:

Peringkat Manajer Investasi Berdasarkan Total AUM Reksa Dana
Investment Manager Ranking Based on Total Mutual Fund AUM

Rank	*Top 10 Fund Manager*	**Des-2023** Dec-2023	**Des-2024** Dec-2024		**YoY AUM Variance (dalam miliar Rupiah)** YoY AUM Variance (in billion Rupiah)
		AUM (dalam miliar Rupiah) AUM (in billion Rupiah)	**AUM (dalam miliar Rupiah)** AUM (in billion Rupiah)	***Market Share***	
1	PT BRI Manajemen Investasi	40.162	**49.358**	**9,23%**	9.196
2	PT Bahana TCW Investment Management	46.223	**44.435**	**8,31%**	(1.788)
3	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	44.877	**43.441**	**8,12%**	(1.436)
4	PT Sinarmas Asset Management	34.662	**34.464**	**6,45%**	(199)
5	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	31.407	**33.628**	**6,29%**	2.222

Peringkat Manajer Investasi Berdasarkan Total AUM Reksa Dana
Investment Manager Ranking Based on Total Mutual Fund AUM

Rank	*Top 10 Fund Manager*	Des-2023 Dec-2023	Des-2024 Dec-2024		YoY AUM Variance (dalam miliar Rupiah) YoY AUM Variance (in billion Rupiah)
		AUM (dalam miliar Rupiah) AUM (in billion Rupiah)	AUM (dalam miliar Rupiah) AUM (in billion Rupiah)	*Market Share*	
6	PT Trimegah Asset Management	32.695	**32.949**	**6,16%**	254
7	PT Syailendra Capital	29.210	**29.923**	**5,60%**	712
8	PT Mandiri Manajemen Investasi	29.245	**27.419**	**5,13%**	(1.826)
9	PT BNI Asset Management	29.361	**25.030**	**4,68%**	(4.331)
10	PT BNP Paribas Asset Management	22.953	**23.710**	**4,43%**	757
Other Fund Manager		**202.969**	**190.366**	**35,60%**	**(12.603)**
Total AUM *All Fund Manager*		**543.765**	**534.722**	**100,00%**	**(9.042)**

c. Modal Ventura

Sebagai agen pembangunan, BAV berperan serta dalam pengembangan bisnis UMKM melalui penyaluran UMi sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Nomor KEP-10/IP/2018 tentang penunjukan BAV sebagai penyalur UMi pada PIP dengan pola penyaluran melalui lembaga *linkage* dan Nomor KEP-49/IP/2024 dengan pola penyaluran langsung sesuai dengan pasal 13 ayat (1) a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 /PMK.05/2020.

Produk yang ditawarkan oleh BAV, antara lain penyaluran UMi, pinjaman modal ventura jangka pendek (PMVJP), dan penyertaan modal ke perusahaan modal ventura daerah (PMVD). Portofolio pembiayaan usaha BAV induk masih didominasi oleh produk pembiayaan UMi dengan total *outstanding* sebesar Rp281,2 miliar.

Pada tahun 2024, ini telah dilakukan *piloting direct lending* dengan nilai penyaluran sebesar Rp76,7 miliar kepada 11.002 debitur yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan diharapkan jumlahnya akan meningkat eksponensial sehubungan dengan perbaikan proses *underwriting* dan akan bertambahnya kerja sama antara BAV dengan enabler lainnya.

Saat ini BAV tengah melakukan perbaikan dan percepatan credit *screening/underwriting* debitur dengan mengembangkan loan *origination system* yang mencakup proses *credit screening/underwriting, monitoring, reporting* yang ke depan dapat dilakukan secara otomatis.

BAV memiliki 22 PMVD terkonsolidasi yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan sepanjang tahun 2024 telah menyalurkan Rp112,8 miliar kepada UMKM. Seiring dengan terbitnya POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha

c. Venture Capital

As a development agent, BAV participates in the development of MSME businesses through the distribution of UMi in accordance with the Decree of the President Director of the Government Investment Center (PIP) Number KEP-10/IP/2018 concerning the appointment of BAV as a UMi distributor at PIP with a distribution pattern through linkage institutions and Number KEP-49/IP/2024 with a direct distribution pattern in accordance with article 13 paragraph (1) a of the Minister of Finance Regulation Number 193 / PMK.05/2020.

The products offered by BAV include UMi distribution, short-term venture capital loans (PMVJP), and equity participation in regional venture capital companies (PMVD). The parent BAV's business financing portfolio is still dominated by UMi financing products with a total outstanding of IDR281.2 billion.

In 2024, it has piloted direct lending with a disbursement value of IDR76.7 billion to 11,002 debtors spread almost all over Indonesia and it is expected that the number will increase exponentially in connection with the improvement of the underwriting process and will increase the cooperation between BAV and other enablers.

BAV is currently improving and accelerating the credit screening/underwriting of debtors by developing a loan origination system that includes credit screening/ underwriting, monitoring, reporting processes which in the future can be done automatically.

BAV has 22 consolidated PMVDs spread across almost all provinces in Indonesia and throughout 2024 has disbursed IDR112.8 billion to MSMEs. Along with the issuance of POJK Number 25 of 2023 concerning the Business Implementation of Venture Capital

Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, khususnya terkait kewajiban ekuitas minimal, akan berdampak terhadap PMVD milik BAV yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal sebesar Rp20 miliar.

Ke depan, BAV akan melakukan langkah-langkah strategis berupa merger, divestasi, atau likuidasi dalam rangka penguatan fokus dan kesinambungan bisnis. Sebagai bagian dari realisasi inisiatif tersebut, pada tahun 2024 BAV telah menyelesaikan proses transaksi penjualan kepemilikan saham di PMVD Bali kepada Jamkrida Bali Mandara dan pada 10 Desember 2024, OJK telah mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura (SSV) melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.06/2024. Atas pencabutan izin tersebut. BAV tengah mengajukan permohonan RUPS untuk melakukan likuidasi PMVD SSV.

d. *Building Management*

Anggota *Holding* IFG yang bergerak dalam jasa *building management* adalah PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). GNTU memiliki aset gedung yang dikelola, yaitu gedung Graha CIMB Niaga Sudirman. Pada tahun 2024, *occupancy rate* atas gedung Graha CIMB Niaga Sudirman adalah 95,4%. *Occupancy rate* ini lebih tinggi dibandingkan *occupancy rate* atas gedung perkantoran di CBD Jakarta, yaitu sebesar 74,0%.

Berdasarkan analisis dari Colliers, angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan yang moderat sementara pasar terus mengantisipasi perbaikan di beberapa sektor. Permintaan gedung perkantoran di CBD untuk kantor Grade A lebih tinggi daripada yang premium disebabkan lokasinya yang strategis yang menarik bagi perusahaan lokal maupun multinasional. Sementara itu di luar CBD, permintaan gedung kantor Grade A relatif lebih rendah.

Permintaan akan ruang kantor berkualitas tinggi di luar CBD diperkirakan akan meningkat, didorong oleh pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung dan peningkatan aktivitas bisnis. Ke depan, GNTU akan melakukan pengembangan bisnis selain pengelolaan gedung Graha CIMB Niaga Sudirman, seperti peningkatan *new retail tenant* dan kerja sama optimalisasi aset milik grup IFG.

Companies and Sharia Venture Capital Companies, especially regarding minimum equity obligations, it will have an impact on BAV's PMVDs that have not met the minimum equity requirement of IDR20 billion.

Going forward, BAV will take strategic steps in the form of mergers, divestments, or liquidations in order to strengthen focus and business continuity. As part of the realization of these initiatives, in 2024 BAV has completed the transaction process of selling share ownership in PMVD Bali to Jamkrida Bali Mandara and on December 10, 2024, OJK has revoked the business license of PT Sarana Sultra Ventura (SSV) through the decision of the OJK Board of Commissioners Number KEP-63/D.06/2024. For the revocation of the license. BAV is currently applying for a GMS to liquidate PMVD SSV.

d. Building Management

IFG holding member engaged in building management services is PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). GNTU has building assets under management, namely the Graha CIMB Niaga Sudirman building. In 2024, the occupancy rate of the Graha CIMB Niaga Sudirman building is 95.4%. This occupancy rate is higher than the occupancy rate of office buildings in the Jakarta CBD, which is 74.0%.

Based on analysis from Colliers, these figures indicate modest growth while the market continues to anticipate improvements in several sectors. Demand for office buildings in the CBD for Grade A offices is higher than premium ones due to its strategic location which is attractive to both local and multinational companies. Meanwhile outside the CBD, demand for Grade A office buildings is relatively lower.

Demand for high-quality office space outside the CBD is expected to increase, driven by ongoing infrastructure development and increased business activity. Going forward, GNTU will carry out business development in addition to the management of Graha CIMB Niaga Sudirman building, such as increasing new retail tenants and cooperation in optimizing assets owned by the IFG group.

e. Jasa Konsultasi Keuangan Lainnya

Pada tahun 2024, pendapatan usaha PT Bahana Kapital Investa (BKI) yang bergerak di bidang investasi dan *advisory* hanya mencapai 28,3% dari total target RKAP 2024. Pendapatan terbesar didapatkan dari jasa *advisory* sementara lini bisnis subrogasi belum mencatatkan pendapatan.

Namun, sepanjang tahun 2024, BKI telah mencatatkan beberapa pencapaian, seperti: 1) menandatangani PKS pengelolaan aset subrogasi dengan Jamkrindo dan Askrindo; 2) menandatangani NDA dengan Bank BRI untuk akses data terkait pekerjaan rekonsiliasi; 3) menandatangani PKS dengan mitra penagih terkait penagihan langsung kepada debitur; 4) melakukan *piloting project* rekonsiliasi di wilayah kerja Malang dan akan diperluas ke wilayah kerja di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya; dan 5) memulai proses rekonsiliasi KUR Gen 1 dan telah menemukan 149 data debitur Askrindo dan 1.800 data debitur Jamkrindo hasil rekonsiliasi di kantor wilayah BRI Malang. BKI telah mengirimkan data tersebut kepada Bank BRI untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, BKI tengah mengeksplorasi kerja sama baru dengan perbankan penyalur dana KUR dan mengeksplorasi subrogasi *surety*, KBG, dan KPRS FLPP Bank BTN.

e. Other Financial Consulting Services

In 2024, the operating income of PT Bahana Kapital Investa (BKI), which is engaged in investment and advisory, only reached 28.3% of the total 2024 RKAP target. The largest revenue was obtained from advisory services while the subrogation business line has not yet recorded revenue.

However, throughout 2024, BKI has recorded several achievements, such as: 1) signed a subrogation asset management agreement with Jamkrindo and Askrindo; 2) signed an NDA with Bank BRI for data access related to reconciliation work; 3) signed an agreement with collection partners related to direct billing to debtors; 4) piloted a reconciliation project in the Malang working area and will be expanded to working areas in Bandung, Semarang, Yogyakarta, and Surabaya; and 5) started the KUR Gen 1 reconciliation process and has found 149 Askrindo debtor data and 1,800 Jamkrindo debtor data reconciled at the BRI Malang regional office. BKI has sent the data to BRI Bank for further processing.

In addition, BKI is exploring new partnerships with banks channeling KUR funds and exploring the subrogation of surety, KBG, and Financing Liquidity Facility for Subsidized Housing Loan (KPRS FLPP) of Bank BTN.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review by Business Segment

IFG belum memiliki segmen usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Penyesuaian 2015) yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2024, segmen usaha Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas bisnis yang dijalankan melalui 11 (sebelas) entitas anak, yaitu:

1. Asuransi Umum dan Penjaminan
2. Asuransi Jiwa
3. Pasar Modal dan Investasi

IFG does not yet have business segments that meet the criteria as stipulated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Adjustment) applicable in Indonesia. Therefore, in 2024, the Company's business segments are classified based on business activities implemented through 11 (eleven) subsidiaries, namely:

1. General Insurance and Guarantee
2. Life Insurance
3. Capital Markets and Investment

ASURANSI UMUM DAN PENJAMINAN

Perusahaan menugaskan 4 (empat) entitas anak, yang terdiri dari 3 (tiga) Anggota *Holding* di bidang asuransi umum dan 1 (satu) Anggota *Holding* di bidang penjaminan, untuk mengelola kegiatan usaha di segmen asuransi umum dan penjaminan. Anggota *Holding* yang beroperasi di bidang asuransi umum meliputi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja). Sementara itu, Anggota *Holding* yang bergerak di bidang penjaminan adalah PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

GENERAL INSURANCE AND GUARANTEE

The Company assigns 4 (four) subsidiaries, consisting of 3 (three) subsidiaries in general insurance and 1 (one) subsidiary in guarantee, to manage business activities in the general insurance and guarantee segments. Subsidiaries operating in general insurance include PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), and PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja). Meanwhile, the subsidiary engaged in guarantee business is PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Penjelasan Segmen Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

Askrindo adalah perusahaan asuransi yang beroperasi di bidang asuransi umum dan asuransi kredit yang diberikan melalui perbankan. Perusahaan ini menjalankan 7 (tujuh) lini bisnis, yakni KUR, asuransi kredit, asuransi umum, PEN, *suretyship*, reasuransi *incoming*, dan asuransi kredit perdagangan. Selain itu, Askrindo memiliki 2 (dua) entitas anak, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), yang bergerak di bidang reasuransi, serta PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS), yang fokus pada penjaminan berbasis syariah.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Jasindo adalah perusahaan yang beroperasi di bidang asuransi umum. Perusahaan ini memiliki 15 (lima belas) lini bisnis, yang mencakup asuransi pengangkutan, kebakaran, rangka pesawat, rekayasa, rangka kapal, kendaraan bermotor, aneka, jaminan, energi *offshore*, energi *onshore*, satelit, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, serta kredit.

Explanation of Business Segments

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

Askrindo is an insurance company that operates in the field of general insurance and credit insurance provided through banks. The company engages in 7 (seven) line of business, namely KUR, credit insurance, general insurance, PEN, suretyship, incoming reinsurance, and trade credit insurance. In addition, Askrindo has 2 (two) subsidiaries, namely PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), which is engaged in reinsurance, and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS), which focuses on sharia-based guarantees.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Jasindo is a company that operates in general insurance. The company has 15 (fifteen) lines of business, which include Freight Insurance, Fire Insurance, Aviation, Engineering, Marine Hull, Vehicles, Miscellaneous Guarantee, Energy Offshore, Energy Onshore, Satellite, Liability, Personal Accident, Health and Credit.

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

Jasa Raharja adalah perusahaan yang menjalankan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Jamkrindo adalah perusahaan yang beroperasi di bidang penjaminan kredit. Kegiatan usahanya mencakup penjaminan bagi UMKM dan koperasi, serta penjaminan yang diberikan dalam rangka menjalankan penugasan dari Pemerintah.

STRATEGI SEGMEN USAHA

Di tahun 2024, Anggota *Holding* IFG yang bergerak di segmen asuransi umum dan penjaminan telah menetapkan sejumlah strategi utama, antara lain:

1. **Askrindo**
   a. Memperkuat kemitraan strategis melalui kolaborasi dengan ekosistem bisnis perusahaan guna meningkatkan kinerja bisnis yang *profitable* dan *sustainable,* melalui:
      i) Peningkatan layanan yang lebih responsif;
      ii) Pengembangan produk bersama yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan; dan
      iii) Penyediaan solusi yang lebih baik yang bisa mencakup manfaat tambahan terutama terhadap pelanggan *key account*
   b. Pembenahan proses bisnis serta implementasi PSAK 74 guna mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan layanan dan produk secara komprehensif
   c. Implementasi inovasi digital melalui sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksional Perusahaan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik
   d. Mengoptimalkan aset investasi untuk memperkuat profitabilitas perusahaan, melalui:
      i) Evaluasi terhadap portofolio investasi yang ada;
      ii) Identifikasi peluang dan risiko potensial; dan
      iii) Penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai dari setiap aset yang dimiliki.

   e. Melanjutkan transformasi SDM, tata kelola dan penerapan manajemen risiko dalam menghadapi tantangan masa depan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, melalui:
      i) Pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan menyesuaikan perubahan dan tuntutan pasar yang dinamis;
      ii) Penyempurnaan struktur organisasi dan prosedur manajemen agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis; dan
      iii) Penerapan manajemen risiko yang lebih baik sebagai landasan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara proaktif, menjadikan perusahaan lebih tangguh dan mampu mengambil peluang dengan lebih bijaksana

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

Jasa Raharja is a company that carries out a mandate based on Law Number 30 of 1964 concerning the Passenger Accident Compulsory Insurance Fund and Law Number 34 of 1964 concerning the Road Traffic Accident Fund.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Jamkrindo is a company that operates in the field of credit guarantee. Its business activities include guarantees for MSMEs and cooperatives, as well as guarantees provided in the context of carrying out assignments from the Government.

BUSINESS SEGMENT STRATEGY

In 2024, IFG's subsidiaries in the general insurance and underwriting segments have set a number of key strategies, including:

1. **Askrindo**
   a. Strengthening strategic partnerships through collaboration with the company's business ecosystem to improve profitable and sustainable business performance, through:
      i) Improved services that are more responsive;
      ii) Joint product development that can meet customer needs; and
      iii) Provision of better solutions that can include additional benefits especially to key account customers
   b. Revamping business processes and implementing PSAK 74 to achieve sustainable performance growth by integrating services and products comprehensively.

   c. Implementation of digital innovation through Enterprise Resource Planning (ERP) system to improve the Company's transactional efficiency and effectiveness to support better decision making
   d. Optimizing investment assets to strengthen the company's profitability, through:
      i) Evaluation of the existing investment portfolio;
      ii) Identification of potential opportunities and risks; and
      iii) Determine the steps needed to maximize the value of each asset owned.
   e. Continue the transformation of human capital, governance and risk management implementation to face future challenges and support sustainable business growth, through:
      i) Development of employee skills and competencies to adjust to dynamic market changes and demands;
      ii) Improvement of organizational structure and management procedures to be more responsive to changes in the business environment; and
      iii) Better implementation of risk management as a foundation for identifying, evaluating, and proactively managing risks, making the company more resilient and take opportunities more wisely.

2. Jasindo

a. Strategi bisnis yang terdiri dari 4 strategi yaitu:

i) *Customer Engagement & Strong Relationship*, melalui:
- Peningkatan penetrasi pada Ekosistem BUMN melalui *joint capacity* dan *added value* berupa *Risk Management Partnership;*
- Optimalisasi kerja sama dengan mitra perbankan khususnya HIMBARA;
- *Win Back initiative*;
- Ekspansi *channel* broker dengan *service promise* berdasarkan SLA & *tiering*; dan
- Optimalisasi kerja sama dengan afiliasi IFG

ii) Intensifikasi & Ekstensifikasi Penugasan dan Program Pemerintah Perusahaan menargetkan agar Penugasan & Program Pemerintah dapat memberikan hasil yang *profitable* & *sustainable* Penetrasi Segmen *Small Medium Enterprise* (SME), melalui:
- *Cross selling* pada ekosistem BUMN;
- Pemanfaatan jaringan IFG sebagai *point of service*;
- Kerja sama pemasaran melalui *alternative distribution channel*;
- *Host to host* dengan HIMBARA dan mitra potensial untuk segmen SME; dan
- Pembangunan *digital platform* untuk peningkatan layanan kepada segmen SME

iii) Peningkatan *Underwriting Performance & Reinsurance Capacity*

b. Strategi *Enablers*, meliputi:
i) Penguatan Tata Kelola & Manajemen Risiko;
ii) Penguatan Infrastruktur IT & IT *Business Support*;
iii) Pelaksanaan *Dry Run* PSAK 74;
iv) Optimalisasi Penagihan Piutang & Subrogasi;
v) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Produktif dan Berdaya Saing
vi) Optimalisasi Kinerja Anak Perusahaan.

3. Jasa Raharja

a. Dalam upaya meningkatkan penetrasi Sumbangan Wajib akibat rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan Iuran Wajib Jasa Raharja telah melakukan beberapa strategi seperti sebagai berikut:
i) Kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat untuk penggalian potensi, dimulai dengan konsinyering Tim Pembina Samsat, FGD bersama pemerhati transportasi dan kebijakan publik serta YLKI dan Pimpinan Redaksi, hingga peresmian Ruangan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional;
ii) Penyeragaman Sistem Samsat bersama Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Nasional sebagai upaya persamaan persepsi, visi & misi serta alur proses Samsat di Seluruh Indonesia;

2. Jasindo

a. Business strategy which consists of 4 strategies, namely:
i) Customer Engagement & Strong Relationship, through:
- Increased penetration in the SOE Ecosystem through joint capacity and added value in the form of Risk Management Partnership;
- Optimization of cooperation with banking partners, especially HIMBARA;
- Win Back initiative;
- Broker channel expansion with service promise based on SLA & tiering; and
- Optimization of cooperation with IFG affiliates

ii) Intensification & Extensification of Government Assignments and Programs The company aims for Government Assignments & Programs to deliver profitable and sustainable results. Small Medium Enterprise (SME) Segment Penetration, through:
- Cross selling in the SOE ecosystem;
- Utilization of IFG network as a point of service;
- Marketing cooperation through alternative distribution channels;
- Host to host with HIMBARA and potential partners for SME segment; and
- Development of a digital platform to improve services to the SME segment

iii) Improved Underwriting Performance & Reinsurance Capacity

b. Strategic Enablers, including:
i) Strengthening Governance & Risk Management;
ii) Strengthening IT Infrastructure & IT Business Support;
iii) Dry Run Implementation of PSAK 74;
iv) Optimizing Receivables Collection & Subrogation;
v) Realizing Superior Human Capital that are Productive and Competitive
vi) Optimizing Subsidiary Performance.

3. Jasa Raharja

a. In an effort to increase the penetration of Compulsory Contributions due to low public compliance in paying taxes, as well as increasing Compulsory Premiums, Jasa Raharja has carried out several strategies as follows:
i) Collaboration with the Samsat Supervisory Team to explore potential, starting with the Samsat Supervisory Team consignment, FGDs with observers of transportation and public policy as well as YLKI and the Chief Editor, to the inauguration of the National Level Samsat Supervisory Secretariat Room;
ii) Uniformity of the Samsat System with the Secretariat of the National Level Samsat Supervisor as an effort to equalize perceptions, vision & mission and the flow of Samsat processes throughout Indonesia;

iii) Dukungan upaya penegakkan hukum dari Korlantas Polri melalui penerapan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74;
iv) Sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta adanya penghapusan data kendaraan sesuai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74;
v) Intensifikasi potensi SWDKLLJ, salah satunya melalui Samsat *Goes to Anywhere* dan melakukan kerja sama dengan perangkat desa sebagai media penagihan SWDKLLJ untuk kendaraan yang belum membayar hingga tingkat desa / kelurahan;
vi) Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sebagai upaya penggalian potensi SWDKLLJ untuk kendaraan Dinas atau plat merah;
vii) Implementasi program integrasi *Host to Host* dengan Samsat untuk mendapatkan data yang akurat secara *real-time*; dan
viii) Kerja sama dengan Tim Pembina Samsat dalam rangka menciptakan *Single Data* Samsat Seluruh Indonesia

b. Meningkatkan efektivitas program pencegahan kecelakaan, melalui:
   i) Optimalisasi program pencegahan kecelakaan, yaitu program *Safety Campaign* pada semua level kendaraan bermotor;
   ii) Optimalisasi kolaborasi dan koordinasi dengan mitra Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk sinergi program pencegahan kecelakaan;
   iii) Implementasi kerja sama dengan Admedika untuk verifikasi berkas kecelakaan lalu lintas;
   iv) Penyelenggaraan aplikasi JR *Safety Road;*
   v) Sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas; dan
   vi) Pemasangan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas pada masing-masing titik rawan kecelakaan
c. Memperkuat landasan & dukungan hukum pada operasional Perusahaan, melalui:
   i) Penyusunan kajian dan / atau usulan *draft* perubahan regulasi terkait dengan proses bisnis Perusahaan; dan
   ii) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *Stakeholders* terkait

4. Jamkrindo

a. Memperkuat *portfolio* produk dengan perbaikan T&C, pencadangan klaim yang kuat, kolaborasi *Holding* dan BUMN berorientasi pada profitabilitas
b. Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar
c. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI
d. Mengoptimalkan pemeringkatan dan pembinaan UMKMK untuk peningkatan *market share*
e. Mengoptimalkan pembinaan mitra untuk mendukung misi organisasi
f. Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo

iii) Support for law enforcement efforts from the Korlantas Polri through the application of Law Number 22 of 2009 Article 74;
iv) Dissemination to the public about the benefits of paying Motor Vehicle Tax (PKB) and the elimination of vehicle data in accordance with Law Number 22 of 2009 Article 74;
v) Intensification of SWDKLLJ potential, one of which is through Samsat Goes to Anywhere and collaborating with village officials as a medium for SWDKLLJ collection for vehicles that have not paid up to the village /sub-district level;
vi) Cooperation with the Provincial Government as an effort to explore the potential of SWDKLLJ for Service vehicles or red plates;
vii) Implementation of Host to Host integration program with Samsat to obtain accurate data in real-time; and
viii) Cooperation with the Samsat Supervisory Team in order to create Single Samsat Data throughout Indonesia

b. Improve the effectiveness of accident prevention programs, through:
   i) Optimization of accident prevention programs, namely Safety Campaign programs at all levels of motor vehicles;
   ii) Optimize collaboration and coordination with Police and Transportation Agency partners for synergy of accident prevention programs;
   iii) Implementation of cooperation with Admedika to verify traffic accident files;
   iv) Implementation of JR Safety Road application;
   v) Traffic safety socialization and education; and
   vi) Installation of traffic accident prevention facilities at each accident-prone point
c. Strengthen the legal foundation & support for the Company's operations, through:
   i) Preparation of studies and/or proposed drafts of regulatory changes related to the Company's business processes; and
   ii) Focus Group Discussion (FGD) with related Stakeholders

4. Jamkrindo

a. Strengthen product portfolio with improved T&C, strong claim reserve, collaboration between holding companies and state-owned enterprises focused on profitability
b. Strengthen & develop partnership network for market penetration & expansion
c. Improve the quality and coverage of IT-based customer services
d. Optimize the ranking and coaching of MSMEs and Cooperatives to increase market share
e. Optimize partner coaching to support the organization's mission
f. Increase customer preference for Jamkrindo products

g. Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM
h. Meningkatkan efektivitas & standardisasi proses kerja
i. Meningkatkan efisiensi proses internal dan dengan mitra berbasis otomasi
j. Meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning*
k. Memperkuat portofolio usaha dan investasi
l. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM
m. Memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi
n. Meningkatkan internalisasi budaya inovasi
o. Meningkatkan budaya sadar risiko, kepatuhan & penerapan prinsip TARIF (GCG)

g. Increase customer & partner loyalty through CRM
h. Improve effectiveness & standardization of work processes
i. Improve efficiency of internal processes and with automation-based partners
j. Improve business performance through the use of machine learning
k. Strengthen business and investment portfolio
l. Improve HC competency and productivity
m. Strengthen organizational knowledge management
n. Improve the internalization of innovation culture
o. Improve risk awareness culture, compliance & implementation of TARIF (GCG) principles

PRODUKSI, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA

1. ASURANSI UMUM DAN PENJAMINAN
   a. Produksi /

PRODUCTION, REVENUE, AND PROFITABILITY OF SEGMENTS BUSINESSES

1. GENERAL INSURANCE AND GUARANTEE
   a. Production

Premi Asuransi Umum dan Penjaminan
General Insurance and Guarantee Premiums

Premi Bruto (jutaan Rupiah) Gross Premium (million Rupiah)	2024	2023	RKAP 2024 2024 Work Plan & Budget	% kenaikan/ Penurunan % increase/ decrease	% pencapaian % achievement
	A	B	C	d = (a - b)/b	e = a/c
Askrindo	10.003.594	11.420.595	10.522.375	-12,41%	95,07%
Jamkrindo	8.101.308	7.146.735	8.093.767	13,36%	100,09%
Jasa Raharja	6.343.838	6.191.582	6.725.242	2,46%	94,33%
Jasindo	4.024.830	3.308.598	5.619.151	21,65%	71,63%
Total	**28.473.570**	**28.067.510**	**30.960.535**	**1,45%**	**91,97%**

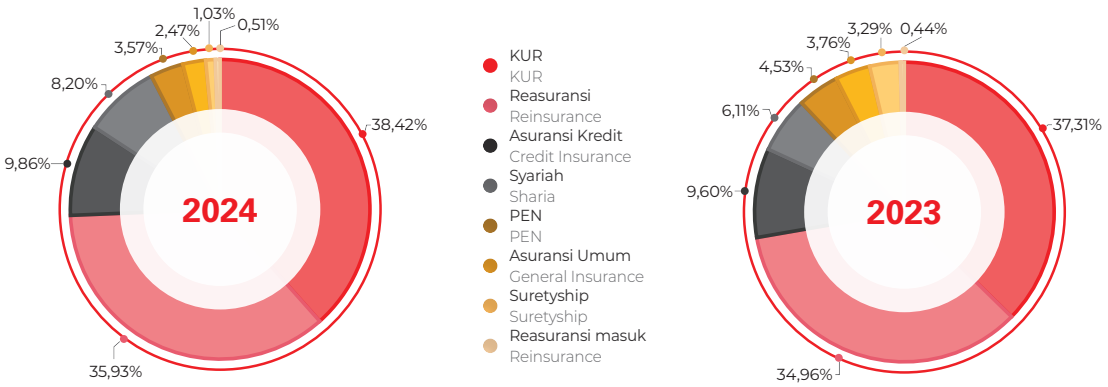
Anggota *Holding* asuransi umum dan penjaminan pada tahun 2024 meraih premi sebesar Rp28,5 triliun atau 91,97% dari RKAP tahun 2024, sebesar Rp31,0 triliun. Ketidakberhasilan memenuhi target RKAP terutama karena shortfall dari Jasindo sebesar Rp1,6 triliun, atau hanya mencapai 71,63% dari target RKAP tahun 2024.

Meskipun demikian, perolehan premi tersebut meningkat 1,45% dari periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp28,1 triliun. Jamkrindo dan Jasindo menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan premi secara *year-on-year* (YoY) masing-masing sebesar 13,36% dan 21,65%. Di tahun 2024, komposisi premi bruto bisnis non-penugasan mengalami kenaikan, dari 34,77% menjadi 37,73% atau dari Rp8,3 triliun menjadi Rp9,1 triliun yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja bisnis non-penugasan.

Members of the general insurance and guarantee holding in 2024 achieved premiums of IDR28.5 trillion or 91.97% of the 2024 RKAP, amounting to IDR31.0 trillion. The failure to meet the RKAP target was mainly due to Jasindo's shortfall of IDR1.6 trillion, or only 71.63% of the 2024 RKAP target.

Nevertheless, the premium increased by 1.45% from the same period last year, amounting to IDR28.1 trillion. Jamkrindo and Jasindo were the main contributors with year-on-year (YoY) premium growth of 13.36% and 21.65%, respectively. In 2024, the gross premium composition of non-assignment business increased from 34.77% to 37.73% or from IDR8.3 trillion to IDR9.1 trillion, indicating an improvement in the performance of non-assignment business.

Premi Bruto Askrindo per Lini Bisnis Tahun 2023 – 2024
Askrindo's Gross Premium by Line of Business in 2023–2024



Askrindo dan anak usaha (Nasre dan JPAS) mencatatkan premi bruto sebesar Rp10 triliun di tahun 2024, turun 19,28% YoY dan mencapai 95,07% dari target RKAP tahun 2024. Kontributor terbesar premi bruto Askrindo berasal dari Askrindo induk, dengan premi bruto mencapai Rp5,6 triliun atau 55,87% dari total premi bruto. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, perolehan premi ini turun 23,47%.

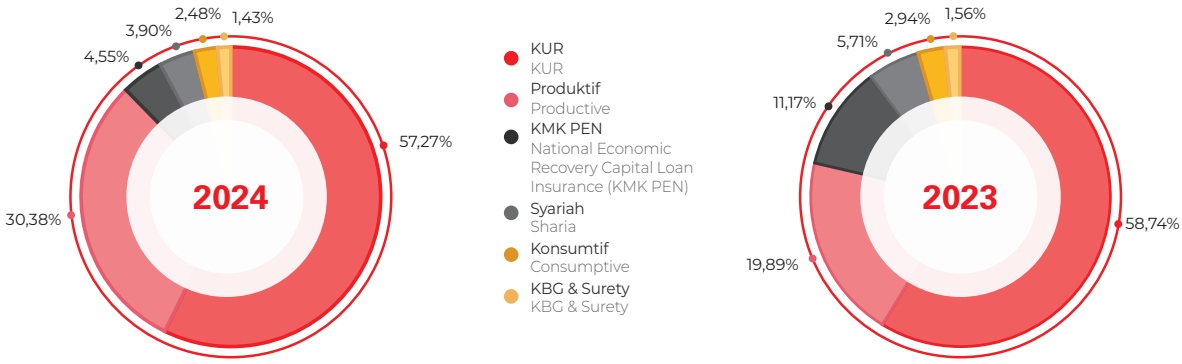
Premi bruto bisnis penugasan Askrindo turun signifikan karena penghentian penyaluran KUR Supermikro dan PEN sejak tahun 2022. Sebaliknya, bisnis non-penugasan Askrindo mengalami perbaikan sehingga porsi premi bruto dari bisnis non-penugasan mencapai 29,60%, meningkat dari 29,00% di tahun 2023. Adapun, pendapatan premi Nasre tumbuh 3,05% YoY dan mencapai 99,07% dari target RKAP 2024. Ke depan, Askrindo akan fokus meningkatkan kinerja bisnis non-penugasan sehingga tidak lagi bergantung pada program penugasan pemerintah, salah satunya melalui produk asuransi mikro.

Askrindo and its subsidiaries (Nasre and JPAS) recorded gross premiums of IDR10 trillion in 2024, a decrease of 19.28% YoY and reaching 95.07% of the 2024 RKAP target. The largest contributor to Askrindo's gross premium came from the parent company, with a gross premium of IDR5.6 trillion or 55.87% of the total gross premium. However, this was a decrease of 23.47% compared to the previous year.

Askrindo's gross premiums from assigned business decreased significantly due to the discontinuation of Super Micro KUR and PEN distribution since 2022. On the other hand, Askrindo's non-assigned business improved, with the portion of gross premiums from non-assigned business reaching 29.60%, an increase from 29.00% in 2023. Meanwhile, Nasre's premium income grew by 3.05% YoY and reached 99.07% of the 2024 RKAP target. Going forward, Askrindo will focus on improving the performance of its non-assignment business to reduce its reliance on government assignment programs, one of which is through microinsurance products.

Jamkrindo

Proporsi IJP Jamkrindo per Lini Bisnis Tahun 2023 – 2024
Jamkrindo's Guarantee Fee (IJP) Proportion by Line of Business in 2023 - 2024



Pada tahun 2024, Jamkrindo bersama Anggota *Holding*nya, Jamkrindo Syariah, mencatatkan IJP sebesar Rp8,1 triliun, naik 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 100,09% dari target RKAP 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan IJP Jamkrindo induk pada lini bisnis produktif, yang mencatatkan premi sebesar Rp2,4 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh 73,18% secara YoY.

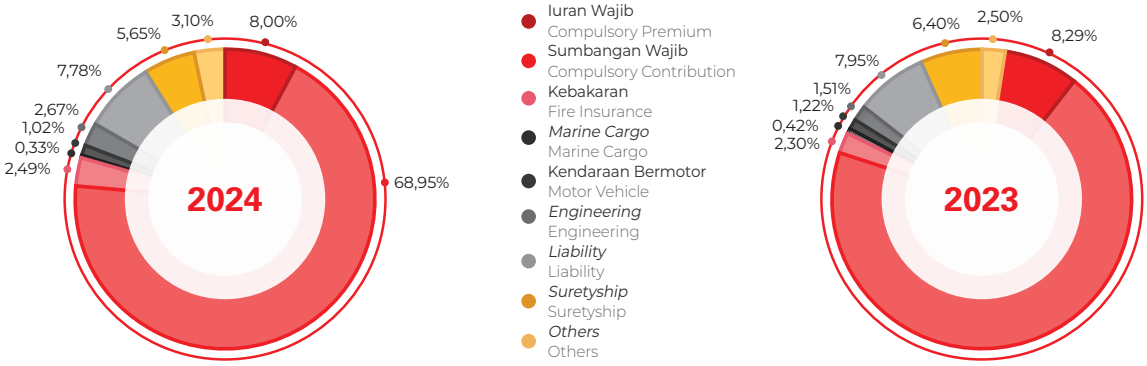
Adapun, kontribusi utama berasal dari produk Kupra dan Kupedes. Di sisi lain, lini bisnis KUR berhasil membukukan IJP sebesar Rp4,7 triliun pada periode yang sama, meningkat 10,52% secara YoY. Namun, IJP dari PEN turun 60,46% akibat berakhirnya program PEN sejak tahun 2022, sehingga tidak ada lagi pengajuan baru untuk penjaminan PEN. Secara keseluruhan, kontribusi lini bisnis produktif berhasil menjaga keseimbangan kinerja secara menyeluruh, sekaligus mendorong pertumbuhan positif IJP dalam portofolio premi.

In 2024, Jamkrindo and its subsidiary, Jamkrindo Syariah, recorded an IJP of IDR8.1 trillion, an increase of 13.36% compared to the previous year and reaching 100.09% of the 2024 RKAP target. This growth was driven by an increase in Jamkrindo's IJP in its productive lines of business, which recorded premiums of IDR2.4 trillion in 2024, representing a 73.18% increase year-on-year.

The main contribution originated from People's Rural Business Credit (Kupra) and Rural General Credit (Kupedes) products. On the other hand, the KUR line of business managed to record an IJP of IDR4.7 trillion in the same period, an increase of 10.52% YoY. However, the IJP from PEN decreased by 60.46% due to the end of the PEN program since 2022, resulting in no new applications for PEN guarantees. Overall, the contribution of the productive line of business successfully maintained overall performance balance while driving positive growth in IJP within the premium portfolio.

Jasa Raharja

Proporsi Premi Bruto Jasa Raharja per Lini Bisnis Tahun 2023 – 2024
Jasa Raharja's Gross Premium by Line of Business in 2023–2024



Pada tahun 2024, premi bruto konsolidasi Jasa Raharja tumbuh 2,46%, dari Rp6,2 triliun menjadi Rp6,3 triliun secara YoY, dan mencapai 94,33% dari RKAP 2024, sebesar Rp6,7 triliun.

Lini bisnis Sumbangan Wajib (SW) menjadi kontributor utama penerimaan premi Jasa Raharja, yaitu sebesar 68,95%. Premi bruto SW terealisasi sebesar Rp4,4 triliun di tahun 2024, mengalami pertumbuhan 1,72% dari tahun, 2023 sebesar Rp4,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa *action plan* JR mulai berjalan untuk meningkatkan *collection* premi SW. Sedangkan lini bisnis Iuran Wajib (IW) mencatatkan premi bruto sebesar Rp512 miliar, mencapai 98,81% dari RKAP tahun 2024 sebesar Rp519 miliar. Capaian ini turun 1,01% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp518 miliar.

In 2024, Jasa Raharja's consolidated gross premiums increased by 2.46%, from IDR6.2 trillion to IDR6.3 trillion year-on-year, and reached 94.33% of the 2024 RKAP, amounting to IDR6.7 trillion.

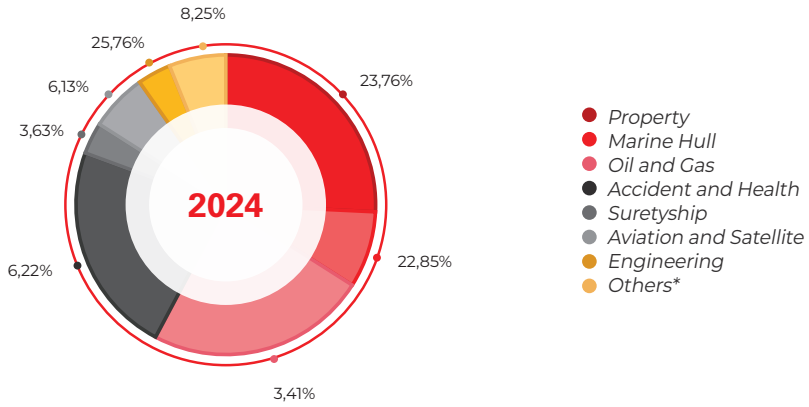
The Compulsory Contribution (SW) line of business was the main contributor to Jasa Raharja's premium income, accounting for 68.95%. SW gross premiums realized at IDR4.4 trillion in 2024, a growth of 1.72% from IDR4.3 trillion in 2023. This shows that JR's action plan to increase SW premium collection is beginning to take effect. Meanwhile, the Compulsory Premiums (IW) line of business recorded gross premiums of IDR512 billion, reaching 98.81% of the 2024 RKAP of IDR519 billion. This achievement decreased by 1.01% compared to the previous year, which was IDR518 billion.

Sementara itu, Jasaraharja Putera (JRP), yang merupakan Anggota *Holding* dari Jasa Raharja, mencatatkan premi bruto sebesar Rp1,47 triliun, tumbuh 5,79% dibandingkan tahun sebelumnya, dan mencapai 96,65% dari RKAP 2024, sebesar Rp1,52 triliun. Peningkatan premi di JRP terutama dikontribusi oleh lini bisnis *engineering, marine hull*, dan *property*. Premi bruto *engineering* sampai dengan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp171 miliar, naik sebesar 80,71% dari tahun sebelumnya sebesar Rp94 miliar. Kenaikan premi bruto *engineering* disumbang oleh account Pelindo sebesar Rp70 miliar dan PLN sebesar Rp39 miliar.

Meanwhile, Jasaraharja Putera (JRP), a subsidiary of Jasa Raharja, recorded gross premiums of IDR1.47 trillion, an increase of 5.79% compared to the previous year, and reaching 96.65% of the 2024 RKAP of IDR1.52 trillion. The increase in premiums at JRP was mainly contributed by the engineering, marine hull, and property lines of business. Engineering gross premiums as of 2024 amounted to IDR171 billion, an increase of 80.71% from the previous year's IDR94 billion. The increase in engineering gross premiums was contributed by Pelindo accounts amounting to IDR70 billion and PLN amounting to IDR39 billion.

Jasindo

Premi Bruto Jasindo per Lini Bisnis Tahun 2023 – 2024
Jasindo's Gross Premium by Line of Business in 2023–2024



*Termasuk lini bisnis asuransi *motor vehicle, marine cargo, liability, miscellaneous*, dan kredit.
*Includes motor vehicle, marine cargo, liability, miscellaneous, and credit insurance lines of business.

Pada tahun 2024, Jasindo meraih premi bruto sebesar Rp4,0 triliun, meningkat 21,65% dari tahun 2023 yang sebesar Rp3,3 triliun. Pertumbuhan premi Jasindo didorong oleh kenaikan premi dari sektor *accident & health* dan *oil & gas*. Kenaikan premi accident & *health* terutama dikontribusi oleh penyesuaian tarif pada penugasan Jamkesmen & Jamkestama, serta sudah berjalannya program JamkesPimpRI sejak Januari 2024.

In 2024, Jasindo achieved gross premiums of IDR4.0 trillion, an increase of 21.65% from IDR3.3 trillion in 2023. Jasindo's premium growth was driven by increases in premiums from the accident & health and oil & gas sectors. The increase in accident & health premiums was primarily contributed by tariff adjustments for Jamkesmen (Health Insurance for Ministers and Certain Officials) & Jamkestama (Primary Health Insurance) assignments, as well as the implementation of the JamkesPimpRI (Health Insurance for Indonesian Leaders) program since January 2024.

Namun demikian, premi bruto Jasindo tersebut baru mencapai 71,63% dari RKAP 2024, dengan shortfall sebesar Rp1,6 triliun. Penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas dalam penutupan bisnis dari segmen *large corporation*. Oleh karena itu, Jasindo bersama Askrindo, JRP, Nasre, dan RIU melakukan *joint capacity* untuk meningkatkan kapasitas dan *bargaining power* grup IFG, serta memperluas penetrasi pada market SME melalui kemitraan B2B2C dengan produk asuransi mikro berbasis santunan. Selain itu, Jasindo juga berperan sebagai *risk management partner* guna meningkatkan daya saing di pasar asuransi umum dengan menawarkan nilai tambah berupa layanan manajemen risiko.

However, Jasindo's gross premiums only reached 71.63% of the 2024 budget, with a shortfall of IDR1.6 trillion. The main cause was limited capacity in closing business from the large corporation segment. Therefore, Jasindo, together with Askrindo, JRP, Nasre, and RIU, are conducting a joint capacity initiative to enhance the capacity and bargaining power of the IFG group, as well as expand market penetration in the SME sector through B2B2C partnerships with indemnity-based microinsurance products. Additionally, Jasindo serves as a risk management partner to enhance competitiveness in the general insurance market by offering value-added services in risk management.

b. Pendapatan

b. Revenue

HUW Asuransi Umum dan Penjaminan
Underwriting Result for General Insurance and Guarantee

Hasil Underwriting Underwriting Result	2024	2023	RKAP 2024 2024 Work Plan & Budget	% Kenaikan/ Penurunan % Increase/ Decrease	%Pencapaian %Achievement
(jutaan Rupiah) (million Rupiah)	a	B	C	d = (a - b)/b	e = a/c
Askrindo	(458.676)	2.635.225	2.332.866	-117,41%	-19,66%
Jamkrindo	2.029.975	2.838.708	2.150.341	-28,49%	94,40%
Jasa Raharja	1.597.351	1.669.676	1.723.201	-4,33%	92,70%
Jasindo	191.105	328.360	618.331	-41,80%	30,91%
Total	**3.359.755**	**7.471.969**	**6.824.739**	**-55,04%**	**49,23%**

Anggota *Holding* asuransi umum dan penjaminan mencatatkan hasil *underwriting* (HUW) sebesar Rp3,3 triliun, turun 56,89% dari tahun 2023, sebesar Rp7,6 triliun. HUW hanya mencapai 47,93% dari target RKAP 2024, terutama karena kenaikan klaim dari bisnis penugasan (KUR) dan produktif yang signifikan. Di sisi lain, porsi HUW bisnis non-penugasan menyusut dari 58,73% atau Rp3,6 triliun di tahun 2023 menjadi 25,02% atau Rp1,3 triliun di tahun 2024.

Members of the general insurance and guarantee holding recorded underwriting results (HUW) of IDR3.3 trillion, decreased 56.89% from 2023, amounting to IDR7.6 trillion. Underwriting Result only reached 47.93% of the 2024 RKAP target, mainly due to a significant increase in claims from assignment (KUR) and productive businesses. On the other hand, the Underwriting result portion of non-assignment business decreased from 58.73% or IDR3.6 trillion in 2023 to 25.02% or IDR1.3 trillion in 2024.

Oleh karena itu, IFG bersama Anggota *Holding* ke depan akan berfokus pada portofolio bisnis yang memiliki kinerja positif dan sesuai dengan risk appetite Anggota *Holding*. Selain itu, IFG dan Anggota *Holding* akan melakukan perbaikan, di antaranya melalui standardisasi pedoman *underwriting* dan *balancing* portofolio bisnis melalui *ecosystem play* dan *joint sales*.

Therefore, IFG and its holding members will focus on business portfolios that have positive performance and are in line with the risk appetite of holding members. In addition, IFG and holding members will make improvements, including through standardization of underwriting guidelines and balancing business portfolios through ecosystem play and joint sales.

Askrindo

HUW Askrindo pada tahun 2024 terealisasi -Rp459 miliar, dengan penurunan sebesar 117,41% dari capaian tahun 2023. Askrindo tidak mencapai target HUW di RKAP 2024 yang dipatok Rp2,3 triliun (-19,66% dari target). Namun, khusus HUW dari bisnis non-penugasan, terdapat kenaikan signifikan sebesar 48,62%, dari Rp544 miliar menjadi Rp661 miliar. Hal ini ditopang oleh perbaikan bisnis melalui penutupan bisnis yang lebih selektif dan fokus pada bisnis yang sesuai dengan *risk appetite* Askrindo.

Askrindo

Askrindo's underwriting result in 2024 was realized at minus IDR459 billion, with a decrease of 117.41% from the 2023 achievement. Askrindo did not achieve its underwriting result target in the 2024 RKAP of IDR2.3 trillion (-19.66% of target). However, specifically for underwriting result from non-assignment business, there was a significant increase of 48.62%, from IDR544 billion to IDR661 billion. This was supported by business improvement through more selective business closure and focus on businesses that are in line with Askrindo's risk appetite.

Penyebab utama kinerja negatif Askrindo dalam hal HUW adalah penurunan premi KUR karena penghentian kredit KUR Supermikro BRI, serta tidak tercapainya premi asuransi umum. Tidak tercapainya target HUW terjadi baik di Askrindo induk, Nasre, maupun JPAS, di mana HUW di masing-masing perusahaan mengalami penurunan. Penurunan terbesar dikontribusi oleh Nasre yang mencatat kerugian sebesar Rp1,8 triliun. Hal ini terjadi karena Nasre masih fokus pada upaya penyehatan keuangan, sehingga mempengaruhi kinerja bisnis Nasre secara keseluruhan.

In terms of underwriting result, the main causes of Askrindo's negative performance were the decline in KUR premiums due to the termination of BRI's Supermicro KUR credit, as well as the non-achievement of general insurance premiums. Non-achievement of underwriting result targets occurred in Askrindo, Nasre, and JPAS, where underwriting result in each company decreased. The biggest decline was contributed by Nasre, which recorded a loss of IDR1.8 trillion. This occurred because Nasre was still focusing on financial restructuring efforts, thus affecting Nasre's overall business performance.

Jamkrindo

Sampai dengan tahun 2024, Jamkrindo mencatatkan HUW sebesar Rp2 triliun atau hanya mencapai 94,40% dari RKAP 2024, disebabkan tren klaim bruto yang terus meningkat. HUW lini bisnis produktif, khususnya Kupra, mencatat kerugian sebesar Rp660 miliar akibat klaim bruto yang mencapai Rp3,3 triliun dan pembentukan cadangan klaim sebesar Rp439 miliar.

Hal ini tidak berimbang dengan perolehan premi bruto yang hanya sebesar Rp2,5 triliun. Kombinasi kondisi ini berdampak kepada HUW netto (NHUW) produktif mengalami kerugian sebesar Rp1,1 triliun. Namun demikian, pendapatan subrogasi Jamkrindo mencapai Rp1,9 triliun, tumbuh 83,14% secara YoY dan mencapai 163,47% dibandingkan target di RKAP 2024. Pencapaian ini didukung oleh tingginya pendapatan subrogasi pada lini bisnis KUR, yakni sebesar Rp1,2 triliun dan produktif sebesar Rp466 miliar. Pencapaian subrogasi ini juga memberikan dampak positif terhadap HUW lini bisnis KUR, yang mencapai 656,39% target RKAP tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun.

Jasa Raharja

Penerimaan premi bruto Jasa Raharja (JR) secara konsolidasi meningkat 2,46% sementara klaim telah menunjukkan penurunan sebesar 5,55%. Namun, HUW JR turun cukup signifikan sebesar 4,33% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun. Hal ini dipicu oleh penurunan HUW JR induk yang mencapai 21,12% secara YoY, yakni dari Rp1,2 triliun menjadi Rp959 miliar atau hanya 73,63% dari target RKAP 2024.

Adapun, penurunan HUW JR induk karena realisasi HUW dari lini SW hanya mencapai Rp743 miliar, turun 18,04% secara YoY dan hanya mencapai 71,06% dari target RKAP tahun 2024, sebesar Rp1,0 triliun. Lebih jauh, kinerja SW menurun karena terdapat pembentukan cadangan klaim sebesar Rp166 miliar pada tahun 2024 sebagai dampak dari perubahan metode pencadangan *first reserve* menjadi sebesar 100% untuk *guarantee letter*, dari sebelumnya hanya sebesar 50%-60% dari biaya santunan perawatan untuk kecelakaan. Berbeda dengan kinerja SW, HUW IW pada tahun 2024 mencapai Rp299 miliar atau 115,80% dari target RKAP 2024 yang sebesar Rp258 miliar.

Dari sisi Anggota *Holding*, HUW JRP tercatat Rp389 miliar. Kendati nilainya naik 15,64% dari tahun 2023, HUW JRP ini hanya mencapai 95,32% dari target RKAP 2024, sebesar Rp409 miliar. Salah satu kontributor kenaikan HUW JRP berasal dari klaim lini bisnis kredit yang turun 41,96% menjadi Rp140 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp242 miliar. Selain itu, HUW lini bisnis *suretyship* meningkat signifikan mencapai 192,17% YoY berkat penurunan klaim sebesar 62,43%. Hal ini menunjukkan bahwa JRP telah melakukan *underwriting* yang lebih *robust* serta melakukan bisnis dengan lebih selektif.

Jamkrindo

Until 2024, Jamkrindo recorded underwriting result of IDR2 trillion or only reached 94.40% of the 2024 RKAP, due to the trend of gross claims that continued to increase. The underwriting result of productive lines of business, especially People's Rural Business Credit (Kupra), recorded a loss of IDR660 billion due to gross claims reaching IDR3.3 trillion and the formation of claim reserves of IDR439 billion.

This is not balanced with the acquisition of gross premiums which only amounted to IDR2.5 trillion. The combination of these conditions resulted in a net productive underwriting result (NHUW) loss of IDR1.1 trillion. Nevertheless, Jamkrindo's subrogation income reached IDR1.9 trillion, growing 83.14% YoY and reaching 163.47% compared to the target in the 2024 RKAP. This achievement was supported by the high subrogation income in the KUR line of business, which amounted to IDR1.2 trillion and productive of IDR466 billion. This subrogation achievement also had a positive impact on the underwriting result for the KUR line of business, which reached 656.39% of the 2024 RKAP target, with a realization of IDR1.7 trillion.

Jasa Raharja

Jasa Raharja's (JR) gross premium receipts on a consolidated basis increased by 2.46% while claims have shown a decline of 5.55%. However, JR's underwriting result declined quite significantly by 4.33% compared to 2023 which reached IDR1.7 trillion. This was triggered by a decrease in JR underwriting result which reached 21.12% YoY, from IDR1.2 trillion to IDR959 billion or only 73.63% of the 2024 RKAP target.

Meanwhile, the decline in the parent JR underwriting result was due to the realization of underwriting result from the Compulsory Contribution line only reaching IDR743 billion, decreased 18.04% YoY and only reaching 71.06% of the 2024 RKAP target of IDR1.0 trillion. Furthermore, Compulsory Contribution performance declined due to the formation of a claim reserve of IDR166 billion in 2024 as a result of the change in the first reserve method to 100% for guarantee letters, from previously only 50%-60% of the cost of treatment benefits for accidents. In contrast to Compulsory Contribution's performance, Compulsory Premium's underwriting result in 2024 reached IDR299 billion or 115.80% of the 2024 RKAP target of IDR258 billion.

In terms of subsidiaries, JRP's underwriting result was recorded at IDR389 billion. Although the value increased by 15.64% from 2023, this JRP underwriting result only reached 95.32% of the 2024 RKAP target, amounting to IDR409 billion. One of the contributors to the increase in JRP underwriting result came from the credit line of business claim, which has 41.96% decrease to IDR140 billion, from the previous year of IDR242 billion. In addition, underwriting result in the suretyship line of business increased significantly by 192.17% YoY due to a 62.43% decrease in claims. This shows that JRP has conducted more robust underwriting and conducted business more selectively.

Jasindo

Akibat tingginya beban *underwriting* di tahun 2024, Jasindo hanya mencatatkan HUW sebesar Rp191 miliar atau turun 41,80% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp328 miliar. Dengan penurunan ini, Jasindo hanya mencapai 30,91% dari target HUW di RKAP 2024 sebesar Rp618 miliar. Tingginya beban *underwriting* dipicu oleh kenaikan cadangan klaim sebesar Rp97 miliar. Padahal, RKAP 2024 justru menargetkan *release* cadangan sebesar Rp155 miliar. Kenaikan cadangan klaim tersebut berasal dari lini *suretyship* sebesar Rp86 miliar, *marine hull* sebesar Rp74 miliar, dan PA & *health* sebesar Rp68 miliar. Sementara itu, klaim bruto mencapai Rp2,6 triliun, jauh di bawah target Rp4,2 triliun di RKAP 2024.

Agar kinerja Jasindo lebih baik, IFG terus memperkuat fundamental perusahaan melalui perbaikan praktik *underwriting* dan *loss ratio* melalui penerapan *risk management partnership* sebagai bagian dari strategi peningkatan profitabilitas.

c. Profitabilitas

Jasindo

Due to high underwriting expenses in 2024, Jasindo only recorded underwriting result of IDR191 billion, decreased 41.80% from the previous year, amounting to IDR328 billion. Therefore, Jasindo only achieved 30.91% of the underwriting result target in the 2024 RKAP of IDR618 billion. The high underwriting expense was triggered by an increase in claim reserves of IDR97 billion. In fact, the 2024 RKAP had targeted the release of reserves of IDR155 billion. The increase in claim reserves came from the suretyship line of IDR86 billion, marine hull of IDR74 billion, and PA & health of IDR68 billion. Meanwhile, gross claims reached IDR2.6 trillion, far below the target of IDR4.2 trillion in the 2024 RKAP.

To improve Jasindo's performance, IFG continues to strengthen the company's fundamentals by improving underwriting practices and loss ratio through the implementation of risk management partnership as part of the strategy to increase profitability.

c. Profitability

Laba Bersih Asuransi Umum dan Penjaminan
General Insurance and Guarantee Net Profit

Laba Bersih Net Profit	**2024**	**2023**	**RKAP 2024** 2024 Work Plan & Budget	**% kenaikan/ penurunan** % increase/ decrease	**% pencapaian** % achievement
(jutaan Rupiah) (million Rupiah)	**a**	**B**	**c**	**d = (a - b)/b**	**e = a/c**
Askrindo	**(1.096.333)**	1.272.673	**1.118.233**	-186,14%	-98,04%
Jamkrindo	**1.161.494**	1.436.849	**1.346.789**	-19,16%	86,24%
Jasa Raharja	**1.333.461**	1.297.201	**1.391.825**	2,80%	95,81%
Jasindo	**157.940**	103.522	**226.432**	52,57%	69,75%
Total	**1.556.562**	**4.110.245**	**4.083.279**	**-62,13%**	**38,12%**

Pada tahun 2024, Anggota *Holding* asuransi umum dan penjaminan mencatatkan laba sebesar Rp1,6 triliun, turun 62,13% dari tahun 2023, yang sebesar Rp4,1 triliun dan hanya mencapai 38,12% dari target RKAP 2024. Penyebabnya adalah tidak tercapainya target laba di seluruh Anggota *Holding* asuransi umum dan penjaminan karena beberapa faktor, seperti kenaikan klaim pada lini bisnis KUR dan produktif, khususnya Kupra di Askrindo dan Jamkrindo, serta kondisi bisnis Nasre yang belum optimal dikarenakan masih berada dalam kondisi insolven.

Askrindo

Secara konsolidasi, Askrindo membukukan kerugian sebesar Rp1,1 triliun walaupun Askrindo induk saja mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan, yaitu mencapai 615,14% dari rugi Rp77 miliar menjadi laba bersih Rp396 miliar. Namun, capaian ini tertutup oleh kerugian Nasre yang mencapai Rp1,4 triliun. Selain itu, meski melonjak, capaian laba bersih entitas induk ini masih di bawah target RKAP 2024 yang sebesar Rp541 miliar atau hanya mencapai 73,32% dari target.

In 2024, members of the general insurance and guarantee holding recorded a profit of IDR1.6 trillion, a decrease of 62.13% from 2023, which amounted to IDR4.1 trillion and only reached 38.12% of the 2024 RKAP target. This is due to non-achievement of profit targets in all general insurance and guarantee subsidiaries due to several factors, such as an increase in claims in the KUR and productive lines of business, especially People's Rural Business Credit (Kupra) in Askrindo and Jamkrindo, as well as suboptiomal Nasre's business conditions since it is still in an insolvent condition.

Askrindo

On a consolidated basis, Askrindo recorded a loss of IDR1.1 trillion despite the fact that Askrindo parent company alone recorded a significant increase in net profit, reaching 615.14% from a loss of IDR77 billion to a net profit of IDR396 billion. However, this was overshadowed by Nasre's loss of IDR1.4 trillion. In addition, despite the sharp increase, the parent entity's net profit was still below the 2024 RKAP target of IDR541 billion or only 73.32% of the target.

Tidak tercapainya HUW, terutama pada lini bisnis KUR dan asuransi umum, menjadi penyebab utama Askrindo induk tidak mencapai target. Apalagi, Askrindo juga masih menanggung pembebanan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari Reliance, di mana perjanjian kerja sama ko-asuransi antara Askrindo dengan Asuransi Jiwa Reliance sudah dimulai sejak tahun 2015 sebelum terbentuknya *Holding*. Ke depan, Askrindo berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja, di antaranya melalui perbaikan tarif IJP KUR berbasis risiko, pengembangan Sistem Informasi Penjaminan yang terintegrasi, optimalisasi perolehan subrogasi, serta lebih selektif dan berfokus pada bisnis yang profitable.

Jamkrindo

Jamkrindo mencetak laba bersih Rp1,2 triliun atau hanya 86,24% dari target RKAP 2024. Capaian ini pun turun 19,16% dibandingkan dengan tahun 2023, dipicu oleh besarnya klaim bruto, yakni sebesar Rp9,1 triliun atau ada kenaikan sebesar Rp3,2 triliun dari klaim bruto tahun 2023. Peningkatan klaim bruto tersebut terutama terjadi pada lini bisnis penugasan produktif dan KUR. Meskipun demikian, Jamkrindo berhasil mencatat hasil investasi yang melebihi target RKAP 2024, yaitu 107,32%. Ke depan, Jamkrindo berkomitmen untuk mengoptimalkan bisnisnya melalui berbagai upaya strategis, termasuk usulan perubahan tarif IJP KUR berbasis risiko, pengembangan Sistem Informasi Penjaminan yang terintegrasi, dan perbaikan portofolio Kupra.

Jasa Raharja

Laba bersih konsolidasi Jasa Raharja mencapai Rp1,33 triliun, yang berarti 95,81% dari target RKAP 2024 yang sebesar Rp1,39 triliun. Dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp1,28 triliun, laba bersih ini tumbuh 2,80%. Jika diperinci, JRP meraih laba bersih sebesar Rp168 miliar, meningkat 27,76% dari tahun sebelumnya dan melampaui target Rp157 miliar atau mencapai 107,33%. Peningkatan laba JRP didorong oleh HUW sebesar Rp389 miliar, meningkat 15,64% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp337 miliar. Hasil investasi sebesar Rp110 miliar, naik 21,52% dari Rp91 miliar di tahun 2023, juga berkontribusi pada peningkatan laba bersih JRP.

Jasindo

Laba bersih Jasindo mencapai Rp158 miliar, meningkat sebesar 52,57% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp104 miliar. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan hasil investasi sebesar 12,55% dari tahun sebelumnya atau terealisasi sebesar Rp249 milar, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp221 miliar. Meskipun laba bersihnya hanya mencapai 69,75% dari RKAP 2024 sebesar Rp226 miliar, Jasindo berhasil mengefisienkan beban usaha sebesar Rp191 miliar atau terealisasi sebesar Rp469 miliar dari target sebesar Rp661 miliar di RKAP 2024.

The non-achievement of underwriting result, especially in the KUR and general insurance lines of business, is the main cause of the parent Askrindo not achieving its target. Moreover, Askrindo also still bears the burden of impairment loss reserves (CKPN) from Reliance, where the co-insurance cooperation agreement between Askrindo and Asuransi Jiwa Reliance has started since 2015 before the formation of the holding. Going forward, Askrindo is committed to optimizing performance, including through improving risk-based KUR IJP rates, developing an integrated Guarantee Information System, optimizing subrogation acquisition, and being more selective and focusing on profitable businesses.

Jamkrindo

Jamkrindo scored a net profit of IDR1.2 trillion or only 86.24% of the 2024 RKAP target. This achievement also decreased by 19.16% compared to 2023, triggered by the amount of gross claims, which amounted to IDR9.1 trillion or an increase of IDR3.2 trillion from gross claims in 2023. The increase in gross claims mainly occurred in the productive assignment and KUR lines of business. Despite this, Jamkrindo managed to record investment returns that exceeded the 2024 RKAP target, which was 107.32%. Going forward, Jamkrindo is committed to optimizing its business through various strategic efforts, including the proposed changes to the risk-based KUR IJP rate, the development of an integrated Guarantee Information System, and the improvement of the People's Rural Business Credit (Kupra) portfolio.

Jasa Raharja

Jasa Raharja's consolidated net profit reached IDR1.33 trillion, which means 95.81% of the 2024 RKAP target of IDR1.39 trillion. Compared to the 2023 achievement of IDR1.28 trillion, this net profit experienced 2.80% increase. In detail, JRP achieved a net profit of IDR168 billion, an increase of 27.76% from the previous year and exceeded the target of IDR157 billion or reached 107.33%. The increase in JRP's profit was driven by underwriting result of IDR389 billion, an increase of 15.64% from the previous year of IDR337 billion. Investment returns of IDR110 billion, an increase of 21.52% from IDR91 billion in 2023, also contributed to the increase in JRP's net profit.

Jasindo

Jasindo's net profit reached IDR158 billion, an increase of 52.57% from the previous year, amounting to IDR104 billion. This increase was driven by growth in investment returns of 12.55% from the previous year or realized at IDR249 billion, compared to the year 2023 of IDR221 billion. Although its net profit only reached 69.75% of the 2024 RKAP of IDR226 billion, Jasindo managed to streamline operating expenses by IDR191 billion or realized IDR469 billion from the target of IDR661 billion in the 2024 RKAP.

2. ASURANSI JIWA

Pada tahun 2024, IFG Life secara konsolidasi mencatat total pendapatan premi sebesar Rp6,26 triliun, naik Rp5,04 triliun atau 413% dari tahun 2023 sebesar Rp1,22 triliun. Hal ini terjadi karena IFG Life telah melakukan akuisisi terhadap Mandiri Inhealth sebesar 80%. Mandiri Inhealth berkontribusi terhadap pendapatan premi IFG Life secara konsolidasi sebesar Rp4,47 triliun.

Adapun, secara entitas induk, sebagian besar pendapatan IFG Life diperoleh dari lini bisnis korporasi *worksite*, yakni sebesar Rp1,61 triliun atau 90,22% dari total premi IFG Life induk. IFG Life juga berhasil menjaga persistensi pemegang polis eks-Jiwasraya, yang dapat dilihat dari pencapaian GWP IFG Life untuk bisnis korporasi yang sebagian besar berasal dari penerimaan premi *renewal* dan top-up produk migrasi Jiwasraya. Lini bisnis *agency* membukukan GWP sebesar Rp71,36 miliar atau naik 18% dari tahun 2023. Sedangkan, di lini bisnis *bancassurance*, total premi sebesar Rp81,68 miliar atau naik 3661% dari tahun 2023. Untuk lini bisnis digital, total premi sampai mencapai Rp21,44 miliar.

2. LIFE INSURANCE

In 2024, IFG Life on a consolidated basis recorded total premium income of IDR6.26 trillion,an increase of IDR5.04 trillion or 413% from 2023 of IDR1.22 trillion. This was due to IFG Life has acquired Mandiri Inhealth by 80%. Mandiri Inhealth contributed to IFG Life's consolidated premium income of IDR4.47 trillion.

Meanwhile, as a parent entity, most of IFG Life's revenue was obtained from the worksite corporate line of business, which amounted to IDR1.61 trillion or 90.22% of the total parent IFG Life premium. IFG Life also managed to maintain the persistence of former Jiwasraya policyholders, which is shown from the achievement of IFG Life's GWP for corporate business, which mostly came from the receipt of renewal premiums and top-ups for Jiwasraya migration products. The agency line of business recorded a GWP of IDR71.36 billion, an increase of 18% from 2023. Meanwhile, in the bancassurance line of business, total premiums amounted to IDR81.68 billion, increase of 3661% from 2023. For the digital line of business, the total premium reached IDR21.44 billion.

Proporsi Pendapatan Premi GWP IFG Life Tahun 2023 dan Tahun 2024 *(audited)*
Proportion of IFG Life GWP Premium Income in 2023 and 2024 (audited)



Di sisi lain, pendapatan premi *new business* menunjukkan peningkatan pada bisnis kesehatan korporasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan *new business* adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya eksekusi *preferred partnership* dengan BTN karena proses integrasi sistem untuk pengembangan bisnis antara IFG Life dan BTN.

b. *Launching* produk belum terlaksana sesuai timeline yang ditetapkan karena proses pengembangan produk dan perizinan membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan.

c. Pada bisnis *agency*, peningkatan dan kualitas *manpower* belum sesuai dengan perencanaan sehingga masih perlu rekrutmen yang berkelanjutan untuk dapat memenuhi jumlah dan kualitas *agency* untuk menutupi kondisi *agency* dengan *turnover* yang tinggi.

On the other hand, new business premium income showed an increase in corporate health business. Some of the challenges faced in developing new business are as follows:

a. The execution of the preferred partnership with BTN is not yet optimal due to the system integration process for business development between IFG Life and BTN.

b. Product launches have not been completed according to the established timeline because the product development and licensing processes are taking longer than targeted.

c. In the agency business, improvements and quality of manpower have not been in line with plans, requiring ongoing recruitment to meet the number and quality of agencies needed to cover high turnover.

d. Bisnis *worksite* masih dalam proses finalisasi bisnis model yang baru untuk menggarap ekosistem BUMN. Namun demikian, bisnis *worksite* sudah mulai memiliki traksi dengan diluncurkannya produk LPP Bajo.

d. The worksite business is still in the process of finalizing a new business model to tap into the state-owned enterprise ecosystem. However, the worksite business has begun to gain traction with the launch of the LPP Bajo product.

Secara garis besar kinerja bisnis IFG Life sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The outline of IFG Life's business performance until 2024 is as follows:

Pendapatan *Underwriting* IFG Life
IFG Life Underwriting Income

Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income	**2024 *Audited***	**2023 *Audited***	**RKAP YTD 2024** 2024 Work Plan & Budget YTD	**% Kenaikan/ Penurunan** % Increase/ Decrease	**% Pencapaian** % Achievement
(jutaan Rupiah) (million Rupiah)	**a**	**b**	**c**	**d = (a - b)/b**	**e = a/c**
Pendapatan premi asuransi jiwa Life insurance premium income	**6.241.743**	1.220.034	**6.738.431**	412%	93%
Pendapatan premi reasuransi Reinsurance premium income	**-838.612**	-1.521	**-442.669**	55036%	189%
(Kenaikan)/penurunan cadangan atas PYBMP (Increase)/decrease in unearned premium reserves	**-108.854**	-1.494	**-718.214**	7188%	15%
Pendapatan *Underwriting* lainnya Other underwriting income	**-**	-	**-**	-	-
Jumlah pendapatan *Underwriting* Total underwriting income	**5.294.278**	**1.217.019**	**5.577.548**	**335%**	**95%**
Beban klaim asuransi jiwa Life insurance claim expense	**9.943.306**	4.145.688	**8.134.459**	140%	122%
Klaim reasuransi Reinsurance claims	**-778.982**	-497	**-584.136**	156506%	133%
Kenaikan (penurunan) LMPMD Increase (decrease) in liabilities for future policy benefits	**-3.131.847**	-1.733.441	**-2.322.754**	81%	135%
Beban komisi Commission expenses	**237.069**	8.574	**299.869**	2665%	79%
Beban *Underwriting* Underwriting Expenses	**6.269.546**	2.420.323	**5.527.437**	159%	113%
Hasil *Underwriting* Underwriting Result	**-975.268**	**-1.203.304**	**50.111**	**-19%**	**-1946%**

Realisasi pendapatan premi/GWP IFG Life secara konsolidasi mencapai 93% atau Rp476,53 miliar di bawah RKAP tahun 2024. Pendapatan *underwriting* tahun 2024 meningkat sebesar 335% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan pendapatan premi ini dikontribusi oleh pendapatan premi Mandiri Inhealth, di mana premi Inhealth sudah mencapai 127% target RKAP tahun 2024 Mandiri Inhealth. Hal ini terjadi karena, berdasarkan karakteristik bisnis Inhealth, mayoritas klien korporasi membeli produk kesehatan di awal tahun.

IFG Life's consolidated premium income/GWP realization reached 93% or IDR476.53 billion below the 2024 RKAP. Underwriting income in 2024 increased by 335% compared to 2023. The increase in premium income was contributed by Mandiri Inhealth premium income, in which Inhealth premium has reached 127% of Mandiri Inhealth's 2024 RKAP target. This occurred because, based on the characteristics of Inhealth's business, the majority of corporate clients purchase health products at the beginning of the year.

Premi IFG Life secara induk belum mencapai target, hanya tercapai 54% dari target RKAP 2024. Hal ini disebabkan belum maksimalnya penjualan beberapa produk, seperti produk kesehatan maupun AJK. Belum optimalnya hasil kerja sama *partnership* dengan BTN juga menjadi faktor lain yang menyebabkan lebih rendahnya pencapaian

IFG Life's parent premium has not yet reached the target, and only 54% of the 2024 RKAP target was achieved. This is due to not maximizing the sales of several products, such as health products and Credit Life Insurance (AJK). The suboptimal results of partnership cooperation with BTN is also another factor that causes

target premi IFG Life induk dibandingkan RKAP 2024. Namun demikian, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, pendapatan premi IFG Life mengalami pertumbuhan sebesar 46%.

Hasil *underwriting* terealisasi sebesar minus Rp975,27 miliar, atau 1.946% di bawah asumsi RKAP 2024 karena tingginya klaim produk PHT dan klaim penebusan produk Tampan.

Secara garis besar, rasio profitabilitas IFG Life sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

the lower achievement of the parent IFG Life premium target compared to the 2024 RKAP. However, compared to the achievement in 2023, IFG Life's premium income increased by 46%.

Underwriting results were realized at minus IDR975.27 billion, or 1,946% below the 2024 RKAP assumption due to high provident fund (PHT) product claims and Tampan product redemption claims.

In general, IFG Life's profitability ratios up to 2024 are as follows:

Rasio Keuangan IFG Life
IFG Life Financial Ratios

Rasio Keuangan Financial Ratio	**2023** ***Audited***	**RKAP YTD 2024** 2024 Work Plan & Budget YTD	**2024** ***Audited***
Laba Bersih Net Profit	(659.518)	**124.050**	**(48.441)**
Return on Asset (ROA)	-2,24%	**0,57%**	**-0,16%**
Return on Equity (ROE)	-24,50%	**4,43%**	**-1,40%**

Dilihat dari analisis profitabilitasnya, IFG Life membukukan rugi sebesar Rp48,44 miliar pada tahun 2024, atau mencapai minus 39% dari target RKAP 2024 dengan laba sebesar Rp124,05 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi sebesar Rp659,52 miliar, capaian 2024 ini meningkat signifikan, ditopang pendapatan premi yang mendekati target RKAP 2024 dan hasil investasi secara aktual yang meningkat di atas target RKAP 2024. Realisasi *capital gain* atas penjualan saham dalam portofolio reksadana yang dialihkan dari Jiwasraya juga membantu pencapaian hasil investasi. Penggunaan anggaran yang sejalan dengan inisiatif *cost efficiency* juga turut membantu pencapaian laba bersih.

Kendati belum berhasil mencetak laba bersih sebagaimana ditargetkan, IFG Life memperlihatkan perbaikan dari sisi tingkat pengembalian aset dan ekuitas. *Return on asset* (ROA) membaik, dari minus 2,24% pada tahun 2023 menjadi minus 0,16% pada tahun 2024. Adapun, *return on equity* (ROE) pun membaik, dari minus 24,50% pada tahun 2023 menjadi minus 1,40% pada tahun 2024. Namun demikian, perbaikan-perbaikan masih tetap diperlukan, seperti eksekusi bisnis yang lebih baik dalam bekerja sama dengan bank partner BTN dan masih perlunya strategi lebih lanjut untuk mengatasi negative *investment spread* yang terjadi dari hasil investasi aset properti yang belum optimal.

In terms of profitability analysis, IFG Life recorded a loss of IDR48.44 billion in 2024, or achieved minus 39% of the 2024 RKAP target with a profit of IDR124.05 billion. Compared to the previous year which recorded a loss of IDR659.52 billion, this 2024 achievement improved significantly, supported by premium income that was close to the 2024 RKAP target and actual investment returns that increased above the 2024 RKAP target. The realization of capital gains on the sale of shares in the mutual fund portfolio transferred from Jiwasraya also helped achieve investment results. Budget utilization in line with cost efficiency initiatives also helped achieve net profit.

Although IFG Life has not managed to make a net profit as targeted, it has shown improvement in terms of return on assets and equity. Return on assets (ROA) improved, from minus 2.24% in 2023 to minus 0.16% in 2024. Meanwhile, return on equity (ROE) also improved, from minus 24.50% in 2023 to minus 1.40% in 2024. However, improvements are still needed, such as better business execution in working with BTN's bank partners and the need for further strategies to overcome the negative investment spread that occurs from sub-optimal investment returns on property assets.

3. PASAR MODAL DAN INVESTASI
   a. Produksi
      Dari sisi produk, Anggota *Holding* pasar modal dan investasi menyediakan produk dan/atau jasa sesuai dengan model bisnis masing-masing. Di bawah ini adalah perincian produk dan/atau jasa yang diberikan oleh Anggota *Holding* pasar modal dan investasi IFG:

3. CAPITAL MARKETS AND INVESTMENT
   a. Production
      In terms of products, capital market and investment holding members provide products and/or services in accordance with their respective business models. The following is a detailed description of the products and/or services provided by members of the IFG capital market and investment holding company:

Produk dan/atau Jasa Yang Diberikan Oleh Anggota *Holding* Pasar Modal dan Investasi
Products and/or Services Provided by Capital Market and Investment Holding Members

Entitas Entity	Produk/Jasa Products/Services
Bahana Sekuritas	• Penjamin Emisi Efek • Jasa Penasihat Keuangan • *Equity Brokerage* • *Fixed Income Brokerage* • Underwriter • Financial Advisory Services • Equity Brokerage • Fixed Income Brokerage
Bahana Artha Ventura	• Penyertaan Saham ke PMVD • Pembiayaan PMVJP • Penyertaan Saham • Pembiayaan Ultra Mikro • Investment in Shares to Regional Venture Capital Company (PMVD) • Short-term Venture Capital Company PMVJP) Fund • Investment in Shares • Ultra Microfinance
Bahana TCW Investment Management	• Reksa dana Pendapatan Tetap • Reksa dana Saham • Reksa dana Pasar Uang • Reksa dana Campuran • Reksa dana Terproteksi • Reksa dana Index/ETF • Reksa dana Penyertaan Terbatas • KIK EBA • Pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana (“KPD”) • Fixed Income Mutual Fund • Equity Mutual Fund • Money Market Mutual Fund • Balanced Mutual Fund • Protected Mutual Fund • Index/ETF mutual funds • Limited participation mutual fund • KIK EBA • Fund Management Contract ("KPD") Management
Bahana Kapital Investa	• Jasa Penasihat Keuangan • Jasa Pengelolaan Aset Subrogasi • Investasi Pada Obligasi Konversi • Financial Advisory Services • Subrogation Asset Management Services • Investment in Convertible Bonds
Grahaniaga Tatautama	• Pengelolaan Gedung • Pengelolaan Financial Club • Building Management • Financial Club Management

b. Pendapatan

Dari sisi pendapatan usaha, secara total, kinerja Anggota *Holding* pasar modal dan investasi mengalami kenaikan sebesar 2,4%, dari Rp700,5 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp717,5 miliar pada tahun 2024. Namun, pendapatan usaha ini hanya mencapai 80,4% dari RKAP tahun 2024. Adapun, kontribusi dari masing-masing Anggota *Holding* pasar modal dan investasi terhadap pendapatan operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

b. Revenue

In terms of operating income, in total, the performance of the capital market and investment holding members increased by 2.4%, from IDR700.5 billion in 2023 to IDR717.5 billion in 2024. However, this operating income only reached 80.4% of the 2024 RKAP. Meanwhile, the contribution of each member of the capital market and investment holding to operating is shown in the table below:

Pendapatan dan Pertumbuhan Usaha Anggota *Holding* Pasar Modal dan Investasi
Revenue and Business Growth of Capital Market and Investment Holding Members

Pendapatan usaha Business income	**2024 *audited***	**2023 *audited***	**RKAP 2024** 2024 Work Plan & Budget	**% Kenaikan/ Penurunan** % Increase/ Decrease	**% Pencapaian** % Achievement
(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)	**a**	**b**	**c**	**d=(a-b)/b**	**e=a/c**
Bahana Sekuritas*)	**137.731**	151.318	**188.571**	(9,0%)	73,0%
Bahana Artha Ventura	**128.404**	138.919	**178.340**	(7,6%)	72,0%
Bahana TCW Investment Management	**234.558**	207,689	**282,014**	12,9%	83,2%
Bahana Kapital Investa	**16.453**	30.450	**58.157**	(46,0%)	28,3%
Grahaniaga Tatautama	**200.352**	172.118	**185,582**	16,4%	108,0%
Total	**717.498**	**700.494**	**892,664**	**2,4%**	**80,4%**

Fokus utama dari Anggota *Holding* bidang pasar modal dan investasi adalah meningkatkan peran Anggota *Holding* sebagai *strategic enabler,* baik di ekosistem grup IFG maupun ekosistem BUMN, terutama dalam optimalisasi kinerja aset investasi Anggota *Holding*, mendukung pengembangan bisnis, dan peningkatan *recovery* atas aset subrogasi. Berikut, penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja per Anggota *Holding* pasar modal dan investasi dari sisi pendapatan operasionalnya.

The main focus of the capital market and investment holding members is to increase the role of subsidiaries as strategic enablers, both in the IFG group ecosystem and the SOEs ecosystem, especially in optimizing the performance of subsidiaries' investment assets, supporting business development, and increasing recovery on subrogation assets. The following is a further description of the performance of each member of the capital market and investment holding in terms of operating income.

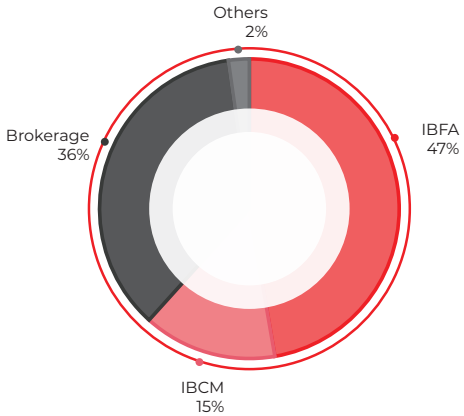
Bahana Sekuritas

Produk dan jasa yang disediakan oleh Bahana Sekuritas dapat dikelompokkan menjadi empat lini bisnis, yaitu bisnis *brokerage, financial advisory, underwriter,* dan bisnis lainnya. Pada tahun 2024, proporsi pendapatan operasional neto Bahana Sekuritas adalah sebagai berikut:

Bahana Sekuritas

The products and services provided by Bahana Sekuritas can be categorized into four lines of business, namely brokerage, financial advisory, underwriter, and other businesses. In 2024, the proportion of Bahana Sekuritas' net operating income is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto Bahana Sekuritas
Proportion of Net Operating Income of Bahana Sekuritas



Terkait pendapatan dari lini bisnis *financial advisory*, Bahana Sekuritas telah membukukan pendapatan bersih senilai Rp42,2 miliar pada tahun 2024, meningkat 14% dibandingkan tahun 2023. Salah satu penyebab kenaikan pendapatan lini bisnis ini adalah terisinya posisi senior di *Investment Banking*. Hal ini juga menyebabkan BS untuk membukukan pendapatan *underwriter* sebesar Rp12,7 miliar.

Regarding revenue from the financial advisory line of business, Bahana Sekuritas has recorded net income of IDR42.2 billion in 2024, an increase of 14% compared to 2023. One of the reasons for the increase in revenue in this line of business is the filling of senior positions in Investment Banking. This also led BS to record underwriter income of IDR12.7 billion.

Pendapatan dari lini bisnis *brokerage* BS membukukan nilai sebesar Rp32,7 miliar di tahun 2024, meningkat 47% dibandingkan tahun 2023, seiring dengan meningkatnya transaksi di BEI. Namun demikian, *fixed income* melihat penurunan pendapatan karena instrumen SRBI. Terakhir, pendapatan lainnya hanya sebesar Rp1,9 miliar. Pendapatan lainnya menurun dibandingkan tahun 2023 disebabkan pada tahun 2023 terdapat *one-off income*, yaitu dividen dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Revenues from the BS brokerage line of business recorded a value of IDR32.7 billion in 2024, an increase of 47% compared to 2023, as transactions on the IDX increased. However, fixed income saw a decline in revenue due to SRBI instruments. Lastly, other income amounted to IDR1.9 billion, it is a decrease compared to 2023, since during that year, there was one-off income, namely dividends from the Indonesia Stock Exchange (IDX).

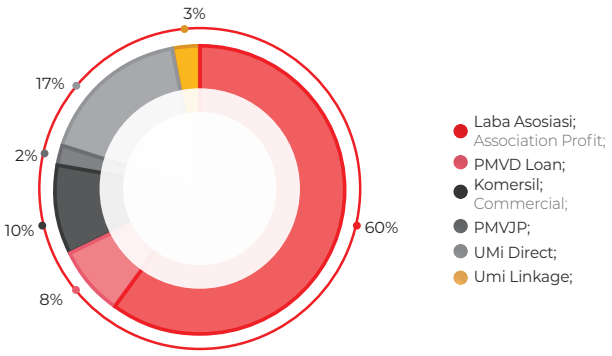
BAV

Proporsi pendapatan operasional neto BAV di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAV

The proportion of BAV's net operating income in 2024 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto BAV
Proportion of Net Operating Income BAV



Pendapatan operasional bersih BAV pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp31,28 miliar, turun 33% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp46,85 miliar. Produk UMi *Linkage* tetap menjadi kontributor utama sebesar 60% dari total pendapatan atau mengalami penurunan sebesar 40%, dari Rp31,4 miliar di tahun 2023 menjadi Rp18,7 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penangguhan penyaluran pembiayaan kepada lembaga *linkage* senilai Rp300 miliar, akibat adanya *concentration risk*. Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan transformasi bisnis, BAV mulai melakukan *shifting business* dari pembiayaan melalui lembaga *linkage* ke skema *direct lending*.

BAV's net operating income in 2024 was recorded at IDR31.28 billion, decreased 33% compared to IDR46.85 billion in 2023. UMi Linkage products remained the main contributor at 60% of total revenue or decreased by 40%, from IDR31.4 billion in 2023 to IDR18.7 billion in 2024. This decline is due to the suspension of financing disbursements to linkage institutions worth IDR300 billion, due to concentration risk. As part of the risk mitigation strategy and business transformation, BAV began shifting business from financing through linkage institutions to direct lending schemes.

Melalui pembiayaan *direct lending* tersebut, telah berhasil dicatatkan pendapatan sebesar Rp2,5 miliar atau setara 8% dari total pendapatan. Selain itu, segmen PMVD *Loan* mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 50% dengan mencatatkan Rp5,4 miliar, berkontribusi sebesar 17%. Segmen PMVJP juga menunjukkan kinerja yang positif, mencatat pendapatan Rp3,2 miliar atau tumbuh 14%, dan berkontribusi sebesar 10%. Sementara itu, pendapatan dari laba asosiasi tercatat sebesar Rp1,0 miliar atau turun 86%, sehingga hanya berkontribusi sebesar 3%. Segmen pembiayaan komersial mencatatkan pendapatan sebesar Rp471 juta, yang berarti turun 67%, dengan kontribusi sebesar 2%.

Through the direct lending financing, IDR2.5 billion in revenue was recorded, equivalent to 8% of total revenue. In addition, the PMVD Loan segment recorded a significant growth of 50% by recording IDR5.4 billion, contributing 17%. The PMVJP segment also showed a positive performance, recording revenue of IDR3.2 billion or a 14% increase, and contributed 10%. Meanwhile, revenue from profits of associates was recorded at IDR1.0 billion or decreased 86%, contributing only 3%. The commercial financing segment recorded revenue of IDR471 million, a 67% decline, contributing 2%.

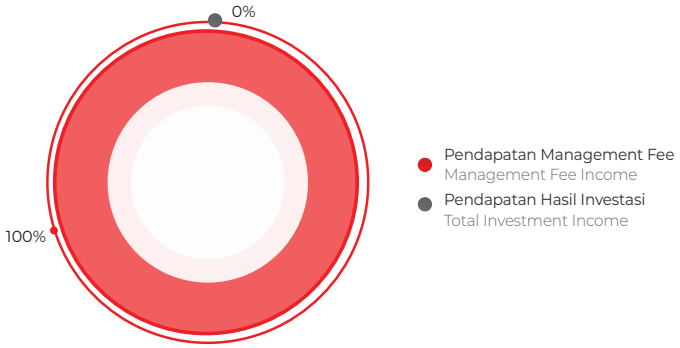
BTIM

Proporsi pendapatan operasional neto BTIM di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BTIM

The proportion of BTIM's net operating income in 2024 is as follows:

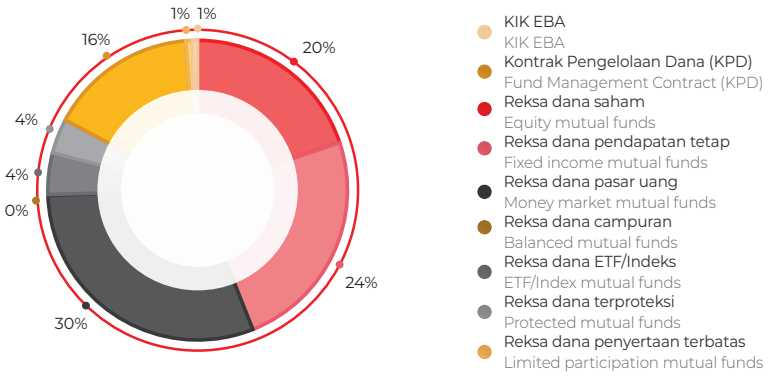
Proporsi Pendapatan Operasional Neto BTIM
Proportion of BTIM Net Operating Income



Adapun, komposisi pendapatan *management fee* (*gross*) dapat diperinci per masing-masing jenis reksa dana, sebagai berikut:

The composition of management fees (gross) can be specified for each type of mutual fund, as follows:

Komposisi Pendapatan Management Fee (Gross)
Composition of Management Fee Income (Gross)



Kontribusi pendapatan *management fee* terbesar berasal dari reksa dana pasar uang (30%) dan reksa dana pendapatan tetap (24%). Produk reksa dana pasar uang dengan AUM terbesar adalah Reksa Dana Bahana Dana Likuid (Rp4,48 triliun), sementara untuk reksa dana pendapatan tetap dengan AUM terbesar adalah Reksa Dana Bahana Prime Income Fund (Rp1,90 triliun). Reksa dana yang diterbitkan BTIM dijual kepada nasabah retail dan institusi, baik melalui agen penjual reksa dana (APERD), *online website* (BahanaLink), ataupun melalui tim sales BTIM.

The largest contribution of management fee income came from money market mutual funds (30%) and fixed income mutual funds (24%). The money market mutual fund product with the largest AUM is Bahana Dana Likuid Mutual Fund (IDR4.48 trillion), while the fixed income mutual fund with the largest AUM is Bahana Prime Income Fund (IDR1.90 trillion). Mutual funds issued by BTIM are sold to retail and institutional customers, either through mutual fund selling agents (APERD), online website (BahanaLink), or through the BTIM sales team.

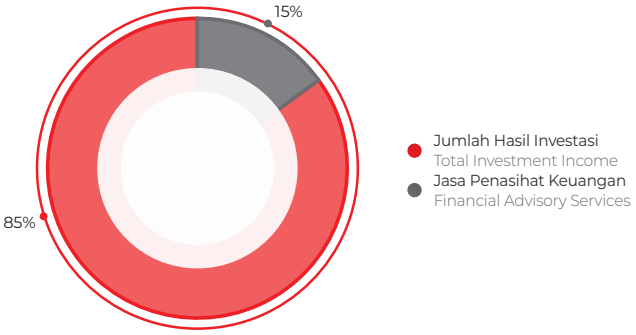
BKI

Proporsi pendapatan operasional neto BKI di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BKI

The proportion of BKI's net operating income in 2024 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto BKI
Proportion of BKI Net Operating Income



Pada tahun 2024, BKI mencatatkan total pendapatan operasional bersih sebesar Rp16,5 miliar yang disumbangkan oleh jasa penasihat investasi sebesar Rp15,8 miliar, pendapatan atas penempatan investasi pada reksa dana sebesar Rp272,6 juta, serta pendapatan kupon investasi pada *exchange bond* sebesar Rp416,1 juta yang dicatatkan secara *accrual basis*. Pencapaian ini merupakan 28,3% dari target RKAP Tahun 2024 sebesar Rp58,2 miliar.

In 2024, BKI recorded a total net operating income of IDR16.5 billion contributed by investment advisory services of IDR15.8 billion, income from investment placements in mutual funds of IDR272.6 million, and investment coupon income on exchange bonds of IDR416.1 million which was recorded on an accrual basis. This achievement represents 28.3% of the 2024 RKAP target of IDR58.2 billion.

Pada lini bisnis subrogasi, hingga akhir tahun 2024 belum ada realisasi pendapatan *recovery* aset subrogasi, namun BKI telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jamkrindo dan Askrindo serta menandatangani NDA dengan perbankan untuk pelaksanaan pekerjaan rekonsiliasi. Saat ini BKI tengah memulai pekerjaan rekonsiliasi KUR Gen 1 dengan nilai SHS sebesar Rp648 M. BKI juga telah menandatangani PKS penagihan langsung dengan pihak konsultan jasa penagihan.

In the subrogation line of business, until the end of 2024 there will be no realization of subrogation asset recovery income, but BKI has signed cooperation agreements with Jamkrindo and Askrindo and signed NDAs with banks for the implementation of reconciliation work. Currently, BKI is starting reconciliation work for KUR Gen 1 with a SHS value of IDR648 billion. BKI has also signed a direct billing agreement with a billing service consultant.

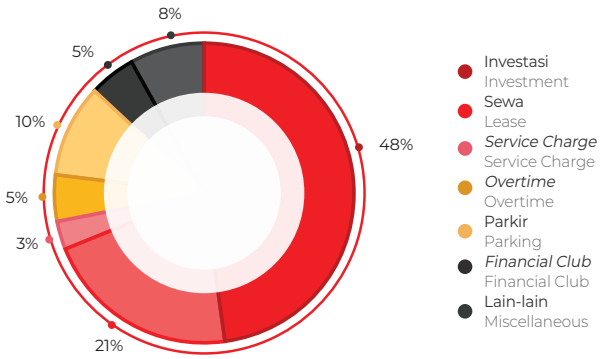
GNTU

Proporsi pendapatan operasional neto GNTU di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

GNTU

The proportion of GNTU net operating income in 2024 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto GNTU
Proportion of Net Operating Income GNTU



Pendapatan pengelolaan gedung didapatkan dari pendapatan sewa, *service charge, overtime,* parkir, dan pendapatan lainnya dari sewa atas gedung Graha CIMB Niaga Sudirman. Sepanjang tahun 2024, *occupancy rate* gedung GNTU mencapai 95,4% dari *total rentable spaces* sehingga lini bisnis ini dapat menyumbang 82% dari total pendapatan GNTU. IFG dan Anggota *Holding* menempati 39% dari *rentable spaces* di GNTU.

Selain pendapatan pengelolaan gedung, GNTU mendapatkan pendapatan pengelolaan *financial club* yang dilakukan oleh Anggota *Holding* GNTU. Di luar gedung Graha CIMB Niaga Sudirman, GNTU juga sudah mulai melakukan pengelolaan aset grup IFG walaupun masih minim, seperti Jamkrindo Syariah dengan penambahan pendapatan baru setiap bulannya sebesar Rp138 juta dan pembangunan *new retail* untuk aset Jasa Raharja.

c. Profitabilitas
Dari sisi profitabilitas, secara total, Anggota *Holding capital market* dan investasi meraup laba setelah pajak hingga tahun 2024 sebesar Rp45,7 miliar, meningkat secara yoy sebesar 32,2%. Pencapaian laba ini sebesar 26,4% dari RKAP Tahun 2024. Profitabilitas tiap Anggota *Holding capital market* dan investasi dapat dijelaskan melalui tabel dan pembahasan lebih lanjut di bawah ini:

Building management income is derived from rental income, service charges, overtime, parking, and other income from the lease of the Graha CIMB Niaga Sudirman building. Throughout 2024, the occupancy rate of the GNTU building reached 95.4% of the total rentable spaces so that this line of business can contribute 82% of GNTU's total revenue. IFG and its holding members occupy 39% of the rentable spaces in GNTU.

In addition to the building management income, GNTU earns income from the management of financial clubs carried out by GNTU subsidiaries. Outside the Graha CIMB Niaga Sudirman building, GNTU has also begun managing IFG group assets, albeit on a small scale, such as Jamkrindo Syariah with an additional monthly income of IDR138 million and the development of new retail for Jasa Raharja assets.

c. Profitability
In terms of profitability, overall, members of the capital market and investment holding company earned after-tax profits of IDR45.7 billion in 2024, an increase of 32.2% year-on-year. This profit achievement represents 26.4% of the 2024 RKAP. The profitability of each member of the capital market and investment holding company is explained in the table and further discussion below:

Profitabilitas Pasar Modal dan Investasi
Capital Market Profitability and Investment

Laba bersih Net profit	**2024 *audited***	**2023 *audited***	**RKAP 2024**	**%kenaikan/ penurunan** % increase/decrease	**% Pencapaian** % Achievement
(dalam jutaan Rupiah) (in millions Rupiah)	**a**	**b**	**c**	**d=(a-b)/b**	**e=a/c**
Bahana Sekuritas	**(32.561)**	(101.094)	**18.656**	67,8%	(174,5%)
Bahana Artha Ventura	**(20.982)**	11.552	**15.344**	(281,6%)	(136,7%)
Bahana TCW Investment Management	**42.036**	54.990	**60.242**	(23,6%)	69,8%
Bahana Kapital Investa	**(17.171)**	202	**8.078**	(8.600,5%)	(312,6%)
Grahaniaga Tatautama	**74.411**	68,939	**70,681**	7,9%	105,3%
Total	**45.733**	**34.589**	**173.001**	**32,2%**	**26,4%**

Bahana Sekuritas

Pada tahun 2024, Bahana Sekuritas berhasil mengurangi biaya operasional, lebih kecil 30% dari tahun 2023 serta realisasi lebih kecil 21% dari RKAP, dengan menjaga realisasi biaya karyawan dan efisiensi biaya *subscription*. Selain itu, terdapat *one-off revenue* atas dividen dari BEI di tahun 2023 yang tidak lagi didapatkan di tahun 2024. Inisiatif-inisiatif tersebut yang menyebabkan perbaikan profitabilitas Bahana Sekuritas pada tahun 2024. Namun demikian, pendapatan Bahana Sekuritas belum dapat menutup biaya operasionalnya.

Bahana Sekuritas

In 2024, Bahana Sekuritas succeeded in reducing operating costs, 30% less than in 2023 and realization was 21% less than the RKAP, by maintaining the realization of employee costs and subscription cost efficiency. In addition, there was one-off revenue from dividends from the IDX in 2023 that will no longer be earned in 2024. These initiatives led to an improvement in Bahana Sekuritas' profitability in 2024. However, Bahana Sekuritas' revenue has not been able to cover its operating costs.

Ke depan, manajemen Bahana Sekuritas terus berupaya untuk mendapatkan bisnis serta tetap menjaga realisasi biaya operasional perusahaan. Efisiensi biaya yang dilakukan oleh Bahana Sekuritas tidak mengecilkan upaya Bahana Sekuritas dalam mencapai peningkatan pendapatan. Bahana Sekuritas senantiasa terus membangun *pipeline project,* baik dari *investment banking financial advisory* maupun *investment banking capital market.*

IFG melakukan transformasi bisnis model baru untuk Bahana Sekuritas yang dilaksanakan dan dimonitor melalui pembentukan *task force* yang termasuk dalam *Task Force Platform Digital* dan *New Business* Development. IFG juga secara ketat melakukan pemantauan dan analisis atas biaya operasional perusahaan serta *pipeline* bisnis *investment banking* di Bahana Sekuritas.

BAV

Pada tahun 2024, profitabilitas BAV minus sebesar Rp21 miliar atau turun 281,6% secara yoy dan minus 136,7% dari target RKAP tahun 2024 sebesar Rp15,3 miliar. Hal ini disebabkan oleh pendapatan operasional yang mengalami penurunan sebesar Rp10,5 miliar secara yoy seiring dengan tidak tercapainya target pembiayaan (realisasi Rp230,4 miliar vs RKAP YTD Rp817,9 miliar).

Tidak tercapainya target pembiayaan akibat dimulainya shifting business dari pembiayaan melalui lembaga *linkage* ke skema *direct lending,* di mana terdapat beberapa kendala pada operasional pembiayaan *direct lending* seperti, kuota SLIK yang terbatas, penyesuaian *risk acceptance criteria* (RAC) yang tepat, proses *credit screening/underwriting* debitur yang masih manual dan kendala pada sistem SIKP PIP untuk mengunggah jaminan fidusia.

Sementara itu, beban karyawan tercatat relatif stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2023. Terjadi kenaikan pada cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp23,9 miliar secara yoy yang disebabkan adanya penambahan CKPN atas perbaikan Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) beberapa PMVD, CKPN pembebanan biaya pajak pada PMVD Sumbar dan pembentukan CKPN atas pinjaman BAV di 6 PMVD (Sultra, Sulut, Sulteng, Riau, Papua & Bengkulu).

BTIM

Pada tahun 2024, profitabilitas BTIM mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan dengan realisasi YTD Desember 2023. *Net profit margin* BTIM sampai dengan akhir tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 (2024: 18%, 2023: 26%), antara lain karena penurunan pendapatan dari surat berharga akibat penurunan nilai investasi BTIM di RDT dengan *underlying* MTN Sritex sebesar Rp27 miliar. Oleh karena itu, profitabilitas BTIM hanya mencapai 70% dari RKAP 2024. Total AUM BTIM pada tahun 2024 adalah Rp73,21 triliun, di mana terdapat 6 (enam) klien institusional baru dan 3 (tiga) mandat baru yang menghasilkan penambahan AUM sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2024.

Going forward, Bahana Sekuritas management will continue to strive to acquire business and maintain the company's operating costs. Bahana Sekuritas' cost efficiency measures will not diminish its efforts to increase revenue. Bahana Sekuritas will continue to build its project pipeline, both in investment banking financial advisory and investment banking capital markets.

IFG conducted a new business model transformation for Bahana Sekuritas, which was implemented and monitored through the establishment of task forces included in the Digital Platform and New Business Development Task Force. IFG also closely monitors and analyzes the company's operational costs and investment banking business pipeline at Bahana Sekuritas.

BAV

In 2024, BAV's profitability was minus IDR21 billion or decreased 281.6% yoy and minus 136.7% of the 2024 RKAP target of IDR15.3 billion. This was due to operating income which decreased by IDR10.5 billion yoy along with the non-achievement of the financing target (realization of IDR230.4 billion vs RKAP YTD of IDR817.9 billion).

The non-achievement of the financing target was due to the start of shifting business from financing through linkage institutions to direct lending schemes, where there were several obstacles in direct lending financing operations such as, limited SLIK quota, proper adjustment of risk acceptance criteria (RAC), manual credit screening/underwriting process of debtors and constraints on the SIKP PIP system to upload fiduciary guarantees.

At the same time, employee expenses were relatively stable and did not significantly decrease compared to 2023. There was an increase in allowance for impairment losses (CKPN) of IDR23.9 billion yoy due to the addition of CKPN for the improvement of the Financial Health Level (TKK) of several PMVDs, allowance for impairment losses for tax expense in West Sumatra PMVD and the establishment of allowance for impairment losses on BAV loans in 6 PMVDs (Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Riau, Papua & Bengkulu).

BTIM

In 2024, BTIM's profitability decreased by 24% compared to the realization YTD December 2023. BTIM's net profit margin by the end of 2024 decreased compared to 2023 (2024: 18%, 2023: 26%), partly due to a decrease in income from securities due to a decrease in the value of BTIM's investment in RDT underlying Sritex's MTN of IDR27 billion. Therefore, BTIM's profitability only reached 70% of the 2024 RKAP. BTIM's total AUM in 2024 was IDR73.21 trillion, of which there were 6 (six) new institutional clients and 3 (three) new mandates resulting in additional AUM of IDR1.1 trillion in 2024.

Pada tahun 2024, BTIM telah resmi menambahkan kegiatan usaha menjadi penasihat investasi dan mendaftarkan ke OJK, sehingga bisnis ini bisa menjadi solusi alternatif bagi para investor. BTIM berhasil mencapai target RKAP AUM di saat industri aset manajemen mengalami penurunan AUM dengan tetap melakukan inisiatif bisnis sehingga tetap mendapatkan mandat dari beberapa klien institusional, seperti penerbitan produk *alternative investment* dan peningkatan *margin management fee* dari produk baru/kelas produk baru.

In 2024, BTIM has officially added business activities to become an investment advisor and registered with OJK, so that this business can be an alternative solution for investors. BTIM successfully achieved its RKAP AUM target at a time when the asset management industry experienced a decrease in AUM by continuing to implement business initiatives, thereby maintaining its mandate from several institutional clients, such as the issuance of alternative investment products and an increase in management fee margins from new products/new product classes.

Sebagai *Holding*, IFG juga turut melakukan pengawasan terkait pengelolaan risiko di BTIM terkait dengan rencana penerbitan produk dan bisnis. Koordinasi di dalam ekosistem IFG juga dilakukan untuk melakukan optimalisasi sinergi pengelolaan investasi secara konsolidasi di BTIM. Hal ini turut meningkatkan AUM BTIM sekitar Rp20 miliar di tahun 2024.

As a holding company, IFG also oversees risk management in BTIM related to product and business issuance plans. Coordination within the IFG ecosystem is also carried out to optimize the synergy of consolidated investment management in BTIM. This will help increase BTIM's AUM by around IDR20 billion in 2024.

BKI

Pada tahun 2024, BKI mengalami kerugian sehingga pencapaiannya minus 312,6% dari RKAP 2024. Penyebabnya adalah capaian pendapatan bisnis *advisory* yang belum sesuai target dan belum adanya pendapatan dari bisnis subrogasi. Selain itu, terdapat peningkatan beban karyawan secara signifikan yang disebabkan oleh pembayaran beban tunjangan cuti tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024 akibat tidak dilakukan pencadangan pada tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh *Holding* IFG.

BKI

In 2024, BKI experienced a loss so that its achievement was minus 312.6% of the 2024 RKAP. The reason was the achievement of advisory business income that was not on target and there was no income from the subrogation business. In addition, there was a significant increase in employee expenses caused by the payment of leave allowance expenses in 2023 which were realized in 2024 due to the fact that no provision was made in 2023. This is of particular concern to IFG holding.

GNTU

Pada tahun 2024, profitabilitas GNTU mengalami peningkatan sebesar 7,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan mencapai 105,3% dari RKAP YTD Desember 2024. GNTU membukukan kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp28,2 miliar yang didukung dengan *occupancy rate* Gedung Graha CIMB Niaga Sudirman sebesar 95,4% (di atas target RKAP 2024 sebesar 94%, di mana di dalamnya terdapat kontribusi penyewaan dari IFG). Adapun, *net profit margin* GNTU sebesar 37,1%. Angka ini relatif stabil atau tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

GNTU

In 2024, GNTU's profitability increased by 7.9% compared to the realization in 2023 and reached 105.3% of the December 2024 YTD RKAP. GNTU recorded an increase in operating income of IDR28.2 billion supported by the occupancy rate of Graha CIMB Niaga Sudirman Building of 95.4% (exceeding the 2024 RKAP target of 94%, which includes rental contributions from IFG). Meanwhile, GNTU's net profit margin was 37.1%. This figure is relatively stable and has not increased from the previous year.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Pembahasan dan analisis kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian Indonesia Financial Group untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan-peraturan yang berlaku.

The discussion and analysis of financial performance in this Annual Report refers to the Consolidated Financial Statements of Indonesia Financial Group for the years ended December 31, 2023 and 2024 which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm with the opinion fair, in all material respects.

The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian generally accepted accounting principles (SAK), including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI), as well as applicable regulations.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Aset

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Assets

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	2024	2023*	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	15.229	14.523	706	4,86%
Investasi Investments	76.338	78.977	(2.639)	-3,34%
Piutang Premi dan Penjaminan Premiums and Guarantees Receivables	7.083	8.899	(1.816)	-20,41%
Piutang Klaim Reasuransi, Koasuransi dan Penjaminan Reinsurance, Coinsurance and Guarantee Claims Receivables	2.864	2.734	130	4,75%
Piutang Pembiayaan Modal Ventura Venture Capital Financing Receivables	869	1.175	(306)	-26,04%
Piutang Lainnya Other Receivables	1.946	1.584	362	22,85%
Aset Reasuransi Reinsurance Assets	7.952	8.652	(700)	-8,09%
Aset Retrosesi Retrocession Assets	819	1.164	(345)	-29,64%
Properti Investasi Investment Property	4.968	5.018	(50)	-1,00%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna Sewa Fixed Assets and Right to Lease Assets	3.347	3.279	68	2,07%
Aset Lain-lain Other Assets	10.969	10.191	778	7,63%
Jumlah Aset Total Assets	**132.384**	**136.196**	**(3.812)**	**-2,80%**

*)Disajikan Kembali
*)Restated

Per 31 Desember 2024, Perusahaan berhasil membukukan jumlah aset sebesar Rp132,38 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp3,8 triliun atau 2,80% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp136,20 triliun. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penurunan investasi sebesar Rp2,64 triliun atau 3,34% dari tahun sebelumnya, terutama dikontribusi oleh penurunan di Askrindo sebesar Rp2,45 triliun yang merupakan dampak dari pencairan investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, terutama pembayaran klaim tahun berjalan.
2. Penurunan piutang premi dan penjaminan sebesar Rp1,82 triliun atau 20,41% dari tahun sebelumnya, terutama dikontribusi oleh penurunan piutang premi penjaminan kredit di Jamkrindo sebesar Rp0,92 triliun dan penurunan piutang asuransi di Askrindo sebesar Rp0,73 triliun dampak dari perbaikan *collection rate* atas piutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun dan penambahan cadangan penurunan nilai atas piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun (terutama dari piutang KUR).

As of December 31, 2024, the Company managed to record total assets of IDR 132.38 trillion, a decrease of IDR 3.8 trillion or 2.80% compared to 2023 which amounted to IDR 136.20 trillion. This was due to:

1. A decrease in investment of IDR 2.64 trillion or 3.34% from the previous year, mainly contributed by a decrease in Askrindo of IDR 2.45 trillion which was the impact of investment disbursements used to support operational activities, especially the payment of claims for the current year.
2. Decrease in premium and guarantee receivables of IDR 1.82 trillion or 20.41% from the previous year, mainly contributed by a decrease in credit guarantee premium receivables at Jamkrindo of IDR 0.92 trillion and a decrease in insurance receivables at Askrindo of IDR 0.73 trillion as a result of an improvement in the collection rate for receivables with maturities of less than 1 year and the addition of impairment reserves for receivables with maturities of more than 1 year (mainly from KUR receivables).

LIABILITAS

LIABILITIES

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023***	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal	**Persentase (%)** Percentage (%)
Utang Klaim Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee Claims Payable	**2.411**	2.874	(463)	-16,11%
Utang Premi Reasuransi, Retrosesi dan Penjaminan Reinsurance, Retrocession and Guarantee Premium Payables	**1.824**	1.913	(89)	-4,65%
Pinjaman dari Pemerintah Government Loans	**522**	493	29	5,88%
Utang Bank Bank Loans	**2.363**	3.555	(1.192)	-33,53%
Utang Lain-Lain Other Liabilities	**12.383**	12.190	193	1,58%
Liabilitas Kontrak Asuransi, Unit Link dan Penjaminan Insurance, Unit Link and Guarantee Contract Liabilities	**74.518**	75.497	(979)	-1,30%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	**1.287**	1.460	(173)	-11,85%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**95.308**	97.982	(2.674)	-2,73%
Dana Tabarru Tabarru Funds	**(1.762)**	(1.787)	25	-1,40%

*) Disajikan Kembali
*) Restated

Di tahun 2024, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp95,31 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,67 triliun atau 2,73% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp97,98 triliun. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penurunan utang bank sebesar Rp1,19 triliun atau 33,53% dari tahun sebelumnya, dampak dari pembayaran pokok utang bank di IFG.
2. Penurunan liabilitas kontrak asuransi, *unit link* dan penjaminan menurun sebesar Rp0,98 triliun atau 1,30% dari tahun sebelumnya, terutama dikontribusi oleh penurunan liabilitas kontrak asuransi di Jasindo dampak penurunan penambahan liabilitas kontrak atas produksi bisnis tahun berjalan, sejalan dengan penurunan pendapatan premi bruto. Selain itu, terdapat penurunan liabilitas kontrak jaminan keuangan di Jamkrindo sebagai dampak dari lebih tingginya *release* cadangan klaim tahun berjalan sejalan dengan beban klaim yang lebih tinggi.

In 2024, the Company's total liabilities were recorded at IDR 95.31 trillion, a decrease of IDR 2.67 trillion or 2.73% compared to 2023 which amounted to IDR 97.98 trillion. This is due to:

1. A decrease in bank loans of IDR 1.19 trillion or 33.53% from the previous year, as a result of principal repayment of bank loans at IFG.
2. Decrease in insurance, unit-linked and guarantee contract liabilities decreased by IDR 0.98 trillion or 1.30% from the previous year, mainly contributed by a decrease in insurance contract liabilities at Jasindo due to a decrease in the addition of contract liabilities on current year business production, in line with the decrease in gross premium income. Furthermore, there was a decrease in financial guarantee contract liabilities at Jamkrindo as a result of higher release of current year claim reserves in line with higher claim expenses.

EKUITAS

EQUITY

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	2024	2023*	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Equity Attributable to:	37.603	38.750	(1.147)	-2,96%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	1.235	1.251	(16)	-1,28%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**38.838**	**40.001**	**(1.163)**	**-2,91%**

*) Disajikan Kembali
*) Restated

Di tahun 2024, jumlah ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp38,84 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,16 triliun atau 2,91% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp40,00 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh:

1. Selisih transaksi ekuitas sepengendali dan ekuitas emerging entities sebesar Rp3,49 triliun, terutama dampak dari transfer portofolio dari Jiwasraya dan akuisisi Inhealth di IFG Life.
2. Menyerap rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1,14 triliun.
3. Di sisi lain, terdapat peningkatan modal saham dari pemerintah kepada IFG di April 2024 sebesar Rp3,56 triliun.

In 2024, the Company's total equity was recorded at IDR 38.84 trillion, a decrease of IDR 1.16 trillion or 2.91% compared to the previous year of IDR 40.00 trillion. This was mainly due to:

1. Difference in equity transactions under common control and equity of emerging entities amounted to IDR 3.49 trillion, mainly as a result of portfolio transfer from Jiwasraya and Inhealth's acquisition of IFG Life.
2. Absorption of comprehensive loss for the year amounting to IDR 1.14 trillion.
3. On the other hand, there was an increase in share capital from the government to IFG in April 2024 amounting to IDR 3.56 trillion.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	2024	2023*	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan *Underwriting* – Neto Underwriting income - net	**27.076**	27.145	(69)	-0,25%
Beban *underwriting* Pendapatan (beban) *underwriting* lain-lain - neto Hasil *underwriting* Pendapatan hasil kegiatan keuangan Pendapatan hasil kegiatan pengelolaan gedung Hasil investasi Jumlah pendapatan usaha Beban *Underwriting* - Neto Underwriting expenses Other underwriting income (expenses) – net Underwriting result Financial activities income Building management activities income Investment Income Total operating income	**25.393**	20.899	4.494	21,50%
Pendapatan (Beban) *Underwriting* Lain-lain - Neto Other underwriting income (expense) - net	**85**	(31)	116	-374,19%
Hasil *Underwriting* Underwriting result	**1.768**	**6.215**	**(4.447)**	**-71,55%**
Pendapatan lain-lain - neto(Rugi)/laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan Rugi/(laba) tahun berjalan Pendapatan *underwriting* - neto Beban *underwriting* Pendapatan (beban) *underwriting* lain-lain - neto Hasil *underwriting* Pendapatan hasil kegiatan keuangan Pendapatan hasil kegiatan pengelolaan gedung Hasil investasi Jumlah pendapatan usaha Beban usaha Beban keuangan Laba usaha Pendapatan lain-lain - neto(Rugi)/laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan Pendapatan Hasil Kegiatan Keuangan Other income - net (Loss)/profit before tax Income tax expense Loss/(profit) for the year Underwriting income - net Underwriting expenses Other underwriting income (expense) - net Underwriting result Income from financial activities Income from building management activities Investment income Total operating income Operating expensesFinancial expenses Operating profit Other income - net (Loss)/profit before tax Income from investment income Other income - net (Loss)/profit before tax Income tax expense Income from financial activities	**438**	400	38	9,50%
Pendapatan Hasil Kegiatan Pengelolaan Gedung Income from building management activities	**140**	150	(10)	-6,67%
Hasil Investasi Investment Income	**5.500**	5.151	349	6,78%

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	2024	2023*	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Usaha Operating income	**7.846**	**11.916**	**(4.070)**	**-34,16%**
Beban Usaha Operating expenses	**9.097**	9.500	(403)	-4,24%
Beban Keuangan Financial expenses	**369**	397	(28)	-7,05%
Laba Usaha Operating profit	**(1.620)**	**2.019**	**(3.639)**	**-180,24%**
Pendapatan Lain-lain – Neto Other income - net	**1.004**	929	75	8,07%
(Rugi) / Laba Sebelum Pajak (Loss)/profit before tax	**(616)**	**2.948**	**(3.564)**	**-120,90%**
Manfaat / (Beban) Pajak Penghasilan Income tax benefit/(expense)	**229**	(609)	838	-137,60%
(Rugi) / Laba Tahun Berjalan (Loss)/profit for the year	**(387)**	**2.339**	**(2.726)**	**-116,55%**

Per 31 Desember 2024, Perusahaan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp0,39 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,73 triliun atau 116,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,34 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Beban klaim sebesar Rp33,8 triliun di tahun 2024 yang lebih tinggi Rp2,6 triliun dari RKAP 2024, termasuk di dalamnya beban klaim KUR sebesar Rp9,8 triliun.
2. Adanya beban CKPN atas piutang dengan total sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2024 yang terutama berasal dari KUR sebesar Rp691 miliar dan AJRI sebesar Rp277 miliar.
3. Upaya meningkatkan integritas laporan keuangan dengan penguatan cadangan teknis di Nasre sebesar Rp941 miliar (sehingga movement cadangan teknis 2024 sebesar Rp661 miliar) dan di Inhealth sebesar Rp385 miliar (sehingga movement cadangan teknis 2024 sebesar Rp196 miliar).
4. Terdapat penyesuaian tambahan berupa jurnal eliminasi yang menambah beban di tingkat konsolidasi sebesar Rp637 miliar sebagai implikasi dari proses konsolidasi di IFG Grup. Penambahan ini disebabkan oleh *natural differences* atas perlakuan *future inflow*, yang mengacu pada perbedaan penerapan PSAK 104 dan PSAK 109, khususnya antara Jamkrindo dan Nasre.
5. Penurunan pendapatan premi bruto dengan penurunan terbesar terjadi karena penghentian penyaluran KUR Supermikro BRI di Askrindo serta penurunan produksi premi di Jasindo terutama dari LOB *Property*.

Di sisi lain, hasil investasi meningkat 6,78% dari tahun sebelumnya, terutama dari hasil investasi obligasi di IFG Life atas dampak dari peningkatan laba pelepasan obligasi, kupon dan *amortisasi discount* (yang berasal dari perolehan investasi).

As of December 31, 2024, the Company booked a net loss for the year of IDR 0.39 trillion, a decrease of IDR 2.73 trillion or 116.55% when compared to the year 2023 which amounted to IDR 2.34 trillion. This was due to:

1. Claims expense of IDR 33.8 trillion in 2024 which was IDR 2.6 trillion higher than the 2024 RKAP, including KUR claims expense of IDR 9.8 trillion.
2. CKPN expenses on receivables totaling IDR 1.1 trillion in 2024, which mainly came from KUR amounting to IDR 691 billion and AJRI amounting to IDR 277 billion.
3. Efforts to improve the integrity of financial statements by strengthening technical reserves at Nasre by IDR 941 billion (so that the 2024 technical reserve movement is IDR 661 billion) and at Inhealth by IDR 385 billion (so that the 2024 technical reserve movement is IDR 196 billion).
4. There was an additional adjustment in the form of journal of elimination that increased expenses at the consolidated level by IDR 637 billion as an implication of the consolidation process in IFG Group. This addition is due to natural differences on the treatment of future inflow, which refers to the different application of PSAK 104 and PSAK 109, particularly between Jamkrindo and Nasre.
5. Decrease in gross premium income with the largest decrease occurring due to the termination of BRI Supermicro KUR distribution in Askrindo as well as a decrease in premium production in Jasindo mainly from LOB Property.

On the other hand, investment return increased by 6.78% from the previous year, mainly from return on Investment bond in IFG Life due to the impact of increase in bond redemption profit, coupon and discount amortization (which came from investment acquisition).

Selain itu, beban usaha IFG konsolidasian 2024 turun 4,25% atau sebesar Rp0,40 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan beban usaha terutama dikontribusi oleh beban cadangan kerugian penurunan nilai yang turun 39,25% atau Rp0,72 triliun terutama dikontribusi oleh CKPN piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun (terutama dari piutang KUR) di Askrindo dan Jamkrindo.

In addition, IFG's operating expenses decreased by 4.25% or IDR 0.40 trillion compared to the previous year. The decrease in operating expenses was mainly contributed by the provision for impairment losses which decreased by 39.25% or IDR 0.72 trillion mainly contributed by CKPN on receivables with maturity of more than 1 year (mainly from KUR receivables) in Askrindo and Jamkrindo.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal	**Persentase (%)** Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	**(6.931)**	(594)	(6.337)	-1.066,84%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	**6.296**	(1.140)	7.436	652,28%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	**1.341**	1.215	126	10,37%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**706**	**(519)**	**1.225**	**236,03%**
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**14.523**	15.042	(519)	-3,45%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	**15.229**	14.523	706	4,86%

*) Disajikan Kembali
*) Restated

Per 31 Desember 2024, Perusahaan membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp15,23 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp0,71 triliun atau 4,86%. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
   Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas operasi tercatat sebesar Rp6,93 triliun, mengalami penurunan Rp6,34 triliun atau 1.066,84% jika dibandingkan tahun 2023 yang membukukan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp0,60 triliun. Peningkatan arus kas keluar terutama dari pembayaran klaim yang meningkat terutama dikontribusi oleh:

As of December 31, 2024, the Company recorded cash and cash equivalents at the end of the year of IDR 15.23 trillion, an increase of IDR 0.71 trillion or 4.86%. This was due to:

1. Cash Flow from Operating Activities
   Cash outflow used for operating activities was recorded at IDR 6.93 trillion, a decrease of IDR 6.34 trillion or 1,066.84% when compared to 2023 which recorded cash outflow from operating activities of IDR 0.60 trillion. The increase in cash outflow was mainly from increased claim payments mainly contributed by:

a. Pembayaran klaim Askrindo dampak peningkatan klaim KUR dan AKK di entitas induk dan peningkatan klaim di Nasre.
b. Pembayaran klaim Jamkrindo dampak peningkatan klaim lini bisnis KUR dan Produktif.
c. Pembayaran klaim IFG Life dampak dari peningkatan pembayaran klaim polis-polis yang diterima dari Jiwasraya yang merupakan bentuk komitmen IFG Life dalam menjalankan penugasan Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat polis eks Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dan peningkatan pembayaran klaim dari polis-polis asuransi kesehatan di Inhealth.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas masuk dari aktivitas investasi tercatat sebesar Rp6,30 triliun, mengalami peningkatan Rp7.44 triliun atau 652,28% jika dibandingkan tahun 2023 yang membukukan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp1,14 triliun. Peningkatan arus kas masuk tersebut dampak dari peningkatan penerimaan hasil investasi terutama dikontribusi oleh Jamkrindo dan Askrindo dampak dari peningkatan keperluan kas dari aktivitas operasi untuk pembayaran klaim.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp1,34 triliun, mengalami peningkatan Rp0,13 triliun atau 10,37% jika dibandingkan tahun 2023 yang membukukan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,22 triliun. Peningkatan tersebut dampak dari adanya peningkatan penerimaan atas penerbitan saham baru net-off penurunan movement utang bank.

a. Askrindo's claim payments as a result of increased KUR and AKK claims in the parent entity and increased claims in Nasre.
b. Jamkrindo claim payments as a result of the increase in KUR and Productive business line claims.
c. IFG Life claim payments as a result of increased claim payments for policies received from Jiwasraya, which is a form of IFG Life's commitment to carry out the Government's assignment to ensure the continuity of payment of benefits for restructured former Jiwasraya policies and increased claim payments from health insurance policies at Inhealth.

2. Cash Flows from Investment Activities
Cash inflows from investment activities were recorded at IDR 6.30 trillion, an increase of IDR 7.44 trillion or 652.28% when compared to 2023 which recorded cash outflows from investment activities of IDR 1.14 trillion. The increase in cash inflows was the result of an increase in investment income, mainly contributed by Jamkrindo and Askrindo, as a result of an increase in cash requirements from operating activities for claim payments.
3. Cash Flows from Financing Activities
Cash inflows from financing activities were recorded at IDR 1.34 trillion, an increase of IDR 0.13 trillion or 10.37% when compared to 2023 which recorded cash inflows from financing activities of IDR 1.22 trillion. The increase was due to an increase in proceeds from the issuance of new shares net-off a decrease in bank debt movement.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY PAYABLES AND COLLECTIBILITY LEVEL OF RECEIVABLES

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Sampai dengan 31 Desember 2024, IFG berhasil memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur sindikasi secara tepat waktu. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya tersebut tercermin dalam indikator keuangan berikut:

1. Rasio Likuiditas
   Per 31 Desember 2024, rasio likuiditas perusahaan mencapai 171,65%. Hal ini tercermin dari aset lancar perusahaan yang sebesar Rp32,94 triliun dibandingkan liabilitas lancar sebesar Rp19,19 triliun. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang sangat baik untuk melunasi kewajiban utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
   Sepanjang tahun 2024 (audited), penerimaan IFG Holding tercatat sebesar Rp2,78 triliun. Dengan total beban operasional perusahaan sebesar Rp0,83 triliun, maka total cash flow available for debt service perusahaan berada di angka Rp1,95 triliun. Sementara itu, total kewajiban pembayaran pokok dan bunga hutang IFG tercatat sebesar Rp1,71 triliun. Dengan demikian, DSCR IFG masih berada di atas 1 (satu) kali, yang menandakan perusahaan memiliki kemampuan membayar utang yang baik.

ABILITY TO PAY PAYABLES

As of December 31, 2024, IFG has successfully met its debt payment obligations to syndicated creditors on time. The company's ability to fulfill its debt obligations is reflected in the following financial indicators:

1. Liquidity Ratio
   As of December 31, 2024, the company's liquidity ratio reached 171.65%. This is reflected in the company's current assets of IDR 32.94 trillion compared to current liabilities of IDR 19.19 trillion. This shows that the company has a very good liquidity ability to pay off its short-term debt obligations using its current assets.

2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
   Throughout 2024 (audited), IFG Holding's revenue was recorded at IDR 2.78 trillion. With the company's total operating expenses of IDR 0.83 trillion, the company's total cash flow available for debt service is at IDR 1.95 trillion. Meanwhile, IFG's total debt principal and interest payment obligations were recorded at IDR 1.71 trillion. Thus, IFG's DSCR is still above 1 (one) time, which indicates that the company has a good ability to pay debt.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA TAHUN 2024

REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS FOR THE YEAR 2024

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENYELAMATAN PEMEGANG POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat penugasan penyelamatan polis Jiwasraya yang dijalankan oleh IFG, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dan fundamental melalui pemberian PMN dengan total sebesar Rp26,56 triliun yang dialokasikan kepada IFG. Pemberian PMN tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. PMN sebesar Rp20 triliun pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;

2. PMN sebesar Rp3 triliun pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; dan
3. PMN sebesar Rp3,56 triliun pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Seluruh dana PMN yang diterima IFG tersebut kemudian diteruskan sepenuhnya kepada IFG Life.

Sampai dengan 31 Desember 2024, tambahan modal yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG dan selanjutnya dialokasikan kepada IFG Life telah digunakan dan ditempatkan sesuai mandat yang ditetapkan. Adapun rekapitulasi penggunaan dan penempatan dana tersebut adalah sebagai berikut:

REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS TO RESCUE POLICYHOLDERS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

In order to support the implementation of the Jiwasraya policy rescue assignment mandate by IFG, the Government of Indonesia has taken strategic and fundamental steps through the provision of PMN with a total of IDR26.56 trillion allocated to IFG. The PMN provision is carried out in 3 (three) stages, namely:

1. PMN of IDR20 trillion in 2021 as a follow-up to the implementation of Government Regulation No. 102 of 2021 concerning the Addition of State Equity of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
2. PMN of Rp3 trillion in 2023 as a follow-up to the implementation of Government Regulation No. 60 of 2023 concerning the Addition of State Equity of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; and
3. PMN amounting to IDR3.56 trillion in 2024 as a follow-up to the implementation of Government Regulation No. 16 of 2024 concerning the Addition of State Equity of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

All PMN funds received by IFG were then transferred in full to IFG Life.

As of December 31, 2024, the additional capital derived from the State Equity Participation (PMN) to IFG and subsequently allocated to IFG Life has been used and placed in accordance with the stipulated mandate. The recapitulation of the use and placement of these funds is as follows:

Tabel Alokasi Penggunaan Dana PMN
Table of Allocation of PMN Fund Usage

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Keterangan Description	Total PMN Rp26,56 Triliun IDR26.56 Trillion	
	Alokasi Dana Fund Allocation	Persentase Percentage
Penempatan Placement		
SBN Government Securities	17.382.331	65,46%
Deposito Deposit	742.747	2,80%
Obligasi Korporasi Corporate Bonds	340.980	1,28%
Giro Current Account	0	0,00%
Penggunaan Usage		
Pembayaran Klaim dan Pajak Claims and Tax Payments	8.089.942	30,46%
Total	**26.556.000**	**100,00%**

Sumber: Diolah dari Laporan PMN PT Asuransi Jiwa IFG Triwulan IV Tahun 2024
Source: Processed from PT Asuransi Jiwa IFG, Fourth Quarter Year 2024 PMN Report

Berdasarkan data tersebut di atas, secara akumulasi IFG Life masih menjaga alokasi dana atas PMN mayoritas pada instrumen SBN sebesar Rp17,38 triliun dari total PMN yang diterima sebesar Rp26,56 triliun. Atas dana PMN tersebut juga telah digunakan untuk pembayaran klaim dan pembayaran perpajakan di mana hingga 31 Desember 2024 terakumulasi sebesar Rp8,09 triliun.

Pemberian PMN kepada IFG merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam mendukung penyelesaian program penyelamatan polis nasabah Jiwasraya. Intervensi modal ini memainkan peran krusial, tidak hanya dalam menjamin kelancaran proses transfer polis ke IFG Life dan menutup kekurangan ekuitas (*equity gap*) yang ada, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan rasio kesehatan keuangan IFG secara menyeluruh.

Berkat dukungan PMN yang diterima, hingga akhir tahun 2024 IFG melalui IFG Life berhasil mencatat sejumlah pencapaian di berbagai aspek sebagai berikut:

Progres Portofolio Transfer Polis Jiwasraya (Berdasarkan Total Liabilitas)

Sampai dengan tahun 2024, realisasi pengalihan portofolio pertanggungan (polis) dari Jiwasraya yang telah diterima IFG Life sebesar Rp7,62 triliun dari target KPI 2024 sebesar Rp7,71 triliun. Berikut, perbandingan target dan realisasi pengalihan polis dari Jiwasraya kepada IFG Life:

Based on the data above, IFG Life's accumulation still maintains the allocation of funds for the majority PMN in SBN instruments amounting to IDR17.38 trillion from the total PMN received of IDR26.56 trillion. The PMN funds have also been used for claim payments and tax payments where up to December 31, 2024, an accumulated amount of IDR8.09 trillion.

The provision of PMN to IFG is a tangible form of the Government's commitment in supporting the completion of the Jiwasraya customer policy rescue program. This capital intervention plays a crucial role, not only in ensuring the smooth transfer of policies to IFG Life and closing the equity gap, but also in maintaining IFG's overall financial stability and health ratio.

Due to the PMN support received, until the end of 2024 IFG through IFG Life managed to record a number of achievements in various aspects as follows:

Jiwasraya Policy Transfer Portfolio Progress (Based on Total Liabilities)

Until 2024, the realization of the transfer of the coverage portfolio (policy) from Jiwasraya that IFG Life has received is IDR7.62 trillion from the 2024 KPI target of IDR7.71 trillion. The comparison of the target and realization of policy transfer from Jiwasraya to IFG Life is summarized as follow:

Tabel Realisasi Pengalihan Portofolio dari Jiwasraya
Table of Portfolio Transfer Realization from Jiwasraya

Target KPI PMN Kajian PMN Rp3,56 triliun PMN KPI Target PMN Review IDR3.56 trillion		Realiasi Tahun 2024* Realization of 2024*	
Target (Nominal)	**Target** (%)	**Realisasi (Nominal)** Realization (Nominal)	**Realisasi** Realization **(%)**
Rp7,71 triliun IDR7.71 trillion	100%	7,62 triliun 7.62 trillion	98,81%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2024
*Realisasi pengalihan liabilitas dihitung dari tahun 2023 sampai dengan triwulan IV tahun 2024.
Source: IFG Life Realization Report on the Use of Additional Equity from PMN to IFG for the Fourth Quarter of 2024
*Realization of liability transfer is calculated from 2023 to the fourth quarter of 2024.

Pengalihan liabilitas dari Jiwasraya belum mencapai target 100% karena masih terdapat polis-polis dengan status menolak restrukturisasi serta masih terdapat polis-polis yang dalam proses pengalihan.

The transfer of liabilities from Jiwasraya has not reached the 100% target because there are still policies with a status of refusing restructuring and there are still policies in the transfer process.

Realisasi RKI IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2024 (*unaudited*), realisasi pencapaian RKI IFG Life sebesar 114,29% atau 2,59% lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

IFG Life's RKI Realization

Based on IFG Life's 2024 Financial Report (unaudited), the realization of IFG Life's Individual Work Realization (RKI) achievement was 114.29% or 2.59% higher than the set target.

Tabel Target KPI RKI IFG Life dan Pencapaian Tahun 2024
Table of IFG Life RKI KPI Target and Achievement in 2024

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Target KPI PMN review IDR3.56 trillion	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Pencapaian Tahun 2024 Kajian PMN Rp3,56 triliun Achievement in 2024 PMN review IDR3.56 trillion
111,40%	114,29%	102,59%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2024
Source: IFG Life Realization Report on the Use of Additional Capital from PMN to IFG for the Fourth Quarter of 2024

IFG Life akan terus melakukan pengelolaan aset-aset investasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik dan juga menjalankan ALM secara *prudent* sehingga rasio kecukupan investasi dapat terjaga dan memenuhi indikator kesehatan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

IFG Life will continue to manage investment assets while prioritizing the principles of prudence and good governance and also carry out prudent ALM so that the investment adequacy ratio can be maintained and meet financial health indicators in accordance with applicable regulations.

Realisasi RBC IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2024 (*unaudited*), realisasi pencapaian RBC IFG Life sebesar 182,67% atau tercapai di atas target pada KPI PMN tahun 2024.

IFG Life RBC Realization

Based on IFG Life's 2024 Financial Report (unaudited), the realization of IFG Life's RBC achievement is 182.67% or achieved above the target in the 2024 PMN KPI.

Tabel Target KPI RBC IFG Life dan Pencapaian Tahun 2024
Table of IFG Life RBC KPI Target and Achievement by 2024

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Target KPI PMN review IDR3.56 trillion	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Pencapaian Tahun 2024 Kajian PMN Rp3,56 triliun Achievement Year 2024 PMN review IDR3.56 trillion
>135%	182,67%	135,31%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Life Triwulan IV Tahun 2024
Source: IFG Life Realization Report on the Use of Additional Capital from PMN to IFG Life in the fourth quarter of 2024

Hal ini menunjukkan pengelolaan aset dan liabilitas yang *prudent*, namun tetap memenuhi kewajiban sebagai penerima polis pengalihan Jiwasraya dengan memperhatikan faktor penting lainnya, seperti prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

This shows prudent management of assets and liabilities, while still fulfilling the obligations as the recipient of Jiwasraya's transfer policy by taking into account other important factors, such as the principles of good corporate governance and risk management.

Realisasi Expense Ratio IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2024 (*unaudited*), pencapaian *expense ratio* IFG Life mencapai 15,90%, yang berarti lebih baik dari target pada KPI PMN tahun 2024 yang sebesar 17,90%.

IFG Life Expense Ratio Realization

Based on IFG Life's 2024 Financial Statements (unaudited), IFG Life's expense ratio achievement reached 15.90%, which is better than the target in the 2024 PMN KPI of 17.90%.

Tabel Target KPI Expense Ratio IFG Life Periode Tahun 2024
Table of IFG Life Expense Ratio KPI Target for the Period of 2024

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Target KPI PMN review IDR3.56 trillion	**Realisasi Tahun 2024** Realization in 2024	**Pencapaian Tahun 2024 Kajian PMN Rp3,56 triliun** Achievement Year 2024 PMN review IDR3.56 trillion
17,90%	15,90%	112,60%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Life Triwulan IV Tahun 2024
Source: IFG Life Realization Report on the Use of Additional Capital from PMN to IFG Life for the Fourth Quarter of 2024

Realisasi beban usaha yang lebih rendah dari perencanaan didukung oleh pemantauan penggunaan biaya secara disiplin serta efisiensi biaya yang dilakukan IFG Life di 2024. Pencapaian premi neto konsolidasi yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam Kajian Bersama PMN Rp3,56 triliun juga menghasilkan realisasi *expense ratio* yang lebih baik dari proyeksi. Sampai dengan saat ini, IFG Life masih dalam tahapan proses membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan operasional, pengembangan bisnis baru, serta penyelesaian permasalahan Jiwasraya yang memerlukan biaya cukup signifikan.

The lower-than-planned operating expense realization was supported by disciplined monitoring of cost utilization as well as IFG Life's cost efficiency in 2024. The achievement of higher consolidated net premium compared to the projection in the Joint PMN Review of IDR3.56 trillion also resulted in a better than projected expense ratio realization. To date, IFG Life is still in the process of building infrastructure to support operational activities, developing new businesses, and resolving Jiwasraya issues which require significant costs.

Realisasi YoI IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2024 (*unaudited*), pencapaian YoI IFG Life (konsolidasi) periode *year to date* tahun 2024 sebesar 5,81%, lebih tinggi dibandingkan target pada KPI PMN 2024 yang sebesar 5,40%. Realisasi *YoI* ini antara lain didukung oleh realisasi *capital gain* yang bersifat *one-off*.

IFG Life YoI Realization

Based on IFG Life's 2024 Financial Statements (unaudited), IFG Life's YoI achievement (consolidated) for the year to date period of 2024 amounted to 5.81%, higher than the target in the KPI PMN 2024 of 5.40%. This YoI realization is partly supported by the realization of one-off capital gains.

Perhitungan YoI tersebut dihasilkan dari komposisi investasi dan hasil investasi sebagai berikut:

The YoI calculation is generated from the investment composition and investment income as follows:

Tabel Komposisi Aset Investasi dan Hasil Investasi Tahun 2024
Table of Investment Asset Composition and Investment Income in 2024

(dalam juta rupiah)
(in million rupiah)

Hasil Investasi s.d Tahun 2024 (*Unaudited*) Investment Income until 2024 (Unaudited)	**Rata-Rata Komposisi Investasi s.d Tahun 2024 (*Unaudited*)** Average Investment Composition until 2024 (Unaudited)
1.732.891	30.142.549

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2024
Source: IFG Life Realization Report on the Use of Additional Capital from PMN to IFG for the Fourth Quarter of 2024

Tabel Realisasi *YoI* IFG Life Tahun 2024
Table of IFG Life YoI Realization in 2024

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Target KPI PMN review IDR3.56 trillion	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Pencapaian Tahun 2024 Kajian PMN Rp3,56 triliun Achievement in 2024 PMN review IDR3.56 trillion
>5,40%	5,81%	107,67%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari P
Source: Report on the Realization of the Use of Additional Capital of IFG Life Sourced from P

IFG Life akan tetap berupaya meningkatkan *yield* dari aset investasi yang dimiliki dengan melakukan optimalisasi hasil investasi melalui *rebalancing* atas aset-aset dengan likuiditas rendah dan tidak memberikan imbal hasil optimal, baik aset finansial maupun tanah dan bangunan. Optimalisasi dilakukan melalui skema penjualan, kemudian hasil penjualannya ditempatkan pada instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih baik. *Rebalancing* aset melalui skema penjualan tersebut dilakukan secara *prudent* dengan tetap memperhatikan kondisi pasar serta ketentuan regulasi yang berlaku di internal dan eksternal.

IFG Life will continue to increase the yield of its investment assets by optimizing investment income through rebalancing of assets with low liquidity and not providing optimal returns, both financial assets and land and buildings. Optimization is through a sales scheme, then the proceeds are placed in investment instruments that provide better returns. Asset rebalancing through the sale scheme is carried out in a prudent manner while taking into account market conditions and applicable internal and external regulations.

Di samping memberikan manfaat pada kinerja IFG Life dan IFG secara keseluruhan, PMN yang diberikan oleh Pemerintah juga memberikan sejumlah manfaat bagi:

1. Masyarakat:
   a. menyelamatkan masyarakat yang merupakan pemegang polis Jiwasraya dari dampak kerugian yang lebih besar akibat hilangnya tabungan atau pendapatan di masa depan atau masa pensiun, hilangnya proteksi atas perlindungan jiwa, dan dampak psikis akibat kerugian yang dialami.;
   b. menyediakan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik melalui produk dan jasa asuransi yang terintegrasi;
   c. meningkatkan daya beli masyarakat akibat bertambahnya angkatan kerja yang diserap oleh IFG Life serta banyaknya pemegang polis yang diselamatkan melalui proses pengalihan polis kepada IFG Life; dan
   d. meningkatkan literasi masyarakat atas asuransi jiwa dan kesehatan.
2. Pemerintah dan lembaga lainnya:
   a. memberikan wujud nyata atas komitmen Pemerintah dalam penyelesaian permasalahan yang dialami Jiwasraya;
   b. meningkatkan reputasi BUMN di sektor asuransi; dan
   c. membantu mendorong peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya atas asuransi jiwa dan kesehatan.
3. Industri asuransi jiwa:
   a. mengembalikan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi jiwa di Indonesia, khususnya pada perusahaan asuransi milik Pemerintah;
   b. menciptakan persaingan yang sehat di industri asuransi jiwa serta meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk; dan
   c. membantu akselerasi penyehatan asuransi jiwa di tingkat nasional.

Aside from benefiting IFG Life and IFG's overall performance, the PMN provided by the government also provides a number of benefits for:

1. Public:
   a. saving people who are Jiwasraya policyholders from the impact of greater losses due to loss of savings or income in the future or retirement, loss of protection for life protection, and psychological impact due to losses experienced.;
   b. providing better protection and services through integrated insurance products and services;
   c. increasing the purchasing power of the community due to the increase in the workforce absorbed by IFG Life and the number of policyholders saved through the process of transferring policies to IFG Life; and
   d. increasing public literacy on life and health insurance.
2. Government and other institutions:
   a. providing a tangible manifestation of the Government's commitment to resolving the problems experienced by Jiwasraya;
   b. enhancing the reputation of SOEs in the insurance sector; and
   c. helping to encourage an increase in the level of public financial literacy and inclusion, especially on life and health insurance.
3. Life insurance industry:
   a. restoring public confidence in the life insurance industry in Indonesia, especially in Government-owned insurance companies;
   b. creating healthy competition in the life insurance industry and improving service quality and product innovation; and
   c. helping accelerate the restructuring of life insurance at the national level.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PELAKSANAAN PENUGASAN PEMERINTAH UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat penugasan untuk penjaminan KUR dan program PEN yang dijalankan oleh IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dan fundamental melalui pemberian PMN dengan total sebesar Rp6 triliun yang dialokasikan kepada IFG. Dana PMN tersebut efektif dicairkan pada Februari 2021 dan selanjutnya diteruskan kepada Askrindo dan Jamkrindo sebagai penambahan modal masing-masing sebesar Rp3 triliun.

Penambahan modal ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan Askrindo dan Jamkrindo guna mendukung program PEN, tetapi secara krusial juga meningkatkan kapasitas Askrindo dan Jamkrindo dalam menjalankan mandat pemberdayaan UMKM, terutama dalam program KUR dan Kredit Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (KMK PEN). Suntikan dana strategis ini terbukti fundamental dalam mendukung berbagai capaian signifikan kedua entitas penjaminan tersebut.

Hingga akhir tahun 2024, dukungan PMN ini telah berkontribusi signifikan terhadap kemampuan Askrindo dan Jamkrindo untuk, secara kumulatif sejak tahun 2007, menjangkau total lebih dari 65 juta unit UMKM – dengan rincian Askrindo telah menjangkau 34.261.138 unit UMKM dan Jamkrindo sebanyak 30.749.329 unit UMKM. Lebih lanjut, upaya ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang masif, mencapai total lebih dari 100 juta tenaga kerja, di mana Askrindo berkontribusi pada penyerapan 58.969.200 tenaga kerja dan Jamkrindo sebanyak 41.276.154 tenaga kerja.

Berkat dukungan PMN yang diterima, hingga akhir tahun 2024 IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo berhasil mencatat sejumlah pencapaian di berbagai aspek sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, Askrindo dan Jamkrindo ditunjuk sebagai lembaga penjaminan KUR. Adapun, target penyaluran KUR nasional dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS FOR THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ASSIGNMENTS FOR PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AND THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM

In order to support the implementation of the assignment mandate for KUR guarantees and the PEN program by IFG through Askrindo and Jamkrindo, the Government of Indonesia has taken a strategic and fundamental step by providing PMN with a total of IDR6 trillion allocated to IFG. The PMN funds were effectively disbursed in February 2021 and then transferred to Askrindo and Jamkrindo as additional capital of IDR3 trillion each.

This additional capital not only aims to improve Askrindo's and Jamkrindo's capital structure to support the PEN program, but crucially also to increase Askrindo's and Jamkrindo's capacity to carry out the mandate of empowering MSMEs, especially in the KUR program and the National Economic Recovery Working Capital Credit (KMK PEN). This strategic funding injection has proven fundamental in supporting the significant achievements of the two guarantee entities.

By the end of 2024, this PMN support has significantly contributed to Askrindo and Jamkrindo's ability to, cumulatively since 2007, reach a total of more than 65 million MSME units - with Askrindo reaching 34,261,138 MSME units and Jamkrindo 30,749,329 MSME units. Furthermore, these efforts have also contributed to massive employment, reaching a total of more than 100 million workers, with Askrindo contributing to the absorption of 58,969,200 workers and Jamkrindo 41,276,154 workers.

Due to the PMN support received, until the end of 2024 IFG through Askrindo and Jamkrindo managed to record a number of achievements in various aspects as follows:

Realization of KUR Disbursement in 2020 to 2024

Based on the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 188/2015 on the Determination of People's Business Credit and People's Business Credit Guarantee Companies, Askrindo and Jamkrindo are appointed as KUR guarantee institutions. The national KUR distribution target from 2020 to 2024 is as follows:

Tabel Target Penjaminan KUR Askrindo dan Jamkrindo Tahun 2020 s.d. 2024
Table of KUR Guarantee Targets of Askrindo and Jamkrindo from 2020 to 2024

(dalam triliun Rupiah)
(in trillion Rupiah)

Lembaga Penjamin Guarantor Institution	2020	2021	2022	2023	2024
Askrindo	99	110	125	142,5	162,5
Jamkrindo	99	110	125	142,5	162,5
Total	**198**	**220**	**250**	**285**	**325**

Sumber: Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2020
Source: Joint Study on the Addition of State Equity Participation to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2020

Realisasi penyaluran KUR nasional IFG tahun 2024 mencapai 81,86% dari target yang telah ditetapkan pada kajian bersama. Perlu diketahui, realisasi penjaminan KUR dipengaruhi oleh penyaluran KUR dari bank pelaksana. Adapun perhitungan realisasi penjaminan KUR adalah sebagai berikut:

The realization of the national KUR distribution IFG in 2024 reached 81.86% of the target set in the joint study. It should be understood that the realization of KUR guarantees depends on the distribution of KUR by the implementing banks. The calculation of the realization of KUR guarantees is as follows:

Tabel Target vs Realisasi Penjaminan KUR IFG Periode Tahun 2024
Table of Target vs Realization of IFG KUR Guarantee Period 2024

(dalam triliun Rupiah)
(in trillion Rupiah)

Target Tahun 2024 Target in 2024	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024	Persentase Pencapaian Tahun 2024 Percentage of Achievement in 2024

Sumber: Analisis IFG
Source: IFG Analysis

Adapun, realisasi IJP, klaim, subrogasi, dan rasio klaim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The realization of IJP, claims, subrogation, and claim ratios during 2024 are as follows:

Tabel Realisasi IJP, Klaim, Subrogasi, dan Rasio Klaim Tahun 2024
Table of IJP Realization, Claims, Subrogation, and Claims Ratio in 2024

Uraian Description	Realisasi s.d. Tahun 2024 Realization until 2024	IJP (Rp juta) IJP (IDRmillion)	Klaim (Rp juta) Claim (IDRmillion)	Subrogasi (Rp juta) Subrogation (IDRmillion)	Rasio Klaim Claims Ratio (%)	NPG (%)
KUR	Askrindo	3.816.296	4.609.170	1.503.478	120,78	5,31
	Jamkrindo	5.031.259	4.541.246	1.361.079	90,26	4,57
PEN	Askrindo	-	280.829	120.322	-	-
	Jamkrindo	-	268.449	125.172	-	-

Sumber: Analisis IFG
Source: IFG Analysis

Pencapaian *Gearing Ratio*

Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan UMKM sehingga sektor UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Penguatan permodalan tersebut dilakukan melalui penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo melalui IFG sebagai induk perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi *gearing ratio* Askrindo sebesar 8,13 kali dan Jamkrindo sebesar 10,25 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Gearing Ratio Achievement

Considering the importance of MSME development as the main pillar of the national economy, it is necessary to strengthen the capital of credit guarantee institutions to increase MSME confidence so that the MSME sector is able to grow into a sustainable business with a larger scale. The capital strengthening is done through the addition of PMN to Askrindo and Jamkrindo through IFG as the holding company. Until the end of 2024, the realization of Askrindo's gearing ratio is 8.13 times and Jamkrindo is 10.25 times, with the following details:

Tabel Pencapaian *Gearing Ratio*
Table of Gearing Ratio Achievement

Index	Formula	Target KPI	Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024
Gearing Ratio Askrindo	*Outstanding* Penjaminan / Ekuitas Outstanding Guarantee/Equity	<20x	8,13x
Gearing Ratio Jamkrindo			10,25x

Di samping memberikan manfaat pada kinerja Askrindo dan Jamkrindo serta IFG secara keseluruhan, PMN yang diberikan oleh Pemerintah juga memberikan sejumlah manfaat, khususnya bagi masyarakat, antara lain:

1. melalui pelaksanaan program penjaminan KUR dan KMK PEN oleh Jamkrindo dan Askrindo, maka diproyeksikan jumlah UMKM yang dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo akan semakin meningkat, baik dari sisi unit usaha yang dijamin (debitur) maupun penyerapan tenaga kerja; dan
2. melalui penjaminan KUR dan penjaminan KMK PEN oleh Jamkrindo dan Askrindo kepada UMKM yang feasible *but not bankable* atau tidak mempunyai agunan tambahan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan perbankan, maka UMKM tersebut dapat mengakses kredit sehingga pengusaha UMKM dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.

In addition to providing benefits to the performance of Askrindo and Jamkrindo and IFG as a whole, the PMN provided by the Government also provides a number of benefits, especially for the community, among others:

1. through the implementation of the KUR and National Economic Recovery Working Capital Credit (KMK PEN). guarantee programs by Jamkrindo and Askrindo, it is projected that the number of MSMEs guaranteed by Jamkrindo and Askrindo will increase, both in terms of guaranteed business units (debtors) and employment; and
2. through KUR guarantees and KMK PEN guarantees by Jamkrindo and Askrindo to MSMEs that are feasible but not bankable or do not have sufficient additional collateral in accordance with banking regulations, these MSMEs can access credit so that MSME entrepreneurs can operate and develop their businesses.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Untuk menjaga tingkat biaya dana pada level yang efisien, Perusahaan memadukan modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas) sebagai struktur modalnya. Perusahaan senantiasa menjaga struktur modal agar tetap optimal dalam rangka menunjang pengembangan usaha Perusahaan.

Di tahun 2024, komposisi struktur modal Perusahaan terdiri dari liabilitas sebesar 71,05% dan ekuitas sebesar 28,95%, di mana komposisi ini mengalami perubahan dari tahun 2023 yaitu 2,73% Liabilitas sedangkan ekuitas 2,91%. Adapun rincian struktur modal Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY

To maintain the cost of funds at an efficient level, the Company combines own capital (equity) and debt (liabilities) as its capital structure. The Company always maintains an optimal capital structure in order to support the Company's business development.

In 2024, the composition of the Company's capital structure consisted of liabilities of 71.05% and equity of 28.95%, where this composition has changed from 2023, with 2.73% liabilities while equity is 2.91%. The details of the Company's capital structure is shown as follows:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in billion Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan Growth	
	Nominal	Komposisi Composition (%)	Nominal	Komposisi Composition (%)	Nominal	Persentase Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**95.308**	**71,05%**	97.982	71,01%	(2.674)	-2,73%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**38.838**	**28,95%**	40.001	28,99%	(1.163)	-2,91%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**134.146**	**100,00%**	137.983	100,00%	(3.837)	-2,78%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Untuk menjaga keseimbangan dan menyesuaikan struktur permodalan, baik *Holding* maupun Anggota *Holding*, berbagai langkah dapat dilakukan, seperti menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, menerbitkan saham atau obligasi baru, serta menjual aset guna mengurangi liabilitas. Sejalan dengan praktik di industri sejenis, Perusahaan dan Anggota *Holding* memantau struktur modalnya melalui rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total liabilitas terhadap modal, di mana modal mencakup seluruh komponen ekuitas. Selain itu, Perusahaan juga telah merancang struktur permodalan yang optimal guna memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

To maintain balance and adjust the capital structure of both the holding and the holding members, various steps can be taken, such as adjusting the amount of dividends paid to shareholders, issuing new shares or bonds, and selling assets to reduce liabilities. In line with industry practice, the Company and its subsidiaries monitor their capital structure through the debt-to-capital ratio. This ratio is calculated by dividing total liabilities by capital, where capital includes all equity components. In addition, the Company has also designed an optimal capital structure to maximize overall corporate value.

.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZATION

Investasi barang modal (*capital expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk melakukan pembelian sejumlah aset, maupun perbaikan terhadap aset sehingga dapat memberikan nilai tambah di kemudian hari. Realisasi investasi barang modal merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Investment in capital goods (capital expenditure) is a cost incurred by the Company to purchase a number of assets, as well as improvements to assets so that they can provide added value in the future. Realization of investment in capital goods is one of the important things to do in developing business activities.

Per 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan realisasi investasi barang modal sebesar Rp503 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp56 miliar atau 11,11% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp558 miliar. Adapun realisasi investasi barang modal Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2024, the Company has realized investment in capital goods of IDR 503 billion. This figure shows a decrease of IDR 56 billion or 11.11% compared to 2023 which amounted to IDR 558 billion. The realization of the Company's investment in capital goods is as follows:

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	**Nilai** Value
Software, Program dan Aset Tidak Berwujud Software, Programs and Intangible Assets	175
Tanah, Bangunan, Rumah Dinas dan Renovasi Kantor Land, Building, Office House and Office Renovation	166
Perabot Kantor, Mesin, inventaris Kantor dan Perlengkapan Lainnya Office Furniture, Machinery, Office Inventory and Other Equipment	80
Komputer dan Perangkatnya Computers and Devices	71
Kendaraan Vehicles	11
Jumlah Total	**503**

Perbandingan nilai investasi barang modal Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Comparison of the Company's capital goods investment value in the last 2 (two) years is shown as follows:

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	**2024**	**2023**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal	**Persentase** Percentage **(%)**
Realisasi Investasi Barang Modal Capital Goods Investment Realization	**503**	558	55	-11,11%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2024, sampai dengan tanggal laporan auditor independen pada 30 April 2025.

1. Perubahan struktur pemegang saham
   Pada bulan Maret 2025, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 ("PP No. 15/2025") yang merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. PP No. 15/2025 mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam rangka pendirian Holding Operasional dengan mengalihkan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk sebanyak 93.719.536 lembar saham Seri B pada Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta per lembar saham dengan nilai total Rp93.719.536 juta.

   Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-72/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

The following information and material facts occurred between the end of the reporting period of December 31, 2024, and the date of the independent auditor's report on April 30, 2025.

1. Changes in shareholder structure
   In March 2025, the Government issued Government Regulation No. 15 of 2025 ("PP No. 15/2025") which is an implementing regulation of Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2023 on State-Owned Enterprises. Government Regulation No. 15/2025 regulates the addition of state capital participation into the share capital of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia in the context of establishing an Operational Holding by transferring all Series B and/or Series C shares owned by the Republic of Indonesia in State-Owned Enterprises, including 93,719,536 Series B shares in the Company with a nominal value of Rp1 million per share with a total value of IDR 93,719,536 million.

   Based on the Decree of the Shareholders of the Company Number SK-72/MBU/03/2025 dated March 22, 2025 concerning Amendments to the Articles of Association, the composition of the Company's shareholders is as follows:

	Jumlah Saham Number of Shares	**Persentase Kepemilikan (%)** Shareownership Percentage (%)	**Nilai (dalam jutaan Rupiah)** Value (in million Rupiah)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares	1	0,000001%	1
PT Biro Klasifikasi Indonesia			
Saham Seri B Series B Shares	93.719.536	99,999999%	93.719.536
Jumlah Saham Total Shares	**93.719.537**	**100,000000%**	**93.719.537**

2. Perubahan Susunan Komite Audit
   Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 tanggsal 11 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

2. Changes to the Audit Committee
   Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 dated March 11, 2025, concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee of the Company is as follows:

Ketua	: Mohamad Fauzi M Ichsan
Anggota	: Ika Istakariana
Anggota	: Masyita Crystallin
Anggota	: Sumiyati
Anggota	: Sartono

3. Pengalihan Jiwasraya
   Sampai dengan bulan April 2025, IFG Life menerima pengalihan portfolio pertanggungan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan rincian liabilitas manfaat polis masa depan sebesar Rp8.573 juta.

4. Pencabutan Izin Usaha pada Entitas Anak
   Pada tanggal 16 Januari 2025, PT Sarana Riau Ventura mendapatkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-1/D.06/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Modal Ventura PT Sarana Riau Ventura.

   Pada tanggal 5 Februari 2025, PT Sarana Sulut Ventura mendapatkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/D.06/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Modal Ventura PT Sarana Sulut Ventura.

5. Penerimaan Pengembalian Restitusi Pajak
   Pada tanggal 20 Desember 2024, Bahana Sekuritas (BS) menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan tahun 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp2.803 juta. BS menerima pengembalian restitusi dari SKPLB tersebut sebesar Rp2.803 pada tanggal 23 Januari 2025.

   Pada tanggal 19 Desember 2024, BS menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Desember 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp7.256 juta. BS menerima pengembalian restitusi dari SKPLB PPN tersebut sebesar Rp7.183 juta pada tanggal 21 Januari 2025, setelah dikurangi kompensasi utang pajak lainnya sebesar Rp73 juta.

Chairman: Mohamad Fauzi M Ichsan
Member: Ika Istakariana
Member: Masyita Crystallin
Member: Sumiyati
Member: Sartono

3. Transfer of Jiwasraya
   As of April 2025, IFG Life has received the transfer of the insurance portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) with details of future policy benefit liabilities amounting to IDR 8,573 million.

4. Revocation of Business License for a Subsidiary
   On January 16, 2025, PT Sarana Riau Ventura received a Decision Letter from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-1/D.06/2025 concerning the Revocation of the Business License in the Field of Venture Capital Company for PT Sarana Riau Ventura.

   On February 5, 2025, PT Sarana Sulut Ventura received a Decision Letter from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-3/D.06/2025 concerning the Revocation of the Business License in Venture Capital Company PT Sarana Sulut Ventura.

5. Receipt of Tax Refund
   On December 20, 2024, Bahana Sekuritas (BS) received a Tax Overpayment Decision Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax for the year 2023 with an overpayment amount of IDR 2,803 million. BS received the tax refund from the SKPLB in the amount of IDR 2,803 on January 23, 2025.

   On December 19, 2024, BS received the VAT Overpayment Tax Assessment Notice (SKPLB) for the December 2023 tax period with an overpayment amount of IDR 7,256 million. BS received a refund of the VAT refund from the VAT SKPLB in the amount of IDR 7,183 million on January 21, 2025, after deducting other tax debt compensation of IDR 73 million.

PERNYATAAN TENTANG PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN SECARA TERINTEGRASI

STATEMENT ON THE ISSUANCE OF INTEGRATED ANNUAL REPORT

Perusahaan telah menyusun Laporan Tahunan secara terintegrasi dengan menyajikan gambaran lengkap mengenai kinerja historisnya. Hal ini dapat dilihat dalam bab Ikhtisar Keuangan, yang menampilkan data keuangan selama lima tahun terakhir dalam bentuk tabel. Selain itu, perbandingan antara kinerja keuangan dan operasional juga disajikan melalui grafik untuk dua tahun terakhir.

Dalam hal risiko, peluang, dan prospek bisnis ke depan, Perusahaan mengungkapkan analisisnya berdasarkan kondisi makroekonomi global dan nasional, serta menetapkan target kuantitatif untuk tahun mendatang pada sub Prospek Usaha. Informasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memahami arah strategis Perusahaan serta kemajuan yang dicapai dalam menciptakan nilai berkelanjutan.

The Company has prepared an integrated Annual Report that presents a complete picture of its historical performance. This is signified in the Financial Highlights chapter, which displays financial data for the past five years in tabular form. In addition, a comparison between financial and operational performance is also presented through graphs for the last two years.

In terms of risks, opportunities and future business prospects, the Company discloses its analysis based on global and national macroeconomic conditions, and sets quantitative targets for the coming year in the Business Outlook sub-section. This information is expected to provide insights for shareholders and stakeholders in understanding the Company's strategic direction and progress made in creating sustainable value.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION AND PROJECTION FOR THE NEXT YEAR

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2024

Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Perumusan Target Tahun 2024

Perusahaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 dengan memperhatikan sejumlah asumsi, antara lain:

1. Ekonomi nasional diperkirakan tumbuh sebesar 5,2%;
2. Laju inflasi nasional diperkirakan berada di bawah level 2,8%;
3. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia akan berada pada 6,7% di akhir tahun;
4. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada akhir tahun diproyeksikan di kisaran Rp15.000;
5. Harga minyak mentah di Indonesia diperkirakan berada di kisaran USD80/barel pada akhir tahun;
6. *Lifting* minyak diperkirakan sebanyak 625 barel per hari;
7. *Lifting* gas diperkirakan sebanyak 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Pencapaian Realisasi Tahun 2024 terhadap Target

ACHIEVEMENT OF 2024 TARGET

Assumptions Used in Formulating the 2024 Target

The Company has prepared the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 by taking into account a number of assumptions, among others:

1. The national economy is expected to grow by 5.2%;
2. The national inflation rate is expected to be below the 2.8% level;
3. Bank Indonesia's benchmark interest rate will stand at 6.7% at the end of year;
4. The Rupiah exchange rate against the US Dollar at the end of the year is projected to be in the range of IDR15,000;
5. Crude oil prices in Indonesia are expected to be in the range of USD 80/barrel by the end of the year;
6. Oil lifting is estimated at 625 barrels per day;
7. Gas lifting is estimated at 1,033 thousand barrels of oil equivalent per day.

Achievement of 2024 Realization against Target

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	**Realisasi 2024** 2024 Realization	**Target 2024**	**Pencapaian Realisasi terhadap Target** Achievement of Realization against Target **(%)**
Pendapatan *Underwriting* Underwriting Income	28.297	29.346	96,43%
Hasil *Underwriting* Underwriting Result	1.768	6.623	26,69%
(Rugi)/ Laba Bersih Tahun Berjalan Net (Loss)/ Profit for the Year	(387)	3.279	-11,80%
Jumlah Aset Total Assets	132.384	152.578	86,76%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	95.308	105.339	90,48%
Jumlah Ekuitas Total Equity	38.838	47.239	82,22%

PROYEKSI TAHUN 2025
2025 PROJECTION

Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Perumusan Proyeksi Tahun 2025

Pada penyusunan RKAP 2025, IFG menggunakan asumsi makroekonomi yang berasal dari internal IFG yang dikeluarkan oleh IFG Progress, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% pada tahun 2025, suku bunga SUN tenor 10 tahun 6,62% di akhir periode 2025, inflasi 2,72% sepanjang tahun 2025 dan nilai tukar Rp15.437/USD untuk tahun 2025. Sebagai referensi tambahan, terdapat pula asumsi makroekonomi yang tertera pada APBN 2025, proyeksi dari ekonom dan analis pasar yang diagregatkan dari Bloomberg, serta *outlook* yang disajikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).

Assumptions Used in the Formulation of 2025 Projections

In the preparation of the 2025 RKAP, IFG utilized IFG's internal macroeconomic assumptions issued by IFG Progress, namely economic growth of 5.1% in 2025, 10-year SUN interest rate of 6.62% at the end of the 2025 period, inflation of 2.72% throughout 2025 and exchange rate of IDR15,437/USD for 2025. As additional references, there are also macroeconomic assumptions stated in the 2025 State Budget, projections from economists and market analysts aggregated from Bloomberg, and outlooks presented by the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB).

	PDB, y/y		Inflation, y/y		Nilai Tukar		Yield SBN 10 Tahun	
	(in %)		(in %, EoP)		(in Rp, EoP)		(%, EoP)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(Outlook 2024/RAPBN 2025)	5,1	5,2	2,7	2,5	16.000	16.000	6,9	7,0
Bloomberg Consensus (*Average*)	5,0	5,1	2,6	2,7	15.525	15.275	6,6	6,3
IMF	5,0	5,1	2,34	2,54	-	-	-	-
World Bank	5,0	5,1	-	-	-	-	-	-
IFG Progress (as of September 2024)	4,9-5,0	5,1	2,7-2,8	2,72	15.000-15.400	15.437	6,6-7,1	6,62

Sumber: APBN, World Bank, IMF, IFG Progress, Bloomberg
Source: State Budget, World Bank, IMF, IFG Progress, Bloomberg

Selain itu, IFG juga mengacu pada asumsi mikro yang bersumber dari RAPBN, dengan proyeksi inflasi sebesar 2,5%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, serta nilai tukar Rp16.100 per dolar AS. Sementara itu, untuk JIBOR, IFG mempertimbangkan analisis dari IFG Progress tentang hubungan tingkat suku bunga Fed, Bank Indonesia (BI), dan *domestic market rates*/JIBOR yang dielaborasikan pada IFG *Progress Digest - Issue* 14 (*Special Issue on Key Rates' Movements*).

In addition, the IFG also refers to micro assumptions sourced from the Draft State Budget, with projected inflation of 2.5%, economic growth of 5.2%, and an exchange rate of IDR16,100 per US dollar. Meanwhile, for JIBOR, the IFG considers analysis from IFG Progress on the relationship between Fed, Bank Indonesia (BI), and domestic market rates/JIBOR elaborated in IFG Progress Digest - Issue 14 (Special Issue on Key Rates' Movements).

IFGP *Forecast*	*Current* (24/09/24)	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	FY '26
IFGP Forecast as of September 2024		6.40 – 6.65	6.15 – 6.65	5.90 – 6.40	5.65 – 6.15	5.65 – 6.15	5.40 – 6.15
Adjusted Bloomberg Forecasts	6.65	6.30 – 6.60	5.60 – 6.30	5.40 – 5.75	5.40 - 5.75	4.75 – 5.50	4.75 – 5.50
Mirae Sekuritas Forecast		6.65	5.95	5.75	5.15	5.10	5.00

Sumber: IFGP Research, Bloomberg, Mirae Sekuritas
Source: IFGP Research, Bloomberg, Mirae Sekuritas

Perbandingan Proyeksi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024

Comparison of 2025 Projection to 2024 Realization

(dalam miliar Rupiah)
(in billion Rupiah)

Uraian Description	**Realisasi 2024** 2024 Realization	**Target 2025** 2025 Target	**Pencapaian Realisasi terhadap Target** Achievement of Realization against Target **(%)**
Hasil Investasi Bersih Net Investment Income	5.500	5.840	94,18%
Hasil Keuangan Bersih Net Financial Result	438	3.258	13,44%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(616)	2.269	-27,15%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	(387)	1.312	-29,50%
Jumlah Aset Total Assets	132.384	139.435	94,94%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	95.308	97.428	97,82%
Jumlah Ekuitas Total Equity	38.838	42.007	92,46%

ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

Sebagai Perusahaan holding asuransi, penjaminan, dan investasi memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hingga 31 Desember 2024, jumlah pajak dibayar di muka dan utang pajak Perusahaan sebagai berikut:

As an insurance, guarantee, and investment holding company, we are highly committed to complying with all applicable laws and regulations, including tax regulations. As of December 31, 2024, the Company's prepaid taxes and tax liabilities were as follows:

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

No.	Jenis Pajak Type of Tax	2024	2023*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal	Persentase Percentage (%)
1.	**Pajak Dibayar di Muka** Prepaid Tax				
A.	Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	**194.279**	200.303	(6.024)	-3,01%
B.	Pajak Lain-lain Other Taxes	**22.274**	15.541	6.733	43,32%
	Total Pajak Dibayar di Muka Total Prepaid Tax	**216.553**	**215.844**	**709**	**0,33%**
2.	**Utang Pajak** Tax Payable				
A.	Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	**289.185**	197.504	91.681	46,42%
B.	Pajak Lain-lain Other Taxes	**221.781**	646.619	(424.838)	-65,70%
	Total Utang Pajak Total tax payable	**510.966**	**844.123**	**(333.157)**	**-39,47%**

*)Disajikan Kembali
*)Restated

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAMS (ESOP/MSOP)

IFG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100,00% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP) yang dilakukan oleh Perusahaan.

IFG is a State-Owned Enterprise (SOE) whose 100.00% shares are owned by the Government. Thus, there is no information related to Employee (ESOP) and/or Management (MSOP) Share Ownership Program conducted by the Company.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION ABOUT THE REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Per 31 Desember 2024, IFG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100,00% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di bursa efek manapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, baik total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, IFG is a State-Owned Enterprise (SOE) whose 100.00% shares are owned by the Government and the Company has never conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange. Therefore, there is no information related to the realization of the use of proceeds from the public offering, either the total proceeds, the plan for the use of funds, the details of the use of funds, the balance of funds, or the date of GMS approval for changes in the use of funds that can be presented in this Annual Report.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER OF BUSINESSES, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Di tahun 2024, tidak terdapat informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang berpengaruh secara material baik terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.

In 2024, there is no material information regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring that materially affects both the financial performance and operational performance of the Company. Thus, information related to these matters cannot be submitted.

Referring to the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 17 / POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities; a transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Company's equity.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

IFG telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari kebijakan akuntansi penting terkait hubungan afiliasi (Pihak Berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024.

Uraian terkait saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dimuat pada Laporan Keuangan Audit yang menjadi bagian yang terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, pada Catatan 51.

IFG has disclosed all the nature of and transactions with related parties as part of the significant accounting policies related to affiliation (Related Parties), which can be found in the 2024 Consolidated Financial Statements.

A description of balances and transactions with related parties has been provided in the Audited Financial Statements which form an integral part of this Annual Report, in Note 51.

DEFINISI PIHAK BERELASI

Pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau
   c. Merupakan personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1);
   d. orang yang diidentifikasi, dalam butir (1) (a) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

DEFINITION OF RELATED PARTY

Related parties are persons or entities related to the reporting entity as follows:

1. A person or their immediate family member is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the Company and its subsidiaries;
   b. Have significant influence over the Company and its subsidiaries; or
   c. Represents key management personnel of the Company and its subsidiaries.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets the following conditions:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, subsidiaries and subsequent subsidiaries are related to other entities);
   b. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of a reporting entity or an entity related to a reporting entity;
   c. An entity controlled or jointly controlled by a person identified in item (1);
   d. the person identified, in item (1)(a) as having significant influence over the entity or a member of the key management in the entity (or a parent of the entity).

3. Definisi pihak-pihak berelasi untuk Grup adalah sebagai berikut:
   a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
   b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham tunggal Perusahaan. Dengan demikian, entitas yang merupakan Pihak-pihak yang Berelasi bagi Perusahaan adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya. Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai manajemen kunci juga menjadi pihak berelasi bagi Perusahaan.

Alasan Dilakukannya Transaksi Pihak Berelasi dan Kewajaran Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak berelasi secara menyeluruh dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, hal itu sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang Pengungkapan Pihak Pihak Berelasi. Transaksi dengan Pihak Berelasi yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha melalui masing-masing Anggota *Holding* dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkesinambungan.

Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*)

Adapun transaksi antara Perusahaan dengan BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak pihak Berelasi". Dalam hal ini, Direksi memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

3. The definition of related parties for the Group is as follows:
   a. Governments that have control, or joint control, or significant influence, over the reporting entity; and
   b. Other entities are related parties because they are controlled or jointly controlled, or significantly influenced by the same government as the reporting entity and the other entity.

The Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia is the sole shareholder of the Company. Thus, entities that are Related Parties to the Company are entities controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government, namely State-Owned Enterprises (SOEs) and their subsidiaries. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors as key management are also related parties to the Company.

Reasons for Related Party Transactions and Fairness of Transactions

Transactions conducted by the Company with related parties as a whole are carried out with due regard to the precautionary principle, it is in accordance with generally accepted business practices and has complied with PSAK No. 7 (Revised 2014) concerning Related Party Disclosures. Transactions with related parties by the Company are business activities carried out in order to generate business income through each subsidiary and are conducted routinely, recurringly, and / or continuously.

Statement of the Board of Directors that related party transactions have gone through adequate procedures to ensure that related party transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arms-length principle.

The transactions between the Company and SOEs are treated as transactions with related parties in accordance with PSAK 7 "Related Party Disclosures". In this case, the Board of Directors has a role to ensure that related party transactions have gone through adequate procedures and are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arm's-length principle.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melakukan Prosedur yang Memadai untuk Memastikan bahwa Transaksi Afiliasi Dilaksanakan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Berlaku Umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(Arms-Length Principle)*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No.7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Adapun kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Mekanisme *review* atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pernyataan terkait Pendapatan Usaha yang Dijalankan secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Pendapatan usaha IFG berasal dari aktivitas operasional inti yang dijalankan secara rutin, berulang, dan berkelanjutan, mencerminkan kestabilan serta konsistensi model bisnis dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Keberlanjutan pendapatan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat. Lebih jauh, sebagai bagian dari strategi perusahaan, IFG juga mengoptimalkan transaksi afiliasi yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, guna meningkatkan sinergi antar Anggota *Holding* dan memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in Performing Adequate Procedures to Ensure that Affiliated Transactions are Carried out in accordance with Generally Accepted Business Practices, among others, by complying with the Arms-Length Principle.

The Company conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No.7 concerning Related Party Disclosures. The fairness of transactions and fulfillment of regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors. The review mechanism for material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with related parties is through an audit process by the Audit Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners.

Statement related to Business Income that is Routine, Recurring, and/or Sustainable

IFG's operating revenues are derived from core operational activities that are conducted on a regular, recurring and sustainable basis, reflecting the stability and consistency of the business model in driving long-term growth. This revenue sustainability is one of the key indicators in maintaining healthy financial performance. Furthermore, as part of the company's strategy, IFG also optimizes affiliated transactions in line with the principles of good governance, in order to enhance synergies between holding members and strengthen contributions to sustainable business growth.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa perundang-undangan dan peraturan baru yang berdampak secara signifikan bagi kegiatan usaha Perusahaan, antara lain:

Throughout 2024, there were several new laws and regulations that had a significant impact on the Company's business activities, among others:

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
1.	Salinan Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-190/MBU/07/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan, Audit, dan Penilaian Penyelenggaraan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara ("Kepmen BUMN 190/2024") Copy of the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-190/MBU/07/2024 concerning Technical Guidelines for Reporting, Auditing, and Assessment of the Information Technology Implementation in State-Owned Enterprises ("Kepmen BUMN 190/2024")	Kepmen BUMN 190/2024 disusun bertujuan untuk memberikan panduan bagi BUMN dalam melakukan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Penyelenggaraan TI serta Pelaksanaan Audit dan Penilaian Penyelenggaraan TI dengan ruang lingkup: 1. Standar pelaporan penyelenggaraan TI. 2. Proses Pelaksanaan Audit TI. 3. Penilaian Penyelenggaraan TI. Decree of the Minister of SOEs (Kepmen BUMN) 190/2024 was prepared to provide guidance for SOEs in preparing and submitting IT Implementation Reporting and Implementation of IT Implementation Audit and Assessment with the scope: 1. IT implementation reporting standards. 2. IT Audit Implementation Process. 3. IT Implementation Assessment.	IFG berkewajiban untuk: 1. Menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan TI yang terdiri dari: a. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan; b. Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan; dan c. Laporan Hasil Penilaian Penyelenggaraan TI. 2. Dengan batas waktu penyampaian Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan BUMN. 3. Audit penyelenggaraan TI 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun (dilakukan secara mandiri atau oleh pihak independen). IFG is obliged to: 1. Prepare an IT Implementation Report document consisting of: a. Quarterly IT Implementation Report; b. Annual IT Implementation Report; and c. IT Implementation Assessment Report. 2. With deadline for submitting the SOE's Quarterly Report and Annual Report. 3. IT implementation audit is conducted 1 (one) time in 2 (two) years (conducted independently or by an independent party).

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
		Kepmen BUMN 275/2024 diterbitkan sebagai upaya KBUMN dalam penerapan kebijakan keamanan siber yang menyeluruh dan sistematis di lingkungan BUMN untuk menjaga kelangsungan operasional, melindungi aset-aset digital, serta memastikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Tujuan penyusunan dari Peraturan ini adalah: 1. Untuk melindungi sistem informasi, data sensitif, dan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman dan serangan siber; 2. panduan agar seluruh BUMN dapat memiliki ketahanan terhadap serangan siber melalui penerapan kontrol yang telah ditetapkan; 3. meminimalisasi adanya serangan siber yang dapat berdampak negatif, baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas seperti gangguan operasional, kerugian finansial, dan risiko reputasi dan lainnya. Ruang lingkup Kepmen BUMN 275/2024 ini berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk dapat digunakan untuk standar minimum bagi anak dan cucu Perusahaan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing BUMN.	
2.	Salinan Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-275/MBU/11/2024 tentang Prioritas Penerapan Keamanan Siber di Lingkungan BUMN (“Kepmen BUMN 275/2024”) Copy of the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-275/MBU/11/2024 on the Prioritization of Cybersecurity Implementation within SOEs ("SOE Decree 275/2024").	Decree of the Minister of SOEs (Kepmen BUMN) 275/2024 was issued as an effort by Ministry of SOEs to implement a comprehensive and systematic cybersecurity policy within SOEs to maintain operational continuity, protect digital assets, and ensure public trust in SOEs. The purpose of this Regulation is: 1. To protect information systems, sensitive data, and information technology infrastructure from cyber threats and attacks; 2. guidance so that all SOEs can have resilience to cyber attacks through the implementation of established controls; 3. minimize the existence of cyber attacks that can have a negative impact, both for individuals, organizations, and the community at large such as operational disruptions, financial losses, and reputational and other risks. The scope of Decree of the Minister of SOEs 275/2024 applies to all SOEs, including for minimum standards for subsidiaries and sub-subsidiaries in accordance with the policies of each SOE.	IFG diwajibkan mengimplementasikan 15 (lima belas) kontrol keamanan siber yang meliputi proses identifikasi, proteksi, deteksi, respon dan pemulihan dan melaporkan penerapan atas 15 (lima belas) kontrol kepada KBUMN secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada Laporan Tahunan BUMN. IFG is required to implement 15 (fifteen) cybersecurity controls covering identification, protection, detection, response and recovery processes and report the implementation of 15 (fifteen) controls to Ministry of SOEs periodically every 1 (one) year in the SOE Annual Report.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
3.	Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN RI Nomor SK-5/ DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) BUMN ("Juknis ICOFR") Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of Indonesian Ministry of SOEs Number SK-5/DKU. MBU/11/2024 concerning Technical Guidelines for Internal Control Over Financial Reporting of SOEs ("ICOFR Guidelines")	Juknis ICOFR ini diterapkan kepada seluruh BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan mencakup kebijakan serta penjabaran mengenai tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan setiap tahapan ICOFR. Juknis ICOFR bertujuan untuk: 1. memberikan pemahaman mengenai ICOFR dan implementasinya, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ICOFR di lingkungan BUMN. 2. Memberikan panduan bagi Dewan Komisaris, Direktur Utama, Lini Pertama (termasuk CFO), Lini Kedua – Fungsi ICOFR, dan Lini Ketiga dalam pelaksanaan setiap tahapan ICOFR. This ICOFR Technical Guidelines applies to all SOEs and SOE Subsidiaries and includes policies and a description of the duties and responsibilities of relevant parties in the implementation of each stage of ICOFR. The ICOFR technical guidelines aim to: 1. provide an understanding of ICOFR and its implementation, thus supporting the effectiveness of ICOFR implementation within SOEs. 2. Provide guidance to the Board of Commissioners, President Director, First Line (including CFO), Second Line - ICOFR Function, and Third Line in the implementation of each stage of ICOFR.	IFG perlu menjalankan 5 (lima) tahapan/lifecycle ICOFR yakni Perancangan, Implementasi, & Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi, Remediasi, dan Pelaporan. Atas implementasi ICOFR tersebut kemudian akan dilakukan asurans oleh Praktisi Eksternal. Model Tiga Lini membantu mengidentifikasi struktur dan proses dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat pada Perusahaan. IFG needs to carry out 5 (five) stages/lifecycle of ICOFR namely Design, Implementation, & Continuous Monitoring, Evaluation, Remediation, and Reporting. For the implementation of ICOFR, assurance will then be carried out by External Practitioners. The Three-Line Model helps identify structures and processes to help achieve objectives and facilitate strong governance and risk management in the Company.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ("UU 4/2024") Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2024 Concerning Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life ("Law 4/2024")	UU 4/2024 adalah peraturan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. UU 4/2024 ini menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, baik dari segi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, maupun keagamaan. Law 4/2024 is a regulation that aims to ensure the welfare of mothers and children from the time of pregnancy until the child is 2 (two) years old. Law 4/2024 emphasizes the importance of fulfilling the rights and basic needs of mothers and children, both in terms of physical, psychological, social, economic, spiritual, and religious aspects.	IFG harus mengupayakan sarana/fasilitas di lingkup Perusahaan agar terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Perusahaan antara lain: 1. Merumuskan kebijakan dan peraturan terkait kesejahteraan ibu dan anak di lingkup Perusahaan. 2. Karyawan wanita mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau sejak sebelum hamil hingga pasca persalinan. 3. Cuti melahirkan bagi karyawan wanita selama 3 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan 3 bulan jika terdapat kondisi khusus. 4. Perlindungan dari pemecatan dan hak atas upah selama cuti melahirkan, 5. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. IFG shall strive for facilities within the Company to fulfill the rights and basic needs of mothers and children including physical, psychological, social, economic, spiritual, and religious needs, so that they can develop themselves and participate optimally in accordance with social functions in the development of community life. Things that must be considered by the Company include: 1. Formulate policies and regulations related to the welfare of mothers and children within the Company, 2. Female employees receive quality, safe, and affordable health services from pre-pregnancy to postpartum, 3. Maternity leave for female employees for 3 months, with the possibility of a 3-month extension if there are special circumstances, 4. Protection from dismissal and right to wages during maternity leave, 5. An environment that supports child development.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
5.	Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 12/2024") OJK Regulation No. 12/2024 on the Implementation of Anti Fraud Strategies for Financial Services Institutions ("POJK 12/2024")	POJK 12/2024 diundangkan sebagai peraturan yang menekankan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh lembaga jasa Keuangan. POJK 12/2024 was promulgated as a regulation that emphasizes strengthening the internal control system in the form of implementing anti-fraud strategies by financial services institutions.	Peraturan ini juga berdampak terhadap IFG dan diwajibkan untuk: 1. Memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi LJK. 2. Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi penanganan strategi anti *fraud* harus memiliki: 3. Sertifikat keahlian di bidang anti *fraud*; 4. Pengalaman di bidang anti *fraud*; dan/atau 5. Pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait. 6. Kewajiban pelaporan kepada OJK. This regulation also affects IFGs and is required: 1. To have a work unit or function in charge of handling the implementation of anti-fraud strategies in the FSI organization. 2. That the head of the work unit or the official in charge of the anti-fraud strategy handling function must have: 3. Certificate of expertise in anti-fraud; 4. Experience in the field of anti-fraud; and/or 5. Adequate experience in the relevant FSI field. 6. Reporting obligations to OJK.
6.	Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-1/MBU/01//2024 tentang *Employee Well-Being* (EWB) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("SE Menteri BUMN 1/2024") Circular Letter of the Minister of SOEs Number SE-1/MBU/01//2024 concerning Employee Well-Being (EWB) within State-Owned Enterprises ("Circular Letter of the Minister of SOEs 1/2024").	Peraturan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan agar: 1. Seluruh Insan Grup BUMN (Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Grup BUMN) menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, aman, nyaman, dan bahagia bagi seluruh Insan Grup BUMN. 2. Meningkatkan nilai tambah dan kinerja Grup BUMN yang berkelanjutan melalui implementasi *Employee Well-being Policy* di lingkungan Grup BUMN. Adapun ruang lingkup Peraturan ini adalah penyusunan dan penerapan *Employee Well-being Policy* di lingkungan Grup BUMN untuk seluruh Insan Grup BUMN. This regulation is issued with the aim and purpose of: 1. All SOE Group personnel (Board of Commissioners/ Supervisory Board, Board of Directors, and SOE Group employees) create a productive, healthy, safe, comfortable, and happy working environment for all SOE Group personnel. 2. Increase the added value and sustainable performance of the SOE Group through the implementation of the Employee Well-being Policy within the SOE Group. The scope of this Regulation is the preparation and implementation of the Employee Well-being Policy within the SOE Group for all SOE Group personnel.	Perusahaan diwajibkan untuk: 1. Menyiapkan program strategis maupun taktis, yang terdiri dari pembentukan pola pikir dan kesadaran tentang EWB, kebijakan. 2. Melakukan sosialisasi, internalisasi, dan memastikan implementasi program EWB. 3. Implementasi program EWB di grup BUMN. 4. Mengoptimalkan kolaborasi antar Grup BUMN untuk mendorong peningkatan nilai tambah, keterikatan dan kinerja Grup BUMN. 5. Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program EWB. 6. Mendorong peningkatan utilisasi atas setiap program/fasilitas terkait EWB. The company is required to: 1. Prepare strategic and tactical programs, which consist of shaping the mindset and awareness of EWB, policies. 2. Socialize, internalize, and ensure the implementation of the EWB program. 3. Implementation of the EWB program in the SOE group. 4. Optimize collaboration between SOE Groups to encourage increased added value, engagement and performance of SOE Groups. 5. Promote the effective and efficient implementation of the EWB program. 6. Encourage increased utilization of any EWB-related programs/facilities.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 ("Putusan MK 168/2023") Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 ("MK Decision 168/2023")	Undang – Undang Cipta Kerja atau UU No. 6 Tahun 2023 ("UU Cipta Kerja") dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 ("Putusan MK 168/2023") adalah peraturan yang mengubah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja"). Walaupun UU Cipta Kerja mengubah UU Tenaga Kerja, tetapi peraturan tersebut bukan berarti tidak berlaku lagi. Terdapat pasal – pasal yang dipertahankan, dihapus dan disisipkan. Beberapa poin penting dalam UU Tenaga Kerja sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan MK 168/2023 adalah mengenai: 1. Perjanjian Kerja untuk Suatu Jangka Waktu Tertentu (PKWT); 2. Berakhirnya perjanjian kerja 3. *Outsourcing* 4. Jam waktu kerja 5. Pekerjaan yang melebihi waktu kerja atau lembur 6. Waktu istirahat 7. Pengupahan 8. PHK 9. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. The Job Creation Law or Law No. 6 of 2023 ("Job Creation Law") and Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 ("Constitutional Court Decision 168/2023") are regulations that amend Law No. 13 of 2003 on Manpower ("Manpower Law"). Although the Job Creation Law amends the Labor Law, it does not mean that the regulation is no longer valid. There are articles that are retained, deleted and inserted. Some important points in the Labor Law as amended by the Job Creation Law and Constitutional Court Decision 168/2023 are: 1. Employment Agreement for a Fixed Term (PKWT); 2. Expiration of employment agreement 3. Outsourcing 4. Hours of working time 5. Work that exceeds working time or overtime 6. Break time 7. Wages 8. Layoffs 9. Settlement of industrial relations disputes.	Perusahaan menyesuaikan kebijakan internal, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Putusan MK 168/2023 ini. The Company adjusts its internal policies, Company Regulations, Employment Agreements to refer to the prevailing laws and regulations including the Constitutional Court Decision 168/2023.
8.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 ("Permenaker 16/2024") Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 16 of 2024 concerning the Determination of Minimum Wage for 2025 ("Permenaker 16/2024")	Salah satu pokok utama Permenaker 16/2024 adalah kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 yang diinisiasi berdasarkan instruksi presiden untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Pada akhirnya, kenaikan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja sekaligus memperkuat daya saing usaha secara keseluruhan. One of the main points of Permenaker 16/2024 is the increase in the national minimum wage in 2025, which was initiated based on a presidential instruction to increase the minimum wage by 6.5%. Ultimately, this increase aims to maintain workers' purchasing power while strengthening overall business competitiveness.	Perusahaan dalam menentukan upah minimum karyawan agar merujuk pada Permenaker 16/2024. The Company in determining the minimum wage of employees should refer to Permenaker 16/2024.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
9.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem inti Administrasi Perpajakan ("PMK 81/2024") Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 81 of 2024 on Taxation Provisions in the Framework of Implementing the core Tax Administration System ("PMK 81/2024")	PMK No. 81/2024 diterbitkan sebagai upaya Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") dalam modernisasi administrasi perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan *Core Tax Administration System* (CTAS), untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi bagi Wajib Pajak. Regulasi ini menjadi pijakan utama bagi implementasi *system coretax* yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan berdampak 42 (empat puluh dua) peraturan terkait perpajakan. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 81/2024 was issued as an effort of the Ministry of Finance ("MoF") in modernizing tax administration in the Core Tax Administration System (CTAS), to improve efficiency and transparency for taxpayers. This regulation becomes the main footing for the implementation of the coretax system which will be effective from January 1, 2025 and has an impact on 42 (forty-two) tax-related regulations.	IFG sebagai wajib pajak memiliki waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. IFG as a taxpayer has until the 15th of the following month to complete its tax obligations.
10.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045 Law of the Republic of Indonesia Number 59 of 2024 concerning the national Long-Term Development plan for 2025-2045	UU 59/2024 diterbitkan Pemerintah Pusat sebagai landasan hukum dan Rencana Strategis arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan tersebut terdiri dari tiga (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Law No. 59/2024 was issued by the Central Government as a legal basis and Strategic Plan for Long-Term Development policy direction to achieve the vision of a Golden Indonesia 2045, which is realized through 8 (eight) Development Missions in the form of a National Development agenda. The Development Mission consists of three (3) transformations of Indonesia, 2 (two) transformation foundations, and 3 (three) transformation implementation frameworks. The agenda is implemented through 17 (seventeen) development directions measured through 45 (forty-five) key development indicators.	*Alignment* dengan UU ini diperlukan dalam menerapkan kebijakan atau rencana jangka panjang IFG. Alignment with the Law is necessary in implementing IFG's policies or long-term plans.
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan ("PP 41/2024") Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2024 concerning Work Plan and Budget of the Financial Services Authority and Levies in the Financial Services Sector ("PP 41/2024")	PP 41/2024 ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Government Regulation No. 41/2024 is promulgated to implement the provisions of Article 36B and Article 37 paragraph (4) of Law Number 21 of 2011 concerning OJK as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening.	Besaran biaya tahunan IFG dihitung sebesar 0,045% dari total aset dikurangi dengan aset seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dikonsolidasikan, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). The amount of IFG annual fee is calculated at 0.045% of total assets minus the assets of all consolidated Financial Services Institutions, at least IDR10,000,000.00 (ten million rupiah).

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian ("POJK 22/2024")	POJK 22/2024 ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dengan perkembangan industri perasuransian di Indonesia.	Kewajiban pelaporan bagi Anggota *Holding* IFG yang bergerak di industri Perasuransian agar memperhatikan ketentuan pelaporan berkala yang harus dilakukan, antara lain: 1. Laporan bulanan; 2. Laporan triwulanan; 3. Laporan tahunan; 4. Laporan publikasi; dan 5. Laporan lain.
12.	Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 22 of 2024 concerning Periodic Reports of Insurance Companies ("POJK 22/2024")	This POJK 22/2024 is promulgated to implement the provisions of Article 22 paragraph (7) and Article 23 paragraph (2) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening, as well as to adjust the regulation of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.05/2017 concerning Periodic Reports of Insurance Companies with the development of the insurance industry in Indonesia.	Reporting obligations for IFG Holding Members engaged in the Insurance industry to pay attention to the periodic reporting provisions that must be carried out, among others: 1. Monthly report; 2. Quarterly report; 3. Annual report; 4. Publication reports; and 5. Other reports.
	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/SEOJK.05/2024 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("SEOJK 23/2024")	SEOJK 23/2024 ini diundangkan dalam rangka pemenuhan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, yang mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala, penyampaian koreksi laporan berkala, dan penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dan/atau koreksi laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.	Anggota *Holding* IFG yang bergerak di industri Perasuransian wajib menyusun laporan berkala dengan memperhatikan: 1. Bentuk dan susunan laporan berkala; 2. Tata cara penyampaian laporan; 3. Tata cara penyampaian koreksi atas laporan; 4. Merujuk pada SEOJK 23/2024 beserta lampiran nya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK 23/2024.
13.	Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 23/SEOJK.05/2024 concerning the Form and Composition of Periodic Reports of Insurance Companies and Reinsurance Companies ("SEOJK 23/2024")	This SEOJK 23/2024 is promulgated in order to fulfill the mandate of the provisions of Article 8 and Article 12 of the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2024 concerning Periodic Reports of Insurance Companies, which regulates the form, composition, and procedures for submitting periodic reports, submitting corrections to periodic reports, and postponing the deadline for submitting periodic reports and/or corrections to periodic reports of insurance companies and reinsurance companies.	IFG Holding Members engaged in the Insurance industry must prepare periodic reports with due regard to: 1. Form and structure of periodic reports; 2. Procedure for submitting reports; 3. Procedures for submitting corrections to the report; 4. Refer to SEOJK 23/2024 and its attachments which are an integral part of SEOJK 23/2024.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
14.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2017 tentang Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2024 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2017 concerning Debtor Information through the Financial Information Service System (SLIK).	POJK 11/2024 diterbitkan sebagai upaya OJK untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif melalui penambahan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana, meliputi pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. POJK 11/2024 was issued as an effort by OJK to provide more comprehensive debtor information through the addition of supporting information for funding activities, including risk coverage/management, guarantees, and information technology-based joint funding services.	Terdapat Anggota *Holding* IFG yang memenuhi kriteria, diberikan batas waktu paling lambat 1 tahun untuk menjadi pelapor yaitu jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2025, sebagai berikut : 1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yaitu Bahana Sekuritas 2. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, yaitu Askrindo, Jasindo, dan JRP 3. Perusahaan Penjaminan, yaitu Jamkrindo 4. Perusahaan Penjaminan Syariah, yaitu Jamkrindo Syariah, JPAS 5. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK, yaitu BTIM, BAV, IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasindo Syariah, dan Jasa Raharja There are IFG Holding Members that meet the criteria, given a deadline of no later than 1 year to become a reporting party, which is due on July 31, 2025, as follows: 1. Securities Company that conducts business as a securities broker, namely Bahana Sekuritas 2. Insurance companies that market credit insurance and/or suretyship products, namely Askrindo, Jasindo, and JRP 3. Guarantee Company, namely Jamkrindo 4. Sharia Guarantee Companies, namely Jamkrindo Syariah, JPAS 5. FSIs that are required to become the Reporting Party in accordance with OJK Regulations are BTIM, BAV, IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasindo Syariah, and Jasa Raharja
15.	Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“POJK 3/2024”) OJK Regulation No. 3/2024 on the Implementation of Financial Sector Technology Innovation ("POJK 3/2024")	Dalam POJK ini diatur ketentuan terkait penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*), perizinan, pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, Perlindungan Konsumen, perlindungan data pribadi Konsumen, aspek kelembagaan dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK. This POJK regulates provisions related to the provision of space and /or facilitation of innovation trials/ development (sandbox), licensing, monitoring and evaluation, financial education, consumer protection, protection of consumer personal data, institutional aspects and the implementation of ITSK, including activities organized by third parties that support the implementation of ITSK.	Anggota *Holding* IFG apabila akan menjadi penyelenggara ITSK agar merujuk pada POJK 3/2024 ini IFG Holding Members if they are to become ITSK organizers should refer to POJK 3/2024

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
16.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah ("SEOJK 19/2024") Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 19/SEOJK.06/2024 concerning Health Level Assessment of Venture Capital Companies and Sharia Venture Capital Companies ("SEOJK 19/2024")	SEOJK 19/2024 ini diundangkan sebagai amanat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah yang mengatur beberapa hal berikut: 1. Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan; 2. Tata cara penilaian tingkat kesehatan; 3. Penilaian faktor tata kelola; 4. Penilaian faktor profil risiko. This SEOJK 19/2024 is promulgated as a mandate of the provisions of Article 112 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 25 of 2023 concerning Business Implementation of Venture Capital Companies and Sharia Venture Capital Companies which regulates the following matters: 1. General principles of soundness assessment; 2. Procedures for health level assessment; 3. Assessment of governance factors; 4. Risk profile factor assessment.	Anggota *Holding* IFG yang bergerak di industri modal ventura wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Perusahaan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan bulan Desember dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada OJK sesuai tenggat waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam SEOJK 19/2024. IFG Holding Members engaged in the venture capital industry are required to conduct a self-assessment of the Company's soundness level at least annually for the December month-end position and report the results of the assessment to OJK according to the specified deadline as stated in SEOJK 19/2024.
17	POJK 34 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ("POJK 34/2024")	Peraturan ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Anggota *Holding* yang bergerak di industri perasuransian (Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, baik konvensional maupun syariah), industri Penjaminan (baik konvensional maupun syariah) dan Dana Pensiun memiliki kewajiban untuk: 1. melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM secara tahunan untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun sebelumnya; 3. melaporkan rencana serta realisasi pengembangan kualitas SDM kepada Otoritas Jasa Keuangan; 4. memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan dan memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui sistem dan prosedur dimaksud; 5. memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan: 1) Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK); atau 2) sertifikasi kompetensi selain SKK yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. 6. melakukan identifikasi dan menetapkan aktivitas dan jabatan kritikal pada PPDP.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
	POJK 34/2024 on Human Resources Quality Development for Insurance Companies, Guarantee Institutions, Pension Funds, and Specialized Institutions in the Field of Insurance, Guarantee, and Pension Funds ("POJK 34/2024")	This regulation is promulgated to implement the provisions of Article 252 paragraph (4) and Article 253 paragraph (3) of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.	Holding members engaged in the insurance industry (Insurance and Reinsurance Companies, both conventional and sharia), the Guarantee industry (both conventional and sharia) and Pension Funds have an obligation to: 1. manage human resources and developing the quality of its human resources on an ongoing basis; 2. provide and realize HR education and training programs on an annual basis for each fiscal year of at least 3.5% (three point five percent) of the total realization of employee expenses, Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in the previous year; 3. report the plan and realization of HR quality development to the Financial Services Authority; 4. have systems and procedures for the development of HR quality on an ongoing basis and monitor the realization of HR quality development on an ongoing basis through these systems and procedures; 5. have human resources that meet the competencies as evidenced by: 1) Work Competency Certification (SKK); or 2) competency certification other than SKK approved by the Financial Services Authority, in the fields of insurance, guarantee, and pension funds. 6. identify and define critical activities and positions in Insurance Companies, Guarantee Institutions, and Pension Funds (PPDP).
18	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 36/2024") Financial Services Authority Regulation Number 36 of 2024 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 69/ POJK.05/2016 concerning the Implementation of Business Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies ("POJK 36/2024")	Peraturan ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 28 ayat (9), dan Pasal 31 ayat (5) UU 40/2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. This regulation is promulgated to implement the provisions of Article 5 paragraph (5), Article 28 paragraph (9), and Article 31 paragraph (5) of Law 40/2014 on Insurance as amended by Law 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening.	Dengan diundangkannya POJK 36/2024, peraturan tersebut berdampak kepada Anggota *Holding* yang bergerak di industri perasuransian (Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, baik konvensional maupun syariah) Perusahaan yang telah menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital ("LAD") sebelum POJK ini berlaku, harus menyesuaikan kewajiban dan persyaratan penyelenggaraan LAD yang diatur dalam Peraturan OJK ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. With the promulgation of POJK 36/2024, the regulation has an impact on Holding Members engaged in the insurance industry (Insurance and Reinsurance Companies, both conventional and sharia) Companies that have organized Digital Insurance Services ("LAD") before this POJK takes effect, must adjust the obligations and requirements for organizing LAD stipulated in this OJK Regulation no later than 6 (six) months after this OJK Regulation takes effect.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
19	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("POJK 30/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies ("POJK 30/2024")	POJK 30/2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu Pasal 205 sampai dengan Pasal 212 Bab XV Konglomerasi Keuangan. Dengan pengaturan PIKK saat ini, seluruh Konglomerasi Keuangan akan memiliki struktur vertikal, dalam hubungan antara induk dengan Anggota *Holding*, mengingat PIKK wajib memiliki pengendalian dan melakukan konsolidasi terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan. POJK 30/2024 is issued as a follow-up to the mandate of Law No. 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening, namely Article 205 through Article 212 of Chapter XV of the Financial Conglomerate. With the current Parent Company of Financial Conglomerate (PIKK) arrangement, the entire Financial Conglomerate will have a vertical structure, in the relationship between the parent and subsidiaries, given that the PIKK is required to have control and consolidate all members of the Financial Conglomerate.	Kriteria dalam POJK 30/2024 mengharuskan IFG mengajukan perizinan selaku PIKK Nonoperasional. Adapun dampak kepada IFG sebagai berikut: 1. Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar IFG serta kegiatan usaha berdasarkan POJK 30/2024; 2. IFG harus memiliki sumber pendapatan sendiri selain dari dividen dari anggota konglomerasi keuangan; 3. Menyusun rencana strategis konglomerasi keuangan dalam bentuk rencana korporasi konglomerasi keuangan; 4. Penyesuaian terhadap Piagam Korporasi; 5. Direktur Utama IFG dilarang merangkap jabatan; 6. Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 7. Penyampaian laporan berkala kepada OJK untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember paling lambat akhir bulan berikutnya (ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian pertama kali, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan OJK). The criteria in POJK 30/2024 requires IFG to apply for licensing as a Non-Operational PIKK The impact to IFG is as follows: 1. Adjustments to IFG's Articles of Association and business activities based on POJK 30/2024; 2. The IFG must have its own source of income other than dividends from members of the financial conglomerate; 3. Developing the strategic plan of the financial conglomerate in the form of a financial conglomerate corporate plan. 4. Adjustments to the Corporate Charter 5. IFG President Director prohibited from holding concurrent positions 6. Prospective members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of PIKK must obtain approval from OJK before conducting their actions, duties and functions as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 7. Submission of periodic reports to OJK for the end of March, June, September, and December no later than the end of the following month (further provisions regarding the first time submission, form, composition, and procedures for submitting reports are stipulated by OJK)

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 37/2024")	Latar belakang, POJK 37/2024 diundangkan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu merupakan upaya OJK dalam memperkuat penegakan hukum (law enforcement) di industri perasuransian, meningkatkan efektivitas penerapan mekanisme pengawasan berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan menerapkan metode pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) dalam prosedur pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang sebelumnya diatur secara bertahap dan berdasarkan tingkat kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan (*compliance based*). Penyempurnaan dalam POJK ini khususnya bagi Perusahaan Asuransi (PA), Perusahaan Asuransi Syariah (PAS), Perusahaan Reasuransi (PR), dan Perusahaan Reasuransi Syariah (PRS) antara lain: 1. Penambahan jenis sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan; 2. Perubahan jangka waktu pengenaan sanksi administratif yang semula bersifat limitatif menjadi fleksibel berdasarkan pertimbangan dan penilaian OJK; 3. Perubahan prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang semula bertahap menjadi tidak bertahap dan didasarkan atas kategori pelanggaran.	OJK berhak memberikan sanksi administratif kepada IFG selaku Pemegang Saham berupa: 1. Peringatan tertulis 2. Denda Administratif 3. Larangan menjadi pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, DPS atau pejabat eksekutif pada Perusahaan perasuransian
20	Financial Services Authority Regulation Number 37 of 2024 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 17/ POJK.05/2017 concerning Procedures and Procedures for Imposing Administrative Sanctions in the Insurance Sector and Blocking the Wealth of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies ("POJK 37/2024")	The background of POJK 37/2024 is to implement the provisions of Article 71 paragraph (4) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance (Law 40/2014) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening. In addition, it is OJK's effort to strengthen law enforcement in the insurance industry, increase the effectiveness of the implementation of risk-based supervision mechanisms for insurance companies and reinsurance companies and implement risk-based supervision methods in the procedure for imposing administrative sanctions on insurance and reinsurance companies which were previously regulated in stages and based on the level of compliance with the provisions of laws and regulations (compliance based). The improvements in this POJK specifically for Insurance Companies (PA), Sharia Insurance Companies (PAS), Reinsurance Companies (PR), and Sharia Reinsurance Companies (PRS) include: 1. Addition of types of administrative sanctions in the form of a decrease in soundness level; 2. Changes in the period of imposition of administrative sanctions which were originally limitative to be flexible based on OJK's consideration and assessment; 3. Changes in procedures and procedures for imposing administrative sanctions from gradual to non-gradual and based on the category of violation.	OJK has the right to impose administrative sanctions to IFG as Shareholder in the form of: 1. Written warning 2. Administrative Fines 3. Prohibition of being a controller, shareholder, Director ,Commissioner, DPS or executive officer of an insurance company

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
21.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal ("POJK 33/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 33 of 2024 concerning Development and Strengthening of Investment Management in the Capital Market ("POJK 33/2024")	POJK 33/2024 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal. POJK 33/2024 is an implementing regulation of Article 24 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector relating to Investment Management in the Capital Market.	POJK 33/2024 ini berdampak kepada Anggota *Holding* yang bergerak di industri pasar modal. Dalam hal melakukan Perusahaan tersebut melakukan: 1. penerimaan dan/atau memberikan pinjaman; dan 2. pembelian saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain, 3. agar merujuk pada ketentuan POJK 33/2024 ini. POJK 33/2024 has an impact on Holding Members engaged in the capital market industry. In the event that the Company does: 1. acceptance and/or providing loans; and 2. purchase of shares of Mutual Funds in the form of a Company and/or Participation Units of other Collective Investment Contract Mutual Funds, 3. to refer to the provisions of this POJK 33/2024.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
22	POJK 43 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK 43/2024") POJK 43 of 2024 Regarding the Development of the Quality of Human Resources of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("POJK 43/2024")	Peraturan ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"), di mana PVML wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan. This regulation is promulgated to implement the provisions of Article 252 paragraph (4) and Article 253 paragraph (3) of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening ("P2SK Law"), where Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML) are obliged to carry out HR management and continuous development of HR quality.	Anggota *Holding* IFG yang masuk sebagai PVML wajib memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM dan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM. Selain itu juga memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 2. Merealisasikan seluruh penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM untuk setiap tahun berjalan. 3. Melaksanakan permintaan OJK 4. Memiliki sistem dan prosedur internal pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan. 5. Menyusun rencana program pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis PVML kecuali Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil. 6. Memantau realisasi program pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan. 7. Melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program Pengembangan kualitas SDM. 8. Mengadministrasikan realisasi program pengembangan kualitas SDM. IFG Holding Members listed as PVML are required to have HR quality management and development functions and must have a member of the Board of Directors in charge of HR quality management and development functions. It also has the following obligations: 1. Provide funding for HR education and training from the current year's budget to support the implementation of education and training. 2. Realize the entire provision of HR education and training funds for each current year. 3. Carry out OJK requests 4. Have internal systems and procedures to develop the quality of human resources on an ongoing basis. 5. Prepare HR quality development program plan in PVML business plan except for small-scale Microfinance Institutions. 6. Monitor the realization of HR quality development programs on an ongoing basis. 7. Monitoring HR who participated in the HR quality development program. 8. Administering the realization of the HR quality development program.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
23	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi ("POJK 8/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 8 of 2024 concerning Insurance Products and Marketing Channels for Insurance Products ("POJK 8/2024")	Latar belakang POJK 8/2024 diterbitkan adalah terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PPSK") yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap POJK 23/2015, khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi yang selaras dengan perkembangan inovasi produk asuransi yang semakin variatif dan dinamis, serta dilakukan penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada *stakeholders*. The background to the issuance of POJK 8/2024 is that there is a mandate in Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening ("PPSK Law") which causes the need for adjustments to POJK 23/2015, especially regarding provisions related to the use of electronic or digital insurance policies and governance of insurance product development. In addition, improvements were also made to the arrangements regarding insurance products and insurance product marketing channels that are in line with the development of insurance product innovations that are increasingly varied and dynamic, as well as simplifying the insurance product approval process while still prioritizing prudential aspects and market behavior in the context of improving services to stakeholders.	Perusahaan Asuransi yang berada di bawah *Holding* IFG wajib melakukan penyesuaian dalam hal persetujuan produk asuransi sebagai berikut: 1. Produk asuransi baru dan produk asuransi dengan kriteria tertentu wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. 2. OJK dapat memberikan instruksi tertulis kepada perusahaan yang berada dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus untuk memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu. Insurance Companies under IFG Holding are required to make adjustments in terms of insurance product approval as follows: 1. New insurance products and insurance products with certain criteria must first obtain approval from OJK. 2. OJK may give written instructions to companies under intensive supervision or special supervision to obtain OJK's prior approval.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
24.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (”POJK 28/2024”) Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning Management of Individuals or Entities Track Record Information through the Individual Information System at Financial Services Sector ("POJK 28/2024")	POJK 28/2024 memberikan panduan bagi Pengguna SIPELAKU dalam mengakses, menatausahakan, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan data dalam *database* rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan. POJK 28/2024 ini mengatur antara lain: 1. Ruang lingkup pihak yang tergolong sebagai Pelaku, yaitu orang perseorangan, korporasi, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 2. Ruang lingkup pihak yang tergolong sebagai Pengguna, yaitu LJK dan pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. 3. Persyaratan bagi Pengguna untuk memperoleh Hak Akses SIPELAKU. 4. Kriteria pertimbangan Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU. 5. Cakupan dan sumber data dan/atau informasi yang terkandung dalam Rekam Jejak dalam SIPELAKU. 6. Kewajiban dan larangan bagi Pengguna dalam penggunaan dan pengelolaan Rekam Jejak SIPELAKU. 7. Sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. POJK 28/2024 provides guidance for SIPELAKU Users in accessing, administering, and supervising the use of data in the track record database of individuals in the financial services sector. POJK 28/2024 regulates, among others: 1. The scope of parties classified as Business Actors, namely individuals, corporations, business entities both in the form of legal entities and those that are not legal entities, or other entities. 2. The scope of parties classified as Users, namely Financial Services Institutions and parties carrying out activities in the financial services sector. 3. Requirements for Users to obtain SIPELAKU Access Rights. 4. Criteria for User consideration in accessing and using the Track Record in SIPELAKU. 5. Scope and source of data and/or information contained in the Track Record in SIPELAKU. 6. Obligations and prohibitions for Users in the use and management of SIPELAKU Track Record. 7. Administrative sanctions for violations of obligations and prohibitions stipulated in this Financial Services Authority Regulation.	IFG sebagai LJK yang telah memenuhi kewajiban pelaporan Strategi Anti-*Fraud* sebagaimana diatur dalam POJK 12/2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bagi LJK dapat mengakses SIPELAKU dengan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran hak akses kepada OJK secara elektronik melalui SPRINT. IFG sebagai pengguna SIPELAKU (setelah mendapat hak akses) dapat mengakses dan menggunakan rekam jejak dalam SIPELAKU sebagai: 1. bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk keperluan kepegawaian; 2. bahan pertimbangan pemrofilan (profiling) terhadap calon konsumen, dan/atau pihak lain, sesuai dengan kebijakan pengendalian risiko; dan/atau 3. penerapan manajemen risiko. IFG as a FSI that has fulfilled the Anti-Fraud Strategy reporting obligation as stipulated in POJK 12/2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for FSIs can access SIPELAKU by first applying for registration access rights to OJK electronically through SPRINT. IFG as a SIPELAKU user (after obtaining access rights) can access and use the track record in SIPELAKU as: 1. consideration in the decision-making process for staffing purposes; 2. consideration of profiling of prospective consumers, and/or other parties, in accordance with risk control policies; and/or 3. implementation of risk management.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
25.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("SEOJK 10/2024") Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 10/SEOJK.05/2024 concerning Mechanisms and Procedures for the Separation of Sharia Units of Insurance Companies and Reinsurance Companies ("SEOJK 10/2024")	SEOJK 10/2024 ini mengatur mekanisme, tata cara, pemberitahuan, pengumuman, pelaporan dan persetujuan OJK untuk pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana mandat Pasal 10 ayat (11), POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Tahapan pemisahan unit syariah terdiri dari: 1. Persiapan pemisahan unit syariah; 2. Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1); 3. Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1); 4. Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah; 5. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan 6. Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah. This SEOJK 10/2024 regulates the mechanism, procedures, notification, announcement, reporting and OJK approval for the separation of sharia units of insurance companies and reinsurance companies as mandated by Article 10 paragraph (11), POJK Number 11 of 2023 concerning Separation of Sharia Units of Insurance Companies and Reinsurance Companies. The stages of separation of the sharia unit consist of: 1. Preparation for the separation of the sharia unit; 2. Establishment of Legal Entity of Sharia Insurance Company or New Sharia Reinsurance Company resulting from Separation of Sharia Unit (special form 1); 3. Application for Business License of Sharia Insurance Company or New Sharia Reinsurance Company resulting from Separation of Sharia Unit (special form 1); 4. Transfer of Participation Portfolio of Sharia Unit to Sharia Insurance Company or New Sharia Reinsurance Company resulting from the Separation of Sharia Unit; 5. Reporting of Amendments to Articles of Association on the Addition of Paid-up Capital in Connection with the Transfer of Participation Portfolio; and 6. Closure of Syariah Unit and Revocation of License to Establish Syariah Unit.	Peraturan ini berdampak terhadap Anggota *Holding* IFG yang melakukan pemisahan unit syariah, yaitu JRP dan Nasre. Anggota *Holding* tersebut agar merujuk pada ketentuan mengenai tahapan pemisahan unit syariah sebagaimana tercantum dalam SEOJK 10/2024 ini. This regulation has an impact on IFG Holding Members that separate sharia units, namely JRP and Nasre. These Holding Members should refer to the provisions regarding the stages of separation of sharia units as stated in this SEOJK 10/2024.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
26.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis ("POJK 31/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 31 of 2024 regarding Written Orders ("POJK 31/2024")	POJK 31/2024 ini disusun dalam rangka harmonisasi ketentuan mengenai pengaturan kewenangan OJK dalam memberikan Perintah Tertulis yang berlaku secara OJK wide dengan mengedepankan penyelarasan dan pengkinian dengan ketentuan existing antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terutama terkait tindak lanjut amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (UU OJK) yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK). Pokok perubahan pengaturan sebagai berikut: 1. penambahan ketentuan perintah P3IK sesuai Pasal 8A UU OJK, dengan disusun secara OJK wide (memenuhi kepentingan seluruh LJK); 2. penyelarasan ketentuan terkait pengawasan market conduct (EPK) dalam "pemberian perintah atau tindakan tertentu" sesuai Pasal 244 UU P2SK; dan 3. pencabutan atas 3 (tiga) POJK: a. POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis; b. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank; dan c. POJK Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan LJK Nonbank POJK 31/2024 is prepared in the context of harmonizing the provisions regarding the regulation of OJK's authority to grant Written Orders that apply OJK wide by prioritizing alignment and updating with existing provisions, including Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), especially regarding the follow-up to the mandate of Article 8A of Law Number 21 of 2011 concerning OJK as amended by the P2SK Law (OJK Law) which mandates OJK to further regulate OJK's authority in granting Written Orders to Financial Services Institutions to merger, consolidation, acquisition, integration, and/or conversion (P3IK). The main regulatory changes are as follows: 1. the addition of P3IK order provisions in accordance with Article 8A of the OJK Law, by being structured in an OJK wide manner (meeting the interests of all FSIs); 2. alignment of provisions related to market conduct supervision (EPK) in "giving orders or certain actions" in accordance with Article 244 of the P2SK Law; and 3. revocation of 3 (three) POJK: a. POJK Number 18 of 2022 regarding Written Orders; b. POJK Number 18/POJK.03/2020 concerning Written Orders for Handling Bank Problems; and c. POJK Number 40/POJK.05/2020 concerning Written Orders for Handling Problems of Nonbank Financial Institutions	Apabila IFG sebagai Lembaga Jasa Keuangan menerima Perintah Tertulis dari OJK, harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK (jika ditetapkan oleh OJK dalam Perintah Tertulis). If IFG as a Financial Services Institution receives a Written Order from OJK, it shall submit an action plan and a progress report on the implementation of the action plan to OJK (if specified by OJK in the Written Order).

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
27.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK 49/2024"). Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 49 of 2024 on Supervision, Determination of Supervisory Status Follow-up Supervision of Financing Institutions Venture Capital Companies Microfinance Institutions Other Financial Services Institutions ("POJK 49/2024").	POJK 49/2024 diundangkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain hal tersebut sebelumnya, untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan di sektor jasa keuangan, perlu penyusunan ketentuan baru terkait pengawasan, status pengawasan dan tindak lanjut status pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PVML mengatur tentang ruang lingkup pengawasan. frekuensi pemeriksaan, tim pemeriksa, kewajiban PVML, tata cara pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan oleh pihak asing, tindak lanjut pengawasan, penetapan status pengawasan intensif dan khusus, kriteria waktu status pengawasan, jangka waktu status pengawasan, dan tindak lanjut status pengawasan. POJK 49/2024 was promulgated to implement the mandate of Article 128 paragraph (4) of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, Article 32 of Law Number 1 of 2013 on Microfinance Institutions as amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, and Article 40 of Law Number 2 of 2009 on Indonesian Export Financing Institutions as amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. Moreover, to support industry development and legal needs for supervision, determination of supervisory status, and follow-up of supervision in the financial services sector, it is necessary to prepare new provisions related to supervision, supervisory status and follow-up of supervisory status in the fields of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML). The Financial Services Authority Regulation on PVML Supervision regulates the scope of supervision, frequency of inspection, inspection team, PVML obligations, inspection procedures, follow-up of inspection results, inspection by foreign parties, follow-up of supervision, determination of intensive and special supervision status, time criteria for supervision status, period of supervision status, and follow-up of supervision status.	Seluruh aspek dari kegiatan usaha PVML di lingkungan IFG *Holding* dapat dilakukan pemeriksaan oleh OJK, baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. If IFG as a Financial Services Institution receives a Written Order from OJK, it shall submit an action plan and a progress report on the implementation of the action plan to OJK (if specified by OJK in the Written Order).

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
28.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("POJK 48/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("POJK 48/2024")	Penyusunan POJK 48/2024 dilatarbelakangi oleh amanat ketentuan Pasal 121 ayat (2), Pasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Cakupan lembaga jasa keuangan yang diatur adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, dan penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Adapun ketentuan yang diatur antara lain: 1. jumlah minimum Direksi; 2. jumlah minimum Dewan Komisaris; 3. jumlah minimum Komisaris Independen; 4. pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi; 5. pembentukan satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit internal serta pembentukan fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan dan fungsi audit internal; dan 6. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko. The preparation of POJK 48/2024 was motivated by the mandate of the provisions of Article 121 paragraph (2), Article 269, and Article 270 paragraph (3) of Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening. The scope of regulated financial services institutions are finance companies, infrastructure finance companies, venture capital companies, microfinance institutions, pawnbroking companies, and the organization of information technology-based joint funding services. The provisions regulated include: 1. minimum number of Directors; 2. minimum number of Board of Commissioners; 3. minimum number of Independent Commissioners; 4. establishment of an audit committee, risk monitoring committee, and remuneration and nomination committee; 5. the establishment of a compliance work unit and an internal audit work unit and the establishment of functions responsible for the implementation of compliance and internal audit functions; and 6. establishment of an internal control system in the implementation of Risk Management.	Penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Anggota *Holding* yang bergerak di industri Modal Ventura wajib memperhatikan ketentuan POJK 48/2024 ini. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah mengenai jumlah minimal anggota Direksi: 1. PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. 2. PVML yang memiliki total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. The implementation of Good Governance for Holding Members engaged in the Venture Capital industry must pay attention to the provisions of this POJK 48/2024. One of the provisions that must be considered is the minimum number of members of the Board of Directors: 1. PVML with total assets of more than IDR250,000,000,000.00 (two hundred and fifty billion rupiah) must have at least 3 (three) members of the Board of Directors. 2. PVML with total assets up to IDR250,000,000,000.00 (two hundred and fifty billion rupiah) must have at least 2 (two) members of the Board of Directors.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
29.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32 of 2024 concerning Development and Strengthening of Securities Transactions and Institutions.	POJK 32/2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang antara lain terkait Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. UU P2SK telah mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diantaranya mengatur ketentuan terkait pengembangan dan penguatan substansi pengaturan Transaksi dan Lembaga Efek di Pasar Modal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Substansi pengaturan yang diatur dalam POJK 32/2024 ini meliputi: 1. Jasa Lain yang dapat diberikan oleh *Self-Regulatory Organizations* berdasarkan ketetapan atau persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; 3. Perluasan Penggunaan Dana Jaminan; 4. Perdagangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Lembaga Penjamin Simpanan; 5. Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha Bagi Penyelenggara Pasar Di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek. POJK 32/2024 was issued as a follow-up to the mandate of Law No. 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), which related to the Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange. The P2SK Law has amended, deleted, and or established new arrangements in Law Number 8 of 1995 on the Capital Market, which among others regulates provisions related to the development and strengthening of the substance of the regulation of Securities Transactions and Institutions in the Capital Market in the Financial Services Authority Regulation. The substance of the regulations stipulated in this POJK 32/2024 includes: 1. Other Services that can be provided by Self-Regulatory Organizations based on the provisions or approval of the Financial Services Authority; 2. Guarantee of Securities Transaction Settlement by Clearing and Guarantee Institution; 3. Expansion of the Use of Guarantee Funds; 4. Trading of Debt Securities and/or Sukuk of the Deposit Insurance Corporation; 5. Difficult conditions that jeopardize the continuity of business activities for market operators in the capital market, stock exchanges, clearing and guarantee institutions, depository and settlement institutions, and/or securities companies.	Penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Anggota *Holding* yang bergerak di Perusahaan Efek wajib memperhatikan ketentuan POJK 32/2024 ini. The implementation of Good Governance for Holding Members engaged in Securities Companies must pay attention to the provisions of this POJK 32/2024.
30.	Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.05/2024 tentang Persetujuan dan Pelaporan Produk Asuransi ("SEOJK 14/2024") OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.05/2024 on Insurance Product Approval and Reporting ("SEOJK 14/2024")	SEOJK 14/2014 ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK 8/2024 yang mengatur tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan produk asuransi, pelaporan produk asuransi, opini dari dewan pengawas syariah, dan pelaporan penghentian produk asuransi. SEOJK 14/2014 is an implementing regulation of POJK 8/2024 which regulates the procedure, form, and format of application for approval of insurance product implementation, insurance product reporting, opinion from the sharia supervisory board, and reporting of insurance product termination.	Terdapat beberapa perubahan dokumen yang harus disiapkan oleh Anggota *Holding* sesuai dengan peraturan ini. There are several changes to the documents that must be prepared by holding members in accordance with this regulation.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
31.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya ("POJK 42/2024"). Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and other Financial Services Institutions ("POJK 42/2024").	POJK 42/2024 merupakan amanat Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam POJK ini mengatur mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko secara efektif berdasarkan empat pilar pada seluruh industri PVML secara terintegrasi agar meminimalisasi potensi adanya *regulatory arbitrage*. Adapun ruang lingkup POJK ini mencakup usaha jasa pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero). Adapun usaha jasa pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara LPBBTI, dan skema kegiatan pembiayaan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK ini mengatur kewajiban penerapan manajemen risiko secara efektif berdasarkan empat pilar yaitu: 1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syaariah, dan pengelola; 2. kecukupan kebijakan & prosedur manajemen risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian internal. POJK 42/2024 is the mandate of Article 122 paragraph (3) and Article 269 of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. This POJK regulates the obligation to implement effective risk management based on four pillars in the entire PVML industry in an integrated manner in order to minimize the potential for regulatory arbitrage. The scope of this POJK includes financing services businesses, Microfinance Institutions, LPEI, Secondary Housing Financing Companies, PT PNM, BP Tapera, and PT SMI (Persero). The financing service business includes Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, Venture Capital Companies, Pawnbroking Companies, LPBBTI Organizers, and other financing activity schemes regulated by the Financial Services Authority. This POJK regulates the obligation to implement effective risk management based on four pillars, namely: 1. active supervision of the board of directors, board of commissioners, sharia supervisory board, and managers; 2. adequacy of risk management policies & procedures; 3. the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as risk management information systems; and 4. internal control system.	PVML dibawah IFG *Holding* memiliki kewajiban: 1. Membentuk organisasi dan fungsi manajemen risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha. 2. Memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko atas pengembangan atau perluasan kegiatan usaha yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau saat ini telah dilakukan namun berpotensi mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu. 3. Melakukan penilaian sendiri atas tingkat risiko dan disampaikan dalam laporan profil risiko. PVML under IFG Holding has obligations: 1. Establish a risk management organization and function tailored to the size and complexity of the business. 2. Have written policies and procedures to manage the risk of developing or expanding business activities that have not previously been carried out or are currently being carried out but have the potential to change or increase certain risk exposures. 3. Conduct self-assessment of the level of risk and submitted in the risk profile report.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
32.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura ("POJK 46/2024") Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies ("POJK 46/2024")	Penerbitan POJK 46 Tahun 2024 ini dilatar belakangi oleh: 1. semakin kompleksnya kegiatan lembaga pembiayaan berdampak terhadap penanganan berbagai permasalahan di lembaga pembiayaan sehingga memerlukan penyempurnaan mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan aspek prudensial dan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengutan Sektor Keuangan (UU P2SK); 2. Upaya untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap industri PP, PPS, PPI, PMV dan PMVS. The issuance of POJK 46 of 2024 is motivated by: 1. The increasing complexity of the activities of financing institutions has an impact on the handling of various problems in financing institutions so that it requires the improvement of effective and efficient risk mitigation to ensure the fulfillment of prudential aspects and the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law); 2. Efforts to support industry development and legal needs for the Finance Companies (PP), Sharia Finance Companies (PPS), Infrastructure Finance Companies (PPI), Venture Capital Companies (PMV) and Sharia Venture Capital Companies (PMVS) industries.	Peraturan ini berdampak terhadap Anggota *Holding* yang bergerak di industri Modal Ventura. BAV dalam hal ini perlu memperhatikan beberapa pokok substansi yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kegiatan PMV, antara lain: 1. Penyesuaian ketentuan pemisahan unit usaha syariah. 2. Penyesuaian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK yaitu Pasal 126 ayat (3) yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendorong peran asosiasi Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan industri Usaha Jasa Pembiayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, asosiasi harus memiliki pedoman dalam bentuk *code of conduct*. This regulation has an impact on Holding Members engaged in the Venture Capital industry. BAV in this case needs to pay attention to several main substances that are adjusted in accordance with PMV activities, among others: 1. Adjustment of separation provision of sharia business unit 2. The adjustment is in accordance with the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning P2SK, namely Article 126 paragraph (3) which stipulates that the Financial Services Authority encourages the role of the Financing Services Business association as referred to in paragraph (2) to build market discipline-based supervision in the context of strengthening and/ or restructuring the Financing Services Business industry. In performing its duties and functions, the association must have guidelines in the form of a code of conduct.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
33.	Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("SE OJK 22/2024") OJK Circular Letter No. 22/ SEOJK.06/2024 on Fit and Proper Test for Main Parties of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions ("OJK Circular 22/2024")	Terdapat penyesuaian ruang lingkup penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) bagi calon Pihak Utama sebagai dampak reorganisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memisahkan sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB) menjadi sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Selain itu terdapat penambahan ketentuan mengenai pelaksanaan proses PKK bagi calon pihak utama secara online melalui media video conference yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank beserta perubahannya. There are adjustments to the scope of the fit and proper test (PKK) for prospective Main Parties as a result of the reorganization of the Financial Services Authority as a follow-up to Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), which separates the Non-Bank Financial Industry (IKNB) sector into the Insurance, Guarantee, and Pension Fund (PPDP) and Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions (PVML) sectors. In addition, there are additional provisions regarding the implementation of the Fit and Proper Test process for prospective main parties online through video conference media which were previously regulated in Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for NonBank Financial Services Institutions and its amendments.	Penerapan Tata Kelola Yang Baik bagi Anggota *Holding* yang bergerak sebagai Perusahaan Modal Ventura wajib memperhatikan ketentuan SEOJK 22/2024 ini. Terdapat larangan melakukan tindakan, tugas, dan fungsi serta pemberian remunerasi yang lebih rendah bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah diangkat terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum dilakukan PKK. Persyaratan dalam PKK, yaitu: persyaratan integritas, persyaratan reputasi keuangan, persyaratan kelayakan keuangan, dan/atau persyaratan kompetensi. The implementation of Good Governance for Holding Members engaged as Venture Capital Companies must pay attention to the provisions of this SEOJK 22/2024. There is a prohibition on performing actions, duties, and functions as well as providing lower remuneration for prospective members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Management Board, or members of the Sharia Supervisory Board who have been appointed in advance by the General Meeting of Shareholders (GMS) before the Fit and Proper Test. Requirements in the Fit and Proper Test, namely: integrity requirements, financial reputation requirements, financial viability requirements, and/or competency requirements.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes in Regulations/ Legislation	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Impact on the Company
34.	Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.06/2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi ("SE OJK 5/2024") OJK Circular Letter Number 5/ SEOJK.06/2024 on Mechanism of Trial Room and Innovation Development ("OJK Circular Letter 5/2024")	Latar belakang penerbitan SEOJK 5/2024 ini adalah merupakan amanat POJK 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi teknologi Sektor Keuangan, yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme ruang uji coba dan pengembangan inovasi (*sandbox*). Dalam SE OJK 5/2024 ini diatur ketentuan terkait tata cara permohonan menjadi Peserta, proses verifikasi dan analisis dokumen permohonan menjadi peserta, proses uji coba dan pengembangan inivasi, laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi, pemantauan atas laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi, pembatalan persetujuan sebagai peserta, laporan akhir *sandbox*, hasil *sandbox*, dan alur mekanisme *sandbox*. The background to the issuance of SEOJK 5/2024 is the mandate of POJK 3/2024 concerning the Implementation of technological innovation in the Financial Sector, which further regulates the mechanism for testing and developing innovation (sandbox). SE OJK 5/2024 regulates provisions related to the procedure for applying to become a participant, the process of verification and analysis of application documents to become a participant, the process of trial and development of innovations, reports on the results of the implementation of trials and development of innovations, monitoring of reports on the results of the implementation of trials and development of innovations, cancellation of approval as a participant, final sandbox report, sandbox results, and sandbox mechanism flow.	Baik *Holding* maupun Anggota *Holding* IFG apabila akan menjadi penyelenggara ITSK agar merujuk pada SEOJK 5/2024 ini. Both Holding and IFG Holding Members if they are to become ITSK organizers should refer to this SEOJK 5/2024.
35.	Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. ("SEOJK 6/2024") OJK Circular Letter Number 6/SEOJK.07/2024 concerning Registration of Financial Sector Technology Innovation Providers. ("SEOJK 6/2024")	Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Peserta yang lulus untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan ini antara lain sebagai berikut: 1. kesiapan Peserta yang terdiri atas aspek kelembagaan, permodalan, dan infrastruktur teknologi; 2. kesiapan kerangka pengaturan; dan 3. kesiapan infrastruktur pendukung pasar lainnya. Through the Financial Services Authority Regulation No. 3 of 2024 on the Implementation of Technology Innovation in the Financial Sector, the Financial Services Authority may determine the Participants who pass to register before applying for a business license based on considerations made by the Financial Services Authority. These considerations include the following: 1. Participants' readiness, which consists of institutional, capital, and technological infrastructure aspects; 2. readiness of the regulatory framework; and 3. readiness of other market supporting infrastructure.	Baik *Holding* maupun Anggota *Holding* IFG apabila akan menjadi penyelenggara ITSK wajib merujuk pada SEOJK 6/2024 ini. Both Holding and IFG Holding Members if they are to become ITSK organizers must refer to this SEOJK 6/2024.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

ACCOUNTING POLICY CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

Di tahun 2024, Grup menerapkan standar dan interpretasi baru/amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang menjadi efektif pada tahun 2024. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
2. Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
3. Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
4. Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan

5. Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi dari amendemen dan revisi terhadap standar-standar tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

In 2024, the Group adopted new standards and interpretations/amendments to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") which became effective in 2024. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

Starting from January 1, 2024, the references to each PSAK and ISAK have been changed in accordance with the issuance by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendments and revisions to standards are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption permitted, namely:

1. Amendments to PSAK 116: Leases on Lease Liabilities under Sale and Lease-Back;
2. Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements on the Classification of Liabilities as Short-term or Long-term;
3. Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements on Long-Term Liabilities with Covenants;
4. Amendment to PSAK 207: Statement of Cash Flows and amendments to PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures about Supplier Financing Arrangements; and
5. Revision of PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah and Revised PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of the amendments and revisions to the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the consolidated financial statements in the current or prior years.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

Sebagai komitmen terhadap pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel, IFG telah mengikuti proses penilaian tingkat kesehatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan melalui surat PEFINDO Nomor RTG-198/PEF-DIR/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, tingkat kesehatan IFG di tahun 2024 dinyatakan berada dalam kategori "Sangat Sehat" dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Dalam penilaian tersebut, IFG memperoleh standalone rating idA+ (Single A Plus), yang mencerminkan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi komitmen jangka panjang, meskipun tetap sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Selain itu, IFG juga memperoleh final rating idAAA/Stable (Triple A Stable Outlook), yang merupakan peringkat tertinggi dalam skala pemeringkatan PEFINDO, mencerminkan kemampuan superior perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

As part of its commitment to transparent and accountable corporate governance, IFG has undergone a health rating assessment process conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) in accordance with the provisions of Article 81 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. Based on the assessment results communicated via PEFINDO's letter No. RTG-198/PEF-DIR/VI/2025 dated June 13, 2025, IFG's financial health in 2024 was categorized as "Very Healthy" and demonstrated strong capacity to meet its long-term obligations. Education and Training Materials.

In this assessment, IFG received a standalone rating of idA+ (Single A Plus), which reflects its strong financial ability to meet long-term commitments, although it remains sensitive to significant changes in economic conditions. In addition, IFG also received a final rating of idAAA/Stable (Triple A Stable Outlook), which is the highest rating on PEFINDO's rating scale, reflecting the company's superior ability to meet its long-term obligations.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menghadapi faktor yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usahanya. Meskipun demikian, IFG tetap waspada terhadap berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang sarat dengan ketidakpastian. Manajemen juga mencermati perkembangan di setiap segmen usaha, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pendekatan selektif dalam menentukan kebijakan strategis guna memastikan kualitas aset tetap terjaga dan profitabilitas dapat dipertahankan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pertumbuhan yang optimal, IFG terus menyempurnakan kebijakan strategisnya dengan mengutamakan tata kelola yang baik dan prinsip manajemen risiko yang terukur. Perusahaan secara proaktif menetapkan profil risiko serta strategi mitigasi yang efektif untuk mengantisipasi potensi hambatan di masa mendatang, sehingga stabilitas dan keberlanjutan bisnis dapat terus terjaga.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Di tahun 2024, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, parameter yang digunakan Manajemen dalam melakukan pengukuran dan penilaian tersebut antara lain:

1. Aspek keuangan
   a. Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2024 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
   b. Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan saldo-saldo aktual tahun 2023.

MATTERS THAT POTENTIALLY HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Until the end of 2024, the Company does not face any factors that have the potential to have a significant impact on its business continuity. Nevertheless, IFG remains vigilant against various challenges, especially in the face of global economic dynamics that are full of uncertainties. Management is also paying close attention to developments in each business segment, by applying the precautionary principle and selective approach in determining strategic policies to ensure asset quality is maintained and profitability can be maintained.

As a form of commitment in driving optimal growth, IFG continues to refine its strategic policies by prioritizing good governance and measurable risk management principles. The Company proactively establishes risk profiles and effective mitigation strategies to anticipate potential obstacles in the future, so that business stability and sustainability can be maintained.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT SIGNIFICANTLY INFLUENCED BUSINESS CONTINUITY

Management has assessed the ability to go on with its business and is confident that the Company has the resources to keep doing business in the future. In 2024, management doesn't see any material uncertainty that could cause significant doubt about the Company's ability to stay in business.

In measuring and assessing matters that have the potential to have a significant effect on business continuity, the parameters used by Management in conducting such measurements and assessments include:

1. Financial Aspect
   a. Compare the actual balances for 2024 with the audited Financial Statements.
   b. Recalculate the percentage fluctuation reported by Management between the actual balances for 2024 and the targets for 2024 and the actual balances for 2023.

2. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan
   a. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja keuangan antara realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   b. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja operasional antara realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   c. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja administrasi antara realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   d. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan tingkat kesehatan Perusahaan antara realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Manajemen mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan asesmen terhadap keberlangsungan usaha, antara lain:

1. Kinerja Keuangan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas
4. Masalah Internal
5. Perkara Hukum

2. Assessment of the Company's soundness level
   a. Recalculate and compare financial performance indicators between the 2024 realization and the 2024 target based on the established criteria.
   b. Recalculate and compare operational performance indicators between the 2024 realization and the 2024 target based on the established criteria.
   c. Recalculate and compare administrative performance indicators between the 2024 realization and the 2024 target based on the established criteria.
   d. Recalculate and compare the Company's soundness level between the 2024 realization and the 2024 target based on the established criteria.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

Management considers various factors in assessing business continuity, among others:

1. Financial Performance
2. Liquidity
3. Solvency
4. Internal Problems
5. Legal Cases

PROSPEK USAHA TAHUN 2025
BUSINESS PROSPECT IN 2025

GAMBARAN UMUM KONDISI PEREKONOMIAN TAHUN 2025

Sebagaimana dikutip dari Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program-program yang dirumuskan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.

OVERVIEW OF ECONOMIC CONDITIONS IN 2025

As quoted from the Bank Indonesia Annual Meeting Book 2024, it explains that overall, the programs formulated by the Government are expected to increase higher economic growth with maintained macroeconomic stability.

Tabel Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024-2030
Table of Indonesia Economic Projection in 2024-2030

Indikator Indicator	Satuan Unit	2024	2025	2026	2030		
					Baseline	Optimis Optimistic	Super Optimis Super Optimistic
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	%	4,7-5,5	4,8-5,6	4,9-5,7	5,3-61	5,8-6,6	6,7-7,5
Inflasi IHK CPI Inflation	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Transaksi Berjalan Current Account	% PDB	-0,1 s.d -0,9	-0,5 s.d -1,3	-0,6 s.d -1,4	-0,5 s.d -1,3	-0,9 s.d -1,7	-1,1 s.d -1,9
Kredit Perbankan Bank Credit	%	10-12	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13

Sumber: Proyeksi Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia Projections

Simulasi capaian kinerja perekonomian sebagai hasil dari implementasi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional perlu terus dievaluasi dengan dinamika yang berkembang dan respons bauran kebijakan yang diperlukan. Sejumlah asumsi mendasari simulasi ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia diasumsikan akan meningkat dari 3,2% pada 2024 menjadi 3,4% pada 2030, dengan inflasi dan harga komoditas dunia yang stabil dan suku bunga kebijakan moneter AS akan turun dari 4,5% menjadi 3,5%. Asumsi ini dapat saja berubah dengan kebijakan Pemerintah AS di bawah Presiden Trump. Pertumbuhan ekonomi AS bisa meningkat lebih tinggi, tetapi Tiongkok, Uni Eropa dan sejumlah negara lain justru menurun. Inflasi AS bisa saja lebih tinggi, dan karenanya suku bunga FFR tidak menurun tetapi justru *Yield* US Treasury meningkat tinggi dengan kenaikan utang Pemerintah AS dan dolar AS semakin kuat.

Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia yang berubah cepat ini dapat berpengaruh pada stabilitas dan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia perlu dikalibrasi untuk penguatan kerja sama bilateral dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dunia, seperti AS, India, dan Arab Saudi. Kedua, di samping program dan proyek Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, peran swasta baik perusahaan besar maupun UMKM, ekonomi kreatif, sektor jasa ekonomi dan keuangan digital, dan pariwisata

Simulations of economic performance as a result from the implementation of the national economic transformation policy mix need to be continuously evaluated in light of evolving dynamics and the necessary policy mix responses. A number of assumptions underlie these simulations. First, global economic growth is assumed to increase from 3.2% in 2024 to 3.4% in 2030, with stable global inflation and commodity prices and US monetary policy interest rates falling from 4.5% to 3.5%. These assumptions may change with US government policy under President Trump. U.S. economic growth could rise higher, but China, the European Union, and several other countries are expected to see declines. U.S. inflation could be higher, and therefore the federal funds rate (FFR) may not decline but instead see a significant increase in U.S. Treasury yields due to rising U.S. government debt and a stronger U.S. dollar.

The fast-changing dynamics of geopolitics and the world economy can affect the stability and achievement of Indonesia's economic growth. Thus, Indonesia's trade and investment policies need to be calibrated to strengthen bilateral cooperation with sources of world economic growth, such as the US, India and Saudi Arabia. Second, in addition to Government programs and projects to boost growth, the role of the private sector, both large companies and MSMEs, the creative economy, the digital economy and financial services sector, and tourism is very important

sangat penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kaitan ini, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan kepastian usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Yang tak kalah penting ialah terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membentuk kredibilitas bagi kinerja perekonomian Indonesia yang diakui secara internasional. Dalam kaitan ini, koordinasi erat antara kebijakan Pemerintah, kebijakan Bank Indonesia, dan kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perekonomian global yang berubah cepat menjadi prasyarat dan landasan bagi keberhasilan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN TERKAIT PROSPEK USAHA DI TAHUN 2025

Tahun 2025 menjadi fase penting yang akan menjadi landasan utama bagi Perusahaan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, rencana kerja tahun 2025 difokuskan pada penguatan fundamental bisnis dengan mengadopsi praktik terbaik, meningkatkan kapabilitas perusahaan, serta melakukan transformasi organisasi dan budaya untuk menciptakan organisasi dengan kinerja unggul (*high-performing organization).*

Mengacu pada 23 *strategic levers*, IFG menyusun berbagai inisiatif strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025. Di mana setiap inisiatif telah melalui analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) guna memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dari 23 *strategic levers,* IFG kemudian menyusun 19 Proyek Korporasi yang dibagi ke beberapa kategori sebagai berikut:

Proyek Korporasi terkait Optimasi Bisnis dan Operasional:

1. Pengoptimalan Program Penugasan Pemerintah;
2. Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan;
3. *Key Account Management* (KAM) dan Penguatan Kapasitas Bisnis Asuransi (*Joint Underwriting*, Reasuransi, dan *Risk Management Partner*);
4. Peningkatan dan Penguatan *Distribution Channel* (Digital, B2B2C, G2G);
5. Persiapan untuk Masuk ke dalam Pasar MTPL;
6. Digitalisasi Proses Bisnis;
7. Perbaikan layanan Asuransi Kesehatan untuk meningkatkan *customer experience* dan menurunkan klaim rasio (seperti melalui *telemedicine*);
8. Optimalisasi/Konsolidasi Bisnis Syariah dan Penjaminan di Ekosistem IFG;
9. Restrukturisasi dan Penyehatan Bisnis Reasuransi; dan
10. Optimalisasi Bisnis CMI.

for driving economic growth and job creation. In this regard, improving the investment climate, infrastructure development, and business certainty are key to economic growth and job creation.

Equally important is the maintenance of macroeconomic and financial system stability that has established credibility for Indonesia's internationally recognized economic performance. In this regard, close coordination between Government policies, Bank Indonesia policies, and Financial System Stability Committee (KSSK) policies in the face of fast-changing geopolitical and global economic dynamics is a prerequisite and foundation for the success of the national economic transformation policy mix in achieving high and sustainable economic growth towards the Golden Indonesia (Indonesia Emas) of 2045.

COMPANY AND STRATEGIES RELATED TO BUSINESS PROSPECTS IN 2025

The year 2025 is an important phase that will be the main foundation for the Company in the next five years. Therefore, the 2025 work plan is focused on strengthening business fundamentals by adopting best practices, enhancing corporate capabilities, and transforming the organization and culture to create a high-performing organization.

Referring to the 23 strategic levers, IFG has developed various strategic initiatives that will be implemented by 2025. Each initiative has gone through a cost-benefit analysis to ensure that the benefits gained outweigh the costs incurred. From the 23 strategic levers, IFG then developed 19 Corporate Projects divided into the following categories:

Corporate Projects related to Business and Operational Optimization:

1. Government Assignment Program Optimization;
2. Assurance Information System Development;
3. Key Account Management (KAM) and Strengthening Insurance Business Capacity (Joint Underwriting, Reinsurance, and Risk Management Partner);
4. Improvement and Strengthening of Distribution Channels (Digital, B2B2C, G2G);
5. Preparation for MTPL Market Entry;
6. Digitalization of Business Processes;
7. Improvement of Health Insurance services to enhance customer experience and reduce claim ratio (such as through telemedicine);
8. Optimization/Consolidation of Sharia and Guarantee Business in the IFG Ecosystem;
9. Restructuring and Revitalization of Reinsurance Business; and
10. CMI Business Optimization.

Proyek Korporasi terkait Kepatuhan:
1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan;
2. Implementasi dan Optimalisasi Penerapan PSAK 117;
3. Pengembangan dan Implementasi ERP; dan
4. Program *Environmental, Social, and Governance (ESG).*

Proyek Korporasi terkait Transformasi Organisasi:

1. *Purpose Activation and Culture Transformation;*
2. *Talent Management and Development;*
3. Tindak Lanjut Kajian *Brand* Arsitektur; dan
4. Implementasi *Parenting Governance.*

Proyek Korporasi terkait Sinergi antar Anggota *Holding*:
1. Implementasi *Shared Services;* dan
2. Optimalisasi Aset dan Investasi secara terintegrasi.

Compliance-related Corporate Projects:
1. Improved Governance and Financial Management;
2. Implementation and Optimization of PSAK 117;
3. ERP Development and Implementation; and
4. Environmental, Social, and Governance (ESG) Program.

Corporate Projects related to Organizational Transformation:
1. Purpose Activation and Culture Transformation;
2. Talent Management and Development;
3. Follow-up for Architecture Brand Review; and
4. Implementation of Parenting Governance.

Corporate Projects related to Synergy between Holding members:
1. Implementation of Shared Services; and
2. Integrated Asset and Investment Optimization.


IFG



6

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

IFG meyakini bahwa peningkatan nilai perusahaan yang berlandaskan integritas akan memperkuat kinerja dan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan.

IFG believes that increasing corporate value based on integrity will strengthen performance and provide added value to Shareholders and stakeholders.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan persaingan yang sehat dan lingkungan usaha yang kondusif. Oleh karena itu, IFG berkomitmen untuk secara konsisten dan berkelanjutan memperkuat governansi melalui 4 (empat) pilar utama. Diharapkan, upaya ini tidak hanya meningkatkan kinerja IFG tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nilai tambah tersebut diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang selaras dengan budaya IFG, sehingga mampu menghadirkan layanan yang unggul, inovatif, efisien, dan efektif sesuai dengan perkembangan bisnis.

Selain itu, penerapan governansi perusahaan terus berkembang seiring dengan dinamika lingkungan bisnis, mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini juga memperkuat integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang optimal, serta hubungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan yang berlandaskan prinsip etika. Seluruh Insan IFG senantiasa berkomitmen dalam menerapkan governansi perusahaan dengan semangat dan tekad yang kuat. Semangat ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan IFG dengan kualitas produk dan proses kerja yang unggul, serta kepatuhan terhadap kode etik bisnis, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan.

Penerapan GCG secara berkelanjutan oleh IFG merupakan bukti nyata dari komitmen IFG untuk terus berinovasi dalam menyempurnakan berbagai aspek di lingkungan internal organisasi. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, prinsip dan kebijakan governansi perusahaan dijadikan pedoman bagi manajemen serta seluruh Insan IFG dalam menjalankan bisnis. IFG selalu berpegang pada kebijakan governansi yang mengacu pada standar terbaik yang berlaku. Selain itu, IFG juga terus memperkuat infrastruktur governansi, termasuk peningkatan sistem dan prosedur bisnis, dengan menerapkan struktur yang mendukung pelaksanaan governansi perusahaan secara efektif.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Komitmen IFG dalam menerapkan governansi perusahaan tercermin dalam kerangka kerja atau *Governance Framework*. IFG berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip governansi secara konsisten dan menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut berlandaskan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

COMMITMENT AND CONSISTENCY IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in a Company is one of the main factors in creating healthy competition and a conducive business environment. Therefore, IFG is committed to consistently and continuously strengthen governance through 4 (four) main pillars. This effort is expected to not only improve IFG's performance but also provide added value for stakeholders. The added value is realized through attitudes and behaviors that are in line with IFG's culture, to be able to deliver superior, innovative, efficient, and effective services in accordance with business development.

In addition, the implementation of corporate governance continues to evolve in line with the dynamics of the business environment, including supervisory and control systems that support work ethics and responsible decision-making. It also strengthens integrity in financial reporting, optimal risk management, and relationships between stakeholders and the company based on ethical principles. All IFG personnel are committed to implementing corporate governance with passion and strong determination. This dedication is believed to drive IFG's growth and development with superior product quality and work processes, as well as compliance with the business code of conduct, including environmental responsibility.

IFG's continuous implementation of GCG is clear evidence of IFG's commitment to continuously innovate in improving various aspects of the organization's internal environment. In daily operations, the principles and policies of corporate governance are used as guidelines for management and all IFG personnel in conducting business. IFG always adheres to governance policies that refer to the best applicable standards. IFG also continues to strengthen its governance infrastructure, including the improvement of business systems and procedures, by implementing a structure that supports the effective implementation of corporate governance.

GOVERNANCE FRAMEWORK

IFG's commitment to implementing corporate governance is reflected in its Governance Framework. IFG strives to implement the principles of governance consistently and thoroughly. These principles are based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of SOEs

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum Tata kelola perusahaan Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Sebagai bagian dari komunitas korporasi, IFG menerapkan prinsip-prinsip governansi perusahaan yang berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, yang terakhir diperbarui pada tahun 2021. PUGKI 2021 merupakan penyempurnaan dan perkembangan terbaru dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan), yang sebelumnya digunakan dalam PUGKI 2019.

As part of the corporate community, IFG applies corporate governance principles based on 4 (four) key pillars: Ethical Behavior, Accountability, Transparency and Sustainability, which were last updated in 2021. PUGKI 2021 is the latest refinement and development of the TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) core values, which were previously used in PUGKI 2019.

Pilar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Pillars of Corporate Governance

PERILAKU BERETIKA
ETHICAL BEHAVIOR

AKUNTABILITAS
ACCOUNTABILITY

TRANSPARAN
TRANSPARENCY

KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY

Pilar Pillar	**Prinsip Dasar** Basic Principles
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam menjalankan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In conducting its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. Corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The corporation shall be accountable for its performance in a transparent and fair manner. Thus, the Corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information that the stakeholders can easily access and understand. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are important for shareholders, creditors and other stakeholders in making decision.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is consistent with business interests and the sustainable development agenda.

Selain menerapkan pilar-pilar governansi perusahaan, IFG juga mengadopsi 8 (delapan) prinsip governansi yang mencakup hak-hak Pemegang Saham, pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan, serta ketentuan utama dalam

Not only applying the pillars of corporate governance, IFG also adopts 8 (eight) governance principles that cover shareholder rights, fulfillment of stakeholder interests, and key provisions in the management and supervision

pengelolaan dan pengawasan korporasi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga mencakup aspek etika, manajemen risiko, dan transparansi. Ke delapan prinsip tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu:

1. kelompok prinsip pertama, kedua, dan ketiga adalah prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kelompok prinsip keempat, kelima, dan keenam adalah prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. kelompok prinsip ketujuh dan kedelapan adalah prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Prinsip-prinsip governansi perusahaan beserta penerapannya dalam lingkungan IFG disajikan dalam tabel berikut:

of corporations in Indonesia. These principles also cover aspects of ethics, risk management and transparency. The eight principles are grouped into 3 (three) main categories, namely:

1. The first, second, and third groups of principles are principles that regulate the management and supervisory functions of the corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. The fourth, fifth and sixth groups of principles regulates the processes and outputs produced by the Board of Directors and Board of Commissioners; and
3. The seventh and eighth groups of principles regulates the resource owners, who will primarily benefit from the implementation of corporate governance.

The principles of corporate governance and their application within the IFG environment are presented in the following table:

Prinsip Principle	**Definisi** Definition	**Penjelasan** Explanation
Prinsip 1 Principle 1		
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. The Board of Directors and Board of Commissioners conduct their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the long-term best interests of the corporation and shareholders, taking into account the interests of stakeholders.	Peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu, prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris. The roles and responsibilities of the Board of Directors in conducting corporate management and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising corporate management by the Board of Directors. Furthermore, this Principle regulates the performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their respective members, the handling of conflicts of interest that occur to the Board of Directors and Board of Commissioners. It also regulates the competence development for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
Prinsip 2 Principle 2		
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors as the management organ and the composition of the Board of Commissioners as the supervisory organ are diverse. Each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise required to appropriately fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners. Remuneration is designed to effectively align the interests of Board members with the long-term interests of the corporation and sustainable value creation.	Mengharuskan pemilihan dan penetapan Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel. Requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners be carried out in such a way that the Board of Directors and the Board of Commissioners as management and supervisory organs, respectively, have a composition of members with the required knowledge, abilities and expertise in accordance with their respective roles. In addition, this Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability, and requires the disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Prinsip Principle	Definisi Definition	Penjelasan Explanation
Prinsip 3 Principle 3		
Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional and trusting working relationship for the best interest of the corporation.	Menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya. Emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional, trusting working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. Principle 3 also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understanding the implications of the ownership structure of the corporation on the implementation of their roles.
Prinsip 4 Principle 4		
Perilaku Etis Ethical Behavior	Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi. The corporation is committed to acting ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.	Korporasi perlu untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. The corporation need to make regular statements about the corporation's commitment not only to comply with applicable laws and regulations, but also the commitment to act ethically and responsibly.
Prinsip 5 Principle 5		
Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	Korporasi menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas. The Corporation implements corporate governance practices that are integrated with the implementation of internal control and risk management systems, as well as an effective compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.	Direksi harus mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi. The Board of Directors shall implement governance, internal control and risk management systems, and compliance management systems in an integrated manner as part of the strategies, management tools, and practices completed by the corporation in doing business responsibly as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides input on the effectiveness of the implementation of governance, internal control and risk management systems, and corporate compliance management systems implemented in an integrated manner by the Board of Directors.
Prinsip 6 Principle 6		
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. The Corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the corporation.	Korporasi harus memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan tata kelola perusahaan. The corporation should have a governance framework that provides the assurance that accurate and timely disclosure of all material matters about the corporation, including financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance, can be achieved.

Prinsip Principle	Definisi Definition	Penjelasan Explanation
Prinsip 7 Principle 7		
Hak-hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemegang Saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap Pemegang Saham. Semua Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. The corporation protects and facilitates the exercise of Shareholders' rights and ensures fair treatment of shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective redress for any violation of their rights.	Pemenuhan hak Pemegang Saham dan perlakuan adil bagi Pemegang Saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan Pemegang Saham dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak Pemegang Saham secara efektif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fulfillment of Shareholders' rights and fair treatment for Shareholders how active cooperation between the corporation and its shareholders is conducted and the effective exercise of some shareholder rights through the General Meeting of Shareholders (GMS).
Prinsip 8 Principle 8		
Hak-hak Pemangku Kepentingan Stakeholder Rights	Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. The corporation recognizes the rights of stakeholders set out in the applicable laws and regulations or an agreement entered into by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment and financially sound business sustainability.	Peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, Melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi. The role of the Board of Directors and Board of Commissioners is to integrate sustainability aspects into the corporate business model, implement stakeholder engagement, and ensure the protection of stakeholders' rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all aspects mentioned above by the Board of Directors.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam penerapan governansi, IFG senantiasa berpedoman pada beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;

THE BASIS FOR IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

In implementing governance, IFG is always guided by several regulations, including:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Government Regulation Number 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in National Private Business Development as amended by Government Regulation Number 15 of 2020;
4. Government Regulation Number 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Share Capital Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
5. Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management;
6. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
7. Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2020 concerning Financial Conglomerates, as repealed by Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Parent Companies of Financial Conglomerates;
8. Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.05/2022 Concerning Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
12. Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;
15. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan
16. Pedoman Umum Tata kelola perusahaan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Tahun 2021.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai *Holding* BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten. Penerapan governansi dalam bidang keuangan, investasi, dan konsultasi manajemen bertujuan untuk:

1. menjadi acuan IFG dalam Melaksanakan tata kelola pada industri asuransi, penjaminan dan investasi;
2. meningkatkan reputasi dan mengoptimalkan nilai IFG agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan IFG;
3. mendorong pengelolaan IFG secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ IFG;
4. mendorong agar organ IFG dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial IFG terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar IFG;

9. Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
10. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
11. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
12. A copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Guidelines for the Preparation of Key Performance Indicators at State-Owned Enterprises;
13. Copy of the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index within State-Owned Enterprises;
14. Decision of the Deputy for Finance and Risk Management Number SK-7/DKU.MBU/10/2023 concerning Technical Guidelines for Risk Management Reporting by State-Owned Enterprises;
15. Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 2 of 2023 concerning Integrated Good Corporate Governance Guidelines; and
16. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance by the National Committee concerning Governance Policy (KNKG) 2021.

OBJECTIVES OF IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

As part of the Insurance, Guarantee and Investment SOE Holding, IFG is committed to consistently applying the principles of corporate governance. The implementation of governance in finance, investment, and management consulting aims to:

1. become a reference for IFG in implementing governance in the insurance, guarantee, and investment industries;
2. enhance the reputation and optimize the value of IFG in order to have a strong competitiveness, both nationally and internationally, in order to maintain its existence and live sustainably to achieve IFG's goals and objectives;
3. encourage professional, efficient, and effective management of IFG as well as empowering the functions and increasing the independence of IFG organs;
4. encourage IFG organs to make decisions and take actions based on high moral values and compliance with the provisions of laws and regulations as well as awareness of IFG's social responsibility to stakeholders and environmental sustainability around IFG;

5. mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan IFG dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya IFG yang lebih baik;
6. menciptakan dan meningkatkan iklim yang kondusif pada sektor keuangan nasional khususnya di bidang asuransi, penjaminan dan investasi serta mendorong terbentuknya identitas, karakter, dan motivasi karyawan untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan IFG serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
7. mematuhi aspek kepatuhan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. develop attitudes and behaviors in accordance with the demands of IFG development and changes in the business environment towards a better IFG culture;
6. create and improve a conducive climate in the national financial sector, especially in the fields of insurance, guarantee and investment, and encourage the formation of identity, character, and motivation of employees to behave and act according to the demands of IFG and based on sound moral and ethical values; and
7. comply with compliance aspects as a financial services institution supervised by the Financial Services Authority.



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Sampai akhir tahun 2024, IFG telah Melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung penerapan governansi, di antaranya:

1. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mendukung penerapan governansi, yaitu di antaranya: (a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), (b) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, (c) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, (d) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), (e) Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), (f) Pedoman Pengendalian Gratifikasi, (g) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), (h) Pedoman Benturan Kepentingan, dan (i) Pedoman Penilaian *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris dan Direksi;
2. membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan mengesahkan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai wujud implementasi atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Terintegrasi;
3. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. menetapkan struktur organisasi;
6. menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan;
7. mengikuti pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
9. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi secara berkala; dan
10. mengoptimalkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi.

Until the end of 2024, IFG has completed various activities to support the implementation of governance, including:

1. implementing policies and procedures to support the implementation of governance, including: (a) Good Corporate Governance Guidelines, (b) Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors, (c) Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners (d) Code of Conduct, (e) Compliance Guidelines for Submission of State Officials Wealth Reports (LHKPN), (f) Gratification Control Guidelines, (g) Whistleblowing System Guidelines, (h) Conflict of Interest Guidelines, and (i) Board of Commissioners' and Directors' Key Performance Indicator (KPI) Assessment Guidelines;
2. establishing an Integrated Corporate Governance Committee and ratify the Integrated Corporate Governance Committee as a form of implementation of the Integrated Good Corporate Governance Guidelines;
3. establishing the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
4. organizing the annual General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with laws and regulations;
5. establishing an organizational structure;
6. preparing annual reports and sustainability reports;
7. following the implementation of monitoring and evaluation of Public Information Disclosure by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia refers to the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
8. conducting self-assessment on the implementation of good corporate governance;
9. organizing regular Board of Commissioners meetings and Board of Directors meetings; and
10. optimizing the role of supporting organs of the Board of Commissioners and Board of Directors.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GOVERNANSI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip governansi, IFG telah menunjuk unit kerja di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan untuk memastikan implementasi governansi dilakukan secara *prudent* dan berkelanjutan melalui serangkaian program kerja yang strategis.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI TAHUN 2024

Selaras dengan komitmen dan pemahaman IFG terhadap peran penting tata kelola perusahaan dalam keberlanjutan

RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

As a commitment to the implementation of the principles of governance, IFG has appointed a work unit under the Corporate Secretary Division to ensure the implementation of governance is done prudently and sustainably through a series of strategic work programs.

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT IN 2024

In line with IFG's commitment and understanding of the important role of corporate governance in the sustainability

suatu perusahaan, IFG senantiasa meningkatkan praktik tata kelola di sepanjang tahun 2024 melalui pelaksanaan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

of a company, IFG continues to improve its governance practices throughout 2024 through the implementation of self-assessment on the implementation of good corporate governance with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates and a copy of the Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) merupakan penilaian yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu struktur, proses, dan hasil. Penilaian tersebut meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. penerapan manajemen risiko terintegrasi;
7. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
8. serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

Self-assessment is an assessment conducted on 3 (three) aspects of governance, namely structure, process, and results. The assessment includes at least 7 (seven) governance implementation assessment factors, namely:

1. implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
2. implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
3. duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee;
4. duties and responsibilities of the Integrated Compliance Working Unit;
5. duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit;
6. implementation of integrated risk management;
7. preparation and implementation of the Integrated Governance Guidelines; and
8. as well as taking into account other information related to the implementation of integrated governance.

Hasil penilaian pelaksanaan GCG terintegrasi IFG mengacu pada peringkat sesuai yang dikategorikan dalam ketentuan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015, di mana dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.

The results of the integrated GCG assessment by IFG refer to the rating categories specified in SEOJK Regulation Number 15/SEOJK.03/2015, which categorizes the assessment into five (5) ratings: Rating 1, Rating 2, Rating 3, Rating 4, and Rating 5. A lower Integrated Governance Rating reflects better implementation of Integrated Governance.

Berikut merupakan hasil penilaian GCG terintegrasi IFG untuk tahun 2024:

The following are the results of the IFG integrated GCG assessment for 2024:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2024
Results of the 2024 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
IFG	2	Mencerminkan IFG telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum "Baik". Hal ini terefleksikan dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. This reflects that IFG has implemented integrated governance that is generally "Good." This is shown by the adequate fulfilment of integrated governance principles. If there are weaknesses in the implementation of integrated governance, these weaknesses are generally insignificant and can be resolved through normal measures. This achievement is the result of IFG's maximum efforts in meeting the requirements for good corporate governance. Going forward, IFG is committed to continuing improvements and enhancements to ensure the implementation of more effective and sustainable corporate governance.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur governansi IFG terdiri dari organ atau perangkat yang dibentuk guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk memenuhi kebutuhan internal dalam meningkatkan penerapan governansi atau mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Sementara itu, mekanisme tata kelola perusahaan mencakup serangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang berperan dalam memengaruhi pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

Aspek utama dalam struktur tata kelola perusahaan berperan dalam memperkuat kontrol dan pengelolaan perusahaan, didukung oleh perangkat kebijakan agar sejalan dengan tujuan penerapan prinsip-prinsip governansi. Sementara itu, implementasi prinsip governansi tercermin dalam mekanisme governansi yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, penerapan governansi ini diharapkan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa Organ Perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;

2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan

3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pemegang Saham melalui RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan

CORPORATE GOVERNANCE ORGAN STRUCTURE

IFG's governance structure consists of organs or devices established to ensure compliance with applicable laws and regulations, as well as to fulfill internal needs to improve governance implementation or support the Company's business growth. Meanwhile, the corporate governance mechanism includes a series of processes, habits, rules and institutions that play a role in influencing the overall management of the Company.

The main aspects of the corporate governance structure play a role in strengthening the control and management of the Company, supported by policy tools in line with the objectives of implementing the principles of governance. Meanwhile, the implementation of governance principles is reflected in the governance mechanism supported by adequate structure and infrastructure. Thus, the implementation of this governance is expected to achieve results in accordance with the expectations of shareholders and other stakeholders.

Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Chapter I regarding General Provisions Article 1, it is stated that the Company Organ consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners, with the following explanation:

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is an organ of the Company that has authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set forth in the Law and/or the Articles of Association;
2. The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association; and
3. The Board of Commissioners is organ of the Company in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and advising the Board of Directors.

Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making forum for Shareholders, the Board of Commissioners as the supervisor of the management of the company and the Board of Directors as the manager of the company. The Board of

tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan diharapkan memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Commissioners and Board of Directors have clear authorities and responsibilities according to their respective functions in accordance with the Articles of Association and laws and regulations and are expected to have the same perception of the Company's vision, mission and values.

Sebagai *Holding* BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG meyakini bahwa peningkatan nilai perusahaan yang berlandaskan integritas akan memperkuat kinerja dan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan. Selain itu, IFG berkomitmen untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai sosial, norma hukum, serta prinsip dan standar yang berlaku. Sebagai wujud komitmen kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, IFG memastikan implementasi GCG didukung oleh struktur governansi yang memadai, yang mencakup:

As a Holding SOE in insurance, guarantee, and investment, IFG believes that increasing the value of the Company based on integrity will strengthen performance and provide added value for shareholders and stakeholders. IFG is also committed to contributing more to the national economy while upholding social values, legal norms, and applicable principles and standards. As a form of commitment to shareholders and stakeholders, IFG ensures GCG implementation is supported by an adequate governance structure, which includes:

Struktur Governansi
Governance Structure

Struktur Governansi Governance Structure	Perangkat Lunak Struktur Governansi Governance Structure Software
1. RUPS 2. Dewan Komisaris 3. Direksi 4. Organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi. 1. GMS 2. Board of Commissioners 3. Board of Directors 4. Supporting organs of the Board of Commissioners and Board of Directors.	1. *Core Values* 2. IFG *Principle* (Piagam Korporasi, Pedoman Strategis dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi) 3. Pedoman 4. Kebijakan 5. Prosedur 6. Petunjuk Teknis 7. Sistem Manajemen/Sistem Pengendalian Internal 1. Core Values 2. IFG Principle (Corporate Charter, Strategic Guidelines and Integrated Governance Guidelines) 3. Guidelines 4. Policy 5. Procedure 6. Technical Guidelines 7. Management System/Internal Control System

PERANGKAT LUNAK STRUKTUR GOVERNANSI

Proses dan mekanisme tata kelola perusahaan berperan krusial dalam mengatur hubungan kerja yang efektif dan terstruktur antar Organ Perusahaan. Mekanisme ini dituangkan dalam perangkat lunak struktur governansi, yang mencakup berbagai regulasi, pedoman, dan kebijakan yang menetapkan tanggung jawab masing-masing organ governansi serta mengatur koordinasi antar organ tersebut, termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan berjalan optimal, perusahaan berkomitmen untuk terus menyempurnakan kelengkapan perangkat lunak struktur governansi. Penyempurnaan ini juga berperan dalam mendukung implementasi governansi yang sejalan dengan pembaruan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SOFT STRUCTURE GOVERNANCE

Corporate governance processes and mechanisms play a crucial role in regulating effective and structured working relationships between the Company's organs. These mechanisms are set out in the soft structure of governance, which includes various regulations, guidelines and policies that define the responsibilities of each organ of governance and regulate coordination between these organs. This includes interactions with both internal and external stakeholders.

To ensure the optimal implementation of corporate governance principles, the Company is committed to continuously improving the comprehensiveness of the soft structure governance. This refinement also plays a role in supporting the implementation of governance in line with the update for various applicable laws and regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan. Prinsip dasar RUPS adalah wadah bagi Pemegang Saham dalam memutuskan arah IFG ke depan. RUPS juga berperan sebagai forum Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada Pemegang Saham. Para Pemegang Saham dapat mempergunakan haknya dan memberikan pendapat untuk mengambil keputusan penting dalam menentukan arah IFG dalam setiap RUPS.

The GMS is the highest organ in the Company that has all authority that is not granted to the Board of Commissioners and the Board of Directors, within the limits specified in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association. The basic principle of GMS is a forum for shareholders to decide the future direction of IFG. The GMS also serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to report and be accountable for their duties and performance to the shareholders. Shareholders can exercise their rights and provide opinions to make important decisions in determining the direction of IFG in each GMS.

PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan. Pemegang Saham perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri perusahaan. Adapun komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS AND INFORMATION ON MAJOR/ CONTROLLING SHAREHOLDERS TO ULTIMATE OWNER ENTITY

Shareholder is a person or legal entity that legally owns one or more shares in the Company. Shareholders as capital owners have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association. The Company's Shareholders consist of the Major/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the founders of the Company. The composition of the Company's Shareholders as of December 31, 2024 is as follows:

Komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2024
IFG Shareholder Composition as of December 31, 2024



100%

Government of the Republic of Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia

Seluruh saham IFG, yakni 100%, dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara. Dengan kepemilikan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia berperan sebagai pemegang saham utama, pengendali, sekaligus pemilik akhir IFG.

All shares of IFG, which is 100%, are owned by the Government of the Republic of Indonesia through State Equity Participation. With this ownership, the Government of the Republic of Indonesia acts as the main shareholder, controlling shareholder(s), and ultimate owner of the Company.

JENIS-JENIS RUPS

Perusahaan menjamin penyampaian informasi yang relevan kepada Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil dengan mengutamakan kepentingan perusahaan. RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi, tanpa mengurangi hak RUPS untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis RUPS yang diselenggarakan oleh perusahaan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, antara lain:
1. RUPS pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
2. RUPS pengesahan RKAP;
3. RUPS pengesahan laporan tahunan; dan
4. RUPS lainnya.

RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen. Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

WEWENANG RUPS

RUPS memiliki sejumlah wewenang, antara lain:

1. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
2. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
3. pengaturan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap atau jabatan Anggota Direksi;
4. memberikan persetujuan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha IFG dalam jangka panjang dan jangka pendek, meliputi:
   a. pengesahan RJPP;
   b. pengesahan RKAP;

TYPES OF GMS

The Company guarantees the delivery of relevant information to Shareholders, as long as it does not conflict with the interests of the Company or the provisions of laws and regulations. All decisions/resolutions in the GMS are taken by prioritizing the interests of the Company. The GMS cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, without prejudice to the right of the GMS to exercise its authority in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

There are several types of GMS held by the Company, including Annual GMS and Other GMS, among others:
1. GMS on the ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP);
2. GMS on the ratification of the Company Budget Work Plan (RKAP);
3. GMS on the ratification of the annual report; and
4. other GMS.

The Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the corporate governance structure as well as being the main forum for shareholders to exercise their rights and authority over the Company's Management. Shareholders also have a Circular Resolution mechanism, which is decision-making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Resolutions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all shareholders give written approval to the proposal to be decided in the Circular Resolution in accordance with Article 91 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

AUTHORITY OF GMS

The General Meeting of Shareholders (GMS) has a number of authorities, including:
1. the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is based on policies/guidelines set by the shareholders;
2. the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is based on policies/guidelines set by the shareholders;
3. arrangements for concurrent positions that cause conflicts of interest, including the types of concurrent positions and the mechanism for resigning from concurrent positions or positions of Members of the Board of Directors;
4. provide approvals/decisions necessary to safeguard IFG's long-term and short-term business interests, including:
   a. ratification on the Company's Long-Term Plan (RJPP);
   b. ratification on the Company's Work Plan and Budget (RKAP);

c. pengesahan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan;
d. persetujuan usulan aksi korporasi yang disampaikan Direksi;
e. penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi; dan
f. termasuk hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki sejumlah hak yang diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut IFG secara lengkap, tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. memperoleh pembagian laba dalam bentuk dividen;
4. menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud; dan
6. keputusan Pemegang Saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan secara fisik.

RISALAH DAN BENTUK KEPUTUSAN RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS, termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* (jika ada). Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Adapun bentuk keputusan dalam RUPS, antara lain:
1. keputusan Pemegang Saham dan keputusan Menteri BUMN selaku pemilik modal dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
2. surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

c. ratification on the annual report including the financial statements;
d. approval on the corporate action proposal submitted by the Board of Directors;
e. assessment on the performance of the Board of Commissioners and the performance of the Board of Directors; and
f. including matters stipulated in the company's articles of association.

SHAREHOLDERS' RIGHTS

The Company's shareholders have a number of rights that are regulated in accordance with applicable laws and regulations, among others:
1. attend the GMS and vote at the GMS;
2. obtain material information (including the right to ask questions) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding financial or other matters concerning IFG in a complete, timely, measurable and regular manner;
3. obtain profit distribution in the form of dividends;
4. organize the GMS in the event that the Board of Directors and/or Board of Commissioners fail to hold the annual GMS and at any time requesting the holding of an extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company faces a significant decline in performance;
5. shareholders may adopt resolutions outside the GMS, provided that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the resolution in question; and
6. shareholder decision/resolutions have the same binding legal force as physical resolutions.

MINUTES AND FORM OF GMS RESOLUTION

Minutes of GMS must be prepared for each GMS that at least contains the time, agenda, participants, opinions developed in the GMS, and GMS resolutions, including dissenting opinions (if any). The minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS, unless the minutes of the GMS are made by notarial deed. Each shareholder is entitled to obtain a copy of the minutes of the GMS.

The forms of GMS Resolutions, are as follow:
1. shareholders resolutions and decisions of the Minister of SOEs as the owner of capital can be made in the form of a decree or an ordinary letter, both of which have binding force as GMS resolution/decree of Minister of SOEs; and
2. ordinary letters are submitted in order to provide decisions on proposals submitted by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2024: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Berdasarkan Anggaran Dasar IFG Pasal 21, RUPS Tahunan diadakan setiap tahun yang terdiri dari RUPS mengenai persetujuan RKAP dan RUPS Tahunan yang berkaitan dengan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan.

Di tahun 2024, IFG telah mengadakan RUPS Tahunan dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2024. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024:

THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING: RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Pursuant to IFG's Articles of Association Article 21, an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is held every year which consists of the GMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the GMS relating to the approval of the annual report and ratification of the financial statements.

In 2024, IFG has held AGMS with the following details:

1. The Annual GMS on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget for the Year 2024 was held on January 30, 2024. The following are the GMS resolutions and follow-up on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget of 2024:

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2024 and the Board of Commissioners Work Plan and Budget of 2024	Telah ditindaklanjuti Followed up
2.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2024	Telah ditindaklanjuti Followed up
3.	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Determination of Annual Management Contract containing Key Performance Indicator (KPI) Targets for the Board of Directors Collegially and the Board of Commissioners in 2024	Telah ditindaklanjuti Followed up

2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan secara sirkuler dan memperoleh keputusan RUPS melalui surat Menteri BUMN nomor S-2/MBU/01/2025 tanggal 3 Januari 2025. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2023:

2. The Annual GMS on the approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023 was held circularly and obtained the GMS resolutions through the letter of the Minister of SOEs number S-2/MBU/01/2025 dated January 3, 2025. The following are the GMS resolutions and follow-ups of GMS Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements Year 2023:

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including Restatement of the Consolidated Financial Statements of the 2021 and Fiscal Year 2022, Approval of the Board of Commissioners' Monitoring Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for the Management of the Company and the Board of Commissioners for the Supervision of the Company that has been carried out in the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up
3.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023. Determination of Salary/Honorarium and Facilities and Benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2024, and Bonuses/Performance Incentive/Special Incentive for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up
4.	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024. Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for the Fiscal Year 2024.	Telah ditindaklanjuti Followed up

RUPS LUAR BIASA

Berdasarkan Anggaran Dasar IFG Pasal 22, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, terdapat 5 (lima) RUPS Luar Biasa IFG dengan rincian agenda sebagai berikut:

EXTRAORDINARY GMS

Based on IFG's Articles of Association Article 22, Extraordinary GMS can be held at any time as needed in the interest of the company. Throughout 2024, there were 5 (five) IFG Extraordinary GMS with the following agenda details:

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda
1.	3 Januari 2024 January 3, 2024	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Appointment of Members of the Board of Commissioners at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
2.	3 April 2024 April 3, 2024	Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG Approval of State Equity Participation of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG
3.	3 April 2024 April 3, 2024	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
4.	5 April 2024 April 5, 2024	Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of the Release of Share Equity Participation of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
5.	5 April 2024 April 5, 2024	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Jiwa IFG oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of Addition of State Equity Participation to PT Asuransi Jiwa IFG by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2023: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Berdasarkan Anggaran Dasar IFG Pasal 21, RUPS Tahunan diadakan setiap tahun yang terdiri dari RUPS mengenai persetujuan RKAP dan RUPS Tahunan yang berkaitan dengan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan.

THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING: RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Pursuant to IFG's Articles of Association Article 21, an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is held every year which consists of the GMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the AGMS relating to the approval of the annual report and ratification of the financial statements.

Sepanjang tahun 2023, IFG telah mengadakan RUPS Tahunan dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 yang digelar pada tanggal 22 Desember 2023. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022:

Throughout 2023, the Company has held an Annual GMS with the following details:

1. Annual General Meeting of Shareholders on the Approval of the Annual Report and Audit Report of the Company for the Fiscal Year 2022 held on December 22, 2023. The following are the GMS resolutions and follow-ups of the AGMS on the Approval of the Annual Report and Audit Report of the Company for the Fiscal Year 2022:

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the Fiscal Year 2022 and the Board of Commissioners' Monitoring Report, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022.	Telah ditindaklanjuti Followed up
2.	Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022.	Telah ditindaklanjuti Followed up
3.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2022. Determination of Salary/Honorarium, Facilities and Benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2023, and Bonuses/Performance Incentive/Special Incentive for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2022.	Telah ditindaklanjuti Followed up
4.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022. Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Income for the Fiscal Year 2022.	Telah ditindaklanjuti Followed up
5.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta non PUMK Periode Tahun Buku 2023. Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and non PUMK for the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up

2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 yang digelar pada tanggal 31 Mei 2023. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021:

2. Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021 held on May 31, 2023. The following are the GMS resolutions and follow-ups on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021:

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021. Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2021, including the Board of Commissioners' Monitoring Report for the Fiscal Year 2021, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2021.	Telah ditindaklanjuti Followed up
2.	Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2021. Approval of the Annual Report of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the Fiscal Year 2021 and Ratification of the Financial Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2021.	Telah ditindaklanjuti Followed up
3.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2021. Determination on the Use of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2021.	Telah ditindaklanjuti Followed up

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
4.	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta Tantiem/Insentif untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2021. Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, and Other Facilities and Benefits) for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2022, and Bonuses/Incentive for Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2021.	Telah ditindaklanjuti Followed up
5.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta non PUMK Periode Tahun Buku 2023. Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and non PUMK for the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up

3. RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023:

3. The Annual GMS on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget for 2023 was held on February 16, 2023. The following are the resolutions and follow-up to the Annual GMS regarding the Ratification of the Company's Work Plan and Budget for 2023:

No.	Hasil Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada kuadran Sistemik A dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023. Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023, including the determination of the risk classification of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in Systemic Quadrant A and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up
2.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023. Ratification of Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) in 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up
3.	Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023. Determination of Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up
4.	Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023. Determination of Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed up

Sementara itu, sepanjang tahun 2023, IFG telah Melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali. Daftar agenda pelaksanaan RUPS Luar biasa selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, IFG has held Extraordinary GMS 2 (two) times. The agenda list of the Extraordinary GMS during 2023 is as follows:

No.	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda
1.	21 Maret 2023 March 21, 2023	Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
2.	29 Desember 2023 December 29, 2023	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam fungsi pengawasan perusahaan, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang telah ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 6 Juli 2023. Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta diperbarui secara berkala. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam penerapan tata kelola perusahaan, mencakup peran dan fungsi, pembagian tugas, hubungan kerja antar organ, mekanisme rapat, serta proses pengambilan keputusan.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Adapun ketentuan masa jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:
   a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
   b. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama; dan

   c. kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
3. apabila karena sebab apa pun juga IFG tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka:
   a. dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan itu;
   b. selama terdapat kekosongan jabatan Dewan Komisaris selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara Melaksanakan tugas Dewan Komisaris;

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties and responsibilities in the company's supervisory function, the Board of Commissioners is guided by the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners, which were jointly signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on July 6, 2023. These guidelines are formulated in accordance with applicable laws and regulations and are updated periodically. The guidelines serve as a reference for the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, including roles and functions, division of duties, working relationships between organs, meeting mechanisms, and decision-making processes.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The terms of office of the Board of Commissioners are as follows:

1. the term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.
2. if for any reason there is a vacancy in the position of a member of the Board of Commissioners, then:
   a. GMS shall be held no later than 30 (thirty) days after a vacancy occurs, to fill the vacancy;

   b. in the event that the vacancy is caused by the expiration of the term of office of a member of the Board of Commissioners, the member of the Board of Commissioners whose term of office expires may be appointed by the GMS to temporarily continue to conduct his/her duties as a member of the Board of Commissioners with the same duties, authorities and obligations; and
   c. to the acting member of the Board of Commissioners as referred to in letter b, shall be given honorarium and benefits/facilities as a member of the Board of Commissioners, except for retirement benefits.
3. if for any reason whatsoever IFG does not have any member of the Board of Commissioners, then:
   a. within no later than 30 (thirty) days after a vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy;

   b. If there is a vacancy in the position of the Board of Commissioners other than due to the expiration of the term of office, the GMS shall appoint one or more Shareholders or other parties to temporarily implement the duties of the Board of Commissioners;

c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
d. kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota.

4. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang mencakup:

1. memenuhi persyaratan materiil yaitu:
   a. integritas;
   b. dedikasi;
   c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
   e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk Melaksanakan tugasnya.
2. memenuhi persyaratan formal yaitu:
   a. orang perseorangan;
   b. mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
   c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
   e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anggota *Holding*, badan usaha lainnya dan/atau 10/51 yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. memenuhi persyaratan lain antara lain yaitu:
   a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. in the event that the vacancy is caused by the expiration of the term of office, the member of the Board of Commissioners whose term of office expires may be determined by the GMS to temporarily continue to conduct his/her duties as a member of the Board of Commissioners with the same duties, authorities, and obligations; and
d. to the acting members of the Board of Commissioners as referred to in letters b and c, are given honorarium and allowances/facilities as members.

4. the position of a member of the Board of Commissioners ends when:
   a. He/she passed away;
   b. His/her term of office ended;
   c. Dismissed by resolution of the GMS; and
   d. No longer fulfill the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the articles of association and laws and regulations.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the appointment of members of the Board of Commissioners, prospective members of the Board of Commissioners must fulfill the requirements which include:

1. meet the material requirements, namely:
   a. integrity;
   b. dedication;
   c. understand corporate management issues related to one of the management functions;
   d. have sufficient knowledge in the business field in which he/she is nominated; and
   e. can provide sufficient time to perform his/her duties.
2. fulfill formal requirements, such as:
   a. an individual;
   b. capable of performing legal acts;
   c. never declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment;
   d. never been a Member of the Board of Directors or Member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing an SOE, subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment; and
   e. never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the State finances, SOEs, Holding Members, other business entities and/or 10/51 related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. other requirements include:
   a. not an official of a political party and/or candidate member and/or member of the House of People's Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial Regional House of People's Representatives and District/ Municipal Regional House of People's Representatives;

b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anggota *Holding* yang bersangkutan;
d. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;
f. sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah Melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh IFG.
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan IFG sesuai dengan pembagian tugas dengan fokus area yang akan diberikan kepadanya (antara lain memiliki latar belakang profesi dan/atau pengalaman profesional dan/atau *subject matter expert* di bidang akuntansi, keuangan, investasi hukum, regulasi, kebijakan publik, teknologi informasi, manajemen risiko, operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan hal-hal lain yang dinilai perlu sesuai dengan bidang usaha IFG dan Anggota *Holding*).
6. lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dalam hal ini terjadi maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
8. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
9. Persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar IFG dan kebijakan yang ditetapkan oleh IFG termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan IFG dalam 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali untuk pengangkatan alasan sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
    b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada IFG;
    c. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IFG, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama IFG;

b. not a candidate for regional head/deputy head and/or a regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
c. not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the SOE/Subsidiary concerned;
d. not serving as a Member of the Board of Commissioners of any SOE or the Board of Commissioners of the relevant Subsidiary for 2 (two) periods;
e. not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of Member of the Board of Commissioners;
f. physically and mentally healthy, who is not currently suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a Member of the Board of Commissioners, as evidenced by a health certificate from a hospital; and
g. have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have done tax payment obligations for the last 2 (two) years.

4. fulfillment of the formal requirements as referred to in number 2 (two) is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of the Board of Commissioners and the letter is kept by IFG.
5. having knowledge and/or expertise in the fields required by IFG in accordance with the division of duties with focus areas that will be assigned to him/her (such as, having a professional background and/or professional experience and/or subject matter expert in accounting, finance, investment law, regulation, public policy, information technology, risk management, operations, human resource management, and other matters deemed necessary in accordance with the business fields of IFG and Holding Members).
6. passed the fit and proper test.
7. members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the third degree either in a direct line of descent or branching line of descent, including those arising out of marriage, in the event that this occurs, the GMS is authorized to dismiss one of them.
8. do not have bad credit and/or bad financing.
9. other requirements as determined by IFG's articles of association and policies set by IFG including the provisions of laws and regulations.
10. in addition to fulfilling the above provisions, Independent Commissioners must fulfill the following requirements:
    a. not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of IFG in the last 6 (six) months, except for the reason of appointment as Independent Commissioner in the next period;
    b. Has no direct or indirect shareholding in IFG;
    c. has no affiliation with IFG, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of IFG;

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha IFG;
e. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris yang lain dan/atau Direksi;
f. tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG;
g. tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG.

11. mantan Anggota Direksi IFG dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan, setelah tidak menjabat Anggota Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang melarangnya.

d. has no direct or indirect business relationship related to IFG's business activities;
e. has no family relationship with other members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors;
f. has no financial relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or affiliation with IFG;
g. has no management relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or affiliation with IFG.

11. former Members of the Board of Directors of IFG may become Members of the Board of Commissioners of the company, after not serving as Members of the Board of Directors of the Company for at least 1 (one) year, except with certain considerations decided by the Minister to maintain the continuity of the company's restructuring program, as long as there is no provision of other laws and regulations that prohibit it.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2024, terdapat perubahan komposisi dan susunan anggota Dewan Komisaris, di mana Wahyu Setyawan resmi menjabat sebagai Komisaris IFG per 3 Januari 2024. Jumlah Dewan Komisaris IFG di tahun 2024 adalah 6 (enam) orang di mana seluruhnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham guna menjamin Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, there was a change in the composition and structure of the Board of Commissioners, in which Mr. Wahyu Setyawan officially served as IFG Commissioner as of January 3, 2024. The number of IFG's Board of Commissioners in 2024 is 6 (six) people. All of them have undergone a fit and proper test by the shareholders to ensure that the Board of Commissioners has the integrity, competence, reputation, freedom from affiliation and other conflicts of interest, and the experience and expertise required in performing their respective functions and duties.

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris
Composition and Structure of the Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020-2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as President Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020-2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris
Composition and Structure of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Nasrudin	Komisaris Commissioner	29 April 2021 – RUPS Tahun 2026 April 29, 2021 –2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.
Sumiyati	Komisaris Commissioner	31 Juli 2021 – RUPS Tahun 2026 July 31, 2021 – 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG Nomor SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021. Appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	26 November 2020-RUPS Tahun 2025 November 26, 2020-2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor 337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 jo. 87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020. Appointed as Independent Commissioner based on Decree of the Minister of SOEs as GMS Number 337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020 in conjuction with 87/MBU/S/11/2020 dated November 26, 2024.
Wahyu Setyawan	Komisaris Commissioner	3 Januari 2024 – RUPS Tahun 2029 January 3, 2024 – 2029 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-3/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024. Appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number SK-3/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Profiles of all members of the Board of Commissioners are presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkungan IFG, informasi mengenai kepemilikan saham di perusahaan lain oleh Dewan Komisaris dengan kepemilikan lebih dari 5% dapat dilihat pada tabel berikut:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a form of transparency in managing potential conflicts of interest within IFG, information on share ownership of more than 5% in other companies by members of the Board of Commissioners is presented in the table below.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Share Ownership

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepemilikan Saham Share Ownership
	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	Nihil
Masyita Crystallin (Komisaris) | (Commissioner)	
Nasrudin (Komisaris) | (Commissioner)	
Sumiyati (Komisaris) | (Commissioner)	
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)| (Independent Commissioner)	
Wahyu Setyawan (Komisaris) | (Commissioner)	

IFG tidak menerapkan kebijakan terkait kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) dan tidak memperdagangkan sahamnya di pasar publik. Dengan demikian, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham di IFG.

IFG does not implement a policy related to management share ownership plan (MSOP) and does not trade its shares in the public market. As such, no member of the Board of Commissioners or Directors owns shares in IFG.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

IFG mengatur persyaratan rangkap jabatan Dewan Komisaris dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris berikut ini:

1. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perseroan lain selain IFG, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Bagi Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perseroan selain IFG sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris IFG selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:
   a. BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
   b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
   c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
5. Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir karena hukum sejak saat anggota

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

IFG regulates the concurrent position requirements of the Board of Commissioners in the following Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners may concurrently serve as the Board of Commissioners in other companies other than IFG, subject to the provisions of sectoral laws and regulations;
2. For the Board of Commissioners who concurrently serves as the Board of Commissioners of a company other than IFG as referred to in number 1 (one), must meet the percentage of attendance at the IFG Board of Commissioners meeting for one year of at least 75% (seventy-five percent) attendance, as a requirement for obtaining bonus/performance incentives for the person concerned;
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners of SOEs, except based on special assignments from the Minister;
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
   a. State-owned enterprises, regionally-owned enterprises (ROEs), privately-owned enterprises (POEs);
   b. other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or candidates for legislative members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and/or
   c. other positions that may create a conflict of interest.
5. Members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as referred to in numbers 3 (three) and 4 (four), their term of office as members of the Board of Commissioners ends by operation of law

Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), anggota Dewan Komisaris lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama IFG oleh anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 6, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian IFG yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

from the time when other members of the Board of Commissioners or Members of the Board of Directors or the GMS/Minister become aware of the concurrent position as referred to.

6. Within a period of no later than 7 (seven) days as of the notification of the concurrent position as referred to in number 3 (three) and 4 (four), the other member of the Board of Commissioners, or the member of the Board of Directors, shall submit a notification to the GMS/Minister related to the concurrent position, for further process of determination of dismissal;
7. Legal actions conducted for and on behalf of IFG by members of the Board of Commissioners after the expiration of the law as referred to in number 6 are invalid and become the personal responsibility of the members of the Board of Commissioners concerned;
8. The provisions referred to in number 7 do not reduce the responsibility of the member of the Board of Commissioners concerned for IFG losses caused by the error or negligence of the member of the Board of Commissioners concerned in carrying out his/her duties, if the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners or more, the responsibility referred to in this paragraph, applies jointly for each member of the Board of Commissioners.

Hubungan kepengurusan antara anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The management relationships between members of the Board of Commissioners in other companies during 2024 are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen) (President Commissioner/Independent Commissioner)	√	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris) | (Commissioner)	x	x	√
Nasrudin (Komisaris) | (Commissioner)	x	x	x
Sumiyati (Komisaris) | (Commissioner)	√	x	√
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) | (Independent Commissioner)	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris) | (Commissioner)	x	x	√

√ = terdapat hubungan (yes) | x = tidak terdapat hubungan (no)

Informasi mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yang tercatat di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Information regarding concurrent positions of the Board of Commissioners listed in other companies is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Fauzi Ichsan	1. Komisaris Independen PT Manulife Investment Management Indonesia 2. Komisaris Independen PT AKR Corporindo Tbk 3. Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk 4. Komisaris Independen PT Minamas Gemilang 1. Independent Commissioner of PT Manulife Investment Management Indonesia 2. Independent Commissioner of PT AKR Corporindo Tbk 3. Independent Commissioner of PT Unilever Indonesia Tbk 4. Independent Commissioner of PT Minamas Gemilang
Masyita Crystallin	1. Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq 2. Co-chair Sherpa (Deputi) bersama Belanda 3. Dewan Pembina World Resource Institute 4. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia 1. Partner and Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq 2. Co-chair Sherpa (Deputy) with the Netherlands 3. World Resource Institute Board of Advisors 4. Expert Board of the Indonesian Employers Association
Sumiyati	1. Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Anggota Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Sekretariat Negara 1. Member of Government Accounting Standards Committee 2. Member of the State Secretariat Kemayoran Complex Management Center
Nasrudin	-
Hotbonar Sinaga	-
Wahyu Setyawan	Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOEs

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing dengan saling menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam mendukung hal tersebut, IFG telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur tanggung jawab, kewajiban, wewenang, serta hak setiap organ perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi IFG tidak memiliki keterkaitan afiliasi, baik dalam aspek keuangan maupun hubungan keluarga, satu sama lain, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Informasi mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat sebagai berikut:

AFFILIATION RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders carry out their respective duties, responsibilities, and authorities with mutual respect in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. In support of this, IFG has established Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors that govern the responsibilities, obligations, authorities, and rights of each organ of the Company.

IFG's Board of Commissioners and Board of Directors have no affiliation, either in the financial aspect or family relationship, with each other, or with the Major/Controlling Shareholders. Information regarding affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders is shown as follows:

Nama dan Jabatan Name and title	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders	**Dewan Komisaris lainnya** Other Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen) (President Commissioner/ Independent Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Sumiyati (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Nasrudin (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x	x	x

√ = terdapat hubungan (yes) | x = tidak terdapat hubungan (no)

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai IFG maupun usaha IFG yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
2. Dalam Melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus:
   a. mematuhi Anggaran Dasar IFG dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
   b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG.

DUTIES, OBLIGATIONS, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In implementing its supervisory function and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the following duties, authorities, obligations, rights, and responsibilities:

Duties of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising the management policy, the course of management in general both regarding IFG and IFG's business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP, provisions of the articles of association, GMS resolutions and provisions of laws and regulations, for the benefit of IFG and in accordance with the aims and objectives of IFG and not intended for the benefit of certain parties or groups.
2. In implementing its duties, the Board of Commissioners must:
   a. comply with IFG's articles of association and laws and regulations, as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness; and
   b. be in good faith, prudent and responsible in conducting supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of IFG and in accordance with IFG's purposes and objectives.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan IFG;
2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IFG;
3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IFG;
4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi;
5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. menerima informasi dari Direksi secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan IFG serta informasi lainnya jika diminta sewaktu-waktu;
7. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
8. membentuk komite Dewan Komisaris di antaranya:
   a. Komite Audit;
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
   c. Komite Pemantau Risiko;
   d. Tata Kelola Terintegrasi dan/atau;
   e. Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IFG;

   Pengangkatan anggota komite pada angka 8 ini dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab komite Dewan Komisaris diatur dalam piagam masing-masing komite.
9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IFG (jika diperlukan);
10. memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar IFG atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan IFG atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi IFG. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri;
11. melakukan tindakan pengurusan IFG dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IFG;

Authority of the Board of Commissioners

In conducting its supervisory function and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the following authorities:

1. reviewing records, letters, and other documents, checking cash for verification purposes, etc., securities and check IFG's assets;
2. entering the premises, buildings and offices used by IFG;
3. requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials on all issues concerning the management of IFG;
4. knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings;
6. receiving information from the Board of Directors regularly, without delay, and in a comprehensive manner on all information relevant to IFG as well as other information if requested at any time.
7. appointing and dismissing the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
8. establishing committees of the Board of Commissioners including:
   a. Audit Committee;
   b. Nomination and Remuneration Committee;
   c. Risk Monitoring Committee
   d. Integrated Governance Committee; and/or
   e. Other committees as deemed necessary with due regard to the capabilities of the IFG.

   The appointment of committee members in number 8 is conducted by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners Meeting. The duties and responsibilities of the committees of the Board of Commissioners are regulated in the charter of each committee.
9. utilizing experts for a specific matter and for a specific period of time at IFG's expense (if required);
10. temporarily suspending a member of the Board of Directors at any time by stating the reasons if the member of the Board of Directors acts contrary to the provisions of IFG's articles of association or there are indications of taking actions that are detrimental to IFG or neglecting his/her obligations or there are urgent reasons for IFG. Such temporary suspension must be notified in writing to the person concerned along with the reasons that led to the action. Within 30 (thirty) days after the date of the temporary suspension, the Board of Commissioners is required to organize a GMS that will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed or restored to his/her position, where the person concerned is given the opportunity to attend and defend himself/herself;
11. performing IFG management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of IFG's Articles of Associations;

12. menghadiri Rapat Direksi atau unit-unit di bawahnya dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
13. memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
14. menyetujui piagam *audit interna*l (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SKAI;
15. memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
    a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;
    b. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/ BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/ BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/ BTO), dan kerja sama lainnya dengan batasan nilai atau jangka waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS;
    c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar, dan pinjaman yang diberikan kepada Anggota *Holding* dengan ketentuan pinjaman kepada Anggota *Holding* dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
    d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
    e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
    f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
16. memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
    a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang;
    b. melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
    c. mendirikan Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan;
    d. melepaskan penyertaan modal pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan, kecuali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
    e. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan;
    f. mengikat IFG sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
    g. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/ BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;

12. attending meetings of the Board of Directors or its subordinate units and provide views on matters discussed;
13. approving the appointment of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary;
14. approving the internal audit charter proposed by the Board of Directors by taking into account the proposal from the Internal Audit Unit;
15. providing written approval for the following actions of the Board of Directors:
    a. Pledging fixed assets to draw down short-term loans;
    b. establishing cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a limit on the value or period determined by the GMS;
    c. receive or provide medium/long-term loans, except for loans (debt or receivables) arising from business activities as referred to in Article 3 of the Articles of Association, and loans given to Holding Members provided that loans to Holding Members are reported to the Board of Commissioners;
    d. writing off bad debts and inventories of dead stock;
    e. establish an organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors; and
    f. providing written responses to the following actions of the Board of Directors:
16. pledging fixed assets for medium/long-term loans;
    a. pledging fixed assets for medium/long-term loans;
    b. making capital investments and reduce the percentage of capital investment in other companies that must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders;
    c. establishing Holding Members and/or joint ventures;
    d. releasing capital participation in Holding Members and/or joint venture companies, except for business activities as referred to in letter c;
    e. conducting merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of Holding Members and/or joint ventures;
    f. binding IFG as guarantor (borg or avalist);
    g. entering into cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a value or period exceeding the stipulation of the GMS;

h. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan;
i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap IFG dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
j. menetapkan *blueprint* organisasi IFG;
k. menetapkan dan mengubah logo IFG;
l. melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
m. membentuk kebijakan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG yang dapat berdampak bagi IFG;
n. pembebanan biaya IFG yang bersifat tetap dan rutin untuk kebijakan, organisasi, dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG;
o. pengusulan wakil IFG untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada IFG, dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
p. melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;
q. melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh IFG; dan

17. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

h. no further collection of bad debts that have been written off;
i. disposing and writing off IFG's fixed assets with a typical economic life in the industry of more than 5 (five) years which must be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna;
j. establishing IFG's organizational blue print;
k. establishing and changing the IFG logo;
l. performing other actions and actions as referred to in letter h that have not been stipulated in the RKAP;
m. formulating policies, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to IFG that may impact IFG;
n. fixed and routine IFG expenses for policies, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to IFG;
o. proposing IFG representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners at Holding Members and/or joint ventures that make significant contributions to IFG, and/or have strategic value as determined by the GMS;
p. making long-term investments and financing;
q. issuing bonds and other debt securities by IFG; and

17. performing other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Direksi bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban berikut:

1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam Melaksanakan pengurusan IFG;
2. meneliti dan menelaah RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP IFG mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
3. mengikuti perkembangan kegiatan IFG, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dan/atau strategis bagi pengurusan IFG, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja IFG;
4. memberikan persetujuan atas Pedoman Strategis, Kebijakan dan Prosedur IFG, serta memastikan pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas penerapannya;
5. memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi material dengan limit-limit tertentu sesuai yang ditetapkan kebijakan IFG;
6. memberikan persetujuan atas kelebihan penggunaan anggaran dan/atau penggunaan anggaran di luar rencana yang ditetapkan;
7. memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
8. mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

Obligations of the Board of Commissioners

In performing its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, the Board of Directors is responsible for the following obligations:

1. providing advice to the Board of Directors in completing the management of IFG;
2. examining and reviewing the RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors, as well as providing opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP IFG regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP;
3. following the development of IFG's activities, providing opinions and suggestions to the GMS on any issues considered important and/or strategic for the management of IFG, and report immediately to the GMS if there are symptoms of a decline in IFG's performance;
4. approving IFG's Strategic Guidelines, Policies and Procedures, and ensure the Board of Directors' responsibility for their implementation;
5. approving material transactions with certain limits as set by IFG policy;
6. approving the excess use of budget and/or the use of budget beyond the stipulated plan;
7. approving the appointment of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary;
8. proposing a Public Accountant to the GMS;

9. meneliti, menelaah dan memberikan saran atas gejala menurunnya kinerja IFG kepada Direksi, untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja IFG, dan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja IFG;
10. menetapkan kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris;
11. meneliti dan menelaah laporan berkala, laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan dan memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta. Memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS;
12. memastikan pelaksanaan rapat/forum komunikasi secara regular berkenaan dengan evaluasi efektivitas penerapan governansi, manajemen risiko dan kepatuhan;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
14. menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial, khusus kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh Komisaris Utama.

Hak Dewan Komisaris

Dalam Melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berhak atas hal-hal berikut:

1. menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya; dan
5. mendapatkan tantiem atas prestasi kerja setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila IFG memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja

9. researching, reviewing and providing advice on symptoms of declining IFG performance to the Board of Directors, to fix problems that have an impact on the decline in IFG performance, and reporting to the GMS if there are symptoms of declining IFG performance;
10. establishing a policy for measuring and assessing the performance of the Board of Commissioners, evaluating the performance achievements of the Board of Commissioners and outlined in the minutes of the Board of Commissioners meeting;
11. examining and reviewing periodic reports, quarterly reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report and providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested. Providing a report on the implementation of supervisory duties that have been implemented during the fiscal year to the GMS;
12. ensuring the implementation of regular meetings/communication forums regarding the evaluation of the effectiveness of the implementation of governance, risk management and compliance;
13. performing other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions; and
14. signing the annual management contract containing the performance targets of the Board of Directors collegially, specifically the annual management contract containing the performance targets of the Board of Directors individually signed by the President Commissioner.

Rights of the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory and advisory duties to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the following rights:

1. receive income in accordance with the provisions stipulated by the GMS with due observance of laws and regulations;
2. receive income in the form of salary or honorarium, allowances, and facilities that are fixed by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations;
3. receive bonus/performance incentive/LTI that is variable (merit rating) by considering performance factors and the company's financial capability, as well as other relevant factors;
4. in the event that the calculation of salary or honorarium causes the salary or honorarium to be lower than the previous year, the salary or honorarium used for the person concerned may be set equal to the salary or honorarium of the previous year; and
5. receive Bonus for work performance every year, the amount of which is determined by the GMS if IFG earns a profit, or it will be given to the Board of Directors and Board of Commissioners if there is an improvement

IFG walaupun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Pemberian tantiem diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1. setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian IFG apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
2. dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
3. anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil kebijakan atau memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
4. anggota Dewan Komisaris menjaga kepentingan IFG dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
5. menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diangkat, yang paling kurang memuat:
   a. landasan hukum;
   b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
   c. nilai-nilai;
   d. waktu kerja;
   e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat, dan Risalah Rapat; dan
   f. pelaporan dan pertanggungjawabannya;
6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
7. anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk kebijakan strategis;
8. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal , dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk Melaksanakan tugasnya;

in IFG's performance even though it still experiencing losses in the relevant fiscal year or accumulated losses from the previous fiscal year. Bonuses is given if it has been budgeted and calculated as a cost in the RKAP for the year concerned

Responsibility of the Board of Commissioners

In conducting its supervisory and advisory duties to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. each member of the BOC shall be personally liable for the loss of IFG if he/she is guilty or negligent in the performance of his/her duties;
2. in the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibility applies jointly and severally to each member of the Board of Commissioners;
3. members of the Board of Commissioners shall not be liable for losses if he/she can prove:
   a. the loss is not due to his/her fault or negligence;
   b. has supervised in good faith, responsibly and prudently for the benefit of and in accordance with the aims and objectives of IFG;
   c. has no conflict of interest either directly or indirectly on supervisory policies that result in losses; and
   d. has taken measures or provided advice to the Board of Directors to prevent the incurrence or continuation of such losses.
4. members of the Board of Commissioners safeguard the interests of IFG with due regard to the interests of the Shareholders and are accountable to the GMS;
5. prepare guidelines that bind each member of the Board of Commissioners no later than 60 (sixty) days after being appointed, which at least contains:
   a. legal foundation;
   b. description of duties, responsibilities and authorities;
   c. values;
   d. working time;
   e. meeting policies, including meeting attendance policies, and meeting minutes; and
   f. reporting and accountability.
6. the Board of Commissioners/Supervisory Board must oversee and ensure that the implementation of Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably;
7. members of the Board of Commissioners shall direct, supervise, and evaluate the implementation of strategic policies, including strategic policies;
8. the Board of Commissioners and the Board of Directors must ensure that the External Auditor, internal auditors, and the Audit Committee, and other committees if any, have access to accounting records, supporting data, and information about SOEs, to the extent necessary to conduct their duties;

9. mengawasi pelaksanaan pemberian fasilitas, tunjangan, dan biaya operasional pada anggota Direksi perusahaan;

10. Melaksanakan pengawasan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam lingkup IFG yang mencakup:
    a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko (termasuk *risk appetite and risk tolerance* sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko);
    b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
    c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
    d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko, komite audit dan komite lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
    f. memastikan fungsi internal audit bekerja secara independen dan efektif; dan
    g. menerapkan strategi *anti-fraud* dan mengawasi pelaksanaannya;
11. khusus dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal , Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
    a. melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
    b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
    c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit; dan
    d. Dewan Komisaris memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal , auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan Otoritas, dan/atau Lembaga negara lain yang berwenang terhadap IFG.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen

1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
    a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Intern; dan
    b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.

9. supervise the implementation of the provision of facilities, allowances, and operational costs to the Company's Board of Directors;
10. supervise the implementation of risk management and internal control within the scope of IFG which includes:
    a. approving and evaluating the risk management policy (including risk appetite and risk tolerance as an integral part of the risk management policy);
    b. evaluating the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies;
    c. evaluating and deciding on the Board of Directors' requests relating to transactions and risk limits that require the approval of the Board of Commissioners;
    d. monitoring and evaluating the implementation of the duties of the risk management committee, audit committee and other committees in accordance with applicable regulations;
    e. reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system at least once a year;
    f. ensuring that the internal audit function works independently and effectively; and
    g. implementing an anti-fraud strategy and overseeing its implementation.
11. specifically in the implementation of supervision of the internal control system, the Board of Commissioners is also responsible for:
    a. supervising that the Board of Directors has established and maintained an adequate, effective and efficient internal control system;
    b. reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit Work Unit at least once a year;
    c. appointing an independent external quality controller to review the performance of the Internal Audit Unit, taking into account the recommendations of the audit committee; and
    d. the Board of Commissioners ensures that the Board of Directors conducts follow-up on the findings of internal auditors, external auditors, the results of OJK and Authority supervision, and/or other authorized state institutions against IFG.

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Fauzi Ichsan as President Commissioner/Independent Commissioner

1. Coordinate the duties and functions of the Board of Commissioners.
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Main Directorate as follows:
    a. performing supervision and providing advice related to the function of the Internal Supervisory Unit; and
    b. performing supervision and providing advice related to secretarial functions.

3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
   d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *special liability management*;
   e. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *merger and acquisition* dan *partnership*; dan
   f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Masyita Crystallin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
   d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *special liability management*;
   e. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *merger and acquisition* dan *partnership*; dan
   f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
   d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Sumiyati sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Internal; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.

3. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Business Directorate as follows:
   a. supervising and advising on capital market and investment business;
   b. supervising and advising on the general insurance and guarantee business;
   c. supervising and advising on the life insurance business;
   d. supervising and advising on special liability management;
   e. supervising and advising on mergers and acquisitions and partnerships; and
   f. supervising and advising on digital strategy and business development.
4. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Masyita Crystallin as Commissioner

1. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Business Directorate as follows:
   a. supervising and advising on capital market and investment business;
   b. supervising and advising on the general insurance and guarantee business;
   c. supervising and advising on the life insurance business;
   d. supervising and advising on special liability management;
   e. supervising and advising on mergers and acquisitions and partnerships; and
   f. supervising and advising on digital strategy and business development.
2. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Human Capital Directorate as follows:
   a. supervising and advising on human resources/ human capital;
   b. supervising and advising on learning and corporate culture
   c. supervising and advising on law; and
   d. supervising and advising on procurement and asset management.
3. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Sumiyati as Commissioner

1. Conduct supervisory duties and functions of the IFG Main Directorate as follows:
   a. supervising and advising on the function of the Internal Supervisory Unit; and
   b. supervising and advising on the secretarial functions.

2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
   c. pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan Anggota *Holding*.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Nasrudin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuaria; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuaria; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.
2. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
3. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Wahyu Setyawan sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.

2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Finance Directorate as follows:
   a. supervising and advising on finance;
   b. supervising and advising on accounting and reporting; and
   c. supervising and advising on the management of investment portfolios and Holding Members.
3. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Nasrudin as Commissioner

1. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the Deputy IFG Main Directorate as follows:
   a. supervising and advising on risk management, compliance, and policy;
   b. supervising and advising on planning; and
   c. supervision and providing advice related to information technology.
2. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Technical Directorate as follows:
   a. carry out actuarial-related supervision and advice; and
   b. supervising and advising on insurance operational optimization.
3. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Hotbonar Sinaga as Independent Commissioner

1. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Technical Directorate as follows:
   a. conduct actuarial-related supervision and advice; and
   b. supervising and advising on insurance operational optimization.
2. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
3. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Wahyu Setyawan as Commissioner

1. Conduct supervisory duties and functions related to the functions of IFG's Vice President Directorate as follows:
   a. supervising and advising on risk management, compliance, and policy;
   b. implementing supervision and providing advice related to planning; and
   c. supervising and providing advice related to information technology.

2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
   d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
   c. pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan Anggota *Holding*.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
5. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

PELAKSANAAN TUGAS, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola serta mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan rencana kerja yang ditetapkan di awal tahun. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai forum, seperti Rapat Dewan Komisaris, pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat dan evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan persetujuan, tanggapan, serta rekomendasi kepada Pemegang Saham dan Direksi. Persetujuan, tanggapan, maupun rekomendasi tersebut diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, yang antara lain mencakup berbagai hal berikut:

a. Ruang Lingkup Pengawasan dan Pemberian Nasihat
   1. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. melakukan penelitian dan penelaahan dalam rangka pengesahan RKAP yang disiapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

2. Conduct supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Human Resources Directorate as follows:
   a. carry out supervision and advice related to human resources/human capital;
   b. supervising and advising on learning and corporate culture
   c. supervising and advising on law; and
   d. supervising and advising on procurement and asset management.
3. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Finance Directorate as follows:
   a. conduct financial-related supervision and advisory;
   b. implementing supervision and providing advice related to accounting and reporting; and
   c. supervision and advising on the management of investment portfolios and Holding Members.
4. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
5. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

IMPLEMENTATION OF DUTIES, APPROVALS, AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

In 2024, the Board of Commissioners has implemented its duties and responsibilities in managing and supervising the running of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, the articles of association, and the work plan set at the beginning of the year. The implementation of these duties and responsibilities is realized through various forums, such as meetings of the Board of Commissioners, meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as meetings and evaluations with committees under the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Commissioners has also submitted approvals, responses and recommendations to shareholders and the Board of Directors. These approvals, responses and recommendations are given as part of the implementation of the Board's supervisory and advisory functions, which include the following:

a. Scope of Supervision and Advisory
   1. supervise the management policy and the course of management by the Board of Directors, including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP, provisions of the Articles of Association, GMS Resolutions, and applicable laws and regulations;
   2. conduct research and review in order to ratify the RKAP prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;

3. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP serta kebijakan strategis lainnya yang diambil oleh Direksi;
4. mengikuti perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan memberikan nasihat serta rekomendasi atas isu-isu penting yang mempengaruhi kepengurusan IFG;
5. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan, serta menandatangani laporan tahunan;
6. Laporan Hasil Diagnostik *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR) IFG;
7. menyampaikan permintaan konfirmasi status IFG sebagai Emiten atau Non-emiten;
8. menyampaikan *Updating Talent Pool* Direksi IFG;
9. menyampaikan data dan evaluasi atas ambang batas transaksi IFG dan Anggota *Holding*;
10. meminta penjelasan Direksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, baik secara tertulis maupun melalui rapat;
11. melakukan pengawasan pengelolaan IFG melalui pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit dan/atau Anggota *Holding*;
12. menyampaikan arahan atas pengadaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2024;
13. menyampaikan penjelasan atas keterlambatan penyelesaian laporan keuangan *audited* tahun buku 2023 serta tindak lanjut atas teguran keterlambatan penyampaian laporan keuangan *audited*;
14. menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023; dan
15. bersama Direksi menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Triwulan I dan II Tahun 2024.

b. Ruang Lingkup Akuntabilitas
   1. menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari RKAP;
   2. membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   3. mengusulkan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS;
   4. melaporkan kepemilikan saham pribadi dan keluarga, baik di IFG maupun di perusahaan lain;
   5. memberikan laporan pengawasan tahunan kepada RUPS;
   6. Melaksanakan kewajiban lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS; dan
   7. penetapan berbagai Keputusan Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian organ Dewan Komisaris.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan, tanggapan, serta rekomendasi kepada Pemegang Saham dan Direksi. Persetujuan atau tanggapan serta rekomendasi Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dijalankan, antara lain:

3. provide opinions and suggestions to the GMS regarding the RKAP and other strategic policies taken by the Board of Directors;
4. follow the development of the Company's business activities and provide advice and recommendations on important issues affecting the management of IFG;
5. examine and review periodic reports and annual reports, and signing annual reports;
6. IFG Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) Diagnostic Results report;
7. submit a request for confirmation of IFG's status as Issuer or Non-issuer;
8. convey the Updating Talent Pool of Directors of PT IFG;
9. submit data and evaluation of the transaction thresholds of PT IFG and Holding Members;
10. request explanations from the Board of Directors as a follow-up to the recommendations of the Board of Commissioners, either in writing or through meetings;
11. supervise the management of IFG through the implementation of working visits by the Board of Commissioners to units and/or Holding Members;
12. Convey direction on the procurement of the Public Accounting Firm for 2024;
13. submit an explanation for the delay in the completion of the audited financial statements for the fiscal year 2023 and follow-up on the reprimand for the delay in submitting the audited financial statements;
14. submit a report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023; and
15. alongside the Board of Directors to submit a Report on the Realization of the Use of Additional State Equity Participation (PMN) for the First and Second Quarter of 2024.

b. Scope of Accountability
   1. prepare the annual work program of the Board of Commissioners which is part of the RKAP;
   2. establish an Integrated Governance Committee;
   3. propose a Public Accountant Firm to the GMS;
   4. report personal and family share ownership, both in IFG and in other companies;
   5. provide an annual supervisory report to the GMS;
   6. conduct other obligations as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and the Resolutions of the GMS; and
   7. determination of various Board of Commissioners Decisions related to the appointment and/or termination of Board of Commissioners organs.

In addition, the Board of Commissioners has also provided approvals, responses, and recommendations to shareholders and the Board of Directors. The approvals or responses and recommendations of the Board of Commissioners related to the implementation of supervisory and advisory functions that have been carried out, among others:

1. tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Perubahan Anggaran Dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
2. tanggapan Dewan Komisaris atas Penambahan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp3,56 Triliun;
3. pemberian dukungan atas usulan Direksi terkait Keikutsertaan dalam Pertemuan dengan TCW Capital Investment Company LCC;
4. tanggapan atas Usulan Calon Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia;
5. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penerimaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
6. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penerimaan Pengalihan Aset, Liabilitas, dan Dokumen dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG;
7. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025-2029;
8. tanggapan atas Usulan Pengangkatan Komisaris Independen PT Jamkrindo;
9. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Jangka Panjang PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025-2029;
10. tanggapan Dewan Komisaris atas Penyesuaian Usulan Penerimaan Pengalihan Aset, Liabilitas, dan Dokumen dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG;
11. tanggapan Dewan Komisaris atas Penyesuaian Usulan Penerimaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
12. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Calon Komisaris PT Bahana Kapital Investa;
13. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Calon Komisaris PT Bahana Mitra Investa;
14. penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis Indonesia Financial Group (IFG);
15. penyampaian Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
16. tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2024;
17. tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 (*unaudited*);

1. Board of Commissioners' response to the Plan of Amendment to the Articles of Association of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
2. Board of Commissioners' response to the Additional State Equity Participation of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG amounting to IDR3.56 trillion;
3. providing support for the proposal of the Board of Directors regarding Participation in Meetings with TCW Capital Investment Company LCC;
4. response to the Proposed Candidate for Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia;
5. Board of Commissioners' response to the proposal to accept the Micro and Small Business Funding Program from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
6. Board of Commissioners' response to the Proposal to Accept the Transfer of Assets, Liabilities, and Documents from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG;
7. Board of Commissioners' Response to the Proposed Long-Term Plan of the Company PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2025-2029;
8. response to the Proposed Appointment of Independent Commissioner of PT Jamkrindo;
9. Board of Commissioners' Response to the Proposed Long-Term Plan of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2025-2029;
10. Board of Commissioners' Response to the Proposed Adjustment of Acceptance of Transfer of Assets, Liabilities, and Documents from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG;
11. Board of Commissioners' response to the Adjustment of the Proposed Acceptance of the Micro and Small Business Funding Program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
12. response from the Board of Commissioners on the Proposed Candidate for Commissioner of PT Bahana Kapital Investa;
13. Response from the Board of Commissioners on the Proposed Candidate for Commissioner of PT Bahana Mitra Investa;
14. appointment of Acting Business Director of Indonesia Financial Group (IFG);
15. submission of Determination of Acting Business Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
16. Board of Commissioners' response to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Social and Environmental Responsibility Program Budget Work Plan (RKA-TJSL) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) of 2024;
17. Board of Commissioners' response to the Performance Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) until with the fourth quarter of 2023 (unaudited);

18. penunjukan Lembaga Pemeringkat Perusahaan Tahun Buku 2023;
19. tanggapan Atas Usulan *Top* 20% *Selected Talent* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
20. tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
21. tanggapan Pengajuan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025-2029;
22. tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2024;
23. tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
24. tanggapan atas Usulan Pemberhentian dan Pengalihan tugas Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia;
25. tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023 dan Permohonan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
26. tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
27. tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025;
28. usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2024 dan Tantiem Kinerja Tahun 2023;
29. usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Umum Tahun 2024 dan *Audit Opening Balance* atas Implementasi PSAK 117 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
30. penyampaian Tinjauan Dewan Komisaris atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024; dan
31. tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Atas Kesiapan BUMN Menjalankan Peta Jalan Implementasi ICOFR.

18. appointment of Company Rating Agency for Fiscal Year 2023;
19. response to the Proposal of Top 20% Selected Talent of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
20. Board of Commissioners' response to the Performance Report for the First Quarter of 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
21. response to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Long Term Plan (RJP) Submission 2025-2029;
22. Board of Commissioners' Response to the Proposed Revision of Work Plan and Budget (RKA) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2024;
23. Board of Commissioners' response to the Performance Report for the Second Quarter of 2024 of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
24. response to the Proposed Dismissal and Assignment of Members of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia;
25. Board of Commissioners' response to the Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the Fiscal Year 2023 and Request for Resolution of the General Meeting of Shareholders;
26. Board of Commissioners' response to the Performance Report for the Third Quarter of 2024 of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
27. the Board of Commissioners' response to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Social and Environmental Responsibility Program Budget Work Plan (RKA- TJSL) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2025;
28. proposed remuneration of Directors and Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for 2024 and Performance Bonuses in 2023;
29. proposal to Appoint a Public Accountant Firm to Conduct the 2024 General Audit and Opening Balance Audit of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia's Implementation of PSAK 117;
30. submission of the Board of Commissioners' Review of Anti-Bribery Management System PT BPUI (Persero) in 2024; and
31. response from the Board of Commissioners/ Supervisory Board on the Readiness of SOEs to Implement the ICOFR Implementation Roadmap.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

IFG menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat guna memastikan keselarasan kinerja anggota baru dengan organ Perusahaan lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai organisasi dan operasional perusahaan, khususnya dalam aspek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris yang baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

IFG organizes an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners to ensure the alignment of the new members' performance with other organs of the Company. The program is designed to provide a deeper understanding of the Company's organization and operations, especially in the supervisory aspects that are the responsibility of the new Board of Commissioners.

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjadi tanggung jawab fungsi Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 2024, Divisi Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan mengadakan *Onboarding Program and Advancement Leadership* (OPAL) pada tanggal 24 Januari 2024 bagi anggota Dewan Komisaris IFG dan Anggota *Holding* yang baru.

Penyelenggaraan OPAL dibagi ke dalam 5 (lima) sesi, sebagai berikut:
1. Sesi I: Inisiatif Strategis dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
2. Sesi II: Strategi Bisnis Asuransi dan Penjaminan;
3. Sesi III: Strategi Bisnis Pasar Modal dan Investasi;
4. Sesi IV: Peran Penting Aktuaria dalam Strategi Bisnis Asuransi dan Penjaminan; dan
5. Sesi V: Peran Penting dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

IFG mengatur kriteria dan prosedur pengangkatan serta pemberhentian Dewan Komisaris sebagai berikut:

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK yang berlaku.
7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.

The introduction program for new members of the Board of Commissioners is the responsibility of the Corporate Secretary function. In 2024, the Corporate Secretary Division in collaboration with the Learning and Corporate Culture Division held an Onboarding Program and Advancement Leadership (OPAL) on January 24, 2024 for new IFG Board of Commissioners and Holding Members.

The organization of OPAL is divided into 5 (five) sessions, as follows:
1. Session I: Strategic Initiatives and the Company's Long-Term Plan;
2. Session II: Insurance and Guarantee Business Strategy;
3. Session III: Capital Market and Investment Business Strategy;
4. Session IV: The Important Role of Actuarial in Insurance and Guarantee Business Strategy; and
5. Session V: Important Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

IFG regulates the criteria and procedures for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners as follows:

Appointment of Members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, and the GMS Resolution. must be approved by the Seri A Dwiwarna Shareholders.
2. The appointment of members of the Board of Commissioners must fulfil the requirements set by technical agencies based on laws and regulations.
3. The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.
4. Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by Seri A Dwiwarna Shareholders and the nomination is binding for the GMS.
5. Newly appointed members of the Board of Commissioners must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) before conducting their actions, duties, and functions as Members of the Board of Commissioners.
6. OJK conducts a fit and proper test for the Board of Commissioners in accordance with the applicable Financial Services Authority Regulation (POJK).
7. Before being appointed as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Commissioners must sign a statement letter resigning from other positions that are prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners as of the time he/she is appointed as a member of the Board of Commissioners.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Menteri/RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:
   a. tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
   d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan;
   e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
   f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   g. mengundurkan diri.
3. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perseroan.
4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
5. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri ini disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diinformasikan mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
7. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Dismissal of members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the Minister's decision/GMS Resolutions by stating the reasons.
2. The reasons for the dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in number 1 (one) are as follows:
   a. unable to perform his/her duties properly;
   b. not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association;
   c. involved in actions that harm the company and/or state finances;
   d. conduct actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the company's Board of Commissioners;
   e. has been named as a suspect or defendant by the competent authority in actions that harm the company and/or state finances;
   f. declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
   g. resigned.
3. In addition to the reasons for dismissal of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS/Minister based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of the company.
4. The plan to dismiss a member of the Board of Commissioners shall be notified to the member of the Board of Commissioners concerned verbally or in writing by the shareholders.
5. The decision to dismiss a member of the Board of Commissioners for reasons as referred to in point 2 (two), is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself/herself.
6. In the event that the dismissal is implemented outside the GMS forum, the defense shall be submitted in writing to the shareholders within 14 (fourteen) days as of the time the member of the Board of Commissioners concerned is informed of the plan to dismiss the member of the Board of Commissioners.
7. Dismissal for reasons of involvement in actions that are detrimental to IFG and found guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.
8. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Commissioners concerned shall perform his/her duties accordingly.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga independensi dan tidak terikat dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners must maintain independence and not be bound by parties that could potentially cause a conflict of interest with the Company. The Board of Commissioners is required to prioritize the interests of the Company over personal

kepentingan pribadi serta menghindari konflik kepentingan dari pihak mana pun, termasuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pelaksanaan aksi korporasi. Prinsip profesionalisme ini diatur secara tegas dan menjadi bagian dari *Board Manual*.

interests and avoid conflicts of interest from any party, including family relationships with members of the Board of Directors and Board of Commissioners, especially in making business decisions and implementing corporate actions. This principle of professionalism is strictly regulated and becomes part of the Board Manual.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite sebagai organ pendukung. Penilaian terhadap organ-organ di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Dewan Komisaris serta komite terkait. Rincian mengenai penilaian kinerja organ pendukung Dewan Komisaris dapat ditemukan dalam pembahasan tentang Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite di bab Governansi Perusahaan ini.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES AND SUPPORTING ORGANS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners and Committees as supporting organs. The assessment of the organs under the Board of Commissioners is conducted based on the achievement of targets set in the Annual Work Plan of the Secretary of the Board of Commissioners and related committees. Details regarding the performance assessment of the supporting organs of the Board of Commissioners can be found in the discussion on the Secretary of the Board of Commissioners and Committees in this Corporate Governance chapter.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

IFG menyediakan program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris guna memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman mereka, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Informasi terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

IFG provides competency development programs for the Board of Commissioners to broaden their horizons and improve their understanding, especially in performing supervisory functions. Information related to training and competency development for the Board of Commissioners throughout 2024 is presented below:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Fauzi Ichsan	Manajemen Risiko Risk management	*Certified Risk Executive Leader*	12-19 Februari 2024 February 12-19, 2024	BPKP
Fauzi Ichsan	Manajemen Risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Masyita Crystallin	Manajemen Risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Nasrudin	Manajemen Risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Nasrudin	Akuntansi Accounting	*Chartered Accountant*	16 Mei-13 Juli 2024 May 16-July 13, 2024	IAI
Sumiyati	Manajemen Risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Sumiyati	Audit	*Konferensi Auditor Internal 2024*	10 Juli 2024 July 10, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Education Foundation Internal Audit
Wahyu Setyawan	Manajemen Risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Wahyu Setyawan	Kepatuhan Compliance	*Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs*	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	CRMS

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dalam aspek keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, atau perusahaan lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan tugas. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, Komisaris Independen bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau pengelolaan perusahaan.

Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dengan adanya Komisaris Independen, diharapkan tercipta lingkungan yang objektif dan independen serta terjaga prinsip *fairness* demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen tidak terpengaruh oleh pihak-pihak dengan kepentingan yang mungkin berbeda dari perusahaan, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dengan menyampaikan pendapat secara independen dalam rapat.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholders, or other companies that may affect his/her independence in carrying out his/her duties. In accordance with the principles of corporate governance, the Independent Commissioner is responsible for overseeing and monitoring the management of the Company.

Independent Commissioners are regulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. With the presence of an Independent Commissioner, it is expected to create an objective and independent environment and maintain the principle of fairness for the benefit of the Company. Independent Commissioners are not influenced by parties with interests that may differ from those of the Company, so that they can optimally carry out their supervisory functions by expressing their opinions independently in meetings.

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, IFG memiliki 2 (dua) Komisaris Independen, yaitu:

1. Fauzi Ichsan, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-400/MBU/12/2020 pada 30 Desember 2020; dan
2. Hotbonar Sinaga, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-337/MBU/10/2020 pada 20 Oktober 2020.

Dengan jumlah total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen di IFG mencapai 30,3% dari keseluruhan komposisi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang mengharuskan minimal 20% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS IN 2024

Throughout 2024, IFG had 2 (two) Independent Commissioners, namely:

1. Fauzi Ichsan, who was appointed through Decree of the Minister of SOEs Number SK-400/MBU/12/2020 on December 30, 2020; and
2. Hotbonar Sinaga, who was appointed through Decree of the Minister of SOEs Number SK-337/MBU/10/2020 on October 20, 2020.

With a total of 6 (six) members of the Board of Commissioners, Independent Commissioners in IFG account for 30.3% of the overall composition, in accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 which requires a minimum of 20% of the members of the Board of Commissioners to be Independent Commissioners.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria independensi Dewan Komisaris merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Adapun kriteria dalam mengangkat Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. tidak menjabat sebagai Direksi pada perusahaan terafiliasi;
2. tidak bekerja kepada Pemerintah termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
3. tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
4. tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya; dan
5. bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.

Dengan demikian, kedua Komisaris Independen IFG telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRITERIA FOR DETERMINING AND FULFILLING THE INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The criteria for the independence of the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The criteria for appointing Independent Commissioners are as follows:

1. not serving as Directors of affiliated companies;
2. not working for the Government including departments, agencies, and the military within the last 3 (three) years;
3. not working in the SOEs concerned or its affiliates within the last 3 (three) years;
4. have no financial relationship, either directly or indirectly, with the SOEs concerned or companies that provide services and products to the SOE concerned and its affiliates; and
5. free from interests and business activities that may hinder or interfere with the ability of an Independent Commissioner from outside the SOE concerned to act or think freely within the SOE.

Thus, both Independent Commissioners of IFG have met the criteria in accordance with the applicable regulations.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola perusahaan demi kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, Direksi juga berwenang mewakili perusahaan, baik dalam maupun luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan perannya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan, selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Board of Directors is an organ of the Company that has collective duties and responsibilities in managing the Company for the benefit and achievement of the Company's objectives. The Board of Directors is also authorized to represent the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions stated in the Articles of Association. In carrying out its role, the Board of Directors is responsible to the GMS as a form of accountability for the management of the company, in line with the principles of good corporate governance.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi pada 6 Juli 2023. Pedoman ini berisi panduan mengenai tata tertib kerja Direksi, termasuk tahapan aktivitas yang tersusun secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan pedoman Direksi yang senantiasa dikaji secara berkala. Pedoman ini mengatur hal-hal berikut:

1. peran Direksi dalam Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
2. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perusahaan, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
3. keterbukaan informasi;
4. kehadiran dalam rapat perusahaan;
5. pengelolaan laporan perusahaan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Kegiatan Perusahaan, dan Laporan Tata Kelola Perusahaan; dan
6. peranan Direksi dalam menyiapkan RKAP serta RJPP.

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has Guidelines and Work Procedures that has been ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors on July 6, 2023. This contains guidelines regarding the work order of the Board of Directors, including the stages of activities that are structured, systematic, easy to understand, and can be applied consistently. The Board of Directors' Guidelines and Work Procedures was prepared based on the principles of corporate law, provisions in the Articles of Association, prevailing laws and regulations, shareholder directives, and good corporate governance practices.

The Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors is a guideline for the Board of Directors that is reviewed regularly. This guideline regulates the following matters:

1. the role of the Board of Directors in performing their duties in good faith;
2. compliance with laws and regulations and/or the company's Articles of Association, as well as the principles of good corporate governance;
3. information disclosure;
4. attendance at company meetings;
5. management of company reports including Annual Reports, Company Activity Reports, and Corporate Governance Reports; and
6. the role of the Board of Directors in preparing the Drafts for Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Company's Long Term Plan (RJPP).

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

1. Anggota Direksi yang ditetapkan sebelum uji kemampuan dan kepatutan, memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Dalam pengangkatan anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang mencakup:
1. memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
   a. keahlian;
   b. integritas;
   c. kepemimpinan;
   d. pengalaman;
   e. jujur;
   f. perilaku yang baik; dan
   g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. memenuhi persyaratan formal, yaitu:
   a. orang perseorangan;
   b. mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
   c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. memenuhi persyaratan lain, yaitu:
   a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
   b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
   c. tidak menjabat sebagai Direksi pada IFG selama 2 (dua) periode berturut-turut;
   d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi

TERM OF OFFICE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors who are appointed before the fit and proper test, have a term of office that is effective since they are appointed by the GMS/Minister.
2. The term of office for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.
3. The GMS may dismiss the members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.
4. The position of a member of the Board of Directors ends if:
   a. he/she passed away;
   b. his/her term of office ends;
   c. dismissed by resolution of the GMS; or
   d. no longer fulfill the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the articles of association and laws and regulations including prohibited concurrent positions.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the appointment of members of the Board of Directors, candidates must fulfill the requirements which include:
1. meet the material requirements, namely:
   a. skills;
   b. integrity;
   c. leadership;
   d. Experience;
   e. honestly;
   f. good behavior; and
   g. high dedication to advance and develop the Company.
2. meet the formal requirements, such as:
   a. an individual;
   b. capable of performing legal acts;
   c. never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment; and
   d. never been a Member of the Board of Directors or Member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing an SOE, subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.
3. meet other requirements, namely:
   a. not an official of a political party and/or candidate member and/or member of the House of People's Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial Regional House of People's Representatives and District/ Municipal Regional House of People's Representatives;
   b. not a candidate for regional head/deputy head and/ or a regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head.
   c. not serving as Directors of IFG for 2 (two) consecutive periods;
   d. not currently serving as an official at a ministry/ agency, member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board at another SOEs, member of

pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya;

e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh IFG.

the Board of Directors at another SOEs, member of the Board of Directors at a subsidiary and/or other business entity;
e. not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of member of the Board of Directors;
f. have dedication and make full time available to perform their duties, which is stated in a statement from the person concerned;

g. physically and mentally healthy, i.e. not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
h. have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and tax payment obligations for the last 2 (two) years.

4. the fulfillment of the requirements as referred to in number 2 above, is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of the Board of Directors and the letter is kept by IFG.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI

Pada 23 Desember 2024, Pantro Pander Silitonga diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi di Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada 17 Desember 2024. Dengan pengangkatan tersebut, merujuk pada Anggaran Dasar IFG, Pantro Pander Silitonga secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bisnis IFG.

Dengan demikian terdapat perubahan susunan anggota Direksi dengan kronologi sebagai berikut:

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

On December 23, 2024, Mr. Pantro Pander Silitonga was appointed as the Executive Director for Monitoring and Evaluation of Economic Priority Programs at the National Economic Council based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 88/M of 2024 concerning the Appointment of the Director of National Economy stipulated on December 17, 2024. With this appointment, referring to IFG's Articles of Association, Mr. Pantro Pander Silitonga officially no longer serves as IFG's Business Director.

Thus, there are changes in the composition of the Board of Directors with the following chronology:

Kronologis Perubahan Susunan Direksi
Chronology of Changes in the Board of Directors

Direksi yang Berhenti Menjabat Directors who Stop Serving	Direksi yang Baru Menjabat Newly Appointed Directors	Keterangan Description
Pantro Pander Silitonga	-	Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bisnis IFG karena telah diangkat menjadi Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi di Dewan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2024. No longer serves as IFG Business Director as he has been appointed as Executive Director for Monitoring and Evaluation of Economic Priority Programs at the National Economic Council on December 23, 2024.

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	4 Juni 2021 - RUPS 2026 June 4, 2021 – 2026 GMS	Ke-1 1st	• Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. • Appointed as Vice President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-186/MBU/06/2021 dated June 4, 2021. • Appointed as President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS of IFG Number SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	21 Maret 2023-RUPS 2028 March 21, 2023- 2028 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Appointed as Vice President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS of IFG Number SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Rizal Ariansyah	Direktur SDM HC Director	11 Februari 2020 - RUPS Tahun 2025 February 11, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 1st	• Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. • Appointed as Director of Finance and General Affairs based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS of IFG Number SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020. • The change in nomenclature to Director of Finance, Risk Management and General Affairs is based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-186/MBU/06/2021 dated June 4, 2021. • The change in nomenclature to HC Director is based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik Technical Director	20 September 2021 – RUPS Tahun 2026 September 20, 2021 – 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG Nomor SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021. Appointed as Technical Director based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS of IFG Company Number SK-313/MBU/09/2021 dated September 20, 2021.

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2024
Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	26 September 2022 - RUPS Tahun 2027 September 26, 2022 – 2027 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Finance based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS of IFG Number SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Profiles of all Directors can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Seluruh calon anggota Direksi wajib lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Direksi, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan; dan
2. calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF DIRECTORS

All candidates for the Board of Directors must pass the fit and proper test conducted by the Shareholders before being appointed to the Board of Directors, as described below:

1. the appointment of the Board of Directors is determined by the GMS in accordance with the mechanism and provisions of laws and regulations and is done through a fit and proper test mechanism; and
2. candidates for members of the Board of Directors who have passed the fit and proper test must sign an Integrity Pact before their appointment as members of the Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Berikut disampaikan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Direksi sebagai bentuk transparansi pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkup perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

The following is the share ownership of other companies above 5% by the Board of Directors as a form of transparency in managing potential conflicts of interest within the Company.

Direksi Board of Directors	Kepemilikan Saham Shared Ownership
	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) | (President Director)	
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) | (Wakil Direktur Utama)	
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) | (HC Director)	Nihil None
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) | (Technical Director)	
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) | (Director of Finance)	

IFG tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP), dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham IFG.

IFG does not have a policy related to management share ownership plan (MSOP), and does not trade its shares to the public. As such, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors own shares of IFG.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hubungan kepengurusan antar anggota Direksi di perusahaan lain selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The management relationships between members of the Board of Directors in other companies during 2024 are as follows:

Direksi Board of Directors	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	√	X	X
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	X	X	X
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (HC Director)	√	X	X
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	√	X	X
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	√	X	X

√ = ada | x = tidak ada | √ = yes | x = no

Penjelasan terkait rangkap jabatan Direksi yang tercatat di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Explanation of the Board of Directors' concurrent positions recorded in other companies is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) | (President Director)	Komisaris PT Bahana Kapital Investa Commissioner of PT Bahana Kapital Investa
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) | (Vice President Director)	-
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) | (HC Director)	Komisaris PT Grahaniaga Tatautama Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) | (Technical Director)	Komisaris PT Bahana Artha Ventura Komisaris PT Asuransi Jiwa IFG Commissioner of PT Bahana Artha Ventura Commissioner of PT IFG Life Insurance
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) | (Director of Finance)	Komisaris PT Bahana Sekuritas Commissioner of PT Bahana Sekuritas

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

AFFILIATION RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hubungan afiliasi Direksi mengungkapkan hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham, atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun pengungkapan hubungan afiliasi Direksi di tahun 2024, sebagai berikut.

The affiliation of the Board of Directors discloses family and financial relationships with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or Shareholders, or relationships with the Company that may affect their ability to act independently.

The disclosure of the affiliation of the Board of Directors in 2024 is as follows.

Nama dan jabatan Name and position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders	**Dewan Komisaris lainnya** Other Board of Commissioners	**Direksi** Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x	x	x	x
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	x	x	x	x	x	x
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (HC Director)	x	x	x	x	x	x
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	x	x	x	x	x	x
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	x	x	x	x	x	x

√ = ada hubungan (yes) | x = tidak ada hubungan (no)

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK DIREKSI

Direksi dalam Melaksanakan kepengurusan IFG mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili IFG, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam pelaksanaan kegiatan kepengurusan IFG Direksi memiliki tugas antara lain:

1. menetapkan visi, misi, budaya, dan strategi IFG;
2. menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP;
3. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai tata kelola perusahaan;
4. menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada BUMN, Pedoman Umum Tata kelola perusahaan Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya;
5. melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors in carrying out the management of IFG has the following duties, authorities, obligations, rights and responsibilities:

Board of Directors Duties

The Board of Directors is assigned to perform all actions related to the management of the company for the benefit of IFG and in accordance with its purposes and objectives as well as representing IFG, both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS resolutions.

In the implementation of IFG management activities, the Board of Directors has duties, among others:

1. establish IFG's vision, mission, culture and strategy;
2. organize an introduction program for new members of the Board of Directors and organize training/learning programs to improve the competence of members of the Board of Directors on an ongoing basis which is realized in accordance with the RKAP;
3. implement and evaluate consistently and continuously IFG's policies on corporate governance;
4. avoid any deviation in the implementation of the principles of Corporate Governance in accordance with the guidelines for Corporate Governance in SOEs, the general guidelines for Indonesian Corporate Governance and other standards of practice and regulations;
5. coordinate the management and administration of the State Officials Wealth Report (LHKPN) and

dan Melaksanakan kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN;
6. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai program pengendalian gratifikasi;
7. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan *Whistleblowing System* (WBS);
8. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang pengembangan karier;
9. memberikan respons terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan IFG, penghematan IFG, pendayagunaan aset dan manfaat lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan (setuju atau tidak setuju) atas usulan tersebut;
10. menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan arahan mengenai usulan peluang bisnis disertai dengan studi kelayakan yang memadai;
11. Melaksanakan program/kegiatan IFG sesuai dengan rencana RKAP dengan memperhatikan:
    a. pengambilan keputusan untuk setiap program/kegiatan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar IFG atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar IFG; dan
    b. setiap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, kajian/studi kelayakan, analisis risiko serta menetapkan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.
12. mengupayakan tercapainya sasaran kinerja IFG sesuai dengan aspirasi pemegang saham yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP;
13. menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan;
14. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala, tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unit/jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan;
15. Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan. Hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan;
16. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem teknologi informasi;

implementing policies/SOPs on the management of compliance and submission of LHKPN;
6. implement and evaluate consistently and continuously the IFG policy on gratification control program;
7. implement and evaluate consistently and continuously the IFG policy on Whistleblowing System (WBS);
8. implement and evaluate consistently and continuously IFG's policy on career development;
9. respond to proposed business opportunities that have the potential to increase IFG's income, IFG's savings, asset utilization and other benefits within the scope of authority of the Board of Directors by identifying matters that provide business opportunities and making decisions (agree or disagree) on the proposal;
10. the Board of Directors submits to the Board of Commissioners for guidance on proposed business opportunities accompanied by adequate feasibility studies;
11. implement IFG programs/activities in accordance with the RKAP plan with due regard:
    a. decision making for each program/activity has gone through a mechanism in accordance with IFG's articles of association or in accordance with the authority stipulated in IFG's articles of association; and
    b. every program/activity that requires a significant amount of investment and debt has been decided through adequate analysis based on sufficient information, feasibility studies, risk analysis and establishing control measures to prevent the occurrence of such risks.
12. pursue the achievement of IFG's performance targets in accordance with the aspirations of shareholders which are used as the basis for assessing the management contract stipulated in the GMS ratification of the RKAP;
13. establish performance targets based on the RKAP for structural positions in stages according to the capacity of the role and potential duties of the unit and structural positions equipped with a performance contract for each unit/position;
14. conduct analysis and evaluation of the development of performance achievements for units/positions (structural) in the organization periodically, on time and in stages and discuss with units/positions that do not/have not achieved performance according to the set targets;
15. carry out performance assessment for employees consistently in accordance with individual performance indicators and targets set. Performance assessment results are utilized for employee development;
16. implement and conduct consistent and continuous evaluation of IFG policies on information technology systems;

17. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
18. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengadaan barang dan jasa IFG;
19. mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian IFG;
20. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (triwulanan dan tahunan) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi;
21. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang manajemen risiko IFG;
22. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengendalian internal IFG untuk mengamankan investasi dan aset IFG serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan;
23. menindaklanjuti hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan *monitoring* tingkat penyelesaian (*progress*) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SKAI dan auditor eksternal pada tahun yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
24. menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap mekanisme dan fungsi yang:
    a. mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan IFG dan seluruh kegiatan IFG sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar IFG; dan
    b. memantau dan menjaga kepatuhan IFG terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh IFG dengan pihak ketiga.
25. memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan IFG telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama Direksi, jabatan Direksi di perusahaan lain, termasuk jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Direksi maupun rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan;
26. menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
27. melakukan TJSL serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (Pemangku Kepentingan), mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral, serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan IFG tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, dan saling menguntungkan dengan masyarakat;

17. implement and evaluate consistently and continuously IFG's policy on product and service quality improvement system;
18. implement and conduct consistent and continuous evaluation of IFG's policy on IFG's procurement system;
19. develop Human Capital (HC), assess performance and provide appropriate remuneration and build an effective HC environment that supports IFG's achievements;
20. implement and conduct consistent and continuous evaluation of IFG's policies on accounting and preparation of financial statements (quarterly and annual) in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) generally accepted in Indonesia, so that there are no adjustments and auditor findings on recognition, measurement and recording and accounting of transactions and disclosure of accounting policies;
21. implement and evaluate consistently and continuously IFG's risk management policy;
22. implement and conduct consistent and continuous evaluation of IFG's policy on IFG's internal control system to secure IFG's investments and assets and conduct continuous evaluation;
23. follow up on the results of the examination of the Internal Supervisory Unit and external auditors (KAP and BPK) and monitoring the level of completion (progress) of the implementation of follow-up to the recommendations of the Internal Supervisory Unit and external auditors in the relevant year. The follow-up results are submitted to the Board of Commissioners;
24. implement and conduct consistent and continuous evaluation of mechanisms and functions:
    a. Control and ensure IFG's policies, decisions and all IFG's activities are in accordance with the provisions of laws, regulations and IFG's articles of association; and
    b. monitor and maintain IFG's compliance with all agreements and commitments made by IFG with third parties.
25. ensure that the IFG Annual Report contains information on the identity, main occupation of the Board of Directors, the position of the Board of Directors in other companies, including the number of meetings held in a fiscal year (meetings of the Board of Directors and joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners) and salaries, facilities, and/or other benefits received from the company concerned;
26. execute laws and regulations and agreements with third parties;
27. perform social and environmental responsibilities and taking into account the interests of various parties (Stakeholders), has legal, social, moral, and ethical obligations and responsibilities to respect the interests of the surrounding community considering that IFG's success cannot be separated from a harmonious, dynamic, and mutually beneficial relationship with the community;

28. melakukan dan meningkatkan hubungan kerja/ kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi IFG dan Pemangku Kepentingan berdasarkan pada kebijakan IFG;
29. melakukan survei secara sistematis dan berkala untuk mengetahui:
    a. tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan pelanggan/konsumen; dan
    b. tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan karyawan.
30. mewakili IFG baik di dalam maupun di luar pengadilan;
31. melakukan perencanaan penugasan khusus dan melaporkan pelaksanaan penugasan khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri dan pemberi penugasan khusus yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan GCG dan prinsip paradigma usaha (*business judgment rule*);
32. memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal , Komite Audit dan Komite Dewan Komisaris, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai IFG sepanjang diperlukan untuk Melaksanakan tugasnya;
33. melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola IFG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi;
34. melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa (yang berasal dari tim pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK pada saat pemeriksaan berakhir yaitu membahas hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menandatangani berita acara dengan muatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut; dan
35. mengajukan usulan pengelolaan IFG yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS serta Melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar IFG, persetujuan Dewan Komisaris, serta keputusan RUPS.

Wewenang Direksi

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan IFG, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan IFG dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan;
2. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan IFG;
3. menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan pemangku kepentingan secara tuntas;
4. menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan IFG (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar Rapat Direksi;

28. conduct and improve working relationships/partnerships that provide added value to IFG and Stakeholders based on IFG policies;
29. conduct systematic and periodic surveys to find out:
    a. satisfaction level and results of customer/consumer satisfaction survey index; and
    b. employee satisfaction level and satisfaction survey index results.
30. represent IFG both in and out of court;
31. plan the Special Assignment and reporting the implementation of the Special Assignment to the Minister of Finance, the Technical Minister, the Minister and the provider of the Special Assignment carried out by the company with due regard to good corporate governance and the principle of business judgment rule;
32. ensure that external auditors, internal auditors, Audit Committee and Board of Commissioners Committee, have access to accounting records, supporting data, and information on IFG as necessary to perform their duties;
33. protect and ensure the security of personal data managed by IFG in accordance with the provisions of laws and regulations governing the protection of personal data;
34. conduct a meeting with the examination team (which comes from the examination team based on the examination warrant issued by the Financial Services Authority ("OJK")) at the end of the examination to discuss the examination results, follow-up on the examination results and sign the minutes with the contents of the examination results and recommendations or follow-up; and
35. submit IFG management proposals that require the approval of the Board of Commissioners and/or require a written response from the Board of Commissioners and GMS Approval and implementing them in accordance with the provisions stipulated in IFG's articles of association, approval of the Board of Commissioners, and GMS resolutions.

Authority of the Board of Directors

In the execution of IFG's management duties, the Board of Directors has the following authorities:

1. establish an organizational structure/arrangement designed to ensure the achievement of organizational goals and objectives and in accordance with the needs of IFG with job descriptions and responsibilities for all levels of positions;
2. establish policies deemed appropriate in the management of IFG;
3. establish and organize a written mechanism to accommodate and resolve Stakeholder complaints thoroughly;
4. establish and regulate the decision-making mechanism for IFG's corporate actions in accordance with statutory provisions and in a timely manner, consisting of decision-making through the Board of Directors Meeting and decision-making outside the Board of Directors meeting;

5. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
6. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IFG baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
7. menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Setelah penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* Direksi wajib melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
8. mengangkat dan memberhentikan karyawan IFG berdasarkan peraturan IFG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. mengangkat dan memberhentikan pejabat IFG sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi, kecuali untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan maupun SKAI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
10. mengatur ketentuan tentang karyawan IFG termasuk penempatan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan, menyusun rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam IFG serta menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan IFG berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. dalam hal penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu RUPS;
12. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IFG, mengikat IFG dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IFG, serta mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar IFG dan/atau keputusan RUPS;
13. menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar IFG untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
14. menetapkan kegiatan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan terkait keuangan;
15. menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi misalnya *cash management*, *expenditure authority* dan *payment authority*;
16. menyampaikan usulan tentang insentif kinerja kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai;

5. regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent IFG in and out of court;
6. regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or several IFG employees either alone or jointly or to other persons, to represent IFG in and out of court;
7. determine candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Holding Members in accordance with the guidelines set by the Minister of State-Owned Enterprises. After the determination of candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Holding Members, the Board of Directors must report it to the Board of Commissioners;
8. appoint and dismiss IFG employees based on IFG regulations and other laws and regulations;
9. appoint and dismiss IFG officers up to a certain level regulated by a decree of the Board of Directors, except for appointing and dismissing the Corporate Secretary and Internal Audit Working Unit (SKAI) after obtaining approval from the Board of Commissioners;
10. regulate the provisions regarding IFG's employees including the placement of employees at all levels of positions in accordance with job specifications, develop succession plans for all positions in IFG and determine salaries, pensions or retirement benefits, and other income for IFG employees based on laws and regulations;
11. in the event that the determination of salaries, pensions or retirement benefits and other income for employees exceeds the obligations stipulated by laws and regulations, prior approval must be obtained from the GMS;
12. perform all actions and other deeds regarding the management and ownership of IFG's assets, binding IFG with other parties and/or other parties with IFG, and representing IFG in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, IFG's articles of association and/or GMS resolutions;
13. submit proposals for amendments to IFG's articles of association for GMS approval;
14. determine cooperation activities or contracts with a contract value or the use/acquisition of assets that exceed the Board of Director's authority as stipulated in finance-related policies;
15. establish financial policies that periodically need to be reviewed by the Board of Directors such as cash management, expenditure authority and payment authority;
16. submit proposals on performance incentives to the Board of Commissioners, to obtain the approval of the Board of Commissioners before being submitted to the GMS regarding the determination of the amount and type of income of the Board of Commissioners and Board of Directors. Determination of the proposed performance incentives of the Board of Directors reflects the suitability with the performance achieved;

17. menetapkan kebijakan pada Anggota *Holding* termasuk Anggota *Holding* eks BUMN agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada IFG dalam bidang sebagai berikut:
    a. bidang akuntansi dan keuangan;
    b. bidang pengembangan dan investasi;
    c. bidang aktuaria;
    d. bidang operasional (termasuk pengadaan barang dan/atau jasa);
    e. bidang pemasaran dan produk;
    f. bidang informasi teknologi;
    g. bidang sumber daya manusia;
    h. bidang manajemen risiko dan pengawasan internal ;
    i. bidang hukum; dan
    j. bidang PKBL;

18. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut.

Kewajiban Direksi

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan IFG, Direksi memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IFG sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. mengikuti program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang diselenggarakan oleh IFG;
3. mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;
4. menyiapkan susunan organisasi IFG lengkap dengan perincian dan tugasnya;
5. menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
    b. posisi IFG saat ini;
    c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
    d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang;
    e. kerja sama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun; dan
    f. kebijakan penataan dan pengembangan Anggota *Holding* untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.
6. menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);
    b. evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;
    c. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan IFG, dan program kerja/kegiatan;

17. establish policies on Holding Members including former Holding Members of State-Owned Enterprise to always be aligned and in accordance with the policies and regulations applicable to IFG in the following areas:
    a. accounting and finance;
    b. development and investment sector;
    c. actuarial areas;
    d. operational areas (including procurement of goods and/or services);
    e. marketing and product areas;
    f. information technology areas;
    g. human capital areas;
    h. risk management and internal control;
    i. legal areas; and
    j. area of partnership and environmental development programs (PKBL).
18. perform actions for and on behalf of Series A Dwiwarna Shareholders granted by Series A Dwiwarna Shareholders of Holding Members originating from former SOEs based on the articles of association and Power of Attorney from Series A Dwiwarna Shareholders of the Holding Members.

Obligations of the Board of Directors

In doing IFG's management duties, the Board of Directors has the following obligations:

1. strive and ensure the implementation of IFG's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities;
2. participate in the introduction program for new members of the Board of Directors organized by IFG;
3. participate in training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed;
4. prepare the IFG organizational structure complete with details and duties;
5. prepare Company's Long-Term Plan (RJPP) which is a strategic plan that contains goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, which at least contains:
    a. evaluation of the implementation of the previous RJPP;
    b. IFG's current position;
    c. assumptions used in the preparation of the RJPP;
    d. establishment of mission, goals, strategies, policies, and long-term work programs;
    e. corporate level cooperation that is strategic and/or has a term of more than 5 (five) years; and
    f. structuring and development policy of Holding Members for the next 5 (five) years.
6. prepare the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as an annual elaboration of the RJPP, which at least contains:
    a. basic assumptions for RKAP preparation (parameters used);
    b. evaluation of the implementation of the previous RKAP;
    c. mission, business objectives, business strategies, IFG policies, and work programs/activities;

d. anggaran IFG yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
e. tingkat kinerja IFG;
f. proyeksi keuangan IFG dan Anggota *Holding*; dan
g. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

7. menyiapkan dan memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan RUPS pada waktunya mengenai RJPP, RKAP, dan perubahannya untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pengesahan RUPS;
8. Melaksanakan kewajiban kepada negara tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung dan PBB) serta penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator;
9. meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui pencapaian target-target yang disepakati serta mampu meningkatkan kinerja IFG dari tahun-tahun sebelumnya;
10. Melaksanakan tanggung jawab sosial IFG untuk mendukung berkelanjutan operasi IFG dan untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari IFG;
11. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan SAK dan berdasarkan prinsip pengendalian internal , terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
12. menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
13. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap diminta oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham;
14. menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
15. menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
16. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IFG dan dokumen IFG lainnya;
17. menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
18. menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi, serta menghadiri Rapat Gabungan baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
19. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham;
20. menyusun dan menetapkan *blueprint* organisasi IFG;
21. memformulasikan dan menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit*;

d. IFG budget detailing each work program/activity budget;
e. IFG performance level;
f. financial projections of IFG and Holding Members; and
g. other matters requiring GMS resolutions.

7. prepare and provide explanations to the Board of Commissioners and the GMS in due time regarding the RJPP, RKAP, and their amendments to obtain the approval of the Board of Commissioners and the ratification of the GMS;
8. carry out obligations to the state on time in terms of payment of tax obligations (employee income tax, corporate income tax, periodic and completed VAT and Land and Building Tax) and submission of liability documents to regulatory agencies;
9. increase shareholder value consistently and sustainably through the achievement of agreed targets and be able to improve IFG's performance from previous years;
10. implement IFG's social responsibility to support the sustainability of IFG's operations and to mitigate any negative impacts on society caused by IFG's products, services and operational processes;
11. set up an accounting system in accordance with SAK and based on internal control principles, especially the functions of management, recording, storage and supervision;
12. prepare Financial Statements based on SAK and submit to the Public Accountant for auditing;
13. provide periodic reports in accordance with the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and shareholders;
14. submit the Balance Sheet and Income Statement that have been authorized by the GMS to the Minister of Law and Human Rights;
15. submit a report on changes in the composition of shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;
16. create and maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting, and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Reports and IFG financial documents and other IFG documents;
17. prepare and propose the Performance Achievement Indicators of the Board of Directors for approval by the Board of Commissioners and GMS;
18. organize and attend Board of Directors meetings, as well as attend joint meetings either organized by the Board of Directors or organized by the Board of Commissioners;
19. provide explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders;
20. develop and establish IFG's organizational blueprint;
21. formulate and establish risk appetite, risk tolerance and risk limits;

22. memenuhi KPI yang telah disusun IFG dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, memastikan IFG beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, dan mengakselerasi pertumbuhan kinerja IFG;
23. melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja IFG berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen;
24. membuat dan menyampaikan Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan) dan Laporan Tahunan yang memuat informasi-informasi penting dan relevan secara tepat waktu dan disajikan dengan akurat, jelas, dan objektif serta dengan perlakuan, muatan, dan waktu yang sama kepada semua Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
25. memenuhi permintaan data dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
26. meminta persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut, dalam hal:
    a. pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    b. perubahan Anggaran Dasar; dan
    c. pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
27. melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut;
28. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar IFG dan yang ditetapkan oleh RUPS;
29. menyampaikan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP;
30. menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
31. menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. memastikan dilaksanakannya penilaian terhadap pelaksanaan dan penerapan GCG;
33. menetapkan rencana strategis teknologi informasi; dan
34. menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial. Khusus

22. fulfill the KPIs that IFG has developed with the aim of ensuring the achievement of strategic objectives, improving the effectiveness of performance control, ensuring that IFG operates within the tolerable risk corridor established earlier, and accelerating IFG's performance growth;
23. report to the Board of Commissioners on the implementation of the Board of Directors performance management system and IFG's performance achievement based on the Board of Directors collegial targets as well as the achievement of individual Board of Directors performance targets based on the targets in the management contract;
24. prepare and submit Management Reports (quarterly and annual) and Annual Reports containing important and relevant information in a timely manner and presented accurately, clearly, and objectively and with the same treatment, content, and timing to all shareholders and the Board of Commissioners;
25. fulfill data requests and accessing company data and documents submitted by Series A Dwiwarna Shareholders;
26. request GMS approval to perform actions for and on behalf of series A Dwiwarna shareholders granted by series A Dwiwarna Shareholders in Subsidiary originating from former SOEs based on the articles of association of the Subsidiary and the Power of Attorney from the series A Dwiwarna Shareholders of the Subsidiary, in the event:
    a. appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
    b. amendments to the articles of association; and
    c. nomination of candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.
27. report every action for and on behalf of the Dwiwarna series A shareholders given by the Dwiwarna series A shareholders in the Subsidiary originating from the former SOEs based on the articles of association of the Subsidiary and the Power of Attorney from the Dwiwarna series A Shareholders of the Subsidiary;
28. carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in IFG's articles of association and those determined by the GMS;
29. submit the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors collegially to the GMS/Minister to be determined together with the determination of the RKAP;
30. elaborate the KPIs of the Board of Directors on a collegial basis into individual KPIs of the Board of Directors and submit to the Board of Commissioners for approval;
31. submit health level reports to Shareholders in accordance with applicable regulations;
32. ensure assessment of the implementation and application of good corporate governance;
33. establish an IT strategic plan;
34. sign the annual management contract containing the performance targets of the Board of Directors as a

kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan.

Hak Direksi

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan IFG, Direksi memiliki hak sebagai berikut:

1. menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya;
5. bila IFG mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerja yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
6. dalam hal IFG tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka IFG dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
7. memperoleh cuti sesuai ketentuan IFG; dan
8. menggunakan sarana dan tenaga profesional, kecuali ditentukan lain melalui kebijakan/peraturan, Direksi dapat mengangkat staf ahli berdasarkan kebijakan/peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tugas kepengurusan IFG, Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan IFG kepada RUPS;
2. setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IFG yang menyebabkan kerugian bagi IFG, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
3. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
4. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

collegial group. Specifically, the annual management contract containing individual performance targets of the Board of Directors is signed by the relevant member of the Board of Directors.

Board of Directors' Rights

In the performance of IFG's management duties, the Board of Directors has the following rights:

1. receive income in accordance with the provisions stipulated by the GMS with due observance of laws and regulations;
2. receive income in the form of salary or honorarium, allowances, and facilities that are fixed by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations;
3. receive bonus/performance incentive/LTI which is variable (merit rating) by considering performance factors and the company's financial capability, as well as other relevant factors;
4. in the event that the calculation of salary or honorarium causes the salary or honorarium to be lower than the previous year, the salary or honorarium used for the person concerned may be set equal to the salary or honorarium of the previous year;
5. if IFG achieves a profit level, the Board of Directors may receive bonus as a reward for work performance, the amount of which is determined by the GMS;
6. in the event that IFG does not have net profit but shows improved performance as indicated by the achievement of targets to be achieved, IFG may provide tantiem for members of the Board of Directors to the extent that it has been budgeted and accounted for as an expense.
7. obtain work leave as per IFG requirements; and
8. using professional facilities and personnel, unless otherwise determined through policies/regulations, the Board of Directors may appoint expert staff based on applicable policies/regulations.

Responsibility of the Board of Directors

In the execution of IFG's management duties, the Board of Directors has the following responsibilities:

1. accountable for the implementation of IFG management duties to the GMS;
2. each member of the Board of Directors shall be personally liable if he/she is guilty or negligent in carrying out his/her duties for the interest and business of IFG which causes loss to IFG, unless the member of the Board of Directors can prove that IFG's losses were not due to its errors or omissions;
3. has conducted management in good faith and prudence for the benefit of and in accordance with the purposes and objectives of IFG;
4. have no conflict of interest, either directly or indirectly, over the management actions that result in losses; and

5. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian IFG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Utama yaitu:
   a. sebagai pimpinan perusahaan:
      i) bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan, termasuk memberikan arahan penyusunan dan penetapan rancangan RJPP dan RKAP;
      ii) mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS;
      iii) mewakili Direksi dalam menandatangani surat/dokumen terkait pengurusan perusahaan, tanpa mengurangi hak anggota Direksi lainnya untuk menandatangani surat/dokumen sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing atau yang telah diatur tersendiri dalam kebijakan perusahaan;
      iv) memimpin rapat Direksi dan mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/RUPS;
      v) mewakili Direksi dalam menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala SKAI sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
      vi) mewakili Direksi dan perusahaan dalam memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang perusahaan kepada pemangku kepentingan;
      vii) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan WBS di IFG dibantu oleh unit kerja pengelola WBS;
      viii) menandatangani laporan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkala; dan
      ix) memberikan arahan dalam penyelesaian atas pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. sebagai pimpinan direktur bidang:
      i) memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* dalam bidang transformasi, riset, audit internal , dan sekretaris perusahaan;

5. have taken measures to prevent IFG's losses from arising or continuing.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

Based on the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 15 of 2024 concerning the Organizational Structure Policy, the main duties and functions of the Board of Directors are as follows:

1. The main duties, functions and responsibilities of the President Director including:
   a. To act as a company leader:
      i) act as the leader of the members of the Board of Directors in providing direction in preparing and determining the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
      ii) provide direction and control all Company's activities including planning, implementation, control, and evaluation of the achievement of the RJPP and RKAP that have been approved by the GMS;
      iii) represent the Board of Directors in signing letters/documents related to company management, without prejudice to the rights of other members of the Board of Directors to sign letters/documents in accordance with their respective fields and responsibilities or as separately stipulated in company policy;
      iv) lead Board of Directors meetings and coordinate the Board of Directors for the implementation of Board of Commissioners/GMS meetings;
      v) act on behalf of the Board of Directors in appointing, promoting, and dismissing the Head of the Corporate Secretary Division and the Head of SKAI in accordance with the company's applicable policies, with prior written approval from the Board of Commissioners;
      vi) represent the Board of Directors and the company in providing information related to all matters concerning the Company to stakeholders;
      vii) be responsible for the implementation of the WBS at IFG, assisted by the WBS management unit;
      viii) sign periodic reports on the realization of the use of additional State Equity Participation (PMN); and
      ix) provide guidance in the resolution of disciplinary violations and industrial relations in the company in accordance with applicable regulations;
   b. To act as the head director of field:
      i) provide direction, monitoring, and conduct periodic evaluations in order to align the work programs and policies of Holding Members in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretarial;

ii) memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris perusahaan;
iii) melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris perusahaan;
iv) memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang transformasi, riset, audit internal , dan sekretaris perusahaan;
v) memberikan arahan dalam rangka mengembangkan kerangka audit internal untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan pemantauan, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi;
vi) memastikan fungsi pelaksana audit internal memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugasnya, memperoleh sumber daya serta anggaran yang diperlukan, dan Melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
vii) memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi fungsi pelaksana audit internal ;
viii) menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
ix) memastikan tersedianya unit kerja yang membidangi fungsi pelaksana audit internal di Anggota *Holding*.

2. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Wakil Direktur Utama:
Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Wakil Direktur Utama yang membidangi unit kerja teknologi informasi, manajemen risiko, kepatuhan & kebijakan, dan strategi perusahaan. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
a. melakukan pengurusan perusahaan dalam Melaksanakan program kerja bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
b. memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
c. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
d. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang

ii) provide direction in the preparation of company work plans, both RKAP and RJPP, for Holding Members in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretarial;
iii) conduct periodic supervision and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members that have been approved by the GMS in the areas of transformation, research, internal audit and corporate secretarial;
iv) provide direction in controlling and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on the needs and strategic plans in the areas of transformation, research, internal audit and corporate secretarial;
v) provide direction in developing an internal audit framework to identify, measure, monitor, and control all risks faced;
vi) ensure that the internal audit function obtains information related to the performance of its duties, obtains the necessary resources and budget, and performs its functions in accordance with the provisions of laws and regulations;
vii) ensure that appropriate corrective actions are taken in a timely manner on all findings and recommendations of the internal audit function;
viii) conduct internal supervision in accordance with applicable laws and regulations; and
ix) ensure the availability of a work unit that is responsible for the internal audit function in Holding Members

2. Main duties, functions and responsibilities of the Vice President Director:
The main duties of the Vice President Director are to manage the company by leading the Vice President Director Directorate, which oversees the information technology, risk management, compliance & policy, and corporate strategy work units. In implementing these main duties, the Vice President Director is responsible for performing the following functions:
a. managing the company in implementing work programs in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
b. providing direction, monitoring, and conducting periodic evaluations to align the work programs and policies of Holding Members in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
c. providing direction in the preparation of company work plans, both RKAP and RJPP, for Holding Members in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
d. supervising and evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members that have

telah disahkan oleh RUPS pada bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;

e. memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
f. memimpin dan memberikan arahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas rancangan RJPP dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
g. memberikan arahan dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* dan mengevaluasi program kerja serta kinerja Divisi Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;

h. menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;

i. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan risiko;
j. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada pihak eksternal;
l. melakukan pengembangan organisasi terkait kegiatan manajemen risiko, dan teknologi informasi serta perencanaan strategis dan pemantauan kinerja di lingkungan Perusahaan dan Anggota *Holding*;
m. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
n. memimpin, memberikan arahan dan mengawasi perencanaan, implementasi, dan penyusunan laporan ESG.

3. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Bisnis:
Tugas pokok Direktur Bisnis adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Bisnis yang membidangi unit kerja M&A dan Partnership, Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis, Bisnis Capital Market & Investasi, Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan, Bisnis Asuransi Jiwa, Special Liability Management, dan Quality Assurance. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Bisnis bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
a. melakukan pengurusan perusahaan di bidang *merger*, akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu

been approved by the GMS in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
e. providing guidance in controlling and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on the needs and strategic plans in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
f. leading and providing direction in the preparation, implementation, and evaluation of the Company's RJPP and Key Performance Indicators (KPIs);
g. providing direction and developing information systems and technology in the Company and/or its Holding Members and evaluate the work programs and performance of the Information Technology Division and other activities in accordance with their areas of responsibility in the Company and/or its Holding Members;
h. establishing, directing, supervising, and evaluating the implementation of Company management in accordance with risk management in accordance with the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, and/or decisions of the GMS/Minister;
i. monitoring compliance and conducting internal supervision of all work units of the risk management organization;
j. taking the necessary steps to ensure that the Company complies with all laws and regulations and that the Company's business activities do not deviate from the provisions of laws and regulations;

k. monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company to external parties;

l. developing the organization related to risk management activities, information technology, strategic planning, and performance monitoring within the Company and its Holding Members;
m. coordinating and providing direction on the implementation of good corporate governance principles; and
n. leading, providing direction, and supervising the planning, implementation, and preparation of ESG reports.

3. Main duties, functions and responsibilities of the Business Director
The main duty of the Business Director is to manage the Company by leading the Business Directorate in charge of M&A and Partnership, Digital Strategy and Business Development, Capital Market & Investment Business, General Insurance and Guarantee Business, Life Insurance Business, Special Liability Management, and Quality Assurance. In carrying out these main duties, the Business Director is responsible for organizing functions which include:
a. managing the Company in the areas of mergers, acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy

(*quality assurance*), strategi digital dan pengembangan bisnis, serta pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

b. memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

c. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang *merger* dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

d. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

e. memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

f. menetapkan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan strategi lini bisnis Anggota *Holding* dan kinerja lini bisnis Anggota *Holding*;

g. memberikan arahan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan lini bisnis, termasuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja lini bisnis Anggota *Holding* sesuai dengan target dan arahan dari Pemangku Kepentingan; dan

h. mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi kerja sama bisnis, mitra, dan investor dalam rangka implementasi strategi bisnis perusahaan dan Melaksanakan tugas dari pemerintah.

and business development, as well as management of business lines including distribution channels of Holding Members in the fields of life insurance, general insurance and guarantees, as well as capital markets and investments;

b. providing direction, monitoring, and conducting periodic evaluations in order to align work programs and policies of Holding Members in the fields of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and management of business lines including distribution channels of Holding Members in the life insurance, general insurance and guarantees, as well as capital markets and investments;

c. providing direction in the preparation of the Company's work plan both RKAP and RJPP of Holding Members in the field of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and management of business lines including distribution channels of Holding Members in the life insurance business, general insurance and guarantee, as well as capital markets and investment;

d. conducting periodic supervision and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members that have been approved by the GMS in the fields of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development and business line management including the life insurance, general insurance and guarantee, as well as capital markets and investment;

e. providing direction in controlling, and evaluating the achievement of RJPP and RKAP of Holding Members based on the needs and strategic plans in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development and business line management including life insurance, general insurance and guarantee, as well as capital markets and investment;

f. establishing, directing, supervising, controlling and evaluating the strategic planning of Holding Members' business lines and the performance of Holding Members' business lines;

g. providing direction and evaluating the preparation and implementation of business line activities, including evaluating and monitoring the performance of Holding Members' business lines in accordance with targets and directions from Stakeholders; and

h. controlling and evaluating activities to fulfill the optimization of business cooperation, partners, and investors in order to implement the Company's business strategy and carry out tasks from the government.

4. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Keuangan:
   Tugas Pokok Direktur Keuangan adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Keuangan yang membidangi unit kerja Keuangan Perusahaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Manajemen Portofolio Investasi dan Anggota *Holding*. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
   a. melakukan pengurusan perusahaan di bidang keuangan meliputi penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan aset instrumen investasi, pengelolaan portofolio investasi, dan *Management Information System* (MIS);
   b. memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan instrumen investasi termasuk tanah dan/atau bangunan, pengelolaan portofolio investasi, dan MIS;
   c. memimpin, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan RKAP dalam lingkup keuangan secara konsolidasi perusahaan dan Anggota *Holding*;
   d. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, MIS, dan manajemen portofolio investasi;
   e. memimpin dan mengoordinasikan persiapan bahan/ materi RUPS perusahaan terkait RKAP dan revisi RKAP perusahaan (jika ada);
   f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, MIS, dan manajemen portofolio investasi;
   g. memberikan arahan penetapan strategi, kebijakan, pengaturan keuangan di perusahaan;
   h. melakukan pemantauan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan/atau Anggota *Holding*
   i. serta mempersiapkan penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan;
   j. mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana perusahaan melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/ atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional perusahaan;
   k. melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan permodalan perusahaan dan/atau Anggota *Holding* untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
   l. mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga;

4. Main duties, functions and responsibilities of the Finance Director:
   The main duty of the Finance Director is to manage the Company by leading the Finance Directorate which is in charge of the Corporate Finance, Accounting and Reporting, and Investment Portfolio Management and Holding Members work units. In carrying out these main duties, the Finance Director is responsible for organizing functions which include:
   a. managing the Company in the financial sector including budgeting, treasury, accounting, taxation, reporting, investment instrument asset management, investment portfolio management, and Management Information System (MIS);
   b. providing direction, monitoring, and conducting periodic evaluations to align work programs and subsidiary policies in the fields of budgeting, treasury, accounting, taxation, reporting, management of investment instruments including land and/or buildings, investment portfolio management, and MIS;
   c. Leading, providing direction, controlling and evaluating the preparation of RKAP within the scope of finance on a consolidated basis for the company and its Holding Members;
   d. providing direction in the preparation of the Company's work plan both RKAP and RJPP Holding Members in the areas of corporate finance, accounting and reporting, MIS, and investment portfolio management;
   e. leading and coordinating the preparation of materials for the Company's GMS related to the RKAP and revision of the Company's RKAP (if any);
   f. conducting periodic supervision and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members that have been authorized by the GMS in the areas of corporate finance, accounting and reporting, MIS, and investment portfolio management;
   g. providing direction for setting strategies, policies, financial arrangements in the company;
   h. monitoring the financial health level of the company and/or its Holding Members;
   i. and preparing an assessment of the Company's financial soundness;
   j. coordinating, controlling and evaluating the Company's fund optimization activities through fund placement activities in banks and/or other money market instruments including administration activities to ensure the availability of funds to finance the Company's operational activities;
   k. monitoring and evaluating the adequacy of the capital of the company and/or its Holding Members to carry out business activities and operations of the company and/or its Holding Members;
   l. coordinating, controlling and evaluating activities or efforts to obtain funding from third parties;

m. memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh kreditur, termasuk pembayaran kepada kreditur atau pemegang surat hutang;
n. memberikan arahan pengelolaan, dan pemantauan dividen secara konsolidasi;
o. mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran perusahaan (fungsi *controller*) serta Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan perusahaan;
p. memberikan arahan dan melakukan pemantauan pengelolaan arus kas perusahaan serta memonitor arus kas Anggota *Holding*;
q. memastikan pelaksanaan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan perusahaan dan Anggota *Holding*, termasuk memastikan kesesuaian pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. memimpin, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi, mengoordinasikan pelaporan capaian kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* dibandingkan dengan RKAP dan revisi RKAP (jika ada);
s. mengoordinasikan, menganalisis dan mengevaluasi serta menyajikan laporan kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* untuk disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya;
t. mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
u. mengoordinasikan, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan triwulan, semester, tahunan, dan laporan keuangan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan dan Anggota *Holding* kepada pihak atau regulator sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
v. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN;
w. memberikan arahan dan melakukan evaluasi atas portofolio investasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* termasuk ekosistem usaha Anggota *Holding* melalui Anggota *Holding*;
x. memberikan arahan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sinergi data yang valid dalam rangka menerapkan konsep *single source of truth data* dan berperan sebagai narahubung (*focal point*) data keuangan, kecuali data-data terkait remunerasi karyawan dan Direksi perusahaan; dan
y. memberikan arahan, mengawasi dan melakukan evaluasi atas pengembangan MIS.

5. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur SDM:
Tugas Pokok Direktur SDM adalah melakukan pengurusan Perusahaan dengan memimpin Direktorat SDM yang membidangi unit kerja Sumber Daya Manusia,

m. ensuring the fulfillment of obligations required by creditors, including payments to creditors or debenture holders;
n. providing management direction, and monitoring dividends on a consolidated basis;
o. coordinating, controlling, and evaluating the use of the Company's budget (controller function) as well as implementing and controlling payment and collection activities to other parties related to the Company's activities;
p. providing direction and monitoring the Company's cash flow management and monitoring the cash flow of its Holding Members;
q. ensuring the fulfillment of taxation aspects related to the activities of the Company and its Holding Members, including ensuring the suitability of tax reporting in accordance with applicable regulations;
r. leading, providing direction, and evaluating, coordinating the reporting of the Company's and Holding Members' financial performance achievements compared to the RKAP and revised RKAP (if any);
s. coordinating, analyzing and evaluating as well as present financial performance reports of the Company and its Holding Members to be submitted to the Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders, and other Stakeholders;
t. coordinating the implementation, evaluate and approve the recording, administration and documentation activities as well as the preparation of company management reports related to the accounting field;
u. coordinating, providing direction, controlling and evaluating the activities of recording financial transactions, preparing quarterly, semester, annual reports, and other financial reports that are the obligations of the Company and its Holding Members to parties or regulators in accordance with applicable accounting standards in a timely manner;
v. signing a statement of responsibility for the report on the realization of the use of additional PMN;
w. providing direction and evaluating the investment portfolio in the Company and/or its Holding Members including the business ecosystem of Holding Members through Holding Members;
x. providing direction, monitoring and evaluating the implementation of valid data synergy in order to implement the concept of single source of truth data and act as a focal point for financial data, except data related to remuneration of employees and Directors of the Company; and
y. providing direction, supervising and evaluating the development of the MIS.

5. Main duties, functions and key responsibilities of HC Director:
The main duty of the HC Director is to manage the Company by leading the HC Directorate in charge of the Human Capital, Learning & Corporate Culture, Legal,

Pembelajaran & Budaya Perusahaan, Hukum, dan Pengadaan & Pengelolaan Aset. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur SDM bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

a. melakukan pengurusan perusahaan meliputi menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi strategi dan pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
b. memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* meliputi pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
c. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
d. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
e. memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
f. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan karyawan, strategi dan perencanaan SDM, pengelolaan remunerasi, analisis data dan layanan, pengembangan karyawan, pengelolaan manajemen kinerja, hubungan industrial dan pengakhiran hubungan kerja serta pengelolaan manajemen talenta dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
g. memimpin pelaksanaan dan menentukan penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
i. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan aktiva tetap di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;

and Procurement & Asset Management work units. In performing these main duties, the HC Director is responsible for organizing functions which include:

a. managing the Company includes establishing, directing, supervising and evaluating the strategy and implementation of HR management, learning and corporate culture, legal support, procurement and management of fixed assets, office management, archives, and environmental social responsibility;
b. providing direction, monitoring, and periodic evaluation in the context of aligning work programs and subsidiary policies including the implementation of HR management, learning and corporate culture, legal support, procurement and management of fixed assets, office management, archives, and environmental social responsibility;
c. providing direction in the preparation of the Company's work plan both RKAP and RJPP Holding Members in the field of HR management, learning and corporate culture, law, procurement and management of fixed assets, archives, and environmental social responsibility;
d. conducting periodic supervision and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members that have been approved by the GMS in the fields of HC management, learning and corporate culture, law, procurement and management of fixed assets, archives, and environmental social responsibility;
e. providing direction in controlling, and evaluating the achievement of RJPP and RKAP of Holding Members based on the needs and strategic plans in the fields of HR management, learning and corporate culture, law, procurement and management of fixed assets, archives, and environmental social responsibility;
f. providing direction, monitoring and evaluation of employee planning and fulfillment, HC strategy and planning, remuneration management, data analysis and services, employee development, performance management, industrial relations and termination of employment and talent management and other activities in accordance with their areas of responsibility in the Company and/or its Holding Members;
g. lead the implementation and determine the settlement of cases of violations of discipline and industrial relations in the Company in accordance with applicable regulations;
h. providing direction, monitoring and evaluation of goods and services procurement activities in the Company and/or its Holding Members;
i. providing direction, monitoring, and evaluation of the management of fixed assets in the Company and/or its Holding Members;

j. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam lingkup perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
k. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap dukungan aspek hukum di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
l. memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset perusahaan yang dipergunakan untuk operasional rutin perusahaan; dan
m. memberikan arahan, memonitor, mengevaluasi tata kelola kearsipan perusahaan dan Anggota *Holding*.

6. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Teknik:
Tugas Pokok Direktur Teknik adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Teknik yang membidangi unit kerja Aktuaria dan Optimasi Operasional Asuransi. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Teknik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
a. melakukan pengurusan perusahaan di bidang aktuaria meliputi pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, keunggulan operasional (*operational excellence*), dan tata kelola asuransi (*governance*);
b. memberikan arahan, melakukan pengawasan dan mengevaluasi rencana program kerja serta melakukan aktivitas lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan keselarasan program kerja Anggota *Holding*, sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
c. memberikan arahan dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
d. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja Perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang aktuaria dan pengembangan produk;
e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;
f. memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;
g. menetapkan, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan *product & pricing*, penilaian risiko terkait *product & pricing* dan penerapan disiplin *product & pricing* di Anggota *Holding*;

j. providing direction, monitoring, and evaluation of social and environmental responsibility activities within the scope of the Company and/or its Holding Members;
k. providing direction, monitoring, and evaluation of the support of legal aspects in the Company and/or its Holding Members;
l. providing direction, monitoring, and evaluation of activities to fulfill work facilities/infrastructure in order to support the implementation of the Company's activities including maintaining and administering the Company's assets used for routine company operations; and
m. providing direction, monitoring, and evaluation of the archival governance of the Company and its Holding Members.

6. Main duties, functions and main responsibilities of the Technical Director:
The main duties of the Technical Director is to manage the company by leading the Technical Directorate in charge of the Actuarial and Insurance Operational Optimization work units. In carrying out these main duties, the Technical Director is responsible for organizing functions which include:
a. managing the company in the actuarial field including product development, asset and liability management, operational excellence, and insurance governance;
b. providing direction, monitoring, and evaluation of work program plans and carry out other activities needed to ensure the alignment of the Holding Members' work program, in accordance with the area of responsibility;
c. providing direction in preparing, controlling and evaluating the achievement of RJPP and RKAP based on the needs and strategic plans in the field of responsibility;
d. providing direction in the preparation of the Company's work plan both RKAP and RJPP Holding Members in the field of actuarial and product development;
e. conducting periodic supervision and evaluation of the implementation of RJPP and RKAP of Holding Members that have been authorized by the GMS in the areas of product development, asset and liability management, and operational excellence;
f. providing direction in controlling, and evaluating the achievement of RJPP and RKAP of Holding Members based on the needs and strategic plans in the areas of product development, asset and liability management, and operational excellence;
g. establishing, controlling and evaluating product & pricing planning, risk assessment related to product & pricing and implementation of product & pricing discipline in Holding Members;

h. memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan aktuaria dan *underwriting*, serta pengawasan aktivitas fungsi aktuaria dan *underwriting* di Anggota *Holding*; dan
i. memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimasi operasional asuransi Anggota *Holding*.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

IFG menerapkan kebijakan program orientasi bagi Direksi yang baru menjabat agar mereka dapat bekerja selaras dengan keseluruhan organisasi perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pelaksanaan program orientasi ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pengenalan wajib diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat di IFG.
2. Tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengadakan Program Pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam teknis pelaksanaannya, apabila Program Pengenalan Direksi dilaksanakan bersamaan dengan pengenalan Dewan Komisaris, maka Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang diterapkan IFG.
4. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas IFG, dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebutuhan IFG, termasuk namun tidak terbatas pada perkenalan dengan Pejabat Satu Level di bawah Direksi.

5. Materi presentasi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi:
   a. pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh IFG;
   b. gambaran mengenai IFG berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal; dan
   d. penjelasan mengenai fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Pertemuan perkenalan dengan Insan IFG dan Pemangku Kepentingan IFG, meliputi:
   a. anggota Dewan Komisaris;
   b. anggota Direksi;
   c. Sekretaris Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris;
   d. pejabat IFG; dan
   e. Pemangku Kepentingan IFG.

h. providing direction and controlling and evaluating actuarial and underwriting activities, as well as supervision of actuarial and underwriting function activities in Holding Members; and
i. provide direction and control as well as evaluate the optimization activities of the Holding Members' insurance operations.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

IFG implements an orientation program policy for newly appointed Directors so that they can work in harmony with the Company's overall organization. In accordance with the provisions contained in the Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors, the implementation of this orientation program is governed by the following provisions:

1. The Introduction Program shall be provided to the first-time Directors of IFG.
2. The responsibility for preparing and conducting the Induction Program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of Corporate Secretary.

3. In its technical implementation, if the Introduction Program of the Board of Directors is held simultaneously with the introduction of the Board of Commissioners, the Corporate Secretary coordinates with the Secretary of the Board of Commissioners to prepare everything needed in accordance with the procedures applied by IFG.
4. The Introduction Program provided may be in the form of presentations, meetings, or visits to IFG's facilities, and review of documents and other programs in accordance with IFG's needs, including but not limited to introductions to Officers One Level below the Board of Directors.
5. Presentation materials given at the Introduction Program include:
   a. implementation of good corporate governance principles by IFG;
   b. overview of IFG regarding its objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. explanations relating to delegated authority, internal and external audit; and
   d. explanation of the functions, duties, authorities, rights, obligations and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and laws and regulations.
6. Introductory meeting with IFG Employee and IFG Stakeholders, including:
   a. member of the Board of Commissioners;
   b. member of the Board of Directors;
   c. Secretary of the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners;
   d. IFG officials; and
   e. IFG Stakeholders.

7. Kunjungan ke unit kerja Kantor Pusat dan kantor Anggota *Holding* serta lokasi usaha/kegiatan IFG lainnya. Khusus untuk kunjungan ke kantor Anggota *Holding* dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Peserta pertemuan adalah Dewan Komisaris dan Direksi Anggota *Holding*.
   b. Presentasi Direksi Anggota *Holding* yang berkaitan dengan:
      i) profil Anggota *Holding*;
      ii) RKAP Anggota *Holding*;
      iii) evaluasi RKAP dan KPI; dan
      iv) permasalahan dan solusi.
8. Pelaksanaan Program Pengenalan dapat melibatkan narasumber dari:
   a. Pemegang Saham;
   b. regulator;
   c. Komisaris;
   d. Direksi;
   e. Pejabat IFG;
   f. Tenaga Ahli dari eksternal sesuai dengan materi yang dibutuhkan; dan
   g. unsur Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Board Manual IFG mengatur kriteria dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagai berikut:

Pengangkatan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diusulkan dan diangkat oleh RUPS.
2. Pengangkatan menjadi anggota Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Menteri BUMN.
3. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
4. Penetapan seorang menjadi Direksi dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
5. Dalam hal penetapan anggota Direksi dilakukan sebelum uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral maka Direksi berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi terhitung sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
6. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

7. Visits to the Head Office work unit and subsidiary offices as well as other IFG business locations/activities. Particularly for visits to subsidiary offices are carried out with the following provisions:
   a. The meeting participants were the Board of Commissioners and Directors of the Holding Members.
   b. Presentation of the Board of Directors of Holding Members related to:
      i) subsidiary profile;
      ii) work Plan and Budget (RKAP) of Holding Members;
      iii) evaluation of RKAP and KPI; and
      iv) problems and solutions.
8. The implementation of the Introduction Program can involve resource person from:
   a. Shareholders;
   b. regulator;
   c. Board of Commissioner;
   d. Board of Directors;
   e. IFG Officials;
   f. external experts in accordance with the required material; and
   g. elements of Trade Unions and Employers' Associations.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

IFG's Board Manual regulates the criteria and procedures for the appointment and dismissal of Board of Directors as follows:

Appointment of member of Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are proposed and appointed by the GMS.
2. Appointment as a member of the Board of Directors is confirmed through an Appointment Agreement (Management Contract) signed by the person concerned and the Minister of SOEs.
3. GMS resolutions on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.
4. The appointment of a person to be a Director can be done after passing the fit and proper test in accordance with sectoral provisions.
5. In the event that the determination of members of the Board of Directors is made prior to the fit and proper test in accordance with sectoral provisions, the Board of Directors is authorized to perform actions, duties, and functions as a member of the Board of Directors as of the date of passing the fit and proper test in accordance with sectoral provisions.
6. Members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Directors.

7. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Anggota Direksi sesuai dengan POJK yang berlaku.

8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
9. Calon anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi yaitu mencakup:
   a. kandidat yang telah dinyatakan lulus UKK; atau

   b. anggota Direksi BUMN yang diangkat kembali.

10. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, calon Direksi yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi IFG.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
2. Keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain:

   a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
   c. tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

   d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
   e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
   g. mengundurkan diri.
4. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 3 huruf a, b, c, d, e dan angka 4 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

7. OJK conducts a fit and proper assessment of the Members of the Board of Directors in accordance with the applicable POJK.
8. In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is made through a resolution of the Shareholders outside the GMS, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in such Shareholders' resolution. In the event that the resolution of the Shareholders outside the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect since the Shareholders' resolution is stipulated.
9. Prospective members of the Board of Directors must sign a Management Contract before their appointment as members of the Board of Directors, which includes:
   a. candidates who have passed the Fit and Proper Test; or
   b. reappointed members of the Board of Directors of SOEs.
10. Before being appointed as a member of the Board of Directors, the candidate must sign a statement letter resigning from other positions that are prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Directors as of the time he/she is appointed as a member of the IFG Board of Directors.

Dismissal of member of Board of Directors

1. Members of the Board of Directors may be dismissed by resolution of the GMS by stating the reasons and based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of IFG.
2. GMS resolutions on the dismissal of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the GMS.
3. Members of the Board of Directors may be dismissed by the GMS at any time by stating the reasons, among others:
   a. unable to fulfill his/her obligations that have been agreed upon in the management contract;
   b. unable to perform his/her duties properly;
   c. not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association;
   d. involved in actions that harm the company and/or the state;
   e. take actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Directors;
   f. declared guilty by a court decision that has permanent legal force; and
   g. resigned.
4. The Board of Directors may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of IFG.
5. The dismissal decision as referred to in number 3 letters a, b, c, d, e and number 4 is taken after the person concerned is given the opportunity to defend him/herself.

6. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan/atau negara dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

6. The plan to dismiss a member of the Board of Directors at any time shall be notified to the member of the Board of Directors concerned orally or in writing by the Shareholders.
7. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out his/her duties accordingly.
8. Dismissal for reasons of involvement in actions that harm IFG and/or the state is declared guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2024

Hingga 31 Desember 2024, pelaksanaan tugas Direksi di luar tugas rutin dan teknis dapat ditelusuri melalui keputusan yang telah dikeluarkan. Rincian Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi mencakup, antara lain:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Until December 31, 2024, the implementation of the duties of the Board of Directors beyond routine and technical duties can be traced through the decisions/decree that have been issued. Details of the Decrees relating to the implementation of the duties of the Board of Directors include, among others:

Keputusan Direksi Tahun 2024
Decree of the Board of Directors in 2024

No.	Tanggal Date	Nomor Number	Perihal Subject
1.	10 Januari 2024 January 10, 2024	1 Tahun 2024 1 Year 2024	Penetapan Tim Evaluasi dalam Proses Pemilihan Calon Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* Establishment of an Evaluation Team in the Selection Process of Candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners at Holding Members
2.	12 Januari 2024 January 12, 2024	2 Tahun 2024 2 Year 2024	Pengesahan Rencana Strategis Teknologi Informasi (d/h *IT Holding Master Plan* Tahun 2021 – 2024) Ratification of Information Technology Strategic Plan (formerly IT Holding Master Plan Year 2021 - 2024)
3.	23 Februari 2024 February 23, 2024	3 Tahun 2024 3 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Digitalisasi Proses Bisnis Establishment of Business Process Digitalization Task Force
4.	4 Maret 2024 March 4, 2024	4 Tahun 2024 4 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Asesmen dan Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Establishment of Task Force for the Assessment and Implementation of Internal Control over Financial Reporting of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
5.	5 Maret 2024 March 5, 2024	5 Tahun 2024 5 Years 2024	Pembentukan Tim Penyusun Buku Putih Formation of White Paper Compilation Team
6.	7 Maret 2024 March 7, 2024	6 Tahun 2024 6 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Implementasi *Management Information System* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of Task Force for the Implementation of Management Information System PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
7.	13 Maret 2024 March 13, 2024	7 Tahun 2024 7 Year 2024	Penetapan Koordinator Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Aset Cilandak Townsquare Assignment of Coordinator for the Implementation of Cilandak Townsquare Asset Problem Resolution
8.	20 Maret 2024 March 20, 2024	8 Tahun 2024 8 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Implementasi PSAK 117 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of PSAK 117 Implementation Task Force PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
9.	19 April 2024 April 19, 2024	10 Tahun 2024 10 Year 2024	Kebijakan Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Leave and Permission to Leave Work Policy
10.	22 April 2024 April 22, 2024	11 Tahun 2024 11 Year 2024	Pembentukan *Community of Interest* (COI) Komunitas Bedah Buku Establishment of Community of Interest (COI) Book Review Community
11.	23 April 2024 April 23, 2024	12 Tahun 2024 12 Year 2024	Kebijakan Fasilitas Subsidi Pinjaman Pembiayaan Rumah dan Kendaraan Home and Vehicle Finance Loan Subsidy Facility Policy

Keputusan Direksi Tahun 2024
Decree of the Board of Directors in 2024

No.	Tanggal Date	Nomor Number	Perihal Subject
12.	26 April 2024 April 26, 2024	13 Tahun 2024 13 Year 2024	Pembentukan *Task Force Proyek New Business Development* dan Pengembangan Platform Digital Establishment of Task Force for New Business Development Project and Digital Platform Development
13.	6 Mei 2024 May 6, 2024	14 Tahun 2024 14 Year 2024	Petugas Upacara Tahun 2024 di Lingkungan Indonesia Financial Group Indonesia Financial Group's 2024 Ceremony Officers
14.	3 Juni 2024 June 3, 2024	15 Tahun 2024 15 Year 2024	Kebijakan Struktur Organisasi Organizational Structure Policy
15.	5 Juni 2024 June 5, 2024	16 Tahun 2024 16 Year 2024	Pembentukan Tim Pendampingan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kebijakan *Holding* BUMN pada Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Formation of Performance Audit Assistance Team on the Effectiveness of SOE Holding Policy at Ministry of SOEs and Other Related Agencies by the Audit Board of the Republic of Indonesia
16.	5 Juni 2024 June 5, 2024	17 Tahun 2024 17 Year 2024	Kebijakan Pengelolaan *Sponsorship* Sponsorship Management Policy
17.	11 Juni 2024 June 11, 2024	18 Tahun 2024 18 Year 2024	Kebijakan Realokasi Anggaran Budget Reallocation Policy
18.	26 Juni 2024 June 26, 2024	19 Tahun 2024 19 Year 2024	Kebijakan Remunerasi Remuneration Policy
19.	26 Juni 2024 June 26, 2024	20 Tahun 2024 20 Year 2024	Kebijakan Pengelolaan Kompetensi Competency Management Policy
20.	26 Juni 2024 June 26, 2024	21 Tahun 2024 21 Year 2024	Struktur Skala Gaji Pokok dan Nilai Remunerasi Base Salary Scale Structure and Remuneration Value
21.	28 Juni 2024 June 28, 2024	22 Tahun 2024 22 Year 2024	Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi Establishment of Information Security Management System Team
22.	31 Juli 2024 July 31, 2024	23 Tahun 2024 23 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Implementasi PSAK 117 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of PSAK 117 Implementation Task Force PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
23.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	24 Tahun 2024 24 Year 2024	Panitia IFG Labuan Bajo Marathon 2024 IFG Labuan Bajo Marathon 2024 Committee
24.	06 September 2024 September 06, 2024	25 Tahun 2024 25 Year 2024	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Jasa Asuransi Kesehatan, Jiwa, dan Kecelakaan Tahun 2024 Formation of Ad Hoc Team for Joint Procurement of Health, Life, and Accident Insurance Services in 2024
25.	11 September 2024 September 11, 2024	26 Tahun 2024 26 Year 2024	Kebijakan Penarikan Dividen Anggota *Holding* Subsidiary Dividend Withdrawal Policy
26.	23 September 2024 September 23, 2024	27 Tahun 2024 27 Year 2024	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Lisensi *Oracle Enterprise Resource Planning* (ERP) IFG Formation of IFG Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) License Joint Procurement Ad Hoc Team
27.	25 September 2024 September 25, 2024	28 Tahun 2024 28 Year 2024	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum Tahun 2024 dan Audit *Opening Balances* atas Implementasi PSAK 117 Formation of Ad Hoc Team for Joint Procurement of Public Accounting Firm Services for General Audit Year 2024 and Opening Balances Audit on the Implementation of PSAK 117
28.	27 September 2024 September 27, 2024	29 Tahun 2024 29 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of the Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Task Force of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
29.	08 Oktober 2024 October 08, 2024	30 Tahun 2024 30 Years 2024	Kebijakan Manajemen Kinerja Karyawan Employee Performance Management Policy
30.	09 Oktober 2024 October 09, 2024	31 Tahun 2024 31 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Transformasi Perbaikan Layanan Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Transformation of Health Insurance Service Improvement PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
31.	15 Oktober 2024 October 15, 2024	32 Tahun 2024 32 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Digitalisasi Proses Bisnis (*Addendum*) Establishment of Business Process Digitalization Task Force (Addendum)
32.	25 Oktober 2024 October 25, 2024	33 Tahun 2024 33 Year 2024	Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Budget Implementation and Control Policy
33.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	34 Tahun 2024 34 Year 2024	Kebijakan Pengelolaan Kas Operasional Perusahaan Company Operational Cash Management Policy

Keputusan Direksi Tahun 2024
Decree of the Board of Directors in 2024

No.	Tanggal Date	Nomor Number	Perihal Subject
34.	08 November 2024 November 08, 2024	35 Tahun 2024 35 Year 2024	Pembentukan *Task Force* Implementasi PSAK 117 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of PSAK 117 Implementation Task Force PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
35.	20 November 2024 November 20, 2024	36 Tahun 2024 36 Year 2024	Kebijakan Hierarki dan Pengelolaan Peraturan Internal Hierarchy and Internal Regulation Management Policy
36.	21 November 2024 November 21, 2024	37 Tahun 2024 37 Year 2024	Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee Charter
37.	21 November 2024 November 21, 2024	38 Tahun 2024 38 Year 2024	Kebijakan Pengelolaan *Chart of Account* pada Sistem ERP Chart of Account Management Policy in ERP System
38.	29 November 2024 November 29, 2024	39 Tahun 2024 39 Year 2024	Kebijakan Kehadiran Karyawan Employee Attendance Policy
39.	29 November 2024 November 29, 2024	40 Tahun 2024 40 Years 2024	Susunan Keanggotaan *Risk Champion* dan *Risk Officer* di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Membership Composition of Risk Champion and Risk Officer at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
40.	06 Desember 2024 December 06, 2024	41 Tahun 2024 41 Year 2024	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Policy
41.	09 Desember 2024 December 09, 2024	42 Tahun 2025 42 Year 2025	Pedoman Strategis Penyelenggaraan Kearsipan Strategic Guidelines for Organizing Archives
42.	11 Desember 2024 December 11, 2024	43 Tahun 2024 43 Year 2024	Kebijakan Manajemen Hubungan Kelembagaan Institutional Relationship Management Policy
43.	23 Desember 2024 December 23, 2024	44 Tahun 2024 44 Year 2024	Kebijakan Kajian Risiko Risk Assessment Policy
44.	26 Desember 2024 December 26, 2024	45 Tahun 2024 45 Year 2024	Penetapan Person *in Charge Home Company* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam Implementasi *Program Talent Mobility* Determination of Person in Charge of Home Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia in the Implementation of Talent Mobility Program
45.	27 Desember 2024 December 27, 2024	46 Tahun 2024 46 Year 2024	Kebijakan Manajemen Budaya Inovasi Innovation Culture Management Policy
46.	27 Desember 2024 December 27, 2024	47 Tahun 2024 47 Year 2024	Penilaian Indeks Kematangan Risiko Risk Maturity Index Assessment
47.	31 Desember 2024 December 31, 2024	48 Tahun 2024 48 Year 2024	Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction
48.	31 Desember 2024 December 31, 2024	49 Tahun 2024 49 Year 2024	Pedoman Strategis Tata Kelola Teknologi Informasi Strategic Guidelines for Information Technology Governance
49.	31 Desember 2024 December 31, 2024	50 Tahun 2024 50 Years 2024	Pedoman Strategis Manajemen Risiko Strategic Guidelines for Risk Management
50.	31 Desember 2024 December 31, 2024	51 Tahun 2024 51 Year 2024	Pedoman Strategis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Strategic Guidelines for Social and Environmental Responsibility Programs
51.	31 Desember 2024 December 31, 2024	52 Tahun 2024 52 Year 2024	Pedoman Strategis Pengelolaan Aktiva Tetap Strategic Guidelines for Fixed Asset Management
52.	31 Desember 2024 December 31, 2024	53 Tahun 2024 53 Year 2024	Pedoman Strategis Hukum Legal Strategic Guidance
53.	31 Desember 2024 December 31, 2024	54 Tahun 2024 54 Year 2024	Kebijakan Kepatuhan terhadap Peraturan (*Regulatory Compliance*) Regulatory Compliance Policy
54.	31 Desember 2024 December 31, 2024	55 Tahun 2024 55 Year 2024	Pedoman Strategis Operasional Asuransi dan Penjaminan Strategic Guidelines for Insurance and Guarantee Operations
55.	31 Desember 2024 December 31, 2024	56 Tahun 2024 56 Year 2024	Pedoman Strategis Audit Internal Internal Audit Strategic Guidance
56.	31 Desember 2024 December 31, 2024	57 Tahun 2024 57 Year 2024	Pedoman Strategis Pengembangan Bisnis Strategic Guidelines for Business Development

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

IFG menyediakan program pengembangan kompetensi bagi Direksi guna memperluas wawasan dan pengetahuan, terutama dalam aspek pengelolaan perusahaan. Informasi terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi adalah sebagai berikut:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

IFG provides competency development programs for the Board of Directors to broaden their horizons and knowledge, especially in the aspect of managing the Company. Information related to training and competency development of the Board of Directors is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Materials of Education and Training	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Rizal Ariansyah	Manajemen Risiko Risk management	*Certified Risk Executive Leader*	12-19 Februari 2024 February 12-19, 2024	BPKP
Rianto Ahmadi	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate business activities	*7th Indonesian Actuaries Summit 2024*	20-22 Agustus 2024 August 20-22, 2024	PAI
Rianto Ahmadi	Akuntansi Accounting	Seminar Implementasi PSAK 74 dan Tantangan Industri Asuransi di 2024	21 Februari 2024 February 21, 2024	LPPI
Rianto Ahmadi	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate business activities	FGD Nasional Pengembangan Komoditas Unggulan Melalui Kemitraan Terpadu dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah National FGD on Leading Commodity Development through Integrated Partnership in Supporting Regional Economic Growth	28 Mei 2024 May 28, 2024	OJK Institute
Rianto Ahmadi	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate business activities	28th Indonesia *Rendevouzs* 2024	9 Oktober 2024 October 9, 2024	AAUI
Rianto Ahmadi	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate business activities	IFG *Conference* 2024	15 Oktober 2024 October 15, 2024	IFG
Rianto Ahmadi	Kepatuhan Compliance	*Risk Beyond* 2024	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	ERMA & CRMS
Hexana Tri Sasongko	Manajemen Risiko Risk management	Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 7	25 November 2024 November 25, 2024	LPPI
Rianto Ahmadi	Kegiatan Usaha Korporasi Corporate business activities	Seminar Aktuaria Indonesia *Actuarial Conference* 2024	20 November 2024 November 20, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia
Heru Handayanto	Kepatuhan Compliance	*Risk Beyond* 2024	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Erma & CRMS
Haru Koesmahargyo	Manajemen Risiko Risk management	*Certified Risk Executive Leader*	12-19 Februari 2024 February 12-19, 2024	BPKP
Haru Koesmahargyo	Bisnis Business	*IT Executive Development Program*	18-20 September 2024 September 18-20, 2024	BSE
Haru Koesmahargyo	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 2024 August 29, 2024	Vintus

INFORMASI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DIREKSI

Dalam Melaksanakan tugasnya, Direksi didukung oleh Komite Manajemen Risiko dan Komite Sumber Daya Manusia didukung oleh beberapa komite. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh organ pendukung lainnya, seperti Sekretaris Perusahaan serta SKAI. Evaluasi terhadap organ pendukung tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian target dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

INFORMATION ON PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING ORGANS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties, the Board of Directors is supported by the Risk Management Committee and the Human Capital Committee as well as other committees. The Board of Directors is also assisted by other supporting organs, such as the Corporate Secretary and Internal Audit. Evaluation of these supporting organs is done based on the achievement of targets in the implementation of their respective duties.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

Sebagai organ utama, Dewan Komisaris dan Direksi memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk memastikan efektivitas peran tersebut, evaluasi kinerja keduanya menjadi langkah yang esensial. Dalam kapasitasnya sebagai *Holding* BUMN sekaligus entitas utama dalam konglomerasi keuangan, IFG memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya penerapan GCG, IFG melakukan evaluasi dan pemantauan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara berkala. Penilaian ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Metode penilaian ini mencakup berbagai indikator, termasuk aspek terkait Dewan Komisaris dan Direksi, yang dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan tata kelola pada masing-masing indikatornya.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola terintegrasi IFG untuk tahun 2024, IFG memperoleh peringkat 2 dengan kategori "Baik", di mana:

1. Dewan Komisaris IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama IFG. Di samping itu, Dewan Komisaris IFG juga telah Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
    a. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
    b. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
    c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
    d. guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

As the main organs, the Board of Commissioners and the Board of Directors play a strategic role in driving the company's growth and sustainability. To ensure the effectiveness of these roles, evaluating their performance is an essential step. In its capacity as an SOE holding as well as the main entity in a financial conglomerate, IFG has an obligation to implement a comprehensive GCG.

As part of the GCG implementation effort, IFG conducts evaluation and monitoring through a self-assessment mechanism on the implementation of integrated governance on a regular basis. This assessment refers to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 15/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates. This assessment method covers various indicators, including aspects related to the Board of Commissioners and Board of Directors, which are done by evaluating the structure, process and governance of each indicator.

Based on the results of IFG's integrated governance implementation self-assessment for 2024, IFG obtained a rating of 2 in the "Good" category, where:

1. IFG's Board of Commissioners has met the requirements of integrity, competence, and financial reputation, obtained fit and proper test approval from OJK, and has sufficient knowledge of IFG's business activities and key risks. Furthermore, IFG's Board of Commissioners has also completed its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the assessment indicators set, among others by:
    a. evaluating the Integrated Governance Guidelines and supervising the implementation of integrated governance;
    b. organizing periodic Board of Commissioners Meetings; and
    c. supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
    d. This is done to ensure sustainability and compliance with applicable regulations.

2. Direksi IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama IFG. Di samping itu, Direksi IFG juga telah Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
   b. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan konglomerasi keuangan IFG;
   c. senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit; dan
   d. guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IFG mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan menerapkan KPI yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis IFG. Penilaian ini dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas keduanya. Keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang berperan sentral dalam mendorong pertumbuhan IFG, merupakan hasil kerja kolegial dari kedua organ utama tersebut.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun sebagai bentuk penilaian terhadap pelaksanaan tugasnya. Selain merujuk pada Laporan Tugas Pengawasan, penilaian ini juga didasarkan pada realisasi KPI, yang mengukur keberhasilan kinerja Dewan Komisaris sebagai hasil kerja kolegial seluruh anggotanya. Adapun capaian kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2024 berdasarkan KPI adalah sebagai berikut:

2. IFG's Board of Directors has met the requirements of integrity, competence, and financial reputation, obtained fit and proper test approval from OJK, and has sufficient knowledge of IFG's business activities and key risks. IFG's Board of Directors has also conducted its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the assessment indicators set, by:
   a. making improvements to the Integrated Corporate Governance Guidelines in accordance with the direction of the Board of Commissioners;
   b. directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Integrated Governance Guidelines within IFG's financial conglomerate;
   c. always follow up on audit recommendations and findings; and
   d. ensuring sustainability and compliance with applicable regulations.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

IFG evaluates the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors by applying the KPIs that are tailored to IFG characteristics business. This assessment is conducted routinely every year as a form of evaluation of the implementation of their duties. The successful performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which play a central role in driving the IFG growth, is the result of the collegial work of the two main organs.

Board of Commissioners Performance Assessment

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted annually as a form of assessment of the implementation of its duties. In addition to referring to the Supervisory Task Report, this assessment is also based on the realization of KPIs, which measure the success of the Board of Commissioners' performance as a result of the collegial work of all its members. The performance achievements of the Board of Commissioners in 2024 based on KPIs are as follows:

No.	Indikator Indicator	Uraian Description	Satuan Output Output Unit	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget		Capaian 2024 2024 Achievement	
				Target Output Output Target	Bobot Weight	Realisasi Output Output Realization	Bobot Weight
A	**Aspek Perencanaan** Planning Aspect						
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 Develop a Work Plan and Budget and KPIs for the Board of Commissioners in 2025	Program Kerja Tahunan meliputi Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 Annual Work Program including Activities and Budget for the Board of Commissioners in 2025	Dokumen Document	1	10	1	10
B	**Aspek Pengawasan dan Nasihat** Supervisory & Advisory Aspects						
1	Memberikan Tanggapan/Rekomendasi atas: Provide Feedback/Recommendations on:						
a	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 The Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP)	Tahunan Annual	Surat Letter	1	5	1	5
b	Kinerja Triwulan Quarterly Performance	Triwulanan Quarterly	Surat Letter	3	10	3	10
c	Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annual	Surat Letter	1	4	1	4
d	Pengusulan Eksternal Auditor/KAP kepada Pemegang Saham Proposal of External Auditor/ KAP to Shareholders	Tahunan Annual	Surat Letter	1	4	1	4
2	Rapat Dewan Komisaris (Memberi Saran/Nasihat kepada Direksi) Board of Commissioners Meeting (Providing Advice to the Board of Directors)	Rapat diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali Meetings are held at least 1 (once) a month					
a	Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Jumlah Total	12	6	19	9.5
b	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	100	8	96.35	7.71
c	Risalah Minutes of Meetings	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	12	6	19	9.5
3	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	12	12	6	6
4	Kunjungan ke Anggota *Holding* Visit to Holding Members	Setahun One Year	Laporan Monitoring/ Surat Monitoring Report/ Letter	2	10	2	10

No.	Indikator Indicator	Uraian Description	Satuan Output Output Unit	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget		Capaian 2024 2024 Achievement	
				Target Output Output Target	Bobot Weight	Realisasi Output Output Realization	Bobot Weight
5	Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi sesuai Dengan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 30 Hari Kalender Sejak Surat Diterima oleh Dewan Komisaris Provision of written approval of the Board of Commissioners for Acts of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association within 30 Calendar Days from the Letter Received by the Board of Commissioners.	Setahun One Year	Surat Letter	10	5	16	8
6	Pemberian tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 30 Hari kalender sejak surat diterima oleh Dewan Komisaris Providing written responses from the Board of Commissioners on the actions of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association within 30 calendar days from the letter received by the Board of Commissioners	Setahun One Year	Surat Letter	3	5	19	31.67
C	**Aspek Pelaporan** Reporting Aspect						
1	Menyampaikan laporan tahunan tentang Tugas Pengawasan dan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Submit an annual report on the Supervisory Duties and Realization of KPI Implementation of the Board of Commissioners	Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2023 Report on Supervisory Duties for 2023 Fiscal Year	Surat Letter	1	10	1	10
D	**Aspek Dinamis/Lain** Dynamic/Other Aspects						
1	Peningkatan Kompetensi melalui kegiatan seminar, workshop, dan studi banding Competency Development through seminars, workshops, and comparative studies	Tahunan Annual	Surat/ Laporan Letter/ Report	2	5	9	22,5
Total KPI				**100**		**147.87**	

Penilaian Kinerja Direksi

IFG menetapkan target KPI Direksi dalam RUPS RKAP Tahun 2024. Keberhasilan kinerja Direksi diukur sebagai hasil kerja kolegial seluruh anggota dalam mengelola perusahaan. Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan secara rutin melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui *Working Group Meeting* yang diadakan setiap bulan. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian di berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, pelanggan, serta SDM dan sistem.

Dengan mengacu pada Kontrak Manajemen antara IFG dengan Kementerian BUMN yang tertuang dalam Risalah RUPS IFG tentang Pengesahan RKAP 2024 dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka capaian KPI Kolegial Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Performance Assessment of the Board of Directors

IFG sets KPI targets for the Board of Directors in the 2024 GMS RKAP. The success of the Board of Directors' performance is measured as a result of the collegial work of all members in managing the Company. Evaluation of the Board of Directors' performance is conducted regularly through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as through Working Group Meetings held monthly. Performance assessment is based on achievements in various aspects, including finance, operations, customers, along with HC and systems.

With reference to the Management Contract between IFG Indonesia and the Ministry of SOEs as stated in IFG GMS Minutes on the Ratification of the 2024 RKAP and the Annual Management Contract of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, the achievement of the KPI Collegial Board of Directors for 2024 are as follows:

KPI		Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization Up to Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
I. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia							
Finansial							
1	EBITDA	*Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture*	Rp Triliun IDRTrillion	4	4,50	-0,64	0,00
2	ROE (Konsolidasi) ROE (Consolidated	Laba Bersih Tahun Berjalan / *Average Total Equity* Net Profit for the Year / Average Total Equity	%	4	5,00	-0,92	0,00
3	*Cashflow from Operation*	Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash provided by (used in) Operational activities	Rp Miliar IDRBillion	3	100,00	-6.931,00	0,00
4	DSCR	CFADS / *Debt Service*	Kali Times	3	1,35	1,14	2,54
5	Peningkatan RBC Increased RBC	*Weighted Average* Pencapaian RBC Anggota *Holding* Asuransi Umum dan Jiwa Weighted Average Achievement of RBC of Holding Members of General and Life Insurance Company	%	3	400,00	517,62	3,30

KPI		Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization Up to Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
Operasional Operational							
6	Perbaikan *Combined Ratio* (COR) Anggota *Holding* Asuransi dan Penjaminan Improvement of Combined Ratio (COR) of Holding Members Insurance and Guarantee	*Loss Ratio + Expense Ratio*	%	5	96,00	110,11	4,36
7	Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 Completion and submission of 2023 Audited Financial Statements	Tanggal rilis laporan keuangan BPUI Konsolidasi (*audited*) tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Release date of BPUI Consolidated financial statements (audited) in 2023 with Unqualified opinion (WTP)	Waktu Date	6	15 April 2024 April 15, 2024	07 Oktober 2024 October 7, 2024	0,00
8	Penyelesaian Identifikasi *Onerous Contracts* Onerous Contracts Identification Completion	*Onerous Contract* teridentifikasi 100% Onerous Contract 100% identified	Waktu Date	3	31 Maret 2024 March 31, 2024	29 Maret 2024 March 29, 2024	3,00
9	Penyelesaian Perbaikan *Onerous Contracts* *Settlement of Onerous Contracts*	Meminimalisir dampak PSAK 74 dari kontrak asuransi *onerous* yang dapat diperbaiki (Persentase nilai *onerous contract* yang dapat dilakukan perbaikan yang berhasil diubah menjadi tidak *onerous*) *exclude* program penugasan pemerintah Minimize the impact of PSAK 74 from onerous insurance contracts that can be amended (Percentage of onerous contract value that can be successfully amended to non-onerous) exclude Government assignment programs	%	5	100,00	86,31	5,00
10	Penyelesaian Target *Output* Persiapan Implementasi PSAK 74 Completion of Output Targets for the Implementation of PSAK 74	Persiapan implementasi PSAK 74 selesai 100% Preparation for the implementation of PSAK 74 is 100% complete.	Waktu Date	4	31 Desember 2024 December 31, 2024	96,93	3,92
Sosial Social							

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization Up to Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
11	Volume Penjaminan KUR dan/atau Penugasan Pemerintah Lainnya KUR Guarantee Volume and/or Other Government Assignments	Rata-rata pencapaian dari lini bisnis penugasan pemerintah: · Persentase volume penjaminan KUR sesuai penugasan dari pemerintah; (Bobot: 50%) · Persentase pencapaian premi IW dan SW; (Bobot: 50%) Average achievement of government assignment business lines: · Percentage of KUR guarantee volume in accordance with government assignments; (Weight: 50%) · Percentage of Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contribution (SW) ; (Weight: 50%)	%	5	100,00	98%	4,85
12	Penyelesaian Secara Tuntas Pengalihan Pengalihan Portofolio Liabilitas dan Aset Polis Jiwasraya ke IFG Life Completed Settlement of Transfer of Liability Portfolio and Jiwasraya Policy Assets to IFG Life	(Persentase Penyelesaian Pengalihan Aset + Persentase Penyelesaian Pengalihan Liabilitas) / 2 Percentage of Asset Transfer Completion + Percentage of Liability Transfer Completion) / 2	%	5	100,00	99,99	5,00
	Sub Total			**50**			**31,97**
II. Inovasi Model Bisnis Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation							
13	Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Roadmap for Improvement of Risk Management	(Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 / *Total program roadmap* perbaikan penerapan manajemen risiko) x 100% (Number of programs implemented in 2024/ Total implementation improvement roadmap programs for risk management) x 100%	%	5	100,00	100,00	5,00
14	HUW Bisnis di Luar Penugasan dari LoB sesuai dengan fokus Bisnis HUW Business outside the scope of the LoB in accordance with the Business focus	Hasil *Underwriting Non* Penugasan 2024 Non-assignment underwriting result in 2024	Rp Triliun IDRTrillion	5	2,86	1,31	2,29
	Sub Total			**10**			**7,29**

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization Up to Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
III. Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership							
15	Integrasi MIS dengan Anggota *Holding* (*Front End dan Back End*) MIS Integration with Holding Members (Front End and Back End)	Progres Penyelesaian: · Implementasi ERP; (Bobot: 30%) · Integrasi Data Finansial yang bersumber dari ERP dengan *Holding*; (Bobot: 20%) · Integrasi Data Manajemen Risiko Terintegrasi; (Bobot: 25%) · Implementasi *Dashboard* fungsi *enabler* pada *single source of truth* IFG (*One Data*) Progress of Completion: · ERP implementation; (Weight: 30%) · Integration of financial data sourced from ERP with Holding; (Weight: 20%) · Integration of Integrated Risk Management Data; (Weight: 25%) · Implementation of Dashboard enabler function on IFG's single source of truth (One Data)	%	5	100,00	97,95	4,90
16	Produktivitas *Channel* Pemasaran Digital Marketing Channel Productivity Digital	Rata-rata persentase nilai transaksi dari channel digital Anggota *Holding* Average percentage of transaction value from digital channels of Holding Members	%	5	100,00	141,58	5,50
	Sub Total			**10**			**10,40**
IV. Peningkatan Investasi Increased Investment							
17	*Yield on Investment* (YoI)	Pendapatan Investasi (*Gross*) / Rata- rata *Geometric Total Aset* Investasi Investment Income (Gross) / Geometric Average Total Assets Investment	%	5	6,00	6,19	5,15
18	Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Investment Adequacy Ratio (RKI)	(Investasi+Kas dan Bank) / (Cadangan Teknis Retensi Sendiri + Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung) (Investments+Cash and Banks)/ (Own Retention Technical Reserves+self-insured retention+ Other Payables To Insured)	%	5	136,00	120,72	4,44

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2024 2024 FY Target	Realisasi s.d Des 2024 Realization Up to Dec 2024	Nilai KPI KPI Score
19	Pencapaian KPI PMN State Equity Participation's KPI Achievement	Persentase Pencapaian KPI PMN BPUI Percentage of State Equity Participation's KPI Achievement in BPUI	Skor Score	5	100,00	104,04	5,20
	Sub Total			**15**			**14,79**
V. Pengembangan Talenta							
20	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Ratio of Women in Nominated Talent	(Jumlah *Nominated Talent* Perempuan / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Female Nominated Talent / Total Nominated Talent) x 100%	%	3	27,00	27,91	3,10
21	*Rasio Top Talent* Muda (<=42 tahun) dalam *Nominated Talent* *Ratio of Young Top Talent (<=42 years old) in Nominated Talent*	(Jumlah *Nominated Talent* Muda <=42 Tahun / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Female Nominated Talent / Total Nominated Talent) x 100%	%	3	25,00	20,93	2,51
22	Implementasi *Talent Mobility* Induk Perusahaan dan Anggota *Holding* (BOD-1/Setara) Implementation of Talent Mobility Parent Company and Holding Members (BOD-1/Equivalent)	(Jumlah *Nominated Talent* yang mengalami *Talent Mobility* / Jumlah *Nominated Talent*) x 100% (Number of Nominated Talent experiencing Talent Mobility / Number of Nominated Talent) x 100%	%	3	11,00	6,98	1,90
23	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	(Jumlah personel organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi / Total jumlah personel organ pengelola risiko) x 100% (Number of risk management personnel who meet the qualifications / Total number of risk management personnel) x 100%	%	3	90,00	96,49	3,22
24	Implementasi *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Implementation of the Restructuring Roadmap Pension Fund	Persentase penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun sesuai *milestone* tahun 2024 Percentage of completion of the Restructuring Roadmap Pension Fund	%	3	100,00	100,00	3,00
	Sub Total			**15**			**13,73**
	Total			**100**			**78,18**

* Skala penilaian sesuai Kontak Manajemen , di mana pencapaian 61%-100% = skor 5.
* grading scale according to Contact Management, where the achievement is 61%-100%= score 5

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan objektivitas, keterjangkauan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta memperhitungkan berbagai kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi operasional dan bisnis perusahaan serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek keberagaman, termasuk latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan usia. Komposisi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi IFG perusahaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

DIVERSITY OF BOARD COMPOSITION

Diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company's strategy to improve objectivity, affordability and effectiveness in decision-making. This diversity is expected to enrich perspectives and consider various interests in the decision-making process, both at the Board of Commissioners and Board of Directors levels. Thus, this can provide added value to the Company's operations and business and support the implementation of good corporate governance.

The policy on the diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in writing refers to the Articles of Association, Shareholders' provisions, and prevailing laws and regulations. In its implementation, this policy considers various aspects of diversity, including educational background, expertise, work experience, gender, and age. The diversity composition of IFG Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	**Kewarganegaraan** Nationality	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Fauzi Ichsan	Indonesia	S2 Development Studies Master's Degree in Development Studies	Ekonomi Economy	54 tahun 54 years old	Laki-laki Male
Masyita Crystallin	Indonesia	S3 Economics Doctorate Degree in Economics	International Monetary and Finance International Monetary and Finance	43 tahun 43 years old	Perempuan Female
Hotbonar Sinaga	Indonesia	S1 Ekonomi Bachelor's Degree in Economics	Asuransi Insurance	75 tahun 75 years old	Laki-laki Male
Sumiyati	Indonesia	S2 Financial Management Master's Degree in Financial Management	Finance	63 tahun 63 years old	Perempuan Female
Nasrudin	Indonesia	S3 Hukum Doctorate Degree in Law	Hukum Law	68 tahun 68 years old	Laki-laki Male
Wahyu Setyawan	Indonesia	S2 Hukum dan S2 Manajemen Master's Degree in Law and Master's Degree in Management	Hukum Law	50 tahun 50 years old	Laki-Laki Male
Direksi Directors					
Hexana Tri Sasongko	Indonesia	S2 Business Administration Master's Degree in Business Administration	Bisnis Business	60 tahun 60 years old	Laki-Laki Male
Haru Koesmahargyo	Indonesia	S2 Investment Banking Master's Degree in Investment Banking	Bisnis Business	58 tahun 58 years old	Laki-Laki Male
Rizal Ariansyah	Indonesia	S2 Hukum Master's Degree in Law	Hukum Law	50 Tahun 50 years old	Laki-Laki Male
Rianto Ahmadi	Indonesia	S3 Statistika Doctorate Degree in Statistics	Statistika Statistics	65 tahun 65 years old	Laki-Laki Male
Heru Handayanto	Indonesia	S1 Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Akuntansi Accounting	53 tahun 53 years old	Laki-Laki Male

REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab atas perencanaan suksesi Direksi guna memastikan regenerasi serta keberlanjutan kepemimpinan di masa depan. Kebijakan utama terkait pergantian dan suksesi Dewan Komisaris serta Direksi dalam perusahaan berlandaskan pada sejumlah peraturan mendasar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Peraturan Menteri BUMN di atas memberikan metode tentang *talent pool* pengelolaan manajemen korporasi BUMN oleh Kementerian BUMN selaku entitas pemilik akhir. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022, mengatur persyaratan bahwa calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris IFG wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, IFG selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Remunerasi diberikan sebagai bentuk imbalan atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa besaran gaji dan tunjangan Direksi ditentukan melalui keputusan RUPS. Sementara itu, Pasal 96 ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada Dewan Komisaris. Adapun Pasal 113 mengatur bahwa gaji, honorarium, serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Selain itu, IFG menetapkan kebijakan mengenai besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan keputusan Pemegang Saham, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

REMUNERATION AND NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Succession Policy Basis for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for the succession planning of the Board of Directors to ensure regeneration and sustainability of future leadership. The main policies related to the succession of the Board of Commissioners and Directors in the Company are based on a number of fundamental regulations, namely:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; and
3. Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.05/2022 on the Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Company.

The above regulation of the Minister of SOEs provides a method of talent pool management of SOE corporate management by the Ministry of SOEs as the final owner entity. Meanwhile, Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.05/2022 regulates the requirement that prospective members of the IFG Board of Directors and Board of Commissioners must obtain approval from OJK before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

POLICY FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In doing its business operations, IFG always prioritizes the prudent principle and adheres to the prevailing laws and regulations in determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors. Remuneration is given as a form of reward for the performance that has been achieved. This is regulated in Article 96 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which states that the amount of salaries and benefits of the Board of Directors is determined by a resolution of the GMS. Meanwhile, Article 96 paragraph (2) states that the authority can be transferred to the Board of Commissioners. Article 113 stipulates that the salary, honorarium, and allowances for members of the Board of Commissioners are determined by the GMS.

In addition, IFG sets the policy regarding the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the Shareholders' decision, which is adjusted to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

Secara internal , IFG terus menyempurnakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada prinsip 3P, yaitu *Pay for Person*, *Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. Prinsip ini tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengusulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Struktur remunerasi yang diterapkan mencakup *Fixed Pay*, *Variable Pay*, dan *Non-Cash Benefit*. IFG juga memastikan bahwa total penghasilan karyawan saat ini melebihi standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, skala upah telah disusun dengan mempertimbangkan data pasar dan kapasitas keuangan perusahaan.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IFG telah menentukan prosedur pengusulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS);

2. penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan; dan
4. penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anggota *Holding* dianggarkan sebagai biaya dalam RKAP Anggota *Holding*.

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengusulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan komisaris Perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi terdiri dari:
   a. gaji/honorarium;
   b. tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan Perumahan, dan 3) Asuransi Purna Jabatan;

Internal ly, IFG continues to improve the remuneration system based on the 3P principle, namely Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance. This principle is stated in the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 90 of 2022 concerning Policy Proposing the Determination of Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The remuneration structure applied includes Fixed Pay, Variable Pay, and Non-Cash Benefit. IFG also ensures that the total income of current employees exceeds the minimum wage standard set by the Government. Moreover, the wage scale has been compiled by considering market data and the company's financial capacity.

PROCEDURE FOR PROPOSING AND DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

IFG has determined the procedure for proposing the remuneration of the Board of Commissioners and Directors, among others:

1. The income of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. The determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities of a fixed nature is done by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations;
3. the determination of income in the form of tantiem/performance incentives that are variable (merit rating) is done by considering performance factors and the financial capacity of the company, as well as other relevant factors; and
4. The income of the Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary is budgeted as an expense in the Holding Members' Work Plan and Budget (RKAP).

STRUCTURE AND COMPONENTS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS' REMUNERATION

The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 90 of 2022 concerning the Policy for Proposing the Determination of Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Based on the regulation, the income components of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

1. The income of the Board of Directors consists of:
   a. salary/honorarium;
   b. allowances; which consist of 1) Religious Holiday allowance, 2) Housing Allowance, 3) Retirement Insurance;

c. fasilitas yang terdiri atas; 1) fasilitas kendaraan, 2) fasilitas kesehatan, dan 3) fasilitas bantuan hukum; serta
d. tantiem/insentif kinerja;

2. Penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. gaji/honorarium;
   b. tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan Transportasi, dan 3) Asuransi Purna Jabatan;
   c. fasilitas yang terdiri atas; 1) fasilitas kesehatan dan 2) fasilitas bantuan hukum; serta
   d. tantiem/insentif kinerja.

c. facilities consisting of; 1) vehicle facilities, 2) health facilities, 3) legal aid facilities; along with
d. bonus/performance incentive;

2. The income of the Board of Commissioners consists of:
   a. salary/honorarium;
   b. allowances; which consist of 1) Religious Holiday allowance, 2) Transport allowance, 3) Retirement Insurance;
   c. facilities consisting of; 1) health facilities, 2) legal aid facilities; along with
   d. bonus/performance incentive

PENGUNGKAPAN INDIKATOR SERTA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menentukan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, IFG mengacu pada indikator kinerja manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penilaian kinerja kedua organ tersebut. Indikator ini tertuang dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang mencakup target RKAP, termasuk target KPI dengan indikator, pembobotan, serta sasaran yang ditetapkan. Selain itu, penentuan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia serta kapasitas keuangan perusahaan.

DISCLOSURE OF INDICATORS AND DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, IFG refers to the management performance indicators previously described in their performance assessment. These indicators are contained in the management contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners, which includes RKAP targets, including KPI targets with indicators, weightings, and targets set. The determination of remuneration also considers labor market conditions in Indonesia and the Company's financial capacity.

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara)

Calculation of Remuneration Amount for Board of Commissioners and Board of Directors (In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises)

Direktur Utama President Director	:	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham) 100% (determined using internal guidelines set by Shareholders)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	:	Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 90% of Salary/Bonuses/Performance Incentive of President Director
Direksi Lainnya Other Directors		Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of Salary/Bonuses/Performance Incentive of President Director
Komisaris Utama President Commissioner	:	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of Salary/Bonuses/Performance Incentive of President Director
Komisaris Lainnya Other Commissioners	:	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of Honorarium/Bonuses/Performance Incentive of President Commissioner

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Pemegang Saham menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Kementerian BUMN perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2023 nomor SR-167/MBU/03/2024 tanggal 19 Maret 2024. Adapun rincian jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan struktur remunerasi tersebut adalah sebagai berikut:

TOTAL REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

In 2024, the Shareholders determined the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors through a letter from the Ministry of SOEs regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2023 Number SR-167/MBU/03/2024 dated March 19, 2024. The details of the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the remuneration structure are as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Uraian Description	**Jumlah (Rp juta)** Total (IDRmillion)	
	2024	**2023**
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	**30.978**	29.666
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	**69.442**	62.605
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024	**100.420**	92.271

Berdasarkan data remunerasi tahun 2024, total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tercatat sebesar Rp100.420 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp92.271 juta. Rincian kenaikan ini terdiri atas remunerasi Dewan Komisaris yang meningkat dari Rp29.666 juta menjadi Rp30.978 juta, serta remunerasi Direksi yang naik dari Rp62.605 juta menjadi Rp69.442 juta.

Peningkatan ini selaras dengan bentuk penguatan peran strategis pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Kenaikan ini juga mencerminkan apresiasi atas kinerja dan kontribusi manajemen dalam mendukung pencapaian target kinerja korporasi di tahun berjalan.

Based on the remuneration data for 2024, the total remuneration given to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors was recorded at IDR100,420 million, an increase of 8.85% compared to the previous year which amounted to IDR92,271 million. The details of this increase consist of the remuneration of the Board of Commissioners which increased from IDR29,666 million to IDR30,978 million, and the remuneration of the Board of Directors which increased from IDR62,605 million to IDR69,442 million.

This increase is in line a form of strengthening the strategic role of the leadership in conducting the functions of supervision and management of the company. This increase also reflects appreciation for the performance and contribution of management in supporting the achievement of corporate performance targets in the current year.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETINGS

Rapat Dewan Komisaris

IFG memiliki ketentuan Rapat Dewan Komisaris yang dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur sebagai berikut:

Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi:

1. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi (Rapat Gabungan). Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.
2. Keputusan Rapat Gabungan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan bukan merupakan keputusan Dewan Komisaris yang terkait dengan operasional IFG.
3. Keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.
4. Keputusan yang menyangkut aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat. Aspek strategis tersebut antara lain meliputi kegiatan strategis IFG yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan semua perbuatan Direksi yang harus dimintakan/mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
5. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus diungkap dalam Laporan Tahunan IFG.
6. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.

Pelaksanaan Rapat

Pelaksanaan rapat diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan IFG, atau tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan rapat juga dapat dilakukan melalui daring melalui telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Kehadiran dan keputusan anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara daring diperhitungkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan masing-masing diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

Board of Commissioners' Meeting

IFG has Board of Commissioners meeting provisions contained in the Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors which stipulates as follows:

Basic Principles

The basic principles of the Board of Commissioners' Meeting include:

1. Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings of the Board of Commissioners and Meetings of the Board of Commissioners that invite the presence of the Board of Directors (Joint Meetings). The Board of Commissioners Meeting is a meeting attended by the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners.
2. The decisions of the Joint Meeting are related to the implementation of supervisory and advisory duties and do not constitute decisions of the Board of Commissioners related to IFG operations.
3. Binding decisions can also be made without a meeting provided that the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners.
4. Decisions concerning strategic aspects must be made through a meeting mechanism. Such strategic aspects include IFG's strategic activities that must be approved by the GMS and all actions of the Board of Directors that must be requested/obtain written approval from the Board of Commissioners.
5. The number of meetings and attendance of each member of the Board of Commissioners shall be disclosed in IFG's Annual Report.
6. Minutes must be taken at every Board of Commissioners meeting.

Meeting Implementation

The meetings is organized according to the following provisions:

1. Meetings of the Board of Commissioners are considered valid if held at the domicile of IFG, or other places within the territory of the Republic of Indonesia.
2. The meeting can also be held online through teleconference, video teleconference or other electronic media facilities that allow all participants to communicate and interact in the Board of Commissioners Meeting.
3. Attendance and decisions of members of the Board of Commissioners who attend the Board of Commissioners Meeting online are taken into account in the Board of Commissioners Meeting.
4. Meetings of the Board of Commissioners or Joint Meetings are held at least once every month.

5. Panggilan rapat dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat dan bahan-bahan rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama.
7. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
8. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
10. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan agenda dan jadwal rapat dengan mempertimbangkan permintaan dan masukan dari Dewan Komisaris.
11. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membantu dan mengatur penyelenggaraan rapat termasuk mempersiapkan materi rapat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan IFG dalam persiapan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Salah satu agenda dan bahan/materi adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya di dalam setiap rapat.

Kuorum Rapat dan Keabsahan Kehadiran

Ketentuan kuorum rapat dan keabsahan kehadiran rapat diatur sebagai berikut.

1. Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam satu tahun.
6. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi, Pejabat dan Pegawai IFG atau undangan dari luar IFG.

5. Meeting invitations are made in writing at the latest 3 (three) days before the meeting is held by stating the agenda, date, time, meeting place and meeting materials.
6. Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings are chaired by the President Commissioner.
7. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, which does not need to be proven to any party, the Board of Commissioners Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.
8. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, the member of the Board of Commissioners who has served the longest as a member of the Board of Commissioners shall act as chairman of the Board of Commissioners Meeting.
9. In the event that the longest serving member of the Board of Commissioners is more than one person, the oldest member of the Board of Commissioners in age shall act as chairman of the meeting.
10. The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for preparing meeting agendas and schedules by considering requests and inputs from the Board of Commissioners.
11. The Secretary of the Board of Commissioners is tasked with assisting and organizing meetings including preparing meeting materials for all members of the Board of Commissioners.
12. The Secretary of the Board of Commissioners coordinates with IFG's Corporate Secretary in the preparation of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
13. One of the agendas and materials is the results of the evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting in each meeting.

Meeting Quorum and Attendance Validity

The provisions for meeting quorum and validity of meeting attendance are regulated as follows.

1. Meetings are valid and can make binding decisions, if attended or represented by more than ½ (one-half) of the total number of members of the Board of Commissioners;
2. Meetings of the Board of Commissioners can be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners;
3. A member of the Board of Commissioners may be represented in a meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of a written proxy given specifically for that purpose;
4. A member of the Board of Commissioners may only represent one other member of the Board of Commissioners;
5. Each member of the Board of Commissioners is required to attend at least 75% (seventy-five percent) of meetings in one year;
6. The Board of Commissioners may invite meetings of Directors, Officers and Employees of IFG or invitees from outside IFG;

7. Peserta tamu undangan rapat tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Pembahasan masalah dan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Semua keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Semua keputusan rapat harus berdasarkan itikad baik, dan pertimbangan rasional, setelah melalui pembahasan yang mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen.
4. Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
5. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
6. Dalam pengambilan keputusan rapat, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar IFG, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
7. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Dalam mata acara lain-lain, rapat tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua peserta rapat yang sah menyetujui penambahan mata acara.
9. Setiap peserta rapat berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk yang diwakilinya.
10. Jika terdapat peserta rapat yang mempunyai pendapat berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh *abstain*).
12. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
13. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam mencantumkan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Invited guest participants of the meeting do not have a vote in decision-making.

Problem Discussion and Decision Making

Discussion of issues and decision-making in the Board of Directors Meetings and Joint Meetings are governed by the following provisions:

1. All decisions of the Board of Commissioners are taken at the Board of Commissioners Meeting.
2. Decisions can also be made outside the Board of Commissioners Meeting as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.
3. All meeting decisions must be based on good faith, and rational judgment, after in-depth discussion of various relevant matters, sufficient information and free from conflicts of interest and made independently.
4. All decisions in the meeting are made by deliberation for consensus.
5. If a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made by voting based on the number of affirmative votes of more than ½ (one-half) of the total number of valid votes cast in the relevant meeting.
6. In the decision-making of the meeting, if the number of votes in favor and against is equal, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting, while taking into account the provisions regarding accountability as referred to in the articles of association of IFG, except regarding the person, the decision-making of the meeting is carried out by closed voting.
7. In the event that there are more than 2 (two) alternative proposals and the voting results have not obtained 1 (one) alternative with more than ½ (one-half) of the total votes cast, then re-election will be held on 2 (two) proposals that received the most votes so that one of the proposals received more than ½ (one-half) of the total votes cast.
8. In other agenda items, the meeting is not entitled to make decisions unless all authorized meeting participants agree to the addition of the agenda item.
9. Each meeting participant is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the person he/she represents.
10. If there are meeting participants who have dissenting opinion on the decisions made, then the opinion must be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.
11. Each member of the Board of Commissioners present at the meeting or represented must cast or cast a vote (must not be abstained)
12. A blank vote (abstention) is deemed to approve the resolution of the meeting.
13. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in calculating the number of votes cast at the meeting.

14. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap peserta rapat yang memiliki benturan kepentingan diharuskan tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan termasuk hak suara yang diwakilinya dan harus dicatat dalam Risalah Rapat.
15. Pimpinan rapat harus menyampaikan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
16. Setiap keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Penyelesaian Risalah Rapat

Ketentuan dalam Risalah Rapat meliputi:

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.

2. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Risalah Rapat Gabungan wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Risalah Rapat disusun oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana tersebut pada nomor 2 dan 3, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dengan Risalah Rapat dan menjadi satu kesatuan dalam Risalah Rapat.
6. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat dan hal-hal yang diputuskan.
7. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan sekurang-kurangnya:
   a. acara, tempat, tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya rapat;
   b. daftar nama dan tanda tangan kehadiran;
   c. alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
   d. permasalahan yang dibahas;
   e. berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis termasuk yang mengemukakan pendapat;
   f. proses pengambilan keputusan;
   g. keputusan yang dihasilkan;
   h. *dissenting opinion*, jika ada;
   i. keputusan rapat sebelumnya; dan
   j. hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya;

14. To maintain independence and objectivity, any meeting participant who has a conflict of interest is required not to participate in voting for decision making including the voting rights he/she represents and must be recorded in the minutes of the meeting.
15. The chairperson should present the conclusions and resolutions at the end of each meeting.
16. Every decision of the meeting is binding for all members of the Board of Commissioners.

Completion of Meeting Minutes

Provisions in the Minutes of Meeting include:

1. The results of the Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting shall be set forth in the Minutes of Meeting.
2. Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners must be signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners.
3. Minutes of the Joint Meeting must be signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Minutes of Meeting shall be prepared by the Secretary of the Board of Commissioners or other party appointed by the Board of Commissioners.
5. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors who do not sign the results of the meeting as referred to in numbers 2 and 3, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting and become an integral part of the Minutes of the Meeting.
6. If there are dissenting opinions occurring in the Meeting of the Board of Commissioners, the dissenting opinions shall be clearly stated in the Minutes of the Meeting along with the reasons for the dissenting opinions and the matters decided.
7. The Minutes of Meeting must describe the course of the meeting. For this reason, the Minutes of the Meeting must include at least:
   a. agenda, venue, date and time of the start and end of the meeting;
   b. attendance roster and signatures;
   c. reasons for the absence of members of the Board of Commissioners in the meeting;
   d. issues discussed;
   e. The various opinions contained in the meeting, especially in discussing strategic issues, include those who express opinions;
   f. decision-making process;
   g. the resulting decision;
   h. dissenting opinion, if any;
   i. decision of the previous meeting; and
   j. evaluation results on the implementation of the decisions of the previous meeting;

8. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membuat Risalah Rapat. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris, Risalah Rapat dibuat oleh salah seorang dari antara peserta rapat yang hadir.

9. Risalah Rapat merupakan dokumen IFG yang penting sebagai bukti pengambilan keputusan. Oleh karena itu aspek legalitas dari Risalah Rapat diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
   a. Risalah Rapat asli harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat yang hadir termasuk yang diwakili dan penulis Risalah Rapat;
   b. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Dewan Komisaris yang tidak hadir (jika ada);
   c. setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai;
   d. Risalah Rapat asli dari setiap rapat harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh IFG serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris; dan
   e. Risalah Rapat asli dari setiap rapat dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Komisaris.

8. The Secretary of the Board of Commissioners is in charge of preparing the Minutes of Meeting. In the event that the meeting is not attended by the Secretary of the Board of Commissioners, the Minutes of Meeting shall be made by one of the meeting participants present.
9. Minutes of Meeting is an important IFG document as evidence of decision making. Therefore, the legality aspect of the Minutes of Meeting is regulated according to the following provisions:
   a. The original Minutes of Meeting must be signed by the chairperson of the meeting and the meeting participants present including those represented and the author of the Minutes of Meeting;
   b. The Minutes of Meeting must be accompanied by a power of attorney granted specifically by the absent Board of Commissioners (if any).
   c. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the Minutes of Meeting, even if he/she did not attend the meeting at the latest 7 (seven) days after the meeting is completed.
   d. The original Minutes of Meeting of each meeting shall be bound in an annual set and retained by the IFG and shall be available upon request by any Board Member.
   e. The original Minutes of Meeting of each meeting are accessible to any member of the Board of Commissioners.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris merupakan agenda rutin yang diselenggarakan minimal satu kali setiap bulan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja bulanan IFG. Rapat internal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar anggota Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait operasional perusahaan.

Hingga 31 Desember 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 6 (enam) rapat internal . Agenda rapat, risalah pertemuan, tingkat kehadiran, serta rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal sepanjang tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners meeting is a routine agenda held at least once every month to analyze and evaluate IFG's monthly performance. This internal meeting aims to strengthen coordination among members of the Board of Commissioners to increase effectiveness in conducting supervisory functions and providing advice to the Board of Directors regarding the Company's operations.

As of December 31, 2024, the Board of Commissioners has held 6 (six) internal meetings. The meeting agenda, minutes of meeting, attendance level, and recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners in internal meetings throughout 2024 are presented below:

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal
Minutes and Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting						Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
	10/01	14/03	3/05	28/06	8/07	11/10		
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	√	√	6	100
Hotbonar Sinaga*	-	-	-	-	-	-	-	-
Masyita Crystallin	√	√	√	√	√	X	5	83,33

Risalah dan Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal
Minutes and Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting						Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
	10/01	14/03	3/05	28/06	8/07	11/10		
Wahyu Setyawan	FnP OJK	FnP OJK	FnP OJK	X	√	X	4	66,67
Nasrudin	√	√	√	√	√	√	6	100
Sumiyati	√	√	√	√	√	√	6	100
Rata-Rata Average								**91,67**

*) Dalam Kondisi Sakit
*) unable to attend due to illnes

Adapun topik pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris, sebagai berikut.

The topics of discussion in the internal meetings of the Board of Commissioners are as follows.

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1.	10 Januari 2024 January 10, 2024	• Komite Tata Kelola Terintegrasi • Keanggotaan Dewan Komisaris • Buku Putih PT Asuransi Jiwasraya (Persero) • Integrated Governance Committee • Membership of the Board of Commissioners • White Paper of PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
2.	14 Maret 2024 March 14, 2024	Pembahasan Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Discussion on Audit Progress of Financial Statements for Fiscal Year 2023
3.	3 Mei 2024 May 3, 2024	• Persiapan Rapat Gabungan Pembahasan PT Asuransi Kredit Indonesia • Persiapan Rapat Gabungan Pembahasan PT Reasuransi Nasional Indonesia. • Preparation of Joint Meeting to Discuss PT Asuransi Kredit Indonesia • Preparation of Joint Meeting of PT Reasuransi Nasional Indonesia.
4.	28 Juni 2024 June 28, 2024	• Agenda Rahasia • Pembahasan Progres Penyelesaian Laporan Keuangan IFG Tahun 2023 • Confidential Agenda • Discussion on the Progress of Completion of IFG Financial Report of 2023
5.	8 Juli 2024 July 8, 2024	Pembahasan Pembagian Tugas Dewan Komisaris di IFG Discussion on the Division of Duties of the Board of Commissioners at IFG
6.	11 September 2024 September 11, 2024	Pembahasan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) IFG Periode 2025 - 2029 Discussion of IFG Information Technology Strategic Plan (RSTI) Period 2025 - 2029

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi sebagai sarana koordinasi untuk membahas laporan periodik Direksi, meninjau kondisi serta prospek bisnis perusahaan, serta menyampaikan tanggapan, catatan, dan rekomendasi terkait pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Selain itu, Rapat Gabungan berfungsi sebagai forum bagi Dewan Komisaris dalam mengevaluasi keputusan, kebijakan, serta pelaksanaan arahan yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya.

Rapat Gabungan merupakan agenda rutin yang dijadwalkan setiap bulan. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 19 (sembilan belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Rapat ini berfokus pada evaluasi kinerja triwulanan

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Board of Commissioners organizes Joint Meetings by inviting the Board of Directors as a means of coordination to discuss the Board of Directors' periodic reports, review the Company's business conditions and prospects, and submit responses, notes and recommendations related to the management of the Company by the Board of Directors. In addition, the Joint Meeting serves as a forum for the Board of Commissioners to evaluate decisions, policies, and the implementation of directives that have been conveyed in previous meetings.

The Joint Meeting is a routine agenda scheduled every month. Throughout 2024, the Board of Commissioners held 19 (nineteen) Joint Meetings with the Board of Directors. These meetings focus on evaluating the Company's

perusahaan serta membahas berbagai aspek strategis yang memerlukan konsultasi, arahan, pertimbangan, dan/atau keputusan dari Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat melibatkan Komite Audit untuk memberikan masukan, melakukan klarifikasi, atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Untuk setiap Rapat Gabungan yang diadakan bersama Direksi, akan disusun Risalah Rapat yang mencatat pencapaian kinerja triwulanan atau sesuai dengan agenda yang tercantum dalam undangan rapat. Hasil dari rapat ini juga digunakan sebagai bahan diskusi dalam pertemuan antara IFG dan Pemegang Saham. Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan dapat dilihat sebagai berikut:

quarterly performance, as well as discussing various strategic aspects that require consultation, direction, consideration, and/or decisions from the Board of Commissioners. If necessary, the Board of Commissioners may involve the Audit Committee to provide input, clarify, or conduct direct field observations.

For each Joint Meeting held with the Board of Directors, Meeting Minutes shall be prepared to record the quarterly performance achievements. or in accordance with the agenda stated in the meeting invitation. The results of these meetings are also used as discussion materials in meetings between IFG and Shareholders. The recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners and Directors in the Joint Meeting can be seen as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Joint Meeting

Nama Name	**Tanggal Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi** Date of Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors																		**Jumlah** Total	**%**
	17/1	**18/1**	**27/2**	**7/3**	**8/5**	**29/5**	**17/7**	**25/7**	**29/7**	**31/7**	**8/8**	**30/8**	**6/9**	**23/9**	**4/10**	**7/10**	**16/10**	**29/10**	**18/12**	
Dewan Komisaris Board of Commissioners																				
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100
Hotbonar Sinaga*)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100
Masyita Crystallin	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	15	83,33
Wahyu Setyawan	FnP OJK	FnP OJK	FnP OJK	FnP OJK	FnP OJK	FnP OJK	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	18	94,74
Nasrudin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100
Sumiyati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100
Rata-rata Average																					**96,35**
Direksi Board of Directors																					
Hexana Tri Sasongko	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	17	89,47
Haru Koesmahargyo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100
Rizal Ariansyah	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√	√	14	73,68
Pantro Pander Silitonga**)	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	12	63,16
Rianto Ahmadi	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	18	94,74
Heru Handayanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	100

*)Dalam Kondisi Sakit
**) Pantro Pander Silitonga diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2024 (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Ekonomi Nasional tanggal 17 Desember 2024).
*) unable to attend due to illness
**) Pantro Pander Silitonga was appointed as Executive Director for Monitoring and Evaluation of Economic Priority Programs of the National Economic Council on December 23, 2024 (based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 88/M of 2024 on the Appointment of the Director of National Economy dated December 17. 2024).

Adapun topik pembahasan dalam Rapat Gabungan, sebagai berikut:

The topics of discussion in the Joint Meeting are as follows:

No.	**Tanggal** Date	**Agenda Pembahasan** Discussion Agenda
1.	17 Januari 2024 January 17, 2024	Pembahasan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan IFG Tahun 2024 Aspek Kebijakan Risiko Discussion of Draft IFG Company Work Plan and Budget of 2024 in Risk Policy Aspects
2.	18 Januari 2024 January 18, 2024	Pembahasan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan IFG Tahun 2024 Discussion on Approval of IFG Company Work Plan and Budget of 2024
3.	27 Februari 2024 February 27, 2024	Pembahasan Kinerja IFG s.d. Triwulan IV 2023 (*Unaudited*) Discussion of IFG Performance up to Q4 2023 (Unaudited)

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
4.	7 Maret 2024 March 7, 2024	1. Pembahasan Progres Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam rangka penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp3,56 triliun. 2. Pengajuan Penyertaan Modal Negara Tahun 2024 sebesar Rp3 Triliun dan Penyertaan Modal Negara Tahun2025 sebesar Rp3 Triliun untuk Penguatan Kapasitas Modal PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia dalam Keberlanjutan Pelaksanaan Penugasan Pemerintah 1. Discussion of the Proposed Progress of Additional State Equity Participation in the context of saving PT Asuransi Jiwasraya (Persero) policies amounting to IDR3.56 trillion. 2. Submission of State Equity Participation in 2024 amounting to IDR3 Trillion and State Capital Participation in 2025 amounting to IDR3 Trillion to Strengthen the Capital Capacity of PT Asuransi Kredit Indonesia and PT Jaminan Kredit Indonesia in the Continuation of the Implementation of Government Assignments.
5.	8 Mei 204 May 8, 2024	1. Kinerja Keuangan IFG dan Anggota *Holding* Triwulan I Tahun 2024 2. Pembahasan Kinerja PT Asuransi Kredit Indonesia 3. Pembahasan Kinerja PT Reasuransi Nasional Indonesia 1. Financial Performance of IFG and Holding Members in the First Quarter of 2024 2. Discussion on Performance of PT Asuransi Kredit Indonesia 3. Discussion on the Performance of PT Reasuransi Nasional Indonesia
6.	29 Mei 204 May 29, 2024	Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan IFG Konsolidasi Tahun 2025 – 2029 Application for Approval of IFG Consolidated Company Long-Term Plan 2025 - 2029
7.	17 Juli 2024 July 17, 2024	Progres Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Progress of Financial Statement Audit Completion for Fiscal Year 2023
8.	25 Juli 2024 July 25, 2024	Permohonan Persetujuan atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Request for Approval of the Proposed Revision of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2024
9.	29 Juli 2024 July 29, 2024	1. Kinerja IFG dan Anggota *Holding* Triwulan II Tahun 2024 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 1. IFG and Holding Members' Performance in the Second Quarter of 2024 2. Audit Progress of Financial Statements for Fiscal Year 2023
10.	31 Juli 2024 July 31, 2024	Permohonan Persetujuan atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Request for Approval of the Proposed Revision of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2024
11.	8 Agustus 2024 August 8, 2024	1. Pembahasan PT Asuransi Jasa Indonesia 2. Penjelasan Usulan Revisi RKAP Tahun 2024 atas Catatan Divisi SKAI 1. Discussion of PT Asuransi Jasa Indonesia 2. Explanation of the Proposed Revision of RKAP Year 2024 on the Note of Internal Audit Work Unit (SKAI) Division
12.	30 Agustus 2024 August 30, 2024	1. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan IFG Konsolidasi Tahun 2025 – 2029 2. Penerimaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh IFG 3. Penerimaan Aset, Kewajiban dan Dokumen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG 1. Draft of IFG Consolidated Company Long-Term Plan 2025 - 2029 2. Acceptance of the Micro and Small Business Funding Program from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) by IFG 3. Acceptance of Assets, Liabilities and Documents of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG
13.	6 September 2024 September 6, 2024	Pembahasan Lanjutan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 Further Discussion of the Draft Company Long-Term Plan 2025-2029
14.	23 September 2024 September 23, 2024	Progres Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Progress of Financial Statement Audit Completion for Fiscal Year 2023
15.	4 Oktober 2024 October 4, 2024	Persetujuan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan IFG Tahun 2025-2029 Approval of Draft IFG Company Long-Term Plan 2025-2029
16.	7 Oktober 2024 October 7, 2024	*Clearance Meeting Audit* Umum Laporan Keuangan Konsolidasian IFG Tahun Buku 2023 Clearance Meeting of General Audit of IFG Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023
17.	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan IFG Tahun Buku 2023 Preparation for IFG Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023
18.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan IFG Tahun 2025 2. Persetujuan Kinerja Keuangan IFG dan Anggota *Holding* Triwulan III Tahun 2024 1. Approval of IFG Company Work Plan and Budget of 2025 2. Approval of IFG and Holding Members' Financial Performance in the Third Quarter of 2024
19.	18 Desember 2024 December 18, 2024	1. Pembahasan Progres Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan Progress Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 2. Pembahasan Anggota *Holding* IFG 1. Discussion on the Progress of the General Meeting of Shareholders of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023 and the Audit Progress of the Financial Statements for the Fiscal Year 2024 2. IFG Subsidiary Discussion

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang diberi kuasa. Berdasarkan Anggaran Dasar, ketentuan Rapat Direksi antara lain.

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Risalah Rapat berisi hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal yang diputuskan.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir, dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Meeting of the Board of Directors is a meeting held by the Board of Directors and chaired by the President Director or a duly authorized member of the Board of Directors. Based on the Articles of Association, the provisions of the Board of Directors Meeting include.

1. All decisions of the Board of Directors are made at the Board of Directors Meeting.
2. Decisions may also be made outside the Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors agree on the manner and subject matter of the resolutions.
3. In every Meeting of the Board of Directors, Minutes of Meeting must be drawn up and signed by the Chairperson of the Meeting of the Board of Directors and all members of the Board of Directors present. The Minutes of Meeting shall contain the matters discussed (including the statement of dissenting opinion of the members of the Board of Directors, if any) and the matters decided.
4. The Board of Directors Meeting may be held at any time if:
   a. deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
   b. upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or
   c. upon the written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
5. Meetings of the Board of Directors are considered valid if held at the domicile of the company or at another place within the territory of the Republic of Indonesia.
6. The invitation to the Meeting of the Board of Directors shall be made in writing by a member of the Board of Directors who is entitled to represent the Company and shall be submitted no later than 3 (three) days before the meeting is held or within a shorter period if in an urgent situation, without taking into account the date of the invitation and the date of the meeting.
7. The meeting summons must include the agenda, date, time and place of the meeting.
8. Prior notice of a meeting is not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
9. Meetings of the Board of Directors are valid and entitled to make binding decisions if attended by more than ½ (one-half) of the total number of members of the Board of Directors or their authorized representatives.
10. In other agenda items, the Board of Directors Meeting is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors or their authorized representatives, are present, and agree to the addition of the meeting agenda.

11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
12. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
13. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
14. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
15. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

11. All Board Meetings are chaired by the President Director.
12. All decisions in the Board of Directors Meeting are made by deliberation for consensus.
13. In the event that a decision cannot be made by deliberation to reach consensus, the decision shall be made by ordinary majority vote.
14. A blank vote (abstention) is deemed to approve the resolution of the meeting.
15. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah Melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 40 kali. Adapun agenda dan Risalah Rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors held 40 Board of Directors meetings. The agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Board of Directors in these meetings is shown as follows

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
1.	09 Januari 2024 January 09, 2024	· Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 · *Zoom Video Conference* · Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor · Zoom Video Conference	· Pembahasan Penggunaan Sistem Naskah Dinas I-Flow · Persetujuan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) · Discussion on the Use of the I-Flow Manuscript System · Approval of the Draft Work Plan and Corporate Budget in 2024 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	· Direktur Utama · Wakil Direktur Utama · Direktur SDM · Direktur Bisnis · Direktur Keuangan · Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait · President Director · Vice President Director · HC Director · Business Director · Director of Finance · Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
2.	11 Januari 2024 January 11, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Pembahasan Progres Akuisisi Mayoritas Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia oleh PT Asuransi Jiwa IFG Discussion on the Progress of the Acquisition of Majority Shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia by PT Asuransi Jiwa IFG	· Wakil Direktur Utama · Direktur Bisnis · Direktur Teknik · Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait · Direksi dan Tim Teknis PT Asuransi Jiwa IFG · PT Bahana Sekuritas · Vice President Director · Business Director · Technical Director · Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff · Directors and Technical Team of PT Asuransi Jiwa IFG · PT Bahana Sekuritas

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
3.	16 Januari 2024 January 16, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Pembahasan Perubahan Piagam Audit Internal • Pembahasan Progres Pemeriksaan BPK RI • Pembahasan Penyelesaian Aset Tanah dan Bangunan PT Asuransi Jiwa IFG • Pembahasan Progres Akuisisi Mayoritas Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia oleh PT Asuransi Jiwa IFG • Internal Audit Charter Amendment Discussion • Discussion of BPK RI Audit Progress • Discussion on Settlement of Land and Building Assets of PT Asuransi Jiwa IFG • Discussion on the Progress of the Acquisition of Majority Shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia by PT Asuransi Jiwa IFG	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Direksi dan Tim Teknis PT Asuransi Jiwa IFG • Tim Konsultan yang terdiri atas PT Bahana Sekuritas, Grant Thornton Indonesia, Oliver Wyman, dan Pinnacle • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Directors and Technical Team of PT Asuransi Jiwa IFG • Consultant team consisting of PT Bahana Sekuritas, Grant Thornton Indonesia, Oliver Wyman, and Pinnacle
4.	23 Januari 2024 January 23, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Pemabahasan Laporan Rutin Manajemen Risiko Bulan Januari 2024 • Permohonan Persetujuan Tema dan Pelaksanaan HUT 4 Tahun IFG • Review of Routine Risk Management Report for January 2024 • Request for Approval of Theme and Implementation of IFG 4th Anniversary	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Head of Division, Head of Department, and related IFG Staff
5.	24 Januari 2024 January 24, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Pembahasan Progres *Project* Istanbul II Hasil Evaluasi Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Discussion of Istanbul II Project Progress Results of Share Evaluation of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senio Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
6.	30 Januari 2024 January 30, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Penetapan Koordinator Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Aset Cilandak *Townsquare* • Pembahasan Tindak Lanjut atas Aset Cilandak *Townsquare* • Assignment of Coordinator for the Implementation of Cilandak Townsquare Asset Problem Resolution • Discussion on Follow-up of Cilandak Townsquare Assets	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Kepala Divisi dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Director of Finance • Head of Division and relevant IFG Staff
7.	06 Februari 2024 February 06, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Kerja IFG dan Anggota *Holding* Tahun 2024 • Pembahasan Rencana Penandatanganan CSPA Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia antara PT Asuransi Jiwa IFG dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma Tbk • Pembahasan Proyek Kajian Manajemen Pengelolaan Bisnis dan Operasional Perusahaan Afiliasi IFG *Holding* • Request for Approval to Organize IFG and Holding Members Work Meeting in 2024 • Discussion of the Plan to Sign the CSPA for PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Shares between PT Asuransi Jiwa IFG with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Kimia Farma Tbk. • Discussion of IFG Holding Affiliated Company's Business Management and Operational Management Study Project	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Direktur Keuangan dan Tim PT Asuransi Jiwa IFG • Konsultan yang terdiri atas PT Bahana Sekuritas, ABNR Counsellors at Law, PT Bahana Kapital Investa, Boston Consulting Group Indonesia, dan Wiyono Partnership Attorneys at Law • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Director of Finance and Team of PT Asuransi Jiwa IFG • Consultants consisting of PT Bahana Sekuritas, ABNR Counsellors at Law, PT Bahana Kapital Investa, Boston Consulting Group Indonesia, and Wiyono Partnership Attorneys at Law
8.	13 Februari 2024 February 13, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Adjustment KPD Management Fee PT Bahana TCW Investment Management • Permohonan Persetujuan Pemenang Kompetisi Desain Logo HUT IFG ke-4 • Pembahasan Penyelenggaraan Book Launching • Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan IFG: Pencapaian 2020-2024 dan Penyusunan 2025-2029 • Request for Approval of Ownership and Control (KPD) Management Fee Adjustment PT Bahana TCW Investment Management • Request for Approval of the Winner of the IFG 4th Anniversary Logo Design Competition • Discussion on Book Launching Organization • Discussion of IFG Company Long-Term Plan: Achieving 2020-2024 and Drafting 2025-2029	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
9.	21 Februari 2024 February 21, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Pembahasan IFG dan Anggota *Holding* Triwulan IV Tahun 2023 • Pembahasan terkait Perbaikan Skema atas Margin Deposito pada Anggota *Holding* • Discussion of IFG and Holding Members in the fourth quarter of 2023 • Discussion on the Improvement of Scheme on Deposit Margin in Holding Members	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
10.	05 Maret 2024 March 05, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Rencana Aksi Korporasi di PT Bahana TCW *Investment Management* Request for Approval of Follow-up to Corporate Action Plan at PT Bahana TCW Investment Management	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
11.	19 Maret 2024 March 19, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan atas *Visioning Internal Holding* untuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Konsolidasi 2025-2029 • Permohonan Persetujuan atas Usulan *Key Performance Indicator* Direksi secara Individual Tahun 2024 • Permohonan Persetujuan atas Proyek Transformasi yang Dikelola dan Dimonitor oleh *Transformation Office* Berdasarkan Proyek Korporasi dan Aksi Korporasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 • Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal • Request for Approval of Internal Holding Visioning for the Preparation of the Consolidated Company Long-Term Plan 2025-2029 • Request for Approval of the Proposed Key Performance Indicator for Directors Individually in 2024 • Request for Approval of Transformation Projects Managed and Monitored by Transformation Office Based on Corporate Projects and Corporate Actions in the Company's 2024 Work Plan and Budget • Discussion on Follow-up of External Audit Results	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Konsultan dari Boston Consulting Group Indonesia • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultant from Boston Consulting Group Indonesia

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
12.	26 Maret 2024 March 26, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Pembahasan Akuisisi Mayoritas Saham Mandiri Inhealth oleh PT Asuransi Jiwa IFG Discussion on the Acquisition of Majority Shares of Mandiri Inhealth by PT Asuransi Jiwa IFG	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Direktur Keuangan dan Kepala Divisi Corporate Strategy and Performance Management PT Asuransi Jiwa IFG • Konsultan dari PT Bahana Sekuritas dan konsultan pendukung lainnya • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Director of Financeand Head of Corporate Strategy and Performance Management PT Asuransi Jiwa IFG • Consultants from PT Bahana Sekuritas and other supporting consultants
13.	02 April 2024 April 02, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • Indonesia Financial Group Office • AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Permohonan Persetujuan Arahan Pemegang Saham Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 • Pembahasan Hasil Audit di PT Bahana Sekuritas • Pembahasan terkait Bisnis PT Bahana Sekuritas • Pembahasan Progres Audit Tahun Buku 2023 • Request for Approval of Shareholder Direction for the Company's Long-Term Plan 2025-2029 • Discussion of Audit Results at PT Bahana Sekuritas • Discussion related to PT Bahana Sekuritas Business • Discussion of Audit Progress for Fiscal Year 2023	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Konsultan dari PT Bahana Sekuritas, Boston Consulting Group Indonesia, dan Skha Consulting • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultants from PT Bahana Sekuritas, Boston Consulting Group Indonesia, and Skha Consulting

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
14.	23 April 2024 April 23, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Pembahasan Progres *Task Force* MIS Triwulan I Tahun 2024 • Pembahasan Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Penugasan Kredit Usaha Rakyat • Pembahasan *Gap Analysis* Pedoman Strategis *Cut Loss* dengan Ketentuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Discussion of MIS Task Force Progress for the First Quarter of 2024 • Discussion of Proposed State Equity Participation for Fiscal Year 2024 and State Equity Participation for Fiscal Year 2025 in the context of People's Business Credit Assignment • Discussion of Gap Analysis of Cut Loss Strategic Guidelines with the Provisions of the Ministry of State-Owned Enterprises	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
15.	30 April 2024 April 30, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan Tema dan Desain Publikasi *Annual Report* dan *Sustainability Report* IFG Tahun 2023 Request for Approval of the Theme and Design for the Publication of IFG Annual Report and Sustainability Report of 2023	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Head of Division, Head of Department, and related IFG Staff
16.	07 Mei 2024 May 07, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Permohonan Persetujuan Kinerja Keuangan IFG dan Anggota *Holding* Triwulan I Tahun 2024 • Permohonan Persetujuan Draf I Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 (*Baselining, Purpose Statement,* Visi, Strategi, dan Inisiatif Strategis) • Request for Approval of IFG and Holding Members' Financial Performance for the First Quarter of 2024 • Request for Approval of Draft I of the Company's Long-Term Plan 2025-2029 (Baselining, Purpose Statement, Vision, Strategy, and Strategic Initiatives)	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Konsultan dari Boston Consulting Group Indonesia • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultant from Boston Consulting Group Indonesia

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
17.	14 Mei 2024 May 14, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan Kajian terkait PT Asuransi Jasaraharja Putera Request for Approval of Review related to PT Asuransi Jasaraharja Putera	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur SDM • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • HC Director • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
18.	28 Mei 2024 May 28, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan IFG Konsolidasi Tahun 2025-2029 Request for Approval of IFG Consolidated Company Long-Term Plan 2025-2029	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
19.	04 Juni 2024 June 04, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan IFG Tahun 2024 • Permohonan Persetujuan Tema dan Desain Laporan Tahunan *(Annual Report)* dan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2023 • Permohonan Persetujuan Pengimplementasian Sistem Aplikasi Tata Naskah Dinas I-Flow • Permohonan Persetujuan atas Kajian Kepemilikan Bisnis Asuransi Jiwa Syariah di Ekosistem PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) • Proposed Revision of IFG Company Work Plan and Budget Year 2024 • Request for Approval of the Theme and Design of the Annual Report and Sustainability Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for 2023 • Request for Approval to Implement the I-Flow Office Manuscript Application System • Request for Approval of the Study of Sharia Life Insurance Business Ownership in the Ecosystem of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Konsultan dari Skha Consulting • President Director • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultant from Skha Consulting

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
20.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan Penarikan Dividen PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2023 Request for Approval of the Withdrawal of Dividends of PT Jaminan Kredit Indonesia for the Fiscal Year 2023	• Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Direktur Teknik • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Vice President Director • Business Director • Director of Finance • Technical Director • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
21.	14 Juni 2024 June 14, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI Presentation of BPK RI's Compliance Audit Report	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
22.	25 Juni 2024 June 25, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Permohonan Persetujuan Laporan Gap Analysis dan *Roadmap* Internal *Control over Financial Reporting* • Rencana Penandatanganan Akta Jual Beli dan *Shareholders Agreement* dalam rangka Pelaksanaan Akuisisi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia oleh PT Asuransi Jiwa IFG • Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Penyelesaian Transaksi Aset Citos • Pemaparan terkait PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja • Permohonan Persetujuan Arahan Pemegang Saham Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 • Request for Approval of Gap Analysis Report and Internal Control over Financial Reporting Roadmap • Plan to Sign the Deed of Sale and Purchase and Shareholders Agreement in the context of the Acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia by PT Asuransi Jiwa IFG • Request for Approval of Principle License for Settlement of Cilandak Townsquare Asset Transaction • Presentation on PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja • Request for Approval of Shareholder Direction for the Revision of Company Work Plan and Budget of 2024	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Direktur Keuangan dan Kepala Divisi Corporate Strategy and Performance Management PT Asuransi Jiwa IFG • Konsultan dari Deloitte Indonesia • President Director • Vice President Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Director of Finance and Head of Corporate Strategy and Performance Management PT Asuransi Jiwa IFG • Consultant from Deloitte Indonesia

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
23.	02 Juli 2024 July 02, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan atas Tanggapan kepada TCW Request for Approval of Response to TCW	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Direktur Pemasaran dan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bahana TCW Investment Management • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • - Marketing Director and Risk Management and Compliance Director PT Bahana TCW Investment Management
24.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan atas Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Request for Approval of the Proposed Revision of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2024	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
25.	26 Juli 2024 July 26, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Kinerja IFG dan Anggota *Holding* Triwulan II Tahun 2024 IFG and Holding Members' Performance in the Second Quarter of 2024	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
26.	30 Juli 2024 July 30, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Persetujuan IFG *Conference* dan IFG *Research* Seminar Approval of IFG Conference and IFG Research Seminar	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
27.	23 Agustus 2024 August 23, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Pemaparan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 (Implementasi PSAK 117, Strategi, dan Inisiatif Strategis) Presentation of the Company's Draft Long-Term Plan 2025-2029 (Implementation of PSAK 117, Strategies, and Strategic Initiatives)	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
28.	28 Agustus 2024 August 28, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group • Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak atas Transaksi • Permohonan Persetujuan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029 (Implementasi PSAK 117, Strategi, dan Inisiatif Strategis) • Request for Approval of Tax Payment on Transaction • Request for Approval of the Draft Company Long-Term Plan 2025-2029 (Implementation of PSAK 117, Strategy, and Strategic Initiatives)	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
29.	03 September 2024 September 03, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Permohonan Persetujuan Kajian terkait PT Asuransi Jasaraharja Putera dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja • Pemaparan mengenai Update Progres Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan IFG • Request for Approval of Study related to PT Asuransi Jasaraharja Putera and PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja • Presentation of Update on the Progress of Implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in the IFG Environment	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
30.	24 September 2024 September 24, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan *Executive Meeting* IFG Triwulan III Tahun 2024 di Labuan Bajo Request for Approval to Organize IFG Executive Meeting Quarter III Year 2024 in Labuan Bajo	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Head of Division, Head of Department, and related IFG Staff
31.	01 Oktober 2024 October 01, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	• Persetujuan Penyampaian Hasil *Assessment* ICOFR di IFG kepada Kementerian BUMN • Permohonan Persetujuan atas Usulan Prioritasi Anggaran Aksi Korporasi untuk RKAP Tahun 2025 • Persetujuan Arahan Pemegang Saham Seri B RKAP 2025 • Approval of Submission of ICOFR Assessment Results at IFG to the Ministry of SOEs • Request for Approval of the Proposed Prioritization of Corporate Action Budget for 2025 RKAP • Approval of Series B Shareholders Direction for 2025 RKAP	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
32.	03 Oktober 2024 October 03, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Persetujuan Rancangan RJPP IFG 2025-2029 Approval of IFG Company Long-Term Plan Draft (RJPP) of 2025-2029	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Head of Division, Head of Department, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
33.	04 Oktober 2024 October 04, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	*Clearance Meeting* Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian IFG Tahun Buku 2023 Clearance Meeting of General Audit of IFG Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Konsultan dari PWC Indonesia • President Director • Vice President Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultant from PWC Indonesia
34.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Penyelesaian Transaksi Tanah dan Bangunan Cilandak • Permohonan Persetujuan Rencana Biaya IFG (*Holding*) dan Pemaparan Angka IFG Konsolidasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 • Request for Approval of Follow-up Settlement of Cilandak Land and Building Transaction • Request for Approval of IFG (Holding) Cost Plan and Exposure of Consolidated IFG Figures in the Company's 2025 Work Plan and Budget	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • Tim Konsultan dari PT Mandiri Sekuritas, KJPP RHR, Savills Indonesia, KPMG Indonesia, dan Wiyono Partnership Attorneys at Law • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Technical Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff • Consultant Team from PT Mandiri Sekuritas, Public Appraisal Service Office RHR, Savills Indonesia, KPMG Indonesia, and Wiyono Partnership Attorneys at Law
35.	28 Oktober 2024 October 28, 2024	• Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 • *Zoom Video Conference* • Indonesia Financial Group Office, AKHLAK Meeting Room 27th Floor • Zoom Video Conference	Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Request for Approval of Company Work Plan and Budget in 2025	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Bisnis • Direktur Keuangan • Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Business Director • Director of Finance • Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
36.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Kinerja Keuangan IFG dan Anggota *Holding* Triwulan III Tahun 2024 Financial Performance of IFG and Holding Members in the Third Quarter of 2024	· Direktur Utama · Wakil Direktur Utama · Direktur SDM · Direktur Bisnis · Direktur Teknik · Direktur Keuangan · Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait · President Director · Vice President Director · HC Director · Business Director · Technical Director · Director of Finance · Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
37.	03 Desember 2024 December 03, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	· Permohonan Persetujuan atas Aksi Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia · Permohonan Persetujuan atas *Key Performance Indicator* Tahun 2025 IFG dan Anggota *Holding* · Permohonan Persetujuan atas Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025 – 2029 PT Asuransi Jiwa IFG melalui Rapat Umum Pemegang Saham · Request for Approval of the Corporate Action of PT Asuransi Jasa Indonesia · Request for Approval of Key Performance Indicator in 2025 within IFG and Holding Members · Request for Approval of the Ratification of the 2025–2029 Long-Term Plan for PT Asuransi Jiwa IFG through a General Meeting of Shareholders.	· Direktur Utama · Wakil Direktur Utama · Direktur Bisnis · Direktur Teknik · Direktur Keuangan · Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait · President Director · Vice President Director · Business Director · Technical Director · Director of Finance · Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff
38.	17 Desember 2024 December 17, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	· Pembahasan Progres Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan Progress Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 · Permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Strategis Teknologi Informasi IFG Tahun 2025 – 2029 · Update Isu pada Anggota *Holding* · Persetujuan RUPS Atas Rencana Penyelesaian dan Penghapusbukuan Aset Properti Investasi PT Asuransi Jiwa IFG yang Berasal dari Aset Tetap · Discussion on the Progress of the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Financial Statements for Fiscal Year 2023 and the Audit Progress of the Financial Statements for Fiscal Year 2024 · Request for Approval of the IFG Information Technology Strategic Plan 2025-2029 · Update on Subsidiary Issues · GMS Approval of the Plan to Settlement and Write-off of Investment Property Assets of PT Asuransi Jiwa IFG Derived from Fixed Assets.	· Wakil Direktur Utama · Direktur Bisnis · Direktur SDM · Direktur Teknik · Direktur Keuangan · Senior Executive Vice President, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait · Vice President Director · Business Director · HC Director · Technical Director · Director of Finance · Senior Executive Vice President, Division Heads, Department Heads, and related IFG Staff

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
39.	23 Desember 2024 December 23, 2024	*Zoom Video Conference*	Penetapan Usulan Penataan Sementara Jabatan dan Fungsi Direktur Bisnis IFG Determination of Proposed Temporary Arrangement of Position and Function of Business Director of IFG	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director
40.	31 Desember 2024 December 31, 2024	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Rapat AKHLAK Lantai 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Meeting Room 27th Floor	Konsultasi terkait dengan Pencadangan Akhir Tahun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia Consultation related to Year End Reserves for PT Asuransi Kredit Indonesia	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama • Direktur SDM • Direktur Teknik • Direktur Keuangan • Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Staf IFG terkait • President Director • Vice President Director • HC Director • Technical Director • Director of Finance • Head of Division, Head of Department, and related IFG Staff

Berikut disampaikan rekapitulasi kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi pada tahun 2024.

The following is a summary of the Board of Directors' attendance at the Internal Board of Directors' Meeting in 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Recapitulation of Board of Directors Attendance at Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage Attendance
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) | (President Director)	40	37	92,5%
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) | (Vice President Director)	40	40	100,0%
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) | (HC Director)	40	28	70,0%
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) *) | (Business Director)*)	38	33	86,8%
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) | (Technical Director)	40	37	92,5%
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) | (Director of Finance)	40	39	97,5%
Rata-rata Average			**90,0%**

*) Pantro Pander Silitonga diangkat sebagai Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2024 (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Ekonomi Nasional tanggal 17 Desember 2024) dan secara efektif tidak menjabat sebagai Direktur Bisnis IFG dan tidak ikut serta di 2 (dua) Rapat Direksi terakhir di tanggal 23 Desember 2024 dan 31 Desember 2024.
*) Pantro Pander Silitonga was appointed as Executive Director of Monitoring and Evaluation of Priority Economic Programs at the National Economic Council on December 23, 2024 (based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 88/M of 2024 on the Appointment of the National Economic Director dated December 17, 2024) and has effectively stopped serving as Business Director at IFG and did not participate in the last two Board of Directors meetings on December 23, 2024, and December 31, 2024.

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI DI TAHUN 2025

Anggaran Dasar Perusahaan serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan ketentuan terkait pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi. Kedua dokumen ini mengatur bahwa rapat tersebut dapat diselenggarakan setidaknya sekali dalam satu bulan dan dapat diadakan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengambilan keputusan, Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan dapat diadakan sekali dalam sebulan. Rapat Dewan Komisaris dirancang untuk membahas laporan kinerja bulanan manajemen, mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta keputusan rapat sebelumnya, menindaklanjuti arahan atau keputusan Dewan Komisaris, serta membahas hal-hal lain yang relevan dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dijadwalkan untuk diselenggarakan setidaknya sekali setiap bulan. Agenda dalam rapat ini mencakup pembahasan laporan bulanan dari masing-masing Direktorat, penetapan kebijakan strategis perusahaan, evaluasi kinerja operasional, perumusan strategi perusahaan, serta berbagai hal lain yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PLAN FOR BOARD MEETINGS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS IN 2025

The Company's Articles of Association as well as the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors stipulate the provisions related to the implementation of the Board of Commissioners Meeting and Board of Directors Meeting. Both documents stipulate that such meetings may be held at least once a month and may be held at any time if necessary.

To improve coordination and effectiveness of decision making, the Board of Commissioners' Meetings as well as Joint Meetings may be held once a month. The Board of Commissioners' Meeting is designed to discuss management's monthly performance report, evaluate the implementation of performance and decisions of the previous meeting, follow up on directions or decisions of the Board of Commissioners, and discuss other matters relevant to the duties and functions of the Board of Commissioners' supervision.

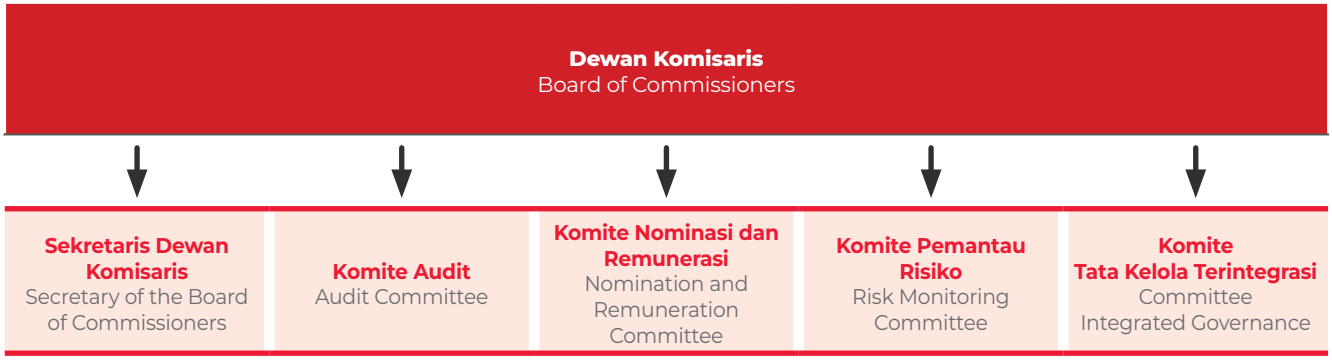
Board of Directors meetings are scheduled to be held at least once every month. The agenda of this meeting includes the discussion of monthly reports from each Directorate, determination of the company's strategic policies, evaluation of operational performance, formulation of company strategy, as well as various other matters relevant to the duties and responsibilities of the Board of Directors.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh 5 (lima) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan organ pendukung ini didasarkan pada Anggaran Dasar, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

In carrying out its supervisory function over the management of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is supported by 5 (five) supporting organs, namely the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. The establishment of these supporting organs is based on the Articles of Association, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources in State-Owned Enterprises, and Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1 of 2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines.

Dewan Komisaris dan Organ Pendukung
Board of Commissioners and Supporting Organ



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ pendukung yang dibentuk untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Organ ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris serta didukung oleh staf yang bertugas dalam lingkup Sekretariat Dewan Komisaris.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menunjuk Sukendar sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/SK-DEKOM/ BPUI/X/2019 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners is a supporting organ established to support the duties of the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners. This organ is led by a Secretary of the Board of Commissioners and supported by staff in charge of the Board of Commissioners Secretariat.

Secretary of the Board of Commissioners
The Board of Commissioners appointed Sukendar as the Secretary of the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners Number 04/SK-DEKOM/ BPUI/X/2019 stipulated in Jakarta on October 25, 2019.

Sukendar
Sekretaris Dewan Komisaris
Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 s.d. 25 November 2024
Secretary of the Board of Commissioners
Term of Office: October 25, 2019 to November 25, 2024

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Usia 42 tahun | 42 years old

Domisili | Domicile
Jakarta Timur, DKI Jakarta Indonesia | East Jakarta, DKI Jakarta Indonesia

Pendidikan | Education
- Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006
- Magister hukum ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2018
- Bachelor's Degree in Law from Gadjah Mada University in 2006
- Master's Degree in Economic Law from University of Indonesia in 2018

Pengalaman Kerja | Work Experience
Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.
Some of the positions he has held include the Business Competition Supervisory Commission, and Assistant Deputy for Legislation at the Ministry of SOEs.

Pada tanggal 25 November 2024, Dewan Komisaris menunjuk Weny Maulatsih sebagai Sekretaris Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 19/SK-DEKOM/BPUI/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

On November 25, 2024, the Board of Commissioners appointed Weny Maulatsih as Secretary of the Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree Number 19/SK-DEKOM/BPUI/XI/2024 dated November 25, 2024.

Weny Maulatsih
Sekretaris Dewan Komisaris
Periode Jabatan: 25 November 2024
Secretary of the Board of Commissioners
Term of Office: November 25, 2024

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Usia 40 Tahun | 40 years old

Domisili | Domicile
DKI Jakarta

Pendidikan | Education
- Magister Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara
- D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- D3 Perbendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Master's Degree in Business Management Bina Nusantara University
- Diploma 4 in Accounting, Indonesian State College of Accountancy (STAN)
- Diploma 3 in State Treasury, Indonesian State College of Accountancy (STAN)

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Sekretaris Dewan Komisaris IFG (November 2024 – sekarang)
- Koordinator Organisasi Kementerian BUMN (2022 – sekarang)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2022 – November 2024)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas (2021 – 2022)
- Subkoordinator Layanan SDM Kementerian BUMN (2020 – 2022)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019 – 2021)
- Secretary of IFG Board of Commissioners (November 2024 - present)
- Organizational Coordinator of the Ministry of SOEs (2022 - present)
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2022 - November 2024)
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Pelindo Terminal Petikemas (2021 - 2022)
- HR Services Subcoordinator of the Ministry of SOEs (2020 - 2022)
- Secretary of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019 - 2021)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam Melaksanakan tugasnya berupa:

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in performing its duties in the form of:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, antara lain berupa:
   a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
   c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, Risalah Rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Melaksanakan dan memastikan penyimpanan dokumen kegiatan Dewan Komisaris dengan baik;
   e. menyusun rancangan berbagai laporan Dewan Komisaris;
   f. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   g. menyusun dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan Dewan Komisaris serta mempersiapkan sarana yang diperlukan; dan
   h. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.
2. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   b. bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola IFG;
   c. dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan IFG yang dilakukan oleh Direksi; dan
   d. mempersiapkan serta menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
3. Membuat dan mendistribusikan Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
5. Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretaris Melaksanakan tugas lain yaitu:
   a. memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip governansi perusahaan;
   b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta berkenaan dengan kegiatan IFG; dan
   c. mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
6. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk informasi-informasi lainnya yang oleh IFG belum diungkapkan kepada publik.

1. Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners, including:
   a. preparing for meetings, including Board of Commissioners' briefing sheets;
   b. preparing Minutes of the Board of Commissioners Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association;
   c. administering the Board of Commissioners' documents, including incoming letters, outgoing letters, Minutes of Meetings and other documents;
   d. carrying out and ensuring proper storage of documents of the Board of Commissioners' activities;
   e. drafting various Board of Commissioners reports;
   f. drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
   g. arranging and coordinating the schedule of activities of the Board of Commissioners and prepare the necessary facilities; and
   h. carrying out other duties of the Board of Commissioners.
2. Providing data/information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners relating to:
   a. monitoring the follow-up of decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners;
   b. administrative materials regarding the report/activities of the Board of Directors in managing IFG;
   c. administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendation from the Board of Commissioners in connection with IFG management activities by the Board of Directors; and
   d. Preparing and organizing the Board of Commissioners Meeting and meetings/meetings between the Board of Commissioners and Shareholders/Directors and other related parties, including briefing sheet of the Board of Commissioners.
3. Preparing and distributing the Minutes of the Board of Commissioners and Joint Meetings to all members of the Board of Commissioners.
4. As a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.
5. The Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretary conducts other duties such as:
   a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of corporate governance;
   b. providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested regarding IFG activities; and
   c. coordinating committee members, if necessary, to expedite the duties of the Board of Commissioners.
6. Maintaining the confidentiality of information in accordance with applicable regulations including other information that IFG has not disclosed to the public.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung serta membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite di bawahnya. Sepanjang tahun 2024, berbagai kegiatan telah dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan tanggung jawab tersebut, di antaranya:

Duties Implementation Report 2024

The Secretary of the Board of Commissioners has done its roles and responsibilities in supporting and assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners and its committees. Throughout 2024, various activities have been carried out as part of the fulfillment of these duties and responsibilities, including:

No.	Aktivitas Utama Main Activity	Deskripsi Description	Target	Realisasi Realization
1.	Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners/Supervisory Board	· Pengaturan jadwal rapat · Koordinasi dengan Manajemen dan Komite terkait untuk bahan rapat · Mempersiapkan undangan rapat, daftar hadir. · Scheduling meetings · Coordinating with management and relevant committees on meeting materials · Preparing meeting invitations and attendance lists.	100%	100%
2	Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan Preparing the Board of Commissioners' Minutes of Meetings in accordance with the Company's articles of association	· Risalah Rapat terdiri dari Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan. · Sepanjang tahun 2024 telah diadakan sebanyak dilakukan sebanyak 6 kali Rapat Dewan Komisaris dan 19 kali Rapat Gabungan. · Minutes of Meetings consist of Board of Commissioners meeting minutes and Joint Meeting minutes · Throughout 2024, there were 6 Board of Commissioners meetings and 19 Joint Meetings	100%	100%
3	Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, Risalah Rapat maupun dokumen lainnya Administering Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing correspondence, Minutes of Meetings and other documents	· Selama tahun 2024 dilakukan dokumentasi terhadap surat masuk dan surat keluar Dewan Komisaris. Tercatat jumlah surat Dewan Komisaris tahun 2024 adalah sebanyak 49 surat. · Untuk Risalah Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 Risalah dan Risalah Rapat Gabungan sebanyak 19 Risalah. · During 2024, documentation was conducted for incoming and outgoing letters of the Board of Commissioners. The total number of Board of Commissioners' letters in 2024 was 49 letters. · There were 6 Meeting Minutes for the Board of Commissioners' Meeting, and 19 Minutes for Joint Meetings' Minutes.	100%	100%
4	Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Preparing draft work plans and budgets for the Board of Commissioners	Dalam penyusunan RKA Dekom 2025, bahan dan data yang relevan disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. In preparing the 2025 Work Plan and Budget for Board of Commissioners, relevant materials and data were prepared by the Secretary of the Board of Commissioners.	100%	100%
5	Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris Preparing draft reports for the Board	Terkait dengan Laporan Dewan Komisaris disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan komite terkait Regarding the Board of Commissioners' Report, it was prepared by the Secretary of the Board of Commissioners in coordination with the relevant committee.	100%	100%
6	Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris Performing other duties assigned by the Board of Commissioners	Sekretaris Dewan Komisaris Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris yang umumnya Melaksanakan tugas *liaison officer* dengan *stakeholders* terkait. The Secretary of the Board of Commissioners conducted other assignments from the Board of Commissioners, which generally involved acting as a liaison officer with relevant stakeholders.	100%	100%

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Komite ini bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pelaporannya, dengan tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit mencakup aspek-aspek terkait informasi akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal , efektivitas audit oleh auditor eksternal dan internal , serta praktik aktuaria.

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners to support the implementation of the supervisory function. This committee works collectively and is independent, both in performing its duties and in reporting, with direct responsibility to the Board of Commissioners. The supervision conducted by the Audit Committee covers aspects related to accounting information and financial reporting, internal control systems, audit effectiveness by external and internal auditors, and actuarial practices.

PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE AUDIT

IFG menetapkan piagam sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen formal yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit sebagai komitmen dari Dewan Komisaris dalam usaha mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap IFG. Piagam Komite Audit ini harus digunakan dan dilaksanakan oleh Komite Audit dan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan IFG secara efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam Komite Audit ini merupakan acuan bagi Komite Audit dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan disosialisasikan kepada semua pihak terkait agar tercapai kerja sama dan koordinasi yang baik dalam membantu Dewan Komisaris Melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap IFG.

Piagam Komite Audit ini mencakup:
1. kode etik Komite Audit;
2. kewenangan Komite Audit;
3. tugas Komite Audit;
4. protokol komunikasi;
5. rapat Komite Audit;
6. rencana kerja Komite Audit;
7. evaluasi kinerja Komite Audit;
8. pelaporan Komite Audit; dan
9. dokumentasi Komite Audit.

WORK GUIDELINES: AUDIT COMMITTEE CHARTER

IFG established a charter as a work guideline for the Audit Committee through the Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2023 dated February 14, 2023. This Audit Committee Charter is a formal document that contains practical guidelines for the Audit Committee as a commitment from the Board of Commissioners to realize effective supervision of IFG. This Audit Committee Charter must be used and implemented by the Audit Committee and related parties to achieve IFG's objectives effectively, efficiently and in accordance with applicable laws and regulations and based on the principles of good corporate governance.

This Audit Committee Charter is a reference for the Audit Committee in doing its duties and responsibilities, and is disseminated to all relevant parties in order to achieve good cooperation and coordination in assisting the Board of Commissioners to carry out effective supervision of IFG.

This Audit Committee Charter includes:
1. Audit Committee code of conduct;
2. The authority of the Audit Committee;
3. duties of the Audit Committee;
4. communication protocol;
5. Audit Committee meetings;
6. Audit Committee work plan;
7. evaluation of the Audit Committee's performance;
8. Audit Committee reporting; and
9. Audit Committee documentation.

KRITERIA KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Kriteria dalam keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengawasan/pemeriksaan;

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP CRITERIA

The criteria for membership of the Audit Committee are as follows:
1. has good integrity and sufficient knowledge and work experience of at least 3 (three) years in the field of supervision/examination;

2. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap IFG;
3. mampu berkomunikasi dengan efektif;
4. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan; dan
6. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan.

2. has no personal interest/relationship that could have a negative impact and conflict of interest on IFG;
3. able to communicate effectively;
4. can provide sufficient time to complete the duties;
5. one of the Audit Committee members must have an independent background or have expertise in accounting or finance, and one of the Audit Committee members must understand the company's industry/business; and
6. other requirements set out in the Audit Committee charter, if required.

MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan
3. dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TERM OF OFFICE

The term of office of the Audit Committee is stipulated as follows:

1. The term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time;
2. Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners shall resign automatically as members of the Board of Commissioners at the end of their term of office; and
3. in the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Audit Committee stops serving as a member of the Board of Commissioners, then the chairman of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE AUDIT TAHUN 2024

Komite Audit IFG terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang anggota sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Adapun susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

TOTAL NUMBER, STRUCTURE AND COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE IN 2024

IFG Audit Committee consists of 1 (one) chairman and 3 (three) members as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Susunan Komite Audit
Composition of the Audit Committee

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period
Ketua/Komisaris Chairperson/ Commissioner	Fauzi Ichsan	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Decree of the Minister of SOEs Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Public Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.	30 Desember 2020 s.d. saat ini December 30, 2020- present	Ke-1 1st

Susunan Komite Audit
Composition of the Audit Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Anggota Member	Sumiyati	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Decree of the Minister of SOEs Number SK-254/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.	30 Juli 2021 s.d. saat ini July 30, 2021 -present	Ke-1 1st
Anggota Member	Masyita Crystallin	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Decree of the Minister of SOEs Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Public Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.	30 Desember 2020 s.d. saat ini December 30, 2020- present	Ke-1 1st
Anggota Member	Ika Istakariana	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit BPUI. Decree of the Board of Commissioners Number 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 dated May 24, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of BPUI.	24 Mei 2022 s.d. saat ini May 24, 2022- present	Ke-1 1st

PROFIL KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE PROFILE

Fauzi Ichsan
Ketua Komite Audit
Chairperson of the Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit, Fauzi Ichsan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairperson of the Audit Committee, Fauzi Ichsan has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Sumiyati
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Profil Anggota Komite Audit, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Audit Committee Member, Sumiyati has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Masyita Crystallin
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Profil Anggota Komite Audit, Masyita Crystallin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Audit Committee Member, Masyita Crystallin has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.

Ika Istakariana
Anggota Komite Audit
Menjabat sejak 24 Mei 2022
Audit Committee Member
Serving since May 24, 2022

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 7 September 1965
Indonesian citizen
Born on September 7, 1965

Domisili | Domicile
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia | Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Appointment History
Ika Istakariana menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
Ika Istakariana serves as a Member of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number 4/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 dated May 24, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Riwayat Pendidikan | Education History
- Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2007)
- Sarjana Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1994)
- Master's Degree in Accounting at University of Indonesia (2007)
- Bachelor's Degree in Accounting at STIE YAI Jakarta (1994)

Sertifikasi yang dimiliki | Certifications
- Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
- *Certified Fraud Examiners*
- Auditor Functional Position Certification
- Certified Fraud Examiners

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Pelaksana Inspektur Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
- Rikban Anggaran Wilayah 1.1 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
- Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
- Acting Budget Inspectoral General of the Ministry of Finance
- Regional Budget Assistant Auditor 1.1 Inspectoral General of the Ministry of Finance
- Junior Expert Auditor Inspectoral General Ministry of Finance

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Hubungan Afiliasi | Affiliation
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kriteria independensi Komite Audit tercantum dalam tabel berikut:

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without intervention from other parties that are not in accordance with the provisions of laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee independence criteria are listed in the following table:

Aspek Independensi Aspects Independence	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Masyita Crystallin (Anggota)** (Member)	**Ika Istakariana (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x

Aspek Independensi Aspects Independence	Fauzi Ichsan (Ketua) (Chairperson)	Sumiyati (Anggota) (Member)	Masyita Crystallin (Anggota) (Member)	Ika Istakariana (Anggota) (Member)
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x

v = ada (yes) | x = tidak ada (No)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Peran dan tanggung jawab Komite Audit seperti tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien.
2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi tentang penetapan auditor independen dan mengevaluasi kualifikasi, independensi, dan kinerjanya.
4. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
5. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan.
6. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite.
7. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara rutin dan dapat berlangsung jika dihadiri oleh minimal setengah dari jumlah anggota, sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan atau agenda yang telah disepakati sebelumnya. Setiap rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen atau risalah yang mencatat waktu, lokasi, agenda, peserta yang hadir, topik pembahasan, perbedaan pendapat (jika ada), serta keputusan yang diambil. Salinan notulen atau risalah tersebut disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The roles and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. Ensure that the Board of Directors develops and maintains an adequate, effective and efficient internal control system.
2. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from SKAI at least once in 1 (one) year.
3. Provide opinions and recommendations on the appointment of independent auditors and evaluate their qualifications, independence and performance.
4. Review audit reports and ensure the Board of Directors takes the necessary corrective actions expeditiously to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other issues identified and reported by SKAI.
5. Submit a report to the Board of Commissioners on each task performed, along with recommendations if necessary.
6. Make quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners, signed by the chairman and members of the committee.
7. Provide recommendations on improving the internal control system and its implementation.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Meeting Policy

The Audit Committee holds regular meetings and can take place if attended by at least half of the members, as stipulated in the Audit Committee Charter. Meetings are held based on invitations or agendas that have been agreed upon in advance. Each meeting is documented in the form of minutes or minutes that record the time, location, agenda, participants, topics of discussion, differences of opinion (if any), and decisions taken. A copy of the minutes is submitted to the Secretary of the Board of Commissioners for reporting to the Board of Commissioners.

Agenda dan Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat. Berikut disajikan agenda dan Risalah Rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam setiap rapat yang diselenggarakan.

Meeting Agenda and Recapitulation

Throughout 2024, the Audit Committee held 7 (seven) meetings. The following is presented the agenda and Minutes of Meetings, attendance list, and recapitulation of the level of attendance of Audit Committee members in each meeting held.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
21 Februari 2024 February 21, 2024	Ruang Rapat AKHLAK Lt. 27 Graha CIMB AKHLAK Meeting Room 27th Floor Graha CIMB	1. Pembahasan Konsep Revisi Pedoman Audit internal 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 3. *Current Issue Audit* (termasuk LHP yang telah diterbitkan pada tahun 2024) 4. Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023, PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, dan PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 1. Discussion of Draft Revision of Internal Audit Guidelines 2. Progress of Financial Statement Audit Year 2023 3. Current Issue Audit (including LHP that has been issued in 2024) 4. Evaluation of the Implementation of the Minister of SOE Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 Year 2023, PER-2/MBU/03/2023 Year 2023, and PER-3/MBU/03/2023 Year 2023
1 April 2024 April 1, 2024	Canton 108 Restaurant Canton 108 Restaurant	Pembahasan Progres Audit Laporan Keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun 2023 Discussion of the Progress of the Audit of the Financial Statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia Year 2023
19 April 2024 April 19, 2024	Ruang Rapat AKHLAK Lt. 27 Graha CIMB AKHLAK Meeting Room 27th Floor Graha CIMB	Rapat Pembahasan Permasalahan Signifikan pada Entitas Induk dan Anggota *Holding* Serta Penelaahan Sampling Meeting to Discuss Significant Issues in Parent and Subsidiary Entities and Review of Sampling
19 Juni 2024 June 19, 2024	*Online Meeting (Zoom)*	*Update Draft Roadmap* ICoFR IFG IFG ICoFR Draft Roadmap Update
21 Mei 2024 May 21, 2024	Ruang Kolaborasi I Lt. 28 Graha CIMB Collaboration Room I 28th Floor Graha CIMB	1. Evaluasi Pelaksanaan RKAT 2024 2. Finalisasi usulan Pedoman Strategis Audit Internal dan Piagam Audit Internal 3. *Update* Audit Laporan Keuangan IFG dan Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) 4. Update Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) SKAI 2025-2029 1. Evaluation of RKAT 2024 Implementation 2. Finalization of proposed Internal Audit Strategic Guidelines and Internal Audit Charter 3. IFG Financial Statement Audit Update and Procurement of Public Accounting Firm (KAP) 4. Update on SKAI's Proposed Company Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029
21 Agustus 2024 August 21, 2024	Ruang Dewan Komisaris Lt. 28 Graha CIMB AKHLAK Meeting Room 27th Floor Graha CIMB	1. Pengadaan KAP Tahun 2024 2. *Proactive Assurance* PSAK 117 Tahun 2024 1. KAP Procurement in 2024 2. Proactive Assurance PSAK 117 of 2024
22 Oktober 2024 October 22, 2024	Ruang Bima Lt. 9 Graha CIMB Bima Room 9th Floor Graha CIMB	1. Usulan Revisi RKAT Tahun 2024 2. Usulan RKAT dan RKAP 2025 3. Pelaksanaan QAIP 2025 4. *Update* Penugasan Signifikan 1. Proposed Revision of RKAT in 2024 2. Proposed RKAT and RKAP in 2025 3. QAIP 2025 Implementation 4. Significant Assignment Update

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat
Recapitulation of Audit Committee Attendance at Meetings

Nama Komite Audit Audit Committee Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Fauzi Ichsan	7	7	100 %
Sumiyati	7	7	100 %
Masyita Crystallin	7	5	71,43 %
Ika Istakariana	7	7	100 %

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

IFG melibatkan Komite Audit dalam program pengembangan kompetensi guna memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan. Informasi terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit dapat dilihat sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

IFG engages the Audit Committee in competency development programs to broaden their horizons and improve their knowledge. Information related to training and competency development of the Audit Committee can be seen below:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Trainings	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Fauzi Ichsan	Manajemen risiko Risk Management	Certified Risk Executive Leader	12-19 Februari 2024 February 12-19, 2024	BPKP Financial and Development Supervisory Board
	Manajemen risiko Risk Management	Qualified Risk Governance Professional	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Sumiyati	Manajemen risiko Risk Management	Qualified Risk Governance Professional	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
	Audit	Konferensi Auditor Internal 2024	10 Juli 2024 July 10, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Education Foundation Internal Audit
Masyita Crystallin	Manajemen risiko Risk Management	Qualified Risk Governance Professional	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Ika Istakriana	Manajemen risiko Risk Management	Certified Risk Executive Leader	3-17 Juni 2024 June 3-17, 2024	BPKP Financial and Development Supervisory Board

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMITE AUDIT

Penetapan jumlah remunerasi Komite Audit didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, ketentuan mengenai penghasilan anggota Komite secara internal telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG;
2. penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut; dan
3. anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

REMUNERATION POLICY FOR AUDIT COMMITTEE

The determination of the remuneration amount of the Audit Committee is based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Meanwhile, provisions regarding the income of Committee members internal ly have been regulated in the IFG Board of Commissioners' Charter with the following provisions:

1. The income of Audit Committee members is determined by the Board of Commissioners with due regard to IFG's capabilities;
2. the income of Audit Committee members in the form of honorarium is a maximum of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director, provided that taxes are borne by IFG and are not allowed to receive other income besides the honorarium; and
3. Members of the Board of Commissioners who serve as chairperson/member of the Audit Committee shall not be granted any additional income from such position in addition to their income as members of the Board of Commissioners.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2024

Komite Audit telah merancang rencana tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2024. Adapun realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit pada tahun 2024 meliputi:

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal dan audit ekstern:
   a. memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;
   b. memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk tindak lanjut keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
   c. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan auditor eksternal; dan
   d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
2. Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
3. Mengevaluasi kinerja SKAI:
   a. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; dan
   b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI dan penghargaan kinerja.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Internal BUMN Induk maupun Entitas Anggota *Holding*.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Internal BUMN Induk dan Audit Internal Entitas Anggota *Holding*.
6. Melakukan penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
7. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

The Audit Committee has designed a plan for its duties and responsibilities based on the Audit Committee Work Guidelines and the Audit Committee Work Program for 2024. The realization of the Audit Committee's duties in 2024 includes:

1. Reviewing monitoring and reviewing the effectiveness of internal and external audits:
   a. monitored and reviewed the effectiveness of the implementation of internal audit and external audit;
   b. ensured the credibility and objectivity of the SOE's financial reports to be issued to external parties and regulatory bodies, including follow-up on complaints and/or notes of impropriety against the reports during the Audit Committee's review period;
   c. ensured the Internal Audit Unit (SKAI) communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, and external auditors; and
   d. provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of the Internal Audit Unit.
2. Reviewed the audit report and together with the Board of Commissioners ensure that the Board of Directors takes the necessary corrective actions quickly to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations or other issues identified and reported by the Internal Audit Unit.
3. Evaluated the performance of the Internal Audit Unit:
   a. ensured the Internal Audit Unit upholds integrity in the performance of duties; and
   b. provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of the Internal Audit Unit annual remuneration and performance awards.
4. Monitored and evaluated the suitability of the implementation of financial policies and Internal Audit of Parent SOEs and Holding Members.
5. Provided recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and conformity between the Internal Audit policies of the Parent SOE and Internal Audit of Holding Members.
6. Assessed the adequacy of internal control and the implementation of the compliance function in an integrated manner.
7. Monitored and reviewed the financial reporting process audited by the external auditor.
8. Provided an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the external auditor on the services provided.
9. Provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants based on independence, scope of

jasa.
10. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal.
11. Memastikan auditor eksternal tidak melakukan pekerjaan non-asurans kecuali mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (*pre-concurrance*) dari Komite Audit.
12. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

RENCANA KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Komite Audit telah merancang program kerja untuk tahun 2025 guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

1. rapat dengan SKAI, membahas progres pelaksanaan RKA SKAI dan temuan audit, kendala dan upaya yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan RKA SKAI;
2. rapat dengan SKAI dan *Auditee* (Anggota *Holding* IFG) untuk membahas tindak lanjut hasil audit dari SKAI dan BPK, BPKP, Itjen Kementerian Keuangan serta upaya dan kendala yang dihadapi;
3. melakukan pembahasan dan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan secara bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
4. rapat dengan SKAI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membahas progres pelaksanaan dan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan IFG Tahun Buku 2024;
5. rapat dengan SKAI, Divisi Akuntansi dan Pelaporan IFG dan Anggota *Holding* dengan KAP untuk membahas Draf Final (*Audited*) Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2024;
6. Melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke unit usaha atau proyek perusahaan yang sedang berlangsung atas penugasan Dewan Komisaris;
7. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja KAP atas pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG dan Anggota *Holding* Tahun Buku 2024, dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris;
8. menyampaikan usulan penunjukan KAP untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG dan Anggota *Holding* Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris;
9. rapat dengan SKAI dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan IFG untuk persiapan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi IFG dan Anggota *Holding* Tahun Buku 2024;
10. menyusun Rencana Kerja Komite Audit tahun 2026 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
11. rapat dengan SKAI dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan IFG terkait progres implementasi ICOFR;

assignment, and service fees.
10. Evaluated the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by external auditors.
11. Ensured that the external auditor does not perform non-assurance work unless preapproved by the Audit Committee.
12. Reviewed the compliance with laws and regulations related to the Company's activities.

AUDIT COMMITTEE WORK PLAN IN 2025

The Audit Committee has designed a work program for 2025 to support the effectiveness of its duties, as follows:

1. meeting with the Internal Audit Unit, discussing the progress of the Internal Audit Unit's Work Plan and Budget implementation and audit findings, obstacles and efforts needed, related to the implementation of the Internal Audit Unit's Work Plan and Budget;
2. meetings with the Internal Audit Unit and Auditee (IFG Holding Members) to discuss the follow-up of audit results from with the Internal Audit Unit and BPK, BPKP, Inspectorate General of the Ministry of Finance as well as efforts and obstacles encountered;
3. discuss and review the company's financial statements and performance reports on a monthly basis and report the results to the Board of Commissioners;
4. meeting with the Internal Audit Unit and the Public Accounting Firm (KAP) to discuss the progress of the implementation and results of the KAP audit of IFG's Financial Statements for Fiscal Year 2024;
5. meeting with the Internal Audit Unit, IFG Accounting and Reporting Division and Holding Members with KAP to discuss the Final Draft (Audited) of Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024;
6. carry out field work visits to business units or ongoing company projects on assignment by the Board of Commissioners;
7. assess and evaluate the performance of KAP on the audit of the Consolidated Financial Statements of IFG and Holding Members for the Fiscal Year 2024, and submit the report to the Board of Commissioners;
8. submit the proposal for the appointment of KAP for the audit of the Consolidated Financial Statements of IFG and Holding Members for the Fiscal Year 2024 to the Board of Commissioners;
9. meeting with the Internal Audit Unit and IFG's Accounting and Reporting Division to prepare for the audit of IFG and Holding Members' Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2026;
10. develop the Audit Committee Work Plan for 2024 and submit it to the Board of Commissioners;
11. meeting with the Internal Audit Unit and IFG Accounting and Reporting Division regarding ICOFR implementation progress;

12. rapat dengan SKAI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membahas implementasi dan progres pelaksanaan PSAK 117 di IFG dan Anggota *Holding*;
13. menyusun Laporan Triwulanan tentang pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
14. mengikuti seminar, *workshop*, *training* terkait dengan tugas Komite Audit; dan
15. melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

12. meeting with the Internal Audit Unit and Public Accounting Firm (KAP) to discuss the implementation and progress of PSAK 117 implementation in IFG and Holding Members;
13. Prepare a Quarterly Report on the implementation of the Audit Committee's activities;
14. Attend seminars, workshops, training related to the duties of the Audit Committee; and
15. Carry out other duties of the Board of Commissioners.



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola perusahaan di lingkungan perusahaan. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sesuai dengan POJK Pasal 51 Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 23 Desember 2016 yang terakhir diubah dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 27 Desember 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perseroan Asuransi, Perseroan Asuransi Syariah, Perseroan Reasuransi, dan Perseroan Reasuransi Syariah tanggal 9 Desember 2014, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tanggal 22 Juli 2019.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota, termasuk seorang Ketua yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris, serta anggota lainnya yang berasal dari Komisaris Independen atau pejabat eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas SDM, atau perwakilan pegawai.

PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

IFG menetapkan piagam sebagai pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/SK-DEKOM/BPUI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024. Piagam ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas komite berjalan secara optimal, terarah, terpercaya, dan independen. Selain itu, perusahaan secara berkala meninjau kembali Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan dokumen tertulis yang menetapkan kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab komite. Selain itu, piagam ini juga mengatur batasan serta hubungan kerja antara Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Dewan Komisaris, manajemen, dan unit terkait lainnya.

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee based on Decree Number 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 dated April 20, 2020 as a form of implementation of corporate governance within the Company. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with POJK Article 51 Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies dated December 23, 2016 which was last amended by POJK Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies dated December 27, 2019, Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) Number 16/SEOJK.05/2014 concerning the Committee of the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies dated December 9, 2014, and Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.05/2019 concerning the Establishment, Membership Composition, and Term of Office of Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies dated July 22, 2019.

The Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, including a Chairperson who is also a member of the Board of Commissioners, and other members who come from Independent Commissioners or company executives responsible for Human Capital, or employee representatives.

WORK GUIDELINES: NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

IFG established a charter as a work guideline for the Nomination and Remuneration Committee through the Decree of the Board of Commissioners Number 09/SK-DEKOM/BPUI/III/2024 dated March 26, 2024. This charter aims to ensure that the committee's duties are optimized, directed, trusted and independent. In addition, the company periodically reviews the Nomination and Remuneration Committee Charter to ensure it is in line with the needs of the company, prevailing laws and regulations, and best practices in corporate governance.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is a written document that defines the position, authority, duties and responsibilities of the committee. In addition, this charter also regulates the boundaries and working relationships between the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Commissioners, management, and other relevant units.

MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur sebagai berikut:

1. masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan
3. dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite Nominasi dan Remunerasi harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TERM OF OFFICE

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners shall not exceed 3 (three) years and may be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time;
2. members of the nomination and remuneration committee who are members of the Board of Commissioners shall resign automatically as the member of the Board of Commissioners at the end of their term of office.
3. the event that any Member of the Board of Commissioners who serves as chairman of the Nomination and Remuneration Committee stops serving as a Member of the Board of Commissioners, the chairman of the Nomination and Remuneration Committee shall be replaced by another Member of the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) days.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Adapun komposisi dan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TOTAL NUMBER, STRUCTURE AND COMPOSITION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

The structure of the Nomination and Remuneration Committee consists of 1 (one) chairperson and 4 (four) members, as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024 concerning the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The composition of the Nomination and Remuneration Committee for 2024 is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis for Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period
Ketua Chairperson	Masyita Crystallin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Decree of the Board of Commissioners Number 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021	3 Tahun 9 Bulan 3 Years 9 Months	I
Anggota Member	Nasrudin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Decree of the Board of Commissioners Number 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021	3 Tahun 9 Bulan 3 Years 9 Months	I
Anggota Member	Sumiyati	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Decree of the Board of Commissioners Number 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021	3 Tahun 9 Bulan 3 Years 9 Months	I
Anggota Member	Wahyu Setyawan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree ofthe Board of Commissioners Number 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	3 Bulan 3 Months	I

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Anggota Member	Irham Dilmy	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 jo. 4/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 27 Februari 2025 Decree of the Board of Commissioners Number 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021 in conjunction with 4/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 27, 2025	3 Tahun 9 Bulan 3 Years 9 Month	II

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

Masyita Crystallin
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Menjabat sejak tahun 2021
Chairperson of Nomination and Remuneration Committee
Serving since 2021

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Masyita Crystallin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee, Masyita Crystallin has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Sumiyati
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Menjabat sejak tahun 2021
Member of Nomination and Remuneration Committee
Serving since 2021

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Nomination and Remuneration Committee Member, Nasrudin has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Nasrudin
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Menjabat sejak tahun 2021
Member of Nomination and Remuneration Committee
Serving since 2021

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Nasrudin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Nomination and Remuneration Committee Member, Nasrudin has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Wahyu Setyawan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Menjabat sejak tahun 2024
Member of Nomination and Remuneration Committee
Serving since 2024

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Wahyu Setyawan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Nomination and Remuneration Committee Member Wahyu Setyawan has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Irham Dilmy
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Menjabat sejak tahun 2022
Member of Nomination and Remuneration Committee
Serving since 2022

Data Pribadi | Personal Data
Warga Negara Indonesia

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Appointment History
Irham Dilmy menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.
Irham Dilmy serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number: 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021.

Riwayat Pendidikan | Education History
- Doctor in Business Administration, Universitas Indonesia
- Master Business Administration, American University – Kogod School of Business
- MA in International Relations dan BA in Political Science, Universitas Indonesia
- Doctor in Business Administration, University of Indonesia
- Master's Degree in Business Administration, American University - Kogod School of Business
- MA in International Relations and BA in Political Science, University of Indonesia

Sertifikasi yang dimiliki | Certifications
Certification of Competence, Human Resources Management Manager, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2019)

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Country Manager Indonesia - Pedersen & Partners
- Commitee Member, Remuneration & HR Development, Board of Commissioners – LPS RI
- Vice Chair & Commissioner - The Indonesian Civil Service Commission (ICSC)
- Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)
- Country Manager Indonesia - Pedersen & Partners
- Commitee Member, Remuneration & HR Development, Board of Commissioners - LPS RI
- Vice Chair & Commissioner - The Indonesian Civil Service Commission (ICSC)
- Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)
Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)

Hubungan Afiliasi | Afiliation Relationship
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, independen, serta terbebas dari intervensi pihak mana pun yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, kriteria independensi komite ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

INDEPENDENCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee conducts its functions and duties professionally, independently, and free from the intervention of any party that is not in line with the provisions of laws and regulations. In accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, the criteria for independence of this committee can be described as follows:

Aspek Independensi Aspects Independence	**Masyita Crystallin (Ketua)** (Chairperson)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Irham Dilmy (Anggota)** (Member)	**Wahyu Setyawan (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company	x	x	x	x	x

Aspek Independensi Aspects Independence	**Masyita Crystallin (Ketua)** (Chairperson)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Irham Dilmy (Anggota)** (Member)	**Wahyu Setyawan (Anggota)** (Member)
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi IFG adalah sebagai berikut:

1. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan;
2. membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite;
3. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi;
5. menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
7. melakukan evaluasi terhadap calon wakil perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anggota *Holding*, sebelum diajukan kepada RUPS; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Rapat

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala, dengan ketentuan bahwa rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota komite, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat dilaksanakan

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, the roles and responsibilities of IFG's Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. submit a report to the Board of Commissioners on each task performed, along with recommendations if necessary;
2. make quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners, signed by the chairman and members of the committee;
3. prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. evaluate the KPI proposals of individual members of the Board of Directors;
5. prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. evaluate the remuneration policy for employees that require approval/response from the Board of Commissioners;
7. evaluate candidates for company representatives who shall be proposed as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of holding members, before being submitted to the GMS; and
8. carry out other duties assigned by the Board of Commissioners to the extent not in conflict with applicable regulations.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

Meeting Policy

The Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings, provided that the meeting can be held if attended by at least ½ (one-half) of the committee members, as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. Meetings are held

berdasarkan undangan atau agenda yang telah disepakati sebelumnya. Setiap rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen atau risalah yang mencatat waktu, tempat, agenda, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (jika ada), serta keputusan yang diambil. Salinan notulen atau Risalah Rapat kemudian disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Dewan Komisaris.

Agenda dan Rekapitulasi Rapat

Hingga 31 Desember 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disajikan agenda rapat, tingkat kehadiran anggota, serta rekapitulasi kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam setiap pertemuan tersebut.

based on invitations or agendas that have been agreed upon in advance. Each meeting is documented in the form of minutes or minutes that record the time, place, agenda, participants present, topics discussed, differences of opinion (if any), and decisions taken. A copy of the minutes is then submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be forwarded to the Board of Commissioners.

Meeting Agenda and Recapitulation

As of December 31, 2024, the Nomination and Remuneration Committee has held 3 (three) meetings. The following are the meeting agenda, attendance rate of members, and recapitulation of attendance.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Minutes and Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda
1.	3 April 2024 April 3, 2024	Ruang Dewan Komisaris Lt. 28 Graha CIMB Board of Commissioners Room 28th Floor Graha CIMB	Pembahasan Penilaian Top 20% BOD-1 dan Direksi Existing Discussion on Top 20% Assessment of BOD-1 and Existing Directors
2.	7 Mei 2024 May 7, 2024	*Online Meeting* (Zoom)	Usulan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia Proposed Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia
3.	27 Desember 2024 December 27, 2024	*Online Meeting* (Zoom)	Pembahasan Usulan Calon Komisaris pada PT Bahana Kapital Investa dan PT Bahana Mitra Investa Discussion of Proposed Commissioner Candidates at PT Bahana Kapital Investa and PT Bahana Mitra Investa

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat
Recapitulation of Attendance of Nomination and Remuneration Committee at Meetings

Nama Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Name of Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Masyita Crystallin	3	3	100%
Nasrudin	3	3	100%
Sumiyati	3	3	100%
Wahyu Setyawan*	1	1	100%
Irham Dilmy	3	3	100%
Rata-rata Average			**100%**

*) Keterangan: Bergabung sejak 19 September 2024
*) Remarks: Joined on September 19, 2024

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Penetapan jumlah remunerasi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, penghasilan anggota komite secara internal diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG, dengan ketentuan sebagai berikut:

REMUNERATION POLICY FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The determination of the amount of remuneration for the Nomination and Remuneration Committee refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Meanwhile, the income of committee members is internal ly regulated in the IFG Board of Commissioners' Charter, with the following provisions:

1. penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG; dan
2. besaran honorarium anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

1. the income of the Nomination and Remuneration Committee members shall be determined by the Board of Commissioners with due regard to IFG's ability; and
2. the amount of honorarium for nomination and remuneration committee members is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's salary, provided that the tax is borne by IFG and they are not allowed to receive other income besides the honorarium.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

IFG melibatkan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam program pengembangan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka. Informasi mengenai pelatihan serta peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

IFG involves the Nomination and Remuneration Committee in competency development programs to improve their insight and knowledge. Information regarding training and competency development of the Nomination and Remuneration Committee can be seen below:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Waktu Pelaksanaan**	**Penyelenggara** Organizer
Masyita Crystallin	Manajemen risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Nasrudin	Manajemen risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Nasrudin	Akuntansi Accounting	*Chartered Accountant*	16 Mei-13 Juli 2024 May 16-July 13, 2024	IAI
Sumiyati	Manajemen risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Sumiyati	Audit	*Konferensi Auditor Internal 2024*	10 Juli 2024 July 10, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Wahyu Setyawan	Manajemen risiko Risk management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Wahyu Setyawan	Kepatuhan Compliance	*Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs*	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	CRMS
Irham Dilmy	-	-	-	-

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2024

The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities based on the Committee Charter and the established Work Program. The realization of the duties of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2024 is as follows:

1. evaluated the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;

2. melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
3. melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding*, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
4. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan
6. melakukan evaluasi atas Direksi *existing* sebagai *top talent* IFG.

RENCANA KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun rencana program kerja untuk tahun 2025, sebagai berikut:

1. melakukan tinjauan secara berkala atas sistem manajemen talenta IFG serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya;
2. melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi IFG;
3. melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta terseleksi (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar talenta ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri BUMN;
4. melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota *Holding* yang diajukan oleh Direksi sebelum diajukan kepada RUPS;
5. melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi;
6. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. melakukan evaluasi atas usulan Direksi IFG mengenai struktur organisasi IFG; dan
9. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.

2. validated and calibrated the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board (Selected Talent), to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (Nominated Talent);
3. evaluated the candidates of the company's representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of holding members, before being submitted to the GMS/Minister;
4. prepared a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
5. evaluated the remuneration policy for employees that require approval/response from the Board of Commissioners/Supervisory Board; and
6. evaluated the existing Directors as IFG's top talent.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK PLAN 2025

To increase the effectiveness in performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has developed a work program plan for 2025, as follows:

1. periodic review of IFG's talent management system and monitoring and evaluation of its implementation;
2. evaluate the talent classification system and procedures conducted by the IFG Board of Directors;
3. validate and calibrate the selected talents to produce a list of nominated talents that are nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister of SOEs;
4. evaluate candidates for members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of holding members proposed by the Board of Directors before being submitted to the GMS;
5. evaluate the KPI proposals of individual members of the Board of Directors;
6. prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
7. prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
8. evaluate the IFG Board of Directors' proposal regarding IFG's organizational structure; and
9. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure of remuneration, policies on remuneration and the amount of remuneration.

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan yang memadai atas manajemen risiko, penerapan tata kelola, kepatuhan, dan etika. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring Committee is a committee established by the Board of Commissioners to provide adequate oversight of risk management, governance implementation, compliance and ethics. The Risk Monitoring Committee works collectively and is independent both in performing its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

IFG telah menetapkan piagam sebagai pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 12/SK-DEKOM/BPUI/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024. Piagam ini disusun untuk mendukung dan sebagai acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu, IFG secara berkala meninjau kembali Piagam Komite Pemantau Risiko guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam Tata Kelola Perusahaan.

Piagam Komite Pemantau Risiko merupakan dokumen tertulis yang menetapkan kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab komite. Selain itu, piagam ini juga mengatur batasan serta hubungan kerja antara Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris, Manajemen Perusahaan, dan unit terkait lainnya.

WORK GUIDELINES: RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

IFG has established a charter as a work guideline for the Risk Monitoring Committee through the Decree of the Board of Commissioners Number 12/SK-DEKOM/BPUI/VI/2024 dated June 04, 2024. This charter is prepared to support and serve as a reference for the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties, authorities and responsibilities. In addition, IFG periodically reviews the Risk Monitoring Committee Charter to ensure its suitability with the company's needs, prevailing laws and regulations, and best practices in corporate governance.

The Risk Monitoring Committee Charter is a written document that defines the position, authority, duties and responsibilities of the committee. In addition, this charter also regulates the boundaries and working relationships between the Risk Monitoring Committee and the Board of Commissioners, Company Management, and other relevant units.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko diatur sebagai berikut:

1. masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan

3. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua komite berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka ketua komite harus diganti oleh Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TERM OF OFFICE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The term of office of the Risk Monitoring Committee is as follows:

1. The term of office of members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners shall not exceed 3 (three) years and may be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time;
2. the term of office of a member of the Risk Monitoring Committee who is a member of the Board of Commissioners shall resign automatically as the member of the Board of Commissioners at the end of their term of office; and
3. in the event that a member of the Board of Commissioners who serves as chairperson of the committee stop serving as a member of the Board of Commissioners, the chairperson of the committee shall be replaced by another Independent Commissioner within 30 (thirty) days at the latest.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang anggota sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024. Adapun susunan Komite Pemantau Risiko di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TOTAL NUMBER, STRUCTURE AND COMPOSITION OF RISK MONITORING COMMITTEE IN 2024

The composition of the Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) chairperson and 5 (five) members as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024. The composition of the Risk Monitoring Committee in 2024 is as follows:

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis for Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period
Ketua Chairperson	Nasrudin**	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 2/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 2/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021 in conjunction with Decree of the Board of Commissioners Number 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	3 Tahun 8 Bulan 3 Years 8 Months	I
Anggota Member	Hotbonar Sinaga	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021 in conjunction with Decree of the Board of Commissioners Number 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	3 Tahun 8 Bulan 3 Years 8 Months	I
Anggota Member	Sumiyati	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	3 Bulan 3 Months	I
Anggota Member	Wahyu Setyawan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	3 Bulan 3 Months	I
Anggota Member	Dewi Gayatri***	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 Decree of the Board of Commissioners Number: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021	3 Tahun 3 Years	I
Anggota Member	Fajar Proboseno	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners Number: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021 in conjunction with Decree of the Board of Commissioners Number 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024	3 Tahun 8 Bulan 3 Years 8 Months	II
Anggota Member	Gresika Bunga Sylvana	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024	7 Bulan 7 Months	I

Keterangan:
*) Sebelumnya disebut sebagai Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Efektif berubah pada 5 Februari 2025 sehubungan dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi.
**) Sdr. Nasrudin sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berlaku sejak 19 September 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024, sebelumnya diketuai oleh Sdr. Hotbonar Sinaga.
***) Berakhir pada 1 April 2024.
Remark:
*) Previously referred to as the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee. Effectively changed on February 5, 2025 due to the establishment of the Integrated Governance Committee.
**) Mr. Nasrudin as Chairperson of the Risk Monitoring Committee effective from September 19, 2024 in accordance with the Decree of the Board of Commissioners Number 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024, previously chaired by Mr. Hotbonar Sinaga.
***) Ends on April 1, 2024.

Nasrudin
Ketua Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 19 September 2024
Chairperson of the Risk Monitoring Committee
Serving since September 19, 2024

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko, Nasrudin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
The profile of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee, Nasrudin, has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Hotbonar Sinaga
Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 19 September 2024
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since September 19, 2024

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Hotbonar Sinaga telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
The profile of Risk Monitoring Committee Member Hotbonar Sinaga has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Sumiyati
Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 19 September 2024
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since September 19, 2024

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
The profile of Risk Monitoring Committee Member, Sumiyati has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report

Wahyu Setyawan
Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 19 September 2024
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since September 19, 2024

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Wahyu Setyawan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
The profile of Risk Monitoring Committee Member Wahyu Setyawan has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Fadjar Proboseno
Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 3 Mei 2024
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since May 3, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 5 September 1971

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024

Riwayat Pendidikan
- Lulusan *Personal Computer Technician and Network System* di Pennsylvania College of Technology, USA (1997),
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (2002).

Riwayat Pekerjaan
Memiliki pengalaman sebagai konsultan Manajemen Risiko selama 13 tahun dengan klien diberbagai industri dan sektor, di antaranya OJK, Bank Indonesia, BEI, dan berbagai perusahaan jasa keuangan baik asuransi maupun pembiayaan di Indonesia, serta berbagai perusahaan lain di sektor riil dan sektor publik. Salah satu pengalaman Fadjar Bekerja di Astra Internasional (*Holding*) selama 5 (lima) tahun, diantaranya menjabat sebagai Kepala Manajemen Risiko yang mengawasi berjalannya Manajemen Risiko Korporasi dengan 198 Anggota *Holding* di berbagai sektor, terutama di sektor keuangan.

Sertifikasi yang dimiliki
- *CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)*
- *ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)*
- *QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi*
- *Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *QRMP (Qualified Risk Management Professional) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *CRMP (Certified Risk Management Professional) BNSP – LSPMR (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko)*
- *CCIA (Certified Chief Internal Audit) BNSP – LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *CIAL (Certtified Internal Audit Leader) BNSP – LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *CCCO (Certified Chief Compliance Officer) BNSP – LSP*

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on September 5, 1971

Domicile
Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021 in conjunction with Decree of the Board of Commissioners Number 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024

Education History
- Graduate of Personal Computer Technician and Network System at Pennsylvania College of Technology, USA (1997),
- Bachelor's Degree in Economics from Satya Wacana Christian University, Salatiga (2002).

Work History
He has experience as a Risk Management consultant for 13 years with clients in various industries and sectors, including OJK, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange, and various financial services companies both insurance and financing in Indonesia, as well as various other companies in the real sector and public sector. One of Fadjar's experiences was working at Astra International (Holding) for 5 (five) years, including serving as Head of Risk Management overseeing the running of Corporate Risk Management with 198 holding members in various sectors, especially in the financial sector.

Certifications
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute)
- Mitra Kalyana Sejahtera)
- QRMP (Qualified Risk Management Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- CRMP (Certified Risk Management Professional) BNSP - LSPMR (Risk Management Professional Certification Institute)
- CCIA (Certified Chief Internal Audit) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute Mitra Kalyana Sejahtera)
- CIAL (Certtified Internal Audit Leader) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute Mitra Kalyana Sejahtera)
- CCCO (Certified Chief Compliance Officer) BNSP - LSP

Concurrent Position
None

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Gresika Bunga Sylvana

Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 3 Mei 2024
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since May 3, 2024

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Kelahiran 9 Oktober 1991

Domisili

Jalan Melon III, Blok S I, Perumahan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Indonesia, 17131

Riwayat Penunjukan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024

Riwayat Pendidikan

- S1 – Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (*Cumlaude*)
- S2 – *Risk Management*, The City University of New York, Amerika Serikat (*Cumlaude*)

Riwayat Pekerjaan

- (2023 s.d. saat ini) Ketua Tim Audit/Audit Team Leader, Kementerian Keuangan
- Memimpin audit/pengawasan BUMN, BLU, SMV, serta kebijakan fiskal, *compliance*, keuangan dan manajemen risiko.
- (2018-2023) Auditor, Kementerian Keuangan
- Menyusun berbagai Pedoman audit/pengawasan termasuk diantaranya Pedoman Audit Kinerja *(Performance Audit), Risk Management Maturity Level*, melakukan pengawasan terkait BUMN, BLU, SMV, serta kebijakan fiskal, *compliance*, keuangan dan manajemen risiko.
- (2015-2018) Pelaksana Keuangan, Inspektorat VII, Kementerian Keuangan
- (2014-2015) Business Planning & Commercial Analyst, PT Coca Cola Amatil Indonesia
- (2012-2013) Monetary & Payment System Research Assistant, Bank Indonesia

Sertifikasi yang dimiliki

- *Certified Risk Associate (CRA) - Risk Management Professional Certification*
- *Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA)*

Organisasi Profesi

- Deputy Chair of Professional Development Committee [2023 - Now]
- Indonesian Internal Auditor Professional Institute (PAII)
- Member [2021 - Now]
- Indonesian Risk Management Professional Association
- Member [2020 - Now]
- The Institute of Internal Auditors Indonesia

Rangkap Jabatan

Audit Team Leader/Ketua Tim Audit, Kementerian Keuangan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data

Indonesian citizen
Born on October 9, 1991

Domicile

Jalan Melon III, Blok S I, Harapan Indah Housing Complex, Pejuang Sub-District, Medan Satria District, Bekasi City, Indonesia, 17131

Appointment History

Decree of the Board of Commissioners Number 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024

Education History

- Bachelor's Degree- Accounting, Gadjah Mada University, Indonesia (Cumlaude)
- Master's Degree - Risk Management, The City University of New York, USA (Cumlaude)

Work History

- (2023- present) Audit Team Leader/Audit Team Leader, Ministry of Finance
- Lead the audit/supervision of SOEs, Public Service Agency (BLU), SMV, as well as fiscal policy, compliance, finance and risk management.
- (2018-2023) Auditor, Ministry of Finance
- Developing various audit/supervision guidelines including Performance Audit Guidelines, Risk Management Maturity Level, conducting supervision related to SOEs, Public Service Agency (BLU), SMV, as well as fiscal policy, compliance, finance and risk management.
- (2015-2018) Financial Executive, Inspectorate VII, Ministry of Finance
- (2014-2015) Business Planning & Commercial Analyst, PT Coca Cola Amatil Indonesia
- (2012-2013) Monetary & Payment System Research Assistant, Bank Indonesia

Certifications

- Certified Risk Associate (CRA) - Risk Management Professional Certification
- Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA)

Professional Organization

- Deputy Chair of Professional Development Committee [2023 - Present]
- Indonesian Internal Auditor Professional Institute (PAII)
- Member [2021 - Present]
- Indonesian Risk Management Professional Association
- Member [2020 - Present]
- The Institute of Internal Auditors Indonesia

Concurrent Position

Audit Team Leader, Ministry of Finance

Afiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Dewi Gayatri*
Anggota Komite Pemantau Risiko
Menjabat sejak 1 April 2021
Member of Risk Monitoring Committee
Serving since April 1, 2021

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 16 April 1978

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 2/SK-Dekom/BPUI/IV/2021

Riwayat Pendidikan
- S1 Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2000)
-
- S2 *Master of Business Administration* (MBA) dari Universitas Gadjah Mada (2011)
- Saat ini tengah menyelesaikan studi *Master of Commerce* di University New South Wales.

Riwayat Pekerjaan
Beliau resmi menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2021. Dewi Gayatri mempunyai pengalaman di Perbankan selama 14 (empat belas) tahun, baik di bank BUMN (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Maupun beberapa bank asing (PT. Bank Commowealth Indonesia dan PT. Bank UOB Indonesia). Beberapa area pekerjaan antara lain: Business Unit, Credit Risk Management, Capital Management, dan Portfolio Risk Management. Jabatan terakhir adalah VP pada IFS Portfolio Management Head di PT. Bank UOB Indonesia. Kemudian selama 6 (enam) tahun berperan di *Enterprise Risk Management* LPS dengan melakukan pengembangan *Risk Management Framework* termasuk pengembangan kebijakan, *tools, system, risk culture,* dan *Business Continuity* Management (BCM) dengan posisi terakhir adalah Direktur Group Manajemen Risiko Lembaga (*Enterprise Risk Management).*

Sertifikasi yang dimiliki
- *CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)*
- *QRMP (Qualified Risk Governance Professional), BNSP – LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)*
- *ERMCP (Enterprise Risk Mangement Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)*
- Sertifikasi Risiko Perbankan (Bank *Risk Management*) Level 4, LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)
- Sertifikasi Manajemen Risiko (Bank *Risk Management*) Level 4, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
- Sertifikasi Risiko Perbankan (Bank *Risk Management*) Level 3, LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)
- Sertifikasi Manajemen Risiko (Bank *Risk Management*) Level 2, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
- Sertifikasi Manajemen Risiko (Bank *Risk Management*) Level 1, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

*) Berakhir pada 1 April 2024

Personal Data
Indonesian citizen
Born on April 16, 1978

Domicile
Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 2/SK-Dekom/BPUI/IV/2021

Education History
- Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from Bogor Agricultural University (2000)
- Master of Business Administration (MBA) from Gadjah Mada University (2011)
- She is currently completing her Master of Commerce studies at the University of New South Wales.

Work History
She officially became a member of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee in 2021. Dewi Gayatri has 14 (fourteen) years of experience in Banking, both in state-owned banks (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. As well as several foreign banks (PT. Bank Commowealth Indonesia and PT. Bank UOB Indonesia). Some areas of work include: Business Unit, Credit Risk Management, Capital Management, and Portfolio Risk Management. Her last position was VP at IFS Portfolio Management Head at PT Bank UOB Indonesia. Then for 6 (six) years she played a role in LPS Enterprise Risk Management by developing the Risk Management Framework including the development of policies, tools, systems, risk culture, and Business Continuity Management (BCM) with the last position being Director of the Institutional Risk Management Group (Enterprise Risk Management).

Certifications
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- QRMP (Qualified Risk Governance Professional), BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- ERMCP (Enterprise Risk Mangement Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- Banking Risk Certification (Bank Risk Management) Level 4, LSPP (Banking Profession Certification Institute)
- Risk Management Certification (Bank Risk Management) Level 4, BSMR (Risk Management Certification Board)
- Banking Risk Certification (Bank Risk Management) Level 3, LSPP (Banking Profession Certification Institute)
- Risk Management Certification (Bank Risk Management) Level 2, BSMR (Risk Management Certification Board)
- Risk Management Certification (Bank Risk Management) Level 1, BSMR (Risk Management Certification Board.

Concurrent Position
None

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Ends on April 1, 2024

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko menjalankan fungsi dan tugasnya dengan profesionalisme dan independensi, tanpa pengaruh dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, kriteria independensi komite mencakup hal-hal berikut:

INDEPENDENCE OF RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee carries out its functions and duties with professionalism and independence, without influence from other parties that contradicts the laws and regulations. Based on the Risk Monitoring Committee Charter, the committee's independence criteria include the following:

Aspek Independensi Aspects Independence	**Nasrudin (Ketua)** Chairman	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** Members	**Sumiyati (Anggota)** Members	**Wahyu Setyawan (Anggota)** Members	**Fajar Proboseno (Anggota)** Members	**Gresika Bunga Sylvana (Anggota)** Members	**Dewi Gayatri (Anggota)** Members
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company	x	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

IFG telah mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan etika di lingkungan IFG dan Anggota *Holding*;
2. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala terutama apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
3. memastikan terlaksananya proses dan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan efektif di dalam IFG dan Anggota *Holding*;

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

IFG has set out the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as follows:

1. support the Board of Commissioners in supervising and evaluating the implementation of governance, risk management, compliance and ethics within IFG and its holding members;
2. evaluate risk management policies periodically, especially if there are changes in factors that significantly affect business activities;
3. ensure the implementation of comprehensive and effective risk management processes and systems within IFG and its holding members;

4. menerima informasi dan melakukan pengawasan terkait dengan:
   a. selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
   b. potensi, limit dan indikator pendorong risiko;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko IFG;
6. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan; dan
7. membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite.

4. receive information and conduct supervision related to:
   a. risk appetite and risk tolerance;
   b. potential, limits and indicators of risk drivers;
5. monitor and evaluate the suitability of the implementation of IFG's risk management policies and strategies;
6. submit a report to the Board of Commissioners on each task performed, along with recommendations if necessary; and
7. make quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners, signed by the chairman and members of the committee.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

RISK MONITORING COMMITTEE MEETING

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee held 9 (nine) meetings with the following details:

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1.	11 Januari 2024 January 11, 2024	Pendalaman Implementasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi IFG In-Depth Implementation of IFG Integrated Governance Policy
2.	18 April 2024 April 18, 2024	Pembahasan Data Kebijakan, Evaluasi dan Masukan Ambang Batas Transaksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Anggota *Holding* Discussion of Policy Data, Evaluation and Input on Transaction Threshold of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Holding Members
3.	22 Mei 2024 May 22, 2024	Pembahasan Analisa Risiko dalam RJPP IFG Tahun 2025 – 2029 Discussion of Risk Analysis in IFG RJPP Year 2025 - 2029
4.	27 Juni 2024 June 27, 2024	Pembahasan Dokumen Rencana Darurat Keuangan (*Financial Contingency Plan*) IFG Discussion of IFG's Financial Contingency Plan Document
5.	3 September 2024 September 3, 2024	Analisis *Top* 3 *Risk* IFG IFG Top 3 Risk Analysis
6.	6 September 2024 September 6, 2024	· Laporan Risiko IFG Semester I Tahun 2024 · Laporan Risiko Anggota *Holding*: Askrindo · Draf Laporan *Risk Maturity Indeks* (RMI) 2023 IFG · *Loss Event Database* IFG · IFG Risk Report Semester I Year 2024 · Holding Member Risk Report: Askrindo · IFG Draft 2023 Risk Maturity Index (RMI) Report · IFG Loss Event Database
7.	25 September 2024 September 25, 2024	*Update* Draf Laporan hasil penilaian *Risk Maturity Indeks* (RMI) IFG Tahun 2024 Update Draft Report on Risk Maturity Index (RMI) assessment results IFG in 2024
8.	1 November 2024 November 1, 2024	Pembahasan *Risk Composite* Risk Composite Discussion
9.	10 Desember 2024 December 10, 2024	Rapat Pembahasan Laporan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-bribery Management System (SMAP) Implementation Report Discussion Meeting

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko
Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance

Nama Komite Nominasi dan Remunerasi Name of Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Nasrudin	9	9	100%
Hotbonar Sinaga*	9	-	-
Sumiyati**	4	4	100%

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko
Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance

Nama Komite Nominasi dan Remunerasi Name of Nomination and Remuneration Committee	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Attendance Percentage
Wahyu Setyawan**	4	4	100%
Dewi Gayatri***	1	1	100%
Fajar Proboseno	9	9	100%
Gresika Bunga Sylvania****	6	6	100%
Rata-rata Average			**100%**

Keterangan:
*) Dalam kondisi sakit
**) Bergabung sejak 19 September 2024
***) Berakhir pada 1 April 2024
****) Bergabung pada 3 Mei 2024
Description:
*) unable to attend due to illness
**) Joined since September 19, 2024
***) Ends on April 1, 2024
****) Joined since May 3, 2024

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Jumlah remunerasi Komite Pemantau Risiko ditentukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun penghasilan anggota Komite secara internal diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG, yakni penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG; dan
2. besaran honorarium anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

REMUNERATION POLICY FOR RISK MONITORING COMMITTEE

The remuneration amount of the Risk Monitoring Committee is determined by referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. As for the income of Committee members internally, it is regulated in the IFG Board of Commissioners Guidelines and Rules of Procedure, namely the income of members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is regulated with the following provisions:

1. the income of the members of the Risk Monitoring Committee shall be determined by the Board of Commissioners with due regard to IFG's ability; and
2. The amount of honorarium for members of the Risk Monitoring Committee is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director with the provision of taxes borne by IFG and is not allowed to receive other income besides the honorarium.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

IFG melibatkan Komite Pemantau Risiko dalam program pengembangan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Informasi terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi komite dapat dilihat sebagai berikut:

RISK MONITORING COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

IFG engages the Risk Monitoring Committee in competency development programs to enhance insight and knowledge. Information related to training and competency development of the committee is summarized as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Nasrudin	Manajemen risiko Risk Management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Nasrudin	Akuntansi Accounting	*Chartered Accountant*	16 Mei-13 Juli 2024 May 16-July 13, 2024	IAI
Sumiyati	Manajemen risiko Risk Management	*Qualified Risk Governance Professional*	6 Maret 2024 March 6, 2024	CRMS
Sumiyati	Audit	Konferensi Auditor Internal 2024 Internal Auditor Conference 2024	10 Juli 2024 July 10, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Education Foundation Internal Audit
Fadjar Proboseno	Manajemen risiko Risk Management	*Certified Risk Executive Leader*	3-17 Juni 2024 June 3-17, 2024	BPKP Financial and Development Supervisory Board
Gresika Bunga Sylvana	Audit	Pelatihan Praktik Audit Kinerja dalam Rangka Penguatan Pengawasan Training on Performance Audit Practices in the Context of Strengthening Supervision	19-20 Maret 2024 March 19-20, 2024	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Gresika Bunga Sylvana	Audit	*Certified Fraud Examiners*	4-8 November 2024 November 4-8, 2024	ACFE

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan tugas komite selama tahun 2024 mencakup:

1. melakukan pembahasan dan reviu atas beberapa usulan draf kebijakan atau laporan terkait pengelolaan risiko seperti metodologi *risk composite*, Laporan *Risk Maturity Index* (RMI) IFG Tahun 2024, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di IFG;
2. telah dibahas data kebijakan, termasuk evaluasi serta masukan terkait ambang batas transaksi di IFG dan Anggota *Holding*;
3. telah dilakukan pembahasan analisa risiko yang akan diintegrasikan dalam RJPP IFG tahun 2025–2029;
4. telah dibahas dan dikaji dokumen Rencana Darurat Keuangan (*Financial Contingency Plan*) IFG;
5. telah dilakukan analisis terhadap tiga risiko utama yang dihadapi IFG;
6. telah dipaparkan dan dibahas Laporan Risiko IFG Semester I Tahun 2024;
7. telah disampaikan Laporan Risiko Anggota *Holding*, khususnya dari Askrindo;

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE IN 2024

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Committee Charter and the established Work Program. The realization of the committee's duties during 2024 included:

1. discussed and reviewed several proposed draft policies or reports related to risk management such as risk composite methodology, IFG Risk Maturity Index (RMI) Report Year 2024, implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) in IFG;
2. Policy data was discussed, including evaluation and feedback on transaction thresholds in IFG and its holding members;
3. There has been a discussion on risk analysis that will be integrated in IFG's RJPP 2025-2029;
4. IFG's Financial Contingency Plan document was discussed and reviewed;
5. three key risks facing IFG have been analyzed;
6. The IFG Risk Report for the first semester of 2024 was presented and discussed;
7. Holding Member Risk Reports have been submitted, particularly from Askrindo;

8. telah dikaji *draft* Laporan *Risk Maturity Index* (RMI) tahun 2023 IFG;
9. telah dilakukan pembahasan terhadap *Loss Event Database* IFG untuk melihat pola dan potensi risiko berulang;
10. aktif melakukan diskusi dengan Dewan Komisaris terkait risiko-risiko utama perusahaan, usulan aksi korporasi, usulan RKAP berbasis risiko, dan lainnya;
11. menyusun Rencana Kerja Pemantau Risiko tahun 2026 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Secara umum, kegiatan Komite Pemantau Risiko terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kegiatan rutin dan non-rutin. Berikut adalah rencana kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2025:

1. rapat dengan Divisi Manajemen Risiko membahas pengawasan dan melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko baik dalam bentuk Profil Risiko Terintegrasi maupun pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko lainnya;
2. rapat dengan unit kerja terkait untuk membahas pengelolaan RBC/*Gearing Ratio* (GR) perusahaan;
3. rapat dengan unit kerja terkait untuk membahas identifikasi dan pengelolaan risiko pada instrumen investasi, likuiditas, dan terkait *asset and liabilities management*;
4. melakukan pembahasan dan reviu atas Laporan *Risk Maturity Index* (RMI) perusahaan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
5. rapat dengan Divisi Manajemen Risiko untuk melakukan pembahasan dan reviu atas laporan *key risk monitoring* dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
6. melakukan pembahasan dan reviu dengan unit kerja terkait mengenai pengelolaan *business continuity management* perusahaan;
7. melakukan pembahasan dan reviu terkait tata kelola terintegrasi dengan unit kerja terkait dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris;
8. melakukan pembahasan dan reviu dengan unit kerja terkait mengenai pengelolaan risiko legal dan *regulatory compliance*;
9. menyusun rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2026 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
10. mengikuti seminar, *workshop*, *training* terkait dengan tugas Komite Pemantau Risiko; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

8. IFG's draft 2023 Risk Maturity Index (RMI) Report has been reviewed;
9. IFG's Loss Event Database has been reviewed for patterns and potential recurring risks;
10. actively conducts discussions with the Board of Commissioners regarding the company's main risks, proposed corporate actions, proposed risk-based RKAP, and others;
11. prepared the Risk Monitoring Work Plan for 2026 and submit it to the Board of Commissioners; and
12. carried out other duties of the Board of Commissioners.

RISK MONITORING COMMITTEE WORK PLAN 2025

In general, the activities of the Risk Monitoring Committee are divided into 2 (two) categories, namely routine and non-routine activities. The following is the Risk Monitoring Committee's work plan for 2025:

1. meetings with the Risk Management Division to discuss supervision and evaluate the implementation of Risk Management both in the form of Integrated Risk Profiles and the implementation of other risk management;
2. meetings with relevant work units to discuss the management of the company's RBC/Gearing Ratio (GR) ;
3. meetings with relevant working units to discuss the identification and management of risks in investment instruments, liquidity, and related asset and liabilities management;
4. discuss and review the company's Risk Maturity Index (RMI) Report and report the results to the Board of Commissioners;
5. meeting with the Risk Management Division to discuss and review the key risk monitoring report and report the results to the Board of Commissioners;
6. conduct discussions and reviews with relevant work units regarding the management of the company's business continuity management;
7. conduct discussions and reviews related to integrated governance with relevant work units and provide input to the Board of Commissioners;
8. conduct discussions and reviews with relevant work units regarding legal and regulatory compliance risk management;
9. prepare the Risk Monitoring Committee work plan for 2025 and submit it to the Board of Commissioners;
10. attend seminars, workshops, training related to the duties of the Risk Monitoring Committee; and
11. carry out other duties of the Board of Commissioners.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Sebagai langkah lanjut atas penetapan IFG sebagai konglomerasi keuangan, IFG telah menyusun Pedoman GCG Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 2 Tahun 2023. Dalam penerapan pedoman tersebut, IFG memisahkan fungsi Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang masing-masing berada di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris IFG menetapkan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan melibatkan Dewan Komisaris Independen dari Anggota *Holding* yang merupakan anggota konglomerasi keuangan sebagai bagian dari komite. Dengan langkah ini, di tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

IFG telah menetapkan piagam sebagai pedoman kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 30 September 2024. Piagam ini disusun untuk mendukung dan sebagai acuan bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu, IFG secara berkala meninjau kembali Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam Tata Kelola Perusahaan.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan dokumen tertulis yang menetapkan kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab komite. Selain itu, piagam ini juga mengatur batasan serta hubungan kerja antara Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan Dewan Komisaris, manajemen, dan unit terkait lainnya.

As a follow-up step to IFG's establishment as a financial conglomerate, IFG has developed an Integrated GCG Guideline which is stipulated through the Board of Commissioners' and Board of Directors' Decree No. 2 of 2023. In implementing the guideline, IFG separates the functions of the Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee, each of which is under the Board of Commissioners.

The IFG Board of Commissioners has established the composition of the Integrated Governance Committee by involving the Independent Board of Commissioners of holding members that are members of the financial conglomerate as part of the committee. This step will enable the Integrated Governance Committee to be implemented more effectively and comprehensively in 2024.

The Integrated Governance Committee is an organ under the Board of Commissioners. The Integrated Corporate Governance Committee works collectively and is independent both in performing its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners with the authority, duties and responsibilities as stipulated in the provisions of laws and regulations.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE WORK GUIDELINES

IFG has established a charter as a work guideline for the Integrated Governance Committee through the Decree of the Board of Commissioners Number 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 30, 2024. This charter was prepared to support and serve as a reference for the Integrated Governance Committee in carrying out its duties, authorities and responsibilities. In addition, IFG periodically reviews the Integrated Corporate Governance Committee Charter to ensure its suitability with the company's needs, prevailing laws and regulations, and best practices in corporate governance.

The Integrated Corporate Governance Committee Charter is a written document that defines the position, authority, duties and responsibilities of the committee. This charter also regulates the boundaries and working relationship between the Integrated Governance Committee Charter and the Board of Commissioners, management, and other related units.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen yang juga menjadi ketua pada salah satu komite pada IFG yang berada di bawah Dewan Komisaris, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk IFG dari Anggota *Holding* yang merupakan anggota konglomerasi keuangan sebagai anggota, di mana keanggotaan Komisaris Independen dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan;
3. seorang pihak independen yang mempunyai kompetensi dalam membantu pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai anggota; dan
4. anggota Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat Anggota *Holding* yang merupakan anggota konglomerasi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha syariah, sebagai anggota.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Integrated Governance Committee shall at least consist of:

1. an Independent Commissioner who also chairs one of the IFG committees under the Board of Commissioners, as chairperson and member;
2. Independent Commissioners who represent and are appointed by IFG from holding members that are members of the financial conglomerate as members, where the membership of Independent Commissioners can be either permanent or non-permanent membership, as needed;
3. an independent party who has competence in assisting the implementation of the duties of the Integrated Governance Committee, as a member; and
4. member of the Sharia Supervisory Board if there is a holding member that is a member of a financial conglomerate that conducts sharia business activities, as a member.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 8 (delapan) orang anggota sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024. Adapun susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TOTAL NUMBER, STRUCTURE AND COMPOSITION OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEES IN 2024

The composition of the Integrated Governance Committee consists of 1 (one) chairperson and 8 (eight) members as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024. The composition of the Integrated Governance Committee in 2024 is as follows:

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Composition of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ketua Chairperson	Fauzi Ichsan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Ahmad Fuad Rahmany*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	9 Bulan 9 Months	I
Anggota Member	Hotbonar Sinaga	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Eko Suwandi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Composition of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Anggota Member	Hernita Alius	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Heru Kreshna Reza	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Yasril Rasyid	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Hari Gusrida	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I
Anggota Member	Farid Azhar Nasution	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	10 Bulan 10 Months	I

*) Sdr. Ahmad Fuad Rahmany mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama PT Asuransi Jasa Indonesia pada 12 November 2024.
*) Mr. Ahmad Fuad Rahmany resigned as Independent Commissioner, concurrently Acting President Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia on November 12, 2024.

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE PROFILE

Fauzi Ichsan
Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Chairperson of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Fauzi Ichsan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairperson of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, Fauzi Ichsan has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Hotbonar Sinaga
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Hotbonar Sinaga telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairperson of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, Hotbonar Sinaga has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Eko Suwandi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 14 September 1963

Domisili
Bantul, D.I.Yogyakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
- *Doctorate Program in Business in Accounting*, Queensland University Of Technology, (2005)
- *Master Science in Accounting*, California State University, (1994)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (1987)

Riwayat Pekerjaan
- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021)
- Komisaris PT Bank BRI Syariah Tbk (2017-2021)
- Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2016)
- Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi di FEB UGM (2013)
- Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM FEB UGM (2008)
- Ketua Satuan Audit Internal di Universitas Gadjah Mada (2005)
- Wakil Direktur pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi UGM (1995)

Sertifikasi yang dimiliki
Qualified Risk Governance Professional

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen PT Jasa Raharja

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on September 14, 1963

Domicile
Bantul, D.I.Yogyakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
- Doctorate Program in Business in Accounting, Queensland University Of Technology, (2005)
- Master of Science in Accounting, California State University, (1994)
- Bachelor's Degree in Accounting, Gadjah Mada University, Yogyakarta, (1987)

Work History
- Commissioner of PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021)
- Commissioner of PT Bank BRI Syariah Tbk (2017-2021)
- Dean of the Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada (2016)
- Vice Dean for Planning and Information Systems at FEB UGM (2013)
- Vice Dean for Finance, Assets and Human Resources FEB UGM (2008)
- Head of Internal Audit Unit at Gadjah Mada University (2005)
- Vice Director of Diploma III Program at Faculty of Economics UGM (1995)

Certifications
Qualified Risk Governance Professional

Concurrent Position
Independent Commissioner of PT Jasa Raharja

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Hernita Alius
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 13 Oktober 1959

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
- (S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006)
- (S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004)
- (S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986)
- (DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur PT Indobagus Investama (2018)
- Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017)
- Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012- 2016)
- Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012)
- Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006-2009)
- Supervisor Inspektur Pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000-2006).

Sertifikasi yang dimiliki
Manajemen Risiko Level 1

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen PT Jamkrindo

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on October 13, 1959

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
- (S2) Master's Degree in Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006)
- (S2) Master's Degree in Management Bhayangkara University (2004)
- (S1) Bachelor's Degree in Economics from the Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986)
- (DIII) Diploma 3 from the State College of Accountancy (1981)

Work History
- Director of PT Indobagus Investama (2018)
- Head of Tax Office Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017)
- Supervisor of tax inspector at Tax Service Office Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012- 2016)
- Supervisor of tax inspector at Tax Service Office Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012)
- Supervisor of tax inspectors at Tangerang Madya Tax Office (2006-2009)
- Supervisor of tax inspectors at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000-2006).

Certifications
Level 1 Risk Management

Concurrent Position
Independent Commissioner of PT Jamkrindo

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Heru Kreshna Reza
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 20 Oktober 1960

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
- (S3) Doktoral pada jurusan Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor (2006)
- (S2) Magister pada jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (1996)
- (S1) Sarjana pada jurusan Hukum Keperdataan di Universitas Islam Jakarta (1990)
- (S1) Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945 (1990)

Riwayat Pekerjaan
- Auditor Utama Keuangan Negara VII, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020)
- Auditor Utama Keuangan Negara I, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2014-2020)
- Auditor Utama Keuangan Negara IV, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2012-2014)
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2011-2012)
- Kepala Auditorat I.A, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2010-2012)
- Kepala Auditorat I.B, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007-2010)
- Kepala Auditorat I.C, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2006-2007)
- Kepala Sub Auditorat I.A.3, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2006)
- Kepala Bidang Analev Pemeriksaan APBN-2, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004)
- Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2001-2004)
- Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1997-2001)
- Pemeriksa Muda, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1994-1997)
- Penilik, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1987-1994)
- Administrasi Umum, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1986-1987)

Sertifikasi yang dimiliki
Ahli Tata Kelola Terintegrasi (ATKRT-BNSP)/(CGRP-GIRMA)

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen PT Askrindo

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on October 20, 1960

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
- (S3) Doctorate degree in Agricultural Industrial Technology at Bogor Agricultural University (2006)
- (S2) Master's degree in Administrative Science at the University of Indonesia (1996).
- (S1) Bachelor's Degree in Civil Law at Jakarta Islamic University (1990).
- (S1) Bachelor's Degree in Commercial Administration at the University of August 17, 1945 (1990).

Work History
- Auditor General of State Finance VII, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2020)
- Principal Auditor of State Finance I, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2014-2020)
- Auditor General of State Finance IV, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2012-2014)
- Head of the East Java Representative of the Supreme Audit Agency, Republic of Indonesia (2011-2012)
- Head of Auditorate I.A, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2010-2012)
- Head of Auditorate I.B, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2007-2010)
- Head of Auditorate I.C, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2006-2007)
- Head of Sub Auditorate I.A.3, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2004-2006)
- Head of Budget Audit Analysis Division-2, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2004)
- Head of Secretariat, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2001-2004)
- Head of the Public Relations Section of the Secretariat General, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1997-2001)
- Junior Auditor, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1994-1997)
- Inspector, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1987-1994)
- General Administration, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1986-1987)

Certifications
Integrated Governance Expert (ATKRT-BNSP)/(CGRP-GIRMA)

Concurrent Position
Independent Commissioner of PT Askrindo

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Yasril Rasyid
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 08 Juni 1958

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1984)

Riwayat Pekerjaan
- Tim Penguji *Fit and Proper Test* bagi pihak utama OJK (2020-sekarang)
- Direktur Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (2019-2022)
- Konsultan Manajemen Risiko dan Asuransi (*Self Employed*) (2019-sekarang), beberapa penugasan yang pernah dilakukan antara lain Konsultan di Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan, Konsultan di ADB, Konsultan di Bank Dunia, dan lainnya
- Presiden Direktur di PT Reasuransi Maipark Indonesia (2015-2018)
- Presiden Direktur di PT Tugu Pratama Indonesia (2013-2015)

Sertifikasi yang dimiliki
AAIK, AMRP, CREL

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen IFG Life

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on June 08, 1958

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1984)

Work History
- Fit and Proper Test Examiner Team for OJK principals (2020-present)
- Director of Indonesian Insurance Education Institute (2019-2022)
- Risk Management and Insurance Consultant (Self Employed) (2019-present), some of the assignments that have been conducted include Consultant at the General Secretariat of the Ministry of Finance, Consultant at ADB, Consultant at the World Bank, and others.
- President Director at PT Reasuransi Maipark Indonesia (2015-2018)
- President Director at PT Tugu Pratama Indonesia (2013-2015)

Certifications
AAIK, AMRP, CREL

Concurrent Position
Independent Commissioner of IFG Life

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Hari Gusrida
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran 11 Maret 1955

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
- Doktor Akuntansi Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2005)
- Magister Manajemen, STIE IPWI (1998)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1981)

Riwayat Pekerjaan
- PT Bahana Artha Ventura sebagai Direktur Operasional dan Remedial, Komisaris PT Sarana Surakarta Ventura, Komisaris PT Sarana Jatim Ventura, Komisaris PT Sarana Sumbar Ventura, Komisaris PT Sarana Sulsel Ventura (2005-2007)
- Kepala Divisi Administrasi Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004)

Sertifikasi yang dimiliki
Certified Public Accountant

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama PT Bahana Sekuritas

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born on March 11, 1955

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
- Doctorate Degree in Economic Accounting, Padjadjaran University (2005)
- Master's Degree in Management, STIE IPWI (1998)
- Bachelor's Degree in Accounting, Padjadjaran University (1981)

Work History
- PT Bahana Artha Ventura as Operations and Remedial Director, Commissioner of PT Sarana Surakarta Ventura, Commissioner of PT Sarana Jatim Ventura, Commissioner of PT Sarana Sumbar Ventura, Commissioner of PT Sarana Sulsel Ventura (2005-2007)
- Head of Asset Administration Division of the National Banking Restructuring Agency (2000-2004)

Certifications
Certified Public Accountant

Concurrent Position
Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner of PT Bahana Sekuritas

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Farid Azhar Nasution
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Menjabat sejak 5 Februari 2024
Member of Integrated Governance Committee
Serving since February 5, 2024

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Kelahiran Jakarta 6 Agustus 1970

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024

Riwayat Pendidikan
- Sarjana S-1, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1992)
- *Postgraduate* Diploma jurusan *Finance*, Sekolah Bisnis Prasetya Mulya
- Magister Manajemen Keuangan Syariah, Institut Pertanian Bogor (2016)

Riwayat Pekerjaan
- Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life (2021-2022)
- Direktur *Group Treasury* Lembaga Penjamin Simpanan (2017-2020)
- Direktur Group Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penjamin Simpanan (2021-2021)

Sertifikasi yang dimiliki
Sertifikasi Wakil Manajer Investasi

Rangkap Jabatan
Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizen
Born in Jakarta August 6, 1970

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Decree of the Board of Commissioners Number 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024

Education History
- Bachelor's Degree, State College of Accountancy (STAN) (1992)
- Postgraduate Diploma in Finance, Prasetya Mulya Business School
- Master's Degree in Sharia Financial Management, Bogor Agricultural University (2016)

Work History
- IFG Life's Director of Finance and Investment (2021-2022)
- Director of Group Treasury of Deposit Insurance Corporation (2017-2020)
- Group Director of the Center for Education and Training of the Deposit Insurance Corporation (2021-2021)

Certifications
Investment Manager Representative Certification

Concurrent Position
Member of the Supervisory Board of the Deposit Insurance Corporation

Afiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi menjalankan fungsi dan tugasnya dengan profesionalisme dan independensi, tanpa pengaruh dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, kriteria independensi komite mencakup hal-hal berikut:

INDEPENDENCE OF INTEGRATED RISK MONITORING AND GOVERNANCE COMMITTEE

The Integrated Risk Monitoring and Governance Committee carries out its functions and duties with professionalism and independence, without influence from other parties in contravention of laws and regulations. Based on the Charter of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, the criteria for committee independence include the following:

Aspek Independensi Aspects Independence	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Ahmad Fuad Rahmany (Anggota)** (Member)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Eko Suwandi (Anggota)** (Member)	**Hernita Alius (Anggota)** (Member)	**Heru Kreshna Reza (Anggota)** (Member)	**Yasril Rasyid (Anggota)** (Member)	**Hari Gusrida (Anggota)** (Member)	**Farid Azhar Nasution (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Aspek Independensi Aspects Independence	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Ahmad Fuad Rahmany (Anggota)** (Member)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Eko Suwandi (Anggota)** (Member)	**Hernita Alius (Anggota)** (Member)	**Heru Kreshna Reza (Anggota)** (Member)	**Yasril Rasyid (Anggota)** (Member)	**Hari Gusrida (Anggota)** (Member)	**Farid Azhar Nasution (Anggota)** (Member)
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya meliputi:

1. melakukan evaluasi pedoman tata kelola terintegrasi;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pedoman tata kelola terintegrasi IFG dan Anggota *Holding*;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris memberikan arahannya kepada Direksi untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi;
5. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi melalui Direksi;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
7. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

The duties, authorities, and responsibilities of the Integrated Governance Committee shall at least include:

1. evaluate the integrated governance guidelines;
2. monitor and evaluate the compliance of IFG and holding members' integrated governance guidelines;
3. evaluate the implementation of integrated governance, at least through assessing the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance functions;
4. provide recommendations to the Board of Commissioners and then the Board of Commissioners provides its direction to the Board of Directors for the improvement of integrated governance guidelines;
5. communicate with working units for functions such as internal audit, legal and compliance, finance and risk management, human resources and aspects of business operational functions as necessary, to obtain information, clarification and request the necessary reports in an integrated manner through the Board of Directors;
6. monitor and evaluate the implementation of other integrated governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or GMS/Ministerial Decree of SOEs; and
7. carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions.

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. rapat diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali setiap semester;
2. rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota;
3. rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
4. hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik; dan
5. perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Integrated Governance Committee meetings are conducted with the following provisions:

1. meetings are held periodically at least 1 (one) time per semester;
2. A meeting can be conducted if attended by more than 50% of the total members;
3. meetings can be conducted through video conferencing;
4. the results of the meeting were set forth in the Minutes of Meeting signed by all members of the Integrated Governance Committee present and properly documented; and
5. dissenting opinions that occur in the meeting are clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

Meeting Agenda

Throughout 2024, the Integrated Corporate Governance Committee held 3 (three) meetings with the following details:

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1.	22 Mei 2024 May 22, 2024	Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi IFG Dissemination of IFG Integrated Governance Guidelines
2.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	• Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2024 • Penyampaian Kajian *Parenting Model* IFG Grup • Approval of Integrated Governance Implementation Report Semester I of 2024 • IFG Group Model Parenting Study Submission
3.	27 Desember 2024 December 27, 2024	• Persiapan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 • Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) • Preparation for Financial Statement Audit in 2024 • Implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)

Rekapitulasi Kehadiran Komite Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada Rapat
Recapitulation of Attendance of Integrated Risk Management and Governance Committee at Meetings

Nama Komite Tata Kelola Terintegrasi Name of Integrated Governance Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Fauzi Ichsan	3	3	100%
Ahmad Fuad Rahmany*	2	2	100%
Hotbonar Sinaga	3	3	100%
Eko Suwandi	3	3	100%
Hernita Alius	3	3	100%
Heru Kreshna Reza	3	3	100%
Yasril Rasyid	3	3	100%
Hari Gusrida	3	3	100%
Farid Azhar Nasution	3	3	100%
Rata-rata Average			100%

*) Sdr. Ahmad Fuad Rahmany mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama PT Asuransi Jasa Indonesia pada 12 November 2024.
*) Mr. Ahmad Fuad Rahmany resigned as Independent Commissioner and concurrently Acting President Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia on November 12, 2024.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perusahaan melibatkan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam program pengembangan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Informasi terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi komite dapat dilihat sebagai berikut:

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company involves the Integrated Corporate Governance Committee in competency development programs to improve insight and knowledge. Information related to training and competency development of the committee is summarized as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Name and Position	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Ahmad Fuad Rahmany	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector*	4 Juli 2024 July 4, 2024	OJK Institute
Hernita Alius	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Program Executive Refreshment for Top Level Management* Executive Refreshment for Top Level Management Program	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
Hernita Alius	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)*	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
Hernita Alius	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Data for Executive Decision Making*	12-13 September 2024 September 12-13, 2024	UQ Executive Education
Heru Kreshna Reza	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Certification in Audit Committee Practices (CACP)*	23-25, 29 Januari 2024 January 23-25, 29, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)
Heru Kreshna Reza	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	Webinar Series 2024: Kinerja dan Kematangan *Integrated Risk Management* Webinar Series 2024: Performance and Maturity of Integrated Risk Management	20-21 Juni 2024 June 20-21, 2024	GRC
Heru Kreshna Reza	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Masterclass Program Series XXIII: Life Cycle Assesment (LCA) and Carbon Reduction Strategy* Webinar Series 2024: Performance and Maturity Integrated Risk Management	25-26 Juli 2024 July 25-26, 2024	LSMPR & BNSP
Yasril Rasyid	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Digital and Risk Management in Insurance 2024*	15-17 Mei 2024 May 15-17, 2024	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Indonesian Life Insurance Association
Yasril Rasyid	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Refreshment Programme* Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Perusahaan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Tahun 2024 Refreshment Program for the Fit and Proper Assessment Team of Insurance, Guarantee and Pension Fund Companies in 2024	5 Maret 2025 March 5, 2025	OJK

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Name and Position	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Hari Gursida	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Anti Fraud Professional* (CAFP) Certified Anti Fraud Professional (CAFP) Training and Certification	9-13 September 2024 September 9-13, 2024	GRC Management
Hari Gursida	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	PPL DIRKOM *Risk Management*	30 Juli 2024 July 30, 2024	APEI
Farid Azhar Nasution	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*	16 Desember 2024 December 16, 2024	Cipta Karakter
Eko Suwardi	Manajemen risiko Risk Management	*Program Refreshment Qualified Risk Governance Professional* Qualified Risk Governance Professional Refreshment Program	25-26 November 2024 November 25-26, 2024	CRMS Indonesia
Ahmad Fuad Rahmany	Manajemen risiko Risk Management	Pengkinian Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Scheme Update	17-18 Oktober 2024 October 17-18, 2024	IRPA

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan tugas komite selama tahun 2024 mencakup:

1. melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di lingkup IFG secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholders* terkait;
2. pembahasan usulan Kajian *Parenting Model* IFG termasuk memberikan masukan penyempurnaan;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola terintegrasi di lingkup IFG seperti penyelesaian audit laporan keuangan tahun 2024 dan implementasi ICOFR; dan
4. penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan akuntabilitas Komite Tata Kelola Terintegrasi seperti Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND ACTIVITIES OF THE INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE IN 2024

Throughout 2024, the Integrated Corporate Governance Committee has conducted its duties and responsibilities in accordance with the Committee Charter and the established Work Program. The realization of the committee's duties during 2024 are as follow:

1. evaluated the implementation of integrated governance within IFG periodically to be reported to relevant stakeholders;
2. discussed the proposed IFG Model Parenting Study including providing feedback on improvements;
3. supervised the implementation of integrated governance within IFG such as the completion of the 2024 financial statements audit and the implementation of ICOFR; and
4. completion of documents related to the fulfillment of Integrated Governance Committee accountability such as the Integrated Governance Committee Charter.

RENCANA KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Secara umum, kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kegiatan rutin dan non-rutin. Berikut adalah rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2025:

1. rapat dengan Sekretariat Perusahaan dan atau unit kerja terkait membahas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
2. melakukan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi IFG dan/atau Anggota *Holding*;
4. melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
5. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris memberikan arahannya kepada Direksi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
6. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit internal, hukum dan kepatuhan, keuangan, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi melalui Direksi;
7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE WORK PLAN 2025

In general, the Integrated Governance Committee activities were divided into 2 (two) categories, namely routine and non-routine activities. The following is the work plan of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee for the year 2025:

1. meetings with the Corporate Secretariat and or related work units to discuss monitoring and evaluation of the implementation of integrated governance;
2. evaluating the Integrated Governance Guidelines;
3. monitoring and evaluation of the conformity of the Integrated Governance Guidelines of IFG and/or its holding members;
4. evaluating the implementation of integrated governance, at least through assessing the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance functions;
5. providing recommendations to the Board of Commissioners and then the Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors to improve the Integrated Governance Guidelines;
6. communicating with work units for functions such as internal audit, legal and compliance, finance, risk management, human resources, and aspects of business operational functions as necessary, to obtain information, clarification and request the necessary reports in an integrated manner through the Board of Directors;
7. monitoring and evaluating the implementation of other integrated governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association and/or decisions of the GMS/Minister of SOEs; and
8. conducting other duties of the Board of Commissioners.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi didukung oleh organ pendukung yang bertugas menjalankan fungsi bisnis, perencanaan, serta pengawasan terhadap berbagai aspek operasional. Pembentukan organ ini berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Berdasarkan regulasi tersebut, Direksi membentuk organ pendukung, termasuk komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan SKAI, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi bisnis, perencanaan, dan kontrol.

The Board of Directors is supported by supporting organs in charge of carrying out business functions, planning, and supervision of various operational aspects. The establishment of these organs is guided by the Company's Articles of Association, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, and Decree of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1 of 2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines. Based on these regulations, the Board of Directors established supporting organs, including committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit (SKAI), to ensure the effective implementation of business, planning, and control functions.

KOMITE TALENTA

Komite Talenta adalah komite yang dibentuk oleh Direksi IFG untuk mengevaluasi, menilai, menetapkan, serta memberikan arahan strategis terkait manajemen talenta di IFG. Proses klasifikasi talenta dilakukan dengan menetapkan kategori berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Talenta Divisi Sumber Daya Manusia IFG. Talenta IFG yang dimaksud mencakup seluruh karyawan tetap IFG.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA

IFG menetapkan Direktur Utama sebagai Ketua Komite Talenta dengan anggota tetap Komite Talenta terdiri dari Direktur yang Membidangi Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko. Sementara, anggota tidak tetap Komite Talenta terdiri dari Direktur lainnya. Struktur keanggotaan Komite Talenta tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 059/ SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TALENTA

Tugas dan tanggung jawab Komite Talenta adalah sebagai berikut:

1. memberikan arahan strategis terkait manajemen talenta di IFG dan Anggota *Holding*;
2. menetapkan kebijakan dan program terkait manajemen talenta di IFG yang diusulkan oleh Direktur yang Membidangi Sumber Daya Manusia;
3. menetapkan *talent pool* untuk satu level di bawah Direksi (BOD-1) di IFG, untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi;

TALENT COMMITTEE

Talent Committee is a committee formed by the IFG Board of Directors to evaluate, assess, determine, and provide strategic direction related to talent management in IFG. The talent classification process is done by assigning categories based on the results of performance measurement and competency assessment conducted by the Talent Management Department of IFG's Human Resources Division. IFG talents include all permanent employees of IFG.

TALENT COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

IFG appoints the President Director as the Chairperson of the Talent Committee with permanent members of the Talent Committee consisting of the Directors in Charge of Human Capital and Risk Management. Meanwhile, non-permanent members of the Talent Committee consist of other Directors. The Talent Committee membership structure is in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 059/ SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE TALENT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Talent Committee are as follows:

1. provide strategic direction on talent management in IFG and its Holding Members;
2. establish policies and programs related to talent management in IFG proposed by the HC Director;
3. establish a talent pool for one level below the Board of Directors (BOD-1) in IFG, to be proposed to the Nomination and Remuneration Committee;

4. melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta satu level di bawah Direksi (BOD-1) dan dua level di bawah Direksi (BOD-2) di IFG, serta satu level di bawah Direksi (BOD-1) Anggota *Holding*;
5. menetapkan strategi mobilitas talenta untuk satu level di bawah Direksi (BOD-1) dan dua level di bawah Direksi (BOD-2) IFG, serta satu level di bawah Direksi (BOD-1) Anggota *Holding*;
6. menetapkan nominasi atas Direksi dan Dewan Komisaris Anggota *Holding*; dan
7. memberikan persetujuan atas hasil konsultasi nominasi Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota *Holding*.

4. periodically evaluate and assess the talents of one level below the Board of Directors (BOD-1) and two levels below the Board of Directors (BOD-2) in IFG, as well as one level below the Board of Directors (BOD-1) of holding members;
5. establish talent mobility strategies for one level below the Board of Directors (BOD-1) and two levels below the Board of Directors (BOD-2) of IFG, as well as one level below the Board of Directors (BOD-1) of holding members;
6. determine the nomination of Directors and Board of Commissioners of holding members; and
7. approve the results of the consultation on the nomination of Directors and Commissioners in the holding members of the company.

RAPAT KOMITE TALENTA

Rapat Komite Talenta dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh minimal 50% dari Anggota Tetap Komite. Di tahun 2024, Komite Talenta menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

TALENT COMMITTEE MEETING

Talent Committee meetings can be held if attended by at least 50% of the Permanent Members of the Committee. In 2024, the Talent Committee held 3 (three) meetings, with the following details:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Talenta
Minutes and Attendance of Talent Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda
8 Maret 2024 March 8, 2024	IFG	*Updating* Pemetaan Talenta IFG Updating the IFG Talent Mapping
15 Maret 2024 March 15, 2024	IFG	Pemetaan Talenta IFG Group IFG Group Talent Mapping
2 September 2024 September 2, 2024	IFG	Reviu Kinerja Direksi Anggota *Holding* IFG dan *Update* Usulan Calon Direktur dan Dewan Komisaris Anggota *Holding* IFG Review of IFG Holding members' Board of Directors Performance and Update on IFG Holding members' Director and Board of Commissioners Candidate Proposal

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TALENTA 2024

Komite Talenta telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Komite Talenta 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 061/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021 tentang Komite Talenta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang meliputi:

1. telah melaksanakan tugas untuk menetapkan *talent pool* untuk level BOD-1 di IFG yang selanjutnya keputusan Komite Talenta tersebut ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi IFG;
2. telah melaksanakan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta BOD-1 dan BOD-2 di IFG, serta level BOD-1 di Anggota *Holding*;
3. telah melaksanakan penetapan strategi mobilitas talenta untuk level BOD-1 dan BOD-2 di IFG, serta BOD-1 di Anggota *Holding*;
4. telah melakukan penetapan nominasi atas calon Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota *Holding*, yang selanjutnya keputusan Komite Talenta tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris IFG; dan

IMPLEMENTATION OF TALENT COMMITTEE DUTIES IN 2024

The Talent Committee has carried out a work program and submitted a report in the form of a Talent Committee Report 2024 in accordance with its duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 061/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021 concerning the Talent Committee of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, which includes:

1. has carried out the task of determining the talent pool for the BOD-1 level in IFG, after which the Talent Committee's decision is followed up to be proposed to the IFG Nomination and Remuneration Committee;
2. has conducted periodic evaluations and assessments of BOD-1 and BOD-2 talents in IFG, as well as BOD-1 level in holding members;
3. has implemented the establishment of talent mobility strategies for BOD-1 and BOD-2 levels in IFG, as well as BOD-1 in holding members;
4. has determined the nomination of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in holding members, after which the Talent Committee's decision is followed up for a written response request to the IFG Board of Commissioners; and

5. telah memberikan persetujuan atas hasil konsultasi nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota *Holding* IFG.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk oleh Direksi yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan teknologi informasi di IFG. Komite ini berperan dalam membantu Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi di perusahaan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk Surat Keputusan Direksi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, Organ Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri atas:

1. Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi;
2. Wakil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi;
3. Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi; dan
4. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

1. Anggota Tetap dengan Hak Suara
   a. Direktur yang Membidangi Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko (sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   b. SEVP yang membidangi fungsi Teknologi Informasi (sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   c. Direktur yang Membidangi Fungsi Keuangan.
   d. Direktur yang Membidangi Fungsi Teknik.
   e. Direktur yang Membidangi Fungsi Bisnis.
2. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara
   a. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Teknologi Informasi (sebagai Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   b. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
3. Anggota Tidak Tetap
   a. Direksi/SEVP/Kepala Divisi dan/atau Kepala Departemen dari masing-masing fungsi di IFG yang bukan Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi.

5. has approved the results of the consultation on the nomination of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in IFG's holding members.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Information Technology Steering Committee is a committee formed by the Board of Directors that is responsible for providing recommendations to the Board of Directors regarding the management of information technology in IFG. This committee plays a role in assisting the Board of Directors in making strategic decisions related to the planning, development and management of information technology in the company.

MEMBERSHIP STRUCTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Referring to the Decree of the Board of Directors Number 37 of 2024 concerning the Charter of the Information Technology Steering Committee, the Organ of the Information Technology Steering Committee consists of:

1. The Chairperson of the Information Technology Steering Committee concurrently serves as a member of the Information Technology Steering Committee;
2. The Vice Chairperson of the Information Technology Steering Committee concurrently serves as a member of the Information Technology Steering Committee;
3. The Secretary of the Information Technology Steering Committee concurrently serves as a member of the Information Technology Steering Committee; and
4. Members of the Information Technology Steering Committee, consisting of Permanent Members and Non-Permanent Members.

The membership of the Information Technology Steering Committee consists of:

1. Voting Permanent Member;
   a. Director in Charge of Information Technology and Risk Management (as Chairpersom of the Information Technology Steering Committee).
   b. SEVP in charge of Information Technology function (as Vice Chairperson of Information Technology Steering Committee).
   c. Director in Charge of Finance Function.
   d. Director in Charge of Technical Function.
   e. Director in Charge of Business Functions.
2. Non-voting Permanent Member
   a. Head of Division in charge of Information Technology function (as Secretary of Information Technology Steering Committee).
   b. Head of Division in charge of Risk Management function.
3. Non-permanent Member
   a. Directors/SEVPs/Division Heads and/or Department Heads of each function in IFG who are not Permanent Members of the Information Technology Steering Committee.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. memastikan keselarasan rencana strategis teknologi informasi dengan RJPP;
2. memastikan implementasi rencana strategis teknologi informasi yang dituangkan dalam RKAP;
3. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan teknologi informasi;
4. melakukan perencanaan pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha IFG;
5. perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi;
6. memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan proyek informasi yang disetujui;
7. memastikan kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha IFG;
8. memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi IFG pada sektor teknologi informasi agar investasi IFG pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis IFG;
9. pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
10. mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
11. memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi yang dimiliki IFG.

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, komite mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan, yaitu minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dianggap kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Anggota Tetap, yang mengikuti seluruh agenda rapat. Setiap rapat wajib didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota komite, serta memuat keputusan-keputusan yang telah disepakati.

Pada tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat. Berikut disampaikan agenda rapat, risalah keputusan, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat-rapat tersebut.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Information Technology Steering Committee are as follows:

1. ensure alignment of the information technology strategic plan with the Company Long-Term Plan (RJPP);
2. ensure the implementation of the information technology strategic plan as outlined in the Work Plan and Budget (RKAP);
3. evaluate, direct, and monitor the implementation of information technology implementation;
4. conduct information technology development planning in line with IFG's business activities;
5. formulate the information technology policies and procedures;
6. ensure compliance of information technology project implementation with the approved information project;
7. ensure the suitability of information technology with the needs of management information system and IFG's business activities;
8. ensure the effectiveness of risk mitigation on IFG's investment in information technology sector so that IFG's investment in information technology sector contributes to the achievement of IFG's business objectives;
9. monitor the information technology performance and efforts to improve information technology performance;
10. strive to solve various problems related to information technology that cannot be resolved by the user work unit and information technology organizer effectively, efficiently, and in a timely manner; and
11. ensure the adequacy and allocation of IFG's technology resources.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETING

Referring to the Decree of the Board of Directors No. 37 of 2024 on the Charter of the Information Technology Steering Committee, the committee holds regular meetings in accordance with the provisions in the Decree, which is at least 2 (two) times a year.

Information Technology Steering Committee meetings are considered a quorum if attended by more than 50% (fifty percent) of the Permanent Members, who participate in the entire meeting agenda. Each meeting must be documented in the form of Minutes of Meeting, signed by the Chairperson and all committee members, and contain agreed decisions.

In 2024, the Information Technology Steering Committee held 2 (two) meetings. The following are the meeting agenda, minutes of decisions, attendance list, and recapitulation of the attendance level of committee members in these meetings.

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Minutes and Attendance of Information Technology Steering Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants
5 Juli 2024 July 5, 2024	Ruang Kolaborasi 2 lantai 28 Graha CIMB Niaga Collaboration Room 2 28th floor Graha CIMB Niaga	1. Pencapaian Divisi Teknologi Informasi 2023 2. Program Kerja Divisi Teknologi Informasi 2024 3. Rencana Strategis Teknologi Informasi 4. Penyelarasan Peta Jalan Teknologi Informasi dan Digital 5. Progres Implementasi ERP, Interco, PSAK 117 6. Rekomendasi Komite Teknologi Informasi 1. Achievement of Information Technology Division in 2023 2. Information Technology Division Work Program in 2024 3. Information Technology Strategic Plan 4. Information and Digital Technology Roadmap Alignment 5. Implementation Progress for ERP, Interco, PSAK 117 6. Information Technology Committee Recommendations	1. Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) 2. Heru Handayanto (Direktur Keuangan) 3. Joseph Georgino Godong (SEVP Teknologi Informasi) 4. Sariniatun (Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan) 5. Firman Anindra (Kepala Divisi Teknologi Informasi) 6. Dhinda Arisyiya (Kepala Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis) 7. Ratna Juwita (*Senior Officer* Perencanaan dan Tata Kelola) 8. Cattleya Trienanda Putri (Pelaksana Tugas Kepala Departemen Bisnis Digital) 9. Faisal Rasbihan (*Executive Advisor*) 1. Haru Koesmahargyo (Vice President Director) 2. Heru Handayanto (Director of Finance) 3. Joseph Georgino Godong (SEVP of Information Technology) 4. Sariniatun (Head of Risk Management, Compliance, and Policy Division) 5. Firman Anindra (Head of Information Technology Division) 6. Dhinda Arisyiya (Head of Digital Strategy and Business Development Division) 7. Ratna Juwita (Senior Officer Planning and Governance) 8. Cattleya Trienanda Putri (Acting Head of Digital Business Department) 9. Faisal Rasbihan (Executive Advisor)
9 Desember 2024 December 9, 2024	Ruang *Meeting* AKHLAK Lt. 27 CIMB NIAGA AKHLAK Meeting Room 27th floor CIMB NIAGA	1. Pencapaian Divisi Teknologi Informasi 2024 2. Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2025-2029 1. Information Technology Division Achievement in 2024 2. Information Technology Strategic Plan in 2025-2029	1. Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) 2. Heru Handayanto (Direktur Keuangan) 3. Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) 4. Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) 5. Joseph Georgino Godong (SEVP Teknologi Informasi) 6. Sariniatun (Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan) 7. Muhamad Yusuf Nur Sumarno Putro (Kepala Divisi Teknologi Informasi) 8. Bagus Satria Anugerah (Kepala Departemen Perencanaan dan Tata Kelola) 9. Faisal Rasbihan (*Executive Advisor*) 1. Haru Koesmahargyo (Vice President Director) 2. Heru Handayanto (Director of Finance) 3. Pantro Pander Silitonga (Business Director) 4. Rianto Ahmadi (Technical Director) 5. Joseph Georgino Godong (SEVP of Information Technology) 6. Sariniatun (Head of Risk Management, Compliance, and Policy Division) 7. Muhamad Yusuf Nur Sumarno Putro (Head of Information Technology Division) 8. Bagus Satria Anugerah (Head of Planning and Governance Department) 9. Faisal Rasbihan (Executive Advisor)

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI 2024
Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE DUTIES IN 2024
The Information Technology Steering Committee has implemented the work program and submitted a report in the form of a report on the implementation of the duties of the Information Technology Steering Committee in accordance with its duties and responsibilities.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk menjamin penerapan tata kelola manajemen risiko yang efektif sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan. Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko IFG bertujuan untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan strategis terkait manajemen risiko perusahaan.

IFG telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat fungsi manajemen risiko. Salah satu upaya tersebut adalah penyempurnaan peran Komite Pengelolaan Risiko, yang mencakup perluasan keanggotaan serta peningkatan kewenangan. Penyempurnaan ini juga disesuaikan dengan rencana penerbitan POJK terkait pengawasan IFG, mengingat IFG sebagai *Holding* berperan sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan yang harus menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko Perseroan
   Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Direksi Perusahaan, di antaranya Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite, Direktur yang membawahi fungsi teknik sebagai Wakil Ketua Komite dan Direktur yang membawahi fungsi bisnis. Selain itu SEVP yang membawahi fungsi manajemen bisnis, dan Kepala Divisi yang membawahi fungsi hukum. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko adalah Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko. Terkait keanggotaan komite tersebut tercantum Surat Keputusan Direksi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Piagam dan Kerangka Acuan Kerja Komite Manajemen Risiko tanggal 29 Juni 2022.

2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
   Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur IFG yang membawahi fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite, Direktur Bisnis IFG, Direktur Teknik IFG, Direktur Keuangan IFG dan Direktur Anggota *Holding* yang membidangi Manajemen Risiko sebagai anggota tetap. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko adalah Kepala Divisi IFG yang membawahi fungsi manajemen risiko. Terkait keanggotaan komite tersebut tercantum Surat Keputusan Direksi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Piagam dan Kerangka Acuan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 14 Maret 2023.

   IFG senantiasa mengkaji susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan dan Terintegrasi untuk dilakukan perubahan dan menyesuaikan dengan peraturan dan struktur organisasi perusahaan yang terkini.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a committee established by the Board of Directors to ensure the implementation of effective risk management governance as part of the implementation of corporate governance. The establishment of the IFG Risk Management Committee aims to support the Board of Directors in making strategic decisions related to corporate risk management.

IFG has taken various steps to strengthen its risk management function. One of these efforts is the enhancement of the role of the Risk Management Committee, which includes the expansion of membership and increased authority. This refinement is also in line with the planned issuance of POJK related to IFG's supervision, considering that IFG as a holding acts as the main entity in a financial conglomerate that must implement risk management and governance in an integrated manner.

MEMBERSHIP STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. Risk Management Committee of the Company
   The membership of the Risk Management Committee consists of the Company's Board of Directors, including the Director in charge of risk management function as Chairperson of the Committee, the Director in charge of technical function as Vice Chairperson of the Committee and the Director in charge of business function. In addition, the SEVP in charge of the business management function, and the Head of Division in charge of the legal function. In this case, the Secretary of the Risk Management Committee is the Head of Division in charge of the risk management function. Regarding the membership of the committee, a decree is established namely, the Decree of the Board of Directors Number 32 of 2022 concerning the Charter and Terms of Reference of the Risk Management Committee dated June 29, 2022.
2. Integrated Risk Management Committee
   The membership of the Integrated Risk Management Committee consists of IFG Director in charge of risk management function as the Committee Chairperson, IFG Business Director, IFG Technical Director, IFG Director of Finance and Holding Member Director in charge of Risk Management as permanent members. In this case, the Secretary of the Risk Management Committee is the IFG Division Head in charge of risk management function. Regarding to the membership of the committee is the Board of Directors Decree No. 23 of 2023 on the Charter and Terms of Reference of the Integrated Risk Management Committee dated March 14, 2023.

   IFG continuously reviews the membership composition of the Corporate and Integrated Risk Management Committee for changes and adjusts to the latest regulations and organizational structure of the company.

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dalam menerapkan manajemen risiko di IFG. Komite ini bersifat non-struktural, dengan anggota yang berasal dari struktur internal perusahaan, dan dibentuk sebagai instrumen pengawasan aktif untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat. Berikut disajikan agenda dan Risalah Rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat tersebut.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

The Risk Management Committee meets to support the implementation of the duties and authorities of the Board of Directors in implementing risk management at IFG. This committee is non-structural, with members coming from the company's internal structure, and is established as an active supervisory instrument to ensure effective risk management implementation.

In 2024, the Risk Management Committee held 10 (ten) meetings. The following are the agendas and Minutes of Meetings, attendance lists, as well as a recapitulation of the level of attendance of members in these meetings.

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Minutes and Attendance of Risk Management Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	12 Februari 2024 February 12, 2024	*Hybrid* - Ruang Rapat Akhlak Gedung Graha Niaga Lantai 27 dan rapat *online via Zoom* Hybrid - Meeting Room Akhlak Graha Niaga Building 27th Floor and online meeting via Zoom	1. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2023 2. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi Desember 2023. 1. Integrated Risk Profile Report December 2023 Position 2. Integrated Capital Adequacy Report (CAR) position December 2023.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. SEVP Bisnis 4. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. SEVP of Business 4. Head of Legal Division.	Direktur Bisnis, bertepatan dengan agenda rapat lainnya Business Director, coincides with other meeting agenda
2	7 Juli 2024 July 7, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko Mei 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan Mitigasi Kajian Risiko 3. Pemantauan *Risk Register* RCSA pada i-ERM 4. Pemantauan Kepatuhan 5. Pemantauan Peraturan Internal. May 2024 Risk Monitoring Report consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Risk Assessment Mitigation Monitoring 3. RCSA Risk Register Monitoring on i-ERM 4. Compliance Monitoring 5. Internal Regulation Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Minutes and Attendance of Risk Management Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
3	19 Juli 2024 July 19, 2024	Rapat *Online* Online Meeting	1. Pembahasan Laporan *Internal Control Testing* untuk Kementerian BUMN 2. Pembahasan Laporan *Stress Testing* untuk Kementerian BUMN. 1. Discussion of Internal Control Testing Report for the Ministry of SOEs 2. Discussion of Stress Testing Report for Ministry of SOEs.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. Undangan: 1. Direktur Keuangan 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division. Invitation: 1. Director of Finance	-
4	8 Agustus 2024 August 8, 2024	*Hybrid* - Ruang Rapat Akhlak Gedung Graha Niaga Lantai 27 dan rapat *online via zoom* Hybrid - Meeting Room Akhlak Building Graha Niaga 27th Floor and online meeting via zoom	1. Laporan profil risiko terintegrasi posisi Desember 2023 2. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Posisi Desember 2023 3. Pembahasan Topik Strategis Lainnya. 1. Integrated risk profile report as of December 2023 2. Report on Integrated Capital Adequacy Minimum (CAR) as of December 2023 3. Discussion of Other Strategic Topics.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. SEVP Bisnis 4. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. SEVP of Business 4. Head of Legal Division.	Direktur Bisnis, bertepatan dengan agenda rapat lainnya Business Director, coincides with other meeting agenda
5	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan II 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan *Key Risk Indicators* 3. Pemantauan *Risk Appetite Statement* IFG 4. Pemantauan Komposit Risiko 5. *Risk Event Database* 6. Pemantauan Mitigasi Kajian Risiko 7. Pemantauan Kepatuhan 8. Pemantauan Peraturan Internal. Risk Monitoring Report for the second quarter of 2024 consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Monitoring Key Risk Indicators 3. IFG Risk Appetite Statement Monitoring 4. Risk Composite Monitoring 5. Risk Event Database 6. Risk Assessment Mitigation Monitoring 7. Compliance Monitoring 8. Internal Regulation Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Minutes and Attendance of Risk Management Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
6	20 September 2024 September 20, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko posisi Juli 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan Mitigasi Kajian Risiko 3. Pemantauan Kepatuhan 4. Pemantauan Peraturan Internal. Risk Monitoring Report July 2024 position consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Risk Assessment Mitigation Monitoring 3. Compliance Monitoring 4. Internal Regulation Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-
7	24 September 2024 September 24, 2024	Sirkuler Circular	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian RMI IFG Tahun 2024 atas Tahun Buku 2023 Submission of IFG RMI Assessment Report for the Fiscal Year 2023	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-
8	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko posisi Agustus 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan Mitigasi Kajian Risiko 3. Pemantauan Kepatuhan 4. Pemantauan Peraturan Internal 5. Pemantauan Indikator *Financial Contingency Plan* (FCP). August 2024 Risk Monitoring Report consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Risk Assessment Mitigation Monitoring 3. Compliance Monitoring 4. Internal Regulation Monitoring 5. Financial Contingency Plan (FCP) Indicator Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko
Minutes and Attendance of Risk Management Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
9	15 November 2024 November 15, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko posisi Triwulan III 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan *Key Risk Indicator* 3. Pemantauan *Risk Appetite Statement* 4. Pemantauan Komposit Risiko 5. *Risk Event Database* 6. Pemantauan *Risk Register* RCSA 7. *Internal Control Testing* 8. Pemantauan Kajian Risiko 9. Pemantauan Kepatuhan 10. Pemantauan Peraturan Internal 11. Pemantauan Indikator *Financial Contingency Plan* (FCP). Risk Monitoring Report for the Third Quarter of 2024 consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Key Risk Indicator Monitoring 3. Risk Appetite Statement Monitoring 4. Risk Composite Monitoring 5. Risk Event Database 6. RCSA Risk Register Monitoring 7. Internal Control Testing 8. Risk Assessment Monitoring 9. Compliance Monitoring 10. Internal Regulation Monitoring 11. Financial Contingency Plan (FCP) Indicator Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-
10	23 Desember 2024 December 23, 2024	Sirkuler Circular	Laporan Pemantauan Risiko posisi Oktober 2024 yang terdiri dari: 1. Pemantauan Risiko Utama RKAP 2024 2. Pemantauan Mitigasi Kajian Risiko 3. Pemantauan Kepatuhan 4. Pemantauan Peraturan Internal 5. Pemantauan Indikator *Financial Contingency Plan* (FCP). Risk Monitoring Report October 2024 position consisting of: 1. Key Risk Monitoring for 2024 Work Plan & Budget 2. Risk Assessment Mitigation Monitoring 3. Compliance Monitoring 4. Internal Regulation Monitoring 5. Financial Contingency Plan (FCP) Indicator Monitoring.	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Teknik 3. Direktur Bisnis 4. SEVP Bisnis 5. Kepala Divisi Hukum. 1. Vice President Director 2. Technical Director 3. Business Director 4. SEVP of Business 5. Head of Legal Division.	-

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Perseroan dan Terintegrasi telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Ketua/Wakil Ketua Komite:
   a. menentukan agenda rapat;
   b. memimpin dan mengarahkan rapat agar efektif dan efisien; dan
   c. memastikan keputusan yang diambil telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan agenda rapat.
2. Sekretaris Komite:
   a. mengusulkan agenda rapat kepada Ketua Komite sebelum rapat diselenggarakan;
   b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan rapat;
   c. mempersiapkan dan memastikan semua materi rapat telah tersedia dengan lengkap, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan;
   d. memastikan usulan agenda rapat dan bahan presentasi diserahkan kepada seluruh anggota komite sesuai jadwal yang telah di tentukan;
   e. undangan dan agenda rapat sudah harus didistribusikan kepada anggota komite selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan. Sedangkan untuk materi presentasinya harus didistribusikan 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan;
   f. Sekretaris Komite harus hadir dalam setiap rapat komite dan mengikuti serta mencatat proses dari rapat tersebut;
   g. memeriksa perkembangan atas rencana tindakan yang telah disetujui dalam rapat sebelumnya;
   h. menyampaikan hasil rapat sebelumnya di hadapan peserta rapat sebelum agenda pertama rapat dimulai;
   i. membantu Ketua Komite dalam menyimpulkan hasil rapat, dalam hal:
      i) keputusan yang telah diambil dalam rapat;
      ii) langkah yang telah dilaksanakan dan yang masih tertunda; dan
      iii) penanggung jawab yang akan menindaklanjuti keputusan yang diambil;
   j. membuat Risalah Rapat; dan
   k. hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan Ketua/Wakil Ketua Komite.
3. Anggota Tetap Komite, termasuk tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua:
   a. memberikan masukan dan rekomendasi persetujuan atas penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko (*risk appetite*) yang diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTIES

The Company and Integrated Risk Management Committee has carried out work programs and submitted reports in accordance with its duties and responsibilities, among others:

1. Chair/Vice Chair of the Committee:
   a. determine the meeting agenda;
   b. lead and direct meetings to be effective and efficient; and
   c. ensure that the decisions taken are in accordance with the applicable terms and conditions and in line with the meeting agenda.
2. Committee Secretary:
   a. propose the meeting agenda to the Chairperson of the Committee prior to the meeting;
   b. coordinate with the parties involved in the meeting preparation and execution process;
   c. prepare and ensure that all meeting materials are available in full, including necessary supporting documents;
   d. ensure that the proposed meeting agenda and presentation materials are submitted to all committee members as scheduled;
   e. invitation and meeting agenda must be distributed to committee members no later than 3 (three) calendar days before the meeting is held. Meanwhile, the presentation materials must be distributed 3 (three) working days before the meeting is held;
   f. The Committee Secretary must attend every committee meeting and follow and record the proceedings of the meeting;
   g. check on the progress of the action plan approved in the previous meeting;
   h. present the results of the previous meeting to the meeting participants before the first agenda of the meeting begins;
   i. assist the Chairperson of the Committee in summarizing the results of the meeting, in terms of:
      i) decisions that have been made at the meeting;
      ii) steps that have been implemented and those that are still pending; and
      iii) the person in charge who will follow up on the decision taken;
   j. take minutes of the meeting; and
   k. other matters related to the needs of the Chairperson/Vice Chairperson of the Committee.
3. Permanent Members of the Committee, including the responsibilities of the Chairperson and Vice Chairperson:
   a. provide input and recommendations for approval of the preparation of policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management and its changes, including the level of risk (risk appetite) taken and risk tolerance, as well as contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;

b. memperbaiki dan menyesuaikan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal IFG yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko IFG, dan ketidakefektifan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
c. menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

b. improve and adjust the implementation of risk management based on the results of the evaluation of risk management implementation, including improving the risk management process periodically or incidentally as a result of a change in IFG's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, IFG's risk profile, and the ineffectiveness of risk management implementation based on the evaluation results; and
c. determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as significant exceedances of the amount of investment placements compared to the company's previously established business plan, or taking positions or risk exposures that exceed predetermined limits.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi membentuk Sekretaris Perusahaan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*). Sekretaris Perusahaan ini ditugaskan oleh Direksi untuk mengelola kegiatan kesekretariatan serta komunikasi, baik eksternal maupun internal, guna mendukung kelancaran hubungan IFG.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, serta memastikan komunikasi perusahaan berlangsung secara efektif dan transparan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan mengelola hubungan kelembagaan dan investor dengan tetap berpedoman pada standar etika, prinsip tata kelola perusahaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal IFG dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan melapor langsung kepada Direktur Utama.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Oktarina Dwidya Sistha yang diangkat sejak tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022.

CORPORATE SECRETARY

The Board of Directors established the Corporate Secretary as a working unit responsible for conducting the role of liaison officer. The Corporate Secretary is assigned by the Board of Directors to manage secretarial activities as well as communications, both external and internal, to support the smooth running of IFG relations.

The Corporate Secretary is also responsible for formulating policies, planning, and ensuring effective and transparent corporate communications. In addition, the Corporate Secretary manages institutional and investor relations while adhering to ethical standards, principles of corporate governance, and the company's values.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director through IFG's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. In performing his/her duties, the Corporate Secretary reports directly to the President Director.

CORPORATE SECRETARY OFFICER

The Head of Corporate Secretary Division is Oktarina Dwidya Sistha who was appointed on October 24, 2022 based on the Decree of the Board of Directors Number 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022.

Oktarina Dwidya Sistha*
Sekretaris Perusahaan
Menjabat sejak 24 Oktober 2022
Corporate Secretary
Serving since October 24, 2022

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Kelahiran 24 Oktober 1981

Domisili
Jakarta, Indonesia

Pendidikan
- Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2019)
- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2000)

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Indonesia Financial Group (Oktober, 2022 – sekarang)
- *Vice President Complience*, Indonesia Investment Authority (INA) (Juni, 2021 – Oktober, 2022)
- Indonesia Financial Group (Desember, 2020 – Mei, 2021)
- Lembaga Penjamin Simpanan (2006 – 2020)

*) Menjabat sampai dengan tanggal 16 Desember 2025 karena memperoleh penugasan sebagai *talent secondment* di Kementerian BUMN.

Personal Data
Indonesian citizen
Birth October 24, 1981

Domicile
Jakarta, Indonesia

Education
- Master's Degree in Law from University of Indonesia (2019)
- Bachelor's Degree in Law from University of Indonesia (2000)

Work Experience
- Head of Corporate Secretary Division, Indonesia Financial Group (October, 2022 - present)
- Vice President Compliance, Indonesia Investment Authority (INA) (June, 2021 - October, 2022)
- Indonesia Financial Group (December, 2020 - May, 2021)
- Deposit Insurance Agency (LSP) (2006 - 2020)

*) Served until December 16, 2025 because she is assigned as a secondment talent at the Ministry of SOEs.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan administrasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, menjalankan fungsi komunikasi korporat, juga bertindak sebagai penghubung (*liaison officer)* antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang strategis dalam penerapan kebijakan tata kelola perusahaan.

Sebagaimana bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan transparansi bagi semua pemangku kepentingan, perusahaan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dan Direksi serta mengikuti prosedur yang mengatur kegiatan kerja masing-masing maupun interaksi di antara keduanya, menjadi penghubung perusahaan dengan regulator dan berbagai lembaga terkait, menyiapkan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Direksi, mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS, dan mengadministrasikan dokumen perusahaan, antara lain Risalah Rapat.

Tugas Sekretaris Perusahaan meliputi:
1. bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta evaluasi atas kegiatan terkait komunikasi perusahaan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler, dan tata usaha Direksi serta hubungan lembaga;
2. melakukan penyelarasan, reviu, pemantauan dan evaluasi berkala atas program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* pada bidang sekretaris perusahaan;
3. memastikan penyusunan rencana kerja Anggota *Holding* baik RKAP maupun RJPP pada bidang sekretaris perusahaan agar selaras dengan arahan strategis perusahaan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary has duties and responsibilities to ensure administrative compliance in corporate decision-making, carry out corporate communication functions, also act as a liaison officer between the company and stakeholders. Thus, the Corporate Secretary has a strategic role in the implementation of corporate governance policies.

As part of the company's commitment to provide transparency for all stakeholders, the company appoints a Corporate Secretary who is responsible for assisting the Board of Commissioners and the Board of Directors and following procedures governing their respective work activities and interactions between them, liaising with regulators and various related institutions, preparing reports on the accountability of his/her duties to the Board of Directors, coordinating the organization of the GMS, and administering company documents, including Minutes of Meeting.

The duties of the Corporate Secretary include:
1. responsible for the planning, implementation, supervision and reporting as well as evaluation of activities related to corporate communication, implementation of corporate governance, protocol, and business administration of the Board of Directors and institutional relations;
2. align, review, monitor and periodically evaluate the work programs and policies of holding members in the field of corporate secretary;
3. ensure the preparation of Holding Member work plans both the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP) in the field of corporate secretary to be in line with the company's strategic direction;

4. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang sekretaris perusahaan;
5. melakukan pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang sekretaris perusahaan;
6. mengoordinasikan divisi-divisi terkait di dalam perusahaan mengenai kegiatan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa Anggota *Holding*, baik sirkuler maupun fisik;
7. memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi perusahaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, GCG Terintegrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
8. melaksanakan kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka pemenuhan GCG dan GCG Terintegrasi;
9. menyusun dan memfasilitasi implementasi Pedoman GCG, Pedoman GCG Terintegrasi, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya mengoordinasikan pelaksanaan asesmen dan evaluasi GCG;
10. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penerapan GCG kepada regulator;
11. menatausahakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan RUPS, termasuk RUPS Tahunan/Luar Biasa dan RUPS RKAP, baik sirkuler maupun fisik, serta berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam mempersiapkan dan menyusun materi RUPS sesuai agenda dan kebutuhannya di perusahaan;
12. menyusun dan mengoordinasikan laporan triwulan, laporan tahunan, laporan perubahan anggaran dasar perusahaan, laporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dan laporan lainnya yang menjadi kewajiban korporasi serta menyampaikannya kepada regulator;
13. merencanakan strategi, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembentukan citra dan komunikasi perusahaan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham (*shareholders*) dengan tetap memperhatikan informasi rahasia perusahaan, termasuk menjadi juru bicara perusahaan;
14. merencanakan strategi, melaksanakan dan mengevaluasi program *sponsorship, corporate branding* dan *corporate event*;
15. melakukan pemetaan dan merencanakan strategi perusahaan dalam pengelolaan hubungan lembaga dengan pemangku kepentingan;
16. menjadi penghubung (*liaison officer*) perusahaan untuk membina hubungan dengan pemangku kepentingan;
17. membuat, menatausahakan dan mengelola korespondensi, dokumen atau arsip perusahaan, termasuk surat masuk dan surat keluar perusahaan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah RUPS, dan dokumen perusahaan lainnya;

4. conduct periodic supervision and evaluation of the implementation of RJPP and RKAP of holding members that have been authorized by the GMS in the field of corporate secretary;
5. control and evaluate the achievement of RJPP and RKAP of holding members based on the needs and strategic plans in the field of corporate secretary;
6. coordinate relevant divisions within the company regarding the activities of the Annual General Meeting or Extraordinary General Meeting of holding members, both circular and physical;
7. ensure compliance with regulations on corporate information disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles, Integrated GCG, and prevailing laws and regulations; providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request;
8. conduct corporate activities in order to fulfill GCG and Integrated GCG;
9. prepare and facilitate the implementation of GCG Guidelines, Integrated GCG Guidelines, Board of Directors and Board of Commissioners Code of Conduct, including coordinating the implementation of GCG assessment and evaluation;
10. coordinate the preparation and submission of GCG implementation reports to the regulator;
11. arrange and coordinate the organization of GMS activities, including Annual/Extraordinary GMS and GMS Work Plan and Budget, both circular and physical, as well as coordinate with other related divisions in preparing and compiling GMS materials according to the agenda and needs in the company;
12. compile and coordinate quarterly reports, annual reports, reports on changes to the company's articles of association, reports on changes to members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, sustainability reports, and other reports that become corporate obligations and submit them to the regulator;
13. plan strategies, implement, and evaluate corporate image building and communication programs to be delivered to stakeholders and shareholders with due regard to confidential company information, including being a company spokesperson;
14. plan strategies, implement and evaluate sponsorship programs, corporate branding and corporate events;
15. map and plan the company's strategies in managing institutional relationships with stakeholders;
16. become the company's liaison officer to foster relationships with stakeholders;
17. create, organize and manage correspondence, company documents or archives, including incoming letters and outgoing letters of the company, Register of Shareholders, Special Register, Minutes of Board of Directors Meetings, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of GMS, and other company documents;

18. memberikan penomoran dan salinan produk hukum berupa surat keputusan dan surat edaran yang berada pada kewenangan Direksi serta melakukan pengarsipan dokumen pedoman, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
19. melakukan program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris pertama kalinya;
20. mengelola tata usaha (*office of the board*) yang mencakup ketersediaan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris Direksi, protokoler dan/atau *personal assistant*, termasuk *executive advisor* yang membantu tugas Direksi;
21. melakukan pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku;
22. melakukan koordinasi dengan Direktur Pembina Wilayah Operasional dan/atau Anggota *Holding* (jika ada) serta pengelolaan protokoler terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi sebagai Direktur Pembina Wilayah Operasional dan/atau Anggota *Holding* (jika ada); dan
23. bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), termasuk di dalamnya mengoordinasikan kepada pihak terkait dalam pemenuhan data dan laporan yang dibutuhkan.

18. provide numbering and copies of legal products in the form of decrees and circulars that are under the authority of the Board of Directors as well as archiving documents of guidelines, policies, and procedures that have been established;
19. conduct a company introduction program for the first time members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
20. manage the office of the board which includes the availability of information in order to smooth the implementation of the activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the company including coordinating the implementation of the duties of the secretary of the Board of Directors, protocol and/or personal assistant, including executive advisors who assist the duties of the Board of Directors;
21. fulfill and update each corporate license in accordance with applicable regulations;
22. coordinate with the Director of Operational Area and/or Holding Members Supervisor (if any) as well as protocol management related to the implementation of the duties of the Board of Directors as Director of Operational Area and/or Holding Members Supervisor (if any); and
23. is responsible for managing the State Officials Wealth Report (LHKPN) system, including coordinating with related parties in fulfilling the required data and reports.

Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

The Corporate Secretary shall act in accordance to the applicable regulations and ensure that the company fulfills and complies with such regulations. The Corporate Secretary will provide information relating to the performance of his duties to the Board of Directors on a regular basis and to the Board of Commissioners upon request.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang memadai. Adapun gambaran tentang cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is responsible to the President Director or a member of the Board of Directors appointed by the President Director and has sufficient authority. An overview of the scope of the Corporate Secretary function is shown as follows:



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Di tahun 2024, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2024, the training and competency development programs attended by the Corporate Secretary are as follows

Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer
Astry Nurul Saputri	*Workshop Influencer* BUMN Jawa timur	Januari 2024 January 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Sakkan Abram Rodotua	CRMP *Batch* 2	April 2024 April 2024	RAP
Marissa Devi Alexandra Pontoan	CRMO *Batch* 2	Mei 2024 May 2024	RAP
Arnaldo Brayend Fanggi	CRMO *Batch* 2	Mei 2024 May 2024	RAP
I Gede Suhendra Kertanugraha	CRMP *Batch* 3	Mei 2024 May 2024	RAP
Sara Gabrielle Lewerissa	CRMO *Batch* 3	Juni 2024 June 2024	RAP
Shahmar Kharisma	CRMO *Batch* 3	Juni 2024 June 2024	RAP
Anggraini Pradyaningtyas	CRMO *Batch* 3	Juni 2024 June 2024	RAP
Swasti Ayu Puspitasari	CRMO *Batch* 3	Juni 2024 June 2024	RAP
Muhammad Rizki Mirza	*Data Protection Officer*	Mei 2024 May 2024	Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia Indonesian Data Privacy Professionals Association
Sarita Amalina	*Data Protection Officer*	Mei 2024 May 2024	Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia Indonesian Data Privacy Professionals Association
I Gede Suhendra Kertanugraha	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Sakkan Abram Rodotua	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Putri Ramalia Rianda	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Ulfhy Alvini	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Swasti Ayu Puspitasari	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Ayi Fakhrotun Nisa	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa

Nama Peserta Participant Name	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer
Arnaldo Brayend Fanggi	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Sara Gabrielle Lewerissa	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Dhyantya Rarasrum	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Deki Firmansyah	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Astry Nurul Saputri	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Riki Setiawan	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 1 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 1	Oktober 2024 October 2024	Narabahasa
Sarita Amalina	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	November 2024 November 2024	Narabahasa
Muhammad Rizki Mirza	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	November 2024 November 2024	Narabahasa
Dwi Ponco Kuncoro	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	November 2024 November 2024	Narabahasa
Yoga Adha Gumilar	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	November 2024 November 2024	Narabahasa
Marissa Devi Alexandra Pontoan	*Communication & Negotiation*	November 2024 November 2024	IFG Corpu
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Pelatihan *Event Management*	Desember 2024 December 2024	GRC Training

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2024

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan program kerja dan menyusun laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan, sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi Sekretaris Perusahaan, yang mencakup:

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2024

In 2024, the Corporate Secretary has carried out a work program and compiled a report in the form of a Corporate Secretary Report, in accordance with the division of fields in the Corporate Secretary organizational structure, which includes:

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
1	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Terintegrasi	Penyampaian Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Terintegrasi kepada regulator dengan tepat waktu	1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2023 kepada Kementerian BUMN *Deadline*: 31 Januari 2024 Realisasi: Merupakan bagian dari Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2023 (*Unaudited*) dan disampaikan juga melalui *Virtual Data Room* Kementerian BUMN 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2023 kepada OJK *Deadline*: 15 Februari 2024 Realisasi: Disampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 melalui surat Direktur Utama nomor 039/DIRUT/BPUI/II/2024 3. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Posisi Desember 2023 kepada OJK *Deadline*: 28 Februari 2024 Realisasi: Disampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 melalui surat Direktur Utama nomor 039/DIRUT/BPUI/II/2024 4. Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023 kepada OJK *Deadline*: 31 Mei 2024 Realisasi: Disampaikan pada tanggal 30 Mei 2024 melalui surat Direktur Utama nomor 197/DIRUT-SEKPER/S/BPUI/V/ 2024 5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2024 kepada Kementerian BUMN *Deadline*: 31 Juli 2024 Realisasi: Merupakan bagian dari Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2023 (*Unaudited*) dan disampaikan juga melalui *Virtual Data Room* Kementerian BUMN. 6. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Semester I Tahun 2024 kepada OJK *Deadline*: 31 Agustus 2024 Realisasi: Disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui surat Direktur Utama nomor 284/DUM-SEKPER/S/BPUI/VIII/2024 7. Laporan Tata Kelola Terintegrasi Triwulanan kepada Kementerian BUMN *Deadline*: Sama dengan deadline Laporan Manajemen Triwulanan IFG (merupakan sub bab bagian dari Laporan Manajemen Triwulanan) Realisasi: Disampaikan di dalam Laporan Manajemen Triwulanan IFG.

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
	Implementation of Integrated Good Corporate Governance (GCG)	Timely submission of Integrated Good Corporate Governance (GCG) Report to regulators	1. Integrated Governance Implementation Report Semester II of 2023 to the Ministry of SOEs Deadline: January 31, 2024 Realization: Part of the Management Report for the fourth quarter of 2023 (Unaudited) and also submitted through the Virtual Data Room of the Ministry of SOEs. 2. Self Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance Position December 2023 to OJK Deadline: February 15, 2024 Realization: Delivered on February 15, 2024 through President Director letter number 039/DIRUT/BPUI/II/2024. 3. Corporate Governance Implementation Report December 2023 Position to OJK Deadline: February 28, 2024 Realization: Delivered on February 15, 2024 through President Director letter number 039/DIRUT/BPUI/II/2024. 4. Annual Corporate Governance Report 2023 to OJK Deadline: May 31, 2024 Realization: Delivered on May 30, 2024 through President Director's letter number 197/DIRUT-SEKPER/S/BPUI/V/ 2024. 5. Integrated Governance Implementation Report Semester I of 2024 to the Ministry of SOEs Deadline: July 31, 2024 Realization: Part of the Management Report for the fourth quarter of 2023 (Unaudited) and also submitted through the Virtual Data Room of the Ministry of SOEs. 6. Self Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance for Semester I of 2024 to OJK Deadline: August 31, 2024 Realization: Delivered on August 12, 2024 through the President Director's letter number 284/DUM-SEKPER/S/BPUI/VIII/2024. 7. Quarterly Integrated Governance Report to the Ministry of SOEs Deadline: Same as the IFG Quarterly Management Report deadline (subchapter of the Quarterly Management Report) Realization: Presented in IFG's Quarterly Management Report.

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
2	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Rapat Perusahaan Implementation of the Company's Meeting Management Function	Terselenggaranya: 1. Rapat Direksi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Rapat Umum Pemegang Saham 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (RUPS Pengesahan RKAP dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) Implementation of: 1. Board of Directors Meeting 2 (two) times in 1 (one) month 2. General Meeting of Shareholders 2 (two) times in 1 (one) year (GMS Ratification of RKAP and GMS Ratification of Annual Report and Financial Statements)	Rapat Direksi: Sampai dengan Q4 tahun 2024, telah diselenggarakan 40 (empat puluh) kali Rapat Direksi. RUPS: 1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 telah diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2024. 2. Agenda beserta seluruh dokumen kelengkapan RUPS Tahunan IFG Tahun Buku 2023 telah disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat Dewan Komisaris dan Direksi IFG Nomor 013/DIRKOM-DSP/S/BPUI/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan persetujuan RUPS Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan IFG Tahun Buku 2023 telah diperoleh secara sirkuler sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor S-2/MBU/01/2025. Board of Directors Meeting: Until Q4 of 2024, 40 (forty) Board Meetings were held. GMS: 1. The GMS for the ratification of the 2024 RKAP was held on January 30, 2024. 2. The agenda and all documents for the IFG Annual GMS for the Fiscal Year 2023 have been submitted to the Minister of SOEs through the letter of the IFG Board of Commissioners and Directors Number 013/DIRKOM-DSP/S/BPUI/XI/2024 dated November 14, 2024 and the approval of the Annual GMS Report and ratification of the IFG Financial Statements for the Fiscal Year 2023 has been obtained circularly in accordance with the Letter of the Minister of SOEs number S-2/MBU/01/2025.
3	Pelaksanaan *Brand Communication Reach* Perusahaan	Tercapainya peningkatan *Brand Communication Reach Index*	Peningkatan *Brand Communicaton Reach Index* didapat dari pencapaian kegiatan-kegiatan komunikasi korporasi: 1. Publikasi Media: *PR Value* 2024 sebesar Rp 167.936.380.766 (meningkat 8.20% dari 2023) 2. *Website*: a. Pencapaian 27.69 *page/visit* dan 114.007 klik dari interaksi pengunjung *website* b. SEO mencapai Posisi Nomor 1 dalam *page search* untuk Kata kunci BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan dan Investasi,; BUMN *Holding* Asuransi; BUMN *Holding* Penjaminan; BUMN *Holding* Penjaminan Tata Kelola; BUMN *Holding* Asuransi Tata Kelola; BUMN Asuransi Penjaminan Tata Kelola; BUMN *Holding* Asuransi TJSL; Asuransi Penjaminan TJSL 3. Media Sosial: Pencapaian peningkatan *engagement* instagram @IFG.*Holding* dari tahun 2023 yaitu *Reach* meningkat 173.5%, followers meningkat 21.21% dan *Likes* meningkat 450% 4. Penghargaan: Upaya IFG dalam kegiatan komunikasi korporasi mendapat penghargaan eksternal PR Indonesia *Awards* 2025 untuk: a. *Gold Winner* BUMN, kategori *Pre Crisis Management* b. *Bronze Winner* BUMN, kategori Corporate PR.

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
	Implementation of Brand Communication Reach Company	Achieving an increase in Brand Communication Reach Index	The increase in Brand Communicaton Reach Index is derived from the achievement of corporate communication activities: 1. Media Publications: PR Value 2024 amounting to IDR167,936,380,766 (8.20% increase from 2023) 2. Website: a. Achieved 27.69 pages/visit and 114,007 clicks from website visitor interactions b. SEO reaches Number 1 position in page search for keywords BUMN Holding Insurance, Guarantee and Investment,; BUMN Holding Insurance; BUMN Holding Guarantee; BUMN Holding Guarantee Governance; BUMN Holding Insurance Governance; BUMN Insurance Guarantee Governance; BUMN Holding Insurance TJSL; TJSL Guarantee Insurance 3. Social Media: The achievement of increasing Instagram engagement @IFG.Holding from 2023, namely Reach increased 173.5%, followers increased 21.21% and Likes increased 450%. 4. Awards: IFG's efforts in corporate communication activities were recognized by the external PR Indonesia Awards 2025 for: a. Gold Winner SOE, Pre Crisis Management category b. Bronze Winner SOE, Corporate PR category.
4	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Perusahaan Implementation of the Company's Public Information Disclosure	Tercapainya hasil penilaian keterbukaan informasi publik dengan kategori "Cukup Informatif" berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat. Achieving the results of the assessment of public information disclosure with the category "Quite Informative" based on the assessment of the Central Information Commission.	Pada 2024 berhasil mencapai kategori Cukup Informatif dengan skor 75,48 In 2024, it reached the Moderately Informative category with a score of 75.48.

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
5	Pelaksanaan *Event* Perusahaan dalam rangka Peningkatan *Brand Awareness*	Terlaksananya *event* perusahaan: 1. IFG Labuan Bajo Marathon 2024 2. IFG Conference 2024	1. IFG LBM 2024 di tanggal 9 November 2024 dilaksanakan dengan berbagai pencapaian, di antaranya: a. Peningkatan jumlah Peserta 27% dari IFG LBM 2023 b. Peningkatan pendapatan dari registrasi peserta 138% dari IFG LBM 2023 c. Pencapaian publikasi IFG LBM 2024 meningkat 12.93% dari tahun 2023 (*PR Value* 2023 sebesar Rp 10.652.250.000 dan *PR Value* 2024 sebesar 12.030.000.000 d. Pencapaian *engagement* komunikasi digital IFG LBM 2024 meningkat signifikan dari tahun 2023: *impression* meningkat 439,50% (dari 588.200 ke 3.173.336) , jangkauan meningkat 843,93% (dari 201.146 ke 1.898.680) dan likes meningkat 2.259,43% (dari 1888.ke 44.546) e. Aktivasi *one by* IFG melalui kegiatan IFG LBM 2024 berhasil di *donwload* oleh 1000 peserta dengan 500 pengguna terdaftar (50% konversi). 2. IFG *Conference* di tanggal 15 Oktober 2024 dilaksanakan dengan pencapaian a. Total kehadiran 543 peserta (*invitation only*), meningkat dari tahun 2023 dengan pencapaian total kehadiran 540 peserta (*invitation* dan *public*) b. Pencapaian publikasi IFG *Conference* sebanyak 61 pemberitaan. 3. IFG *Research Dissemination* di tanggal 21 November 2024 dilaksanakan dengan pencapaian total kehadiran 150 peserta (*invitation only*) 4. IFG *Launching* Buku "Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor *Untapped Potentials* Sektor Asuransi dan Dana Pensiun" dilaksanakan di tanggal 15 Mei 2024 dihadiri oleh 150 Mahasiswa Universitas Indonesia dan pencapaian publikasi sebanyak 20 pemberitaan.

Program Kerja Utama
Main Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Target 2024 Target 2024	Pencapaian Achievements
	Implementation of Company Events in order to Increase Brand Awareness	Implementation of company events: 1. IFG Labuan Bajo Marathon 2024 2. IFG Conference 2024	1. The IFG LBM 2024 on November 9, 2024 was held with many achievements, including: a. 27% increase in number of participants from IFG LBM 2023 b. Increased revenue from participant registration 138% from IFG LBM 2023 c. IFG LBM 2024 publication achievement increased 12.93% from 2023 (PR Value 2023 of IDR10,652,250,000 and PR Value 2024 of 12,030,000,000). d. IFG LBM 2024 digital communication engagement achievement increased significantly from 2023: impression increased 439.50% (from 588,200 to 3,173,336), reach increased 843.93% (from 201,146 to 1,898,680) and likes increased 2,259.43% (from 1888 to 44,546). e. Activation of One by IFG through IFG LBM 2024 activities was successfully donwloaded by 1000 participants with 500 of them are registered users (50% conversion). 2. IFG Conference on October 15, 2024 was held with the following achievements a. Total attendance of 543 participants (invitation only), increased from 2023 with a total attendance of 540 participants (invitation and public). b. Achievement of 61 IFG Conference Publications. 3. IFG Research Dissemination on November 21, 2024 was held with a total attendance of 150 participants (invitation only) 4. IFG Book Launching "Towards a Sustainable Future: Exploring Untapped Potentials of the Insurance and Pension Fund Sector" was held on May 15, 2024 attended by 150 University of Indonesia students and achieved 20 publications
6	Penerapan *Brand* Arsitektur Architectural Brand Application	Tersedianya Kajian Mengenai Kelayakan Penerapan *Brand* Arsitektur Availability of a Study on the Feasibility of Implementing an Architecture Brand	Kajian Kelayakan Penerapan Brand Arsitektur telah diafirmasi oleh Direksi melalui Rapat Direksi dan disetujui melalui *update* ke Direktur Utama di Bulan Februari 2025 The Feasibility Study for the Implementation of Brand Architecture has been affirmed by the Board of Directors through the Board of Directors Meeting and approved through an update to the President Director in February 2025.
7	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Hubungan Kelembagaan Formulation of Institutional Relationship Management Policy	Tersedianya Draf Kebijakan mengenai Pengelolaan Hubungan Kelembagaan Availability of Draft Policy on Institutional Relationship Management	Telah terbit Salinan Keputusan Direksi Nomor 43 Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Kebijakan Manajemen Hubungan Kelembagaan. A copy of the Decree of the Board of Directors Number 43 of 2024 dated December 11, 2024 concerning Institutional Relationship Management Policy has been issued.
8	Pelaksanaan Pengelolaan *Stakeholders* Implementation of Stakeholders Management	Terlaksananya Survei Kepuasan *Stakeholders* dengan hasil "Memuaskan" Implementation of Stakeholders Satisfaction Survey with "Satisfactory" results	Pelaksanaan Survei Kepuasan *Stakeholders* telah terlaksana dengan hasil akhir skor 4,3 (target skor 4) kategori memuaskan (*likert scale*). The implementation of the Stakeholders Satisfaction Survey has been carried out with a final score of 4.3 (target score 4) in the satisfactory category (Likert scale).

UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal berperan sebagai bagian penting dalam sistem pengendalian internal, khususnya dalam aspek pengendalian di tingkat operasional perusahaan. Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Unit Audit Internal sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal. Secara umum, tugas utama Unit Audit Internal adalah mendukung manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan melalui evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consultative management*) secara independen dan objektif. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

PEJABAT UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala SKAI. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, IFG menunjuk Yullyan Fuad sebagai Kepala SKAI.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit plays an important role in the internal control system, especially in the aspect of control at the operational level of the company. The Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Unit as part of the internal control mechanism. In general, the main task of the Internal Audit Unit is to support management in achieving the Company's objectives through evaluating the adequacy and effectiveness of internal control processes, risk management, and corporate governance.

The Internal Audit Unit has the duty and responsibility to carry out audits (assurance) and consultations (consultative management) independently and objectively. This activity aims to assess the effectiveness of the internal control system, risk management, and corporate governance processes, as well as provide recommendations for improvement.

INTERNAL AUDIT UNIT OFFICER

The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit Unit (SKAI). Based on the Decree of the Board of Directors Number 152/SK- DIR/BPUI/SDM/X/2021 dated October 5, 2021, IFG appointed Yullyan Fuad as Head of Internal Audit Unit (SKAI).

Yullyan Fuad
Kepala Divisi SKAI
Menjabat sejak 5 Oktober 2021- sekarang
Head of SKAI Division
Served since October 5, 2021- present

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran 17 Juli 1977

Domisili
Tangerang, Indonesia

Pendidikan
- Master (Akuntansi) Universitas Indonesia (2006)
- Sarjana (Akuntansi) Universitas Brawijaya (2001)
- Diploma (Akuntansi) STAN (1998)

Sertifikasi
- *Certified Internal Auditor* (CIA)
- *Chartered Accountant* (CA)
- *Certified Public Accountant* (CPA)
- *Scrum Master Accredited Certification*

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi SKAI, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (Oktober 2021 - sekarang)
- *Chief Audit Executive*, Meratus Group (2019 – 2021)
- *Audit Lead | Financial Controller*, BP Indonesia (2013 – 2019)
- *Tax Section Head*, Premier Oil (2012 – 2013)
- *Head of Audit*, CNOOC (2010 – 2012)
- Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010)

Personal Data
Indonesian citizen
47 years old
Birth July 17, 1977

Domicile
Tangerang, Indonesia

Education
- Master's Degree (Accounting) University of Indonesia (2006)
- Bachelor's Degree (Accounting) Brawijaya University (2001)
- Diploma Degree (Accounting) STAN (1998)

Certification
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Chartered Accountant (CA)
- Certified Public Accountant (CPA)
- Scrum Master Accredited Certification

Work Experience
- Head of SKAI Division, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (October 2021 - present)
- Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 - 2021)
- Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 - 2019)
- Tax Section Head, Premier Oil (2012 - 2013)
- Head of Audit, CNOOC (2010 - 2012)
- Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 - 2010)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal memiliki tugas untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal:

1. membuat, melaksanakan, dan memonitor kebijakan dan program kerja terkait kegiatan pengawasan internal;
2. membuat dan mengusulkan Piagam Audit Internal (PAI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengevaluasi PAI secara berkala;
3. membuat Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko dan mencakup pengawasan pada IFG dan melakukan reviu atas PKAT Anggota *Holding*;
4. menyusun, mereviu, dan/atau melakukan evaluasi Pedoman Strategis kegiatan Internal Audit yang akan diberlakukan di IFG dan Anggota *Holding*;
5. melaksanakan pemeriksaan kinerja operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikannya sesuai PKAT untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan praktik tata kelola, termasuk pelaksanaan audit khusus sesuai permintaan Direktur Utama;
6. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
7. melakukan evaluasi dan reviu atas praktik Tata Kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal;
8. memberikan konsultasi terkait kegiatan usaha perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam memperbaiki kegiatan operasional perusahaan;
9. sebagai pendamping auditor eksternal namun tidak terbatas kepada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
10. mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anggota *Holding* terkait kegiatan internal audit di Anggota *Holding* untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama;
11. melaporkan hasil aktivitas pekerjaan kepada Direktur Utama secara berkala;
12. melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Satuan Pengawasan Internal; dan
13. menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris IFG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit has a duty to assist the organization to achieve its objectives, through a systematic and regular approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. The details of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit:

1. create, implement, and monitor policies and work programs related to internal control activities;
2. create and propose the Internal Audit Charter (PAI) to the Board of Directors and Board of Commissioners, and evaluate the PAI periodically;
3. developed a risk-based Annual Audit Work Program (PKAT) that includes oversight of IFG and reviewed the PKAT of holding members;
4. develop, review, and/or evaluate the Strategic Guidelines for Internal Audit activities that will be applied in IFG and its holding members;
5. conduct operational and financial performance examinations, assess controls, management and implementation as well as provide suggestions for improvement in accordance with the PKAT to improve internal control activities, risk management and governance practices, including the conduct of special audits as requested by the President Director;
6. monitor follow-up on the results of both internal and external examinations;
7. evaluate and review Corporate Governance, risk management and internal control practices;
8. provide consultation related to the company's business activities related to governance, risk management, and internal control in improving the company's operational activities;
9. as a companion to external auditors but not limited to audits by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial and Development Audit Agency (BPKP);
10. propose, prepare, analyze and make Internal Memo in connection with the request from holding members related to internal audit activities in holding members to be followed up to the President Director;
11. report the results of work activities to the President Director on a regular basis;
12. provide direct guidance and supervision to employees within the Internal Audit Division; and
13. complete any pending matters and complete follow-up on audit findings.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Head of Internal Audit Unit (SKAI) is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, as outlined in the IFG Board of Directors and Board of Commissioners Decree.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, struktur organisasi SKAI terdiri dari Kepala Divisi SKAI yang membawahi 3 departemen, yaitu:

1. Departemen Audit;
2. Departemen Advisory Pengendalian Internal; dan
3. Departemen *Center of Excellence* Audit Internal.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT UNIT

Based on the Decree of the Board of Directors Number 15 of 2024 concerning the Organizational Structure Policy, the SKAI organizational structure consists of the Head of Division SKAI which oversees 3 departments, namely:

1. Audit Department;
2. Internal Audit Advisory Department; and
3. Internal Audit Center of Excellence Department.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal dapat dilihat sebagai berikut ini:
The Organizational Structure of the Internal Audit Unit is as follows:



Selama tahun 2024, terdapat penambahan 3 (tiga) orang pegawai untuk Divisi SKAI. Total pegawai Divisi SKAI pada 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Divisi SKAI;
2. Kepala Departemen sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Personel Auditor 9 (sembilan) orang;
4. Personel Advisory 5 (lima) orang; dan
5. Personel *Center of Excellence* 3 (tiga) orang.

During 2024, there were 3 (three) additional employees for the SKAI Division. The total employees of the SKAI Division as of December 31, 2024 are 21 (twenty-one) people consisting of:

1. Head of SKAI Division;
2. Head of Department is 3 (three) people;
3. Auditor personnel 9 (nine) people;
4. Advisory Personnel 5 (five) people; and
5. Center of Excellence personnel 3 (three) people.

SERTIFIKASI PROFESI UNIT AUDIT INTERNAL

Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi auditor internal, IFG melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan auditor internal dalam program sertifikasi. Daftar staf Unit Audit Internal yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To improve the quality and competence of internal auditors, IFG conducts a systematic and tiered auditor competency development program. The competency development is done by involving internal auditors in the certification program. The list of Internal Audit Unit staff who have participated in the certification program is as follows:

Sertifikasi Profesi Professional Certification	**Jumlah Auditor** Number of Auditors
Asean CPA	2
Associate Certified Public Accountant (ACPA)	1
Associate CPA Australia (ASA)	1
Certified Public Accountant (CPA)	3
Chartered Accountant (CA)	8
ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)	1
Certified Forensic Auditor (CFrA)	1
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	4
Certified Internal Auditor (CIA)	5
EnCase Certified Examiner (EnCe)	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	1

Sertifikasi Profesi Professional Certification	**Jumlah Auditor** Number of Auditors
Lead Auditor ISO 27001:2013	3
Qualified Internal Auditor (QIA)	7
Certified Fraud Examiner (CFE)	3
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	1
Certified Legal Auditor (CLA)	1
Certified Life Insurance (CLI)	1
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) Representative of Securities Underwriter (WPEE)	1
Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) Representative of Securities Trading Broker (WPPE)	1
Certified Bankers Internal Audit (CBIA)	1
Certified Banking Risk Management (CBRM)	1
Certified Governance, Risk Management and Compliance Audit (GRCA)	1
Certified GRC Professional (GRCP)	1
Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	1
Certified Risk Governance Professional (CRGP)	2
Certified Risk Management Officer (CRMO)	3
Certified Risk Management Professional (CRMP)	6
Integrated Data Privacy Professional (IDPP)	1
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	1
Certified Secure Computer User (CSCU)	1
IT Auditor	1
ITIL® Foundation v3	1
Offensive Security Certified Professional (OSCP)	1
Oracle Database 11g Administrator Certified Associate	1

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI INTERNAL AUDIT

IFG mengikutsertakan Unit Audit Internal dalam pengembangan kompetensi di tahun 2024. Adapun detail informasi terkait pengembangan kompetensi yang diikuti Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT

IFG includes the Internal Audit Unit in competency development in 2024. The detailed information related to competency development followed by the Internal Audit Unit is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Yullyan (Kepala Divisi SKAI) Yullyan (Head of SKAI Division)	Pelatihan Training	*Creative Accounting-navigating the grey areas of financial reporting*	10 Desember 2024 December 10, 2024	MyCPE
	Seminar	Konferensi Auditor Internal (KAI) Internal Auditor Conference	10 s.d. 11 Juli 2024 July 10 to 11, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	*Ethics for Certified Internal Auditors* (CIA)	10 Desember 2024 December 10, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Core principles, standard, and code of conduct for internal auditors*	10 Desember 2024 December 10, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Key strategies for Chief Audit Executives in 2025*	12 Desember 2024 December 12, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Big Data Analytics in Enhancing Financial Analysis*	18 Desember 2024 December 18, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Comprehensive Identity Theft - 2024 Update*	18 Desember 2024 December 18, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*The social Impact of AI : Ethical Considerations for Businesses*	30 Oktober 2024 October 30, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Cybersecurity for Executive : Understanding Your Strategic Role*	4 November 2024 November 4, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Outsmart Cyber Threats with Cloud Security Innovations*	17 Desember 2024 December 17, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Money Laundering-How it Works*	4 November 2024 November 4, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Current Fraud Trends - Shifting Risks and Changing Fraud Schemes*	10 November 2024 November 10, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Ethics for Fraud Examiner*	10 November 2024 November 10, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Dodging the Scam - Top Occupational Frauds and How to Outsmart Them*	18 Desember 2024	MyCPE
	Seminar	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X National Conference of Risk Management Professionals X	12 s.d. 13 Desember 2024 December 12 to 13, 2024	LSPMR

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
I Made Suandi Putra (Kepala Departemen Advisory Pengendalian Internal) I Made Suandi Putra (Head of Internal Audit Advisory Department)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Seminar	Konferensi *Auditor Internal* (KAI) Internal Auditor Conference	10 s.d. 11 Juli 2024 July 10 to 11, 2024	YPIA
	Seminar	*Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference*	28 s.d. 29 Agustus 2024 August 28 to 29, 2024	IIA Indonesia
Lelya Novita Kusumawati (Kepala Departemen Audit) Lelya Novita Kusumawati (Head of Audit Department)	Pelatihan Training	Pelatihan *Chartered Accountant - Foundation Level* Chartered Accountant Training - Foundation Level	1 s.d. 3 Agustus 2024 August 1 to 3, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Accountants Association
	Pelatihan Training	Pelatihan *Chartered Accountant - Profesional Level* Chartered Accountant Training - Professional Level	8 s.d. 31 Agustus 2024 8 to August 31, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Accountants Association
	Pelatihan Training	Pelatihan *Chartered Accountant - Advance Level* Chartered Accountant Training - Advance Level	2 s.d. 21 September 2024 September 2 to 21, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Accountants Association
	Pelatihan Training	Strategi Mencegah Serangan Siber Strategies to Prevent Cyber Attacks	29 Februari 2024 February 29, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
	Sertifikasi Certification	*Certified Fraud Examiners (CFE) Exam Preparation Training Online*	4-8 November 2024 November 4-8, 2024	ACFE
	Seminar	National *Anti Fraud Conference*	5 s.d. 6 September 2024 September 5 to 6, 2024	ACFE
	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Legal Auditor Training and Certification	30 April s.d. 4 Mei 2024 April 30 to May 4, 2024	Justitia Training Center
Deny Sjahbani (Kepala Departemen Center of Excellence Audit Internal) Deny Sjahbani (Head of Internal Audit Center of Excellence Department)	Seminar	*Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference*	28 s.d. 29 Agustus 2024 April 30 to May 4, 2024	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Bakhas Nasrani Diso (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) Bakhas Nasrani Diso (Internal Audit Advisory Senior Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Pelatihan Training	Pelatihan *Internal Control Testing* Internal Control Testing Training	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	CRMS Indonesia
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	4 s.d. 5 Desember 2024 December 4 to 5, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia Opportunities and Challenges of Digital Assets in Indonesia	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Pelatihan Training	*The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations*	12 September 2024 September 12, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
	Pelatihan Training	Pelatihan Aktuaria Actuarial Training	4 November 2024 November 4, 2024	Udemy
Hari Sundoro (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) Hari Sundoro (Internal Audit Advisory Senior Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Seminar	*Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference*	28 s.d. 29 Agustus 2024 August 28 to 29, 2024	IIA Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan *Project Management Professional* Project Management Professional Training	19 s.d. 25 Juni 2024 June 19 to June 25, 2024	AVENEW
	Pelatihan Training	Pelatihan *Data Science & Analytics* Data Science & Analytics Training	23 s.d. 24 Juli 2024 July 23 to 24, 2024	Rakamin Academy
	Pelatihan Training	Pelatihan *Project Management Level One* Project Management Level One Training	20 November 2024 November 20, 2024	IFG-Corpu
	Pelatihan Training	Pelatihan *Looker Google Studio* Google Studio Looker Training	11 November 2024 November 11, 2024	IFG-Corpu
	Pelatihan Training	Pelatihan Aktuaria Actuarial Training	4 November 2024 November 4, 2024	Udemy
	Pelatihan Training	Pelatihan SMAP ISO 37000 ISO 37000 SMAP Training	4 November 2024 November 4, 2024	IFG-Corpu
Laila Fajriani (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) Laila Fajriani (Internal Audit Advisory Senior Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Seminar	*Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference*	28 s.d. 29 Agustus 2024 August 28 to 29, 2024	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan/ Pendidikan Type of Training/ Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
Rizky Ananda Putra (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) Rizky Ananda Putra (Internal Audit Advisory Senior Officer)	Pelatihan Training	Lokakarya *Integrity Risk Assessment* Integrity Risk Assessment Workshop	13 s.d. 14 November 2024 November 13 to 14, 2024	FKSPI
Wirawan Arief Nugroho (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) Wirawan Arief Nugroho (Internal Audit Advisory Senior Officer)	Pelatihan Training	RASHID: Penguatan Sistem Akuntansi di Pesantren: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Berbasis Syariah RASHID: Strengthening the Accounting System in Pesantren: Towards Sharia-Based Financial Transparency and Accountability	25 September 2024 September 25, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	*Regular Accounting Discussion* (RAD): Penerapan PSAK 117 pada Perusahaan Reasuransi Regular Accounting Discussion (RAD): Application of PSAK 117 to Reinsurance Companies	26 September 2024 September 26, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	Strategi Implementasi *Market Conduct*: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan Market Conduct Implementation Strategy: Building Trust and Improving the Performance of the Financial Services Industry	8 Agustus 2024 August 8, 2024	OJK Institute
	Pelatihan Training	COBIT 19 *Foundation*	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Multimatics
	Pelatihan Training	Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Implementation of Risk Management in Local Government	19 September 2024 September 19, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
Jaka Tirtana Hanafiah (Senior Officer Audit) Jaka Tirtana Hanafiah (Senior Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Pelatihan Training	Memahami IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* Understanding IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements	7 Mei 2024 May 7, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	Penerapan PSAK 117 pada Perusahaan Reasuransi Application of PSAK 117 to Reinsurance Company	30 September 2024 September 30, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	*Pelatihan Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)* Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Training	1 s.d. 16 Juli 2024 July 1 to July 16, 2024	IIA Indonesia
	Seminar	*Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference*	28 s.d. 29 Agustus 2024 August 28 to 29, 2024	IIA Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (ISO SMM) Tahun 2024 Internal Audit Training ISO 9001: 2015 Quality Management System (ISO SMM) of 2024	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	Robere & Associates
	Pelatihan Training	*Business Sentiment Indonesia*	19 Februari 2024 February 19, 2024	CPA Australia, IAI, AFA
	Pelatihan Training	*Strengthening Cybersecurity in your business*	29 Februari 2024 February 29, 2024	CPA Australia
	Pelatihan Training	*Introduction To ESG And Corporate Responsibilities*	4 April 2024 April 4, 2024	CPA Australia

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan/ Pendidikan Type of Training/ Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan Training	*ESG In Actions: How to integrate ESG Into Corporate Governance?*	4 April 2024 April 4, 2024	CPA Australia & IIA Vietnam
	Pelatihan Training	*M&A 101: The Guidance (Merger and Acquisition)*	26 Mei 2024 May 26, 2024	CPA Australia
	Pelatihan Training	*Workshop Effective Report Writing for Internal Auditor*	22 s.d. 23 Agustus 2024 August 22 to 23, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan *Integrated Data Privacy Professional* (IDPP) Integrated Data Privacy Professional (IDPP) Training	15 Oktober 2024 October 15, 2024	OCEG & GRC Certify
	Pelatihan Training	*How to Prevent Accounting Fraud In Financial Sector*	2 Mei 2024 May 2, 2024	CPA Australia & Otoritas Jasa Keuangan CPA Australia & Financial Services Authority
	Pelatihan Training	*Handling and Measuring Conflict of Interest (COI)*	10 s.d. 11 September 2024 September 10 to 11, 2024	Basel Institute on Governance
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi *Certified in General Insurance* Certification Training Certified in General Insurance	14 s.d. 17 Oktober 2024 October 14 to 17, 2024	IFG-Corpu
	Pelatihan Training	*Strategic Finance Function to Drive Business Performance*	24 April 2024 April 24, 2024	CPA Australia & SEA Bank
	Pelatihan Training	*GRC Fundamentals 3.5- Business Management and Organization*	11 Februari 2024 February 11, 2024	OCEG
	Pelatihan Training	*Develop GRC Skills and Get Certifications for Your Entire Team*	10 Maret 2024 March 10, 2024	OCEG
	Sertifikasi Certification	Pelatihan *Certified GRC Professional* (GRCP) Certified GRC Professional (GRCP) Training	24 Maret 2024 March 24, 2024	OCEG & GRC Certify
	Sertifikasi Certification	*Certified Governance, Risk Management and Compliance Audit (GRCA)*	12 Mei 2024 May 12, 2024	OCEG & GRC Certify
	Pelatihan Training	Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	4 s.d. 5 September 2024 September 4 to 5, 2024	Robere & Associates
Lucky Parwitasari (Senior Officer Audit) Lucky Parwitasari (Senior Audit Officer)	Pelatihan Training	Ijarah Jasa Leasing of Service	12 Juni 2024 June 12, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	Sosialisasi SPJ 4510 dan Materi Edukasi 7 Dissemination of SPJ 4510 and Educational Materials 7	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	Kupas Tuntas Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang/ Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Comprehensive Discussion on Policy and Regulation of Imported Goods / MOT Regulation Number 8 of 2024	3 Juli 2024 July 3, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
	Pelatihan Training	*Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Implementasinya dan *Value* Bagi Perusahaan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Implementation and Value for the Company	26 Juli 2024 July 26, 2024	Department of Accounting University of Indonesia (UI)
	Pelatihan Training	Penerapan Penurunan Nilai Pada Perbankan Implementation of Impairment in Banking	6 Agustus 2024 August 6, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	4 s.d. 5 Desember 2024 December 4 to 5, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	*Inspiring change, Guiding Progress Youth Leaders United*	10 Juli 2024 July 10, 2024	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
	Pelatihan Training	*Workshop Effective Report Writing for Internal Auditor* *Effective Report Writing for Internal Auditor Workshop*	22 s.d. 23 Agustus 2024 August 22 to 23, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	*How to prevent money laundering and terrorism Financing*	5 September 2024 September 5, 2024	OJK Institute and The London Instituteof Banking and Finance (LIBF) present
	Pelatihan Training	POJK5/2024 Mengukuhkan Fondasi Perbankkan di Tengah Volatilitas Global POJK5/2024 Strengthens Banking Foundations Amid Global Volatility	26 Juli 2024 July 26, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in General Insurance Certification Training Certified in General Insurance	14 s.d. 17 Oktober 2024 October 14 to 17, 2024	IFG-Corpu
	Pelatihan Training	Strategi Implementasi *Market Conduct*: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan Market Conduct Implementation Strategy: Building Trust and Improving the Performance of the Financial Services Industry	8 Agustus 2024 August 8, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
	Sertifikasi Certification	Pelatihan *Certified Risk Management Professional* *Certified Risk Management Professional Training*	29 April s.d. 6 Mei 2024 April 29 to May 6, 2024	LSPMR

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Octavian Abrianto (Senior Officer Audit) Octavian Abrianto (Senior Audit Officer)	Pelatihan Training	*Agile Auditing*	16 Juni 2024 June 16, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Information Technology Audit for CFE Professionals*	26 Desember 2024 December 26, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Fraud & Forensic Accounting - 2024 Update*	4 Mei 2024 May 4, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Understanding Bid Rigging Frauds*	19 Mei 2024 May 19, 2024	MyCPE
	Seminar	*National Anti Fraud Conference*	5 s.d. 6 September 2024 September 5 to 6, 2024	ACFE
	Pelatihan Training	*Fraud Investigations for Insurance Fraud*	1 Desember 2024 December 1, 2024	MyCPE
	Pelatihan Training	*Current Fraud Trends - Shifting Risks and Changing Fraud Schemes*	25 Desember 2024 December 25, 2024	MyCPE
Ryani Ariesti Syafitri (Senior Officer Audit) Ryani Ariesti Syafitri (Senior Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Pelatihan Training	Memahami IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* Understanding IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements	7 Mei 2024 May 7, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Pelatihan Training	Peran Akuntan dalam Mewujudkan IT GRC Accountant's Role in Realizing IT GRC	10 Mei 2024 May 10, 2024	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	4 s.d. 5 Desember 2024 December 4 to 5, 2024	YPIA
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi *Certified in General Insurance* *Certification Training Certified in General Insurance*	14 s.d. 17 Oktober 2024 October 14 to 17, 2024	IFG-Corpu
	Sertifikasi Certification	Pelatihan *Certified Risk Management* Professional Certified Risk Management Professional Training	26 s.d. 29 Februari 2024 February 26 to 29, 2024	LSPMR
Darmo Saputro Wibowo (Senior Officer Audit) Darmo Saputro Wibowo (Senior Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Certified Risk Management Professional Training	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	4 s.d. 5 Desember 2024 December 4 to 5, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan Aktuaria Actuarial Training	4 November 2024 November 4, 2024	Udemy
	Seminar	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X National Conference of Risk Management Professionals X	12 s.d. 13 Desember 2024 December 12 to 13, 2024	LSPMR

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Handarudigdaya Jalanidhi Kuncaratrah (Officer Audit) Handarudigdaya Jalanidhi Kuncaratrah (Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Seminar	Konferensi Auditor Internal (KAI) Internal Auditor Conference	10 s.d. 11 Juli 2024 July 10 to 11, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan *Internal Control Testing* Internal Control Testing Training	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	CRMS Indonesia
	Pelatihan Training	*Workshop Effective Report Writing for Internal Auditor* Workshop on Effective Report Writing for Internal Auditors	22 s.d. 23 Agustus 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan P3DN Increased Use of Domestic Products (P3DN) Training	30 September s.d. 4 Oktober 2024 September 30 to October 4, 2024	BPKP
	Pelatihan Training	Program Pelatihan Strategi Pengelolaan Subrogasi Subrogation Management Strategy Training Program	3 September 2024 September 3, 2024	IFG-Corpu
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi *Certified in General Insurance* Certification Training Certified in General Insurance	14 s.d. 17 Oktober 2024 October 14 to 17, 2024	IFG-Corpu
Lulu Dwi Rahmawati (Officer Audit) Lulu Dwi Rahmawati (Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi QIA Manajerial Managerial QIA Certification Training	24 Juni s.d. 3 Juli 2024 June 24 to July 3, 2024	YPIA
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	4 s.d. 5 Desember 2024 December 4 to 5, 2024	YPIA
Muhammad Rosyid Ridho Muttaqien (Officer Audit) Muhammad Rosyid Ridho Muttaqien (Audit Officer)	Pelatihan Training	Pelatihan Pemahaman dan Implementasi PSAK 74 Training on Understanding and Implementing PSAK 74	1 April 2024 April 1, 2024	KPMG
	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi ISO 27001 *Lead Auditor* - I27001LA ISO 27001 Lead Auditor Certification Training - I27001LA	20 s.d. 26 Juni 2024 June 20-26, 2024	Multimatics
	Seminar	Konferensi Auditor Internal (KAI) Internal Auditor Conference	10 s.d. 11 Juli 2024 July 10 to 11, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan *Internal Control Testing* Internal Control Testing Training	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	CRMS Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (ISO SMM) Tahun 2024 Internal Audit Training ISO 9001: 2015 Quality Management System (ISO SMM) of 2024	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	Robere & Associates

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
	Pelatihan Training	*Workshop Effective Report Writing for Internal Auditor* Effective Report Writing for Internal Auditor Workshop	22 s.d. 23 Agustus 2024 August 22 to 23, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	4 s.d. 5 September 2024 September 4 to 5, 2024	Robere & Associates
Fadian Dwiantara *(Senior Officer Center of Excllence Audit Internal)* Fadian Dwiantara (Senior Officer Center of Excllence Internal Audit)	Seminar	National *Anti Fraud Conference*	5 s.d. 6 September 2024 September 5 to 6, 2024	ACFE
Jihan Abigail *(Staff Center of Excllence Audit Internal)* Jihan Abigail (Internal Audit Center of Excllence Staff)	Seminar	Konferensi Auditor Internal (KAI) Internal Auditor Conference	10 s.d. 11 Juli 2024 July 10 to 11, 2024	YPIA
	Pelatihan Training	Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (ISO SMM) Tahun 2024 Internal Audit Training ISO 9001: 2015 Quality Management System (ISO SMM) of 2024	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	Robere & Associates
	Pelatihan Training	*Teammate User Meeting*	18 November 2024 September 17 to 18, 2024	Teammate
	Pelatihan Training	*How to Prevent Accounting Fraud In Financial Sector*	2 Mei 2024 May 2, 2024	CPA Australia & Otoritas Jasa Keuangan CPA Australia & Financial Services Authority
	Sertifikasi Certification	Pelatihan *Certified Risk Management Officer* Certified Risk Management Officer Training	26 s.d. 28 Februari 2024 February 26 to 28, 2024	LSPMR
	Pelatihan Training	Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	4 s.d. 5 September 2024 September 4 to 5, 2024	Robere & Associates
Winda Anggraini *(Staff Center of Excllence Audit Internal)* Winda Anggraini (Internal Audit Center of Excllence Staff)	Pelatihan Training	Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi The Role of Digital Technology in Improving Accounting Practices	11 Juli 2024 July 11, 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)
	Pelatihan Training	Pelatihan *Internal Control Testing* Internal Control Testing Training	17 s.d. 18 September 2024 September 17 to 18, 2024	CRMS Indonesia
	Seminar	National *Anti Fraud Conference* National Anti Fraud Conference	5 s.d. 6 September 2024 September 5 to 6, 2024	ACFE
	Pelatihan Training	Pelatihan Aktuaria Actuarial Training	4 November 2024 November 4, 2024	Udemy
	Seminar	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X National Conference of Risk Management Professionals X	12 s.d. 13 Desember 2024 December 12 to 13, 2024	LSPMR

RAPAT UNIT AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2024, Unit Audit Internal telah menyelenggarakan rapat. Adapun agenda rapat Unit Audit Internal adalah seputar pelaksanaan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consultative management*) secara independen dan objektif. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Throughout 2024, the Internal Audit Unit has held meetings. The agenda of the Internal Audit Unit meeting is about the implementation of audit (assurance) and consultation (consultative management) independently and objectively. This activity aims to assess the effectiveness of the internal control system, risk management, and corporate governance processes, as well as provide recommendations for improvement.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS UNIT AUDIT INTERNAL TAHUN 2024

Di tahun 2024, Unit Audit Internal melaksanakan program kerja pengawasan yang rencana dan realisasinya beserta temuan dan tindak lanjut hasil audit adalah sebagai berikut:

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT IN 2024

In 2024, the Internal Audit Unit implemented a supervisory work program whose plans and realizations along with the findings and follow-up of audit results are as follows:

Departemen Audit
Audit Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
1.	Pendampingan KAP 2023 KAP 2023 Assistance	2 Jan – 30 Apr 2024 Jan 2 - Apr 30, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
2.	Audit/Reviu/Evaluasi/Konsultansi sesuai kebutuhan/permintaan Dekom/Direksi Audit/Review/Evaluation/Consultancy as needed/requested by the Board of Commissioners/Board of Directors	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet
3.	Reviu P3DN IFG Increased Use of Domestic Products (P3DN) IFG Review	1 Jul – 24 Nov 2024 Jul 1 - Nov 24, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
4.	*Continuous Audit* Tahun 2024 Continuous Audit in 2024	4 Mar – 29 Des 2024 Mar 4 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing
5.	Reviu Pelaporan Realisasi Penggunaan PMN Triwulanan Tahun 2024 Review of the Reporting of the Realization of the Use of State Equity Participantion (PMN) Quarterly in 2024	2 Jan – 31 Okt 2024 Jan 2 - Oct 31, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
6.	Audit Tematik Penerapan Manajemen Risiko TI (POJK Nomor 4/POJK.05/2021) (Aspen) Thematic Audit of IT Risk Management Implementation (POJK Number 4/POJK.05/2021) (Insurance and Guarantee)	3 Jun – 17 Jul 2024 Jun 3 - Jul 17, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
7.	Implementasi *Combined Assurance* di IFG Implementation of Combined Assurance at IFG	2 Jan – 29 Maret 2024 Jan 2 - March 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing
8.	Audit Permodalan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Integrated Capital Audit for Financial Conglomerates	1 Jul – 30 Agus 2024 Jul 1 - Aug 30, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done
9.	Audit Tematik Klaim di Anggota *Holding* Aspen Thematic Audit of Claims at Insurance and Guarantee Holding members	2 May – 24 Jun 2024 May 2 - June 24, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing
10.	Reviu Kinerja Anggota *Holding* per Triwulan 2024 Review of Holding Member Performance as of Quarter 2024	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing

Departemen Audit
Audit Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
11.	Audit Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Implementation Audit	2 Sept – 31 Okt 2024 Sept 2 - Oct 31, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
12.	Koordinator Asesmen ICML Anggota *Holding* CMI dan Aspen Coordinator for ICML Assessment in CMI and Insurance and Guarantee Holding Members	2 Des – 31 Des 2024 Dec 2 - Dec 31, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
13.	*Self Assessment* ICML IFG ICML IFG Self Assessment	1 Nov – 29 Nov 2024 Nov 1 - Nov 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing
14.	Reviu Laporan Keuangan IFG Tahun 2024 Review of IFG Financial Statements of 2024	1 Apr – 1 Nov 2024 Apr 1 - Nov 1, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
15.	Audit Tata kelola Governance Audit	8 Jan – 16 Feb 2024 Jan 8 - Feb 16, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
16.	Audit pengelolaan biaya operasional BTIM Audit of BTIM's operational cost management	1 Feb – 2 Mar 2024 Feb 1 - Mar 2, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
17.	Audit Pengelolaan Biaya Operasional BS BS Operational Cost Management Audit	2 Apr – 2 May 2024 Apr. 2 - May 2, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
18.	Audit tematik (pengelolaan kas dan investasi *Holding*) – arahan ke anper aspen Thematic audit (cash management and investment holding) - direction to Insurance and Guarantee Holding members	2 Mar – 1 Apr 2024 Mar 2 - Apr 1, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
19.	Audit ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Audit of 2024	2 May – 1 Jun 2024 May 2 - Jun 1, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
20.	Audit ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Tahun 2024 ISO 9001:2015 Audit of Quality Management System (QMS) of 2024	2 May – 1 Jun 2024 May 2 - Jun 1, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done
21.	Audit Pengelolaan Biaya Operasional BKI Audit of BKI's Operational Cost Management	2 Jun – 2 Jul 2024 2 Jun - 2 Jul 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
22.	*Monitoring* tindak lanjut Dep. Audit Monitoring the follow-up of Audit Department	2 – 7 Okt 2024 Oct. 2 - 7, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
23.	Kajian/Telaah keinvestigasian Investigative review/study	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done
24.	Pendampingan Auditor Eksternal External Auditor Assistance	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
25.	Penyusunan RKAT 2025 Departemen Audit Preparation of RKAT 2025 Audit Department	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done

Realisasi diisi dengan status: *Not Yet, Ongoing, Done*
Realization is filled with the status: Not Yet, Ongoing, Done

Departemen Advisory Pengendalian Internal
Internal Audit Advisory Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
1.	Pendampingan implementasi ICOFR 2023 ICOFR 2023 implementation assistance	2 Jan – 31 Okt 2024 Jan 2 - Mar 31, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
2.	*Probity Audit* Implementasi ERP Probity Audit of ERP Implementation	2 Jan – 31 Mar 2024 Jan 2 - Mar 31, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
3.	*Probity Audit* RKAP 2025 Probity Audit RKAP 2025	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
4.	Pengembangan *Dashboard Analytics* dalam mendukung peran Audit Analytics Dashboard Development in support of Audit role	1 Mar – 29 Mar 2024 Mar 1 - Mar 29, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
5.	*Whistleblowing System* (WBS) Terintegrasi Integrated Whistleblowing System (WBS)	2 Jun – 29 Des 2024 June 2 - Dec 29, 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
6.	Konsultansi Sesuai Permintaan Dekom/ Direksi Consultancy as requested by Board of Commissioners/Board of Directors	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet
7.	Penilaian FRM tahun 2023 FRM assessment in 2023	2 Nov – 22 Nov 2024 Nov 2 - Nov. 22, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
8.	*Monitoring* Tindak Lanjut *Dep. Advisory* Monitoring of Follow-up from Advisory Department	2 Jan – 29 Des 2024 Jan 2 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet
9.	Penyusunan RKAT 2025 Departemen *Advisory* Preparation of RKAT 2025 Advisory Department	1 Okt – 31 Okt 2024 Oct 1 - Oct 31, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done

Realisasi diisi dengan status: *Not Yet, Ongoing, Done*
Realization is filled with the status: Not Yet, Ongoing, Done

Departemen Center of Excellence Audit Internal
Internal Audit Center of Excellence Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
1.	Penyusunan laporan SKAI Terintegrasi Preparation of Integrated Internal Audit Unit report	Tanggal 25 Bulan N+1 (periode triwulanan) 25th of Month N+1 (quarterly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
2.	Penyusun laporan audit internal triwulanan untuk Kementerian BUMN Preparing quarterly internal audit reports for the Ministry of SOEs	Tanggal 25 Bulan N+1 (periode triwulanan) 25th of Month N+1 (quarterly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
3.	Penyusunan laporan triwulan SKAI Preparation of Internal Audit Unit quarterly report	Tanggal 10 Bulan N+1 (periode triwulanan) 10th of Month N+1 (quarterly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
4.	Penyusunan laporan tahunan SKAI Preparation of Internal Audit Unit annual report	29 Jan – 29 Feb 2024 Jan 29 - Feb 29, 2024	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
5.	Pelaksanaan monitoring tindak lanjut audit internal dan eksternal Implementation of internal and external audit follow-up monitoring	Tanggal 5 Bulan N+1 (periode bulanan) 5th of Month N+1 (monthly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done

Departemen Center of Excellence Audit Internal

Internal Audit Center of Excellence Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
6.	Pelaksanaan forum komunikasi SKAI dengan Anggota *Holding* Implementation of Integrated Internal Audit Unit communication forum with holding member	Tanggal 5 s.d. 10 Bulan N+1 / Menyesuaikan hari kerja (5 hari per triwulan) 5th to 10th of Month N+1/Adjusting working days (5 days per quarter)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
7.	Pelaksanaan forum komunikasi dengan Direktur Utama/Komite Audit Implementation of communication forum with President Director/Audit Committee	Menyesuaikan jadwal Direktur Utama/ Komite Audit Adjusting the schedule of the President Director/ Audit Committee	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
8.	Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan RKAP 2025 Departemen CoE AI Develop Annual Audit Work Plan (RKAT) and 2025 RKAP of AI CoE Department	1 Aug – 4 Sep 2024 Aug 1 - Sep 4, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
9.	Mengkoordinir penyelarasan RKAT antara *Holding* dan Anggota *Holding* Coordinate RKAT alignment between holding and holding members	9 Sep – 4 Nov 2024 Sep 9 - Nov 4, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
10.	Menyusun Buku RKAT Compile the RKAT Book	11 Des – 22 Des 2024 Dec 11 - Dec 22, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done
11.	Menyusun Buku RKAT Terintegrasi Develop an Integrated RKAT Book	15 Feb – 29 Feb 2024 Feb 15 - Feb 29, 2024	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
12.	Menyusun RKAP konsolidasi Divisi Prepare Division consolidated RKAP	2 Sep – 1 Des 2024 Sep 2 - Dec 1, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
13.	Peningkatan kompetensi auditor Improve auditor competency	Tanggal 8 Bulan N+1 (periode triwulanan) 8th of Month N+1 (quarterly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
14.	Penyusunan Piagam Audit Internal (PAI) Terintegrasi Preparation of Integrated Internal Audit Charter (PAI)	1 Jul – 30 Sep 2024 Jul 1 - Sep 30, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing
15.	Pekerjaan administrasi Administrative work	2 Jan – 29 Des 2024 15th of Month N+1 (2-month period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
16.	Penyediaan infrastruktur pendukung penugasan Provision of supporting infrastructure for assignments	Tanggal 15 Bulan N+1 (periode 2 bulanan) 15th of Month N+1 (2-month period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done

Departemen Center of Excellence Audit Internal

Internal Audit Center of Excellence Department

No.	Program Kerja Work Program	RKAT 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi Realization			
			TW I Q I	TW II Q II	TW III Q III	TW IV Q I
17.	Penggunaan dan *monitoring* penggunaan *Audit Management System* (AMS) Use and monitoring of the Audit Management System (AMS)	1. Penggunaan: sepanjang penugasan 2. Monitoring: Tanggal 5 Bulan N+1 (periode triwulanan) 1. Usage: throughout the assignment 2. Monitoring: 5th of Month N+1 (quarterly period)	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
18.	Implementasi AMS terintegrasi fase 3 Integrated AMS implementation phase 3	8 Jan – 31 Okt 2024 Jan 8 - Oct 31, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing
19.	Pelaksanaan *self assessment* penilaian kapabilitas organisasi SKAI Implementation of self assessment of SKAI organizational capability assessment	4 Nov – 29 Nov 2024 Nov 4 – Nov 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing
20.	Koordinator standardisasi penilaian kapabilitas organisasi audit internal *holding* dan Anggota *Holding* Coordinator of standardization of capability assessment of holding and Holding Member internal audit organizations	4 Nov – 29 Nov 2024 Nov 4 – Nov 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
21.	Pelaksanaan *quality assurance* (penilaian *ongoing monitoring*) terhadap penugasan audit, reviu, dan *advisory* Implementation of quality assurance (assessment of ongoing monitoring) of audit, review, and advisory assignments.	10 hari penugasan 10 days of assignment	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done
22.	Penyusunan petunjuk teknis standarisasi format dokumentasi penugasan dan laporan SKAI Preparation of technical guidelines for standardizing the format of assignment documentation and SKAI reports	5 Feb – 30 Apr 2024 Feb 5 - Apr 30, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
23.	Penyusunan laporan *Quality Assurance/ Self-Assessment* QAIP Preparation of Quality Assurance/Self-Assessment QAIP report	Maret 2024 March 2024	Sedang Berlangsung Ongoing	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done	Sudah Selesai Done
24.	Penyelarasan piagam audit internal dengan Anggota *Holding* Internal audit charter alignment with holding members	1 Jul – 29 Des 2024 Jul 1 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing
25.	Revisi Kebijakan audit internal Revised internal audit policy	1 Jul – 29 Des 2024 Jul 1 - Dec 29, 2024	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Belum Dilakukan Not Yet	Sedang Berlangsung Ongoing

Realisasi diisi dengan status: *Not Yet, Ongoing, Done*
Realization is filled with the status: Not Yet, Ongoing, Done

STATUS REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi yang dipantau oleh SKAI adalah rekomendasi dari hasil audit internal oleh SKAI dan audit eksternal oleh BPK RI, BPKP, KAP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Status rekomendasi dan tindak lanjut per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

STATUS OF RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

Recommendations monitored by Internal Audit Unit are recommendations from internal audits by Internal Audit Unit and external audits by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), Financial & Development Supervisory Board (BPKP), Public Accounting Firm (KAP), and the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen Kemenkeu) The status of recommendations and follow-up as of December 31, 2024 is as follows:

Audit	**Total Rekomendasi** Total Recommendation	**Total Selesai** Total Completed				**Total Belum Jatuh Tempo** Total Not yet due		**Total *Outstanding***	
		Closed	**%**	**TDD**	**%**	**Jumlah** Total	**%**	**Jumlah** Total	**%**
Internal	268	88	33%	0	0%	11	4%	169	63%
BPK RI the Audit Board of the Republic of Indonesia	45	41	91%	0	0%	0	0%	4	9%
BPKP Financial & Development Supervisory Board	119	11	9%	0	0%	13	11%	92	77%
KAP Public Accounting Firm	32	2	6%	0	0%	15	47%	15	47%
Itjen Kemenkeu Inspectorate General of the Ministry of Finance	30	25	83%	0	0%	0	0%	5	17%
Total	**494**	**167**	**34%**	**0**	**0%**	**39**	**8%**	**285**	**58%**

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK
EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Pengawasan independen terhadap aspek keuangan perusahaan dilakukan melalui pemeriksaan Audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik berperan sebagai pihak eksternal yang memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2024 telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Independent supervision of the financial aspects of the company is carried out through an External Audit examination by the Public Accounting Firm (KAP). The Public Accountant acts as an external party that provides an opinion regarding the conformity of the presentation of the Company's Financial Statements with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 has been done by a Public Accountant who is independent, competent, professional, and objective, in accordance with the Public Accountant Professional Standards, as well as the work agreement and audit scope that has been determined.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pemilihan dan penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dilakukan melalui RUPS Tahunan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses seleksi auditor ini dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan.

Perusahaan menjamin bahwa auditor eksternal yang ditunjuk harus bebas dari benturan kepentingan guna memastikan independensi serta kualitas hasil audit. Proses penunjukan Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT MECHANISM

The selection and appointment of the Public Accounting Firm as the external auditor in charge of examining the company's financial statements is carried out through the Annual GMS, considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The auditor selection process is conducted through the procurement mechanism within the company.

The Company ensures that the appointed external auditor must be free from conflicts of interest to ensure independence and quality of audit results. The Public Accountant appointment process has been done in accordance with POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as part of the implementation of good corporate governance principles within the company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Di tahun 2024, IFG menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 006/DPA/BPUI/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat S-2/MBU/01/2025 tanggal

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2024

Based on the Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services in article 3 paragraph 1, it is stated that the provision of general audit services for the financial statements of an entity is completed by Public Accounting Firm (KAP) for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years.

In 2024, IFG appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) based on Appointment Letter Number 006/DPA/BPUI/I/2025 dated January 7, 2025 which was approved by the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) through letter S-2/MBU/01/2025

3 Januari 2025, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 beserta Anggota *Holding* IFG dan juga Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2024.

dated January 3, 2025, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) is tasked to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 and its Holding members as well as the Annual Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for Fiscal Year 2024.

Akuntan Publik Tahun 2024 / **Public Accountant in 2024**

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Nomor Izin KAP KAP License Number	:	477/KM.1/2025
Akuntan Accountant	:	Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik Public Accountant License Number	:	AP.0645
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024
Periode Penugasan Assignment Period	:	7 Januari 2025 – 30 September 2025 January 7, 2025 - September 30, 2025
Jasa Services	:	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024
Jasa Lainnya Other Services	:	• Pengujian dan pelaporan atas kepatuhan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PSA Nomor 62 • Audit umum atas Laporan Keuangan TJSL untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 • Testing and reporting on IFG's compliance with applicable laws and regulations under PSA No. 62 • General audit of TJSL Financial Statements for the year ended December 31, 2024
Biaya Cost	:	Rp5.150.000.000 (belum termasuk PPN dan *Out of Pocket* (OPE) luar kota IDR5,150,000,000 (excluding VAT and Out of Pocket (OPE) out of town)

AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR

Untuk menjaga profesionalisme dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya dapat melakukan audit maksimal selama enam tahun buku berturut-turut, sementara Akuntan Publik (*Partner*) dibatasi hingga tiga tahun buku berturut-turut.

Berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan selama 6 (enam) tahun terakhir.

PUBLIC ACCOUNTANT AND ITS FEES FOR THE LAST 6 (SIX) YEARS

To maintain professionalism and independence, the selection of External Auditors conducted annually must comply with the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services. The regulation stipulates that one Public Accounting Firm (KAP) can only conduct audits for a maximum of six consecutive fiscal years, while Public Accountants (Partners) are limited to three consecutive fiscal years.

The following is a list of Public Accounting Firms, Accountants and fees awarded in auditing the Company's financial statements for the last 6 (six) years.

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Akuntan** Accountant	**Opini** Opinion	**Biaya (Rp)** Cost (IDR)
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Dedy Sukrisnadi	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp5.150.000.000
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp7.150.000.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp3.300.000.000
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp1.900.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp2.547.000.000
2019	RSM Indonesia	Benny Andria	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	Rp350.000.000



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal yang efektif berperan penting dalam melindungi investasi dan aset perusahaan, mencakup pengendalian prosedural (*tangible*) serta pengendalian substansi (*intangible*). Sistem ini berfungsi untuk memantau dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal dapat memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan, serta menjamin keandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, dan keamanan aset perusahaan.

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan, Direksi harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko telah tersedia dan diterapkan di seluruh aspek serta lini bisnis perusahaan. Implementasi sistem pengendalian internal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara.

An effective Internal Control System plays an important role in protecting the company's investments and assets, including procedural controls (tangible) and substance controls (intangible). This system serves to monitor and ensure that all business activities are in line with the established strategy. In addition, the Internal Control System can provide recommendations for improvement if irregularities are found, as well as ensure the reliability of reports and information, compliance with regulations, operational efficiency, and security of company assets.

As the organ responsible for managing the company's operations, the Board of Directors must ensure that internal control and risk management systems are in place and implemented in all aspects and lines of business. The implementation of this internal control system is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO

Perusahaan menerapkan kebijakan dan mekanisme berbasis *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam merancang Sistem Pengendalian Internal. Kerangka terintegrasi ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam membangun serta mempertahankan pengendalian internal yang efektif dan efisien, sekaligus beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan operasional.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO meliputi 5 (lima) komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan Pemonitoran.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh Direksi dan manajemen lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan Perusahaan.

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO

The Company applies policies and mechanisms based on the Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) in designing the Internal Control System. This integrated framework is designed to assist companies in building and maintaining effective and efficient internal controls, while adapting to changes in the business and operational environment.

The elements of internal control according to COSO include 5 (five) components, namely:
1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring Activities.

The Internal Control System is a control process implemented continuously by the Board of Directors and other management to provide adequate assurance of the achievement of the Company's vision, mission, goals and objectives.

HASIL REVIU EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

IFG secara konsisten melakukan reviu terhadap pelaksanaan sistem pengendalian yang diterapkan oleh manajemen di setiap tingkat organisasi. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian internal berfungsi secara terpadu dan efektif. Selain itu, manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal serta menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh SKAI. Evaluasi yang dilakukan oleh SKAI disampaikan kepada manajemen, yang kemudian memastikan implementasi dan pemantauan tindak lanjutnya agar sistem pengendalian internal tetap memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dan Komite Audit, bersama dengan Direksi, menyimpulkan bahwa sistem tersebut telah berfungsi dengan baik serta beroperasi dalam batas risiko yang terukur.

RESULT OF THE REVIEW OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

IFG consistently reviews the implementation of the control system implemented by management at every level of the organization. This review aims to ensure that all components of internal control function in an integrated and effective manner. In addition, management is committed to continuously improving the effectiveness of the internal control system and following up on the results of monitoring conducted by Internal Audit Unit. The evaluation conducted by Internal Audit Unit is submitted to management, which then ensures the implementation and monitoring of its follow-up so that the internal control system remains adequate in supporting the achievement of the company's goals and objectives.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on the evaluation of the effectiveness of the internal control system, the Board of Commissioners and the Audit Committee, together with the Board of Directors, concluded that the system was functioning properly and operating within measurable risk limits.



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Dalam menjalankan operasionalnya, IFG menyadari bahwa berbagai risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar kendali, dapat memengaruhi hasil usaha dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang menyeluruh menjadi aspek penting dalam mengelola risiko secara efektif, efisien, dan konsisten, sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

In conducting its operations, IFG realizes that various risks, both controllable and beyond control, can affect the company's business results and performance. Therefore, the implementation of comprehensive risk management is an important aspect in managing risks effectively, efficiently and consistently, as part of the implementation of good corporate governance.

KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap proses bisnis, di mana risiko melekat dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan serta dapat berdampak signifikan pada stabilitas perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, IFG berkomitmen untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien guna memastikan keberlanjutan usaha. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengelolaan risiko secara proaktif, fokus pada risiko utama, serta perhatian terhadap proses pengendalian risiko. IFG terus mengembangkan dan mempertahankan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dalam kerangka tata kelola perusahaan, guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di perusahaan berlandaskan pada regulasi tata kelola yang baik serta praktik manajemen risiko yang umum digunakan dan dapat diterapkan secara efektif serta efisien. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan identifikasi tersebut, perusahaan mengambil langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan risiko, seperti mengadakan asuransi yang relevan atau merancang kontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini, sehingga langkah mitigasi yang tepat dapat diterapkan demi menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan.

COMPANY'S RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION POLICY

Risk management is an integral part of every business process, where risk is inherent in every activity and decision making and can have a significant impact on the stability of the company. In conducting its business, IFG is committed to managing risks effectively and efficiently to ensure business sustainability. The approach adopted includes proactive risk management, focus on key risks, and attention to risk control processes. IFG continues to develop and maintain an integrated risk management system within the corporate governance framework, to achieve the set performance targets.

The implementation and development of risk management in the company is based on good governance regulations and commonly used risk management practices that can be applied effectively and efficiently. The Company is responsible for identifying potential risks, both from external and internal factors. Based on such identification, the company takes preventive measures to minimize risks, such as procuring relevant insurance or drafting contracts that provide legal protection for the company. This approach aims to detect potential risks early, so that appropriate mitigation measures can be implemented to maintain the stability and performance of the company.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Per 31 Desember 2024, Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan Perusahaan dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan dan dibantu oleh 4 orang Kepala Departemen dan 16 staf, dengan detail sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT

As of December 31, 2024, the Risk Management, Compliance and Corporate Policy Division is led by the Head of Risk Management, Compliance and Policy Division and assisted by 4 Department Heads and 16 staff, with details as follows:

Keterangan Jabatan Position Description	Jumlah (orang) Number (people)
Karyawan Tetap Permanent Employees	19
Karyawan Kontrak Contract Employee	2

PEJABAT MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 tanggal 29 April 2020, IFG telah menunjuk 1 (satu) orang Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan.

RISK MANAGEMENT OFFICER

Based on the Board of Directors Decree Number 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 dated April 29, 2020, IFG has appointed 1 (one) Head of Risk Management, Compliance and Policy Division.

Sariniatun
Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan
Menjabat sejak 02 Oktober 2023
Head of Risk Management, Compliance and Policy Division
Serving since October 02, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun
Kelahiran Semarang

Domisili
DKI Jakarta

Pendidikan
- S2 – Keuangan, Universitas Gadjah Mada
- S1 – Matematika, Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja
- 2021 – 2023: BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Direktur Analisis Portofolio
- 2019 – 2021: PT Taspen (Persero), Kepala Divisi/Senior Advisor Manajemen Risiko & Financial Modeling
- 2016 – 2019: PT Zurich Topas Life, Kepala Manajemen Risiko Operasional dan Enterprise
- 2012 – 2015: PT Great Eastern Life, Kepala Divisi/Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- 2009 – 2012: PT BNI Life, Kepala Divisi Manajemen Risiko
- 2010 – 2011: PT BNI Life, Kepala Unit Bisnis Syariah
- 2005 – 2009: PT BNI Securities, Kepala Divisi Manajemen Risiko
- 2003 – 2005: PT Bank BNI, Manager, Hubungan Investor
- 2003 – 2003: PT BNI Life, Fund Manager
- 1996 – 2003: PT Bank BNI, Assistant Manager, Analis Keuangan Senior
- 1995 – 1996: PT Astra International, Analis Keuangan

Personal Data
Indonesian citizen
54 years old
Born in Semarang

Domicile
DKI Jakarta

Education
- Master's Degree- Finance, Gadjah Mada University
- Bachelor's Degree - Mathematics, Gadjah Mada University

Work Experience
- 2021 - 2023: BPJS Ketenagakerjaan, Deputy Director of Portfolio Analysis
- 2019 - 2021: PT Taspen (Persero), Division Head/Senior Advisor Risk Management & Financial Modeling
- 2016 - 2019: PT Zurich Topas Life, Head of Operational and Enterprise Risk Management
- 2012 - 2015: PT Great Eastern Life, Division Head/Director of Risk Management and Compliance
- 2009 - 2012: PT BNI Life, Head of Risk Management Division
- 2010 - 2011: PT BNI Life, Head of Sharia Business Unit
- 2005 - 2009: PT BNI Securities, Head of Risk Management Division
- 2003 - 2005: PT Bank BNI, Manager, Investor Relations
- 2003 - 2003: PT BNI Life, Fund Manager
- 1996 - 2003: PT Bank BNI, Assistant Manager, Senior Financial Analyst
- 1995 - 1996: PT Astra International, Financial Analyst

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola manajemen risiko, memberikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh perusahaan sebelumnya dan seluruh kegiatan yang dilakukan di seluruh unit kerja.

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan sebagai berikut.

1. bertanggung jawab dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perusahaan, pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan perusahaan, serta pengelolaan manajemen risiko sebagai lini kedua dalam tata kelola risiko perusahaan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In conducting its duties, the risk management manager provides decision-making considerations in handling new work that has never been done by the company before and all activities carried out in all work units.

The duties and responsibilities of the Risk Management, Compliance and Policy Division are as follows.

1. responsible for synchronizing and harmonizing corporate policies, implementing and monitoring corporate compliance, and managing risk management as the second line in corporate risk governance;

2. melakukan penyelarasan, reviu, pemantauan dan evaluasi berkala atas program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
3. memastikan penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan agar selaras dengan arahan strategis IFG;
4. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
5. melakukan pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
6. menyusun, melakukan pemantauan, dan melakukan sosialisasi atas strategi manajemen risiko di perusahaan yang mencakup *risk capacity, risk tolerance, risk appetite*, dan *risk limit* dengan melibatkan *risk owner* yang selaras dengan arahan pemegang saham untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
7. melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko di perusahaan yang telah disetujui oleh Direksi;
8. memantau profil risiko, peta risiko, realisasi perhitungan risiko inheren dan risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya baik secara individual perusahaan maupun secara terintegrasi yang melibatkan *risk owner* dan Anggota *Holding*, serta melaporkannya kepada Wakil Direktur Utama dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
9. melakukan *stress testing* dan *internal control testing*;
10. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko di perusahaan;
11. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko di perusahaan;
12. memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki di perusahaan;
13. menyusun dan menyampaikan laporan manajemen risiko perusahaan kepada Wakil Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko secara berkala triwulan;
14. menyusun ketentuan terkait manajemen risiko perusahaan termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
15. memastikan dan melaksanakan program peningkatan budaya sadar risiko di perusahaan;
16. melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian profil risiko, uji ketahanan (*stress testing*), dan uji pengendalian internal (*internal control testing*);
17. melaksanakan kaji ulang manajemen risiko di perusahaan untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, serta ketepatan ketentuan manajemen risiko dan penetapan limit risiko;

2. align, review, monitor and periodically evaluate the work programs and policies of holding members in the areas of risk management, compliance, and policy;
3. ensure the preparation of company work plans both the Company's Work Plan & Budget (RKAP) and Long-Term Plans (RJPP) of holding members in the areas of risk management, compliance, and policy to be in line with IFG's strategic direction;
4. conduct periodic supervision and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of holding members that have been authorized by the GMS in the areas of risk management, compliance, and policy;
5. control and evaluate the achievement of RJPP and RKAP of holding members based on the needs and strategic plans in the areas of risk management, compliance, and policy;
6. develop, monitor, and socialize risk management strategies in the company that include risk capacity, risk tolerance, risk appetite, and risk limit by involving risk owners in line with the direction of shareholders to be approved by the Board of Directors and Board of Commissioners;
7. monitor the implementation of risk management strategies in the company that have been approved by the Board of Directors;
8. Monitor risk profiles, risk maps, realization of inherent risk and residual risk calculations, and realization of risk and cost treatment both individually and in an integrated manner involving risk owners and holding members, and report them to the Deputy President Director and to the Integrated Risk Management Committee;
9. conduct stress testing and internal control testing;
10. periodically review the risk management process in the company;
11. evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure risk in the company;
12. provide recommendations to the first line and/or the Risk Monitoring Committee according to the authority held in the company;
13. compile and submit corporate risk management reports to the Deputy President Director and the Risk Monitoring Committee on a quarterly basis;
14. develop provisions related to enterprise risk management including developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring and control;
15. ensure and implement programs to improve risk awareness culture in the company;
16. conduct risk monitoring on financial conglomerates based on the results of risk profile assessment, stress testing, and internal control testing;
17. carry out a review of risk management in the company to ensure the accuracy of the risk assessment methodology, the adequacy of the implementation of risk management information systems, as well as the accuracy of risk management provisions and the establishment of risk limits;

18. mengkaji risiko dan kepatuhan terkait usulan produk baru, aksi korporasi, dan aktivitas lainnya yang bersifat strategis dan berdampak signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan;
19. melaksanakan dan melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi kepatuhan serta kepatuhan terintegrasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam peraturan mengenai konglomerasi keuangan;
20. melakukan inisiatif guna mendukung terciptanya budaya kepatuhan di setiap unit kerja di perusahaan ;
21. membuat dan/atau melakukan reviu atas *checklist* kepatuhan;
22. memastikan Direksi dan seluruh unit kerja di perusahaan mendapatkan informasi mengenai peraturan perundangan-undangan dan regulasi baru atau perubahannya yang relevan dengan usaha perusahaan;
23. melakukan pemantauan laporan berkala kepada regulator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang berlaku;
24. melakukan pendampingan, reviu, penyelarasan dan memberikan rekomendasi atas penyusunan pedoman, kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis di seluruh unit kerja perusahaan;
25. melakukan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu serta sistem manajemen anti penyuapan di perusahaan;
26. memberikan dukungan kepada divisi pemilik pedoman strategis dalam melakukan implementasi pedoman strategis; dan
27. menyusun, melakukan reviu, dan/atau melakukan evaluasi pedoman strategis kepatuhan dan pedoman strategis manajemen risiko yang berlaku di perusahaan dan Anggota *Holding*.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN KEBIJAKAN

Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

IFG melakukan program pengembangan kompetensi bagi personel Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan secara sistematis dan berjenjang untuk meningkatkan mutu dan kompetensi personel dari Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan. Program pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan para personel divisi dalam program sertifikasi. Berikut disampaikan daftar staf Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan yang telah mengikuti program sertifikasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

18. review risk and compliance related to new product proposals, corporate actions, and other activities that are strategic in nature and have a significant impact on the risk exposure of the financial conglomerate;
19. implement and monitor the implementation of compliance and integrated compliance functions in the company and/or its holding members in accordance with the obligations contained in the regulations on financial conglomeration;
20. undertake initiatives to support the creation of a culture of compliance in every work unit in the company;
21. create and/or review compliance checklists;
22. ensure that the Board of Directors and all work units in the company are informed of new or amended laws and regulations relevant to the company's business;
23. monitor periodic reports to regulators in accordance with applicable laws and regulations;
24. assist, review, harmonize and provide recommendations on the preparation of guidelines, policies, procedures, and technical instructions in all company work units;
25. review and evaluate the implementation of the company's quality management system and anti-bribery management system;
26. provide support to divisions that own strategic guidelines in implementing strategic guidelines; and
27. develop, review, and/or evaluate the compliance strategic guidelines and risk management strategic guidelines applicable in the company and its holding members.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION, COMPLIANCE AND POLICY

The Head of Risk Management, Compliance and Policy Division is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION

IFG conducts competency development programs for Risk Management, Compliance and Policy Division personnel in a systematic and tiered manner to improve the quality and competence of Risk Management, Compliance and Policy Division personnel. The competency development program is carried out by involving the division personnel in the certification program. The following is a list of Risk Management, Compliance and Policy Division staff who have participated in certification programs in 2024:

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Total
CRMO (Certified Risk Management Officer)	2
CRMP (Certified Risk Management Professional)	6
CRA (Certified Risk Associate)	1
CAFO (Certified Anti Fraud Officer)	3
CAFG (Certified Anti Fraud Governance)	2
BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional)	1
GRCP (Governance Risk & Compliance Professional)	3

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

IFG mengikutsertakan Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan dalam beberapa pengembangan kompetensi di tahun 2024. Adapun detail informasi terkait pengembangan kompetensi yang diikuti Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

IFG included the Risk Management, Compliance and Policy Division in several competency developments in 2024. The detailed information related to competency development followed by the Risk Management, Compliance and Policy Division is as follows:

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
1	Ade Candra Waskita - Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Risk Maturity Index Batch* 2 Risk Maturity Index Training Batch 2	08 Maret 24 March 8, 2024	BUMN School of Excellence
2	Ade Candra Waskita - Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department	*Fraud*	*Certified Anti Fraud Officer*	03 Juni 24 June 3, 2024	GRC Management
3	Ade Candra Waskita - Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department	*Fraud*	Training Sertifikasi *Certified Anti Fraud Governance* (CAFG) Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certification Training	24-26 Juli 2024 July 24–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
4	Ade Candra Waskita - Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
5	Ade Candra Waskita - Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department	Keuangan Finance	*Financial Risk Manager Preparation*	27 Aug - 15 Nov 24 August 27–November 15, 2024	Binus
6	Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Risk Maturity Index Batch 2* Risk Maturity Index Training Batch 2	08 Maret 24 March 8, 2024	BUMN School of Excellence
7	Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	*Fraud*	*Certified Anti Fraud Officer*	03 Juni 24 June 3, 2024	GRC Management
8	Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
9	Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	*Fraud*	*Training Sertifikasi Certified Anti Fraud Governance (CAFG)*	24-26 Juli 24 July 24–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
10	Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
11	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Officer*	3-5 Juni 24 June 3–5, 2024	Risk Advisory and Performance
12	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
13	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	*Quality Management System Awareness Training (ISO 9001:2015)*	4-5 September 24 September 4–5, 2024	Robere & Associates
14	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Audit	*Quality Management System Internal Auditor Training (ISO 9001:2015)*	17-18 September 24 September 17–18, 2024	Robere & Associates
15	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Internal Control Testing* (ICT)	17-18 September 24 September 17–18, 2024	CRMS Indonesia
16	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
17	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	ESG	*The A to Z of ESG - Environmental & Social Governance*	21 - 25 Oktober 24 October 21–25, 2024	IFG Corporate University
18	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	*Data Analytics*	Visualisasi Data Interaktif dengan *Google Data Studio* Interactive Data Visualization with Google Data Studio	28 Oktober - 1 November 24 October 28–November 1, 2024	IFG Corporate University
19	Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Bisnis Business	*Project Management* untuk Profesional : Panduan Lengkap PM Project Management for Professionals: The Complete PM Guide	18 - 29 November 24 November 18–29, 2024	IFG Corporate University
20	Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Program Pelatihan dan Sertifikasi *Project Management Professional* Project Management Professional Training and Certification Program	19 - 25 Juni 24 June 19–25, 2024	Avenew
21	Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
22	Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Integrated Governance, Risk, and Compliance*	11-12 September 24 September 11–12, 2024	PT Grajosa Resources
23	Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Multimatics

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
24	Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Manajemen Risiko Risk management	*Business Continuity Management Certified Professional*	7-10 Oktober 2024 October 7–10, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Agency
25	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	*Fraud*	*Certified Anti Fraud Officer*	3 Juni 24 June 3, 2024	GRC Management
26	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kepatuhan Compliance	Seminar Nasional *Integrated Governance, Risk, and Compliance* (GRC) National Seminar on Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)	16-17 Juli 24 July 16–17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditors Association
27	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	ESG	*Awareness ESG Sustainability*	23-24 September 24 September 23–24, 2024	Indonesia Environment & Energy Center (IEC)
28	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kepatuhan Compliance	*Quality Management System Awareness Training (ISO 9001:2015)*	4-5 September 24 September 4–5, 2024	Robere & Associates
29	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	*Audit*	*Quality Management System Internal Auditor Training (ISO 9001:2015)*	17-18 September 24 September 17–18, 2024	Robere & Associates
30	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Internal Control Testing* (ICT) Internal Control Testing (ICT) Training	17-18 September 24 September 17–18, 2024	CRMS Indonesia
31	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
32	Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Akuntansi Accounting	Panduan Lengkap Memahami Akuntansi *Basic* s/d *Intermediate* A Complete Guide to Understanding Basic to Intermediate Accounting	4 - 8 November 24 November 4–8, 2024	IFG Corporate University
33	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Hukum Legal	*Strengthening PDP Law Governance Through Cybersecurity*	15 Mei 24 May 15, 2024	Telkomsigma
34	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Hukum Legal	*Legal Compliance*	8-9 Juli 24 July 8–9, 2024	GRC Training
35	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Program Pelatihan dan Sertifikasi *Project Management Professional* Project Management Professional Training and Certification Program	19 - 25 Juni 24 June 19–25, 2024	Avenew
36	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
37	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	23-24 Juli 24 July 23–24, 2024	Robere & Associates
38	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	11 dan 13 Juni 24 June 11 and 13, 2024	Robere & Associates
39	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics

No.	**Nama dan Jabatan** Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
40	Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
41	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	Sertifikasi ISO 37001 *Anti Bribery Lead Implementer* ISO 37001 Anti Bribery Lead Implementer Certification	10-13 Juni 24 June 10–13, 2024	CRMS
42	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Bisnis Business	Strategi Pemasaran Digital di Era Digital : Taktik dan Langkah Efektif Mencetak *Profit* Optimal Digital Marketing Strategy in the Digital Age: Effective Tactics and Steps to Make Optimal Profits	05 Juni 24 June 5, 2024	OJK Institute
43	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Bisnis Business	Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun Investment Management Strategy for the Insurance and Pension Fund Industry	01 Februari 24 February 1, 2024	OJK Institute
44	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	30 Mei 24 May 30, 2024	OJK Institute
45	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Impact of Technology on Complying with Indonesia's PDP Law | Leveraging technology, like automation and AI, for efficient data privacy management and compliance*	3 April 24 April 3, 2024	Delloite
46	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
47	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
48	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	23 dan 24 Juli 2024 July 23 and 2024, 2024	Robere & Associates
49	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
50	Ezra A. Situmeang - Officer Kepatuhan Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
51	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	13-16 Mei 24 May 13–16, 2024	Risk Advisory and Performance
52	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
53	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
54	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	ESG	*The A to Z of ESG - Environmental & Social Governance*	21 - 25 Oktober 24 October 21–25, 2024	IFG Corporate University

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
55	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	*Data Analytics*	Visualisasi Data Interaktif dengan *Google Data Studio* Interactive Data Visualization with Google Data Studio	28 Oktober - 1 November 24 October 28 - November 1, 2024	IFG Corporate University
56	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	Akuntansi Accounting	Panduan Lengkap Memahami Akuntansi *Basic* s/d *Intermediate* A Complete Guide to Understanding Basic to Intermediate Accounting	4 - 8 November 24 November 4 - 8, 2024	IFG Corporate University
57	Febrina - Officer Analisis Risiko Risk Analysis Officer	Bisnis Business	*Beginning Project Management: Project Management Level One*	11 - 15 November 24 November 11 - 15, 2024	IFG Corporate University
58	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	13-16 Mei 24 May 13-16, 2024	Risk Advisory and Performance
59	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
60	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	11 dan 13 Juni 24 June 11 and 13, 2024	Robere & Associates
61	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20-Aug-24 August 20, 2024	Multimatics
62	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29-Aug-24 August 29, 2024	Vintus
63	Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Head of Policy Department	Akuntansi Accounting	Panduan Lengkap Memahami Akuntansi *Basic* s/d *Intermediate* A Complete Guide to Understanding Basic to Intermediate Accounting	4 - 8 November 2024 November 4 - 8, 2024	IFG Corporate University
64	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Manajemen Risiko Risk management	Bimbingan Teknis Implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian RMI Internal Berbasis SK-8/DKU. MBU/12/2023 di PT Asuransi Kredit Indonesia Technical Guidance on Implementation of Internal RMI Assessment Implementation Guidelines Based on SK-8/DKU. MBU/12/2023 at PT Asuransi Kredit Indonesia	26 Februari 24 February 26, 2024	Askrindo
65	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
66	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	11 dan 13 Juni 24 June 11 and 13, 2024	Robere & Associates
67	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
68	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Hukum Legal	*Workshop* Tipikor dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan dan Perbankan serta Pemerintah Workshop on Corruption Eradication in Financial Management of Companies and Banks and Government	29-30 Mei 24 May 29–30, 2024	LBKI

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
69	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	ESG	*The A to Z of ESG - Environmental & Social Governance*	21 - 25 Oktober 24 October 21–25, 2024	IFG Corporate University
70	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	*Data Analytics*	Visualisasi Data Interaktif dengan *Google Data Studio* Interactive Data Visualization with Google Data Studio	28 Oktober - 1 November 24 October 28–November 1, 2024	IFG Corporate University
71	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Akuntansi Accounting	Panduan Lengkap Memahami Akuntansi *Basic* s/d *Intermediate* *A Complete Guide to Understanding Basic to Intermediate Accounting*	4 - 8 November 24 November 4–8, 2024	IFG Corporate University
72	Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Risk Management Officer	Bisnis Business	*Project Management* untuk Profesional : Panduan Lengkap PM Project Management for Professionals: The Complete PM Guide	18 - 29 November 24 November 18–29, 2024	IFG Corporate University
73	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	*Fraud*	*Certified Anti Fraud Officer*	03 Juni 24 June 3, 2024	GRC Management
74	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	Kepatuhan Compliance	Seminar Nasional *Integrated Governance, Risk, and Compliance* (GRC) National Seminar on Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)	16-17 Juli 24 July 16–17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditors Association
75	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
76	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
77	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
78	Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Head of Compliance Department	Bisnis Business	*Beginning Project Management: Project Management Level One*	11 - 15 November 24 November 11–15, 2024	IFG Corporate University
79	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	13-16 Mei 24 May 13–16, 2024	Risk Advisory and Performance
80	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
81	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	ESG	*Awareness ESG Sustainability*	23-24 September 2024 September 23–24, 2024	Indonesia Environment & Energy Center (IEC)

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
82	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kepatuhan Compliance	*Quality Management System Awareness Training (ISO 9001:2015)*	4-5 Sept 24 September 4–5, 2024	Robere & Associates
83	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	*Audit*	*Quality Management System Internal Auditor Training (ISO 9001:2015)*	17-18 Sept 24 September 17–18, 2024	Robere & Associates
84	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Internal Control Testing* (ICT) Internal Control Testing (ICT) Training	17-18 Sept 24 September 17–18, 2024	CRMS Indonesia
85	Mediana Puspitasari - Senior Officer Kebijakan Senior Policy Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
86	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Officer*	27-29 Mei 24 May 27–29, 2024	Risk Advisory and Performance
87	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Hukum Legal	*Legal Compliance*	8-9 Juli 24 July 8–9, 2024	GRC Training
88	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Kepatuhan Compliance	*Governance Risk and Compliance Professional*	6-8 Agustus 24 August 6–8, 2024	CRMS
89	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
90	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
91	Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Policy Clerk	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
92	Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	26-29 Februari dan 1 Maret 24 February 26–29 and March 1, 2024	RAP Consulting
94	Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Seminar Nasional Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)*	16-17 Juli 24 July 16–17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditors Association
95	Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Integrated Governance, Risk, and Compliance*	11-12 September 24 September 11–12, 2024	PT Grajosa Resources
96	Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
97	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Data Protection Officer*	28-30 Mei 24 May 28–30, 2024	Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia Indonesian Data Privacy Professionals Association

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
98	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Certified Governance Risk and Compliance Professional*	6-8 Agustus 24 August 6–8, 2024	CRMS
99	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Seminar Nasional Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)*	16-17 Juli 24 July 16–17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditors Association
100	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	23 - 24 Juli 24 July 23–2024 2024	Robere & Associates
101	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Integrated Governance, Risk, and Compliance*	11 - 12 September 24 September 11–12, 2024	PT Grajosa Resources
102	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Quality Management System Awareness Training (ISO 9001:2015)*	4-5 Sept 24 September 4–5, 2024	Robere & Associates
103	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	*Audit*	*Quality Management System Internal Auditor Training (ISO 9001:2015)*	17-18 Sept 24 September 17–18, 2024	Robere & Associates
104	Nuraemy Firdaus - Senior Staff Kepatuhan Senior Compliance Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
105	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Program Pelatihan dan Sertifikasi *Project Management* Professional Project Management Professional Training and Certification Program	19 - 25 Juni 24 June 19–25, 2024	Avenew
106	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR
107	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
108	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Kepatuhan Compliance	*Quality Management System Awareness Training (ISO 9001:2015)*	4-5 Sept 24 September 4–5, 2024	Robere & Associates
109	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	*Audit*	*Quality Management System Internal Auditor Training (ISO 9001:2015)*	17-18 Sept 24 September 17–18, 2024	Robere & Associates
110	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
111	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
112	Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Senior Risk Analysis Officer	Keuangan Finance	*Financial Risk Manager Preparation*	27 Agustus - 15 November 24 August 27–November 15, 2024	Binus

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
113	Ridwan Nur Arifin - Officer Kebijakan Policy Officer	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	29-30 Mei, 2-3 Juni 24 May 29–30, June 2–3, 2024	Risk Advisory and Performance
114	Ridwan Nur Arifin - Officer Kebijakan Policy Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
115	Ridwan Nur Arifin - Officer Kebijakan Policy Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	23 - 24 Juli 24 July 23–2024	Robere & Associates
116	Ridwan Nur Arifin - Officer Kebijakan Policy Officer	*Audit*	*Anti Bribery Management System Internal Auditor Training (ISO 37001 : 2016)*	11 dan 13 Juni 24 June 11 and 13, 2024	Robere & Associates
117	Ridwan Nur Arifin - Officer Kebijakan Policy Officer	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
118	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Risk Maturity Index Batch* 1 Risk Maturity Index Training Batch 1	6-7 Februari 24 February 6–7, 2024	BUMN School of Excellence
119	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
120	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	Kepatuhan Compliance	TASPEN *GRC Insight Forum 2024* TASPEN GRC Insight Forum 2024	19 September 24 September 19, 2024	PT Taspen
121	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	Kegiatan usaha korporasi Corporate business activities	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
122	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
123	Sariniatun – Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan Head of Risk Management, Compliance and Policy Division	ESG	*ESG Investing*	18 Sepember - 20 November 2024 September 18–November 20, 2024	Kaplan Edupac
124	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	*Governance Risk and Compliance Professional*	6-8 Agustus 24 August 6–8, 2024	CRMS

No.	**Nama dan Jabatan** Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
125	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	Seminar *Nasional Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)* National Seminar on Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC)	16-17 Juli 24 July 16–17, 2024	Asosiasi Auditor Internal Internal Auditors Association
126	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
127	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
128	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Internal Control Testing* (ICT) Internal Control Testing (ICT) Training	17-18 September 24 September 17–18, 2024	CRMS Indonesia
129	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kegiatan usaha korporasi	Sosialisasi *Awareness* COBIT 2019 COBIT 2019 Awareness	20 Agustus 24 August 20, 2024	Multimatics
130	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
131	Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	*Data Analytics*	Visualisasi Data Interaktif dengan *Google Data Studio* *Interactive Data Visualization with Google Data Studio*	28 Oktober - 1 November 24 October 28–November 1, 2024	IFG Corporate University
132	Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Policy Staff	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Management Professional*	13-16 Mei 24 May 13–16, 2024	Risk Advisory and Performance
133	Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Policy Staff	Kepatuhan Compliance	*Governance Risk and Compliance Professional*	6-8 Agustus 24 August 6–8, 2024	CRMS
134	Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Policy Staff	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
135	Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Policy Staff	ESG	*Awareness ESG Sustainability*	23-24 September 24 September 23–24, 2024	Indonesia Environment & Energy Center (IEC)
136	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Manajemen risiko Risk management	*Certified Risk Associate (CRA)*	26-27 Juni 24 June 26–27, 2024	Tap Kapital Indonesia

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
137	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	ESG	*Masterclass Program Series XXIII Life Cycle Assessment and Carbon Reduction Strategy*	25-26 Juli 24 July 25–26, 2024	LSPMR Risk Management Professional Certification Agency
138	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Compliance Management System Awareness Training (ISO 37301: 2021)*	28 Juni 24 June 28, 2024	Robere & Associates
139	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Integrated Governance, Risk, and Compliance*	11-12 September 24 September 11–12, 2024	PT Grajosa Resources
140	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Manajemen risiko Risk management	Pelatihan *Internal Control Testing* (ICT) Internal Control Testing (ICT) Training	17-18 September 24 September 17–18, 2024	CRMS Indonesia
141	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Kepatuhan Compliance	*Socialization and FGD of Implementation of Data Protection Law in IFG*	29 Agustus 24 August 29, 2024	Vintus
142	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	Bisnis Business	*Project Management* untuk Profesional : Panduan Lengkap PM Project Management for Professionals: The Complete PM Guide	18 - 29 November 24 November 18–29, 2024	IFG Corporate University
143	Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Senior Risk Management Officer	*Soft Skill*	Pelatihan Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif *Batch* 3 Effective Office Manuscript Writing Skills Training Batch 3	29 November 24 November 29, 2024	Narabahasa

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2024

Proses pengelolaan manajemen risiko di perusahaan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perusahaan menerapkan manajemen risiko berdasarkan *Enterprise Risk Management* (ERM) dengan standar internasional ISO 31000 versi terbaru tahun 2018. Standar ini memberikan panduan penerapan risiko yang mencakup 3 (tiga) elemen utama: prinsip (*principle*), yaitu filosofi dan dasar praktik manajemen risiko; kerangka kerja (*framework*), yaitu sistem yang terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan risiko di seluruh organisasi; serta proses (*process*), yakni rangkaian aktivitas pengelolaan risiko yang berkesinambungan dan saling terkait. Manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*governance*) dan harus terintegrasi dalam setiap proses organisasi.

Mengacu kepada ISO 31000:2018, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai yang diwujudkan dengan:
1. meningkatkan kinerja;
2. mendorong inovasi; dan
3. mendukung pencapaian sasaran.

Adapun pelaksanaan penerapan manajemen risiko selama tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Departemen Manajemen Risiko
Program kerja meliputi:
1. Peningkatan Budaya Sadar Risiko (*Risk Awareness*) di Lingkungan IFG
   IFG menyusun *framework* budaya risiko dan kepatuhan dan mengimplementasikan tahap awal peningkatan budaya risiko dan kepatuhan di IFG serta mengkoordinasikan implementasinya di Anggota *Holding*. Adapun *deliverables* dari aktivitas ini meliputi:
   a. laporan *gap analysis* budaya sadar risiko di lingkungan IFG;
   b. laporan hasil survei budaya sadar risiko di lingkungan IFG beserta daftar pernyataan survei;
   c. laporan hasil wawancara budaya sadar risiko di lingkungan IFG;
   d. laporan hasil *benchmarking* budaya sadar risiko di IFG;
   e. laporan akhir *framework* dan *roadmap* budaya risiko untuk 5 (lima) tahun (2024-2029); dan
   f. laporan *workshop* dan sosialisasi *framework* budaya sadar risiko di lingkungan IFG.

2. Pencapaian Kualifikasi Organ Pengelola Risiko
   IFG melakukan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko melalui program sertifikasi dan pelatihan yang dijalankan oleh Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan IFG. Sebanyak 55 dari 57 orang yang terkategorikan organ pengelola risiko atau 96,49% telah terkualifikasi sesuai persyaratan yang tercantum dalam SK-3/DKU.MBU/05/2023.

IMPLEMENTATION THE RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND POLICY DIVISION DUTIES IN 2024

The risk management process in the company continues to develop from year to year. The company implements risk management based on Enterprise Risk Management (ERM) with the latest international standard ISO 31000 version 2018. This standard provides guidance on the implementation of risk that includes 3 (three) main elements: principle, which is the philosophy and basis of risk management practices; framework, which is a structured and systematic system for managing risk throughout the organization; and process, which is a series of continuous and interrelated risk management activities. Risk management is part of corporate governance and must be integrated in every organizational process.

Referring to ISO 31000:2018, the purpose of risk management is to create and protect value which is realized by:

1. improving performance;
2. encouraging innovation; and
3. supporting the achievement of targets.

The implementation of risk management during 2024 is described as follows:

Risk Management Department
The work program includes:
1. Improving Risk Awareness Culture in IFG Environment

   IFG developed a risk and compliance culture framework and implemented the initial phase of risk and compliance culture improvement in IFG and coordinated its implementation in holding members. The deliverables of this activity include:
   a. gap analysis report on risk awareness culture in IFG environment;
   b. report on the survey results of risk-aware culture in IFG environment along with the list of survey statements;
   c. interview report on risk-aware culture in IFG environment;
   d. report on the results of risk-aware culture benchmarking at IFG;
   e. final report on risk culture framework and roadmap for 5 (five) years (2024-2029); and
   f. report on workshop and dissemination of risk awareness culture framework within IFG.

2. Achievement of Risk Management Organ Qualification
   IFG fulfills the qualifications of risk management organs through certification and training programs run by IFG's Learning and Corporate Culture Division. A total of 55 out of 57 people categorized as risk management organs or 96.49% have been qualified according to the requirements stated in SK-3/DKU.MBU/05/2023.

3. Laporan *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2024 ke Kementerian BUMN
   IFG melakukan penilaian RMI tahun 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) dengan hasil sebagai berikut.
   a. Berdasarkan hasil penilaian Aspek Dimensi RMI (*Risk Maturity Index*) – IFG secara keseluruhan telah mencapai Level 3 (3.8) – Fase Praktik yang Baik (+), dari 5 Level RMI, dengan capaian tertinggi pada Dimensi Proses dan Kontrol Risiko pada Level 4 (4.3) – Fase Praktik yang Lebih Baik.
   b. Selanjutnya, berdasarkan hasil Penilaian Aspek Kinerja, nilai Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final *Rating*) adalah AAA dan nilai untuk Peringkat Komposit Risiko mencapai 5.

   Sehingga capaian RMI berbasis kinerja untuk IFG tahun 2024 mencapai Level 3 (3.05) – Fase Praktik yang Baik.

4. Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
   IFG menjalankan roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko sebagai hasil laporan *Risk Maturity Index* tahun 2023. Program perbaikan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan di tahun 2024 mencapai 100% dari target, atau sebanyak 40 program yang perlu dilakukan di tahun 2024, termasuk *enhancement* penambahan modul *Internal Control Testing* pada aplikasi i-ERM.

5. Penyelesaian *Stress Testing* dan *Mitigation Plan*
   IFG telah menyampaikan laporan *stress testing* tahun 2024 ke Kementerian BUMN melalui Surat Direksi Nomor 002/DIREKSI-DMR/B/BPUI/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal Penyampaian *Soft File* Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan II 2024, *Internal Control Testing* dan *Stress Testing* 2024.
6. Penyelesaian Dokumen *Contingency Plan*
   IFG telah menyusun dokumen *contingency plan* yang ditetapkan dalam Surat Dewan Komisaris dan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Rencana Darurat Keuangan (*Financial Contingency Plan*) dan telah disampaikan ke Kementerian BUMN pada tanggal 28 Juni 2024. Selain itu, IFG juga telah menyusun dokumen *Business Continuity Management* mencakup *Business Continuity Plan* (BCP), *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assesment* (RA) dan *Recovery Strategies* (RS) pada tanggal 30 September 2024.

3. Risk Maturity Index (RMI) Report 2024 to the Ministry of SOEs
   IFG conducted an RMI assessment in 2024 in accordance with the Technical Guidelines of the Ministry of SOEs Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 dated December 6, 2023 concerning Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment with the following results.
   a. Based on the results of the RMI (Risk Maturity Index) Dimension Aspect assessment - IFG in its entirety has reached Level 3 (3.8) - Good Practice Phase (+), out of 5 RMI Levels, with the highest achievement in the Risk Process and Control Dimension at Level 4 (4.3) - Better Practice Phase.
   b. Furthermore, based on the results of the Performance Aspect Assessment, the Final Rating Health Level score is AAA and the score for the Risk Composite Rating reaches 5.

   As a result, the performance-based RMI achievement for IFG in 2024 reaches Level 3 (3.05) - Good Practice Phase.

4. Roadmap for Improvement of Risk Management Implementation
   IFG implemented a roadmap to improve risk management implementation for the Risk Maturity Index report in 2023. The risk management implementation improvement program implemented in 2024 reached 100% of the target, or as many as 40 programs that need to be carried out in 2024, including enhancement of the addition of the Internal Control Testing module in the i-ERM application.
5. Completion of Stress Testing and Mitigation Plan
   IFG has submitted the 2024 stress testing report to the Ministry of SOEs through Board of Directors Letter Number 002/DIREKSI-DMR/B/BPUI/VII/2024 dated July 26, 2024 regarding Submission of Soft File of Risk Management Monitoring Report for the Second Quarter of 2024, Internal Control Testing and Stress Testing 2024.
6. Completion of Contingency Plan Document
   IFG has prepared a contingency plan document stipulated in the Letter of the Board of Commissioners and Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 2 of 2024 dated June 28, 2024 concerning the Financial Contingency Plan and has been submitted to the Ministry of SOEs on June 28, 2024. In addition, IFG has also prepared Business Continuity Management documents including Business Continuity Plan (BCP), Business Impact Analysis (BIA), Risk Assessment (RA) and Recovery Strategies (RS) on September 30, 2024.

Departemen Kepatuhan

Program kerja meliputi:

1. Resertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

   IFG berkomitmen menerapkan manajemen anti penyuapan yang terdapat dalam persyaratan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP) di mana IFG telah memiliki sertifikasi ISO SMAP sejak tahun 2021. ISO SMAP ini bertujuan untuk menetapkan, memelihara dan meningkatkan program anti penyuapan yang dapat mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani risiko penyuapan dalam IFG.

   Fungsi kepatuhan anti penyuapan sesuai dengan standar ISO SMAP, bertugas dalam melakukan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip SMAP di IFG serta melaporkan kinerja SMAP kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

   Pada tahun 2024, siklus sertifikasi ISO SMAP ini sudah harus diperbaharui. Oleh karenanya, IFG telah melakukan resertifikasi ISO SMAP di tahun 2024 dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Sertifikasi.

2. Implementasi *Roadmap* Kepatuhan

   Pada tahun 2023, IFG telah menyusun *Roadmap* Kepatuhan tahun 2023-2027 yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap setiap kewajiban yang terdapat dalam peraturan, serta meningkatkan kepedulian dari seluruh Insan IFG terhadap implementasi kepatuhan di Perusahaan. Keseluruhan inisiatif strategis dan program kegiatan dirancang untuk mencapai sasaran dan strategi kepatuhan selama periode tahun 2023-2027 berdasarkan tema tahunan yang menggambarkan perjalanan pengembangan praktik manajemen kepatuhan secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2027.

   Tema *Roadmap* Kepatuhan pada tahun 2024 adalah kolaborasi, dengan sasaran "Terbentuknya kolaborasi sinergis antar lini dalam tata kelola kepatuhan berbasis model tiga lini pada praktik manajemen kepatuhan". IFG juga telah menetapkan strategi *Roadmap* Kepatuhan pada tahun 2024 yaitu "peningkatan partisipasi aktif para pihak di semua lini dan tata kelola kepatuhan terintegrasi secara horisontal maupun vertikal". Strategi ini diturunkan ke dalam beberapa langkah inisiatif strategis, yaitu:

   a. *Tone from the top* kepatuhan sebagai tanggung jawab semua insan IFG dan *Tone from the top* pengelolaan kepatuhan sebagai penentu kinerja unggul

      IFG melaksanakan program sosialisasi yang bertujuan untuk membentuk *shared belief* kepatuhan yaitu kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab unit kerja tertentu. Selain itu dengan membentuk *shared belief*

Compliance Department

The work program includes:

1. ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Recertification

   IFG is committed to implementing anti-bribery management contained in the requirements of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ISO SMAP) in which IFG has been ISO SMAP certified since 2021. ISO SMAP aims to establish, maintain and improve an anti-bribery program that can prevent, detect, report and handle bribery risks within IFG.

   The anti-bribery compliance function, in accordance with the ISO SMAP standard, is responsible for developing, fostering, implementing and enforcing SMAP principles in IFG and reporting SMAP performance to the Board of Directors and Board of Commissioners.

   In 2024, the ISO SMAP certification cycle shall be renewed. Therefore, IFG has recertified ISO SMAP in 2024 and received a recommendation from the Certification Body.

2. Implementation of Compliance Roadmap

   In 2023, IFG has developed the Compliance Roadmap 2023-2027 which aims to enhance the Company's credibility by ensuring compliance with every obligation contained in the regulations, as well as increasing the awareness of all IFG People towards compliance implementation in the Company. The overall strategic initiatives and activity programs are designed to achieve compliance goals and strategies over the period 2023-2027 based on annual themes that illustrate the journey of gradual development of compliance management practices from 2023 to 2027.

   The theme of the Compliance Roadmap in 2024 is collaboration, with the objective of "Establishing synergistic collaboration between lines in compliance governance based on the three-line model of compliance management practices". IFG has also set the Compliance Roadmap strategy in 2024, namely "increased active participation of parties at all levels and integrated compliance governance horizontally and vertically". This strategy is derived into several strategic initiative steps, namely:

   a. Tone from the top compliance as the responsibility of all IFG people and Tone from the top compliance management as a determinant of superior performance

      IFG implements a dissemination program that aims to form a shared belief of compliance, namely compliance is a shared responsibility not only the responsibility of certain work units. In addition, by forming a shared belief of compliance as a

kepatuhan sebagai penentu kinerja unggul melalui arahan tertulis maupun lisan dari Direksi dan Dewan Komisaris dengan penayangan *videotron*, *screensaver laptop* dan diseminasi *email* kepada seluruh insan IFG.

b. Persiapan operasional pengelolaan kepatuhan terintegrasi, serta evaluasi dan peningkatan kinerja pengelolaan kepatuhan
IFG berkolaborasi dengan seluruh pemilik risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi kewajiban kepatuhan yang bersifat *mandatory*, termasuk di antaranya dengan membuat analisa kesenjangan, kajian kepatuhan dan *compliance checklist*.
c. Standarisasi kompetensi kepatuhan
IFG telah memetakan kebutuhan kompetensi kepatuhan melalui *training needs analysis* yang dilengkapi oleh Departemen Kepatuhan kepada Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan dalam rangka memenuhi kompetensi yang disyaratkan ataupun untuk mengembangkan kemampuan baik *hard skill* maupun *soft skill*.
d. Penyediaan pimpinan kepatuhan yang kompeten
IFG berkolaborasi bersama Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan untuk melaksanakan program sertifikasi kompetensi kepatuhan sesuai standar kompetensi bidang GRC bagi *Top Manajemen*.
e. Pengembangan pusat digital kepatuhan terintegrasi

IFG telah mengembangkan sistem pusat digital kepatuhan terintegrasi melalui aplikasi *i-Compliance* untuk mengambil, mengukur, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja kepatuhan Anggota *Holding* dalam bentuk *dashboard* infografis.

3. Pengembangan tata kelola kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021.
Penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan sesuai standar ISO 37301:2021 sebagai salah satu fondasi dalam implementasi *Roadmap* Kepatuhan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, proporsionalitas, transparansi dan keberlanjutan, mampu membantu IFG untuk membangun, mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif dan responsif di Perusahaan.

4. *Enhancement* Aplikasi *i-Compliance*
Salah satu tugas yang diamanatkan oleh pemegang saham dengan penetapan IFG sebagai perusahaan *Holding* adalah agar IFG melakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko dengan didukung oleh implementasi fungsi kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, IFG telah memiliki aplikasi *i-Compliance*, sebagai perangkat yang digunakan oleh IFG dalam melakukan implementasi program Kepatuhan terhadap Peraturan dan pemantauan

determinant of superior performance through written and verbal directions from the Board of Directors and Board of Commissioners with videotron displays, laptop screensavers and email dissemination to all IFG people.
b. Operational preparation of integrated compliance management, as well as evaluation and improvement of compliance management performance
IFG collaborates with all compliance risk owners to identify mandatory compliance obligations, including gap analysis, compliance assessment and compliance checklist.

c. Standardization of compliance competencies
IFG has mapped compliance competency needs through training needs analysis completed by the Compliance Department to the Learning and Corporate Culture Division to fulfill the required competencies or to develop both hard and soft skills.

d. Provision of competent compliance leaders
IFG collaborates with the Learning and Corporate Culture Division to implement a compliance competency certification program in accordance with the GRC field competency standards for Top Management.
e. Development of an integrated compliance digital center
IFG has developed an integrated compliance digital hub system through the i-Compliance application to capture, measure, analyze, evaluate and report on holding members' compliance performance in the form of infographic dashboards.

3. Development of compliance governance based on ISO 37301:2021 standard.
The implementation of Compliance Management System according to ISO 37301:2021 standard as one of the foundations in the implementation of Compliance Roadmap is based on the principles of good governance, proportionality, transparency, and sustainability, able to help IFG to build, develop, implement, evaluate, maintain and improve an effective and responsive compliance management system in the Company.

4. i-Compliance Application Enhancement
One of the tasks mandated by shareholders with the establishment of IFG as a holding company is for IFG to strengthen governance and risk management supported by the implementation of regulatory compliance functions.

In order to support this task, IFG has an i-Compliance application, as a tool used by IFG in implementing the Regulatory Compliance program and monitoring monthly compliance reports submitted by holding

terhadap laporan bulanan kepatuhan yang disampaikan oleh Anggota *Holding*. Hal tersebut sejalan dengan salah satu program kerja di IFG, yaitu *enhancement* aplikasi *i-Compliance* di tahun 2024 yang bertujuan seluruh IFG Group dapat mengimplementasikan dan melakukan penguatan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dengan memanfaatkan sistem atau teknologi yang ada.

members. This is in line with one of the work programs at IFG, namely the enhancement of the i-Compliance application in 2024, which aims to enable the entire IFG Group to implement and strengthen the compliance function in an integrated manner by utilizing existing systems or technologies.

Sebagai bentuk optimalisasi penggunaan aplikasi *i-Compliance*, IFG telah melakukan pengembangan lanjutan aplikasi sesuai dengan *input* yang diterima oleh para pengguna aplikasi *i-Compliance*, agar dapat mengakomodir kebutuhan dalam penguatan fungsi kepatuhan di lingkungan IFG *Group*. Dalam pengembangan lanjutan tersebut, IFG telah melakukan penambahan fungsi berupa *repository* peraturan, buku saku kepatuhan, *monitoring* pemenuhan komite, Dewan Komisaris dan penambahan laporan lainnya untuk mengakomodir kebutuhan laporan lainnya pada Anggota *Holding*.

As a form of optimizing the use of i-Compliance application, IFG has done further development of the application in accordance with the input received by i-Compliance application users, in order to accommodate the needs in strengthening the compliance function within IFG Group. In the further development, IFG has added functions in the form of a regulatory repository, compliance handbook, monitoring the fulfillment of committees, the Board of Commissioners and the addition of other reports to accommodate the needs of other reports on holding members.

5. Implementasi Pemenuhan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
   Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), IFG berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terhadap perusahaan.

   Kegiatan yang dilakukan IFG dalam pemenuhan UU PDP antara lain:
   a. melakukan analisa terhadap *exposure* dan/atau risiko di lingkungan IFG atas UU PDP;
   b. merumuskan *Data Privacy Impact Assessment* (DPIA) untuk selanjutnya dilengkapi oleh unit kerja yang akan melakukan pemrosesan data pribadi;
   c. merumuskan *Record of Processing Activities* (ROPA) untuk dilengkapi oleh setiap unit kerja yang memiliki pemrosesan data pribadi;
   d. melakukan standarisasi klausula pelindungan data pribadi dan informasi rahasia berdasarkan hasil dari *benchmarking*;
   e. memberikan rekomendasi atas kebutuhan DPO di IFG;
   f. memberikan rekomendasi teknologi dan penerapan UU PDP; dan
   g. melakukan sosialisasi pelindungan data pribadi dan informasi rahasia yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2024 dan Desember 2024.

5. Implementation of Fulfillment of Personal Data Protection Law
   In connection with the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), IFG is committed to ensuring compliance with regulations applicable to the company.

   Activities done by IFG in fulfillment of the PDP Law include:
   a. analyze the exposure and/or risk within IFG on the PDP Law;
   b. formulate a Data Privacy Impact Assessment (DPIA) to be subsequently completed by the work unit that will perform personal data processing;
   c. formulate a Record of Processing Activities (ROPA) to be completed by each Work unit that has personal data processing;
   d. standardize the clauses on the protection of personal data and confidential information based on the results of benchmarking;
   e. provide recommendations on the need for DPOs in IFG;
   f. provide recommendations on technology and implementation of the PDP Law; and
   g. conduct dissemination of the protection of personal data and confidential information that has been conducted in August 2024 and December 2024.

6. Peningkatan Budaya Kepatuhan di Lingkungan IFG
   IFG melakukan upaya untuk meningkatkan budaya sadar kepatuhan melalui pembuatan konten pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh Insan IFG. Pada tahun 2024 IFG telah membuat konten *e-learning* dengan materi:

6. Improving Compliance Culture in IFG Environment
   IFG makes efforts to improve compliance awareness culture through the creation of learning content that can be accessed by all IFG People. In 2024 IFG has created e-learning content with material:

a. Kepatuhan;
b. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
c. Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
d. Kepatuhan Persaingan Usaha.

Pembelajaran tersebut memiliki tema utama yaitu penerapan AKHLAK dalam fungsi kepatuhan di lingkungan IFG. Adapun nilai AKHLAK sendiri menggambarkan penerapan Kepatuhan yang diterapkan di IFG sebagai jawaban dari tantangan *risk culture* yang terus berubah. Dari tema tersebut, pembelajaran ini akan dilakukan melalui media *Learning Management System* (LMS) yang sudah dimiliki oleh IFG, melalui modul yang telah dibuat dan dicantumkan dalam LMS ini.

Upaya untuk meningkatkan budaya sadar kepatuhan ini juga dilakukan melalui penayangan video BOD dan BOC *message* perihal pentingnya kepatuhan melalui layar monitor di lingkungan kantor IFG, mengirimkan pesan perihal kepatuhan melalui diseminasi *e-mail* kepada seluruh insan IFG dan menayangkan pada *screen saver* insan IFG.

7. *One on One* dengan Fungsi Kepatuhan Anggota *Holding*
IFG telah melakukan fungsi pengawasan kepatuhan melalui *one-on-one meeting* secara triwulanan kepada Anggota *Holding* khususnya untuk unit kerja kepatuhan baik secara daring maupun luring. Pertemuan tersebut merupakan wadah untuk mendiskusikan laporan bulanan kepatuhan yang telah disampaikan oleh Anggota *Holding* kepada IFG melalui aplikasi *i-Compliance*, menyampaikan kendala dan tindak lanjut atas implementasi kepatuhan serta menangkap isu-isu kepatuhan lainnya yang membutuhkan eskalasi atau perhatian kepada manajemen.

8. *Focus Group Discussion* (FGD)
Dalam rangka memperkuat sinergi, fungsi, dan koordinasi satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan IFG dan Anggota *Holding*, pada tahun 2024 telah dilaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) sebanyak 4 (empat) kali dengan mengambil topik, antara lain :
a. Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021 pada bulan Juni 2024;
b. Implementasi UU PDP di IFG *Group* pada bulan Agustus 2024;
c. Penggunaan Aplikasi *i-Compliance* pada bulan Desember 2024; dan
d. Implementasi UU PDP untuk unit kerja yang memiliki pemrosesan data pribadi di bulan Desember 2024 (lanjutan).

a. Compliance;
b. Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, & Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
c. Anti-bribery Management System; and
d. Competition Compliance.

The learning has the main theme of the application of AKHLAK in the compliance function within IFG. The value of AKHLAK itself describes the implementation of Compliance applied at IFG as an answer to the ever-changing risk culture challenges. From this theme, this learning will implemented through the Learning Management System (LMS) media already owned by IFG, through modules that have been created and included in this LMS.

Efforts to improve the culture of compliance awareness are also completed through the display of Board of Directors' and Board of Commissioners' message videos regarding the importance of compliance through monitor screens in the IFG office environment, sending messages regarding compliance through e-mail dissemination to all IFG people and displaying on IFG people's screen savers.

7. One on One with Holding Member Compliance Function
IFG has performed the compliance monitoring function through quarterly one-on-one meetings with holding members, especially for the compliance work unit both online and offline. The meeting is a forum to discuss the monthly compliance reports that have been submitted by the holding members to IFG through the i-Compliance application, convey constraints and follow-up on compliance implementation and capture other compliance issues that require escalation or attention to management.

8. Focus Group Discussion (FGD)
To strengthen the synergy, function, and coordination of the work unit in charge of the compliance function of IFG and its holding members, in 2024 a Forum Group Discussion (FGD) has been held 4 (four) times by taking topics, among others:
a. Compliance Management System based on ISO 37301:2021 standard by June 2024;
b. Implementation of the PDP Law at IFG Group in August 2024;
c. Use of i-Compliance Application by December 2024; and
d. Implementation of the PDP Law for work units that have personal data processing in December 2024 (continued).

Departemen Kebijakan

Program kerja meliputi:

1. *Enhancement i-Regulation*
   Salah satu tugas yang diamanatkan oleh pemegang saham IFG dengan penetapan IFG sebagai perusahaan *Holding* adalah agar IFG melakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan *Holding* dan Anggota *Holding* dengan didukung melalui implementasi fungsi kebijakan terintegrasi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam *Roadmap* Kebijakan Terintegrasi yaitu ketersediaan dan kesesuaian seluruh peraturan berdasarkan pemetaan proses bisnis di *Holding* dan Anggota *Holding*. Dalam rangka mendukung hal tersebut, IFG beserta Anggota *Holding* telah memiliki aplikasi *i-Regulation* yang bertujuan untuk digitalisasi proses pengelolaan peraturan internal perusahaan secara *end to end process* dari mulai penyusunan, *monitoring*, evaluasi, hingga pelaporan peraturan internal perusahaan yang terintegrasi dengan bisnis proses guna mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Pada saat implementasi penggunaan aplikasi *i-Regulation* terdapat berbagai masukan dari pengguna dan kebutuhan lanjutan untuk mengembangkan fitur agar dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan peraturan internal. IFG telah mencantumkan *enhancement* aplikasi *i-Regulation* sebagai salah satu program kerja di tahun 2024 yang bertujuan agar *Holding* dan Anggota *Holding* dapat mengimplementasikan fungsi kebijakan secara terintegrasi melalui aplikasi *i-Regulation*. Dalam *enhancement* aplikasi *i-Regulation* ini IFG telah melakukan beberapa penyesuaian pada *menu dashboard* utama, *i-business process*, alur proses penyusunan peraturan, *user interface, repository* peraturan dan pengintegrasian aplikasi *i-Regulation* dengan *microsoft office* 365 serta *i-Flow*.

2. *Utilisasi i-Regulation*
   Pemanfaatan *i-Regulation* dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti sosialisasi fitur aplikasi, pelatihan pengguna, serta integrasi dengan sistem lainnya. Aplikasi ini memungkinkan karyawan untuk dengan mudah mencari, memahami, dan mengetahui ketercukupan peraturan internal yang berlaku yang terintegrasi dengan bisnis proses yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk memastikan penggunaan *i-Regulation* dapat terutilisasi dengan baik, IFG telah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan *i-Regulation* kepada unit kerja/fungsi kebijakan di seluruh Anggota *Holding*. Saat ini, seluruh Anggota *Holding* telah menyimpan peraturan-peraturan internal di masing-masing entitasnya dalam aplikasi *i-Regulation* dan telah melakukan kampanye internal kepada karyawan di Anggota *Holding*.

3. Peningkatan Budaya/*Awareness* terhadap Pengelolaan Peraturan
   Peraturan internal memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan, efektivitas operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Oleh karena itu, membangun kesadaran dan budaya terhadap pengelolaan peraturan internal menjadi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan

Policy Department

The work program includes:

1. i-Regulation Enhancement
   One of the tasks mandated by IFG shareholders with the establishment of IFG as a holding company is for IFG to strengthen governance and risk management in the holding environment and holding members supported by the implementation of an integrated policy function in accordance with the objectives set out in the Integrated Policy Roadmap, namely the availability and suitability of all regulations based on business process mapping in the holding and holding members. Therefore, IFG and its holding members have i-Regulation application which aims to digitize the process of managing internal company regulations in an end-to-end process from the preparation, monitoring, evaluation, to reporting of internal company regulations that are integrated with business processes to support good corporate governance. During the implementation of the i-Regulation application, there were various inputs from users and further needs to develop features to accommodate the needs in managing internal regulations. IFG has included i-Regulation application enhancement as one of the work programs in 2024 which aims to enable the holding company and its holding members to implement integrated policy functions through i-Regulation application. In this i-Regulation application enhancement, IFG has made several adjustments to the main dashboard menu, i-business process, regulation drafting process flow, user interface, regulation repository and integration of i-Regulation application with Microsoft Office 365 and i-Flow.

2. Utilization of i-Regulation
   The utilization of i-Regulation is done through various initiatives, such as dissemination of application features, user training, and integration with other systems. This application allows employees to easily search, understand, and know the adequacy of applicable internal regulations that are integrated with the business processes carried out by the company. To ensure the use of i-Regulation can be properly utilized, IFG has conducted socialization/dissemination and training on the use of i-Regulation to work units/policy functions in all holding members. Currently, all holding members have stored internal regulations in each entity in the i-Regulation application and have conducted internal campaigns to employees in the holding members.

3. Improved Culture/Awareness of Regulatory Management
   Internal regulations play a crucial role in ensuring compliance, operational effectiveness, and the implementation of good corporate governance (GCG). Therefore, building awareness and culture towards the management of internal regulations is important in creating an orderly and integrity work environment.

berintegritas. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran ini meliputi sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan IFG antara lain melalui penyebarluasan materi *awareness* penyusunan peraturan internal, serta pelatihan pengelolaan peraturan bagi setiap karyawan di Departemen Kebijakan.

4. Pemetaan *Business Process Model Notation* (BPMN) di Anggota *Holding*
   Penguatan bisnis proses yang telah dilakukan IFG dengan menggunakan metode *Business Process Model Notation* (BPMN) Level 0 sampai dengan Level 5 pada tahun 2023 telah mendapatkan gambaran utuh suatu proses bisnis yang berjalan di IFG dengan memperlihatkan secara visual gambaran *input-output* serta relasi antar unit kerja. Hal ini menjadi fondasi bagi Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan khususnya Departemen Kebijakan dalam mengidentifikasi secara komperhensif atas ketersediaan peraturan internal di setiap unit kerja yang meng-*cover* setiap proses bisnis yang telah berjalan. Pada tahun 2024, konsep BPMN yang telah di implementasikan oleh IFG disosialisasikan ke seluruh Anggota *Holding* dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) pada bulan Agustus sampai dengan September 2024 dengan tujuan untuk memberikan *knowledge* kepada Anggota *Holding* atas konsep pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan teori/kaidah yang ada sehingga selaras dengan konsep pemetaan proses bisnis IFG. Selanjutnya Anggota *Holding* diharapkan dapat melakukan pemetaan bisnis proses secara mandiri dengan menggunakan konsep pemetaan proses bisnis yang sama dengan IFG dengan tetap berkonsultasi kepada IFG.

5. *Sharing Knowledge* Fungsi Kebijakan
   Dalam rangka mendukung dan melakukan penguatan fungsi kebijakan terintegrasi, IFG telah melaksanakan *sharing knowledge* fungsi kebijakan ke 10 (sepuluh) Anggota *Holding*. Melalui pelaksanaan *sharing knowledge* tersebut, IFG menyampaikan arahan terkait program kerja fungsi kebijakan yang melibatkan Anggota *Holding* dan aktivitas pengelolaan peraturan internal. Selain itu dalam *sharing knowledge* tersebut juga dilakukan diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Anggota *Holding* sehubungan dengan pengelolaan peraturan internal.

6. *Maintenance* Sertifikasi ISO SMM *Holding*
   IFG berkomitmen menerapkan manajemen mutu yang terdapat dalam persyaratan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (ISO SMM) di mana IFG telah memiliki sertifikasi ISO SMM sejak tahun 2022. ISO SMM ini merupakan standar sistem manajemen yang berfokus pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk dan/atau layanan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan. Sertifikasi ISO SMM yang dimiliki oleh IFG dilakukan *maintenance* atau pemeliharaan tiap tahunnya agar tetap sesuai dengan standar dan terus efektif. Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan melalui Departemen Kebijakan memiliki fungsi dan tanggung jawab melakukan reviu

Efforts made in raising this awareness include the dissemination of internal regulations to all IFG employees, among others, through the dissemination of awareness materials on the preparation of internal regulations, as well as training on regulatory management for each employee in the Policy Department.

4. Business Process Model Notation (BPMN) Mapping in Holding members
   Strengthening the business process that has been carried out by IFG using the Business Process Model Notation (BPMN) Level 0 to Level 5 method in 2023 has obtained a comprehensive understanding of a business process that runs in IFG by visually showing the input-output picture and the relationship between work units. This is the foundation for the Risk Management, Compliance, and Policy Division, especially the Policy Department, in identifying comprehensively the availability of internal regulations in each work unit that covers each business process that has been operating. In 2024, the BPMN concept that has been implemented by IFG is disseminated to all holding members with the Focus Group Discussion (FGD) method in August to September 2024 with the aim of providing knowledge to holding members on the concept of business process mapping in accordance with existing theories/techniques so that it is in line with the IFG business process mapping concept. Furthermore, holding members are expected to be able to conduct business process mapping independently using the same business process mapping concept as IFG while still consulting IFG.

5. Knowledge Sharing Policy Function
   In order to support and strengthen the integrated policy function, IFG has conducted policy function knowledge sharing to 10 (ten) holding members. Through the implementation of the knowledge sharing, IFG delivered directions related to the policy function work program involving holding members and internal regulatory management activities. Furthermore, in the knowledge sharing, discussions were also held on issues faced by the holding members in relation to the management of internal regulations.

6. Holding ISO SMM Certification Maintenance
   IFG is committed to implementing quality management contained in the requirements of SNI ISO 9001:2015 on Quality Management System (ISO SMM) where IFG has been ISO SMM certified since 2022. ISO SMM is a management system standard that focuses on the company's ability to provide quality products and/or services to meet customer expectations. The ISO SMM certification obtained by IFG is maintained annually so that it remains in accordance with the standards and continues to be effective. The Risk Management, Compliance and Policy Division through the Policy Department has the function and responsibility of reviewing and evaluating the implementation of the

dan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) serta menyampaikan hasil reviu dan evaluasi tersebut kepada Direksi.

Pada tahun 2024, IFG melalui Departemen Kebijakan telah menyelesaikan rangkaian *surveillance* audit tahun kedua guna mempertahankan sertifikasi ISO SMM yang telah dimiliki. Beberapa tahap kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan sertifikasi ISO SMM tersebut antara lain dimulai dari *update* isu internal dan eksternal, *update* kebutuhan dan harapan para pihak, *update* dan evaluasi komitmen dan sasaran mutu, melakukan *refreshment awareness* pengetahuan terkait ISO SMM, penyesuaian dan pemenuhan peraturan internal terkait SMM dan proses bisnis, pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen serta di akhiri dengan *surveillance* audit oleh Badan Sertifikasi ISO (British Standard Institution).

Hasil positif di dapatkan IFG atas proses *surveillance* audit, di mana IFG telah berhasil mengimplementasikan seluruh klausul ISO SMM dengan baik sehingga mendapatkan status "*Recommended*" mempertahankan sertifikasi ISO SMM.

Quality Management System (QMS) and submitting the results of the review and evaluation to the Board of Directors.

In 2024, IFG through the Policy Department has completed a series of second year surveillance audits to maintain the ISO SMM certification that has been owned. Several stages of activities carried out to maintain the ISO SMM certification include starting from updating internal and external issues, updating the needs and expectations of the parties, updating and evaluating quality commitments and objectives, refreshing awareness of knowledge related to ISO SMM, adjusting and fulfilling internal regulations related to SMM and business processes, conducting Internal Audits and Management Reviews and surveillance audits by the ISO Certification Body (British Standard Institution).

Positive results were obtained by IFG for the surveillance audit process, where IFG has successfully implemented all ISO SMM clauses well to get a "Recommended" status to maintain ISO SMM certification.

Departemen Analisis Risiko

Departemen Analisis Risiko terbentuk secara definitif pada tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Program kerja utama Departemen Analisis Risiko yang berfungsi sebagai Lini 1,5 adalah membantu Lini pertama melalui pemberian panduan metodologi penilaian Risiko serta melakukan reviu secara independen atas kajian risiko untuk memastikan pengendalian Risiko yang objektif dan efektif dengan prinsip kehati-hatian.

Program kerja meliputi:

1. Reviu Kajian Risiko
   Kajian Risiko yang dibuat oleh Unit Pemilik Risiko/Lini pertama seperti aksi korporasi, pengembangan produk di Anggota *Holding*, atau pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dapat menimbulkan risiko yang tinggi atau berdampak signifikan pada perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko dalam perusahaan dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan perkembangan bisnis serta regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, reviu ini akan mencakup evaluasi atas metodologi kajian risiko yang digunakan, validasi terhadap parameter dan asumsi yang dipakai, serta analisis efektivitas kontrol mitigasi yang telah diterapkan. Hasil reviu diharapkan dapat meningkatkan kualitas kajian risiko, memperkuat ketahanan perusahaan terhadap potensi risiko, dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

Risk Analysis Department

The Risk Analysis Department was definitively established on June 3, 2024 based on the Board of Directors Decree No. 15 of 2024 on the Organizational Structure Policy. The main work program of the Risk Analysis Department, which functions as Line 1.5, is to assist the first line by providing guidance on risk assessment methodologies and independently reviewing risk assessments to ensure objective and effective risk control with prudent principles.

The work program includes:

1. Risk Assessment Review
   Risk assessments made by the Risk Owner Unit / First Line such as corporate actions, product development in holding members, or procurement of goods/services with a certain value that can pose a high risk or have a significant impact on the company. It aims to ensure that the process of identifying, assessing, and mitigating risks in the company is implemented comprehensively and in accordance with business developments and applicable regulations. In its implementation, this review will include an evaluation of the risk assessment methodology used, validation of the parameters and assumptions used, and analysis of the effectiveness of the mitigation controls that have been implemented. The results of the review are expected to improve the quality of risk assessment, strengthen the company's resilience to potential risks, and support strategic decision making.

2. Sosialisasi Fungsi Lini 1,5 dan Kajian Risiko
Program Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman internal perusahaan mengenai peran Departemen Analisis Risiko sebagai Lini 1,5 dalam kerangka *three lines models*, serta memperkuat koordinasi dalam proses kajian risiko. Sosialisasi ini akan mencakup penjelasan mengenai tanggung jawab Departemen Analisis Risiko sebagai Lini 1,5 serta peran dari Unit Bisnis (Lini 1), Manajemen Risiko (Lini 2), dan Audit Internal (Lini 3), mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko, serta proses pengelolaan risiko. Kegiatan ini akan dilakukan melalui presentasi, diskusi interaktif, pelaksanaan *pre* dan *post test* serta penyebaran materi edukasi untuk memastikan seluruh unit kerja memahami perannya dalam menjaga keberlangsungan bisnis yang lebih terkendali dan berorientasi pada manajemen risiko yang efektif.

3. Kebijakan Kajian Risiko
Kebijakan kajian risiko ini disusun sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bisnis perusahaan sejalan dengan kebijakan manajemen risiko operasional. Sebagai *Holding*, terdapat banyak aktivitas operasional yang dilakukan oleh IFG seperti aksi korporasi, proyek inisiatif strategis, pengembangan produk, pengadaan barang dan/atau jasa, yang dapat memberikan risiko tinggi atau dampak (*impact*) yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, dengan adanya permintaan regulator/*stakeholders* untuk melakukan kajian yang lengkap sebelum aksi korporasi/proyek inisiatif strategis dilaksanakan, maka diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan standar ketentuan mengenai penyusunan kajian risiko dan tindakan selanjutnya. Kebijakan kajian risiko ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar acuan dalam penerapan kajian risiko terkait operasional dan bisnis perusahaan. Kebijakan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

   a. untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab para pihak terkait dalam proses Kajian Risiko sesuai konsep *three lines model*;
   b. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kajian risiko; dan
   c. sebagai implementasi kebijakan manajemen risiko operasional, terutama aktivitas baru, inisiatif, atau proyek, sehingga dibutuhkan panduan standar berdasarkan prinsip kehati-hatian dan *four-eyes principle*, baik untuk aktivitas di *Holding*, maupun Anggota *Holding* yang memerlukan keputusan *Holding*/Pemegang Saham.

2. Dissemination of Line 1,5 Functions and Risk Assessment
A dissemination program aimed at improving the company's internal understanding of the role of the Risk Analysis Department as Line 1.5 in the three lines model framework, as well as strengthening coordination in the risk assessment process. This dissemination will include an explanation of the responsibilities of the Risk Analysis Department as Line 1.5 as well as the roles of the Business Unit (Line 1), Risk Management (Line 2), and Internal Audit (Line 3), risk identification and mitigation mechanisms, and risk management processes. This activity will be carried out through presentations, interactive discussions, conducting pre-test and post-tests and distributing educational materials to ensure that all work units understand their role in maintaining business continuity that is more controlled and oriented towards effective risk management.

3. Risk Assessment Policy
This risk assessment policy is prepared as an implementation of good corporate governance (GCG) of the company's business in line with the operational risk management policy.As a holding company, there are many operational activities carried out by IFG such as corporate actions, strategic initiative projects, product development, procurement of goods and/or services, which can provide high risk or significant impact to the company. Moreover, with the request of regulators/stakeholders to conduct a complete review before corporate actions/strategic initiative projects are implemented, a policy is needed that regulates governance and standard provisions regarding the preparation of risk assessments and subsequent actions. This risk assessment policy was established with the intention of being the basis of reference in the application of risk assessment related to the company's operations and business. This policy is prepared with the following objectives:
   a. providing clarity on the duties and responsibilities of the parties involved in the Risk Assessment process in accordance with the three lines model concept;
   b. improving the effectiveness of risk assessment implementation; and
   c. As the implementation of operational risk management policies, especially new activities, initiatives, or projects, standard guidelines based on prudential principles and the four-eyes principle are needed, both for activities in the holding, as well as holding members that require holding/Shareholder decisions.

4. *Monitoring* Pelaksanaan Mitigasi Risiko
   Monitoring dilakukan secara bulanan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah disusun dalam kajian risiko diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan target *timeline*. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dengan unit terkait pelaksana mitigasi risiko, mengumpulkan informasi terkini terkait pelaksanaan mitigasi risiko serta pelaporan kepada manajemen IFG. Dengan adanya *monitoring* mitigasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat mengoptimalkan efektivitas pengendalian risiko, meningkatkan ketahanan operasional, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis.

4. Risk Mitigation Implementation Monitoring
   Monitoring is conducted on a monthly basis to ensure that mitigation measures that have been prepared in the risk assessment are implemented effectively and in accordance with the target timeline. Monitoring is done regularly through coordination with relevant units implementing risk mitigation, collecting the latest information related to the implementation of risk mitigation and reporting to IFG management. With continuous monitoring of mitigation, the company can optimize the effectiveness of risk control, improve operational resilience, and support the achievement of business objectives.

PROFIL RISIKO TAHUN 2024 DAN MITIGASINYA

Berikut disampaikan profil risiko dan mitigasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

2024 RISK PROFILE AND ITS MITIGATION

The following is the risk profile and mitigations that have been carried out throughout 2024.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
1.	Tidak optimalnya kolektibilitas IW dan SW	Proses penagihan IW dan SW yang tidak efisien	1. Melakukan rekonsiliasi data antara pihak Ditlantas, Bapenda dan Jasa Raharja yang dituangkan ke dalam Berita Acara setiap bulannya; 2. *Business Process Improvement* dengan *Working Team* Jasa Raharja pada Q3 2024 telah dilaksanakan melalui Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kinerja Luar Biasa Bidang Pendapatan s/d Oktober 2024 dalam upaya peningkatan penerimaan; 3. Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) PT Jasa Raharja dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk meningkatkan Pelayanan Publik Kapal Perintis dan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi; 4. *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Direktorat Jendral Kereta Api (DJKA) terkait rencana pengutipan Iuran Wajib Kereta Api (IWKA) relasi <50 Km; 5. Evaluasi MoU dengan Direktorat Angkutan Udara tentang Pemanfaatan Data Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; 6. Melakukan analisis terhadap proses penagihan mandiri di Samsat melalui Implementasi 11 Program Kerja Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi atas turunan dari 5 Rekomendasi Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional s/d Agustus 2024; 7. Telah diadakan FGD dengan instansi/lembaga yang akan dipilih disertai dengan pelaksanaan pilot *project* implementasi penggunaan JRku *Web* Modul Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) di 4 (empat) cabang yaitu DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan; 8. Saat ini dalam proses penerapan sistem *host to host* & penerapan Samsat *Goes to Anywhere* dengan bentuk implementasi JRku Web Modul IWKBU di 4 (empat) cabang di atas; 9. Pendataan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi insan BUMN dalam proses pengembangan *host to host*, data penumpang dengan PT ASDP dan PT Pelni melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam peningkatan IWKBU; 10. Telah dilakukan WA blast kepada 1.715.274 pemilik kendaraan dalam upaya melakukan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Paja Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
	Non-optimal collection of Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contributions (SW)	Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contributions (SW) inefficient collection process	1. Conducted data reconciliation between the Traffic Directorate (Ditlantas), Regional Revenue Agency (Bapenda) and Jasa Raharja as outlined in the Minutes every month; 2. Business Process Improvement with the Jasa Raharja Working Team in Q3 of 2024 has been carried out through the Implementation of Analysis and Evaluation of Extraordinary Performance in the Revenue Sector until October 2024 in an effort to increase revenue; 3. Implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) between PT Jasa Raharja and the Directorate General of Marine Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia regarding Cooperation in the Implementation of Duties and Functions to improve Public Services for Pioneer Ships and Public Service Obligations in Marine Transportation for Economy Class Passengers; 4. Focus Group Discussion (FGD) with the Directorate General of Railways (DJKA) related to the plan to collect Railway Compulsory Premiums (IWKA) for <50 Km relations; 5. Evaluation of MoU with Directorate of Air Transport on Utilization of Domestic Scheduled Commercial Air Transport Passenger Data; 6. Conducted an analysis of the self-billing process at Samsat through the Implementation of 11 Work Programs of the Provincial Samsat Supervisory Team for derivatives of 5 Recommendations of the National Samsat Supervisory Team until August 2024; 7. FGDs have been held with agencies / institutions that will be selected along with the implementation of a pilot project for the use of the JRku Web Module for Mandatory Fees for Public Motorized Vehicles (IWKBU) in 4 (four) branches, namely DKI Jakarta, Lampung, Central Java and South Sumatra; 8. Currently in the process of implementing a host to host system & implementing Samsat Goes to Anywhere with the form of implementing JRku Public Motor Vehicles Compulsory Premiums (IWKBU) Web Module in the 4 (four) branches stated above; 9. Data collection of official vehicles and private vehicles of SOE personnel in the process of developing host to host, passenger data with PT ASDP and PT Pelni through a Cooperation Agreement (PKS) with PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Company in improving Public Motor Vehicles Compulsory Premiums (IWKBU); 10. WA blasts have been sent to 1,715,274 vehicle owners in an effort to encourage taxpayers to pay the Motor Vehicle Tax (PKB) and the Road Traffic Accident Fund Compulsory Contribution (SWDKLLJ).
2.	Rendahnya *advisory income* Anggota *Holding* Low advisory income of holding members	Belum optimalnya *advisory income* dari ekosistem BUMN Non-optimal advisory income from the SOE ecosystem	1. Pendampingan dan *monitoring pipeline* terkait *origination project advisory* selalu dilakukan *bi-weekly* meeting dengan tim Bahana Sekuritas; 2. *Ongoing pitching* serta *offering* terkait berbagai proyek *advisory* selalu dilakukan *bi-weekly meeting* dengan tim Bahana Sekuritas; 3. Terfinalisasinya kontrak payung antara Bahana Sekuritas dengan *group* IFG dan ekosistem BUMN sedang dalam tahap persiapan perencanaan; 4. Ditunjuknya Bahana Sekuritas sebagai *lead advisor high profile projects* telah dilakukan *pitching* dari tim Bahana Sekuritas kepada client. 1. Assistance and pipeline monitoring related to origination project advisory is always conducted in bi-weekly meetings with the Bahana Sekuritas team; 2. Ongoing pitching and offering related to various advisory projects are always conducted in bi-weekly meetings with the Bahana Sekuritas team; 3. The finalization of the umbrella contract between Bahana Sekuritas and the IFG group and the SOE ecosystem is in the planning preparation stage; 4. The appointment of Bahana Sekuritas as lead advisor for high profile projects has been carried out by the Bahana Sekuritas team to the client.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
3.	Lemahnya *monitoring* dan pengendalian *cashflow* serta penagihan piutang Weak monitoring and control of cash flow and collection of receivables	Proses *monitoring* dan pengendalian masih dilaksanakan secara manual The monitoring and control process is still carried out manually	1. Penyusunan *Business Requirement Document* (BRD) telah 100% selesai dan disampaikan ke Divisi Tranformasi dan Divisi Teknologi Informasi pada 28 Juni 2024; 2. Penyusunan *mockup system* telah 100% selesai dan disampaikan ke Divisi Tranformasi dan Divisi Teknologi Informasi pada 28 Juni 2024; 3. *UX mockup testing* dilakukan bersamaan dengan agenda *workstream marketing, underwriting, claim*, dan reasuransi dengan Anggota *Holding*; 4. Integrasi *database historical* untuk bisnis prioritas sudah dilakukan pengumpulan data 8 klaster BUMN dan saat ini sudah disusun juga *risk and loss profile*-nya; 5. Mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, pengembangan *core system* terintegrasi dengan *design micro services* akan dilakukan di 2025 setelah proses *design* selesai di 2024; 6. Mengacu pada RKAP 2024, keseragaman data pada *core system* terintegrasi akan dilakukan di 2025 setelah proses *design* selesai di 2024; 7. Implementasi *Financial Account Hub* (FAH) di Anggota *Holding* sektor asuransi dan penjaminan sebagai berikut: a. *Monitoring* secara lebih intensif implementasi FAH untuk IFG Life; b. Berkirim surat ke Direksi IFG Life dalam rangka mempercepat penyelesaian persiapan data event DB untuk *go live* FAH melalui memberikan target waktu dan meminta penguatan tim implementasi khususnya dari fungsi Akuntansi; c. Diskusi untuk penyesuaian *timeline*; dan d. FAH telah *go live* pada 2 Januari 2025. 1. The preparation of the Business Requirement Document (BRD) has been 100% completed and submitted to the Transformation Division and Information Technology Division on June 28, 2024; 2. The development of the mockup system was 100% completed and submitted to the Transformation Division and Information Technology Division on June 28, 2024; 3. UX mockup testing was conducted in conjunction with the marketing, underwriting, claims and reinsurance workstream agenda with holding members; 4. Integration of historical databases for priority businesses has been carried out by collecting data on 8 SOE clusters and currently the risk and loss profile has also been compiled; 5. Referring to the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP), the development of an integrated core system with micro services design will be carried out in 2025 after the design process is completed in 2024; 6. Referring to the 2024 RKAP, data uniformity in the integrated core system will be carried out in 2025 after the design process is completed in 2024; 7. Implementation of Financial Account Hub (FAH) in insurance and guarantee sector holding members as follows: a. More intensive monitoring of FAH implementation for IFG Life; b. Sent a letter to the IFG Life Board of Directors in order to accelerate the completion of DB event data preparation for FAH go live by providing a target time and requesting strengthening of the implementation team, especially from the Accounting function; c. Discussion for timeline adjustment; d. FAH has gone live on January 2, 2025.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
4.	Pencadangan Anggota *Holding* yang tidak cukup Holding Member's insufficient provision	Belum mengikuti standar PSAK 62 dan PSAK 108 Not yet following PSAK 62 and PSAK 108 standards	1. Divisi Aktuaria telah menerapkan *control process sign off checklist* setiap bulan sebagai konfirmasi bahwa telah dilakukan proses verifikasi dan validasi data sesuai standar yang diharapkan; 2. Divisi Aktuaria telah melakukan *monitoring* perhitungan liabilitas manfaat masa depan setiap bulan dan reviu perhitungan liabilitas manfaat masa depan setiap 3 bulan; 3. Divisi Aktuaria telah memberikan arahan kepada setiap *Affiliated Companies* (AC) untuk melakukan uji kecukupan liabilitas atau *Liability Adequacy Test* (LAT) sesuai standar yang ditetapkan setiap bulan; 4. Divisi Aktuaria telah melakukan *monitoring* perhitungan cadangan *Insurred But Not Reported* (IBNR) setiap bulan; 5. Divisi Aktuaria telah melakukan *monitoring* penggunaan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas setiap 3 bulan; 6. Sebagai tambahan, laporan reviu cadangan per Q1 2024 dan Q3 2024 telah disampaikan kepada AC; 7. Divisi Aktuaria telah menyediakan *file* kerja dalam *format excel* untuk beberapa ruang lingkup pekerjaan di atas; 8. Tim Aktuaria *Holding* sudah memberikan penjelasan terkait data, asumsi dan metode yang digunakan kepada Tim Nasional Re; 9. Tim Aktuaria *Holding* sudah melakukan pendampingan kepada Tim Nasional Re untuk memberikan penjelasan terkait perhitungan kewajiban per 31 Desember 2023 kepada Tim Eksternal Auditor. 1. The Actuarial Division has implemented a control process sign off checklist every month as confirmation that the data verification and validation process has been done according to the expected standards; 2. The Actuarial Division has monitored the calculation of future benefit liabilities every month and reviewed the calculation of future benefit liabilities every 3 months; 3. The Actuarial Division has provided direction to each Affiliated Companies (AC) to conduct a Liability Adequacy Test (LAT) in accordance with established standards on a monthly basis; 4. The Actuarial Division has monitored the calculation of Insured But Not Reported (IBNR) reserves every month; 5. The Actuarial Division has monitored the use of assumptions used in the calculation of liabilities every 3 months; 6. The reserve review reports as of Q1 of 2024 and Q3 of 2024 have been submitted to the AC; 7. The Actuarial Division has provided work files in excel format for some of the above scopes of work; 8. The Holding Actuarial Team has provided explanations regarding the data, assumptions and methods used to the Re National Team; 9. The Holding Actuarial Team has provided assistance to the National Re Team to provide explanations regarding the calculation of liabilities as of December 31, 2023 to the External Auditor Team.
5.	Peningkatan beban bunga Increase in interest expense	Peningkatan suku bunga JIBOR JIBOR rate increase	1. Dalam rangka menekan biaya bunga serta merelaksasi kewajiban jangka pendek Perusahaan dan mendukung kebutuhan operasional Anggota *Holding*, dilakukan eksplorasi *alternative source of fund* berupa *standby facility* melalui pinjaman perbankan; 2. Telah dilakukan diskusi dengan perbankan atas rencana fasilitas jangka pendek; dan 3. IFG akan melalukan analisis atas *indicative term sheet* dan kebutuhan perusahaan atas adanya fasilitas jangka pendek. 1. In order to reduce interest costs and relax the Company's short-term liabilities and support the operational needs of its holding members, alternative sources of funds were explored in the form of standby facilities through bank loans; 2. Discussions have been held with banks on short-term facility plans; and 3. IFG will analyze the indicative term sheet and the company's need for a short-term facility.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
6.	Beban *underwriting* melebihi proyeksi Underwriting expenses exceeded projections	Peningkatan beban *underwriting* Increase in underwriting expenses	1. Telah dibuat laporan analisis perbandingan pembayaran santunan YoY terkait efektivitas program pencegahan kecelakaan 2023; 2. Pelaksanaan Kegiatan *Socio Engineering*, yaitu: a. Pelaksanaan Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) di 852 sekolah & universitas, SMS/WA *blast* di 1.519 titik rawan laka, 1.424 Kegiatan Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas (MUKL) kepada 43.010 pasien; dan b. 1.360 Kegiatan Forum Keselamatan Lalu Lintas (FKLL) dengan 1.634 tindak lanjut kesepakatan forum; 3. Implementasi pencegahan kecelakaan yaitu: a. Sosialisasi dan *Safety Campaign* Bagi Pengemudi dan Awak Angkutan Umum Kota Sukabumi; dan b. Berkolaborasi dengan PNM dan Honda dalam pelaksanaan *Safety Campaign* Bagi *Account Officer* PT PNM Cabang Aceh; 4. Jamkrindo dan Askrindo sudah dalam proses implementasi penggunaan *stop-loss* pada PKS penjaminan/asuransi kredit produktif untuk new & renewal; 5. Sudah dalam proses monitoring atas kerjasama penjaminan kredit produktif dengan perbankan menggunakan *stop-loss*: a. Askrindo dengan Bank BRI, BTN, BNI, Exim Bank & Bank Kalteng; b. Jamkrindo dengan Bank BRI & BNI; dan c. PKS yang sudah ditandatangani antara lain Askrindo dengan BPD Maluku Utara dan Jamkrindo dengan Bank BTN. 1. A comparative analysis report of YoY compensation payments related to the effectiveness of the 2023 accident prevention program has been prepared; 2. Implementation of Socio Engineering Activities, such as: a. Implementation of Traffic Safety Teachers (PPKL) in 852 schools & universities, SMS/WA blasts in 1,519 accident-prone points, 1,424 Mobile Traffic Safety Unit (MUKL) activities to 43,010 patients; and b. 1,360 Traffic Safety Forum (FKLL) activities with 1,634 follow-up forum agreements; 3. Implementation of accident prevention, such as: a. Dissemination and Safety Campaign for Drivers and Crews of Public Transport in Sukabumi City; and b. Collaborated with PNM and Honda in the implementation of Safety Campaign for Account Officers of PT PNM Aceh Branch; 4. Jamkrindo and Askrindo are already in the process of implementing the use of stop-loss in the productive credit guarantee/insurance agreement for new & renewal; 5. Already in the process of monitoring productive credit guarantee cooperation with banks using stop-loss: a. Askrindo with Banks BRI, BTN, BNI, Exim Bank & Bank Kalteng; b. Jamkrindo with Banks BRI & BNI; and c. The signed agreements include Askrindo with BPD North Maluku and Jamkrindo with Bank BTN.
7.	Teguran dari regulator Reprimand from the regulator	Proses rekonsiliasi membutuhkan waktu yang lama Reprimand from the regulator	1. Telah dilakukan pendampingan konsultan untuk penyelesaian laporan keuangan *audited* 31 Desember 2023; 2. *Kick off Audit* telah dilakukan di Desember (*Affiliated Companies*) dan Januari di level Konsolidasi; 3. Laporan keuangan audit telah rilis pada 7 Oktober 2024. Adapun keterlambatan terutama karena menunggu laporan keuangan Nasre dan Askrindo rilis terlebih dahulu, untuk kemudian dikonsolidasi di IFG; 4. Konsinyering audit telah dilakukan secara fisik 2 kali di bulan Februari 2024, hal ini untuk membantu penyelesaian rekonsiliasi transaksi pihak berelasi. Untuk konsinyering selanjutnya akan dijadwalkan di April 2024 untuk mempercepat penyelesaian *Monthly Report Package* (MRP) dan *Annual Report Package* (ARP) Konsolidasi 31 Desember 2023. 1. Consultant assistance has been provided for the completion of the audited financial statements as of December 31, 2023; 2. Kick off audits were conducted in December (Affiliated Companies) and January at the Consolidated level; 3. The audited financial statements were released on October 7, 2024. The delay is mainly due to waiting for the financial statements of Nasre and Askrindo to be released first, and then consolidated in IFG; 4. Audit consignment has been conducted in-person twice in February 2024, this is to assist the completion of related party transaction reconciliation. The next consignment will be scheduled in April 2024 to accelerate the completion of the Consolidated Monthly Report Package (MRP) and Annual Report Package (ARP) for December 31, 2023.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
8.	Implementasi PSAK 117 tidak tepat waktu PSAK 117 implementation is not on time	Keterlambatan atau kegagalan proses UAT Delay or failure of the UAT process	1. *End-to-end User Acceptance Test* (UAT) *supported by IT Vendor* sedang dilaksanakan sejak 1 Maret 2024 hingga 31 Juli 2024 realisasinya sebesar 100%; 2. *Dry run* (2 *reporting period for whole data population*) *supported by* IT *Vendor* (SAS) akan dimulai pada Agustus 2024; 3. *Produce* PSAK 117 parallel *run report by* IFG, *supported by* IT Vendor (SAS) akan dimulai pada 2 Desember 2024; dan 4. *Finalization of change management strategy* telah dilakukan pada 29 Februari 2024, *Execute Change Management Plan* (i.*e. socialization/awareness sessions, trainings, etc.*). 1. End-to-end User Acceptance Test (UAT) supported by IT Vendor is being implemented since March 1, 2024. until July 31, 2024 the realization is 100%; 2. Dry run (2 reporting periods for whole data population) supported by IT Vendor (SAS) will start in August 2024; 3. Produce PSAK 117 parallel run report by IFG, supported by IT Vendor (SAS) will start on December 2, 2024; and 4. Finalization of change management strategy was conducted on 29 February 2024, Execute Change Management Plan (i.e. awareness sessions, trainings, etc.).
9.	Tidak terpenuhinya modal sesuai persyaratan regulasi Non-fulfillment of capital as per regulatory requirements	Permodalan saat ini belum memperhitungkan semua jenis biaya yang melekat pada produk Current capitalization does not take into account all types of costs attached to the product	1. Telah dilakukan penyusunan formulasi kebijakan akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dan perumusan model perhitungan. Selain itu, hasil perhitungan *opening balance sheet* per Desember 2023 untuk masing-masing *Affiliated Companies* telah disampaikan kepada Kementerian BUMN; 2. Telah dilakukan penyusunan *report Onerous Contract Assessment* 2024 yang meliputi analisis kontrak merugi pada beberapa *Affiliated Companies*; 3. Sudah dilakukan identifikasi bersama Anggota *Holding* kontrak-kontrak yang merugi (*onerous*); 4. Telah dilakukan simulasi perhitungan *opening balance sheet* untuk seluruh *Affiliated Companies* yang akan menerapkan PSAK 117; 5. Proses perhitungan *opening balance sheet* dan modal dengan menggunakan asumsi yang relevan saat ini telah dilakukan di masing-masing *Affiliated Companies*. Per Juni 2024 semua AC yang akan mengimplementasikan PSAK 117 telah menyampaikan hasil perhitungan *Opening Balance Sheet* per Desember 2023. 1. Accounting policy formulation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 117 and calculation model formulation have been carried out. Moreover, the results of the opening balance sheet calculation as of December 2023 for each Affiliated Companies have been submitted to the Ministry of SOEs; 2. An Onerous Contract Assessment 2024 report has been prepared, which includes an analysis of loss-making contracts at several Affiliated Companies; 3. Identification has been made with holding members of onerous contracts; 4. A simulation of the opening balance sheet calculation has been completed for all Affiliated Companies that will apply PSAK 117; 5. The process of calculating the opening balance sheet and capital using relevant assumptions has now been carried out in each Affiliated Companies. As of June 2024, all ACs that planned to implement PSAK 117 have submitted the results of the Opening Balance Sheet calculation as of December 2023.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
			1. Telah dilakukan finalisasi kajian bersama konsultan McKinsey, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan IFG *Progress*; 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada para *stakeholder*, yaitu: a. Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian b. Wakil Menteri Kementerian BUMN c. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (PMLK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian d. Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian e. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal f. Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran g. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) h. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah i. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN j. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN k. Sekretaris Kementerian BUMN l. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu 3. Telah disusun *short deck* kajian dan dipaparkan kepada Sekretaris Kementerian BUMN untuk dibawa pada Rapat Komite Kebijakan (Rakomjak) Pembiayaan UMKM pada tanggal 17 Juli 2024; 4. Terkait evaluasi dampak perubahan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru yaitu: a. Telah dipaparkan dan diusulkan tarif IJP berdasarkan risiko segmen, sektor, dan kredit restru non-restru kepada Kementerian BUMN, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkop UKM, dan OJK pada FGD *risk based premium* dan KUR klaster pada tanggal 15 Agustus 2024; b. Telah dibuat kajian terbaru untuk pengajuan kembali usulan skema dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR pada Rakomjak Desember 2024; c. Telah dipaparkan dan diusulkan opsi kompensasi kepada Kementerian BUMN, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkop UKM, dan OJK pada FGD risk based premium dan KUR klaster pada tanggal 15 Agustus 2024.
10.	Terganggunya *sustainability* bisnis KUR ke Anggota *Holding* Disruption of KUR business sustainability to holding members	Memburuknya kualitas kredit KUR karena meningkatnya risiko bisnis nasabah Deterioration in KUR credit quality due to increased customer business risk	1. A joint study with McKinsey consultants, the Management Institute of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, and IFG Progress has been finalized; 2. Dissemination has been conducted to stakeholders, namely: a. Deputy I of the Coordinating Ministry for Economic Affairs b. Deputy Minister of the Ministry of SOEs c. Assistant Deputy for Capital Markets and Financial Institutions (PMLK) of the Coordinating Ministry for Economic Affairs d. Deputy III of the Coordinating Ministry for Economic Affairs e. Head of Financial Sector Policy Center Fiscal Policy Agency f. Budget Director for Political, Legal and Security Affairs and Budget Section of the State General Treasurer Directorate General of Budget g. Deputy Commissioner for Insurance, Guarantee and Pension Fund Supervision of the Financial Services Authority (OJK) h. Deputy for Micro Business of the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises i. Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs j. Deputy for Law and Legislation of the Ministry of SOEs k. Secretary of the Ministry of SOEs l. Director General of Budget of the Ministry of Finance 3. A short deck study has been prepared and presented to the Secretary of the Ministry of SOEs to be brought to the MSME Financing Policy Committee Meeting (Rakomjak) on July 17, 2024; 4. Related to the evaluation of the impact of changes in the new People's Business Credit (KUR) scheme, namely: a. IJP rates based on segment, sector, and restructured credit risk have been presented and proposed to the Ministry of SOEs, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Cooperatives and SMEs, and OJK at the FGD on risk-based premium and KUR clusters on August 15, 2024; b. An updated study has been made for the resubmission of the proposed KUR scheme and Guarantee Fee (IJP) at the December 2024 SME Financing Policy Committee Meeting; c. Compensation options were presented and proposed to the Ministry of SOEs, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Cooperatives and SMEs, and OJK at the FGD on risk-based premium and KUR clusters on August 15, 2024.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
11.	Pengalihan polis portofolio Jiwasraya tidak tuntas sesuai jadwal Jiwasraya portfolio policy transfer not completed on schedule	Masih terdapat aset yang belum dialihkan yang disebabkan permasalahan administrasi dan direncanakan untuk dialihkan pada tahun 2024 There are still assets that have not been transferred due to administrative problems and are planned to be transferred in 2024	1. Dijadwalkan pelaksanaan *Project Management Office* (PMO) *meeting* secara berkala dengan pemangku kepentingan terkait untuk pembahasan setiap perkembangan pelaksanaan pengalihan portofolio liabilitas polis dan aset Jiwasraya kepada IFG Life. 2. Dilakukan *profiling* pemegang polis untuk menentukan prioritas pengalihan polis. 3. Jiwasraya dan IFG Life telah menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Polis. 4. Telah diundangkannya PP No 16/2024 terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG sebesar Rp3,56 triliun. 5. PMN Rp3,56 triliun telah diterima oleh IFG Life pada bulan April 2024. 1. Scheduled regular Project Management Office (PMO) meetings with relevant stakeholders to discuss any progress in the transfer of Jiwasraya's policy liabilities and assets portfolio to IFG Life. 2. Profiling of policyholders to determine policy transfer priorities. 3. Jiwasraya and IFG Life have signed a Deed of Policy Transfer Agreement. 4. Government Regulation No. 16/2024 has been promulgated regarding the addition of State Equity Participation (PMN) to IFG amounting to IDR3.56 trillion. 5. IDR3.56 trillion PMN has been received by IFG Life in April 2024. 1. Peningkatan status aset tanah bangunan yang memiliki masalah legalitas dan kepenghunian. 2. Berkoordinasi dengan kejaksaan agung untuk pelepasan aset reksadana yang disita. 1. Improved status of land and building assets that have legality and tenancy issues 2. Coordinated with the attorney general for the release of seized mutual fund assets. Telah diundangkannya PP No 16/2024 tanggal 28 Maret 2024 terkait penambahan PMN kepada IFG sebesar Rp3,56 triliun dan pencairan PMN Tahun Anggaran (TA) 2024 telah dilakukan pada April 2024. Government Regulation No. 16/2024 has been promulgated on March 28, 2024 related to the addition of PMN to IFG amounting to IDR3.56 trillion and the disbursement of PMN for Fiscal Year (FY) 2024 has been carried out in April 2024. Telah dilakukan pengalihan liabilitas (polis) secara berkala atas liabilitas (polis) yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Nomor 20 tanggal 28 Desember 2023 dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan IFG Life. There has been a periodic transfer of liabilities (policies) on the liabilities (policies) contained in the Deed of Assignment Agreement Number 20 dated December 28, 2023 while taking into account the financial health of IFG Life.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
12.	Penyusunan *framework* budaya risiko, *contingency plan* dan kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tidak tepat waktu	Belum tersedianya *framework* budaya risiko, *contingency plan* dan kebijakan PDP secara tepat waktu	Budaya Risiko: 1. Telah dilakukan *benchmark* penerapan budaya risiko ke perusahaan berbentuk *Holding* yaitu Bank Mandiri dan BTPN. 2. Telah dilakukan sosialisasi *framework* dan *roadmap* budaya sadar risiko. 3. Telah dilakukan pembahasan dengan Wakil Direktur Utama IFG untuk pelaksanaan proyek budaya sadar risiko mulai dari pembahasan *gap analysis* hingga *draf framework*. 4. Telah dilakukan pengukuran budaya risiko melalui hasil *survey* dan hasil wawancara serta telah dilakukan *workshop* dan sosialisasi hasil *framework* dan *roadmap*. Budaya Kepatuhan: 1. Telah diselesaikannya dalam pembuatan konten pembelajaran kepatuhan dan *upload* dalam sistem LMS. 2. Telah dilakukan sosialisasi *framework* budaya risiko ke seluruh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) IFG, pemaparan *framework* ke Wakil Direktur Utama IFG, telah disusun dan disampaikan laporan mengenai penerapan *framework* dan *roadmap* laporan sosialisasi ke Wakil Direktur Utama IFG. *Contingency Plan*: 1. *Draft* Kebijakan BCMS telah disusun oleh konsultan pada akhir bulan September 2024. 2. *Roadmap* penerapan BCMS untuk persiapan sertifikasi BCMS di *Holding* telah disusun oleh konsultan pada bulan Juli 2024. 3. Telah dilakukan pelaksanaan simulasi dan evaluasi penerapan BCM pada bulan Oktober 2024. 4. Telah dilakukan koordinasi ke Anggota *Holding* terkait implementasi BCM setelah dokumen BCMS *Holding* disahkan. PDP: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-undang (UU) PDP belum diundangkan sampai dengan 31 Desember 2024, namun hasil *benchmarking* sudah dilakukan terhadap beberapa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) lainnya. 2. RPP UU PDP belum diundangkan sampai dengan 31 Desember 2024, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada penunjukkan Unit atau Fungsi yang akan menjalankan fungsi sebagai *Data Protection Officer* (DPO) dari Divisi SDM. Konsultan sudah memberikan rekomendasi mengenai unit atau fungsi DPO dalam Rapat Direksi (radir) September 2024. Departemen Kepatuhan IFG juga telah menyampaikan hasil radir untuk menunjuk DPO, dan memberikan *reminder* tiga kali terhadap pemenuhan ini. 3. RPP UU PDP belum diundangkan sampai dengan 31 Desember 2024, namun seluruh *Data Protection Impact Assesment* (DPIA), *Record of Processing Activities* (ROPA) sudah dibuat berdasarkan standar UU PDP dan RPP. 4. RPP UU PDP belum diundangkan sampai dengan 31 Desember 2024, sehingga kegiatan penyesuaian infrastruktur keamanan pemrosesan data pada sistem TI belum dapat dilakukan. 5. RPP UU PDP belum diundangkan sampai dengan 31 Desember 2024, namun klausa data pribadi dan kerahasiaan data sudah disampaikan kepada seluruh tim yang terlibat sesuai dengan standar RPP.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
	Untimely development of risk culture framework, contingency plan and Personal Data Protection (PDP) policy	Unavailability of risk culture framework, contingency plan and PDP policy in a timely manner	Risk Culture: 1. Benchmarking of risk culture implementation to holding companies, namely Bank Mandiri and BTPN, has been conducted. 2. Dissemination of risk awareness culture framework and roadmap has been conducted. 3. Discussions have been held with the Vice President Director of IFG for the implementation of the risk-aware culture project, starting from the discussion of gap analysis to the draft framework. 4. Risk culture has been measured through survey results and interview results, and workshops and dissemination of framework and roadmap results have been implemented. Compliance Culture: 1. Completed the creation of compliance learning content and uploaded it to the LMS system. 2. The risk culture framework has been disseminated to all Risk Management Work Units (SKMR) of IFG, the framework exposure to the deputy president director of IFG, a report on the implementation of the framework and roadmap of the dissemination report has been prepared and submitted to the vice president director of IFG. Contingency Plan: 1. A draft BCMS Policy was prepared by the consultant by the end of September 2024. 2. A roadmap for BCMS implementation in preparation for BCMS certification in the holding has been prepared by a consultant in July 2024. 3. A simulation and evaluation of BCM implementation was conducted in October 2024. 4. Coordination has been made to holding members regarding BCM implementation after the BCMS holding document has been approved. PDP: 1. The Draft Government Regulation (RPP) of the PDP Law has not been promulgated until December 31, 2024, but benchmarking results have been conducted against several other Non-Bank Financial Services Institutions (NBFIs). 2. The RPP of the PDP Law has not been promulgated until December 31, 2024, but until December 31, 2024 there has been no appointment of the Unit or Function that will conduct the function as Data Protection Officer (DPO) from the HC Division. The consultant has provided recommendations regarding the DPO unit or function in the September 2024 Board of Directors Meeting (radir). IFG Compliance Department has also submitted the result of the meeting to appoint DPO, and provided reminders three times towards this fulfillment. 3. The Draft Government Regulation (RPP) of the PDP Law has not been promulgated until December 31, 2024, but all Data Protection Impact Assessments (DPIA), Record of Processing Activities (ROPA) have been made based on the standards of the PDP Law and RPP. 4. The Draft Government Regulation (RPP) of the PDP Law will not be promulgated until December 31, 2024, so activities to adjust data processing security infrastructure in IT systems cannot be carried out. 5. The Draft Government Regulation (RPP) of the PDP Law has not been promulgated until December 31, 2024, but the personal data and data confidentiality clauses have been conveyed to all teams involved in accordance with the RPP standards.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
13.	Rendahnya *recovery* atas hak subrogasi grup IFG Low recovery of IFG group subrogation rights	Kurangnya akses dan ketersediaan data Lack of data access and availability	Sudah ditandatanganinya PKS dengan Perbankan yaitu Jamkrindo (tanggal 30 Januari 2024) dan Askrindo (tanggal 5 April 24). Agreements have been signed with banks, namely Jamkrindo (dated January 30, 2024) and Askrindo (dated April 5, 24).
			1. Sudah ditandatanganinya *Non Disclosure Agreement* (NDA) dengan Perbankan, dalam proses persiapan rekonsiliasi. 2. Askrindo & Jamkrindo telah melaksanakan rekonsiliasi dengan Perbankan & Kemenko Perekonomian: Askrindo: a. Bank BRI 12 - 14 Juni 2024 b. Bank BNI 31 Mei 2024 c. Bank Mandiri 11 Juni 2024 d. Kemenko Perekonomian 24 - 27 Juni 2024 Jamkrindo: Bank BTN 22 Mei 2024 Kemenko Perekonomian 6 - 11 Juni 2024 3. Rekonsiliasi dilakukan secara regular pada masing-masing cabang Askrindo & Jamkrindo dengan unit kerja di masing-masing Bank. 1. Non Disclosure Agreement (NDA) signed with Banks, in the process of reconciliation preparation. 2. Askrindo & Jamkrindo have conducted reconciliation with Banks & Coordinating Ministry for Economic Affairs: a. Askrindo: b. Bank BRI 12 - 14 June 2024 c. Bank BNI May 31, 2024 d. Bank Mandiri June 11, 2024 e. Coordinating Ministry for Economic Affairs June 24-27, 2024 Jamkrindo: Bank BTN May 22, 2024 Coordinating Ministry for Economic Affairs June 6 - 11, 2024 3. Reconciliation is carried out regularly at each Askrindo & Jamkrindo branch with the work unit at each Bank.
14.	Belum optimalnya pendapatan premi *surety* Suboptimal surety premium income	Belum dijalankannya perbaikan T&C *suretyship* Improvement of suretyship T&C has not been implemented	1. Adanya standarisasi KBG & Surety pada: a. Rate premi b. Biaya admin c. Kolateral d. SLA Klaim 2. Sudah ada standarisasi *Risk Acceptance Criteria* (RAC) & *Term & Condition* (TC) akseptasi pada *Group* IFG untuk penawaran kepada BUMN Karya dengan pengerjaan proyek menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 1. Standardization of KBG & Surety on: a. Rate premium, b. Administration fees, c. Collateral, d. SLA Claims. 2. There is already a standardization of Risk Acceptance Criteria (RAC) & Term & Condition (TC) acceptance in the IFG Group for offers to BUMN Karya with project work using State Budget funds.
			1. *Memorandum of Understanding* (MoU) surety sudah ditandatangani oleh Askrindo, Jamkrindo, Jasindo & JRP. Selanjutnya proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Anggota *Holding* IFG. 2. Telah dilakukan *signing* MoU dengan 6 BUMN Karya (PP, Wika, Waskita, Abhipraya, Nindya, Adhi). 1. Surety Memorandum of Understanding (MoU) has been signed by Askrindo, Jamkrindo, Jasindo & JRP. Furthermore, the process of drafting the Cooperation Agreement (PKS) between IFG holding members. 2. MoU signing has been organized with 6 BUMN Karya (PP, Wika, Waskita, Abhipraya, Nindya, Adhi).
			Belum adanya evaluasi dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan konsorsium/koasuransi. No evaluation and recommendations for improving the implementation of consortium/co-insurance.
			Belum adanya implementasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan konsorsium/koasuransi. No implementation of improvements based on evaluation results and recommendations for improvement of consortium/co-insurance implementation.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
15.	Implementasi ERP dan infrastruktur lainnya untuk PSAK 117 tidak terlaksana sesuai *timeline* Implementation of ERP and other infrastructure for PSAK 117 was not carried out according to the timeline	Banyaknya jenis aplikasi yang harus diimplementasikan dan diintegrasikan Many types of applications that must be implemented and integrated	1. *Monitoring* secara lebih intensif implementasi *Finance & Accounting Hub* (FAH) untuk IFG Life. 2. Berkirim surat ke Direksi IFG Life dalam rangka mempercepat penyelesaian persiapan *data event database* (DB) untuk *go live* FAH memberikan target waktu dan meminta penguatan tim implementasi khususnya dari fungsi Akuntansi. 3. Dilakukan diskusi terkait kendala yang dihadapi IFG Life, dan melakukan perhitungan ulang untuk menentukan target go live FAH IFG Life. 4. Telah dilakukan penyesuaian target *go live* di 2 Januari 2025. 1. More intensive monitoring of Finance & Accounting Hub (FAH) implementation for IFG Life. 2. Sent a letter to the IFG Life Board of Directors in order to accelerate the completion of event database (DB) preparation for FAH go live by providing a target time and requesting strengthening of the implementation team, especially from the Accounting function. 3. Discussions were held regarding the obstacles faced by IFG Life, and recalculated to determine IFG Life's FAH go live target. 4. Adjustments have been made to the go live target of January 2, 2025. 1. Implementasi ERP untuk Jamkrindo saat ini dilakukan *paralel run* tahap I, dan juga persiapan tahap II. Dilakukan *monitoring* intensif ke Jamkrindo termasuk dengan evaluasi pelaksanaan *paralel run*. 2. Untuk Jasindo dan CMI sedang dalam tahap *key user training*. *Gap analysis* kebijakan terdampak telah selesai dilakukan, *in progress monitoring* intensif dalam evaluasi secara *weekly*. 3. Jasindo dan CMI dalam proses penyiapan *go live* di 2 Januari 2025. 1. ERP implementation for Jamkrindo is currently conducted in parallel run phase I, and also preparation for phase II. Intensive monitoring is conducted to Jamkrindo including evaluation of the parallel run implementation. 2. Jasindo and CMI are in the key user training stage. Gap analysis of affected policies has been completed, in progress intensive monitoring in weekly evaluation. 3. Jasindo and CMI are in the process of preparing to go live on January 2, 2025.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
			1. Sudah dilaksanakan peluncuran aplikasi One by IFG kepada ekosistem IFG dengan fitur unggulan untuk akses produk Asuransi Kesehatan Ko-As Mandiri Inhealth dan IFG Life produk *Managed Care* untuk implementasi eRJTP (rujukan *online*) ke Dokter Spesialis, Perubahan Faskes, *Telemedicine* (LMS, YesDok, dan Viva Health), *Top Up* penambahan anak dan kenaikan kelas, *Claim Reimbursement*. 2. Sudah tersedia menu menghubungkan Polis untuk peserta Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth Indemnity. 3. Sudah ditambahkan menu *bionic login* untuk mempermudah pengguna masuk ke aplikasi One by IFG. 4. Transaksi produk Asuransi Jiwa LifeCOVER sudah dapat dilakukan di aplikasi One by IFG. 5. Sudah dilakukan diluncurkan transaksi menu reksa dana BTIM pada aplikasi One by IFG dan penambahan jenis produk Reksa Dana baru BTIM. 6. Sudah *Go Live* layanan kesehatan *video consultation* dengan General Practition (GP) dan menu *claim reimbursement* asuransi kesehatan melalui One by IFG. 7. Sudah tersedia *menu chat* dokter spesialis sesuai dengan jenis *plan* peserta. 8. Sudah Go Live transaksi produk *Third Party Liability* Jasaraharja Putera. 9. Sudah diluncurkan promo Bonus One, One reksadana, Gratis produk asuransi *Third Party Liability* (TPL) tiket Labuan Bajo Maraton. 10. Telah diluncurkan *customer service* terintegrasi antara One by IFG, Mandiri Inhealth Contact Center (MICC) dan IFG Life.
			Kajian "satu entitas IFG" sudah dilakukan untuk Modul 1 dan Modul 2, sedang menunggu waktu untuk jadwal presentasi ke Direksi
16.	Rendahnya transaksi melalui *digital platform* Anggota *Holding*	Informasi mengenai produk yang dipasarkan melalui *channel* pemasaran digital belum tersedia secara lengkap	1. Sudah dilakukan peluncuran One by IFG kepada internal ekosistem dan eksternal. 2. Sosialisasi One by IFG kepada karyawan secara berkala sejak April 2024 3. *Public launch* sejak bulan Juli 2024. 4. *Office branding* atas penggunaan *telemedicine* di One by IFG. 5. *Paid Marketing strategy* sejak Juli 2024, termasuk publikasi *event* Labuan Bajo Marathon tahun 2024 (LBM2024) *via* One by IFG. 6. Social media *activation* secara regular dilakukan, kolaborasi dengan ekosistem IFG *impacting* terhadap jumlah *downloader* sampai dengan Oktober 2024 yaitu ≈ 60.000 *downloaders*. 7. Sosialisasi bahwa pilar reksa dana sudah dapat diakses melalui One by IFG, dengan beberapa aktivasi *reward* berupa reksa dana pasar uang BTIM. 8. Sosialisasi bahwa produk Asuransi TPL Pro sudah dapat diakses melalui One by IFG dengan aktivasi *reward* berupa *free* Asuransi TPL Pro untuk ≈ 1000 *downloaders*. 9. Sosialisasi atas perubahan akses layanan kesehatan digital ke One by IFG sudah dilakukan di bulan November 2024. 10. Dijalankannya regular program dalam rangka optimalisasi penetrasi & utilisasi One by IFG (*PayDay*, *Connect Polis*, *Double Dates* 11-11 12-12).
			1. Sudah menerima surat nomor 780 dan 781 dari OJK yang menyatakan bahwa kerja sama IFG dengan IFG Life dan JRP bukan merupakan Badan Usaha Selain Bank (BUSB) namun kerja sama penyelenggara IT. 2. Sampai dengan September 2024 total Investor Reksadana adalah 148 dan transaksi Rp 1,4 juta. 3. Sudah dilakukan *Live* Demo aplikasi One by IFG kepada OJK pada tanggal 12 Mei 2024 dan BTIM sudah mengirimkan jawaban atas beberapa tanggapan OJK pada tanggal 20 Juni 2024. 4. Penyesuaian perijinan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Risalah Rapat Nomor RR-14/IK.01/2022 dari OJK untuk pertemuan antara Departemen Pengaturan dan Perizinan IKD OJK pada 30 Mei 2024 yang menyatakan bahwa One by IFG tetap dapat menjalankan produk atau layanan asuransi dan reksa dana milik Lembaga Keuangan yang merupakan Anggota *Holding* IFG. 5. BTIM dan IFG sudah menerima izin bahwa IFG sebagai Gerai Reksa Dana BTIM melalui Surat Nomor S-731/PM.02.2024.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
			1. The One by IFG application has been launched to the IFG ecosystem with superior features for access to Co-As Mandiri Inhealth Health Insurance products and IFG Life Managed Care products for the implementation of eRJTP (online referral) to specialists, Facility Changes, Telemedicine (LMS, YesDok, and Viva Health), top up/ addition for number of child and class upgrade, Claim Reimbursement. 2. Policy linking menu is available for Mandiri Inhealth Indemnity Health Insurance participants. 3. A bionic login menu has been added to make it easier for users to enter the One by IFG application. 4. LifeCOVER Life Insurance product transactions is accessible in the One by IFG application. 5. BTIM mutual fund menu transactions have been launched in the One by IFG application and the addition of new BTIM mutual fund product types. 6. There is a Go Live video consultation health service with General Practitioner (GP) and health insurance reimbursement claim menu through One by IFG 7. Specialist chat menu is available according to the participant's plan type. 8. Jasaraharja Putera's Third Party Liability product transaction has gone live 9. There is a launched Bonus One, One mutual fund promo, Free Third Party Liability (TPL) insurance product Labuan Bajo Marathon ticket 10. An integrated customer service has been launched between One by IFG, Mandiri Inhealth Contact Center (MICC) and IFG Life.
			The "one IFG entity" study has been conducted for Module 1 and Module 2, waiting for the time to schedule a presentation to the Board of Directors.
	Low transactions through holding members' digital platforms	Information about products marketed through digital marketing channels is not yet fully available	1. One by IFG launched to internal and external ecosystems. 2. One by IFG dissemination to employees periodically since April 2024 3. Public launch since July 2024 4. Office branding on the use of telemedicine at One by IFG 5. Paid Marketing strategy since July 2024, including publication of the Labuan Bajo Marathon event in 2024 (LBM2024) via One by IFG 6. Regular social media activation, collaboration with the IFG ecosystem impacting the number of downloaders until October 2024 which is ≈ 60,000 downloaders 7. Dissemination regarding the mutual fund pillar now can be accessed through One by IFG, with several reward activations in the form of BTIM money market mutual funds 8. Dissemination regarding TPL Pro Insurance products now can be accessed through One by IFG with activation of rewards in the form of free TPL Pro Insurance for ≈ 1000 downloaders. 9. Dissemination regarding the change in access to digital health services to One by IFG has been carried out in November 2024 10. Implementation of regular programs to optimize penetration & utilization of One by IFG (PayDay, Connect Polis, Double Dates 11-11 12-12).
			1. Having received letters number 780 and 781 from OJK stating that IFG's cooperation with IFG Life and JRP is not a Business Entity Other Than a Bank (BUSB) but a cooperation of IT providers. 2. As of September 2024, the total number of mutual fund investors was 148 and transactions amounted to IDR1.4 million. 3. Live Demo of One by IFG application has been conducted to OJK on May 12, 2024 and BTIM has sent answers to several OJK responses on June 20, 2024. 4. Digital Identity of Population (IKD) licensing adjustment through Minutes of Meeting Number RR-14/IK.01/2022 from OJK for a meeting between the OJK IKD Regulatory and Licensing Department on May 30, 2024 which states that One by IFG can still operate insurance and mutual fund products or services owned by financial institutions that are holding members of IFG. 5. BTIM and IFG have received permission for IFG to act as a BTIM Mutual Fund outlet through Letter Number S-731/PM.02.2024.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
17.	Alokasi instrumen investasi yang kurang produktif Allocation of less productive investment instruments	Penerapan *Asset Liability Management* (ALM) yang belum optimal Implementation of Asset Liability Management (ALM) that is not optimal	1. Pembaruan Kebijakan ALM masih dalam *review* Divisi Keuangan, Departemen Kebijakan & Divisi Hukum. 2. Telah selesai dilakukan perbaikan skema marginal deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI. 3. Melakukan *monitoring* secara periodikal (bulanan) penurunan Aset Investasi Deposito ke SBN atau Obligasi Korporasi. 4. *Kick-off Meeting* bersama dengan Anggota *Holding* serta vendor sudah dijalankan. 5. Telah dilakukan *monitoring* berkala bulanan atas realisasi rencana penambahan penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) Anggota *Holding* bidang Asuransi dan Penjaminan (aspen) kepada BTIM. Per Desember-2024, AUM KPD aspen di BTIM sebesar Rp23,17 triliun. 6. *Monitoring* dan pencatatan atas kas operasional dan kas investasi telah dilakukan periodik per bulan. 7. Telah terdapat keputusan Direksi mengenai *product alternative* yang dibentuk di Q2-Q3 tahun 2024 tidak perlu diajukan sampai *Business Development Holding Committee Capital Market & Investment* (BDHC CMI). 8. Terdapat 6 *pipeline* produk alternatif di mana 1 produk telah *launched*, sisanya dalam proses *due diligence*. 1. ALM Policy update still under review by Finance Division, Policy Department & Legal Division. 2. improvement of the marginal deposit scheme at Bank Mandiri and Bank BNI has been completed. 3. Conduct periodic (monthly) monitoring of the decline in Investment Assets Deposits to Government Securities or Corporate Bonds. 4. Kick-off Meeting with Holding members and Vendors has been conducted. 5. Monthly periodic monitoring has been carried out on the realization of the plan to increase the placement of Fund Management Contracts (KPD) of Insurance and Guarantee Holding members (aspen) to BTIM. As of December 2024, the AUM of Insurance and Guarantee Fund Management Contracts in BTIM amounted to IDR23.17 trillion. 6. Monitoring and recording of operational cash and investment cash has been carried out periodically per month. 7. A Decree by the Board of Directors that product alternatives formed in Q2-Q3 of 2024 do not need to be submitted to the Business Development Holding Committee Capital Market & Investment (BDHC CMI). 8. There are 6 alternative product pipelines where 1 product has been launched, the rest are in the due diligence process.
18.	Tingginya *idle cash on hand* High idle cash on hand	Manajemen kas operasional dan kas investasi yang belum memadai Inadequate operational and investment cash management	1. *Monitoring* dan pencatatan atas kas operasional dan kas investasi telah dilakukan periodik per bulan. 2. Implementasi *Dashboard Cash Management* (DCM) sedang dilakukan pada *affiliated company* IFG untuk *cluster* Aspen dan Asuransi Jiwa (Asjiw) untuk *cluster* CMI akan dilaksanakan pada *fase* 2 pengembangan/ *enhancement* DCM. 1. Monitoring and recording of operational cash and investment cash has been carried out periodically per month. 2. Implementation of Dashboard Cash Management (DCM) is conducted at affiliated company IFG for Insurance and Guarantee cluster and Life Insurance for CMI cluster will be implemented in phase 2 of DCM development/enhancement.

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
19.	Pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak terlaksana sesuai jadwal Disbursement of State Equity Participation (PMN) funds that did not occur on schedule	Proses administrasi yang memakan waktu lama Time-consuming administrative process	Sudah dilakukan pencairan dana PMN pada bulan April 2024. PMN funds have been disbursed in April 2024.
20.	Terbatasnya kandidat perempuan yang memenuhi kualifikasi Limited number of qualified female candidates	Program pengembangan SDM untuk *talent* perempuan yang belum mengenai sasaran Human resource development programs for women's talents that have not yet on target	1. Hasil pemetaan dan analisa dari konsultan terhadap *selected talent* telah dilakukan dan telah ditetapkan *Nominated Talent* oleh Dekom dan disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui *Cost to Company* (CTC). Adapun jumlah *talent* perempuan sebanyak 12 orang dari total 44 orang. 2. Divisi SDM sedang dalam tahap persiapan program terkait dengan tahapan seleksi, persiapan *website* seleksi, melakukan *shortlist* kandidat seleksi dari internal *Holding*, dan permintaan kandidat seleksi kepada seluruh Anggota *Holding*. 1. The results of mapping and analysis from consultants on selected talents have been carried out and Nominated Talents have been determined by the Decommission and submitted to the Ministry of SOEs through Cost to Company (CTC). The number of female talents is 12 out of a total of 44 people. 2. The HC Division is in the preparation stage of the program related to the selection stages, preparation of the selection website, shortlisting selection candidates from within the Holding, and requesting selection candidates to all Holding members. 1. Divisi SDM sudah memberikan penjelasan Aspirasi Pemegang Saham (APS) mengenai peningkatan produktivitas karyawan melalui Surat Direktur SDM nomor 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. Divisi SDM melakukan *monitoring* secara berkala pada Anggota *Holding* bersamaan dengan *monitoring* dan evaluasi bulanan bidang SDM. 1. The HC Division has provided an explanation of Shareholder Aspirations (APS) regarding increasing employee productivity through HC Director Letter number 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. The HC Division conducts regular monitoring of holding members in conjunction with the monthly HC monitoring and evaluation.

No.	**Risiko** Risk	**Uraian Penyebab Risiko** Description of Risk Causes	**Realisasi Pelaksanaan Mitigasi** Realization of Mitigation Implementation
21.	Terbatasnya kandidat *talent* muda yang memenuhi kualifikasi Limited number of qualified young talent candidates	Program pengembangan SDM untuk *talent* muda yang belum mengenai sasaran HC development programs for young talents that have not yet on target	1. Hasil pemetaan dan analisa dari konsultan terhadap *selected talent* telah dilakukan dan telah ditetapkan *Nominated Talent* oleh Dekom dan disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui CTC. Adapun jumlah *talent* muda sebanyak 9 orang dari total 44 orang. 2. Divisi SDM sedang dalam tahap persiapan program terkait dengan tahapan seleksi, persiapan *website* seleksi, melakukan *shortlist* kandidat seleksi dari internal *Holding*, dan permintaan kandidat seleksi kepada seluruh Anggota *Holding*. 1. The results of mapping and analysis from consultants on selected talents have been obtained and Nominated Talents have been determined by the Decommission and submitted to the Ministry of SOEs through the CTC. The number of young talents is 9 people out of a total of 44 people. 2. The HC Division is in the preparation stage of the program related to the selection stages, preparation of the selection website, to shortlist selection candidates from internal Holding, and request for selection candidates to all Holding members.
			1. Divisi SDM sudah memberikan penjelasan Aspirasi Pemegang Saham (APS) mengenai peningkatan produktivitas karyawan melalui Surat Direktur SDM nomor 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. Divisi SDM melakukan *monitoring* secara berkala pada Anggota *Holding* bersamaan dengan *monitoring* dan evaluasi bulanan bidang SDM. 1. The HC Division has provided an explanation of Shareholder Aspirations (APS) regarding increasing employee productivity through HR Director Letter number 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. The HC Division conducts regular monitoring of holding members in conjunction with the monthly HC monitoring and evaluation.
22.	Ketidaksesuaian antara pengisian jabatan yang dibutuhkan dengan kandidat *talent mobility* Mismatch between the required position filling and talent mobility candidates	Kualifikasi kandidat *talent mobility* yang tidak sesuai kebutuhan Qualifications of talent mobility candidates that do not meet the needs	1. Divisi SDM sudah memberikan penjelasan aspirasi pemegang saham (APS) terkait target *talent mobility* melalui Surat Direktur SDM nomor 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. Perluasan lingkup *talent mobility* sampai BOD-2 juga sudah diselaraskan ke Anggota *Holding* dan sudah dimasukkan ke dalam Kontrak Manajemen tahun 2024. 3. Divisi SDM melakukan *monitoring* secara berkala atas implementasi *talent mobility* pada Anggota *Holding* bersamaan dengan *monitoring* dan evaluasi bulanan bidang SDM. 4. Program yang telah dijalankan 100% terdiri atas 2 dari target 4 program: a. Kebijakan pengelolaan talenta (terlaksana 100%). b. Implementasi *talent mobility* (terlaksana 7 dari target 11 talent atau sebesar 63%). c. Indikator pengembangan *talent* muda dan wanita (terlaksana 100%) d. Penyusunan kebijakan kepangkatan (95%). 1. The HC Division has provided an explanation of shareholder aspirations (APS) regarding the talent mobility target through HC Director Letter number 047/DIRSDM/BPUI/II/2024. 2. The expansion of the scope of talent mobility to BOD-2 has also been harmonized to the holding members and has been included in the Management Contract for 2024. 3. The HC Division conducts regular monitoring of the implementation of talent mobility in holding members in conjunction with the monthly HC monitoring and evaluation. 4. Programs that have been implemented 100% consist of 2 out of a target of 4 programs: a. Talent management policy (100% implemented). b. Implementation of talent mobility (implemented 7 out of a target of 11 talents or 63%) c. Indicator of young and female talent development (100% implemented). d. Preparation of rank policy (95%).

No.	Risiko Risk	Uraian Penyebab Risiko Description of Risk Causes	Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Realization of Mitigation Implementation
23.	Program peningkatan kualifikasi yang belum tepat sasaran Qualification improvement program that is not yet on target	*Training need analysis* (TNA) yang belum sesuai dengan Juknis Kualifikasi Organ Pengelola Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN Training need analysis (TNA) that is not in accordance with the Technical Guidelines for Qualification of Risk Management Organs issued by the Ministry of SOEs.	1. *Focus Group Discussion* (FGD) TNA 2025 sudah dilakukan bersama dengan Anggota *Holding* untuk memastikan penyusunan Kalender Pembelajaran telah sesuai *First draft* Kalender Pembelajaran Universitas dan Kalender Pembelajaran Akademi telah selesai disusun. 2. Penyusunan *draft* kurikulum sudah dilakukan bersama LPPI, namun saat ini tindak lanjut atas penyusunan kurikulum tersebut sedang di-*hold* dikarenakan akan dilakukan reviu ulang atas kesesuaian terhadap kebutuhan kurikulum yang akan diprioritaskan. 3. *Enhancement* Sistem Pembelajaran Digital (*Learning Management System* (LMS)) tahap 2 sudah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan di Q1 2025 untuk masuk ke dalam tahap 3. 4. Program pembelajaran baik secara *in class training* maupun digital *learning* terlaksana 48 dari 50 program (96%) pelatihan teknis dan 24 dari 25 (96%) program sertifikasi. 5. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan program teknis dilaksanakan bersamaan dengan implementasi program pembelajaran. Sampai dengan Desember 2024 telah terlaksana sebanyak 100% dari total program yang akan dievaluasi. 6. Laporan pelaksanaan Q4 telah selesai disusun dan akan dilakukan persetujuan kepada Direktur SDM. 1. Focus Group Discussion (FGD) of TNA 2025 has been conducted together with Holding members to ensure the preparation of Learning Calendar is appropriate. First draft of University Learning Calendar and Academy Learning Calendar have been completed. 2. The preparation of the draft curriculum has been carried out alongside LPPI, but currently the follow-up to the preparation of the curriculum is being held due to a review of the suitability of the curriculum needs that will be prioritized. 3. Phase 2 of the Learning Management System (LMS) enhancement has been completed and will continue in Q1 of 2025 to enter phase 3. 4. Learning programs both in class training and digital learning were implemented 48 out of 50 (96%) technical training programs and 24 out of 25 (96%) certification programs. 5. The evaluation process for the implementation of technical programs is done simultaneously with the implementation of learning programs. Until December 2024, 100% of the total programs to be evaluated have been implemented. 6. The Q4 implementation report has been completed and will be approved by the HC Director.
24.	Rasio kecukupan dana yang tidak memadai Inadequate fund adequacy ratio	Belum diterapkannya ALM di Dana Pensiun ALM has not yet been implemented in the Pension Fund	1. Surat terkait inisiasi *Holding* untuk *monitoring* implementasi *roadmap* Dana Pensiun disampaikan ke Jasindo dan JR selaku pemilik Dana Pensiun dengan nomor surat: a. 091.DIRSDM.BPUI.III.2024 untuk Jasindo b. 092.DIRSDM.BPUI.III.2024 untuk Jasa Raharja 2. Sepanjang tahun 2024 sudah dilakukan *monitoring* dengan Pendiri Dana Pensiun (Dapen) dan Perusahaan Dapen masing-masing Anggota *Holding* tersebut, dalam *monitoring* tersebut Dapen masing-masing Anggota *Holding* mengirimkan *evidence* atas pencapaian dapen yang telah diberikan. Selanjutnya, telah dilakukan pelaporan Dapen untuk Desember 2024 oleh masing-masing Anggota *Holding*. 3. Sudah dilakukan diskusi progres implementasi *roadmap* penyehatan dana pensiun dengan Divisi Hukum, Divisi Keuangan Perusahaan sebagai tim teknis penyusunan *roadmap* atas *evidence* yang telah diberikan. 4. Divisi SDM sudah melakukan *reminder* terkait pengumpulan laporan bulanan (*monthly performance evaluation*) kepada Dapen Jasindo dan Jasa Raharja. 1. Letters related to the holding initiation for monitoring the implementation of the Pension Fund roadmap were submitted to Jasindo and JR as the owners of the Pension Fund with letter numbers: a. 091.DIRSDM.BPUI.III.2024 for Jasindo b. 092.DIRSDM.BPUI.III.2024 for Jasa Raharja 2. Throughout 2024, monitoring has been done alongside the Pension Fund (Dapen) Founder and the Pension Fund Company of each Holding Member, the Pension Fund of each Holding Member sends evidence of the achievement from the Pension Fund that has been given. Furthermore, the Pension Fund reporting has been conducted for December 2024 by each Holding Member. 3. Discussions have been held on the progress of the implementation of the roadmap for pension fund restructuring with the Legal Division, Corporate Finance Division as the technical team for preparing the roadmap for the evidence that has been provided. 4. The HC Division has issued reminders regarding the collection of monthly performance evaluation reports to Jasindo and Jasa Raharja Pension Fund.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO OLEH DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko IFG dibantu oleh Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi dan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris serta melalui rapat-rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai manajemen risiko. Adapun IFG telah merumuskan evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RKAP dan dipantau realisasi secara triwulanan yang dicantumkan dalam laporan manajemen triwulanan yang keseluruhan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RJPP yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pencapaian peringkat komposit risiko triwulanan yang berasal dari indikator pencapaian kinerja dan kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN yaitu SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
4. Evaluasi kebijakan ambang batas kewenangan transaksi atas aksi korporasi IFG.
5. Pemenuhan implementasi atas pedoman strategis yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya untuk diturunkan ke Anggota *Holding*.
6. Penetapan *Financial Contingency Plan* (Rencana Darurat Keuangan).
7. Pelaksanaan *Risk Maturity Index* (RMI).
8. Pelaksanaan pelaporan *Loss Event Database* (LED).

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners and the Board of Directors continuously evaluate the effectiveness of IFG's risk management with the assistance of the Risk Management Committee under the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee under the Board of Commissioners as well as through meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners that require the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding risk management. IFG has formulated an evaluation of the effectiveness of risk management as follows:

1. Management for each major risk is included in the RKAP document and monitored for realization on a quarterly basis which is included in the overall quarterly management report approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Management for each major risk included in the RJPP document approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Achievement of quarterly risk composite ratings derived from indicators of performance achievement and quality of risk management implementation based on a copy of the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs, SK-7/DKU.MBU/10/2023 concerning Technical Guidelines for SOE Risk Management Reporting.
4. Evaluation of transaction authority threshold policy on IFG corporate actions.
5. Fulfillment of the implementation of strategic guidelines set in the previous year to be passed down to holding members.
6. Establishment of a Financial Contingency Plan.
7. Implementation of Risk Maturity Index (RMI).
8. Implementation of Loss Event Database (LED) reporting.

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris IFG menjalankan praktik bisnis yang sehat dan menciptakan nilai tambah sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, terstruktur, dan menyeluruh. Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko secara *enterprise-wide*, IFG menetapkan *risk appetite*, yaitu tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil untuk mencapai sasaran bisnisnya. *Risk appetite* ini tercermin dalam strategi serta tujuan bisnis perusahaan. Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dalam bentuk standar operasional dan prosedur.

Sebagai bagian dari kerangka penerapan manajemen risiko, perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko secara *prudent* dan efektif, termasuk memperkuat budaya risiko di seluruh tingkatan jabatan. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan, sasaran, mandat, dan standar penerapan manajemen risiko. Dalam kerangka organisasi, penerapan manajemen risiko mencakup perencanaan, sistem, struktur hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses, serta berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan risiko di perusahaan.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

IFG's Board of Directors and Board of Commissioners conduct sound business practices and create added value in line with stakeholders' expectations through the implementation of systematic, structured and comprehensive risk management. As part of an enterprise-wide risk management approach, IFG establishes a risk appetite, which is the level and type of risk it is willing to take to achieve its business objectives. This risk appetite is reflected in the company's strategy and business objectives. To minimize potential conflict of interest in operational and financial management, IFG has established Goods and Services Procurement Guidelines in the form of operational standards and procedures.

As part of the risk management implementation framework, the company is committed to managing risk prudently and effectively, including strengthening the risk culture at all levels. This commitment is realized through policies, targets, mandates, and standards of risk management implementation. Within the organizational framework, the implementation of risk management includes planning, systems, relationship structures, accountability, resources, processes, and various activities that support risk management in the company.

PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

PERMASALAHAN HUKUM

Adapun permasalahan hukum yang dihadapi IFG dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

LEGAL ISSUES

The legal issues faced by IFG in the last 2 (two) years are summarized in the following table:

Permasalahan Hukum Legal Issues	2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Settled and Has Permanent Legal Force	1	Nihil None	2	Nihil None
Dalam Proses Penyelesaian In the Settlement Process	2	Nihil None	1	Nihil None
Jumlah Total	**3**	**Nihil** None	**3**	**Nihil** None

Adapun rincian permasalahan hukum yang dihadapi IFG di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The details of legal issues faced by IFG in 2024 are as follows:

Pihak yang Berperkara Litigants	Pokok Perkara Merits of Case	Putusan Pengadilan Verdict	Status Perkara Case Status
Perkara Nomor 903/PDT/2023/PT.DKI jo Perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst Penggugat : Agus Gondokusumo dan 51 penggugat lainnya Tergugat: IFG sebagai Tergugat 10 Case Number 903/PDT/2023/PT.DKI in conjunction with Case Number 659/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst Plaintiff(s): Agus Gondokusumo and 51 other plaintiffs Defendant(s): IFG as Defendant 10	Wanprestasi Tuntutan dari Para Penggugat kepada Jiwasraya untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat akibat tidak terbayarnya polis Jiwasraya yang telah jatuh tempo. Para Penggugat juga meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. Breach of Contract The Plaintiffs demanded Jiwasraya to pay the losses suffered by the Plaintiffs due to the non-payment of Jiwasraya's matured policies. The Plaintiffs also requested the Court to declare that the Defendants had committed an act of breach of promise.	Putusan tingkat pertama tanggal 12 Januari 2023 Menolak gugatan seluruhnya Putusan tingkat banding tanggal 18 September 2023 menyatakan gugatan tidak dapat diterima Decision of first instance dated January 12, 2023 Reject the lawsuit entirely Decision of the appeal level dated September 18, 2023 declaring the lawsuit inadmissible	Inkracht. Tidak ada upaya hukum dari Para Penggugat berdasarkan Surat pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1765/PAN/W10.U1/HK2.4/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 Inkracht. There are no legal efforts from the Plaintiffs based on the Jakarta District Court Letter Number 1765/PAN/W10.U1/HK2.4/2/2024 dated February 22, 2024.

Pihak yang Berperkara Litigants	Pokok Perkara Merits of Case	Putusan Pengadilan Verdict	Status Perkara Case Status
Perkara Nomor 503/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst Penggugat: Anton Fadjar Alogo Tergugat: Askrindo Turut Tergugat: 1. Menteri BUMN 2. IFG Case Number 503/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst Plaintiff(s): Anton Fadjar Alogo Defendant(s): Askrindo Co- Defendant(s): 1. SOE Minister 2. IFG	Perbuatan Melawan Hukum Anton Fadjar Alogo meminta agar Askrindo, IFG, dan Menteri BUMN melakukan pembayaran hak tantiem dan remunerasi dari Anton Fadjar Alogo saat menjabat sebagai Direktur Operasional Ritel di Askrindo. Unlawful Acts Anton Fadjar Alogo requested that Askrindo, IFG, and the Minister of SOEs pay the bonuses and remuneration rights of Anton Fadjar Alogo when he served as Director of Retail Operations at Askrindo.	Dalam proses persidangan In the trial process	Tahapan penyampaian bukti awal atas eksepsi kompetensi absolut Stages of submission of preliminary evidence on the exception of absolute competence
Perkara Nomor 749/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst Penggugat: Demak Tobing Tergugat: 1. Menteri BUMN 2. OJK 3. Jiwasraya 4. Dr. Hendrisman Rahim 5. DPR RI Turut Tergugat: 1. IFG 2. IFG Life Case Number 749/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst Plaintiff(s): Demak Tobing Defendant(s): 1. SOE Minister 2. FSA 3. Jiwasraya 4. Dr. Hendrisman Rahim 5. HOUSE OF REPRESENTATIVES Co- Defendant(s): 1. IFG 2. IFG Life	Perbuatan Melawan Hukum Demak Tobing selaku pemegang polis Jiwasraya, meminta agar Menteri BUMN, OJK, Jiwasraya, Dr. Hendrisman Rahim, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membayar nilai manfaat polis milik Penggugat. Dalam perkara ini tidak ada petitum yang secara langsung ditujukan kepada IFG dan IFG Life. Unlawful Acts Demak Tobing as a Jiwasraya policyholder, requested that the Minister of SOEs, OJK, Jiwasraya, Dr. Hendrisman Rahim, and the House of Representatives of the Republic of Indonesia to pay the value of the Plaintiff's policy benefits. In this case there is no petitum directly addressed to IFG and IFG Life.	Dalam proses persidangan In the trial process	Tahapan pemeriksaan legalitas para pihak Stages of checking the legality of the parties

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan, mempertimbangkan bahwa perusahaan bukan merupakan tergugat utama dan tidak terdapat tuntutan yang berpotensi menimbulkan kewajiban finansial kepada IFG. Namun demikian, IFG telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memitigasi permasalahan hukum baik dengan melibatkan sumber daya internal maupun konsultan eksternal.

Selain perkara yang dihadapi IFG, terdapat juga permasalahan hukum yang dihadapi/melibatkan Anggota *Holding*. Atas permasalahan hukum Anggota *Holding*, IFG memberikan dukungan/asistensi hukum dengan memberikan kajian hukum, penyusunan strategi penanganan perkara, melakukan pendampingan atau negosiasi. Untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, IFG senantiasa melakukan *monitoring* secara berkala terhadap perkembangan dari permasalahan hukum yang sedang berlangsung.

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE COMPANY

The legal issues as described in the table above do not have a significant impact on the company's operations, considering that the company is not the main defendant and there are no claims that have the potential to cause financial obligations to IFG. However, IFG has taken actions deemed necessary to mitigate legal issues both by involving internal resources and external consultants.

In addition to cases faced by IFG, there are also legal issues faced/involving holding members. For legal issues of holding members, IFG provides legal support/assistance by providing legal studies, preparing case handling strategies, providing assistance or negotiations. To monitor as well as anticipate the necessary mitigation measures, IFG always conducts regular monitoring of the development of ongoing legal issues.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Adapun pengungkapan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat di tahun 2024 sebagai berikut:

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES FACED BY THE INCUMBENT BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The disclosure of legal issues faced by the incumbent Board of Commissioners and Directors in 2024 is as follows:

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status	**Tindak Lanjut** Follow-up
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANGGOTA *HOLDING*

Adapun pengungkapan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Anggota *Holding* sebagai berikut:

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES FACED BY HOLDING MEMBERS

The disclosure of legal issues faced by holding members is as follows:

IFG Group	Kasus Hukum Anggota *Holding* IFG Tahun 2023-2024 Legal Case of IFG's Holding members in 2023-2024			
	2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Civil	Perdata Civil	Pidana Civil
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	4	Nihil None	1	Nihil None
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	6	Nihil None	8	Nihil None
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	11	Nihil None	12	Nihil None
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	11	Nihil None	18	Nihil None
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	4	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Sekuritas (BS)	4	Nihil None	4	Nihil None
PT Bahana Kapital Investama (BKI)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	5	Nihil None	5	Nihil None
Total	**45**	**Nihil**	**48**	**Nihil**

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

IFG selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2024, IFG tidak menerima sanksi administratif dari otoritas yang berwenang.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELEVANT AUTHORITIES

IFG has always complied with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Therefore, throughout 2024, IFG did not receive any administrative sanctions from the competent authority.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Pengelolaan informasi dilakukan sebagai upaya menciptakan nilai dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. IFG berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam prinsip transparansi, dengan menyediakan akses informasi baik secara internal maupun eksternal. Keterbukaan Informasi Publik berperan sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap kegiatan perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, sesuai dengan ketentuan internal mengenai pengelolaan informasi.

Information management is implemented as an effort to create value and increase stakeholders' trust in the company. IFG is committed to implementing good corporate governance standards, especially in the principle of transparency, by providing access to information both internally and externally. Public Information Disclosure serves as a means to optimize public monitoring of the company's activities as well as matters relating to the public interest, in accordance with internal provisions regarding information management.

IFG senantiasa berupaya menyajikan informasi yang memadai, relevan, dan terkini, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait data yang tergolong sebagai informasi rahasia perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan oleh pejabat atau unit kerja yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuannya, dalam hal ini dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

IFG always strives to present adequate, relevant and up-to-date information, while taking into account the provisions related to data classified as confidential company information. Information disclosure is carried out by officials or work units that have duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions, in this case managed by the Corporate Secretary.

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam upaya meningkatkan transparansi, IFG menyediakan akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti laporan resmi, siaran pers, dan pemberitaan di media massa. Langkah ini sejalan dengan prinsip kebebasan informasi publik yang diatur oleh pemerintah serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi terkini mengenai IFG.

COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS POLICY

To increase transparency, IFG provides access to information through various communication channels, such as official reports, press releases, and media coverage. This step is in line with the principle of freedom of public information regulated by the government and aims to fulfill stakeholders' needs for up-to-date information about IFG.

Informasi mengenai IFG dapat diakses secara terbuka melalui situs *web* www.ifg.id, yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Situs ini menyajikan beragam informasi terkait IFG, termasuk profil perusahaan, produk dan layanan, laporan kinerja keuangan, serta informasi korporasi lainnya.

Information about IFG can be accessed publicly through the website www.ifg.id, which is available in Indonesian and English. The website provides a variety of information related to IFG, including company profile, products and services, financial performance reports, and other corporate information.

Selain itu, IFG juga menyediakan fasilitas untuk menyampaikan informasi dengan menghubungi langsung kantor pusat IFG di alamat berikut:

In addition, IFG also provides facilities to submit information by contacting IFG head office directly at the following address:

Kantor Pusat IFG
Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. +62 21 2505080
Situs Web: www.ifg.id

IFG Head Office
Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190
Tel. +62 21 2505080
Website: www.ifg.id

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

IFG telah menyusun dan menyampaikan informasi keuangan serta non-keuangan secara transparan kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut disajikan secara tepat waktu, lengkap, akurat, mutakhir, menyeluruh, dan memadai, sesuai dengan prosedur, jenis, dan cakupan yang diatur dalam regulasi terkait Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Penyampaian informasi dilakukan melalui laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan; dan
3. Surat kepada Pemegang Saham.

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN PERUSAHAAN

Hingga 31 Desember 2024, IFG telah menerbitkan sebanyak 1959 *press release* di media massa yang berisi informasi antara lain mengenai kinerja dan aksi korporasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

CORRESPONDENCE AND PERIODIC REPORTS

IFG has compiled and submitted financial and non-financial information transparently to Shareholders, stakeholders, and related institutions in accordance with applicable regulations. The information is presented in a timely, complete, accurate, up-to-date, comprehensive, and adequate manner, in accordance with the procedures, types, and scope stipulated in the regulations related to Transparency of the Company's Financial Condition. Information submission is managed through the following reports:

1. Annual Report;
2. Financial Statements; and
3. Letter to Shareholders.

COMPANY'S PUBLICATIONS AND NEWS

As of December 31, 2024, IFG has published 1959 press releases in the mass media containing information on the company's performance and corporate actions, with details as follows:

Rilis Media 2024
2024 Media Release

Bulan Month	Jumlah Publikasi Number of Publications	Tone
Januari January	55	Positif: 55 Positive: 55
Februari February	31	Positif: 31 Positive: 31
Maret March	166	Positif: 166 Positive: 166
April April	105	Positif: 105 Positive: 105
Mei May	102	Positif: 102 Positive: 102
Juni June	53	Positif: 53 Positive: 53
Juli July	226	Positif: 226 Positive: 226
Agustus August	355	Positif: 355 Positive: 355
September September	221	Positif: 221 Positive: 221
Oktober October	301	Positif: 301 Positive: 301
November November	285	Positif: 285 Positive: 285
Desember December	59	Positif: 59 Positive: 59

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

IFG mengakui peran krusial sistem Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung keberlangsungan usaha IFG di era digital. Pengembangan sistem TI diyakini dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta kualitas layanan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, IFG berkomitmen untuk terus melakukan penguatan TI dan mengimplementasikannya guna mendukung kinerja optimal.

Mengingat pentingnya TI dalam operasional bisnis, sistem TI IFG dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, memperkuat daya saing dengan inovasi berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan fungsional perusahaan. Sistem ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk memastikan pengawasan dan pengendalian yang optimal.

Melalui komitmen ini, IFG dapat menyediakan produk dan layanan yang lebih baik, mengukur serta menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan strategis yang tepat guna memastikan keberlanjutan usaha dan memperkuat daya saing IFG di masa depan.

IFG recognizes the crucial role of Information Technology (IT) systems in supporting IFG's business sustainability in the digital era. IT system development is believed to improve effectiveness, productivity, and quality of service to stakeholders. Therefore, IFG is committed to continuously strengthening IT and implementing it to support optimal performance.

Given the importance of IT in business operations, IFG's IT system is designed to improve efficiency through process automation, strengthen competitiveness with continuous innovation, and adapt to the company's operational and functional needs. The system is supported by competent human resources to ensure optimal supervision and control.

Through this commitment, IFG can provide better products and services, measure and track business performance, and make the right strategic decisions to ensure business sustainability and strengthen IFG's competitiveness in the future.

VISI DAN MISI TATA KELOLA TI

IFG memiliki visi dan visi dalam mencapai TI yang terintegrasi untuk lingkup bisnis perusahaan dalam rangka menjalankan pengelolaan TI.

Visi
Menjadi partner bisnis dalam transformasi digital untuk menjadi grup keuangan non bank terbesar di ASEAN.

Misi
1. Sinergi investasi TI dalam implementasi teknologi *best in class*.
2. Menyediakan platform TI terpadu di lingkungan IFG group untuk mendukung standarisasi proses dan sinergi bisnis.

VISION AND MISSION OF IT GOVERNANCE

IFG has a vision and vision in achieving integrated IT for the company's business scope in order to carry out IT management.

Vision
Become a business partner in digital transformation to become the largest non-bank financial group in ASEAN.

Mission
1. IT investment synergy in best in class technology implementation.
2. Provide a unified IT platform within IFG group to support process standardization and business synergy.

IT DISRUPTION

Sepanjang tahun 2024, IFG mengidentifikasi dan mengelola gangguan terkait TI (*IT disruption*) sebagai bagian dari manajemen risiko. Untuk meminimalkan dampak gangguan tersebut, berbagai langkah mitigasi telah diterapkan. Berikut adalah ringkasan insiden yang terjadi beserta upaya mitigasi yang telah dilakukan:

IT DISRUPTION

Throughout 2024, IFG identified and managed IT-related disruptions as part of risk management. To minimize the impact of such disruptions, various mitigation measures have been implemented. The following is a summary of the incidents that occurred and the mitigation efforts that have been made:

No	Tanggal Date	Insiden Incidents	Mitigasi Mitigation
1	28 Maret 2024 March 28, 2024	Kerusakan kabel koneksi dari perangkat Palo Alto ke Fortinet di *Data Center* Damage to the connection cable from the Palo Alto device to Fortinet in the Data Center	Penggantian kabel koneksi Fortigate 601E ke Palo Alto 3440 di *Data Center* Fortigate 601E to Palo Alto 3440 connection cable replacement in Data Center
2	25 April 2024 April 25, 2024	*Tunnel* utama ke AWS terindikasi *down* Main tunnel to AWS indicated down	Pemindahan jalur utama AWS ke *link* cadangan Transfer AWS main line to backup link
3	7 Mei 2024 May 7, 2024	Kerusakan *hardware* pada port SFP *(Small Form-factor Pluggable)* di perangkat SDWAN *Head Office* Hardware damage to the SFP (Small Form-factor Pluggable) port on the HeadOffice SDWAN device	Pengalihan kabel jaringan ke Port LAN Aktif pada Perangkat SDWAN di *Head Office* Switching the network cable to the Active LAN Port of the SDWAN Device at the Head Office
4	3 Juni 2024 June 3, 2024	Terdapat malfungsi pada perangkat jaringan *data center* There was a malfunction in the data center network device	Penyesuaian kebijakan pada perangkat Palo Alto dan restart perangkat jaringan di *data center* Policy adjustment on Palo Alto devices and restart of network devices in the data center
5	19 Juli 2024 July 19, 2024	*Update patch* antivirus *Crowdstrike* yang menyebabkan *crash* pada Sistem Operasi Windows Crowdstrike antivirus patch update that causes crashes on Windows Operating Systems	Penghapusan *file update patch* antivirus *Crowdstrike* pada setiap perangkat laptop/PC dan *server* Removal of Crowdstrike antivirus patch update files on each laptop/PC device and server

CYBER SECURITY

Kegiatan operasional TI mencakup penyelenggaraan layanan dasar TI, seperti internet, *email*, dan *file server*, serta penyediaan layanan sistem aplikasi. Layanan ini meliputi *monitoring*, perawatan, perbaikan, dan dukungan teknis bagi seluruh karyawan.

Untuk memastikan kelancaran operasional, IFG secara proaktif mengelola risiko guna mencegah dan mengatasi gangguan TI, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah langkah-langkah yang diterapkan dalam menjaga dan mengelola gangguan tersebut:

1. pembentukan CSIRT IFG, 27 Juli 2022;
2. *Workshop Cyber Security* OJK, 12 Agustus 2024;
3. kegiatan Apel CSIRT Sektor Perekonomian, 20 Agustus 2024;
4. *Sharing Session Security Awareness* "Meningkatkan *Cyber Security Awareness* di Tengah Ancaman Serangan *Cyber*", 29 Agustus 2024;
5. BUMN Cybersecurity Drill, Rabu 4 Desember 2024;
6. implementasi Sertifikasi ISO 27001;2022 *Information Security Management System* (Sistem Manajemen Keamanan Informasi);
7. penerapan antivirus standar pada semua *endpoint* dan *server*, memastikan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki perlindungan dasar terhadap virus, *malware*, dan ancaman siber lainnya;
8. melaksanakan Asesmen Tingkat Keamanan Siber dengan menerapkan *Zero Trust Framework* di IFG dan seluruh Anggota *Holding*, yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus – November 2024; dan
9. mengoperasikan *Security Operation Center* (SOC) untuk memantau, mendeteksi, dan merespons ancaman keamanan siber secara proaktif.

CYBER SECURITY

IT operational activities include the provision of basic IT services, such as internet, email, and file servers, as well as the provision of application system services. These services include monitoring, maintenance, repair, and technical support for all employees.

To ensure seamless operations, IFG proactively manages risks to prevent and address IT disruptions, both internal and external. The following are the measures implemented in safeguarding and managing such disruptions:

1. establishment of CSIRT IFG, July 27, 2022;
2. OJK Cyber Security Workshop, August 12, 2024;
3. CSIRT Economic Sector Apple event, August 20, 2024;
4. Sharing Session Security Awareness "Increasing Cyber Security Awareness Amidst the Threat of Cyber Attacks", August 29, 2024;
5. SOE Cybersecurity Drill, Wednesday, December 4, 2024;
6. implementation of ISO 27001;2022 Information Security Management System Certification;
7. standard antivirus deployment on all endpoints and servers, ensuring every device connected to the network has basic protection against viruses, malware and other cyber threats;
8. conducting a Cybersecurity Level Assessment by implementing the Zero Trust Framework at IFG and all holding members, which is scheduled to take place in August - November 2024; and
9. operating a Security Operation Center (SOC) to proactively monitor, detect and respond to cybersecurity threats.

DISASTER RECOVERY

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) IFG sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, diperlukan tinjauan strategis untuk mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis melalui sinergi dan standardisasi di bidang TI.

Sebagai bagian dari upaya mendukung governansi TI, Perusahaan secara aktif melakukan mitigasi risiko TI untuk memastikan keberlanjutan operasional. Risiko keberlangsungan usaha dapat timbul akibat berbagai faktor eksternal, seperti bencana alam, perubahan kondisi lingkungan, dinamika politik, serta ancaman terkait teknologi informasi.

Untuk mendukung ketahanan sistem TI, IFG memiliki lokasi *data center* sebagai berikut:
1. *Data Center* Utama (DC) berlokasi di area Cibitung; dan
2. *Data Recovery Center* (DRC) berlokasi di area Bogor.

IFG juga telah melakukan uji coba skenario *Business Continuity Plan* untuk memastikan kesiapan saat terjadi gangguan operasional. Lokasi pelaksanaan uji coba BCP IFG Tahun 2024 yaitu di Gedung Graha CIMB Niaga, yang melibatkan seluruh pihak terkait seperti karyawan yang mewakili masing-masing unit kerja. Pihak yang terlibat dalam uji coba BCP IFG Tahun 2024 atau yang disebut Fungsi Kritikal/*Critical Business Function* antara lain:
1. Divisi Akuntansi dan Pelaporan;
2. Divisi Hukum;
3. Divisi Keuangan Perusahaan;
4. Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset;
5. Divisi Sekretaris Perusahaan;
6. Divisi Sumber Daya Manusia;
7. Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan; dan
8. Divisi Teknologi Informasi.

SERTIFIKASI PROFESI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kompetensi Divisi Teknologi Informasi, IFG menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara sistematis dan berjenjang. Program ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan anggota Komite dalam berbagai program sertifikasi yang relevan. Berikut adalah daftar karyawan Divisi Teknologi Informasi yang telah mengikuti program sertifikasi:

DISASTER RECOVERY

Referring to Government Regulation No. 20/2020 on the Addition of State Equity of the Republic of Indonesia into the Share Capital of IFG as an Insurance, Guarantee and Investment Holding Company (Persero), a strategic review is needed to support accelerated business growth through synergy and standardization in the IT field.

As part of the effort to support IT governance, the Company actively mitigates IT risks to ensure operational sustainability. Business continuity risks can arise from various external factors, such as natural disasters, changes in environmental conditions, political dynamics, and threats related to information technology.

To support IT system resilience, IFG has the following data center locations:
1. Main Data Center (DC) located in Cibitung area; and
2. Data Recovery Center (DRC) located in Bogor area.

IFG has also tested the Business Continuity Plan scenario to ensure readiness in the event of operational disruption. The location for the implementation of the IFG BCP trial in 2024 is at Graha CIMB Niaga Building, which involves all related parties such as employees representing each work unit. Parties involved in the IFG BCP (Critical Business Function) trial in 2024 include:

1. Accounting and Reporting Division;
2. Legal Division;
3. Corporate Finance Division;
4. Procurement and Asset Management Division;
5. Corporate Secretary Division;
6. Human Capital Division;
7. Risk Management, Compliance and Policy Division; and
8. Information Technology Division.

INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION PROFESSIONAL CERTIFICATION

In an effort to improve the quality and competence of the Information Technology Division, IFG organizes a systematic and tiered competency development program. This program is implemented by involving Committee members in various relevant certification programs. The following is a list of Information Technology Division employees who have participated in certification programs:

Sertifikasi Certification	Jumlah Staf Number of Staff
Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	5
Certified Risk Management Officer (CRMO)	3
TOGAF (The Open Group Architecture Framework)	1
Sertifikasi Development & Operation	1
Cisco Certified Network Associate (CCNA)	2
VMware VSphere Certification	2
Google Cloud Engineer Certification	1
ISO 27001 Lead Auditor	2

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

IFG mengikutsertakan karyawan Divisi Teknologi Informasi dalam berbagai program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2024. Berikut adalah detail informasi mengenai pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Divisi Teknologi Informasi:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

IFG participated its Information Technology Division employees in various competency development programs throughout 2024. The following is detailed information on the competency development that has been participated in by the Information Technology Division:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
Bagus Satria Anugerah	Program Sertifikasi Certification Program	Project Management Professional	19 Juli 2024 July 19, 2024	Avenew
Deny Dermawan Sabri	Program Sertifikasi Certification Program	Project Management Professional	19 Juli 2024 July 19, 2024	Avenew
Dwi Satrio	Program Sertifikasi Certification Program	CRMO Batch 1	26 Februari 2024 February 26, 2024	RAP
Faisal Rasbihan	Program Sertifikasi Certification Program	CRMP Batch 1	26 Februari 2024 February 26, 2024	RAP
Sri Astuti	Program Sertifikasi Certification Program	CRMO Batch 2	27 Mei 2024 May 27,2024	RAP
Ailsa Fulvia	Program Sertifikasi Certification Program	CRMO Batch 3	3 Juni 2024 June 3, 2024	RAP
Yudha Unggul Amadyo	Program Sertifikasi Certification Program	CRMO Batch 3	3 Juni 2024 June 3, 2024	RAP
Subnanda Enriko	Program Sertifikasi Certification Program	CRMP Batch 2	29 April 2024 April 29, 2024	RAP
Amadea Daniel Makes	Program Sertifikasi Certification Program	CRMP Batch 3	15 Mei 2024 May 15, 2024	RAP
Wahyu Eko	Program Sertifikasi Certification Program	CRMP Batch 3	15 Mei 2024 May 15, 2024	RAP
Ratna Juwita	Program Sertifikasi Certification Program	CRMP Batch 3	15 Mei 2024 May 15, 2024	RAP

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Implementation Date	**Penyelenggara** Organizer
Dwi Baskoro	Program Sertifikasi Certification Program	ISO 27001 Lead Auditor	20 Juni 2024 June 20, 2024	Multimatics
Aji Metabuana	Program Sertifikasi Certification Program	ISO 27001 Lead Auditor	20 Juni 2024 June 20, 2024	Multimatics
Ahmat Cholid	Program Pelatihan	Stress Management	24 Oktober 2024 October 24, 2024	JBI
Harsa Pudjiandi	Program Pelatihan Training Program	Creative Thinking	30 Oktober 2024 October 30, 2024	JBI
Ailsa Fulvia	Program Pelatihan Training Program	Naskah Dinas Batch-3 Batch-3 Office Manuscripts	29 November 2024 November 29, 2024	JBI
Elly Pardede	Program Pelatihan Training Program	Naskah Dinas Batch-3 Batch-3 Office Manuscripts	29 November 2024 November 29, 2024	JBI
Harsa Pudjiandi	Program Sertifikasi Certification Program	AWS Cloud Engineer	16 Desember 2024 December 16, 2024	Trainocate
I Gusti Agung	Program Sertifikasi Certification Program	AWS Cloud Engineer	16 Desember 2024 December 16, 2024	Trainocate



KODE ETIK PERUSAHAAN
COMPANY'S CODE OF CONDUCT

Kode Etik Perusahaan atau *Code of Conduct* (COC) merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang mencakup ketentuan yang harus dipatuhi serta larangan yang harus dihindari oleh seluruh Insan IFG dalam menjalankan etika bisnis dan etika kerja, baik dalam aktivitas operasional maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam menegakkan kode etik bisnis, IFG selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan bisnisnya. Selain itu, *Code of Conduct* juga menetapkan pedoman perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan beretika.

The Code of Conduct (COC) is part of corporate governance that includes provisions that must be obeyed and prohibitions that must be avoided by all IFG personnel in doing business and work ethics, both in operational activities and daily life.

In upholding the Code of Conduct, IFG always complies with laws and regulations relevant to its business activities. In addition, the Code of Conduct also sets out the code of conduct for the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees in interacting with stakeholders, based on the principles of sound and ethical corporate governance.

PRINSIP DASAR PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

IFG juga memahami pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkelanjutan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, IFG berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten, salah satunya melalui penyusunan Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka saat ini nilai-nilai utama IFG, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. AMANAH
   Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. KOMPETEN
   Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. HARMONIS
   Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

BASIC PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CODE OF ETHICS

IFG also understands the importance of implementing corporate governance as an instrument to increase value and long-term sustainable business growth, not only for shareholders but also for all stakeholders. Therefore, IFG is committed to implementing corporate governance consistently, one of which is through the preparation of the Code of Conduct.

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners and Directors Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance, currently IFG's main values are Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK) with the following description:

1. AMANAH
   The Company upholds the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values.
2. COMPETENT
   The Company continues to learn and develop its capabilities by improving competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn and completing assignments with the best quality
3. HARMONIOUS
   The Company continues to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to support others and also build a conducive work environment.

4. LOYAL
   Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.
5. ADAPTIF
   Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.
6. KOLABORATIF
   Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) berlaku bagi seluruh pegawai IFG, termasuk karyawan dengan hubungan kerja langsung, karyawan tetap maupun kontrak, serta Direksi dan Dewan Komisaris. Komitmen terhadap kode etik ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI), sebagaimana terlampir di bawah ini.

4. LOYAL
   The Company will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, State-Owned Enterprises and the State. The Company is willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.
5. ADAPTIVE
   The Company will continue to innovate and also enthusiastically drive or face changes that occur by adapting to be better, to continuously make improvements by following technological developments and acting proactively.

6. COLLABORATIVE
   The Company continues to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, being open to working together to generate added value and also mobilizing the use of various resources for common goals.

ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT FOR ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Conduct applies to all IFG employees, including employees with direct employment, permanent and contract employees, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners. Commitment to this code of conduct is set out in the Statement of Compliance and Commitment to the Code of Conduct and Competition Compliance Policy of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), as attached below.

LAMPIRAN 1

Contoh Surat Pernyataan:

PAKTA INTEGRITAS

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN DAN KOMITMEN PADA
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) DAN
KEBIJAKAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Nomor Pegawai : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Dengan ini menyatakan:

1. Telah menerima dan membaca seluruhnya (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG.
2. Akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab saya dengan menjaga standar kinerja tinggi secara bersih, transparan dan profesional untuk menjaga budaya, Etika Bisnis, etika kerja maupun etika persaingan usaha yang sehat untuk menjaga nama baik IFG.
3. Tidak akan melakukan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyuapan, korupsi dan kecurangan (*fraud*) dilingkungan IFG.
4. Berjanji akan mematuhi dengan sebaiknya-baiknya dan penuh kesadaran semua kebijakan yang menjadi standar etika dan perilaku yang tertuang dalam (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
5. Bersedia untuk menerima sanksi atas pelanggaran terhadap (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG sesuai peraturan yang berlaku di IFG dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Demikian Surat Pernyataan (Pakta Integritas) ini yang saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan/ tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)
Yang membuat pernyataan,

(Nama dan Tanda tangan)

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

IFG menyelenggarakan sosialisasi kode etik bagi setiap karyawan baru yang bergabung. Karyawan yang baru bergabung akan menerima *softcopy* atau buku pedoman etika perilaku perusahaan. Selain itu, mereka diwajibkan menandatangani lembar pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan yang mengatur standar etika dan perilaku dalam Pedoman Perilaku. Lembar pernyataan tersebut kemudian diserahkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia.

Selain itu, dalam kode etik perusahaan terdapat nilai-nilai baru perusahaan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan *Core Values* IFG, dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

IFG conducts socialization of the code of conduct for every new employee who joins. Newly joined employees will receive a softcopy or book of the company's code of conduct. In addition, they are required to sign a statement stating that they have read, understood, and are committed to complying with all policies governing ethical and behavioral standards in the Code of Conduct. The statement sheet is then submitted to the Human Capital Division.

Moreover, in the company's code of conduct there are new company values as stated in the Decree of the Board of Directors Number 42 of 2020 concerning the Determination of IFG Core Values, and has been socialized to all employees as well as the Board of Commissioners and Directors.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Jika terdapat pegawai IFG yang terbukti melanggar *Code of Conduct*, Perusahaan IFG akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah rincian tingkat hukuman dan sanksi yang diterapkan di IFG:

SANCTIONS FOR VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT

If any IFG employee is found to have violated the Code of Conduct, the Company will impose sanctions in accordance with the applicable rules and regulations. The following are details of the level of penalties and sanctions applied at IFG:

Tingkat Pelanggaran Level of Violation	Kewenangan Penetapan Sanksi Sanctioning Authority	Jenis-jenis Sanksi Types of Sanctions
I	Kepala Divisi dan Human Capital Head Division Head and Human Capital Head	Surat Peringatan I First Warning Letter
II	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head Company's Board of Directors and Human Capital Head	Surat Peringatan II Second Warning Letter
III	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head Company's Board of Directors and Human Capital Head	• Surat Peringatan III atau • Skorsing atau • Pemutusan Hubungan Kerja • Third Warning Letter or • Suspension or • Termination of Employment
Berat Severe Violation	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head Company's Board of Directors and Human Capital Head	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

IFG telah membentuk Tim Kepatuhan GCG yang bertanggung jawab dalam menerima serta menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi penegakan *Code of Conduct*. Berikut adalah rincian sanksi yang telah diterapkan terkait penegakan *Code of Conduct* dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

IFG has established a GCG Compliance Team that is responsible for receiving and following up on any complaints received. This step is part of the implementation of Code of Conduct enforcement. The following are details of sanctions that have been applied related to Code of Conduct enforcement in the last 3 (three) years:

Kategori Pelanggaran Pelanggaran	Jenis Sanksi Sanction Type	Jumlah Pelanggaran Number of Violations		
		2024	2023	2022
Tingkat I Level I	Surat Peringatan I First Warning Letter	0	1	0
Tingkat II Level II	Surat Peringatan II Second Warning Letter	0	0	0
Tingkat III Level IIII	Surat Peringatan III atau Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja Warning Letter III or Suspension or Termination of Employment	0	1	0
	Surat Peringatan Pertama dan Terakhir First and Final Warning Letter	1	-	-
Berat Severe Violation	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	1	0	1

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG), IFG membentuk Tim Kepatuhan GCG untuk menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran *Code of Conduct*. Selama periode 2022–2024, tercatat jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi relatif rendah dan menunjukkan konsistensi dalam penerapan disiplin. Pada tahun 2024, terdapat dua kasus pelanggaran yang dikenakan sanksi, yaitu satu kasus pada kategori "Surat Peringatan Pertama dan Terakhir" serta satu kasus yang dikenakan sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja" untuk pelanggaran berat.

As part of its commitment to good corporate governance (GCG), IFG established a GCG Compliance Team to receive and follow up on any complaints of Code of Conduct violations. During the period 2022-2024, the number of sanctioned violations was relatively low and showed consistency in the application of discipline. In 2024, there were two cases of sanctioned violations, namely one case in the "First and Final Warning Letter" category and one case sanctioned "Termination of Employment" for severe violations.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran di tahun 2024 menurun dari dua kasus di tahun 2023, di mana saat itu terdapat satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi pada kategori Tingkat III. Sementara pada tahun 2022, hanya terdapat satu pelanggaran berat yang berujung pemutusan hubungan kerja. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan kepatuhan di lingkungan perusahaan telah berjalan secara efektif, dengan penanganan pelanggaran dilakukan secara tegas dan proporsional sesuai tingkat keseriusan pelanggaran.

Compared to the previous year, the number of violations in 2024 decreased from two cases in 2023, at which time there was one sanction of First Warning Letter and one sanction in the Level III category. Meanwhile, in 2022, there was only one severe violation that led to termination of employment. Overall, this trend shows that the supervision and compliance enforcement system within the company has been operating effectively, with the handling of violations carried out firmly and proportionally according to the severity of the violation.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Dalam rangka mendukung prinsip transparansi, adapun pengungkapan jumlah penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaiannya sebagai berikut:

INTERNAL DEVIATIONS

In order to support the principle of transparency, the disclosure of the number of internal irregularities/violations that occurred and the efforts to resolve them are as follows:

Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun Internal Irregularities in 1 Year	**Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh** Number of Cases Committed by					
	Dewan Komisaris/Direksi Commissioners/Directors		**Pegawai Tetap** Permanent Employees		**Pegawai Tidak Tetap** Non-permanent Employees	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Telah diselesaikan Settled	**0**	0	**1**	1	**0**	0
Dalam proses penyelesaian internal In the settlement process by internal party	**0**	0	**1**	1	**0**	0
Belum diupayakan penyelesaiannya Not yet settled	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through legal process	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Jumlah Total	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**

Selama tahun 2024, tercatat satu kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap dan saat ini masih dalam proses penyelesaian internal. Tidak terdapat kasus yang melibatkan Dewan Komisaris/Direksi maupun pegawai tidak tetap. Selain itu, tidak ada kasus yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum maupun yang belum diupayakan penyelesaiannya. Data ini juga menunjukkan tren yang serupa dengan tahun 2023, di mana tidak ada peningkatan jumlah kasus, dan keseluruhan pengendalian penyimpangan masih berada dalam lingkup internal organisasi.

During 2024, there was one case of internal irregularities committed by a permanent employee and is currently still in the process of internal resolution. There were no cases involving the Board of Commissioners/Directors or non-permanent employees. In addition, there were no cases that required resolution through the legal process or that have not been pursued for resolution. This data also shows a similar trend to 2023, where there was no increase in the number of cases, and the overall control of irregularities is still within the internal scope of the organization.

Stabilnya jumlah kasus penyimpangan serta absennya pelanggaran yang melibatkan pihak manajerial atau pegawai tidak tetap mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan yang dijaga dengan baik di lingkungan perusahaan. Meski demikian, perusahaan tetap perlu menjaga kewaspadaan dan secara berkelanjutan memperkuat sistem pelaporan, pemantauan, serta penyelesaian penyimpangan guna memastikan terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

The consistent number of irregularities cases and the absence of violations involving managerial or non-permanent employees reflect the effectiveness of the internal control system and a well-maintained culture of compliance within the company. Nevertheless, the company still needs to maintain vigilance and continuously strengthen the system of reporting, monitoring and resolving irregularities to ensure the creation of transparent, accountable and high-integrity corporate governance.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

IFG berkomitmen untuk menghindari segala bentuk praktik korupsi sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang adil, nilai sportivitas, profesionalisme, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

IFG berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan menghindari segala tindakan, perilaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). IFG selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Selain itu, IFG senantiasa mematuhi kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IFG is committed to avoiding all forms of corrupt practices as part of the implementation of corporate governance principles. All IFG employees, including the Board of Commissioners and Directors, always uphold fair competition, the value of sportsmanship, professionalism, and the principles of corporate governance.

IFG is committed to creating a healthy business environment by avoiding any actions, behaviors, or deeds that may lead to conflicts of interest, as well as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. IFG always prioritizes the interests of the company over personal, family, group, or class interests. In addition, IFG always complies with anti-corruption policies as stipulated in Law No. 20 of 2001 which is an amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Komitmen anti-korupsi bagi seluruh Insan IFG diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap individu, yang diperbarui setiap tahun. Selain itu, komitmen ini juga dikomunikasikan dan disosialisasikan secara terbuka kepada pihak internal maupun eksternal, serta disampaikan setiap tahun melalui berbagai media.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ DISSEMINATION

The anti-corruption commitment for all IFG personnel is realized through the signing of the Integrity Pact by each individual, which is renewed annually. This commitment is also communicated and socialized openly to internal and external parties, and delivered annually through various media.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL POLICY

IFG secara konsisten menetapkan batasan terkait hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak diperbolehkan. Hal ini mencakup segala bentuk penerimaan oleh pejabat atau pegawai dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan mereka demi keuntungan pemberi.

Dari perspektif hukum dan etika bisnis, IFG menganggap penerimaan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, IFG secara aktif menjalankan berbagai upaya pengendalian gratifikasi. Selaras dengan prinsip antikorupsi, IFG melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai untuk memberikan, menawarkan, atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai, termasuk hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi), kepada klien atau pejabat Pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau sebagai bentuk imbalan atas suatu tindakan yang telah dilakukan.

Unit Pengendalian Gratifikasi

1. IFG membentuk atau menunjuk unit khusus untuk melaksanakan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), berdasarkan Surat Keputusan Direksi IFG.
2. UPG melaksanakan tugas antara lain:
   a. menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan IFG;
   b. menyampaikan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
   c. melakukan pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan IFG dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. membuat jadwal sosialisasi secara berkala, melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal IFG (terutama pada hari raya keagamaan);
   e. melakukan pemetaan tempat maupun waktu rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
   f. menerima, menganalisis, dan mengadministrasi laporan penerimaan gratifikasi dari Insan IFG;
   g. menerima, menganalisis, dan mengadministrasi laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Insan IFG melaporkan penolakan gratifikasi;
   h. meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah UPG menerima laporan dari Insan IFG;
   i. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
   j. melakukan koordinasi dan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan KPK terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

The IFG consistently sets limits on impermissible gifts, rewards and donations. This includes any acceptance by officers or employees from parties with an interest in the company, with the intention of influencing the officials or employees concerned to benefit the interests of the giver of the gift.

From a legal and business ethics perspective, IFG considers such acceptance as a form of non-compliance with regulations. Therefore, IFG actively carries out various gratification control efforts. In line with anti-corruption principles, IFG prohibits the Board of Commissioners, Board of Directors and employees from giving, offering or accepting, either directly or indirectly, anything of value, including gifts, rewards and donations, to clients or Government officials with the aim of influencing decisions or as a form of reward for an action taken.

Gratification Control Unit

1. IFG establishes or appoints a special unit to carry out the duties of the Gratification Control Unit (UPG), based on the IFG Board of Directors Decree.
2. The UPG conducts duties including:
   a. preparing a set of rules related to the implementation and control of gratuity practices in the IFG environment;
   b. submitting the proposed Gratification Control Guidelines to the Board of Directors;
   c. updating the Gratification Control Guidelines in accordance with changes that occur in the IFG environment and changes in applicable laws and regulations;
   d. making a regular socialization schedule, conduct socialization and provide clear information related to the provisions of gratuities to IFG internal and external parties (especially on religious holidays);
   e. mapping places and times prone to receiving and giving gratuities;
   f. receiving, analyzing, and administering gratification receipt reports from IFG People;
   g. receiving, analyzing, and administering reports of rejection of gratuities, in the event that IFG personnel report rejection of gratuities;
   h. forwarding the gratification report to the Corruption Eradication Commission (KPK) after the UPG received the report from IFG personnel;
   i. reporting the recapitulation of gratification acceptance and rejection report periodically to KPK;
   j. coordinating and consulting both verbally and in writing with the KPK regarding the implementation of gratification control;

k. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Direksi;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi dan melaporkan kepada Direksi; dan
m. melakukan pemeliharaan objek gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan IFG sampai dengan adanya penetapan status objek gratifikasi tersebut dari KPK.

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan laporan Gratifikasi melalui:

1. UPG IFG:
   a. *Email* UPG IFG
   b. Surat yang ditujukan kepada UPG
   c. Media lainnya yang disediakan IFG
2. Saluran WBS Terintegrasi IFG:
   a. *Email* WBS Integrasi IFG
   b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas
   c. Melalui Situs WBS Integrasi
   d. Saluran Telepon Khusus WBS Integrasi
   e. Saluran Faksimili Khusus WBS Integrasi
   f. Saluran SMS dan WhatsApp WBS Integrasi
   g. Media lainnya yang disediakan IFG
3. Direktorat Gratifikasi KPK
   a. *Email*: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
   b. Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1. Jakarta Selatan 12920
   c. Aplikasi: www.gol.kpk.go.id

k. submitting the results of the management of gratification acceptance and rejection reports to the Board of Directors;
l. monitoring and evaluation in the context of gratification control and reporting to the Board of Directors; and
m. maintaining the gratification object reported by IFG personnel until the determination of the status of the gratification object from the KPK.

Gratification Reporting Media

The person who reports on gratification may submit Gratification reports through:

1. UPG IFG:
   a. UPG IFG Email
   b. Letter addressed to UPG
   c. Other media provided by IFG
2. IFG Integrated WBS Channel:
   a. IFG Integration WBS Email
   b. Letter addressed to IFG Integrity
   c. Through the WBS Integration Site
   d. WBS Integration Dedicated Phone Line
   e. WBS Integration Dedicated Facsimile Line
   f. SMS and WhatsApp channels WBS Integration
   g. Other media provided by IFG
3. KPK Gratification Directorate
   a. Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
   b. Address: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1. South Jakarta 12920
   c. Application: www.gol.kpk.go.id

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan IFG dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, kompetisi yang sehat, transparansi, keadilan, kewajaran, serta akuntabilitas. Proses ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG telah menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam standar operasional dan prosedur yang resmi. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 62 Tahun 2022 tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Selain itu, IFG menerapkan proses pengadaan yang selaras dengan standar tata kelola perusahaan, dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, persaingan yang sehat, serta keadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Procurement of facilities and infrastructure within IFG is done through a goods and services procurement process based on the principles of efficiency, effectiveness, fair competition, transparency, fairness, reasonableness, and accountability. This process is completed in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

To minimize potential conflicts of interest in operational and financial management, IFG has established guidelines for the procurement of goods and services as outlined in official operational standards and procedures. This guideline is endorsed through the Decree of the Board of Directors No. 62 of 2022 dated October 12, 2022 concerning Goods and/or Services Procurement Policy. In addition, IFG implements a procurement process that is in line with corporate governance standards, by upholding the principles of transparency, cost efficiency, healthy competition, and fairness, in accordance with applicable laws and regulations.

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

POLICY ON GRANTING FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

IFG menetapkan kebijakan yang mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan pegawai yang mewakili perusahaan dalam urusan pemerintahan dan politik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keterlibatan perusahaan dalam ranah publik. IFG menghormati hak setiap individu dalam menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan pilihan masing-masing. Oleh karena itu, IFG tidak mengizinkan adanya tindakan pemaksaan terhadap siapa pun yang dapat membatasi hak individu dalam mengekspresikan pandangan politiknya.

IFG menerapkan kebijakan yang mewajibkan pegawai yang terlibat aktif dalam partai politik dan/atau mencalonkan diri dalam pemilu untuk mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, IFG melarang segala bentuk pemberian sumbangan kepada partai politik mana pun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

IFG has established a policy that requires the Board of Commissioners, Board of Directors, management and employees who represent the company in government and political affairs to comply with laws and regulations related to the company's involvement in the public domain. IFG respects the right of every individual to channel their political aspirations in accordance with their respective choices. Therefore, IFG does not allow any coercive action against anyone that may limit an individual's right to express his/her political views.

IFG implements a policy that requires employees who are actively involved in political parties and/or running for election to resign, in accordance with applicable laws and regulations. Also, IFG prohibits any form of donation to any political party, as stipulated in the laws and regulations.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

Sebagai bagian dari BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, IFG berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi yang berlandaskan semangat pemberantasan korupsi serta pencegahan penyimpangan internal adalah kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaksanaan LHKPN merupakan salah satu wujud komitmen IFG dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan.

As part of the state-owned enterprises through the Government of Indonesia, IFG is obliged to comply with the prevailing laws and regulations. One of the regulations based on the spirit of eradicating corruption and preventing internal irregularities is the obligation to report the State Officials' Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials' Assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the KPK as stipulated in KPK Decree Number KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Officials' Wealth Reports. The implementation of LHKPN is a form of IFG's commitment in implementing corporate governance.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan LHKPN, IFG menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan IFG. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana disahkan oleh Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023.

Sebagai BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat struktural di dalamnya, dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan terikat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di mana penyelenggara negara wajib menghindarkan diri dari perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain yang dapat merugikan keuangan perusahaan atau negara.

LEGAL AND REGULATORY BASIS IN IMPLEMENTING LHKPN IN THE COMPANY

In implementing LHKPN, IFG considers several legal and regulatory bases as the basis for the perspective of implementing LHKPN within IFG. The legal basis is:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 concerning Clean State Administration and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
4. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Guidelines for Compliance with the Submission of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) as authorized by the Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1 of 2023.

As a state-owned enterprise, the Board of Commissioners and Directors, as well as structural officials therein, are categorized as state administrators and are bound by Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free State Administrators. Whereby state officials are required to refrain from acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN) for personal gain and/or the benefit of others that may harm the financial interests of the company or the country.

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan Instansi Pusat, menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib membuat LHKPN dan melaporkannya setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan dan disampaikan secara *online* melalui www.elhkpn.kpk.go.id.

Sementara, ketentuan terkait tata cara penyampaian LHKPN di lingkup IFG, diatur sendiri dalam Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana disahkan oleh Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pejabat IFG yang diwajibkan menyampaikan LHKPN atau wajib lapor adalah sebagai berikut:

1. anggota Dewan Komisaris;
2. anggota Direksi; dan
3. pejabat dua tingkat di bawah Direksi sesuai struktur organisasi yang berlaku, termasuk Senior Executive Vice President (SEVP), kepala divisi dan/atau kepala departemen.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2024

Adapun transparansi penyampaian LHKPN pejabat IFG di tahun 2024 sebagai berikut:

In accordance with KPK Regulation No. 07/2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth and KPK Chairman's Circular Letter No. 10/2017 concerning Guidelines for LHKPN Management within Central Agencies, states that state officials are required to make LHKPN and report it annually no later than March 31 of the current year and submitted online through www.elhkpn.kpk.go.id.

Meanwhile, provisions related to the procedures for submitting LHKPN within the scope of IFG, are regulated in the Compliance Guidelines for Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN) as authorized by the Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 1 of 2023. IFG officials who are required to submit LHKPN or are required to report are as follows:

1. member of the Board of Commissioners;
2. member of the Board of Directors; and
3. officials two levels below the Board of Directors in accordance with the applicable organizational structure, including Senior Executive Vice President (SEVP), division heads and/or department heads.

COMPANY OFFICIALS' LHKPN TRANSPARENCY IN 2024

The transparency of IFG officials' LHKPN submission in 2024 is as follows:

Pengungkapan Penyampaian LHKPN di Lingkup IFG Tahun 2024
Disclosure of LHKPN Submission in the Scope of IFG in 2024

Pejabat Subjek Pelapor LHKPN Officials Subject to LHKPN Reporting	**Jumlah Wajib Lapor** Number of Mandatory Reporters	**Pejabat yang Telah Melaporkan** Officials Who Have Reported		**Pejabat yang Tidak Melaporkan** Officials Who Did Not Report
		Jumlah Total	**%**	**Jumlah** Total
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100	0
Direksi Board of Directors	6	6	100	0
SEVP	2	2	100	0
Kepala Divisi Division Head	20	20	100	0
Kepala Departemen Department Head	54	54	100	0
Total Pelapor LHKPN Total LHKPN Reporters	**86**	**86**	**100**	**0**

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen berkomitmen mengelola perusahaan secara profesional dengan berlandaskan perilaku yang sesuai dengan *Code of Conduct*, guna mewujudkan GCG. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan telah mengembangkan mekanisme WBS sebagai salah satu instrumen GCG. WBS merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola pengaduan atau pengungkapan terkait tindakan melawan hukum maupun perilaku tidak etis yang bertentangan dengan Kode Etik atau *Code of Conduct*.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan menjunjung prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan independensi. Setiap pengaduan yang diterima akan dianalisis oleh Tim Pengelola Pelaporan sebelum diteruskan kepada IFG. Proses penanganan laporan WBS mengacu pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kebijakan prosedur WBS menjamin bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen, sehingga memungkinkan seluruh pegawai IFG dan pihak terkait berperan aktif dalam mengungkap pelanggaran di lingkungan perusahaan. Setiap laporan yang diterima akan dikaji, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan. Keputusan mengenai kebenaran laporan akan ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak tindakan, tingkat kesengajaan, serta motif di balik tindakan tersebut.

RUANG LINGKUP *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Ruang lingkup pelaporan yang masuk dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran antara lain sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan Kecurangan (*Fraud*) yaitu:
   a. korupsi;
   b. penyuapan;
   c. pemerasan;
   d. benturan kepentingan;
   e. kecurangan;
   f. gratifikasi;
   g. pencurian; dan
   h. kecurangan atas laporan keuangan.

To improve the effectiveness of GCG implementation, the management is committed to managing the company professionally based on behavior in accordance with the Code of Conduct, to realize GCG. As part of this effort, the Company has developed a WBS mechanism as one of the GCG instruments. WBS is a system designed to manage complaints or disclosures related to illegal actions or unethical behavior that contradicts the Code of Conduct.

WBS management is carried out by upholding the principles of confidentiality, anonymity, and independence. Every complaint received will be analyzed by the Reporting Management Team before being forwarded to IFG. The process of handling WBS reports refers to the Whistleblowing System Guidelines, which have been ratified through the Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1 of 2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines at the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The WBS procedure policy guarantees that reporting can be done confidentially, anonymously and independently, allowing all IFG employees and related parties to play an active role in exposing violations within the company. Every report received will be reviewed, classified, and followed up through in-depth investigation based on the facts found. A decision on the veracity of the report will be made by considering the impact of the action, the degree of intent, and the motive behind the action.

SCOPE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The scope of reporting included in the management of the Whistleblowing System includes the following:
1. Related to Fraud, namely:
   a. corruption;
   b. bribery;
   c. extortion;
   d. conflict of interest;
   e. cheating;
   f. gratuity;
   g. theft; and
   h. fraud on financial statements.

2. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, serta peraturan lainnya akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi perusahaan.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) disosialisasikan kepada seluruh Insan IFG serta pihak eksternal yang berkepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh unit kerja terkait yang bertanggung jawab atas implementasi WBS. Kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun persepsi yang tepat, serta mendorong keterbukaan bagi Insan IFG dalam melaporkan penyimpangan dan memanfaatkan WBS sesuai dengan fungsinya.

MEKANISME *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Pelapor melakukan pelaporan melalui sarana yang disediakan IFG berupa:
   a. *email*;
   b. surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
   c. situs WBS Integrasi;
   d. saluran telepon khusus WBS Integrasi;
   e. saluran faksimili khusus WBS Integrasi;
   f. SMS dan WhatsApp khusus WBS Integrasi; dan
   g. media lainnya yang disediakan IFG.

   Seluruh saluran penyampaian laporan pelanggaran hanya dapat diakses oleh Tim WBS. Ketentuan dan detail mengenai sarana pelaporan akan dimuat pada kebijakan tersendiri.

2. Dalam pelaporan pelanggaran tersebut, Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
   a. Pelanggaran yang Diadukan
      Pokok pelaporan yang ingin disampaikan dan dugaan jumlah kerugian jika dapat ditentukan, yang mana 1 (satu) pelaporan hanya untuk satu permasalahan saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
   b. Pihak yang Terlibat
      Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk pihak terkait dan pihak yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari pelanggaran tersebut.
   c. Waktu Terjadinya Pelanggaran
      Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, dan/atau tanggal tertentu saat masalah tersebut terjadi.

2. In relation to human resources/human capital, violations of the law, disciplinary violations, Company Regulations, Code of Conduct and Corporate Behavior, and other regulations will be forwarded to the relevant functions using the company's official correspondence mechanism.

DISSEMINATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) guidelines are disseminated to all IFG personnel and external parties concerned. This dissemination is carried out by the relevant work unit responsible for WBS implementation. Continuous dissemination activities aim to increase understanding, build the right perception, and encourage openness for IFG People in reporting irregularities and utilizing the WBS in accordance with its function.

WHISTLEBLOWINGSYSTEM MECHANISM

1. The whistleblower reports through the means provided by IFG in the form of:
   a. Email;
   b. letter addressed to IFG Integrity;
   c. WBS Integration website;
   d. dedicated WBS Integration phone line;
   e. dedicated WBS Integration facsimile line;
   f. Special SMS and WhatsApp for WBS Integration; and
   g. other media provided by IFG.

   All channels for submitting violation reports can only be accessed by the WBS Team. Provisions and details regarding the means of reporting will be contained in a separate policy.

2. In reporting the violation, the Whistleblower is required to provide evidence, information, or clear indications of the occurrence of the reported violation. The Whistleblower is required to provide Initial Indications that can be accounted for, including:
   a. Violations Complained
      The subject of the report to be submitted and the alleged amount of loss if it can be determined, where 1 (one) report is only for one problem, so that it can focus on handling it.
   b. Parties Involved
      The parties responsible for the incident includes the relevant party and the party who participated, assisted, and/or ordered the act of infringement and which party benefited or harmed from the infringement.
   c. Time of Violation
      The period of occurrence of the problem is either the month, year, and/or specific date when the problem occurred.

d. Tempat Terjadinya Pelanggaran
Lokasi masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama tempat dan keterangan lainnya yang dapat membantu.
e. Bagaimana Kejadiannya
Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.

f. Bukti-Bukti Pelanggaran
Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.

3. Tim WBS menerima pelaporan dan mengadministrasi pelaporan baik yang diterima melalui Konsultan WBS maupun melalui media lainnya. Dalam melakukan administrasi pelaporan, Tim WBS membuat nomor pelaporan, tanggal penerimaan, media penyampaian, pihak Pelapor (jika diketahui), pihak Terlapor, deskripsi laporan, dan status laporan.

4. Tim WBS melakukan seleksi dan verifikasi laporan berupa kecukupan informasi dan kesesuaian pelaporan dengan ruang lingkup pelaporan. Bila bukti/informasi tidak cukup, maka Tim WBS berkoordinasi dengan Pelapor melalui konsultan WBS atau secara langsung untuk meminta informasi tambahan. Apabila sampai dengan 10 hari kerja, informasi tambahan tidak diterima maka laporan tersebut akan diarsipkan dan dapat diaktifkan kembali apabila data tambahan telah didapatkan

5. Tim WBS selanjutnya menyampaikan hasil laporan yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor untuk memutuskan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

d. Where the Violation Occurred
The location where the problem occurred with specifics on the name of the place and any other information that may be helpful.
e. How it happened
Chronological description of events from beginning to end.
f. Evidence of Violation
Documentation related to indications of violations reported in the form of photos or other related documents.

3. The WBS Team receives reports and administers reports both received through the WBS Consultant and through other media. In administering the report, the WBS Team creates a reporting number, date of receipt, delivery media, reporting party (if known), reporting party, report description, and report status.

4. The WBS Team selects and verifies reports in the form of information adequacy and suitability of reporting with the scope of reporting. If the evidence/information is insufficient, the WBS Team coordinates with the Whistleblower through the WBS consultant or directly to request additional information. If up to 10 14/18 working days, additional information is not received, the report will be archived and can be reactivated if additional data has been obtained.

5. The WBS Team then submits the results of the verified report to the Deciding Official in accordance with the criteria of the Reported party to decide the follow-up with the following provisions:

Kriteria Pihak Terlapor Reporting Party Criteria	**Pejabat Pemutus Tindak Lanjut** Deciding Official Follow-up
Kepala Departemen/Setingkat Kepala Departemen ke Bawah Department Head/Equal to Department Head Level and Below	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Director in charge of compliance function
Kepala Divisi/SEVP atau setara Division Head/SEVP or equivalent	Direktur Utama President Director
Direksi Division Head/SEVP or equivalent	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris selain yang Terlapor Board of Commissioners other than the Reported

6. Tim WBS meneruskan Pengaduan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.

7. Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor memutuskan Tim Investigasi dengan menerbitkan surat tugas Investigasi untuk melaksanakan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Investigasi dapat dilakukan oleh pihak internal atau dapat dilakukan oleh Investigator Independen (eksternal) dan/atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penanganan pelaporan pelanggaran.

6. The WBS team forwards complaints related to members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the WBS manager of the Ministry of SOEs.

7. The Deciding Official in accordance with the criteria of the Reporting party decides the Investigation Team by issuing an Investigation task letter to carry out the Investigation in accordance with applicable provisions. The Investigation Team can be conducted by internal parties or by Independent Investigators (external) and/or a combination of both in accordance with the needs of handling violation reports.

8. Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi sesuai dengan bukti pelanggaran.
9. Setelah selesai pelaksanaan Investigasi, Tim Investigasi menyampaikan komponen laporan Investigasi berupa berita acara dan laporan hasil Investigasi. Laporan hasil Investigasi wajib disertai beberapa bukti pendukung, di mana laporannya mencakup hasil pelaksanaan, rekomendasi sanksi sesuai peraturan BPUI dan rekomendasi perbaikan. Seluruh komponen laporan Investigasi disampaikan kepada pejabat yang menugaskan Tim Investigasi.
10. Pejabat Pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor yang menugaskan pelaksanaan Investigasi menerima komponen laporan Investigasi dan melaksanakan tinjauan. Selanjutnya Pejabat Pemutus tindak lanjut sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menetapkan sanksi untuk Terlapor jika Terlapor terbukti bersalah.
11. Pejabat pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menyampaikan informasi kepada Tim WBS terhadap laporan yang telah selesai.
12. Tim WBS menerima informasi pelaporan yang sudah selesai dan memperbarui status pelaporan.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

IFG telah mengatur perlindungan untuk pelapor sebagai berikut:

1. IFG menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Pihak Terkait dan isi dari laporan, kecuali atas permintaan penegak hukum.
2. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dari segala tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, catatan yang merugikan Pelapor dan/atau Pihak Terkait, hingga tindakan fisik. Bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap segala tindakan tersebut di atas, diharapkan dapat melaporkan ke Tim WBS.
3. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS selama Pelapor, Pihak Terkait, Tim 8/18 Investigasi dan/atau Tim WBS menjaga kerahasiaan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
4. Dalam hal Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS adalah Insan IFG yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri (anonim) dan menerima ancaman dari pihak di dalam IFG, maka Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Tim WBS.
5. Informasi pelaksanaan pemberian perlindungan, berupa kapan dan bagaimana serta institusi yang diserahkan untuk memberikan perlindungan akan disampaikan secara rahasia kepada Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS yang meminta untuk diberikan perlindungan kepada Tim WBS.

8. The Investigation Team then conducts an investigation in accordance with the evidence of violations.
9. Upon completion of the Investigation, the Investigation Team submits the Investigation report component in the form of minutes and a report on the results of the Investigation. The Investigation report must be accompanied by several supporting evidence, where the report includes the results of the implementation, recommendations for sanctions in accordance with BPUI regulations and recommendations for improvement. All components of the Investigation report are submitted to the official who assigned the Investigation Team.
10. The Deciding Official follows up in accordance with the criteria of the Reporting Party who assigns the implementation of the Investigation receives the components of the Investigation report and conducts a review. Furthermore, the Deciding Official follows up in accordance with the criteria of the Reporting Party to determine sanctions for the Reporting Party if the Reporting Party is found guilty.
11. The deciding official follows up according to the criteria of the reported party to inform the WBS Team of the completed report.
12. The WBS team receives the completed reporting information and updates the reporting status.

PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

The IFG has regulated the protection for whistleblowers as follows:

1. IFG guarantees the confidentiality of the identity of the Whistleblower, Related Parties and the content of the report, except at the request of law enforcement.
2. IFG provides protection to the Whistleblower, Related Party, Investigation Team and/or WBS Team from any pressure, delay in promotion, discrimination, dismissal, records that are detrimental to the Whistleblower and/or Related Party, to physical action. For those who need protection against all these actions above, are expected to report to the WBS Team.
3. IFG provides protection to the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team as long as the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team maintain the confidentiality of reporting violations reported to any party.
4. In the event that the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team are IFG Personnel who have not previously disclosed personal data information (anonymous) and received threats from parties within IFG, the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team can submit a request for protection to the WBS Team.
5. Information on the implementation of the provision of protection, in the form of when and how and the institution submitted to provide protection will be conveyed confidentially to the Whistleblower, Related Party, Investigation Team and/or WBS Team who requests to be given protection to the WBS Team.

Perlindungan di atas tidak diberikan kepada Pelapor dan/atau Pihak Terkait yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah, serta tidak dapat diberikan kepada Pelapor yang di kemudian hari diketahui membocorkan laporannya kepada pihak lain.

The above protection is not given to Whistleblowers and/or Related Parties who are proven to have committed false reporting and/or slander, and cannot be given to Whistleblowers who are later found to have leaked their reports to other parties.

MEDIA PELAPORAN DAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

WBS merupakan sistem yang mengelola Pengaduan mengenai perbuatan Kecurangan (*Fraud*) dan penyimpangan terhadap kebijakan, kode etik, prosedur, dan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Insan IFG yang dapat merugikan IFG. Setiap Pengaduan yang masuk ke dalam WBS dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan IFG. Pengaduan melalui saluran pengaduan yang disediakan, yaitu:

REPORTING MEDIA AND WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

WBS is a system that manages Complaints regarding Fraud and irregularities from policies, codes of conduct, procedures, and illegal acts, committed by IFG People that can harm IFG. Every Complaint entered into the WBS is guaranteed confidentiality and is used to disclose violations that occur within IFG. Complaints through the complaint channels provided, namely:

E-mail	:	wbsifg@tipoffs.info
Dropbox	:	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027
Surat Letter	:	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027

Selain melalui saluran di atas, WBS dapat diadukan melalui media sebagai berikut:

In addition to the above channels, WBS can be reported through the following media:

Situs Website	:	https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas/
Telepon Phone	:	+62 21 50886181
Faksimili Facsimile	:	+62 21 50886182, dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] with a form that can be downloaded at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
E-mail	:	wbsifg@tipoffs.info
Surat Letter	:	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027 dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] with a form that can be downloaded at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
SMS dan Whatsapp SMS and Whatsapp	:	+62 812 2356 2277

JUMLAH PENGADUAN MASUK DAN DIPROSES

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED

	2024	2023
Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Number of complaints received and processed	18	4
Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti Number of complaints that have been followed up	18	1
Jumlah pengaduan yang belum diproses Number of complaints not yet processed	0	0

TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN

Sepanjang tahun 2024, IFG memproses sebanyak 18 pengaduan. Dari 18 pengaduan tersebut semuanya telah selesai ditindaklanjuti.

FOLLOW-UP OF COMPLAINT REPORTS

Throughout 2024, IFG processed 18 complaints. Of the 18 complaints, all have been followed up.



TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

No.	Keterangan Description	Praktik dalam Tahun Practice in Year		
		2024	2023	2022
1.	Aktivitas perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan. Insider trading activities involving directors/ commissioners, management and employees.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
2.	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun. Non-compliance in disclosure of fulfillment of tax obligations including conviction by the highest tax court in relation to any tax matter.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
3.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
4.	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material. Cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
5.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan. There are no operating segment disclosures in the Financial Statements.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
6.	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/ kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan. Violation of any law relating to labor/ employment/ consumer/ insolvency/ commercial/ competition or environmental matters.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting. Sanctions from regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for significant events.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan. Evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations over the past year apart from disclosure rules.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE

Dalam rangka memastikan transparansi dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan IFG serta menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan IFG tahun 2024 mencakup beberapa aspek berikut:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2024.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan IFG.
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan IFG posisi sampai dengan Desember 2024.
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan IFG.
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan IFG.
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan IFG.

In order to ensure transparency in the implementation of Integrated Governance in IFG Financial Conglomerate and to follow up the provisions in the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015, the implementation of Integrated Governance of IFG Financial Conglomerate in 2024 includes the following aspects:

1. Integrated Governance Self-Assessment Report for 2024.
2. IFG Financial Conglomerate Structure.
3. The shareholding structure of the IFG Financial Conglomerate is in place until December 2024.
4. IFG Financial Conglomerate Management Structure.
5. Basic Principles of Integrated Governance of IFG Financial Conglomerate.
6. Intra-Group Transaction Policy of IFG Financial Conglomerate.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2024

Selaras dengan komitmen dan pemahaman IFG terhadap peran penting tata kelola perusahaan dalam keberlanjutan suatu perusahaan, IFG senantiasa meningkatkan praktik tata kelola di sepanjang tahun 2024 melalui pelaksanaan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) merupakan penilaian yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu struktur, proses, dan hasil. Penilaian tersebut meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;

INTEGRATED GOVERNANCE IMPLEMENTATION SELF-ASSESSMENT REPORT DURING 2024

In line with IFG's commitment and understanding of the important role of corporate governance in the sustainability of a company, IFG continues to improve its governance practices throughout 2024 through the implementation of self-assessment on the implementation of good corporate governance with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates and a copy of the Financial Services Authority Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.

Self-assessment is an assessment conducted on 3 (three) aspects of governance, namely structure, process, and results. The assessment includes at least 7 (seven) governance implementation assessment factors, namely:

1. implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
2. implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
3. duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee;
4. duties and responsibilities of the Integrated Compliance Working Unit;
5. duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit;

6. penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
7. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
8. serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan GCG terintegrasi IFG mengacu pada peringkat sesuai yang dikategorikan dalam ketentuan 15/SEOJK.03/2015, di mana dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.

Berikut merupakan hasil penilaian GCG terintegrasi IFG untuk tahun 2024:

6. implementation of integrated risk management; and
7. preparation and implementation of the Integrated Governance Guidelines;
8. as well as taking into account other information related to the implementation of integrated governance.

The results of IFG's integrated GCG implementation assessment refer to the ratings as categorized in provision 15/SEOJK.03/2015, which is categorized in 5 (five) assessment ratings, namely Rating 1, Rating 2, Rating 3, Rating 4, and Rating 5. The smaller Integrated Governance Rating order reflects the better implementation of Integrated Governance.

The following are the results of IFG's integrated GCG assessment for 2024:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2024
IFG Integrated GCG Implementation Assessment Results in 2024

	Peringkat Rating	**Definisi Peringkat** Definition of Rating
IFG ***Stand Alone*** Stand Alone	2	Mencerminkan IFG telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum "Baik". Hal ini terefleksikan dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Reflecting that IFG has implemented integrated governance which is generally "Good". This is reflected in the adequate fulfillment of the implementation of integrated governance principles. If there are weaknesses in the implementation of integrated governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions. This achievement is the result of maximum efforts made by IFG in fulfilling the implementation of good corporate governance. Going forward, IFG is committed to continuous improvement and refinement to ensure a more effective and sustainable implementation of corporate governance.

Analisis
Analysis

Berdasarkan analisis penilaian sendiri terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola terintegrasi pada setiap faktor penilaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. struktur tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah cukup dan memadai;
2. proses tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah efektif, didukung dengan struktur yang baik; dan
3. hasil tata kelola terintegrasi dinilai telah baik, dihasilkan dari proses yang efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terintegrasi di IFG secara umum sudah berjalan dengan baik, di mana:
1. Direksi IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan dan risiko bisnis utama IFG. Direksi IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
   b. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG; dan
   c. senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Dewan Komisaris IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan bisnis dan risiko bisnis utama IFG. Dewan Komisaris IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
   b. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
   c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3. IFG telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang anggotanya terdiri atas Komisaris Independen IFG, Komisaris Independen Anggota Konglomerasi Keuangan IFG, dan pihak independen di luar perusahaan. Komite Tata Kelola Terintegrasi IFG senantiasa mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penyelenggaraan rapat secara berkala.
4. IFG telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi acuan bagi penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG;
5. IFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bersifat independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
6. IFG telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi. IFG telah memiliki struktur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi serta telah memenuhi ketentuan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang antara lain mencakup penetapan limit risiko, pengkinian Pedoman Strategis Manajemen Risiko, mengesahkan Prosedur Pelaporan Daftar Risiko Utama Terintegrasi, dan mengesahkan Prosedur Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, yaitu:
1. IFG masih perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi IFG, di mana saat ini masih terdapat Komisaris Independen dari anggota Konglomerasi Keuangan IFG yang belum tergabung sebagai anggota.
2. IFG telah memenuhi ketentuan sesuai POJK 17 tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK 13 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Namun, dengan adanya POJK 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan internal yang telah dimiliki.
3. IFG masih perlu memperkuat implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG mengingat hingga periode pelaporan ini, masih terdapat anggota yang sedang dalam proses menyelaraskan Pedoman Tata Kelola Perusahaannya dengan pedoman terintegrasi IFG.

Analisis
Analysis

Based on the analysis of the self-assessment of integrated governance structures, processes and outcomes on each assessment factor, it is concluded as follows:

1. IFG's integrated governance structure is considered sufficient and adequate;
2. IFG's integrated governance process is considered effective, supported by a good structure; and
3. Integrated governance results are considered good, resulting from effective processes and supported by a complete structure.

Overall, the implementation of integrated governance at IFG has generally been properly implemented where:

1. IFG's Board of Directors has met the requirements of integrity, competence and financial reputation, obtained fit and proper assessment approval from OJK, and has sufficient knowledge of IFG's main business activities and risks. IFG's Board of Directors has also carried out its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the assessment indicators set, among others by:
   a. made improvements to the Integrated Corporate Governance Guidelines in accordance with the direction of the Board of Commissioners;
   b. direct, monitor, and evaluate the implementation of the Integrated Governance Guidelines within IFG Financial Conglomerate; and
   c. always follow up on audit recommendations and findings to ensure sustainability and compliance with applicable regulations.
2. IFG's Board of Commissioners has met the requirements of integrity, competence, and financial reputation, obtained fit and proper test approval from OJK, and has sufficient knowledge of IFG's business activities and key business risks. IFG's Board of Commissioners has also performed its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the assessment indicators set, among others by:
   a. evaluating the Integrated Governance Guidelines and supervising the implementation of integrated governance;
   b. organizing periodic Board of Commissioners Meetings; and
   c. supervising the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors to ensure sustainability and compliance with applicable regulations.
3. IFG has an Integrated Governance Committee whose members consist of IFG Independent Commissioners, Independent Commissioners of IFG Financial Conglomerate Members, and independent parties outside the company. IFG's Integrated Governance Committee continuously evaluates the implementation of integrated governance through regular meetings.
4. IFG has an Integrated Governance Guidelines that serves as a reference for the implementation of integrated governance within IFG Financial Conglomerate;
5. IFG has an Integrated Compliance Working Unit and Integrated Internal Audit Working Unit that are independent and separate from the operational working units.
6. IFG has implemented integrated risk management. IFG has an adequate structure to support the implementation of integrated risk management and has fulfilled the provisions in accordance with POJK No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, which among others include setting risk limits, updating the Risk Management Strategic Guidelines, ratifying the Integrated Major Risk Register Reporting Procedure, and ratifying the Integrated Risk Profile Reporting Procedure.

However, there are still some weaknesses in the implementation of integrated governance within the IFG Financial Conglomerate, namely:

1. IFG still needs to make adjustments to the composition of the IFG Integrated Governance Committee, where currently there are still Independent Commissioners from members of the IFG Financial Conglomeration who have not joined as members.
2. IFG has fulfilled the provisions in accordance with POJK 17 of 2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates and POJK 13 of 2022 concerning the Supervision of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. However, with the existence of POJK 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies, it is necessary to readjust the internal regulations that have been owned.
3. IFG still needs to strengthen the implementation of the Integrated Governance Guidelines across all members of the IFG Financial Conglomeration considering that up to this reporting period. There are still members that are in the process of harmonizing their Corporate Governance Guidelines with IFG's integrated guidelines.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

Berdasarkan Salinan Surat Keputusan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG Group, struktur konglomerasi keuangan IFG ditetapkan berdasarkan keterkaitan kepemilikan saham dan/atau pengendalian IFG, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap anggota konglomerasi keuangan. Penetapan ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah struktur konglomerasi keuangan IFG:

IFG FINANCIAL CONGLOMERATE STRUCTURE

Based on a copy of the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 77 of 2023 concerning the IFG Group's Financial Conglomerate Corporate Charter, IFG's financial conglomerate structure is determined based on the relationship of IFG's share ownership and/or control, either directly or indirectly, to the members of the financial conglomerate. This determination is made in compliance with the prevailing laws and regulations. The following is IFG's financial conglomerate structure:



Sehubungan dengan pengambilalihan 80% saham PT Asuransi Jiwa In*health* Indonesia oleh PT Asuransi Jiwa IFG, IFG telah menyampaikan perubahan susunan anggota Konglomerasi Keuangan IFG kepada OJK melalui surat Direktur Utama nomor 498/DUM-SEKPER/S/BPUI/XI/2024 tanggal 18 November 2024.

In connection with the acquisition of 80% of the shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia by PT Asuransi Jiwa IFG, IFG has submitted changes in the composition of the members of the IFG Financial Conglomerate to OJK through the President Director's letter number 498/DUM-SEKPER/S/BPUI/XI/2024 dated November 18, 2024.

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

SHAREHOLDING STRUCTURE OF IFG FINANCIAL CONGLOMERATE

1. Struktur Kepemilikan Saham IFG — Share Ownership Structure of IFG

Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN Republic of Indonesia cq. Ministry of SOEs	100%
Total Total	**100%**

2. Struktur Kepemilikan Saham PT Jaminan Kredit Indonesia — Share Ownership Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN Republic of Indonesia cq. Ministry of SOEs	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total Total		**100%**

3. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja — Share Ownership Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN Republic of Indonesia cq. Ministry of SOEs	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total Total		**100%**

4. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kredit Indonesia — Share Ownership Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN Republic of Indonesia cq. Ministry of SOEs	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total Total		**100%**

5. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jasa Indonesia — Share Ownership Structure of PT Asuransi Jasa Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN Republic of Indonesia cq. Ministry of SOEs	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total Total		**100%**

6. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana TCW Investment Management

Share Ownership Structure of PT Bahana TCW Investment Management

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	60%
2	TCW Capital Investment Company LLC	40%
Total		**100%**

7. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Sekuritas

Share Ownership Structure of PT Bahana Sekuritas

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,2%
2	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Employee Cooperative of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,8%
Total Total		**100%**

8. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Artha Ventura

Share Ownership Structure of of PT Bahana Artha Ventura

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	84,7%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15,1%
3	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Employee Cooperative of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,2%
Total Total		**100%**

9. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa IFG

Share Ownership Structure of PT Asuransi Jiwa IFG

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
2	PT Bahana Kapital Investa	0,01%
Total Total		**100%**

10. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Share Ownership Structure of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Asuransi Jiwa IFG	80%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20%
Total Total		**100%**

STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

1. Indonesia Financial Group
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fauzi Ichsan	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2	Sumiyati	Komisaris Commissioner
3	Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner
4	Nasrudin	Komisaris Commissioner
5	Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	Wahyu Setyawan	Komisaris Commissioner

Direksi

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director
2	Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director
3	Rizal Ariansyah	Direktur SDM Director of HC
4	Rianto Ahmadi	Direktur Teknik Technical Director
5	Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance

2. PT Jaminan Kredit Indonesia
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner
2	Desty Arlaini	Komisaris Commissioner
3	Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner
4	Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner
5	Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner

MANAGEMENT STRUCTURE OF IFG FINANCIAL CONGLOMERATE

1. Indonesia Financial Group
Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Board of Directors

2. PT Jaminan Kredit Indonesia
Board of Commissioners

Direksi **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director
2	Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business
3	Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network
4	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Resources, General Affairs and Risk Management
5	Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services
6	Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment

3. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dewan Komisaris **Board of Commissioners**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hendro Sugiatno	Komisaris Utama President Commissioner
2	M. Khoerur Roziqin	Komisaris Commissioner
3	Rimawan Pradiptyo	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Eko Suwardi	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Iwan Faidi	Komisaris Independen Independent Commissioner

Direksi **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rivan Achmad Purwantono	Direktur Utama President Director
2	Rubi Handojo	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
3	Bayu Rafisukmawan	Direktur Keuangan Director of Finance
4	Dewi Aryani Suzana	Direktur Operasional Director of Operations
5	Harwan Mulidarmawan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management

4. PT Asuransi Kredit Indonesia
Dewan Komisaris

4. PT Asuransi Kredit Indonesia
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Widodo Ekatjahjana	Komisaris Utama President Commissioner
2	Encep Sudarwan	Komisaris Commissioner
3	Heru Kreshna Reza	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Renny Octanianus Rorong	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Viviet Savitri Putri*	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper test*) OJK
*) is in the process of OJK's Fit & Proper test.

Direksi

Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fankar Umran	Direktur Utama President Director
2	Leonardo H. Gavaza*	Direktur Keuangan Director of Finance
3	Budhi Novianto	Direktur Bisnis Business Director
4	Vicentius Wilianto	Direktur Teknik Technical Director
5	R. Mahelan Prabantarikso *)	Direktur Kepatuhan, SDM, dan MR Director of Compliance, HC and Risk Management

*) sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper test*) OJK
*) is in the process of OJK's Fit & Proper test.

5. PT Asuransi Jasa Indonesia
Dewan Komisaris

5. PT Asuransi Jasa Indonesia
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioner
2	Dwi Pujiastuti Handayani	Komisaris Commissioner

Direksi

Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Andy Samuel	Direktur Utama President Director
2	Diwe Novara	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development
3	Syah Amondaris	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business
4	Ocke Kurniandy	Direktur Operasional merangkap Direktur Keuangan dan Investasi Director of Operations concurrently Director of Finance and Investment
5	Dewi Utari	Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs

6. PT Bahana TCW Investment Management
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hario Soeprobo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2	Pantro Pander Silitonga	Komisaris Commissioner
3	Marc Irwin Stern	Komisaris Commissioner

6. PT Bahana TCW Investment Management
Board of Commissioners

Direksi / **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rukmi Proborini	Direktur Utama President Director
2	Doni Firdaus	Direktur Investasi Investment Director
3	Danica Adhitama	Direktur Pemasaran Marketing Director
4	Novi Imelda	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Director of Risk Management and Compliance

7. PT Bahana Sekuritas
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hari Gursida	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently as President Commissioner
2	Heru Handayanto	Komisaris Commissioner

7. PT Bahana Sekuritas
Board of Commissioners

Direksi / **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Reza Benito Zahar	Direktur Utama President Director
2	Jolanda Veronica Sondak	Direktur Capital Market Capital Market Director
3	Tulus Nababan	Direktur Investment Banking Investment Banking Director
4	Suryadi Adipranata	Direktur Operasional Operational Director

8. PT Bahana Artha Ventura
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hafiz Arief	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Independen Independent Commissioner concurrently as President Commissioner
2	Rianto Ahmadi	Komisaris Commissioner

8. PT Bahana Artha Ventura
Board of Commissioners

Direksi **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Agus Wicaksono	Direktur Utama President Director
2	Noersari Handayani	Direktur Pembinaan Usaha Business Development Director
3	Rukita	Direktur Keuangan dan Operasional Finance & Operational Director

9. PT Asuransi Jiwa IFG
Dewan Komisaris

9. PT Asuransi Jiwa IFG
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Dasuki Amar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2	Rianto Ahmadi	Komisaris Commissioner
3	Maliki Heru Santosa	Komisaris Commissioner
4	Yasril Rasyid	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Akhmad Gojali Harahap*)	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper test*) OJK
*) is in the process of OJK's Fit & Proper test.

Direksi **Board of Directors**

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Budi Tua Arifin Tampubolon	Direktur Utama President Director
2	Eli Wijanti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management
3	Iskak Hendrawan	Direktur Operasional Operational Director
4	Fabiola Noralita	Direktur Bisnis Individu Director of Individual Business
5	Bugi Riagandhy	Direktur Bisnis Korporasi Director of Corporate Business
6	Ryan Diastana Firman	Direktur Keuangan Director of Finance
7	Mufri Dharmawan	Direktur Investasi Director of Investment

10. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Dewan Komisaris

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hernando	Komisaris Commissioner
2	Bambang Widianto	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	M. D. Abrory Djabbar	Komisaris Independen Independent Commissioner

Direksi

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rahmat Syukri	Plt. Direktur Utama Acting President Director
2	Marihot H. Tambunan	Direktur Kepatuhan Compliance Director
3	Jenni Wihartini	Direktur Operasional Operational Director
4	Tisye Diah Retnojati	Direktur Pemasaran Marketing Director

10. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Board of Commissioners

Board of Directors

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI

Menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, IFG terus menjalankan bisnis yang sehat dengan fondasi permodalan yang kuat serta manajemen risiko yang efektif. Dalam praktiknya, IFG secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan lima prinsip utama GCG, yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
   Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai IFG.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban *(Responsibility)*
   Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

BASIC PRINCIPLES OF INTEGRATED GOVERNANCE

Recognizing the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) in an integrated manner to ensure the sustainability of the company, IFG continues to operate a healthy business with a strong capital foundation and effective risk management. In practice, IFG consistently and continuously implements the five main principles of GCG, namely:

1. Transparency
   Transparency is openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about IFG.
2. Accountability
   Accountability is the clarity of functions, implementation, and accountability of the company's organs so that its management can be carried out effectively.
3. Responsibility
   Responsibility is the conformity in the management of IFG to the applicable laws and regulations and sound corporate principles.

4. Kemandirian (*Independency*)
   Kemandirian adalah keadaan IFG yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*)
   Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlandaskan 5 (lima) prinsip utama tersebut, IFG terus berupaya mengoptimalkan penerapan GCG terintegrasi. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan bisnis perusahaan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta manajemen IFG.

Penerapan GCG terintegrasi di lingkungan IFG berfungsi sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sejalan dengan harapan serta nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bisnis IFG mematuhi peraturan perundang-undangan, selaras dengan norma etika bisnis yang berlaku secara universal, serta mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai IFG.

Penerapan GCG berperan dalam menentukan dan mencapai tujuan IFG, mengawasi serta mengevaluasi risiko bisnis, mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja, dan mengembangkan budaya kerja di lingkungan IFG. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan menjadi aspek yang penting.

Penetapan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 2 Tahun 2023 di lingkungan IFG dan Anggota *Holding* sebagai acuan dalam penerapan GCG di setiap entitas mencerminkan komitmen IFG dalam mengutamakan etika dan integritas dalam pengelolaan Anggota *Holding*. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan IFG untuk mengawasi Anggota *Holding* agar tetap menjalankan bisnis secara sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independency
   Independency is the state of IFG that is managed professionally without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
5. Fairness
   Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.

Based on the 5 (five) main principles, IFG continues to optimize the implementation of integrated GCG. This effort is not only focused on the company's business growth, but also aims to protect the interests of shareholders, stakeholders, and IFG management.

The implementation of integrated GCG within IFG serves as a mechanism to direct and control the company in line with the expectations and core values of the company. It aims to ensure that all IFG's business operations comply with laws and regulations, are in line with universally accepted norms of business ethics, and reflect the values upheld by IFG's management and employees.

GCG implementation plays a role in determining and achieving IFG's objectives, monitoring and evaluating business risks, optimizing performance improvement efforts, and developing a work culture within IFG. Therefore, understanding the importance of improving the quality of effective and sustainable GCG implementation is an important aspect.

The issuance of the Decree of Board of Commissioners and Directors No. 2 of 2023 within IFG and its holding members as a reference in the implementation of GCG in each entity reflects IFG's commitment in prioritizing ethics and integrity in the management of its holding members. Additionally, this policy allows IFG to supervise its holding members to continue to have a healthy business and comply with applicable laws and regulations.




IFG
IFG



7

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Melalui Program TJSL, IFG dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memperkuat peran IFG sebagai agen pembangunan nasional

Through the TJSL Program, IFG supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and strengthens IFG's role as an agent of national development.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Sebagai *Holding* BUMN yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan dan investasi, IFG memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), IFG berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola Perusahaan. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PER-1/2023"), yang menekankan pentingnya pelaksanaan TJSL oleh BUMN untuk menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan dan masyarakat secara terintegrasi, terarah, terukur, serta akuntabel.

Program TJSL yang dijalankan oleh IFG bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta memperkuat aspek hukum dan tata kelola Perusahaan. Melalui Program TJSL, IFG dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memperkuat peran IFG sebagai agen pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang holistik, inisiatif TJSL IFG diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperkuat kinerja dan reputasi Perusahaan.

Menurut PER-1/2023, Program TJSL dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program PUMK"), merupakan pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan
2. Program bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan ("Program Non-PUMK").

Dalam pelaksanaannya, Program TJSL, baik yang dilakukan dalam bentuk Program PUMK maupun Program Non PUMK, dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi IFG untuk merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai landasan strategis dalam menyusun dan menjalankan Program TJSL, sebagai berikut:
1. memberikan kebermanfaatan bagi Perusahaan dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
2. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta membantu masyarakat sekitar Perusahaan; dan
4. mendukung misi strategis inisiatif Perusahaan.

As a state-owned holding company engaged in insurance, guarantee and investment, IFG has a strategic role in supporting sustainable development in Indonesia. Through the implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program, IFG is committed to making a real contribution in economic, social, environmental, as well as law and corporate governance aspects. This commitment is in line with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises ("PER-1/2023"), which emphasizes the importance of implementing TJSL by SOEs to create added value for companies and communities in an integrated, targeted, measurable, and accountable manner.

IFG's TSJL Program aims to benefit economic, social and environmental development, as well as strengthen law and corporate governance aspects. Through the TJSL Program, IFG supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and strengthens IFG's role as an agent of national development. Through a holistic approach, IFG's TJSL initiatives are expected to generate positive impacts on both the community and the environment, while also enhancing the company's performance and strengthening its reputation.

According to PER-1/2023, the TJSL Program can be implemented in the form of:
1. Micro and Small Enterprises Funding Program ("PUMK Program"), which is the financing and fostering micro and small businesses enterprises; and
2. Other assistance Programs and/or activities, including fostering ("Non-PUMK Programs").

In its implementation, the TJSL Program, both in the form of the PUMK Program and the Non-PUMK Program, is designed to create a sustainable impact. Therefore, it is important for IFG to refer to the goals and objectives that have been set as a strategic foundation in developing and implementing the TJSL Program, as follows:

1. providing benefits for the company in economic development, social development, environmental development and law and governance development for the company;
2. contributing to the creation of added value for the Company with integrated principles, targeted and measurable impact, and accountability;
3. fostering micro and small businesses/enterprises to be more resilient and independent and helping communities around the Company; and
4. supporting the strategic mission of the Company's initiatives.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan TJSL memberikan hasil yang maksimal dan selaras dengan visi pembangunan nasional, PER-1/2023 juga mengarahkan agar setiap Program TJSL dijalankan berdasarkan empat pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari:

1. Sosial
   Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan
   Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Ekonomi
   Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan Tata Kelola
   Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dengan pendekatan ini, IFG berupaya untuk dapat berkontribusi secara nyata terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

To ensure that the implementation of the TJSL Program provides maximum results and is in line with the vision of national development, PER-1/2023 also directs that each TJSL Program is based on the four main pillars of the Sustainable Development Goals (SDGs), which consist of:

1. Social
   Achieving the fulfillment of quality basic human rights in a fair and equal manner to improve welfare for the entire community.
2. Environment
   The sustainable management of natural resources and the environment as the support of all life.
3. Economy
   Achieving quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships.
4. Law and Governance Pillar
   The realization of the rule of law and effective, transparent, accountable and participatory governance to create security stability and achieve a state based on law.

With this approach, IFG strives to contribute significantly to the achievement of community welfare and sustainable development.



PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN

PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE COMPANY

Dalam melaksanakan kegiatan TJSL, Perusahaan berpedoman pada prinsip keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan TJSL tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan TJSL didasarkan pada berbagai regulasi yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri beserta turunannya, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

In executing TJSL activities, the Company is guided by the principles of sustainability and compliance with applicable regulations. This approach ensures that TJSL activities not only have a positive impact on the community and the environment, but also comply with legal requirements governing responsible business practices.

The implementation of TJSL is based on various regulations covering various levels, ranging from Laws, Government Regulations, to Ministerial Regulations and their derivatives, including:

1. Law Number 30 of 2007 concerning Energy;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Government Regulation Number 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control;
4. Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
5. Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management;
6. Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management;
7. Decree of the Minister of Environment Number. 111 of 2003 Concerning Guidelines on Requirements and Procedures for Licensing and Guidelines for the Assessment of Wastewater Discharge to Water or Water Sources;
8. Regulation of the State Minister of Environment Number. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Procedure;
9. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 13 of 2012 concerning Electricity Usage Saving;
10. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
11. Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 16 of 2022 concerning the Policy on Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises

STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

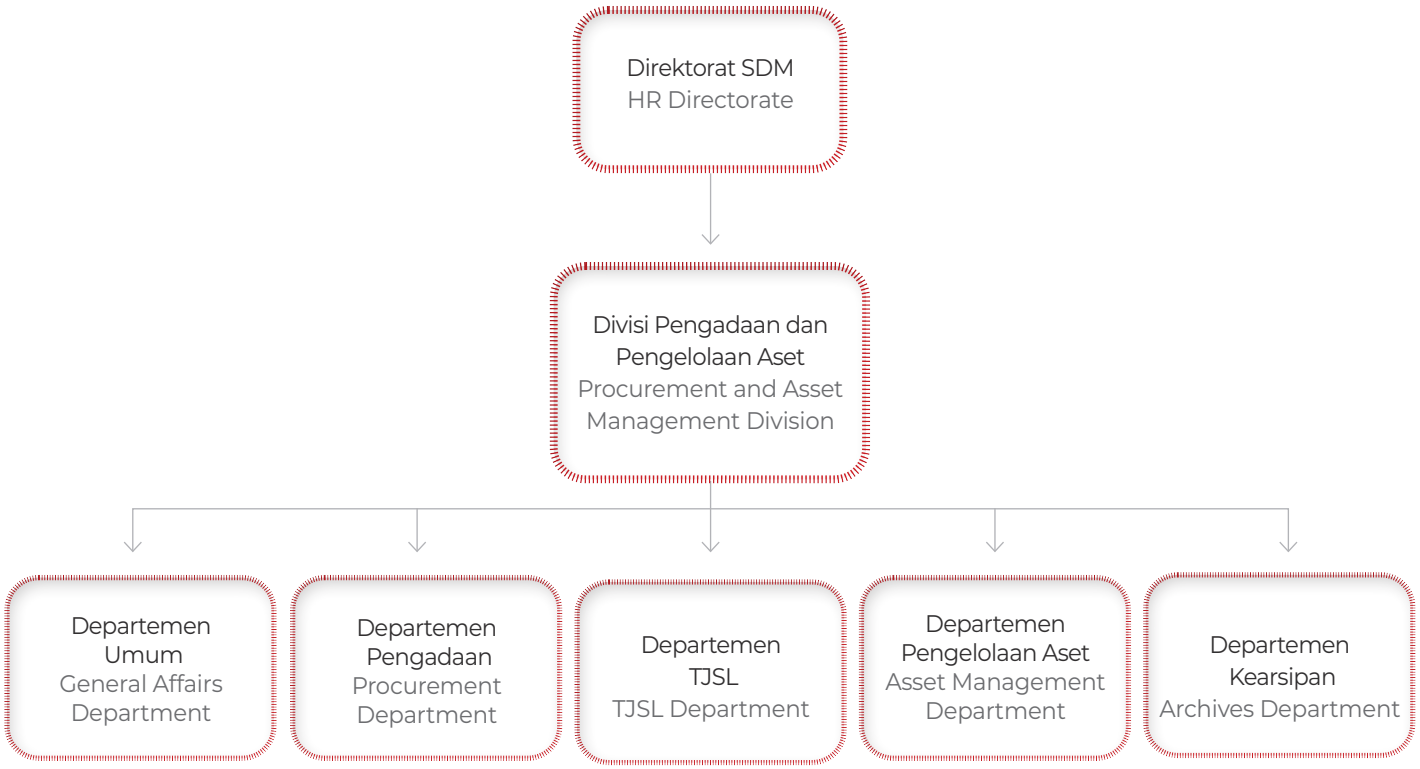
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

IFG menempatkan Departemen TJSL sebagai unit utama dalam mengelola serta menjalankan Program TJSL Perusahaan.

IFG places the TJSL Department as the main unit in managing and executing the Company's TJSL Program.

Struktur organisasi TJSL, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, berada di bawah Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset serta berada dalam lingkup Direktorat SDM.

The organizational structure of TJSL, based on the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 15 of 2024 concerning the Organizational Structure Policy, is under the Procurement and Asset Management Division and is within the scope of the Directorate of Human Capital.



STRATEGI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY STRATEGY

ASPIRASI DAN SASARAN STRATEGIS IFG BERDASARKAN RJPP 2020-2024

IFG'S STRATEGIC ASPIRATIONS AND GOALS BASED ON RJPP 2020-2024

Visi | Vision

Menjadi Perusahaan Grup Keuangan Perasuransian dan Penjaminan yang Terdepan, Terpercaya dan Terintegrasi dalam Memberikan Layanan Jasa dan Produk yang Terkemuka dan Handal
To be a leading, trusted and integrated insurance and guarantor financial group company in providing reputable and reliable services and products.

Aspirasi: *One of the largest non-banking financial in Southeast Asia with Rp. 120 trillion valuation in 2024*

Sasaran Strategis Strategic Goal

Marketing Positioning	*Financial Performance*	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Health Level	*Brand Perception*
1	2	3	4
Menjadi *Leader* di Industri Becoming a Leader in the Industry **#1** *in Non-Life Insurance & Guarantee* **#1** *In Asset Management* ***Top 5*** *in Securities* ***Top 5*** *in Life Insurance*	*Double Profit* Kinerja keuangan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian Financial performance while maintaining prudence	Pencadangan yang Kuat Strong Backup RBC Min **200%** GR Maksimal **20x**	*Brand* yang kuat Strong brand

Sejalan dengan aspirasi dan sasaran strategis Perusahaan tahun 2020 s.d 2024, maka misi strategis TJSL IFG adalah menjadi *industry leader* yang mampu menyelaraskan peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi pemangku kepentingan utama dengan keberlanjutan Perusahaan dan Anggota *Holding* melalui Program TJSL

In line with the Company's aspirations and strategic goals for 2020 to 2024, IFG's TJSL strategic missions are Becoming an Industry Leader capable of aligning increased added value and benefits for key stakeholders with the sustainability of the Company and its Holding Members through TJSL Programs.

Governance
Tata Kelola

Perbaikan tata kelola dengan pemutakhiran Pedoman Strategis Program TJSL sesuai PER-1/2023 serta menyesuaikan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, baik secara regulasi dari pemerintah dan perkembangan dalam lingkungan ekosistem IFG
Improvement of governance by updating the TJSL Program Strategic Guidelines in accordance with PER-1/2023 and adjusting the dynamics and developments that occur today both in government regulations and developments in the IFG ecosystem environment.

Stakeholder and Employee Involvement
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Karyawan

Keterlibatan pemangku kepentingan utama termasuk dalam karyawan secara aktif dalam menumbuhkan peran dan kehadiran IFG di kehidupan masyarakat melalui Program TJSL
Involvement of key stakeholders including employees actively in fostering IFG's role and presence in community life through the CSR Program.

Sinergi dengan Grup IFG
Synergy with IFG Group

Mengutamakan sinergi dengan Anggota *Holding* dengan tujuan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan bisnis Anggota *Holding* melalui Program-Program kolaborasi
Prioritizing synergy with Holding Members with the aim of providing greater benefits to the community and Holding Members' businesses through collaborative Programs.

Financial Literacy
Literasi Keuangan

IFG mendukung pencapaian target angka literasi keuangan Indonesia setingkat 65% dan inklusi keuangan Indonesia setingkat 65% dan inklusi keuangan setingkat 93% pada tahun 2027 melalui Program-Program literasi keuangan
IFG supports the achievement of Indonesia's target financial literacy rate of 65% and financial inclusion rate of 65% and financial inclusion rate of 93% by 2027 through financial literacy Programs.

Tabel Target dan Realisasi Investasi pada Proyek Berwawasan Lingkungan/Sesuai Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021-2024
Table of Target and Realization of Investment in Environmentally Sound/Sustainable Finance-compliant Projects in 2021-2024

Tahun Year	Nama Program Name of Program	Target (Rp/IDR)	Realisasi (Rp) Realization (IDR)
2024	Program TJSL Bidang Prioritas Lingkungan TJSL Program for Environmental Priority Areas	3.734.000.000	3.948.035.742
2023	Program TJSL Bidang Prioritas Lingkungan TJSL Program for Environmental Priority Areas	1.604.000.000	2.029.524.059
2022	Program TJSL Bidang Prioritas Lingkungan TJSL Program for Environmental Priority Areas	1.600.000.000	1.246.551.308
2021	Program TJSL Bidang Prioritas Lingkungan TJSL Program for Environmental Priority Areas	200.000.000	225.000.000

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

IFG menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/3/2023, yang menjadi panduan pelaksanaan Program TJSL dan penugasan khusus bagi BUMN, yang berfokus pada tiga bidang utama: pendidikan, lingkungan, dan pendanaan PUMK. Ketiga bidang ini selaras dengan empat pilar utama TJSL, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, sehingga IFG dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian TPB.

Sebagai bagian dari strategi pelaksanaan TJSL, IFG menempatkan pemetaan pemangku kepentingan sebagai langkah krusial. Perusahaan telah mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak maupun berkontribusi terhadap operasionalnya guna memastikan setiap Program TJSL dapat memberikan manfaat optimal. Para pemangku kepentingan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya terhadap Perusahaan serta lingkungan sekitar. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak atas kegiatan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

IFG implements corporate social responsibility based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/3/2023, which guides the implementation of TJSL Programs and special assignments for SOEs, focusing on three main areas: education, environment, and MSEs Funding Program (PUMK). These three areas are aligned with the four main pillars of TJSL, namely social, environmental, economic, and law and governance, allowing IFG to have a positive impact on the community while supporting government policies in achieving SDGs.

As part of its TJSL implementation strategy, IFG places stakeholder mapping as a crucial step. The Company has identified the parties affected by and contributing to its operations to ensure that each TJSL Program can provide optimal benefits. These stakeholders are classified based on their level of involvement and impact on the company and the environment. Stakeholders who influence or are affected by the Company's activities are classified as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk Pelibatan Form of Involvement	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact of Company Activities
Pemegang Saham Shareholders	· RUPS · Laporan Kinerja · GMS · Performance Report	Peningkatan kinerja dan peningkatan nilai Perusahaan serta dukungan pada kepentingan pemegang saham Improved performance and increased Company value and support for shareholder interests
Karyawan Employees	· Perjanjian Kerja Bersama · Pendidikan dan Pelatihan · Collective Labor Agreement · Education and Training	· Terjaminnya kesejahteraan karyawan beserta keluarganya · Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman · Jenjang karier dan penilaian kinerja yang adil dan transparan · Pemenuhan hak-hak karyawan · Meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan karyawan · Ensuring welfare of employees and their families · Conducive, healthy, and safe working atmosphere · Fair and transparent career paths and performance appraisals · Fulfillment of employee rights · Improving the effectiveness of management and employee relations

Pemangku Kepentingan Stakeholders	**Bentuk Pelibatan** Form of Involvement	**Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan** Influence/Impact of Company Activities
Pemerintah Government	· Kepatuhan terhadap Peraturan · Kesehatan Perusahaan · Compliance to Regulations · Company Soundness	Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan TJSL) Economic contribution to the Government (taxes and community economic improvement activities through TJSL activities)
Masyarakat Community	Kegiatan TJSL TJSL Activities	Meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik Improving the community's economy along with sustainable community empowerment through the development of community welfare, both physical and non-physical.
Konsumen/Pelanggan Consumers/Customers	· Survei Kepuasan Pelanggan · Program *Engagement* Lainnya · Customer Satisfaction Survey · Other Engagement Programs	Peningkatan fasilitas atas produk-produk Perusahaan yang dapat memberikan kenyamanan dan kualitas hidup lebih baik Improving facilities for the Company's products that can provide comfort and better quality of life
Rekanan Partners	· Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama · Proses Operasional · Contract and Cooperation Agreement · Operational Process	· Proses pengadaan yang adil dan transparan · Proses evaluasi yang objektif · Hubungan yang harmonis · Fair and transparent procurement process · Objective evaluation process · Harmonious relationship
Media Massa Mass Media	· Siaran Pers/Keterbukaan Informasi · Press Release/ Information Disclosure	Memperoleh akses informasi yang akurat dan terkini Access to accurate and up-to-date information



REALISASI DANA DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 2024

REALIZATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDS AND ACTIVITIES IN 2024

REALISASI PENYALURAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

Hingga akhir Desember 2024, Perusahaan telah menyalurkan dana Program TJSL sebesar Rp17,77 miliar. Jumlah ini setara dengan 101,86% dari RKA Tahunan dan meningkat 52,76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Rincian penyalurannya adalah sebagai berikut:

1. Program TJSL Non-PUMK yang dijalankan oleh unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/CID sebesar Rp14,33 miliar.
2. Program TJSL Non-PUMK yang dijalankan di luar unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/Non-CID sebesar Rp2,99 miliar.
3. Program TJSL PUMK sebesar Rp450 juta yang disalurkan melalui kerja sama Program PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

REALIZATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM DISTRIBUTION IN 2024

By the end of December 2024, the Company had disbursed IDR17.77 billion in TJSL Program funds. This amount is equivalent to 101.86% of the Annual Work Plan and Budget (RKA) and an increase of 52.76% compared to the previous year's realization. The details of the distribution are as follows:

1. Non-MSEs Funding TJSL Program run by the community engagement and development unit/CID amounted to IDR14.33 billion.
2. Non-MSEs Funding TJSL Program that are run outside the community involvement and development unit/ Non-CID amounting to IDR2.99 billion.
3. TJSL MSEs Funding Program amounting to IDR450 million which was distributed through the MSE Funding Program collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2024
Table of SOE TJSL Budget Realization in 2024

(dalam Rupiah penuh)
In full Rupiah)

Program Program	**RKA 2024 (Rp)** 2024 Work Plan and Budget (IDR)	**Real Tahun 2023 (Rp)** 2023 Realization (IDR)	**Real Tahun 2024 (Rp)** 2024 Realization (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4:2)	(6)=(4:3)
TJSL CID Non-PUMK TJSL Non-MSEs Funding (CID) Program	**450.000.000**	999.000.000	**14.328.559.554**	95,52%	148,06%
TJSL Non-CID TJSL Non-CID Program	**15.000.000.000**	9.677.324.435	**2.995.861.424**	149,79%	312,28%
TJSL PUMK TJSL MSEs Funding Program	**2.000.000.000**	959.339.331	**450.000.000**	100,00%	45,05%
Total Realisasi TJSL Total TJSL Realization	**17.450.000.000**	**11.635.663.766**	**17.774.420.978**	**101,86%**	**152,76%**

REALISASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN MENURUT PILAR UTAMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Rincian pencapaiannya Program TJSL BUMN hingga Desember 2024 berdasarkan pilar utama TJSL adalah sebagai berikut:

REALIZATION OF SOE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM ACCORDING TO THE MAIN PILLARS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ESPONSIBILITY

Details of the achievements of the SOE TJSL Program until December 2024 based on the main pillars of TJSL are as follows:

1. Pilar sosial sebesar Rp9,60 miliar;
2. Pilar ekonomi sebesar Rp1,74 miliar;
3. Pilar lingkungan sebesar Rp4,19 miliar; dan
4. Pilar hukum dan tata kelola Rp2,25 miliar.

Penyaluran TJSL berdasarkan pilar utama TJSL dan TPB telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. The social pillar amounted to IDR9.60 billion;
2. The economic pillar amounted to IDR1.74 billion;
3. Environmental pillars amounting to IDR4.19 billion; and
4. Law and governance pillar IDR2.25 billion.

The distribution of TJSL based on the main pillars of TJSL and SDGs has achieved the following results:

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2024 (CID dan Non CID)
Table of Realization of SOEs' TJSL Budget in 2024 (CID and Non CID)

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	TPB SDGs	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2024 (Rp) In 2024 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**10.570.000.000**	**9.602.827.825**	**90,85%**
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	1.850.000.000	2.910.898.311	157,35%
2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	200.000.000	116.178.400	58,09%
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	2.650.000.000	1.314.765.413	49,61%
4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	5.870.000.000	5.260.985.701	89,62%
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**2.750.000.000**	**1.739.429.154**	**63,25%**
8	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Decent Work and Economic Growth	2.750.000.000	1.739.429.154	63,25%
C	**PILAR LINGKUNGAN** ENVIRONMENTAL PILLAR	**4.034.000.000**	**4.185.035.742**	**103,74%**
6	Air bersih dan Sanitasi Layak Clean water and sanitation	300.000.000	350.000.000	116,67%
11	Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities & Communities	2.530.000.000	3.472.432.830	137,25%
15	Ekosistem Daratan Life on Land	1.204.000.000	362.602.912	30,12%
D	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** LAW AND GOVERNANCE PILLAR	**96.000.000**	**2.247.128.257**	**2340,76%**
16	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice and Strong Institutions	96.000.000	2.247.128.257	2340,76%
	TOTAL	**17.450.000.000**	**17.774.420.978**	**101,86%**

Berdasarkan empat pilar utama TJSL realisasi tertinggi pada Tahun 2024 terjadi pada pilar sosial sebesar Rp9,60 miliar (90,85% dari RKA) dan pilar lingkungan sebesar Rp4,19 miliar (103,74% dari RKA 2024). Realisasi Program TJSL juga diklasifikasikan berdasarkan TPB, di mana kontribusi terbesar terdapat pada:

Based on the four main pillars of TJSL, the highest realization in 2024 occurred in the social pillar of IDR9.60 billion (90.85% of the Work Plan and Budget) and the environmental pillar of IDR4.19 billion (103.74% of the 2024 Work Plan and Budget). The realization of the TJSL Program is also classified based on SDGs, where the largest contribution is found in:

1. TPB 1 Tanpa Kemiskinan sebesar Rp2,91 miliar;
2. TPB 4 Pendidikan Berkualitas sebesar Rp5,26 miliar;
3. TPB 11 Kota & Pemukiman Berkelanjutan sebesar Rp3,47 miliar; dan
4. TPB 16 Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan sebesar Rp2,25 miliar.

Sementara itu, rincian realisasi pencapaian Program TJSL hingga Desember 2024, khusus untuk anggaran CID, adalah sebagai berikut:

1. SDG 1 No Poverty amounted to IDR2.91 billion;
2. SDG 4 Quality Education amounted to IDR5.26 billion;
3. SDG 11 Sustainable Cities & Communities amounting to IDR3.47 billion; and
4. SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions amounted to IDR2.25 billion.

Meanwhile, the details of the realization of TJSL Program achievements until December 2024, specifically for the CID budget, are as follows:

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2023 (Hanya CID)
Table of SOEs' TJSL Budget Realization in 2023 (CID Only)

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	TPB SDGs	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2024 (Rp) In 2024 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**8.570.000.000**	**7.964.827.271**	**92,94%**
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	1.850.000.000	2.440.898.311	131,94%
2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	200.000.000	116.178.400	58,09%
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	1.400.000.000	785.175.000	56,08%
4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	5.120.000.000	4.622.575.560	90,28%
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**2.750.000.000**	**1.739.429.154**	**63,25%**
1	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Decent Work and Economic Growth	2.750.000.000	1.739.429.154	63,25%
C	**PILAR LINGKUNGAN** ENVIRONMENTAL PILLAR	**4.034.000.000**	**3.948.035.742**	**97,87%**
2	Air bersih dan Sanitasi Layak Clean water and sanitation	300.000.000	350.000.000	116,67%
3	Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities & Communities	2.530.000.000	3.235.432.830	127,88%
4	Ekosistem Daratan Life on Land	1.204.000.000	362.602.912	30,12%
D	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** LAW AND GOVERNANCE PILLAR	**96.000.000**	**1.126.267.387**	**1173,20%**
1	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice and Strong Institutions	96.000.000	1.126.267.387	1173,20%
	TOTAL	**15.450.000.000**	**14.778.559.554**	**95,65%**

IFG juga menjalankan berbagai Program sosial kemasyarakatan di luar unit TJSL, yang dikenal sebagai Program Non-CID. Hingga Desember 2024, total dana yang terserap untuk TJSL Non-CID mencapai Rp2,99 miliar, atau 149,79% dari RKA Tahunan. Rincian penggunaan dana ini disusun berdasarkan TPB dan pilar utama TJSL sebagai berikut:

IFG also provides various social community Programs outside of the TJSL unit, known as Non-CID Programs. As of December 2024, the total funds absorbed for TJSL Non-CID reached IDR2.99 billion, or 149.79% of the Annual Work Plan and Budget. The details of the use of these funds are organized based on the SDGs and the main pillars of TJSL as follows:

Tabel Realisasi Angggaran TJSL BUMN Tahun 2024 (Hanya Non CID)
Table of Realization of SOE TJSL Budget in 2024 (Non CID Only)

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	TPB SDGs	RKA 2024 2024 Work Plan and Budget	Tahun 2024 In 2024	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**2.000.000.000**	**1.638.000.554**	**81,90%**
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	-	470.000.000	-
2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	1.250.000.000	529.590.413	42,37%
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	750.000.000	638.410.141	85,12%
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**-**	**-**	**-**
C	**PILAR LINGKUNGAN** ENVIRONMENTAL PILLAR	**-**	**237.000.000**	**-**
1	Kota & Pemukiman yang berkelanjutan Sustainable Cities & Communities	-	237.000.000	-
D	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	**-**	**1.120.860.870**	**-**
2	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice and Strong Institutions	-	1.120.860.870	-
	TOTAL	**2.000.000.000**	**2.995.861.424**	**149,79%**

PROGRAM UNGGULAN
FLAGSHIP PROGRAMS

Berlandaskan RKA TJSL tahun 2024 serta mengacu pada Aspirasi Pemegang Saham tahun yang sama, IFG telah menyusun berbagai inisiatif strategis dalam pelaksanaan TJSL Non-PUMK. Program-Program ini dijalankan oleh unit TJSL/CID dengan fokus pada Program prioritas serta pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Program Prioritas

Program TJSL memiliki tiga prioritas utama, yaitu di bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK, yang tertuang dalam RKA TJSL tahun 2024. Hingga Desember 2024, realisasi Program ini telah mencapai Rp9,86 miliar atau 94,59% dari RKA Tahunan, dengan pencapaian 63,61% dari RKA Program TJSL Non-Pendanaan UMK CID. Rincian setiap prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas di Bidang Pendidikan
   Sampai dengan Desember 2024, realisasi anggaran mencapai Rp4,62 miliar melalui Program Literasi Keuangan kepada Masyarakat, Program Bantuan Tunjangan Pendidikan dan/atau Beasiswa, Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Based on the 2024 Work Plan and Budget for TJSL and referring to the Shareholder Aspirations of the same year, IFG has developed various strategic initiatives in the implementation of TJSL's Non-MSEs Funding Program. These Programs are run by the TJSL/CID unit with a focus on priority Programs and a Creating Shared Value (CSV) approach to create sustainable impact.

Priority Programs

The TJSL Program has three main priorities, namely in the sectors of Education, Environment, and MSE Development, which are stated in the 2024 Work Plan and Budget for TJSL Program. As of December 2024, the realization of this Program has reached IDR9.86 billion or 94.59% of the Annual Work Plan & Budget, with an achievement of 63.61% of the TJSL Non-MSEs Funding (CID) Program. The details of each priority are as follows:

1. Priority Programs in Education
   As of December 2024, the budget realization reached IDR4.62 billion through the Financial Literacy Program to the Community, Education Allowance and/or Scholarship Assistance Program, Education Facilities and Infrastructure Assistance Program.

Tabel Program Prioritas Pendidikan Tahun 2024
Table of Priority Programs for Education in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No.	Program Program	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Realisasi Tahun 2024 (Rp) Realization In 2024 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
1	Literasi Keuangan kepada Masyarakat Financial Literacy to the Community	600.000.000	1.344.389.348	224,06%	**Literasi Keuangan kepada 959 orang, sbb:** 1. 150 guru bekerjasama dengan zap finance 2. 47 anak-anak binaan Yayasan Kampus Diakonia Moderen 3. 300 mahasiswa di UNSOED 4. 50 orang pemuda dalam kegiatan Youth Fest 2024 5. 412 mahasiswa dalam IFG Goes to Campus 2024 di UNPAR **Financial Literacy to 959 people, as follows:** 1. 150 teachers collaborate with zap finance 2. 47 fostered children of Kampus Diakonia Moderen Foundation 3. 300 students at UNSOED 4. 50 youth in Youth Fest 2024 activities 5. 412 students in IFG Goes to Campus 2024 at UNPAR

Tabel Program Prioritas Pendidikan Tahun 2024
Table of Priority Programs for Education in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No.	Program Program	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Realisasi Tahun 2024 (Rp) Realization In 2024 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
2	Program Bantuan Tunjangan Pendidikan dan/atau Beasiswa Education Allowance and/or Scholarship Assistance Program	740.000.000	1.262.487.670	170,61%	**Bantuan beasiswa:** 1. S-1 kepada 6 (enam) Tenaga Alih Daya 2. S-1 kepada 6 anak karyawan non-staf **Tunjangan pendidikan:** 1. 50 santri di Ponpes Al Falakiah Bogor 2. 100 putra/putri TNI AD 3. 50 mahasiswa IPB, Bogor 4. 20 siswa SMK Darussalam Tangsel 5. 13 peneliti tentang TJSL berbasis data desa presisi di Bali dan 7 peneliti tentang stunting di Jawa Timur 6. 100 orang atlet lari pelajar di Labuan Bajo 7. 13 orang guru 8. madrasah diniyah Tasikmalaya **Scholarship assistance:** 1. Undergraduate Scholarships for 6 (six) outsourced workers 2. Undergraduate Scholarships to 6 children of non-staff employees **Education allowance:** 1. For 50 students at Al Falakiah Islamic Boarding School in Bogor 2. For 100 sons/daughters of the Indonesian Army 3. For 50 IPB students, Bogor 4. For 20 students of SMK Darussalam, South Tangerang 5. For 13 researchers on TJSL based on precision village data in Bali and 7 researchers on stunting in East Java 6. For 100 student athletes in Labuan Bajo 7. For 13 teachers in 8. Madrasah Diniyah Tasikmalaya
3	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Education Facilities and Infrastructure Assistance Program	2.000.000.000	2.015.698.542	100,78%	**Prasarana:** 1. Renovasi taman baca di Medang, Kab. Tangerang 2. Renovasi gedung/ruang kelas sebanyak 11 unit, di wilayah Karawang, Palembang, Nganjuk, Bogor, Magelang, Sawangan, Demak, Pati, Tasikmalaya, Jaksel **Sarana:** 1. 25 buku Ensiklopedia Manggarai 2. 1.873 buah buku bacaan anak dalam kegiatan Mudik Bersama 3. 50 pcs Seragam santri di Ponpes Al Falakiah Bogor 4. 300 paket alat tulis dan ibadah untuk anak yatim piatu melalui YIAB 5. 10 laptop untuk SMPN Satap Pulau Messah Manggarai Barat 6. 33 paket alat belajar di TK Srikandi Way Jepara 7. 400 unit kaos seragam dan 650 alat sekolah untuk siswa SLBN 11 Jakarta **Infrastructure:** 1. Renovation of reading center in Medang, District of Tangerang 2. Renovation of buildings/classrooms in 11 units, in Karawang, Palembang, Nganjuk, Bogor, Magelang, Sawangan, Demak, Pati, Tasikmalaya, South Jakarta **Facilities**: 1. 25 books of Manggarai Encyclopedia 2. 1.873 children's reading books for Mudik Bersama (Joint Homecoming) activities 3. 50 pcs of uniforms for Al Falakiah Islamic Boarding School in Bogor 4. 300 stationery and worship kits for orphans through YIAB 5. 10 laptops for SMPN Satap Pulau Messah West Manggarai 6. 33 packages of stationary at Srikandi Way Jepara Kindergarten 7. 400 units of uniforms and 650 school kits for SLBN 11 Jakarta students
4	Kolaborasi Pendidikan BUMN SOE Education Collaboration	1.500.000.000	-	0,00%	(dialihkan menjadi Program stunting oleh Kementerian BUMN) (switched to stunting Program by Ministry of SOEs)
	Total Prioritas Pendidikan Total Priority Program in Education	**4.840.000.000**	**4.622.575.560**	**95,51%**	

2. Program Prioritas di Bidang Lingkungan
Sampai dengan Desember 2024, realisasi anggaran mencapai Rp3,95 miliar melalui IFGreen (konservasi alam dan kampanye lingkungan), program pengelolaan sampah, dan revitalisasi prasarana dan sarana umum di wilayah pemukiman dan perkotaan.

2. Priority Programs in the Environmental Sector
As of December 2024, the budget realization achieved IDR3.95 billion through IFGreen (nature conservation and environmental campaign), waste management program, and revitalization of public infrastructure and facilities in residential and urban areas.

Tabel Program Prioritas Lingkungan Tahun 2024
Environmental Priority Program Table 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	Program Program	RKA 2024 2024 Work Plan and Budget	Tahun 2024 In 2024	Capaian Achievement	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
Prioritas Lingkungan Environmental Priority Program					
1	IFGreen (Konservasi Alam dan Kampanye Lingkungan) IFGreen (Nature Conservation and Environmental Campaign)	804.000.000	362.602.912	45,10%	Penanaman: 1. 500 bibit pakan gajah dalam Konservasi Taman Nasional Way Kambas 2. 100 pohon ara dan 100 pohon beringin dalam Tapak Rinjani 3. 50 pohon palem dan durian di Banda Neira 4. 1000 pohon pucuk merah di Ruteng Manggarai 5. 3.000 pohon di Kabupaten Garut Planting: 1. 500 elephant food seedlings in Way Kambas National Park Conservation 2. 100 fig trees and 100 banyan trees in Tread of Rinjani 3. 50 palm and durian trees in Banda Neira 4. 1000 mereh shoot trees in Ruteng Manggarai 5. 3.000 trees in Garut District
2	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	600.000.000	196.500.000	32,75%	1. Lomba Kreasi Sampah, Labuan Bajo diikuti 100 peserta 2. Pembangunan 3 TPS 3R dan 2 unit mobil angkut sampah di Cikole, Jawa Barat 3. Pembangunan rumah mesin olah sampah di Likupang 1. Waste Creation Competition, Labuan Bajo participated by 100 participants 2. Construction of 3 Temporary Shelters 3R and 2 units of waste transportation cars in Cikole, West Java 3. Construction of waste processing machine house in Likupang
3	Revitalisasi Prasarana dan Sarana Umum di Wilayah Pemukiman dan Perkotaan Revitalization of Public Infrastructure and Facilities in Residential and Urban Areas	2.330.000.000	3.388.932.830	145,45%	1. Renovasi bangunan Gedung Satma dan Satbek Lanal Bandung 2. Renovasi 7 unit prasarana ibadah berupa Masjid dan Gereja 3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah, Tandon Air dan Rabat Beton di Kab. Sampang 4. Penyerahan Sarana Ibadah berupa mushaf dan alat shalat sebanyak 200 paket di Jabodetabek 5. Bantuan sarana ibadah untuk 3 Gereja 6. Mudik Bersama IFG Group memberangkatkan 1.873 pemudik 7. Pemasangan 22 set lampu penerangan jalan umum di Blitar 8. Pembangunan 3 Tembok Penahan Tanah dan 2 Rabat Beton di Kab. Sampang 9. Pembangunan 5 unit sarana air bersih di Sampang, Batam, Blitar dan Morowali Utara 1. Renovation of Headquarter Unit and Supply Unit buildings of Bandung Naval Base 2. Renovation of 7 units of worship facilities in the form of Mosques and Churches 3. Construction of retaining walls, water reservoirs and concrete rebates in Sampang District 4. Handover of prayer facilities in the form of Qurans and prayer kits of 200 packages in Greater Jakarta (Jabodetabek) 5. Assistance for prayer facilities for 3 churches 6. IFG Group's Mudik Bersama (Joint Homecoming Program) sent out 1,873 people on their way to their destinations. 7. Installation of 22 sets of public street lighting in Blitar 8. Construction of 3 retaining walls and 2 concrete rebates in Sampang District 9. Construction of 5 units of clean water facilities in Sampang, Batam, Blitar and North Morowali
	Total Prioritas Lingkungan Total Priority Program in Environment	**3.734.000.000**	**3.948.035.742**	**105,73%**	

3. Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK
Sampai dengan Desember 2024, realisasi anggaran mencapai Rp1,29 miliar melalui Pelatihan/Pendidikan Kewirausahaan, Bantuan Peralatan dan Infrastruktur Usaha/Produksi UMKM, dan Pengembangan dan Pembinaan UMKM Binaan dan Umum.

3. Priority pPrograms in MSE Development Sector
As of December 2024, the budget realization reached IDR1.29 billion through Entrepreneurship Training/ Education, MSME Business/Production Equipment and Infrastructure Assistance, and Development and Guidance of Fostered and General MSMEs.

Tabel Program Prioritas Pengembangan UMK Tahun 2024
Table of MSE Development Priority Programs in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No.	Program Program	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Real Tahun 2024 (Rp) Realization In 2024 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
Prioritas Pengembangan UMK MSE Development Priority Program					
1	Pelatihan/ Pendidikan Kewirausahaan Entrepreneurship Training/Education	350.000.000	285.175.076	81,48%	1. Program Inklusif dan Berdaya Bersama 21 Pelaku UMKM Pariwisata Disabilitas dan Perempuan di Labuan Bajo 2. Sosialisasi perencanaan Keuangan kepada kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 3. Pendidikan kepada 39 keluarga rentan di lembang 4. Pelatihan *entrepreneur make up artist* kepada 20 narapidana di Rutan Pondok Bambu 5. Edukasi kepada 200 pelaku usaha muda dalam PEAKFestive 1. An Inclusive and Empowering Program for 21 Women and Persons with Disabilities in Tourism MSMEs in Labuan Bajo 2. Dissemination of financial planning to women-headed households empowerment groups 3. Education for 39 vulnerable families in Lembang 4. Entrepreneurial make-up artist training for 20 inmates at Pondok Bambu Detention Center 5. Educating 200 young entrepreneurs in PEAKFestive
2	Bantuan Peralatan dan Infrastruktur Usaha/ Produksi Providing Equipment and Infrastructure Assistance	400.000.000	362.500.000	90,63%	1. Program Bantuan Alat Optimasi Promosi Digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul, 2. Bantuan 18 unit peralatan usaha jasa pariwisata di Banyuwangi, 3. Pembangunan UMKM Center Lampung 4. Revitalisasi prasarana produksi ternak Ayam Petelur Karang Taruna Desa Lembang 5. Bantuan sarana usaha untuk 25 UMKM melalui kolaborasi TJSL Ata Modo 6. Pembangunan kandang dan bantuan peralatan usaha kepada 1 kelompok ternak kambing di Cilacap 1. Digitalization Promotion Optimization Tool Assistance Program for Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency 2. Assistance for 18 units of equipment for tourism service businesses in Banyuwangi 3. Construction of Lampung MSME Center 4. Revitalization of Layer Poultry Farming infrastructure in Lembang Village Community Youth Development 5. Business facility assistance for 25 MSMEs through Ata Modo's TJSL collaboration 6. Construction of cages and business equipment assistance to 1 group of goats in Cilacap
3	Pengembangan dan Pembinaan UMKM Binaan dan Umum Development and Guidance of Fostered and General MSMEs	1.100.000.000	641.754.078	58,34%	1. Pembinaan 18 UMKM pada Kegiatan "Weekend Fiesta Batu Cermin 2024 Labuan Bajo" 2. Pengembangan UMKM ternak ayam di Desa Lembang melalui panduan pemeliharaan beternak ayam dan penanganan 3. kesehatan ayam petelur 1. Development of 18 MSMEs in the "Weekend Fiesta Batu Cermin 2024 Labuan Bajo" Activity 2. Development of small and medium-sized poultry farming businesses in Lembang Village using guidelines for raising poultry and caring for 3. laying hens
	Total Prioritas Pengembangan UMK Total MSE Development Priority Program	**1.850.000.000**	**1.289.429.154**	**69,70%**	

4. Program CSV
   Terdapat 3 (tiga) Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan CSV bagi Perusahaan dan merupakan Program yang berkelanjutan dari Program tahun 2023, yaitu Insurance Goes to Campus, Korporatisasi UMKM dan Kindness to Progress, dengan rincian sebagai berikut:

4. CSV Programs
   There are 3 (three) TJSL Programs that are committed to supporting the core business and creating CSV for the company and are sustainable Programs from the 2023 Program, namely Insurance Goes to Campus, MSME Corporatization and Kindness to Progress, with details as follows:

Tabel Program *Creating Shared Value* Tahun 2024
Table of Creating Shared Value Program in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No.	**Nama Program** Name of Program	**RKA 2024** 2024 Work Plan and Budget	**Tahun 2024** In 2024	**Capaian** Achievement	**Output**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(4:3)**	**(6)**
1	IFG Goes to Campus	600.000.000	706.855.348	117,81%	1. Program IFG Goes to Campus "Start Early, Reap the Rewards Later" di Univ. Katolik Parahyangan kepada 412 mahasiswa calon wirausahawan 2. Literasi Keuangan untuk Penegakan Hukum Sektor Keuangan yang Unggul kepada 300 mahasiswa di UNSOED 3. Seminar terkait literasi keuangan, budaya dan wirausaha kepada 50 mahasiswa dan pemuda dalam Youth Fest **Manfaat bagi masyarakat:** Peningkatan wawasan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, termasuk tentang asuransi, penjaminan, dan investasi. **Manfaat bagi Perusahaan:** Peningkatan *exposure* produk-produk ritel IFG Group baik dari segi informasi produk maupun *experiential* untuk aplikasi/pembelian atau penggunaan teknologi digital, kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan *potential market* bagi anak usaha IFG 1. IFG Goes to Campus "Start Early, Reap the Rewards Later" Program at Parahyangan Catholic University to 412 aspiring student entrepreneurs 2. Financial Literacy for Excellent Financial Sector Law Enforcement to 300 students at UNSOED 3. Seminars on financial literacy, culture and entrepreneurship for 50 students and youth in Youth Fest **Benefits to the Community:** Increasing the knowledge and skills in financial management, including insurance, guarantee, and investment. **Benefits to the Company:** Increasing the exposure of IFG Group retail products in terms of product information and experiential aspects for application/purchase or use of digital technology, targeting students as the future generation and potential market for IFG subsidiaries.

Tabel Program *Creating Shared Value* Tahun 2024
Table of Creating Shared Value Program in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No.	Nama Program Name of Program	RKA 2024 2024 Work Plan and Budget	Tahun 2024 In 2024	Capaian Achievement	Output
2	Program Kindness to Progress Kindness to Progress Program	550.000.000	233.574.639	42,47%	Program yang menggabungkan kegiatan sosial dengan internalisasi *core values* Perusahaan dan proyek sosial oleh peserta Program yaitu 25 orang karyawan IFG dan Anggota *Holding*, dengan rincian proyek sosial berupa : a. Pengelolaan Sampah Organik Pada Warga Desa b. Revitalisasi Peternakan Ayam Petelur Pada Karang Taruna c. Revitalisasi Perpustakaan dan Peningkatan Skill Pada Anak Binaan SOS d. Edukasi Manajemen Keuangan kepada kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Yang memberikan manfaat kepada audiens sebanyak 155 penerima manfaat langsung dan 1356 penerima manfaat tidak langsung di Desa Lembang. **Manfaat bagi masyarakat:** Peningkatan kualitas *human capital*, perbaikan/penambahan prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa, pelestarian kondisi lingkungan di desa, dan peningkatan skill maupun fasilitas usaha untuk UMKM. **Manfaat bagi Perusahaan:** Peningkatan nilai internalisasi rata-rata AKHLAK karyawan partisipan dalam penerapan kompetensi AKHLAK dari 4,49 (tinggi) menjadi 4,70 (sangat tinggi), serta sense of belonging dan loyalitas karyawan melalui aktualisasi diri, meningkatkan persepsi IFG di masyarakat. The Program combines social activities with internalization of the company's core values and social projects by Program participants, namely 25 IFG and Subsidiary employees, with details of social projects in the form of: a. Organic Waste Management for Villagers b. Revitalization of layer poultry farming in Community Youth Development. c. Library Revitalization and Skill Improvement for SOS Fostered Children d. Financial Management Education for Women-Headed Household Empowerment Groups. It benefited an audience of 155 direct beneficiaries and 1356 indirect beneficiaries in Lembang Village. **Benefits to the Community:** Improving the quality of human capital, improving/adding physical infrastructure and facilities in the village environment, preserving environmental conditions in the village, and improving skills and business facilities for MSMEs. **Benefits to the Company:** Increasing the average internalization score of AKHLAK of participating employees in the application of AKHLAK competencies from 4.49 (high) to 4.70 (very high), as well as the sense of belonging and loyalty of employees through self-actualization, improving the perception of IFG in the community.
3	Program Korporatisasi UMKM MSME Corporatization Program	1.400.000.000	1.289.429.154	92,10%	Payung Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM sebanyak 280 UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri dan layak mendapatkan akses pembiayaan, termasuk juga melaksanakan Program inklusif dan berdaya bersama 21 pelaku UMKM disabilitas dan perempuan bidang pariwisata di Labuan Bajo. **Manfaat bagi masyarakat:** Perluasan pasar UMKM di ranah domestik (*onboarding* ke berbagai platform komersial), perluasan pasar ekspor melalui Program pemantapan ekspor, peningkatan kapasitas produksi, pendampingan sertifikasi, dan pelatihan pengemasan produk. **Manfaat bagi Perusahaan:** Perluasan pangsa pasar Anggota *Holding* IFG yang bergerak di bidang KUR maupun asuransi terkait usaha mikro dan kecil. An umbrella Program to improve the capacity and capabilities of 280 MSMEs to become resilient and independent and eligible for access to financing, including implementing inclusive and empowering Programs with 21 persons with disabilities and women MSME actors in the tourism sector in Labuan Bajo. **Benefits to the Community:** Expanding the market for MSMEs domestically (onboarding to various commercial platforms), expanding export markets through export consolidation Programs, increasing production capacity, providing certification assistance, and product packaging training. **Benefits to the Company:** Expansion of the market share of IFG subsidiaries engaged in KUR and insurance related to micro and small businesses/enterprises.
	Total	**2.550.000.000**	**2.229.859.141**	**87,45%**	

IFG memiliki anggaran tahun 2024 untuk Program CSV sebesar Rp2,55 miliar yang dialokasikan kepada Program IFG Goes to Campus, Kindness to Progress, dan Korporatisasi UMKM dan diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp1,81 miliar atau 71,06% dari anggaran.

IFG has a 2024 budget of IDR2.55 billion for CSV Programs, which is allocated to the IFG Goes to Campus, Kindness to Progress, and MSME Corporatization Programs and is projected to be realized at IDR1.81 billion or 71.06% of the budget.

Program Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebanyak 12 (dua belas) Program TJSL Kolaborasi BUMN telah dilaksanakan dan/atau masih berjalan hingga Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Corporate Social and Environmental Responsibility Collaboration Program

A total of 12 (twelve) TJSL Collaboration Programs have been implemented and/or were still ongoing as of December 2024, with the following details:

Tabel Realisasi Program Kolaborasi TJSL BUMN Tahun 2024
Table of SOEs' TJSL Collaboration Program Realization in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	Program Program	Realisasi Tahun 2024 (Rp) 2024 Realization (IDR)	Kolaborator Collaborator	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bidang Pendidikan Education				
1	TJSL Labuan Bajo Marathon 2023 Tahap II TJSL Labuan Bajo Marathon 2023 Phase II	128.750.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; Jasa Raharja; dan IFG Life.	Bantuan lanjutan sebagai bagian dari rangkaian Festival Budaya Manggarai, di mana IFG menyerahkan 50 buah ensiklopedia manggarai (tahap II sebanyak 25 buah) Further assistance as part of the Manggarai Cultural Festival, during which IFG handed over 50 Manggarai encyclopedias (25 in phase II)
2	Literasi Asuransi kepada di Universitas Jenderal Soedirman Insurance Literacy to Jenderal Soedirman University	166.000.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; dan Jasa Raharja.	Literasi Asuransi kepada 300 mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman Insurance Literacy to 300 students in Jenderal Soedirman University
3	IFG Goes to Campus 2024	408.000.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; dan Jasa Raharja.	IFG Goes to Campus "Start Early, Reap the Rewards Later" di Universitas Katolik Parahyangan kepada 412 mahasiswa calon wirausahawan IFG Goes to Campus "Start Early, Reap the Rewards Later" Program at Parahyangan Catholic University to 412 aspiring student entrepreneurs
4	Investasi Cerdas Menjelang Usia Emas Smart Investments for the Golden Age	249.975.000	Bahana TCW Investment Management; dan Bahana Sekuritas	Seminar dan *talkshow* yang memberikan literasi keuangan khususnya investasi untuk masa purna kepada 250 karyawan IFG Group yang sebagian besar berada pada *age bracket* > 45 tahun dan memerlukan persiapan menghadapi *retirement*, sekaligus memperkenalkan produk-produk Bahana TCW Investment Management dan Bahana Sekuritas kepada karyawan IFG Group A seminar and talk show providing financial literacy, particularly on investment, for 250 IFG Group employees, most of whom are aged over 45 and need to prepare for retirement, while also introducing Bahana TCW Investment Management and Bahana Sekuritas products to IFG Group employees.
Bidang Lingkungan Environmental				
5	Mudik Asyik Bersama IFG Group Fun Homecoming with IFG Group	830.000.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; Jasa Raharja; IFG Life; BTIM; BS; BKI; BAV; dan GNTU.	IFG dan Anggota *Holding* bersama-sama melaksanakan mudik gratis bagi 1.873 pemudik ke 9 kota tujuan menggunakan 40 armada bus. IFG and its subsidiaries jointly organized a free homecoming trip for 1,873 travelers to nine destinations utilizing 40 buses.
6	Renovasi Fasilitas Sanitasi di Rindam Jaya, Condet Renovation of sanitation facilities at Rindam Jaya, Condet	140.409.520	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasa Raharja	Renovasi fasilitas sanitasi gedung asrama dan gedung kelas di Rindam Jaya, Condet Renovation of sanitation facilities in dormitory buildings and classroom buildings at Rindam Jaya, Condet

Tabel Realisasi Program Kolaborasi TJSL BUMN Tahun 2024
Table of SOEs' TJSL Collaboration Program Realization in 2024

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

No	Program Program	Realisasi Tahun 2024 (Rp) 2024 Realization (IDR)	Kolaborator Collaborator	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Renovasi Gedung Satma dan Satbek Lanal Bandung Renovation of Headquarter Unit and Supply Unit buildings of Bandung Naval Base	91.055.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; Jasa Raharja.	Bantuan renovasi prasarana Lanal Bandung berupa Gedung Serbaguna yang sudah terbengkalai untuk dimanfaatkan sebagai pembinaan kewilayahan TNI AL Bandung Assistance in renovating Bandung Naval Base's infrastructure in the form of a Multipurpose Building that has been abandoned to be utilized as a regional guidance for the Bandung Navy
8	Program "Tapak Rinjani ke-X 2024" "Tapak Rinjani ke-X 2024" Program	48.750.000	Jamkrindo; Askrindo; Jasindo; Jasa Raharja; dan IFG Life.	Kolaborasi dalam Program Tapak Rinjani yang diinisiasikan oleh IFG Life, di mana IFG berkontribusi melalui penanaman bibit pohon (100 bibit Ara & 100 bibit beringin) di Rinjani Collaboration in the Tapak Rinjani Program initiated by IFG Life, where IFG contributed through planting tree seedlings (100 Fig seedlings & 100 Banyan seedlings) in Rinjani
Bidang Pengembangan UMK MSE Development				
9	Kolaborasi Pembangunan UMKM Center Lampung Collaboration in the Construction of the Lampung MSME Center	100.000.000	12 BUMN	Pembangunan 1 (satu) unit UMKM Center Lampung di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung Construction of 1 (one) Lampung UMKM Center unit at the Way Halim Bandar Lampung Sports Activity Center (PKOR)
10	Kindness to Progress 2024	137,700,000	IFG Group	1. Pengelolaan Sampah Organik Pada Warga Desa 2. Revitalisasi Peternakan Ayam Petelur Pada Karang Taruna 3. Revitalisasi Perpustakaan dan Peningkatan Skill Pada Anak Binaan SOS 4. Edukasi Manajemen Keuangan kepada kelompok Perempuan Kepala Keluarga Program ini memberikan manfaat kepada sebanyak 155 penerima manfaat langsung dan 1356 penerima manfaat tidak langsung di Desa Lembang 1. Organic Waste Management for Villagers 2. Revitalization of layer poultry farming in Community Youth Development. 3. Library Revitalization and Skill Improvement for SOS Fostered Children 4. Financial Management Education for Women-Headed Households This Program benefits 155 direct beneficiaries and 1,356 indirect beneficiaries in Lembang Village.
11	Inklusif dan Berdaya Bersama Pelaku UMKM Bidang Pariwisata Disabilitas dan Wanita di Labuan Bajo An Inclusive and Empowering for Women and Persons with Disabilities in Tourism MSMEs in Labuan Bajo	315.459.000	Bahana Kapital Investa; Bahana Artha Ventura; Jamkrindo; dan Askrindo	Pelaksanaan pelatihan *offline* dan *online* kepada 21 UMKM bidang pariwisata yang merupakan penyandang disabilitas dan/atau wanita, terkait digitalisasi usaha, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Pelatihan selama 3 bulan ini turut didukung oleh komunitas disabilitas dan srikandi IFG di bawah departemen budaya Perusahaan, yang menyeleksi 5 orang karyawan sebagai narasumber pelatihan dan co-fasilitator. Offline and online training for 21 tourism-related MSMEs owned by people with disabilities and/or women, focusing on business digitalization, marketing, and financial management. The three-month training was supported by the disability community and IFG's female employees under the company's culture department, which selected five employees as training speakers and co-facilitators.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non CID

IFG melaksanakan Program TJSL non-PUMK di luar unit CID dengan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dalam laporan Perusahaan tahun 2024. Hingga Desember 2024, Program TJSL non-PUMK non-CID meliputi:

Non-CID Corporate Social and Environmental Responsibility Program

IFG implemented TJSL non-MSEs Funding Programs outside the CID unit with a budget calculated as an expense in the 2024 company report. Until December 2024, non-CID TJSL Programs include:

Tabel Realisasi Program TJSL Non CID Tahun 2024
Table of Realization of TJSL Non CID Program in 2024

Realisasi Tahun 2024 Realization in 2024			
No.	**Kegiatan** Activities	**Divisi/Departemen** Division/Department	**Jumlah (Rupiah Penuh)** Total (In Full Rupiah)
1	Implementasi Pemenuhan *Gap* UU Perlindungan Implementation of the Personal Data Protection Law Gap	Manajemen Risiko Risk Management	375.070.500
2	Implementasi *Roadmap* Kepatuhan Implementation of Compliance Roadmap	Manajemen Risiko Risk Management	185.000.000
3	*Sharing Knowledge* Kepatuhan Compliance Knowledge Sharing	Manajemen Risiko Risk Management	12.790.370
4	Peningkatan Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan di Lingkungan IFG Group Enhanced Risk Awareness and Compliance Culture within IFG Group	Manajemen Risiko Risk Management	333.000.000
5	Melaksanakan *Maintenance* Sertifikasi ISO SMAP Conducting ISO SMAP Certification Maintenance	Manajemen Risiko Risk Management	215.000.000
6	*Campus Visit*/Literasi Asuransi Campus Visit/Insurance Literacy	IFG Progress	301.207.238
7	*Kindness to Progress (Live in dan Design Thinking)* Kindness to Progress (Live in and Design Thinking)	Pembelaran dan Budaya Perusahaan Learning and Corporate Culture	337.202.903
8	Program Sosial Kemasyarakatan melalui Internalisasi Budaya Perusahaan Selama Periode Ramadhan dan Natal Social Community Program through Internalization of Corporate Culture during Ramadan and Christmas	Pembelaran dan Budaya Perusahaan Learning and Corporate Culture	470.000.000
9	Biaya Suntik Vitamin dan *Booster* Karyawan IFG Cost of Vitamin Injections and Boosters for IFG Employees	SDM Human Resources	529.590.413
10	Pengadaan Kendaraan Operasional Rendah Emisi - non CID Procurement of Low Emission Operational Vehicles - non CID	Pengadaan dan Pengelolaan Aset (Umum) Procurement and Asset Management (General)	237.000.000

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL (PUMK)

MICRO & SMALL ENTERPRISES FUNDING PROGRAM (PUMK)

Program PUMK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMK agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Pelaksanaan Program PUMK diharapkan dapat:

1. memperluas kesempatan UMK dalam mengakses penyediaan kredit atau permodalan usaha;
2. mendukung pengembangan UMK di Indonesia; dan
3. memperkuat struktur keuangan UMK untuk memaksimalkan kontribusi UMK dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sesuai dengan surat arahan dari Menteri BUMN nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 ("S-721") perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana disebutkan bahwa Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas sebagai pengelola kerja sama Program PUMK kecuali jika terdapat arahan baru dari Kementerian BUMN. Pada 12 Desember 2024, IFG dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") telah menandatangani Akta Pengalihan Program Pendanaan UMK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di hadapan notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., sesuai dengan persetujuan dari RUPS yang tertuang dalam surat Menteri BUMN nomor S-628/MBU/12/2024 perihal Persetujuan Penerimaan atas Pengalihan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tanggal 9 Desember 2024, dengan rincian akta pengalihan sebagai berikut:

1. Akta Pengalihan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 6 tanggal 12 Desember 2024;
2. Akta Pengalihan Piutang Atas Nama (cessie) Nomor 7 tanggal 12 Desember 2024;
3. Akta Hibah atas Dana Tunai Nomor 8 tanggal 12 Desember 2024;

yang menyepakati pengalihan dana tunai sebesar Rp23,04 miliar dan piutang pinjaman mitra binaan sebesar Rp7,93 miliar. Terdapat tambahan pengalihan dana tunai dari Jiwasraya pada tanggal 8 Januari 2025 yang berasal dari pendapatan jasa giro rekening Program PUMK Jiwasraya setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar Rp15,43 juta. Seluruh obyek pengalihan Program PUMK dari Jiwasraya didokumentasikan pada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

The MSE's Funding Program aims to improve the ability of MSEs to become resilient and independent through the use of SOE funds. The implementation of the MSE's Funding Program is expected to:

1. expand opportunities for MSEs to access the provision of credit or business capital;
2. support the development of MSEs in Indonesia; and
3. strengthen the financial structure of MSEs to maximize their contribution to Indonesia's economic growth.

In accordance with the directive letter from the Minister of State-Owned Enterprises number S721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 ("S-721") concerning Cooperation in Micro and Small Enterprises Funding Programs, as stated that the Minister of State-Owned Enterprises recommends PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) to state-owned enterprises and companies with minority state ownership as the manager of the PUMK Program cooperation, unless there are new directives from the Ministry of State-Owned Enterprises. On December 12, 2024, IFG and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") signed a Deed of Transfer of the Micro and Small Enterprises Funding Program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in the presence of notary Shahreza Annaz, S.H., M.Kn.. In accordance with the approval of the General Meeting of Shareholders as stated in the Minister of State-Owned Enterprises' Letter No. S-628/MBU/12/2024 concerning Approval of the Acceptance of the Transfer of the Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding Program from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dated December 9, 2024, with the details of the transfer deed as follows:

1. Deed of Transfer of Micro and Small Enterprises Funding Program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Number 6 dated December 12, 2024;
2. Cessie Deed Number 7 dated December 12, 2024; and
3. Gift Deed for Cash Number 8 dated December 12, 2024.

which agreed to transfer cash funds of IDR23.04 billion and receivables from loans to partner companies of IDR7.93 billion. There was an additional cash transfer from Jiwasraya on January 8, 2025, originating from the interest income of the Jiwasraya PUMK Program, after deducting bank administrative fees of IDR15.43 million. All objects of the PUMK Program transfer from Jiwasraya are documented in the Handover Minutes (BAST) document.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL AUDIT TAHUN 2024

FINANCIAL STATEMENT FOR MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES FUNDING PROGRAM AUDIT IN 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pelaksanaan Program PUMK memberikan manfaat nyata dalam mendorong kemandirian pelaku UMK. Sepanjang tahun 2024, IFG berhasil menyalurkan dana PUMK yang menjangkau 41 mitra binaan di sektor perdagangan, jasa, industri, hingga peternakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). IFG tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana usaha, menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui Program Pengembangan UMK.

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi jumlah aset lancar Program PUMK yang terdiri dari kas pada bank serta piutang pinjaman mitra binaan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7,9 miliar, sehingga total aset lancar adalah sebesar Rp23,11 miliar.

Pencapaian tersebut signifikan peningkatannya dibandingkan dengan RKA Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp25,39 juta dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perbedaaan yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh penerimaan pengalihan dana Program PUMK dan piutang mitra binaan dari Jiwasraya pada Desember 2024, sebagaimana arahan terkait pengalihan Program PUMK Jiwasraya tersebut baru diterima IFG pada bulan Juli 2024, sehingga belum teranggarkan pada RKA Tahun 2024.

Realisasi jumlah aset tidak lancar Program PUMK adalah sebesar Rp2,73 miliar yang terdiri Piutang Kerja Sama PUMK kepada BRI (sejak tahun 2022) beserta akrual piutang jasa administrasinya dan piutang bermasalah yang telah dicadangkan sebanyak 100%. Secara terperinci dapat kami sampaikan pada tabel berikut:

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The implementation of the PUMK Program provides tangible benefits in encouraging the independence of MSE actors. Throughout 2024, IFG successfully distributed PUMK funds to 41 partners in the trade, services, industry, and livestock sectors in DKI Jakarta and West Java in collaboration with Bank Rakyat Indonesia (BRI). IFG not only expanded access to financing but also supported the sustainability of small businesses/enterprises through training, mentoring, and the provision of business facilities, creating sustainable social and economic impacts through the SME Development Program.

As of December 31, 2024, the realized amount of current assets under the PUMK Program, consisting of cash in banks and loan receivables from supported partners after deducting provisions for impairment losses of IDR7.9 billion, resulted in total current assets of IDR23.11 billion.

This achievement represents a significant increase compared to the 2024 Work Plan and Budget (RKA) of only IDR25.39 million and compared to the previous year's realization. The significant difference is due to the receipt of transferred funds from the PUMK Program and receivables from partner institutions from Jiwasraya in December 2024. The relevant instructions regarding the transfer of the Jiwasraya PUMK Program were only received by IFG in July 2024, and therefore were not included in the 2024 RKA.

The realization of non-current assets under the PUMK Program amounted to IDR2.73 billion, consisting of receivables from UMK Funding Program in collaboration with BRI (since 2022) along with accrued administrative service receivables and problematic receivables that have been fully provisioned at 100%. The detailed information is presented in the following table:

Tabel Laporan Posisi Keuangan Program PUMK
Table of Statement of Financial Position for PUMK Programs

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

Uraian Description	**RKA 2024 (Rp)** 2024 Work Plan and Budget (IDR)	***Audited* 2023 (Rp)** Audited 2023 (IDR)	***Audited* 2024 (Rp)** Audited 2024 (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(4:2)**	**(6)=(4:3)**
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	7.674.958	56.333.384	23.065.238.210	300525%	40944%
Kas di Bank Cash in Bank	7.674.958	56.333.384	23.065.238.210	300525%	4094%
Piutang Mitra Binaan – bersih Fostered Partners Receivables - net	17.720.941	418.504.803	17.720.924	100,00%	4,23%
Piutang Mitra Binaan JS – bersih (dikurangi penyisihan 31 Des 24 sebesar Rp7.909.817.902) JS Fostered Partners Receivables - net (deducted by allowance of IDR7,909,817,902 as of December 31, 2024)	-	-	24.545.250	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**25.395.899**	**474.838.187**	**23.107.504.384**	**90989%**	**4866%**
Aset Tidak Lancar Non-current Assets					
Piutang Bermasalah (dikurangi penyisihan 31 Des '24 dan '23 sebesar Rp179.336.707) Outstanding Receivables (Deducted by allowance amounting to IDR179,336,707 as of December 31, 2024 and 2023)	-	-	-	0,000%	100,00%
Piutang Kerjasama PUMK kpd BRI Receivables from UMK Funding Program in collaboration with BRI.	2.750.000.000	1.258.826.242	1.356.888.665	49,34%	107,79%
Piutang Kerjasama PUMK kpd MB (dikurangi penyisihan per 31 Des '24 sebesar Rp54.686.366) Receivables from MSME Funding Cooperation with MB (Deducted by allowance amounting to IDR54,686,366 as of December 31, 2024)	-	1.044.180.732	1.376.214.458	0,00%	131,80%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**2.750.000.000**	**2.303.006.974**	**2.733.103.123**	**99,39%**	**118,68%**
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	**2.775.395.899**	**2.777.845.161**	**25.840.607.507**	**931,06%**	**930,24%**
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH LIABILITIES AND ASSETS NET					
Kewajiban Lancar Current Liabilities					
Hutang kepada BAV Payable to BAV	10.499.997	10.499.997	10.499.997	100,00%	100,00%

Tabel Laporan Posisi Keuangan Program PUMK
Table of Statement of Financial Position for PUMK Programs

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

Uraian Description	**RKA 2024 (Rp)** 2024 Work Plan and Budget (IDR)	***Audited* 2023 (Rp)** Audited 2023 (IDR)	***Audited* 2024 (Rp)** Audited 2024 (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(4:2)**	**(6)=(4:3)**
Jumlah Kewajiban Total Liabilities	**10.499.997**	**10.499.997**	**10.499.997**	**100,00%**	**100,00%**
Aset Bersih Net Assets					
Tidak Terikat Unrestricted	2.764.895.902	2.767.345.165	25.830.107.510	934,22%	933,39%
Jumlah Aset Bersih Total Net Assets	**2.764.895.902**	**2.767.345.165**	**25.830.107.510**	**934,22%**	**933,39%**
Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih Total Liabilities and Net Assets	**2.775.395.899**	**2.777.845.162**	**25.840.607.507**	**931,06%**	**930,24%**

LAPORAN AKTIVITAS

Pada laporan aktivitas sampai dengan 31 Desember 2024, pendapatan sebesar Rp31,03 miliar, signifikan peningkatannya dibandingkan dengan RKA Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp2,46 juta dan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Tingginya realisasi nilai pendapatan tersebut dikontribusikan terutama dari penerimaan pengalihan dana tunai Program PUMK dari Jiwasraya sebesar Rp23,04 miliar, penerimaan pengalihan piutang mitra binaan Jiwasraya sebesar Rp7,93 miliar dan pengakuan akrual pendapatan jasa administrasi dari Program Pendanaan UMK Kerja Sama dengan BRI.

ACTIVITY REPORT

In the activity report up to December 31, 2024, revenue amounted to IDR31.03 billion, a significant increase compared to the 2024 RKA of only IDR2.46 million and compared to the previous year's realization. The high realization of revenue was primarily contributed by the receipt of cash transfers from the PUMK Program of Jiwasraya amounting to IDR23.04 billion, the receipt of transferred receivables from Jiwasraya's fostered partners amounting to IDR7.93 billion, and the recognition of accrued revenue from administrative services under the UMK Funding Program in collaboration with BRI.

Tabel Laporan Aktivitas Program PUMK
Table of Activity Report for PUMK Programs

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

Uraian Description	**RKA 2024 (Rp)** 2024 Work Plan and Budget (IDR)	**Audited 2023 (Rp)**	**Audited 2024 (Rp)**	**Capaian (%) Achievement (%)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(4:2)**	**(6)=(4:3)**
PENDAPATAN REVENUE					
Pendapatan Jasa Adm Administrative Service Income	351.611	5.880.520	35.134.126	9274,11%	554,52%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	2.113.619	5.485.867	21.176.891	1001,93%	386,03%
Pendapatan Dana PUMK Pengalihan JS PUMK Fund Income JS Transfer	- -	- -	23.041.137.827 7.934.363.152	- -	- -

Tabel Laporan Aktivitas Program PUMK
Table of Activity Report for PUMK Programs

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

Uraian Description	RKA 2024 (Rp) 2024 Work Plan and Budget (IDR)	Audited 2023 (Rp)	Audited 2024 (Rp)	Capaian (%) Achievement (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:2)	(6)=(4:3)
Pendapatan Lain-Lain Other Income					
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**2.465.229**	**11.366.387**	**31.031.811.996**	**1258677%**	**272991%**
BEBAN OPERASIONAL OPERATING EXPENSES					
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Mitra Binaan Jiwasraya Provision For Impairment Losses In Jiwasraya Partners	-	-	7.909.817.902	-	-
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Kerja Sama PUMK Kepada Mitra Binaan Provision For Impairment Losses for UMK Funding Program to Partners	-	-	54.686.366	-	-
Biaya Administrasi Bank Bank Administration Fees	422.724	1.527.180	4.545.383	1075,26%	297,63%
Jumlah Beban Total Expenses	**422.724**	**1.527.180**	**7.969.049.651**	**1885166%**	**521815%**
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tidak Terikat Increase (Decrease) in Unrestricted Net Assets	2.042.506	9.839.207	23.062.762.345	1129140%	234396%
Aset Bersih pada Awal Tahun Net Assets at the Beginning of the Year	2.762.853.397	2.757.505.957	2.767.345.165	100,16%	100,36%
Aset Bersih pada Akhir Tahun Net Assets at the End of the Year	2.764.895.902	2.767.345.165	25.830.107.510	934,22%	933,39%

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Tahun 2024 *Audited*
Source: PUMK IFG Audited Financial Statements in 2024

LAPORAN ARUS KAS

Sampai dengan 31 Desember tahun 2024, kas diterima adalah sebesar Rp23,46 miliar atau 40,54% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kas diterima tersebut terdiri atas penerimaan pengembalian pokok pinjaman, pendapatan jasa administrasi pendapatan jasa giro, dan pendapatan pengalihan dana PUMK Jiwasraya. Tahun 2024 IFG kembali melakukan penyaluran Program PUMK melalui BRI dengan nilai sebesar Rp450 juta atau 100,00% dibandingkan dengan RKA Tahun 2024 dan 45,05% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

STATEMENT OF CASH FLOWS

As of December 31, 2024, cash received amounted to IDR23.46 billion, or 40.54% of the previous year's realization. The cash received consists of principal loan repayments, administrative service income, interest income, and income from the transfer of PUMK Jiwasraya funds. In 2024, IFG once again disbursed the PUMK Program through BRI with a value of IDR450 million, or 100.00% compared to the 2024 RKA and 45.05% compared to the previous year's realization.

Tabel Laporan Arus Kas Program PUMK
Table of Cash Flows for PUMK Programs

(dalam Rupiah penuh)
(In full Rupiah)

Uraian Description	RKA 2024 2024 Work Plan and Budget	*Audited* 2023	*Audited* 2024	Capaian Achievement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:2)	(6)=(4:3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
KAS DITERIMA DARI: CASH RECEIVED FROM:					
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman Principal Repayment Receipt	400.783.879	986.216.206	400.783.879	100,00%	40,64%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Income from Loan Administration Services	351.611	1.873.546	351.612	100,00%	18,77%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	2.113.619	5.485.868	21.176.891	1001,93%	386,03%
Pendapatan Pengalihan Dana PUMK Jiwasraya Jiwasraya PUMK Fund Transfer Income	-	-	23.041.137.827	-	
Jumlah Kas diterima Total Cash received	**403.249.108**	**993.575.620**	**23.463.450.209**	**5818,60%**	**2361,52%**
KAS DIKELUARKAN UNTUK: CASH DISBURSED FOR:					
Penyaluran PUMK Kerja Sama BRI PUMK Distribution in Collaboration with BRI	(450.000.000)	(999.000.000)	(450.000.000)	100,00%	45,05%
Beban Operasi Operating Expenses	(422.724)	(1.527.180)	(4.545.383)	1075,26%	297,63%
Jumlah Kas Dikeluarkan Total Cash Disbursed	**(450.422.724)**	**(1.000.527.180)**	**(454.545.383)**	**100,92%**	**45,43%**
Arus Kas Bersih Diterima dari Aktivitas Operasi Net Cash Received from Operating Activities	(47.173.616)	(6.951.560)	23.008.904.826	-48774%	-330989%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	(47.173.616)	(6.951.560)	23.008.904.826	-48774%	-330989%
Kas dan Setara Kas – Awal Periode Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	54.848.574	63.284.944	56.333.384	102,71%	89,02%
Kas dan Setara Kas – Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at The End of Period	7.674.958	56.333.384	23.065.238.210	300525%	40944%

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Th 2024 Audited
Source: PUMK IFG Audited Financial Statements in 2024

Keberhasilan pengalihan Program PUMK dari Jiwasraya pada tahun 2024 menunjukkan komitmen IFG dalam menjalankan penugasan pemerintah khususnya terkait penyehatan keuangan Jiwasraya yang mana Program PUMK merupakan salah satu aset *off balance sheet* yang dialihkan kepada ekosistem IFG.

The successful transfer of the PUMK Program from Jiwasraya in 2024 demonstrates IFG's commitment to carrying out government assignments, particularly those related to the financial restructuring of Jiwasraya, in which the PUMK Program is one of the off-balance sheet assets transferred to the IFG ecosystem.





8

Laporan
Keuangan
Financial Report

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023

Daftar Isi | **Halaman/ *Page*** | ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan		***Additional Information***
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	*Statements of Financial Position (Parent Entity)*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)*
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	*Statements of Changes in Equity (Parent Entity)*
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	*Statements of Cash Flows (Parent Entity)*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hexana Tri Sasongko
   Alamat kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190

   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heru Handayanto
   Alamat kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190

   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO)

We, the undersigned:

1. *Name* : *Hexana Tri Sasongko*
   Office address : *Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190*

   Position : *President Director*

2. *Name* : *Heru Handayanto*
   Office address : *Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190*

   Position : *Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries;*

2. *The consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries have been completely and correctly disclosed;*

   b. The consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, nor do they omit any information or facts that would be material;

4. *We are responsible for the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 April/*April* 2025
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Hexana Tri Sasongko Direktur Utama / *President Director*	Heru Handayanto Direktur Keuangan / *Finance Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00698/2.1030/AU.1/09/0645-1/1/IV/2025

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab Auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Valuasi liabilitas kontrak asuransi dan aset reasuransi

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.ab (Informasi kebijakan akuntansi material – Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak asuransi) dan Catatan 27 (Liabilitas kontrak asuransi), atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah liabilitas kontrak asuransi adalah sebesar Rp59.406.746 juta yang mewakili 62% dari jumlah liabilitas, dan jumlah aset reasuransi adalah sebesar Rp7.952.374 juta yang mewakili 6% dari jumlah aset.

   Kami berfokus pada area ini karena penilaian atas kewajiban kontrak asuransi dan aset reasuransi melibatkan pertimbangan manajemen yang bergantung pada estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan melibatkan penilaian yang kompleks terhadap kejadian yang akan datang, dimana adanya perubahan terhadap asumsi dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian atas kewajiban tersebut. Manajemen dibantu oleh pakar-pakar aktuaria untuk melakukan perhitungan liabilitas kontrak asuransi dan aset reasuransi.

   Terdapat ketidakpastian yang timbul dari asumsi-asumsi utama aktuaria yang digunakan untuk menghitung liabilitas kontrak asuransi dan aset reasuransi, meliputi rasio kerugian dan tingkat diskonto untuk portofolio asuransi umum, serta tingkat diskonto, tingkat mortalitas, *lapse rate*, dan asumsi biaya untuk portofolio asuransi jiwa seperti yang dijelaskan dalam Catatan 53 (Risiko asuransi dan penjaminan keuangan) atas laporan keuangan konsolidasian. Asumsi-asumsi ini dengan mempertimbangkan pengalaman historis masing-masing portofolio dengan penyesuaian yang dibuat untuk mencerminkan faktor-faktor perkiraan masa

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

1. *Valuation of insurance contract liabilities and reinsurance assets*

   As described in Note 2.ab (Material accounting policy information – Revenue and expense recognition of insurance contract liabilities) and Note 27 (Insurance contract liabilities) to the consolidated financial statements as of December 31, 2024, insurance contract liabilities was Rp59,406,746 million which represented 62% of total liabilities, and reinsurance assets was Rp7,952,374 million which represented 6% of total assets.

   We focused on this area as the valuation of the insurance contract liabilities and reinsurance assets involves management judgement, is subject to a high degree of estimation and involves a complex valuation of future events, where a change in assumptions could have material impact to the valuation of the obligation. Management was assisted by actuarial experts in its calculation of the insurance contract liabilities and reinsurance assets.

   There is uncertainty arising from the key actuarial assumptions used to calculate insurance contract liabilities and reinsurance assets, including the loss ratio and discount rate for the general insurance portfolio, and the discount rate, mortality rate, lapse rate and the expense assumption for the life insurance portfolio as described in Note 53 (Insurance and financial guarantee risk) to the consolidated financial statements. These assumptions are determined considering historical experience of each portfolio with adjustments made to reflect forward looking factors. For products with insufficient historical experience,

depan. Untuk produk-produk yang tidak memiliki pengalaman historis mencukupi, asumsi-asumsi dihasilkan berdasarkan referensi dari produk-produk serupa dengan risiko serupa yang dijual oleh Grup.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar-pakar aktuaris yang membantu manajemen untuk melakukan perhitungan atas liabilitas kontrak asuransi;

- Dengan bantuan pakar-pakar aktuaris kami, kami:
  - Memahami dan menilai metodologi dan perhitungan yang digunakan untuk menghitung liabilitas kontrak asuransi (mencakup cadangan premi dan estimasi klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan) dan aset reasuransi;
  - Menilai asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam model arus kas terdiskonto untuk menentukan cadangan premi, khususnya tingkat diskonto, rasio kerugian, tingkat mortalitas, tingkat pembatalan polis, dan asumsi biaya atas portofolio profil dibandingkan dengan data aktual terkini;
  - Melakukan perhitungan ulang atas liabilitas kontrak asuransi (cadangan premi) dengan menggunakan metode *Gross Premium Valuation* ("GPV") berdasarkan PSAK 104 - Kontrak Asuransi ("PSAK 104") secara bruto dan neto, dengan menggunakan data aktual terkini;
  - Melakukan perhitungan ulang atas estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") secara bruto dan neto sesuai dengan PSAK 104;
  - Menguji kecukupan liabilitas kontrak asuransi dengan melakukan Tes Kecukupan Liabilitas ("LAT") berdasarkan PSAK 104, dengan menggunakan nilai kini atas estimasi arus kas masa depan kontrak-kontrak asuransi;

assumptions are derived based on reference to the Group's similar products that have similar risks.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the actuarial experts who assisted management in the calculation of the insurance contract liabilities;*

- *With the assistance from our actuarial experts, we:*
  - *We obtained understanding and assessed the methodology and calculation used to calculate the insurance contract liabilities (consisting of the premium reserves and incurred but not reported claim reserves) and reinsurance assets;*
  - *Assessed the key assumptions used in the discounted cash flow model to determine premium reserves, particularly discount rates, loss ratios, mortality rates, policy cancellation rates, and cost assumptions for the profile portfolio compared to recent actual data;*
  - *Recalculated the insurance contract liabilities (premium reserve) using the Gross Premium Valuation ("GPV") method in accordance with SFAS 104 - Insurance Contract ("SFAS 104") on the gross and net basis, using recent actual data;*
  - *Recalculated the incurred but not reported ("IBNR") claim reserves on a gross and net basis according to SFAS 104;*
  - *Assessed the adequacy of the insurance contracts liabilities by performing an independent Liability Adequacy Test ("LAT") based on SFAS 104, using the present value of estimated future cash flows of insurance contracts;*

- Kami melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung liabilitas kontrak asuransi dengan data aktual yang tersedia di Grup;

- Kami melakukan pengujian untuk menentukan apakah sudah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai aset reasuransi; dan

- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait liabilitas kontrak asuransi dan aset reasuransi dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Valuasi liabilitas kontrak jaminan keuangan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 29, Liabilitas kontrak jaminan keuangan, atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan adalah sebesar Rp14.939.747 juta, yang mewakili 16% dari jumlah liabilitas.

Kami berfokus pada area ini karena valuasi atas liabilitas kontrak jaminan keuangan melibatkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan melibatkan penilaian yang kompleks dan subjektif terhadap kejadian yang akan datang, dimana adanya perubahan asumsi dapat memberikan dampak yang material terhadap kewajiban tersebut. Manajemen dibantu oleh pakar-pakar aktuaris dan pakar pemodelan kredit untuk melakukan perhitungan utang tersebut.

Terdapat ketidakpastian yang timbul dari berbagai asumsi-asumsi utama aktuaria yang digunakan, termasuk *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), dan *Exposure At Default* ("EAD"), dalam menentukan liabilitas kontrak jaminan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.ac (Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak jaminan keuangan) atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar-pakar aktuaris dan pakar pemodelan kredit yang membantu manajemen untuk melakukan perhitungan atas liabilitas kontrak jaminan keuangan;

- *We checked the completeness and accuracy of the data used to calculate the insurance contract liabilities with the Group's actual data;*

- *We conducted tests to determine if there were any objective evidences for impairment of reinsurance assets; and*

- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the insurance contract liabilities and reinsurance assets in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

2. *Valuation of liabilities for financial guarantee contracts*

As described in Note 29 (Liabilities for financial guarantees contracts) to the consolidated financial statements, liabilities for financial guarantee contracts was Rp14,939,747 million which represented 16% of total liabilities,as of December 31, 2024.

We focused on this area as the valuation of the liabilities of financial guarantee contracts involves subjective management judgement, is subject to a high degree of estimation and involves a complex and subjective valuation of future events, where a change in assumptions could have material impact to the obligation. Management was assisted by actuarial experts and credit modelling experts in its calculation of the obligation.

There is uncertainty arising from various key actuarial assumptions used, including the Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Exposure At Default ("EAD"), in determining the liabilities for financial guarantee contracts, as described in Notes 2.ac (Revenue and expense recognition of financial guarantee contract liabilities) to the consolidated financial statements.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the actuarial experts and credit modelling experts who assisted management in the calculation of the liabilities for financial guarantee contracts;*

- Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan untuk menentukan liabilitas kontrak jaminan keuangan (perhitungan kuantitatif bruto dan neto) dengan bantuan pakar pemodelan kredit kami. Kami menguji PD, LGD, EAD, yang mencakup (i) membandingkan prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di Grup;

- Kami menghitung ulang *PD, LGD*, dan liabilitas kontrak jaminan keuangan dengan bantuan spesialis kami; dan

- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait nilai liabilitas kontrak jaminan keuangan dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9 (Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih), Catatan 10 (Piutang imbal jasa penjaminan - bersih), dan Catatan 11 (Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih) atas laporan keuangan konsolidasian, cadangan kerugian penurunan nilai piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi masing-masing berjumlah sebesar Rp2.301.734 juta, Rp2.364.631 juta dan Rp3.541.919 juta pada 31 Desember 2024.

   Cadangan kerugian penurunan nilai piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi ditentukan berdasarkan PSAK 109 - Instrumen Keuangan ("PSAK 109"), seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.g.vii, Instrumen keuangan - Penurunan nilai aset keuangan atas laporan keuangan konsolidasian.

   Manajemen menghitung cadangan kerugian penurunan nilai untuk semua piutang. Untuk piutang yang tidak dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung cadangan

- *We obtained understanding and assessed the methodology and significant modelling assumptions used in determining the liabilities for financial guarantee contracts (the gross and net quantitative calculations) with assistance from our credit modelling expert. We tested the PD, LGD, EAD, which included (i) comparing forecasts of Indonesia macroeconomics with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the Group's actual data;*

- *We recalculated the PD, LGD and liabilities for financial guarantee contracts with assistance from our specialists; and*

- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the liabilities for financial guarantees contracts in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

3. *Allowance for impairment losses of insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables*

   As described in Note 9 (Insurance and reinsurance premium receivables – net), Note 10 (Guarantee fee receivables – net) and Note 11 (Reinsurance and retrocession claim receivables – net) to the consolidated financial statements, the allowance for impairment losses on insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables were Rp2,301,734 million, Rp2,364,631 million and Rp3,541,919 million, respectively as of December 31, 2024.

   The allowances for impairment losses for insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables were determined based on SFAS 109 – Financial Instruments ("SFAS 109"), as described in Notes 2.g.vii (Financial instruments – Impairment of financial assets) to the consolidated financial statements.

   Management calculates allowances for impairment losses for all receivables. For receivables that were not considered individually significant, management calculated the allowance for

kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko yang memasukkan parameter utama, yaitu *PD*, *LGD*, dan *EAD*, setelah mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan dan data eksternal lainnya. Untuk piutang yang dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan memperkirakan arus kas yang diharapkan akan diperoleh dari piutang tersebut.

Kami berfokus pada area ini karena saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi mewakili 93% dari jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Lebih lanjut, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam menentukan model cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk penentuan PD dan LGD, yang diterapkan sebagaimana diharuskan oleh PSAK 109 – Instrumen Keuangan ("PSAK 109"), dengan: (i) menilai model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat PD dan LGD serta bobot probabilitas tertimbangnya;

- Kami menguji input utama yang digunakan dalam menentukan *PD*, *LGD*, dan *EAD* untuk penilaian kolektif melalui pengecekan berdasarkan sampel, basis data terhadap data historis, data pada tanggal 31 Desember 2024 dan dokumen pendukung;

- Kami menilai keakuratan cadangan kerugian penurunan nilai baik dengan pendekatan individu maupun kolektif dengan melakukan perhitungan ulang terhadap cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi; dan

impairment losses collectively using a risk parameter model that incorporated key parameters including PD, LGD, and EAD, after considering forward-looking information and other external data. For receivables that were considered individually significant, management calculated the allowance for impairment losses on an individual basis by estimating the expected cash flows to be obtained from the receivables.

We focused on this area because the balance of allowance for impairment losses on insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables represents 93% of the total allowance for impairment losses for all financial assets and is significant to the consolidated financial statements. Furthermore, determining allowance for impairment losses involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We obtained understanding on the methodology and significant modelling assumptions used in determining the allowance for impairment losses model, including the determination of PD and LGD, that were applied as required by SFAS 109 – Financial Instrument ("PSAK 109"), by: (i) assessing the model and methodology used in quantitative calculations; and (ii) testing the completeness and accuracy of the data used as the basis for determining PD and LGD levels and the probability weightings;*

- *We tested key data inputs used to determine the PD, LGD, and EAD for the collective assessments by checking, on a sample basis, the underlying data against historical data, data as of December 31, 2024 and supporting documents;*

- *We assessed the accuracy of the allowance for impairment losses for both the individual and collective assessments by recalculating the allowance for impairment losses of insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables; and*

- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, serta piutang klaim reasuransi dan retrosesi dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

4. Eliminasi intra-grup atas aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.d (Informasi kebijakan akuntansi material - Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas), atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024.

   Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 1 (Informasi Umum) atas laporan keuangan konsolidasian, Grup beroperasi di industri jasa keuangan, investasi, penjaminan keuangan, asuransi dan reasuransi. Melalui aktivitas Grup, terdapat transaksi-transaksi intra-grup di antara entitas-entitas asuransi, entitas penjaminan keuangan dan entitas reasuransi yang berkaitan pada aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi yang harus dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

   Kami berfokus pada area ini karena eliminasi intra-grup atas aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi merupakan area yang signifikan dalam audit kami terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagaimana terdapat perhitungan yang kompleks untuk menilai peristiwa di masa depan yang melibatkan pertimbangan manajemen yang bergantung pada tingkat estimasi yang tinggi.

   Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

   - Kami memperoleh pemahaman tentang proses Grup untuk mengeliminasi intra-grup aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi, termasuk metodologi untuk alokasian cadangan teknis dari entitas reasuransi;
   - Kami melakukan pengujian transaksi-transaksi dan saldo-saldo intra-grup untuk menilai apakah transaksi-transaksi dan saldo-saldo tersebut telah dieliminasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup dan standar akuntansi yang berlaku;

- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the allowance for impairment losses of insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

4. *Intra-group elimination of reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities*

   As described in Note 2.d (Material accounting policy information – Principles of consolidation and equity accounting) to the consolidated financial statements as of December 31, 2024.

   As described in Note 1 (General Information) of the consolidated financial statements, the Group operates in the financial services, investments, financial guarantees, insurance and reinsurance industries. Through the Group's activities, there are intra-group transactions amongst the insurance, financial guarantee entity and reinsurance entities relating to the reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities that are required to be eliminated in the consolidated financial statements.

   We focused on this area as the elimination of intra-group reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities is a significant area to our audit of the consolidated financial statements as there are complex calculations to value future events that involve management judgement which are subject to a high degree of estimation.

   We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

   - *We obtained understanding of the Group's process for eliminating intra-group reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities, including the methodology used for the allocation of technical reserves from the reinsurance entity;*
   - *We tested the elimination of intra-group transactions and balances to assess whether they were eliminated in accordance with Group's accounting policies and applicable accounting standards;*

- Kami menilai metodologi yang digunakan oleh manajemen dalam menghitung saldo eliminasi pada tingkat kontrak asuransi untuk menentukan jumlah alokasian yang akan dieliminasi atas setiap lini bisnis ("LoB") produk asuransi;

- Kami menilai penyesuaian yang dibuat oleh manajemen untuk mengeliminasi aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi antara entitas penjaminan keuangan dan entitas reasuransi dan menilai apakah hal tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku; dan

- Kami mendapatkan konfirmasi dan laporan rekonsiliasi dari masing-masing anak perusahaan dan menilai kelengkapan dari eliminasi transaksi-transaksi dan saldo-saldo intra-grup.

5. Pengakuan pendapatan premi asuransi bruto

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2.ab (Informasi kebijakan akuntansi material - Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak asuransi) dan Catatan 38 (Pendapatan premi asuransi - bersih), atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah pendapatan premi asuransi bruto adalah sebesar Rp23.699.755 juta.

Pendapatan premi asuransi bruto diakui pada saat tanggal pertanggungan dimulai dan sesuai dengan periode pertanggungan polis. Terdapat berbagai kendala administrasi yang umum terjadi atas ketepatan waktu untuk mendapatkan kelengkapan informasi pertanggungan polis tersebut, yang dapat mengakibatkan pendapatan premi asuransi bruto tercatat secara tidak tepat.

Kami berfokus pada area ini sebagai hal audit utama karena signifikansi dari pendapatan premi asuransi bruto atas laporan keuangan konsolidasian, risiko ketidaktepatan pengakuan pendapatan premi asuransi bruto dan serta upaya audit yang signifikan dalam area ini.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses Grup untuk mengakui pendapatan premi asuransi bruto, termasuk sistem, pengendalian, dan metodologi yang digunakan sesuai dengan PSAK 328 - Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian;

- *We assessed the methodology applied by management in calculating the elimination balance at the insurance contract level to determine the total allocation that should be eliminated for each insurance product Line of Business ("LoB");*

- *We assessed the adjustments made by management to eliminate asset reimbursements and liability insurance contracts between the financial guarantee entity and reinsurance entity and whether the adjustments were in accordance with applicable accounting standards; and*

- *We obtained confirmations and reconciliations report from each subsidiary in the Group to assess the completeness of the elimination of intra-group transactions and balances.*

5. *Gross insurance premium income recognition*

As described in Note 2.ab (Material accounting policy information – Revenue and expense recognition of insurance contract liabilities) and Note 38 (Insurance premium income – net) in the consolidated financial statements, the gross insurance premium income was Rp23,699,755 million as of December 31, 2024.

Gross insurance premium income is recognised at the coverage start date and in accordance with the policy's coverage period. There are various administrative challenges related to the timeliness of obtaining complete information on insurance policy coverage, which may result in gross insurance premium income being incorrectly recorded.

We focused on this area as a key audit matter due to the significance of gross insurance premium income to the consolidated financial statements, the risk of incorrect gross insurance premium recognition and the significant audit effort required in this area.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We obtained understanding on the Group's gross insurance premium income recognition process, including the systems, controls and methodologies used in accordance with SFAS 328 - Accounting for Loss Insurance;*

- Kami menilai desain dan implementasi pengendalian-pengendalian utama atas proses pengakuan pendapatan premi asuransi bruto;
- Kami menguji efektivitas pengendalian-pengendalian utama atas pengakuan pendapatan premi asuransi bruto, termasuk pengendalian atas *underwriting* polis, penerbitan polis, dan penerimaan pendapatan premi asuransi bruto;
- Kami menguji kontrak-kontrak asuransi berdasarkan sampel, untuk menilai bahwa pendapatan premi asuransi bruto telah diakui sesuai dengan periode risiko polis yang ditanggung dan kebijakan-kebijakan akuntansi Grup;
- Kami menguji pendapatan premi asuransi bruto yang diakui dengan membandingkan terhadap *Statement of Accounts* ("SOA") yang diterima selama tahun berjalan;
- Kami menguji kelengkapan data yang digunakan dalam pengakuan pendapatan premi asuransi bruto; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait pendapatan premi asuransi bruto dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

6. Penilaian investasi

Seperti dijelaskan dalam Catatan 7 (Investasi - bersih) atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah investasi Grup adalah sebesar Rp76.337.663 juta yang merupakan 58% dari jumlah aset konsolidasian.

Kami fokus pada penilaian atas investasi Grup yang merupakan bagian substansial dari jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses Grup dalam memutuskan penempatan investasi yang meliputi metode pengukuran, pengendalian, dan kebijakan investasi; melakukan penilaian atas investasi; dan menentukan indikasi penurunan nilai investasi, termasuk penerapan PSAK 109 - Instrumen Keuangan;

- *We assessed the design and implementation of the key controls over the gross insurance premium income recognition process;*
- *We tested the operating effectiveness of key controls over the recognition of gross insurance premium income, including controls over policy underwriting, policy issuance and the collection of gross insurance premium income;*
- *We tested insurance contracts, on a sample basis, to assess whether gross insurance premium income was recognised in accordance with the insured risk policies period and the Group's accounting policies;*
- *We tested the gross insurance premium income recognised against the Statement of Accounts ("SOA") received during the year;*
- *We tested the completeness of the data used for the recognition of the gross insurance premium income; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the gross insurance premium income in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

6. *Valuation of investments*

As described in Note 7 (Investments - net) to the consolidated financial statements as of December 31, 2024, the Group's investments amount to Rp76,337,663 million which represents 58% of the total consolidated assets.

We focus on the valuation of the Group's investments which constitute a substantial portion of the total consolidated assets as of December 31, 2024

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We obtained understanding on the Group's process in making investment placements decision which involving measurement method, controls, and investment policy; conducting valuation on investments; and determining impairment indicators on investments, including adoption of SFAS 109 - Financial Instruments;*

- Kami melakukan prosedur analitis atas investasi dengan melakukan analisis mutasi setiap bulan termasuk pengukuran nilai wajar investasi Grup;

- Secara sampel, kami melakukan pengujian rinci atas transaksi investasi Grup tahun 2024 termasuk verifikasi atas dokumen pendukung investasi;

- Secara sampel, kami memeriksa pendapatan investasi dan menguji perhitungan matematis ulang atas pendapatan hasil investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;

- Kami mereviu pengukuran Grup dalam menentukan penurunan nilai investasi baik yang dilakukan secara mandiri oleh Grup atau melalui pakar valuasi investasi independen ("KJPP") yang ditunjuk Grup; dan

- Kami, dengan bantuan dari pakar valuasi internal kami, mereviu metode dan asumsi penilaian yang digunakan oleh KJPP yang ditunjuk Grup.

Penekanan Suatu Hal
Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasiannya tanggal 1 Januari 2023 sebagai akibat dari kombinasi bisnis entitas sepengendali dan penyesuaian atas aset retrosesi, aset reasuransi beserta akun-akun yang relevan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain
Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporan No. 00542/2.1457/AU.1/09/0222-4/1/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebelum penyajian kembali yang didiskusikan pada paragraf Penekanan Suatu Hal.

- *We performed analytical procedures on investments by analyzing monthly movements including fair value measurement of Group's investments;*

- *On a sample basis, we performed test of details on Group's investment transactions for the year 2024 which include verifying the supporting documents for the investments;*

- *On a sample basis, we examined the investment income and recalculate the mathematical accuracy of investment income for the year ended December 31, 2024;*

- *We reviewed the Group's measurements in determining investments impairment which conducted by the Group itself or through independent investment valuation experts ("KJPP") appointed by Group; and*

- *We, with assistances from our internal valuation experts, reviewed valuation methods and assumptions used by KJPP which was appointed by the Group.*

Emphasis of a Matter
As disclosed in Note 4 to the accompanying consolidated financial statements, the Group restated their consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended, and its consolidated statement of financial position as of January 1, 2023 as a result of the business combination of entities under common control and adjustments to retrocession assets, reinsurance assets and relevant accounts of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Our opinion is not modified in respect of such matter.

Other Matters
The Group's consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended, were audited by other independent auditor whose report No. 00542/2.1457/AU.1/09/0222-4/1/X/2024 dated October 7, 2024 expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements, prior to the restatements as discussed in the Emphasis of a Matter paragraph.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("Entitas Induk") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2024, and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("Parent Entity"), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain tidak konsisten secara material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki niat untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup;

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Group's internal control;*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on Groups's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause Group to cease to continue as a going concern;*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar; dan

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation; and*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas ofau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of Group's consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal

From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter

audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 30 April 2025/ *April 30, 2025*

00698

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024 Rp	31 Desember/ *December* 2023*) Rp	1 Januari/ *January* 2023*) Rp	
ASET					***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	6,51	15,228,596	14,522,579	15,041,966	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	7,51	76,337,663	78,977,062	72,791,580	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	8	1,084,342	749,996	912,874	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	9,51	5,279,734	6,170,255	7,644,876	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	10,51	1,803,735	2,728,574	3,473,922	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	11,51	2,816,637	2,677,657	2,492,608	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	12,51	47,478	55,948	121,904	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	13	869,314	1,174,981	1,286,867	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih		861,933	834,227	879,246	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar dimuka	14a	216,553	215,844	150,819	*Prepaid taxes*
Penyertaan langsung	15	362,880	564,010	535,915	*Direct participation*
Aset tetap - bersih	16	3,346,745	3,278,854	3,172,862	*Fixed assets - net*
Properti investasi - bersih	17	4,967,930	5,018,208	3,782,857	*Investment properties - net*
Aset pajak tangguhan	14d	5,595,752	4,842,295	4,836,859	*Deferred tax assets*
Aset reasuransi	18	7,952,374	8,652,073	8,790,453	*Reinsurance assets*
Aset retrosesi	19	819,032	1,164,474	1,831,212	*Retrocession assets*
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	20	86,038	100,628	385,214	*Deferred acquisition cost - net*
Penjaminan ulang dibayar dimuka	21	129,113	182,482	257,200	*Prepaid re-guarantee*
Aset lain-lain	22	4,578,515	4,286,154	4,205,182	*Other assets*
JUMLAH ASET		**132,384,364**	**136,196,301**	**132,594,416**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	23,51	2,113,132	2,797,729	2,260,017	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	24,51	297,696	76,262	52,618	*Guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	25,51	1,737,009	1,889,384	1,500,623	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang penjaminan ulang	26,51	86,617	23,927	26,717	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	33	8,186,539	7,523,707	7,847,486	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	34	1,747,893	1,887,075	1,862,098	*Accruals*
Utang restrukturisasi	35,51	682,256	711,324	633,129	*Restructuring debt*
Utang pajak	14b	510,966	844,123	1,279,291	*Taxes payable*
Liabilitas kontrak asuransi	27	59,406,746	60,096,525	60,409,199	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kepada pemegang *unit link*	28	171,852	189,144	187,344	*Liabilities to unit-linked holders*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	29	14,939,747	15,211,466	12,204,280	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pendapatan diterima dimuka		139,238	157,654	164,655	*Unearned revenue*
Pinjaman dari Pemerintah	30,51	521,958	493,128	466,306	*Government loans*
Utang bank	31,51	2,363,092	3,555,359	4,293,340	*Bank loans*
Medium Term Notes	32	1,116,162	1,065,416	1,065,731	*Medium Term Notes*
Liabilitas imbalan kerja	36	1,286,886	1,459,614	1,370,459	*Employee benefit liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**95,307,789**	**97,981,837**	**95,623,293**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA TABARRU'	56	**(1,761,682)**	**(1,786,614)**	**(970,335)**	***TABARRU' FUNDS***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

*) *As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)

As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024 Rp	31 Desember/ *December* 2023*) Rp	1 Januari/ *January* 2023*) Rp	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Share capital*
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham					*Share capital - Nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share*
Modal dasar: 240.000.000 lembar pada tahun 2024 dan 2023					*Authorised capital: 240,000,000 shares in year 2024 and 2023*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					*Issued and fully paid capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2024					*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2024*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 90.163.536 saham per 31 Desember 2023					*1 share of Series A Dwiwarna - and 90,163,536 shares of Series B as at 31 December 2023*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 87.163.536 saham per 1 Januari 2023	37	93,719,537	90,163,537	87,163,537	*1 share of Series A Dwiwarna - and 87,163,536 shares of Series B as at January, 01 2023*
Tambahan modal disetor	37	(62,006,445)	(59,815,120)	(56,392,393)	*Additional paid-in capital*
Akumulasi (kerugian)/ keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(119,835)	728,795	422,140	*Accumulated (losses)/ gains for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		(29,503)	(121,198)	(52,413)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Komponen ekuitas lainnya		3,279	3,279	3,279	*Other equity components*
Ekuitas *merging entities*		--	1,232,279	1,109,180	*Equity of merging entities*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2,704,908	2,614,908	2,414,155	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		3,331,178	3,943,958	2,051,711	*Unappropriated*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**37,603,119**	**38,750,438**	**36,719,196**	***Total equity attributable to the owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali		1,235,138	1,250,640	1,222,262	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**38,838,257**	**40,001,078**	**37,941,458**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA TABARRU', DAN EKUITAS		**132,384,364**	**136,196,301**	**132,594,416**	***TOTAL LIABILITIES, TABARRU' FUNDS, AND EQUITY***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024 Rp	31 Desember/ *December* 2023*) Rp	
PENDAPATAN *UNDERWRITING*				***UNDERWRITING INCOME***
Pendapatan premi asuransi				***Insurance premium income***
Pendapatan premi asuransi bruto	38	23,699,755	23,341,833	*Gross insurance premium income*
Premi reasuransi dan retrosesi	38	(4,127,488)	(4,321,784)	*Reinsurance and retrocession premiums*
Penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	38	175,722	1,568,648	*Decrease in unearned premium reserves*
Pendapatan premi asuransi - bersih	38	**19,747,989**	**20,588,697**	***Insurance premium income - net***
Pendapatan penjaminan				***Guarantee income***
Imbal jasa penjaminan	39	7,733,031	6,738,700	*Guarantee fee income*
Premi penjaminan ulang	39	(405,506)	(182,273)	*Re-guarantee premiums*
Pendapatan penjaminan - bersih	39	**7,327,525**	**6,556,427**	***Guarantee income - net***
Pendapatan *underwriting* lain-lain	44a	**1,221,673**	**942,380**	***Other underwriting income***
PENDAPATAN *UNDERWRITING* - BERSIH		**28,297,187**	**28,087,504**	***UNDERWRITING INCOME - NET***
BEBAN *UNDERWRITING*				***UNDERWRITING EXPENSES***
Beban klaim asuransi				***Insurance claim expenses***
Beban klaim asuransi bruto	40	24,989,872	23,255,090	*Gross insurance claim expenses*
Klaim reasuransi dan retrosesi	40	(3,225,322)	(3,524,682)	*Reinsurance and retrocession claims*
(Penurunan)/ kenaikan liabilitas kepada pemegang *unit-link*	40	(18,237)	1,800	*(Decrease)/ increase in liabilities to unit-linked holders*
Penurunan estimasi liabilitas klaim	40	(2,361,684)	(2,372,092)	*Decrease in estimated claim liabilities*
Beban klaim asuransi - bersih	40	**19,384,629**	**17,360,116**	***Insurance claim expenses - net***
Beban klaim penjaminan				***Guarantee claim expenses***
Beban klaim penjaminan bruto	41	8,827,602	5,476,738	*Gross guarantee claim expenses*
Klaim penjaminan ulang	41	(28,397)	(38,525)	*Re-guarantee claims*
Penurunan estimasi liabilitas klaim	41	(348,485)	(697,772)	*Decrease in estimated claim liabilities*
Beban klaim penjaminan - bersih	41	**8,450,720**	**4,740,441**	***Guarantee claim expenses - net***
Pendapatan subrogasi	42	**(3,460,668)**	**(2,432,009)**	***Subrogation income***
Beban akuisisi dan komisi asuransi - bersih	43a	**993,398**	**1,212,212**	***Acquisition cost and insurance commission expenses - net***
Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih	43b	**25,059**	**18,375**	***Acquisition cost and guarantee commission expenses - net***
Beban *underwriting* lain-lain	44b	**1,136,313**	**973,598**	***Other underwriting expenses***
BEBAN *UNDERWRITING* - BERSIH		**26,529,451**	**21,872,733**	***UNDERWRITING EXPENSES - NET***
HASIL *UNDERWRITING* - BERSIH		**1,767,736**	**6,214,771**	***UNDERWRITING RESULTS - NET***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

*) *As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024 Rp	31 Desember/ *December* 2023*) Rp	
Hasil investasi - bersih	45,51	5,499,844	5,152,111	*Investment income - net*
Pendapatan jasa manajemen keuangan	46	438,122	399,557	*Financial management services income*
Pendapatan pengelolaan gedung	47	139,997	149,923	*Building management income*
Beban umum dan administrasi	48	(9,096,885)	(9,500,260)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	49,51	(369,114)	(397,083)	*Finance costs*
Pendapatan lain-lain - bersih	50	1,004,076	929,027	*Other income - net*
(RUGI)/ LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**(616,224)**	**2,948,046**	***(LOSS)/ PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Penghasilan/ (beban) pajak penghasilan	14c	228,849	(608,909)	*Income tax/ (expenses)*
(RUGI)/ LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**(387,375)**	**2,339,137**	***NET (LOSS)/ PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(694,214)	563,942	*Unrealised (loss)/ gain on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(156,551)	(257,087)	*Unrealised loss on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja, setelah pajak		93,853	(67,615)	*Remeasurement of post-employment benefits, net of tax*
(Rugi)/ laba komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		**(756,912)**	**239,240**	***Other comprehensive (loss)/ income for the year, net of tax***
JUMLAH (RUGI)/ LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(1,144,287)**	**2,578,377**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME FOR THE YEAR***
(RUGI)/ LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***NET (LOSS)/ PROFIT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		(444,697)	2,239,348	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		57,322	99,789	*Non-controlling interest*
		(387,375)	**2,339,137**	
(RUGI)/ LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		(1,200,972)	2,478,163	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		56,685	100,214	*Non-controlling interest*
		(1,144,287)	**2,578,377**	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

*) *As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Accumulated gain for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities* Rp	Pengukuran kembali imbalan pascakerja/ *Remeasurement of post-employment benefits* Rp	Ekuitas merging entities/ *Equity of merging entities* Rp	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings* Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings* Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
Saldo per 31 Desember 2022	**87,163,537**	**(56,392,393)**	**422,140**	**(52,413)**	**--**	**3,279**	**2,414,155**	**3,699,578**	**37,257,883**	**892,187**	**38,150,070**	***Balance as at December 31, 2022***
Dampak penyajian kembali penerapan PSAK 338: "Kombinasi Bisnis Entitas Pengendali"	--	--	--	--	1,109,180	--	--	135,646	1,244,826	330,075	1,574,901	*Impact of restatement os SFAS 338 implementation "Business Combination of Entities Under Common Control"*
Efek penyajian kembali Askrindo	--	--	--	--	--	--	--	(1,783,513)	(1,783,513)	--	(1,783,513)	*Askrindo restatement effect*
Saldo per 1 Januari 2023 *)	**87,163,537**	**(56,392,393)**	**422,140**	**(52,413)**	**1,109,180**	**3,279**	**2,414,155**	**2,051,711**	**36,719,196**	**1,222,262**	**37,941,458**	***Balance as at January 1, 2023 *)***
Selisih aset dan liabilitas yang dialihkan kepada IFG Life	--	(3,478,817)	--	--	--	--	--	--	(3,478,817)	--	(3,478,817)	*Difference on transferred assets and liabilities to IFG Life*
Penyesuaian nilai kini utang restrukturisasi	--	56,090	--	--	--	--	--	--	56,090	--	56,090	*Adjustments to the present value of debt restructuring*
Penambahan saham	3,000,000	--	--	--	--	--	--	--	3,000,000	--	3,000,000	*Share issuance*
Dividen	--	--	--	--	(24,194)	--	--	--	(24,194)	(72,421)	(96,615)	*Dividend*
Cadangan umum	--	--	--	--	--	--	200,753	(200,753)	--	--	--	*General reserves*
Laba komprehensif tahun berjalan:												*Comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	146,348	--	--	2,093,000	2,239,348	99,789	2,339,137	*Net income for the year*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	--	--	(3,758)	--	--	--	--	--	(3,758)	--	(3,758)	*Allowance for impairment losses of financial assets*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	--	310,413	--	--	--	--	--	310,413	200	310,613	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	(68,785)	945	--	--	--	(67,840)	225	(67,615)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Perubahan ekuitas lain entitas anak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	585	585	*Other movement of equity of subsidiaries*
Saldo per 31 Desember 2023 *)	**90,163,537**	**(59,815,120)**	**728,795**	**(121,198)**	**1,232,279**	**3,279**	**2,614,908**	**3,943,958**	**38,750,438**	**1,250,640**	**40,001,078**	***Balance as at December 31, 2023 *)***
Selisih aset dan liabilitas yang dialihkan kepada IFG Life	--	(1,333,609)	--	--	--	--	--	--	(1,333,609)	--	(1,333,609)	*Difference on transferred assets and liabilities to IFG Life*
Penyesuaian nilai kini utang restrukturisasi	--	(12,739)	--	--	--	--	--	--	(12,739)	--	(12,739)	*Adjustments to the present value of debt restructuring*
Akuisisi InHealth oleh IFG Life	--	(844,977)	--	--	--	--	--	--	(844,977)	--	(844,977)	*InHealth acquisition by IFG Life*
Divestasi entitas anak pada BAV	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(15,092)	(15,092)	*Divestment of subsidiaries in BAV*
Penambahan saham	3,556,000	--	--	--	--	--	--	--	3,556,000	--	3,556,000	*Share issuance*
Dividen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(56,786)	(56,786)	*Dividend*
Cadangan umum	--	--	--	--	--	--	90,000	(90,000)	--	--	--	*General reserves*
Rugi komprehensif tahun berjalan:												*Comprehensive loss for the year:*
Rugi bersih tahun berjalan	--	--	--	--	78,083	--	--	(522,780)	(444,697)	57,322	(387,375)	*Net loss for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	--	(848,630)	--	--	--	--	--	(848,630)	(2,135)	(850,765)	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	91,695	660	--	--	--	92,355	1,498	93,853	*Remeasurement of post-employment benefits*
Pembalikan ekuitas merging entities	--	--	--	--	(1,311,022)	--	--	--	(1,311,022)	--	(1,311,022)	*Reversal of equity from merging entities*
Perubahan ekuitas lain entitas anak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(309)	(309)	*Other movement of equity of subsidiaries*
Saldo per 31 Desember 2024	**93,719,537**	**(62,006,445)**	**(119,835)**	**(29,503)**	**--**	**3,279**	**2,704,908**	**3,331,178**	**37,603,119**	**1,235,138**	**38,838,257**	***Balance as at December 31, 2024***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 *) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas:			***Cash received:***
Penerimaan kas dari pendapatan premi asuransi	26,399,856	26,757,190	*Cash received from insurance premium income*
Penerimaan kas dari imbal jasa penjaminan	7,940,891	11,110,630	*Cash received from guarantee fee income*
Penerimaan kas dari subrogasi, klaim reasuransi, dan klaim retrosesi	4,079,963	3,810,690	*Cash received from subrogation, reinsurance claims, and retrocession claims*
Penerimaan kas dari klaim penjaminan ulang	46,147	326,790	*Cash received from reguarantee claims*
Penerimaan kas dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek, dan jasa penasihat keuangan	479,390	825,180	*Cash received from investment manager activities, brokerage commissions, and financial advisory services*
Penerimaan kas lainnya	4,081,199	3,296,823	*Cash received from others*
Pengeluaran kas:			***Cash disbursement:***
Pengeluaran kas untuk klaim	(36,669,012)	(24,463,272)	*Cash disbursement for claims*
Pengeluaran kas untuk komisi	(1,170,460)	(1,198,415)	*Cash disbursement for commissions*
Pengeluaran kas untuk premi reasuransi dan retrosesi	(4,339,052)	(10,756,576)	*Cash disbursement for reinsurance and retrocession premiums*
Pengeluaran kas untuk premi penjaminan ulang	(486,448)	(440,875)	*Cash disbursement for re-guarantee premiums*
Pengeluaran kas untuk pajak penghasilan badan	(982,221)	(1,384,436)	*Cash disbursement for corporate income tax*
Pengeluaran kas untuk beban umum dan *underwriting* lainnya	(3,603,168)	(4,625,628)	*Cash disbursement for general and other underwriting expenses*
Pengeluaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(148,728)	(584,732)	*Cash disbursement to supplier and other third parties*
Pengeluaran kas untuk lainnya	(2,559,843)	(3,256,519)	*Cash disbursement for others*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(6,931,486)**	**(583,150)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan aset tetap	6,677	27,973	*Sales of fixed assets*
Pembayaran uang muka Aset Cilandak	(94,800)	--	*Cilandak Asset advance payment*
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(394,503)	(437,792)	*Acquisition of fixed assets and investment properties*
Pembayaran atas perolehan entitas anak	(1,939,000)	--	*Payment of acquitition of subsidiary*
Penerimaan hasil investasi	5,491,975	4,795,004	*Investment income received*
Pencairan investasi	13,007,974	45,105,180	*Redemption of investments*
Penempatan investasi	(9,547,450)	(50,630,067)	*Placement of investments*
Pembayaran aktivitas investasi lainnya	(234,428)	--	*Payment of other investment activities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan) untuk aktivitas investasi	**6,296,445**	**(1,139,702)**	***Net cash flows provided by/ (used in) investing activities***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

*) *As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 *) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank dan lembaga non-bank	122,126	1,852,777	*Proceeds from bank and non-bank institution loans*
Pembayaran utang bank dan lembaga non-bank	(1,654,849)	(2,718,841)	*Payment of bank and non-bank institution loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(174,800)	(178,739)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen	(56,786)	(96,000)	*Dividend payment*
Pelepasan *Medium Term Notes* ke Pihak Ketiga	50,000	--	*Disposal of Medium Term Notes to Third Party*
Pembayaran bunga utang bank	(255,662)	(287,411)	*Cash disbursement for interest of bank loan*
Pembayaran bunga *Medium Term Notes*	(94,500)	(93,905)	*Interest paid on Medium Term Notes*
Penerimaan dari penerbitan saham	3,556,000	3,000,000	*Proceeds from issuance of shares*
Pembayaran utang restrukturisasi	(86,347)	(78,287)	*Payment of restructuring debt*
Pembayaran pinjaman dari Pemerintah	(6,200)	(6,200)	*Payment of Government loans*
Aktivitas pendanaan lainnya	(58,128)	(178,638)	*Other financing activities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**1,340,854**	**1,214,756**	***Net cash flows provided by financing activities***
Kenaikan/ (penurunan) bersih kas dan setara kas	**705,813**	**(508,096)**	***Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents***
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	204	(11,291)	*Net effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas pada awal tahun	**14,522,579**	**15,041,966**	***Cash and cash equivalents at the beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**15,228,596**	**14,522,579**	***Cash and cash equivalents at the end of the year***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

*) *As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. Umum

1.a. Pendirian dan informasi umum

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 11 tanggal 17 April 1973 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA.5/191/20 tertanggal 22 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973, Tambahan No. 508/1973.

Pada saat pendirian, Perseroan adalah lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 444/KMK/017/1993 tertanggal 23 Maret 1993, yang memberi izin usaha lembaga pembiayaan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit.

Dalam perkembangannya, maksud dan tujuan Perseroan telah mengalami perubahan dan terakhir sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta No. 07 tertanggal 6 April 2020, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029706.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 April 2020, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186829 tanggal 14 April 2020, yaitu sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas perusahaan *holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain;

1. General

1.a. Establishment and general information

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 11 dated April 17, 1973 of Mohamad Ali, S.H., which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. YA.5/191/20 dated May 22, 1973, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973, Supplement No. 508/1973.

On the establishment date, the Company was a financial institution as stipulated in the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, which was subsequently revoked by the Decree No. 444/KMK/017/1993 dated March 23, 1993, which gave the Company license to engage in leasing, factoring, and credit card activities.

The Company's aims and objectives have undergone changes and the latest changes is as stated in the Company's Articles of Association, in accordance with the Deed No. 07 dated April 6, 2020, made before Notary Ashoya Ratam S.H., M.kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0029706.AH.01.02.Year 2020 dated April 14, 2020, and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Acceptance Letter of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0186829 dated April 14, 2020, namely as a holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of companies or other parties including micro businesses, small and medium enterprises, and optimizing the use of Company resources based on the principles of good corporate governance.

In accordance with Articles 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are as follows:

- *Holding company activities including establishing or participating in other entities;*

- Aktivitas kantor pusat;
- Investasi langsung maupun tidak langsung;
- Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
- Aktivitas konsultasi manajemen.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana yang tertuang sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 4 April 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0083246.

Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor terdaftar di Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Entitas Induk Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("KBUMN") yang merupakan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

- *Head office activities;*
- *Direct or indirect investments;*
- *Company/assets restructuring activities; and*
- *Management consulting activities.*

In addition to the main business activities as referred to above, the Company may carry out business activities in order to optimize the use of resources owned by the Company.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest change is as stated in the Company's Articles of Association, in accordance with the Deed of Amandment to Articles of Association No. 25 dated April 4, 2024, made in presence of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated April 4, 2024 No. AHU-AH.01.03-0083246.

The Company is domiciled in Indonesia with its registered office at Graha CIMB Niaga 18th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

The Company's Parent Entity is the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises ("MSOE") which is the Ministry within the Indonesian Government that is in charge of fostering state-owned enterprises.

1.b. Struktur entitas anak
Perseroan memiliki pengendalian pada entitas anak sebagai berikut:

1.b. The structure of subsidiaries
The Company has control in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2024 %	2023 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2024 Rp	2023 Rp
Penyertaan langsung/ *Direct investments*						
PT Bahana Artha Ventura ("BAV")	84.75%	84.75%	Modal ventura/ *Venture capital*	11 Maret/ *March* 1991	1,281,497	1,639,769
PT Bahana Sekuritas ("BS")	99.20%	99.20%	Penjamin emisi dan perantara pedagang efek/ *Securities brokerage and underwriting*	26 Juli/ *July* 1989	856,326	580,387
PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")	52.88%	52.88%	Kepemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung/ *Building ownership, maintance and rental*	22 Agustus/ *August* 1989	798,956	811,032

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2024 %	2023 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2024 Rp	2023 Rp
PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")	60.00%	60.00%	Pengelola portofolio investasi, manajemen investasi dan penasihat investasi/ *Portfolio investment management, investment management and investment advisor*	10 Oktober/ *October* 1991	502,509	491,732
PT Bahana Mitra Investa ("BMI")	99.10%	99.10%	Jasa keuangan dan non keuangan bidang investasi/ *Financial and non financial services in the Investment sector*	15 Mei/ *May* 1997	988	1,423
PT Bahana Kapital Investa ("BKI")	99.97%	99.97%	Jasa konsultasi manajemen dan investasi/ *Management consulting and investment service*	12 April/ *April* 1993	43,211	70,522
PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")	99.99%	99.99%	Penjaminan kredit/ *Loan guarantee*	1 Juli/ *July* 1970	32,358,328	32,231,220
PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	11 Januari/ *January* 1971	31,530,058	32,954,694
PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	1 Januari/ *January* 1961	18,374,228	18,207,187
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	2 Juni/ *June* 1973	15,616,613	15,756,061
PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")	99.99%	99.99%	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	22 Oktober/ *October* 2020	34,960,154	33,088,034
Penyertaan tidak langsung/ *Indirect investments*						
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	99.93%	99.93%	Penjaminan syariah/ *Sharia guarantee*	24 September/ *September* 2014	2,408,935	2,452,095
PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")	99.99%	99.99%	Reasuransi/ *Reinsurance*	22 Agustus/ *August* 1994	9,752,296	11,119,311
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	99.99%	99.99%	Penjaminan syariah/ *Sharia guarantee*	29 November/ *November* 2012	2,986,402	2,550,858
PT Askrindo Mitra Utama	97.92%	97.92%	Jasa keagenan/ *Agency service*	7 Oktober/ *October* 1997	11,419	17,291
PT Asuransi Jasaraharja Putera	93.80%	93.80%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	27 November/ *November* 1993	4,458,105	4,244,515
PT Asuransi Jiwa Inhealth ("Inhealth")[3)]	80.00%	-	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	6 Oktober/ *October* 2008	3,609,299	--
PT Mitracipta Polasarana	88.30%	88.30%	Jasa penyediaan dan penyewaan gedung/ *Building management and rental service*	24 November/ *November* 1994	57,686	53,273
PT Mitrasraya Adhijasa	99.00%	99.00%	Pembangunan dan pengelolaan gedung komersial dan jasa penyewaan dan penjualan ruangan atau bangunan/ *Construction and management of commercial buildings and leasing and selling of rooms or buildings*	6 Februari/ *February* 1997	826,413	818,169

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2024 %	2023 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2024 Rp	2023 Rp
PT Asuransi Jasindo Syariah	96.50%	96.50%	Asuransi syariah/ *Sharia insurance*	27 Januari/ *January* 2016	603,899	580,720
Mitra PT Sarana Jatim Ventura ("SJTiV")	61.10%	61.10%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Oktober/ *October* 1994	68,706	68,368
Mitra PT Sarana Sumbar Ventura ("SSBV")	47.12%	47.12%	Modal ventura/ *Venture capital*	17 April/ Apr-95	67,993	86,300
Mitra PT Sarana Kalteng Ventura ("SKTaV")	45.42%	45.42%	Modal ventura/ *Venture capital*	8 Mei/ *May* 1997	82,116	82,914
Mitra PT Sarana Kaltim Ventura ("SKV")	58.53%	58.53%	Modal ventura/ *Venture capital*	15 Juni/ *June* 1995	103,264	101,740
Mitra PT Sarana Jakarta Ventura ("SJAV")	99.33%	99.33%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Februari/ *February* 1998	75,801	79,908
Mitra PT Sarana NTB Ventura ("SNTBV")	34.35%	34.35%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Desember/ *December* 1995	88,662	85,412
Mitra PT Sarana Kalsel Ventura ("SKSelV")	47.82%	47.82%	Modal ventura/ *Venture capital*	20 Juni/ *June* 1997	71,232	63,449
Mitra PT Sarana Lampung Ventura ("SLV")	53.35%	53.35%	Modal ventura/ *Venture capital*	27 Mei/ *May* 1995	42,313	41,067
Mitra PT Sarana Jateng Ventura ("SJTaV")	27.70%	27.70%	Modal ventura/ *Venture capital*	16 Oktober/ *October* 1994	51,451	53,157
Mitra PT Sarana Yogya Ventura ("SYV")	59.77%	59.77%	Modal ventura/ *Venture capital*	10 Oktober/ *October* 1994	49,322	44,043
Mitra PT Sarana Kalbar Ventura ("SKBar")	48.72%	48.72%	Modal ventura/ *Venture capital*	21 Juni/ *June* 1995	34,912	35,373
Mitra PT Sarana Surakarta Ventura ("SSV")	29.79%	29.79%	Modal ventura/ *Venture capital*	26 April/ April 1995	36,906	39,684
Mitra PT Sarana Jabar Ventura ("SJBV")	59.04%	59.04%	Modal ventura/ *Venture capital*	28 Oktober/ *October* 1994	22,881	26,837
Mitra PT Sarana Bali Ventura ("SBaV")[1)]	-	25.15%	Modal ventura/ *Venture capital*	10 Desember/ *December* 1994	--	29,477
Mitra PT Sarana Riau Ventura ("SRV")	40.75%	40.75%	Modal ventura/ *Venture capital*	23 Juli/ *July* 1996	10,537	11,190
Mitra PT Sarana Jambi Ventura ("SJV")	35.40%	35.40%	Modal ventura/ *Venture capital*	22 Mei/ *May* 1995	11,098	15,655
Mitra PT Sarana Sulsel Ventura ("SSSelV")	55.00%	55.00%	Modal ventura/ *Venture capital*	1 Desember/ *December* 1994	48,139	48,029
Mitra PT Sarana Bengkulu Ventura ("SBeV")	69.82%	69.82%	Modal ventura/ *Venture capital*	18 Oktober/ *October* 1997	3,625	7,894
Mitra PT Sarana Sulteng Ventura ("SSTengV")	49.74%	49.74%	Modal ventura/ *Venture capital*	25 Maret/ *March* 1997	10,768	12,109
Mitra PT Sarana Sultra Ventura ("SSTraV")[2)]	89.94%	89.94%	Modal ventura/ *Venture capital*	30 Oktober/ *October* 1996	8,026	9,616
Mitra PT Sarana Sulut Ventura ("SSUtV")	41.47%	41.47%	Modal ventura/ *Venture capital*	6 Oktober/ *October* 1995	8,565	9,482

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2024 %	2023 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2024 Rp	2023 Rp
Mitra PT Sarana Papua Ventura ("SPV")	40.90%	40.90%	Modal ventura/ *Venture capital*	11 April/ April 1996	1,978	2,172
PT Nusasarana Pradipta	70.00%	70.00%	Restoran dan ruang serbaguna/ *Restaurant and function hall*	20 Oktober/ *October* 1994	17,672	15,484

*) Entitas anak seluruhnya berdomisili di Indonesia
1) Tidak lagi dikonsolidasi sejak 8 Oktober 2024
2) Pencabutan izin usaha per tanggal 10 Desember 2024
3) Inhealth diakuisisi oleh IFG Life per tanggal 26 Juni 2024 (Catatan 37b)

**) All subsidiaries are domiciled in Indonesia*
1) No longer consolidated since October 8, 2024
2) Revocation of business license as of December 10, 2024
3) Inhealth acquired by IFG Life as of June 26, 2024 (Note 37b)

Penyertaan langsung

PT Bahana Artha Ventura ("BAV")
BAV didirikan pada tanggal 11 Maret 1991 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal 9 Desember 1993. Entitas anak berkedudukan di KMO Building, Suite 701, Lantai 7, Jl. Kyai Maja No 1, Gunung, Kebayoran, Jakarta Selatan 12120.

Sesuai dengan Anggaran Dasar entitas anak, entitas anak bergerak dalam bidang usaha modal ventura. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Penyertaan modal;
b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi; dan
c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
d. Pembiayaan usaha produktif.

Selain usaha modal ventura, entitas anak dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu (i) Kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau (ii) Kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Selain sebagai perusahaan modal ventura, entitas anak dan unit syariah entitas anak dapat menyelenggarakan kegiatan usaha modal ventura syariah yang meliputi: (i) penyertaan modal; (ii) penyertaan melalui pembelian sukuk konversi; (iii) penyertaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan nasabah pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; (iv) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil; (v) kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau (vi) kegiatan lain dengan persetujuan OJK.

Direct investments

PT Bahana Artha Ventura ("BAV")
BAV was established on March 11, 1991, and obtained its operations license on December 9, 1993. The subsidiary located at KMO Building, Suite 701, 7th Floor, Jl. Kyai Maja No 1, Gunung, Kebayoran, Jakarta Selatan 12120.

According to the subsidiary's Articles of Association, the subsidiary is engaged in venture capital business. To achieve the aim and objectives, the subsidiary may carry out business activities which includes:
a. Investment in capital;
b. Investment by purchase of convertible bonds; and
c. Financing by purchase of bonds issued by the Business Partners in the start-up and /or development stages; and/or
d. Financing for productive business.

In addition to venture capital business, subsidiaries may conduct other business activities, namely (i) Fee-based activities; and/or (ii) Other activities with the approval of the Financial Services Authority ("FSA").

In addition to being a venture capital company, subsidiaries and sharia units of subsidiaries may conduct sharia venture capital business activities which include: (i) capital participation; (ii) participation through the purchase of convertible sukuk; (iii) participation through the purchase of sukuk issued by customers at the initial start-up and/or business development stage; (iv) financing based on the profit sharing principle; (v) reward-based activities; and/or (vi) other activities with the approval of the FSA.

Entitas anak atau unit syariah entitas anak dapat melakukan jual beli kepada nasabah yang sedang atau telah menerima kegiatan usaha modal ventura syariah sebagaimana dimaksud di atas.

Subsidiaries or sharia units of subsidiaries may make sales and purchases to customers who are or have received sharia venture capital business activities as referred to above.

Entitas anak sebagai perusahaan modal ventura dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kategori yang disebut sebagai perusahaan berbentuk *Venture Debt Corporation.*

A subsidiary entity as a venture capital company can carry out business activities in accordance with the category known as a company in the form of a Venture Debt Corporation.

Entitas anak memiliki 21 Perusahaan Modal Ventura Daerah ("PMVD") per 31 Desember 2024 (2023: 22 PMVD).

The subsidiary owns 21 Regional Venture Capital Companies ("RVCC") as of December 31, 2024 (2023: 22 RVCC).

PT Bahana Sekuritas ("BS")
BS didirikan pada tanggal 26 Juli 1989 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal 20 Februari 1992. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai 10 dan 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

PT Bahana Sekuritas ("BS")
BS was established in July 26, 1989, and obtained its operations license in February 20, 1992. The subsidiary is located at Graha CIMB Niaga 10th and 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah berusaha dalam perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

In accordance with the subsidiary's article of association, the aim and objectives of the subsidiary is to run as a securities entity. To achieve the aim and objectives, the subsidiary may carry out business activities which includes:

1. Melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek yang menjalankan:
   a. Kegiatan utama, yaitu:
      i. Penjamin emisi efek; dan
      ii. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan penawaran umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi; serta
   b. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

2. Melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang menjalankan:
   a. Kegiatan utama, yaitu:
      i. Transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain; dan/atau
      ii. Pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain; serta

1. *Carry out business activities as a securities underwriter which conduct:*
   a. *Main activities, such as:*
      i. *Securities underwriter; and*
      ii. *Other activities related to the corporate actions of the Companies that are about to or have made a public offering, such as providing advice during security issuance, merger, acquisition, takeovers and/or restructuring; and*
   b. *Other activities determined and/or approved by the FSA.*

2. *Conducting business activities such as an intermediary of securities traders which conducts:*
   a. *Main activities, such as:*
      i. *Securities transactions for the own interest and other parties; and/or*
      ii. *Securities offering for the benefit of the other securities company; and*

b. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")
GNTU didirikan pada tanggal 22 Agustus 1989 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal 6 Januari 1994. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah berusaha dalam bidang jasa dan pemborong. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung-gedung atau bagian gedung-gedung untuk dipergunakan sebagai ruang kantor, tempat usaha dan keperluan lainnya;
2. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan, sebagai pemborong, kontraktor dan konsultan, baik sebagai perencana, pelaksana ataupun pengawasan atas bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga, pengairan irigasi, pemasangan instalasi listrik, air ledeng dan telepon; dan
3. Jasa *e-commerce* meliputi kegiatan transaksi perdagangan barang atau jasa, melalui media jaringan elektronika, internet, *telephone*, televisi ataupun media elektronik lainnya serta kegiatan usaha yang terkait.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")
BTIM didirikan pada tanggal 10 Oktober 1991 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal 21 Juni 1994. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah memberikan jasa-jasa yang berhubungan dengan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

b. Other activities determined and/or approved by the FSA.

PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")
GNTU was established on August 22, 1989, and obtained its operations license on January 6, 1994. The subsidiary located at Graha CIMB Niaga, B1 floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

According to the subsidiary's article of association, the aim and objectives of the subsidiary is to run in the field of services and contractors. To achieve the aim and objectives, the subsidiary may carry out business activities which includes:
1. Carry out business activities as building ownership, maintenance and rental of the building to be used as office spaces, business premises and other purposes;
2. Carry out business activities as a contractor and consultant, either as a planner executor or supervise of buildings, roads, bridges, docs, irrigation, electrical installations, tap water and telephones; and
3. E-commerce services include trade transactions of goods or services, through electronic network media, internet, telephone, television or other electronic media and related business activities.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")
BTIM was established on October 10, 1991, and obtained its operation license on June 21, 1994. The subsidiary located at Graha CIMB Niaga, 21th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

According to the subsidiary's article of association, the aim and objectives of the subsidiary is to provide services related to Investment Managers and Investment Advisors.

To achieve these aims and objectives, the subsidiary entity may carry out the following business activities:

1. Manajer Investasi: sebagai pihak yang mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio Investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengelola portofolio dari perusahaan efek atau portofolio investasi kolektif untuk para nasabah atau pihak ketiga;

PT Bahana Mitra Investa (”BMI”)
BMI didirikan pada tanggal 15 Mei 1997. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah berusaha dalam jasa konsultasi manajemen, restrukturisasi, dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan utama, yaitu:
   a. Melaksanakan kegiatan usaha mendirikan dan menjalankan usaha selaku konsultan manajemen, restrukturisasi, dan investasi perusahaan-perusahaan, seperti penggabungan usaha dan peleburan usaha, memberi jasa konsultasi dalam akuisisi perusahaan/ perseroan-perseroan dan studi kelayakan, serta melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan/ perseroan-perseroan;
   b. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi; serta
2. Kegiatan lain, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

Entitas anak tidak menjalankan kegiatan usaha sejak didirikan.

PT Bahana Kapital Investa (”BKI”)
BKI didirikan pada tanggal 12 April 1993 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal

1. *Investment Manager: as a party that manages a portfolio of securities for clients or manages a collective investment portfolio for a group of clients, except for insurance companies, pension funds and banks that carry out their own business activities based on applicable laws and regulations;*
2. *Manage portofolios of securities companies or collective investment portfolios for clients or third parties;*

PT Bahana Mitra Investa (”BMI”)
BMI was established in May 15, 1997. The subsidiary is located at Graha CIMB Niaga, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190.

In accordance with the subsidiary’s articles of association, the aim and objectives of the subsidiary is to run as a management, restructuring and investment consultation. To achieve the aim and objectives, the subsidiary may carry out business activities which includes:

1. *Main activities, such as:*
   a. *To carry out business activities to establish and run a business as a consultant for management, restructuring, and investment of companies, such as business merger and business mergers, providing consulting services in company acquisition/ companies and feasibility studies, and investing in the form of capital participation in companies.*
   b. *Other activities related to corporate actions of companies that will or have carried out, such as providing advice in the context of issuing securities, mergers, takeovers, and/or restructuring; and*
2. *Other activities, without prejudice to the approval of the competent authorities, if required.*

The subsidiary has not carried out business activities since its establishment.

PT Bahana Kapital Investa (”BKI”)
BKI was established in April 12, 1993 and obtained its operations license September 4,

4 September 1993. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190. Entitas anak tidak menjalankan kegiatan operasinya sejak tahun 2013 dan memulai lagi menjalankan kegiatan operasinya pada bulan Juni 2018.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah berusaha dalam jasa konsultasi manajemen dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan utama, yaitu:
   a. Melaksanakan aktivitas konsultasi manajemen, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan SDM. Dapat mencakup juga bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen;

   b. Aktivitas konsultasi bisnis, mecakup pada usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis; dan

   c. Melakukan investasi, dalam bentuk yang termasuk pada: (i) penyertaan saham; (ii) investasi pada instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan; (iii) investasi pada proyek-proyek; (iv) restrukturisasi perusahaan, proyek dan/atau aset; (v) melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan-perusahaan atau penyertaan lainnya dimana entitas anak melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, entitas anak dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

1993. The subsidiary is located at Graha CIMB Niaga 23th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190. The subsidiary has not carried out its operation since 2013 and resumed its operations in June 2018.

In accordance with the articles of association, the aim and objectives of the subsidiary is to run as a management and investment consulting services. To achieve the aim and objectives, the subsidiary may carry out business activities which includes:

1. Main activities, such as:
   a. To carry out management consulting activities, including advisory assistance, guidance and business operations as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decision relating finance; Human Resource goals and policies. May also include advisory assistance, guidance and operation of various management functions, design of accounting methods and procedures, efficiency and supervision and management information;
   b. Business consulting activities, including the business of providing advice and operational assistance to the business world, such as business world, such as business brokerage activities; and
   c. Make investments, in forms that include: (i) share participation; (ii) investments in financial instruments issued by companies; (iii) investment in projects; (iv) restructuring of company's projects and/or assets; (v) divest or divest shares of companies or other participation where the subsidiaries makes investments, either directly or indirectly.

2. In addition to business activities as to referred above, the subsidiary might carry out business activities in order to optimize the utilization of resources owned by the subsidiary.

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")
Jamkrindo didirikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1970. Entitas anak berkedudukan di Jalan Angkasa Blok 9 Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah untuk melakukan penjaminan kredit baik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi ("UMKM"), penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, penjaminan sistem resi gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")
Askrindo telah memperoleh izin beroperasi secara komersial sejak tahun 1971. Kantor pusat entitas anak beralamat di Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

Sesuai anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya entitas anak untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai entitas anak dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dari debitur terutama usaha mikro kecil menengah dan koperasi ("UMKMK") yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya;

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")
Jamkrindo was established based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981 under the name Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, previously named Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") which is formed by July 1, 1970. The subsidiary located at Jalan Angkasa Blok 9 Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

In accordance with the subsidiary's article of association, the aim and objectives of the subsidiary is to provide credit guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives ("UMKM"), Guarantees for State-Owned Enterprises, Guarantee for Warehouse Receipt Systems, and other guarantees as well as optimising the utilisation of the subsidiary's resources based on the principles of good corporate governance.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")
Askrindo has obtained a license to operate commercially since 1971. The subsidiary's head office is located at Jalan Angkasa Block B-9 Kav. No. 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

In accordance with the subsidiary's articles of association, the purpose and objectives of the subsidiary is to engage in the insurance business by operating in the field of general insurance, as well as optimizing the utilization of the subsidiary's resources to deliver highquality and competitively viable services, aiming to pursue profits to enhance the subsidiary's value, while adhering to the principles of a limited liability company as stated in Article 3 of the Articles of Association.

To achieve these purposes and objectives, the subsidiary may engage in the following business activities:
1. *Acceptance of risks for non-acceptance of loan and/or loan repayments, including sharia principle financing, from debtor, especially Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives ("MSMEC") provided by a Bank or other financial Institution;*

2. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersamasama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan entitas anak;
3. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/ reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan entitas anak; dan
4. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Receive direct coverage of any kind of insurance against such losses and originating from within or outside the country, individually or jointly with other insurance companies, either for own retention or reinsurance of such risks by taking into account the subsidiary's ability;*
3. *Accepting indirect coverage of any kind of indemnity and similar insurance originating from within or outside the country for any kind of loss insurance and similar one, whether for own retention or reinsurance of such insurance risks by taking into account with the subsidiary's ability;and*
4. *Perform other activities that are commonly done by insurance companies with due regard to the provisions of legislation.*

PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")
Jasa Raharja didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 dan memperoleh izin beroperasi menjalankan program Asuransi Sosial pada tanggal 1 Januari 1965. Entitas anak berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta Selatan.

PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")
Jasa Raharja was established on January 1, 1961 and obtained operational authorisation to carry out Social Insurance programs on January 1, 1965. The subsidiary is headquartered at Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, South Jakarta.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya entitas anak untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai entitas anak dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya;

In accordance with the subsidiary's articles of association, the purpose and objectives of the subsidiary entity are to participate in and support Government policies and programs in the fields of economy, social security, and national development in general, particularly in the field of loss insurance by organizing social insurance programs and optimizing the utilization of the subsidiary's resources to deliver high-quality services and maintain strong competitiveness, thereby enhancing the subsidiary's value by adhering to the principles of a limited company. To achieve these purposes and objectives, the subsidiary may engage in the following business activities:

1. *Implementing passenger accident insurance for public transportation vehicles in accordance with Law No. 33 Year 1964 and its implementing regulations, as well as liability insurance according to law towards third parties as stipulated in Law No. 34 Year 1964 and its implementing regulations;*

2. Mengadakan dan menutup perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga dalam hal kecelakaan alat angkutan;
3. Menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh entitas anak; dan
4. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")
Jasindo didirikan pada tanggal 2 Juni 1973 dan memperoleh izin beroperasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. Kep- 587/MD/1987 tanggal 2 Februari 1987 untuk Berusaha Dalam Bidang Asuransi Kerugian. Entitas anak berkedudukan di Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya entitas anak untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai entitas anak dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya serta mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan entitas anak;
2. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/ reasuransi di dalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya untuk di tahan sendiri serta mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan entitas anak; dan
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Arranging and closing agreements for motor vehicle insurance and liability insurance according to law towards third parties in the event of transportation accidents;*
3. *Accepting indirect insurance coverage for retention by the subsidiary; and*
4. *Conducting investment activities in compliance with applicable laws and regulations.*

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")
Jasindo was established on June 2, 1973, and obtained operational authorization based on the Decision of the Director General of Domestic Monetary No. Kep-587/MD/1987 dated February 2, 1987, to engage in the field of General Insurance. The subsidiary is headquartered at Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta.

In accordance with the subsidiary's articles of association, the purpose and objectives of the subsidiary entity are to engage in the field of loss and similar insurance in accordance with prevailing laws and regulations, as well as to optimise the utilisation of the subsidiary entity's resources to produce high-quality services and strong competitiveness to achieve/pursue profits in order to enhance the subsidiary's value by adhering to the principles of Limited Liability Company. To achieve these purposes and objectives, the subsidiary may carry out the following main business activities:

1. *Accepting direct insurance coverage for all types of loss and similar insurance, as well as reinsuring the risks of such insurance, taking into account the subsidiary entity's capabilities;*

2. *Accepting indirect insurance coverage from insurance/reinsurance companies domestically and internationally for all types of loss and similar insurance to be retained internally, and reinsuring the risks of such insurance, considering the subsidiary's capabilities; and*

3. *Engaging in other activities commonly undertaken by insurance companies, while adhering to the provisions of laws and regulations.*

Selain kegiatan usaha utama tersebut, entitas anak dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki entitas anak untuk jasa pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang asuransi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana.

PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")
IFG Life didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan memperoleh izin beroperasi pada tanggal 7 April 2021. Entitas anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Lantai 5 dan 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Sesuai dengan anggaran dasar entitas anak, maksud dan tujuan entitas anak adalah bergerak dalam bidang asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, serta mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya entitas anak untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai entitas anak dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menutup pertanggungan perbagai program asuransi jiwa termasuk anuitas, asuransi kesehatan unit link, *bancassurance* dan asuransi kecelakaan diri baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan perusahaan asuransi lain (koasuransi), untuk ditahan sendiri dan/atau mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan entitas anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan lini usaha anuitas termasuk namun tidak terbatas pada menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan; dan

In addition to the aforementioned main business activities, the subsidiary may engage in business activities aimed at optimising the utilisation of its resources for services related to human resource competence development in the insurance field, as well as leasing and managing facilities and infrastructure.

PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")
IFG LIfe was established on October 22, 2020 and obtained operational authorisation on April 7, 2021. The subsidiary is headquartered at Graha CIMB Niaga, 5th and 6th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

In accordance with the subsidiary's articles of association, the purpose and objectives of the subsidiary entity are to operate in the field of conventional life insurance, including but not limited to risk mitigation services that provide payments to policyholders, insured individuals, or other entitled parties in the event of the insured's death or survival or other payments to policyholders, insured individuals, or other entitled parties at specified times as stipulated in agreements, the amount of which has been determined or based on fund management results. Additionally, the subsidiary aims to optimize the utilisation of its resources to produce high-quality and competitively viable services, to pursue profits for enhancing the subsidiary entity's value, by adhering to the principles of a limited liability company. To achieve these purposes and objectives, the subsidiary entity may engage in the following business activities:

1. *Closed life insurance coverage for various life insurance programs, including annuities, unit-linked health insurance, bancassurance, and personal accident insurance, whether independently or in conjunction with other insurance companies (co-insurance), to be retained internally and/or reinsuring the risks of such insurance, considering the subsidiary entity's capabilities and the prevailing laws and regulations;*
2. *Operating the annuity business line, including but not limited to managing financial institution pension funds; and*

3. Melakukan kegiatan investasi dan kegiatan penyertaan saham dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lazim dilakukan perusahaan asuransi jiwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud tersebut di atas, entitas anak dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki entitas anak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Engaging in investment activities, equity participation, and other customary activities undertaken by life insurance companies, while adhering to prevailing laws and regulations.

In addition to the aforementioned main business activities, the subsidiary may engage in business activities aimed at optimizing the utilization of its resources, while adhering to applicable laws and regulations.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1.c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees

As of December 31, 2024, and 2023 the composition of the Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

	2024	2023	
Dewan Komisaris:			***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Mohamad Fauzi M Ichsan	Mohamad Fauzi M Ichsan	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Masyita Crystallin	Masyita Crystallin	*Commissioner*
Komisaris	Nasrudin	Nasrudin	*Commissioner*
Komisaris	Wahyu Setiawan[1)]	--	*Commissioner*
Komisaris Independen	Hotbonar Sinaga	Hotbonar Sinaga	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sumiyati	Sumiyati	*Independent Commissioner*
Direksi:			***Board of Directors:***
Direktur Utama	Hexana Tri Sasongko	Hexana Tri Sasongko	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo	*Vice President Director*
Direktur	Pantro Pander Silitonga[2)]	Pantro Pander Silitonga	*Director*
Direktur	Rizal Ariansyah	Rizal Ariansyah	*Director*
Direktur	Rianto Ahmadi	Rianto Ahmadi	*Director*
Direktur	Heru Handayanto	Heru Handayanto	*Director*
Komite Audit:			***Audit Committee:***
Ketua	Mohamad Fauzi M Ichsan	Mohamad Fauzi M Ichsan	*Chairman*
Anggota	Ika Istakariana	Ika Istakariana	*Member*
Anggota	Masyita Crystallin	Masyita Crystallin	*Member*
Anggota	Sumiyati	Sumiyati	*Member*

1) Efektif diangkat pada tanggal 3 Januari 2024
2) Efektif diberhentikan dengan hormat pada tanggal 17 Desember 2024

1) Effectively appointed on January 3, 2024
2) Effectively dismissed with honor on December 17, 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perseroan memiliki 309 karyawan (2023: 300 karyawan) (tidak diaudit), sedangkan entitas anak memiliki 6.521 karyawan (2023: 6.594 karyawan) (tidak diaudit).

As of December 31, 2024, the Company employed 309 employees (2023: 300 employees) (unaudited), and subsidiaries employed 6,521 employees (2023: 6,594 employees) (unaudited).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

2.a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (”SAK”) di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dengan asumsi kelangsungan usaha dan diukur berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan penilaian lain seperti dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan kas pada bank mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain (“PKL”) disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi signifikan telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2. Material Accounting Policy Information

Presented below are the material accounting policy information adopted in preparing the consolidated financial statements:

2.a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The Group’s consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard (“FAS”) which comprise the Statements and Intrepretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountant (“IIA”) and the Boards of Sharia Accounting Standars IIA.

The Group’s consolidated financial statements have been prepared based on going concern assumption and measured under the historical cost convention except for certain accounts which are presented on the basis of other measurements, as stated in the respective accounting policies of the relevant accounts. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing, and financing activities. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash in bank include cash on hand and cash in banks which are not restricted and placed as collateral for any borrowings.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated.

The items under Other Comprehensive Income (“OCI”) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and items not to be reclassified to profit or loss.

The accounting policies were consistently applied in the preparation of the consolidated financial statements to all years presented, unless otherwise stated.

2.b. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode di mana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2.b. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian FAS requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are material to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

2.c. Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.c. New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year

Beginning January 1, 2024, references to the individual SFASs and ISAKs have been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("FASB-IIA").

The following are amendments and revisions to standards which effective for periods on or after January 1, 2024 with early adoption, are as follows:

- *Amendment to SFAS 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;*
- *Amendment to SFAS 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;*
- *Amendment to SFAS 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendment to SFAS 207: Statement of Cash Flows and SFAS 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Arrangements; and*
- *Revision to SFAS 409: Accounting for Zakat, Infaq, dan Sadaqah and Revision SFAS 401: Presentation of Sharia Financial Statements.*

Implementasi dari amendemen dan revisi terhadap standar-standar tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

The implementation of the above amendments and revisions towards standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for the current year or prior financial years.

2.d. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas

2.d. *Principles of consolidation and equity accounting*

Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1.b dimana Perseroan memiliki pegendalian.

Pengendalian diperoleh ketika Perseroan terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Secara khusus, Perseroan mengendalikan entitas anak jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas entitas anak, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi entitas induk kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas anak;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas entitas anak, tersebut:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan entitas anak jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas

Subsidiary

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries as mentioned in Note 1.b in which the Company has control.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. Specifically, the Company controls an subsidiary if, and only if, the Company has all of the following:

- *power over the subsidiary, which is existing rights that give the parent current ability to direct the relevant activities of the subsidiary;*
- *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the subsidiary; and*
- *the ability to use its power over the subsidiary to affect its returns*

When the Group has less than a majority of the voting, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an subsidiary, including:

- *the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the investee;*
- *rights arising from other contractual arrangements; and*
- *the Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group reassesses whether it controls an subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Group obtains

Anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

control over the Subsidiary and ceases when the Group loses control of the Subsidiary.

Kepentingan Non Pengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laba rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup.

Non-controlling Interests represents the portion of profit or loss and net assets of Subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Group, which are presented in profit or loss and under the equity section in the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the Group.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup dan KNP, meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the Group and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance.

Grup melakukan eliminasi secara penuh atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas untuk seluruh transaksi, saldo dan keuntungan/kerugian yang belum terealisasi, yang material dan berasal dari transaksi antar Perusahaan di dalam Grup telah dieliminasi. PSAK 212: Pajak Penghasilan telah diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam Grup.

The Group fully eliminates assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows for all material transactions, balances and unrealized gains/losses arising from transactions between companies within the Group. SFAS 212: Income Taxes has been applied to temporary differences arising from the elimination of profits and losses resulting from intercompany transactions within the Group.

Grup menghitung eliminasi menggunakan hasil rekonsiliasi dari masing-masing anak perusahaan dalam Grup dan menerapkan asumsi dan metodologi alokasi pada level kontrak asuransi untuk menentukan total alokasi yang harus dieliminasi setiap Lini Bisnis ("LoB") produk asuransi dan setiap entitas dalam Grup.

The Group calculates the elimination using reconciliation result from each subsidiary in the Group and applies assumptions and allocation methodology at the insurance contract level to determine the total allocation that should be eliminated each insurance product Line of Business ("LoB") and each entity within the Group.

Jika terdapat transaksi antar Perusahaan di dalam Grup yang dicatat di masing-masing Perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi, asumsi dan/atau metodologi yang berbeda dan diterima oleh Grup, maka selisih yang timbul saat proses eliminasi, akan diakui pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

If intercompany transactions within the Group are recorded by each company using different accounting policies, assumptions, and/or methodologies accepted by the Group, any differences arising during the elimination process will be recognized in the Group's consolidated financial statements.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali bila dinyatakan lain.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by subsidiaries unless otherwise stated.

Pada laporan keuangan konsolidasian Grup, kebijakan akuntansi entitas anak disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

In the Group's consolidated financial statements, accounting policies of subsidiaries have been adjusted where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi konsolidasian; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Changes in Group's ownership interest in a Subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes any surplus or deficit in the consolidated profit or loss; and*
- *recognizes any surplus or deficit in the consolidated profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investment in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the associates after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the associates is recognized in profit or loss. Distributions received from an associates reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also

bagian investor atas entitas asosiasi yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the associate arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences.The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) jika investasi menjadi entitas anak;
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar;
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) if the investment becomes a subsidiary;
(b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value;
(c) when the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividends received or receivable from associates or are recognised as deduction of the carrying amount of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2g.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investment is tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2g.

2.e. Penjabaran mata uang asing

2.e. Foreign currency translation

Mata uang fungsional dan penyajian
Beberapa item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.

Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Kurs nilai tukar yang digunakan oleh Grup untuk menjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing on the consolidated statement of financial position date.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign exchange transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the consolidated profit or loss.

The exchange rates used by the Group to translate foreign currencies into Rupiah in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 and 2023 are as follows (in full Rupiah):

	2024 Rp	2023 Rp	
Dolar Amerika Serikat (Dolar AS)	16,162	15,416	*United States Dollar (USD)*

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian, dan perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada laba komprehensif konsolidasian lainnya.

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as fair value to other comprehensive income are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in the consolidated profit or loss, and fair value through other comprehensive income are recognised in the consolidated other comprehensive income.

2.f. Transaksi dengan pihak berelasi
Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 - "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

2.f. Transactions with related parties
The Group has transactions with related parties in accordance with SFAS 224 - "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
   2. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
   3. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (i);
   7. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (i) (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
   8. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa

A related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follows:

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   1. Has control or joint control of the reporting entity;
   2. Has significant influence over the reporting entity; or
   3. Is member of the key management personnel of the reporting entity or parent of the reporting entity,

ii. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   1. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   2. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   3. Both entities are joint ventures of the same third party;
   4. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   5. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   6. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i);
   7. A person identified in (i) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and
   8. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the

personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

reporting entity or to the parent of the reporting entity.

iii. Definisi pihak-pihak berelasi untuk Grup adalah sebagai berikut:
   1. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
   2. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

iii. The definition of related parties for the Group is as follows;
   1. The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and
   2. Other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or is significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity.

Pemerintah yang dimaksud oleh Grup sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Anak Perusahaan, namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 51.

The Government referred to by the Group as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and the Subsidiaries, but do not include Local Government-Owned Companies. The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the Note 51.

2.g. Instrumen keuangan

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Grup berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, serta berdasarkan dengan PSAK 109 “Instrumen Keuangan”:

2.g. Financial instruments

The following table presents the classification of the Group's financial instruments based on the characteristics of these financial instruments, as well as in accordance with SFAS 109 “Financial Instruments”:

Kategori yang diidentifikasikan pada PSAK 109/ *Category as defined by SFAS 109*		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/ *Classes (as determined by the Group)***	**Sub-golongan/ *Sub-classes***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")*	Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Saham/ *Shares*
			Reksadana/ *Mutual funds*
			Efek beragun aset/ *Asset-backed securities*
			Dana investasi infrastruktur/ *Infrastructure investment fund*
			Investasi unit link/ *Unit-linked investment*
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortised cost ("AC")*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	
		Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Deposito berjangka/ *Time deposits*
			Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ *Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
		Piutang premi asuransi dan reasuransi/ *Insurance and reinsurance premium receivables*	
		Piutang imbal jasa penjaminan/ *Guarantee fee receivables*	
		Piutang klaim reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession claim receivables*	
		Piutang penjaminan ulang/ *Re-guarantee receivables*	
		Piutang pembiayaan modal ventura/ *Venture capital financing receivables*	
		Piutang hasil investasi/ *Investment income receivables*	
		Piutang usaha dan piutang lain-lain/ *Accounts receivable and other receivables*	

Kategori yang diidentifikasikan pada PSAK 109/ *Category as defined by SFAS 109*		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/ *Classes (as determined by the Group)***	**Sub-golongan/ *Sub-classes***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortised cost ("AC")*	Aset Lain-lain/ *Other assets*	Uang jaminan/ *Security deposits*
			Bank yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash in bank*
			Lainnya/ *Others*
	Aset keuangan pada nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets measured at other comprehensive income ("FVOCI")*	Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Saham/ *Shares*
		Penyertaan langsung/ *Direct participation*	Entitas lain/ *Other entity*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortised cost ("AC")*	Utang klaim asuransi dan reasuransi/ *Insurance and reinsurance claim payables*	
		Utang klaim penjaminan/ *Guarantee claim payables*	
		Utang premi reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession premium payables*	
		Utang penjaminan ulang/ *Re-guarantee payables*	
		Utang usaha dan liabilitas lain-lain/ *Accounts payable and other liabilities*	Utang usaha/ *Accounts payable*
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities: Titipan premi dan imbal jasa penjaminan/ *Premium and guarantee fee income deposits*
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities: Pinjaman non-bank/ *Non-bank loans*
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities: Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities: Uang jaminan/ *Cash collateral*
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities: Lainnya/ *Others*
		Akrual/ *Accruals*	
		Utang restrukturisasi/ *Restructuring debt*	
		Pinjaman dari Pemerintah/ *Government loans*	
		Utang bank/ *Bank loans*	
		Medium Term Notes ("MTN")/ *Medium Term Notes ("MTN")*	
	Liabilitas kontrak jaminan keuangan/ *Liabilities for financial guarantee contracts*		

i. Aset keuangan

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, Grup menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis Grup dalam pengelolaan aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest* atau "SPPI") dari aset keuangan. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"); dan
- biaya perolehan diamortisasi ("AC").

i. Financial assets

To determine categories and classifications, the Group assesses all financial assets, except equity and derivative instruments, based on a combination of Group's business model in managing the financial assets and the characteristics of contractual cash flow of the financial assets solely payment of principal and interest ("SPPI"). The Group classifies its financial assets in the following categories:

- *fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- *fair value through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *amortised cost ("AC").*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (”AC”)
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (“SPPI”).

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya transaksi mencakup seluruh imbalan dan provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian dan diakui sebagai “hasil investasi - bersih”.

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai “cadangan kerugian penurunan nilai”.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”)
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

Financial assets measured at amortised cost (“AC”)
A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- *the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (“SPPI”).*

Financial assets measured at amortised cost are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses (if any).

Transaction cost includes all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the consolidated profit or loss and is recognised as “investment income - net”.

When an impairment occurs, an impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of financial assets and is recognised in the consolidated financial positions as “allowance for impairment losses”.

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (“FVOCI”)
Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI").*

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, financial instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at fair value where gains or losses on changes in fair value, gains or losses on foreign exchange, and impairment losses are recognised as other comprehensive income.

Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Dividend from equity instrument is recognised in profit or loss.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah/pengurang dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Expected credit losses are recognised as addition/deduction to other comprehensive income in the consolidated statement of financial statements (not reducing the carrying amount of financial assets in the consolidated financial statements). Interest income is calculated using the effective interest method.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVOCI.

Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat *(held for trading)* untuk diukur pada FVOCI. Penetapan ini menyebabkan

Financial assets in the form of derivatives and investments in equity instruments do not meet the criteria for measurement at amortized cost or FVOCI. Therefore, they are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument, which is not intended for trading, as FVOCI at the time of initial recognition. This designation results in gains or losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment

semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Grup mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage;*
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Early redemption and extension terms;*
- *Terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective

mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih *granular* (misalnya: sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen.
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e., sub-portfolios or subbusiness lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management.*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The selection of the operating model for SFAS 109 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Changes to the business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

The Group can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual instrumen, termasuk apakah aset keuangan memiliki persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- peristiwa kontinjensi yang dapat merubah jumlah dan waktu dari arus kas kontraktual;
- fitur pengungkit (*leverage*);
- persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan;
- persyaratan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu; dan
- fitur yang memodifikasi nilai waktu uang dari imbalan (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

In assessing whether the contractual cash flows are solely payment of principal and interest, the Group considers the contractual terms of the instrument, including assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows. In making the assessment, the Group considers:

- *contingent events that would change the amount and timing of contractual cash flows;*
- *leverage features;*
- *prepayment and extension terms;*
- *terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets; and*
- *features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Instrumen ekuitas yang memiliki arus kas kontraktual tidak memenuhi kriteria semata dari pembayaran pokok dan bunga. Oleh karena itu, seluruh aset keuangan ini akan diukur pada FVTPL kecuali opsi diukur pada FVOCI dipilih.

Equity instruments which have contractual cash flows do not meet the solely payment of principal and interest criterion. Accordingly, all such financial assets are measured at FVTPL unless the FVOCI option is selected.

Jika Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Where Group has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar;

(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyedikan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   (i) jumlah penyisihan kerugian; dan
   (ii) jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

(a) Mengeleminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch"*) yang dapat timbul dari pengakuan aset

Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Financial liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

(a) Financial liabilties at fair value through profit ot loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value;

(b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies;

(c) Financial guarantee contract and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
   (i) the amount of the loss allowance; and
   (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of SFAS 115.

(d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which SFAS 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with change recognised in profit or loss.

At initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profir or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets

atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and its perfomance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

iii. Pengakuan awal

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

iii. Initial recognition

The Group uses trade date accounting for regular contracts when recording financial assets transactions.

iv. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan penerbit aset keuangan sehingga penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

iv. Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

The Group writes-off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Group determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of financial asset's issuer such that the financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

v. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

v. Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

vi. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

vi. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its nonperformance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, nilai aset bersih untuk investasi *unit link* dan reksadana, tetapi tidak termasuk yang berasal dari Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI").

Fair value of financial instruments traded in active market is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes share prices from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares price, net assets value for unit-linked investments and mutual funds, but does not include IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan *input* yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau *repackaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

vii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Grup mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Grup menerapkan metode yang

vii. Impairment of financial assets

The Group assesses at each reporting date whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Group applies the simplified method to measure expected

disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Grup, kecuali untuk semua pembiayaan produktif segmentasi UKM BAV yang menggunakan model umum untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("KKE"), dengan menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup.

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("KKE") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan KKE 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

ECL diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *AC & FVOCI* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

credit losses against the Group's financial assets, except for all productive financing SME segmentation from BAV that uses general model to measure expected credit losses ("ECL"), using a lifetime expected loss allowance.

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

ECL are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as AC & FVOCI and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVOCI.

2.h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta intensi dan penggunaannya bukan untuk tujuan investasi.

2.h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks current accounts and time deposits with maturity period three months or less at the time of placement that are not restricted and not placed as collateral and the intention and usage are not for investment purposes.

2.i. Investasi

Deposito wajib dan berjangka

Deposito wajib dan berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

Efek-efek

Efek-efek terdiri dari saham, obligasi, sukuk, *medium term notes*, reksadana, investasi *unit link,* efek beragun aset, dan dana investasi infrastruktur. Efek-efek diklasifikasikan atas

2.i. Investment

Statutory and time deposits

Statutory and time deposits are stated at nominal value.

Marketable securities

Marketable securities consist of shares, bonds, sukuk, medium term notes, mutual funds, unit-linked investment, asset-backed securities, and infrastructure investment fund. Marketable

dasar tujuan atau intensi dari manajemen Grup dalam mengelola investasi tersebut.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Investasi pada sukuk
Investasi sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Grup berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

2.j. Piutang usaha dan piutang lain-lain – bersih

Piutang usaha dan piutang lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

securities are classified based on Group's management purpose or intention of maintaining such investments.

All marketable securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at amortised cost, and financial assets at other comprehensive income. Refer to Note 2g for the accounting policies of financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at amortised cost, and financial assets at other comprehensive income.

Investments in sukuk
Investments in sukuk are classified based on business model defined by the Group in accordance with SFAS 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1. *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*
2. *At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in the current year consolidated profit or loss.*
3. *At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in the current year consolidated other comprehensive income.*

2.j. Accounts receivable and other receivables – net
Accounts receivable and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Piutang usaha terdiri atas: piutang jasa penasehat keuangan; piutang nasabah; piutang lembaga kliring dan penjaminan; piutang atas efek; piutang usaha pengelolaan dana; piutang sewa; piutang komisi penjaminan ulang, piutang klaim syariah; dan piutang imbal jasa kafalah.

Accounts receivable consists of: financial advisory service receivable; customer receivable; clearing and guarantee institution receivable; securities receivable; fund management service receivable; lease receivable; co-guarantee commission receivable; sharia claim receivable; and kafalah fee receivables.

Piutang lain terdiri atas: piutang pemulihan klaim; pinjaman bagi hasil; piutang koperasi; pinjaman yang diberikan kepada karyawan; dan lain-lain.

Other receivables consist of: claim recovery receivables; profit sharing loan; receivables from cooperative; employee receivables; loans; and others.

Piutang lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group.

Grup menelaah penurunan piutang secara berkala. Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai aset keuangan.

The Group review the impairment in receivables periodically. Refer to Note 2g for the accounting policies of financial assets impairment.

2.k. Piutang premi asuransi dan reasuransi, dan piutang klaim reasuransi dan retrosesi

2.k. Insurance and reinsurance premium receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables

Piutang premi meliputi tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker sebagai akibat transaksi asuransi. Dalam hal Grup memberikan potongan premi kepada tertanggung, maka potongan tersebut langsung dikurangkan dari piutang preminya.

Premium receivables include premium bills to the insured/agent/broker as a result of insurance transactions. In the event that the Group gives a premium discount to the insured, the discount is directly deducted from premium receivables.

Piutang reasuransi atau piutang retrosesi tidak boleh disalinghapusbukukan dengan utang reasuransi atau utang retrosesi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya saling hapus buku. Apabila dalam saling hapus buku tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut disajikan pada kelompok liabilitas sebagai utang reasuransi atau utang retrosesi.

Reinsurance receivables or retrocession receivables may not be offsetting with reinsurance payables or retrocession payables, except if the reinsurance contract states the existence of offsetting. If in the offsetting credit balance arises, then the balance is presented in the liability section as reinsurance payables or retrocession payables.

Piutang retrosesi meliputi tagihan kepada perusahaan asuransi/reasuransi sebagai akibat transaksi retrosesi.

Retrocession receivables consist of receivables from insurance company or reinsurance company resulted from a retrocession transaction.

Grup menelaah penurunan piutang secara berkala. Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai aset keuangan.

The Group reviews the impairment in receivables periodically. Refer to Note 2g for the accounting policies of financial assets impairment.

2.l. Piutang imbal jasa penjaminan – bersih

Piutang Imbal Jasa Penjaminan ("IJP")/ Imbalan Jasa Kafalah ("IJK") Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan Non-KUR diakui ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP")/Sertifikat Kafalah ("SK") termasuk ulang tahun SP/SK khusus KUR skema subsidi IJP.

Piutang IJP/IJK terdiri dari Piutang Imbal Jasa Penjaminan KUR kepada Pemerintah dan Piutang Imbal Jasa Penjaminan (KUR skema subsidi bunga dan Non-KUR) kepada Penerima Jaminan (Bank dan Non-Bank).

2.l. Guarantee fee receivables – net

Guarantee fee/Kafalah Fee ("IJK") Kredit Usaha Rakyat ("KUR") and Non-KUR receivables are recognised when the Certificate of Guarantee ("SP")/Certificate of Kafalah ("SK") is issued including the anniversary of the SP/SK specifically for the KUR IJP subsidy scheme.

Receivables from IJP/IJK consist of Receivables for Return on Guarantee Services from KUR to the Government and Receivables for Guarantee Services (KUR with interest subsidy schemes and Non-KUR) to Beneficiaries (Banks and Non-Banks).

2.m. Piutang penjaminan ulang – bersih

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan bersama dan mitra penjaminan ulang dicatat sebagai piutang jaminan bersama.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang pada saat mitra mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Grup dengan Mitra), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat diterbitkannya SOA *(Statement of Account)*, namun pembayaran belum dilakukan.

2.m. Re-guarantee receivables – net

Payment of claims to the sole recipient of a guarantee that partners co-guarantee and partners re-guarantee are recorded as a co-guarantee receivable in the settlement.

Receivables in the settlement are recognised as receivables in the completion of when partners accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Group with partners), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognised as a receivables co-guarantee at the time of the SOA (Statement of Account), but the payment has not been made.

2.n. Penjaminan ulang dibayar dimuka

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban *fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

Berkaitan dengan mekanisme pembayaran IJP yang dilakukan secara tahunan khusus penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN"), KUR skema subsidi IJP, KUR skema subsidi bunga maka pengukuran atas biaya reasuransi dibayar dimuka dan biaya *loss limit* dibayar dimuka juga berbanding lurus dengan pengakuan piutang IJP dan pendapatan IJP ditangguhkan.

2.n. Prepaid re-guarantee

Prepaid co-guarantee expense, re-guarantee expense, fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortised proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/ Kafalah Fee.

In regards with the annual IJP payment mechanism specifically for National Economic Recovery ("PEN") guarantee program, IJP subsidy scheme KUR, interest subsidy scheme KUR, the measurement of prepaid reinsurance costs and prepaid loss limit fees is also directly proportional to the recognition of IJP receivables and deferred IJP income.

2.o. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2.o. *Fixed assets*

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Land is not depreciated. After initial recognition, the other fixed assets are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan	10 - 50	*Buildings*
Peralatan	4 - 5	*Equipment*
Kendaraan	4 - 5	*Vehicles*
Aset tetap lainnya	4 - 5	*Other fixed assets*

Aset Dalam Penyelesaian ("ADP") merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya material, dan biaya lainnya dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

Construction In Progress ("CIP") is an accumulated costs of the construction of buildings, material costs and other costs are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.

2.p. Aset takberwujud

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Grup juga mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian pembangunan, pengoperasian dan pengalihan karena Grup memiliki hak untuk memperoleh bangunan, yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain (“pengelola”), di atas tanah Grup pada akhir masa perjanjian.

2.p. Intangible assets

Intangible assets are initially recognised at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use. The Group also recognises intangible asset arising from a build, operate, and transfer agreement as the Group receives the right to obtain a building, that was built and managed by other party (“operator”), on its land at the end of agreement period.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Jumlah penyusutan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortisation begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortisation stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale). The method of amortisation is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak komputer dan imbal hasil atas tanah Grup yang disewakan dalam skema bangun-kelola-serah ("BOT") selama periode perjanjian BOT. Pada akhir masa perjanjian, Grup akan menerima fisik gedung yang dibangun di atas tanah tersebut sebagai kompensasi. Imbal hasil dicatat berdasarkan biaya pembangunan pengelola yang diakui secara bertahap menggunakan metode garis lurus sepanjang masa perjanjian BOT. Pada akhir perjanjian BOT, Grup akan mengakui aset bangunan pada Nilai wajar dan menghentikan pengakuan aset takberwujud dan pendapatan diterima di muka. Selisih yang timbul dari transaksi tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi tahun berjalan.

Intangible assets consist of computer software and compensation for the Group's land that was leased under the build-operate-transfer ("BOT") scheme during the BOT agreement period. At the end of the agreement, the Group will receive a building that was built on its land as compensation. The compensation is recorded based on operator's construction cost that is recognised gradually using straight line method over the BOT agreement period. At the end of BOT agreement, the Group will recognise building at its fair value and derecognise intangible asset and unearned revenue. Difference arising from this transaction will be recognised as gain or loss in the current year profit or loss.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada tahun berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent year.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.

2.q. Properti investasi

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh Grup diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan dan Prasarana serta perlengkapan gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis masing-masing 20 tahun serta 15 tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan. Secara terpisah, perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan. Contoh bukti perubahan penggunaan mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;

2.q. Investment property

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property. Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, Group chooses to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Land rights are not depreciated and are carried at costs. Building and Infrastructure also building equipments are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives 20 years and 15 years respectively.

Maintenance and repairment costs are charged to the consolidated profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalised.

The Group transfers property to, or from, investment property if, and only if, there is a change in use. A change in use occurs when a property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of a change in use. Separately, a change in management's intention to use a property does not represent evidence of a change in use. Examples of evidence of change of use include:

- *Commencement of owner-occupation, or owner-development, for the transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development for sale, for a transfer from investment property to inventory;*

- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

- *End of use by the owner, for the transfer from own-use property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for the transfer from inventory to investment property.*

An investment property is derecognised upon on disposal or when the investment property is no longer in use permanently and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in consolidated profit or loss and other comprehensive income in the period of the retirement or disposal.

2.r. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke jumlah terpulihkan apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Jumlah terpulihkan dihitung berdasarkan nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan/ (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban/ (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

2.r. Impairment of non-financial assets

The Group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable amount if there are circumstances that indicate such impairment. The recoverable amount calculated based on the value in use or fair value less cost to sell, whichever is higher.

Impairment loss is recognised if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. On the other hand, a reversal of impairment is recognised when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment/(recovery) on the value of the asset is recognised as an expense/ (income) in the current year profit or loss.

2.s. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok selain utang premi dan utang klaim. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.s. Accounts payable

Accounts payable is the obligation to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers other than premium payables and claim payables. Accounts payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

2.t. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas kontrak asuransi syariah, liabilitas kontrak penjaminan syariah, titipan premi dari imbal jasa penjaminan, utang bunga, liabilitas sewa dan utang lainnya yang tidak terjadi dalam kegiatan usaha normal Grup.

2.t. Other liabilities

Other liabilities consist of sharia insurance contract liability, sharia guarantee contract liability, premium and guarantee fee deposits, interest payable, lease liabilities and other payables that do not occur in the Group's normal business course.

2.u. Utang klaim dan utang premi asuransi, reasuransi, dan penjaminan kredit

Utang premi dan klaim meliputi utang kepada tertanggung/asuradur/koasuradur sebagai akibat transaksi asuransi, penjaminan kredit, reasuransi, dan *co-guarantee*.

2.u. Insurance, reinsurance, and credit guarantee claim and premium payables

Claim and premium payables consist of payables to policyholders/insurers/co-insurers resulting from insurance, credit guarantee, reinsurance, and co-guarantee transactions.

2.v. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka berasal dari bisnis penjaminan kredit dan sewa gedung Grup.

Pendapatan diterima dimuka terkait penjaminan kredit merupakan pembayaran imbal jasa penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang. Pendapatan diterima dimuka ini akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan diamortisasi ketika Sertifikat Penjaminan (SP) terbit sampai dengan akhir penjaminan. Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi imbal jasa penjaminan kredit diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Selain itu, Grup juga mencatatkan pendapatan sewa diterima dimuka yang berasal dari penerimaan pembayaran di depan untuk sewa gedung kepada Grup. Pendapatan diterima dimuka diamortisasi menjadi pendapatan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

2.v. Unearned revenue

Unearned revenue is derived from credit guarantee and building leases business of the Group.

Unearned revenue related to credit guarantee is a guarantee fee payment for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will turn to be income in the coming years. This unearned revenue will be recognised as income during the remaining period of guarantee and amortised when the Certificate of Guarantee (SP) is issued until the end of the guarantee period. By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned credit guarantee fee allocation, that is due to time limit.

Other than that, the Group has also recognised unearned rental revenue which is received from an upfront payment of building leases to the Group. Unearned revenue is amortised using the straight-line method over the lease period.

2.w. Utang bank

Utang bank terdiri dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman bank jangka pendek jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan sedangkan pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Rincian utang bank, dapat dilihat pada Catatan 31.

2.w. Bank loans

Bank loans consist of short-term and long-term loans. Short-term bank loans will be due in less than 12 months after the end of the reporting period while the long-term bank loans will be due in more than 12 months after the end of the reporting period. Details of bank loans, could be seen at Note 31.

2.x. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2.x. Employment benefit liabilities

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan pensiun
Entitas-entitas di dalam Grup menyediakan berbagai skema pensiun. Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Pension benefits
The entities under the Group provide various pension schemes. The Group has both defined benefit and defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban pensiun mencakup program imbalan pasti, fasilitas kesehatan pensiunan, medali emas, masa persiapan pensiun, program asuransi kesejahteraan karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), Pendanaan Hari Tua ("PHT"), program santunan kematian dan program sumbangan pensiun. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

In relation of defined benefit programs, the liability recognised in the consolidated statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. Pension obligation includes the pension plans, provided pension health facilities, gold medals, retirement preparation period, employee welfare insurance program through financial institution pension fund ("DPLK"), provident fund ("PHT"), death compensation program and pension fund program. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini diakui sebagai beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Net interest expenses are calculated using discount rate for defined benefit programs and fair value of plan assets. This expense recognised as employee benefit expenses in the consolidated profit or loss.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial (termasuk penurunan nilai aset program) langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Remeasurement gains and loses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions (included the impairment of plan asset) are charged or credited to other comprehensive income in the period in which they arise.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai biaya jasa lalu.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the consolidated profit or loss as past service costs.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran program pensiun karena diwajibkan, berdasarkan kontrak.

For defined benefit, the Group pays contributions to pension plans on a mandatory, based on contractual basis.

Imbalan pascakerja lainnya
Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunnya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui secara akrual selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

Other post-employment benefits
Certain companies under the Group provide post-retirement healthcare benefits to the retires. The entitlement to these benefits usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

Other long-term employee benefits
Other long-term employee benefits measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

Pesangon pemutusan kontrak kerja
Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 - Provisi dan kontijensi dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran

Termination benefits
Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 237 - Provisions and contigences and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

2.y. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas laporan posisi keuangan (*balance sheet liability method)* untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2.y. Income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date. Management periodically evaluate the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Where appropriate, management establish provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss and at the time of the transaction, does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences are deductible in equal amounts.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasikan dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences, unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perseroan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Deferred tax liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

2.z. Akuntansi transaksi syariah

Grup menggunakan akad kontrak asuransi syariah "*wakalah bil ujrah*". Premi yang dibayarkan pada asuransi Syariah diakui sebagai dana *tabarru*' dan tidak diakui sebagai pendapatan premi oleh Grup. Imbalan atau *ujrah* dalam mengelola produk-produk dari peserta diakui sebagai pendapatan oleh Grup selama periode kontrak asuransi.

2.z. Accounting for sharia transactions

The Group uses "wakalah bil ujrah" sharia insurance contract. Premiums paid on Sharia insurance are recognised as tabarru' fund and not recognised as premium income by the Group. Fees or ujrah in managing the product is recognised as income by the Group over the insurance contract period.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk syariah diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi bagian imbalan (*ujrah*) untuk Grup dalam rangka mengelola pendapatan dari produk syariah.

Funds received from customers for sharia products is recognised as liabilities in the consolidated statement of financial position for the amount received net of the portion representing the Group's fees (ujrah) in managing the Sharia product revenue.

Surplus yang dapat didistribusikan akan ditetapkan berdasarkan kecukupan kontribusi premi yang diterima dan hasil investasi yang terkait cukup untuk menutup beban atas pembayaran klaim dan pembentukan cadangan. Setiap kelebihan, setelah

The distributable surplus will be determined based on whether the premium contribution received and its related investment return are sufficient to cover for the expenses on claims paid and reserve set up. Any excess, after deducting the portion to repay the loan or

dikurangkan dengan porsi untuk membayar pinjaman kepada Grup atau *qardh*, jika ada, akan dibagikan kepada peserta, Grup, dan dana *tabarru'* sesuai dengan akad kontrak asuransi.

Ketika dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk menutup klaim yang telah terjadi, Grup akan memberikan *qardh* (pinjaman tidak berbunga) untuk rnenyelesaikannya. Pada saat dana *tabarru'* memiliki surplus *underwriting*, maka *qardh* akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum Grup menyatakan pembagian surplus yang dapat didistribusikan.

qardh from the Group, if any, will be distributed to the policy holders, to the Group, and to the tabarru' fund in accordance with insurance contract.

When the tabarru' fund is insufficient to cover all claims incurred, the Group will settle under qardh (non-bearing interest loans). The qardh is to be repaid first when tabarru' fund have an underwriting surplus before the Group can declares the distributable surplus.

2.aa. Sewa

Grup sebagai penyewa
Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:
- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan;
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini ketika memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2.aa. Leases

The Group as lessee
At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:
- *The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;*
- *The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use;*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to change how and for what purpose the asset is used. In rare cases where the decision about how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
- *The Group has the right to operate the asset; and*
- *The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purposes it will be used throughout the period of use.*

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses borrowing rate as the interest rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalanya diukur dengan menggunakan indeksi atau suku bunga pada tanggal permulaan;

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah
Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa
Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:
- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian

- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as part of fixed assets and other payables in the consolidated statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value assets
The Group has elected not to recognise right-of- use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications
The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:
- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments*

menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- *decreases the carrying amount of the right-of- use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Grup sebagai pesewa
Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

The Group as lessor
When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presented a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.

2.ab. Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak asuransi

Kontrak asuransi
Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi yang signifikan adalah kemungkinan untuk membayar manfaat yang signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

Grup mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan Grup menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tertentu yang tidak pasti (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis.

Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamandemen.

Grup menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Grup memisahkan komponen deposit dari kontrak *unit link* seperti yang disyaratkan oleh PSAK 104 - Kontrak Asuransi hanya jika kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi:

- Grup dapat mengukur komponen "deposit" secara terpisah (termasuk opsi penyerahan melekat, yaitu tanpa memperhitungkan komponen "asuransi"); dan

- Kebijakan akuntansi Grup tidak mensyaratkan untuk mengakui semua hak dan kewajiban yang timbul dari komponen "deposit".

2.ab. Revenue and expense recognition of Insurance contract liabilities

Insurance contract
Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from the policyholder upon the issuance of the policy.

Significant insurance risk is the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios considered are those with commercial substance.

Group defines significant insurance risk as the possibility of the Group agrees to compensate policyholders of the contract for the specified uncertain future events that adversely affect the policyholder.

Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification is subsequently performed unless the terms of the agreement are later amended.

The Group issues insurance contracts for traditional insurance product and investment linked insurance product. Both of these products have significant insurance risk.

The Group unbundles the deposit component of unit-linked contract as required by SFAS 104 - Insurance Contracts only when both of the following conditions are met:

- *The Group can measure separately the "deposit" component (including any embedded surrender option, i.e. without taking into account the "insurance" component); and*
- *The Group's accounting policies do not otherwise require to recognise all obligations and rights arising from the "deposit" component.*

Pendapatan premi
Pendapatan premi diakui sebagai pendapatan sejak berlakunya polis.

Pendapatan premi yang diterima sebelum jatuh tempo polis, premi yang telah diterima oleh Grup sebelum permintaan pertanggungan asuransi disetujui, premi yang diterima oleh Grup sehubungan dengan proses pembaharuan kembali polis namun hingga tanggal laporan keuangan belum ada keputusannya dicatat sebagai titipan premi di laporan posisi keuangan.

Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan penjaminan kredit dari asuransi (atau reasuransi) dan penjaminan kredit (atau *co-guarantee*) jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko.

Premi dari polis bersama (*coinsurance* dan *co-guarantee*) diakui sebesar proporsi premi Grup.

Grup mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi untuk kontrak asuransi. Sedangkan untuk kontrak penjaminan kredit, Grup mereasuransikan ke perusahaan penjaminan kredit lain. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai utang premi sebesar kewajiban yang dibukukan sehubungan kontrak reasuransi tersebut.

Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan merupakan porsi dari pendapatan premi yang dicatat terkait dengan periode penjaminan risiko yang belum jatuh tempo.

Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Premium income
Premium income is recognised as revenue upon inception of the policy.

Premium income received before the due date of the respective policies, premium received by the Group before the policy approved, premium received by the Group in connection with the process of renewal policy but until the date of the financial statements has been no decision are reported as policyholders' deposits in the statement of financial position.

Premium earned in relation to insurance and credit guarantee contracts of short-term insurance (or reinsurance) and credit guarantee (or co-guarantee) are recognized as revenue over the period of the policy (contract) in proportion to the amount of protection to the amount of protection provided. When the policy period significantly different with the risk period all earned premiums are recognised as revenue over the period of risk.

Premium from coinsurance and co-guarantee policies are recognised based on the Group's proportionate share of the premium.

The Group reinsures part of its total accepted risk to other insurance and reinsurance companies for insurance contracts. Whereas for credit guarantee contracts, the Group reinsures to the other credit guarantee companies. Premiums paid or share in the reinsurance premium on prospective reinsurance transactions are recognised as reinsurance premium over the reinsurance contract period based on the coverage provided. Premium payments or liabilities on retroactive reinsurance transactions are recognised as premium payables in the amount equivalent to the recorded liability in relation to the reinsurance contract.

The unearned premium reserve represents the portion of the premiums written related to the unexpired period of risk coverage.

Unearned premiums portion of reinsurance is determined consistently with the approach used in determining the unearned premiums, based on terms and conditions of the reinsurance contract.

Pendapatan subrogasi
Pendapatan subrogasi diakui pada saat terjadi.

Beban klaim
Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Beban klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim retensi sendiri) dihitung berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari klaim yang pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi klaim retensi sendiri diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada tahun terjadinya perubahan. Kenaikan atau penurunan estimasi klaim retensi sendiri adalah selisih antara klaim retensi sendiri tahun berjalan dengan tahun lalu.

Reasuransi, retrosesi dan *co-guarantee*

Grup mempunyai kontrak reasuransi, retrosesi dan *co-guarantee* proporsional dan non proporsional dengan perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan kredit di dalam maupun di luar negeri. Tujuan reasuransi dan *co-guarantee* ini adalah untuk membagi risiko yang melebihi kapasitas retensi Grup yang ditentukan berdasarkan ekuitas. Premi reasuransi, klaim reasuransi dan diskon reasuransi dikurangkan dari premi bruto, klaim bruto dan komisi bruto.

Aset yang timbul dari kontrak reasuransi dan retrosesi juga dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan tes kecukupan liabilitas asuransi. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor

Subrogation income
Subrogation income is recognised when incurred.

Claim expenses
Claims expense consisted of settled claims, claims in process, including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when the obligation to settle the claims is incurred. The portion of claims recovered from reinsurers are recorded and recognised as a deduction from claims expense in the same period when the claims expense is recognised. Subrogation rights are recognised as deduction from claims expense upon realisation.

Claims in process (estimated own retention claims) are computed based on the Group's own retention share of the claims in process at the consolidated statement of financial position date, including claims incurred but not yet reported. The changes in estimated own retention claims are recognised in the consolidated profit or loss at the time of change. The increase or decrease in estimated own retention claims represents the difference between the estimated own retention claims for the current year and the prior year.

Reinsurance, retrocession and co-guarantee
The Group has proportional and non proportional reinsurance, retrocession and co-guarantee contracts with domestic and overseas insurance, reinsurance, and credit guarantee companies. The objective of the reinsurance and co-guarantee is to cede the risk exceeding the Group's retention capacity, determined on the basis of its equity. Reinsurance premiums, reinsurance claims and reinsurance discounts are deducted from the gross written premiums, gross claims and gross commissions paid.

Assets arising from reinsurance and retrocession contracts are also computed using the same methods as liability adequacy test. In addition, the recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty

seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

Jumlah premi yang dibayar diakui sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi dan *co-guarantee* yang diterima.

The amount of premium paid is recognised over the reinsurance and co-guarantee contract in proportion with the protection received.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayar oleh perusahaan reasuransi untuk liabilitas asuransi, yaitu estimasi klaim dan premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah yang dapat dipulihkan dari reasuradur diestimasikan secara konsisten dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for insurance liabilities, includes estimated claim and unearned premium reserve. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, yang menyebabkan Grup tidak dapat menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

If a reinsurance asset is impaired, the Group reduces the carrying amount accordingly and recognises that impairment losses in the consolidated profit or loss. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that the Group may not receive all amounts due under the terms of the contract and the impact on the amounts that the Group will receive from the reinsurers can be reliably measured.

Aset retrosesi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan retrosesi untuk *ceded* estimasi klaim reasuransi, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Retrocession assets include balances expected to be recovered from retrocessionaires for ceded estimated reinsurance claims and ceded unearned premiums. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Grup menelaah apakah aset reasuransi telah mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi jika, dan hanya jika terdapat bukti obyektif yang menyebabkan *cedant* tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak dan dampaknya dapat diukur secara andal. Penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The Group's management assesses at each consolidated statement of financial position date whether retrocession assets is impaired. Retrocession asset impairment occurs if, and only if, there is an objective evidence that the cedant did not receive the entire amount in accordance with the contract requirements and the impact can be measured reliably. Impairment loss is recognised in the consolidated profit or loss.

Perjanjian retrosesi tidak membebaskan Grup dari kewajiban kepada *cedant*.

Retrocession arrangements do not relieve the Group from its obligations to cedant.

Beban akuisisi dan komisi asuransi – bersih

Beban komisi asuransi merupakan beban yang terjadi untuk mendapatkan premi asuransi, seperti komisi yang dibayarkan kepada pialang asuransi, agen dan entitas asuransi lain. Beban ini ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan metode perhitungan cadangan atas premi.

Pendapatan komisi asuransi mewakili biaya yang diperoleh dalam kegiatan asuransi (transfer risiko). Komisi ini terutama diperoleh dari reasuradur dan diakui berdasarkan basis *settlement* neto.

Liabilitas kontrak asuransi
Liabilitas kontrak asuransi mencakup klaim dalam proses, premi belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan.

- Premi dan premi reasuransi belum merupakan pendapatan
  Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

  Cadangan atas premi dan premi reasuransi yang belum merupakan pendapatan dihitung menggunakan metode harian untuk kontrak asuransi kontrak jangka pendek.

- Risiko yang belum jatuh tempo
  Kewajiban untuk manfaat kontraktual yang diharapkan akan timbul di masa depan dicatat pada saat premi diakui. Kewajiban ditetapkan sebagai penjumlahan atas nilai diskonto yang diharapkan dari pembayaran manfaat dan biaya administrasi masa depan yang berkaitan langsung dengan kontrak asuransi, dikurangi dengan nilai diskonto yang diharapkan atas premi teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi manfaat dan biaya administrasi berdasarkan asumsi penilaian yang digunakan (penilaian premi). Kewajiban tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi seperti kerugian, persistensi dan biaya pemeliharaan yang ditetapkan

Acquisition cost and insurance commission expenses – net
Insurance commission expenses represent expenses incurred to obtain premium income, such as commission paid to insurance brokers, agencies and other insurance companies. This expense is deferred and amortised in accordance with calculation method of premium reserve.

Insurance commission income represent fees earned in the course of the insurance activities (transfer risk). These commissions area primarly earned from the reinsurers and are recognized on a net settlement basis.

Insurance contract liabilities
Insurance contract liabilities include the outstanding claims provision, unearned premium reserve and liability for future benefits.

- *Unearned premium and reinsurance premium reserve*
  Unearned premiums are part of the premium that have not been recognised as revenue because the coverage is still running at the end of the accounting period, and presented in the gross amount. Unearned premiums portion of reinsurance is presented as part of the reinsurance asset.

  Unearned premium and reinsurance premium reserves are calculated based on daily method for short-term insurance contract.

- *Unexpired risk reserve ("URR")*
  A liability for contractual benefits that is expected to be incurred in the future is recorded when the premiums are recognised. The liability is determined as the sum of the expected discounted value of the benefit payments and the future administration expenses that are directly related to the insurance contract, less the expected discounted value of the theoretical premiums that would be required to meet the benefits and administration expenses based on the valuation assumptions used (the valuation premiums). The liability is based on assumptions as to loss ratios, persistency and maintenance expense that

pada saat kontrak asuransi dikeluarkan. Sebuah marjin untuk penyimpangan yang merugikan termasuk dalam asumsi yang digunakan.

are established at the time the contract is issued. A margin for adverse deviations is included in the assumptions.

- Liabilitas manfaat polis masa depan
Liabilitas manfaat polis masa depan adalah nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan perhitungan aktuaria. Kenaikan (penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban (pendapatan) dalam laporan laba rugi konsolidasian.

- *Liability for future policy benefits*
Liability for future policy benefits represents the present value of estimate future policy benefits to be paid to policyholders, less present value of estimated future premiums to be received from policyholders, recognised consistently with the recognition of premium income. Liability for future policy benefits is stated in the consolidated statement of financial position in accordance with the actuarial calculation. Increase (decrease) in liability for future policy benefits is recognised as an expense (income) in the current year consolidated statement of profit or loss

- Liabilitas kepada pemegang *unit link*
Liabilitas kepada pemegang *unit link* diakui pada saat penerimaan dana dikonversi menjadi unit setelah dikurangi biaya-biaya dan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai aset bersih efektif yang berlaku.

- *Liability to unit-linked policyholders*
Liability to unit-linked policyholders is recognised at the time the funds received are converted into units, net of related expenses and will increase or decreases in accordance with effective net asset value.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk *unit link* diakui sebagai pendapatan premi bruto di laporan laba rugi.

Funds received from customers for unitlinked products are recognised as gross premium income in the profit or loss.

Untuk produk *unit link* dengan masa pertanggungan sampai dengan satu tahun atau dengan masa pertanggungan lebih dari satu tahun yang dapat diperbaharui pada saat ulang tahun polis, maka liabilitas kepada pemegang polis *unit link* diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian menggunakan metode cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan ditambah cadangan atas akumulasi dana investasi pemegang polis. Metode cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dihitung menggunakan amortisasi harian atas biaya asuransi.

For unit-linked products with a coverage period of up to one year or with a coverage period of more than one year which can be renewed on the policy anniversary, the liability to unit-linked policyholders is recognised in the consolidated statement of financial position, using the unearned premium reserve method plus reserves for the accumulated investment funds of policyholders. Unearned premium reserve method is calculated using the daily method based on insurance costs.

Untuk produk *unit link* dengan masa pertanggungan lebih dari satu tahun dan tidak dapat diperbaharui, maka liabilitas kepada pemegang polis *unit link* diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian

For unit-linked products with a coverage period of more than one year and cannot be renewed, the liability to unit-linked policyholders is recognised in the consolidated statement of financial position

menggunakan metode *Gross Premium Reserve* ditambah cadangan atas akumulasi dana investasi pemegang polis.

Setiap bunga, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan nilai pasar investasi dicatat sebagai pendapatan atau beban, disertai dengan pengakuan kenaikan atau penurunan liabilitas kepada pemegang polis *unit link* di laporan laba rugi dan liabilitas kepada pemegang polis *unit link* di laporan posisi keuangan konsolidasian.

- Estimasi klaim
  Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan Grup sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

  Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan estimasi beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Grup sampi dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pemulihan klaim dari reasuradur dan retrosesi untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim asuransi pada aset reasuransi.

  Grup menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha. Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR).

  Cadangan Grup untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Grup membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

  Grup membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi, termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim dan rasio biaya.

using the Gross Premium Reserve method plus reserves for the accumulated investment funds of the policyholders.

Any interest, gain or loss due to increases or decreases in market value of investments are recorded as income or expense, with a corresponding recognition of increase or decrease in liability to unitlinked policyholders in the profit or loss and liability to unit-linked policyholders in the consolidated statement of financial position.

- *Estimated claims*
  Estimated claims represent outstanding claims and the Group's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the consolidated statement at financial position based on the insurance techical review.

  Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Group until December 31, 2024 and 2023. Reinsurance and retrocession recoveries of the provision for estimated gros claims are recorded as estimated reinsurance claims in reinsurance assets.

  The Group establishes its reserves by line of business. There are two categories of reserves: reserves for reported losses and reserves for incurred but not reported (IBNR) losses.

  The Group's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Group bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

  The Group establishes IBNR reserves using a triangulation method, include discount rate assumptions, claim ratio and expense ratio.

Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya perubahan.

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognised in the consolidated profit or loss in the period when the changes occur.

- Tes kecukupan liabilitas asuransi
  Pada akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika nilai tercatat liabilitas asuransi setelah dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait lebih rendah dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Jika penilaian tersebut menunjukan kekurangan antara nilai tercatat liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait) dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam liabilitas manfaat polis masa depan dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Pada tanggal pelaporan, keseluruhan jumlah aset dan kewajiban asuransi yang dicatat telah diestimasi dan manajemen meyakini bahwa jumlah tersebut memadai.

- *Insurance liability adequacy test*
  At the end of the reporting period, the Group assess whether recognised insurance liabilities are sufficient by using current estimates of future cash flows related to the insurance contracts. If the carrying value of insurance liabilities net of related deferred acquisition costs is lower compared to the estimated future cash flows, the entire deficiency is recognised in consolidated statement of profit or loss for the year. If the valuation shows deficiency between insurance liabilities recorded (deducted with respective deferred acquisition costs) with estimation of future cash flow, the shortage will be recognised as liability for future policy benefit and charged to the current year's consolidated statement of profit or loss. As at reporting date, all insurance assets and liabilities have been estimated and management believes that the amount recorded is adequate.

2.ac. Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Imbal jasa penjaminan

Imbal jasa penjaminan bruto diakui sejak berlakunya sertifikat penjaminan, dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya.

Beban klaim

Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim.

2.ac. Revenue and expense recognition of financial guarantee contract liabilities

Financial guarantee contract is contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.

Guarantee fee income

Gross guarantee fee income is recognise upon inception of guarantee certificate, recorded as unearned revenue and amortised over the period of guarantee.

Claim expenses

Claims expense consisted of settled claims, claims in process, including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses

Beban klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

when the obligation to settle the claims is incurred. The portion of claims recovered from reinsurers are recorded and recognised as a deduction from claims expense in the same period when the claims expense is recognised. Subrogation rights are recognised as deduction from claims expense upon realisation.

Pendapatan subrogasi
Pendapatan subrogasi diakui pada saat terjadi.

Subrogation income
Subrogation income is recognised when incurred.

Beban klaim
Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Claim expenses
Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/ penurunan cadangan klaim.

Claim expenses in the consolidated statement of profit or loss represent gross claims, reguarantee claims and increase/decrease in claim reserves.

Premi penjaminan ulang
Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Re-guarantee premiums
Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Premi penjaminan ulang dibayar di muka dicatat sebagai penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang, kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

Re-guarantee premiums are recorded as prepaid re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee, except for certain guarantee products that pay attention to the mechanism for paying guarantee fees on an annual basis.

Beban akuisisi dan komisi penjaminan – Bersih
Beban komisi penjaminan merupakan beban komisi penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan. Pendapatan komisi penjaminan merupakan pendapatan komisi yang diberikan oleh mitra penjaminan ulang atas transaksi penjaminan ulang.

Acquisition cost and gurantee commission expenses – net
Guarantee commission expenses represent guarantee commission expenses given to guarantee recipients and guarantee agents in connection with guarantee business activities. Guarantee commission income is commission income provided by re-guarantee partners for re-guarantee transactions.

Beban komisi penjaminan diakui sebesar imbal jasa yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan. Pendapatan komisi penjaminan diakui sebagai pendapatan terkait penjaminan kredit diterima dimuka dan diamortisasi selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Reguarantee commission expenses are recognised in the amount of fees for services provided to guarantee recipients and guarantee agents. Guarantee commission income is recognised as income related to unearned credit guarantees and is amortized over the remaining guarantee period and allocated based on the month the Guarantee Certificate ("SP") is issued.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan
Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

Liabilities for financial guarantee contracts
Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognised and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:
i. the amount of the loss allowance determined; and
ii. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

Beban usaha dan beban lain-lain diakui secara akrual basis.

Operating and other expenses are recognised based on accrual basis.

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematik sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

Expected losses for risks that have been transferred to reguarantor are recognised as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas kontrak penjaminan merupakan selisih liabilitas kontrak penjaminan periode berjalan dan periode sebelumnya.

Increase/(decrease) in reserve guarantee contract liabilities represents the difference between the guarantee contract liabilities of current period and the previous period.

2.ad. Pendapatan jasa manajemen keuangan

Pendapatan jasa penasihat keuangan diakui secara akrual pada saat Grup telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian.

2.ad. Financial management services income

Revenue from financial services is recognised on accrual basis when the Group has delivered all significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement.

2.ae. Pendapatan pengelolaan gedung

Pendapatan sewa dan jasa pengelolaan gedung diakui sesuai dengan periode sewa yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan.

2.ae. Building management income

Revenues from rental and service charge are recognised proportionally based on the respective rental term.

2.af. Beban usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui secara akrual basis.

2.af. Operating expenses

Operating and other expenses are recognised based on accrual basis.

2.ag. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengandali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

2.ag. Business combination for entities under common control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of th entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional pain in capital.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui dalam ekuitas dan disajikan dalam "tambahan modal disetor".

Dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Grup mencatat nilai wajar aset dan liabilitas yang dialihkan pada tanggal Grup memperoleh pengendalian atas aset dan liabilitas yang dialihkan.

Selisih yang timbul akibat pengukuran awal aset dan liabilitas yang diterima diakui sebagai bagian ekuitas dan dicatat pada akun tambahan modal disetor.

Penurunan nilai piutang
Grup menelaah kembali piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang klaim reasuransi dan retrosesi, piutang pembiayaan modal ventura, piutang usaha dan piutang lain-lain yang dimiliki setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara khusus, justifikasi manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai

Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan tertanggung. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, seperti yang tercermin dalam perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut di masa datang.

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The difference between consideration transferred and carrying amount of each business combination for entities under common control transaction is recognised in equity and presented as "additional paid-in capital".

In applying pooling of interest method, each financial statements' item of combined entities, for the period of which common control business combination become effective and for the comparative period, are presented as if business combination had occurred from the beginning of the period for which the combined entities were under common control. Carrying amount of those financial statement items are carrying amount of combined entities in business combination for entities under common control.

The Group recognises fair value of transferred assets and liabilities on the date the Group obtains control of the transferred assets and liabilities.

The difference arising from the initial measurement of assets and liabilities received is recognised as part of equity and recorded in the additional paid-in capital account.

Impairment on accounts receivable
The Group reviews insurance and reinsurance premium receivables, reinsurance and retrocession claim receivables, venture capital financing receivables, accounts receivable and other receivables at each reporting date to assess whether impairment should be recognised in the consolidated statement of profit or loss. Particularly, justification made by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment.

In the estimation of cash flows, the Group makes the justification of the insurer's financial situation. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the provision for impairment in the future.

Nilai tercatat penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 8, 9, 11, 12, dan 13.

The carrying amount of impairment on accounts receivable is disclosed in Notes 8, 9, 11, 12, and 13.

Penyisihan piutang imbal jasa penjaminan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan wawasan ke depan untuk piutang usaha dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan skenario optimis dan pesimis. Sedangkan, secara kolektif untuk investasi menggunakan eksternal rating terhadap *investment grade* dengan menggunakan 3 (tiga) skenario yaitu normal, optimis dan pesimis.

Allowance for impairment losses of guarantee fee receivables
The Group applies a simplified approach to measure the allowance for impairment losses on a forward-looking basis for trade receivables calculated using the discounted cash flow method with optimistic and pessimistic scenarios. However, collectively for investment using an external rating of investment grade using 3 (three) scenarios, namely normal, optimistic and pessimistic.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas dimasa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi dimasa depan.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience, current economic conditions, and forecast on future economic conditions.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

The accuracy of the allowance depends on how well the estimation of future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Nilai tercatat penyisihan piutang imbal jasa penjaminan disajikan pada Catatan 10.

The carrying amount of allowance for guarantee fees receivable is presented in Note 10.

Liabilitas imbalan kerja
Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria (lihat Catatan 36). Asumsi digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Employee benefit liabilities
The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions (refer to Note 36). The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.

Liabilitas kontrak asuransi
Liabilitas kontrak asuransi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaria. Termasuk dalam liabilitas kontrak asuransi adalah estimasi klaim dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (lihat Catatan 27).

Insurance contract liabilities
Insurance contract liabilities are stated in the consolidated statement of financial position in accordance with the actuarial calculation based on certain actuarial assumptions. Included in the insurance contract liabilities are estimated claim and unearned premium reserves (refer to Note 27).

Grup wajib membentuk cadangan untuk pembayaran klaim yang timbul. Cadangan klaim merupakan biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan klaim yang telah terjadi, tetapi masih dalam proses atau klaim belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup menetapkan cadangan berdasarkan jenis produk, jenis dan periode penjaminan dan tahun kejadian. Terdapat tiga kategori cadangan, yaitu cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan, estimasi klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR") dan cadangan premi. Cadangan premi jangka panjang dihitung dengan metode valuasi premi bruto ("GPV") berdasarkan asumsi estimasi terbaik (lihat Catatan 53).

The Group is required to establish reserves for payment of claim that arise. These reserves represent the expected ultimate cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding or not yet reported as of the consolidated statement of financial position date. The Group establishes its reserves by product line, type and extent of coverage and year of occurrence. There are three categories of reserve, which are reserves for reported losses, reserves for incurred but not reported ("IBNR") losses and premium reserves. Long term premium reserves are calculated with Gross Premium Valuation ("GPV") method based on the best estimation assumptions (refer to Note 53).

Cadangan Grup untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan dan klaim. Grup membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan. IBNR dihitung dengan metode "*triangle*" berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial.

The Group's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Group bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established. IBNR is calculated using the "triangle" method based on actuarial calculation applying actuarial assumptions.

Tes kecukupan liabilitas asuransi
Pengujian kecukupan liabilitas asuransi yang meliputi reviu atas cadangan premi dan cadangan klaim telah dilakukan dengan menggunakan asumsi dan estimasi aktuaria masa depan.

Insurance liability adequacy test
The liability adequacy testing consist of review on premium reserves and claim reserves that have been performed using the future actuarial assumptions and estimations.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2ab, Grup melakukan tes kecukupan liabilitas asuransi dengan mengestimasi nilai kini estimasi klaim yang akan dibayarkan di masa depan ditambah dengan nilai kini beban yang akan dikeluarkan di masa depan.

Beberapa asumsi harus digunakan dalam menentukan nilai kini tersebut. Asumsi-asumsi tersebut antara lain estimasi tingkat diskonto, estimasi klaim yang akan terjadi, estimasi terbaik dan marjin atas kesalahan pengukuran.

Aset reasuransi dan retrosesi
Aset yang timbul dari kontrak reasuransi dan retrosesi juga dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan tes kecukupan liabilitas asuransi. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terhutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal (lihat Catatan 18 dan 19).

Penentuan nilai wajar atas instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian, termasuk model matematika, seperti teknik penilaian analisis arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Dalam menentukan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan di Catatan 2g. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup

As disclosed in Note 2ab, the Company assesses the adequacy of its insurance liabilities by estimating present value of estimated claims to be paid in the future plus present value of estimated expenses incurred in the future.

Several assumptions must be used to determine the present value amounts. Those assumptions are estimated discount rate, estimated future claims, best estimates and margin for adverse deviation.

Reinsurance and retrocession assets
Assets arising from reinsurance and retrocession contracts are also computed using the same methods as liability adequacy test. In addition, the recoverability of these assets are assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured (refer to Notes 18 and 19).

Determining fair value of financial instruments
Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques, including mathematical models, such as discounted future cash flows analysis by using prevailing market rate.

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2g. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instruments.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility

feedback model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan
Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan dibayarkan. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang kemampuan membayar pihak terjamin dan nilai realisasi bersih dari setiap subrogasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Nilai tercatat liabilitas kontrak jaminan keuangan yang disajikan pada Catatan 29.

Aset pajak tangguhan
Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

Liabilities for financial guarantee contracts
Liabilities for financial guarantee contract is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be disbursed. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteed's payment ability and the net realisable value of any underlying subrogation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The carrying amount of financial guarantee contract liabilities presented in Note 29.

Deferred tax assets
The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow part or all of the deferred tax assets to be utilised.

Pendapatan premi asuransi bruto
Pendapatan premi asuransi bruto dicatat dan diperoleh berdasarkan pada laporan yang diterima dari Grup tertanggung, dilengkapi dengan estimasi premi yang dicatat Grup untuk laporan yang belum diterima dari Grup tertanggung. Penentuan estimasi premi memerlukan penelaahan terhadap pengalaman Grup dengan pihak tertanggung, pemahaman tentang setiap pasar, pemahaman mengenai karakteristik setiap jenis usaha, dan penilaian manajemen terhadap dampak berbagai faktor lainnya pada volume bisnis yang dicatat dan dikeluarkan kepada Grup. Estimasi premi diperbarui seiring dengan diterimanya informasi baru dari pihak tertanggung dan perbedaan antara estimasi dengan jumlah yang sebenarnya dicatat pada periode ketika estimasi diubah atau jumlah yang sebenarnya ditentukan.

Gross insurance premium income
Gross insurance premium income are based upon reports received from ceding companies, supplemented by the Group's own estimates of premiums written for which ceding Group reports have not been received. The determination of premium estimates requires a review of the Group's experience with cedants, familiarity with each market, an understanding of the characteristics of each line of business and management's assessment of the impact of various other factors on the volume of business written and ceded to the Group. Premium estimates are updated as new information is received from cedants and differences between estimates and actual amounts are recorded in the period in which the estimates are changed, or the actual amounts are determined.

4. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

4. Restatement of Consolidation Financial Statements

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Manajemen menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian terdahulu yang terkait dengan:

1) Penyajian kembali sehubungan dengan transaksi akuisisi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Inhealth") oleh entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

   Pada tanggal 26 Juni 2024, IFG Life secara resmi mengakusisi 80% saham Inhealth dengan total nilai transaksi Rp2.156.000 yang berasal dari Perseroan, PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri"), dan PT Kimia Farma Tbk ("Kimia Farma").

   Transaksi pengalihan saham Inhealth tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham utama (*ultimate shareholder*) dari pemegang saham Inhealth yaitu IFG Life, Mandiri, dan Kimia Farma adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi kombinasi bisnis tersebut dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

In preparing the consolidated financial statements as of December 31, 2024, Management has restated the previous consolidated financial statements related to:

1. Restatement regarding to business acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Inhealth") by the subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

   On June 26, 2024, IFG Life has officially acquired 80% shares of Inhealth with total transactions amounting to Rp2,156,000 which derived from the Company, PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri"), and PT Kimia Farma Tbk ("Kimia Farma").

   The share transfer transaction of Inhealth is a business combination of entity under common control where the ultimate shareholder of Inhealth's shareholders, namely IFG Life, Mandiri, and Kimia Farma, is the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the business combination transaction is recorded using the pooling of interest method in accordance with SFAS 338, "Business Combinations of Entity under Common Control".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini sebesar Rp844.977 dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas (Catatan 37).

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian sedemikian rupa seolah-olah Inhealth telah terkonsolidasi dalam Grup pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023.

2) Penyajian kembali sehubungan dengan penyesuaian pencatatan pada laporan keuangan terdahulu yang terkait dengan transaksi-transaksi berikut ini:
   a) Nasre mengakui *premium reinstatement* dari kontrak retrosesi "*excess of loss*" berdasarkan kas diterima yang seharusnya dicatat dengan basis akrual sesuai pengakuan dari aset retrosesi.
   b) Terdapat provisi yang belum dilakukan Askrindo untuk aset reasuransi yang keterpulihannya diragukan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen telah melakukan penyesuaian pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut dan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2023 telah disajikan kembali.

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas dan pendapatan (beban) *underwriting* sebagai akibat penyesuaian atas pencatatan transaksi-transaksi tersebut di atas.

The difference between the consideration transferred and the carrying amount of investment acquired from this transaction amounting to Rp844,977 is recorded in "additional paid-in capital" account in the equity section (Note 37).

The Group has restated the consolidated financial statements as if Inhealth have been consolidated within the Group as of December 31, 2023, and January 1, 2023.

2. Restatement in respect of adjustments on the prior years financial statements related to the following transactions:

a. Nasre recognized premium reinstatement from "excess of loss" retrocession contracts on a cash basis, which should have been recorded on an accrual basis in accordance with the recognition of retrocesion assets.
b. There are provisions that have not been made by Askrindo for reinsurance assets which recoverability was doubtful since previous years.

Management has made adjustment on recording of those transactions and in order to prepare and present the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2024, the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2023 and consolidated statement of financial posititon as of January 1, 2023 have been restated.

Management has also restated accounts related to assets, liabilities, and underwriting income (expenses) as a result of adjustments on recording of the above mentioned transaction.

Tabel di bawah ini merangkum dampak penyajian kembali terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal pada 31 Desember 2023:

The table below summarizes the impact of the restatement on the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023:

		31 Desember/ *December 31,* 2023			
	Referensi/ *Reference*	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
Laporan posisi keuangan konsolidasian					***Consolidated statement of financial position***
ASET					***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	4.1	13,596,010	926,569	14,522,579	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	4.1	77,511,416	1,465,646	78,977,062	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	4.1	720,153	29,843	749,996	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan piutang reasuransi - bersih	4.1	6,041,729	128,526	6,170,255	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	4.1	2,676,464	1,193	2,677,657	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang hasil investasi	4.1	818,806	15,421	834,227	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar dimuka	4.1	203,843	12,001	215,844	*Prepaid taxes*
Aset tetap	4.1	3,226,485	52,369	3,278,854	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	4.1	4,795,446	46,849	4,842,295	*Deferred tax assets*
Aset reasuransi	4.1, 4.2b	9,963,289	(1,311,216)	8,652,073	*Reinsurance assets*
Aset retrosesi	4.2a	1,809,700	(645,226)	1,164,474	*Retrocession assets*
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	4.1	83,017	17,611	100,628	*Deferred acquisition cost - net*
Aset lain-lain	4.1	4,235,186	50,968	4,286,154	*Other assets*
JUMLAH ASET		**135,405,747**	**790,554**	**136,196,301**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	4.1	2,796,007	1,722	2,797,729	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	4.1	1,879,419	9,965	1,889,384	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	4.1	7,365,063	158,644	7,523,707	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	4.1	59,252,979	843,546	60,096,525	*Insurance contract liabilities*
Utang pajak	4.1	837,434	6,689	844,123	*Prepaid taxes*
Liabilitas imbalan kerja	4.1	1,416,948	42,666	1,459,614	*Employee benefit obligation*
JUMLAH LIABILITAS		**96,918,605**	**1,063,232**	**97,981,837**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	4.1, 4.2a, 4.2b	5,801,662	(1,857,704)	3,943,958	*Unappropriated Retained earning*
Kepentingan nonpengendali	4.1	897,893	352,747	1,250,640	*Non-controlling interest*
Ekuitas *merging entities*	4.1	--	1,232,279	1,232,279	*Equity of merging entities*
JUMLAH EKUITAS		**40,273,756**	**(272,678)**	**40,001,078**	***TOTAL EQUITY***

Tabel di bawah ini merangkum dampak penyajian kembali terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:

The table below summarizes the impact of the restatement on the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December, 31 2023:

		31 Desember/ *December 31,* 2023			
	Referensi/ *Reference*	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian					***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
PENDAPATAN *UNDERWRITING*					***UNDERWRITING INCOME***
Pendapatan premi asuransi					***Insurance premium income***
Pendapatan premi asuransi bruto	4.1	20,358,572	2,983,261	23,341,833	*Gross insurance premium income*
Premi reasuransi dan retrosesi	4.1	(3,990,571)	(331,213)	(4,321,784)	*Reinsurance and retrocession premiums*
Penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	4.1, 4.2b	1,548,674	19,974	1,568,648	*Decrease in unearned premium reserves*
Pendapatan premi asuransi - bersih		**17,916,675**	**2,672,022**	**20,588,697**	***Insurance premium income - net***
PENDAPATAN *UNDERWRITING* - BERSIH		**25,415,482**	**2,672,022**	**28,087,504**	***UNDERWRITING INCOME - NET***
BEBAN *UNDERWRITING*					***UNDERWRITING EXPENSES***
Beban klaim asuransi					***Insurance claim expenses***
Beban klaim asuransi bruto	4.1	20,807,289	2,447,801	23,255,090	*Gross insurance claim expense*
Klaim reasuransi dan retrosesi	4.1	(3,247,425)	(277,257)	(3,524,682)	*Reinsurance and retrocession claims*
Penurunan estimasi liabilitas klaim asuransi	4.1, 4.2a, 4.2b	(2,650,931)	278,839	(2,372,092)	*Decrease in estimated insurance claim liabilities*
Beban klaim asuransi - bersih		**14,910,733**	**2,449,383**	**17,360,116**	***Insurance claim expenses - net***
Beban akuisisi dan komisi asuransi - bersih	4.1	**1,073,407**	**138,805**	**1,212,212**	***Acquisition cost and insurance commission expenses - net***
BEBAN *UNDERWRITING* - BERSIH		**19,284,545**	**2,588,188**	**21,872,733**	***UNDERWRITING EXPENSE - NET***
HASIL *UNDERWRITING* - BERSIH		**6,130,937**	**83,834**	**6,214,771**	***UNDERWRITING RESULTS - NET***
Hasil investasi	4.1	4,998,637	153,474	5,152,111	*Investment Income*
Beban umum dan administrasi	4.1	(9,212,707)	(287,553)	(9,500,260)	*General and administrative expenses*
Pendapatan/ (beban) lain-lain - neto	4.1	895,422	33,605	929,027	*Other income/ (expense) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2,964,686**	**(16,640)**	**2,948,046**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	4.1	(590,545)	(18,364)	(608,909)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**2,374,141**	**(35,004)**	**2,339,137**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***

Tabel di bawah ini merangkum dampak penyajian kembali terhadap laporan arus kas konsolidasian tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:

The table below summarizes the impact of the restatement on the consolidated statement of cash flows for the year ended in December, 31 2023:

		31 Desember/ *December 31,* 2023			
	Referensi/ *Reference*	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas:					***Cash received:***
Penerimaan kas dari pendapatan premi asuransi	4.1	23,743,886	3,013,304	26,757,190	*Cash received from insurance premium income*
Penerimaan kas dari subrogasi, klaim reasuransi, dan klaim retrosesi	4.1	3,496,286	314,404	3,810,690	*Cash received from subrogation, reinsurance claims, and retrocession claims*
Penerimaan kas lainnya	4.1	3,276,518	20,305	3,296,823	*Cash received from others*
Pengeluaran kas:					***Cash disbursement:***
Pengeluaran kas untuk klaim	4.1	(22,026,029)	(2,437,243)	(24,463,272)	*Cash disbursement for claims*
Pengeluaran kas untuk komisi	4.1	(1,054,316)	(144,099)	(1,198,415)	*Cash disbursement for commissions*
Pengeluaran kas untuk premi reasuransi dan retrosesi	4.1	(10,417,872)	(338,704)	(10,756,576)	*Cash disbursement for reinsurance and retrocession premiums*
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	4.1	(1,366,982)	(17,454)	(1,384,436)	*Cash disbursement for corporate income tax*
Pengeluaran kas untuk beban umum dan underwriting lainnya	4.1	(4,283,964)	(341,664)	(4,625,628)	*Cash disbursement for general and other underwriting expenses*
Pengeluaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	4.1	(649,628)	64,896	(584,732)	*Cash disbursement to supplier and other third parties*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		**716,895**	**(133,745)**	**583,150**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap dan properti investasi	4.1	(422,353)	(15,439)	(437,792)	*Acquisition of fixed assets and investment properties*
Penerimaan hasil investasi	4.1	4,646,570	148,434	4,795,004	*Investment income received*
Pencairan investasi	4.1	40,839,484	4,265,696	45,105,180	*Redemption of investments*
Penempatan investasi	4.1	(46,163,719)	(4,466,348)	(50,630,067)	*Placement of investments*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		**(1,072,045)**	**(67,657)**	**(1,139,702)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	4.1	(167,434)	(11,305)	(178,739)	*Lease liabilities payment*
Pembayaran dividen	4.1	(65,758)	(30,242)	(96,000)	*Dividend payment*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		**1,256,303**	**(41,547)**	**1,214,756**	***Net cash flows provided from financing activities***
Penurunan pada kas dan setara kas		(532,637)	24,541	(508,096)	***Decrease in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun		14,139,938	902,028	15,041,966	***Cash and cash equivalents at the beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun		**13,596,010**	**(2,810,637)**	**14,522,579**	***Cash and cash equivalents at the end of the year***

Tabel di bawah ini merangkum dampak penyajian kembali terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2023/ 31 Desember 2022:

The table below summarizes the impact of the restatement on the consolidated statement of financial position as of January 1, 2023/ December 31, 2022:

		1 Januari/ *January 1,* 2023			
	Referensi/ *Reference*	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
Laporan posisi keuangan konsolidasian					***Consolidated statement of financial postion***
ASET					***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	4.1	14,139,938	902,028	15,041,966	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	4.1	71,633,561	1,158,019	72,791,580	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	4.1	866,421	46,453	912,874	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	4.1	7,500,714	144,162	7,644,876	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	4.1	2,463,092	29,516	2,492,608	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang hasil investasi	4.1	739,061	140,185	879,246	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar dimuka	4.1	150,715	104	150,819	*Prepaid taxes*
Aset tetap	4.1	3,126,589	46,273	3,172,862	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	4.1	4,774,048	62,811	4,836,859	*Deferred tax assets*
Aset reasuransi	4.1, 4.2b	9,979,762	(1,189,309)	8,790,453	*Reinsurance assets*
Aset retrosesi	4.2a	2,380,618	(549,406)	1,831,212	*Retrocession assets*
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	4.1	367,603	17,611	385,214	*Deferred acquisition assets - net*
Aset lain-lain	4.1	4,176,004	29,178	4,205,182	*Other assets*
JUMLAH ASET		**131,756,791**	**837,625**	**132,594,416**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	4.1	2,259,955	62	2,260,017	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	4.1	1,490,719	9,904	1,500,623	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	4.1	7,660,896	186,590	7,847,486	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	4.1	59,606,790	802,409	60,409,199	*Insurance contract liabilities*
Pendapatan diterima dimuka	4.1	164,655	--	164,655	*Unearned revenue*
Utang pajak	4.1	1,270,793	8,498	1,279,291	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja	4.1	1,331,685	38,774	1,370,459	*Employee benefit obligations*
JUMLAH LIABILITAS		**94,577,056**	**1,046,237**	**95,623,293**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	4.1, 4.2a, 4.2b	3,699,578	(1,647,867)	2,051,711	*Retained earnings Unappropriated*
Kepentingan nonpengendali	4.1	892,187	330,075	1,222,262	*Non-controlling interest*
Ekuitas merging entities	4.1	--	1,109,180	1,109,180	*Equity of merging entities*
JUMLAH EKUITAS		**38,150,070**	**(208,612)**	**37,941,458**	***TOTAL EQUITY***

5. Transfer Portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), KBUMN melalui Surat No. S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 bersama Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020, telah memberikan persetujuan pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas anak, IFG Life.

IFG Life dan Jiwasraya telah menandatangani Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio (Aset dan Kewajiban) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No.041/Perj/ BPUI/V/2021, No. 00048/ SJ/U/HCD/0521 dan No. 0014/ Perj./AJIFG/U/V/2021 pada tanggal 20 Mei 2021, yang mana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 10 tanggal 15 Desember 2021.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengalihan aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life juga harus memperhatikan tingkat kesehatan IFG Life sesuai ketentuan, maka proses pengalihan aset dan liabilitas dilakukan secara bertahap.

Transaksi pengalihan ini diakui sesuai PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali karena dilakukan dengan pihak berelasi dan merupakan bagian dari rencana Pemerintah Republik Indonesia, sebagai pemegang saham pengendali terakhir IFG Life, untuk menyelesaikan liabilitas kepada pemegang polis terdahulu PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Oleh karena itu, selisih antara aset dan liabilitas yang diterima di setiap tahapan pengalihan dicatat pada "tambahan modal disetor"

5. Transfer of Portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

In relation with the implementation of the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), MSOE through Letter No. S-713/MBU/09/2020 dated September 11, 2020, together with the Financial Services Authority ("FSA") through Letter No. S- 449/NB.2/2020 dated October 22, 2020, have given approval for the transfer of assets and liabilities to subsidiary, IFG Life.

IFG Life and Jiwasraya have signed the Master Agreement for the Transfer of Portfolio (Assets and Liabilities) of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG in the Context of Resolving Problems with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 041/Perj/ BPUI/V/2021, No. 00048/ SJ/U/HCD/0521 and No. 0014/ Perj./AJIFG/U/V/2021 dated May 20, 2021, which has been amended and restated in the Deed of Amendment and Restatement of the Master Agreement for the Transfer of Portfolio of Insurance (Policy) Followed by the Transfer of Assets and Liabilities of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 10 dated December 15, 2021.

Taking into account that the transfer of assets and liabilities from Jiwasraya to IFG Life must also pay attention to the soundness of IFG Life in accordance with the provisions, the process of transferring assets and liabilities is carried out in batches.

This transfer transaction is recognized under PSAK 338 "Business Combinations of Entities under Common Control" because it is conducted with a related party and is part of the plan of the Government of the Republic of Indonesia, as ultimate shareholder of IFG Life, to settle its liabilities to the former policyholders of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Therefore, the difference between the assets and liabilities received at each stage of the transfer is recorded in "additional paid-in capital".

Pengalihan aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Transfers of assets and liabilities from Jiwasraya to IFG Life in the current years are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	269,048	16,094	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	1,504,523	100,701	*Investment - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	35,435	--	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	--	1,038	*Investment income receivables - net*
Penyertaan langsung	10	--	*Direct participation*
Aset tetap - bersih	54,081	--	*Fixed assets - net*
Properti investasi - bersih	22,205	757,444	*Investment properties - net*
Aset lain-lain	10	45	*Other assets*
	1,885,312	**875,322**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	112	--	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	3,218,809	4,354,139	*Insurance contract liabilities*
	3,218,921	**4,354,139**	
Selisih yang diakui di tambahan modal disetor (Catatan 37b)	(1,333,609)	(3,478,817)	*Differences recognized in additional paid in capital (Note 37b)*

6. Kas dan Setara Kas – Bersih / *6. Cash and Cash Equivalents - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	5,105	5,261	*Cash on hand*
Kas di bank	2,893,953	2,645,759	*Cash in banks*
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	12,334,481	11,874,956	*Time deposits 3 months or less*
	15,233,539	**14,525,976**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,943)	(3,397)	*Allowance for impairment losses*
	15,228,596	**14,522,579**	

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kas dan setara kas.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible cash and cash equivalents.

Termasuk di dalam kas dan setara kas sebesar Rp269.048 (2023: Rp16.094) adalah saldo kas dan setara kas yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the cash and cash equivalents amounting to Rp269,048 (2023: Rp16,094) is the balance of the cash and cash equivalents transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

Kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan pihak:

Cash and cash equivalents by currency and party:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	**5,105**	**5,261**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	833,998	759,134	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	474,436	697,793	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	209,378	116,404	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165,503	242,048	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	58,854	47,527	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	7,443	12,726	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Mandiri Taspen	948	2,120	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	90	1,186	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
	1,750,650	**1,878,938**	
Pihak ketiga	548,984	464,400	*Third parties*
	2,299,634	**2,343,338**	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	506,755	247,067	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42,054	29,734	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35,359	16,438	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4,185	469	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	588,353	**293,708**	
Pihak ketiga	5,966	8,713	*Third parties*
	594,319	**302,421**	
	2,893,953	**2,645,759**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(488)	(140)	*Allowance for impairment losses*
	2,893,465	**2,645,619**	

	2024 Rp	2023 Rp	
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang			***Time deposits 3 months or less***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,975,650	1,964,672	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,434,896	2,272,770	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,264,143	3,440,938	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,231,334	959,088	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	604,574	926,789	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	265,450	157,531	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	148,000	201,000	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	1,000	1,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
	9,925,047	**9,923,788**	
Pihak ketiga	2,374,696	1,872,540	*Third parties*
	12,299,743	**11,796,328**	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,738	77,115	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	1,513	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	34,738	**78,628**	
Pihak ketiga	--	--	*Third parties*
	34,738	**78,628**	
	12,334,481	**11,874,956**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,455)	(3,257)	*Allowance for impairment losses*
	12,330,026	**11,871,699**	

Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas di bank dan deposito berjangka 3 bulan atau kurang adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on cash in bank and time deposits 3 months or less are as follows:

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Kas di bank	0.00% - 3.50%	0.00% - 3.50%	*Cash in banks*
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	2.00% - 7.50%	2.00% - 7.50%	*Time deposits 3 months or less*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Kas di bank	0.00% - 0.20%	0.00% - 0.15%	*Cash in banks*
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	0.15% - 5.50%	0.15% - 5.50%	*Time deposits 3 months or less*

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

7. Investasi – Bersih / *7. Investments - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Obligasi, sukuk, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	58,020,125	56,206,773	*Bonds, sukuk, and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
Reksadana	12,324,846	9,545,997	*Mutual funds*
Deposito berjangka	4,379,829	11,382,799	*Time deposits*
Saham	1,441,761	1,628,568	*Shares*
Investasi *unit link*	172,012	189,299	*Unit-linked investments*
Efek beragun aset	10,921	12,483	*Asset-backed securities*
Dana investasi infrastruktur	--	30,030	*Infrastructure investment fund*
	76,349,494	**78,995,949**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,831)	(18,887)	*Allowance for impairment losses*
	76,337,663	**78,977,062**	

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya investasi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible investments.

a. Obligasi, sukuk, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia / *a. Bonds, sukuk, and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya perolehan diamortisasi			*Amortised cost*
Obligasi pemerintah	10,951,874	8,461,647	*Government bonds*
Obligasi korporasi	2,640,739	2,206,100	*Corporate bonds*
Sukuk	1,610,058	2,313,670	*Sukuk*
	15,202,671	**12,981,417**	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Obligasi pemerintah	681,998	280,713	*Government bonds*
Obligasi korporasi	1,347,709	766,744	*Corporate bonds*
Sukuk	113,765	--	*Sukuk*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	29,770	--	*Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
	2,173,242	**1,047,457**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi pemerintah	35,486,494	37,318,592	*Government bonds*
Obligasi korporasi	2,813,213	2,114,013	*Corporate bonds*
Sukuk	2,344,505	2,745,294	*Sukuk*
	40,644,212	**42,177,899**	
	58,020,125	**56,206,773**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,814)	(17,563)	*Allowance for impairment losses*
	58,009,311	**56,189,210**	

Termasuk di dalam obligasi sebesar Rp942.153 (2023: Rp100.701) adalah saldo obligasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the bonds amounting to Rp942,153 (2023: Rp100,701) is the balance of the bonds transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

Lihat Catatan 51 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 51 for details of related parties transactions and balances.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

Changes in allowance for impairment losses

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	17,563	15,471	*Beginning balance*
(Pengurangan)/ penambahan	(6,749)	2,092	*(Deduction)/ addition*
Saldo akhir	**10,814**	**17,563**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya obligasi, dan sukuk.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible bonds and sukuk.

b. Reksadana

b. Mutual funds

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Pendapatan tetap	6,602,668	5,453,971	*Fixed income*
Pasar uang	1,965,780	948,477	*Money market*
Saham	1,377,168	1,026,930	*Shares*
Terproteksi	1,225,080	778,469	*Protected*
Penyertaan terbatas	584,540	932,430	*Limited participation*
Campuran	569,610	386,408	*Mixed*
Exchange Traded Fund (ETF)	--	19,312	*Exchange Traded Fund (ETF)*
	12,324,846	**9,545,997**	

Termasuk di dalam reksadana sebesar Rp562.370 (2023: Nihil) adalah saldo obligasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the mutual funds amounting to Rp562,370 (2023: Nil) is the balance of the bonds transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

	2024 Rp	2023 Rp	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	946,500	2,445,144	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	706,955	5,577,320	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500,350	841,700	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	368,260	26,500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	297,112	493,650	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	110,400	319,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Bank Mandiri Taspen	--	10,001	*PT Bank Mandiri Taspen*
	2,929,577	**9,713,315**	
Pihak ketiga	1,175,582	1,345,264	*Third parties*
	4,105,159	**11,058,579**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	64,628	92,634	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga	210,042	231,586	*Third parties*
	274,670	**324,220**	
	4,379,829	**11,382,799**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,017)	(1,324)	*Allowance for impairment losses*
	4,378,812	**11,381,475**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 51 for details of related parties transactions and balances.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / *Changes in allowance for impairment losses*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	1,324	1,158	*Beginning balance*
(Pengurangan)/penambahan	(307)	166	*(Deduction)/addition*
Saldo akhir	**1,017**	**1,324**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya deposito berjangka.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible time deposits.

d. Saham / *d. Shares*

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Perusahaan milik negara	604,133	459,099	*State owned enterprises*
Perusahaan milik swasta	204,583	293,429	*Private owned enterprises*
	808,716	**752,528**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Fair value through other comprehensive income*
Perusahaan milik negara	575,089	825,804	*State owned enterprises*
Perusahaan milik swasta	57,956	50,236	*Private owned enterprises*
	633,045	**876,040**	
	1,441,761	**1,628,568**	

Pada tahun 2024 dan 2023, beberapa investasi saham dari entitas anak, IFG Life dan Jasa Raharja yang tidak memenuhi kriteria pasar aktif dihitung menggunakan *input level 2* masing-masing oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Iwan Bachron & Rekan dan ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan. Laporan untuk IFG Life dan Jasa Raharja masing-masing diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2025 (2023: 25 Maret 2024 dan 12 Februari 2024).

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

In 2024 and 2023, some of investment in shares from the subsidiary, IFG Life and Jasa Raharja, which do not meet the criteria of active market were calculated using level 2 input by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Iwan Bachron & Rekan and ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan respectively. The reports for IFG Life and Jasa Raharja were issued on March 3, 2025 (2023: March 25, 2024 and February 12, 2024), respectively.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

e. Investasi *unit link* / *e. Unit-linked investment*

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi	172,012	189,299	*Fair value through profit or loss*

f. Efek beragun aset / *f. Asset-backed securities*

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi	10,921	12,483	*Fair value through profit or loss*

g. Dana investasi infrastruktur / *g. Infrastructure investment fund*

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi	--	30,030	*Fair value through profit or loss*

8. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain Bersih / *8. Accounts Receivable and Other Receivables - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Piutang usaha	987,607	661,006	*Accounts receivable*
Piutang lain-lain	295,424	259,556	*Other receivables*
	1,283,031	**920,562**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198,689)	(170,566)	*Allowance for impairment losses*
	1,084,342	**749,996**	

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha dan piutang lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts receivable and other receivables.

a. Piutang usaha – bersih / *a. Accounts receivable – net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Piutang nasabah	500,785	117,196	*Customer receivables*
Piutang sewa	143,152	172,203	*Lease receivables*
Piutang komisi penjaminan ulang	72,153	2,799	*Co-guarantee commission receivables*
Piutang atas efek	67,975	129,594	*Securities receivables*
Piutang klaim syariah - penjaminan	59,634	87,156	*Sharia claim receivables - guarantee*
Piutang jasa penasehat keuangan	57,404	8,859	*Financial advisory service receivables*
Piutang usaha pengelolaan dana	34,910	29,979	*Fund management service receivables*
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	26,890	25,284	*Clearing and guarantee institution receivables*
Piutang klaim syariah - asuransi	13,179	58,207	*Sharia claim receivables - insurance*
Piutang imbal jasa kafalah penjaminan	9,085	10,310	*Kafalah fee receivables - guarantee*
Piutang imbal jasa kafalah asuransi	2,440	19,419	*Kafalah fee receivables - insurance*
	987,607	**661,006**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(161,551)	(137,317)	*Allowance for impairment losses*
	826,056	**523,689**	

b. Piutang lain-lain – bersih / *b. Other receivables - net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Piutang kelebihan klaim	85,495	24,866	*Excess claim receivables*
Piutang pemulihan klaim	61,139	101,073	*Claim recovery receivables*
Pinjaman bagi hasil	17,110	17,110	*Profit sharing loan*
Piutang koperasi	9,829	10,417	*Receivables from cooperatives*
Pinjaman yang diberikan kepada karyawan	7,462	13,615	*Employee receivables*
Lainnya	114,389	92,475	*Others*
	295,424	**259,556**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37,138)	(33,249)	*Allowance for impairment losses*
	258,286	**226,307**	

9. Piutang Premi Asuransi dan Reasuransi – Bersih / *9. Insurance and Reinsurance Premium Receivables - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	4,150,833	5,588,752	*Related parties*
Pihak ketiga	3,430,635	2,774,276	*Third parties*
	7,581,468	**8,363,028**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,301,734)	(2,192,773)	*Allowance for impairment losses*
	5,279,734	**6,170,255**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 51 for details of related parties transactions and balances.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	2,192,773	2,097,952	*Beginning balance*
Penambahan	108,961	94,821	*Addition*
Saldo akhir	**2,301,734**	**2,192,773**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang premi asuransi dan reasuransi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible insurance and reinsurance premium receivables.

10. Piutang Imbal Jasa Penjaminan – Bersih / *10. Guarantee Fee Receivables - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	3,804,102	4,367,163	*Related parties*
Pihak ketiga	364,264	387,225	*Third parties*
	4,168,366	**4,754,388**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,364,631)	(2,025,814)	*Allowance for impairment losses*
	1,803,735	**2,728,574**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	2,025,814	1,203,557	*Beginning balance*
Penambahan	338,817	822,257	*Addition*
Saldo akhir	**2,364,631**	**2,025,814**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee fee receivables.

11. Piutang Klaim Reasuransi Dan Retrosesi – Bersih / *11. Reinsurance And Retrocession Claim Receivables - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	573,048	414,494	*Related parties*
Pihak ketiga	5,785,508	5,483,300	*Third parties*
	6,358,556	**5,897,794**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,541,919)	(3,220,137)	*Allowance for impairment losses*
	2,816,637	**2,677,657**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	3,220,137	2,490,974	*Beginning balance*
Penambahan	321,782	729,163	*Addition*
Saldo akhir	**3,541,919**	**3,220,137**	***Ending balance***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas anak, Askrindo, memiliki piutang reasuransi sebesar Rp2.292.342 dan Rp2.130.711 dengan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia ("AJRI") dan atas piutang tersebut dibukukan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.292.342 dan Rp2.130.711.

As of December 31, 2024, and 2023, the subsidiary, Askrindo, had reinsurance receivables amounting to Rp2,292,342 and Rp2,130,711 with PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia ("AJRI") of which allowance for impairment losses amounting to Rp2,292,342 and Rp2,130,711 respectively for such receivables had been booked.

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang klaim reasuransi dan retrosesi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible reinsurance and retrocession claim receivables.

Termasuk di dalam piutang klaim reasuransi dan retrosesi sebesar Rp35.435 (2023: RpNihil) adalah saldo piutang klaim reasuransi dan retrosesi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the reinsurance and retrocession claim receivables amounting to Rp35,435 (2023: RpNil) is the balance of the reinsurance and retrocession claim receivables transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

12. Piutang Penjaminan Ulang – Bersih / *12. Re-Guarantee Receivables – Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	239,130	220,587	*Related parties*
Pihak ketiga	86,011	89,161	*Third parties*
	325,141	**309,748**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277,663)	(253,800)	*Allowance for impairment losses*
	47,478	**55,948**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	253,800	187,518	*Beginning balance*
Penambahan	23,863	66,282	*Addition*
Saldo akhir	**277,663**	**253,800**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

13. Piutang Pembiayaan Modal Ventura – Bersih / *13. Venture Capital Financing Receivables - Net*

a. Berdasarkan pihak / *a. By parties*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak ketiga	1,029,473	1,328,553	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160,159)	(153,572)	*Allowance for impairment losses*
	869,314	**1,174,981**	

b. Berdasarkan umur / ***b. By aging***

	2024 Rp	2023 Rp	
Belum jatuh tempo	776,750	1,046,883	*Not yet due*
Jatuh tempo selama 1 sampai 30 hari	102,568	111,324	*Due for 1 to 30 days*
Jatuh tempo selama 31 sampai 90 hari	8,935	2,541	*Due for 31 to 90 days*
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	141,220	167,805	*Due for over 90 days*
	1,029,473	**1,328,553**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160,159)	(153,572)	*Allowance for impairment losses*
	869,314	**1,174,981**	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	153,572	149,347	*Beginning balance*
Dampak dekonsolidasi PT Sarana Bali Ventura	658	--	*Impact of deconsolidation PT Sarana Bali Ventura*
Pemulihan tahun berjalan	(19,804)	(5,021)	*Recovery during the year*
Penghapusan tahun berjalan	(6,042)	(3,235)	*Write-off during the year*
Penambahan tahun berjalan	31,775	12,481	*Additional during the year*
Saldo akhir	**160,159**	**153,572**	***Ending balance***

Pembiayaan modal ventura berasal dari kegiatan dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil. Grup menyediakan dana untuk keperluan usaha perusahaan mitra usaha. Pola pembiayaan ini mengatur besarnya persentase keuntungan setiap bulan atau periode bagi Grup.

Venture capital financing represents activities in the form of joint cooperation arrangements with a profit sharing. The Group provides funds for operational use of the partner companies. This financing scheme defines a certain percentage of profit for each month or period attributable to the Group.

14. Perpajakan / *14. Taxation*

a. Pajak dibayar dimuka / ***a. Prepaid taxes***

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Kelebihan pembayaran pajak			*Claims for tax refund*
Tahun 2024	71,843	--	*Year 2024*
Tahun 2023	97,045	97,307	*Year 2023*
Tahun 2022	13,444	13,444	*Year 2022*
Tahun 2021	--	77,621	*Year 2021*
Pasal 25	11,947	11,931	*Article 25*
	194,279	**200,303**	
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Pajak Pertambahan Nilai	19,238	12,014	*Value-Added Tax*
Pajak lain-lain	3,036	3,527	*Other taxes*
	22,274	**15,541**	
	216,553	**215,844**	

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan pelaporan keuangan dan dapat berubah pada saat Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2024 is an estimate made for financial reporting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.

Askrindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00002/406/21/093/24 pada tanggal 24 Januari 2024 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp59.240 atas kelebihan pembayaran pada SPT Pembetulan 2021 sejumlah Rp61.180. Kelebihan bayar pajak tahun 2021 tersebut telah diperhitungkan dengan sisa utang pajak atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak 2021 total sebesar Rp10.177. Askrindo telah menerima pembayaran atas pengembalian sisa SKPLB sebesar Rp49.063 pada 16 Februari 2024.

Askrindo received Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00002/406/21/093/24 dated January 24, 2024 on corporate income tax for 2021 fiscal year amounting to Rp59,240 on overpayment of 2021 Income Tax Return amounted to Rp61,180. The tax overpayment for 2021 fiscal year had been netted-off with remaining taxes payable from tax collection letter of value added tax and underpayment tax assessment letter of income tax Articles 21, Article 23 and Value Added Tax for period 2021 totaling Rp10,177. Askrindo had received payment for the remaining refund of SKPLB amounted to Rp49,063 on February 16, 2024.

Pada bulan Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan pemeriksaan pajak Nasre untuk tahun pajak 2021 dan menerbitkan Surat Keputusan Pemeriksaan Pajak yaitu kurang bayar pasal 21, 23, dan 26 sebesar Rp2.852 serta lebih bayar untuk Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp16.422 atas kelebihan pembayaran pada SPT tahun 2021 sebesar Rp16.441. Pada tanggal 1 Februari 2024, Nasre telah menerima pengembalian atas pajak yang dinyatakan lebih bayar sebesar Rp16.422. Nasre mencatat kurang bayar pajak pasal 21, 23 dan 26 sebesar Rp2.852 sebagai beban lain-lain pada tahun 2024.

On January 2024, the Directorate General of Tax ("DGT") have completed tax examination of Nasre for fiscal years 2021 and issued the Decision Letter of Tax Audit, which resulted in tax underpayment article 21, 23, and 26 and overpayment for Corporate Income Taxes with a total value of Rp2,852 underpayment and Rp16,422 overpayment of the overpayment of income tax return 2021 amounting to Rp16,441. On February 1, 2024, Nasre received a tax refund which was declared to be overpaid amounting to Rp16,422. Nasre recorded tax underpayment articles 21, 23, and 26 amounting to Rp2,852 as other expenses in 2024.

Pada bulan April 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan pemeriksaan pajak Nasre untuk tahun pajak 2022 dan menerbitkan Surat Keputusan Pemeriksaan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah sebesar Rp7.999. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Nasre masih belum menerima atas pengembalian pajak tersebut.

On April 2024, the Directorate General of Tax (DGT) completed tax examination of Nasre for fiscal year 2022 and issued the Tax Examination Letter for overpayment of Corporate Income Tax amounted to Rp7,999. As of the date financial statements, Nasre has not received the tax refund yet.

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Pasal 25	2,842	43,808	*Article 25*
Pasal 29			*Article 29*
Tahun 2024	286,343	--	*Year 2024*
Tahun 2023	--	153,696	*Year 2023*
	289,185	**197,504**	
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Pasal 21	47,850	135,904	*Article 21*
Pasal 22	51	264	*Article 22*
Pasal 23	11,210	12,002	*Article 23*
Pasal 26	121	81	*Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai	43,874	436,927	*Value-Added Tax*
Pasal 4(2)	3,545	4,811	*Article 4(2)*
Pajak lain-lain	115,130	56,630	*Other taxes*
	221,781	**646,619**	
	510,966	**844,123**	

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2024 Rp	2023 Rp	
Konsolidasian			***Consolidated***
Kini	(541,589)	(595,949)	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	(35)	(1,135)	*Adjustment from prior year*
Tangguhan	770,473	(11,825)	*Deferred*
	228,849	**(608,909)**	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expenses and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
(Rugi)/ laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	(616,224)	2,948,046	*Consolidated (loss)/ profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(1,225,279)	(4,643,528)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Penyesuaian untuk eliminasi	2,862,448	3,951,525	*Adjustment for elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	**1,020,945**	**2,256,043**	***Profit before income tax - The Company***
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	224,608	496,329	*Taxes calculated at the applicable tax rate*
Perbedaan waktu	3,035	5,146	*Timing difference*
Perbedaan tetap	(223,691)	(498,541)	*Permanent difference*
Total dampak pajak penghasilan	(220,656)	(493,394)	*Total income tax impact*
Beban pajak penghasilan - Perseroan	3,952	2,935	*Income tax expenses - The Company*

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.

Taksiran laba kena pajak Perseroan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's estimated taxable income, and income taxes for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
(Rugi)/ Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	(616,224)	2,948,046	*Consolidated (loss)/ profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(1,225,279)	(4,661,415)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Penyesuaian untuk eliminasi	2,862,448	3,969,412	*Adjustment for elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	**1,020,945**	**2,256,043**	***Profit before income tax - The Company***
Perbedaan waktu:			***Timing differences:***
Penyusutan	7,581	1,895	*Depreciation*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12,517)	564	*Allowance for impairment losses*
Liabilitas imbalan kerja	(10,039)	19,963	*Employee benefit liabilities*
Sewa	28,770	968	*Leases*
	13,795	**23,390**	
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(2,354,247)	(3,525,730)	*Income subject to final tax and non-taxable income*
Beban yang tidak diperkenankan	1,337,470	1,259,636	*Non-deductible expenses*
	(1,016,777)	**(2,266,094)**	
Laba kena pajak	**17,963**	**13,339**	***Taxable income***
Perseroan:			***The Company:***
Beban pajak penghasilan - kini	3,952	2,935	*Income tax expenses - current*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			*Less prepaid income taxes:*
Pasal 23	(510)	(642)	*Article 23*
Pasal 25	(180)	--	*Article 25*
Kekurangan pembayaran pajak	3,262	2,293	*Corporate income tax payable*

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2024 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Tax Return.

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	2024				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ *(charged) to other comprehensive income* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Penyusutan dan amortisasi	(12,212)	(4,998)	--	(17,210)	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	319,146	(9,551)	(26,759)	282,836	*Employee benefit liabilites*
Akrual	129,531	57,707	--	187,238	*Accruals*
Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	1,036,601	152,057	--	1,188,658	*Unearned premium reserves*
Estimasi liabilitas klaim	153,144	231,976	--	385,120	*Estimated claim liabilities*
Cadangan kerugian penurunan penilaian	1,757,026	183,263	--	1,940,289	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,457,977	--	--	1,457,977	*Provision for claim loss*
Sewa	18,466	13,506	--	31,972	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(35,947)	608	9,689	(25,650)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	702,216	254,793	--	957,009	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	(2,304)	279,518	--	277,214	*Financial liabilities valuation*
	5,523,644	**1,158,879**	**(17,070)**	**6,665,453**	
Provisi atas aset pajak tangguhan	(681,349)	(388,406)	54	(1,069,701)	*Provision for deferred tax assets*
	4,842,295	**770,473**	**(17,016)**	**5,595,752**	

	2023				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ *(charged) to other comprehensive income* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Penyusutan dan amortisasi	(4,471)	(7,741)	--	(12,212)	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	298,154	4,468	16,524	319,146	*Employee benefit liabilites*
Akrual	101,685	27,846	--	129,531	*Accruals*
Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	1,105,571	(68,970)	--	1,036,601	*Unearned premium reserves*
Estimasi liabilitas klaim	560,598	(407,454)	--	153,144	*Estimated claim liabilities*
Cadangan kerugian penurunan penilaian	1,329,659	427,367	--	1,757,026	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,641,484	(183,507)	--	1,457,977	*Provision for claim loss*
Sewa	4,316	14,150	--	18,466	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(12,893)	553	(23,607)	(35,947)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	307,849	394,367	--	702,216	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	(2,372)	68	--	(2,304)	*Financial liabilities valuation*
	5,329,580	**201,147**	**(7,083)**	**5,523,644**	
Provisi atas aset pajak tangguhan	(492,721)	(212,972)	24,344	(681,349)	*Provision for deferred tax assets*
	4,836,859	**(11,825)**	**17,261**	**4,842,295**	

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

15. Penyertaan Langsung / *15. Direct Participation*

Nama perusahaan / *Name of company*	Jenis usaha / *Nature of business*	Persentase kepemilikan / *Percentage of ownership* %	2024 Rp	2023 Rp
Entitas asosiasi / ***Associate entity***				
Metode ekuitas / *Equity method*				
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi kerugian / *General insurance*	20.00	311,431	294,850
Entitas lain / ***Other entity***				
PT Asuransi Allianz Utama	Asuransi kerugian / *General insurance*	2.25	14,123	14,123
Bursa Efek Indonesia	Penyedia layanan perdagangan efek / *Securities trading service provider*	0.97	7,500	7,500
PT Reasuransi Maipark Indonesia	Asuransi kerugian / *General insurance*	6.58	6,290	6,290
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	Asuransi kerugian / *General insurance*	2.65	6,247	6,237
PT Taspen Properti Indonesia	Properti / *Property*	4.49	5,505	5,663
PT Kreasi Anak Indonesia	Fintek / *Fintech*	17.00	1,997	2,148
PT Fintek Karya Nusantara	Fintek / *Fintech*	0.89	1,962	2,395
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia *)	Asuransi kerugian / *General insurance*	0.00 (2023: 10.00)	--	217,000
Lain-lain / *Others*			7,825	7,804
			51,449	**269,160**
			362,880	**564,010**

*) IFG Life secara resmi mengakuisisi 80% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dengan tanggal efektif akuisisi 26 Juni 2024 (lihat Catatan 1b)

*) *IFG Life officially acquired 80% of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia's shares, with an effective acquisition date of June 26, 2024 (refer to Note 1b)*

Termasuk di dalam penyertaan langsung sebesar Rp10 (2023: Nihil) adalah saldo penyertaan langsung yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the direct participation amounting to Rp10 (2023: Nil) is the balance of direct participation transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

16. Aset Tetap – Bersih / *16. Fixed Assets - Net*

	2024						
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Dekonsolidasi/ *Deconsolidation* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:							***Acquisition cost:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah	1,308,641	210,532	(164,323)	--	(1,012)	1,353,838	*Land*
Bangunan	2,037,200	171,164	(62,651)	5,718	(921)	2,150,510	*Buildings*
Kendaraan	194,548	10,267	(12,094)	--	(817)	191,904	*Vehicles*
Peralatan	1,104,013	118,568	(70,911)	14,402	(601)	1,165,471	*Equipment*
Aset tetap lainnya	176,782	8,847	--	1,616	--	187,245	*Other fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	182,799	113,732	(33,481)	(49,357)	--	213,693	*Construction in progress*
Sub jumlah	**5,003,983**	**633,110**	**(343,460)**	**(27,621)**	**(3,351)**	**5,262,661**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	309,414	99,033	(57,457)	--	--	350,990	*Buildings*
Kendaraan	259,582	69,763	(33,942)	--	--	295,403	*Vehicles*
Peralatan	6,033	329	(2,931)	252	--	3,683	*Equipment*
Sub jumlah	**575,029**	**169,125**	**(94,330)**	**252**	**--**	**650,076**	*Sub total*
Jumlah	**5,579,012**	**802,235**	**(437,790)**	**(27,369)**	**(3,351)**	**5,912,737**	*Total*
Akumulasi penyusutan:							***Accumulated depreciation:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan	(886,016)	(104,483)	955	--	709	(988,835)	*Buildings*
Kendaraan	(183,710)	(5,948)	11,959	--	725	(176,974)	*Vehicles*
Peralatan	(812,760)	(102,495)	70,445	--	554	(844,256)	*Equipment*
Aset tetap lainnya	(94,065)	(21,303)	67	--	--	(115,301)	*Other fixed asset*
Sub jumlah	**(1,976,551)**	**(234,229)**	**83,426**	**--**	**1,988**	**(2,125,366)**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	(188,987)	(116,902)	72,407	--	--	(233,482)	*Buildings*
Kendaraan	(131,745)	(74,879)	34,095	--	--	(172,529)	*Vehicles*
Peralatan	(2,715)	(1,251)	2,931	(119)	--	(1,154)	*Equipment*
Sub jumlah	**(323,447)**	**(193,032)**	**109,433**	**(119)**	**--**	**(407,165)**	*Sub total*
Jumlah	**(2,299,998)**	**(427,261)**	**192,859**	**(119)**	**1,988**	**(2,532,531)**	*Total*
Penurunan nilai tanah	(160)	--	--	--	--	(160)	*Impairment of land*
Penurunan nilai aset dalam penyelesaian	--	(33,301)	--	--	--	(33,301)	*Impairment of construction in progress*
Nilai buku - bersih	**3,278,854**					**3,346,745**	***Book value - net***

	2023					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Tanah	1,394,861	38,172	(128,805)	4,413	1,308,641	*Land*
Bangunan	1,691,230	304,281	(40,321)	82,010	2,037,200	*Buildings*
Kendaraan	191,459	6,566	(3,906)	429	194,548	*Vehicles*
Peralatan	1,034,403	111,501	(49,234)	7,343	1,104,013	*Equipment*
Aset tetap lainnya	162,910	9,398	(695)	5,169	176,782	*Other fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	252,102	99,977	(37,738)	(131,542)	182,799	*Construction in progress*
Sub jumlah	**4,726,965**	**569,895**	**(260,699)**	**(32,178)**	**5,003,983**	*Sub total*
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan	294,948	117,216	(102,927)	177	309,414	*Buildings*
Kendaraan	180,572	117,533	(51,059)	12,536	259,582	*Vehicles*
Peralatan	18,430	745	--	(13,142)	6,033	*Equipment*
Sub jumlah	**493,950**	**235,494**	**(153,986)**	**(429)**	**575,029**	*Sub total*
Jumlah	**5,220,915**	**805,389**	**(414,685)**	**(32,607)**	**5,579,012**	*Total*
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Bangunan	(782,211)	(109,102)	5,931	(634)	(886,016)	*Buildings*
Kendaraan	(177,368)	(9,677)	3,671	(336)	(183,710)	*Vehicles*
Peralatan	(716,085)	(106,549)	9,752	122	(812,760)	*Equipment*
Aset tetap lainnya	(79,326)	(15,945)	695	511	(94,065)	*Other fixed asset*
	(1,754,990)	**(241,273)**	**20,049**	**(337)**	**(1,976,551)**	*Sub total*
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan	(170,591)	(119,083)	100,752	(65)	(188,987)	*Buildings*
Kendaraan	(117,549)	(62,704)	51,221	(2,713)	(131,745)	*Vehicles*
Peralatan	(4,763)	(1,067)	--	3,115	(2,715)	*Equipment*
Sub jumlah	**(292,903)**	**(182,854)**	**151,973**	**337**	**(323,447)**	*Sub total*
Jumlah	**(2,047,893)**	**(424,127)**	**172,022**	**--**	**(2,299,998)**	*Total*
Penurunan nilai tanah	(160)				(160)	*Impairment of land*
Nilai buku - bersih	**3,172,862**				**3,278,854**	***Book value - net***

Beban penyusutan aset tetap diakui pada beban umum dan administrasi.

Depreciation expense of fixed assets is recognized in general and administrative expenses.

Direksi berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Grup selain yang tersaji pada tabel di atas.

The Directors believe that there is no indication of impairment of fixed assets owned by the Group other than as presented above.

Pada tahun 2024 dan 2023, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.672.420 dan Rp1.361.512 (tidak diaudit). Direksi berkeyakinan bahwa pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

In 2024 and 2023, fixed assets, except land, have been insured with sum insured of Rp2,672,420 and Rp1,361,512, respectively (unaudited). The Directors believe that the sum insured is adequate to cover possible losses on fixed assets.

Termasuk di dalam penambahan aset tetap pada tahun 2024 adalah saldo aset tetap yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp54.081 (2023: Nihil), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5. Atas aset tetap yang telah dialihkan, terdapat Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") yang dikapitalisasi sebesar Rp2.704 (2023: Rp1.905) dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") yang dikapitalisasi sebesar Rp5.949 (2023: Rp116.911).

Included in the additions of fixed assets in 2024 is the balance of the fixed assets transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Rp54,081 (2023: Nil), as described in Note 5. Upon the fixed assets that has been transferred, there are capitalized Land and Building Title Transfer Fee ("BPHTB") amounting to Rp2,704 (2023: Rp1,905) and Value-added Tax ("VAT") amounting to Rp5,949 (2023: Rp116,911).

17. Properti Investasi – Bersih / *17. Investment Properties - Net*

	2024				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	*Penambahan/ Additions* Rp	*Pengurangan/ Deductions* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:					*Acquisition cost:*
Tanah	4,005,193	16,455	(10,188)	4,011,460	*Land*
Bangunan dan prasarana	1,099,509	7,761	(11,049)	1,096,221	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	93,357	3,655	--	97,012	*Building equipment*
Jumlah	**5,198,059**	**27,871**	**(21,237)**	**5,204,693**	*Total*
Akumulasi penyusutan:					*Accumulated depreciation:*
Bangunan dan prasarana	(133,116)	(51,944)	1,241	(183,819)	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	(46,735)	(6,209)	--	(52,944)	*Building equipment*
Jumlah	**(179,851)**	**(58,153)**	**1,241**	**(236,763)**	*Total*
Nilai buku - bersih	**5,018,208**			**4,967,930**	***Book value - net***

	2023				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	*Penambahan/ Additions* Rp	*Pengurangan/ Deductions* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:					*Acquisition cost:*
Tanah	3,261,080	744,113	--	4,005,193	*Land*
Bangunan dan prasarana	572,096	528,511	(1,098)	1,099,509	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	91,958	1,399	--	93,357	*Building equipment*
Jumlah	**3,925,134**	**1,274,023**	**(1,098)**	**5,198,059**	*Total*
Akumulasi penyusutan:					*Accumulated depreciation:*
Bangunan dan prasarana	(101,679)	(35,597)	4,160	(133,116)	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	(40,598)	(6,137)	--	(46,735)	*Building equipment*
Jumlah	**(142,277)**	**(41,734)**	**4,160**	**(179,851)**	*Total*
Nilai buku - bersih	**3,782,857**			**5,018,208**	***Book value - net***

Termasuk di dalam penambahan properti investasi pada tahun 2024 adalah saldo properti investasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp22.205 (2023: Rp757.444), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5. Atas properti investasi yang telah dialihkan, terdapat BPHTB yang dikapitalisasi sebesar Rp1.110 (2023: Rp39.304) dan PPN yang dikapitalisasi sebesar Rp2.442 (2023: Rp472.080).

Included in the additions of investment properties in 2024 is the balance of the investment properties from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Rp22,205 (2023: Rp757,444), as described in Note 5. Upon the investment properties that has been transferred, there are capitalized BPHTB amounting to Rp1,110 (2023: Rp39,304) and VAT amounting to Rp2,442 (2023: Rp472,080).

Beban penyusutan properti investasi diakui pada beban umum dan administrasi.

Depreciation expense of investment properties recognized in general and administrative expenses.

18. Aset Reasuransi / *18. Reinsurance Assets*

	2024 Rp	2023 Rp	
Premi yang belum merupakan pendapatan	2,472,036	2,922,455	*Unearned premium reserves*
Estimasi klaim	6,735,919	7,078,575	*Estimated claims*
	9,207,955	**10,001,030**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,255,581)	(1,348,957)	*Allowance for impairment losses*
	7,952,374	**8,652,073**	

a. Premi yang belum merupakan pendapatan / *a. Unearned premium reserves*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	926,146	1,110,649	*Credit*
Kesehatan	40,346	9,133	*Health*
Tanggung gugat	44,074	39,299	*Liability*
Jiwa	7,135	3,602	*Life*
Harta benda (properti)	243,976	459,837	*Property*
Suretyship	237,993	277,808	*Suretyship*
Energi *offshore*	534,796	303,493	*Energy offshore*
Rangka kapal	87,137	82,246	*Marine hull*
Rekayasa	92,398	82,620	*Engineering*
Kendaraan bermotor	10,747	10,489	*Vehicles*
Rangka pesawat	71,014	70,556	*Aviation*
Pengangkutan	6,840	2,243	*Marine cargo*
Energi *onshore*	18,584	14,922	*Energy onshore*
Satelit	37,923	260,613	*Satellites*
Kecelakaan diri	1,781	1,974	*Personal accident*
Aneka	111,146	192,971	*Miscellaneous*
	2,472,036	**2,922,455**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(667,327)	(867,882)	*Allowance for impairment losses*
	1,804,709	**2,054,573**	

b. Estimasi klaim / ***b. Estimated claims***

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	808,889	584,815	*Credit*
Kesehatan	34,042	37,236	*Health*
Tanggung gugat	95,935	93,564	*Liability*
Jiwa	4,120	7,432	*Life*
Harta benda (properti)	1,177,835	1,325,662	*Property*
Suretyship	485,226	550,479	*Suretyship*
Energi *offshore*	2,380,588	2,712,804	*Energy offshore*
Rangka kapal	318,190	297,192	*Marine hull*
Rekayasa	319,774	353,269	*Engineering*
Kendaraan bermotor	6,454	6,798	*Vehicles*
Rangka pesawat	88,153	83,991	*Aviation*
Pengangkutan	6,871	7,222	*Marine cargo*
Energi *onshore*	8,207	891	*Energy onshore*
Satelit	26,495	15,617	*Satellites*
Kecelakaan diri	240	393	*Personal accident*
Aneka	974,900	1,001,210	*Miscellaneous*
	6,735,919	**7,078,575**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(588,254)	(481,075)	*Allowance for impairment losses*
	6,147,665	**6,597,500**	

Askrindo telah mengadakan perjanjian Kerjasama, Asuransi Kredit dengan Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut "Tertanggung") tertentu dimana Perseroan menanggung risiko kerugian, atas kredit yang diderita oleh Tertanggung akibat debitur Tertanggung tidak melunasi kredit kepada Tertanggung pada saat jatuh tempo atau berada dalam kolektibilitas Diragukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, akibat meninggal dunia, dan akibat meninggal dunia, dan akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

Askrindo entered into a Credit Insurance Cooperation Agreement with certain Banks/Non-Bank Financial Institutions (herein after referred to as the "Insured"), whereby the Company took the risk of loss on credits suffered by the Insured due to the Insured's debtors not paying off the credits to the Insured when due or become Doubtful collectibility according to the Financial Services Authority regulations, due to death, and due to Termination of Employment.

Secara terpisah, pada tanggal 20 Maret 2015, Askrindo dan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (selanjutnya disebut "AJRI") menandatangani Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi Nomor 05/PERJ/DIR/III/2015 Tentang Asuransi Jiwa Kredit dimana AJRI menanggung risiko meninggal dunia alami (*normal death*) dari debitur yang menerima kredit/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank yang memperoleh pertanggungan asuransi kredit dari Askrindo. Perjanjian tersebut telah diberi addendum beberapa kali dan addendum terakhir adalah pada tanggal 6 Mei 2020 terkait dengan perubahan masa berlaku dan berakhirnya perjanjian sampai dengan 28 Februari 2021. Melalui Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi

Separately, on March 20, 2015, Askrindo and PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (here in after referred to as "AJRI") signed a Co-Insurance Cooperation Agreement Number 05/PERJ/DIR/III/2015 Concerning Credit Life Insurance where AJRI bears the risk of normal death of debtors who received credit/financing from Banks/Non-Banks Financial Institutions who obtain credit insurance coverage from the Askrindo. The agreement had been amended several times and the last amendment was on May 6, 2020 related to the changes in the period and expiration of the agreement until February 28, 2021. Through the Co-Insurance Cooperation Agreement with AJRI, Askrindo intends to transfer the risk

dengan AJRI, Askrindo bermaksud untuk mengalihkan risiko kerugian kredit akibat meninggal dunia dari debitur Tertanggung tersebut kepada AJRI.

of credit losses due to normal death of the Insured's debtors to AJRI.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi tersebut, tata cara pengajuan pertanggungan dilakukan oleh Askrindo dengan menyampaikan *Statement of Accounts* (STOA) secara periodik dengan melampirkan daftar peserta penutupan asuransi beserta daftar klaim meninggal dunia kepada AJRI. Askrindo melakukan pembayaran premi kepada AJRI secara neto, yakni premi terhutang dikurangi dengan tagihan klaim yang telah disetujui AJRI.

In accordance with the Co-Insurance Cooperation Agreement, the procedures for submitting insurance coverage is carried out by Askrindo through submitting a Statement of Account (STOA) periodically by attaching a list of insurance coverage participants along with a list of death claims to AJRI. Askrindo made premium payments to AJRI on a net basis, in which the premiums owed deducted with the claim bills which have been approved by AJRI.

Askrindo mencatat transaksi Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi dengan AJRI tersebut sebagai transaksi reasuransi dengan mempertimbangkan substansi dari skema transaksi perjanjian tersebut di atas yaitu bahwa perjanjian antara Askrindo dan Tertanggung (yakni Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank) merupakan perjanjian asuransi bilateral; Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi antara Askrindo dengan AJRI adalah untuk mengalihkan risiko kerugian AJRI adalah untuk mengalihkan risiko kerugian yang dihadapi oleh Askrindo akibat debitur Tertanggung meninggal dunia kepada AJRI dimana AJRI akan melakukan penggantian atas klaim akibat meninggal dunia yang sudah dibayarkan Askrindo kepada Tertanggung; serta tidak adanya perjanjian khusus yang mengatur mengenai pembagian fungsi ketua dan anggota sebagaimana diatur dalam POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 36 tahun 2024.

Askrindo records the Co-Insurance Cooperation Agreement transaction with AJRI as a reinsurance transaction scheme of the agreement above, in which the agreement between Askrindo and the Insured (namely Bank/Non-Bank Financial Institution) is a bilateral insurance agreement; the Co-Insurance Cooperation Agreement with AJRI does not involve the Insured; the purpose of the Co-Insurance Cooperation Agreement between Askrindo and AJRI is to transfer the risk of loss faced by Askrindo due to the death of the Insured's debtors to AJRI where AJRI would compensate for claims due to normal death that have been paid by Askrindo to the Insured; and there is no specific agreement regulating the separation of functions of the leader and member as stipulated in POJK No. 69/POJK.05/2016 concerning the Implementation of Insurance Company Business, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company as amended by POJK No. 36 of 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Askrindo memiliki aset reasuransi yang berasal dari transaksi perjanjian kerjasama Ko-Asuransi dengan AJRI masing-masing sebesar Rp1.255.581 dan Rp1.348.957 dimana Askrindo telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara penuh atas seluruh saldo aset reasuransi tersebut.

As of December 31, 2024, and 2023, Askrindo had reinsurance assets originating from Co-Insurance cooperation agreement transaction with AJRI amounting to Rp1,255,581 and Rp1,348,957, respectively, where Askrindo has recognised a full allowance for impairment losses on the entire balances of such reinsurance assets.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak terpulihkannya aset reasuransi.

Management asserts that the impairment loss provision is adequate to cover any potential losses that may arise from the non-recovery of reinsurance assets.

19. Aset Retrosesi / *19. Retrocession Assets*

	2024 Rp	2023 Rp	
Premi yang belum merupakan pendapatan	154,827	58,177	*Unearned premium reserves*
Estimasi klaim	664,205	1,106,297	*Estimated claims*
	819,032	**1,164,474**	

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset retrosesi.

Management believes that there is no impairment in values of retrocession assets.

20. Biaya Akuisisi Tangguhan – Bersih / *20. Deferred Acquisition Cost – Net*

	2024			
	Biaya akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition cost* Rp	Pendapatan akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition income* Rp	Biaya/ (pendapatan) akuisisi tangguhan - bersih/ *Deferred acquisition cost/ (income) - net* Rp	
Kredit	451,159	(404,082)	47,077	*Credit*
Kesehatan	20,019	(6,377)	13,642	*Health*
Tanggung gugat	12,860	(6,756)	6,104	*Liability*
Jiwa	856	(265)	591	*Life*
Harta benda (properti)	51,662	(29,833)	21,829	*Property*
Suretyship	12,839	(15,973)	(3,134)	*Suretyship*
Energi *offshore*	2,976	(3,329)	(353)	*Energy offshore*
Rangka kapal	39,643	(28,681)	10,962	*Marine hull*
Rekayasa	25,409	(18,246)	7,163	*Engineering*
Kendaraan bermotor	18,644	(6,946)	11,698	*Vehicles*
Rangka pesawat	3,936	(3,546)	390	*Aviation*
Pengangkutan	2,750	(2,135)	615	*Marine cargo*
Energi *onshore*	20,679	(24,278)	(3,599)	*Energy onshore*
Satelit	1,540	(1,712)	(172)	*Satellites*
Kecelakaan diri	6,412	(2,524)	3,888	*Personal accident*
Aneka	81,561	(112,224)	(30,663)	*Miscellaneous*
	752,945	**(666,907)**	**86,038**	

	2023			
	Biaya akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition cost* Rp	Pendapatan akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition income* Rp	Biaya/ (pendapatan) akuisisi tangguhan - bersih/ *Deferred acquisition cost/ (income) - net* Rp	
Kredit	583,203	(571,298)	11,905	*Credit*
Kesehatan	17,361	(2,073)	15,288	*Health*
Tanggung gugat	11,339	(4,885)	6,454	*Liability*
Jiwa	14,537	(1,531)	13,006	*Life*
Harta benda (properti)	89,052	(72,885)	16,167	*Property*
Suretyship	36,090	(48,537)	(12,447)	*Suretyship*
Energi *offshore*	8,687	(29,327)	(20,640)	*Energy offshore*
Rangka kapal	32,941	(22,285)	10,656	*Marine hull*
Rekayasa	21,636	(7,475)	14,161	*Engineering*
Kendaraan bermotor	40,596	(16,423)	24,173	*Vehicles*

	2023			
	Biaya akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition cost* Rp	Pendapatan akuisisi tangguhan/ *Deferred acquisition income* Rp	Biaya/ (pendapatan) akuisisi tangguhan - bersih/ *Deferred acquisition cost/ (income) - net* Rp	
Rangka pesawat	4,568	(4,495)	73	*Aviation*
Pengangkutan	2,129	(749)	1,380	*Marine cargo*
Energi *onshore*	1,199	(2,139)	(940)	*Energy onshore*
Satelit	3,218	(8,713)	(5,495)	*Satellites*
Kecelakaan diri	4,989	(1,163)	3,826	*Personal accident*
Aneka	52,824	(29,763)	23,061	*Miscellaneous*
	924,369	**(823,741)**	**100,628**	

21. Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka / *21. Prepaid Re-Guarantee*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	128,466	180,000	*Credit*
Suretyship	647	2,482	*Suretyship*
	129,113	**182,482**	

22. Aset Lain–Lain / *22. Other Assets*

	2024 Rp	2023 Rp	
Bank yang dibatasi penggunaannya - bersih	1,676,180	1,655,125	*Restricted cash in bank - net*
Uang muka pembelian Aset Cilandak	794,800	700,000	*Advance for purchase of Cilandak asset*
Aset kontrak asuransi syariah	614,047	596,367	*Sharia insurance contract assets*
Aset takberwujud - bersih	599,258	464,310	*Intangible assets - net*
Aset kontrak penjaminan syariah	321,817	258,792	*Sharia guarantee contract assets*
Beban dibayar dimuka	155,287	144,326	*Prepaid expenses*
Uang muka lain-lain	25,930	77,472	*Other advances*
Cadangan ujrah	31,203	24,014	*Ujrah reserves*
Uang jaminan	32,786	25,342	*Security deposits*
Lainnya	327,207	340,406	*Others*
	4,578,515	**4,286,154**	

Termasuk di dalam penambahan aset takberwujud pada tahun 2024 adalah saldo aset takberwujud yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp10 (2023: Rp45), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the additions of intangible assets in 2024 is the balance of the intangible assets transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Rp10 (2023: Rp45), as described in Note 5.

Uang muka pembelian Aset Cilandak merupakan pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") untuk pembelian properti milik Jiwasraya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan.

Advance for purchase of Cilandak asset represents payment to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") for advance related to purchase of property owned by Jiwasraya that located in Cilandak, South Jakarta.

Mekanisme pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebagai berikut:
(1) Cicilan uang muka senilai Rp700.000 dibayarkan pada 31 Maret 2020.
(2) Cicilan terakhir sebagai pelunasan uang muka senilai Rp94.800 dibayarkan kepada pada 22 Maret 2024.

The payment mechanism to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is as follows:
(1) The down payment installment of Rp700,000 was paid on March 31, 2020.
(2) The final installment as down payment acquitance of Rp94,800 was paid on March 22, 2024.

23. Utang Klaim Asuransi Dan Reasuransi / *23. Insurance And Reinsurance Claim Payables*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	1,164,789	851,443	*Related parties*
Pihak ketiga	948,343	1,946,286	*Third parties*
	2,113,132	**2,797,729**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

24. Utang Klaim Penjaminan / *24. Guarantee Claim Payables*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	297,696	75,011	*Related parties*
Pihak ketiga	--	1,251	*Third parties*
	297,696	**76,262**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

25. Utang Premi Reasuransi Dan Retrosesi / *25. Reinsurance And Retrocession Premium Payables*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	189,004	435,983	*Related parties*
Pihak ketiga	1,548,005	1,453,401	*Third parties*
	1,737,009	**1,889,384**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

26. Utang Penjaminan Ulang / *26. Re-Guarantee Payables*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	3,196	1,506	*Related parties*
Pihak ketiga	83,421	22,421	*Third parties*
	86,617	**23,927**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

27. Liabilitas Kontrak Asuransi / *27. Insurance Contract Liability*

	2024 Rp	2023 Rp	
Premi yang belum merupakan pendapatan	42,941,712	44,117,442	*Unearned premium reserves*
Estimasi klaim	16,465,034	15,979,083	*Estimated claims*
	59,406,746	**60,096,525**	

a. Premi yang belum merupakan pendapatan / *a. Unearned premium reserves*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	7,232,164	7,466,502	*Credit*
Kesehatan	829,518	475,195	*health*
Tanggung gugat	2,145,023	2,185,511	*Liability*
Jiwa	29,858,695	30,760,823	*Life*
Harta benda (properti)	653,483	825,313	*Property*
Suretyship	466,367	551,184	*Suretyship*
Energi *offshore*	553,761	316,337	*Energy offshore*
Rangka kapal	251,866	243,720	*Marine Hull*
Rekayasa	200,730	185,324	*Engineering*
Kendaraan bermotor	175,112	176,448	*Vehicles*
Rangka pesawat	84,601	86,257	*Aviation*
Pengangkutan	14,061	11,384	*Marine cargo*
Energi *onshore*	28,055	25,368	*Energy onshore*
Satelit	43,590	296,513	*Satellites*
Kecelakaan diri	38,175	37,497	*Personal accident*
Aneka	366,511	474,066	*Miscellaneous*
	42,941,712	**44,117,442**	

Termasuk di dalam saldo cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan termasuk cadangan premi jangka panjang yang dihitung dengan metode valuasi premi bruto ("GPV") berdasarkan asumsi estimasi terbaik (lihat Catatan 53).

Included in the unearned premium reserves balance is the balance of long term premium reserves that are calculated with Gross Premium Valuation ("GPV") method based on the best estimation assumptions (refer to Note 53).

b. Estimasi klaim / *b. Estimated claims*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	2,987,102	3,222,503	*Credit*
Kesehatan	285,255	244,149	*Health*
Tanggung gugat	551,297	481,017	*Liability*
Jiwa	409,833	273,888	*Life*
Harta benda (properti)	1,395,078	1,666,382	*Property*
Suretyship	829,079	880,638	*Suretyship*
Energi *offshore*	2,492,610	2,825,249	*Energy offshore*
Rangka kapal	742,179	629,646	*Marine hull*
Rekayasa	639,452	571,479	*Engineering*
Kendaraan bermotor	53,301	58,707	*Vehicles*
Rangka pesawat	103,588	101,731	*Aviation*
Pengangkutan	110,724	92,588	*Marine cargo*
Energi *onshore*	18,358	6,047	*Energy onshore*
Satelit	27,116	16,658	*Satelli*
Kecelakaan diri	39,458	35,377	*Personal accident*
Aneka	5,780,604	4,873,024	*Miscellaneous*
	16,465,034	**15,979,083**	

Termasuk di dalam saldo liabilitas kontrak asuransi adalah saldo liabilitas yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang transaksinya dicatatkan sebagai liabilitas kontrak asuransi pada tanggal pengalihan sebesar Rp3.218.809 (2023: Rp4.354.139), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the insurance contract liabilities balance is the balance of liabilities transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), which transactions were recorded as insurance contract liabilities on the date of transfer amounting to Rp3,218,809 (2023: Rp4,354,139), as described in Note 5.

28. Liabilitas Kepada Pemegang *Unit Link* / *28. Liabilities To Unit-Linked Holders*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	189,144	187,344	*Beginning balance*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas kepada pemegang unit link	(17,292)	1,800	*Increase/(decrease) in liabilities to unit-linked holders*
Saldo akhir	**171,852**	**189,144**	***Ending balance***

29. Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan / *29. Liabilities For Financial Guarantee Contracts*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan penjaminan kredit diterima dimuka	8,930,755	8,780,719	*Deferred credit guarantee income*
Estimasi klaim	6,008,992	6,430,747	*Estimated claims*
	14,939,747	**15,211,466**	

a. Pendapatan penjaminan kredit diterima dimuka / *a. Deferred credit guarantee income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	8,897,314	8,723,070	*Credit*
Suretyship	33,441	57,649	*Suretyship*
	8,930,755	**8,780,719**	

b. Estimasi klaim / *b. Estimated claims*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	6,005,089	6,467,839	*Credit*
Suretyship	3,903	(37,092)	*Suretyship*
	6,008,992	**6,430,747**	

30. Pinjaman Dari Pemerintah / *30. Government Loans*

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang rekening dana investasi	931,900	936,900	*Investment fund account loan*
Utang penerusan pinjaman	38,188	39,388	*Loan proceeds payable*
	970,088	976,288	
Biaya yang belum diamortisasi	(448,130)	(483,160)	*Unamortized cost*
	521,958	**493,128**	

Tabel berikut ini merupakan penyajian atas rekonsiliasi saldo pinjaman dari Pemerintah pada tangal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table is a presentation of the reconciliation of government loan balances as of December 31, 2024 and 2023:

	2024 Rp	2023 Rp	
Rekonsiliasi saldo pinjaman dari Pemerintah adalah sebagai berikut:			*The reconciliation of Government loans balance is as follows:*
Saldo awal	493,128	466,306	*Beginning balance*
Amortisasi	35,030	33,022	*Amortisation*
Pembayaran	(6,200)	(6,200)	*Payment*
Saldo akhir	**521,958**	**493,128**	***Ending balance***

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

a. Utang rekening dana investasi ("RDI")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan dengan No. RDI/327/DP3/1997 untuk pinjaman subordinasi RDI tanggal 16 Desember 1997 disepakati bahwa Perseroan mendapat pinjaman subordinasi dalam rangka stabilisasi pasar modal dan pasar uang sejumlah maksimum Rp250.000. Atas pinjaman ini dikenakan beban administrasi sebesar 20% per tahun, beban komitmen sebesar 0,25%, denda pokok 4% per tahun dari yang tertunggak, dan denda biaya administrasi sebesar 24% per tahun dari yang tertunggak. Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Pada saat jatuh tempo Perseroan gagal melunasi pinjaman RDI tersebut.

Perseroan mengajukan gugatan hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 6 September 2005 kepada Saudara Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama Perseroan pada saat itu dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman RDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp250.000. Pada tanggal 18 Oktober 2005, Majelis Hakim memberikan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh provisi Perseroan; dan
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman No. RDI/327/DP3/1997 tertanggal 16 Desember 1997 antara Perseroan yang diwakili oleh Saudara Sudjiono Timan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dana sebesar Rp250.000 untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai adanya

a. Investment fund account payable ("RDI")

Based on Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company, in relation to a subordinated loan RDI dated December 16, 1997, it has been agreed that the Company will obtain a subordinated loan in relation with the stabilization of the capital and money markets for a maximum amount of Rp250,000. This loan is charged with administration fee of 20% per annum, commitment fee of 0.25%, principal penalty of 4% per annum from the outstanding balance, and penalty on the administration fee of 24% per annum from the outstanding balance. The loan period is 3 (three) years from the signing date of the loan agreement. At due date the Company defaulted on the RDI loan.

The Company filed a civil case in South Jakarta State Court with register No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel dated September 6, 2005 against Mr. Sudjiono Timan, the former President Director of the Company and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as the Defendant and Auxiliary Defendant, respectively, in relation with the fund utilization of the RDI loan with principal amount of Rp250,000. On October 18, 2005, the Court of Justice made decision provision as follows:

1. *Accept and grant all the Company's provision; and*
2. *Announce that the Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 dated December 16, 1997 between the Company as represented by Mr. Sudjiono Timan and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia for the fund amounting to Rp250,000 in the time being could not be*

putusan yang berkekuatan hukum atas perkara ini.

Pada 17 Februari 2006, Perseroan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Pencabutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Februari 2006.

Pada tahun 2007, Perseroan mengajukan restrukturisasi utang ini. Pada tanggal 14 Mei 2007, Perseroan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi No. 38/PB.4.13/PTBPUI/0507, terkait restrukturisasi pinjaman RDI. Sejak 31 Desember 2006, selama proses restrukturisasi berlangsung, Perseroan tidak dikenakan bunga pinjaman.

Pada tanggal 2 Februari 2012, Perseroan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa objek hasil rampasan aset Sudjiono Timan telah dilaksanakan lelang dengan nilai sebesar Rp55.717. Perseroan juga mengajukan revisi permohonan restrukturisasi RDI dengan skema sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara ("PMN") atas utang pokok RDI senilai Rp250.000; dan
2. Penjadwalan kembali utang bunga RDI sebesar Rp950.652, dilakukan cicilan sampai dengan tahun 2026.

Pada tanggal 5 November 2012, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyetujui permohonan restrukturisasi RDI yang diajukan Perseroan dan kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) atas Perjanjian RDI pada tanggal 28 Desember 2012. Namun demikian, pelaksanaan restrukturisasi masih menunggu adanya Peraturan Pemerintah mengingat pola restrukturisasi utang RDI adalah melalui PMN.

Pada tanggal 21 Januari 2013, Menteri BUMN melalui surat No. S-28/MBU/2013 meminta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar dapat dialokasikan sebesar Rp250.000 sebagai tambahan PMN di Perseroan.

Berdasarkan Surat Tagihan No. S-7142/PB/2014 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

executed until there is a binding legal decision on this case.

On 17 February 2006, the Company filed a letter for revocation of the case No. 889/Pdt.G/2005 PN.Jak.Sel. The South Jakarta State Court accepted the revocation on February 21, 2006.

In 2007, the Company requested restructuring for this loan. On May 14, 2007, the Company and the Department of Finance of the Republic of Indonesia, signed the Official Report of Reconciliation No. 38/PB.4.13/PTBPUI/0507, regarding to the RDI loan restructurisation. Started from December 31, 2006, during the restructuring process, the Company has not been charged of any interest loan.

On February 2, 2012, the Company sent a letter to the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia stating that the assets confiscated from Sudjiono Timan has been auctioned of in the amount of Rp55,717. The Company also proposed a revision on request for RDI restructuring with the following scheme:

1. *State Capital Investment ("PMN") on RDI principal amounting to Rp250,000; and*
2. *Rescheduling of RDI interest payable amounting to Rp950,652, to be installed until year 2026.*

On November 5, 2012, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia has approved the Company proposed restructuring of the RDI and both parties have signed an Amendment on the RDI Agreement on December 28, 2012. However, the implementation of the restructuring is still waiting for Government Regulation considering debt restructuring scheme of RDI is through the PMN.

On January 21, 2013, the Minister of SOE through letter No. S-28/MBU/2013 has asked the Minister of Finance c.q. Directorate General of Treasury to allocate the outstanding principal of Rp250,000 as additional PMN to the Company.

Based on the Collection Letter No. S-7142 /PB/2014 issued on October 28, 2014, by the Directorate General of Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia has asked the

meminta Perseroan untuk melakukan pembayaran tunggakan bunga dan denda sebesar Rp30.000 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 16 Desember 2014.

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan menyampaikan pandangan terkait Surat Tagihan No. S-7142/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bahwa Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas kewajiban RDI tahun 2012, 2013, 2014 sampai dengan 2018 dengan mempertimbangkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan No.S-92/MK.6/2010 tanggal 13 April 2010;
- Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No.434K/3 Desember 2004 berupa uang tunai sebesar Rp55.717;
- Surat direksi BPUI No.013/HS/BPUI/II/2012 tanggal 2 Februari 2012;
- Surat No. S-352/PB.4/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang menyatakan perhitungan pembayaran utang belum dapat dilakukan atau belum mengurangi saldo utang BPUI;
- Persetujuan Menteri Keuangan atas proses restrukturisasi berdasarkan surat No.S-792/MK.05/2012 tanggal 5 November 2012 dimana kewajiban pokok sebesar Rp250.000 akan dijadikan PMN dan kewajiban lainnya sebesar Rp950.652 akan diangsur selama 20 tahun (2007 sampai dengan 2026) termasuk masa tenggang 5 tahun (2007 sampai dengan 2011).

Pada tanggal 3 Desember 2014, Perseroan menyampaikan surat No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi RI tentang penyelesaian kewajiban tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan total sebesar Rp55.717 selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017, dengan cara melakukan penjualan aset seluas 2.008 m2 yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2015, menyampaikan perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 yang di antaranya mengalokasikan pembiayaan anggaran dana investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada beberapa BUMN termasuk BPUI yaitu

Company to make payments on outstanding interest and penalties amounting to Rp30,000 which should be due on December 16, 2014.

On October 30, 2014, the Company has expressed their view to the related Collection Letter No. S-7142/ PB/2014 dated October 28, 2014 noting that the Company has no obligation to make payments on the outstanding RDI loan in 2012, 2013, 2014 through to 2018 with consideration to several documents as follows:

- *Letter of the Minister of Finance No. S-92 /MK.6/2010 dated April 13, 2010;*
- *Implementation of the Supreme Court ruling No. 434K/December 3, 2004 in the form of cash of Rp55,717;*
- *Letter of directors BPUI No. 013/HS/BPUI/II/2012 dated February 2, 2012;*
- *Letter No. S-352/PB.4/2012 dated February 29, 2012, which states the calculation of debt payments can not be done yet or not reducing debt balances of BPUI yet;*
- *Approval of the Minister of Finance on the restructuring process by letter No. S-792/MK.05/2012 dated November 5, 2012 in which the principal obligation of Rp250,000 will be converted as PMN and other liabilities amounting to Rp950,652 which will be installed for 20 years (2007 until 2026) including a grace period of 5 years (2007 until 2011).*

On December 3, 2014, the Company submit a letter No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 to Director of Investment Management System RI regarding the repayment period of liabilities within 2012 to 2017 amounting to Rp55,717 at the latest by the end of 2017, by selling the asset of 2,008 m2, which is located on Jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.

Furthermore, the Government through Act No.3 Year 2015 has submitted amendments to the Act No.27 Year 2014 regarding Funding Under State Budget year 2015 which among others allocate the budget for Government Investment in the form of PMN to SOEs including BPUI which approved the capital increase amounting to Rp250,000.

menyetujui adanya penambahan modal sebesar Rp250.000. Kemudian melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-924/ MK.06/ 2015 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 November 2015 dengan mengacu kepada Undang-Undang No.3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN, Presiden diminta untuk memberikan persetujuan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah.

Later, through the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-924/MK.06/2015 addressed to the President of the Republic of Indonesia on November 20, 2015, by referring to Act No.3 Year 2015 regarding the State Capital investment to several SOEs, the President was asked to approve the draft of Government Regulation.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 133 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dengan nilai penambahan sebesar Rp250.000 yang berasal dari konversi pokok pinjaman rekening dana investasi, Perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses restrukturisasi utang RDI tersebut.

Based on the Government Regulation No. 133 Year 2015, dated December 28, 2015, regarding the Addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), amounting to Rp250,000 which were converted from investment fund account loan, the Company has already received approval from Government of the Republic of Indonesia regarding the restructuring process of the RDI payable.

Utang bunga rekening dana investasi ("RDI")
Utang bunga RDI merupakan utang Perseroan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungannya dengan utang subordinasi dan saldonya terdiri dari denda utang pokok dan beban administrasi akibat Perseroan lalai untuk melunasi pinjaman RDI ini pada saat jatuh tempo.

Investment fund account ("RDI") interest Payable
The interest payable on RDI is the Company's debt payable to the Government of the Republic of Indonesia in relation to the subordinated loans and the balance consists of principal penalties and administration fees charged to the Company for its failure to repay the related loans on the due date.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas piutang bunga RDI No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perubahan No. AMA-206/RDI-327/DSMI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan perjanjian perubahan tersebut, kewajiban non pokok pinjaman Perseroan sebesar Rp941.900 dijadwalkan kembali dengan jangka waktu yang akan pelunasan selama 20 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun (tahun 2021-2022).

Based on the Decree of the Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure the interest receivables from RDI No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 which was then stated in the Amendment Agreement No. AMA-206/RDI-327/DSMI/2022 dated June 30, 2022. Based on the amendment agreement, the Company's non-principal loan obligations of Rp941,900 are rescheduled with a repayment period of 20 years including a grace period of 2 years (2021-2022).

b. Utang penerusan pinjaman
Utang tersebut berupa pinjaman yang berasal dari dana *Export-Import* Bank of Japan ("JEXIM") (kini operasinya diambil alih oleh Japan Bank for International Cooperation) melalui Pemerintah Republik Indonesia dengan pagu kredit sebesar JPY21.000.000.000 (nilai

b. Loan proceeds payable
The loan was obtained from Export-Import Bank of Japan ("JEXIM") (now its operations is taken over by Japan Bank for International Cooperation) through the Government of the Republic of Indonesia that involves a loan facility amounting to JPY21,000,000,000 (full

penuh) yang hasilnya kemudian diteruskan oleh Perseroan kepada BAV. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,50% per tahun. Jatuh tempo pembayaran pertama cicilan pokok adalah pada bulan Februari 2000 sebesar 1/22 dari jumlah terutang pada tanggal 31 Desember 1999. Jatuh tempo pembayaran terakhir adalah tanggal 15 Juli 2010.

amount) of which proceeds were channeled by the Company to BAV. The loan proceeds payable is subjected to interest rate at 6.50% per annum. The first installment of this subordinated loan was due in February 2000 amounted to 1/22 of the outstanding loan as of December 31, 1999. The final repayment date was due on 15 July 15, 2010.

Utang ini disajikan sebagai utang penerusan pinjaman sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. S-1158/KMK.17/1997, tanggal 15 Desember 1997.

This loan is presented as a subsidiary loan in accordance with a letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia c.q. Directorate General of Financial Institutions No. S-1158/KMK.17/1997 dated December 15, 1997.

Pada tanggal 15 Februari 2007, BAV telah membayar bunga terutang atas pinjaman dana JEXIM setelah restrukturisasi sebesar Rp3.904 kepada PT Bank DKI.

On February 15, 2007, BAV has paid the interest payable of JEXIM loan after the restructuring amounting to Rp3,904 to PT Bank DKI.

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun yang wajib dibayar setiap enam bulan dengan beban komitmen atas pagu kredit yang belum dicairkan sebesar 0,15% per tahun. Pokok pinjaman wajib dibayar setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahun. Pembayaran pertama dilakukan pada 15 Februari 2009. Jatuh tempo pembayaran kembali adalah pada tanggal 15 Agustus 2021.

On June 13, 2008, the Company and the Government of the Republic of Indonesia entered into a Loan Renewal and Amendment Agreement Deed No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008. The loan is subjected to interest rate at 5.50% per annum, which is required to be paid semi annually with commitment fees over the unused facility of 0.15% per annum. The loan principal has to be paid on February 15th and August 15th every year. The first installment was on February 15, 2009. The due date for the repayment was on August 15, 2021.

Pada tahun 2014, BAV telah membayar pinjamannya sebesar Rp17.868.

In 2014, BAV has paid the loan amounting to Rp17,868.

Pada tanggal 17 Februari 2014, Perseroan telah mengajukan permohonan penjadwalan kembali pinjaman ini kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Permohonan penjadwalan ulang ini kemudian diajukan kembali oleh pihak manajemen Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2014. Selain mengajukan permohonan restrukturisasi, manajemen juga mengajukan permohonan agar dapat dilakukan penghentian perhitungan kewajiban pokok dan kewajiban bunga atau denda pada tanggal *cut off date* yang disepakati bersama.

On February 17, 2014, the Company has applied for loan rescheduling to the Director General of Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia. The rescheduling petition was then resubmitted by the Company's management on August 19, 2014. In addition to applying for restructuring, management also filed a petition to freeze the principal obligation and interest or penalties calculation based on the mutually agreed cutoff date that.

Melalui Surat Perusahaan No. 014/DSW/BPUI/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian

Through the Company's Letter No. 014/DSW/BPUI/III/2015 dated March 10, 2015, which addressed to the Director of Investment Management System of Directorate General of

Keuangan Republik Indonesia mengenai permohonan penjadwalan kembali (restrukturisasi kedua) pinjaman dengan SLA-919/DP3/1996, Perseroan mengajukan skema sebagai berikut:

i. Penjadwalan kembali jangka waktu perjanjian pinjaman selama 20 tahun terhitung sejak posisi *cut-off* 31 Desember 2013, sehingga akan jatuh tempo pada tahun 2033;
ii. *Grace* period atas pokok pinjaman selama 10 tahun sehingga pembayaran pokok dimulai pada Februari 2024 sampai dengan Agustus 2033;
iii. Perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 5,50% per tahun menjadi 1,00% per tahun.

atau berupa konversi utang menjadi PMN dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku kreditur.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses restrukturisasi utang penerusan pinjaman tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan nilai penambahan sebesar Rp268.017 yang berasal dari konversi *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) pada Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas utang penerusan pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 yang kemudian dituangkan dalam. Perjanjian Perubahan No. AMA-207/SLA-919/DSMI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan perjanjian perubahan tersebut, kewajiban non pokok atas pinjaman Perseroan sebesar Rp40.588 dijadwalkan kembali dengan jangka waktu pelunasan selama 20 tahun, termasuk masa tenggang selama 2 tahun (tahun 2021-2022).

Sesuai dengan PSAK 109 "Instrumen keuangan", skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms,* sehingga Grup mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

Treasury Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the request for rescheduling (second rescheduling) loan with SLA-919/DP3/1996, the Company proposed the following scheme:

i. Rescheduling term of the loan agreement for 20 years, starting from the position of the cut-off December 31, 2013, which will mature in 2033;

ii. Grace period on principal for 10 years, therefore the principal repayment will begin in February 2024 until August 2033;

iii. Changes in interest rate which originally at 5.50% per annum to 1.00% per annum.

or in the form of debt conversion into PMN and/or other schemes established by the Ministry of Finance as the creditor.

The Company has obtained approval from the Government of the Republic of Indonesia regarding the process of debt restructuring based on Government Regulation Republic Indonesia No. 67/2020 dated November 20, 2020 regarding the addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, amounting to Rp268,017 originated from the conversion of the Company's Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Based on the Decree of the Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure the two-step loan ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 which was then stated in the Amendment Agreement No. AMA-207/SLA-919/DSMI/2022 dated June 30, 2022. Based on the amendment agreement, the non-principal obligation for the Company's loan of Rp40,588 was rescheduled with a repayment period of 20 years, including a grace period of 2 years (2021-2022).

In accordance with SFAS 109 "Financial instruments", this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, the Group recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini sebesar Rp547.157 dicatat sebagai biaya yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor (Catatan 37), serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme amounting to Rp547,157, was recorded as an unamortised cost of debt and additional paid-in capital (Note 37) and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

31. Utang Bank / *31. Bank Loans*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	2,066,555	3,275,237	*Related parties*
Pihak ketiga	296,537	280,122	*Third parties*
	2,363,092	**3,555,359**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

Informasi yang signifikan terkait dengan utang bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Significant information related to bank loans as of December 31, 2024, is as follows:

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)						
Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk / *Syndicated Credit Agreement between* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Fasilitas Tranche B / *Tranche B Facility*	1,455,977 (Fasilitas I/ *Facillity I*)	1,183,564	Maksimal sampai dengan Desember 2026/ *maximum up to December 2026*	*Margin (1.25%)* + *JIBOR*	Akta Jaminan Gadai Rekening Penampungan dan Akta Jaminan Gadai Operasional/ *Pledge Collateral Deed for Escrow Account and Operational Pledge Collateral Deed*
	Fasilitas Tranche A/ *Tranche A Facility*	6,700,000 (Fasilitas I/ *Facillity I*)	1,060,036	Maksimal sampai dengan Desember 2026/ *maximum up to December 2026*	*Margin (1.25%)* + *JIBOR*	Akta Jaminan Gadai Rekening Penampungan dan Akta Jaminan Gadai Operasional/ *Pledge Collateral Deed for Escrow Account and Operational Pledge Collateral Deed*

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Bahana Artha Ventura						
PT Bank Rakyat Indonesia Bridaya	Program Pendanaan UMK/ *SME Funding Program*	5,000	1,000	12 bulan/months *months* Juli/*July* 2024 - Agustus/*August* 2025	0.00%	Tidak ada jaminan/ *no guarantee*
PT Bank Ina Perdana Tbk	Kredit tetap/ *Fixed loan*	50,000	59,632	36 bulan/*months* sejak pencairan kredit selesai pada Desember 2027/ *since the disbursement of the loan is completed in December 2027*	9.50%	Fidusia piutang lancar 125%/*Fiducia 125% of performing from plafond* (Catatan 8/*Note 8*)
PT Sarana NTB Ventura						
PT Bank Central Asia Tbk	*Time Loan Revolving*	6,000	6,159	12 bulan/ *months* 17 Juli/*July* 2024 - 20 Juli/ *July 2025*	10.75%	Bangunan kantor/ *Office building* (Catatan 16/*Note 16*)
	Kredit Lokal (Rekening Koran)/ *Local Credit (Current Account)*	2,500		12 bulan/ *months* 17 Juli/*July* 2024 - 20 Juli/ *July 2025*	8.25%	Bangunan kantor/ *Office building* (Catatan 16/*Note 16*)
PT Sarana Kalsel Ventura						
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Kredit modal kerja/*Revolving credit* - Pinjaman rekening koran/*Overdraft loan*	2,400 (Fasilitas I/ *Facillity I*)	16,433	56 bulan/ *months* Februari/ *February* 2021 - Oktober/ *October* 2025	13.00%	a. Agunan Pokok Berupa hak tagih dari seluruh pembiayaan investasi bagi hasil pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sumber dana pembiayaan berasal dari Bank Kalsel (diluar fasilitas kredit existing dari perbankan dan Lembaga Keuangan yang ada tercatat pada neraca) dengan kolektabilits lancar dengan nilai tagih minimal outstanding kredit yang diberikan oleh Bank Kalsel/ a *Principal Collateral In the form of rights to collect all profi-sharing investment financing for Partners (PPU) whose sources of financing funds come from Bank Kalsel (excluding existing credit facilities from the banks and financial instutions that are listed on the balance sheet) with current collectibility and a minimum outstanding credit value that are provided by Bank Kalsel* (Catatan *51*/ *Notes 51*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
	Kredit modal kerja/*Revolving credit* - Pinjaman rekening koran/*Overdraft loan*	20,000 (Fasilitas II/ *Facillity II*)		56 bulan/ *months* Februari/ *February* 2021 - Oktober/ *October* 2025	12.00%	b. Agunan Tambahan Berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya (kantor operasional perusahaan) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 13 tanggal 14 September 1992 (berakhir haknya tanggal 9 Oktober 2021) saat ini tercatat atas nama Perseroan Terbatas Sarana Kalsel Ventura berkedudukan di Jalan Pramuka No. 4 RT. 07 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *b. Additional Collateral* *In the form of 1 (one) plot of land and building on it (company operational office) in accordance with the Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 13 dated 14 September 1992 (rights ended on 9 October 2021) currently registered in the name of the PT. Sarana Kalsel Ventura who is based in Banjarmasin which is located at Jalan Pramuka No. 04 RT. 07 Pemurus Outer Village, East Banjarmasin District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province* (Catatan 16/*Note 16*)
PT Sarana Sulsel Ventura						
PT Bank Sulselbar	Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Produktif dan UMKM kepada Calon Pasangan Usaha (CPU)/Pasangan Usaha (PU)/*Disbursement of Financing for Productive Business and SMEs to Prospective Business Partner (CPU)/Business Partner (PU)*	10,000	8,012	36 bulan/ *months* 30 Oktober/ *October* 2023 - 30 Oktober/ *October* 2026	10.00%	a. Fidusia atas piutang dengan kondisi lancar/ *Fiduciary over receivables in good standing* b. SHGB Nomor 20646 atas sebidang tanah seluas 103 m2 yang tertulis atas nama PT Sarana Sulsel Ventura/ *SHGB Number 20646 for a plot of land measuring 103 m2 registered under the name of PT Sarana Sulsel Ventura* (Catatan 8 dan 16/*Notes 8 and16*)
PT Sarana Surakarta Ventura						
PT Bank Ina Perdana Tbk	Kredit tetap/ *Fixed loan*	50,000	875	36 bulan/ *months* sejak pencairan kredit selesai pada Desember 2027/ *since the disbursement of the loan is completed in December 2027*	10.00%	Fidusia piutang lancar 125%/*Fiducia 125% of performing from plafond* (Catatan 8/*Note 8*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Sarana Kalteng Ventura						
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	13,500	14,464	36 bulan/ *months* 31 Juli/*July* 2023 - 31 Juli/ *July* *2026*	10.00%	1. Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4047 an PT Sarana Kalteng Ventura/ *Land and Buildings: Right to Build Certificate (Hak Guna Bangunan - HGB) No. 4047 in the name of PT Sarana Kalteng Ventura* 2. Hak tagih atas piutang usaha : Berupa piutang pembiayaan perusahaan Pasangan Usaha PPU atau Pasangan Usaha/ *Right to claim on business receivables: In the form of company financing receivableson Business Partner PPU or Business Partner*
	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	40		36 bulan/ *months* 17 Januari/ *January* 2023 - 17 Januari/ *January* 2026	10.00%	Agunan pokok/ *Principal Collateral:* Piutang hasil usaha tambahan modal kerja di bidang Usaha Modal Ventura/ *Receivables from additional working capital for the Venture Capital* Agunan tambahan/ *Additional Collateral*
	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	16,000		36 bulan/ *months* 10 September/ *September* 2024 - 10 September/ *September* 2027	10.00%	Piutang pemberian kredit PT Sarana Kalteng Ventura/ *Receivables from credit provided to PT Sarana Kalteng Ventura* (Catatan 8 dan 16/*Notes 8 and 16*)
PT Sarana Kalbar Ventura						
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas kredit investasi/*Investment credit facility* Fasilitas kredit lokal (rekening koran)/*Local credit facility (current account)*	1,900	1,766	60 bulan/ *months* 19 Desember/ *December* 2023 - 19 Desember/ *December* 2028 (Kredit Investasi), 19 Desember/ *December* 2023 - 19 Desember/ *December* 2024 (Kredit Lokal)	7.23%	Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2027/Parit Tokaya/ *Land with Building Hak Guna Bangunan Number 2027/Parit Tokaya* (Catatan 8/*Note 8*)
PT Sarana Sumbar Ventura						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*Refinancing*	2,000	917	24 bulan/ *months* 22 November/ *November* 2023 - 22 November/ *November* 2025	9.50%	Tanah SHGB No. 179 dan Bangunan IMB No. 0224/P-01/IMB/KS/LT.3/PU.07/2012 atau IMB No. 0224/IMB/KS/LT. 3/PU. 07/2011/ Land with leasehold title *(SHGB) No. 179 and Building with Building Permit (IMB) No. 0224/P-01/IMB/KS/LT.3/PU.07/2012 or IMB No. 0224/IMB/KS/LT.3/PU.07/2011* (Catatan 8/*Note 8*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Sarana Kaltim Ventura						
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Mudharabah Muqayyadah	1,000	1,000	12 bulan/ *months* 28 November/ *November* 2024 - 28 November/ *November* 2025	90.48% Bank/*Bank* 9.25% Nasabah/ *Customer*	Dana Tabungan pada Bank BTNS/ *Savings Fund at BTNS Bank* (Catatan 51/*Note 51*)
PT Bank KB Bukopin Syariah	Musyarakah/ Musyarakah *Financing*	1,500	1,500	12 bulan/ *months* 24 November/ *November* 2024 - 28 November/ *November* 2025	99.83% dari pendapatan untuk nasabah/ *of the income for the customer* 0.17% dari pendapatan untuk Bank/ *of the income for the Bank*	1. Mengembalikan seluruh jumlah dana/modal yang disediakan oleh bank berikut bagian keuntungan yang menjadi pendapatan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada repayment schedule yang dilekatkan pada dan karenanya yang menyangkut nasabah maupun usahanya/*To return the entire amount of funds/capital provided by the bank, along with the proportion of the profit that constitutes the bank's income, in accordance with the ratio at the time of maturity as stipulated in the repayment schedule attached, and consequently affecting both the customer and their business.* 2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah di bank/*To make payments for all third-party bills through the customer's account at the bank.* 3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban pinjaman terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad/ *To release all the customer's assets from any loan obligation to other parties, except for guarantees in favor of the bank based on agreement.*

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
						4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas seluruh data/modal secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri/ *To manage and maintain the books of all data/capital honestly and correctly with good faith in separate accounting records.* 5. Menyerahkan kepada bank perhitungan usaha yang difasilitasi pembiayaan musyarakahnya/ *To submit to the bank the business calculations facilitated by its musyarakah financing.* 6. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidak-tidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seusai dengan persetujuan bank/ *To run the business in accordance with the provisions or, at the very last, not deviating or contradicting the principles of sharia as per bank's agreement.*
PT Bank Rakyat Indonesia	KMK Maks Co Tetap	6,500,000 (Fasilitas I/ *Facillity I*) 3,500,000 (Fasilitas II/ *Facillity II*)	--	12 bulan/ *months* 17 Juli/ *July* 2023 - 17 Juli/ *July* 2024	8.00%	Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 288 an PT Sarana Jateng Ventura diikat HT I 2595/2012/ *Land and buildings on SHGB No. 288 of PT Sarana Jateng Ventura are bound by Land Certificate I 2595/2012* (Catatan 16/*Note 16*)
PT Sarana Yogya Ventura						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KMK untuk Jasa Dunia Usaha & Jasa Sosial/ *Working Capital Loan for Business and Social Service*	3,735	3,735	12 bulan/ *months* 31 October/ *October* 2024 - 31 October/ *October* 2025	4.05%	Deposito BRI atas nama Sarana Yogya Ventura dengan total nominal 3.735.000.000/ *BRI deposits under the name Sarana Yogya Ventura with a total nominal amount Rp3,735,000,000* (Catatan 51/*Note 51*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	Non UMKM/ Rekening Koran/ Komersial/ *Non UMKM/ Current Account/ Commercial*	14,000	3,999	24 bulan/ *months* 20 Maret/ *March* 2024 - 20 Maret/ *March* 2026	10.00%	Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00192/ Kotabaru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-08-1997 segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut tanpa kecuali sedikitpun juga/ *A plot of yard land with Building Use Rights Certificate Number 00192/ Kotabaru, as described in the Measurement Letter dated 28-08-1997, including everything planted and built on the land without any exceptions.* (Catatan 16/*Note 16*)

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Grup.

All borrowings are intended to finance the working capital of the Group.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman bank.

At each reporting date, the Group has complied with all covenants of its bank loans.

32. *Medium Term Notes* (MTN) / 32. *Medium Term Notes (MTN)*

	2024 Rp	2023 Rp	
MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022	1,100,000	1,050,000	*MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) year 2022*
MTN Lainnya	16,162	15,416	*Other MTN*
	1,116,162	**1,065,416**	

Rekonsiliasi atas penempatan MTN adalah sebagai berikut:

The reconciliation of MTN placement is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	1,065,416	1,065,731	*Beginning balance*
Pelepasan ke pihak ketiga	50,000	--	*Dispose to third party*
Dampak perubahan nilai tukar mata uang asing	746	(315)	*Effect of changes in foreign exchanges rate*
Saldo akhir	**1,116,162**	**1,065,416**	***Ending balance***

***Medium Term Notes* I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022**

Pada tanggal 26 Oktober 2022, dalam rangka pelunasan fasilitas *bridging loan* berdasarkan Akta Perjanjian Sindikasi No. 8 tanggal 20 Desember 2021, Grup menerbitkan *Medium Term Notes* yang diberi nama *Medium Term Notes* I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022 ("MTN") dengan pokok sebesar Rp2.000.000 dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penerbitan dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Bunga MTN akan

Medium Term Notes I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) year 2022

On October 26, 2022, to repay the bridging loan facility based on Syndicated Notarial Deed Agreement No. 8 dated on December 20, 2021, the Group issued Medium Term Notes named Medium Term Notes I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) year 2022 ("MTN") with principal amount of Rp2,000,000, with a period of five years starting from the date of issuance and with a fixed interest rate of 9% per annum. The MTN interest will be paid by the Company

dibayarkan oleh Perseroan setiap tiga bulan. Pokok MTN wajib dilunasi Perseroan pada tanggal 2 November 2027. Perseroan menerima pencairan atas penerbitan MTN pada tanggal 2 November 2022.

every three months. The MTN principal must be repaid by the Company on November 2, 2027. The Company received proceeds from the issuance of the MTN on November 2, 2022.

Per 31 Desember 2023, MTN sebesar Rp950.000 dimiliki oleh beberapa entitas anak yang dikonsolidasi.

As of December 31, 2023, MTN amounting to Rp950,000 is owned by several consolidated subsidiaries.

Di tahun 2024, MTN yang dimiliki oleh Nasre sebesar Rp50.000 dilepas kepada pihak ketiga.

In 2024, MTN owned by Nasre amounted to Rp50,000 have been disposed to a third party.

33. Utang Usaha dan Liabilitas Lain-Lain / *33. Accounts Payable and Other Liabilities*

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang usaha	844,418	434,897	*Accounts payable*
Liabilitas lain-lain	7,342,121	7,088,810	*Other liabilities*
	8,186,539	**7,523,707**	

a. Utang usaha / *a. Accounts payable*

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang nasabah	528,717	118,056	*Customers payables*
Utang komisi	238,664	249,496	*Commissions payables*
Utang premi syariah - asuransi	30,289	34,881	*Sharia premium payables - insurance*
Utang premi penjaminan ulang syariah	16,916	7,357	*Sharia re-guarantee premium payables*
Utang klaim syariah - penjaminan	125	5,110	*Sharia claim payables - guarantee*
Utang klaim syariah - asuransi	1,530	1,552	*Sharia claim payables - insurance*
Utang lembaga kliring dan penjaminan	--	8,113	*Clearing and guarantee institutions payables*
Lainnya	28,177	10,332	*Others*
	844,418	**434,897**	

b. Liabilitas lain-lain / *b. Other liabilities*

	2024 Rp	2023 Rp	
Liabilitas kontrak asuransi syariah	1,782,075	1,407,317	*Sharia insurance contract liabilities*
Uang jaminan	1,091,806	1,369,911	*Cash collateral*
Liabilitas kontrak penjaminan syariah	1,042,293	1,044,643	*Sharia guarantee contract liabilities*
Titipan premi dan imbal jasa penjaminan	733,338	674,264	*Premium and guarantee fee income deposits*
Pinjaman non-bank	268,493	608,949	*Non-bank loans*
Cadangan ujrah	213,637	314,485	*Ujrah reserves*
Liabilitas sewa	179,315	205,452	*Lease liabilities*
Utang bunga	26,518	26,937	*Interest payables*
Utang promes	16,676	15,906	*Promissory notes*
Utang zakat	9,995	12,240	*Zakat payables*
Lainnya	1,977,975	1,408,706	*Others*
	7,342,121	**7,088,810**	

Termasuk di dalam utang usaha dan liabilitas lain-lain sebesar Rp112 (2023: RpNihil) adalah saldo utang usaha dan liabilitas lain-lain yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the accounts payable and other liabilities amounting to Rp112 (2023: RpNil) is the balance of the accounts payable and other liabilities transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

34. Akrual / *34. Accruals*

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban karyawan	754,381	778,390	*Employee expenses*
Beban umum dan administrasi	219,127	257,229	*General and administrative expenses*
Beban pemasaran	160,548	39,269	*Marketing expenses*
Beban penelitian dan pengembangan	62,220	72,521	*Research and development expenses*
Beban kantor	51,253	122,811	*Office expenses*
Imbal jasa profesional	48,626	105,316	*Professional fees*
Beban operasional	41,568	67,482	*Operating expenses*
Lainnya	410,170	444,057	*Others*
	1,747,893	**1,887,075**	

35. Utang Restrukturisasi / *35. Restructuring Debt*

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang restrukturisasi klaim	652,677	680,456	*Claims restructuring payable*
Utang restrukturisasi komisi	29,579	30,868	*Commissions restructuring payable*
	682,256	**711,324**	

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan atas utang restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation from financing activities of restructuring debt are as follows:

	2024			
	Utang klaim/ *claim payable* Rp	Utang komisi/ *commissions payables* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Saldo awal	680,457	30,867	711,324	*Beginning balance*
Penambahan	22,510	--	22,510	*Addition*
Penyesuaian	(18,566)	--	(18,566)	*Adjustment*
Pembayaran	(82,713)	(3,634)	(86,347)	*Payment*
Amortisasi	50,990	2,345	53,335	*Amortisation*
Saldo akhir	**652,678**	**29,578**	**682,256**	***Ending balance***

	2023			
	Utang klaim/ *claim payable* Rp	Utang komisi/ *commissions payables* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Saldo awal	601,056	32,073	633,129	*Beginning balance*
Penambahan	118,084	--	118,084	*Addition*
Penyesuaian	(13,181)	--	(13,181)	*Adjustment*
Pembayaran	(74,646)	(3,641)	(78,287)	*Payment*
Amortisasi	49,143	2,436	51,579	*Amortisation*
Saldo akhir	**680,456**	**30,868**	**711,324**	***Ending balance***

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 51 for the details of related parties balances and transactions.

Entitas anak, PT Asuransi Jasa Indonesia (”Jasindo”), telah bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) sejak tahun 2017, di mana Bank Mandiri merupakan salah satu mitra terbesar untuk penutupan asuransi kredit. Sampai dengan saat ini, terdapat kewajiban Jasindo atas klaim dan komisi kepada Bank Mandiri. Sebagai salah satu upaya perbaikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada periode mendatang, Jasindo melakukan restrukturisasi kewajiban klaim dan komisi dengan Bank Mandiri.

The subsidiary, PT Asuransi Jasa Indonesia (”Jasindo”), has been cooperating with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) since 2017, whereas Bank Mandiri is one of the largest partners for credit insurance coverage. Up until now, there are Jasindo’s obligations for claims and commissions to Bank Mandiri. As one of the corrective efforts to avoid greater losses in the future period, Jasindo restructured claims and commission obligations with Bank Mandiri.

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo No. PKS.036/ AJI/VIII/2022 dan No. JRB.DSG/BAC.1032/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 serta Addendum Pertama No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/ 2022 dan No. JRB.DSG. BAC.1432/ 2022 tanggal 29 November 2022 (”Perjanjian”) antara Jasindo dengan Bank Mandiri, Bank Mandiri telah menyetujui penjadwalan kembali atas kewajiban klaim, *future claims*, serta *fee-based income* untuk diangsur selama 15 tahun tanpa bunga efektif sejak 29 November 2022.

Based on Jasindo's Liability Arrear Settlement Agreement No. PKS.036/AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG/BAC.1032/2022 dated August 10, 2022 and First Addendum No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/ 2022 and No. JRB.DSG.BAC.1432/2022 dated November 29, 2022 ("Agreement") between Jasindo and Bank Mandiri, Bank Mandiri has agreed to restructuring obligations of claims, future claims, and fee-based income for 15 years in installments without interest effective from November 29, 2022.

Menindaklanjuti Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo, Jasindo dan Bank Mandiri telah melakukan rekonsiliasi selama tahun 2023 yang tertuang pada Berita Acara Rekonsiliasi *Future Claim Batch* II-V serta terdapat perubahan dan pernyataan kembali atas jumlah nilai klaim 2022.

Following up the Jasindo Arrear Settlement Agreement, Jasindo and Bank Mandiri have carried out a reconciliation during 2023 as stated in the Minutes of Future Claim Reconciliation Batch II-V and there are amendment and restatement of 2022 claim amounts.

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms*, sehingga Jasindo mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan mengakui liabilitas keuangan yang baru.

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence Jasindo recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini akan dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor (Catatan 37b) serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities related to this restructuring will be recorded as an unamortised expense from debt and additional paid-in capital (Note 37b) and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

36. Liabilitas Imbalan Kerja / *36. Employee Benefit Liabilities*

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: / *The employee benefit liabilities consist of:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	879,599	930,879	*Pension and other post-employment benefits*
Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan	203,001	307,332	*Pension health facilities benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	204,286	221,403	*Other long-term employee benefits*
	1,286,886	**1,459,614**	

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits ("S&M") dan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*", sedangkan untuk entitas anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen KKA Riana dan Rekan (sebelumnya bernama PT Padma Radya Aktuaria), KKA Steven & Mourits (sebelumnya bernama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dan KKA I Gde Eka Sarmaja, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The Company's employee benefit liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits ("S&M") and KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan using the "Projected Unit Credit" method, whilst for subsidiaries, the liability for employee benefits as of December 31, 2024 and 2023 are calculated by an independent actuary, KKA Riana dan Rekan (formerly known as PT Padma Radya Aktuaria), KKA Steven & Mourits (formerly known as PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, and KKA I Gde Eka Sarmaja, using the "Projected Unit Credit" method.

Berdasarkan laporan aktuaris independen untuk Perseroan dan entitas anak, asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

Based on the independent actuary report for the Company and subsidiaries, the actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2024	2023	
Usia pensiun normal	55-56 tahun/ *years*	55-56 tahun/ *years*	*Normal retirement age*
Tingkat kenaikan gaji	4.00%-8.50%	4.00% - 8.50%	*Salary incremental rate*
Tingkat diskonto	6.88% - 7.25%	6.25% - 7.50%	*Discount rate*
Tingkat inflasi biaya kesehatan	11.00%	11.00%	*Health cost inflation rate*
Tingkat inflasi emas	7% - 8%	8.00%	*Gold inflation rate*
Tingkat imbal hasil	4.39% - 6.20%	6.00% - 6.20%	*Yield rate*
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat tetap	1,00% - 10,00% dari tingkat kematian/ *1.00% - 10.00% of mortality rate*	1,00% - 10,00% dari tingkat kematian/ *1.00% - 10.00% of mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0,00% - 5,00% tergantung usia/ *0.00% - 5.00% depending on age*	0,00% - 5,00% tergantung usia/ *0.00% - 5.00% depending on age*	*Resignation rate*
Tingkat pengembalian investasi DPLK	2.5% - 7.00%	2.5% - 7.00%	*Return on investment of DPLK*

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset program Grup dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa IFG, Dana Pensiun Jasa Raharja, Dana Pensiun Jasindo, Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI ("DPLK BRI"), dan PT BNI Life Insurance.

As of December 31, 2024, the Group's plan assets are managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa IFG, Dana Pensiun Jasa Raharja, Dana Pensiun Jasindo, Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI ("DPLK BRI"), and PT BNI Life Insurance.

a. Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

a. *Pension and other post-employment benefits*

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The pension and other post-employment benefits recognised in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai kini kewajiban	2,613,089	2,565,592	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	(1,733,490)	(1,634,713)	*Fair value of plan assets*
	879,599	**930,879**	

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya bersih adalah sebagai berikut:

The movement of net pension and other postemployment benefits is as follows:

	2024			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp	Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya/ *Pension and other post-employment benefit liabilities* Rp	
Saldo awal	2,565,592	(1,634,713)	930,879	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	147,147	--	147,147	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(13,742)	--	(13,742)	*Past service cost*
Beban/ (penghasilan) bunga	188,608	(128,466)	60,142	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Imbal hasil atas aset program	--	20,747	20,747	*Return on plan assets -*
- Perubahan asumsi demografi	(8,273)	--	(8,273)	*Change in - demographic assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	(79,631)	--	(79,631)	*Change in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(25,601)	--	(25,601)	*Experience adjustment - on obligation*
Iuran yang dibayar	--	(106,345)	(106,345)	*Contribution paid*
Imbalan yang dibayar	(161,011)	115,025	(45,986)	*Benefit paid*
	2,613,089	**(1,733,752)**	**879,337**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	262	262	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**2,613,089**	**(1,733,490)**	**879,599**	***Ending balance***

	2023			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp	Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya/ *Pension and other post-employment benefit liabilities* Rp	
Saldo awal	2,485,479	(1,509,766)	975,713	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	135,591	--	135,591	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(239,325)	109,347	(129,978)	*Past service cost*
Beban/(penghasilan) bunga	76,725	(27,675)	49,050	*Interest expense/(income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Imbal hasil atas aset program	--	(221)	(221)	*Return on plan assets -*
- Perubahan asumsi demografi	(1,457)	--	(1,457)	*Change in - demographic assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	152,692	--	152,692	*Change in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	135,901	--	135,901	*Experience adjustment - on obligation*
Iuran yang dibayar	--	(96,112)	(96,112)	*Contribution paid*
Imbalan yang dibayar	(180,014)	123,066	(56,948)	*Benefit paid*
	2,565,592	**(1,401,361)**	**1,164,231**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	(124,005)	(124,005)	*Impact on the application of asset ceiling*
Cadangan kerugian penurunan atas nilai aset program	--	(109,347)	(109,347)	*Allowance for impairment losses of plan assets*
	--	(233,352)	(233,352)	
Saldo akhir	**2,565,592**	**(1,634,713)**	**930,879**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya jasa kini	147,147	135,591	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(13,742)	(129,978)	*Past service cost*
Beban bunga	60,142	49,050	*Interest expense*
	193,547	**54,663**	

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated other comprehensive income are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbal hasil atas aset program	21,009	(233,573)	*Return on plan assets*
Perubahan asumsi demografi	(8,273)	(1,457)	*Change in demographic assumption*
Perubahan asumsi keuangan	(79,631)	152,692	*Change in financial assumption*
Penyesuaian pengalaman kewajiban	(25,601)	135,901	*Experience adjustment on obligation*
	(92,496)	**53,563**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 11,39 tahun (2023: 15,50 tahun).

The weighted average duration of the pension and other post-employment benefit liabilities as of December 31, 2024, is 11.39 years (2023: 5.50 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun dan pascakerja lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other post-employment benefit is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Dalam 1 tahun	167,254	139,593	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	598,428	539,221	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	458,037	551,843	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	9,254,816	8,523,291	*More than 10 years*
	10,478,535	**9,753,948**	

Sensitivitas liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the pension and other post-retirement benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions is as follows:

2024				
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* Rp**	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(89,930)	267,293	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	100,427	(179,795)	*Salary incremental rate*

2023				
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* Rp**	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(273,658)	162,120	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	111,623	(136,867)	*Salary incremental rate*

b. Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan

Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

b. Pension health facilities benefits

The pension health facilities benefits recognised in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai kini kewajiban	209,756	320,522	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	(6,755)	(13,190)	*Fair value of plan assets*
	203,001	**307,332**	

Mutasi imbalan fasilitas kesehatan pensiunan bersih adalah sebagai berikut:

The movement of net pension health facilities benefits is as follows:

	2024			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp	Liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan/ *Pension health facilities benefit liabilities* Rp	
Saldo awal	320,522	(13,190)	307,332	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	19,040	--	19,040	*Current service cost*
Biaya/ (pendapatan) jasa lalu	(108,356)	--	(108,356)	*Past service cost*
Beban/ (pendapatan) bunga	15,038	(1,016)	14,022	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Perubahan asumsi demografi	(387)	--	(387)	*Change in demographic - assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	(5,081)	--	(5,081)	*Change in - financial assumption*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(23,100)	--	(23,100)	*Experience adjustment - on obligation*
- Pengukuran kembali imbal hasil aset program	--	275	275	*Remeasurement of the - return on plan assets*
Imbalan yang dibayar	(7,920)	6,535	(1,385)	*Benefit paid*
	209,756	**(7,396)**	**202,360**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	641	641	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**209,756**	**(6,755)**	**203,001**	***Ending balance***

	2023			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp	Liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan/ *Pension health facilities benefit liabilities* Rp	
Saldo awal	200,342	(19,116)	181,226	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	20,220	--	20,220	*Current service cost*
Biaya/ (pendapatan) jasa lalu	56,494	--	56,494	*Past service cost*
Beban/ (pendapatan) bunga	19,041	(1,434)	17,607	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Imbal hasil aset program	--	(509)	(509)	*Return on plan assets -*
- Perubahan asumsi demografi	(2,290)	--	(2,290)	*Change in demographic - assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	27,936	--	27,936	*Change in - financial assumption*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	6,924	--	6,924	*Experience adjustment - on obligation*
Imbalan yang dibayar	(8,145)	6,543	(1,602)	*Benefit paid*
	320,522	**(14,516)**	**306,006**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	1,326	1,326	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**320,522**	**(13,190)**	**307,332**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya jasa kini	19,040	20,220	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(108,356)	56,494	*Past service cost*
Beban bunga	14,022	17,607	*Interest expense*
	(75,294)	**94,321**	

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated other comprehensive income are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbal hasil aset program	275	(509)	*Return on plan assets*
Perubahan asumsi demografi	(387)	(2,290)	*Change in demographic assumption*
Perubahan asumsi keuangan	(5,081)	27,936	*Change in financial assumption*
Penyesuaian pengalaman kewajiban	(23,100)	6,924	*Experience adjustment on obligation*
	(28,293)	**32,061**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 38,47 tahun (2023: 35,38 tahun).

The weighted average duration of the pension health facilities benefits liability as of December 31, 2024 is 38.47 years (2023: 35.38 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension health facilities benefits is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Dalam 1 tahun	5,043	10,050	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	11,689	23,651	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	14,672	29,122	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	446,718	567,306	*More than 10 years*
	478,122	**630,129**	

Sensitivitas liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the pension health facilities benefit liabilities to changes in the key actuarial assumptions is as follows:

	2024			
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan/ *Increase* Rp**	**Penurunan/ *Decrease* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(112,005)	135,680	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	133,484	(122,034)	*Salary growth rate*

2023				
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan/ *Increase* Rp**	**Penurunan/ *Decrease* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(66,656)	94,635	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	93,220	(67,310)	*Salary growth rate*

c. Imbalan jangka panjang lainnya

Mutasi imbalan jangka panjang lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

c. Other long-term employee benefits

The movement of other long-term employee benefits in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2024 Rp	**2023 Rp**	
Saldo awal	221,403	213,514	*Beginning balance*
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	21,136	33,510	*Amount charged to profit or loss*
Imbalan yang dibayar	(38,253)	(25,621)	*Benefit paid*
Saldo akhir	**204,286**	**221,403**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2024 Rp	**2023 Rp**	
Biaya jasa kini	34,746	37,336	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(4,141)	(15,633)	*Past service cost*
Beban bunga	12,042	12,026	*Interest expense*
Pengukuran kembali yang diakui selama tahun berjalan	(21,511)	(219)	*Remeasurement recognised during the year*
	21,136	**33,510**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 6,03 – 18,71 tahun (2023: 6,50 - 20,12 tahun).

The weighted average duration of the other long-term employee benefits liability as of December 31, 2024, is 6.03 – 18.71 years (2023: 6.50 - 20.12 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits liabilities is as follows:

	2024 Rp	**2023 Rp**	
Dalam 1 tahun	53,448	19,371	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	147,596	114,014	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	169,287	367,584	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	1,193,971	446,308	*More than 10 years*
	1,564,302	**947,277**	

37. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor / *37. Share Capital and Additional Paid-In Capital*

a. Modal saham / *a. Share capital*

Modal saham Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's share capital as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ *Amount* Rp	
Pemerintah Republik Indonesia				***Government of the Republic of Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.000001%	1	*Series A Dwiwarna Share*
Saham Seri B	93,719,536	99.999999%	93,719,536	*Series B Share*
	93,719,537	**100.000000%**	**93,719,537**	

	2023			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ *Amount* Rp	
Pemerintah Republik Indonesia				***Government of the Republic of Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.000001%	1	*Series A Dwiwarna Share*
Saham Seri B	90,163,536	99.999999%	90,163,536	*Series B Share*
	90,163,537	**100.000000%**	**90,163,537**	

Pada 29 Desember 2023, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara No. 73 mengenai persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (saham portepel) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia oleh Negara Republik Indonesia dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp90.163.537 yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2023. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023 melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0165826.

On December 29, 2023, there was an amendment to the Company's Articles of Association by Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 73 regarding the approval of the issuance of shares that are still in deposit (unissued shares) and the addition of issued and paid-up capital amounting to Rp3,000,000 which portion is entirely taken up by the Republic of Indonesia and approved the addition of issued and paid-up capital. The total issued and paid-up capital is Rp90,163,537 sourced from capital participation by the Republic of Indonesia based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 60 Year 2023. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on December 29, 2023, through Decree No. AHU-AH.01.03-0165826.

Pada tanggal 4 April 2024, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 25 mengenai persetujuan pengeluaran saham yang masih dalam

On April 4, 2024, there was an amendment to the Company's Articles of Association by Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 25 regarding the approval of the issuance of shares that are still in deposit

simpanan (saham portepel) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.556.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp93.719.537 yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2024. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2024 melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0083246.

(unissued shares) and the addition of issued and paid-up capital amounting to Rp3,556,000 which portion is entirely taken up by the Republic of Indonesia and approved the addition of issued and paid-up capital. The total issued and paid-up capital is Rp93,719,537 sourced from capital participation by the Republic of Indonesia based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 Year 2024. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 4, 2024, through Decree No. AHU-AH.01.03-0083246.

b. Tambahan modal disetor / ***b. Additional paid-in capital***

	2024 Rp	2023 Rp	
Mutasi tambahan modal disetor:			*Changes in additional paid-in capital:*
Saldo awal	59,815,120	56,392,393	*Beginning balance*
Penyesuaian nilai kini utang restrukturisasi	12,739	(56,090)	*Adjustments to the present value of debt restructuring*
Transfer portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1,333,609	3,478,817	*Transfer of portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
Akuisisi Inhealth oleh IFG Life	844,977	--	*Inhealth acquisition by IFG Life*
Saldo akhir	**62,006,445**	**59,815,120**	***Ending balance***

Transfer portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2024 menerima pengalihan liabilitas sebesar Rp3.218.921 dan aset-aset sebesar Rp1.885.312 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Transfer of portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2024 received the transfer of liabilities amounting to Rp3,218,921 and assets amounting to Rp1,885,312 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2023 menerima pengalihan liabilitas sebesar Rp4.353.139 dan aset-aset sebesar Rp875.322 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2023 received the transfer of liabilities amounting to Rp4,354,139 and assets amounting to Rp875,322 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2022 menerima pengalihan liabilitas pertanggungan asuransi sebesar Rp10.152.689 dan aset-aset sebesar Rp5.198.315 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2022 received the transfer of insurance liabilities portfolio amounting to Rp10,152,689 and assets amounting to Rp5,198,315 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial

rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2021 menerima pengalihan liabilitas pertanggungan asuransi sebesar Rp20.912.510 dan aset-aset finansial sebesar Rp1.487.104 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, received the transfer of insurance liabilities portfolio amounting to Rp20,912,510 and financial assets amounting to Rp1,487,104 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Akumulasi selisih antara aset dan liabilitas yang dialihkan yang diakui sebagai tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Accumulated difference between assets and liabilities transferred which recognised as additional paid-in capital are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	(285,142)	(16,094)	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	(4,206,581)	(2,702,058)	*Investments - net*
Piutang hasil investasi - bersih	(1,038)	(1,038)	*Investment income receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	(35,435)	--	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Penyertaan langsung	(138,265)	(138,255)	*Direct investment*
Properti investasi - bersih	(3,939,302)	(3,917,097)	*Investment properties - net*
Aset tetap - bersih	(810,909)	(756,828)	*Fixed assets - net*
Aset lain-lain	(29,381)	(29,371)	*Other assets*
	(9,446,053)	**(7,560,741)**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas kontrak asuransi	38,638,147	35,419,338	*Insurance contract liabilities*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	112	--	*Account payables and other payables*
	38,638,259	**35,419,338**	
Selisih yang diakui di tambahan modal disetor	**29,192,206**	**27,858,597**	*Differences recognized in additional paid in capital*

Nilai kini pinjaman dari Pemerintah

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas utang bunga Rekening Dana Investasi ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 dan atas utang penerusan pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 yang akan diangsur selama 20 tahun (2021 sampai dengan 2040) termasuk masa tenggang 2 tahun (2021 sampai dengan 2022) (Catatan 30).

Present value of Government loans

Based on the Decision Letter of Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure interest payable on Investment Fund Account ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 and subsidiary loan ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 which will be installed for 20 years (2021 until 2040) including a grace period of 2 years (2021 until 2022) (Note 30).

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms,* sehingga Grup mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, the Group recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini sebesar Rp547.157 dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor, serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme amounting to Rp547,157 was recorded as an unamortised expense of debt and additional paid-in capital and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

Utang restrukturisasi PT Asuransi Jasa Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo No. PKS.036/AJI/VIII/2022 dan No. JRB.DSG/BAC.1032/2022 tanggal 10 Agustus 2022 serta Addendum Pertama No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/2022 dan No. JRB.DSG.BAC.1432/2022 tanggal 29 November 2022 (”Perjanjian”) antara Jasindo dengan Bank Mandiri, Bank Mandiri telah menyetujui penjadwalan kembali atas kewajiban klaim, *future claims*, serta *fee-based income* untuk diangsur selama 15 tahun tanpa bunga efektif sejak 29 November 2022 (Catatan 35).

Restructuring debt of PT Asuransi Jasa Indonesia

Based on Jasindo's Liability Arrear Settlement Agreement No. PKS.036/AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG/BAC.1032/2022 dated August 10, 2022 and First Addendum No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG.BAC.1432/2022 dated November 29, 2022 ("Agreement") between Jasindo and Bank Mandiri, Bank Mandiri has agreed to restructuring obligations of claims, future claims, and fee-based income for 15 years in installments without interest effective from November 29, 2022 (Note 35).

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms*, sehingga Jasindo mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan mengakui liabilitas keuangan yang baru.

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, Jasindo recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini akan dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi dari utang dan tambahan modal disetor, serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laba rugi.

The differences between new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme will be recorded as an unamortised expense of debt and additional paid-in capital, and will be amortised monthly in the profit or loss.

	2024		
	Utang klaim/ *Claim payables* Rp	**Utang komisi/ *Commissions payables* Rp**	
Nilai nominal sebelum restrukturisasi	1,173,228	54,316	*Nominal value before restructuring*
Nilai wajar setelah restrukturisasi	(713,014)	(32,172)	*Fair value after restructuring*
Tambahan modal disetor	**460,214**	**22,144**	***Additional paid-in capital***

	2023		
	Utang klaim/ *Claim payables* Rp	**Utang komisi/ *Commissions payables* Rp**	
Nilai nominal sebelum restrukturisasi	1,180,754	54,316	*Nominal value before restructuring*
Nilai wajar setelah restrukturisasi	(707,801)	(32,172)	*Fair value after restructuring*
Tambahan modal disetor	**472,953**	**22,144**	***Additional paid-in capital***

Kombinasi Bisnis IFG Life

Pada tanggal 11 Juni 2024, entitas anak PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") menandatangani akta jual beli saham dengan Perseroan, untuk membeli 100.000 saham yang mewakili 10% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebesar Rp217.000. IFG Life telah membayar transaksi tersebut pada tanggal yang sama.

IFG Life Business Combination

On 11 June 2024, the subsidiary PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") IFG Life signed sales and purchase agreement with the Company, to acquire 100,000 ownership shares, representing 10% shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth, the entity which engaged in insurance business, including health and personal accident insurance amounting to Rp217,000. IFG Life has paid the transaction on the same date with the date of agreement.

Pada tanggal 26 Juni 2024, IFG Life menandatangani: (1) akta jual beli saham dengan PT Kimia Farma Tbk, untuk membeli 100.000 lembar saham yang mewakili 10% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, dan (2) akta pengambilalihan saham dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk mengambilalih 600.000 lembar saham yang mewakili 60% kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Inhealth. IFG Life telah membayar kedua transaksi dengan nilai total Rp1.939.000 pada tanggal yang sama. Atas hal ini, IFG Life secara resmi mengakuisisi 80% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, dengan tanggal efektif akuisisi 26 Juni 2024 dan dengan nilai akuisisi total Rp2.156.000.

On 26 June 2024, IFG Life signed: (1) sales and purchase agreement with PT Kimia Farma Tbk, to acquire 100,000 shares, representing 10% shares ownership of PT Asuransi Jiwa Inhealth, and (2) acquisition shares agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, to acquire 600,000 shares which represent 60% ownership shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth. IFG Life has paid both transactions amounting to Rp1,939,000 on the same date with the date of agreements. With the above conditions, IFG Life has officially acquired 80% shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth, with the acquisition effective date on 26 June 2024 and with total acquisition cost amounting to Rp2,156,000.

Transaksi di atas diakui sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan.

This transaction recognized as business combination of entity under common control and recorded using pooling interest method.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, nilai-nilai aset dan liabilitas yang diperoleh diakui pada jumlah tercatat. Selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas bersih dengan nilai pembelian saham atau penyetoran modal dicatat sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

In applying the pooling of interest method, the values of assets and liabilities acquired were recorded at their carrying amount. The difference between the carrying amount of net assets and liabilities and the purchase price of shares or paid-up capital were recorded as the difference in value of restructuring transactions among entities under common control and presented as part of additional paid-in capital.

Aset bersih yang diterima dan nilai akuisisi pada tanggal efektif kombinasi bisnis sesuai kepemilikan adalah sebagai berikut:

The net assets received according to IFG Life's ownership and the acquisition price as of the effective date of the business combination are as follows:

	Rp	
Nilai tercatat aset bersih yang diperoleh	1,311,023	*Carrying value of net assets acquired*
Nilai imbalan yang dialihkan	2,156,000	*Considerations paid*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	**(844,977)**	***Difference in value of transactions among entities under common control***

38. Pendapatan Premi Asuransi – Bersih / *38. Insurance Premium Income - Net*

	2024				
	Pendapatan premi asuransi bruto/ *Gross insurance premium income* Rp	Premi reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession premiums* Rp	Penurunan/ (kenaikan) cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan/ *Decrease/ (increase) in unearned premium reserves* Rp	Pendapatan premi asuransi - bersih/ *Insurance premium income - net* Rp	
Kredit	6,773,280	(66,153)	46,209	6,753,336	*Credit*
Kesehatan	5,409,361	(765,956)	131,439	4,774,844	*Health*
Tanggung gugat	4,989,873	(129,850)	18,713	4,878,736	*Liability*
Jiwa	1,700,059	(65,857)	97,088	1,731,290	*Life*
Harta benda (properti)	1,309,451	(1,045,861)	55,092	318,682	*Property*
Suretyship	684,480	(311,188)	(55,721)	317,571	*Suretyship*
Energi *offshore*	809,936	(755,538)	(143)	54,255	*Energy offshore*
Rangka kapal	482,865	(247,797)	3,016	238,084	*Marine hull*
Rekayasa	341,405	(186,365)	5,719	160,759	*Engineering*
Kendaraan bermotor	204,186	(8,959)	2,579	197,806	*Vehicles*
Rangka pesawat	185,436	(160,949)	367	24,854	*Aviation*
Pengangkutan	110,352	(45,742)	(795)	63,815	*Marine cargo*
Energi *onshore*	86,392	(59,710)	(187)	26,495	*Energy onshore*
Satelit	68,417	(62,767)	(1,064)	4,586	*Satellites*
Kecelakaan diri	35,623	(7,609)	(777)	27,237	*Personal accident*
Aneka	508,639	(207,187)	(125,813)	175,639	*Miscellaneous*
	23,699,755	**(4,127,488)**	**175,722**	**19,747,989**	

	2023				
	Pendapatan premi asuransi bruto/ *Gross insurance premium income* Rp	Premi reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession premiums* Rp	Penurunan/ (kenaikan) cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan/ *Decrease/ (increase) in unearned premium reserves* Rp	Pendapatan premi asuransi - bersih/ *Insurance premium income - net* Rp	
Kredit	7,713,683	(204,386)	496,874	8,006,171	*Credit*
Kesehatan	3,394,300	(606,219)	(61,932)	2,726,149	*Health*
Tanggung gugat	5,037,342	(135,764)	(20,549)	4,881,029	*Liability*
Jiwa	1,973,753	(197,005)	462,120	2,238,868	*Life*
Harta benda (properti)	1,617,547	(1,078,839)	339,379	878,087	*Property*
Suretyship	822,645	(408,604)	(4,050)	409,991	*Suretyship*
Energi *offshore*	560,624	(523,761)	5,710	42,573	*Energy offshore*
Rangka kapal	466,267	(180,798)	56,494	341,963	*Marine hull*
Rekayasa	293,159	(143,137)	119,721	269,743	*Engineering*
Kendaraan bermotor	214,897	(12,290)	32,739	235,346	*Vehicles*
Rangka pesawat	202,706	(185,321)	9,750	27,135	*Aviation*
Pengangkutan	147,381	(37,490)	30,439	140,330	*Marine cargo*
Energi *onshore*	42,341	(27,660)	(5,944)	8,737	*Energy onshore*
Satelit	266,706	(253,862)	(1,351)	11,493	*Satellites*
Kecelakaan diri	22,441	(14,938)	(6,178)	1,325	*Personal accident*
Aneka	566,041	(311,710)	115,426	369,757	*Miscellaneous*
	23,341,833	**(4,321,784)**	**1,568,648**	**20,588,697**	

39. Pendapatan Penjaminan – Bersih / *39. Guarantee Income – Net*

	2024			
	Imbal jasa penjaminan/ *Guarantee fee income* Rp	Premi penjaminan ulang/ *Re-guarantee premiums* Rp	Pendapatan penjaminan - bersih/ *Guarantee income - net* Rp	
Kredit	7,617,029	(405,279)	7,211,750	*Credit*
Suretyship	116,002	(227)	115,775	*Suretyship*
	7,733,031	**(405,506)**	**7,327,525**	

	2023			
	Imbal jasa penjaminan/ *Guarantee fee income* Rp	Premi penjaminan ulang/ *Re-guarantee premiums* Rp	Pendapatan penjaminan - bersih/ *Guarantee income - net* Rp	
Kredit	6,629,650	(167,122)	6,462,528	*Credit*
Suretyship	109,050	(15,151)	93,899	*Suretyship*
	6,738,700	**(182,273)**	**6,556,427**	

40. Beban Klaim Asuransi – Bersih / *40. Insurance Claim Expenses – Net*

	2024					
	Beban klaim asuransi bruto/ *Gross insurance claim expenses* Rp	Klaim reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession claims* Rp	(Penurunan)/ kenaikan estimasi klaim retensi sendiri/ *(Decrease)/ increase in estimated own retention claims* Rp	(Penurunan)/ kenaikan liabilitas kepada pemegang *unit link* / *(Decrease)/ increase in liabilities to unit-linked holders* Rp	Beban klaim asuransi - bersih/ *Insurance claim expenses - net* Rp	
Kredit	7,483,034	(347,768)	576,177	--	7,711,443	*Credit*
Kesehatan	4,274,033	(722,326)	464,432	--	4,016,139	*Health*
Tanggung gugat	2,963,174	(20,722)	177,079	--	3,119,531	*Liability*
Jiwa	6,065,452	(24,254)	(3,951,462)	(18,237)	2,071,499	*Life*
Harta benda (properti)	1,687,243	(953,385)	(505,648)	--	228,210	*Property*
Suretyship	286,415	(132,725)	106,173	--	259,863	*Suretyship*
Energi *offshore*	780,037	(646,370)	12,163	--	145,830	*Energy offshore*
Rangka kapal	466,603	(108,890)	155,947	--	513,660	*Marine hull*
Rekayasa	376,197	(139,060)	26,237	--	263,374	*Engineering*
Kendaraan bermotor	88,789	(8,699)	(18,215)	--	61,875	*Vehicles*
Rangka pesawat	152,644	(112,500)	(6,971)	--	33,173	*Aviation*
Pengangkutan	99,625	(21,489)	16,977	--	95,113	*Marine cargo*
Energi *onshore*	217	(17,006)	5,850	--	(10,939)	*Energy onshore*
Satelit	452	--	(217)	--	235	*Satellites*
Kecelakaan diri	95,934	(1,909)	5,421	--	99,446	*Personal accident*
Aneka	170,023	31,781	574,373	--	776,177	*Miscellaneous*
	24,989,872	**(3,225,322)**	**(2,361,684)**	**(18,237)**	**19,384,629**	

	2023					
	Beban klaim asuransi bruto/ *Gross insurance claim expenses* Rp	Klaim reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession claims* Rp	(Penurunan)/ kenaikan estimasi klaim retensi sendiri/ *(Decrease)/ increase in estimated own retention claims* Rp	(Penurunan)/ kenaikan liabilitas kepada pemegang *unit link* / *(Decrease)/ increase in liabilities to unit-linked holders* Rp	Beban klaim asuransi - bersih/ *Insurance claim expenses - net* Rp	
Kredit	7,440,780	(556,566)	(62,960)	--	6,821,254	*Credit*
Kesehatan	2,886,425	(587,232)	23,648	--	2,322,841	*Health*
Tanggung gugat	3,096,958	(40,255)	(2,001)	--	3,054,702	*Liability*
Jiwa	4,977,404	(163,282)	(1,790,321)	1,800	3,025,601	*Life*
Harta benda (properti)	2,026,841	(733,133)	(697,739)	--	595,969	*Property*
Suretyship	380,819	(196,537)	100,276	--	284,558	*Suretyship*
Energi *offshore*	877,973	(718,344)	(62,504)	--	97,125	*Energy offshore*
Rangka kapal	482,798	(97,960)	(55,309)	--	329,529	*Marine hull*
Rekayasa	382,557	(103,390)	16,053	--	295,220	*Engineering*
Kendaraan bermotor	133,975	(4,803)	(20,840)	--	108,332	*Vehicles*
Rangka pesawat	160,645	(117,548)	(3,871)	--	39,226	*Aviation*
Pengangkutan	168,481	(7,151)	(108,599)	--	52,731	*Marine cargo*
Energi *onshore*	19	(187)	5,013	--	4,845	*Energy onshore*
Satelit	17,935	(15,780)	646	--	2,801	*Satellites*
Kecelakaan diri	9,877	(1,404)	3,441	--	11,914	*Personal accident*
Aneka	211,603	(181,110)	282,975	--	313,468	*Miscellaneous*
	23,255,090	**(3,524,682)**	**(2,372,092)**	**1,800**	**17,360,116**	

41. Beban Klaim Penjaminan – Bersih / *41. Guarantee Claim Expenses – Net*

	2024				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* Rp	Klaim penjaminan ulang/ *Reguarantee claims* Rp	Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liabilities* Rp	Beban klaim penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net* Rp	
Kredit	8,574,251	(187,013)	(287,379)	8,099,859	*Credit*
Suretyship	253,351	158,616	(61,106)	350,861	*Suretyship*
	8,827,602	**(28,397)**	**(348,485)**	**8,450,720**	

	2023				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* Rp	Klaim penjaminan ulang/ *Reguarantee claims* Rp	Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liabilities* Rp	Beban klaim penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net* Rp	
Kredit	5,427,302	(38,027)	(584,656)	4,804,619	*Credit*
Suretyship	49,436	(498)	(113,116)	(64,178)	*Suretyship*
	5,476,738	**(38,525)**	**(697,772)**	**4,740,441**	

42. Pendapatan Subrogasi / *42. Subrogation Income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	3,264,811	2,335,321	*Credit*
Tanggung gugat	56	13	*Liability*
Harta benda (properti)	257	163	*Property*
Suretyship	194,966	94,947	*Suretyship*
Rekayasa	7	299	*Engineering*
Kendaraan bermotor	556	382	*Vehicles*
Pengangkutan	1	80	*Marine cargo*
Kecelakaan diri	14	804	*Personal accident*
	3,460,668	**2,432,009**	

43. Beban Akuisisi dan Komisi – Bersih / *43. Acquisition Cost and Commission - Net*

a. Beban akuisisi dan komisi asuransi – bersih / *a. Acquisition cost and insurance commission - Net*

	2024			2023			
	Beban komisi/ *Commission expense* Rp	Pendapatan komisi/ *Commission income* Rp	Beban komisi - bersih/ *Commission expense - net* Rp	Beban komisi/ *Commission expense* Rp	Pendapatan komisi/ *Commission income* Rp	Beban komisi - bersih/ *Commission expense - net* Rp	
Kredit	522,147	(89,519)	432,628	363,861	(115,435)	248,426	*Credit*
Kesehatan	169,957	(4,129)	165,828	144,484	(2,411)	142,073	*Health*
Tanggung gugat	479,112	(4,058)	475,054	490,953	(34,390)	456,563	*Liability*
Jiwa	69,617	(30,343)	39,274	240,358	(32,821)	207,537	*Life*
Harta benda (properti)	39,090	(41,226)	(2,136)	180,409	(105,818)	74,591	*Property*
Suretyship	42,075	(49,981)	(7,906)	62,106	(63,817)	(1,711)	*Suretyship*
Energi *offshore*	51,458	(101,243)	(49,785)	2,821	(76,737)	(73,916)	*Energy offshore*
Rangka kapal	25,758	(34,846)	(9,088)	45,249	(31,536)	13,713	*Marine hull*
Rekayasa	15,074	(4,007)	11,067	52,457	(20,586)	31,871	*Engineering*
Kendaraan bermotor	59,206	(53,242)	5,964	54,167	(40,303)	13,864	*Vehicles*
Rangka pesawat	3,391	(4,599)	(1,208)	9,464	(9,157)	307	*Aviation*
Pengangkutan	13,232	(5,518)	7,714	25,201	(6,332)	18,869	*Marine cargo*
Energi *onshore*	2,316	(6,536)	(4,220)	956	(3,232)	(2,276)	*Energy onshore*
Satelit	959	(1,594)	(635)	787	(7,591)	(6,804)	*Satellites*
Kecelakaan diri	(1,023)	121	(902)	(833)	(1,250)	(2,083)	*Personal accident*
Aneka	112,242	(180,493)	(68,251)	104,084	(12,896)	91,188	*Miscellaneous*
	1,604,611	**(611,213)**	**993,398**	**1,776,524**	**(564,312)**	**1,212,212**	

b. Beban akuisisi dan komisi penjaminan – bersih / *b. Acquisition cost and guarantee commission expenses - net*

	2024			2023			
	Beban komisi/ *Commission expense* Rp	Pendapatan komisi/ *Commission income* Rp	Beban komisi - bersih/ *Commission expense - net* Rp	Beban komisi/ *Commission expense* Rp	Pendapatan komisi/ *Commission income* Rp	Beban komisi - bersih/ *Commission expense - net* Rp	
Kredit	23,511	(13,015)	10,496	33,373	(17,457)	15,916	*Credit*
Suretyship	14,807	(244)	14,563	4,202	(1,743)	2,459	*Suretyship*
	38,318	**(13,259)**	**25,059**	**37,575**	**(19,200)**	**18,375**	

44. Pendapatan dan Beban *Underwriting* Lain-Lain / *44. Other Underwriting Income and Expenses*

a. Pendapatan *underwriting* lain-lain / *a. Other underwriting income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	(1,169,779)	(661,244)	*Credit*
Kesehatan	(201)	(202)	*Health*
Tanggung gugat	(44)	(4,993)	*Liability*
Harta benda (properti)	(7,649)	(3,821)	*Property*
Suretyship	(35,501)	(256,296)	*Suretyship*
Energi *offshore*	(100)	(3,198)	*Energy offshore*
Rangka kapal	(411)	(2,705)	*Marine hull*
Rekayasa	(1,853)	(1,833)	*Engineering*
Kendaraan bermotor	(612)	(2,270)	*Vehicles*
Rangka pesawat	(8)	(85)	*Aviation*
Pengangkutan	(188)	(172)	*Marine cargo*
Energi *onshore*	(2,526)	(69)	*Energy onshore*
Kecelakaan diri	(17)	(3)	*Personal accident*
Aneka	(2,784)	(5,489)	*Miscellaneous*
	(1,221,673)	**(942,380)**	

b. Beban *underwriting* lain-lain / *b. Other underwriting expenses*

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit	1,026,005	411,830	*Credit*
Kesehatan	17,323	5,082	*Health*
Tanggung gugat	36	119	*Liability*
Jiwa	--	69,108	*Life*
Harta benda (properti)	4,249	5,049	*Property*
Suretyship	8,656	394,929	*Suretyship*
Energi *offshore*	41	7,455	*Energy offshore*
Rangka kapal	665	1,228	*Marine hull*
Rekayasa	262	1,269	*Engineering*
Kendaraan bermotor	296	103	*Vehicles*
Rangka pesawat	110	1,072	*Aviation*
Pengangkutan	--	430	*Marine cargo*
Energi *onshore*	170	130	*Energy onshore*
Satelit	8	320	*Satellites*
Kecelakaan diri	43	19	*Personal accident*
Aneka	78,449	75,455	*Miscellaneous*
	1,136,313	**973,598**	

45. Hasil Investasi – Bersih / *45. Investment Income - Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
Obligasi, sukuk dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	3,621,541	3,198,391	*Bonds, sukuk and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
Deposito berjangka	962,507	689,729	*Time deposits*
Reksadana	330,178	355,506	*Mutual funds*
Saham	6,173	81,087	*Shares*
Efek beragun aset	133	298	*Asset-backed securities*
Lainnya	1,192	2,622	*Others*
	4,921,724	**4,327,633**	
Beban investasi	(14,173)	(25,474)	*Investment expenses*
	4,907,551	**4,302,159**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Deposito berjangka	228,472	233,887	*Time deposits*
Reksadana	167,782	295,415	*Mutual funds*
Obligasi, sukuk dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	119,655	151,723	*Bonds, sukuk and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
Saham	31,342	104,038	*Shares*
Lainnya	73,357	66,371	*Others*
	620,608	**851,434**	
Beban investasi	(28,315)	(1,482)	*Investment expenses*
	592,293	**849,952**	
	5,499,844	**5,152,111**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Notes 51 for the details of related parties balances and transactions.

46. Pendapatan Jasa Manajemen Keuangan / *46. Financial Management Services Income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pengelolaan dana	216,859	190,792	*Fund management*
Modal ventura	114,324	132,380	*Venture capital*
Sekuritas	73,426	54,403	*Securities*
Penasehat keuangan	15,758	11,420	*Financial advisory*
Investasi	423	2,457	*Investment*
Lainnya	17,332	8,105	*Others*
	438,122	**399,557**	

47. Pendapatan Pengelolaan Gedung / *47. Building Management Income*

	2024 Rp	2023 Rp	
Sewa bangunan	75,395	78,987	*Building rental*
Jasa pengelolaan gedung	28,978	37,343	*Building management service*
Parkir	7,060	7,593	*Parking*
Lembur	4,712	4,310	*Overtime*
Rektifikasi gedung	977	4,430	*Building rectification*
Lainnya	22,875	17,260	*Others*
	139,997	**149,923**	

48. Beban Umum dan Administrasi / *48. General and Administrative Expenses*

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban karyawan	4,319,062	4,261,298	*Employee expense*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	1,109,122	1,825,037	*Allowance for impairment losses*
Beban pemasaran	663,046	532,520	*Marketing expense*
Beban pajak final dan pajak lainnya	646,006	667,545	*Final tax and other tax expense*
Beban penyusutan dan amortisasi	541,269	479,758	*Depreciation and amortisation*
Imbal jasa profesional	367,007	462,062	*Professional fee*
Beban kantor	208,542	185,297	*Office expense*
Beban pemeliharaan aset tetap	129,672	133,922	*Fixed assets maintenance expense*
Beban pengelolaan data, gedung, dana dan investasi	117,954	98,078	*Data, building, fund, and investment management expense*
Beban penelitian dan pengembangan	106,846	78,589	*Research and development expense*
Beban utilitas	80,504	87,020	*Utility expense*
Beban sewa kantor	49,697	91,840	*Office rental expense*
Beban bunga dan provisi bank	3,688	10,760	*Interest and bank provision expense*
Lainnya	754,470	586,534	*Others*
	9,096,885	**9,500,260**	

49. Beban Keuangan / *49. Finance Costs*

	2024 Rp	2023 Rp	
Bunga pinjaman bank	261,954	291,224	*Bank loans interest*
Bunga MTN	95,580	93,581	*MTN interest*
Bunga pinjaman dari Pemerintah	11,580	12,278	*Government loans interest*
	369,114	**397,083**	

Tabel di bawah ini menyajikan beban keuangan berdasarkan pihak:

The table below presents financial expenses by parties:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi	305,451	326,574	*Related parties*
Pihak ketiga	63,663	70,509	*Third parties*
	369,114	**397,083**	

Lihat Catatan 51 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Notes 51 for the details of related parties balances and transactions.

50. Pendapatan Lain-Lain – Bersih / *50. Other Income – Net*

	2024 Rp	2023 Rp	
Denda keterlambatan pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ("SWDKLLJ")	718,043	644,812	*Late payments penalty fund of Compulsory Contribution Road Traffic Accident ("SWDKLLJ")*
Administrasi sertifikasi/kartu dana	244,557	241,557	*Administration of certificates/ fund cards*
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih	66,853	(35,872)	*(Losses)/gains on foreign exchange - net*
Pendapatan bunga jasa giro	54,192	50,047	*Current account interest income*
Laba pelepasan aset tetap - bersih	6,820	5,074	*Gains on disposal of fixed asset - net*
Bunga piutang	3,666	1,756	*Interest on receivables*
Amortisasi pinjaman dari Pemerintah dan utang restrukturisasi	(88,365)	(84,601)	*Amortisation of government loans and restructuring debt*
Lainnya	(1,690)	106,254	*Others*
	1,004,076	**929,027**	

51. Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Pihak Berelasi / *51. Balances and Transactions With Related Parties*

a. Pemerintah Republik Indonesia / *a. The Government of the Republic of Indonesia*

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Grup. Grup memiliki obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, utang premi reasuransi dan retrosesi, utang penjaminan ulang, pinjaman dari Pemerintah, dan hasil investasi.

The Government of the Republic of Indonesia is the Group's shareholder. The Group owns bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia, insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, reinsurance and retrocession premium payables, re-guarantee payables, Government loans, and investment income.

b. Badan Usaha Milik Negara dan Entitas Anak / *b. State-Owned Enterprises and Subsidiaries*

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara. Grup memiliki penempatan rekening giro, deposito, investasi, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, piutang klaim reasuransi dan retrosesi, piutang penjaminan ulang, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, utang premi reasuransi dan retrosesi, utang penjaminan ulang, utang bank, utang restrukturasi, dan pendapatan hasil investasi pada entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Grup. Entitas-entitas tersebut adalah Badan Pengelola Pusat

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State-Owned Enterprises. The Group has placement in current account, deposits, investments, insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, reinsurance and retrocession claim receivables, re-guarantee receivables, insurance and reinsurance claim payables, guarantee claim payables, reinsurance and retrocession premium payables, re-guarantee payables, bank loans, restructuring debt, and investment income with entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with The Group. These entities are Badan Pengelola

Data Asuransi Nasional (BPPDAN), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (sebelumnya bernama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan unit syariahnya, PT Berdikari, PT Berdikari Insurance, PT Bio Farma (Persero), PT BNI Asset Management, PT BNI Life Insurance, BRI Asuransi Indonesia dan unit syariahnya, PT Bukit Asam Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Danareksa (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jayawijaya Dirgantara Airlines, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Mandiri Tunas Finance, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pindad, PT PLN Indonesia Power, PT PP (Persero) Tbk, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Semen Baturaja Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Telkom Satelit Indonesia, PT Timah (Persero) Tbk, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PNM Investment Management, Pusat Investasi Pemerintah.

Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN), Ministry of Agriculture Republic Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (sebelumnya bernama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk (formerly known as PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and its sharia unit, PT Berdikari, PT Berdikari Insurance, PT Bio Farma (Persero), PT BNI Asset Management, PT BNI Life Insurance, PT BRI Asuransi Indonesia and its sharia unit, PT Bukit Asam Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Danareksa (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jayawijaya Dirgantara Airlines, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Mandiri Tunas Finance, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pindad, PT PLN Indonesia Power, PT PP (Persero) Tbk, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Semen Baturaja Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Telkom Satelit Indonesia, PT Timah (Persero) Tbk, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PNM Investment Management, Pusat Investasi Pemerintah.

c. Manajemen kunci
Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Key management
Key management are Board of Commissioners and Directors.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant balances and transactions with related parties are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset:			***Assets:***
Kas di bank			***Cash in bank***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,340,753	1,006,201	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	509,795	714,231	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	209,378	116,404	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	207,557	271,782	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	63,039	47,996	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	7,443	12,726	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Bank Mandiri Taspen	948	2,120	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	90	1,186	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
	2,339,003	**2,172,646**	
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang			***Time deposits 3 months or less***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,975,650	1,964,672	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,434,896	2,272,770	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,298,881	3,518,053	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,231,334	960,601	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	604,574	926,789	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	265,450	157,531	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia	148,000	201,000	*PT Bank Raya Indonesia*
PT Bank Mandiri Taspen	1,000	1,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
	9,959,785	**10,002,416**	
Deposito berjangka			***Time deposits***
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	946,500	2,445,144	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	771,583	5,669,954	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500,350	841,700	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	368,260	26,500	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	297,112	493,650	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	110,400	319,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Bank Mandiri Taspen	--	10,001	*PT Bank Mandiri Taspen*
	2,994,205	**9,805,949**	

	2024 Rp	2023 Rp	
Obligasi, sukuk, dan *Medium Term Notes*			***Bonds, sukuk, and Medium Term Notes***
Obligasi pemerintah	47,120,366	46,060,952	*Government bonds*
Obligasi korporasi	4,741,234	4,314,703	*Corporate bonds*
Sukuk	4,068,328	5,058,964	*Sukuk*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	29,770	--	*Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
	55,959,698	**55,434,619**	
Saham			***Shares***
Badan usaha milik negara dan entitas anak	1,179,222	1,284,903	*State-owned enterprises and subsidiaries*
Reksadana			***Mutual funds***
Badan usaha milik negara dan entitas anak	6,007,515	4,453,891	*State-owned enterprises and subsidiaries*
Efek beragun aset			***Asset-backed securities***
Badan usaha milik negara dan entitas anak	10,921	12,483	*State-owned enterprises and subsidiaries*
Dana investasi infrastruktur			***Infrastructure investment fund***
Badan usaha milik negara dan entitas anak	--	30,030	*State-owned enterprises and subsidiaries*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih			***Insurance and reinsurance premium receivables - net***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,401,005	805,446	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,301,026	1,016,096	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	349,291	405,721	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang Tbk	140,443	190,222	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	85,235	84,693	*PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	83,144	108,402	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	75,293	40,436	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	64,952	77,207	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	47,335	38,589	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	44,946	43,278	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	37,246	37,409	*Ministry of Agriculture Republic Indonesia*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	35,753	41,651	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telkom Satelit Indonesia	29,785	271,735	*PT Telkom Satelit Indonesia*
PT Bukit Asam Tbk	25,462	22,587	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Semen Tonasa	19,745	31,286	*PT Semen Tonasa*
PT Telekomunikasi Selular	15,406	108,472	*PT Telekomunikasi Selular*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	4,889	55,414	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	462	43,027	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pemerintah Republik Indonesia	269	1,547,762	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Kereta Cepat Indonesia China	--	136,224	*PT Kereta Cepat Indonesia China*
PT Semen Padang	--	42,570	*PT Semen Padang*
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	--	42,567	*PT Solusi Bangun Indonesia Tbk*
PT Pertamina Hulu Mahakam	--	31,475	*PT Pertamina Hulu Mahakam*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	--	22,657	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
Lainnya	389,146	343,826	*Others*
	4,150,833	**5,588,752**	
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih			***Guarantee fee receivables - net***
Pemerintah Republik Indonesia	1,528,734	1,663,503	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,017,358	1,382,370	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	877,411	751,421	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	361,200	553,208	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17,798	15,634	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1,588	1,027	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	13	--	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
	3,804,102	**4,367,163**	
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih			***Reinsurance and retrocession claim receivables - net***
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	195,276	122,792	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	178,891	120,878	*PT Tugu Reasuransi Indonesia*
PT Asuransi Asei Indonesia	66,462	71,198	*PT Asuransi Asei Indonesia*
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	56,108	63,085	*PT Asuransi Perisai Listrik Nasional*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	41,964	738	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT BRI Asuransi Indonesia	21,587	14,536	*PT BRI Asuransi Indonesia*
Lainnya	12,760	21,267	*Others*
	573,048	**414,494**	
Piutang penjaminan ulang - bersih			***Re-guarantee receivables - net***
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	232,775	209,320	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT BRI Asuransi Indonesia	6,355	6,355	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	--	4,912	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
	239,130	**220,587**	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	**87,217,462**	**93,787,933**	***Total assets with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset	**65.88%**	**68.86%**	***Percentage of total assets***

	2024 Rp	2023 Rp	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang klaim asuransi dan reasuransi			***Insurance and reinsurance claim payables***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	251,250	130,864	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	232,188	96,271	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	187,064	114,734	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	169,844	133,295	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	69,432	36,217	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	55,691	1,781	*PT Asuransi Perisai Listrik Nasional*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,814	32,183	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT BRI Asuransi Indonesia	22,732	5,782	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	14,701	12,339	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Selular	13,228	18,068	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	9,965	7,164	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	7,853	2,205	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5,713	196	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
SKK Migas	5,016	265	*SKK Migas*
PT Citilink Indonesia	4,615	4,227	*PT Citilink Indonesia*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4,195	2,791	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)	3,824	678	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3,453	1,500	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Asuransi Asei Indonesia	1,596	1,514	*PT Asuransi Asei Indonesia*
PT Mandiri Tunas Finance	692	1,546	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Timah (Persero) Tbk	682	1,856	*PT Timah (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	154	37,835	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	17	181,438	*PT Pertamina (Persero)*
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	--	5,500	*Ministry of Agriculture Republic Indonesia*
PT Bio Farma (Persero)	--	1,064	*PT Bio Farma (Persero)*
Lainnya	66,070	20,130	*Others*
	1,164,789	**851,443**	
Utang klaim penjaminan			***Guarantee claim payables***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	285,540	67,013	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,116	5,111	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,677	2,856	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pegadaian	--	31	*PT Pegadaian*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	363	--	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	297,696	**75,011**	

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang premi reasuransi dan retrosesi			***Reinsurance and retrocession premium payables***
PT BRI Asuransi Indonesia	59,552	36,402	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	58,929	113,970	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	34,159	58,211	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	7,452	53,978	*PT Tugu Reasuransi Indonesia*
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	3,890	4,701	*PT Asuransi Perisai Listrik Nasional*
PT Asuransi Asei Indonesia	3,088	7,948	*PT Asuransi Asei Indonesia*
Pemerintah Republik Indonesia	--	8,503	*The Government of the Republic of Indonesia*
Lainnya	21,934	152,270	*Others*
	189,004	**435,983**	
Utang penjaminan ulang			***Re-guarantee payables***
PT BRI Asuransi Indonesia	3,000	--	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	196	--	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia	--	1,506	*The Government of the Republic of Indonesia*
	3,196	**1,506**	
Utang restrukturisasi			***Restructuring debt***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**682,256**	**711,324**	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman dari pemerintah			***Government loans***
Pemerintah Republik Indonesia	**521,958**	**493,128**	*The Government of the Republic of Indonesia*
Utang bank			***Bank loans***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	631,870	1,000,245	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	630,955	998,328	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	464,980	821,663	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	338,750	445,111	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	9,890	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	2,066,555	**3,275,237**	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	**4,925,454**	**5,843,632**	***Total liabilities with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**5.17%**	**5.96%**	***Percentage of total liabilities***

	2024 Rp	2023 Rp	
Hasil investasi - bersih			***Investment income - net***
Pemerintah Republik Indonesia	3,281,953	2,834,613	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	393,577	355,781	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	213,686	223,463	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	204,865	115,510	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	140,043	141,175	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	111,418	93,678	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	102,200	53,898	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	65,196	58,207	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah*
PT Danareksa (Persero)	51,691	78,385	*PT Danareksa (Persero)*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	41,936	44,557	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT PNM Investment Management	39,061	23,770	*PT PNM Investment Management*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	29,198	9,969	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	24,010	20,727	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Angkasa Pura I	21,535	69,077	*PT Angkasa Pura I*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20,836	32,333	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14,413	10,681	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	13,460	15,665	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pegadaian	12,555	14,944	*PT Pegadaian*
PT Mandiri Manajemen Investasi	10,257	8,514	*PT Mandiri Manajemen Investasi*
Lainnya	115,661	97,212	*Lainnya*
Jumlah hasil investasi dengan pihak berelasi	**4,907,551**	**4,302,159**	***Total investment income with related parties***
Persentase terhadap Hasil investasi	**89.23%**	**83.50%**	***Percentage of investment income***
Beban keuangan			***Finance costs***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80,736	91,636	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72,938	92,519	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	67,541	91,150	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	38,597	16,467	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Taspen (Persero)	18,099	17,968	*PT Taspen (Persero)*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4,525	4,492	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
Pusat Investasi Pemerintah	--	12,278	*Pusat Investasi Pemerintah*
Lainnya	23,015	64	*Others*
Jumlah beban keuangan dengan pihak berelasi	**305,451**	**326,574**	***Total finance costs with related parties***
Persentase terhadap jumlah beban keuangan	**82.75%**	**82.24%**	***Percentage of total finance costs***

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp100.420 (2023: Rp92.271).

Total compensation paid to the Group's Board of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2024 are amounted to Rp100,420 (2023: Rp92,271).

52. Manajemen Risiko Keuangan / *52. Financial Risk Management*

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai mata uang dan risiko tingkat bunga), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, manajemen permodalan, dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan.

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), liquidity risk, credit risk, operational risk, capital management, and fair value of financial assets and liabilities.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko, tingkat pengembalian, dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup. Grup mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

The Group's aim is to achieve an appropriate balance between risk, rate of return, and minimize potential adverse effects on the Group's financial performance. The Group defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors.

Grup tidak terekspos risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas pada investasi pemegang *unit link*, dikarenakan semua risiko ditanggung langsung oleh masing-masing pemegang polis.

There are no market risk, credit risk, and liquidity risk exposed to the Group for policyholders' investments in unit-linked contracts, since all the risks are directly borne by each policyholder.

a. Risiko pasar / *a. Market risk*

Risiko nilai tukar mata uang asing / *Foreign exchange risk*

Grup menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, mata uang, dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, nilai tukar, dan produk ekuitas.

The Group takes on exposure to market risks which is the risk that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk arises from open positions in interest rate, currency, and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, foreign exchange rates, and equity products.

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Grup menghadapi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang pada posisi keuangan dan arus kas. Direksi memonitor secara berkala risiko ini.

The Group takes on exposure to the effects of fluctuation in the prevailing foreign exchange rates on its financial position and cash flows. The Directors monitor this risk periodically.

Tabel berikut mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing (disajikan dalam jumlah yang setara dengan jutaan Rupiah).

The following table summarises the Group's financial assets and liabilities that are exposed to foreign exchange risk (presented as millions of Rupiah equivalents).

	2024		
	Dolar AS/ *USD*	**Lain-lain/ *Others***	
Aset			***Assets***
Kas dan setara kas	626,699	2,358	*Cash and cash equivalents*
Investasi	686,354	--	*Investments*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1,343,968	28,717	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	2,201,957	39,309	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	1,473	--	*Accounts receivable and other receivables - net*
Aset lain-lain	3,557	--	*Other assets*
	4,864,008	**70,384**	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	670,150	11,125	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	962,568	10,854	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	422,579	6,813	*Accounts payable and other liabilities*
Medium Term Notes	16,162	--	*Medium Term Notes*
	2,071,459	**28,792**	
Aset bersih	**2,792,549**	**41,592**	***Net assets***

	2023		
	Dolar AS/ *USD*	**Lain-lain/ *Others***	
Aset			***Assets***
Kas dan setara kas	372,288	8,761	*Cash and cash equivalents*
Investasi	738,512	--	*Investments*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1,441,422	30,115	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	1,410,473	42,071	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	1,661	--	*Accounts receivable and other receivables - net*
Aset lain-lain	3,395	--	*Other assets*
	3,967,751	**80,947**	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	576,831	29,570	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1,021,604	15,210	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	330,370	6,456	*Accounts payable and other liabilities*
Medium Term Notes	15,416	--	*Medium Term Notes*
	1,944,221	**51,236**	
Aset bersih	**2,023,530**	**29,711**	***Net assets***

Sensitivitas Perseroan terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi yang mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan dalam mata uang asing yang ditranslasikan ke dalam mata uang asing utama Perseroan, yaitu Dolar AS. Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba sebelum pajak Perseroan atas perubahan nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The Company's sensitivity on foreign currencies is determined using the information that summarises the Company's financial assets and liabilities in foreign exchange rate which translated into the Company's main foreign currency, which is U.S. Dollar. The table below shows the sensitivity of the Company income before tax to movement of foreign exchange rates on December 31, 2024, and 2023:

	Pengaruh pada laba rugi/ *Impact on profit or loss*		
	Peningkatan/ *Increase by* 1%	Penurunan/ *Decrease by* 1%	
31 Desember 2024	27,925	(27,925)	*December 31, 2024*

	Pengaruh pada laba rugi/ *Impact on profit or loss*		
	Peningkatan/ *Increase by* 1%	Penurunan/ *Decrease by* 1%	
31 Desember 2023	20,235	(20,235)	*December 31, 2023*

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai wajar tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan konsolidasian yang menghadapi risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table shows the consolidated financial assets and liabilities which are exposed to interest rate risk as of December 31, 2024, and 2023:

	2024				
	Bunga variabel/ *Floating rate* Rp	Bunga tetap/ *Fixed rate* Rp	Tidak dikenakan bunga/ *No interest rate charges* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	805,460	14,417,572	5,564	15,228,596	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	1,806,404	72,887,828	1,643,431	76,337,663	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	--	--	1,084,342	1,084,342	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	--	--	5,279,734	5,279,734	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	--	--	1,803,735	1,803,735	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	--	--	2,816,637	2,816,637	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	--	--	47,478	47,478	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	--	869,314	--	869,314	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	147	184,974	676,812	861,933	*Investment income receivables – net*
Penyertaan langsung	--	--	362,880	362,880	*Direct participation*
Aset lain- lain	--	104,162	4,513,878	4,618,040	*Other assets*
	2,612,011	**88,463,850**	**18,234,491**	**109,310,352**	

	2024				
	Bunga variabel/ *Floating rate* Rp	Bunga tetap/ *Fixed rate* Rp	Tidak dikenakan bunga/ *No interest rate charges* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	--	--	2,113,132	2,113,132	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	--	--	297,696	297,696	*Guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	--	--	1,737,009	1,737,009	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	86,617	86,617	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	6,212	358,696	7,821,631	8,186,539	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	--	--	1,747,893	1,747,893	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	--	682,256	682,256	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	--	--	14,939,747	14,939,747	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	--	521,958	--	521,958	*Government loans*
Utang bank	2,243,600	119,492	--	2,363,092	*Bank loans*
Medium Term Notes	--	1,116,162	--	1,116,162	*Medium Term Notes*
	2,249,812	**2,116,308**	**29,425,981**	**33,792,101**	

	2023				
	Bunga variabel/ *Floating rate* Rp	Bunga tetap/ *Fixed rate* Rp	Tidak dikenakan bunga/ *No interest rate charges* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	868,589	13,647,860	6,130	14,522,579	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	3,395,486	72,435,540	3,146,036	78,977,062	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	--	--	749,996	749,996	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	--	--	6,170,255	6,170,255	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	--	--	2,728,574	2,728,574	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	--	--	2,677,657	2,677,657	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	--	--	55,948	55,948	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	--	1,174,981	--	1,174,981	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	1,353	177,522	655,352	834,227	*Investment income receivables – net*
Penyertaan langsung	--	--	564,010	564,010	*Direct participation*
Aset lain- lain	--	1,278,349	2,974,060	4,252,409	*Other assets*
	4,265,428	**88,714,252**	**19,728,018**	**112,707,698**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	--	--	2,797,729	2,797,729	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	--	--	76,262	76,262	*Guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	--	--	1,889,384	1,889,384	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	23,927	23,927	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	8,202	696,352	6,819,153	7,523,707	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	--	--	1,887,075	1,887,075	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	--	711,324	711,324	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	--	--	15,211,466	15,211,466	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	--	493,128	--	493,128	*Government loans*
Utang bank	3,456,072	99,287	--	3,555,359	*Bank loans*
Medium Term Notes	--	1,065,416	--	1,065,416	*Medium Term Notes*
	3,464,274	**2,354,183**	**29,416,320**	**35,234,777**	

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul dari ketidakmampuan Grup dalam memenuhi kewajiban yang bersifat kontraktual yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun Grup memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka Grup dikatakan tidak likuid.

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of inability of the Group in paying its contractual obligation in cash. Although the Group has sufficient assets to pay its liabilities, but when the assets cannot be converted into cash immediately, then the Group is illiquid.

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group's ability to obtain immediate liquidity.

Tabel berikut menyajikan arus kas kontraktual atas liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa periode sampai tanggal jatuh tempo sesuai kontrak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The following table shows cash flows on the Group's financial liabilities based on the remaining period to the contractual maturity date as of December 31, 2024 and 2023.

	2024				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* Rp	Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year* Rp	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Utang klaim asuransi dan reasuransi	991,832	1,121,300	--	2,113,132	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	297,696	--	--	297,696	*Guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1,528,970	134,956	73,083	1,737,009	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang penjaminan ulang	86,617	--	--	86,617	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	6,156,595	1,458,259	572,328	8,187,182	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	1,741,214	6,679	--	1,747,893	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	682,256	--	682,256	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	8,930,755	--	6,008,992	14,939,747	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	6,200	515,758	--	521,958	*Government loans*
Utang bank	1,424,096	938,996	--	2,363,092	*Bank loans*
Medium Term Notes	16,162	1,100,000	--	1,116,162	*Medium Term Notes*
	21,180,137	**5,958,204**	**6,654,403**	**33,792,744**	

	2023				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* Rp	Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year* Rp	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Utang klaim asuransi dan reasuransi	2,315,652	481,980	97	2,797,729	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	76,262	--	--	76,262	*Guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1,534,464	292,769	62,151	1,889,384	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang penjaminan ulang	23,927	--	--	23,927	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	5,094,515	2,191,888	237,304	7,523,707	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	1,877,109	9,966	--	1,887,075	*Accruals*
Utang restrukturisasi	81,646	629,678	--	711,324	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	3,569,972	--	11,641,494	15,211,466	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	6,200	486,928	--	493,128	*Government loans*
Utang bank	2,302,322	1,253,037	--	3,555,359	*Bank loans*
Medium Term Notes	15,416	1,050,000	--	1,065,416	*Medium Term Notes*
	16,897,485	**6,396,246**	**11,941,046**	**35,234,777**	

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pihak lawan Grup gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

c. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial losses, should any of the Group's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. The Group is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Grup sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian, dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Credit risk is the one of the largest risks for the Group's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios, and of default correlations between counterparties.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Impairment allowances (if any) are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

The following table shows the Group's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas dan setara kas	15,223,491	14,517,318	*Cash and cash equivalents*
Investasi [1]	62,369,274	67,613,198	*Investments* [1]
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1,084,342	749,996	*Accounts receivable and other receivables*
Piutang premi asuransi dan reasuransi	5,279,734	6,170,255	*Insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan	1,803,735	2,728,574	*Guarantee fee receivables*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi	2,816,637	2,677,657	*Reinsurance and retrocession claim receivables*
Piutang penjaminan ulang	47,478	55,948	*Re-guarantee receivables*
Piutang pembiayaan modal ventura	869,314	1,174,981	*Venture capital financing receivables*
Piutang hasil investasi [1]	851,275	800,191	*Investment income receivables* [1]
Aset lain-lain	3,081,227	2,818,116	*Other assets*
	93,426,507	**99,306,234**	

[1] Kecuali saham dan reksadana, dan CKPN reksadana

Exclude shares and mutual funds, and impairment of mutual funds [1]

Kualitas kredit dari aset keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

Credit quality of financial assets
As of December 31, 2024, and 2023, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

	2024				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Kas dan setara kas	15,223,491	--	4,943	15,228,434	*Cash and cash equivalents*
Investasi	62,369,274	--	11,831	62,381,105	*Investments*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1,083,909	433	198,689	1,283,031	*Accounts receivable and other receivables*
Piutang premi asuransi dan reasuransi	3,402,223	1,877,511	2,301,734	7,581,468	*Insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan	--	1,803,735	2,364,631	4,168,366	*Guarantee fee receivables*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi	1,372,207	1,444,430	3,541,919	6,358,556	*Reinsurance and retrocession claim receivables*
Piutang penjaminan ulang	47,478	--	277,663	325,141	*Re-guarantee receivables*
Piutang pembiayaan modal ventura	776,750	92,564	160,159	1,029,473	*Venture capital financing receivables*
Piutang hasil investasi	851,275	--	22,470	873,745	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	3,081,227	--	278,560	3,359,787	*Other assets*
	88,207,834	**5,218,673**	**9,162,599**	**102,589,106**	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai				(9,162,599)	*Less: Allowance for impairment losses*
				93,426,507	

	2023				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Kas dan setara kas	14,517,318	--	3,397	14,520,715	*Cash and cash equivalents*
Investasi	67,613,198	--	18,887	67,632,085	*Investments*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	748,851	1,145	170,566	920,562	*Accounts receivable and other receivables*
Piutang premi asuransi dan reasuransi	2,130,820	4,039,435	2,192,773	8,363,028	*Insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan	--	2,728,574	2,025,814	4,754,388	*Guarantee fee receivables*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi	294,837	2,382,820	3,220,137	5,897,794	*Reinsurance and retrocession claim receivables*
Piutang penjaminan ulang	55,948	--	253,800	309,748	*Re-guarantee receivables*
Piutang pembiayaan modal ventura	1,046,883	128,098	153,572	1,328,553	*Venture capital financing receivables*
Piutang hasil investasi	800,191	--	26,615	826,806	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	2,813,867	4,249	211,619	3,029,735	*Other assets*
	90,021,913	**9,284,321**	**8,277,180**	**107,583,414**	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai				(8,277,181)	*Less: Allowance for impairment losses*
				99,306,233	

d. Risiko operasional

Pengelolaan risiko operasional untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan adanya kesalahan yang melibatkan personalia, sistem dan teknologi, proses, operasi, serta kondisi eksternal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Grup adalah melalui pengadaan sistem Teknologi Informasi ("TI") yang handal, menyusun *Business Continue/Disaster Recovery Plan*, menyediakan server cadangan untuk meminimalisir kerusakan sistem TI secara berkala, prasyarat terkait dengan pemisahan tugas/fungsi, prasyarat rekonsiliasi dan pengawasan transaksi, kepatuhan terhadap regulasi dan prasyarat hukum lainnya, dokumentasi prosedur dan kontrol, ketentuan terkait penilaian secara periodik atas risiko operasional yang dihadapi, kecukupan kontrol dan prosedur terhadap risiko yang teridentifikasi, ketentuan terkait pelaporan atas kerugian operasional dan usulan upaya perbaikannya.

d. Operational risk

In the operational risk management, Group anticipates the losses resulting from an error involving personnel, systems and technologies, processes, operations, and external conditions. In order to minimize operational risks, Group establishes reliable Information Technology ("IT") systems, develops Business Continue/Disaster Recovery Plan, provides backup servers to minimize damage of IT systems on a regular basis, manages separation of duties/functions, reconciliation and monitoring of transactions, compliance with regulations and other legal requirements, documentation and control procedures, periodic assessment to ensure the adequacy of controls and procedures of the identified risks, relevant provisions of operational losses and proposed improvement.

e. Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

e. Capital management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

f. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Semua aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset dan liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatatnya merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan nilai tercatatnya.

i. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait;

ii. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

f. Fair value of financial assets and liabilities

All financial assets and liabilities classified as financial assets and liabilities measured at amortised cost have a short-term maturity, therefore the carrying amount is a reasonable approximate of fair value. The fair value of financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss is the same with the carrying value.

i. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;

ii. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and

iii. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*unobservable inputs*).

iii. *Level 3*
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Instrumen yang diukur pada nilai wajar
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Financial instruments measured at fair value
The following table shows the Group's financial assets and liabilities measured at fair value as of December 31, 2024, and 2023:

	2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	Tingkat 1/ *Level 1* Rp	Tingkat 2/ *Level 2* Rp	Tingkat 3/ *Level 3* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Investasi	56,766,995	13,382,882	43,360,460	23,652	56,766,994	*Investments*
Penyertaan langsung	46,802	--	--	46,802	46,802	*Direct participation*
Aset lain-lain	631	631	--	--	631	*Other assets*
	56,814,428	**13,383,513**	**43,360,460**	**70,454**	**56,814,427**	

	2023					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	Tingkat 1/ *Level 1* Rp	Tingkat 2/ *Level 2* Rp	Tingkat 3/ *Level 3* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Investasi	53,431,083	10,867,122	41,943,815	620,146	53,431,083	*Investments*
Penyertaan langsung	284,513	--	--	264,513	264,513	*Direct participation*
Aset lain-lain	631	631	--	--	631	*Other assets*
	53,716,227	**10,867,753**	**41,943,815**	**884,659**	**53,696,227**	

53. Risiko Asuransi dan Penjaminan Keuangan / *53. Insurance and Financial Guarantee Risk*

Grup bertanggung jawab untuk mengelola secara tepat dalam menghadapi perubahan dalam siklus asuransi dan penjaminan terhadap lingkungan politik dan ekonomi dimana Grup beroperasi.

The Group is responsible for managing appropriately in response to changes in insurance cycles to the political and economic environments in which the Group operates.

Rincian risiko asuransi
Risiko utama yang dihadapi Grup terkait dengan kontrak asuransi adalah perbedaan antara jumlah klaim yang terjadi, manfaat yang dibayarkan dan waktu terjadinya klaim dengan yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, tingkat keparahan (*severity*) dari klaim, manfaat aktual yang dibayarkan, dan perkembangan lanjutan dari klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk memenuhi semua liabilitas tersebut.

Details of insurance risk
The key risk that the Group faces in relation to insurance contracts is the difference between the incurred claim amount, benefits paid and timing of claims from the estimation. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid, and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure reserves booked is adequate to cover all of those liabilities.

Tabel berikut menyajikan menunjukkan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi berdasarkan lini-lini usaha:

The following table shows the concentration of insurance contract liabilities based on lines of business:

a. Premi yang belum merupakan pendapatan / *a. Unearned premium reserves*

	2024			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Kredit	7,232,164	(314,529)	6,917,635	*Credit*
Kesehatan	829,518	(40,346)	789,172	*Health*
Tanggung gugat	2,145,023	(44,074)	2,100,949	*Liability*
Jiwa	29,858,695	(3,905)	29,854,790	*Life*
Harta benda (properti)	653,483	(243,976)	409,507	*Property*
Suretyship	466,367	(227,096)	239,271	*Suretyship*
Energi *offshore*	553,761	(534,950)	18,811	*Energy offshore*
Rangka kapal	251,866	(105,887)	145,979	*Marine hull*
Rekayasa	200,730	(102,016)	98,714	*Engineering*
Kendaraan bermotor	175,112	(10,936)	164,176	*Vehicles*
Rangka pesawat	84,601	(71,014)	13,587	*Aviation*
Pengangkutan	14,061	(8,003)	6,058	*Marine cargo*
Energi *onshore*	28,055	(18,584)	9,471	*Energy onshore*
Satelit	43,590	(37,923)	5,667	*Satellites*
Kecelakaan diri	38,175	(6,554)	31,621	*Personal accident*
Aneka	366,511	(189,743)	176,768	*Miscellaneous*
	42,941,712	**(1,959,536)**	**40,982,176**	

	2023			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Kredit	7,466,502	(234,258)	7,232,244	*Credit*
Kesehatan	475,195	(9,133)	466,062	*Health*
Tanggung gugat	2,185,511	(39,299)	2,146,212	*Liability*
Jiwa	30,760,823	(34,233)	30,726,590	*Life*
Harta benda (properti)	825,313	(459,837)	365,476	*Property*
Suretyship	551,184	(257,964)	293,220	*Suretyship*
Energi *offshore*	316,337	(303,502)	12,835	*Energy offshore*
Rangka kapal	243,720	(98,791)	144,929	*Marine hull*
Rekayasa	185,324	(88,971)	96,353	*Engineering*
Kendaraan bermotor	176,448	(10,489)	165,959	*Vehicles*
Rangka pesawat	86,257	(70,556)	15,701	*Aviation*
Pengangkutan	11,384	(3,611)	7,773	*Marine cargo*
Energi *onshore*	25,368	(14,922)	10,446	*Energy onshore*
Satelit	296,513	(260,613)	35,900	*Satellites*
Kecelakaan diri	37,497	(4,282)	33,215	*Personal accident*
Aneka	474,066	(222,289)	251,777	*Miscellaneous*
	44,117,442	**(2,112,750)**	**42,004,692**	

b. Liabilitas kepada pemegang *unit link* / *b. Liabilities to unit-linked holders*

	2024			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Individu	171,852	--	171,852	*Individual*
	171,852	**--**	**171,852**	

	2023			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Individu	189,144	--	189,144	*Individual*
	189,144	**--**	**189,144**	

c. Estimasi klaim / *Estimated claims*

	2024			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Kredit	2,987,102	(554,194)	2,432,908	*Credit*
Kesehatan	285,255	(34,199)	251,056	*Health*
Tanggung gugat	551,297	(96,379)	454,918	*Liability*
Jiwa	409,833	(5,731)	404,102	*Life*
Harta benda (properti)	1,395,078	(1,038,437)	356,641	*Property*
Suretyship	829,079	(549,027)	280,052	*Suretyship*
Energi *offshore*	2,492,610	(2,422,277)	70,333	*Energy offshore*
Rangka kapal	742,179	(319,678)	422,501	*Marine hull*
Rekayasa	639,452	(330,524)	308,928	*Engineering*
Kendaraan bermotor	53,301	(6,483)	46,818	*Vehicles*
Rangka pesawat	103,588	(91,148)	12,440	*Aviation*
Pengangkutan	110,724	(9,152)	101,572	*Marine cargo*
Energi *onshore*	18,358	(8,245)	10,113	*Energy onshore*
Satelit	27,116	(26,618)	498	*Satellites*
Kecelakaan diri	39,458	(241)	39,217	*Personal accident*
Aneka	5,780,604	(1,319,537)	4,461,067	*Miscellaneous*
	16,465,034	**(6,811,870)**	**9,653,164**	

	2023			
	Kotor/ *Gross* Rp	Reasuransi dan retrosesi/ *Reinsurance and retrocession* Rp	Bersih/ *Net* Rp	
Kredit	3,222,503	(387,295)	2,835,208	*Credit*
Kesehatan	244,149	(37,276)	206,873	*Health*
Tanggung gugat	481,017	(93,665)	387,352	*Liability*
Jiwa	273,888	(7,440)	266,448	*Life*
Harta benda (properti)	1,666,382	(1,300,279)	366,103	*Property*
Suretyship	880,638	(604,558)	276,080	*Suretyship*
Energi *offshore*	2,825,249	(2,716,468)	108,781	*Energy offshore*
Rangka kapal	629,646	(294,742)	334,904	*Marine hull*
Rekayasa	571,479	(370,835)	200,644	*Engineering*
Kendaraan bermotor	58,707	(6,805)	51,902	*Vehicles*
Rangka pesawat	101,731	(86,819)	14,912	*Aviation*
Pengangkutan	92,588	(10,323)	82,265	*Marine cargo*
Energi *onshore*	6,047	(892)	5,155	*Energy onshore*
Satelit	16,658	(15,634)	1,024	*Satellites*
Kecelakaan diri	35,377	(393)	34,984	*Personal accident*
Aneka	4,873,024	(1,770,373)	3,102,651	*Miscellaneous*
	15,979,083	**(7,703,797)**	**8,275,286**	

Asumsi utama
Asumsi utama yang menjadi dasar dalam perhitungan cadangan estimasi klaim adalah pembentukan klaim masa depan Grup akan memiliki pola yang sama dengan pembentukan klaim yang terjadi di masa lalu. Termasuk asumsi dari tingkat diskonto, rasio kerugian, mortalitas, tingkat pembatalan polis, dan asumsi biaya untuk setiap tahun kejadian.

Justifikasi kualitatif tambahan digunakan untuk memperkirakan tingkat di mana tren masa lampau tidak akan terulang lagi di masa depan, misalnya: kejadian khusus yang hanya terjadi sekali, perubahan yang terjadi di pasar seperti sikap masyarakat terhadap klaim, kondisi ekonomi maupun faktor internal seperti campuran portofolio, syarat dan ketentuan polis, dan prosedur penanganan klaim.

Justifikasi lebih lanjut digunakan untuk menghitung tingkat dimana faktor eksternal seperti keputusan peradilan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi estimasi besaran klaim. Kondisi utama yang mempengaruhi keandalan dari asumsi yang digunakan adalah rasio kerugian, dan perbedaan tingkat bunga.

Liabilitas klaim sangat sensitif terhadap asumsi utama yang digunakan. Hingga saat ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dapat menentukan tingkat sensitivitas dari beberapa asumsi seperti perubahan perundangan atau ketidakpastian dalam proses estimasi. Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan pengaruh terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian apabila asumsi utama diubah dengan semua asumsi lain dianggap tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan liabilitas klaim.

Estimasi klaim memiliki sensitivitas terhadap perubahan asumsi yang digunakan seperti *expected loss ratio*, *first incurred development factor,* dan *claim handling expenses.*

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup semua manfaat yang dijamin berdasarkan kondisi pada polis asuransi yang masih berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Main assumptions
The main assumption in calculating the estimated claim reserves is the Group's future claims development will follow similar pattern with the historical claims incurred. This includes assumptions on discount rate, loss ratio, mortality, lapse rate, and expense assumptions for each accident year.

Additional qualitative judgments are used to estimate the extent to which the historical trends may not apply for the future, for example: specific one-off event, changes in market factors such as public attitude towards insurance claims, economic conditions, as well as internal factors such as portfolio mix, policy terms and conditions, and claims handling procedures.

Further justification is required to assess the extent to which external factors such as judicial decisions and government regulations affect the claim estimates. Other key conditions affecting the reliability of assumption used are loss ratio and changed in interest rates.

Claim liabilities are very sensitive to the key assumptions used. It is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process. The following analysis is made to show the impact on the consolidated statement of financial positions if the main assumptions were changed while all the other assumptions remain unchanged. The correlation between those assumptions can give significant impact in calculating the claim liability.

Estimated claims are sensitive to the key assumptions used such as initial expected loss ratio, first incurred development factor, and claim handling expenses.

The liability for future policy benefits is the amount available to cover all benefits guaranteed under the conditions of an insurance policy that is still valid at the statement of financial position date.

Asumsi-asumsi yang dipakai untuk menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan valuasi premi bruto ("GPV") adalah berdasarkan asumsi estimasi terbaik yang meliputi asumsi tingkat mortalita, morbidita, *lapses*, biaya dan tingkat inflasi, di mana asumsi yang digunakan merupakan hasil experience study yang relevan dengan asumsi estimasi terbaik Perusahaan.

The assumptions used to calculate the liability for future policy benefits with the Gross Premium Valuation ("GPV") are based on the best estimation assumptions which include assumptions on mortality, morbidity, lapses, costs and inflation rates where the assumptions used are the results of experience studies that are relevant to the Company's best estimate assumption.

Analisa sensitivitas

Tabel berikut menyajikan sensitivitas dari nilai liabilitas kontrak asuransi terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam estimasi liabilitas kontrak asuransi. Korelasi asumsi akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan cadangan teknis. Tabel ini juga menunjukkan dampak terhadap cadangan teknis akibat dari perubahan asumsi aktuaria.

Sensitivity analysis

The following tables present the sensitivity of the value of insurance contract liabilities to the movements in the assumptions used in the estimation of insurance contract liabilities. The correlation of assumptions will have a significant effect in determining the ultimate technical reserves. This table also indicates the impact on the technical reserve due to the changes in the actuarial assumptions.

	PT Jasa Raharja			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	112,285	110,648	*Gross liability*
	-5	(23,139)	(709)	
Liabilitas neto	+5	114,204	112,641	*Net liability*
	-5	(23,052)	(640)	

	PT Jasa Raharja			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Faktor UPR SW/ *UPR SW Factor*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+1	44,136	43,114	*Gross liability*
	-1	(44,136)	(43,114)	
Liabilitas neto	+1	44,427	43,512	*Net liability*
	-1	(43,535)	(42,413)	

	PT Asuransi Jasaraharja Putera			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	48,592	46,875	*Gross liability*
	-5	(46,629)	(46,875)	
Liabilitas neto	+5	17,898	19,045	*Net liability*
	-5	(17,703)	(19,045)	

	PT Asuransi Jasa Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	129,189	104,795	*Gross liability*
	-5	(131,988)	(104,609)	
Liabilitas neto	+5	57,605	42,518	*Net liability*
	-5	(60,383)	(42,360)	

	PT Asuransi Kredit Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	265,519	355,458	*Gross liability*
	-5	(272,690)	(357,663)	
Liabilitas neto	+5	265,519	277,939	*Net liability*
	-5	(272,690)	(279,782)	

	PT Asuransi Kredit Indonesia			
	Dampak atas cadangan premi/ *Impact on premium reserve*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	3,592	10,575	*Gross liability*
	-5	(3,592)	(10,575)	
Liabilitas neto	+5	3,592	9,394	*Net liability*
	-5	(3,592)	(9,394)	

	PT Reasuransi Nasional Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas neto	+1	(148,228)	(148,588)	*Net liability*
	-1	170,108	160,108	

	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	2024 Rp	2023 Rp	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas neto	+1	3,459	49	*Net liability*
	-1	(3,459)	(49)	

	PT Asuransi Jiwa IFG			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	2024 Rp	2023 Rp	
Penurunan tingkat suku bunga	- 100 bps	490,367	(602,509)	*Decrease in interest rates*
Kenaikan tingkat mortalita	+ 10%	37,541	35,868	*Increase in mortality rates*
Penurunan tingkat mortalita	- 10%	(32,260)	(32,260)	*Decrease in mortality rates*

Reasuransi

Profil bisnis dan risiko dari pertanggungan Grup cukup beragam dan cenderung memiliki tingkat risiko dan nilai pertanggungan yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan dukungan reasuransi yang cukup dan aman untuk memproteksi portofolio bisnis Grup. Dukungan reasuransi diperoleh melalui kontrak reasuransi *treaty* dengan reasuransi dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk *treaty* proporsional maupun non proporsional disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing lini usaha.

Reinsurance

The business and risk profile of the Group is quite diverse and tend to have higher risk and sum insured, therefore sufficient and secure reinsurance backup is needed to protect the Group's business portfolio. The reinsurance back up is obtained through treaty reinsurance with domestic and overseas reinsurers, proportional and nonproportional treaty specific to the character of each line of business.

Program reasuransi *treaty* berpedoman pada kepentingan terbaik Grup, peraturan perundangan-undangan serta regulasi dari pemerintah antara lain ketentuan terbaru dari OJK No.14/POJK.05/2015 dan Surat Edaran No. S.31/SEOJK.05/2015 yang mengatur mengenai "Optimalisasi Kapasitas Dalam Negeri" (batas retensi sendiri, besar dukungan reasuransi).

Treaty reinsurance programs are based on the best benefits of the Group, laws and other government regulations, such as the latest regulation from FSA No. 14/POJK.05/2015 and Circular Letter No. S.31/SEOJK.05/2015 regarding "Optimising of the Local Capacity" (limit of own retention amount of reinsurance back up).

Grup tidak tergantung pada satu reasuradur ataupun satu kontrak reasuransi tertentu secara signifikan.

The Group is not dependent on single reinsurance company or reinsurance contract.

Tabel perkembangan klaim
Tabel berikut menyajikan estimasi klaim yang terjadi, termasuk klaim yang dilaporkan dan IBNR untuk setiap tahun kejadian pada tanggal 31 Desember 2024:

Claim development table
The following table shows the estimates of incurred claims, including both claims reported and IBNR for each accident year as of December 31, 2024:

PT Jasa Raharja

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	2,061,259	2,241,553	2,251,004	2,251,970	2,252,373	2,252,373
2021	2,218,030	2,410,070	2,415,504	2,416,482	--	2,416,482
2022	2,744,807	2,963,062	2,968,396	--	--	2,963,062
2023	2,855,271	3,085,143	--	--	--	2,855,271
2024	2,865,961	--	--	--	--	2,865,961

PT Asuransi Jasaraharja Putera

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	287,558	436,467	447,104	463,104	478,211	478,211
2021	286,791	579,975	611,190	643,374	--	643,374
2022	195,916	420,593	445,266	--	--	445,266
2023	250,477	387,020	--	--	--	387,020
2024	171,607	--	--	--	--	171,607

PT Asuransi Jasa Indonesia

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	1,228,417	1,924,517	2,736,588	2,841,311	3,208,718	3,208,718
2021	1,052,767	2,431,646	2,957,473	3,530,966	--	3,530,966
2022	727,493	1,413,335	1,715,902	--	--	1,715,902
2023	642,069	1,235,671	--	--	--	1,235,671
2024	656,761	--	--	--	--	656,761

PT Asuransi Kredit Indonesia

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	2,128,834	2,902,516	3,015,856	3,105,618	3,122,351	3,122,351
2021	2,602,984	3,960,988	4,107,357	4,192,516	--	4,192,516
2022	3,141,229	4,290,256	4,506,205	--	--	4,506,205
2023	4,240,333	5,607,645	--	--	--	5,607,645
2024	4,650,945	--	--	--	--	4,650,945

PT Reasuransi Nasional Indonesia (Treaty)

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2019	--	--	--	--	--	--
2020	130,698	341,210	90,035	--	--	561,943
2021	141,332	602,803	--	--	--	744,135
2022	118,923	316,136	--	--	--	435,059
2023	29,207	--	--	--	--	29,207
2024	13,871	--	--	--	--	13,871

PT Reasuransi Nasional Indonesia (Treaty kredit dan jiwa/*Treaty credit & life*)

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	734,833	952,156	151,426	155,285	111,562	2,105,262
2021	1,345,063	995,194	561,933	63,647	--	2,965,837
2022	1,573,479	791,596	175,980	--	--	2,541,055
2023	1,151,785	644,992	--	--	--	1,796,777
2024	1,616,430	--	--	--	--	1,616,430

PT Reasuransi Nasional Indonesia (Fakultatif/*Facultative*)

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	227,098	755,067	550,563	191,367	75,056	1,799,151
2021	171,676	615,818	388,527	152,331	--	1,328,352
2022	187,088	504,469	494,924	--	--	1,186,481
2023	196,774	264,527	--	--	--	461,301
2024	236,128	--	--	--	--	236,128

Risiko penjaminan keuangan

Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *nonperforming financing* (NPF) kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Financial guarantee risk

The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's nonperforming financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation offixed underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dengan eksposure risiko yang besar.

The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment,* dan *Personality* dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*) yang harus diperhatikan. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P dan 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, are Prospect, Productivity, Payment, and Personality and 5C (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral). The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps and 5Cs. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Furthermore, to make a decision whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decisionmaking mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk *transfer risk*. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari senior manajemen akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan dengan kelompok terpilih hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

Centrally coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Group must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, reguarantee is placed with a select Company of only the most financially secured and experienced companies in the reguarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

Eksposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

The Group's exposure to a concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

Analisa eksposur
Pada tahun 2024 dan 2023, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan lini usaha sebagai berikut:

Exposure analysis
In 2024 and 2023, the Group's guarantee risks classified based on line of businesses are as follows:

	2024				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses*	**Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims***	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liablities***	**Beban penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Kredit	8,574,251	(187,013)	(287,379)	8,099,859	*Credit*
Suretyship	253,351	158,616	(61,106)	350,861	*Suretyship*
	8,827,602	**(28,397)**	**(348,485)**	**8,450,720**	

	2023				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses*	**Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims***	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liablities***	**Beban penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Kredit	5,427,302	(38,027)	(584,656)	4,804,619	*Credit*
Suretyship	49,436	(498)	(113,116)	(64,178)	*Suretyship*
	5,476,738	**(38,525)**	**(697,772)**	**4,740,441**	

54. Kontinjensi Dan Perikatan

Jasindo
Jasindo memiliki ketidaksepakatan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehubungan dengan penagihan piutang oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejumlah USD 6.562.788. Sampai saat ini, hal ini masih dalam pemeriksaan.

Jasindo tidak mengakui dan tidak mencatat liabilitas kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, karena Jasindo tidak memiliki dokumen pendukung transaksi yang memadai untuk menyatakan bahwa kewajiban tersebut *valid*.

BTIM
BTIM mengadakan kerjasama dengan bank-bank kustodian yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Standard Chartered Bank - Cabang Jakarta, Citibank N.A., - Cabang Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Deutsche Bank AG - Cabang Jakarta sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif reksadana, dimana BTIM bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan reksadana dan memperoleh jasa pengelolaan maksimum sebesar 5% per tahun dari Nilai Aset Bersih reksadana terkait.

BTIM melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank maupun non-bank untuk meningkatkan penjualan reksadana sebagai agen penjual dengan imbalan jasa. BTIM membayarkan biaya komisi agen penjual reksadana dengan tarif sebesar maksimum 0,25% - 85,00% dari *management fee* yang diterima BTIM dari reksadana (*sharing fee*).

Askrindo
Sampai dengan audit laporan keuangan berakhir, masih terdapat pemeriksaan lainnya atas suatu proses bisnis di Askrindo, yang dilakukan oleh regulator atau pemeriksa eksternal lainnya. Namun demikian, Askrindo belum dapat menentukan secara pasti apakah

54. Contingencies And Agreements

Jasindo
Jasindo has a dispute with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, in respect of receivable claimed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to USD 6,562,788. Up until now, this matter is still in investigation.

Jasindo did not recognise nor record a liability to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the consolidated financial statements as of December 31, 2024, because Jasindo does not have adequate transaction supporting documents to declare that the obligations are valid.

BTIM
BTIM entered into agreements with custodian banks i.e., PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Standard Chartered Bank - Jakarta Branch, Citibank N.A., - Indonesia Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and Deutsche Bank AG - Jakarta Branch related to mutual funds Collective Investment Contract, whereby BTIM acts as investment manager that manages mutual fund's assets and earns management fee at maximum of 5% per annum of Net Asset Value of relevant mutual fund.

BTIM entered into agreements with banks and nonbanks to increase sales of mutual funds as sales agent by paying sharing fee. BTIM pays a selling fee for agents to sell mutual funds at the maximum rate of 0.25% - 85.00% from management fee received by BTIM from mutual funds (sharing fee).

Askrindo
As of the audit conclusion of the financial statements, there are ongoing examinations of certain business process within Askrindo conducted by regulators or other external auditors. However, Askrindo is not yet able to definitively ascertain whether the ongoing

hasil pemeriksaan yang masih berlangsung tersebut dapat berakibat pada adanya proses hukum, penambahan keuntungan/kerugian, tuntutan/ganti rugi dari Pihak Ketiga ataupun hal lainnya yang menyebabkan adanya kerugian keuangan maupun non Keuangan terhadap Askrindo. Sehingga sampai dengan tanggal Laporan Keuangan konsolidasian ini, dampak dari hasil pemeriksaan tersebut belum dapat diperkirakan.

examination results may lead to legal proceedings, changes in profit or loss, claims or compensations from third parties, or any other circumstances that could result in financial or non-financial losses to Askrindo. Therefore, as of the date of this consolidated financial report, the impact of these examination results cannot be estimated.

55. Standar Akuntansi Baru

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen sebagai konsekuensi atas berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

55. New Prospective Accounting Standards

New standards and amendments to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments SFAS 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;*
- *SFAS 117: Insurance Contract; and*
- *Amendments SFAS 117: Insurance Contract regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 – Comparative Information.*

Several SFASs were also amended as an impact from the implementation of SFAS 117:Insurance Contracts, as follows:

- *SFAS 103: Business Combinations;*
- *SFAS 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *SFAS 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *SFAS 109: Financial Instruments;*
- *SFAS 115: Income from Contracts with Customers;*
- *SFAS 201; Presentation of Financial Statements;*
- *SFAS 207: Statement of Cash Flows;*
- *SFAS 216: Fixed Assets;*
- *SFAS 219: Employee Benefits;*
- *SFAS 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *SFAS 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *SFAS 236 Impairment of Asset;*
- *SFAS 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *SFAS 238: Intangible Assets; and*
- *SFAS 240: Investment Property.*

Grup akan menerapkan PSAK 117 untuk pertama kalinya pada 1 Januari 2025. Penerapan standar ini akan membawa perubahan signifikan pada akuntansi kontrak asuransi, reasuransi, serta instrumen keuangan, yang diperkirakan akan berdampak pada laporan keuangan Grup pada periode penerapan awal.

The group will apply SFAS 117 for the first time on January 1, 2025. The adoption of this standard will bring significant changes to the accounting for insurance, reinsurance contracts, and financial instruments, which are expected to impact the Group's financial statements for the period of initial application

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of those new standard and amendments to standards.

56. Dana *Tabarru'* / *56. Tabarru' Fund*

Detail informasi berkaitan dengan dana *tabarru'* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The detailed information relating to the tabarru' fund as of December 31, 2024, and 2023 is as follows:

a. Laporan posisi keuangan / *a. Statement of financial position*

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan kas di bank	19,861	3,481	*Cash and cash in bank*
Deposito berjangka	148,501	169,823	*Time deposits*
Efek-efek	509,453	555,152	*Marketable securities*
Piutang lain-lain	312,633	267,235	*Other receivables*
Piutang kontribusi	136,407	334,185	*Contribution receivables*
Piutang retrosesi	78,949	6,278	*Retrocession receivables*
Piutang hasil investasi	5,848	4,992	*Investment income receivables*
Aset reasuransi	170,815	172,919	*Reinsurance assets*
Aset retrosesi	47,795	39,790	*Retrocession assets*
Aset lain-lain	64,274	--	*Other assets*
Jumlah aset	**1,494,536**	**1,553,855**	***Total assets***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang klaim	113,423	142,226	*Claim payables*
Utang retrosesi	32,805	8,932	*Retrocession payables*
Utang lain-lain	326,038	277,243	*Other payables*
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	1,989,890	2,284,295	*Unearned contribution provisions*
Estimasi liabilitas klaim	628,757	488,435	*Estimated claim liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	165,305	139,338	*Accruals*
Jumlah liabilitas	**3,256,218**	**3,340,469**	***Total liabilities***
DANA PESERTA			***PARTICIPANT FUND***
Dana *tabarru'*	(1,761,682)	(1,786,614)	*Tabarru' fund*
Jumlah liabilitas dan dana peserta	**1,494,536**	**1,553,855**	***Total liabilities and participant fund***

b. Defisit dana *tabarru'* / *b. Tabarru' fund deficit*

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan			***Revenue***
Pendapatan kontribusi			***Contribution income***
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi *ujrah*	963,515	1,023,893	*Income from insurance operational management ujrah*
Ujrah pengelola	(166,276)	(157,885)	*Operator ujrah*
Kontribusi retrosesi	(199,197)	(88,701)	*Retrocession contribution*
(Penurunan)/ kenaikan penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	285,020	(979,808)	*Increase in unearned contribution provisions*
Jumlah pendapatan	**883,062**	**(202,501)**	***Total revenue***
Beban			***Expenses***
Klaim reasuransi bruto	(942,378)	(718,680)	*Gross reinsurance claims*
Klaim retrosesi	216,156	58,811	*Retrocession claims*
(Penurunan)/kenaikan estimasi liabilitas klaim	(125,035)	53,102	*(Decrease)/increase in estimated claim liabilities*
Jumlah beban	**(851,257)**	**(606,767)**	***Total expenses***
Laba (Rugi) usaha	**31,805**	**(809,268)**	***Operating profit (loss)***
Pendapatan/(beban) lain-lain			***Other income/(expenses***
Pendapatan investasi - bersih	36,011	29,718	*Investment income - net*
(Beban)/pendapatan lain-lain	(43,536)	(36,487)	*Other (expenses)/income*
Jumlah (beban)/pendapatan lain-lain	**(7,525)**	**(6,769)**	***Total other (expense)/income***
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghaslilan komprehensif lain	652	(242)	*Unrealised (losses)/gains on fair value through other comprehensive income marketable securities*
Bagian/(utang) perserta atas surplus *underwriting*	--	--	*Part/(payables) of surplus underwriting*
Defisit yang tersedia untuk dana *tabarru'*	**24,932**	**(816,279)**	***Deficit available for dana tabarru'***
Dana *tabarru'* pada awal tahun	**(1,786,614)**	**(970,335)**	***Tabarru' fund at the beginning of the year***
Dana *tabarru'* pada akhir tahun	**(1,761,682)**	**(1,786,614)**	***Tabarru' fund at the end of the year***

Pada tahun 2024 dan 2023, terdapat saldo negatif dana *tabarru'* yang disebabkan oleh kinerja tahun berjalan, PT Reasuransi Nasional Indonesia. Selain hal tersebut, klaim yang dibayarkan di tahun berjalan meningkat signifikan, sehingga mengakibatkan hasil *underwriting* menurun.

In 2024 and 2023, there was a negative balance of tabarru' fund caused by current years PT Reasuransi Nasional Indonesia's performance. In addition, claims paid in the current year increased significantly, resulting in a decrease in underwriting results.

Langkah-langkah strategis dilakukan manajemen dalam menanggulangi saldo negatif dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi melalui perbaikan syarat dan kondisi (S&K), peningkatan tarif premi, penambahan atau pengurangan klausul bisnis;

The strategic actions taken by management to solve the negative balance of Tabarru' funds are as follows:

- *Conduct restructuring through the improvement of terms and conditions (T&C), increase on premium rates, additional or exclusion of business clauses;*

- Melakukan pengembalian dana *(refund)* kontribusi atas resiko yang belum dijalankan *(inforce)* atas bisnis jangka panjang yang memberikan hasil negatif;
- Peningkatan pengelolaan aset dan liabilitas dengan melakukan inisiatif strategis dalam manajemen aset dan liabilitas; dan
- Perbaikan pengelolaan atas piutang kontribusi sehingga dana yang diterima dapat diinvestasikan kembali.

Sebagai tambahan, dana *tabarru'* memiliki rasio likuiditas yang menunjukkan liabilitas lancar melebihi aset lancar. Namun, PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai operator Unit Syariah dapat memberikan fasilitas pinjaman *(Qardh)* untuk memenuhi liabilitas dana *tabarru'* sesuai dengan kemampuan.

Walaupun dana *tabarru'* mengalami defisit, PT Reasuransi Nasional Indonesia tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola.

- *Refund contributions for risks that have not been carried out (inforce) on long-term businesses that have negative results;*
- *Improve asset and liability by undertaking strategic initiatives in asset and liability management; and*
- *Improve management of contribution receivables so that funds received can be reinvested.*

In addition, the tabarru' fund has a liquidity ratio that shows the current liabilities exceeding the current assets. However, PT Reasuransi Nasional Indonesia as the Sharia Unit's operator could provide loan facilities (Qardh) to fulfill the tabarru' fund's liabilities in accordance with its ability.

Despite tabarru' fund experience a deficit, PT Reasuransi Nasional Indonesia is not obligated to return the initial amount of funds from participants unless due to negligence or default of the managing entity.

57. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

a. Perubahan struktur pemegang saham
Pada bulan Maret 2025, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 ("PP No. 15/2025") yang merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. PP No. 15/2025 mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam rangka pendirian Holding Operasional dengan mengalihkan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk sebanyak 93.719.536 lembar saham Seri B pada Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp1 per lembar saham dengan nilai total Rp93.719.536.

57. Events After Reporting Period

a. Changes in ownership structure
In March 2025, the Government issued Government Regulation No. 15 of 2025 ("PP No. 15/2025"), which serves as the implementing regulation of Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2023 on State-Owned Enterprises. PP No. 15/2025 regulates the additional state capital participation in the share capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia as part of the establishment of an Operational Holding by transferring all Series B and/or Series C shares owned by the Republic of Indonesia in State-Owned Enterprises, including 93,719,536 Series B shares in the Company with a nominal value of Rp1 per share, amounting to a total value of Rp93,719,536.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-72/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Based on the Decision of the Company's Shareholders Number SK-72/MBU/03/2025 dated March 22, 2025, regarding the Amendment to the Articles of Association, the composition of the Company's shareholders is as follows:

	2025			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ *Amount* Rp	
Pemerintah Republik Indonesia				***Government of the Republic of Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.000001%	1	*Series A Dwiwarna share*
PT Biro Klasifikasi Indonesia				***PT Biro Klasifikasi Indonesia***
Saham Seri B	93,719,536	99.999999%	93,719,536	*Series B share*
	93,719,537	**100.000000%**	**93,719,537**	

b. Perubahan Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 tanggsal 11 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggotan Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

b. Changes in Audit Committee Composition

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 dated March 11, 2025 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

	2025	
Komite Audit:		***Audit Committee:***
Ketua	Mohamad Fauzi M Ichsan	*Chairman*
Anggota	Ika Istakariana	*Member*
Anggota	Masyita Crystallin	*Member*
Anggota	Sumiyati	*Member*
Anggota	Sartono	*Member*

c. Pengalihan Jiwasraya

Sampai dengan bulan April 2025, IFG Life menerima pengalihan portfolio pertanggungan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan rincian liabilitas manfaat polis masa depan sebesar Rp8.573.

c. Jiwasraya Transfer

Until April 2025, IFG Life received a transfer of portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) with details of Liabilities for Future Policy Benefits amounting to Rp8,573.

d. Pencabutan Izin Usaha pada Entitas Anak

Pada tanggal 16 Januari 2025, PT Sarana Riau Ventura mendapatkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-1/D.06/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Modal Ventura PT Sarana Riau Ventura.

d. Revocation of Business License in Subsidiaries

On January 16, 2025, PT Sarana Riau Ventura received the Decision Letter of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-1/D.06/2025 regarding the Revocation of Business License in the Venture Capital Company Sector for PT Sarana Riau Ventura.

Pada tanggal 5 Februari 2025, PT Sarana Sulut Ventura mendapatkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/D.06/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Modal Ventura PT Sarana Sulut Ventura.

On February 5, 2025, PT Sarana Sulut Ventura received the Decision Letter of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-3/D.06/2025 regarding the Revocation of Business License in the Venture Capital Company Sector for PT Sarana Sulut Ventura.

e. Penerimaan Pengembalian Restitusi Pajak

Pada tanggal 20 Desember 2024, BS menerima SKPLB PPh Badan tahun 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp2.803. BS menerima pengembalian restitusi dari SKPLB tersebut sebesar Rp2.803 pada tanggal 23 Januari 2025.

Pada tanggal 19 Desember 2024, BS menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Desember 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp7.256. BS menerima pengembalian restitusi dari SKPLB PPN tersebut sebesar Rp7.183 pada tanggal 21 Januari 2025, setelah dikurangi kompensasi utang pajak lainnya sebesar Rp73.

e. *Receipt of Tax Refunds*

On December 20, 2024, BS received an SKPLB for Corporate Income Tax for 2023 fiscal year, with an overpayment amounted to Rp2,803. BS received a tax refund amounted to Rp2,803 in January 23, 2025.

On December 19, 2024, BS received an SKPLB for Value Added Tax (VAT) for the tax period of December 2023, with an overpayment amounted to Rp7,256. The Company received a tax refund from the VAT SKPLB amounted to Rp7,183 on January 21, 2025, after deducting other tax liabilities of Rp73.

58. Informasi Tambahan Arus Kas / *58. Supplemental Cash Flows Information*

Rekonsiliasi Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan / *Reconciliation of Liabilities from Financing Activity*

	1 Januari/ *January 1, 2024* Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows* Rp	Perubahaan transaksi non kas/ *Non-cash changes* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp	
Utang bank	3,555,359	(1,192,267)	--	2,363,092	*Bank loans*
Pinjaman non-bank	608,949	(340,456)	--	268,493	*Non-bank loans*
Liabilitas sewa	205,452	(174,800)	148,663	179,315	*Lease liabilities*
Medium Term Notes	1,065,416	50,000	746	1,116,162	*Medium Term Notes*
Utang restrukturisasi	711,324	(86,347)	57,279	682,256	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	493,128	(6,200)	35,030	521,958	*Government loans*
Jumlah	**6,639,628**	**(1,750,070)**	**241,718**	**5,131,276**	***Total***

	1 Januari/ *January 1, 2023* Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows* Rp	Perubahaan transaksi non kas/ *Non-cash changes* Rp	31 Desember/ *December 31, 2023* Rp	
Utang bank	4,293,340	(737,981)	--	3,555,359	*Bank loans*
Pinjaman non-bank	737,032	(128,083)	--	608,949	*Non-bank loans*
Liabilitas sewa	164,572	(178,739)	219,619	205,452	*Lease liabilities*
Medium Term Notes	1,065,731	--	(315)	1,065,416	*Medium Term Notes*
Utang restrukturisasi	633,129	(78,287)	156,482	711,324	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	466,306	(6,200)	33,022	493,128	*Government loans*
Jumlah	**3,066,770**	**(391,309)**	**408,808**	**3,084,269**	***Total***

59. Informasi Keuangan Tambahan / *59. Supplementary Financial Information*

Kontribusi pajak
Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Grup kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-32/DKU.MBU/08/2024. Berikut adalah rincian kontribusi pajak sepanjang tahun 2024 (tidak diaudit) dan 2023:

Tax contribution
The supplementary financial information presents information related to the Group's contribution to the Government of Indonesia as reuired by the Circular Letter of Ministry of State-owned Enterprises of The Republic of Indonesia No.S-32/DKU.MBU/08/2024. Below are details of tax contribution during 2024 (unaudited) and 2023:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak penghasilan	1,341,036	2,242,797	*Income tax*
Pajak pertambahan nilai	414,312	1,049,960	*Value-added tax*
Pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya	46,652	25,405	*Land and building tax and other taxes*
	1,802,000	**3,318,162**	

60. Informasi Keuangan Tersendiri Perseroan / *60. The Company's Separate Financial Statements*

Informasi keuangan Perseroan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which consists of a statement of financial position as of December 31, 2024, as well as statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended on that date, and a summary of accounting policies. Significant and other explanatory information (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information") which is presented as additional information to the consolidated financial statements, is presented for additonal analysis purposes and is not part of the consolidated financial statements required under Indonesian Financial Accounting Standards.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Parent Entity's Financial Information is the responsibility of management and is generated from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

61. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan / *61. Management Responsibility on the Financial Statements*

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 30 April 2025.

The consolidated financial statements of the Cosmpany and subsidiaries were completed and authorised for the issuance by the Directors on April 30, 2025.

Lampiran I | ***Attachment I***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	139,249	239,479	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	1,887,480	1,780,169	*Investments - net*
Piutang subordinasi - bersih	249,342	249,279	*Subordinated loan receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	60,577	58,648	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang dividen	--	559,224	*Dividend receivables*
Piutang hasil investasi - bersih	4,376	3,870	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar dimuka	285	53	*Prepaid taxes*
Penyertaan langsung	70,020,890	66,464,890	*Direct participation*
Aset tetap - bersih	90,677	108,913	*Fixed assets - net*
Aset lain-lain	1,955,203	1,547,217	*Other assets*
JUMLAH ASET	**74,408,079**	**71,011,742**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	129,348	93,479	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	336,957	342,602	*Accruals*
Utang pajak	13,153	39,098	*Taxes payable*
Pinjaman dari Pemerintah	521,958	493,128	*Government loans*
Utang bank	2,243,600	3,456,072	*Bank loans*
Medium Term Notes	2,016,162	2,015,416	*Medium Term Notes*
Liabilitas imbalan kerja	41,664	51,947	*Employee benefit liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**5,302,842**	**6,491,742**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			*Share capital - Nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share*
Modal dasar: 240.000.000 lembar pada tahun 2024 dan 2023			*Authorised capital: 240,000,000 shares in year 2024 and 2023*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			*Issued and fully paid capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2024			*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2024*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 90.163.536 saham per 31 Desember 2023	93,719,537	90,163,537	*1 share of Series A Dwiwarna - and 90,163,536 shares of Series B as at 31 December 2023*
Tambahan modal disetor	(32,451,620)	(32,451,620)	*Additional paid-in capital*
Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	29,000	17,000	*Accumulated gain for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	9,280	9,036	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo laba			*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	5,215	5,215	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	7,793,825	6,776,832	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**69,105,237**	**64,520,000**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**74,408,079**	**71,011,742**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lampiran II | ***Attachment II***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Hasil investasi - bersih	101,223	86,294	*Investment income - net*
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**101,223**	**86,294**	***TOTAL OPERATING INCOME***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	(885,886)	(782,120)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	(434,841)	(463,672)	*Finance costs*
JUMLAH BEBAN USAHA	**(1,320,727)**	**(1,245,792)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
Pendapatan lain-lain - bersih	2,240,449	3,415,541	*Other income - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1,020,945**	**2,256,043**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	(3,952)	(3,678)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,016,993**	**2,252,365**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain			***Other comprehensive income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12,000	17,000	*Unrealised gain on fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja, setelah pajak	244	12,793	*Remeasurement of post- employment benefits, net of tax*
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**12,244**	**29,793**	***Other comprehensive income for the year, net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1,029,237**	**2,282,158**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Lampiran III

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO) ENTITAS INDUK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Attachment III

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
PARENT ENTITY

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Accumulated gain for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities* Rp	Pengukuran kembali imbalan pascakerja/ *Remeasurement of post-employment benefits* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp		
Saldo per 31 Desember 2022	**87,163,537**	**(32,451,620)**	**--**	**(3,757)**	**5,215**	**4,524,467**	**59,237,842**	***Balance as at 31 December 2022***
Transaksi dengan pemilik:								*Transaction with owners:*
Penerbitan saham	3,000,000	--	--	--	--	--	3,000,000	*Share issuance*
Laba komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	2,252,365	2,252,365	*Net income for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	17,000	--	--	--	17,000	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	12,793	--	--	12,793	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2023	**90,163,537**	**(32,451,620)**	**17,000**	**9,036**	**5,215**	**6,776,832**	**64,520,000**	***Balance as at 31 December 2023***
Transaksi dengan pemilik:								*Transaction with owners:*
Penerbitan saham	3,556,000	--	--	--	--	--	3,556,000	*Share issuance*
Laba komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	1,016,993	1,016,993	*Net income for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	12,000	--	--	--	12,000	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	244	--	--	244	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2024	**93,719,537**	**(32,451,620)**	**29,000**	**9,280**	**5,215**	**7,793,825**	**69,105,237**	***Balance as at 31 December 2024***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas:			***Cash received:***
Penerimaan kas dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek, dan jasa penasihat keuangan	238	1,299	*Cash received from investment manager activities, brokerage comissions, and financial advisory services*
Penerimaan kas lainnya	125,627	85,918	*Cash received from others*
Pengeluaran kas:			***Cash disbursement:***
Pengeluaran kas untuk pajak penghasilan badan	(2,458)	(2,069)	*Cash disbursement for corporate income tax*
Pengeluaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(387,036)	(319,554)	*Cash disbursement to supplier and other third parties*
Pengeluaran kas lainnya	(415,622)	(366,130)	*Cash disbursement for others*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(679,251)**	**(600,536)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pencairan investasi	2,028,044	4,250,480	*Redemption of investments*
Penempatan investasi	(2,136,776)	(4,850,355)	*Placement of investments*
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(45,559)	(50,281)	*Acquisition of fixed assets and investment properties*
Pembayaran uang muka pembelian Aset Cilandak	(94,800)	--	*Payment of down payment for purchasing Aset Cilandak*
Investasi pada anak perusahaan	(3,773,000)	(4,455,977)	*Investment in subsidiary*
Penjualan saham	217,000	--	*Sale of shares*
Penerimaan dividen dari entitas anak	2,781,903	4,227,129	*Dividend received from subsidiaries*
Penerimaan bunga dari pinjaman subordinasi	2,376	2,465	*Proceeds from interest paid on subordinated loan*
Pengeluaran untuk aktivitas investasi lainnya	(234,403)	--	*Payment for other investment activities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(1,255,215)**	**(876,539)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank	--	1,455,977	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	(1,212,472)	(2,229,905)	*Payment of bank loans*
Pembayaran bunga utang bank	(255,662)	(287,411)	*Interest paid on bank loans*
Pembayaran pinjaman dari Pemerintah	(6,200)	(6,200)	*Payment of Government loans*
Pembayaran bunga *Medium Term Notes*	(180,000)	(180,000)	*Interest paid on Medium Term Notes*
Penerimaan dari penerbitan saham	3,556,000	3,000,000	*Proceeds from issuance of shares*
Pembayaran liabilitas sewa	(23,736)	(28,532)	*Payment of lease liabilities*
Aktivitas pendanaan lainnya	(43,694)	(179,428)	*Other financing activities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**1,834,236**	**1,544,501**	***Net cash flows provided from financing activities***
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	**(100,230)**	**67,426**	***Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	**239,479**	**172,053**	***Cash and cash equivalents at beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**139,249**	**239,479**	***Cash and cash equivalents at end of the year***



2024 **Annual Report**
Laporan Tahunan

Advancing through Challenges for the Future

Melangkah Maju di Tengah Tantangan untuk Masa Depan

IFG

Indonesia Financial Group

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

(+62) 021 2505080
cs@ifg.id

www.ifg.id